SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 30C TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2024, tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025;

b. bahwa sesuai amanat Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang sudah sesuai dengan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13);

9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
3. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen PD untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan PD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PD

Pasal 2

(1) Renja PD merupakan penjabaran RKPD.
(2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman PD dalam penyusunan RKA-PD.

BAB III
SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 3

(1) Sistematika Penyusunan Renja PD terdiri dari :
    a. BAB I : PENDAHULUAN;
       Mengemukakan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
    b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
       Mengemukakan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, reviu terhadap rancangan awal

RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;

Mengemukakan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;

e. BAB V : PENUTUP.

(2) Isi beserta uraian Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) PD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Renja PD dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator hasil (*outcome*) masing-masing program.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bappeda, Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan (PBJ dan Minbang) Setda Kota Pekalongan, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan sebagai bahan penyusunan evaluasi RKPD.

(3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh PD.

BAB V
PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 5

(1) Perubahan Renja PD disusun dengan berpedoman kepada Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

(2) Rancangan Akhir Perubahan Renja PD disampaikan kepada Wali Kota melalui Bappeda paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD ditetapkan, untuk dilakukan verifikasi.

(3) Perubahan Renja Perangkat Daerah yang sudah sesuai dengan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 8 Agustus 2024,

WALI KOTA PEKALONGAN,
TTD.
STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 8 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN,
TTD.
STEMPEL
NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 30C

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

ADAM MUHAMMAD, S.H.
Pembina/ IV (a)
NIP. 19790407 200902 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 30C TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2024

WALI KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

RENCANA KERJA

RENJA 2025

DINAS PENDIDIKAN

KOTA PEKALONGAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, karena dengan pertolongan dan kemudahan dari-Nya, Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini selain mempertimbangkan aspek-aspek pendekatan teknokratik juga sudah mengkolaborasikan pendekatan politis berupa Visi Misi Walikota-Wakil Walikota Pekalongan Periode 2021-2026 dan pendekatan *bottom-up* dalam Musrenbang RKPD.

Berdasarkan pasal 147 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2025 dalam rangka keselarasan program dan kegiatan dengan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah maupun RPJMN Tahun 2020-2025.

Secara umum, Rencana Kerja Perangkat Daerah ini disusun dalam 5 bab. Bab I membahas tentang Pendahuluan, Bab II membahas tentang Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, Bab III membahas tentang Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Bab IV membahas Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dan terakhir Bab V, Penutup.

Harapan kami, Dokumen ini dapat menjadi dasar dalam perencanaan penganggaran program dan kegiatan untuk selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Tak lupa kami mohon masukan kritik dan saran yang membangun demi hasil yang lebih baik di masa depan.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Pekalongan

ZAINUL HAKIM, S.H.,M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19650211 199403 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 5

1.1 LATAR BELAKANG 5

1.2 LANDASAN HUKUM 6

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 7

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 8

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 9

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD 9

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 14

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI 17

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 21

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 51

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH 54

3.1. TELAAHAN TERHADAP ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 54

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 56

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN 56

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 98

BAB V PENUTUP 122

DAFTAR PUSTAKA 123

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Target dan Capaian indikator per program dan urusan Pendidikan tahun 2023	10
Tabel 2.2	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	11
Tabel 2.3	Capaian indikator program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tahun 2023	12
Tabel T-C.30	Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah	15
Tabel 2.4	Indeks Pencapaian (IP) SPM Pendidikan tahun 2023	16
Tabel T-C.31.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Pekalongan	22
Tabel T-C.32	Usulan Program / Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025	52
Tabel T-C.33.	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Pekalongan	59
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	99

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) merupakan penjabaran perencanaan pembangunan tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2025 telah memasuki tahun ketiga dari RPJMD Kota Pekalongan periode 2021-2026. RKPD Tahun 2025 berpedoman kepada RPJMD Kota Pekalongan dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2025 dan RPJMN 2020-2025

Dinas Pendidikan Kota Pekalongan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Pekalongan, dalam menyelenggarakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yakni menyusun satu dokumen rencana kerja (RENJA) sebagaimana diatur Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 21 ayat 3.

Sebagai bagian dari satu kerangka sistem pembangunan daerah, penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan di Dinas Pendidikan tidak dapat dilepaskan dari penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan ataupun yang ada pada lingkup regional Jawa Tengah dan Nasional.

Penyusunan rencana kerja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2025 mengacu pada rancangan awal RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025, dan memperhatikan perkembangan penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai Rencana Strategis Dinas Pendidikan tahun 2021-2026 yang telah disusun. Kerangka pelaksanaan otonomi daerah yang mengedepankan peran serta masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan, rencana kerja Dinas Pendidikan juga menyerap aspirasi dari masyarakat melalui mekanisme penyusunan rencana pembangunan yang telah tersusun secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan hingga ke Pemerintah Kota Pekalongan.

Dokumen rencana kerja Dinas Pendidikan pada dasarnya merupakan himpunan dari rencana pemenuhan kebutuhan terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan yang selama ini telah dilaksanakan oleh satuan/institusi penyelenggara pendidikan, baik pada jalur formal maupun non formal.

Upaya peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan, peningkatan mutu, daya saing dan relevansi pendidikan serta meningkatnya tata kelola diakumulasi menjadi satu untuk kemudian dituangkan secara terstruktur. Pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut, tentunya tidak berjalan dalam ruang potensi yang terjamin dapat dilaksanakan karena berada dalam keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, penyusunan rencana kerja ini memegang prinsip skala prioritas dengan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai aspek, baik teknis, manajemen, ekonomi, ataupun asas kepatutan dalam penganggaran dalam keterbatasan sumber daya.

Dengan berbagai latar belakang pemikiran di atas, diharapkan dokumen rencana kerja ini akan dapat memberikan panduan (*guiden*) baik secara implisit ataupun eksplisit terhadap upaya pencapaian visi dan misi serta implementasi rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Pekalongan bidang pendidikan.

Rencana Kerja sebagaimana dimaksud di atas, disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan Renja;
b. Penyusunan rancangan awal Renja;
c. Pelaksanaan FGD;
d. Perumusan rancangan akhir Renja;
e. Penetapan Renja.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2025 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan dengan Kabupaten Dati II Pekalongan, dan Kabupaten Dati II Batang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perubahan Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
16. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
18. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 tentang Peraturan menteri Dalamm Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
26. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
27. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah :

a. Menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
b. Memberikan landasan operasional bagi para pelaksana sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
c. Menjadi salah satu dokumen pengawasan dan pengendalian untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
d. Menyajikan satu dokumen yang akan menjadi salah satu pijakan dalam penyusunan rencana kerja pada tahun-tahun anggaran selanjutnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi hasil evaluasi renja Tahun 2024 dan permasalahan pembangunan daerah.

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisi catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD

Pelayanan pemerintahan di bidang pendidikan memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermanfaat. Guna mewujudkan pembangunan dalam urusan pendidikan di Kota Pekalongan, dilaksanakan 3 (tiga) program dan 7 (tujuh) kegiatan, yaitu Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum dan Program Pendidik Tenaga Kependidikan. Dalam program pengelolaan pendidikan terdapat 4 (empat) kegiatan yaitu pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar, pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan. Program pengembangan kurikulum didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar dan kegiatan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (PAUD PNF). Sedangkan dalam program pendidik dan tenaga kependidikan terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

Evaluasi kinerja penyelenggaran urusan pendidikan ditunjukkan oleh capaian indikator program dan indikator kegiatan. Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu tercapai dan tidak tercapai. Rekapitulasi capaian indikator program Renstra Dinas Pendidikan periode 2021-2026 di tahun 2023, dari 3 indikator sebanyak 2 indikator tercapai dan 1 indikator tidak tercapai.

Secara garis besar, capaian indikator kinerja dapat kami sajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1. Target dan Capaian Indikator per Program Urusan Pendidikan

No	Program / Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4 x100%
1	Program Pengelolaan Pendidikan				
	Persentase Capaian SPM Pendidikan	persen	83.97	99,67	118,70
2	Program Pengembangan Kurikulum				
	Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang PAUD/PNF Dan Dikdas	persen	100	100	100
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan				
	Persentase Ketercukupan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	persen	100	56,11	56,11

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2023

Dari tabel di atas terdapat indikator yang sesuai target, melebihi target dan tidak mencapai target. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Program pengelolaan pendidikan dengan indikator persentase capaian SPM Pendidikan berhasil terealisasi 99,67% dari target yang ditetapkan sebesar 83,97% atau tercapai 118,70%. Hal ini disebabkan adanya perubahan formula perhitungan pencapaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan dari yang sebelumnya berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 dan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 disebutkan jumlah penduduk usia sekolah penerima layanan pendidikan yang dihitung adalah berasal dari kabupaten/kota yang bersangkutan. Sedangkan pada peraturan yang baru yaitu Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 dan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 tidak mensyaratkan hal tersebut. Sehingga terdapat peningkatan capaian pemenuhan SPM Pendidikan yang cukup signifikan diakibatkan jumlah penerima layanan pendidikan yang dihitung menjadi lebih banyak.

2) Program pengembangan kurikulum dengan indikator persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas berhasil tercapai 100%. Terdapat 2 (dua) kurikulum muatan lokal yang disusun, yaitu kurikulum muatan lokal pendidikan kebencanaan untuk jenjang SD dan kurikulum muatan lokal batik untuk jenjang PAUD.

3) Program pendidik dan tenaga kependidikan dengan indikator persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan tercapai 56,11% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Yang dimaksud pendidik sesuai SPM (mengacu pada Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022) yaitu seorang guru yang mengajar di satuan PAUD, pendidikan dasar, maupun kesetaraan yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dan bersertifikat pendidik. Sedangkan yang dimaksud tenaga kependidikan sesuai SPM meliputi kepala sekolah pada satuan PAUD, pendidikan dasar, maupun kesetaraan yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dan bersertifikat pendidik, serta tenaga penunjang lain yang

memiliki kualifikasi pendidikan minimal SMA/sederajat pada satuan pendidikan dasar dan kesetaraan. Adapun jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Kota Pekalongan adalah 5.287 orang.

Jenjang Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai SPM
KB	444	423	22
SPS	305	168	26
TPA	54	33	4
TK	623	236	250
RA	196	332	74
SD	1603	1353	828
MI	683	640	370
SMP	935	658	596
MTs	312	212	164
PKBM	112	247	80
Total	5267	4302	2414

Salah satu penyebab indikator persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan tidak mencapai target dikarenakan jumlah pendidik berkualifikasi minimal S1 dan bersertifikasi yang meninggal dunia maupun memasuki usia pensiun tidak sebanding dengan alokasi kuota peserta sertifikasi pendidik yang disediakan oleh pemerintah pusat.

Tabel 2.3. Capaian indikator program dan kegiatan Dinas Pendidikan tahun 2023

No	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d. tahun 2023	Persentase capaian target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Realisasi 2023			
1	Program Pengelollan Pendidikan									
	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Persen	100	n/a	99,67	83,97	99,67	99,67	118,70%	tercapai
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (IKK Outcome / SPM)	Persen	100	n/a	99,98	97,50	99,98	99,98	102,54%	tercapai
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (IKK Outcome / SPM)	Persen	100	n/a	96,72	90,00	96,72	96,72	107,47%	tercapai
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)									
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (IKK Outcome / SPM)	Persen	100	n/a	93,56	98,40	93,56	93,56	95,08%	belum tercapai
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (IKK Outcome / SPM)	Persen	100	n/a	22,76	50,00	22,76	22,76	45,52%	belum tercapai
2	Program Pengembangan Kurikulum									
	Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang PAUD/PNF Dan Dikdas	Persen	100	n/a	100	100	100	100	100%	tercapai

	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar									
	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	Persen	100	n/a	100	100	100	100	100%	tercapai
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal									
	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal PAUD/PNF	Persen	100	n/a	100	100	100	100	100%	tercapai
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan									
	Persentase Ketercukupan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persen	100	n/a	100	100	56,11	56,11	56,11%	belum tercapai
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan bersertifikasi pendidik pada satuan pendidikan dasar dan PAUD/PNF	Persen	100	n/a	45,83	76,75	45,83	45,83	59,71%	belum tercapai

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2023

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik. Tuntutan kuat yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan semakin kritisnya pemikiran masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan, disamping adanya pengaruh globalisasi. Hal tersebut menyebabkan pemerintah daerah untuk selalu tanggap atas tuntutan masyarakat dan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD) dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan PD sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis kinerja pelayanan PD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan PP No. 6/2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra PD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Bidang Pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebagian substansi pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib ditetapkan sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan pendidikan di Kota Pekalongan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekalongan guna mendukung visi dan misi Walikota Pekalongan , serta sebagai bentuk implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah - masalah pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

Kinerja urusan Pendidikan ditunjukkan dengan capaian SPM bidang pendidikan sebagaimana tertuang pada Tabel berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan Kota Pekalongan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	SPM Bidang Pendidikan Dasar	IKK Outcome	97,50	99	100	100	99,98	n/a	100	100	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	SPM Bidang Pendidikan Dasar	IKK Outcome	90	95	100	100	96,72	n/a	100	100	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	SPM Bidang Pendidikan Anak Usia Dini	IKK Outcome	98,40	99	100	100	93,56	n/a	100	100	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	SPM Bidang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	IKK Outcome	50	65	100	100	22,76	n/a	100	100	

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan di Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, terdiri atas :

1. Pendidikan dasar;
2. Pendidikan kesetaraan; dan
3. Pendidikan anak usia dini.

Indeks Pencapaian SPM Pendidikan tahun 2023 dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.4

Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	99.41 %	TUNTAS MADYA
2.	Pendidikan Dasar	99.61 %	TUNTAS UTAMA
3.	Pendidikan Kesetaraan	100 %	TUNTAS UTAMA

Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023 adalah sebesar 99,67 % atau kategori TUNTAS UTAMA.

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, baik permasalahan eksternal maupun internal diantaranya sebagai berikut :

1. Proses perencanaan penganggaran belum sepenuhnya berbasis SPM.
2. Kompetensi SDM yang terlibat dalam pencapaian SPM belum memadai
3. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi sasaran/ indikator kinerja SPM.
4. Rapor pendidikan yang dirilis terlambat sehingga menyulitkan dalam menyusun pelaporan tahun N karena data yang disandingkan tidak padan dan hanya menyajikan hasil akhir tanpa menyertakan nilai variabel perhitungannya, sehingga menyulitkan pada saat pengisian form tahapan penerapan SPM

Solusi yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan advokasi penganggaran pemenuhan SPM.
2. Mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi personel yang terlibat dalam penarapan dan pencapaian SPM.
3. Memberikan penjelasan kepada OPD terkait mengenai pentingnya pemenuhan SPM dalam penyelenggaraan pendidikan.
4. Mengonsultasikan permasalahan tersebut kepada Tim Pusat dan mengikuti arahan yang diberikan

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik. Tuntutan kuat yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan semakin kritisnya pemikiran masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan, disamping adanya pengaruh globalisasi. Hal tersebut menyebabkan pemerintah daerah untuk selalu tanggap atas tuntutan masyarakat dan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pelayanan pemerintahan di bidang pendidikan memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermanfaat. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan kompetensi masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan sesuai kebijakan daerah serta melaksanakan tugas-tugas pembantuan yang diberikan pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan dan penetapan sasaran, program di bidang pendidikan;
2. perumusan kebijakan di bidang Pendidikan;
3. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
4. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
5. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
6. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan;
7. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan ;
8. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
9. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan bidang pendidikan;
10. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi standar operasional prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
11. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan;

12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pembangunan bidang pendidikan di Kota Pekalongan secara umum dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Capaian SPM Pendidikan belum optimal. Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan di Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, terdiri atas Pendidikan dasar, Pendidikan kesetaraan dan Pendidikan anak usia dini. Indeks Pencapaian SPM Pendidikan tahun 2022 sebesar 90,94%, dan 99,67% di tahun 2023 dari 100% yang ditargetkan.
2. Persentase ketercukupan PTK sesuai SPM masih rendah, yaitu hanya sebesar 56,11%, dimana jumlah kebutuhan PTK sesuai SPM sebanyak 4.302 sedangkan jumlah PTK sesuai SPM yang tersedia hanya 2.414. Begitu juga dengan masih rendahnya Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan bersertifikasi pendidik pada satuan pendidikan dasar dan PAUD/PNF yang hanya sebesar 45,83%, dimana dari 5.267 PTK hanya 2.414 yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan bersertifikat pendidik.
3. Belum optimalnya ketercukupan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan berstatus ASN.
4. Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan non ASN / honorer yang masih rendah.
5. Kurangnya SDM / tenaga pendidik untuk menangani siswa yang terduga mengalami keterlambatan tumbuh kembang maupun berkebutuhan khusus.
6. Masih adanya perilaku buliying pada warga satuan pendidikan.
7. Tipologi geografis sebagai wilayah langganan bencana banjir / rob.

Solusi dalam mengatasi beberapa permasalahan tersebut akan menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Pekalongan, khususnya Dinas Pendidikan. Namun tantangan tersebut dibarengi oleh beberapa peluang yang ada, diantaranya :

1. Komitmen Pemerintah Kota Pekalongan terhadap pembangunan pendidikan dengan mengalokasikan anggaran minimal sebesar 20% dari total APBD Kota Pekalongan
2. Adanya perhatian dan komitmen dari Pimpinan Daerah untuk pemenuhan SPM sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan di bidang Pendidikan
3. Adanya kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat merupakan peluang yang sangat baik dalam rangka pembangunan bidang pendidikan di Kota Pekalongan

4. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan mengakibatkan tumbuhnya partisipasi aktif masyarakat dalam menyekolahkan anaknya

Tantangan kedepan adalah bagaimana Pemerintah Daerah Kota Pekalongan melalui Dinas Pendidikan mendukung Visi Kemendikbud 2021-2025 yakni mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Selain itu juga diharapkan dapat merealisasikan target pencapaian SPM Pendidikan dan pelaksanaan Impelentasi Kurikulum Merdeka yang merupakan *mandatory* dari kebijakan nasional. Serta yang tidak kalah penting adalah bagaimana mendukung kebijakan-kebijakan nasional yang lain khususnya dalam urusan pendidikan, seperti transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, Pendidikan inklusi dengan memberikan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dan Transformasi Pendidikan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan, solusi dan tantangan di atas, serta mengacu pada arah kebijakan pembangunan tahunan urusan pendidikan Pemerintah Kota pekalongan tahun 2025 sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan , maka isu-isu strategis dalam perumusan program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan pendidikan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan mutu dan capaian SPM Pendidikan sesuai Permendagri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendikbudristek nomor 32 tahun 2022 tentang Standar teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

2. Implementasi kurikulum merdeka pada semua satuan pendidikan, termasuk didalamnya Program Sekolah Penggerak (PSP) dan Program Guru Penggerak (PGP) yang merupakan bagian dari upaya agar IKM berjalan dengan baik di satuan pendidikan. Peraturan Walikota nomor 58 tahun 2022 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Dukungan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka di Kota Pekalongan diharapkan mampu dijadikan salah satu pedoman dalam mendukung upaya pelaksanaan IKM di Kota Pekalongan dapat berjalan dengan baik. Saat ini masih diperlukan pendampingan dari pemerintah kepada beberapa satuan pendidikan yang melaksanakan IKM secara mandiri, yang sejauh ini dirasa masih kurang, apalagi jika disandingkan dengan sekolah yang mendapatkan program sekolah penggerak melalui BOS Kinerja.

3. Project Penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Dalam projek penguatan ini, peserta didik memiliki kesempatan untuk mengupas dan memahami tema-tema atau isu penting seperti perubahan iklim, anti radikalisme, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi

dan lain-lain, sehingga ia bisa melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya. Tema ini dapat berubah setiap tahunnya, ditentukan oleh pemerintah pusat (Kemdikbud) berdasarkan isu yang diprioritaskan. Pada tahun 2025 Dinas Pendidikan merencanakan pengimplementasian Kurikulum Mulok Kebencanaan pada mata pelajaran jenjang SD, SMP dan PAUD melalui program pengembangan kurikulum.

4. Peningkatan ketersediaan akses dan kualitas layanan pendidikan yang merata, salah satunya berupa keterjangkauan biaya pendidikan melalui peningkatan bantuan fasilitasi operasional pendidikan, pemberian perlengkapan dasar siswa untuk peserta didik yang berasal dari keluarga miskin.
5. Peningkatan profesionalisme dan kualifikasi guru yang diharapkan akan berdampak kepada peningkatan kualitas dan kompetensi lulusan PAUD, SD dan SMP
6. Pemenuhan dan pemerataan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan, salah satunya melalui kebijakan tenaga pendidik / guru pengganti.
7. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan non ASN / honorer melalui bantuan harlindung dan status legal formal PTK honorer dari penugasannya oleh Kepala Sekolah menjadi Pemerintah / Kepala Dinas Pendidikan.
8. Penguatan digitalisasi sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mulai dari proses pembelajaran, administrasi sekolah, interaksi antara siswa, guru, orang tua, dan staf sekolah, hingga manajemen sekolah. Beberapa platform yang sudah disediakan oleh pemerintah untuk menunjang digitalisasi sekolah diantaranya Aplikasi DAPODIK, Aplikasi ARKAS, Aplikasi SIPLAh dan Platform Merdeka Mengajar (PMM).
9. Fasilitasi pendidikan inklusi malalui optimalisasi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi, peningkatan kapasitas guru pendamping khusus, penguatan LAKONDIK menjadi ULD (Unit Layanan Disabilitas) Lakondik serta memperkuat dan menambah jejaring mitra.
10. Peningkatan akses layanan informasi seputar dunia pendidikan, dalam upaya memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya mengikuti pendidikan di sekolah formal maupun non formal, khususnya jenjang PAUD dan Kesetaraan
11. Penguatan sarana prasarana pendidikan dengan merehabilitasi dan memperluas sarana dan prasarana pendidikan yang kurang layak / memadai dalam rangka mendukung kegiatan belajar mengajar (KBM) khususnya di sekolah-sekolah yang berada di daerah banjir/rob
12. Optimalisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) sebagai salah satu upaya penanganan ATS (Anak Tidak Sekolah) agar kembali bersekolah.

13. Peningkatan kualitas dan implementasi pendidikan karakter bagi peserta didik dan didukung tata kehidupan masyarakat sekolah yang berakhlak mulia.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada rancangan awal RKPD tahun anggaran 2025, program dan kegiatan Dinas Pendidikan masih sesuai dengan Tahun 2024. Kemudian dilakukan review RKPD, beberapa ada yang dilakukan penundaan karena kemampuan keuangan daerah dan prioritas penganggaran pemerintah Kota Pekalongan sehingga perlu dibuat skala prioritas kegiatan mana yang mendukung pencapaian program pada akhir tahun 2025. Rancangan awal RKPD tahun 2025 merupakan breakdown dari renstra 2021-2026, selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan 2025 menjadi pagu rancangan awal sebesar Rp 265.851.592.000. kemudian dilakukan penyesuaian rasionalisasi pagu hingga akhirnya diperoleh pagu rancangan akhir RKPD tahun 2025 sebesar Rp 233.787.353.000.

Beberapa yang menjadi catatan penting terhadap penyesuaian rasionalisasi pagu Rancangan awal RKPD diantaranya sebagai berikut :

1. Upaya rasionalisasi yang ditempuh dengan memastikan alokasi kegiatan wajib mengikat, hibah rutin, visi dan misi, usulan musrenbang, DAK sudah teranggarkan, sebelum merasionalisasi anggaran kategori prioritas 1 (P-1) dengan mengacu pada anggaran perubahan 2024.
2. Beberapa pekerjaan fisik pada program pengelolaan pendidikan, seperti pembangunan ruang kelas baru, pembangunan ruang guru/ kepala sekolah/ TU, pembangunan unit kesehatan sekolah, dilakukan rasionalisasi jumlah unit / lokasi yang dibangun dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas penganggaran pemerintah Kota Pekalongan.
3. Penyediaan bantuan perlengkapan dasar siswa bagi siswa tidak mampu pada jenjang SD, SMP dan PAUD pada tahun 2025 juga mengalami rasionalisasi anggaran karena memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas penganggaran pemerintah Kota Pekalongan.
4. Terdapat alokasi anggaran untuk operator Dapodik satuan pendidikan.
5. Alokasi anggaran pemberian jasa kinerja bantuan harlindung sudah teranggarkan 12 bulan, melalui sub kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
6. Alokasi anggaran honor guru dan pengawas BTQ SD dan SMP sudah teranggarkan 12 bulan, melalui sub kegiatan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan.

Review terhadap rancangan awal RKPD 2025 tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Pekalongan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.01.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pendidikan**	**Kota Pekalongan**			**265.851.592.000**	**Dinas Pendidikan**	**Kota Pekalongan**			**233.787.353.000**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Kota Pekalongan**	**Persentase capaian SPM pendidikan**	**100,00%**	**80.687.027.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Kota Pekalongan**	**Persentase capaian SPM pendidikan**	**100,00%**	**56.788.452.000**	
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Kota Pekalongan**	**Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (IKK Outcome /SPM)**	**100,00%**	**36.963.227.000**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Kota Pekalongan**	**Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (IKK Outcome /SPM)**	**100,00%**	**24.384.092.000**	
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 ruang	400.000.000	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 ruang	-	
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 ruang	250.000.000	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 ruang	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 ruang	2.000.000.000	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 ruang	483.821.000	
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 unit	425.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 unit	200.000.000	
1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 ruang	1.660.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 ruang	248.740.000	
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 ruang	100.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 ruang	-	
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	2 paket	50.000.000	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	0 ruang	-	
1.01.02.2.01.0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	71 paket	177.500.000	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	71 paket	88.750.000	
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	71 paket	355.000.000	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	14 paket	143.650.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	71 unit	106.500.000	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	71 unit	50.000.000	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	11.680 peserta didik	576.265.000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	8.249 peserta didik	358.750.000	
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.091 orang	2.787.457.000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.091 orang	2.768.076.000	
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	103 orang	9.630.000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	103 orang	7.680.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	103 satuan pendidikan	243.600.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	103 satuan pendidikan	126.840.000	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	103 satuan pendidikan	18.064.400.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	103 satuan pendidikan	18.064.400.000	
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	139 orang	222.900.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	242 orang	25.720.000	
1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	206 orang	67.100.000	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	206 orang	13.500.000	
1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,kekerasan, dan intoleransi		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	4 kegiatan	45.000.000	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	4 kegiatan	30.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3.000 paket	300.000.000	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	990 paket	73.000.000	
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0 ruang	-	Pembangunan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0 ruang	-	
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 unit	555.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 unit	506.850.000	
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	103 satuan pendidikan	133.000.000	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	103 satuan pendidikan	73.395.000	
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	22 ruang	6.273.570.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	71 ruang	735.920.000	
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0 peserta didik	-	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0 peserta didik	-	
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	24 paket	2.161.305.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	4 paket	385.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Kota Pekalongan**	**Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (IKK Outcome / SPM)**	**100,00%**	**29.182.050.000**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Kota Pekalongan**	**Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (IKK Outcome / SPM)**	**100,00%**	**20.133.716.000**	
1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 ruang	-	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 ruang	-	
1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 ruang	-	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 orang	-	
1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	0 ruang	-	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	0 orang	-	
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	0 ruang	-	Pembangunan Laboratorium		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 ruang	490.204.000	
1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula		Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	0 ruang	-	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula		Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	0 ruang	-	
1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir		Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	0 unit	-	Pembangunan Fasilitas Parkir		Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	0 unit	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.01.02.2.02.0011	Pembangunan Kantin Sekolah		Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	1 unit	99.999.000	Pembangunan Kantin Sekolah		Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	0 unit	-	
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 unit	249.850.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 unit	53.660.000	
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 ruang	4.775.925.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	27 ruang	2.389.415.000	
1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 ruang	105.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 ruang	105.000.000	
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 ruang	649.038.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 ruang	461.928.000	
1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 ruang	919.863.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 ruang	919.863.000	
1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula		Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	0 ruang	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula		Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	0 ruang	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.01.02.2.02.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir		Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 unit	149.778.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir		Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 unit	-	
1.01.02.2.02.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah		Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	2 unit	249.630.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah		Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	0 unit	-	
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 unit	2.596.455.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 unit	350.539.000	
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	6 paket	523.392.000	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	180 paket	80.000.000	
1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	34 paket	170.000.000	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	12 paket	34.400.000	
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	51 paket	425.000.000	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	12 paket	191.250.000	
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 unit	170.000.000	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	17 unit	127.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0 peserta didik	-	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0 peserta didik	-	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.200 peserta didik	580.000.000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	850 peserta didik	277.400.000	
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	105 orang	293.470.000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	105 orang	293.470.000	
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	17 orang	9.630.000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	17 orang	9.630.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	30 satuan pendidikan	308.000.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	30 satuan pendidikan	166.770.000	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	30 satuan pendidikan	13.215.800.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	30 satuan pendidikan	13.215.800.000	
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	66 orang	99.500.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	96 orang	15.280.000	
1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	60 orang	38.220.000	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	60 orang	20.000.000	
1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	4 kegiatan	50.000.000	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	4 kegiatan	35.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	30 satuan pendidikan	85.000.000	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	30 satuan pendidikan	40.600.000	
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 ruang	900.000.000	Pembangunan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 ruang	400.000.000	
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2.900 paket	633.500.000	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1.500 paket	109.500.000	
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 ruang	1.400.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 ruang	127.657.000	
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	33 paket	485.000.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	15 paket	218.850.000	
1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Kota Pekalongan**	**Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (IKK Outcome / SPM)**	**100,00%**	**9.648.768.000**	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Kota Pekalongan**	**Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (IKK Outcome / SPM)**	**100,00%**	**8.609.274.000**	
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2 unit	555.123.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah	1 unit	186.736.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
								Dibangun			
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD		Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2 paket	20.000.000	Pengadaan Mebel PAUD		Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	0 paket	-	
1.01.02.2.03.0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD		Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	4 paket	12.000.000	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD		Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	4 paket	13.000.000	
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD		Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	16 paket	80.000.000	Pengadaan Perlengkapan PAUD		Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	4 paket	20.000.000	
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0 peserta didik	-	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0 peserta didik	-	
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	2 orang	55.440.000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	2 orang	55.440.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	4 orang	3.950.000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	4 orang	3.950.000	
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	268 satuan pendidikan	320.974.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	270 satuan pendidikan	230.000.000	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	268 satuan pendidikan	6.021.600.000	Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	270 satuan pendidikan	6.021.600.000	
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	298 orang	253.800.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	565 orang	54.200.000	
1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	546 orang	29.000.000	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	540 orang	18.250.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	273 dokumen	190.300.000	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	270 dokumen	56.000.000	
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	3 dokumen	41.500.000	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 dokumen	21.900.000	
1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 ruang	300.000.000	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 ruang	146.010.000	
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0 ruang	-	Pembangunan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0 ruang	-	
1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 kegiatan	20.000.000	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 kegiatan	14.600.000	
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	750 paket	135.000.000	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	600 paket	73.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	4 unit	80.000.000	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	4 unit	92.000.000	
1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 unit	340.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 unit	146.000.000	
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	4 paket	80.000.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	4 paket	65.000.000	
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	273 satuan pendidikan	210.000.000	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	270 satuan pendidikan	73.000.000	
1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 ruang	900.081.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 ruang	1.318.588.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan**	**Kota Pekalongan**	**Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (IKK Outcome / SPM)**	**100,00%**	**4.892.982.000**	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Kota Pekalongan**	**Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (IKK Outcome / SPM)**	**100,00%**	**3.661.370.000**	
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan		Jumlah Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0 peserta didik	-	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan		Jumlah Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0 peserta didik	-	
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	13 orang	323.692.000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	13 orang	321.680.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1 orang	2.950.000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1 orang	2.950.000	
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan		Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	15 satuan pendidikan	88.000.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan		Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	15 satuan pendidikan	76.840.000	
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan		Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	15 satuan pendidikan	2.467.900.000	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan		Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	15 satuan pendidikan	2.467.900.000	
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	40 orang	40.000.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	30 orang	8.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	30 orang	6.000.000	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	30 orang	3.000.000	
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 dokumen	15.000.000	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	15 dokumen	9.000.000	
1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 ruang	1.283.000.000	Pembangunan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 ruang	474.500.000	
1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	415 paket	229.525.000	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	400 paket	50.000.000	
1.01.02.2.04.0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1 paket	20.000.000	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1 paket	15.000.000	
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	273 peserta didik	176.915.000	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1.826 peserta didik	103.000.000	
1.01.02.2.04.0047	Pembangunan Ruang Laboratorium		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	0 ruang	-	Pembangunan Ruang Laboratorium		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	0 ruang	-	
1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	50 paket	100.000.000	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	85 paket	60.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 unit	100.000.000	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 unit	19.000.000	
1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	3 paket	40.000.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 paket	50.000.000	
1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 unit	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 unit	-	
01.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas**	**100,00%**	**173.029.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas**	**100,00%**	**83.800.000**	
1.01.03.2.01	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar**	**100,00%**	**91.129.000**	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar**	**100,00%**	**47.125.000**	
1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	2 dokumen	8.350.000	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 dokumen	6.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	500 buku	50.000.000	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	200 buku	20.625.000	
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	10 orang	21.246.000	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	10 orang	13.000.000	
1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	2 dokumen	11.533.000	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 dokumen	7.500.000	
1.01.03.2.02	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal PAUD/PNF**	**100%**	**81.900.000**	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**		**Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal PAUD/PNF**	**100%**	**36.675.000**	
1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 dokumen	10.600.000	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 dokumen	6.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	500 buku	60.600.000	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	250 buku	25.675.000	
1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 dokumen	10.700.000	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 dokumen	4.500.000	
01.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan**	**100,00%**	**16.226.291.000**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan**	**100,00%**	**15.485.800.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan bersertifikasi pendidik pada satuan pendidikan dasar dan PAUD/PNF**	**100,00%**	**16.226.291.000**	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan bersertifikasi pendidik pada satuan pendidikan dasar dan PAUD/PNF**	**100,00%**	**15.485.800.000**	
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	25 dokumen	1.126.293.000	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	25 dokumen	614.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	15 laporan	15.099.998.000	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	5 laporan	14.871.800.000	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Pekalongan**			**168.765.245.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Pekalongan**			**161.429.301.000**	
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00%				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00%		
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00%				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100,00%				Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100,00%		
1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100,00%**	**112.375.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100,00%**	**99.750.000**	
1.01.01.2.0.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	8.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	8.500.000	
1.01.01.2.0.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	4.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	4.250.000	
1.01.01.2.0.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	99.625.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 laporan	87.000.000	
1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100,00%**	**166.846.176.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100,00%**	**159.905.426.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.01.01.2.0.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1495 orang/ bulan	166.322.276.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1431 orang/ bulan	159.382.234.000	
1.01.01.2.0.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	520.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	519.292.000	
1.01.01.2.0.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	3.900.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	3.900.000	
1.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**100,00%**	**105.303.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**100,00%**	**87.880.000**	
1.01.01.2.0.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	93 laporan	105.303.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	186 laporan	87.880.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100,00%**	**9.500.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100,00%**	**5.000.000**	
1.01.01.2.0.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	9.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	5.000.000	
1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100,00%**	**571.691.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100,00%**	**486.489.000**	
1.01.01.2.0.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	7.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	7.500.000	
1.01.01.2.0.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	123.322.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	123.322.000	
1.01.01.2.0.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	11.217.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	11.217.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.01.01.2.0.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	82.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	82.000.000	
1.01.01.2.0.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	15.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 paket	15.000.000	
1.01.01.2.0.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	2.900.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	2.900.000	
1.01.01.2.0.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145 laporan	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	117.550.000	
1.01.01.2.0.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 dokumen	129.752.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 dokumen	127.000.000	
X.XX.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian penyediaan jasa penujang urusan pemerintahan daerah**	**100,00%**	**704.873.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian penyediaan jasa penujang urusan pemerintahan daerah**	**100,00%**	**674.873.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.01.01.2.0.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	7.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	7.000.000	
1.01.01.2.0.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	320.997.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	290.997.000	
1.01.01.2.0.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	376.876.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	376.876.000	
X.XX.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100,00%**	**415.327.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100,00%**	**169.883.000**	
1.01.01.2.0.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 unit	72.073.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 unit	61.030.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.01.01.2.0.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 unit	293.254.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 unit	58.853.000	
1.01.01.2.0.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	101 unit	50.000.000	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Salah satu tahapan perencanaan berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 adalah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Kegiatan Musrenbang merupakan kegiatan wajib yang dilaksanakan setiap tahunnya sebagai salah satu sarana prasarana masyarakat dan stakeholder menyampaikan keadaan wilayah di Kota Pekalongan. Musrenbang ini juga merupakan forum musyawarah antar stakeholder dan pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program-kegiatan yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan di wilayah yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan yang ada di daerah tersebut yang nantinya akan dicantumkan dalam Dokumen RKPD.

Dalam rangka penyusunan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025 dilakukan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Kelurahan, musrenbang tingkat Kecamatan dan dilanjutkan Musrenbang tingkat Kota.

Setelah melalui penelaahan dan dengan mempertimbangkan tingkat prioritas, usulan-usulan program kegiatan masyarakat yang dirangkum melalui musrenbang kelurahan dan tingkat kecamatan, Dinas Pendidikan memberikan tanggapan berdasarkan verifikasi lapangan atas usulan Musrenbang sebagai berikut :

Tabel T-C.32
Usulan Program / Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Spesifikasi	Besaran/ Volume	Catatan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	
1	Pengelolaan Pendidikan					
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	POS PAUD "Amanah" Banyurip Banyurip Gang 5 Nomor 38 Pekalongan, Kota Pekalongan	rehab sedang berat 2 ruang kelas	2 ruang	Kondisi bangunan	Rusak sedang atap pada atap dan lantai perlu peninggian karena jika hujan air masuk
					Kepemilikan lahan	Tercatat d kib c kelurahan Banyurip) status tanah milik pjka
					Catatan Tambahan	bangunan eks kelurahan banyurip alit, jumlah siswa 25 anak
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	POS PAUD "Melati" Kuripan Kertoharjo	pembangunan 1 ruang kelas	1 ruang	Kondisi bangunan	- hanya ada 1 ruang kelas digunakan 31 anak, perlu 1 ruang kelas krn tidak ada lahan, rencana akan membangun di selasar depan ruang kelas ukuran 3x4 - belum memiliki ruang guru

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Spesifikasi	Besaran/ Volume	Catatan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	
					Kepemilikan lahan	Tanah milik pemkot (tercatat sebagai aset SDN Kuripan Kertoharjo)
					Catatan Tambahan	Pembangunan 1 ruang selasar depan ukuran 3x4 untuk ruang kelas

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

3.1.1. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan. Kemendikbud dalam menentukan visi kementerian berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2025, serta Visi Indonesia 2045. Adapun visi Kemendikbud tahun 2020-2025 adalah :

"Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang Bernalar Kritis, Kreatif, Mandiri, Beriman, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia, Bergotong royong, dan Berkebinekaan Global"

Sejalan dengan perwujudan visi dan misi Presiden, Kemendikbud sesuai dengan tugas dan kewenangannya, berkomitmen untuk menciptakan Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nila-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama : beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlaq mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, ditetapkan 3 (tiga) Misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita Kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrasuktur dan tehnologi
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra
3. Mengoptimalkan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transpormasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan

Pemerintah memegang peranan penting dalam peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan serta daya saing anak-anak Indonesia, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP), pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada semua jenjang pendidikan serta pemberian beasiswa miskin melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) sehingga keterjangkauan dan jaminan untuk memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah dapat terpenuhi. Selain itu

pemerintah juga harus menjamin ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional di seluruh jenjang pendidikan dan seluruh satuan pendidikan, serta mengurangi kesenjangan akses dan kualitas antar propinsi, kabupaten, dan kota serta antardaerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Sumbangan Kota Pekalongan dalam pencapaian target visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

1. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang;
2. Meningkatkan pemertaan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan memenuhi standar nasional pendidikan;
4. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Memanfaatkan tehnologi informasi dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan pengelolaan manajemen sekolah.

3.1.2. TELAAHAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018-2025 adalah

"Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari"

"Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"

Makna Visi :

a. Sejahtera adalah kondisi yang menunjukkan kemakmuran suatu masyarakat yang terpenuhi hak sosial dasarnya. Upaya yang dilakukan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar, indeks kebahagiaan, dan masyarakat mudah bekerja, yang menyangkut pangan, kesehatan, pendiidkan, penciptaan dan perluasan lapangan kerja, akses aman air minum, rumah layak huni, perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial, hubungan sosial masyarakat, dan akses terhadap indormasi;
b. Berdikari adalah tindakan yang didasarkan pada kekuatan sendiri. Artinya membangun Jawa Tengah berdasarkan kekuatan yang ada di Jawa Tengah dan mengekplorasi seluruh potensi yang dapat digunakan;

   Untuk mewujudkan Jawa Tengah Berdikari, tiga hal yang perlu dilakukan, yaitu:

   1. Membangun berdasarkan kekuatan dan sumber daya yang ada di Jawa Tengah, agar terhindar dari jebakan ketergantungan dengan pihak eksternal;
   2. Mengekplorasi seluruh potensi baik ilmu dan pengetahuan, teknologi, kearifan lokal, sumber daya alam dan lingkungan, serta SDM Jawa Tengah dimanapun bermukim, untuk mendukung dan meningkatkan kekuatan sendiri;
   3. Melakukan kerjasama dengan para pihak, dalam dan luar negeri, secara berdaulat, saling menghormati dan menguntungkan dalam jangka pendek
c. "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"*, bukan hanya sekedar tidak melakukan korupsi dan tidak menipu, melainkan benar-benar menjadi nilai-nilai, sikap dasar, kemauan dan perilaku yang harus diemban oleh seluruh pemangku kepentingan dalam segala aspek kehidupan untuk mendukung perwujudan Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari.

Untuk mencapai visi tersebut, misi yang mendukung bidang pendidikan adalah misi 6, yaitu :

"Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat"

Misi ini diarahkan untuk pemenuhan layanan dasar, pendidikan, kesehatan, pemukiman, jaringan irigasi dan air baku melalui perluasan akses dan penyediaan sarana dan prasarana serta pemenuhan standar pelayanan minimal.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Visi pembangunan Kota Pekalongan dalam RPJMD 2021-2026 menekankan pada "Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius". Untuk mencapai visi tersebut, telah dirumuskan 7 (tujuh) misi pembangunan sebagai arah dan batasan proses pencapaian tujuan. Dari sisi urusan pendidikan melaksanakan misi ke-2 : "Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan" dan misi ke-7 : "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisiean Berdasarkan Prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Goverment*".

Terkait upaya mewujudkan visi dan misi tersebut, serta memperhatikan isi isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi urusan pendidikan, pada tahun 2025 Dinas Pendidikan mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

- Tujuan :
  a. Meningkatkan akses pendidikan
  b. Meningkatkan implementasi pendidikan karakter dan keagamaan
  c. Meningkatkan kualitas layanan publik
- Sasaran :
  a. Meningkatnya capaian SPM pendidikan dan ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan
  b. Terimplementasinya kurikulum muatan lokal sekolah
  c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

3.3. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Bidang Pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sejalan dengan visi dan misi Walikota Pekalongan 2021-2026, Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pendidikan yang bermutu di Kota Pekalongan baik dari segi akses maupun kualitas. Standar Pelayanan Minimal sebagai tolok ukur pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan pendidikan di Kota Pekalongan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekalongan belum optimal, meskipun Indeks Pencapaian SPM Pendidikan mengalami kenaikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir , yaitu 90,94% di tahun 2022 dan 99,67% di tahun 2023 namun masih belum mencapai 100% yang ditargetkan, hal ini menjadi permasalahan sekaligus tantangan bagi Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pendidikan untuk meningkatkan indeks pencapaian SPM urusan pendidikan. Dalam perencanaan tahun 2025 akan difokuskan pada upaya pemenuhan capaian dan mutu SPM pendidikan, Impelentasi Kurikulum Merdeka yang merupakan *mandatory* dari kebijakan nasional serta kebijakan-kebijakan nasional yang lain khususnya dalam urusan pendidikan, melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
2. Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
3. Penataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan
4. Peningkatan sarpras pendidikan
5. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah
6. Fasilitasi pendidikan inklusi
7. Penguatan pendidikan karakter
8. Optimalisasi Digitalisasi Sekolah
9. Peningkatan budaya literasi dan penyediaan kurikulum muatan local

Selanjutnya guna mengampu upaya pemenuhan capaian dan mutu SPM pendidikan dan kebijakan pemerintah urusan pendidikan, Pada tahun 2025 Dinas Pendidikan akan melaksanakan 4 program, yaitu :

1. Program pengelolaan pendidikan
2. Program pengembangan kurikulum
3. Program pendidik dan tenaga kependidikan
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota

Dari keempat program tersebut akan didukung oleh 14 kegiatan dan 107 sub kegiatan, dengan rencana kebutuhan dana / pagu indikatif dalam rancangan akhir Renja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tahun 2025 sebesar Rp 233.787.353.000 yang bersumber dari APBD sebesar Rp 140.404.628.000 (60,06%) dan DAK Rp 93.382.725.000 (39,94%). Jumlah pagu indikatif dalam rancangan akhir Renja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tahun 2025 lebih kecil jika dibandingan pagu indikatif dalam rancangan awal Renja 2025 sebesar Rp 265.851.592.000 karena sesuai hasil desk dan review RKPD , beberapa ada yang dilakukan penyesuaian rasionalisasi dan penundaan serta dengan pertimbangan kemampuan keuangan

daerah dan prioritas penganggaran pemerintah Kota Pekalongan sehingga perlu dibuat skala prioritas kegiatan mana yang mendukung pencapaian program pada akhir tahun 2025.

Secara rinci program, kegiatan dan sub kegiatan dalam renja 2025 dapat kami sajikan dalam tabel Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 berikut ini :

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Pendidikan Kota Pekalongan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.01.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pendidikan**		**Kota Pekalongan**		**233.787.353.000**				**290.782.196.000**
1:01:02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase capaian SPM pendidikan**	**Kota Pekalongan**	**100,00%**	**56.788.452.000**				**102.426.197.000**
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (IKK Outcome /SPM)**	**Kota Pekalongan**	**100,00%**	**24.384.092.000**				**39.731.617.000**
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 ruang	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			750.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 ruang	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			470.000.000
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 ruang	483.821.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK			2.000.000.000
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 unit	200.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			1.564.000.000
1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 ruang	248.740.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK			1.660.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 ruang	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			1.500.000.000
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 ruang	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			1.050.000.000
1.01.02.2.01.0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71 paket	88.750.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			177.500.000
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 paket	143.650.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			355.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71 unit	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			106.500.000
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.249 peserta didik	358.750.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			580.000.000
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.091 orang	2.768.076.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			2.684.800.000
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103 orang	7.680.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			7.100.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103 satuan pendidikan	126.840.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			303.500.000
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103 satuan pendidikan	18.064.400.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK			12.922.744.000
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	242 orang	25.720.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			58.000.000
1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	206 orang	13.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			142.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 kegiatab	30.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			45.000.000
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	990 paket	73.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			300.000.000
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 ruang	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			-
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 unit	506.850.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			555.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103 satuan pendidikan	73.395.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			306.000.000
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71 ruang	735.920.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK			6.273.168.000
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 peserta didik	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			3.765.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 paket	385.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK			2.156.305.000
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (IKK Outcome / SPM)**	**Kota Pekalongan**	**100,00%**	**20.133.716.000**				**36.722.263.000**
1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 ruang	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			400.000.000
1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 orang	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			35.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 orang	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK			300.000.000
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 ruang	490.204.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK			300.000.000
1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 ruang	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			300.000.000
1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 unit	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			35.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.01.02.2.02.0011	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 unit	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			100.000.000
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 unit	53.660.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			1.565.000.000
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27 ruang	2.389.415.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK			5.200.000.000
1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 ruang	105.000.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK			105.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 ruang	461.928.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK			1.000.000.000
1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 ruang	919.863.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK			900.000.000
1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 ruang	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			600.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.01.02.2.02.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 unit	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			150.000.000
1.01.02.2.02.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 unit	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			250.000.000
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 unit	350.539.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK			580.000.000
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180 paket	80.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			700.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 paket	34.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			170.000.000
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 paket	191.250.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			425.000.000
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 unit	127.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			170.000.000
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 peserta didik	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			3.345.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	850 peserta didik	277.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			580.000.000
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105 orang	293.470.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			332.200.000
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 orang	9.630.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			7.100.000
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 satuan pendidikan	166.770.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			496.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 satuan pendidikan	13.215.800.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK			10.127.372.000
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96 orang	15.280.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			23.175.000
1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 orang	20.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			51.000.000
1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 kegiatan	35.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			5.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 satuan pendidikan	40.600.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			172.500.000
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 ruang	400.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK			4.500.000.000
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500 paket	109.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			633.500.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 ruang	127.657.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK			1.740.000.000
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 paket	218.850.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK			1.424.416.000
1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (IKK Outcome / SPM)**	**Kota Pekalongan**	**100,00%**	**8.609.274.000**				**18.440.430.000**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 unit	186.736.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK			555.123.000
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 paket	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			80.000.000
1.01.02.2.03.0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 paket	13.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			10.000.000
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 paket	20.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			80.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 peserta didik	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			710.000.000
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 orang	55.440.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			48.000.000
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 orang	3.950.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			2.000.000
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	270 satuan pendidikan	230.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			905.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	270 satuan pendidikan	6.021.600.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK			7.600.000.000
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	565 orang	54.200.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			129.500.000
1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	540 orang	18.250.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			29.000.000
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	270 dokumen	56.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			26.500.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 dokumen	21.900.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			41.500.000
1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 ruang	146.010.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			500.000.000
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 ruang	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			100.000.000
1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 kegiatan	14.600.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			20.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600 paket	73.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			142.500.000
1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 unit	92.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			20.000.000
1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 unit	146.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			340.000.000
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 paket	65.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK			80.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	270 satuan pendidikan	73.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			6.121.307.000
1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 ruang	1.318.588.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK			900.000.000
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (IKK Outcome / SPM)**	**Kota Pekalongan**	**100,00%**	**3.661.370.000**				**7.531.887.000**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 peserta didik	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			320.000.000
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 orang	321.680.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			248.000.000
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 orang	2.950.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			1.000.000
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 satuan pendidikan	76.840.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			420.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 satuan pendidikan	2.467.900.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK			2.600.000.000
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 orang	8.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			20.400.000
1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 orang	3.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			6.000.000
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 dokumen	9.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			3.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 ruang	474.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			600.000.000
1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400 paket	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			300.000.000
1.01.02.2.04.0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 paket	15.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			20.000.000
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.826 peserta didik	103.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			1.968.487.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.01.02.2.04.0047	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 ruang	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			180.000.000
1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85 paket	60.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			105.000.000
1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 unit	19.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			300.000.000
1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 paket	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			40.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 unit	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK			400.000.000
01.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas**	**Kota Pekalongan**	**100,00%**	**83.800.000**				**299.571.000**
1.01.03.2.01	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar**	**Kota Pekalongan**	**100,00%**	**47.125.000**				**144.984.000**
1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 dokumen	6.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			15.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 buku	20.625.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			60.000.000
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 orang	13.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			44.984.000
1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 dokumen	7.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			25.000.000
1.01.03.2.02	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal PAUD/PNF**	**Kota Pekalongan**	**100,00%**	**36.675.000**				**154.587.000**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 dokumen	6.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			15.000.000
1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250 buku	25.675.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			124.587.000
1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 dokumen	4.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			15.000.000
01.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan**	**Kota Pekalongan**	**100,00%**	**15.485.800.000**				**15.465.367.000**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan**	**Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan bersertifikasi pendidik pada satuan pendidikan dasar dan PAUD/PNF**	**Kota Pekalongan**	**100,00%**	**15.485.800.000**				**15.465.367.000**
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 dokumen	614.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			941.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 laporan	14.871.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			14.524.367.000
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Kota Pekalongan**		**161.429.301.000**				**172.591.061.000**
		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja		100,00%				100,00%	
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100,00%				100,00%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah		100,00%				100,00%	
1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Kota Pekalongan**	**100,00%**	**99.750.000**			**100,00%**	**149.810.000**
1.01.01.2.0.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 dokumen	8.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			5.250.000
1.01.01.2.0.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 dokumen	4.250.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			2.560.000
1.01.01.2.0.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 laporan	87.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			142.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**Kota Pekalongan**	**100,00%**	**159.905.426.000**				**171.036.465.000**
1.01.01.2.0.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1431 orang/ bulan	159.382.234.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD			170.503.715.000
1.01.01.2.0.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 dokumen	519.292.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			529.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.01.01.2.0.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 laporan	3.900.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			3.750.000
1.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**Kota Pekalongan**	**100,00%**	**87.880.000**				**86.386.000**
1.01.01.2.0.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	186 laporan	87.880.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			86.386.000
1.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Kota Pekalongan**	**100,00%**	**5.000.000**				**8.638.000**
1.01.01.2.0.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 paket	5.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			8.638.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**Kota Pekalongan**	**100,00%**	**486.489.000**				**559.598.000**
1.01.01.2.0.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 paket	7.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			10.000.000
1.01.01.2.0.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 paket	123.322.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			118.598.000
1.01.01.2.0.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 paket	11.217.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			11.000.000
1.01.01.2.0.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 paket	82.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			72.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.01.01.2.0.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 paket	15.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			13.000.000
1.01.01.2.0.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 dokumen	2.900.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			3.000.000
1.01.01.2.0.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 laporan	117.550.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			150.000.000
1.01.01.2.0.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 dokumen	127.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			182.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
X.XX.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian penyediaan jasa penujang urusan pemerintahan daerah**	**Kota Pekalongan**	**100,00%**	**674.873.000**				**558.553.000**
1.01.01.2.0.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 laporan	7.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			7.000.000
1.01.01.2.0.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 laporan	290.997.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			276.553.000
1.01.01.2.0.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 laporan	376.876.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			275.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
X.XX.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kota Pekalongan**	**100,00%**	**169.883.000**				**191.611.000**
1.01.01.2.0.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27 unit	61.030.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			50.611.000
1.01.01.2.0.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 unit	58.853.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			91.000.000
1.01.01.2.0.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101 unit	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			50.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bidang Pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sejalan dengan visi dan misi Walikota Pekalongan 2021-2026, Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pendidikan yang bermutu di Kota Pekalongan baik dari segi akses maupun kualitas. Standar Pelayanan Minimal sebagai tolok ukur pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan pendidikan di Kota Pekalongan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Indeks Pencapaian SPM Pendidikan tahun 2023 yang belum optimal, yakni 99,67% dari 100% yang ditargetkan, menjadi permasalahan sekaligus tantangan bagi Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pendidikan untuk meningkatkan indeks pencapaian SPM urusan pendidikan. Dalam perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025 akan difokuskan pada upaya pemenuhan capaian dan mutu SPM pendidikan, Impelentasi Kurikulum Merdeka yang merupakan *mandatory* dari kebijakan nasional serta kebijakan-kebijakan nasional yang lain khususnya dalam urusan pendidikan, seperti transisi PAUD ke SD yang menyenangkan dan Gerakan Sekolah Sehat antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
2. Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
3. Penataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan
4. Peningkatan sarpras pendidikan
5. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah
6. Peningkatan budaya literasi dan penyediaan kurikulum muatan lokal

Selanjutnya guna mengampu upaya pemenuhan capaian dan mutu SPM pendidikan dan kebijakan pemerintah urusan pendidikan, Pada tahun 2025 Dinas Pendidikan akan melaksanakan 4 program, yaitu :

1. Program pengelolaan pendidikan
2. Program pengembangan kurikulum
3. Program pendidik dan tenaga kependidikan
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota

Rencana Kerja dan pendanaan tahun 2025 Dinas Pendidikan Kota Pekalongan secara rinci kami sajikan sebagai berikut :

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025
Dinas Pendidikan Kota Pekalongan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.01.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pendidikan**		**Kota Pekalongan**		**233.787.353.000**	
1:01:02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase capaian SPM pendidikan**	**Kota Pekalongan**	**100,00%**	**56.788.452.000**	
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (IKK Outcome /SPM)**	**Kota Pekalongan**	**100,00%**	**24.384.092.000**	
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 ruang	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 ruang	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 ruang	483.821.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 unit	200.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 ruang	248.740.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 ruang	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 ruang	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.01.0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71 paket	88.750.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 paket	143.650.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71 unit	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.249 peserta didik	358.750.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.091 orang	2.768.076.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103 orang	7.680.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103 satuan pendidikan	126.840.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103 satuan pendidikan	18.064.400.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	242 orang	25.720.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	206 orang	13.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 kegiatab	30.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	990 paket	73.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 ruang	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 unit	506.850.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103 satuan pendidikan	73.395.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71 ruang	735.920.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 peserta didik	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 paket	385.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (IKK Outcome / SPM)**	**Kota Pekalongan**	**100,00%**	**20.133.716.000**	
1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 ruang	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 orang	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 orang	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 ruang	490.204.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 ruang	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 unit	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.02.0011	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 unit	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 unit	53.660.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27 ruang	2.389.415.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 ruang	105.000.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 ruang	461.928.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 ruang	919.863.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 ruang	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.02.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 unit	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.02.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 unit	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 unit	350.539.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180 paket	80.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 paket	34.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 paket	191.250.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 unit	127.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 peserta didik	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	850 peserta didik	277.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105 orang	293.470.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 orang	9.630.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 satuan pendidikan	166.770.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 satuan pendidikan	13.215.800.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96 orang	15.280.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 orang	20.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 kegiatan	35.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 satuan pendidikan	40.600.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 ruang	400.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500 paket	109.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 ruang	127.657.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 paket	218.850.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (IKK Outcome / SPM)**	**Kota Pekalongan**	**100,00%**	**8.609.274.000**	
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 unit	186.736.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 paket	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.01.02.2.03.0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 paket	13.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 paket	20.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 peserta didik	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 orang	55.440.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 orang	3.950.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	270 satuan pendidikan	230.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	270 satuan pendidikan	6.021.600.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	565 orang	54.200.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	540 orang	18.250.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	270 dokumen	56.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 dokumen	21.900.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 ruang	146.010.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 ruang	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 kegiatan	14.600.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600 paket	73.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 unit	92.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 unit	146.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 paket	65.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	270 satuan pendidikan	73.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 ruang	1.318.588.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (IKK Outcome / SPM)**	**Kota Pekalongan**	**100,00%**	**3.661.370.000**	
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 peserta didik	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 orang	321.680.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 orang	2.950.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 satuan pendidikan	76.840.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 satuan pendidikan	2.467.900.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 orang	8.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 orang	3.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 dokumen	9.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 ruang	474.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400 paket	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.04.0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 paket	15.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.826 peserta didik	103.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.01.02.2.04.0047	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 ruang	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85 paket	60.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 unit	19.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 paket	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 unit	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
01.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas**	**Kota Pekalongan**	**100,00%**	**83.800.000**	
1.01.03.2.01	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar**	**Kota Pekalongan**	**100,00%**	**47.125.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 dokumen	6.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 buku	20.625.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 orang	13.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 dokumen	7.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.03.2.02	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal PAUD/PNF**	**Kota Pekalongan**	**100,00%**	**36.675.000**	
1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 dokumen	6.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250 buku	25.675.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 dokumen	4.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
01.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan**	**Kota Pekalongan**	**100,00%**	**15.485.800.000**	
1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan**	**Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan bersertifikasi pendidik pada satuan pendidikan dasar dan PAUD/PNF**	**Kota Pekalongan**	**100,00%**	**15.485.800.000**	
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 dokumen	614.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 laporan	14.871.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Kota Pekalongan**		**161.429.301.000**	
		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja		100,00%		
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100,00%		
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah		100,00%		
1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Kota Pekalongan**	**100,00%**	**99.750.000**	
1.01.01.2.0.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 dokumen	8.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.01.2.0.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 dokumen	4.250.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.01.2.0.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 laporan	87.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**Kota Pekalongan**	**100,00%**	**159.905.426.000**	
1.01.01.2.0.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1431 orang/ bulan	159.382.234.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD
1.01.01.2.0.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 dokumen	519.292.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.01.2.0.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 laporan	3.900.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**Kota Pekalongan**	**100,00%**	**87.880.000**	
1.01.01.2.0.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	186 laporan	87.880.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Kota Pekalongan**	**100,00%**	**5.000.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.01.01.2.0.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 paket	5.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**Kota Pekalongan**	**100,00%**	**486.489.000**	
1.01.01.2.0.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 paket	7.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.01.2.0.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 paket	123.322.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.01.2.0.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 paket	11.217.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.01.2.0.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 paket	82.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.01.2.0.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 paket	15.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.01.2.0.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 dokumen	2.900.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.01.01.2.0.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 laporan	117.550.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.01.2.0.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 dokumen	127.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
X.XX.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian penyediaan jasa penujang urusan pemerintahan daerah**	**Kota Pekalongan**	**100,00%**	**674.873.000**	
1.01.01.2.0.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 laporan	7.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.01.2.0.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 laporan	290.997.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.01.2.0.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 laporan	376.876.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
X.XX.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kota Pekalongan**	**100,00%**	**169.883.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.01.01.2.0.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27 unit	61.030.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.01.2.0.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 unit	58.853.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1.01.01.2.0.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101 unit	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2025 disusun seabagai upaya pencapaian Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekalongan 2021-2026 dengan memperhatikan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2025 serta RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Tentu Rencana Kerja (Renja) ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa dukungan segenap jajaran pendidikan dan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara konsisten dalam mengupayakan tercapainya sasaran dan tujuan sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkeadilan, melaksanakan pemerataan pendidikan yang berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna peningkatan mutu pendidikan di Kota Pekalongan pada semua jenjang pendidikan.

Akhirnya Renja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2025 dapat sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditegaskan dalam RKP Nasional 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen rencana pembangunan secara nasional. Dengan demikian maka pencapaian hasil-hasil pembangunan daerah berkontribusi dalam pencapaian keberhasilan pembangunan secara nasional.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Pekalongan

ZAINUL HAKIM, S.H.,M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19650211 199403 1 005

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018.
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
9. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.
10. Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. (2023). Profil Pendidikan Kota Pekalongan.

PEMERINTAH
KOTA PEKALONGAN

2025

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KESEHATAN KOTA PEKALONGAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

GERMAS
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2025 dapat terselesaikan. Usulan program dan kegiatan yang disampaikan dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2025 ini telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2025 ini, kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2025 ini, harapan kami apa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2025 dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2025.

Pekalongan, 7 Agustus 2024

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Pekalongan

Dr. SLAMET BUDIYANTO, S.K.M., M.Kes.
NIP. 19710118 199303 1 005

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Kata Pengantar..... ii
Daftar Isi..... iii
Daftar Tabel iv

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 LANDASAN HUKUM..... 2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN..... 3

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..... 5
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 5
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 13
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH..... 15
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 15
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT..... 15

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 17
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL..... 17
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 19
3.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 19

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 60

BAB V PENUTUP..... 86

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Pekalongan 6
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Pekalongan 13
Tabel 2.3 Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Pekalongan 16
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Pekalongan..... 20
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 58

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pengganti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja PD juga mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Renja Perangkat Daerah terbagi dalam dua fase yakni Rancangan Renja Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Dalam Rancangan Renja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat yang terserap dari aspirasi masyarakat yang selanjutnya disusun Rencana Kerja. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2025 yang memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut dengan memperhatikan hasil evaluasi pembangunan kesehatan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2023.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2025 mendasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 8);
13. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah memberikan arah sekaligus sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan program kerja Dinas Kesehatan dan terselenggaranya pembangunan yang efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra secara berkesinambungan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah:

a. Mendiskripsikan tentang program-program yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Kota Pekalongan;
b. Menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan pada tahun berjalan untuk mendukung pencapaian target tujuan, sasaran program dan indikator kinerja kegiatan;
c. Memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) melalui pengukuran kinerja Dinas Kesehatan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan kesehatan daerah; serta
d. Menjadi dasar bagi penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Dinas Kesehatan.
e. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Mengemukakan penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan kesehatan tingkat kota. Arah kebijakan umum berisi langkah strategis yang direncanakan untuk mengatasi berbagai kondisi dan permasalahan, Menguraikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai penjabaran dari kebijakan umum dalam rangka perwujudan Renstra Dinas Kesehatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Kerja

Memuat rencana kerja dan jumlah anggaran yang dibutuhkan

BAB V Penutup

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah kaidah pelaksanaan, dan rencana tindaklanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik.

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 yang mengacu pada APBD tahun 2024 dan dikaitkan dengan pencapaian target renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Dalam tahun anggaran 2023 Dinas Kesehatan Kota Pekalongan mempunyai 5 Program, 16 Kegiatan dan 58 Sub Kegiatan. Sedangkan 14 UPT Puskesmas dan 1 UPTD di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan mempunyai 2 Program, 2 Kegiatan, dan 2 Sub Kegiatan di mana program tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan, namun ada beberapa kegiatan yang realisasinya tidak mencapai target yang direncanakan.

Adapun review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan realisasi Renstra Dinas Kesehatan Kota Pekalongan disajikan dalam tabel dibawah ini :

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023
KOTA PEKALONGAN

PERANGKAT DAEARAH : DINAS KESEHATAN

No.	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra 2021 - 2026	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (2021)	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian Renstra sd 2023	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021 - 2026	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021 – 2026
						Target 2023	Realisasi Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dinas Kesehatan										
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	Persen	92	86,59	66,19	89	18	18	19,56	Belum Tercapai
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
	Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP	Persen	100	100	-	100	100	100	100	Tercapai
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
	Persentase Fasyankes yang diberikan rekomendasi tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
	Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Fasyankes (Puskesmas dan RSUD)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									
	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	Persen	95,5	92,15	88,05	93,5	90,59	90,59	94,85	Belum Tercapai
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota									
	Persentase penerbitan rekomendasi Surat Ijin Praktek tenaga kesehatan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai

No.	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra 2021 - 2026	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (2021)	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian Renstra sd 2023	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021 - 2026	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021 – 2026
						Target 2023	Realisasi Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN									
	Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar	Persen	100	89,71	100	100	100	100	100	Tercapai
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)									
	Persentase apotek, toko obat dan toko alat kesehatan yang dilakukan pengawasan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga									
	Persentase Pangan Industri Rumah Tangga yang dilakukan pengawasan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									
	Persentase Rumah Tangga Sehat	Persen	95	96,95	98,04	91	98,65	98,65	103,84	Tercapai
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
	Persentase Posyandu dengan Strata Mandiri	Persen	35	25,12	30,92	31	42.31	42.31	120,88	Tercapai
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Promosi Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									

No.	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra 2021 - 2026	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (2021)	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian Renstra sd 2023	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021 - 2026	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021 – 2026
						Target 2023	Realisasi Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	103.43	103.43	103.43	Tercapai
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
UPT Puskesmas Bendan										
	Peningkatan Pelayanan BLUD									
	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
	Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
UPT Puskesmas Kramatsari										
	Peningkatan Pelayanan BLUD									
	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
	Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Tercapai

No.	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra 2021 - 2026	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (2021)	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian Renstra sd 2023	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021 - 2026	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021 – 2026
						Target 2023	Realisasi Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama									
UPT Puskesmas Tirto										
	Peningkatan Pelayanan BLUD									
	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
	Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Tercapai
UPT Puskesmas Medono										
	Peningkatan Pelayanan BLUD									
	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
	Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Tercapai
UPT Puskesmas Noyontaan										
	Peningkatan Pelayanan BLUD									
	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
	Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Tercapai
UPT Puskesmas Tondano										
	Peningkatan Pelayanan BLUD									
	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Tercapai

No.	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra 2021 - 2026	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (2021)	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian Renstra sd 2023	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021 - 2026	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021 – 2026
						Target 2023	Realisasi Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
	Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Tercapai
UPT Puskesmas Klego										
	Peningkatan Pelayanan BLUD									
	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
	Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Tercapai
UPT Puskesmas Sokorejo										
	Peningkatan Pelayanan BLUD									
	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
	Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Tercapai
UPT Puskesmas Dukuh										
	Peningkatan Pelayanan BLUD									
	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
	Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Tercapai

No.	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra 2021 - 2026	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (2021)	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian Renstra sd 2023	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021 - 2026	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021 – 2026
						Target 2023	Realisasi Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
UPT Puskesmas Krapyak Kidul										
	Peningkatan Pelayanan BLUD									
	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
	Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Tercapai
UPT Puskesmas Kusuma Bangsa										
	Peningkatan Pelayanan BLUD									
	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
	Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Tercapai
UPT Puskesmas Jenggot										
	Peningkatan Pelayanan BLUD									
	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
	Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Tercapai
UPT Puskesmas Pekalongan Selatan										
	Peningkatan Pelayanan BLUD									
	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat									

No.	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra 2021 - 2026	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (2021)	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian Renstra sd 2023	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021 - 2026	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021 – 2026
						Target 2023	Realisasi Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Daerah Kabupaten/Kota									
	Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama	Persen	0	100	100	100	89	89	89	Tercapai
UPT Puskesmas Buaran										
	Peningkatan Pelayanan BLUD									
	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
	Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Tercapai
UPTD Balai Pelayanan Dan Saintifikasi Jamu										
	Peningkatan Pelayanan BLUD									
	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Kesehatan Kota merupakan salah satu pelaksana Pembangunan Kesehatan di Kota Pekalongan. Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Pekalongan, Dinas Kesehatan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM-BK) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 4 Tahun 2019. Di dalam PMK tersebut, SPM Bidang Kesehatan terdiri atas 12 indikator. Pada tahun 2023 ada 6 indikator SPM yang belum mencapai target SPM yaitu Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita, Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif, Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut dan Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Capaian SPM Bidang Kesehatan pada tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini:

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KOTA PEKALONGAN

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	**SPM KESEHATAN (PMK No.4 TAHUN 2019)**											
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,50%	100%	100%	100%	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,16%	100%	100%	100%	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,86%	100%	100%	100%	
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85,96%	100%	100%	100%	
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100%	100%	64,70%	100%	100%	100%	89.78%	100%	100%	100%	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	65,29%	100%	100%	100%	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan telaah capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan tahun 2021-2026 dibandingkan dengan target yang tertuang dalam dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, SPM, SDGs) maka indikator yang belum tercapai dan menjadi isue strategis adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya angka kematian ibu. Adapun faktor penyebab kematian ibu maternal adalah eklampsia, perdarahan, emboli, gagal jantung (decompensasicordis).
2. Masih tingginya angka kematian bayi. Adapun faktor penyebab kematian bayi adalah BBLR, asfiksia, kelainan bawaan, ikterus, dan penyebab lain.
3. Masih tingginya angka kematian balita. Adapun faktor penyebab kematian balita adalah pneumonia dan infeksi pencernaan.
4. Masih ditemukannya gizi buruk pada balita. Adapun faktor penyebab adalah penyakit infeksi, pola asuh yang kurang baik.
5. Masih tingginya angka kesakitan pada penyakit menular (DBD, HIV/AIDS, kusta, TB, filariasis). Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat serta lingkungan yang kurang sehat.
6. Kecenderungan meningkatnya penyakit tidak menular (hipertensi, DM, jantung) dan gangguan kejiwaan. Hal ini disebabkan oleh gaya hidup dan pola makanyang tidak sehat serta lingkungan sosial yang tidak mendukung.
7. Masih kurangnya sarana, prasarana pendukung pelayanan kesehatan baik sarana medis, sarana penunjang pelayanan medis dan non medis.
8. Masih kurangnya akses/jangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar terutama di daerah perbatasan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dokumen Rancangan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2025 program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak mengalami perubahan sesuai Rancangan Awal RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Kesehatan Kota Pekalongan akan menampung, bila ada usulan progam/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD lain yang langsung ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas Kesehatan Kota Pekalongan dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Adapun Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut

TABEL 2.3
USULAN PROGRAM/KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KOTA PEKALONGAN

PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
		KECAMATAN	KELURAHAN			
1	2	3	4	5	6	7
		NIHIL				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.

Dalam Renstra Kementrian Kesehatan Tahun 2020-2025 disusun sasaran strategis pembangunan kesehatan juga arah kebijakannya.

Sasaran strategis pembangunan kesehatan nasional sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
5. Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar
6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan
7. Meningatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
8. Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

Arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional tahun 2020-2025, diarahkan pada :

1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP pemerintah dan FKTP swasta
2. Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intrevensi secara kontinum (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif
3. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit
4. Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan didukung inovasi teknologi
5. Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas, termasuk integrasi lintas program

Sedangkan arah kebijakan pembangunan kesehatan di Kota Pekalongan pada dokumen RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada
2. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit
3. Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program.
4. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
5. Penataan pondasi keberlanjutan program peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Sedangkan arah kebijakan pembangunan kesehatan di Kota Pekalongan pada dokumen Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Mutu Pelayanan KB Sesuai Standar di Puskesmas dan RS
2. Mempersiapkan 14 (empat belas) Puskesmas menjadi Puskesmas Mampu Persalinan
3. Peningkatan cakupan imunisasi melalui Posyandu dan peningkatan peran CSR
4. Semua persalinan baik di Fasyankes pertama maupun rujukan wajib melaksanakan IMD, implementasi Perda ASI Eksklusif
5. Semua balita kurang gizi mendapatkan Makanan Tambahan (PMT) dan balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan lewat Posyandu maupun secara mendiri
6. Penjaringan Suspek TB Paru dengan kunjungan rumah dan pemeriksaan kontak erat pada kasus BTA Positif
7. Penjaringan dan edukasi masyarakat untuk pemeriksaan secara teratur minimal 6 bulan sekali
8. Peningkatan pelayanan dan pelatihan petugas serta pendidikan dan pemberdayaan masyarakat untuk penanganan penderita gangguan jiwa berat
9. Implementasi Perda KTR, lomba PHBS dan monitoring KTR di sekolah, tempat umum dan tempat kerja serta tempat ramah anak
10. Monitoring penggunaan air bersih untuk rumah tangga dan penyakit yang ditularkan melalui air
11. Meningkatkan cakupan ODF dan Monitoring jamban keluarga pada 27 Kelurahan
12. Penambahan dukungan anggaran untuk terwujudnya Universal Health Coverage
13. Meningkatkan implementasi SOP Pelayanan Publik dalam mendukung capaian kinerja
14. Meningkatkan dukungan administrasi Perkantoran
15. Meningkatkan dukungan ketercukupan sarpras Aparatur

16. Optimalisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan
17. Optimalisasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
18. Penerapan system pengendalian internal pemerintahan

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran Renja OPD Dinas Kesehatan tahun 2025, disesuaikan dengan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Pekalongan tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan :
   a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
   b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
2. Sasaran
   a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
   b. Meningkatnya indeks keluarga sehat

3.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Sasaran Srategis sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka disusunlah program-program Dinas Kesehatan Kota. Di tahun 2025 Dinas Kesehatan Kota Pekalongan akan merencanakan 5 Program, 16 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Dinas Kesehatan Kota Pekalongan adalah sesuai tabel berikut :

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KOTA PEKALONGAN

PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**111.122.295.000**				**117.071.429.000**
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**111.122.295.000**				**117.071.429.000**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**		**100 Persen**	**67.359.728.000**			**100 Persen**	**61.322.578.000**
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**		**100 Persen**	**26.985.000**			**100 Persen**	**24.850.000**
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	3 Dokumen	8.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	2.750.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kelurahan						
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - OPD	Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-OPD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	3.485.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	1.650.000
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Laporan	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Laporan	20.450.000
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**		**100 Persen**	**65.452.026.000**			**100 Persen**	**59.246.370.000**
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	484 Orang/bulan	65.365.341.000	Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		484 Orang/bulan	59.164.320.000
1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD	Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	83.455.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	80.400.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	3.230.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	1.650.000
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**		**100 Persen**	**5.000.000**			**100 Persen**	**9.500.000**
1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Peket	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Peket	9.500.000
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**		**100 persen**	**330.700.000**			**100 persen**	**325.000.000**
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	3.650..000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	5.000.000
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	4 Paket	91.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	100.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kelurahan						
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	5.480.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	7.500.000
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	64.420.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	70.000.000
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	14.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	20.000.000
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	1.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	2.500.000
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	260 Laporan	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		260 Laporan	120.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 Persen**	**1.167.587.000**			**100 Persen**	**1.109.892.000**
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	440.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	600.000
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	625.383.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	753.750.000
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	541.764.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	355.542.000
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 Persen**	**377.430.000**			**100 Persen**	**606.966.000**
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	35 Unit	183.980.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35 Unit	434.616.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		dibayarkan Pajaknya	Semua Kelurahan						
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	146.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	93.075.000
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	47.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	79.275.000
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**		**90 Persen**	**41.322.472.000**			**90 Persen**	**53.146.428.000**
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Fasyankes (Puskesmas dan RSUD)**		**100 Persen**	**13.379.107.000**			**100 Persen**	**14.714.921.000**
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Keluaran : Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		3 Unit	2.350.000.000	Dak Fisik-Bidang Kesehatan Dan Kb-Reguler-Pelayanan Kesehatan		3 Unit	2.350.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Dasar, Dau Yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan			
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	3.367.515.000	Dak Fisik-Bidang Kesehatan Dan Kb-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar, Dau Yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan		1 Unit	79.730.000
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	329.560.000	Dau Yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan		4 Unit	3.356.439.000
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Keluaran : Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	89.930.000	Dau Yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan		1 Unit	428.188.725

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Fasilitas Kesehatan Lainnya							
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	790.710.000	Dak Fisik-Bidang Kesehatan Dan Kb-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar, Dau Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		5 Unit	2.712.040.000
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77 Unit	191.724.000	Dak Non Fisik-Bokkb-Bok, Dau Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		77 Unit	582.000.000
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Keluaran : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Pakat	6.174.508.000	Dak Non Fisik-Bokkb-Bok, Dau Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang		3 Pakat	5.141.523.275

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Kesehatan			
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Keluaran : Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	85.160.000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		12 Paket	65.000.000
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan**		**100 Persen**	**27.876.065.000**			**100 Persen**	**38.213.472.000**
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6006 Orang	91.250.000	Dau Yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan		6006 Orang	127.000.000
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5462 Orang	141.650.000	Dau Yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan		5462 Orang	26.070.000
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.314 Orang	114.190.000	Dau Yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan		18.314 Orang	208.745.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.000 Orang	72.380.000	Dau Yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan		45.000 Orang	144.446.000
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	210.465 Orang	32.820.000	Dau Yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan		210.465 Orang	44.950.000
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.783 Orang	19.750.000	Dau Yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan		36.783 Orang	39.415.000
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76.872 Orang	4.810.000	Dau Yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan		76.872 Orang	8.830.000
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standa	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.148 Orang	4.600.000	Dau Yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan		14.148 Orang	8.830.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.013 Orang	8.410.000	Dau Yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan		1.013 Orang	15.380.000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.836 Orang	30.160.000	Dau Yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan		6.836 Orang	41.305.000
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16.169 Orang	24.170.000	Dau Yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan		16.169 Orang	33.105.000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	149.370.000	Dau Yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan		4 Dokumen	617.300.000
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	35.870.000	Dau Yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan		2 Dokumen	83.350.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	124.940.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	230.116.000
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1.087.768.000	Dak Non Fisik-Bokkb-Bok, Dau Yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan		1 Dokumen	1.347.034.750
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	261.190.000	Dau Yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan		3 Dokumen	1.113.784.000
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	24.000.000.000	Dbh Cukai Hasil Tembakau (Cht), Pendapatan Bagi Hasil Pajak, Dau Yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang		1 Dokumen	31.799.476.250

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Kesehatan			
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	34.490.000	Dau Yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan		1 Dokumen	87.400.000
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	1.605.987.000,00	Dau Yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan		2 Dokumen	1.391.061.000
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	23.360.000	Dau Yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan		2 Dokumen	80.620.000
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**Terlaksananya pemeliharaan sarana komunikasi data dan informasi**		**100 Persen**	**16.430.000**			**100 Persen**	**76.280.000**
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	16.430.000	Dau Yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan		1 Dokumen	76.280.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Fasyankes yang diberikan rekomendasi tepat waktu**		**100 Persen**	**50.870.000**			**100 Persen**	**141.755.000**
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52 Unit	50.870.000	Dau Yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan		52 Unit	141.755.000
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek**		**95 Persen**	**708.181.000**			**95 Persen**	**114.039.000**
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase penerbitan rekomendasi Surat Ijin Praktek tenaga kesehatan tepat waktu**		**100 Persen**	**708.181.000**			**100 Persen**	**114.039.000**
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	708.181.000	Dak Non Fisik-Bokkb-Bok, Dau Yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan		2 Dokumen	114.039.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar**		**100 Persen**	**120.784.000**			**100 Persen**	**678.502.000**
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Persentase apotek, toko obat dan toko alat kesehatan yang dilakukan pengawasan**		**100 persen**	**43.671.000**			**100 persen**	**119.277.000**
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	43.671.000	Dau Yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan		2 Dokumen	119.277.000
1.02.04.2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Persentase Pangan Industri Rumah Tangga yang dilakukan pengawasan**		**100 Persen**	**41.523.000**			**100 Persen**	**481.023.000**
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	41.523.000	Dak Non Fisik-Bokkb-Pengawasan Obat Dan Makanan, Dau Yang Ditentukan		5 Dokumen	481.023.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				Penggunaanny a Bidang Kesehatan			
1.02.04.2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang dilakukan pengawasan**		**95 Persen**	**35.590.000**			**95 Persen**	**78.202.000**
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	35.590.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	78.202.000
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga Sehat**		**94 Persen**	**1.611.130.000**			**95 Persen**	**1.809.882.000**
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Posyandu dengan Strata Mandiri**		**34 persen**	**1.566.090.000**			**35 Persen**	**1.681.882.000**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	1.566.090.000	Dak Non Fisik-Bokkb-Pengawasan Obat Dan Makanan, Dau Yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan		3 Dokumen	1.681.882.000
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Puskesmas yang melaksanakan Promosi Kesehatan**		**100 Persen**	**45.040.000**			**100 Persen**	**128.000.000**
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Seha	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	45.040.000	Dau Yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan		2 Dokumen	128.000.000

PERANGKAT DAERAH : UPT PUSKESMAS BENDAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**3.375.725.000**				**3.375.725.000**
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**3.375.725.000**				**3.375.725.000**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**		**100 Persen**	**2.580.000.000**			**100 Persen**	**2.580.000.000**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD**		**100 Persen**	**2.580.000.000**			**100 Persen**	**2.580.000.000**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit Kerja	2.580.000.000	Pendapatan Dari BLUD		1 Unit Kerja	2.580.000.000
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**		**92 Persen**	**891.807.000**			**92 Persen**	**891.807.000**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat**	**Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP**		**100 Persen 100 Persen 100 Persen**	**891.807.000**			**100 Persen 100 Persen 100 Persen**	**891.807.000**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		4 Dokumen	891.807.000	Dak Non Fisik-Bokkb-Bokb		4 Dokumen	891.807.000

PERANGKAT DAERAH : UPT PUSKESMAS KRAMATSARI

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.729.560.000**				**1.805.682.000**
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1.729.560.000**				**1.805.682.000**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**		**100 Persen**	**1.050.000.000**			**100 Persen**	**1.805.682.000**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD**		**100 Persen**	**1.050.000.000**			**100 Persen**	**1.805.682.000**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit Kerja	1.050.000.000	Pendapatan Dari BLUD		1 Unit Kerja	1.805.682.000
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**		**92 Persen**	**679.560.000**			**92 Persen**	**679.504.000**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP**		**100 Persen 100 Persen 100 Persen**	**679.560.000**			**100 Persen 100 Persen 100 Persen**	**679.504.000**
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		4 Dokumen	679.560.000	Dak Non Fisik BOKKB-BOK		4 Dokumen	679.504.000

PERANGKAT DAERAH : UPT PUSKESMAS TIRTO

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**2.135.353.000**				**1.847.890.000**
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**2.135.353.000**				**1.847.890.000**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**		**100 Persen**	**1.280.000.000**			**100 Persen**	**1.250.000.000**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD**		**100 Persen**	**1.280.000.000**			**100 Persen**	**1.250.000.000**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit Kerja	1.280.000.000	Pendapatan Dari BLUD		1 Unit Kerja	1.250.000.000
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**		**92 Persen**	**855.353.000**			**92 Persen**	**855.353.000**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat**	**Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP**		**100 Persen 100 Persen 100 Persen**	**855.353.000**			**100 Persen 100 Persen 100 Persen**	**855.353.000**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		4 Dokumen	855.353.000	Dak Non Fisik BOKKB-BOK		4 Dokumen	855.353.000

PERANGKAT DAERAH : UPT PUSKESMAS MEDONO

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**2.125.238.000**				**1.815.228.000**
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**2.125.238.000**				**1.815.228.000**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**		**100 Persen**	**1.300.000.000**			**100 Persen**	**990.000.000**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD**		**100 Persen**	**1.300.000.000**			**100 Persen**	**990.000.000**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit Kerja	1.300.000.000	Pendapatan Dari BLUD		1 Unit Kerja	990.000.000
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**		**92 Persen**	**825.238.000**			**92 Persen**	**825.228.000**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP**		**100 Persen 100 Persen 100 Persen**	**825.238.000**			**100 Persen 100 Persen 100 Persen**	**825.228.000**
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		4 Dokumen	825.238.000	Dak Non Fisik BOKKB-BOK		4 Dokumen	825.228.000

PERANGKAT DAERAH : UPT PUSKESMAS NOYONTAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.621.032.000**				**1.621.032.000**
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1.621.032.000**				**1.621.032.000**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**		**100 Persen**	**1.113.430.000**			**100 Persen**	**1.113.430.000**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD**		**100 Persen**	**1.113.430.000**			**100 Persen**	**1.113.430.000**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit Kerja	1.113.430.000	Pendapatan Dari BLUD		1 Unit Kerja	1.113.430.000
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**		**92 Persen**	**507.602.000**			**92 Persen**	**507.602.000**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat**	**Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP**		**100 Persen 100 Persen 100 Persen**	**507.602.000**			**100 Persen 100 Persen 100 Persen**	**507.602.000**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		4 Dokumen	507.602.000	Dak Non Fisik BOKKB-BOK		4 Dokumen	507.602.000

PERANGKAT DAERAH : UPT PUSKESMAS TONDANO

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.971.089.000**				**1.653.909.000**
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1.971.089.000**				**1.653.909.000**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**		**100 Persen**	**1.312.180.000**			**100 Persen**	**995.000.000**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD**		**100 Persen**	**1.312.180.000**			**100 Persen**	**995.000.000**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit Kerja	1.312.180.000	Pendapatan Dari BLUD		1 Unit Kerja	995.000.000
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**		**92 Persen**	**658.909.000**			**92 Persen**	**658.909.000**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP**		**100 Persen 100 Persen 100 Persen**	**658.909.000**			**100 Persen 100 Persen 100 Persen**	**658.909.000**
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		4 Dokumen	658.909.000	Dak Non Fisik BOKKB-BOK		4 Dokumen	658.909.000

PERANGKAT DAERAH : UPT PUSKESMAS KLEGO

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.985.596.000**				**1.841.646.000**
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1.985.596.000**				**1.841.646.000**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**		**100 Persen**	**1.214.450.000**			**100 Persen**	**1.070.500.000**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD**		**100 Persen**	**1.214.450.000**			**100 Persen**	**1.070.500.000**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit Kerja	1.214.450.000	Pendapatan Dari BLUD		1 Unit Kerja	1.070.500.000
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**		**92 Persen**	**771.146.000**			**92 Persen**	**771.146.000**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat**	**Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP**		**100 Persen 100 Persen 100 Persen**	**771.146.000**			**100 Persen 100 Persen 100 Persen**	**771.146.000**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		4 Dokumen	771.146.000	Dak Non Fisik BOKKB-BOK		4 Dokumen	771.146.000

PERANGKAT DAERAH : UPT PUSKESMAS SOKOREJO

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**2.123.266.000**				**2.123.266.000**
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**2.123.266.000**				**2.123.266.000**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**		**100 Persen**	**1.460.880.000**			**100 Persen**	**1.460.880.000**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD**		**100 Persen**	**1.460.880.000**			**100 Persen**	**1.460.880.000**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit Kerja	1.460.880.000	Pendapatan Dari BLUD		1 Unit Kerja	1.460.880.000
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**		**92 Persen**	**662.386.000**			**92 Persen**	**662.386.000**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP**		**100 Persen 100 Persen 100 Persen**	**662.386.000**			**100 Persen 100 Persen 100 Persen**	**662.386.000**
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		4 Dokumen	662.386.000	Dak Non Fisik BOKKB-BOK		4 Dokumen	662.386.000

PERANGKAT DAERAH : UPT PUSKESMAS DUKUH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.741.815.000**				**1.705.813.000**
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1.741.815.000**				**1.705.813.000**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**		**100 Persen**	**1.095.000.000**			**100 Persen**	**1.058.998.000**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD**		**100 Persen**	**1.095.000.000**			**100 Persen**	**1.058.998.000**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit Kerja	1.095.000.000	Pendapatan Dari BLUD		1 Unit Kerja	1.058.998.000
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**		**92 Persen**	**646.815.000**			**92 Persen**	**646.815.000**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat**	**Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP**		**100 Persen 100 Persen 100 Persen**	**646.815.000**			**100 Persen 100 Persen 100 Persen**	**646.815.000**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		4 Dokumen	646.815.000	Dak Non Fisik BOKKB-BOK		4 Dokumen	646.815.000

PERANGKAT DAERAH : UPT PUSKESMAS KRAPYAK KIDUL

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**2.055.917.000**				**2.191.719.000**
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**2.055.917.000**				**2.191.719.000**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**		**100 Persen**	**1.480.000.000**			**100 Persen**	**1.650.000.000**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD**		**100 Persen**	**1.480.000.000**			**100 Persen**	**1.650.000.000**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit Kerja	1.480.000.000	Pendapatan Dari BLUD		1 Unit Kerja	1.650.000.000
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**		**92 Persen**	**575.917.000**			**92 Persen**	**541.719.000**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP**		**100 Persen 100 Persen 100 Persen**	**575.917.000**			**100 Persen 100 Persen 100 Persen**	**541.719.000**
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		4 Dokumen	575.917.000	Dak Non Fisik BOKKB-BOK		4 Dokumen	541.719.000

PERANGKAT DAERAH : UPT PUSKESMAS KUSUMA BANGSA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**3.013.385.000**				**3.013.385.000**
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**3.013.385.000**				**3.013.385.000**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**		**100 Persen**	**2.176.805.000**			**100 Persen**	**2.176.805.000**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD**		**100 Persen**	**2.176.800.000**			**100 Persen**	**2.176.800.000**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit Kerja	2.176.805.000	Pendapatan Dari BLUD		1 Unit Kerja	2.176.805.000
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**		**92 Persen**	**836.585.000**			**92 Persen**	**836.585.000**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat**	**Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP**		**100 Persen 100 Persen 100 Persen**	**836.585.000**			**100 Persen 100 Persen 100 Persen**	**836.585.000**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		4 Dokumen	836.585.000	Dak Non Fisik BOKKB-BOK		4 Dokumen	836.585.000

PERANGKAT DAERAH : UPT PUSKESMAS JENGGOT

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.987.333.000**				**1.987.333.000**
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1.987.333.000**				**1.987.333.000**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**		**100 Persen**	**1.335.700.000**			**100 Persen**	**1.335.700.000**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD**		**100 Persen**	**1.335.700.000**			**100 Persen**	**1.335.700.000**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit Kerja	1.335.700.000	Pendapatan Dari BLUD		1 Unit Kerja	1.335.700.000
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**		**92 Persen**	**651.633.000**			**92 Persen**	**651.633.000**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP**		**100 Persen 100 Persen 100 Persen**	**651.633.000**			**100 Persen 100 Persen 100 Persen**	**651.633.000**
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		4 Dokumen	651.633.000	Dak Non Fisik BOKKB-BOK		4 Dokumen	651.633.000

PERANGKAT DAERAH : UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**3.260.381.000**				**4.878.151.000**
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**3.260.381.000**				**4.878.151.000**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**		**100 Persen**	**2.374.335.000**			**100 Persen**	**2.020.695.000**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD**		**100 Persen**	**2.374.335.000**			**100 Persen**	**2.020.695.000**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit Kerja	2.374.335.000	Pendapatan Dari BLUD		1 Unit Kerja	2.020.695.000
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**		**92 Persen**	**886.046.000**			**92 Persen**	**2.857.456.000**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat**	**Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP**		**100 Persen 100 Persen 100 Persen**	**886.046.000**			**100 Persen 100 Persen 100 Persen**	**2.857.456.000**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		4 Dokumen	886.046.000	Dak Non Fisik BOKKB-BOK		4 Dokumen	2.857.456.000

PERANGKAT DAERAH : UPT PUSKESMAS BUARAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.749.000.000**				**1.749.000.000**
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1.749.000.000**				**1.749.000.000**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**		**100 Persen**	**734.000.000**			**100 Persen**	**734.000.000**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD**		**100 Persen**	**734.000.000**			**100 Persen**	**734.000.000**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit Kerja	734.000.000	Pendapatan Dari BLUD		1 Unit Kerja	734.000.000
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**		**92 Persen**	**1.015.000.000**			**92 Persen**	**1.015.000.000**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP**		**100 Persen 100 Persen 100 Persen**	**1.015.000.000**			**100 Persen 100 Persen 100 Persen**	**1.015.000.000**
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		4 Dokumen	1.015.000.000	Dak Non Fisik BOKKB-BOK		4 Dokumen	1.015.000.000

PERANGKAT DAERAH : UPTD BALAI PELAYANAN DAN SAINTIFIKASI JAMU

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**453.074.000**				**1.321.886.000**
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**453.074.000**				**1.321.886.000**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**		**100 Persen**	**220.000.000**			**100 Persen**	**421.661.000**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD**		**100 Persen**	**220.000.000**			**100 Persen**	**421.661.000**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit Kerja	**220.000.000**	Pendapatan Dari BLUD		1 Unit Kerja	421.661.000
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**		**92 Persen**	**233.074.000**			**92 Persen**	**900.225.000**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat**	**Persentase Layanan BPSJ**		**100 Persen 100 Persen 100 Persen**	**233.074.000**			**100 Persen 100 Persen 100 Persen**	**900.225.000**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		1 Dokumen	233.074.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	900.225.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2025 mengacu kepada RKPD Tahun 2025, mempunyai program, kegiatan dan sub kegiatan yang berbeda seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Rencana kerja dan pendanaan Dinas kesehatan Kota Pekalongan untuk tahun 2025 sebesar Rp. 142.450.059.000. Rencana kerja dan pendanaan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini:

TABEL 4.1

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN KOTA PEKALONGAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
DINAS KESEHATAN				
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**111.122.295.000**		
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**111.122.295.000**		
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**67.359.728.000**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja** **Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah**	**100 persen** **100 persen**
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**26.985.000**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 persen**
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.500.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.485.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**65.452.026.000**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 persen**
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	65.365.341.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	484 Orang/bulan
1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	83.455.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.230.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**5.000.000**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 persen**
1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**330.700.000**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100 persen**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.650.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.250.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.480.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.420.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.600.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.300.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260 Laporan
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.167.587.000**	**Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	440.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	625.383.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	541.764.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**377.430.000**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	183.980.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	146.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.450.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**41.322.472.000**	**Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar**	**90 persen**
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**13.379.107.000**	**Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Fasyankes (Puskesmas dan RSUD)**	**100 persen**
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	2.350.000.000	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.367.515.000	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	329.560.000	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2 Unit
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	89.930.000	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	790.710.000	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5 Unit
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	191.724.000	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	77 Unit
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	6.174.508.000	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	85.160.000	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	12 Paket

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**27.876.065.000**	**Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP**	**100 persen**
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	91.250.000	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6006 Orang
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	141.650.000	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5462 Orang
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	114.190.000	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18314 Orang
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	72.380.000	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	45000 Orang
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	32.820.000	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	210465 Orang
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	19.750.000	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36783 Orang
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	4.810.000	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	76872 Orang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	4.600.000	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14148 Orang
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8.410.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1013 Orang
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	30.160.000	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6836 Orang
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	24.170.000	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	16169 Orang
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	149.370.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	35.870.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	124.940.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.087.768.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	261.190.000	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3 Dokumen
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	24.000.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	34.490.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.605.987.000	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	8.900.000	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	15 Unit
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	23.360.000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	2 Dokumen
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**16.430.000**	**Terlaksananya pemeliharaan sarana komunikasi data dan informasi**	**100 persen**
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	16.430.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**50.870.000**	**Persentase Fasyankes yang diberikan rekomendasi tepat waktu**	**100 persen**
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	50.870.000	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	52 Unit
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**708.181.000**	**Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek**	**95 persen**
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**708.181.000**	**Persentase penerbitan rekomendasi Surat Ijin Praktek tenaga kesehatan tepat waktu**	**100 persen**
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	708.181.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dokumen
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**120.784.000**	**Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar**	**100 persen**
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**43.671.000**	**Persentase apotek, toko obat dan toko alat kesehatan yang dilakukan pengawasan**	**100 persen**
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	43.671.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	2 Dokumen

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
			(UMOT)	
1.02.04.2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**41.523.000**	**Persentase Pangan Industri Rumah Tangga yang dilakukan pengawasan**	**100 persen**
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	41.523.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	5 Dokumen
1.02.04.2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**35.590.000**	**Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang dilakukan pengawasan**	**95 persen**
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	35.590.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	2 Dokumen
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**1.611.130.000**	**Persentase Rumah Tangga Sehat**	**94 persen**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.566.090.000**	**Persentase Posyandu dengan Strata Mandiri**	**34 persen**
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.566.090.000	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3 Dokumen
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**45.040.000**	**Persentase Puskesmas yang melaksanakan Promosi Kesehatan**	**100 persen**
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	45.040.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen
UPT PUSKESMAS BENDAN				
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**3.375.725.000**		
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**3.375.725.000**		
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.580.000.000**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**	**100 persen**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**2.580.000.000**	**Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD**	**100 persen**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.580.000.000	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**891.807.000**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92 persen
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**891.807.000**	**Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP**	**100 persen**
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	891.807.000	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen
UPT PUSKESMAS KRAMATSARI				
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1.729.560.000**		
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**1.729.560.000**		
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.050.000.000**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**	**100 Persen**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.050.000.000**	**Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD**	**100 Persen**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.050.000.000	Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**679.560.000**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**	**92 Persen**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**679.560.000**	**Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP**	**100 Persen 100 Persen 100 Persen**
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	679.560.000	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen
UPT PUSKESMAS TIRTO				
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**2.135.353.000**		
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**2.135.353.000**		
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.280.000.000**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**	**100 Persen**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.280.000.000**	**Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD**	**100 Persen**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.280.000.000	Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**855.353.000**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**	**92 Persen**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**855.353.000**	**Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP**	**100 Persen 100 Persen 100 Persen**
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	855.353.000	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen
UPT PUSKESMAS MEDONO				
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**2.125.238.000**		
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**2.125.238.000**		
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.300.000.000**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**	**100 Persen**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.300.000.000**	**Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD**	**100 Persen**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.300.000.000	Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**825.238.000**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**	**92 Persen**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**825.238.000**	**Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP**	**100 Persen 100 Persen 100 Persen**
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	825.238.000	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen
UPT PUSKESMAS NOYONTAAN				
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1.621.032.000**		
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**1.621.032.000**		
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.113.430.000**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**	**100 Persen**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.113.430.000**	**Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD**	**100 Persen**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.113.430.000	Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**507.602.000**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**	**92 Persen**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**507.602.000**	**Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP**	**100 Persen 100 Persen 100 Persen**
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	507.602.000	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen
UPT PUSKESMAS TONDANO				
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1.971.089.000**		
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**1.971.089.000**		
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.312.180.000**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**	**100 Persen**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.312.180.000**	**Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD**	**100 Persen**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.312.180.000	Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**658.909.000**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**	**92 Persen**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**658.909.000**	**Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP**	**100 Persen 100 Persen 100 Persen**
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	658.909.000	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen
UPT PUSKESMAS KLEGO				
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1.985.596.000**		
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**1.985.596.000**		
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.214.450.000**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**	**100 Persen**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.214.450.000**	**Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD**	**100 Persen**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.214.450.000	Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**771.146.000**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**	**92 Persen**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**771.146.000**	**Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP**	**100 Persen 100 Persen 100 Persen**
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	771.146.000	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen
UPT PUSKESMAS SOKOREJO				
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**2.123.266.000**		
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**2.123.266.000**		
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.460.880.000**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**	**100 Persen**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.460.880.000**	**Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD**	**100 Persen**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.460.880.000	Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**662.386.000**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**	**92 Persen**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**662.386.000**	**Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP**	**100 Persen 100 Persen 100 Persen**
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	662.386.000	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen
UPT PUSKESMAS DUKUH				
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1.741.815.000**		
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**1.741.815.000**		
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.095.000.000**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**	**100 Persen**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.095.000.000**	**Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD**	**100 Persen**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.095.000.000	Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**646.815.000**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**	**92 Persen**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**646.815.000**	**Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP**	**100 Persen 100 Persen 100 Persen**
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	646.815.000	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen
UPT PUSKESMAS KRAPYAK KIDUL				
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**2.055.917.000**		
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**2.055.917.000**		
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.480.000.000**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**	**100 Persen**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.480.000.000**	**Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD**	**100 Persen**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.480.000.000	Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**575.917.000**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**	**92 Persen**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**575.917.000**	**Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP**	**100 Persen 100 Persen 100 Persen**
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	575.917.000	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen
UPT PUSKESMAS KUSUMA BANGSA				
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**3.013.385.000**		
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**3.013.385.000**		
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.176.805.000**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**	**100 Persen**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**2.176.800.000**	**Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD**	**100 Persen**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.176.805.000	Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**836.585.000**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**	**92 Persen**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**836.585.000**	**Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP**	**100 Persen 100 Persen 100 Persen**
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	836.585.000	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen
UPT PUSKESMAS JENGGOT				
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1.987.333.000**		
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**1.987.333.000**		
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.335.700.000**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**	**100 Persen**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.335.700.000**	**Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD**	**100 Persen**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.335.700.000	Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**651.633.000**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**	**92 Persen**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**651.633.000**	**Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP**	**100 Persen 100 Persen 100 Persen**
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	651.633.000	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN				
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**3.260.381.000**		
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**3.260.381.000**		
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.374.335.000**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**	**100 Persen**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**2.374.335.000**	**Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD**	**100 Persen**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.374.335.000	Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**886.046.000**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**	**92 Persen**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**886.046.000**	**Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP**	**100 Persen 100 Persen 100 Persen**
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	886.046.000	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen
UPT PUSKESMAS BUARAN				
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1.749.000.000**		
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**1.749.000.000**		
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**734.000.000**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**	**100 Persen**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**734.000.000**	**Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD**	**100 Persen**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	734.000.000	Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1.015.000.000**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**	**92 Persen**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.015.000.000**	**Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP**	**100 Persen 100 Persen 100 Persen**
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.015.000.000	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen
UPTD BALAI PELAYANAN DAN SAINTIFIKASI JAMU				
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**453.074.000**		
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**453.074.000**		
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**220.000.000**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**	**100 Persen**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**220.000.000**	**Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD**	**100 Persen**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	**220.000.000**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**233.074.000**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**	**92 Persen**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**233.074.000**	**Persentase Layanan BPSJ**	**100 Persen 100 Persen 100 Persen**
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	233.074.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab Pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan tatakelola Pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan adalah Program Tahunan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Pekalongan ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025. Dengan Renja, pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Pekalongan.

Pekalongan, 7 Agustus 2024
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PEKALONGAN

Dr. SLAMET BUDIYANTO, S.K.M., M.Kes.
NIP. 19710118 199303 1 005

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

GERMAS

Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025

RENCANA KERJA
RSUD BENDAN
TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekalongan dilaksanakan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangaunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan tersebut, daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan program/kegiatan satu tahun sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen Rencana Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja RSUD Bendan Kota Pekalongan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja-PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA, PPAS dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA APBD Tahun Anggaran 2025.
3. Renja-PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Renja-PD Tahun 2025 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Penyusunan Renja Tahun 2025 berpedoman pada RKPD 2025 yang sasaran pokok arah kebijakannya mengacu pada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Renja Tahun 2025 dalam penyusunannya diarahkan untuk mewujudkan Visi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan, yaitu ***"Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius"***

Renja Tahun 2025 dalam penyusunannya juga diarahkan untuk mewujudkan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan. Terdapat 7 (tujuh) Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan.
3. Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman.
4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan.
5. Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal.
6. Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah.
7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Goverment*.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum RSUD Bendan Kota Pekalongan dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5).

10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 8).
11. Peraturan Wali Kota Pekalongan No. 23 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA RSUD Bendan Kota Pekalongan Tahun 2025.

Sedangkan tujuan disusunnya Renja adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja RSUD Bendan Kota Pekalongan Tahun 2025, meliputi:

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang penyusunan rencana kerja, landasan hukum atau Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja, penjelasan mengenai maksud dan tujuan, serta sistematika bahasan tiap bab dalam Renja Perangkat Daerah.

BAB II

HASIL EVALUSASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

dan Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang Penelaahan Visi, Misi, Program Walikota Dan Wakil Walikota serta Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisikan Rencana Kerja Kegiatan, Capaian Kinerja yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah, Pagu Program dan Kegiatan.

BAB V

PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja RSUD Bendan Kota Pekalongan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis RSUD Bendan Kota Pekalongan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Renja RSUD Bendan Kota Pekalongan ini menyajikan dasar Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh RSUD Bendan Kota Pekalongan selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota menjadi bahan bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota untuk tahun berikutnya.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023 tersaji dalam tabel T-C.29. Jika dilihat dari tabel, capaian indikator sampai dengan tahun 2023 sebagian besar sudah tercapai.

Terdapat 2 Sub kegiatan yang sudah tidak dilaksanakan oleh RSUD karena RSUD yang statusnya berganti menjadi UOBK dari Dinas Kesehatan dan 2 sub kegiatan yang sumber pendanaannya sudah docover dengan dana BLUD diantaranya :

1. Penyusunan dokumen Restra Perangkat Daerah
2. Penyusunan dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP)
3. Kegiatan akreditasi/persiapan akreditasi RSUD Bendan Kota Pekalongan
4. Penyediaan makanan dan minuman

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2023
RSUD Bendan Kota Pekalongan

No	Indikator Urusan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (2021)	Realisasi 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d. Tahun 2023	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Realisasi 2023			
1	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*	*9*	*10*	*11*
Urusan Kesehatan										
1.	Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan	persen	100	100	100	100	100	100	100	tercapai
	- Jumlah gedung fasilitas pelayanan kesehatan yang direhabilitasi	unit	1	0	0	1	0	0	0	Belum tercapai
	- Jumlah gedung fasilitas pelayanan kesehatan yang dibangun	unit	1	1	0	0	1	100	100	tercapai
	- Jumlah ambulan yang diadakan (DAK)	unit	0	1	0	0	0	100	100	tercapai
	- Jumlah IPAL yang diadakan (DAK)	unit	0	1	0	0	0	100	100	tercapai
	- Jumlah genset yang diadakan (DAK)	unit	1	0	1	0	1	100	100	tercapai

	- Jumlah alat-alat kesehatan yang diadakan	unit	120	64	70	30	92	162	135	tercapai
	- Jumlah DAK yang dikelola	kegiatan	1	1	1	1	1	1	100	tercapai
2.	Persentase layanan kesehatan RS tipe C	persen	100	100	100	100	100	100	100	tercapai
	- Jumlah audit maternal/neonatal yang dilaksanakan	kali	10	6	3	2	3	6	60	Belum tercapai
	- Jumlah kegiatan akreditasi/persiapan akreditasi RSUD Bendan Kota Pekalongan yang dilaksanakan	kali	1	1	0	1	0	0	0	
3.	Persentase pelaksanaan pengukuran kepuasan pelaggan	persen	100	100	100	100	100	100	100	tercapai
	- Jumlah dokumen Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat yang disusun		10	2	2	2	2	4	40	Belum tercapai
4.	Persentase perawat yang terkredensial	persen	100	100	100	100	100	100	100	tercapai
	- Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota	org/kali	13	13	13	13	13	13	100	tercapai
	- Jumlah perawat dan bidan yang mengikuti kredensial/ rekredensial	orang	100	37	20	20	180	200	200	tercapai

1.	Persentase perawat/bidan yang bersertifikat pelatihan pengembangan kompetensi	persen	20	20	20	20	80	80	400	tercapai
	- Jumlah perawat dan bidan yang mengikuti diklat pengembangan kompetensi	orang	200	20	40	40	100	140	70	Belum tercapai
5.	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100	tercapai
	- Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun	dokumen	10	2	2	2	2	4	40	Belum tercapai
	- Jumlah dokumen renstra yang disusun	dokumen	0	-	-	-	-			
	- Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	dokumen	10	2	2	2	2	4	40	Belum tercapai
	- Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	bulan	12	12	12	12	12	12	100	tercapai
	- Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)	dokumen	10	2	2	2	2	4	40	Belum tercapai
	- Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan	dokumen	5	-		-				

	(RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun									
6.	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	bulan	12	12	12	12	12	12	12	tercapai
	- Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	dokumen	4	1	1	1	1	2	50	tercapai
7.	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	persen	100	100	100	100	100	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	bulan	12	12	12	12	12	12	100	tercapai
8.	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100	tercapai
	- Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	Org/kali	455	166	56	105	24	80	18	Belum tercapai
	- Penyediaan makanan dan minuman	orang	-	-		-				

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, tersaji pada tabel T-C.30. berdasarkan tabel tersebut, 18 indikator SPM tidak memenuhi target yang direncanakan antara lain:

1. Kematian pasien ≤ 24 jam
2. Jam Visite Dokter Spesialis
3. Kematian pasien >48 jam
4. Kejadian kematian Ibu karena persalinan (Sepsis ≤ 0,2%)
5. Kemampuan menangani BBLR 1500 gr ≤ 2500 gr
6. Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria
7. Rata-rata pasien yang kembali keperawatan intensif dengan kasus yang sama ≤ 72jam
8. Pemberian pelayanan unit intensif
9. Pelaksanaan ekspertisi radiologi
10. Waktu tunggu pelayanan obat jadi
11. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat
12. Penulisan resep sesuai formularium
13. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan
14. Kelengkapan Informed consent setelah mendapatkan informasi yang jelas
15. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun
16. Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap
17. Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah di rumah sakit
18. Ada anggota Tim PPI yang terlatih

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah RSUD Bendan Kota Pekalongan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
I.	IGD										
	1. Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	2. Jam buka Pelayanan Gawat Darurat	24 jam		24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	Tercapai
	3. Pemberi pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	4. Ketersediaan tim penanggulangan bencana	1 tim		1 tim	1 tim	1 tim	3 tim	3 tim	1 tim	1 tim	Tercapai
	5. Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat	<5 menit		<5 menit	<5 menit	<5 menit	1 menit 24 detik	1 menit 09 detik	<5 menit	<5 menit	Tercapai
	6. Kepuasan pelanggan pada Gawat Darurat	>70%		>70%	>70%	>70%	92,64%	92,92%	>70%	>70%	Tercapai
	7. Kematian pasien < 24 jam	<2‰		<2‰	<2‰	<2‰	1,72%	6,60%	<2‰	<2‰	Belum Tercapai
	8. Tidak adanya pasien yang harus membayar uang muka	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
II.	RAWAT JALAN										
	1. Dokter Pemberi pelayanan di Klinik spesialis	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai

	2. Ketersediaan pelayanan	Klinik anak, penyakit dalam, kebidanan bedah		Klinik anak, penyakit dalam, kebidanan bedah	Klinik anak, penyakit dalam, kebidanan bedah	Klinik anak, penyakit dalam, kebidanan bedah	Tersedia	Tersedia	Klinik anak, penyakit dalam, kebidanan bedah	Klinik anak, penyakit dalam, kebidanan bedah	Tercapai
	3. Jam Buka pelayanan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	4. Waktu tunggu di rawat jalan	<60 menit		<60 menit	<60 menit	<60 menit	80 menit 23 detik	33 menit 76 detik	<60 menit	<60 menit	Tercapai
	5. Kepuasan pelanggan pada Rawat Jalan	>90%		>90%	>90%	>90%	91,74%	96,04%	>90%	>90%	Tercapai
	6. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB dg strategi DOTS	>60%		>60%	>60%	>60%	90,02%	85,93%	>60%	>60%	Tercapai
	7. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	>60%		>60%	>60%	>60%	100%	99,47%	>60%	>60%	Tercapai
III.	RAWAT INAP										
	1. Pemberian pelayanan rawat inap	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	2. Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	3. Ketersediaan pelayanan rawat inap	Anak, penyakit dalam, kebidanan, bedah		Anak, penyakit dalam, kebidanan, bedah	Anak, penyakit dalam, kebidanan, bedah	Anak, penyakit dalam, kebidanan, bedah	Tersedia	Tersedia	Anak, penyakit dalam, kebidanan, bedah	Anak, penyakit dalam, kebidanan, bedah	Tercapai
	4. Jam Visite Dokter Spesialis	100%		100%	100%	100%	91,32%	94,32%	100%	100%	Belum Tercapai
	5. Kejadian Infeksi pasca operasi	≤1,5%		≤1,5%	≤1,5%	≤1,5%	0%	0,09%	≤1,5%	≤1,5%	Tercapai
	6. Kejadian infeksi nosokomial	≤1,5%		≤1,5%	≤1,5%	≤1,5%	0,01%	0,25%	≤1,5%	≤1,5%	Tercapai
	7. Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai

	8. Kematian pasien > 48 jam	≤0,24%		≤0,24%	≤0,24%	≤0,24%	1,63%	2,43%	≤0,24%	≤0,24%	Belum Tercapai
	9. Kejadian pulang paksa	≤5%		≤5%	≤5%	≤5%	1,30%	2,07%	≤5%	≤5%	Tercapai
	10. Kepuasan pelanggan rawat inap	≥90%		≥90%	≥90%	≥90%	95,11%	91,67%	≥90%	≥90%	Tercapai
	11. Rawat Inap TB										
	a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB	≥60%		≥60%	≥60%	≥60%	100%	87,15%	≥60%	≥60%	Tercapai
	b. Terlaksananya Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan TB	≥60%		≥60%	≥60%	≥60%	100%	100%	≥60%	≥60%	Tercapai
IV.	BEDAH SENTRAL										
	1. Waktu tunggu operasi efektif	≤2 hari		≤2 hari	≤2 hari	≤2 hari	0,56%	0,68%	≤2 hari	≤2 hari	Tercapai
	2. Kejadian kematian di meja operasi	≤1%		≤1%	≤1%	≤1%	0%	0%	≤1%	≤1%	Tercapai
	3. Tidak adanya kejadian salah sisi	100%		100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	100%	Tercapai
	4. Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%		100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	100%	Tercapai
	5. Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%		100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	100%	Tercapai
	6. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	100%		100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	100%	Tercapai
	7. Komplikasi anestesi overdosis, reaksi dan salah penempatan ET	≤6%		≤6%	≤6%	≤6%	0%	0%	≤6%	≤6%	Tercapai
V.	PERSALINAN, PERINATOLOGI										
	1. Kejadian kematian Ibu karena persalinan										
	a. Perdarahan	≤1%		≤1%	≤1%	≤1%	0,95%	0,92%	≤1%	≤1%	Tercapai
	b. Pre-Eklamsia	≤30%		≤30%	≤30%	≤30%	0,42%	0,73%	≤30%	≤30%	Tercapai

	c. Sepsis	≤0,2%		≤0,2%	≤0,2%	≤0,2%	0,00%	50,00%	≤0,2%	≤0,2%	Belum Tercapai
	2. Pemberi layanan persalinan normal	100%		100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	100%	Tercapai
	3. Pemberi layanan persalinan dengan penyulit	Tim PONEK terlatih		Tim PONEK terlatih	Tim PONEK terlatih	Tim PONEK terlatih	Tersedia Tim PONEK	Tersedia Tim PONEK	Tim PONEK terlatih	Tim PONEK terlatih	Tercapai
	4. Pemberi layanan persalinan dengan tindakan operasi	100%		100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	100%	Tercapai
	5. Kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr	100%		100%	100%	100%	98,46%	98,95%	100%	100%	Belum Tercapai
	6. Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	≤20%		≤20%	≤20%	≤20%	39,32%	44,79%	≤20%	≤20%	Belum Tercapai
	7. a. Keluarga Berencana	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	b. Konseling KB Mantap	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	8. Kepuasan pelanggan	≥ 80%		≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	100%	96,30%	≥ 80%	≥ 80%	Tercapai
VI.	INTENSIF										
	1. Rata-rata pasien yang kembali keperawatan intensif dengan kasus yang sama ≤ 72jam	≤3%		≤3%	≤3%	≤3%	0,19%	3,57%	≤3%	≤3%	Belum Tercapai
	2. Pemberian pelayanan unit intensif	100%		100%	100%	100%	87,76%	88,00%	100%	100%	Belum Tercapai
VII.	RADIOLOGI										
	1. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	<3 jam		<3 jam	<3 jam	<3 jam	0,98	0,85	<3 jam	<3 jam	Tercapai
	2. Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	kerusakan foto <2%		kerusakan foto <2%	kerusakan foto <2%	kerusakan foto <2%	1,45%	0,73%	kerusakan foto <2%	kerusakan foto <2%	Tercapai
	3. Pelaksanaan ekspertisi	100%		100%	100%	100%	91,73%	96,76%	100%	100%	Belum Tercapai
	4. Kepuasan pelanggan	>80%		>80%	>80%	>80%	97,46%	97,92%	>80%	>80%	Tercapai
VIII.	LAB.PATOLOGI KLINIK										
	1. Waktu tunggu pelayanan Laboratorium	<140 menit		<140 menit	<140 menit	<140 menit	42,30 menit	44,06 menit	<140 menit	<140 menit	Tercapai
	2. Pelaksanaan Ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai

	3. Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	4. Kepuasan pelanggan	80%		80%	80%	80%	99,42%	99,66%	80%	80%	Tercapai
IX.	REHABILITASI MEDIK										
	1. Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan	<50%		<50%	<50%	<50%	10,09%	14,06%	<50%	<50%	Tercapai
	2. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	3. Kepuasan pelanggan	>80%		>80%	>80%	>80%	96,83%	96,50%	>80%	>80%	Tercapai
X	FARMASI										
	1. Waktu tunggu pelayanan										
	a. Obat Jadi	<30 menit		<30 menit	<30 menit	<30 menit	22,61 menit	51,56 menit	<30 menit	<30 menit	Belum Tercapai
	b. Obat Racikan	<60 menit		<60 menit	<60 menit	<60 menit	38,49 menit	48,47 menit	<60 menit	<60 menit	Tercapai
	2. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%		100%	100%	100%	99,998%	99,998%	100%	100%	Belum Tercapai
	3. Kepuasan pelanggan	>80 %		>80 %	>80 %	>80 %	95,10%	96,22%	>80 %	>80 %	Tercapai
	4. Penulisan resep sesuai formularium	100%		100%	100%	100%	99,999%	99,99%	100%	100%	Belum Tercapai
XI.	GIZI										
	1. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	>90%		>90%	>90%	>90%	99,94%	100%	>90%	>90%	Tercapai
	2. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	<20%		<20%	<20%	<20%	12,56%	10,73%	<20%	<20%	Tercapai
	3. Tidak adanya kesalahan dalam pemberian Diet	100%		100%	100%	100%	99,996%	100%	100%	100%	Tercapai
XII.	TRANSFUSI DARAH										
	1. kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	2. Kejadian reaksi transfusi	<0,01%		<0,01%	<0,01%	<0,01%	0%	0%	<0,01%	<0,01%	Tercapai

XIII.	PELAYANAN GAKIN Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
XIV.	REKAM MEDIK										
	1. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam	100%		100%	100%	100%	82,54%	99,75%	100%	100%	Belum Tercapai
	2. Kelengkapan Informed consent	100%		100%	100%	100%	99,57%	98,82%	100%	100%	Belum Tercapai
	3. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	<10 menit		<10 menit	<10 menit	<10 menit	39,61 menit	1 menit	<10 menit	<10 menit	Tercapai
	4. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	<15 menit		<15 menit	<15 menit	<15 menit	3,74 menit	3,64 menit	<15 menit	<15 menit	Tercapai
XV.	PENGELOLAAN LIMBAH										
	1. Baku mutu limbah cair	100%		100%	100%	100%	94,05%	94,05%	100%	100%	Tercapai
	2. Pengelolaan limbah padat infeksius dengan aturan	100%		100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	100%	Tercapai
XVI.	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN										
	1. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	2. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	3. Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	4. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun	≥60%		≥60%	≥60%	≥60%	89,40%	32,41%	≥60%	≥60%	Belum Tercapai
	5. Kelengkapan Laporan Akuntabilitas kinerja	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	6. Cost Recovery	≥40%		≥40%	≥40%	≥40%	89,88%	96,48%	≥40%	≥40%	Tercapai
	7. Ketepatan waktu penyusunan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai

	laporan Keuangan 8. Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap 9. Kecepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	≤2 Jam 100%		≤2 Jam 100%	≤2 Jam 100%	≤2 Jam 100%	244,11 menit 91,67%	188,81 menit 100%	≤2 Jam 100%	≤2 Jam 100%	Belum Tercapai Tercapai
XVII.	AMBULANCE / KERETA JENAZAH 1. Waktu pelayanan ambulance (kereta jenazah) 2. Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah	24 Jam 100%		24 Jam 100%	24 Jam 100%	24 Jam 100%	24 Jam 99,22%	24 Jam 99,21%	24 Jam 100%	24 Jam 100%	Tercapai Belum Tercapai
XVIII.	PELAYANAN JENAZAH Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah	≤2 Jam		≤2 Jam	≤2 Jam	≤2 Jam	0,47 menit	29,15 menit	≤2 Jam	≤2 Jam	Tercapai
XIX.	PELAYANAN PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT 1. Ketepatan waktu pemeliharaan alat 2. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat 3. Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100% ≥80 % 100%		≥80 % 100% 100%	≥80 % 100% 100%	≥80 % 100% 100%	98,43% 85,02% 100%	100% 87,42% 100%	≥80 % 100% 100%	≥80 % 100% 100%	Tercapai Tercapai Tercapai
XX.	PELAYANAN LAUNDRY 1. Tidak adanya kejadian linen yang hilang 2. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk rawat inap	100% 100%		100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	Tercapai Tercapai

XXI.	PPI 1. Ada anggota Tim PPI yang terlatih 2. Tersedia APD di setiap instalasi/ departemen 3. Kegiatan Pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/HAI (min 1 Parameter)	75% 75% 75%		75% 75% 75%	75% 75% 75%	75% 75% 75%	100% 100% 100%	4,35% 100% 100%	75% 75% 75%	75% 75% 75%	Belum Tercapai Tercapai Tercapai

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis isu strategis yang berasal dari internal rumah sakit adalah sebagai berikut:

1. Mutu pelayanan yang belum optimal dapat dilihat dari beberapa indikator SPM yang belum tercapai.
2. Indikator Mutu Pelayanan rumah sakit seperti BOR, ALOS, TOI, BTO, NDR dan GDR yang belum maksimal pencapaiannya. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit.
3. Belum cukupnya penerimaan BLUD mengcover seluruh biaya operasional.
4. Jumlah tenaga kesehatan belum memadai.
5. SIM rumah sakit belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan unit pelayanan dan kebutuhan eksternal.

Analisis isu strategis yang berasal dari eksternal rumah sakit adalah sebagai berikut:

1. Perubahan perilaku yang mengakibatkan perubahan pola penyakit.
2. Kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat dan canggih mendorong masyarakat menuntut ketersediaan akses informasi pelayanan kesehatan melalui sistem informasi manajemen yang cepat dan akurat.
3. Banyaknya layanan kesehatan rujukan di Kota Pekalongan, menyebabkan tingkat persaingan dalam industri kesehatan di Kota Pekalongan menjadi semakin ketat.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.

Beberapa perubahan dalam proses analisis perubahan diantaranya adanya Sub kegiatan yang dilebur menjadi satu dengan Sub kegiatan lain dengan pertimbangan perampingan dan efesiensi Sub kegiatan agar lebih optimal dalam menampung target outpun maupun anggaran. Indikator kinerja pada Renja 2025 juga sudah disesuaikan dan disinkronkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarakan sinkronisasi tersebut, sebagian besar indikator kinerja sub kegiatan di RSUD Bendan mengalami perubahan dan harus diikuti oleh perubahan dalam rincian belanja sub kegiatan.

Analisis kebutuhan anggaran juga berubah mengikuti kemampuan anggaran (APBD) Kota Pekalongan sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan.

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 RSUD Bendan Kota Pekalongan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp 000)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**105.988.886,-**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**104.813.530,-**	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1. Presentase ketersediaan layanan BLUD 2. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja 3. Presentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi	100% 100% 100%	**95.860.580,-**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1. Presentase ketersediaan layanan BLUD 2. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja 3. Presentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi	100% 100% 100%	**103.181.840,-**	

			umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah					umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	**12.000,-**	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	**12.000,-**	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RSUD Bendan	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	2.500,-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RSUD Bendan	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	2.500,-	
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokume RKA SKPD	RSUD Bendan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dok	1.500,-	Koordinasi dan Penyusunan Dokume RKA SKPD	RSUD Bendan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dok	1.500,-	

1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD Bendan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 lap	8.000,-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD Bendan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 lap	8.000,-	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100%	**49.095,-**	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100%	**49.300,-**	
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	RSUD Bendan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dok	47.595,-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	RSUD Bendan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dok	47.800,-	
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	RSUD Bendan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	1.500,-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	RSUD Bendan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	1.500,-	

1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100%	**799.485,-**	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100%	**20.540,-**	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD Bendan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 laporan	799.485,-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD Bendan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 lap	20.540,-	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase ketercapaian peningkatan pelayanan BLUD	100%	**95.000,000,-**	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase ketercapaian peningkatan pelayanan BLUD	100%	**103.100.000,-**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Bendan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	95.000.000,-	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Bendan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	103.100.000,-	

1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	72,50%	**10.066.747,-**	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	70%	**1.584.190,-**	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan	100%	**9.730.847,-**	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan	100%	1.500.000,-	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Bendan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 unit	9.730.847,-	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Bendan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	15 unit	1.500.000,-	

1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP	100%	**225.900,-**	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP	100%	**21.109,-**	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	900 orang	45.000,-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 orang	21.109,-	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan persiapan akreditasi RSUD Bendan Kota Pekalongan yang dilaksanakan	1 kali	180.900,-	-	-	-	-	-	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota		Persentase pelaksanaan pengukuran kepuasan pelanggan	100%	**110.000,-**	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota		Persentase pelaksanaan pengukuran kepuasan pelanggan	100%	**60.230,-**	

1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 unit	110.000,-	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	27 unit	60.230,-	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Presentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	60%	**61.559,-**	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Presentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	55%	**50.381,-**	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase perawat dan bidan yang terkredensial	100%	**48.225,-**	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase perawat dan bidan yang terkredensial	100%	**38.571,-**	

1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)	1 orang	34.891,-	-	-	-	-	-	
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 dok	13.334,-	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 dok	98.571,-	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase perawat/bidan yang bersertifikat pelatihan pengembangan kompetensi	20%	**13.334,-**	Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase perawat/bidan yang bersertifikat pelatihan pengembangan kompetensi	20%	**11.810,-**	

1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	96 orang	13.334,-	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	90 orang	18.810,-	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota. Dalam hal ini, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang ditujukan kepada RSUD Bendan.

Tabel T-C.32

Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

RSUD Bendan Kota Pekalongan

Nama Perangkat Daerah : RSUD Bendan

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	NIHIL				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 48 Tahun 2013 tentang Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah, RSUD Bendan adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui lima strategi, yaitu peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi; percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda; peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit; pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan penguatan sistem kesehatan.

Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Peningkatan sumber daya kesehatan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan, yaitu meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan

Rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehtan rujukan perannya diarahkan tidak hanya berfokus pada pelayanan kuratif dan rehabilitatif untuk mengejar *revenue*, tetapi harus mempunyai peran dalam program prioritas, seperti penurunan kematian maternal, penurunan kematian bayi, penurunan *stunting*, penurunan *wasting*, dan juga pengendalian penyakit.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi. Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai Program Perangkat Daerah terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih juga menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Berpedoman pada RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026, misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang berkaitan dengan kesehatan adalah misi 1, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Uraian tujuan pada misi tersebut adalah:

Tujuan:

a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
c. Sasaran:
d. Meningkatnya indeks keluarga sehat
e. Meningkatnya penanganan kemiskinan

RSUD Bendan sebagai unit pelaksana teknis dari Dinas Kesehatan Kota Pekalongan mengacu pada tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan. Tujuan Dinas Kesehatan adalah:

a. Meningkatkan kualitas layanan publik
b. Meningkatkan indeks keluarga sehat.

Sasaran Dinas Kesehatan adalah:

a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
b. Tercapainya kinerja standar pelayanan minimal kesehatan.

IKU Dinas Kesehatan adalah:

a. Nilai SAKIP OPD.
b. Persentase capaian SPM Kesehatan.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada RSUD Bendan, mengacu pada program Dinas Kesehatan, sebagai berikut:

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 RSUD Bendan Kota Pekalongan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**104.813.530.000,-**				**111.006.618.000,-**
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4. Presentase ketersediaan layanan BLUD 5. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja 6. Presentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100% 100% 100%	**103.181.840.000,-**			100% 100% 100%	**100.872.682.000,-**

1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	**12.000.000,-**			100%	**11.000.000,-**
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RSUD Bendan	2 dokumen	2.500.000,-	DAU		2 dokumen	1.500.000,-
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokume RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RSUD Bendan	2 dokumen	1.500.000,-	DAU		2 dokumen	1.500.000,-
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	RSUD Bendan	10 laporan	8.000.000,-	DAU		10 laporan	8.000.000,-
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah		100%	**49.300.000,-**			100%	**50.108.000,-**
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	RSUD Bendan	12 dokumen	47.800.000,-	DAU		12 dokumen	48.608.000,-
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	RSUD Bendan	1 laporan	1.500.000,-	DAU		1 laporan	1.500.000,-

1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah		100%	**20.540.000,-**			100%	**811.574.000,-**
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD Bendan	20 laporan	20.540.000,-	DAU		20 laporan	811.574.000,-
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian peningkatan pelayanan BLUD		100%	**103.100.000.000,-**			100%	**100.000,000,000,-**
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	RSUD Bendan	1 unit kerja	103.100.000.000,-	DAU		1 unit kerja	100.000.000.000,-
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar		70%	**1.584.190.000,-**			70%	**10.071.446.000,-**
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan		100%	1.500.000.000,-			100%	**9.735.546.000,-**
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	RSUD Bendan	15 unit	1.500.000.000,-	DAK		15 unit	9.735.546.000,-

1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP		100%	**21.109.000,-**			100%	**225.900.000,-**
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		500 orang	21.109.000,-	DAU		500 orang	45.000.000,-
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan persiapan akreditasi RSUD Bendan Kota Pekalongan yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	1 kali	180.900.000,-
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Persentase pelaksanaan pengukuran kepuasan pelanggan		100%	**60.230.000,-**			100%	**110.000.000,-**
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan		27 unit	60.230.000,-	DAU		27 unit	110.000.000,-
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Presentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan		55%	**50.381.000,-**			55%	**62.490.000,-**
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan	Persentase perawat dan bidan yang terkredensial		100%	**38.571.000,-**			100%	**48.690.500,-**

	Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)	-	-	-	-	-	1 orang	34.891.000,-
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		12 dokumen	98.571.000,-	DAU		12 dokumen	13.799.500,-
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perawat/bidan yang bersertifikat pelatihan pengembangan kompetensi		20%	**11.810.000,-**			20%	**13.799.500,-**
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		90 orang	18.810.000,-	DAU		90 orang	13.799.500,-

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel T-C.34.

Rencana Program dan Kegiatan RSUD Bendan Kota Pekalongan Tahun 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**105.563.530.000,-**	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7. Presentase ketersediaan layanan BLUD 8. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja 9. Presentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100% 100% 100%	**103.181.840.000,-**	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	**12.000.000,-**	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RSUD Bendan	2 dokumen	2.500.000,-	DAU
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokume RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RSUD Bendan	2 dokumen	1.500.000,-	DAU

1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	RSUD Bendan	10 laporan	8.000.000,-	DAU
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah		100%	**49.300.000,-**	
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	RSUD Bendan	12 dokumen	47.800.000,-	DAU
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	RSUD Bendan	1 laporan	1.500.000,-	DAU
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah		100%	**20.540.000,-**	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD Bendan	20 laporan	20.540.000,-	DAU
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian peningkatan pelayanan BLUD		100%	**103.100.000.000,-**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	RSUD Bendan	1 unit kerja	103.100.000.000,-	DAU
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar		100%	**1.584.190.000,-**	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan		100%	**2.250.000.000,-**	

1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	RSUD Bendan	1 Unit	750.000.000,-	DAU
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	RSUD Bendan	15 unit	1.500.000.000,-	DAK
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP		100%	**21.109.000,-**	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	RSUD Bendan	500 orang	21.109.000,-	DAU
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Persentase pelaksanaan pengukuran kepuasan pelanggan		100%	**60.230.000,-**	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	RSUD Bendan	27 unit	60.230.000,-	DAU
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Presentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan		100%	**50.381.000,-**	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase perawat dan bidan yang terkredensial		100%	**38.571.000,-**	

1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	RSUD Bendan	12 dokumen	98.571.000,-	DAU
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perawat/bidan yang bersertifikat pelatihan pengembangan kompetensi		20%	**11.810.000,-**	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	RSUD Bendan	90 orang	18.810.000,-	DAU

BAB V
PENUTUP

Renja RSUD Bendan Kota Pekalongan Tahun 2025 ini disusun dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi serta target dan sasaran RSUD Bendan disesuaikan Arah Kebijakan dan Prioritas Program Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025.

Dalam rangka mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja RSUD Bendan Tahun 2025, RSUD Bendan mempertimbangkan seluruh potensi pendanaan baik dari APBD maupun yang bersumber dari APBN.

Kemudian dengan adanya Renja RSUD Bendan Kota Pekalongan Tahun 2025 ini maka diharapkan penetapan prioritas pembangunan Kota Pekalongan terutama Bidang Kesehatan dapat lebih terkoordinasi dan tersinergikan dengan Instansi/Perangkat Daerah serta stakeholder terkait di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Pekalongan, 8 Agustus 2023

Direktur RSUD Bendan
Kota Pekalongan

dr. Dwi Heri Wibawa, M.Kes

LAMPIRAN

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DOKUMEN

RENJA

RENCANA KERJA

DPUPR KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2025

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Renja Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2025 dapat diselesaikan. Rancangan Renja ini berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Tahunan ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah diselesaikan sesuai dengan RENJA tahun lalu dan kebijakan serta rencana kerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2025. Rencana Kerja Tahun 2025 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama 5 (lima) tahun, dimana rencana kerja ini disusun dalam upaya memberikan arah / pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama tahun 2025. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pekalongan, 1 Agustus 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang,
Kota Pekalongan

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DPUPR

BAMBANG SUGIARTO, ST.MM
NIP. 19710304 199903 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
Latar Belakang 1
Landasan Hukum 3
Maksud dan Tujuan 5
Sistematika Penulisan 7
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU 8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kota Pekalongan 8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan 11
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan 12
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 15
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 36
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 39
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 39
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 40
3.3 Program, Kegiatan dan sub Kegiatan 42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPUPR 60
BAB V PENUTUP 64

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah(OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja OPD disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerahsecara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Penetapan OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam system perencanaan daerah, karena Renja Penetapan-OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Penetapan OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat pada tahun 2025

Program, kegiatan, alokasi dan indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam Renja Penetapan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan disusun berdasarkan :

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
3. Urusan wajib Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengacu pada SPM Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan
4. Ruang sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan disusun dengan tahapan sebagai berikut:

A. Persiapan penyusunan Renja meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja; penyusunan agenda tim penyusun Renja dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
B. Penyusunan rancangan Renja mencakup :
    1. Perumusan yang meliputi persiapan penyusunan rancangan Renja Penetapan, pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan OPD, mereview hasil evaluasi Renja tahun lalu berdasarkan Renstra Perubahan Perubahan, penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, penelaahan rancangan awal RKPD Kota Pekalongan, perumusan tujuan dan sasaran; penelaahan usulan masyarakat; dan perumusan kegiatan prioritas.
    2. Penyajian Dokumen Renja Perangkat Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:
        a. Pendahuluan;
        b. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu;
        c. tujuan, sasaran, program dankegiatan;
        d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat
        e. penutup.
C. Pelaksanaan forum OPD

    Forum OPD membahas Pembahasan rancangan Renja Penetapan RKPD kabupaten/kota mencakup:

1. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi DPUPR Kota Pekalongan berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang keluarahan dan kecamatan;
2. Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi DPUPR Kota Pekalongan;
3. Penyelarasan program dan kegiatan antar OPD Kota Pekalongan dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing
4. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk DPUPR Kota Pekalongan, sesuai dengan surat edaran Walikota Pekalongan

D. Penetapan Renja OPD

Kepala DPUPR Kota Pekalongan menyempurnakan rancangan Renja dengan berpedoman pada RKPD Kota Pekalongan yang telah ditetapkan kemudian diverifikasi.

1.1 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2025 ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan daerah Istimewa Jogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota ketjil di Djawa
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomo 33, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 4700)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaiana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tentang Penetapan Peratiran Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 20222 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (lembaran negara Repubik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6757)
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah Tentag Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Ketja Pemerintah Daerah ;
16. Kepmendagri nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 20023 tentag Perubahan atas keputusan Menteri Dalam negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, valudasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
18. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2010 tentang rencana Tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah 2009-2029
20. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13).
21. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penetapan Atas Peraturan daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan.
22. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025
23. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan 2021-2026
24. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
25. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk :

1. Menjadi pedoman untuk mendukung capaian kinerja dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

2. Menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan tahun 2025 dalam menjalankan program dan kegiatannya;
3. Menjadi pedoman evaluasi kinerja sebagai rujukan perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan tahun 2025.

B. Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2025 disusun dengan tujuan untuk :

1. Sebagai dokumen perencanaan teknis strategis dan sebagai alat koordinasi sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Mencapai visi, misi, tujuan dan strategi kelembagaan serta kebijakan berdasarkan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dijabarkan dari Rancangan Awal RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025;
3. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi penyelenggaraan pelayanan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kota Pekalongan Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan Tahun 2021 -2026 (Tabel.T-C.29)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan (Tabel.T-30)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD (Tabel T-C.31)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel T-C.32)

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Penetapan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Kota Pekalongan

3.3. Program , Kegiatan sub kegiatan (Tabel T-C.33)

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kota Pekalongan

Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026.

Terdapat 12 (Program) program yang menjadi garapan wajib Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan pada tahun 2024. Penempatan program tersebut dilakukan dengan alasan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan telah berusaha sebaik mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan pertanahan di Kota Pekalongan, baik kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proporsional.

Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah dengan dapat dilaksanakannya seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja difokuskan pada pengukuran output dan outcome, sedangkan indikator benefit dan impact diukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya.

Kegiatan – kegiatan dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis dalam Renstra yaitu meningkatnya sarana dan prasarana jalan, mendukung indikator Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam RKPD Kota Pekalongan yaitu Penanganan Rob, kerusakan jalan dan jembatan segera teratasi, lampiran pada (Tabel T-C.29).

Tabel T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

No.	Indikator Program/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra 2021-2026	"Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (2021-2026)"	Realisasi Tahun 2022	2023		Realisasi Capaian Renstra s.d 2023	Persentae Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026	Status Capaian
						Target 2023	Realisasi Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1	Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik	persen	94.44	82.76		93.10	100.00	107.41	107.41	tercapai
	- Jumlah Sarpras Pengendali Banjir dan Rob dalam kondisi baik	unit	27	18		27	33	112	181	Belum tercapai
	- Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (IKK Output)	persen	85	78.74		82.57	82.57	100	96.2	Belum tercapai
2	Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	persen	92.11	85.77		88.39	67.42	69.50	73.19	Belum tercapai
	- Persentase Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kab/kota dilaksanakan	persen	100	100		100	100	100	100	tercapai
3	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan di Wilayah Kota	persen	68.06	33.33		40	20	0	20	Belum tercapai
	- Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan di Wilayah Kota	persen	100	0		40	0	0	0	Belum tercapai
4	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	persen	9.87	9.50		11.07	17.68	159.67	137.34	tercapai
	- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	persen	59,651	59,351		59,751	68,489	114.62	114.62	tercapai
5	Persentase drainase dalam kondisi baik	persen	71.49	66.45		68.47	68.58	93.96	95.93	Belum tercapai
	- Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	meter	177.142	164.642,18		169,642.18	178,504.65	105.22	100.77	tercapai

6	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	persen	18.74	17.24		17.84	17.34	96.63	92.52	Belum tercapai
	- Jumlah PBG yang diberikan oleh pemerintah Kab/Kota dalam Tahun Eksisting (IKK Output)	dokumen	1650	300		320	173	54.06	10.48	Belum tercapai
7	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	persen	86.57	81.12		83.30	83.77	102	96.76	Belum tercapai
	- Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik dan Sedang	Km	132,809	124,448		127.79	128.68	100.69	96.89	Belum tercapai
8	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	persen	21.20	7.87		13.20	7.61	67.90	35.89	Belum tercapai
	- Jumlah pelatihan tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	kali	5	1		1	1	100	40	Belum tercapai
	- Persentase informasi jasa konstruksi yang tersedia	persen	100	100		100	100	100	100	tercapai
9	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	persen	100	0		100	45.24	45.24	45.24	Belum tercapai
	- Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	persen	100	0		1	1	100	100	tercapai
	- Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang yang dilaksanakan	Kali	60	12		12	12	100	40	Belum tercapai
	- Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatan Tata Ruang yang dilaksanakan	Kali	60	12		12	12	100	40	Belum tercapai
	- Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang yang dilaksanakan	Kali	60	12		12	12	100	40	Belum tercapai
Program Rutin										
10	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100		100	100	100	100	tercapai
	- Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100	100		100	100	100	100	tercapai
	- Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	100		100	100	100	100	tercapai
11	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	100			100	100	100	tercapai
	- Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100	100	100	100	tercapai
	- Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	100		100	100	100	100	tercapai
	- Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100		100	100	100	100	tercapai

12	Persentase Pengadaan/ Pemeliharaan barang milik daerah	Persen		100		100	100	100	100	tercapai
	- Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100		100	100	100	100	tercapai
	- Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100		100	100	100	100	tercapai

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan

lampiran pada (Tabel.T-C.30)
Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Sakip OPD			84.50 Indeks	85.50 Indeks	86.50 Indeks	87.50 indeks	84.45 indeks	N/A	85.50 indeks	86.50 indeks	
2	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK Outcome)			98.80%	99.00%	99.20%	99.40%	100%	N/A	100%	100%	
3	Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir			77,88%	80,42%	82,98%	87,83%	77.88 %	N/A	82,98%	87,83%	
4	persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk			88,389%	89,659%	90,900%	92.115%	100%	N/A	100%	100%	
5	Pengembangan Sarana Persampahan			40%	60%	80%	100%	20%	N/A	80%	100%	
6	Persentase Peningkatan Kemantapan Jalan			1,09 %	1,09 %	1,09 %	1,09 %	2.19%	N/A	2.19%	2.19%	
7	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang			96.211%	96.219%	96.243%	96.251%	99.89%	N/A	96.243%	96.251%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan sebagai salah satu perangkat daerah yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Penataan Ruang berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, bagian kedua Tugas dan Fungsi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang, Bidang Tata Ruang dan Bangunan dan Bidang Cipta Karya

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari:
    1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
    2. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
d. Bidang Bina Marga, terdiri dari:
    1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
    2. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
e. Bidang Tata Ruang dan Bangunan terdiri dari:
    1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
    2. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
f. Bidang Cipta Karya terdiri dari:
    1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
    2. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
g. Kelompok Jabatan Fungional.

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan dapat digambarkan pada Gambar pada halaman berikut :

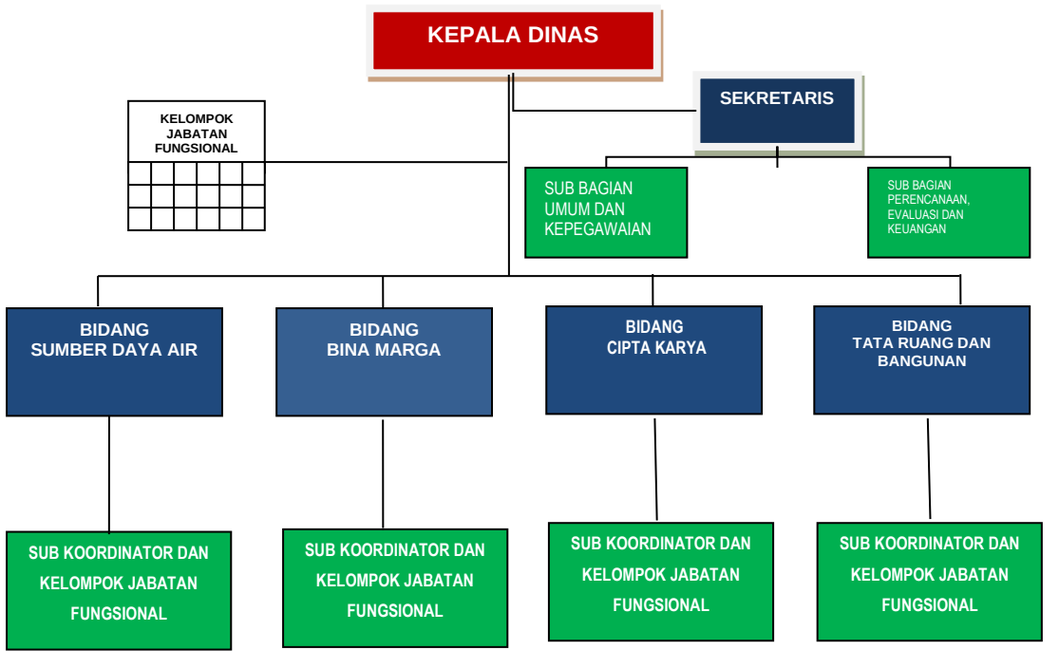

Permasalahan-permasalahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kota Pekalongan dalam pelayanan sebagai berikut :

1. Dalam Bidang Bina Marga khusus Jalan dan jembatan masih terbatasnya kualitas jaringan jalan dan jembatan, yang menjadikan faktor penghambatnya adalah Kapasitas jalan dan jembatan tidak sebanding dengan jumlah pengguna jalan sehingga terkadang mengalami hambatan jalan,

   Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain :

   a) Beberapa ruas jalan yang berada di daerah atau tergenang sehingga memberikan andil yang cukup besar terhadap kerusakan jalan dan jembatan
   b) Belum optimalnya fungsi jaringan drainase baik drainase jalan maupun sistem jaringan drainase kota;
   c) Air rob (banjir air laut) menggenangi sejumlah ruas jalan, upaya yang bisa dilakukan adalah dengan peninggian jalan supaya air rob tidak menggenangi jalan;
   d) Diberlakukannnya pengalihan jalan nasional dan banyaknya kendaraan berat jurusan luar kota memilih melewati jalan kota, upaya yang bisa dilakukan adalah melakukan peningkatan jalan terhadap jalan yang dimaksud.

2. Dalam bidang Sumber Daya Air Terjadi genangan air di lingkungan permukiman dalam waktu yang relatif lama dalam hal ini sering terjadi banjir dan rob.

   Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain :

a) Salah satu penyebab banjir rob saat ini melalui sungai dan drainase di wilayah kota Pekalongan yang merupakan kewenangan provinsi Jawa Tengah dan kabupaten pekalongan.
b) Besarnya investasi pendanaan untuk penyediaan infrastruktur pengendali banjir.

1. Dalam bidang Tata Ruang dan Bangunan Belum optimalnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain :

a) Belum tersedianya Rencana Detail Tata Ruang.
b) Belum adanya dokumen Rencana Rinci Tata Ruang yang menjadi dasar perijinan, sehingga saat ini baru mengandalkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pada Dokumen RPJMD Kota Pekalongan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan mendukung Urusan Perencanaan dengan tujuan dan indikator sasaran yang selaras dengan RPJMD, adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan adalah Misi ke -4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 yaitu Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan.

Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Kemacetan lalu lintas karena tidak ada jalur alternatif selain jalur utama Pantura;
2. Kurangnya pengendalian berat muatan kendaraan angkutan barang;
3. Kondisi topografis Kota Pekalongan menyulitkan pengaturan saluran drainase, yaitu dengan kemiringan lahan rata-rata antara 0-5%;
4. Genangan air yang diakibatkan meluapnya Sungai Pekalongan, Meduri dan Bremi;
5. Kawasan permukiman penduduk yang terdampak rob makin meluas
6. Target retribusi yang relatif tinggi;
7. Kesadaran masyarakat untuk mengajukan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) masih kurang;
8. Kompetensi SDM teknis PBG yang kurang memadai.

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Sudah tehubungnya akses Jalan Tol Trans Jawa;
2. Tersedianya stasiun pompa dan rumah pompa pengendali banjir;
3. Terbangunya polder oleh BBWS Pemali Juana Kementerian PUPERA dan juga adanya Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Dinas PSDA Provinsi Jateng yang memiliki kewenangan dalam hal pengelolaan Sumber Daya Air;
4. Banyak masyarakat yang mendirikan bangunan;
5. Tersedianya regulasi dibidang tata ruang mulai perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan .
6. Adanya instansi pelayanan perijinan satu pintu di Kota Pekalongan.

Isu Strategis berkaitan dengan infrastruktur sesuai dengan analisis permasalahan baik dari aspek geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing antara lain :

1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas jaringan jalan dan jembatan dengan berkomitmen pemerintah untuk penanggulangan kerusakan jalan, jembatan dan penanganan rob serta merehabilitasi infrastruktur jalan dan jembatan
2. pemenuhan ketersediaan sarana pengendali rob dan banjir dengan Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi jawa tengah serta kabupaten pekalongan untuk secara sinergi melakukan penanganan banjir dan rob. Mengoptimalkan peran serta pihak diluar pemerintah (masyarakat dan swasta) untuk bersama-sama terlibat aktif dalam penanganan banjir dan rob.
3. Optimalisasi penataan kawasan strategis dan ruang terbuka hijau kota (taman kota) yang mudah diakses oleh masyarakat dengan melakukan perbaikan Penataan kawasan stratergis yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota pekalongan dan Menambah SDM tenaga dalam pemeliharaan taman kota.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD Kota Pekalongan 2025 dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan, dengan arahan Walikota Pekalongan terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan

untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaraan Ruang Kota Pekalongan berdasarkan rancangan awal RKPD Kota Pekalongan 2025.

Review terhadap rancangan awal RKPD Kota Pekalongan 2025, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tahapan kegiatan telahaan yang dilakukan, adalah:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD Kota Pekalongan2025;
2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Menyajikan dalam bentuk matrik tabel, dengan menempatkan program/kegiatan yang sama pada garis yang sama untuk memudahkan analisis;
4. Melakukan pengecekan apakah program/kegiatan yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah termuat dalam rancangan awal RKPD. Jika belum termuat, maka perlu dibuatkan catatan penting;
5. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
6. Untuk jenis program dan kegiatan yang sesuai, dilakukan langkah berikut:
    a. Mengecek apakah indikator kinerjanya sesuai, jika tidak sesuai, maka menentukan indikator yang akan dipilih;
    b. Meneliti besaran tolok ukur atau target capaian program/kegiatan, bila terdapat perbedaan, maka mengkaji kembali besaran tersebut dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif, target capaian renstra serta ketersediaan sumber dana lainnya; dan
    c. Memberi catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan.
7. Untuk jenis program dan kegiatan yang tidak sesuai (berbeda), dilakukan langkah berikut:
    a. Untuk program dan kegiatan yang hanya terdapat di dalam rancangan awal RKPD Kota Pekalongan 2025, maupun yang hanya terdapat dalam

identifikasi kebutuhan hasil analisis,melakukan pengecekan apakah masih layak untuk direncanakan, dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata, sasaran target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, kebijakan nasional, pencapaian visi-misi kepala daerah, dan ketersediaan pendanaan;

b. Meneliti kembali kemudian tentukan indikator yang akan dipilih;
c. Meneliti kembali kemudian tentukan besaran tolok ukur atau target capaian program dan kegiatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif berdasarkan arahan rancangan awal RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025 target capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta ketersediaan sumber dana lainnya;
d. Memberi catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja SKPD.

8. Merumuskan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025 yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan; dan
9. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Rancangan awal Renja 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Pekalongan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan, tidak ada perubahan rumusan program dan kegiatan yang telah disusun. Proses perbandingan antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan untuk mengetahui sesuai/tidak sesuai, cocok/ketidakcocokan besarannya (anggaran/volume/satuan) terhadap program dan kegiatan yang sudah dirumuskan.

Lampiran tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Pekalongan

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100,00 persen**	**15.882.102.000,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100,00 persen**	**15.882.102.000,00**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	19.680.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	19.680.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.220.000,00		Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.220.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					

		Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.400.000,00		Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.400.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
		Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan	12.000.000,00		Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan	12.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	7.020.214.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	7.020.214.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
		Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	6.922.934.000,00		Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	6.922.934.000,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
		Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	95.000.000,00		Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	95.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					

		Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.280.000,00		Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.280.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	0,00		Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	0,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 Persen	34.387.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 Persen	34.387.000,00	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					
		Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	34.387.000,00		Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik	2 Laporan	34.387.000,00	

			pada SKPD					Daerah pada SKPD			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	16.520.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	16.520.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	5.000.000,00			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	5.000.000,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					
		Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	180 Orang	15.520.000,00		Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	180 Orang	15.520.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	612.500.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	612.500.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
		Kota Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.000.000,00		Kota Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.000.000,00	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	250.000.000,00		Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	250.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
		Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	0		Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	0	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
		Kota Pekalongan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	114.500.000,00		Kota Pekalongan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	114.500.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
		Kota Pekalongan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00		Kota Pekalongan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
		Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3.000.000,00		Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
		Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	150 Laporan	200.000.000,00		Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	150 Laporan	200.000.000,00	

			Konsultasi SKPD					Konsultasi SKPD			
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					
		Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9 Dokumen	10.000.000,00		Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9 Dokumen	10.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daera	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.330.467.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daera	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.330.467.000,00	
	Pengadaan Alat Besar									Pengadaan Alat Besar	
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	2.330.467.000,00			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	2.330.467.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	4.913.523.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	4.913.523.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
		Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	3.000.000,00		Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	3.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					

		Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4.500.000.000,00		Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4.500.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
		Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	410.523.000,00		Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	410.523.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	934.811.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	934.811.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
		Kota Pekalongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	48 Unit	575.000.000,00		Kota Pekalongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	48 Unit	575.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar					

		Kota Pekalongan	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	10 Unit	59.811.000,00		Kota Pekalongan	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	10 Unit	59.811.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
		Kota Pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	250.000.000,00		Kota Pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	250.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70 Unit	50.000.000,00		Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70 Unit	50.000.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		**Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik**	**93,10 persen**	**14.695.950.000,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**		**Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik**	**93,10 persen**	**14.695.950.000,00**	
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Sarpras Pengendali Banjir dan Rob dalam kondisi baik	39 unit	12.820.950.000,00	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Sarpras Pengendali Banjir dan Rob dalam kondisi baik	39 unit	12.820.950.000,00	
	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir					Pembangunan Stasiun Pompa Banjir					

		Kota Pekalongan	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	0 Unit	0,00		Kota Pekalongan	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	0 Unit	0,00	
	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir					Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir					
		Kota Pekalongan	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	10 Unit	1.612.500.000,00		Kota Pekalongan	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	10 Unit	1.612.500.000,00	
	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir					Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir					
		Kota Pekalongan	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	39 Unit	4.861.950.000,00		Kota Pekalongan	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	39 Unit	4.861.950.000,00	
	Normalisasi/Restorasi Sungai									Normalisasi/Restorasi Sungai	
		Kota Pekalongan	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Restorasi	0.4 KM	537.500.000,00		Kota Pekalongan	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Restorasi	0.4 KM	537.500.000,00	
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing					Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing					
		Kota Pekalongan	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0,159 KM	3.961.500.000,00		Kota Pekalongan	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0,159 KM	3.961.500.000,00	
	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing					Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing					

		Kota Pekalongan	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	0,348 KM	1.290.000.000,00		Kota Pekalongan	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	0,348 KM	1.290.000.000,00	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (IKK Output)	84.21 persen	1.875.000.000,00	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (IKK Output)	84.21 persen	1.875.000.000,00	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan					
		Kota Pekalongan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,151 KM	1.875.000.000,00		Kota Pekalongan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,151 KM	1.875.000.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		**Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah**	**90,90 persen**	**2.111.600.000,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**		**Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah**	**90,90 persen**	**2.111.600.000,00**	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Persentase Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) didaerah kab/kota dilaksanakan	100 Persen	2.111.600.000,00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Persentase Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) didaerah kab/kota dilaksanakan	100 Persen	2.111.600.000,00	

	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan									Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
		Kota Pekalongan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1 Unit	2.011.600.000,00		Kota Pekalongan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1 Unit	2.011.600.000,00	
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					
		Kota Pekalongan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	70 SR	100.000.000,00		Kota Pekalongan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	70 SR	100.000.000,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		**Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional**	**80,00 persen**	**4.892.114.000,00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**		**Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional**	**80,00 persen**	**4.892.114.000,00**	
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan di Wilayah Kota	80 Persen	4.892.114.000,00	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan di Wilayah Kota	80 Persen	4.892.114.000,00	
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS					Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS					

		Kota Pekalongan	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	0,112 Ton/hari	4.892.114.000,00		Kota Pekalongan	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	0,112 Ton/hari	4.892.114.000,00	
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan									Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	
		Kota Pekalongan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	0 Orang	0,00		Kota Pekalongan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	0 Orang	0,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		**Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)**	**12,27 persen**	**2.128.200.000,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**		**Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)**	**12,27 persen**	**2.128.200.000,00**	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T (IKK Output)	59951 unit	2.128.200.000,00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan	59951 unit	2.128.200.000,00	

								pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T (IKK Output)			
	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman					Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman					
		Kota Pekalongan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan	0,08 M³/Hari	0,00		Kota Pekalongan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan	0,08 M³/Hari	0,00	
	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman									Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
		Kota Pekalongan	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	0 Unit	803.200.000,00		Kota Pekalongan	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	0 Unit	803.200.000,00	
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja									Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	

		Kota Pekalongan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	150 Rumah Tangga	125.000.000,00		Kota Pekalongan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	150 Rumah Tangga	125.000.000,00	
	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)									Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
		Kota Pekalongan	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	0 Unit	0,00		Kota Pekalongan	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	0 Unit	0,00	
	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja									Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	
		Kota Pekalongan	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	0 Unit	0,00		Kota Pekalongan	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	0 Unit	0,00	
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat									Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	5 Rumah Tangga	1.000.000.000,00			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	5 Rumah Tangga	1.000.000.000,00	

	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		**Persentase drainase dalam kondisi baik**	**70,48 persen**	**6.059.076.000,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**		**Persentase drainase dalam kondisi baik**	**70,48 persen**	**6.059.076.000,00**	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	174642.18 meter	6.059.076.000,00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	174642.18 meter	6.059.076.000,00	
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan					Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan					
		Kota Pekalongan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	0 M	0,00		Kota Pekalongan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	0 M	0,00	
	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan					Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan					
		Kota Pekalongan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	0 Sistem Drainase Lingkungan	0,00		Kota Pekalongan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	0 Sistem Drainase Lingkungan	0,00	
	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan									Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	
		Kota Pekalongan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	8 Sistem Drainase Perkotaan	5.628.366.000,00		Kota Pekalongan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	8 Sistem Drainase Perkotaan	5.628.366.000,00	
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan									Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	

		Kota Pekalongan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	2 Sistem Drainase Perkotaan	0,00		Kota Pekalongan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	2 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan									Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	
		Kota Pekalongan	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan		Kota Pekalongan	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		**Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota**	**18,14 persen**	**1.097.910.000,00**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**		**Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota**	**18,14 persen**	**1.097.910.000,00**	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kota Pekalongan	Jumlah PBG yang diberikan oleh pemerintah Kab/Kota dalam Tahun Eksisting (IKK Output)	330 dokumen	1.097.910.000,00	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kota Pekalongan	Jumlah PBG yang diberikan oleh pemerintah Kab/Kota dalam Tahun Eksisting (IKK Output)	330 dokumen	1.097.910.000,00	
	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					

		Kota Pekalongan	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	2 Bangunan Gedung	2.131.408.000,00		Kota Pekalongan	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	2 Bangunan Gedung	2.131.408.000,00	
	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung					Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung					
		Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	3 Dokumen	300.000.000,00		Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	3 Dokumen	300.000.000,00	
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG					Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG					
		Kota Pekalongan	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	130 Dokumen	150.000.000,00		Kota Pekalongan	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis	130 Dokumen	150.000.000,00	

								(TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		**Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)**	**85,48 persen**	**23.804.998.600,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**		**Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)**	**85,48 persen**	**23.804.998.600,00**	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik dan Sedang	131.137 KM	23.804.998.600,00	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik dan Sedang	131.137 KM	23.804.998.600,00	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan					
		Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1 Dokumen	64.500.000,00		Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1 Dokumen	64.500.000,00	
	Penggantian Jembatan										

		Kota Pekalongan	Jumlah Jembatan yang Diganti	0 Jembatan	6.050.000.000,00		Kota Pekalongan	Jumlah Jembatan yang Diganti	0 Jembatan	6.050.000.000,00	
	Pembangunan Jalan										
		Kota Pekalongan	Panjang Jalan yang Dibangun	0 KM	0,00		Kota Pekalongan	Panjang Jalan yang Dibangun	0 KM	0,00	
	Rekonstruksi Jalan									Rekonstruksi Jalan	
		Kota Pekalongan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1,80 KM	9.287.695.600,00		Kota Pekalongan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1,80 KM	9.287.695.600,00	
	Pemeliharaan Rutin Jembatan										
		Kota Pekalongan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	5 Jembatan	323.470.000,00		Kota Pekalongan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	5 Jembatan	323.470.000,00	
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan										
		Kota Pekalongan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	150,607 KM	169.500.000,00		Kota Pekalongan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	150,607 KM	169.500.000,00	
	Rehabilitasi Jalan										
		Kota Pekalongan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0,09 KM	3.200.000.000,00		Kota Pekalongan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0,09 KM	3.200.000.000,00	

	Pemeliharaan Rutin Jalan										
		Kota Pekalongan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	2,5 KM	4.574.333.000,00		Kota Pekalongan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	2,5 KM	4.574.333.000,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		**Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi**	**18,53 persen**	**115.000.000,00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**		**Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi**	**18,53 persen**	**115.000.000,00**	
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Pekalongan	Jumlah pelatihan tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	1 kali	75.000.000,00	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Pekalongan	Jumlah pelatihan tenaga operator/teknisi/ analisis di wilayah Kabupaten/Kota	1 kali	75.000.000,00	
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi									Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	
		Kota Pekalongan	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga	25.000.000,00		Kota Pekalongan	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga	25.000.000,00	
	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis					Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis					
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	40 Orang	50.000.000,00			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	40 Orang	50.000.000,00	

	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Persentase informasi jasa konstruksi yang tersedia	100 Persen	40.000.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Persentase informasi jasa konstruksi yang tersedia	100 Persen	40.000.000,00	
	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota					Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota					
		Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	4 Dokumen	40.000.000,00		Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	4 Dokumen	40.000.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		**Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota**	**100,00 persen**	**360.000.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**		**Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota**	**100,00 persen**	**360.000.000,00**	
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan RTRW/RRTR	100 persen	25.000.000,00	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan RTRW/RRTR	100 persen	25.000.000,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang					Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang					
		Kota Pekalongan	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan	25.000.000,00		Kota Pekalongan	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan	25.000.000,00	

	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	110.000.000,00	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	110.000.000,00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang					Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang					
		Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	2 Dokumen	200.000.000,00		Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	2 Dokumen	200.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang yang dilaksanakan	12 kali	25.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang yang dilaksanakan	12 kali	25.000.000,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang					Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang					
		Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	25.000.000,00		Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	25.000.000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Langkah yang telah dilakukan dalam mengkaji usulan program dan kegiatan dari musrenbang kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Membuat desk batasan usulan program/kegiatan yang dapat diusulkan oleh masyarakat;
2. Menginventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat;
3. Menyesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku;
4. Meneliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan;
5. Bila belum lengkap melakukan konfirmasi (kalau memungkinkan), atau memberi catatan untuk dikonfirmasikan dengan hasil analisis kebutuhan;
6. Memeriksa apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Membuat rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

lampiran pada (Tabel.T-C.32)

Tabel T-C-32

Usulan Program/Kegaiatn dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kota Pekalongan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	15.882.102.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	19.680.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	34.387.000	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	16.520.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	612.500.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.330.467.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.913.523.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	934.811.000	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik	14.695.950.000	
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarpras Pengendali Banjir dan Rob dalam kondisi baik	12.820.950.000	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (IKK Output)	1.875.000.000	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	2.111.600.000	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) didaerah kab/kota dilaksanakan	2.111.600.000	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	200.000.000	
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan di Wilayah Kota	200.000.000	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	2.128.200.000	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T (IKK Output)	2.128.200.000	

6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Persentase drainase dalam kondisi baik	6.059.076.000	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	6.059.076.000	
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	2.581.408.000	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Jumlah PBG yang diberikan oleh pemerintah Kab/Kota dalam Tahun Eksisting (IKK Output)	2.581.408.000	
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	23.804.998.600	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik dan Sedang	23.804.998.600	
9	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	115.000.000	
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah pelatihan tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	75.000.000	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase informasi jasa konstruksi yang tersedia	40.000.000	
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	25.000.000	
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan RTRW/RRTR	25.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang yang dilaksanakan	25.000.000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2025, Kota Pekalongan antara lain sudah menjadi bagian dari Daftar Proyek Prioritas Strategis berupa Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa, berupa Teratasinya bencana banjir rob di DKI Jakarta, Semarang, Pekalongan, Demak, dan Cirebon. Proyek ini dilatarbelakangi oleh Banjir rob yang terjadi di beberapa kawasan perkotaan Pantai Utara Jawa (termasuk juga di Petanglong), serta kualitas air di 10 wilayah sungai di Kawasan Pantai Utara Pulau Jawa tercemar sedang hingga berat.

Sedangkan indikasi target yang akan diwujudkan adalah berupa Terpasangnya alat pemantauan penurunan tanah, terbangunnya tanggul laut dan bangunan pengaman pantai, terbangunnya SPALDT (Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat) permukiman dan Perkotaan, serta terbangunnya stasiun pemantauan kualitas air yang beroperasi secara kontinyu melalui Online Monitoring (ONLIMO). Selain itu, terdapat juga pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota dan Kawasan, Jalan Lingkar Pekalongan; serta Penyusunan peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana banjir.

Gambaran ringkas tersebut serta berbagai permasalahan dan isu strategis lain berdasarkan gambaran umum yang ada, maka perlu mempertimbangkan aspek sinergitas antara berbagai sumber daya dan pemerintahan di dalam penyusunan strategi dan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang kemudian akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Pekalongan dan masyarakat dalam mengimplementasikannya selama periode tahun 2021-2026.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2025, Kota Pekalongan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dari Wilayah Pengembangan Petanglong yang meliputi Kabupaten Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan. Simpul utama pada kawasan Petanglong adalah kawasan perkotaan Pekalongan dan sekitarnyam dengan sektor unggulan berupa pertanian, pariwisata, industri, dan perikanan dan Pedagang Kaki Lima.

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2025, maka Arah kebijakan pembangunan untuk wilayah Petanglong adalah "Pengembangan Wilayah Petanglong Berbasis Industri Pengolahan Kreatif dan Pertanian Dengan

Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan". Pengembangan wilayah Petanglong ini ditargetkan untuk bisa mencapai 4 (empat) indikator utama pada tahun 2025, yaitu Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00% sampai dengan 5,60%, Angka Kemiskinan pada kisaran 4,5% sampai dengan 9,13%; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,05% sampai dengan 5,55% serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kisaran 70,60 sampai dengan 75,13.

Untuk mencapai indikator makro tersebut maka dilakukan beberapa upaya, antara lain : Pemantapan konektivitas dan aksesibilitas; Pemenuhan kebutuhan air baku melalui pembangunan SPAM Regional Petanglong (Kabupaten Batang, Pekalongan dan Kota Pekalongan); serta Pengelolaan lingkungan diantaranya : utamanya rehabilitasi dan konservasi Kawasan Dieng (Pekalongan, Batang) serta Konservasi CAT Pekalongan – Pemalang; penanganan kerusakan pesisir; Penanganan Limbah Batik dan TPST Regional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan.

Sasaran merupakan target atau hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

a. Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan adalah :
    1) Meningkatkan kualitas layanan publik
    2) Pemenuhan layanan limbah domestik
    3) Penanganan banjir dan rob

4) Meningkatkan layanan air minum
5) Optimalisasi pelayanan sarana dan prasarana persampahan perkotaan
6) Meningkatkan layanan transportasi perkotaan
7) Mewujudkan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan tara ruang dan pemanfaatan ruang

b. Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan adalah:
1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
2) Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan limbah domestik dan jalan/jembatan lingkungan
3) Meningkatnya sarpras pengendali banjir dalam kondisi baik
4) Meningkatnya layanan air bersih perpipaan
5) Meningkatnya pengembangan sarana persampahan
6) Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan perkotaan
7) Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan tara ruang dan pemanfaatan ruang.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target
1.	Meningkatkan kualitas layanan publik		Indeks kepuasan masyarakat	78.62 Indeks
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	86.50 Indeks
2.	Pemenuhan layanan limbah domestik		Persentase layanan pengelolaan air limbah domestik	91.40%
		Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	99.20%
3.	Penanganan banjir dan rob		Luas genangan banjir dan rob	790 ha
		Meningkatnya sarpras pengendali banjir dalam kondisi baik	Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	82,98%
4.	Meningkatkan layanan air bersih perpipaan		Persentase penduduk yang mendapatkan akses layanan air minum	100%
		Meningkatnya layanan air bersih perpipaan	Persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk	90,900%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target
5	Optimalisasi pelayanan sarana dan prasarana persampahan perkotaan		Persentase prasarana persampahan dalam kondisi baik	61.11%
		Meningkatnya pengembangan sarana persampahan	Pengembangan sarana persampahan	80%
6	Meningkatkan layanan transportasi perkotaan		Persentase keterhubungan jalan	96,73%
		Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan perkotaan	Persentase peningkatan kemantapan jalan	1,09%
7	Mewujudkan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan tara ruang dan pemanfaatan ruang		Jumlah regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang	7 dokumen
		Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan tara ruang dan pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	96,243%

3.3 Program, Kegiatan dan sub Kegiatan

Faktor – faktor yang menjadikan bahan pertimbangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan dalam merumuskan program dan kegiatan, adalah disamping untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi OPD juga ada pertimbangan lain seperti :

1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

   Sesuai dengan visi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan terpilih, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 ini diarahkan untuk mencapai Visi "Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius". Dan telah dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi yang akan menjadi pemandu tugas bersama antara Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan mempunya tugas dan tanggungjawa untuk dapat mendukung misi ke 3,4 dan 7.

2. Pencapaian SDG's

   Penerapan Sdgs pada DPUPR mempunyai tujuan meningkatkan konektivitas jalan dan jembatan antar wilayah kota, dengan target mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur jaringan jalan yang nyaman, berkualitas dan merata serta dapat melayani warga kota termasuk warga yang berkebutuhan khusus.

3. Pengentasan kemiskinan

Melalui pembangunan dari infrastruktur kota beserta sarana dan prasarananya diharapkan dapat menimgkatkan kesejahteraan masyarakat yang selanjutka akan berdampak positif pada pengentasan kemiskinan yang ada pada Kota Pekalongan

4. Pencapaian NSPK dan SPM

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/ Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab/Kota, jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum terdiri atas penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

5. Pendayagunaan Potensi Daerah

Kota Pekalongan merupakan simpul strategis di koridor pantai Utara Pulau Jawa. Berdasarkan sistem pengembangan wilayah pun, Kota Pekalongan merupakan salah satu simpul pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini pun tidak terlepas dari perkembangan perekonomian di Kota Pekalongan yang didominasi oleh sumbangan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; dan Konstruksi. Tidak dapat dipungkiri bahwa Kota Pekalongan berkembang dengan batik sebagai penggerak perekonomian wilayah, di samping sektor andalan lainnya yang terus dikembangkan yaitu sektor perikanan dan industri

6. Pengembangan Daerah terisolir

Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai utara Pulau Jawa, dengan ketinggian kurang lebih 1 meter di atas permukaan laut dengan posisi geografis antara 6 RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 | BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 19 50’ 42" s.d. 6 55’ 44” Lintang Selatan dan 109 37’ 55” s.d. 109 42’ 19” Bujur Timur serta dengan koordinat fiktif 510.00 – 518.00 Km membujur dan 517.75 – 526.75 Km melintang. Batas wilayah secara administratif adalah :

- · Sebelah Utara : Laut Jawa
- · Sebelah Timur : Kab. Batang
- · Sebelah Selatan : Kab. Pekalongan dan Kab. Batang
- · Sebelah Barat : Kab. Pekalongan

Sehingga yang perlu mendapat perhatian adalah daerah yang bersebelahan dengan kota atau kabupaten lain.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota 2021-2026, melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun. Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut:
Rencana Program dan Kegiatan, Sebagaimana Tabel T–C. 3.3

Tabel T-C-33

Rumusan Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan DPUPR Tahun 2025

Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kota Pekalongan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2					3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		67.938.334.600,00							123.084.261.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		67.938.334.600,00							123.084.261.000,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		67.938.334.600,00							123.084.261.000,00	
1	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	15.882.102.000,00						100,00 persen	12.137.180.000,00	

	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	19.680.000,00			-	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR	100Persen	16.239.000,00	
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.220.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR		1.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										

							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.460.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR		1.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR		13.239.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	7.020.214.000,00				12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR	100Persen	7.878.647.000,00	
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6.922.934.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR		7.782.147.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										

							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	95.000.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR		95.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.280.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR		1.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	34.387.000,00			-	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan	100Persen	34.881.000,00	
	1	03	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										

							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	34.387.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan		34.881.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	16.520.000,00			-	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR	100persen	22.313.000,00	
	1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										

							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5.000.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR		9.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	11.520.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR		12.813.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	612.500.000,00			-	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR	100persen	412.282.000,00	
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.000.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR		3.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	250.000.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	114.500.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR		110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30.000.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										

							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3.000.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR		3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR		105.782.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										

							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR		10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.330.467.000,00			-	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR	100persen	4.000.000,00	
	1	03	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar										

							Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2.330.467.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR		4.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.913.523.000,00			-	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR	100persen	3.000.701.000,00	
	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR		3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4.500.000.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR		2.597.701.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	410.523.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	934.811.000,00			-	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR	100persen	768.117.000,00	
	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	575.000.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR		496.723.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar										
							Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	59.811.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR		71.394.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	250.000.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50.000.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase sarpras pengendali	14.695.950.000,00							100 persen	26.122.666.000,00	

						SUMBER DAYA AIR (SDA)	banjir dan rob dalam kondisi baik									
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarpras Pengendali Banjir dan Rob dalam kondisi baik	12.820.950.000,00			-	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan	27unit	23.849.351.000,00	
	1	03	02	2.01	0013	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir										
							Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	0,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-	-	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan	Masyarakat Kota Pekalongan		7.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

										DANA ALOKASI UMUM		banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup				
	1	03	02	2.01	0028	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir										
							Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	1.612.500.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir										

							Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	4.861.950.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan		5.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai										
							Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	537.500.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian	Masyarakat Kota Pekalongan		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

												pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup				
	1	03	02	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing										
							Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	3.961.500.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan		4.749.351.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing										

							Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	1.290.000.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0115	Pembangunan Tanggul Sungai										

							Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan 07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang	Masyarakat Kota Pekalongan		1.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

												dan pengelolaan lingkungan hidup				
	1	03	02	2.01	0123	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi										
							Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi	557.500.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan	Masyarakat Kota Pekalongan		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

												lingkungan hidup				
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (IKK Output)	1.875.000.000,00			-	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan	85persen	2.273.315.000,00	
	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan										

							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1.875.000.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan		2.273.315.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	2.111.600.000,00						90,90 persen	2.600.000.000,00	

	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) didaerah kab/kota dilaksanakan	2.111.600.000,00			-	08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Masyarakat Kota Pekalongan	100Persen	2.600.000.000,00	
	1	03	03	2.01	0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan									

							Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	2.011.600.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Masyarakat Kota Pekalongan		1.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan										

							Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100.000.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Masyarakat Kota Pekalongan		1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

4	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	200.000.000,00						80,00 persen	1.205.000.000,00	
	1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan di Wilayah Kota	200.000.000,00			-	08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau	Masyarakat Kota Pekalongan	100Persen	1.205.000.000,00	

												pemerintah Provinsi Jawa Tengah				
	1	03	04	2.01	0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS										
							Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	200.000.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional	Masyarakat Kota Pekalongan		700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

												yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah				
	1	03	04	2.01	0011	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan										
							Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	0,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional	Masyarakat Kota Pekalongan		5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

												yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah				
	1	03	04	2.01	0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS										
							Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	0,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional	Masyarakat Kota Pekalongan		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

												yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah				
5	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	2.128.200.000,00						12,27 persen	5.145.596.000,00	
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan	2.128.200.000,00			-	06. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Masyarakat Kota Pekalongan	60051unit	5.145.596.000,00	

							dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T (IKK Output)									
	1	03	05	2.01	0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat										
							Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan	0,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	06. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Masyarakat Kota Pekalongan		545.596.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman										
							Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	803.200.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	06. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan	Masyarakat Kota Pekalongan		1.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

							yang dioptimalisasi		Kel/Desa			permukiman kumuh				
	1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja										
							Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	125.000.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	06. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Masyarakat Kota Pekalongan		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)										
							Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	200.000.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	06. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Masyarakat Kota Pekalongan		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja										
							Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	0,00	Kota Pekalongan, Semua Kecam	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	06. Pelaksanaan peningkatan kualitas	Masyarakat Kota Pekal		650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

									atan, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM		perumahan kumuh dan permukiman kumuh	ongan			
	1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat										
							Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	1.000.000.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	06. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Masyarakat Kota Pekalongan		1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	6.059.076.000,00						70,48 persen	9.318.974.000,00	
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	6.059.076.000,00			-	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian	Masyarakat Kota Pekalongan	177142.18meter	9.318.974.000,00	

												pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup				
	1	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan										
							Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	0,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan										

							Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	0,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan										
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	5.628.366.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian	Masyarakat Kota Pekalongan		4.158.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

												pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup				
	1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan										
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	0,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan		1.960.974.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan										

							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	430.710.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan		700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	2.581.408.000,00						18,44 persen	2.663.368.000,00	
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah PBG yang diberikan oleh pemerintah Kab/Kota dalam Tahun Eksisting (IKK Output)	2.581.408.000,00			-	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob,	Masyarakat Kota Pekalongan	350dokumen	2.663.368.000,00	

						Bangunan Gedung						pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup				
	1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	2.131.408.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan		2.213.368.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung										

							Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	300.000.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG											
							Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung	150.000.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendali	Masyarakat Kota Pekalongan		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

							(SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG					an pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup				
8	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	0,00						-	0,00	
	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	0,00			-	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian	-	-	0,00	

												pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup				
	1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	23.804.998.600,00						85,48 persen	63.486.477.000,00	

	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik dan Sedang	23.804.998.600,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan	Masyarakat Kota Pekalongan	132.809KM	63.486.477.000,00	

												kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah					
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan											

							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	200.000.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan	Masyarakat Kota Pekalongan		103.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

												kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah					
	1	03	10	2.01	0031	Penggantian Jembatan											

							Jumlah Jembatan yang Diganti	6.050.000.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan	Masyarakat Kota Pekalongan		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

												kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah					
	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan											

							Panjang Jalan yang Dibangun	0,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan	Masyarakat Kota Pekalongan		25.117.777.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

												kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah					
	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan											

							Panjang Jalan yang Direkonstruksi	9.287.695.600,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan	Masyarakat Kota Pekalongan		22.091.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

												kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah					
	1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan											

							Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	323.470.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan	Masyarakat Kota Pekalongan		879.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

												kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah					
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan											

							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	169.500.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan	Masyarakat Kota Pekalongan		103.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

												kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah					
	1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan											

							Panjang Jalan yang Direhabilitasi	3.200.000.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan	Masyarakat Kota Pekalongan		4.648.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

												kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah					
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan											

							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	4.574.333.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan	Masyarakat Kota Pekalongan		10.542.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

												kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah				
10	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	115.000.000,00						18,53 persen	155.000.000,00	
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah pelatihan tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	75.000.000,00			-	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan	DPUPR	1kali	95.000.000,00	

												banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup				
	1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi										
							Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	25.000.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	DPUPR		35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis										

							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	50.000.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	DPUPR		60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi jasa konstruksi yang tersedia	40.000.000,00			-	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang	DPUPR	100Persen	60.000.000,00	

												dan pengelolaan lingkungan hidup				
	1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota										
							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	40.000.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	DPUPR		60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	360.000.000,00						100,00 persen	250.000.000,00	

	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan RTRW/RRTR	25.000.000,00			-	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Kota Pekalongan	100persen	25.000.000,00	
	1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang										
							Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	25.000.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian	Kota Pekalongan		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

												pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup				
	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	110.000.000,00			-	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	-	0Kali	0,00	
	1	03	12	2.02	0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota										

							Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	110.000.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	200.000.000,00			-	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang	-	12kali	200.000.000,00	

												dan pengelolaan lingkungan hidup				
	1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang										
							Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	200.000.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang yang dilaksanakan	25.000.000,00			-	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Kota Pekalongan	12kali	25.000.000,00	
	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang										
							Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	25.000.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian	Kota Pekalongan		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

												pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup				
	J U M L A H							**67.938.334.600,00**							**123.084.261.000,00**	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPUPR

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan beserta pendanaan Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      1) Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah 5,220,000
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2,460,000
      3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.000.000,00
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5,053,750,000
      2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD 95.000.000
      3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD 2,280,000
   c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      1) Rekonsiiasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD 25,110,000
   d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      1) Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapannya 3,650,000
      2) Sosiaisasi Peratura Perundang-Undangan 8,410,000
   e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangnan Kantor 3,650,000
      2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 182,500,000
      3) Penyedian Peralatan Rumah Tangga 0
      4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 83,590,000
      5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21,900,000
      6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 2,190,000
      7) Penyelenggaran Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD 146,000,000
      8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 7,300,000
   f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      1) Pengadaan Alat Besar 678,900,000

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,190,000
    2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 4,423,250,000
    3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 403,867,000
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 548,452,000
    2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 43,670,000
    3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 47,320,000
    4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 36,500,000

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
    a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
        1) Pembangunan Tanggul Sungai 1.250.000.000
        2) Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 665,000,000
        3) Pembangunan Stasiun Pompa Banjir 1,000,000,000
        4) Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing 547,500,000
        5) Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir 1,000,000,000
        6) Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi 219,000,000
        7) Normalisasi/Restorasi Sungai 219,000,000
        8) Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir 3,750,708,000
    b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
        1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 904,740,000
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
    a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
        1) Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 841,600,000

2) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 1,322,400,000

4. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
   a. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
      1) Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota 3,587,114,000
5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
   a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
      1) Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman 3,123,400,000
      2) Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman 103,200,000
      3) Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 146,000,000
      4) Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat 0
      5) Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja 0
      6) Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 119,802,000
6. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
   a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
      1) Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 575,000,000
      2) Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan 3,662,500,000
      3) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan 468,100,000
7. Program Penataan Bangunan Gedung
   a. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
      1) Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 109,500,000
      2) Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung 73,000,000

3) Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 648,380,000

8. Program Penyelenggaraan Jalan
   a. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
      1) Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelangaran Jalan dan jembatan 73,000,000
      2) Survey Kondisi Jalan/Jembatan 123,740,000
      3) Rekonstruksi Jalan 9,670,020,000
      4) Rehabilitasi Jalan 1,460,000,000
      5) Pemeliharaan Jalan 1,460,000,000
      6) Pemeliharaan Rutin Jalan 4,690,680,000
      7) Pemeliharaan Rutin Jembatan 650,780,000
9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
   a. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
      1) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis 36,500,000
      2) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi 18,250,000
   b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
      1) Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota 29,200,000
10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
   a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
      1) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang 18,250,000
   b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
      1) Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 80,300,000
   c. Koordinasi dan Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
      1) Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang 168,104,000

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan merupakan gambaran rencana kerja dalam menunjang tercapainya visi, misi dan arah pembangunan yang telah ditetapkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dalam mewujudkan Kota Pekalongan yang maju.

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun Angaran 2024 Kota Pekalongan menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan APBD yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) Tahun 2025 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025. Adapun Kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program – program Rencana Kerja Penetapan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Kota Pekalongan Tahun 2025 dengan sebaik – baiknya;
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan tahun 2025, Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2025 ini juga disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Rencana tindak lanjut
   Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, selanjutnya Renja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran semestara (KUA) dan Prioreitas Platfon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada akhirnya keberhasilan pembangunan di Kota Pekalongan selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Kota Pekalongan juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan dalam mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat terwujud sesuai waktu yang telah ditentukan.

Pekalongan, 1 Agustus 2024
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang,
Kota Pekalongan

PRAMBANG SUSWARTO, ST.MM
NIP. 19[illegible]4 199903 1 011

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PEKALONGAN

BUKU RENJA 2025

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKALONGAN

JL.Singosari No.2 Pekalongan
No Telp.(0285) 422581

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Renja Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2025 dapat diselesaikan. Rancangan Renja ini berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Tahunan ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah diselesaikan sesuai dengan RENJA tahun lalu dan kebijakan serta rencana kerja

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2025. Rencana Kerja Tahun 2025 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama 5 (lima) tahun, dimana rencana kerja ini disusun dalam upaya memberikan arah / pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selama tahun 2025. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pekalongan,01 Agustus 2024

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman Kota
Pekalongan

ANDRIANTO, ST,MT
Pembina Tk I
NIP. 19730111 199803 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
Latar Belakang 1
Landasan Hukum 4
Maksud dan Tujuan 6
Sistematika Penulisan .....
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU 9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan 9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan 13
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan 14
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 31
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 41
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 41
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 41
3.3 Program, Kegiatan dan sub Kegiatan 42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINPERKIM 47
BAB V PENUTUP 61

BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah(OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja OPD disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerahsecara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Penetapan OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam system perencanaan daerah, karena Renja Penetapan-OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah
terendah dan terkecil. OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada

masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Penetapan OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan untuk periode

1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat pada tahun 2025

Program, kegiatan, alokasi dan indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam Renja Penetapan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kota Pekalongan disusun berdasarkan
:

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
3. Urusan wajib Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang mengacu pada SPM Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan
4. Ruang sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan disusun dengan tahapan sebagai berikut:

A. Persiapan penyusunan Renja meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja; penyusunan agenda tim penyusun Renja dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

B. Penyusunan rancangan Renja mencakup :

1. Perumusan yang meliputi persiapan penyusunan rancangan Renja Penetapan, pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan OPD, mereview hasil evaluasi Renja tahun lalu

berdasarkan Renstra Perubahan Perubahan, penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, penelaahan rancangan awal RKPD Kota Pekalongan, perumusan tujuan dan sasaran; penelaahan usulan masyarakat; dan perumusan kegiatan prioritas.

2. Penyajian Dokumen Renja Perangkat Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Pendahuluan;
b. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu;
c. tujuan, sasaran, program dankegiatan;
d. Rencana Kerja dan Pendanaan

Perangkat e. penutup.

C. Pelaksanaan forum OPD

Forum OPD membahas Pembahasan rancangan Renja Penetapan RKPD kabupaten/kota mencakup:

1. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang keluarahan dan kecamatan;
2. Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan;
3. Penyelarasan program dan kegiatan antar OPD Kota Pekalongan dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing
4. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan, sesuai dengan surat edaran Walikota Pekalongan

D. Penetapan Renja OPD

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan menyempurnakan rancangan Renja dengan berpedoman pada RKPD Kota Pekalongan yang telah ditetapkan kemudian diverifikasi.

1.1 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2023 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: 28 tahun 2010, Nomor: 0199/M PPN/04/2010, Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
17. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan;
18. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan;
19. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan;

20. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;
21. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010-2015.
23. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penetapan Atas Peraturan daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
25. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
26. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk :

1. Menjadi pedoman untuk mendukung capaian kinerja dalam Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
2. Menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan tahun 2023 dalam menjalankan program dan kegiatannya;
3. Menjadi pedoman evaluasi kinerja sebagai rujukan perencanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan tahun 2025.

B. Tujuan

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota

Pekalongan Tahun 2025 disusun dengan tujuan untuk :

1. Sebagai dokumen perencanaan teknis strategis dan sebagai alat koordinasi sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Mencapai visi, misi, tujuan dan strategi kelembagaan serta kebijakan berdasarkan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dijabarkan dari Rancangan Awal RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025;
3. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi penyelenggaraan pelayanan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kota Pekalongan Tahun 2025 dan Perkiraan Capaian Renstra Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2021 -2026

2.2. (Tabel.T-C.29)

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan

2.3. Kawasan Permukiman Kota Pekalongan (Tabel.T-30)

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

2.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan

Review terhadap Rancangan Awal RKPD (Tabel T-C.31)

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel T-C.32)

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Penetapan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan

3.3. Program , Kegiatan sub kegiatan (Tabel T-C.33)

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB
II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kota Pekalongan

Tahun 2025 dan Perkiraan Capaian Renstra Perubahan Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026.

Terdapat 6 (enam) program yang menjadi garapan wajib Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan pada tahun 2022. Penempatan program tersebut dilakukan dengan alasan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan telah

berusaha sebaik mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Pekalongan, baik kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proporsional.

Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah dengan dapat dilaksanakannya seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja difokuskan pada pengukuran output dan outcome, sedangkan indikator benefit dan impact diukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya.

Kegiatan – kegiatan dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis dalam Renstra yaitu Pemenuhan Sarana Prasarana dan Utilitas Perumahan serta Permukiman tidak Kumuh, mendukung indikator Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam RKPD Kota Pekalongan yaitu (Tabel T-C.29).

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
1	Nilai Sakip OPD			82.50 Indeks	82 Indeks	84.50 Indeks	85.50 Indeks	83.50 indeks	N/A	
2	Persentase ketersediaan drainase lingkungan			47,46 %						
3	Rasio akses air minum terhadap jumlah penduduk			95,99 %	93,43 %					
4	Cakupan layanan pengelolaan limbah domestik			97,33 %						
5	Cakupan jalan lingkungan dalam kondisi mantap			1649,41 ha	1728,41 Ha	1856,41 Ha	1973,41 Ha			
6	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni			0%	0,26 %	0,52 %	0,78%			
7	Persentase Perumahan yang Sudah Menyerahkan PSU			25,00	35,87	46,74	57,61			

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan sebagai salah satu perangkat daerah yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, bagian kedua Tugas dan Fungsi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan Permukiman.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Perumahan Rakyat, terdiri dari:
    1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
    2. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
d. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari:
    1. Kepala Seksi Pertanahan
    2. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
e. Kelompok Jabatan Fungional.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan dapat digambarkan pada Gambar pada halaman berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINPERKIM

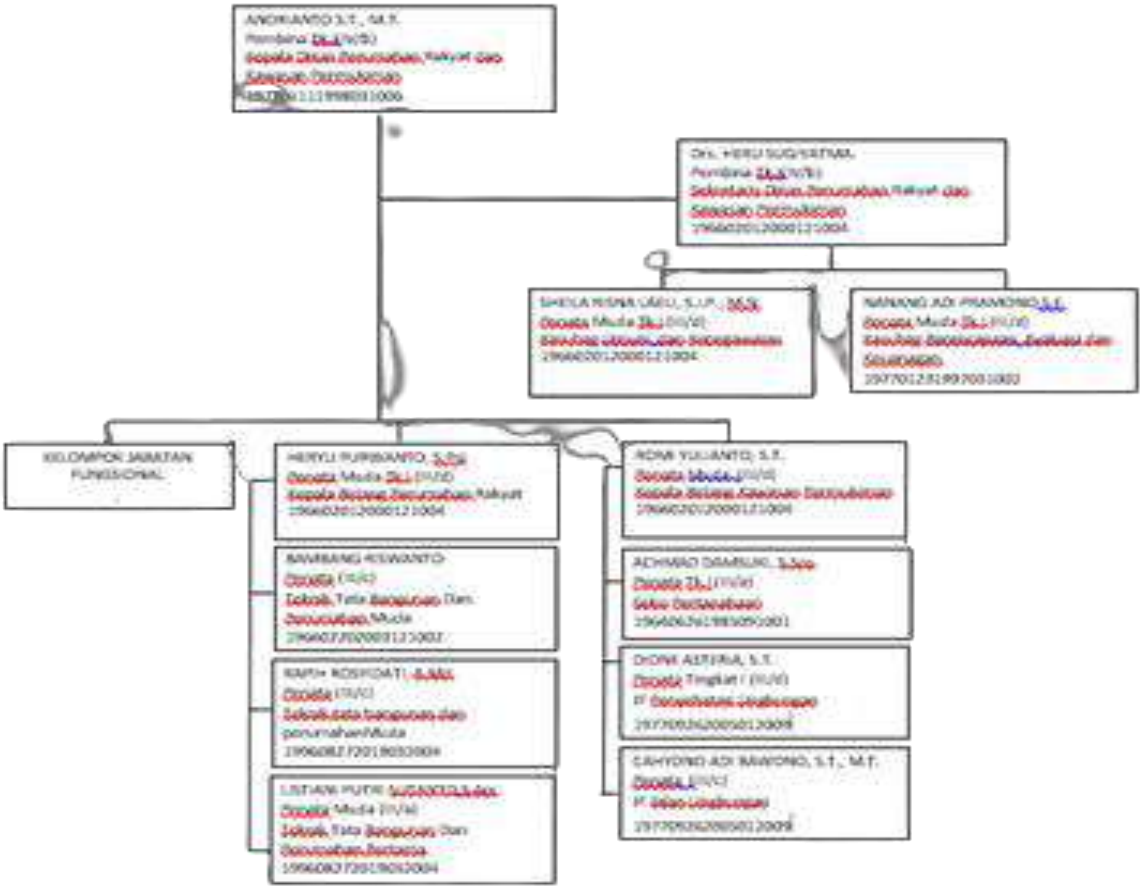

Permasalahan-permasalahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan dalam pelayanan sebagai berikut :

a) Angka pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak diimbangi dengan penambahan jumlah rumah menyebabkan angka kekurangan rumah (backlog)semakin bertambah tinggi;
b) Rendahnya kualitas perumahan penduduk berpenghasilan rendah;
c) Cakupan pelayanan air minum belum optimal;
d) Belum optimalnya layanan drainase lingkungan permukiman;
e) Kondisi jalan lingkungan belum optimal;

Pada Dokumen RPJMD Kota Pekalongan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan mendukung Urusan Perencanaan dengan tujuan dan indikator sasaran yang selaras dengan RPJMD, adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan adalah Misi ke -3 (tiga) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Angka pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak diimbangi dengan penambahan jumlah rumah menyebabkan angka kekurangan rumah (backlog) semakin bertambah tinggi
2. Keterbatasan lahan untuk pengembangan perumahan dan permukiman baru;
3. Adanya rumah-rumah yang berada di lahan illegal;
4. Timbulnya Rumah Tidak Layak Huni baru akibat kemiskinan dan genangan air;
5. Kondisi topografis Kota Pekalongan menyulitkan pengaturan saluran drainase, yaitu dengan kemiringan lahan rata-rata antara 0-5%;
6. Genangan air yang memicu timbulnya kawasan kumuh baru
7. Ketergantungan air baku untuk air bersih pada Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan. Sementara pemanfaatan sumur dalam, baik oleh PDAM ataupun oleh PAMSIMAS dan Swasta seperti hotel ataupun
   perusahaan dapat menjadi pemicu terjadinya penurunan permukaan tanah.

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Adanya program pembangunan Rumah Susun Sewa dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Adanya program sejuta rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

3. Akan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Pencegahan dan peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
4. Adanya Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pusat, bantuan pugar rumah dari Provinsi dan DAK Perumahan dan Permukiman

Isu Strategis berkaitan dengan infrastruktur sesuai dengan analisis permasalahan baik dari aspek geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing antara lain :

1. Pemenuhan rumah / perumahan yang layak huni.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur drainase dan infrastruktur dasar permukiman lainnya sesuai dengan kondisi topografi disertai dengan upaya mendorong kesadaran masyarakat agar berperan aktif menjaga kualitas lingkungan permukiman.Pugar Rumah Tidak Layak Huni disertai dengan pemenuhan infrastruktur dasar permukiman secara memadai.Penanganan kawasan kumuh.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD Kota Pekalongan 2025 dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kota Pekalongan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan, dengan arahan Walikota Pekalongan terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan berdasarkan rancangan awal RKPD Kota Pekalongan 2025.

Review terhadap rancangan awal RKPD Kota Pekalongan 2025, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tahapan kegiatan telahaan yang dilakukan, adalah:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD Kota Pekalongan2021;
2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Menyajikan dalam bentuk matrik tabel, dengan menempatkan program/kegiatan yang sama pada garis yang sama untuk memudahkan analisis;
4. Melakukan pengecekan apakah program/kegiatan yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sudah termuat dalam rancangan awal RKPD. Jika belum termuat, maka perlu dibuatkan catatan penting;
5. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
6. Untuk jenis program dan kegiatan yang sesuai, dilakukan langkah berikut:
   a. Mengecek apakah indikator kinerjanya sesuai, jika tidak sesuai, maka menentukan indikator yang akan dipilih;
   b. Meneliti besaran tolok ukur atau target capaian program/kegiatan, bila terdapat perbedaan, maka mengkaji kembali besaran tersebut dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif, target capaian renstra serta ketersediaan sumber dana lainnya; dan
   c. Memberi catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan.
7. Untuk jenis program dan kegiatan yang tidak sesuai (berbeda), dilakukan langkah berikut:
   a. Untuk program dan kegiatan yang hanya terdapat di dalam rancangan awal RKPD Kota Pekalongan 2025, maupun yang hanya terdapat dalam

identifikasi kebutuhan hasil analisis,melakukan pengecekan apakah masih layak untuk direncanakan, dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata, sasaran target Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, kebijakan nasional, pencapaian visi-misi kepala daerah, dan ketersediaan pendanaan;

b. Meneliti kembali kemudian tentukan indikator yang akan dipilih;
c. Meneliti kembali kemudian tentukan besaran tolok ukur atau target capaian program dan kegiatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif berdasarkan arahan rancangan awal RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025, target capaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta ketersediaan sumber dana lainnya;
d. Memberi catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja SKPD.

8. Merumuskan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025 yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan; dan
9. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Rancangan awal Renja 2025 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan, tidak ada perubahan rumusan program dan kegiatan yang telah disusun. Proses perbandingan antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan untuk mengetahui sesuai/tidak sesuai, cocok/ketidakcocokan besarannya (anggaran/volume/satuan) terhadap program dan kegiatan yang sudah dirumuskan.

Lampiran tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Pekalongan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						**29.517.102.000,0**							**29.785.957.000,0**	
	1	**URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYAN**						**28.433.207.000,00**							**28.685.672.000,00**	
	1.04	**URUSAN BIDANG DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**28.433.207.000,00**							**28.685.672.000,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM URUSAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase laporan capaian***	**100,00 persen**			**100,00 persen**	**4.862.194.000,00**						**100,00 persen**	**5.004.493.000,00**	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Kinerja Perangkat	*Persentase perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah*	100 persen			100 persen	25.350.000,00			-	12. atan hteraa ASN dibare denga pengu mplem si and punish ment	Dinas Rakyat dan Permukiman	100 persen	17.350.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN

	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah				3 Dokumen	10.750.000,00	Kota Pekalong Semua Kecamata Semua	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	12. atan hteraa ASN dibare denga pengu mplem si and punish ment	Dinas Rakyat dan Permukiman		2.750.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Hasil Koordinasi Dokumen RKA-				2 Dokumen	1.650.000,00	Kota Pekalong Semua Kecamata Semua	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	12. atan hteraa ASN dibare denga pengu mplem si and punish ment	Dinas Rakyat dan Permukiman		1.650.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15 Laporan	12.950.000,00	Kota Pekalong Semua Kecamata Semua	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	12. atan hteraa ASN dibare denga pengu mplem si and punish ment	Dinas Rakyat dan Permukiman		12.950.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Perangkat	*Persentase administrasi perangkat daerah*	100 persen			100 persen	3.382.191.000,00			-	12. atan hteraa ASN dibare denga pengu mplem si and punish	Dinas Rakyat dan Permukiman	100 persen	3.504.754.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan				24 Orang/	3.350.541.000,00	Kota Pekalong Semua Kecamata Semua	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	12. atan hteraa ASN dibare denga pengu mplem si and	Dinas Rakyat dan Permukiman		3.473.104.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN

			ASN									punish ment				
	1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Pengujian/Verifik Keuangan SKPD				12 Dokum en	30.0 00.0 00,0 0	Kota Pekalong Semua Kecamata Semua	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	12. atan hteraa ASN dibare denga pengu mplem si and punish ment	Dinas Rakyat dan Permukiman		30.0 00.0 00,0 0	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.650.000,00	Kota Pekalong Semua Kecamata Semua	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	12. atan hteraa ASN dibare denga pengu mplem si and punish ment	Dinas Rakyat dan Permukiman		1.650.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Perangkat	*Persentase administrasi perangkat daerah*	100 persen			100 persen	9.500.000,00			-	12. atan hteraa ASN dibare denga pengu mplem si and punish ment	Dinas Rakyat dan Permukiman	100 persen	9.500.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN

	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	9.500.000,00	Kota Pekalong Semua Kecamata Semua	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	12. atan hteraa ASN dibare denga pengu mplem si and punish ment	Dinas Rakyat dan Permukiman		9.500.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Perangkat	*Persentase administrasi daerah*	100 persen			100 persen	192.414.000,00			-	12. atan hteraa ASN dibare denga pengu mplem si and punish ment	Dinas Rakyat dan Permukiman	100 persen	209.568.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	5.000.000,00	Kota Pekalong Semua Kecamata Semua	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	12. atan hteraa ASN dibare denga pengu mplem si and punish ment	Dinas Rakyat dan Permukiman		5.000.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	44.000.000,00	Kota Pekalongan Semua Kecamatan Semua	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	12. atan hteraa ASN dibare denga pengu mplem si and punish ment	Dinas Rakyat dan Permukiman		48.000.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	2.000.000,00	Kota Pekalongan Semua Kecamatan Semua	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	12. atan hteraa ASN dibare denga pengu mplem si and punish ment	Dinas Rakyat dan Permukiman		2.000.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN

	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	40.000.000,00	Kota Pekalonga Semua Kecamata Semua	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	12. atan hteraa ASN dibare denga pengu mplem si and punish ment	Dinas Rakyat dan Permukiman		49.068.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5.000.000,00	Kota Pekalonga Semua Kecamata Semua	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	12. atan hteraa ASN dibare denga pengu mplem si and punish ment	Dinas Rakyat dan Permukiman		5.000.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2.414.000,00	Kota Pekalongan Semua Kecamatan Semua	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	12. atan hteraa ASN dibare denga pengu mplem si and punish ment	Dinas Rakyat dan Permukiman		2.500.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi dan SKPD				75 Laporan	94.000.000,00	Kota Pekalongan Semua Kecamatan Semua	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	12. atan hteraa ASN dibare denga pengu mplem si and punish ment	Dinas Rakyat dan Permukiman		98.000.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Urusan Daerah*	100 persen			100 persen	970.407.000,00			-	12. atan hteraa ASN dibare denga pengu mplem si and punish ment	Dinas Rakyat dan Permukiman	100 persen	976.720.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN

	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	1.800.000,00	Kota Pekalongan Semua Kecamatan Semua	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	12. atan hteraa ASN dibare denga pengu mplem si and punish ment	Dinas Rakyat dan Permukiman		1.800.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	758.200.000,00	Kota Pekalongan Semua Kecamatan Semua	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	12. atan hteraa ASN dibare denga pengu mplem si and punish ment	Dinas Rakyat dan Permukiman		758.200.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	210.407.000,00	Kota Pekalonga Semua Kecamata Semua	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	12. atan hteraa ASN dibare denga pengu mplem si and punish ment	Dinas Rakyat dan Permukiman		216.720.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Daerah Pemerintahan*	100 persen			100 persen	282.332.000,00			-	12. atan hteraa ASN dibare denga pengu mplem si and punish ment	Dinas Rakyat dan Permukiman	100 persen	286.601.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN

	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Perorangan Dinas Kendaraan Dinas yang Dipelihara dibayarkan				18 Unit	90.000.000,00	Kota Pekalongan Semua Kecamatan Semua	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	12. Tersedianya ASN dibarengi dengan pengumplemsi and punishment	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman		90.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	72.332.000,00	Kota Pekalongan Semua Kecamatan Semua	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	12. Tersedianya ASN dibarengi dengan pengumplemsi and punishment	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman		76.601.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	120.000.000,00	Kota Pekalonga Semua Kecamata Semua	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	12. atan hteraa ASN dibare denga pengu mplem si and punish ment	Dinas Rakyat dan Permukiman		120.000.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	***Persentase Rumah Layak***	**92,02 persen**			**92,02 persen**	**1.638.690.000,00**						**92,02 persen**	**1.671.292.000,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data Rumah pada Kawasan Rawan Bencana yang disusun*	6 dokumen			1 dokumen	50.000.000,00			-	06. naangkatan kualita perum kumuh permun kumuh	Dinperkim Pekalongan	1 dokumen	60.000.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN

	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Pekalongan Semua Kecamatan Semua	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	06. naangkatan kualita perum kumuh permun kumuh	Dinperkim Pekalongan		60.000.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Sosialisasi Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program*	15 kegiatan			3 kegiatan	50.000.000,00			-	06. naangkatan kualita perum kumuh permun kumuh	Masyarakat Pekalongan	3 kegiatan	50.000.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana													
			Jumlah yang Mengikuti Standar Teknis dan Rehabilitasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				60 Orang	10.000.000,00	Kota Pekalongan Semua Kecamatan Semua	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	06. naangkatan kualita perum kumuh permun kumuh	Masyarakat Pekalongan		10.000.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator													
			Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih				6 Orang	30.000.000,00	Kota Pekalongan Semua Kecamatan Semua	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	06. naangkatan kualita perum kumuh permun kumuh	Masyarakat Pekalongan		30.000.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.2.02.0007	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota														
			Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena				2 Orang	10.000.000,00	Kota Pekalonga Semua Kecamata Semua	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	06. naangkatan kualita perum kumuh permun kumuh	Masyarakat Pekalongan		10.000.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan Rehabilitasi Bencana atau Program	*Persentase Rumah Layak Huni bagi Warga Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah*	100 persen			100 persen	264.461.000,00			-	06. naangkatan kualita perum kumuh permun kumuh	Masyarakat Pekalongan	100 persen	281.292.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				15 Unit Rumah	164.461.000,00	Kota Pekalonga Semua Kecamata Semua	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	06. naangkatan kualita perum kumuh permun kumuh	Masyarakat Pekalongan		181.292.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN

	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				2 Unit Rumah	100.000.000,00	Kota Pekalongan Semua Kecamatan Semua	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	06. naangkatan kualita perum kumuh permun kumuh	Masyarakat Pekalongan		100.000.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05	Pembinaan Rumah Susun dan/atau Rumah	*Persentase Rumah Susun dan/atau Rumah*	100 persen			100 persen	1.200.000.000,00			-	06. naangkatan kualita perum kumuh permun kumuh	Masyarakat Pekalongan	100 persen	1.200.000.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah				3 Laporan	1.200.000.000,00	Kota Pekalongan Semua Kecamatan Semua	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	06. naangkatan kualita perum kumuh permun kumuh	Masyarakat Pekalongan		1.200.000.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan Pengembangan	*Persentase penerbitan Izin Pembangunan Pengembangan*	100 persen			100 persen	74.229.000,00			-	06. naangkatan kualita perum kumuh permun kumuh	Pengembang Perumahan	100 persen	80.000.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				20 Laporan	74.229.000,00	Kota Pekalonga Semua Kecamata Semua	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	06. naangkatan kualita perum kumuh permun kumuh	Pengembang Perumahan		80.000.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM PERMUKIMAN**	***Luas kawasan permukiman kumuh***	**72,47 hektar**			**72,47 hektar**	**16.802.744.000,00**						**72,47 hektar**	**16.802.744.000,00**	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Persentase penataan permukiman disusun*	100 persen			100 persen	250.000.000,00			-	06. naangkatan kualita perum kumuh permun kumuh	Kota Pekalongan	100 persen	250.000.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN

	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP													
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				2 Dokumen	150.000.000,00	Kota Pekalonga Semua Kecamata Semua	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	06. naangkatan kualita perum kumuh permun kumuh	Kota Pekalongan		150.000.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh													
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Pekalonga Semua Kecamata Semua	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	06. naangkatan kualita perum kumuh permun kumuh	Kota Pekalongan		100.000.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kawasan Kumuh dengan Bawah 10	*Luasan kawasan kumuh yang tertangani*	508,47 ar			102 hektar	16.552.744.000,00			-	06. naangkatan kualita perum kumuh permun kumuh	Masyarakat Pekalongan	72,47 hektar	16.552.744.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				100 Rumah	1.000.000.000,00	Kota Pekalonga Semua Kecamata Semua	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	06. naangkatan kualita perum kumuh permun kumuh	Masyarakat Pekalongan		1.000.000.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh														
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan				2 Ha	15.552.744.000,00	Kota Pekalonga Semua Kecamata Semua	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	06. naangkatan kualita perum kumuh permun kumuh	Masyarakat Pekalongan		15.552.744.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN
4.	**1.04.04**	**PROGRAM DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	***Luas kawasan permukiman tidak kumuh***	**2075,41 hektar**			**2075,41 hektar**	**4.523.695.000,00**						**2075,41 hektar**	**4.592.098.000,00**	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten /Kota	*Persentase Rumah Tidak*	1.31 persen			1.04 persen	4.523.695.000,00			-	06. naangkatan kualita perum kumuh permun kumuh	Warga RTLH	1.31 persen	4.592.098.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN

	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha													
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan				369 Rumah	4.523.695.000,00	Kota Pekalonga Semua Kecamata Semua	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	06. naangkatan kualita perum kumuh permun kumuh	Warga RTLH		4.592.098.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN
5.	**1.04.05**	**PROGRAM PRASARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	***Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana***	**14,53 persen**			**14,53 persen**	**605.884.000,00**						**14,53 persen**	**615.045.000,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan PSU Perumahan	*Persentase Perumahan yang Sudah Menyerahkan PSU*	79.35 n			68.48 persen	605.884.000,00			-	06. naangkatan kualita perum kumuh permun kumuh	PSU Perumahan	79.35 n	615.045.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan PSU Perumahan				1 Dokumen	230.000.000,00	Kota Pekalongan Semua Kecamatan Semua	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	06. naangkatan kualita perum kumuh permun kumuh	PSU Perumahan		230.000.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian														
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				3 Lokasi	280.000.000,00	Kota Pekalongan Semua Kecamatan Semua	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	06. naangkatan kualita perum kumuh permun kumuh	PSU Perumahan		280.000.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN

	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				1 Laporan	95.884.000,00	Kota Pekalonga Semua Kecamata Semua	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	06. naangkatan kualita perum kumuh permun kumuh	PSU Perumahan		105.045.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN
	2	**URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN**						**1.083.895.000,00**							**1.100.285.000,00**	
	2.10	**URUSAN BIDANG PERTANAHAN**						**1.083.895.000,00**							**1.100.285.000,00**	
1.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	***Persentase pertanahan tertangani***	**-**			**100 persen**	**1.074.937.000,00**						**-**	**1.091.192.000,00**	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase luasan bidang tanah yang terselesaikan ganti ruginya*	-			73.35 persen	1.074.937.000,00			-	07. nguna embag pengeln an banjir/rengen n tan dan olaan lingkun hidup	Masyarakat Pekalongan	-	1.091.192.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1.074.937.000,00	Kota Pekalonga Semua Kecamata Semua	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	07. nguna embag pengeln an banjir/r engen n tan dan olaan lingkun hidup	Masyarakat Pekalongan		1.091.192.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN
2	**2.10.06**	**PROGRAM**	***Persentase***	**-**			**50**	**8.9**						**-**	**9.0**	

.		**TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	***tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee***				**persen**	**58.000,00**							**93.000,00**	
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penetapan Subjek Redistribusi Ganti Kerugian Kelebihan Tanah Absentee*	-			50 persen	8.958.000,00			-	07. nguna embag pengel n an banjir/r engen n tan dan olaan lingkun hidup	Masyarakat Pekalongan	-	9.093.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN
	2.10.06.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah				2 Dokumen	8.958.000,00	Kota Pekalonga Semua Kecamata Semua	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	07. nguna embag pengel n an banjir/r engen n tan dan olaan lingkun hidup	Masyarakat Pekalongan		9.093.000,00	DINAS RAKYAT DAN PERMUKIMAN
	J U M L A H							**29.517.102.000,00**							**29.785.957.000,00**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Langkah yang telah dilakukan dalam mengkaji usulan program dan kegiatan dari musrenbang kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Membuat desk batasan usulan program/kegiatan yang dapat diusulkan oleh masyarakat;
2. Menginventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat;
3. Menyesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku;
4. Meneliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan;
5. Bila belum lengkap melakukan konfirmasi (kalau memungkinkan), atau memberi catatan untuk dikonfirmasikan dengan hasil analisis kebutuhan;
6. Memeriksa apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
7. Membuat rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.lampiran pada (Tabel.T-C.32)

Tabel T-C-32

Usulan Program/Kegaiatn dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2025 Kota Pekalongan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan		4,655,359,000	
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	16,000,000	
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	3,102,461,000	
c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	9,500,000	
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	234,000,000	
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	954,000,000	

			Pemerintahan Daerah		
f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	339,398,000	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen hasil Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, LahanLahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan, Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya	4,949,196,000	
a	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	75,000,000	
b	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Sosialisasi Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	90,000,000.	
c	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah	Kota Pekalongan	Presentase Rumah Layak	3,584,196,000	

	Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Huni bagi Warga Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah (SPM/IKK Outcome)		
d.	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Pekalongan	Persentase Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1,200,000,000	
3	ROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kota Pekalongan	Luas kawasan permukiman kumuh	2,645,400,000	
a.	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Kota Pekalongan	Persentase pelaksanaan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	236,400,000	
b	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Pekalongan	Persentase dokumen penataan kawasan permukiman kumuh yang disusun	550,000,000	
c	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Pekalongan	Luasan kawasan kumuh yang tertangani	1,859,000,000	
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kota Pekalongan	Persentase Pencegahan Rumah Tidak Layak Huni	6,620,000,000	
a.	Pencegahan	Kota	Jumlah Rumah Tidak	6,620,000,000	

	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pekalongan	Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kota Pekalongan	Persentase Perumahan yang Sudah Menyerahkan PSU	628,030,000	
a	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kota Pekalongan	Persentase Pencegahan Rumah Tidak Layak Huni	628,030,000	
6	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Kota Pekalongan	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	320,000,000	
a	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Persentase luasan bidang tanah yang terselesaikan ganti ruginya	320,000,000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, Kota Pekalongan antara lain sudah menjadi bagian dari Daftar Proyek Prioritas Strategis berupa Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa, berupa Teratasinya bencana banjir rob di DKI Jakarta, Semarang, Pekalongan, Demak, dan Cirebon. Proyek ini dilatarbelakangi oleh Banjir rob yang terjadi di beberapa kawasan perkotaan Pantai Utara Jawa (termasuk juga di Petanglong), serta kualitas air di 10 wilayah sungai di Kawasan Pantai Utara Pulau Jawa tercemar sedang hingga berat.

Sedangkan indikasi target yang akan diwujudkan adalah berupa Terpasangnya alat pemantauan penurunan tanah, terbangunnya tanggul laut dan bangunan pengaman pantai, terbangunnya SPALDT (Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat) permukiman dan Perkotaan, serta terbangunnya stasiun pemantauan kualitas air yang beroperasi secara kontinyu melalui Online Monitoring (ONLIMO). Selain itu, terdapat juga pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota dan Kawasan, Jalan Lingkar Pekalongan; serta Penyusunan peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana banjir.

Gambaran ringkas tersebut serta berbagai permasalahan dan isu strategis lain berdasarkan gambaran umum yang ada, maka perlu mempertimbangkan aspek sinergitas antara berbagai sumber daya dan pemerintahan di dalam penyusunan strategi dan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang kemudian akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Pekalongan dan masyarakat dalam mengimplementasikannya selama periode tahun 2021-2026.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023, Kota Pekalongan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dari Wilayah Pengembangan Petanglong yang meliputi Kabupaten Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan. Simpul utama pada kawasan Petanglong adalah kawasan perkotaan Pekalongan

dan sekitarnyam dengan sektor unggulan berupa pertanian, pariwisata, industri, dan perikanan dan Pedagang Kaki Lima.

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, maka Arah kebijakan pembangunan untuk wilayah Petanglong adalah "Pengembangan Wilayah Petanglong Berbasis Industri Pengolahan Kreatif dan Pertanian Dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan". Pengembangan wilayah Petanglong ini ditargetkan untuk bisa mencapai 4 (empat) indikator utama pada tahun 2023, yaitu Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00% sampai dengan 5,60%, Angka Kemiskinan pada kisaran 4,5% sampai dengan 9,13%; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,05% sampai dengan 5,55% serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kisaran 70,60 sampai dengan 75,13.

Untuk mencapai indikator makro tersebut maka dilakukan beberapa upaya, antara lain : Pemantapan konektivitas dan aksesibilitas; Pemenuhan kebutuhan air baku melalui pembangunan SPAM Regional Petanglong (Kabupaten Batang, Pekalongan dan Kota Pekalongan); serta Pengelolaan lingkungan diantaranya : utamanya rehabilitasi dan konservasi Kawasan Dieng (Pekalongan, Batang) serta Konservasi CAT Pekalongan – Pemalang; penanganan kerusakan pesisir; Penanganan Limbah Batik dan TPST Regional.

3.3 Program, Kegiatan dan sub Kegiatan

Faktor – faktor yang menjadikan bahan pertimbangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan dalam merumuskan program dan kegiatan, adalah disamping untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi OPD juga ada pertimbangan lain seperti :

1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

   Sesuai dengan visi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan terpilih, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 ini diarahkan untuk mencapai Visi "Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius". Dan telah dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi yang akan menjadi pemandu tugas bersama antara Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan mempunya tugas dan tanggungjawa untuk dapat mendukung misi ke 3,4 dan 7.

2. Pencapaian SDG's

Penerapan Sdgs pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tujuan meningkatkan konektivitas jalan dan jembatan antar wilayah kota, dengan target mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur jaringan jalan yang nyaman, berkualitas dan merata serta dapat melayani warga kota termasuk warga yang berkebutuhan khusus.

3. Pengentasan kemiskinan

Melalui pembangunan dari infrastruktur kota beserta sarana dan prasarananya diharapkan dapat menimgkatkan kesejahteraan masyarakat yang selanjutka akan berdampak positif pada pengentasan kemiskinan yang ada pada Kota Pekalongan

4. Pencapaian NSPK dan SPM

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/ Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab/Kota, jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Pendayagunaan Potensi Daerah

Kota Pekalongan merupakan simpul strategis di koridor pantai Utara Pulau Jawa. Berdasarkan sistem pengembangan wilayah pun, Kota Pekalongan merupakan salah satu simpul pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini pun tidak terlepas dari perkembangan perekonomian di Kota Pekalongan yang didominasi oleh sumbangan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; dan Konstruksi. Tidak dapat dipungkiri bahwa Kota Pekalongan berkembang dengan batik sebagai penggerak perekonomian wilayah, di samping sektor andalan lainnya yang terus dikembangkan yaitu sektor perikanan dan industri

5. Pengembangan Daerah terisolir

Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai utara Pulau Jawa, dengan ketinggian kurang lebih 1 meter di atas permukaan laut dengan posisi geografis antara 6 RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 | BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 19 50' 42" s.d. 6 55' 44" Lintang Selatan dan 109 37' 55" s.d. 109 42' 19" Bujur Timur serta dengan koordinat fiktif

510.00 – 518.00 Km membujur dan 517.75 – 526.75 Km melintang. Batas wilayah secara administratif adalah :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kab. Batang
- Sebelah Selatan : Kab. Pekalongan dan Kab. Batang
- Sebelah Barat : Kab. Pekalongan

Sehingga yang perlu mendapat perhatian adalah daerah yang bersebelahan dengan kota atau kabupaten lain.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota 2021-2026, melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun. Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan tersebut, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut:

Rencana Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan :

1. Program Kawasan Permukiman
   a. Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
   b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
   c. Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
   d. Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
   e. Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
   f. Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
   g. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

2. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
   a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Ustilitas Umum (Psu)
    a. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
    b. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
    c. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
4. Program Pengembangan Perumahan
    a. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
    b. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
    c. Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator
    d. Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana
5. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
    a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    b. Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        1) Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah
        2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
        3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
        1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
        2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
        3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD

4) Korrdinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulanan

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   1) Rekonsiiasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   1) Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapannya

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangnan Kantor
   2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3) Penyedian Peralatn Rumah Tangga
   4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
   7) Penyelenggaran Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
   3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   2) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   3) Pemelihraan/ Rehabilitasi Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINPERKIM KOTA PEKALONGAN

Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan pada tahun 2025 dan perkiraan maju pada tahun 2025, yang dilakukan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2021 – 2026, adapun faktor – faktor yang menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana kerja dan pendanaan adalah :

1. Program dan Kegiatan yang bersifat rutin se tiap tahun.
2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilakukan.
3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan yang mendukung infrastruktur Kota PekalonganSebagaimana Tabel T–C. 3.3

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Capaian Target Kinerja	28,761,288,000	Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman				100 persen	19,497,985,000	APBD			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	16,000,000	APBD		2 Dokumen	17,350,000
		Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renja yang disusun		2 Dokumen	2,500,000	APBD		2 Dokumen	2,750,000
		Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	1,500,000	APBD		2 Dokumen	1,650,000 0
		Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Renja yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Dokumen	12,000,000	APBD		4 Dokumen	12,950,000

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah		100 persen	3,102,461,000	APBD		100 persen	3,352,671,000
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		14 kali 0 Orang/bulan	3,070,811,000	APBD		100 Persen	3,321,021,000
		Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Bulan	30,000,000	APBD		12 Bulan	30,000,000
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan SKPD disusun		1 Dokumen	1,650,000	APBD		1 Dokumen	1,650,000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah		2 kali	9,500,000	APBD		2 kali	9,500,000
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanny **a**	Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi dan Pekan Batik Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 kali	9,500,000	APBD		2 kali	9,500,000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah		12 Bulan	234,000,000	APBD		12 bulan	209,686,000

		Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Bulan	5.000.000	APBD		12 Bulan	5.000.000
		Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor diadakan		35 unit	52,000,000	APBD		35 unit	52,000,000
		Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12 Bulan	2,000,000	APBD		12 Bulan	2.000.000
		Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		11 Bulan	65,000,000	APBD		11 Bulan	49,186,000
		Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Bulan	7,500,000.	APBD		12 Bulan	5,000,000
		Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah bulan Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Perundang undangan Jumlah		12 Bulan	2,500,000	APBD		12 Bulan	2,500,000

		Perundang undangan i	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan							
		Sub kegiatan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100 persen	100,000,000	APBD		100 persen	98,000,000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	1,800,000	APBD		100 persen	1,800,000
		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Bulan	1,800,000	APBD		12 Bulan	1,800,000
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Bulan	757,200,000	APBD		12 Bulan	758,200,000
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Bulan	195,000,000	APBD		12 Bulan	195,000,000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan	339,398,000	APBD		12 Bulan	286,357,000

		Pemerintahan Daerah								
		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Pemeliharaan kendaraan Dinas/Oprasional Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		12 Bulan	113,398,000	APBD		12 Bulan	90,000,000
		SubKegiatanPemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin berkala		1 unit	**126,000,000**	APBD		1 unit	**76,357,0000**
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	100,000,000	APBD		1 unit	120,000,000
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Jumlah Dokumen Data Rumah pada Kawasan Rawan Bencana yang disusun		1 dokumen	4,949,196,000	APBD		1 dokumen	1,714,461,000
		Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan		91,35 persen	75,000,000	APBD		91,35 persen	60,000,000

			Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, LahanLahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan, Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnyayang Belum Tertangani, data Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana, data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota							
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				90,000,000	APBD			50,000,000
		Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada masyarakat / sukarelawan tanggap bencana yang dilaksanakan		91,35 persen	10,000,000	APBD		91,35 persen	10,000,000

		Sub Kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih		91,35 persen	50,000,000	APBD		91,35 persen	30,000,000
		Sub Kegiatan Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan rembug warga yang dilaksanakan		91,35 perse	30,000,000	APBD		91,35 perse	30,000,000
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Presentase Rumah Layak Huni bagi Warga Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah (SPM/IKK Outcome)		91,35 persen	1.420.000.000	APBD		89,66 Persen	1.420.000.000
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) didaerah kab/kota dilaksanakan		91,35 persen	3,584,196,000	APBD		100 Persen	264,461,000
		Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	umlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi Jumlah rumah yang direhabilitasi		91,35 perse	262,500,000	APBD		320 SR	164,461,000
		Sub Kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan	Jumlah Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		1 lokasi	700,000,000	APBD		91,35 perse	0

		Rumah bagi Korban Bencana								
		Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun Jumlah unit rumah yang terbangun bagi korban bencana		**5 Unit**	**2,621,696,000**	APBD		**91,35 persen**	**100,000,000**
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		100 Persen	1,200,000,000	APBD		100 Persen	1,200,000,000
		Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah rusunawa yang dipelihara Jumlah unit villa/pesanggrahan (Pondok Boro) yang dipelihara		3 Unit 1 unit	1,200,000,000	APBD		**91,35 persen**	1,200,000,000
	Program Kawasan Permukiman				1 dokumen	2,645,400,000	APBD		1 dokumen	17,004,276,000
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase pelaksanaan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		291,47 hektar	236,400,000	APBD		291,47 hektar	236,400,000
		Sub kegiatan Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan	Jumlah Dokumen DE Konsultan Perencana disusun		2 Dokumen	168,000,000	APBD		2 Dokumen	168,000,000

		Permukiman Kumuh								
		Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha yang dilaksanakan		12 Kali	68,400,000	APBD		12 Kali	68,400,000
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase dokumen penataan kawasan permukiman kumuh yang disusun		**4 Kecamatan**	**550,000,000**	APBD		**4 Kecamatan**	**550,000,000**
		Sub kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		4 Kecamatan	400,000,000	APBD		4 Kecamatan	100,000,000
		Sub kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	Jumlah dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang disusun		1 Dokumen	100,000,000	APBD		1 Dokumen	0

		Kumuh dan Permukiman Kumuh								
		Sub kegiatan Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah program pemerintah pusat atau provinsi yang difasilitasi		2 Paket	50,000,000	APBD		2 Paket	150,000,000
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				1,859,000,000	APBD			16,447,876,000
		Sub kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh yang disusun		1 Dokumen	74,000,000	APBD		291.47 Hektar	74,000,000
		Sub KegiatanPerbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH (IKK Output)		93 Unit	1,785,000,000	APBD		93 Unit	1,000,000,000
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh					6,620,000,000	APBD			4,588,188,000
		Sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Dalam Rangka Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk		650 Unit	6,620,000,000	APBD		650 Unit	4,588,188,000

		Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki							
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)					628,030,000	APBD			614,521,000
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Perumahan yang Sudah Menyerahkan PSU		1 Dokumen	628,030,000	APBD		1 Dokumen	614,521,000
		Sub kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome))		1 Aplikasi	240,000,000	APBD		1 Aplikasi	230,000,000
		Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah fasilitas jalan lingkungan yang ditangani Jumlah fasilitas RTNH yang ditangani Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		**330 meter 2 Unit 4 Lokasi**	**280,000,000**	APBD		**330 meter 2 Unit 4 Lokasi**	**280,000,000**
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi tentang PSU Perumahan (Unit Rumah yang Terfasilitasi Air Minum, Jalan Lingkungan, Akses Sanitasi, RTNH, dan PJU) Jumlah		1 Dokumen 10 Unit	108,030,000	APBD		1 Dokumen 10 Unit	104,521,000

			perumahan yang telah menyerahkan aset PSU							
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan					320,000,000	APBD			1,090,262,000
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			100 persen	320,000,000	APBD		100 persen	1,090,262,000
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kab/Kota yang disusun Jumlah Dokumen Proses Legalisasi Pengadaan Tanah Jumlah Ganti Rugi atas Tanah /Bangunan atas proyek Pemerintah Jumlah Lokasi Pengadaan Tanah		4 Dokumen 2 Dokumen 2 lokasi 5 lokasi	320,000,000	APBD		4 Dokumen 2 Dokumen 2 lokasi 5 lokasi	1,090,262,000
	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee					9,285,0000	APBD			9,086,000
		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian	Persentase ketercapaian Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah		100 persen	9,285,000	APBD		100 persen	9,086,000

		Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee							
		Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah peresentase ketercapaian penetapan subjek dan objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		25 persen	9,285,000			25 persen	9,086,000
					TOTAL	19,827,270,000				29,860,636,000

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan merupakan gambaran rencana kerja dalam menunjang tercapainya visi, misi dan arah pembangunan yang telah ditetapkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dalam mewujudkan Kota Pekalongan yang maju.

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kota Pekalongan Tahun Angaran 2025 Kota Pekalongan menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan APBD yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) Tahun 2025 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025. Adapun Kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program – program Rencana Kerja Penetapan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Kota Pekalongan Tahun 2025 dengan sebaik – baiknya;
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan tahun 2025, Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2025 ini juga disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

   Pada akhirnya keberhasilan pembangunan di Kota Pekalongan selain dilaksanakan

Jajaran Pemerintah Kota Pekalongan juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan dalam mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat terwujud sesuai waktu yang telah ditentukan.

Pekalongan, 02 Maret 2024

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman Kota
Pekalongan

ANDRIANTO,
ST,MT Pembina Tk I
NIP. 19730111 199803 1 006

RENCANA KERJA

SATPOL PP, DAMKAR & PENYELAMATAN
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN (SATPOL P3KP)

KOTA PEKALONGAN

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai Rencana Kerja Tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Renja Kerja ini kami ucapkan terima kasih.

Pekalongan, 01 Agustus 2024
KEPALA SATPOL PP, DAMKAR
DAN PENYELAMATAN
KOTA PEKALONGAN

SRIYANA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680709 199003 1 008

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 2

I.1 Latar Belakang 2

I.2 Landasan Hukum 3

I.3 Maksud dan Tujuan 5

I.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 8

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 8

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 11

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 13

2.3.1 Analisis Tingkat Kinerja 13

2.3.2 Permasalahan 14

2.3.3 Dampak terhadap Pencapaian Visi Misi 15

2.3.4 Tatangan dan Peluang 15

II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 16

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 28

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 29

III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 29

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 30

III.3 Program dan Kegiatan 32

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 42

BAB V PENUTUP 47

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan	9
Tabel T-C.30	Pencapaian kinerja pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	12
Tabel T-C.31	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	19
Tabel T-C.32	Usulan prgoram dan kegiatan dari pemangku kepentingan tahun 2024	28
Tabel 3.2	Tujuan Jangka Menengah Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2024	31
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan	33
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2024	42
Tabel 4.2	Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu Anggaran Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2024	43

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang diimplikasikan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Pasal 27), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah merupakan Dokumen perencanaan PD untuk periode 1 tahun, memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Renja Perangkat Daerah juga memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah, pada tahun-tahun yang sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi, serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai

kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan serta mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan aturan tersebut, maka dalam rangka mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan tahunan daerah perlu dibuat Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang sistematis, bermutu, akuntabel dan tepat waktu. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan tahun 2025 disusun dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Pekalongan, rencana strategis Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan dan RKPD Kota Pekalongan. Penyusunan ini dilakukan melalui proses koordinasi antar seksi di lingkungan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan, konsultasi dan koordinasi dengan BAPPEDA dan OPD terkait di Kota Pekalongan.

I.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan tahun 2025 didasarkan kepada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
10. Peraturan Walikota Nomor 97 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;

13. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025.

I.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan tahun 2025 dimaksudkan untuk dan menyelaraskan prioritas program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu, penyusunan Rencana Kerja ini juga dimaksudkan untuk melakukan upaya sinkronisasi terhadap program-program dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pembangunan daerah pada tahun 2025. Hal ini untuk lebih meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan media untuk menyamakan persepsi, menyatukan komitmen dan langkah-langkah kebijakan pemerintah daerah Kota Pekalongan pada Tahun 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan adalah :

1. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi program, kegiatan dan sub kegiatan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional;
2. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. Terdapat acuan bagi pemangku peran (stakeholder) dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketentaman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
4. Terdapat acuan untuk pertanggungjawaban Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentaman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I **PENDAHULUAN**, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**, pada bab ini dibagi menjadi lima bagian pembahasan, yaitu :

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya;

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan;

II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, tantangan dan peluang, dampak terhadap visi/misi kepala daerah dan terhadap capaian

program nasional/ internasional serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan;

II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD berisikan uraian mengenai perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, diuraikan kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota.

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH, pada bab ini pembahasan dibagi menjadi beberapa pembagian pembahasan, yaitu :

III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah , pada bagian ini, perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah;

III.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program/ kegiatan/ sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, tabel rencana program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, memuat rencana kerja dan pendanaan indikatif perangkat daerah.

BAB V PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2025, diperlukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD sampai dengan tahun 2024 Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan PD.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cata Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu (Tahun 2024) Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan dapat disajikan dalam tabel T-C.29 sebagai berikut :

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan

No.	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (2023)	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2024		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2024	Persentase Capaian RPJMD	Status Capaian
						Target 2024	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas										
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum										
1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK Outcome)	Persen	70	80	60	66	60	90,91	85,71	Tidak Tercapai
	- Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Persen	100	100	100	95	100	105,26	100	Tercapai
	- Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Perda	20	16	12	20	12	60	60	Tidak Tercapai
	- Persentase Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Persen	21	7,69	8,33	11	8,33	75,73	39,67	Tidak Tercapai
Program Pencegahan, Penganggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran										
1	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	- Persentase penanganan aduan kebakaran dan kedaruratan sipil non kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	- Persentase sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang dianalisis kesiapannya	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	- Persentase partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	- Persentase penanganan kondisi membahayakan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai

No.	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (2023)	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2024		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2024	Persentase Capaian RPJMD	Status Capaian
						Target 2024	Realisasi 2024			
Non Urusan										
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100	100	38,39	100	38,39	38,39	38,39	Tercapai
	- Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	11,11	100	11,11	11,11	11,11	Tercapai
	- Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	66,67	100	66,67	66,67	66,67	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	33,81	100	33,81	33,81	33,81	Tercapai
	- Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100	0	100	0	0	0	Tercapai
	- Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	100	51,43	100	51,43	51,43	51,43	Tercapai
	- Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	50	100	50	50	50	Tercapai
2	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	100	9,51	100	9,51	9,51	9,51	Tercapai
	- Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	9,51	100	9,51	9,51	9,51	Tercapai

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam Norma Standar Pelayanan Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK). Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan di bidang ketentraman, ketertibaman umum dan perlindungan masyarakat, maka cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan sesuai tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja utama Rencana Stategis Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan.

Kinerja pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan dapat dilihat pada capaian pelaksanaan tugas pokoknya memimpin, merumuskan, mengatur, pembina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang ketentraman, ketertibaman umum dan perlindungan masyarakat.

Analisis kinerja pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan dengan kinerja yang menjadi target pelayanan serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Tabel. T.C-30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
Kota Pekalongan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai SAKIP OPD			71,50 Indeks	73 Indeks	74,50 Indeks	76 Indeks	73,80 Indeks	74,00 Indeks	n/a	76 Indeks	
2	Persentase penanganan bencana kebakaran	SPM		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM	SPM		60%	70%	80%	90%	82,40%	82,41%	85,10%	90%	

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Analisis Tingkat Kinerja

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertibaman umum dan perlindungan masyarakat pada Pemerintah Kota Pekalongan, Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan telah menyusun program kerja dan kegiatan dalam Rencana Strategis yang memuat tugas pokok dan fungsi dan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pekalongan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Dalam RPJMD tersebut, Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan mendukung pencapaian misi 6 yaitu "Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlakul Karimah" dengan Tujuan "Menjamin kepastian hukum dan ketertiban umum" dan misi 7 yaitu "Mewujudkan Tatat Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government" dengan tujuan "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik".

Dalam pencapaian tujuan "Menjamin kepastian hukum dan ketertiban umum", sasaran "Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum", dengan Indikator Kinerja "Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan SPM". Realisasi Indikator Kinerja tersebut pada Triwulan II tahun 2024 sebesar 85,10% dibanding target 80% maka capaian kinerjanya adalah 106,34%. Pencapaian tujuan "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik", sasaran "Meningkatnya penanganan bencana kebakaran" dengan indikator kinerja "Persentase penanganan bencana kebakaran" pada triwulan II tahun 2024 sebesar 100% dan sasaran "Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah" dengan indikator "Nilai SAKIP OPD" pada tahun 2023 dengan target nilai indeks 73,00 dan realisasi 74,00 maka capaian kinerja 101,37%. Dari hasil capaian kinerja tersebut rata-rata capaian diatas 100% , maka capaian kinerja Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan termasuk kategori sangat tinggi / sangat berhasil.

2.3.2 Permasalahan

Selama menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

Permasalahan-permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh antara lain adalah:

1. Rendahnya kepatuhan hukum dan pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang berlaku;
2. Faktor Ekonomi dengan adanya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang membuat masyarakat beralih menjadi pedagang pasar tiban/PK5;
3. Terbatasnya lahan tempat berjualan bagi pedagang pasar tiban/PK5;
4. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
5. Belum optimalnya koordinasi internal antar seksi;
6. Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
7. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP);
8. Belum optimalnya peran PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dalam melaksanakan tupoksinya;
9. Belum optimalnya koordinasi antar Aparat Penegak Hukum dan stakeholder terkait (Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan, POLRI, TNI, Kejaksaan, Bag.Hukum, Kesbangpol, Bea Cukai);
10. Perlunya peningkatan kompetensi SDM/personil Penegakan Perda dan petugas pemadam kebakaran;
11. Belum optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
12. Masih kurangnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran;

2.3.3 Dampak terhadap Pencapaian Visi Misi

Menjaga ketentraman, ketertibaman umum dan perlindungan masyarakat yang telah dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan dalam hal ini Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan memegang peranan dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja pencapaian tujuan pemerintah. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja terbaik Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan akan berdampak langsung pada kinerja yang telah ditetapkan.

Terkait dengan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026, kinerja Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan berdampak pada pencapaian misi "Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlakul Karimah" dan misi "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik".

2.3.4 Tantangan dan Peluang

Tantangan pengembangan pelayanan pada Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Bermunculannya pengamen, silverman, badut dan lainnya pada prempatan-perempatan lampu lalu lintas;
2. Bertambahnya jumlah pedagang kaki lima di wilayah Kota Pekalongan;
3. Adanya penolakan dari pihak yang melanggar aturan saat penegakkan Perda;
4. Banyaknya gang-gang kecil yang mempersulit pemadaman kebakaran;
5. Terbatasnya jumlah personil dan kompetensi personil pemadam kebakaran;
6. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait bahaya kebakaran, pencegahan dan penanganannya.

Peluang pengembangan pelayanan pada Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan keselamatan yang meningkatkan kerjasama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penegakkan peraturan;

2. Adanya kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan.

Isu strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas personil agar terlatih dan memiliki pengetahuan dan keterampilanyang memadai dalam penanganan konflik, penegakan prda dan penanggulangan kebakaran;
2. Meningkatkan peralatan dan teknologi yang digunakan Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan peralatan modrn dan canggih sehingga dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
3. Mengoptimalkan penggunaan sistem pemantauan dan peringatan dini yang lebih canggih, mutakhir dan handal;
4. Meningkatkan kerjasama anatar Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan instansi terkait lainnya guna meningkatkan sinergi dalam penanganan konflik, penegakan perda dan penanggulangan kebakaran;
5. Mengoptimalkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD Kota Pekalongan 2025 dimaksudkan untuk membandingkan anatar rumusan hasil indentifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan, dengan arahan Walikota Pekalongan terkait program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan berdasarkan rancangan awal RKPD Kota Pekalongan 2025.

Review terhadap rancangan awal RKPD Kota Pekalongan 2025, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinrja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program.kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan adalah:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPS Kota Pekalongan 2025;
2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Menyajikan dalam bentuk matrik tabel dengan menempatkan program/kegiatan yang sama pada garis yang sama untuk memudahkan analisis;
4. Melakukan pengecekan apakah program/kegiatan yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan sudah termuat dalam rancangan awal RKPD. Jika belum termuat, maka perlu dibuatkan catatan penting;
5. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
6. Untuk jenis program dan kegiatan yang sesuai, dilakukan langkah berikut:
   a. Mengecek apakah indikator kinerjanya sesuai, jika tidak, maka menentukan indikator yang akan dipilih;
   b. Meneliti besaran tolok ukur atau target capaian program/kegiatan, bila terdapat perbedaan, maka mengkaji kembali besaran tersebut dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber dana lainnya; dan
   c. Memberi catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja Perubahan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan.
7. Untuk jenis program dan kegiatan yang tidak sesuai (berbeda), dilakukan langkah berikut:
   a. Untuk program dan kegiatan yang hanya terdapat di dalam rancangan awal RKPD Kota Pekalongan 2025, maupun yang hanya terdapat dalam identifikasi kebutuhan hasil analisis, melakukan pengecekan apakah masih layak untuk direncanakan, dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata, sasaran target Renstra visi-misi kepala daerah, dan ketersediaan pendanaan;
   b. Meneliti kembali kemudian tentukan indikator yang akan dipilih;
   c. Meneliti kembali kemudian tentukan besaran tolok ukur atau target capaian program dan kegiatan, dengan mempertimbangkan ketrsediaan pagu indikatif

berdasarkan arahan rancangan awal RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025 target capaian Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan serta ketersediaan dana lainnya;

d. Memberi catatan penting sebagai bahan pertibangan dalam memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja SKPD.

8. Merumuskan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025 yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan; dan
9. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Rancangan Renja 2025 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan, tidak ada perubahan rumusan program dan kegiatan yang telah disusun. Proses perbandingan antara rancangan awal RKPD Kota Pekalongan 2025 dengan hasil analisis kebutuhan dilakukan untuk mengetahui sesuai/tidak sesuai, cocok/ketidakcocokan besarannya (anggaran/volume/satuan) terhadap program dan kegiatan yang sudah dirumuskan.

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kota Pekalongan

Nama Perangkat Daerah : Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kota Pekalongan**	**1. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja** **2. Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah** **3. Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah**	**100 persen** **100 persen** **100 persen**	**5.366.877.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Pekalongan**	**1. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja** **2. Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah** **3. Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah**	**100 persen** **100 persen** **100 persen**	**5.716.848.000**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 persen**	**23.970.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 persen**	**20.970.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	7.320.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	7.320.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	1.650.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	1.650.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	15 laporan	15.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	15 laporan	12.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**4.416.425.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**4.830.433.000**	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	42 orang/ bulan	4.364.775.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	42 orang/ bulan	4.778.783.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	50.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	50.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir Tahu SKPD	1 laporan	1.650.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir Tahu SKPD	1 laporan	1.650.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 persen**	**9.500.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 persen**	**5.000.000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 paket	9.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 paket	5.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100 persen**	**222.754.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100 persen**	**222.912.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	7.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	7.500.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	28.254.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	30.412.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	10.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	8.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	97.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	97.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekalongan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	7.500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekalongan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	7.500.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	2.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	2.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	35 laporan	70.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	35 laporan	70.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**134.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**128.600.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	2.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	132.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	126.600.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**560.228.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**508.933.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	29 unit	437.228.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	29 unit	310.222.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 unit	83.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 unit	61.605.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	66 unit	40.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	66 unit	32.500.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Kota Pekalongan**	**Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan**	**66 persen**	**5.999.491.000**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kota Pekalongan**	**Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan**	**68 persen**	**5.859.566.000**	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Pekalongan**	**Persentase Penanganan Gangguan Trantibum**	**95 persen**	**1.822.410.000**	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Pekalongan**	**Persentase Penanganan Gangguan Trantibum**	**97 persen**	**1.706.805.000**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	40 dokumen	1.020.410.000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	39 dokumen	1.020.410.000	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	2 dokumen	25.000.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	2 dokumen	18.750.000	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Pekalongan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	155 orang	48.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Pekalongan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	155 orang	38.645.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	2 dokumen	148.000.000	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	2 dokumen	125.000.000	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kota Pekalongan	Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui Deteksi Dini dan cgah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	300 laporan	106.000.000	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kota Pekalongan	Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan	300 laporan	90.000.000	
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Pekalongan	Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	2000 laporan	450.000.000	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Pekalongan	Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	2000 laporan	414.000.000	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**Kota Pekalongan**	**Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK Output)**	**20 Perda**	**4.162.581.000**	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Kota Pekalongan**	**Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan**	**20 Perda**	**4.138.261.000**	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali	Kota Pekalongan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala	12 laporan	96.600.000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan	Kota Pekalongan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah	12 laporan	77.280.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kota		Daerah			Bupati/Wali Kota		dan Peraturan Kepala Daerah			
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Pekalongan	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai SOP	12 laporan	4.045.981.000	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Pekalongan	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai SOP	12 laporan	4.045.981.000	
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Pekalongan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan trhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	48 laporan	20.000.000	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Pekalongan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan trhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	48 laporan	15.000.000	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	**Kota Pekalongan**	**Persentase Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS**	**21 persen**	**14.500.000**	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Kota Pekalongan**	**Persentase Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS**	**21 persen**	**14.500.000**	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kota Pekalongan	Jumlah laporan hasil pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS Penegak Perda	3 laporan	14.500.000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kota Pekalongan	Jumlah laporan hasil pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS Penegak Perda	3 laporan	14.500.000	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	**Kota Pekalongan**	**Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**	**100 persen**	**1.168.808.000**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Kota Pekalongan**	**Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**	**100 persen**	**1.022.977.000**	
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Pekalongan**	**Persentase penanganan aduan kebakaran dan kedaruratan sipil non kebakaran**	**100 persen**	**971.737.000**	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Pekalongan**	**Persentase penanganan aduan kebakaran dan kedaruratan sipil non kebakaran**	**100 persen**	**845.357.000**	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen NSPM pencegahan/penanggulangan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	4 dokumen	53.000.000	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen NSPM pencegahan/penanggulangan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	4 dokumen	50.000.000	
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	250 laporan	833.737.000	Pemadaman dan Pengendalian Kebakara dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	180 laporan	722.857.000	
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kota Pekalongan	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	42 orang	20.000.000	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kota Pekalongan	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	45orang	15.000.000	
	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Kota Pekalongan	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki sistem komunikasi & informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIKP) yang bisa di secara perbaharui atau dimutakhirkan secara berkala (Setiap Tahun), berkelanjutan dan real time yang dimiliki oleh desa/kelurahan setiap tahunnya	2 desa/ kelurahan	10.000.000	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Kota Pekalongan	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki sistem komunikasi & informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIKP) yang bisa di secara perbaharui atau dimutakhirkan secara berkala (Setiap Tahun), berkelanjutan dan real time yang dimiliki oleh desa/kelurahan setiap tahunnya	2 desa/ kelurahan	7.500.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Pekalongan	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	3 unit	15.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Pekalongan	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	2 unit	15.000.000	
	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar wilayah Kabupaten/ Kota dalam pencgahan, penanggulangan	3 dokumen	40.000.000	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar wilayah Kabupaten/ Kota dalam pencgahan, penanggulangan	4 dokumen	35.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran			Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran			
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	**Kota Pekalongan**	**Persentase sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang dianalisis kesiapannya**	**100 persen**	**44.789.000**	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**Kota Pekalongan**	**Persentase sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang dianalisis kesiapannya**	**100 persen**	**40.000.000**	
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen yang memuat data bangunan/ gedung/ lingkungan yang dipersyaratkan harus memiliki sistem proteksi kebakaran	12 dokumen	44.789.000	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen yang memuat data bangunan/ gedung/ lingkungan yang dipersyaratkan harus memiliki sistem proteksi kebakaran	12 dokumen	40.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	**Kota Pekalongan**	**Persentase partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kebakaran**	**100 persen**	**80.620.000**	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Kota Pekalongan**	**Persentase partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kebakaran**	**100 persen**	**72.620.000**	
	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Kota Pekalongan	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	320 orang	50.000.000	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Kota Pekalongan	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	320 orang	42.000.000	
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kota Pekalongan	Jumlah desa/ kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL)	21 desa/ kelurahan	30.620.000	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kota Pekalongan	Jumlah desa/ kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan	21 desa/ kelurahan	30.620.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			setiap tahunnya					(SKKL) setiap tahunnya			
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	**Kota Pekalongan**	**Persentase penanganan kondisi membahayakan**	**100 persen**	**71.662.000**	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	**Kota Pekalongan**	**Persentase penanganan kondisi membahayakan**	**100 persen**	**65.000.000**	
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Kota Pekalongan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan operasi penyelamatam yang mengancam keselamatan manusia	24 laporan	71.662.000	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	65.000.000	

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam penyusunan program dan kegiatan terlebih dahulu menampung aspirasi masyarakat dari pemangku kepentingan, baik dari OPD terkait, kelompok masyarakat Kota Pekalongan yang langsung ditujukan kepada Perangkat daerah dan juga hasil tinjauan kelapangan.

Berdasarkan hasil rumusan dari pemangku kepentingan tersebut dilakukan penyesuaian dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah sekaligus merupakan program dan kegiatan yang merupakan isu-isu strategis Perangkat Daerah.

Akan tetapi pada Musrenbang Kota, Belum ada usulan dari pemangku kepentingan, baik dari SKPD terkait, kelompok masyarakat Kota Pekalongan

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat disajikan dalam tabel T-C.32 sebagaimana terlampir.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		N I H I L			

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada hakekatnya perencanaan pembangunan nasional perupakan acuan utama bagi setiap daerah propinsi dan kabupaten kota dalam merumuskan kebijaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Arah kebijaksanaan pembangunan daerah kota harus didasari oleh visi dan misi daerah dan output akhirnya berupa pola dasar pembangunan daerah.

Kebijakan Pemerintah tentang Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 dimana dalam PP tersebut dijelaskan mengenai tugas Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan yaitu menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan dalam rencana program dan kegiatan didasari kepada Melindungi Segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara. Disini Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan berperan serta dalam proses melindungi segenap bangsa dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlidungan masyarakat di Kota Pekalongan. Selanjutnya penjabaran program dan kegiatan yang menyangkut ketentraman, ketertiban umum dan perlidungan masyarakat secara konkrit dituangkan dalam bentuk rencana kerja tahunan dan operasionalnya dirumuskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 87 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satpol P3KP mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Satpol P3KP Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. perumusan dan penetapan sasaran, program bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
b. perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
c. penyelenggaraan kebijakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat;
e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
f. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
g. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
h. penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
i. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
j. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran dalam Renja adalah turunan penjabaran tujuan Renstra yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan serta identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan- tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai sesuai tujuan organisasi.

Adapun tujuan dan sasaran Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan, telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik
   - Sasaran 1.1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
   - Sasaran 1.2 : Meningkatnya penanganan bencana kebakaran
2. Tujuan 2 : Menjamin kepastian hukum dan ketertiban umum
   - Sasaran 2.1 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

Untuk mengevaluasi pencapaian sasaran tersebut, maka dirumuskan indikator sasaran dan formulasi/rumus perhitungan indikator sasaran. Indikator sasaran yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan sampai dengan tahun 2025 merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing seksi selaku penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan Jangka Menengah Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
Kota Pekalongan Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		1. Indeks Kepuasan Masyarakat	86,78 Indeks
		a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	a. Nilai Sakip Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	76 Indeks
		b. Meningkatnya penanganan bencana kebakaran	b. Persentase penanganan bencana kebakaran	100%
2.	Menjamin kepastian hukum dan ketertiban umum		1. Tingkat ketentraman dan ketertiban umum	100%
		a. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	a. Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM	90%

III.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan/sub kegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Perangkat daerah menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Rencana kerja tahun 2025 merupakan lanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas untuk mewujudkan tujuan dan sasarannya. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebagian besar masih dilaksanakan pada tahun 2024. Pada prinsipnya program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan skala prioritas sesuai pagu indikatif yang ditetapkan.

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebanyak 3 program, 13 kegiatan dan 40 sub kegiatan dengan jumlah pagu Rp. 12.866.127.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan. Adapun program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2024 tersebut dapat dilihat pada tabel T-C.33 sebagai berikut :

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**12.599.391.000**				**12.955.309.000**
01.05	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**12.599.391.000**				**12.955.309.000**
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja** **2. Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah** **3. Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah**	**Kota Pekalongan**	**100 persen** **100 persen** **100 persen**	**5.716.848.000**	**DAU**		**100 persen** **100 persen** **100 persen**	**5.648.562.000**
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Kota Pekalongan**	**100 persen**	**20.970.000**	**DAU**		**100 persen**	**62.450.000**
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	3 dokumen	7.320.000	**DAU**		2 dokumen	10.750.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	2 dokumen	1.650.000	**DAU**		2 dokumen	1.650.000
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Pekalongan	15 laporan	12.000.000	DAU		11 laporan	50.050.000
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**Kota Pekalongan**	**100 persen**	**4.830.433.000**	**DAU**		**100 persen**	**4.578.591.000**
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kota Pekalongan	42 orang/ bulan	4.778.783.000	DAU		38 orang/ bulan	4.524.941.000
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Kota Pekalongan	12 dokumen	50.000.000	DAU		12 dokumen	52.000.000
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir Tahu SKPD	Kota Pekalongan	1 laporan	1.650.000	DAU		1 laporan	1.650.000
1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Kota Pekalongan**	**100 persen**	**5.000.000**	**DAU**		**100 persen**	**9.500.000**
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kota Pekalongan	1 paket	5.000.000	DAU		1 paket	9.500.000
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**Kota Pekalongan**	**100 persen**	**222.912.000**	**DAU**		**100 persen**	**225.441.000**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Pekalongan	4 paket	7.500.000	DAU		2 paket	7.500.000
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Pekalongan	4 paket	30.412.000	DAU		2 paket	35.941.000
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kota Pekalongan	4 paket	8.000.000	DAU		12 paket	10.000.000
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kota Pekalongan	4 paket	97.000.000	DAU		12 paket	97.000.000
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kota Pekalongan	2 paket	7.500.000	DAU		12 paket	7.500.000
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kota Pekalongan	2 dokumen	2.500.000	DAU		12 dokumen	2.500.000
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	35 laporan	70.000.000	DAU		150 laporan	65.000.000
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Pekalongan**	**100 persen**	**128.600.000**	**DAU**		**100 persen**	**129.125.000**
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kota Pekalongan	4 laporan	2.000.000	DAU		12 laporan	2.000.000
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kota Pekalongan	12 laporan	126.600.000	DAU		12 laporan	127.125.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Pekalongan**	**100 persen**	**508.933.000**	**DAU**		**100 persen**	**559.690.000**
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kota Pekalongan	29 unit	414.828.000	DAU		29 unit	400.000.000
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pekalongan	2 unit	61.605.000	DAU		2 unit	119.690.000
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kota Pekalongan	66 unit	32.500.000	DAU		66 unit	40.000.000
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan**	**Kota Pekalongan**	**68 persen**	**5.859.566.000**	**DAU**		**68 persen**	**6.131.457.000**
1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penanganan Gangguan Trantibum**	**Kota Pekalongan**	**100 persen**	**1.706.805.000**	**DAU**		**100 persen**	**1.822.410.000**
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	39 dokumen	1.020.410.000	DAU		40 dokumen	1.020.410.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Pekalongan	2 dokumen	18.750.000	DAU		2 dokumen	25.000.000
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kota Pekalongan	155 orang	38.645.000	DAU		148 orang	48.000.000
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	Kota Pekalongan	2 dokumen	125.000.000	DAU		2 dokumen	148.000.000
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui Deteksi Dini dan cgah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Kota Pekalongan	300 laporan	90.000.000	DAU		300 laporan	106.000.000
1.05.02.2.01.0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	Kota Pekalongan	2000 laporan	414.000.000	DAU		2000 laporan	450.000.000
1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan**	**Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK Output)**	**Kota Pekalongan**	**20 Perda**	**4.138.261.000**	**DAU**		**20 Perda**	**4.289.496.000**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Bupati/Wali Kota								
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Pekalongan	12 laporan	77.280.000	DAU		12 laporan	223.515.000
1.05.02.2.02.0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai SOP	Kota Pekalongan	12 laporan	4.045.981.000	DAU		12 laporan	4.045.981.000
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan trhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Pekalongan	48 laporan	15.000.000	DAU		48 laporan	20.000.000
1.05.02.2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Persentase Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS**	**Kota Pekalongan**	**18 persen**	**14.500.000**	**DAU**		**21 persen**	**19.551.000**
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah laporan hasil pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS Penegak Perda	Kota Pekalongan	3 laporan	14.500.000	DAU		3 laporan	19.551.000
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**	**Kota Pekalongan**	**100 persen**	**1.022.977.000**	**DAU**		**100 persen**	**1.175.290.000**
1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan**	**Persentase penanganan aduan kebakaran dan kedaruratan sipil non kebakaran**	**Kota Pekalongan**	**100 persen**	**845.357.000**	**DAU**		**100 persen**	**975.239.000**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen NSPM pencegahan/penanggulangan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Kota Pekalongan	4 dokumen	50.000.000	DAU		4 dokumen	53.000.000
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakara dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	180 laporan	722.857.000	DAU		250 laporan	837.239.000
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakara	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Kota Pekalongan	45 orang	15.000.000	DAU		38 orang	20.000.000
1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki sistem komunikasi & informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIKP) yang bisa di secara perbaharui atau dimutakhirkan secara berkala (Setiap Tahun), berkelanjutan dan real time yang dimiliki oleh desa/kelurahan setiap tahunnya	Kota Pekalongan	2 desa/ kelurahan	15.000.000	DAU		2 desa/ kelurahan	10.000.000
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	Kota Pekalongan	2 unit	10.950.000	DAU		3 unit	15.000.000
1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan,	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar wilayah	Kota Pekalongan	4 dokumen	35.000.000	DAU		3 dokumen	40.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kabupaten/ Kota dalam pencgahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran							
1.05.04.2.02	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**Persentase sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang dianalisis kesiapannya**	**Kota Pekalongan**	**100 persen**	**40.000.000**	**DAU**		**100 persen**	**45.466.000**
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen yang memuat data bangunan/ gedung/ lingkungan yang dipersyaratkan harus memiliki sistem proteksi kebakaran	Kota Pekalongan	12 dokumen	40.000.000	DAU		12 dokumen	45.466.000
1.05.04.2.01	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Persentase partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kebakaran**	**Kota Pekalongan**	**100 persen**	**72.620.000**	**DAU**		**100 persen**	**81.839.000**
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	Kota Pekalongan	320 orang	42.000.000	DAU		320 orang	50.000.000
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah desa/ kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	Kota Pekalongan	21 desa/ kelurahan	30.620.000	DAU		21 desa/ kelurahan	31.839.000
1.05.04.2.05	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	**Persentase penanganan kondisi membahayakan**	**Kota Pekalongan**	**100 persen**	**65.000.000**	**DAU**		**100 persen**	**72.746.000**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan operasi penyelamatam yang mengancam keselamatan manusia	Kota Pekalongan	12 laporan	65.000.000	DAU		24 laporan	72.746.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan rencana program dan kegiatan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra, dan visi dan misi Kota Pekalongan yang tertuang dalam RPJMD. Program kerja utama Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kota Pekalongan adalah :

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja dari program tersebut menjadi tanggung jawab Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan dalam evaluasi RKPD dan LKPJ. Target capaian kinerja tahun 2025 yang direncanakan dalam Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja
Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2025
1	2	3	4	5
Misi 6 RPJMD : Melestarikan budaya, kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan yang berakhlaqul karimah				
1	Menjamin kepastian hukum dan ketertiban umum		Tingkat ketentraman dan ketertiban umum	100 Persen
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM	90 Persen
Misi 7 RPJMD : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan *Good Governance* dan *Clean Government*				
1	Meningkatkan kualitas layanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	86,78 Indeks
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	76 Indeks
		Meningkatnya penanganan bencana kebakaran	Persentase penanganan bencana kebakaran	100 Persen

Dalam Renja Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2025 terdapat 13 kegiatan dan 37 sub kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Setiap sub kegiatan juga telah dirumuskan indikator kinerja sub kegiatan. Perumusan sub kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh kegiatan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Kebutuhan pendanaan pada Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan untuk tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 4.2
Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu Anggaran
Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota pekalongan
Tahun 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Suber Dana
1	2	3	4
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**11.813.808.000**	
01.05	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**11.813.808.000**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.971.555.000**	
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**18.110.000**	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.140.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.340.904.000**	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.289.254.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Suber Dana
1	2	3	4
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**5.000.000**	
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**162.750.000**	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.480.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.210.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.480.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.810.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.480.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.830.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**126.929.000**	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.278.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.651.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**318.222.000**	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	310.222.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**4.968.603.000**	
1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**1.052.490.000**	
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	758.590.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	15.410.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan	91.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Suber Dana
1	2	3	4
	Ketentraman dan Ketertiban Umum		
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	31.390.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.02.2.01.0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	155.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**3.905.163.000**	
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	37.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.02.2.02.0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	3.856.463.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBHCHT
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	10.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.02.2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**10.950.000**	
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	10.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**873.290.000**	
1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**751.270.000**	
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Ko	18.070.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	680.270.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	10.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	5.480.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	10.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	25.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.04.2.02	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**29.200.000**	
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	29.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Suber Dana
1	2	3	4
1.05.04.2.01	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**53.020.000**	
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	30.660.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	22.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.04.2.05	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	**39.800.000**	
1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	39.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (Renja) Satpol P3KP Kota Pekalongan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Satpol P3KP. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Satpol P3KP Kota Pekalongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan yang diemban oleh Satpol P3KP sebagai salah satu Perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Pekalongan.

Semoga Renja Satpol P3KP Tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2025. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Pekalongan, 1 Agustus 2024
Kepala Pelaksana,
Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
Kota Pekalongan

SRIYANA, S.Sos, M.Si
NIP. 19680709 199003 1 008

RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TAHUN 2024

KOTA PEKALONGAN

BPBD KOTA PEKALONGAN

JL. SRIWIJAYA NO.5B, BENDAN, PEKALONGAN BARAT

KOTA PEKALONGAN

(0285) 4151508

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, Alhamdulillah dengan rahmatNya Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggang Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 telah berhasil disusun. Renja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggang Bencana Daerah Kota Pekalongan 2021-2026, dan telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam Renja ini, secara rinci telah ditetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggang Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025. Setiap kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target yang ingin dicapai, serta pagu anggaran sebagai acuan dalam pelaksanaannya.

Diharapkan Renja ini dapat menjadi panduan yang efektif bagi seluruh jajaran Badan Penanggang Bencana Daerah Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pekalongan dapat tercapai dengan optimal.

Pekalongan, 1 Agustus 2024
Kepala Pelaksana
BPBD KOTA PEKALONGAN

APRILYANTO DWI PURNOMO, S.E., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670423 198603 1 003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPBD KOTA PEKALONGAN TAHUN LALU 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Kota Pekalongan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD Kota Pekalongan 14

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD Kota Pekalongan 16

2.3.1 Analisis Tingkat Kinerja 16

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan 16

2.3.3 Dampak terhadap Pencapaian Visi Misi 17

2.3.4 Tantangan dan Peluang 17

2.3.5 Penentuan Isu-isu Stategis 20

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 20

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPBD KOTA PEKALONGAN 29

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 29

1. Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 29

2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 31

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah 33

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 34

3.3 Program dan Kegiatan 35

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD KOTA PEKALONGAN 43

BAB V PENUTUP 46

5.1 Catatan Penting 46

5.2 Kaidah Pelaksanaan 46

5.3 Rencana Tindak Lanjut 47

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan) BPBD Kota Pekalongan 9

Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kota Pekalongan 13

Tabel T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 BPBD Kota Pekalongan . 19

Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 BPBD Kota Pekalongan 26

Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 BPBD Kota Pekalongan 35

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan BPBD Kota Pekalongan Tahun 2025 42

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang diimplikasikan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Pasal 27), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah merupakan Dokumen perencanaan PD untuk periode 1 tahun, memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Renja Perangkat Daerah juga memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah, pada tahun-tahun yang sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi, serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan serta mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan aturan tersebut, maka dalam rangka mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan tahunan daerah perlu dibuat Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang sistematis, bermutu, akuntabel dan tepat waktu. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan tahun 2025 disusun dengan mengacu

pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Pekalongan, rencana strategis BPBD Kota Pekalongan dan RKPD Kota Pekalongan. Penyusunan ini dilakukan melalui proses koordinasi antar seksi di lingkungan BPBD Kota Pekalongan, konsultasi dan koordinasi dengan BAPPEDA dan OPD terkait di Kota Pekalongan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan tahun 2025 didasarkan kepada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026
13. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan
14. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja BPBD Kota Pekalongan tahun 2025 dimaksudkan untuk dan menyelaraskan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu, penyusunan Rencana Kerja ini juga dimaksudkan untuk melakukan upaya sinkronisasi terhadap program-program dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pembangunan daerah pada tahun 2025. Hal ini untuk lebih meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan media untuk menyamakan

persepsi, menyatukan komitmen dan langkah-langkah kebijakan pemerintah daerah Kota Pekalongan pada Tahun 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja BPBD adalah :

1. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi program dan kegiatan BPBD Kota Pekalongan yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional;
2. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. Terdapat acuan bagi pemangku peran (stakeholder) dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana;
4. Terdapat acuan untuk pertanggungjawaban BPBD Kota Pekalongan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I **PENDAHULUAN**, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**, pada bab ini dibagi menjadi lima bagian pembahasan, yaitu :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan;

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, tantangan dan peluang, dampak terhadap visi/misi kepala daerah dan terhadap capaian program nasional/ internasional serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian mengenai Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, diuraikan kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota.

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH, pada bab ini pembahasan dibagi menjadi beberapa pembagian pembahasan, yaitu :

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah , pada bagian ini, perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah;

3.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, penjelasan jika rumusan program/ kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, tabel rencana program dan kegiatan.

BAB IV **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,** memuat rencana kerja dan pendanaan indikatif perangkat daerah.

BAB V **PENUTUP**, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian (dalam pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 memuat 2 (dua) program 9 (sembilan) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan dengan anggaran senilai Rp. 3.408.746.000,- . Setelah melalui beberapa tahapan proses perencanaan, kegiatan yang terealisasi dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-Perubahan) Kota Pekalongan tahun 2023 adalah 2 (dua) program 9 (sembilan) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. Rp. 3.678.731.000,- Untuk menilai kinerja capaian keuangan dan hasil kegiatan, status capaian kinerja dikelompokkan menjadi “Sangat Tinggi” yaitu capaian berkisar antara 91-100%, “Tinggi” yaitu capaian berkisar antara 75-90%, “Sedang” yaitu capaian berkisar antara 65-75%, “Rendah” yaitu capaian berkisar antara 50-65%, dan “Sangat Rendah” yaitu capaian di bawah 50%.

Perbandingan Renja 2023 dan APBD Perubahan 2023

No	Keterangan	Renja 2023	APBD Perubahan 2023
1	Jumlah Program	2	2
2	Jumlah Kegiatan	9	9
3	Jumlah Sub Kegiatan	28	28
4	Pagu Indikatif/ Anggaran	3.408.746.000	3.678.731.000

Berdasarkan capaian kinerja keuangan pelaksanaan Renja BPBD Kota Pekalongan tahun 2023, terdapat 25 sub kegiatan dengan status capaian “Sangat Tinggi”, 3 sub kegiatan dengan status capaian “Tinggi.

Untuk capaian kinerja keluaran (output) kegiatan, terdapat 9 kegiatan yang dengan status capaian “Sangat Tinggi”

Berdasarkan capaian kinerja program (hasil/ outcome), pada tahun 2023 terdapat 2 indikator kinerja program telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. Sedangkan pada capaian IKU Renstra dengan indikator Persentase korban bencana yang ditangani, telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.

Faktor penyebab belum tercapainya target kinerja adalah terbatasnya sarana prasarana yang ada. Faktor yang mendukung tercapainya target kinerja adalah semakin meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Implikasi atau dampak yang timbul terhadap capaian Program Renstra Perangkat Daerah adalah diperlukan dukungan yang lebih baik dari sisi anggaran, sarpras maupun kebijakan untung mendukung pencapaian program tersebut.

Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d (tahun berjalan)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan

No.	Indikator Indikator/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (2021)	Realisasi 2021	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s/d Tahun 2023	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Realisasi 2023			
1	2	3	4	5	6				10	11
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas										
	persentase korban bencana alam yang ditangani	Persen	80	75	55,51	75	75	75	100	Tercapai
	peningkatan peran serta lembaga masyarakat/komunitas masyarakat tanggap bencana	Persen	33,33	33,33	166,67	33,33	33,33	33,33	100	Tercapai
	- Jumlah jenis media informasi tentang bencana (leaflet, spanduk, dan pos)	jenis	3	3	3	3	3	3	100	Tercapai
	- Jumlah kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan	kali	2	2	4	2	2	2	100	Tercapai
	- Jumlah kegiatan apel siaga yang difasilitasi	kali	1	1	1	1	0	0	0	Belum Tercapai
	- jumlah dokumen penanggulangan bencana yang disusun	dokumen	0	0	0	1	1	1	100	Tercapai

	- Jumlah perahu karet yang diadakan	unit	1	1	1	1	1	1	100	Tercapai
	- jumlah kejadian bencana alam yang difasilitasi bantuan	kejadian	5	5	4	4	4	4	100	Tercapai
	- jumlah bulan ketersediaan logistik	bulan	12	12	12	12	12	12	100	Tercapai
	- Jumlah bulan penanggulangan bencana yang difasilitasi	bulan	12	12	12	12	12	12	100	Tercapai
	- jumlah peralatan dan perlengkapan Kebencanaan yang diadakan	unit	11	11	1	5	5	5	100	Tercapai
	- jumlah personil/ relawan/ pokmas/ pelajar yang mendapatkan keterampilan pencegahan dan Penanggulangan bencana	orang	200	200	140	200	200	200	100	Tercapai
Urusan Rutin										
1	Persentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan makan minum serta rapat koordinasi dan konsultasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	12	12	12	12	12	100	Tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	12	12	12	12	100	Tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	bulan	12	12	12	12	12	12	100	Tercapai

	- jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	100	Tercapai
	- jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	bulan	12	12	12	12	12	12	100	Tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	12	12	12	12	100	Tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	100	Tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	bulan	12	12	12	12	12	12	100	Tercapai
	- jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	12	12	12	12	12	100	Tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	bulan	12	12	12	12	12	12	100	Tercapai
	- Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	org/kali	30	30	30	50	50	50	100	Tercapai
2	Persentase pelaksanaan pemiliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	- jumlah gedung kantor yang	unit	1	1	1	1	1	1	100	Tercapai

	terpelihara secara rutin/berkala									
	- Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	12	12	12	12	12	12	100	Tercapai
	- jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	unit	11	11	10	10	10	10	100	Tercapai
	- Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	100	Tercapai
3	Persentase kehadiran aparatur	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	- Jumlah pakaian adat yang diadakan	stel	6	6	6	1	1	1	100	Tercapai
4	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	- Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun	dokumen	6	6	6	6	6	6	100	Tercapai
	- Jumlah Dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja Penetapan dan Perubahan; Rencana Aksi; LKjIP) dan Laporan-laporan Keuangan SKPD Yang disusun	dokumen	5	5	5	5	5	5	100	Tercapai
	- Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan	bulan	12	12	12	12	12	12	100	Tercapai

	evaluasi Perangkat Daerah									
	- Jumlah dokumen SPIP (1 Dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 Laporan Pemantauan RTP) yang disusun	dokumen	5	5	5	5	5	5	5	Tercapai
5	Persentase capaian aparatur berkompeten	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	- Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal	orang	40	40	40	40	40	40	100	Tercapai

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam Norma Standar Pelayanan Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK). Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan di bidang penanggulangan bencana, maka cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada BPBD Kota Pekalongan sesuai tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja utama Rencana Stategis BPBD Kota Pekalongan.

Kinerja pelayanan BPBD Kota Pekalongan dapat dilihat pada capaian pelaksanaan tugas pokoknya memimpin, merumuskan, mengatur, pembina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana.

Berdasarkan data Hasil Evaluasi LKjIP tahun 2023, realisasi capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Analisis Pencapaian Sasaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan

	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023
			Target	Realisasi	
1	Persentase korban bencana yang ditangani	%	100	100	100
2	Nilai Evaluasi AKIP	indeks	75,5	75,35	99,80
3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	indeks	90	80,58	89,53
	Rata-rata				99,44

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tabel tersebut diatas terlihat bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan rata-rata capaian kinerja sebesar 99,44% atau dikategorikan baik.

Kendala dalam mencapai target yang direncanakan adalah karena kurangnya dukungan personil maupun anggaran bagi korban bencana, serta semakin meningkatnya intensitas bencana yang terjadi di Kota Pekalongan. Selanjutnya hasil analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel T-C.30. sebagai berikut:

Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kota Pekalongan

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	-	-	100%	100%	100%	n/a	n/a	100%	100%	
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	-	-	100%	100%	100%	n/a	n/a	100%	100%	
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	-	-	100%	100%	100%	n/a	n/a	100%	100%	
4	Persentase korban bencana yang ditangani	-	-	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Nilai Evaluasi AKIP	-	-	72,5	72,88	73	74	100%	100%	100%	100%	
6	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	-	-	90	90	80	81	68,41%	80,58%	100%	100%	
7	Nilai SAKIP OPD	-	-	-	74	74	74,5	-	-	100%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Analisis Tingkat Kinerja

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana pada Pemerintah Kota Pekalongan, BPBD Kota Pekalongan telah menyusun program kerja dan kegiatan dalam Rencana Strategis yang memuat tugas pokok dan fungsi dan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pekalongan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, BPBD Kota Pekalongan mendukung pencapaian misi ke-7 yaitu **"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government"** dengan Tujuan **"Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien"**.

Guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, BPBD Kota Pekalongan menetapkan 3 indikator kinerja guna mengukur tingkat keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan. Indikator Kinerja dan capaian yang dihasilkan pada tahun 2023 sebagai berikut:

1) Persentase korban bencana yang ditangani, dengan capaian 100%
2) Nilai Evaluasi AKIP, dengan capaian 99,80%
3) Nilai Keterbukaan Informasi Publik, dengan capaian 80,58%

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk "tanggap darurat", akan tetapi juga meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), maupun pada saat bencana dan setelah bencana (pasca bencana) itu sendiri

Selama menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

Kapasitas sumberdaya PB di BPBD Kota Pekalongan jika dibandingkan dengan tingginya intensitas bencana dan luasnya wilayah Kota Pekalongan yang rawan bencana belumlah ideal. Pengalaman penanganan kebencanaan yang telah dilakukan selama ini merupakan pengalaman yang berharga dan strategis untuk membangun dan perbaikan sistem untuk menghadapi situasi dan tantangan yang akan datang. Permasalahan-permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh antara lain adalah:

1. Belum maksimalnya pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dalam penanggulangan bencana

2. SDM yang dimiliki masih terbatas dan belum sesuai dengan standar kompetensi dan kualifikasi bidang kebencanaan
3. Minimnya stock logistik dan belum sebanding dengan jumlah proyeksi/ potensi masyarakat terdampak bencana
4. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pencegahan bencana dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana
5. Belum maksimalnya koordinasi manakala terjadi bencana
6. Minimnya sarana prasarana penanggulangan bencana
7. Belum adanya pedoman dan dokumen Penyelenggaraan Bencana, Petunjuk/ Rambu-rambu kebencanaan , shelter pengungsi
8. Belum optimalnya penyusunan perencanaan program dan kegiatan.
9. Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
10. Belum optimalnya penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
11. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
12. Tidak optimalnya dukungan administrasi perkantoran
13. Kurang optimalnya dukungan ketercukupan Sarpras Aparatur.
14. Belum optimalnya dukungan SDM
15. Belum optimalnya keterbukaan informasi pelayanan publik

2.3.3 Dampak terhadap Pencapaian Visi Misi

Penanggulangan bencana yang telah dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan dalam hal ini BPBD Kota Pekalongan memegang peranan dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja pencapaian tujuan pemerintah. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja terbaik BPBD Kota Pekalongan akan berdampak langsung pada kinerja yang telah ditetapkan.

Terkait dengan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 kinerja BPBD Kota Pekalongan berdampak pada pencapaian misi “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip *good governance dan clean government*”,

2.3.4 Tantangan dan Peluang

Adapun yang menjadi tantangan organisasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu adanya kelemahan-kelemahan yang meliputi :

a. Tingkat kerawanan bencana di Kota Pekalongan yang termasuk dalam kategori **Sedang**, dengan skor 122,75, hal tersebut tertuang dalam buku Indeks Resiko Bencana BNPB Tahun 2023;

b. Letak geografis dan topografi yang potensial terhadap terjadinya bencana alam terutama banjir, rob, kebakaran, kekeringan, angin ribut/ angin puting beliung, wabah penyakit dan konflik sosial;
c. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama, meskipun menjadi urusan yang penting dalam pembangunan. Keberadaan dan kinerja BPBD baru diperhatikan manakala terjadi bencana;
d. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana;
e. Kurangnya SDM yang berkompeten sesuai bidang dan tanggungjawab pekerjaan, serta personil teknis yang dapat menganalisa dan membuat perencanaan terhadap pengurangan resiko bencana;
f. Adanya keterbatasan sarana prasarana kantor maupun sarana prasarana penanggulangan bencana;
g. Belum terfasilitasinya gedung BPBD yang berfungsi untuk penyimpan bahan logistik bencana maupun peralatan sesuai standar penyimpanan barang/logistik secara representative, yang berdampak pada rusaknya stok logistik ataupun berkurangnya umur ekonomis sarpras PB bahkan hilang;
h. Belum adanya PUSDALOPS (Pusat Pengendalian dan Operasi) sebagai pusat data dan informasi;
i. Terbatasnya alokasi anggaran serta Penganggaran dalam kebencanaan yang masih mengikuti prosedur normatif, sebagaimana penganggaran rutin, padahal untuk kebencanaan diperlukan terobosan dan lebih persuasive terutama untuk kondisi darurat ataupun memerlukan pendanaan khusus, segera/mendesak;
j. Minimnya data rawan bencana dan basis data bidang penanggulangan bencana belum tertata secara rapi dan tertib,
k. Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
l. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanggulangan yang cukup tinggi, akan tetapi belum adanya standarisasi terutama bagi relawan;
m. Partisipasi dunia usaha melalui dana CSR masih belum terkelola untuk Penanggulangan bencana secara menyeluruh dan komprehensif terutama untuk pra dan pasca bencana.

Selain itu tantangan yang mendasar dan kerangka penentuan arah pembangunan Kota Pekalongan adalah terkait urusan banjir dan rob. Dalam menghadapi tantangan tersebut diperlukan kajian dan analisis kinerja pelayanan kepada masyarakat dan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan masyarakat yang dibutuhkan. Selain itu diperlukan pula pembentukan forum PRB serta adanya Rintisan Kelurahan Tangguh Bencana

Peluang yang dapat disiasati untuk mendukung program penanggulangan bencana di Kota Pekalongan antara lain :

a. Terbitnya UU No. 27 Tahun 2007 beserta peraturan pemerintah pendukungnya termasuk peraturan daerah kota pekalongan nomor 3 tahun 2015 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, menjadikan peluang penyelenggaraan penanggulangan bencana semakin luas, tidak terbatas pada pemerintah tetapi juga dari peran masyarakat dan dunia usaha;
b. Makin pesatnya perkembangan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
c. Makin berperannya lembaga legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat
d. Terbukanya pengembangan kapasitas BPBD melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga nasional maupun internasional
e. Makin terbukanya komunikasi dan koordinasi antar BPBD Kota Pekalongan dengan masyarakat.
f. Adanya peran serta masyarakat, LSM dalam penanggulangan bencana.
g. Adanya dukungan peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana melalui kementerian / lembaga teknis.
h. Adanya kesempatan pengembangan ketrampilan melalui diklat maupun bintek bagi personil BPBD
i. Bimbingan dan pelatihan teknis untuk relawan dan masyarakat peduli bencana;
j. Adanya sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama perangkat daerah (pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa);
k. Mekanisme penganggaran di APBD melalui dana belanja tidak terduga dan peluang belanja (dana alokai Khusus bencana) oleh pemerintah pusat dan komitmen pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana bencana dari APBD;
l. Pendanaan dalam penanggulangan bencana dari berbagai sumber masih sangat terbuka dan banyak, yaitu selain pendanaan dari pemerintah dapat pula berasal dari pendanaan masyarakat, lembaga maupun dunia usaha.
m. Perlunya pengarusutamaan paradigma pengurangan risiko bencana kepada pemangku kepentingan agar kesiapan menghadapi bencana dilakukan pada tahap pra bencana

Disamping itu perlu juga adanya kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh yaitu:

1. Mengoptimalkan kualitas pelayanan masyarakat ;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia Aparatur dan Masyarakat;
3. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di semua bidang

2.3.5 Penentuan Isu-isu Stategis

Penentuan dan pengidetifikasian isu-isu yang tepat, cermat yang bersifat strategis sangat penting sekali karena merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Oleh karena itu isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu mendapatkan perhatian lebih karena merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan .

Berdasarkan telaahan identifikasi permasalahan yang ada, perumusan isu stategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Penanggulangan bencana di Wilayah Kota Pekalongan;
2. Peningkatan pengetahuan dan kepedulian masyarakat dalam penanggulangan bencana;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dengan disusunnya Rancangan Awal RKPD Kota Pekalongan tahun 2025, telah dirumuskan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan BPBD Kota Pekalongan tahun 2025. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dengan membandingkan rumusan rancangan awal RKPD dengan kebutuhan OPD, terdapat perbedaan yang menyebabkan perubahan perumusan kebutuhan tersebut.

Perubahan rumusan kebutuhan dilakukan agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih efisien, efektif dan optimal. Perubahan tersebut antara lain anggaran pagu kegiatan dan penyesuaian target dan indikator kegiatan. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada tabel T-C.31. sebagai berikut :

Tabel T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 BPBD Kota Pekalongan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					**3.164.491.000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**3.481.638.000**	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**BPBD Kota Pekalongan**	**1. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100 persen**	**1.867.937.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**BPBD Kota Pekalongan**	**1. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100 persen**	**2.192.138.000**	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
			2.Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	**100 persen**				**2.Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah**	**100 persen**		
			3. Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	**100 persen**				**3. Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah**	**100 persen**		
A	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***BPBD Kota Pekalongan***	***Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah***	***100 persen***	***24.625.000***	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***BPBD Kota Pekalongan***	***Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah***	***100 persen***	***17.984.000***	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah dokumen renja yang disusun	1 dokumen	9.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah dokumen renja yang disusun	1 dokumen	4.863.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan

											kemampuan daerah
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	2 dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	2 dokumen	1.148.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	4 dokumen	13.625.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	4 dokumen	12.000.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
			Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)	2 dokumen				Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)	2 dokumen		
			Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 bulan				Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 bulan		
			Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	5 dokumen				Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	5 dokumen		
B	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***BPBD Kota Pekalongan***	***Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah***	***100 persen***	***1.457.402.000***	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***BPBD Kota Pekalongan***	***Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah***	***100 persen***	***1.673.054.000***	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	15 orang	1.424.352.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	15 orang	1.638.090.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah

2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	31.550.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	33.900.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	1 dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	1 dokumen	1.064.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
C	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***BPBD Kota Pekalongan***	***Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah***	***100 persen***	***1.797.000***	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***BPBD Kota Pekalongan***	***Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah***	***100 persen***	***22.000.000***	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah keikutsertaan dalam Pameran, Hakteknas dan Karnaval batik	2 kali	9.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah keikutsertaan dalam Pameran, Hakteknas dan Karnaval batik	2 kali	9.500.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	40 orang	10.297.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	50 orang	12.500.000	Di Tahun 2025 Pegawai di BPBD sejumlah 50 orang
D	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***BPBD Kota Pekalongan***	***Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah***	***100 persen***	***133.516.000***	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***BPBD Kota Pekalongan***	***Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah***	***100 persen***	***177.700.000***	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
1	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	2.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	1.800.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah

2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12 bulan	58.400.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12 bulan	58.400.000	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan yang semula 10 unit menjadi 17 unit dikarenakan pembelian peralatan dengan koefisien harga lebih rendah
			Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	10 unit				Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	17 unit		
3	Penyediaan peralatan rumah tangga	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	5.000.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	4.000.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	29.700.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	27.000.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	9.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	9.000.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BPBD Kota Pekalongan	jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	2.500.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BPBD Kota Pekalongan	jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	2.500.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah

7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	100 laporan	26.416.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	100 laporan	75.000.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
E	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***BPBD Kota Pekalongan***	***Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***100 persen***	***98.804.000***	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***BPBD Kota Pekalongan***	***Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***100 persen***	***125.500.000***	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	1.800.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	1.500.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	56.904.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	68.400.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	12 bulan	40.100.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	12 bulan	55.600.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
F	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***BPBD Kota Pekalongan***	***Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***100 persen***	***133.793.000***	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***BPBD Kota Pekalongan***	***Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***100 persen***	***175.900.000***	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	11 unit	79.859.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	11 unit	112.000.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah

2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	2 unit	9.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	2 unit	20.000.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	57 unit	44.434.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	57 unit	43.900.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
II	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Kota Pekalongan**	**Persentase korban bencana alam yang ditangani**	**100%**	**1.296.554.000**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Kota Pekalongan**	**persentase korban bencana alam yang ditangani**	**100%**	**1.289.500.000**	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
A	***Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota***	***Kota Pekalongan***	***Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana***	***100 persen***	***64.945.000***	***Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota***	***Kota Pekalongan***	***Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM/IKK Outcome)***	***100 persen***	***44.700.000***	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana yang disusun	1 dokumen	0	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana yang disusun	1 dokumen	0	
2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kota Pekalongan	Jumlah jenis media informasi tentang bencana (leaflet, spanduk, dan pos)	3 jenis	64.945.000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kota Pekalongan	Jumlah jenis media informasi tentang bencana (leaflet, spanduk, dan pos)	3 jenis	44.700.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
			Jumlah kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan	2 kali				Jumlah kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan	2 kali		
			Jumlah kegiatan apel siaga yang difasilitasi	1 kali				Jumlah kegiatan apel siaga yang difasilitasi	1 kali		

B	***Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana***	***Kota Pekalongan***	***Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana***	***100 persen***	***95.475.000***	***Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana***	***Kota Pekalongan***	***Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM/IKK Outcome)***	***100 persen***	***116.700.000***	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	jumlah personil/ relawan/ pokmas/pelajar/masyarakat yang mendapatkan keterampilan pencegahan dan Penanggulangan bencana	200 orang	62.400.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	jumlah personil/ relawan/ pokmas/ pelajar/masyarakat yang mendapatkan keterampilan pencegahan dan Penanggulangan bencana	200 orang	46.700.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
2	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kota Pekalongan	jumlah peralatan dan perlengkapan Kebencanaan yang diadakan	3 unit	33.075.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kota Pekalongan	jumlah peralatan dan perlengkapan Kebencanaan yang diadakan	3 unit	70.000.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
C	***Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana***	***Kota Pekalongan***	***Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana***	***100 persen***	***996.556.000***	***Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana***	***Kota Pekalongan***	***Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM/IKK Outcome)***	***100 persen***	***1.050.600.000***	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	jumlah bulan penanggulangan bencana yang difasilitasi	12 bulan	846.556.000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	jumlah bulan penanggulangan bencana yang difasilitasi	12 bulan	981.900.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	jumlah kejadian bencana alam yang difasilitasi bantuan	4 kejadian	150.000.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	jumlah kejadian bencana alam yang difasilitasi bantuan	4 kejadian	68.700.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah

C	***Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana***	***Kota Pekalongan***	***Peningkatan Peran Serta Lembaga Masyarakat/Komunitas masyarakat tanggap Bencana***	***100 persen***	139.578.000	***Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana***	***Kota Pekalongan***	***Peningkatan Peran Serta Lembaga Masyarakat/Komunitas masyarakat tanggap Bencana***	***100 persen***	***77.500.000***	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
1	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kab/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	4 Kegiatan	***50.000.000***	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kab/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	4 Kegiatan	37.500.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kab/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	***89.578.000***	Penguatan Kelembagaan Bencana Kab/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	40.000.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada hakekatnya perencanaan pembangunan nasional perupakan acuan utama bagi setiap daerah propinsi dan kabupaten kota dalam merumuskan kebijaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Arah kebijaksanaan pembangunan daerah kota harus didasari oleh visi dan misi daerah dan output akhirnya berupa pola dasar pembangunan daerah.

Kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana sendiri tertuang dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Penanggulangan bencana yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut memuat aktivitas yaitu pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Semua aktivitas tersebut dilaksanakan dalam rangkaian kerja holistik-berkesinambungan dengan kerangka menyukseskan pembangunan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rencana program dan kegiatan didasari kepada Melindungi Segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara. Disini BPBD berperan serta dalam proses melindungi segenap bangsa dalam penanggulangan bencana, dan memberikan kenyamanan pada warga dari semua faktor – faktor penyebab bencana yang ada di Kota Pekalongan. Selanjutnya penjabaran program dan kegiatan yang menyangkut penanggulangan bencana serta pembangunan baik pra bencana , tanggap darurat dan pasca bencana secara konkrit dituangkan dalam bentuk rencana kerja tahunan dan operasionalnya dirumuskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1. Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Pencegahan dan penanggulangan bencana dipengaruhi faktor letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada diantara dua benua dan dua samudera, terbentang di garis khatulistiwa, dan terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik utama dunia, sehingga merupakan wilayah teritorial yang sangat rawan terhadap bencana.

Disamping itu, jumlah penduduk cukup banyak serta penyebaran yang tidak merata, ketimpangan sosial, dan masalah pemanfaatan kekayaan alam yang kurang cerdas, juga sangat rentan terhadap berbagai macam bencana yang tidak lagi bersumber dari gejala alam tapi juga berkaitan dengan ulah manusia.

Hampir semua jenis bencana baik karena alam maupun karena ulah manusia dan gabungan dari keduanya seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran, bencana asap dan bencana akibat kecelakaan industri, pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem, kesalahan teknologi serta konflik sosial, telah mengancam dan berada di tengah lingkaran kehidupan segenap bangsa Indonesia.

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan penanggulangan bencana, antara lain:

a. Belum adanya persamaan persepsi, pengertian dan langkah tindak yang terencana, terkoordinasi dan terintegrasi antar institusi dalam rangka penanggulangan bencana dan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Perpres No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang mengatur struktur dan tatakerja, personil, pembiayaan, sarana dan prasarana penanggulangan bencana, mengakibatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana belum terlaksana secara komprehensif dan terintegrasi.
b. Belum semua daerah memperhatikan upaya Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dan memasukkannya dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
c. Belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana penanggulangan bencana melalui kerjasama daerah baik secara vertikal maupun horisontal.

Misi untuk mewujudkan visi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan adalah sebagai berikut :

a. Memfasilitasi terwujudnya harmonisasi hubungan pusat dan daerah melalui pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, peningkatan kapasitas peran gubernur sebagai wakil pemerintah, kerjasama daerah, serta mendukung reformasi pelayanan umum;
b. Memfasilitasi penataan wilayah perbatasan, wilayah administrasi dan nama rupabumi (toponimi);
c. Memfasilitasi terciptanya ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan HAM serta memperkuat kerukunan nasional melalui persatuan dan kesatuan nasional dalam kerangka NKRI;
d. Memfasilitasi penyelenggaraan kawasan dan otorita serta percepatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
e. Memfasilitasi penyelenggaraan penyelenggaraan manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana;
f. Memfasilitasi terselenggaranya dukungan manajemen dan teknis Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Mengacu pada UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa salah satu tugas BNPB adalah memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara.

Isu-isu strategis dalam rangka penanggulangan bencana antara lain:

a. Meningkatnya frekuensi kejadian bencana alam, baik yang merupakan bencana hidrometeorologi maupun bencana geologis, tetap menjadi ancaman yang serius.
b. Karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan dampak bencana berupa kehilangan, kerugian dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan dikelola dengan baik
c. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pengalokasian anggaran, rencana pembangunan dan penataan ruang harus terus ditingkatkan
d. Mengedepankan upaya-upaya pencegahan guna mengurangi risiko ancaman bencana
e. Mengoptimalkan pendekatan pentaheliks (pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan media) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
f. Masih perlu peningkatan peran pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan bencana melalui perkuatan implementasi SPM sub urusan bencana
g. Masih perlu dioptimalkannya dukungan anggaran yang memadai, khususnya untuk tahapan pencegahan dan tahapan pemulihan pascabencana
h. Dukungan inovasi pembiayaan terhadap risiko kebencanaan belum banyak dikembangkan
i. Kajian, perencanaan, dan penanganan risiko bencana lintas daerah administrasi juga perlu mendapat perhatian
j. Kajian, perencanaan, dan penanganan risiko bencana lintas daerah administrasi juga perlu mendapat perhatian
k. Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diarahkan mempunyai orientasi kepada upaya pengurangan risiko bencana dalam menghadapai ancaman bencana berikutnya, baik bencana alam maupun non alam
l. Manajemen logistik dan peralatan yang andal mutlak diperlukan untuk mendukung penanganan bencana yang lebih cepat dan tepat sasaran
m. Pengembangan kapasitas merupakan kata kunci pengelolaan bencana yang berkualitas
n. Perlu dioptimalkannya penyebaran informasi dan pengetahuan ke masyarakat sebagai bagian dari literasi kebencanaan.
o. Indonesia telah menyusun Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020 - 2045

yang dilegalkan dalam bentuk peraturan presiden sebagai pedoman umum penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 25 tahun kedepan.

Misi BNPB 2020-2024 dirumuskan sebagai berikut :

a. Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan bencana.
b. Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
c. Meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
d. Memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Tujuan BNPB tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

a. Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana.
b. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
c. Terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
d. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Sasaran Strategis BNPB 2020-2024 adalah sebagai berikut:

a. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.
b. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.
c. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.
d. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelengaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan

Arah Kebijakan BNPB dalam kegiatan penanggulangan bencana dalam kurun waktu lima tahun mendatang (2020-2024) adalah:

a. Peningkatan sistem dan strategi Penanggulangan Bencana yang andal, inovatif, kolaboratif dan implementatif.
b. Peningkatan kesiapsiagaan pemerintah/pemerintah daerah, lembaga usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan media yang terkoordinasi dalam menghadapi bencana.
c. Peningkatan layanan darurat bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.
d. Peningkatan layanan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana guna mendukung pencapaian kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana yang berkualitas.
e. Penyediaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana serta pengembangan jaringan

sesuai standar kebutuhan minimal dan karakteristik wilayah.

f. Penguatan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah

Karakteristik alam dan sosial yang cukup kompleks menyebabkan Jawa Tengah menjadi daerah yang rawan bencana. Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah merupakan bentuk komitmen seluruh komponen BPBD Prov Jawa Tengah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah sekaligus wujud dan peran serta BPBD Prov Jawa Tengah dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Prov Jawa Tengah 2018-2023.

Isu-isu strategis dalam penanggulanan bencana di Jawa Tengah, adalah sebagai berikut:

a. Sebagian besar wilayah jawa tengah merupakan daerah rawan bencana, baik bencana alam, non alam maupun sosial, dan sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana tersebut
b. Perlu peningkatan upaya kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana, mengingat banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana
c. Fasilitasi pembentukan jumlah desa tangguh bencana masih belum ideal dengan banyaknya jumlah desa yang mempunyai risiko tinggi bencana
d. Belum semua daerah rawan bencana mempunyai alat system peringatan dini (EWS) dan rambu petunjuk jalur evakuasi
e. Masih terdapat 2 (dua) kota yang belum membentuk BPBD berdasarkan Perda, sehingga menghambat fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di kota tersebut;
f. Belum memadainya dukungan anggaran BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BPBD kabupaten/Kota
g. Masih terbatasnya sarana prasarana, peralatan pendukung PB
h. Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Jawa Tengah
i. Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah
j. Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana di Prov Jawa Tengah
k. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Jateng

l. peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah masih perlu ditingkatkan utamanya pada fase pra dan pasca bencana
m. masih perlunya sinergi penyelenggaraan penanggulangan bencana secara lintas sektor dan lintas wilayah

Tujuan BPBD Prov. Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat Jawa Tengah dalam Penanggulangan Bencana,
b. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah

Sasaran yang akan dicapai BPBD Prov Jawa Tengah antara lain:

a. Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana
b. Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana
c. Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana
d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana
e. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah
f. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran dalam Renja adalah turunan penjabaran tujuan Renstra yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD Kota Pekalongan serta identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan- tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai sesuai tujuan organisasi.

Adapun tujuan dan sasaran BPBD Kota Pekalongan, telah dirumuskan sebagai berikut:

1. a. Tujuan : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik
   b. Sasaran : 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
      2) Meningkatnya upaya penanggulangan bencana

Untuk mengevaluasi pencapaian sasaran tersebut, maka dirumuskan indikator sasaran dan formulasi/rumus perhitungan indikator sasaran. Indikator sasaran yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran BPBD Kota Pekalongan sampai dengan tahun 2026 merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Pelaksana BPBD Kota Pekalongan selaku penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi. Tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dapat dilihat sebagai berikut.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik		1. Indeks Kepuasan Masyarakat	82,93
		a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	a. Nilai SAKIP OPD	77
		b. Meningkatnya upaya penanggulangan bencana	b. persentase korban bencana yang ditangani	100%

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Perangkat daerah menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, kebijakan provinsi dan kebijakan pemerintah daerah.

Rencana kerja tahun 2025 merupakan lanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas untuk mewujudkan tujuan dan sasarannya. Hal ini terlihat dari beberapa sub kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebagian besar masih dilaksanakan pada tahun 2024. Pada prinsipnya program dan kegiatan disusun berdasarkan skala prioritas sesuai pagu indikatif yang ditetapkan.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebanyak 2 program, 10 kegiatan dan 30 sub kegiatan dengan jumlah pagu Rp. 3.531.489.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Pekalongan. Adapun program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2024 tersebut dapat dilihat pada tabel T-C.33 sebagai berikut :

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

BPBD Kota Pekalongan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					**3.564.489.000**	**DAU**			**3.370.513.000**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**BPBD Kota Pekalongan**	**100 persen**	**2.082.849.000**	DAU		**100 persen**	**2.067.004.000**
		2. Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah		**100 persen**				**100 persen**	
		3. Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah		**100 persen**				**100 persen**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah***	***BPBD Kota Pekalongan***	***100 persen***	***17.984.000***	DAU		***100 persen***	***17.722.000***

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	BPBD Kota Pekalongan	1 dokumen	4.836.000	DAU		2 dokumen	2.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	BPBD Kota Pekalongan	2 dokumen	1.148.000	DAU		2 dokumen	1.500.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	BPBD Kota Pekalongan	5 laporan	12.000.000	DAU		5 laporan	13.722.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah***	***BPBD Kota Pekalongan***	***100 persen***	***1.722.562.000***	DAU		***100 persen***	***1.509.642.000***
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	BPBD Kota Pekalongan	15 orang/bulan	1.687.598.000	DAU		15 orang/bulan	1.476.592.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	BPBD Kota Pekalongan	12 dokumen	33.900.000	DAU		12 dokumen	31.550.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	BPBD Kota Pekalongan	1 laporan	1.064.000	DAU		1 laporan	1.500.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah***	***BPBD Kota Pekalongan***	***100 persen***	***16.070.000***	DAU		***100 persen***	***22.000.000***
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	BPBD Kota Pekalongan	2 paket	7.070.000	DAU		2 paket	9.500.000

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	BPBD Kota Pekalongan	50 orang	9.000.000	DAU		50 orang	12.500.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah***	***BPBD Kota Pekalongan***	***100 persen***	***92.900.000***	DAU		***100 persen***	***182.400.000***
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	BPBD Kota Pekalongan	1 paket	1.320.000	DAU		1 paket	2.500.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	BPBD Kota Pekalongan	7 paket	7.990.000	DAU		7 paket	58.400.000
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	BPBD Kota Pekalongan	12 paket	730.000	DAU		12 paket	5.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	BPBD Kota Pekalongan	12 paket	19.710.000	DAU		12 paket	30.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	BPBD Kota Pekalongan	12 paket	6.570.000	DAU		12 paket	9.000.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	BPBD Kota Pekalongan	24 dokumen	1.830.000	DAU		24 dokumen	2.500.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	BPBD Kota Pekalongan	100 laporan	54.750.000	DAU		100 laporan	75.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***BPBD Kota Pekalongan***	***100 persen***	***113.683.000***	DAU		***100 persen***	***125.840.000***

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	BPBD Kota Pekalongan	12 laporan	1.100.000	DAU		12 laporan	1.800.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	BPBD Kota Pekalongan	12 laporan	58.313.000	DAU		12 laporan	68.400.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	BPBD Kota Pekalongan	12 laporan	54.270.000	DAU		12 laporan	55.640.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***BPBD Kota Pekalongan***	***100 persen***	***119.650.000***	DAU		***100 persen***	***209.400.000***
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	BPBD Kota Pekalongan	11 unit	73.000.000	DAU		11 unit	115.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	BPBD Kota Pekalongan	2 unit	14.600.000	DAU		2 unit	50.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	BPBD Kota Pekalongan	57 unit	32.050.000	DAU		57 unit	44.400.000
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**persentase korban bencana alam yang ditangani**	**Kota Pekalongan**	**100 persen**	**1.481.640.000**	DAU		**100 persen**	**1.303.509.000**
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	***Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM/IKK Outcome)***	***Kota Pekalongan***	***100 persen***	***51.180.000***	DAU		***100 persen***	***65.926.000***

	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Kota Pekalongan	100 orang	51.180.000	DAU		100 orang	65.926.000
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	***Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM/IKK Outcome)***	***Kota Pekalongan***	***100 persen***	***873.940.000***	DAU		***100 persen***	***946.610.000***
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga, amupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Kota Pekalongan	3 unit	10.830.000	DAU		3 unit	100.000.000
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kota Pekalongan	100 Kawasan	863.110.000	DAU		100 Kawasan	846.610.000
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	***Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM/IKK Outcome)***	***Kota Pekalongan***	***100 persen***	***510.890.000***	DAU		***100 persen***	***150.040.000***
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	Kota Pekalongan	1 dokumen	125.040.000	DAU		1 dokumen	125.040.000

	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kota Pekalongan	2500 orang	385.850.000	DAU		2500 orang	25.000.000
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	***Peningkatan peran serta lembaga masyarakat/ komunitas masyarakat tanggap bencana***	***Kota Pekalongan***	***100 persen***	***45.630.000***	DAU		***100 persen***	***140.933.000***
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah dokumen tata kelola kelembagaan bencana daerah	Kota Pekalongan	1 dokumen	27.380.000	DAU		1 dokumen	50.000.000
	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Kota Pekalongan	4 kegiatan	18.250.000	DAU		4 kegiatan	90.933.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan BPBD Kota Pekalongan dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renstra, pencapaian Renstra, dan visi dan misi Kota Pekalongan yang tertuang dalam RPJMD. Program kerja utama BPBD Kota Pekalongan sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kota Pekalongan adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penanggulangan Bencana

Indikator kinerja dari program tersebut menjadi tanggung jawab BPBD Kota Pekalongan dalam evaluasi RKPD dan LKPJ.

Dalam Rencana Kerja BPBD Kota Pekalongan Tahun 2024 terdapat 2 Program, 10 kegiatan dan 30 sub kegiatan, yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah. Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan/ sub kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan/ sub kegiatan. Perumusan kegiatan/ sub kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh kegiatan BPBD Kota Pekalongan yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Rencana Kerja dan Pendanaan BPBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan BPBD Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		**3.564.489.000**		
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.082.849.000**	**1. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100 persen**
			2.Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah	**100 persen**
			3. Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	**100 persen**
A	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***17.984.000***	***Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah***	***100 persen***
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.836.000	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.148.000	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 dokumen
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 laporan
B	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***1.722.562.000***	***Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah***	***100 persen***
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.687.598.000	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	15 orang/bulan
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	33.900.000	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.064.000	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan
C	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***16.070.000***	***Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah***	***100 persen***
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	7.070.000	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	2 paket
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.000.000	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 orang
D	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***92.900.000***	***Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah***	***100 persen***
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.320.000	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.990.000	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 paket
3	Penyediaan peralatan rumah tangga	730.000	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 paket
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.710.000	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	12 paket
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.570.000	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.830.000	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	24 dokumen
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.750.000	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 laporan

E	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***113.683.000***	***Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***100 persen***
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.100.000	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.313.000	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.270.000	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan
F	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***119.650.000***	***Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***100 persen***
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.000.000	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	11 unit
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.600.000	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.050.00	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	57 unit
II	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**1.481.640.000**	**persentase korban bencana alam yang ditangani**	**100%**
A	***Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota***	***51.180.000***	***Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM/IKK Outcome)***	***100 persen***
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	51.180.000	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 orang
B	***Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana***	***873.940.000***	***Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM/IKK Outcome)***	***100 persen***
1	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	10.830.000	jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga, amupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	3 paket
2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	863.110.000	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	100 orang
C	***Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana***	***510.890.000***	***Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM/IKK Outcome)***	***100 persen***
1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	125.040.000	jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	1 dokumen
2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	385.850.000	jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2500 orang
D	***Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana***	***45.630.000***	***Peningkatan peran serta lembaga masyarakat/ komunitas masyarakat tanggap bencana***	***100 persen***
1	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	18.250.000	jumlah dokumen tata kelola kelembagaan bencana daerah	1 dokumen
2	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	27.380.000	jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	4 kegiatan

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan terkait perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (Renja) BPBD Kota Pekalongan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan selama satu tahun kedepan. Renja disusun mengacu pada visi misi Walikota Pekalongan dan berpedoman kepada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025.

5.1 Catatan Penting

Terbatasnya alokasi anggaran serta proses penganggaran dalam kebencanaan yang masih mengikuti prosedur normatif, sebagaimana penganggaran rutin harus mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja BPBD Kota Pekalongan tahun 2023, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

a. Substansi Renja BPBD Kota Pekalongan disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kota Pekalongan tahun 2025 dan Renstra BPBD Kota Pekalongan tahun 2021-2026.
b. BPBD Kota Pekalongan berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) BPBD Kota Pekalongan Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025.
c. BPBD Kota Pekalongan berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 yang berpedoman kepada Renja

BPBD Kota Pekalongan Tahun 2025 dan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025 dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.

d. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja BPBD Kota Pekalongan Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (RENJA) BPBD Kota Pekalongan selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BPBD. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf BPBD Kota Pekalongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja BPBD Kota Pekalongan Tahun 2025 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Apabila terdapat kendala dalam pencapaian indikator kinerja yang telah direncanakan, baik diakibatkan oleh anggaran yang kurang memadai ataupun permasalahan teknis lainnya, dappat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai salah satu Perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Pekalongan.

Semoga Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kota Pekalongan sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Pekalongan.

Pekalongan, 1 Agustus 2024
Kepala Pelaksana
BPBD KOTA PEKALONGAN

APRIL YANTO DWI PURNOMO, S.E., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670423 198603 1 003

DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN

RENJA

DINSOSP2KB
KOTA PEKALONGAN

2025

dinsosp2kb.pekalongankota.go.id
dinsosp2kb@gmail.com
(0285) 422868
Jl. Sriwijaya No. 40 Pekalongan

RENCANA KERJA (RENJA) DINSOS P2KB KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025

DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DINSOS P2KB)

K O T A P E K A L O N G A N

2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, Alhamdulillah dengan rahmatNya Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P2KB) Kota Pekalongan Tahun 2025 telah selesai disusun. Renja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinsos P2KB 2021-2026, dan telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam Renja ini, secara rinci telah ditetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinsos P2KB Kota Pekalongan pada tahun 2025. Setiap kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target yang ingin dicapai, serta pagu anggaran sebagai acuan dalam pelaksanaannya.

Diharapkan Renja ini dapat menjadi panduan yang efektif bagi seluruh jajaran Dinsos P2KB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pekalongan dapat tercapai dengan optimal.

Pekalongan, 8 Agustus 2024
Kepala Dinsos P2KB
Kota Pekalongan

YOS ROSYIDI, SIP, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660516 198603 1007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud Dan Tujuan 3
1.4 Sistematika 5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 16
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 35
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 36
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 36
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 37
3.3 Program dan Kegiatan 39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 49
BAB V PENUTUP 54
5.1 Catatan Penting 54
5.2 Kaidah Pelaksanaan 54
5.3 Rencana Tindak lanjut 55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2023.....11

Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinsos P2KB Kota Pekalongan Tahun 2023 Target Dan Proyeksi Tahun 2024 dan Tahun 2025.....15

Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Pekalongan.....23

Tabel T-C.32 Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Dinsos P2KB Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024.....35

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DinsosP2KB..... 38

Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Dinsos P2KB Tahun 2023 Dan Perkiraan Maju Tahun 2025.....40

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinsos P2KB Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025.....50

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dimana sebagai tindaklanjutnya, Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjanga Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan pada level Organisasi Perangkat Daerah dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh OPD dalam satu Tahun Anggaran sehingga memberikan gambaran mengenai Tujuan, Sasaran dan target kinerja OPD sesuai tupoksi. Secara fungsional Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya, baik yang terkait dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem pengelolaan keuangan

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah atau selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah terbagi dalam tiga fase, yakni Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, Rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang

kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Walikota tentang Renja Perangkat Daerah sebagai berikut:

a. Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah merupakan draft awal sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah pada tahun n.
b. Selanjutnya rencangan awal renja disempurnakan berdasarkan hasil konsultasi publik menjadi Rancangan Renja, yang disusun sebagai pembahasan dalam penyusunan Rancangan RKPD yang akan dibahas dalam musrenbang tingkat kota.
c. Hasil musrenbang menjadi dasar penetapan Peraturan Walikota tentang RKPD. Selanjutnya Peraturan Walikota tentang RKPD menjadi dasar dalam menyempurnakan Rancangan Renja menjadi Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.
d. Rancangan Akhir Renja seluruh Perangkat Daerah akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Renja Perangkat Daerah.

Seluruh tahapan proses merupakan implementasi perencanaan secara partisipatif dengan pendekatan teknokratik, *buttom up, top down, dan politis*.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja DINSOS P2KB Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Undang-Undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
7. Undang-Undang Nomor13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 14);
14. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan

pembangunan dan keunagan daerah;

17. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan;
20. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitan dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

   Dokumen Renja DINSOS P2KB Kota Pekalongan disusun dengan maksud sebagai arah dan pedoman bagi DINSOS P2KB Kota Pekalongan dalam melaksanakan rencana kegiatan tahunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Tujuan

   Dokumen Renja DINSOS P2KB Kota Pekalongan disusun bertujuan antara lain untuk:
   a. Mengkoordinasikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan DINSOS P2KB Kota Pekalongan untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya;
   b. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
   c. Menjamin terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
   d. Adanya kesinambungan antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.
   e. Menjalankan tahapan perencanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

1.4 SISTEMATIKA

Rencana Kerja DINSOS P2KB Kota Pekalongan Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja DINSOS P2KB, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang.

Memuat tentang pengertian Renja Dinsos P2KB, Proses Penyusunan Renja, Keterkaitan antara Rencana Kerja (Renja) dengan Dokumen RKPD dan Rencana Strategis (Renstra).

1.2. Landasan Hukum.

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja DINSOS P2KB Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja).

1.4. Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Dinsos P2KB Kota Pekalongan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinsos P2KB berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Memuat uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan Dinsos P2KB dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Selaian itu, juga untuk dapat diketahui dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SDGs. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses yang dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan penjelasannya. Kemudian menjelaskan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Renja, seperti terdapat rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan awal RKPD, atau program, kegiatan dan sub kegiatan cocok namun besarnya anggaran berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Memuat uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain : Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinsos P2KB.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Menjelaskan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinsos P2KB.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinsos P2KB.

3.3. Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Rencana Kerja (Renja) Dinsos P2KB Kota Pekalongan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis pada tahun yang bersangkutan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinsos P2KB Kota Pekalongan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan, program dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinsos P2KB Kota Pekalongan selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2025.

Pengukuran kinerja kegiatan/sub kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan penetapan indikator kinerja, yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2023 Dinsos P2KB Kota Pekalongan sebesar Rp. 15.054.101.000,- termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN dengan melaksanakan 2 penunjang urusan pemerintahan, 9 program, 17 kegiatan dan 42 sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 14.256.620.613,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 94.70%.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2024, dengan alokasi pagu anggaran Belanja sebesar Rp. 13.036.773.000,- (belanja gaji dan tunjangan 4.890.512,-) melaksanakan 2 unsur penunjang urusan pemerintahan, 9 program, 17 kegiatan dan 53 sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%, baik realisasi keuangan maupun capaian fisiknya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta perkiraan capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam

pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinsos P2KB sebagai berikut:

1. Keterbatasan akses terhadap data dan informasi yang relevan dalam proses perencanaan dalam bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Koordinasi antar *stake holder* tidak maksimal menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan;
3. Komitmen dan pemahaman bersama untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD perlu ditingkatkan dalam merencanakan kegiatan.
4. Manajemen risiko yang disusun pada akhir tahun dimana proses perencanaan penganggaran sudah sampai pada tahap RAPBD sehingga belum sepenuhnya diimplementasikan secara menyeluruh dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sehingga potensi risiko belum dikelola secara proaktif dan reaktif.
5. Berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah bahwa hanya terdapat satu indikator dalam satu sub kegiatan sehingga perlu singkronisasi dengan target kinerja pada periode sebelumnya.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinsos P2KB dalam pelaksanaan urusan bidang sosial dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu 2023, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2023 pada Dinsos P2KB Kota Pekalongan dari urusan bidang sosial dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilaksanakan dengan 9 program :

Adapun evaluasi kinerja hasil/ keluaran program/kegiatan/subkegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Pada pelaksanaan Renja Dinsos P2KB Kota Pekalongan tahun 2023, ada satu program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang diharapkan yaitu pada program Pengendalian Penduduk dengan indikator Program persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga. Pada tahun 2023,program ini mempunyai target 100% dan terealisasi sebesar 70,28%. Hal ini disebabkan dikarenakan jumlah pendaatan yang dilaksanakan hanya 18 Kelurahan dari total keseluruhan jumlah kelurahan yang ada di Kota Pekalongan sebanyak 27 Kelurahan. Pada Pelaksaanaan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia

Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan indikator Persentase PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapat pelayanan sosial. Ditahun 2023, kegiatan ini mempunyai target 100% dan teralisasi 98,98%

Pada Tahun 2023 terdapat beberapa program dan kegiatan yang teralisasi melebihi daripada target kinerja yang sudah direncanakan, antara lain : Program Pemberdayaan Sosial; Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial; Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS); Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT); Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota; Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial; Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota; Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal; Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini dapat terjadi dikarenakan ketepatan dalam perencanaan dan penggarannya.

Faktor yang mendukung tercapainya target kinerja adalah adanya komitmen Pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana dari APBD dan peluang belanja (DAK) oleh pemerintah pusat serta makin pesatnya perkembangan tehnologi yang memungkinkan makin terbukanya komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat.

Implikasi yang ditimbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah yaitu perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap indikator-indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap indikator dapat mengukur kinerja pada kegiatan hingga subkegiatan secara spesifik dan tidak terjadi duplikasi dengan indikator lainnya. Sehingga dalam penghitungan realisasi kinerja pada periode akhir renstra dapat secara akurat tersajikan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DINSOS P2KB Kota Pekalongan yang sudah dilakukan maping berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, didasarkan realisasi program, kegiatan dan subkegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023. Capaian evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah dapat dilihat dalam tabel 2.1. dibawah ini :

Tabel 2.1. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DINSOSP2KB S/D TAHUN 2023 KOTA PEKALONGAN

OPD : DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN

02	Indikator Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase capaian target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Realisasi 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2.	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3.	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
4.	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100	98.57	100	100	100	100	Tercapai
5.	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	100	0	100	100	100	100	Tercapai
6.	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
7.	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
8.	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	Persen	75	42	57.14	58	65.41	87.21	112.77	Tercapai
9.	Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan	Persen	10	10	5.23	10	13.61	136.10	136.1	Tercapai
10.	Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif	Persen	75	75	33.33	75	98.38	131.17	131.17	Tercapai
11.	Persentase penyandang disabilitas terlantar,	Persen	100	100	25.16	100	100	100	100	Tercapai

02	Indikator Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase capaian target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Realisasi 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)									
12.	Persentase PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapat pelayanan sosial	Persen	100	100	83.19	100	98.38	98.38	98.38	Tidak Tercapai
13.	Persentase PPKS lainnya yang mendapat pelayanan sosial di luar panti sosial	Persen	3.98	3.32	26.92	3.55	4.62	116.08	130.14	Tercapai
14.	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial	Persen	52.49	60.45	10.32	56.69	57.38	109.32	101.21	Tercapai
15.	Persentase graduasi KPM PKH	Persen	10	10	14.33	10	11.65	116.50	116.50	Tercapai
16.	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
17.	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
18.	Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
19.	Persentase Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
20.	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	Persen	100	100	99.68	100	70.28	70.28	70.28	Tidak Tercapai

02	Indikator Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase capaian target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Realisasi 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Persentase ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
22.	Penurunan angka perkawinan di bawah 21 Tahun	Persen	7.2	8.2	9.02	7.8	14.44	49.86	54.01	Tidak Tercapai
23.	Persentase Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (IKK Output)	Perseribu	7.74	9.72	9.16	9.22	8.8	87.95	104.09	Tercapai
24.	Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	Persen	20.8	19.8	12.15	20.20	29.50	141.82	146.05	Tercapai
25.	Unmeet need KB	Persen	12	17	13.08	15	14.95	80.28	99.66	Tidak Tercapai
26.	Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

Analisis kajian terhadap capaian kinerja pelayanan DINSOS P2KB Kota Pekalongan didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan.

Tugas dan Fungsi DINSOS P2KB

Sesuai Peraturan Wali Kota Pekalongan No. 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Kegiatan urusan sosial dan pengendalian penduduk di Pemerintah Kota Pekalongan secara teknis ditangani oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan.

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan merupakan Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, pembina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Sosial dan Pengendalian Penduduk.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi yaitu :

a. Perumusan dan penetapan sasaran, program urusan social, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang social, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
c. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
d. Pengoordinasiaan penyelenggeraan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
e. Pengoordinasiaan penyelenggeraan tugas dan fungsi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
f. Pengoordinasiaan penyelenggeraan tugas dan fungsi bidang rehabilitasi sosial;
g. Pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
h. Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan,pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam Norma Standar Pelayanan

Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK). Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan di bidang penanggulangan bencana, maka cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada DINSOSP2KB Kota Pekalongan sesuai tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja utama Rencana Stategis DINSOSP2KB Kota Pekalongan.

Kinerja pelayanan DINSOSP2KB Kota Pekalongan dapat dilihat pada capaian pelaksanaan tugas pokoknya memimpin, merumuskan, mengatur, pembina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik pada urusan Sosial, dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan

Berdasarkan data Hasil Evaluasi LKjIP tahun 2023, realisasi capaian kinerja Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	6	7	8		9		10	11	12
1	Nilai SAKIP OPD	-	IKU RENSTRA	71.50	73.00	74.50	76.00	71.53	74.40	74.50	76.00	indeks
2	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	-	IKU RENSTRA	3.32	3.43	3.55	3.68	18.39	17.64	3.55	3.68	persen
3	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	-	IKU RENSTRA	67.45	67.50	67.55	67.60	64.27	61.46	67.55	67.60	persen
4	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	SPM Bidang Sosial	IKK OUTCOME	100	100	100	100	25.16	100	100	100	Persen
5	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	SPM Bidang Sosial	IKK OUTCOME	100	100	100	100	100	100	100	100	Persen

Sumber : Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2024

2.3 ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

2.3.1 Analisis Tingkat Kinerja

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada Pemerintah Kota Pekalongan, DINSOSP2KB Kota Pekalongan telah menyusun program kerja dalam Rencana Strategis yang memuat tugas pokok dan fungsi dan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pekalongan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, DINSOSP2KB Kota Pekalongan mendukung pencapaian visi "*Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius*" dengan misi pertama "*Meningkatkan Kualitas pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat*" dan misi ketujuh *"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisiem berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government"*

Berangkat dari analisis lingkungan strategis dan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kota Pekalongan melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah, dan kemudahan untuk dikelola.

Isu Strategis berkaitan dengan Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan analisis permasalahan baik dari aspek geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing antara lain :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial);
3. Meningkatnya Kepesertaan KB Aktif.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana dan pengendalian penduduk keluarga berencana.

Selama menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan tidak terlepas dari berbagai permasalahan

dan hambatan yang dihadapi.

Kapasitas sumberdaya manusia di DINSOSP2KB Kota Pekalongan jika dibandingkan dengan tingginya target pencapaian sasaran dan tujuan indikator belumlah ideal. Pengalaman penanganan kemiskinan, kebencanaan dan *stunting* yang telah dilakukan selama ini merupakan pengalaman yang berharga dan strategis untuk membangun dan perbaikan sistem untuk menghadapi situasi dan tantangan yang akan datang. Permasalahan-permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh antara lain adalah:

1. Belum optimalnya sistem pelayanan publik.
2. Belum optimalnya kinerja organisasi
3. Belum Optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta menurunnya jumlah PPKS
4. Belum optimalnya pencapaian peserta KB aktif

2.3.3 Dampak terhadap Pencapaian Visi Misi

Penanggulangan bencana yang telah dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan dalam hal ini DINSOSP2KB Kota Pekalongan memegang peranan dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja pencapaian tujuan pemerintah. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja terbaik DINSOSP2KB Kota Pekalongan akan berdampak langsung pada kinerja yang telah ditetapkan.

Terkait dengan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Pekalongan tahun 2016-2021, kinerja DINSOSP2KB Kota Pekalongan berdampak pada pencapaian visi "*Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius*" dengan misi pertama "*Meningkatkan Kualitas pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat*" dan misi ketujuh "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisiem berdasarkan prinsop-prinsip Good Governance dan Clean Government"

2.3.4 Tantangan dan Peluang

Berdasarkan Tugas dan Fungsi utama berkaitan dengan kegiatan Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Renstra Kementerian Sosial, Renstra BKKBN, hasil telaahan RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS Kota pekalongan, maka hal-hal yang menjadi tantangan dan peluang pada Pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

1.3.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan pada Dinsosp2kb antara lain :

1. **Urusan Sosial**
   a) Belum optimalnya system pelayanan publik
   b) Minimnya sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan pekerja sosial.
   c) banyaknya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial tetapi masih terbatasnya sarana penunjang.
   d) belum adanya database PMKS serta belum adanya terminasi (penyelesaian penanganan) PMKS secara berkelanjutan.
   e) Terbatasnya jumlah personil yang ada dibanding dengan jumlah PMKS yang perlu ditangani.
2. **Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
   a) Belum optimalnya para penyelenggara kegiatan kelompok kegiatan (Poktan) BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS.
   b) Belum optimalnya pembinaan terhadap kelompok kegiatan (Poktan) oleh petugas.
   c) Perlu lebih besar lagi dukungan stakeholder, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk meningkatkan keluarga yg berketahanan.
   d) Cara kerja / sistem komando yg kurang singkron antara OPD KB kabupaten kota dengan para penyuluh KB yg statusnya sebagai tenaga pusat.
   e) Kurangnya pemahaman remaja tentang usia kawin pertama.

1.3.4.2 Peluang

Sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, dan dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, maka tugas dan fungsi terkait urusan Sosial dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi tanggungjawab Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peluang yang dapat disiasati untuk mendukung program pada urusan Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Pekalongan antara lain :

a. Makin pesatnya perkembangan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dapat

dimanfaatkan untuk mengurangi jumlah PMKS dan penurunan angka fertilitas penduduk;

b. Makin berperannya lembaga legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat
c. Terbukanya pengembangan kapasitas DINSOSP2KB melalui kerjasama dengan lembaga baik urusan sosial maupun pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.
d. Makin terbukanya komunikasi dan koordinasi antar DINSOSP2KB Kota Pekalongan dengan masyarakat.
e. Adanya peran serta masyarakat, PSKS dan LSM dalam penurunan jumlah PMKS,
f. Adanya dukungan peningkatan sarana dan prasarana dalam operasional urusan sosial maupun pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana melalui kementerian / lembaga teknis.
g. Adanya komitmen pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana dari APBD dan peluang belanja (Dana Alokasi Khusus) oleh pemerintah pusat.
h. Adanya usaha-usaha peningkatan SDM tenaga pengelola KB oleh BKKBN perwakilan Provinsi Jawa Tengah berupa kegiatan orientasi dan pelatihan
i. Adanya advokasi program KB terhadap pimpinan daerah kabupaten/kota.
j. Tercukupinya rasio jumlah Penyuluh KB terhadap jumlah Kelurahan di Kota Pekalongan

Berdasarkan tantangan dan peluang tersebut maka kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan implementasi SOP Pelayanan Publik dalam mendukung capaian kinerja;
2. Meningkatkan dukungan administrasi perkantoran;
3. Meningkatkan dukungan ketercukupan sarpras aparatur;
4. Optimalisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
5. Optimalisasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
6. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintahan;
7. Peningkatan Perlindungan dan layanan jaminan Sosial bagi Keluarga Miskin.;
8. Peningkatan pelayanan sosial bagi PPKS(Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial);
9. Peningkatan graduasi KPM PKH;
10. Optimalisasi database kemiskinan;
11. Optimalisasi bantuan sosial bagi kelompok rentan;
12. Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana pada Taman Makam pahlawan;

13. Optimalisasi pendataan/updating data keluarga;
14. Penurunan angka kelahiran umur 15-19 tahun;
15. Peningkatan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang);
16. Peningkatan peran serta ormas dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Dari uraian di atas, maka dapat diambil kebijakan yang tepat bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang guna mendukung pencapaian visi dan misi Kota Pekalongan serta program nasional maupun program SDGs (Sustainable Development Goals).

2.3.5 Penentuan Isu-isu Stategis

Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solusi atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah.

Isu Strategis pada pelayanan urusan Sosial dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut :

1. Pelayanan pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, dan dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait urusan Sosial dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi tanggungjawab Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan.

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Sosial

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Sasaran Jangka Menengah pada Kementerian Sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan.
2. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Permasalahan sosial yang berkaitan dengan ketimpangan akses dan penjangkauan pelayanan dasar
3. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, melalui penguatan skema layanan dan pendataan terpadu

3. Sasaran jangka menengah pada Renstra BKKBN

Arah kebijakan dan strategi BKKBN secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024, sasaran Renstra pada BKKBN adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga.
2. Menguatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk
3. Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran.
4. Meningkatkan advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran.
5. Memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi

4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, telah ditetapkan 3 (tiga) pengembangan Kawasan Strategis Kota (KSK), yang meliputi : KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, KSK dari sudut kepentingan sosial budaya dan KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Sedangkan untuk struktur ruang wilayah kota meliputi Pusat Kegiatan yang terdiri dari 1 (satu) Pusat Pelayanan Kota (PPK), 4 (empat) Sub Pusat Pelayanan Kota dan 6 (enam) Pusat Lingkungan; serta Sistem Jaringan Prasarana

Meninjau RTRW Kota Pekalongan tentang pengembangan kawasan strategis Kota Pekalongan tersebut maka pelayanan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan memiliki peluang dalam mencapai Indikator Kinerja Penurunan Warga Miskin (DTKS)

5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kondisi lingkungan di Kota Pekalongan merupakan wilayah rawan bencana hal ini disebabkan letak/wilayah Kota Pekalongan yang berada di pesisir pantai utara dan adanya penurunan permukaan tanah dengan rata-rata 11-23 cm per tahun, bencana yang terjadi di Kota Pekalongan ini menyebabkan rusaknya infrastruktur, mengganggu kesehatan dan berdampak secara ekonomi baik langsung maupun tidak langsung, Peningkatan abrasi

merusak bangunan di sekitar pesisir, hilangnya tambak dan sawah serta meningkatnya kerusakan mangrove.

Ditinjau dari kondisi lingkungan di Kota Pekalongan tersebut, maka pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki hambatan yang cukup besar terutama pada kondisi bencana rob yang menyebabkan banyaknya warga Kota Pekalongan yang terkena dampak rob yang harus dipenuhi kebutuhan dasarnya dan hal ini dapat menjadi penyebab menurunnya kesejahteraan hidup masyarakat.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, terutama pada faktor KLHS dapat diketahui bahwa Isu yang muncul di Kota pekalongan adalah pada permasalahan lingkungan hidup Kota Pekalongan yang dapat menurunkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat seperti pencemaran air dan penurunan muka tanah (amblesan) yang berdampak besar terhadap peningkatan wilayah rawan bencana banjir dan rob.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dengan disusunnya Rancangan Awal RKPD Kota Pekalongan tahun 2025, telah dirumuskan rancangan program, kegiatan, subkegiatan yang akan dilaksanakan DINSOSP2KB Kota Pekalongan tahun 2025. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dengan membandingkan rumusan rancangan awal RKPD dengan kebutuhan OPD, terdapat perbedaan yang menyebabkan perubahan perumusan kebutuhan tersebut.

Perubahan rumusan kebutuhan dilakukan agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih efisien, efektif dan optimal. Perubahan tersebut antara lain anggaran pagu kegiatan dan penyesuaian target dan indikator kegiatan. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2023 dapat dilihat pada tabel T-C.31. sebagai berikut :

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan

Rancangan Awal RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No.	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000)**	**CATATAN PENTING**
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	**4.033.653**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	**3.649.209**	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	24.363	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	26.640	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	10.750	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	8.500	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	1.650	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	5.720	
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 laporan	11.963	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 laporan	12.420	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	3.236.187	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	2.610.150	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/bulan	3.186.237	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/bulan	2.567.467	
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	48.300	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	39.300	
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 laporan	1.650	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 laporan	3.383	

Rancangan Awal RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No.	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000)**	**CATATAN PENTING**
			Keuangan Akhir Tahun SKPD					Keuangan Akhir Tahun SKPD			
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	8.510	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	5.000	
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	8.510	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	5.000	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	308.192	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	241.348	
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	10.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	7.300	
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	96.105	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	41.140	
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	7.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	4.110	
4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	75.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	82.318	
4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	10.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	5.480	
4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2.500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1.000	
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	107.087	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	100.000	

Rancangan Awal RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No.	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000)**	**CATATAN PENTING**
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	193.131	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	365.321	
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	2.400	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	1.760	
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	128.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	177.561	
5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 laporan	62.731	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 laporan	186.000	
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	263.270	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	400.750	
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	67 unit	219.370	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	69 unit	200.000	
6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	25.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	182.500	
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 unit	18.900	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	63 unit	18.250	
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	75 persen	406.956	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	75 persen	386.432	

Rancangan Awal RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No.	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000)**	**CATATAN PENTING**
7.	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)		Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan	10 persen	151.532	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)		Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan	10 persen	182.140	
7.1	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Kota Pekalongan	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	340 Keluarga	151.532	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Kota Pekalongan	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	340 Keluarga	182.140	
8.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif	75 persen	255.424	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif	75 persen	204.292	
8.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 persen	104.541	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 persen	41.480	
8.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 orang	150.883	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 orang	130.872	
8.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 lembaga	0	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 lembaga	31.940	
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	100 persen	1.606.630	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	100 persen	1.720.232	

Rancangan Awal RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No.	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000)**	**CATATAN PENTING**
9.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Persentase PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapat pelayanan sosial	100 persen	1.543.925	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Persentase PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapat pelayanan sosial	100 persen	1.161.926	
9.1	Penyediaan Permakanan	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang	190.280	Penyediaan Permakanan	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang	456.696	
9.2	Penyediaan Alat Bantu	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	7 orang	95.350	Penyediaan Alat Bantu	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	7 orang	0	
9.3	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	83 orang	60.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	83 orang	0	
9.4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Pekalongan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang	1.198.295	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Pekalongan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang	643.860	
9.5						Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang	61.370	
10.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Persentase PPKS lainnya yang mendapat pelayanan sosial di luar panti sosial	3.98 persen	62.705	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Persentase PPKS lainnya yang mendapat pelayanan sosial di luar panti sosial	3.82 persen	558.306	

Rancangan Awal RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No.	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000)**	**CATATAN PENTING**
10.1	Penyediaan Permakanan	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	900 orang	0	Penyediaan Permakanan	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	903 orang	428.560	
10.2	Penyediaan Alat Bantu	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	7 orang	0	Penyediaan Alat Bantu	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	23.540	
10.3	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	0 orang	0	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	0 orang	0	
10.4	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kota Pekalongan	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	0	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kota Pekalongan	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	16.010	
10.5	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	62.705	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	37.446	
10.6	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan	83 orang	0	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan	83 orang	52.750	

Rancangan Awal RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No.	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000)**	**CATATAN PENTING**
			Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota			
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial	53.73	972.056	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial	53.73	1.328.740	
11.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase graduasi KPM PKH	10 persen	972.056	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase graduasi KPM PKH	10 persen	1.328.740	
11.1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	2000 orang	636.650	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	2000 orang	564.920	
11.2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Pekalongan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	950 keluarga	335.406	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Pekalongan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	950 keluarga	763.820	
V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100 persen	480.139	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100 persen	704.500	
12.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	100 persen	480.139	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	100 persen	704.500	
12.1	Penyediaan Makanan	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 orang	450.000	Penyediaan Makanan	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 orang	300.000	

Rancangan Awal RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No.	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000)**	**CATATAN PENTING**
12.2	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 orang	30.139	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 orang	386.250	
12.3	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kota Pekalongan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 orang	0	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kota Pekalongan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 orang	18.250	
VI	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan	100 persen	434.453	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan	100 persen	191.020	
13	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Persentase Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	100 persen	434.453	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Persentase Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	100 persen	191.020	
13.1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 dokumen	379.453	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 dokumen	128.110	
13.2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 makam	55.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 makam	62.910	
VII	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	100 persen	70.767	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	100 persen	247.600	
14.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	100 persen	70.767	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	100 persen	247.600	
14.1	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kota Pekalongan	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 dokumen	70.767	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kota Pekalongan	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 dokumen	54.480	
14.2	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	6 laporan	0	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	27 laporan	145.120	

Rancangan Awal RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No.	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000)**	**CATATAN PENTING**
14.3	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 dokumen	0	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	8 dokumen	48.000	
VIII	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Penurunan angka perkawinan di bawah 21 tahun	12 persen	2.559.918	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Penurunan angka perkawinan di bawah 21 tahun	12 persen	1.859.294	
15.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB SesuaiKearifan Budaya Lokal		Persentase Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (IKK Output)	8.24 perseribu	1.843.530	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya lokal		Persentase Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (IKK Output)	8.24 perseribu	969.070	
15.1	Pengendalian Program KKBPK	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 laporan	0	Pengendalian Program KKBPK	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 laporan	80.010	
15.2	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 laporan	1.733.530	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	16 laporan	196.000	
15.3	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	48 laporan	0	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	48 laporan	111.360	

Rancangan Awal RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No.	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000)**	**CATATAN PENTING**
15.4	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 dokumen	110.000	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 dokumen	381.700	
15.5	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Pekalongan	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	3 organisasi	0	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Pekalongan	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	3 organisasi	200.000	
16.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	20.6 persen	716.388	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	20.6 persen	890.224	
16.1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 laporan	0	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 laporan	62.452	
16.2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1026 orang	0	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1026 orang	427.747	
16.3	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Pekalongan	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 unit	429.913	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Pekalongan	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 unit	199.995	
16.4	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 laporan	286.475	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 laporan	200.030	

Rancangan Awal RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No.	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000)**	**CATATAN PENTING**
IX	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Unmeet need KB	13 persen	157.165	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Unmeet need KB	13 persen	1.955.520	
17.	Pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 persen	157.165	Pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 persen	1.955.520	
17.1	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Pekalongan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 organisasi	157.165	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Pekalongan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 organisasi	468.720	
17.2	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kota Pekalongan	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	11 laporan	0	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kota Pekalongan	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	11 laporan	708.000	

Rancangan Awal RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No.	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000)**	**CATATAN PENTING**
17.3	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kota Pekalongan	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat Pendampingan	11 laporan	0	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kota Pekalongan	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat Pendampingan	11 laporan	778.800	

Sumber : Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2024

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sebelum melakukan penyusunan program, kegiatan yang akan dilaksanakan di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, terlebih dahulu telah dilakukan penjaringan aspirasi masyarakat, baik terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berupa usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan perangkat daerah, asosiasi asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan pengamatan pelaksanaan musrenbang tingkat kota. Terhadap aspirasi tersebut kemudian dilakukan inventarisasi dan pengkajian apakah sesuai dengan isu isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah.

Usulan awal program, kegiatan dan sub kegiatan dari perangkat daerah kemudian diselaraskan dengan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui Musrenbang, baik musrenbang kelurahan maupun kecamatan dan kota, serta forum perangkat daerah. Dalam kegiatan ini kemudian diinventarisir pula usulan yang masuk melalui Pagu Indikatif. Sebagai sebuah konsekuensi atas telah ditandatanganinya kesepakatan antara Walikota sebagai pihak Eksekutif dengan DPRD sebagai lembaga legislatif tentang penetapan pagu anggaran, maka semua usulan masyarakat yang masuk sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus dilaksanakan oleh perangkat daerah. Usulan yang dibuat oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitan dan Pengembangan Daerah telah disesuaikan dan telah mengakomodir semua usulan dari pemangku kepentingan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Pada proses Rancangan Awal Renja, belum ada usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Dinsos P2KB Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat disajikan dalam tabel T-C.32. sebagaimana terlampir.

Tabel T-C.32.

Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan DINSOSP2KB Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025

No	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	Program Penanganan Bencana Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Subkegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kota Pekalongan	Penanganan Kelompok Rentan pasca bencana	Rp. 365.000.000	

Sumber : Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2024

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Arah kebijakan Nasional yang berdasarkan RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan, dengan mengusung tema “Terwujudnya Indonesia yang maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdaskan gotong royong”. Terdapat 7 agenda (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (4) Membangunan kebudayaan dan karakter bangsa; (5) Memperkuat insfratruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; (7) Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Kebijakan Kementerian Sosial sesuai dengan yang tertuang dalam RPJM Kementerian Sosial 2020-2024 sebagai berikut:

4. Meningkatkan kemandirian sosial ekonomi, penduduk miskin dan rentan;
5. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kepasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
6. Meningkatknya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, melalui penguatan skema layanan dan pendataan terpadu;
7. Terwujudnya tata kelola kementerian sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik.

Sedangkan untuk kebijakan kementrian BKKBN yang tertuang dalam RPJM BKKBN 2020-2024 adalah :

1. Meningkatkan ketahanan dan kesehateraan keluarga yang holistic dan integrative sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter dikeluarga;
2. Menguatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
3. Meningkakan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayaahan dan focus pada segmentasi sasaran;

4. Meningkakan advokasi penggerakan program Bangka kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran;
5. Memperkuat system infomasi keluarga yang terintegrasi.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan berkewajiban melakukan penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai dokumen perencanaan teknis turunan dari RPJMD Kota Pekalongan.

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu strategis dan juga kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Berdasarkan telaah arah pembangunan Kota Pekalongan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Pekalongan 2021-2026, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan DINSOSP2KB. Adapun pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DINSOSP2KB Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel T-C.25 berikut:

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1.	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	79.67	79.92	80.17	80.42	80.67
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	71.50	73.00	74.50	76.00	77.50
2.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan		Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	1.0	1.0	2.0	2.5	3.0
		Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	3.32	3.43	3.55	3.68	3.82
3.	Menurunkan angka Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)		Total fertility Rate (Angka Kelahiran Total) (IKK Outcome)	2.164	2.162	2.160	2.158	2.156
		Meningkatnya Kepesertaan KB Aktif	Persentase Pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	67.45	67.50	67.55	67.60	67.65

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan/Subkegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program/kegiatan/Subkegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Perangkat daerah menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, kebijakan provinsi dan kebijakan pemerintah daerah.

Rencana kerja tahun 2025 merupakan lanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas untuk mewujudkan tujuan dan sasarannya. Hal ini terlihat dari beberapa Subkegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebagian besar masih dilaksanakan pada tahun 2025. Pada prinsipnya program, kegiatan dan Subkegiatan disusun berdasarkan skala prioritas sesuai pagu indikatif yang ditetapkan.

Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebanyak 9 program, 17 kegiatan dan 54 Subkegiatan dengan jumlah pagu Rp. 12.042.547.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik. Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2025 tersebut dapat dilihat pada tabel T-C.33 sebagai berikut :

Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Pekalongan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 persen	**3.668.855**			100 persen	**3.649.209**
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 persen	19.925			100 persen	26.640
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	2 dokumen	8.500
		Jumlah dokumen renja yang disusun		2 dokumen	2.500				
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	2 dokumen	5.720
		Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun		2 dokumen	1.500				
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	15 laporan	12.420
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah		12 bulan	15.925				
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun		4 dokumen					
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)		2 dokumen					
		Jumlah Dokumen SPIP (1 dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 Laporan Pemantauan RTP yang disusun		5 dokumen					
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah		100 persen	2.456.085			100 persen	2.610.150
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	14 Kali	2.404.760	Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	20 orang/bulan	2.567.467
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	12 dokumen	39.300
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan		12 bulan	49.675				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	1 laporan	3.383
		Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun		1 dokumen	1.650				
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 persen	5.000			100 persen	5.000
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	1 paket	5.000
		Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik		1 kali	5.000				
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah		100 persen	377.887			100 persen	241.348
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	4 paket	7.300
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan pembangunan kantor		12 bulan	10.000				
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	2 paket	41.140
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos		12 bulan	137.787				
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan		17 Unit					
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	4 paket	4.110
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga		12 bulan	12.500				
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	4 paket	82.318
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman		11 bulan	75.100				
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	2 paket	5.480
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12 bulan	10.000				
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	1 dokumen	1.000
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang- undangan		12 dokumen	2.500				
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	150 laporan	100.000
		Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah		150 orang/kali	130.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	239.147			100 persen	365.321
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	4 laporan	1.760
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat		12 bulan	2.400				
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	12 laporan	177.561
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 bulan	137.147				
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	12 laporan	186.000
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor		12 bulan	99.600				
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	570.811			100 persen	400.750
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	69 unit	200.000
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional		12 bulan	262.864				
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	8 unit	182.500
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala		1 unit	287.797				
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	63 unit	18.250
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala		12 bulan	20.150				
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan		58 persen	533.801			75 persen	386.432
1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan		10 persen	169.406			10 persen	182.140
1.06.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	340 Keluarga	182.140
		Jumlah bulan pendampinganprogram KUBE		12 Bulan	169.406				
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif		75 persen	364.395			75 persen	204.292
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan				Kota Pekalongan	30 persen	41.480

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
	Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rakor pembinaan psks yang dilaksanakan		6 Kali	124.115	Dana Alokasi Umum			
		Jumlah bulan Fasilitasi pembinaan PSKS		12 Bulan					
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	4 orang	130.872
		Jumlah bulan Fasilitasi pembinaan PSKS		12 Bulan	145.280				
		Jumlah TKSK yang difasilitasi		6 Kali					
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	1 lembaga	31.940
		Jumlah fasilitasi Karang Taruna		1 Kali	95.000				
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)		100 persen	1.602.420			100 persen	1.720.232
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapat pelayanan sosial		100 persen	1.164.010			100 persen	1.161.926
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	80 orang	456.696
		Jumlah pemberian permakanan yang diberikan		60 Orang	365.520				
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	80 orang	643.860
		Jumlah bulan pelayanan PMKS di RPSBM		12 Bulan	798.490				
1.06.04.2.01.06	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	-	-	-	Kota Pekalongan	80 orang	61.370
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS lainnya yang mendapat pelayanan sosial di luar panti sosial		3.98 persen	438.410			3.82 persen	558.306

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	903 orang	428.560
		Jumlah anggota veteran dan ahli waris pejuang 3 oktober yang mendapat bantuan sembako		83 Orang	249.005				
		Jumlah disabilitas yang mendapat bantuan sembako		225 Orang					
		Jumlah lansia yang mendapat bantuan sembako		600 Orang					
1.06.04.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	10 orang	23.540
		Jumlah kegiatan pelayanan anak rentan kesejahteraan sosial		1 Kegiatan	71.720				
		Jumlah PMKS yang mendapat alat bantu		11 Orang					
		Jumlah wanita rawan sosial yang mendapat pelatihan		10 Orang					
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	-	-	-	Kota Pekalongan	15 orang	16.010
1.06.04.2.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	10 orang	37.446
		Jumlah warga miskin yang difasilitasi nikah massal		10 Pasang	58.657				
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan				Kota Pekalongan	83 orang	52.750
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		83 orang	59.028	Dana Alokasi Umum			
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial		53.73	1.614.996			53.73	1.328.740
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase graduasi KPM PKH		10 persen	1.614.996			10 persen	1.328.740
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	2000 orang	564.920

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
		Jumlah bulan fasilitasi BPNT		12 Bulan	667.559				
		Jumlah bulan pelayanan SLRT		12 Bulan					
		Jumlah dokumen database kemiskinan yang disusun		1 Dokumen					
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum – DBH Cukai Hasil Tembakau	Kota Pekalongan	950 keluarga	763.820
		Jumlah bulan pendampingan PKH		12 Bulan	947.437				
		Jumlah KPM PKH yang mendapatkan sosialisasi		200 Orang					
		Jumlah Penerima DBHCHT		500 Orang					
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)		100 persen	1.720.304			100 persen	704.500
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial		100 persen	1.720.304			100 persen	704.500
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	2000 orang	300.000
		Jumlah kegiatan bantuan untuk korban bencana alam yang difasilitasi		1 Kegiatan	445.304				
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	2000 orang	386.250
		Jumlah bulan fasilitasi bantuan sosial bagi kelompok rentan		12 Bulan	1.275.000				
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	-	-	-	Kota Pekalongan	2000 orang	18.250
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan		100 persen	92.382			100 persen	191.020
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan		100 persen	92.382			100 persen	191.020
1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	1 dokumen	128.110

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
	Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		1 dokumen	26.830				
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	1 makam	62.910
		Jumlah bulan pemeliharaan taman makam pahlawan		12 Bulan	65.552				
		Jumlah taman makam pahlawan yang dilakukan pemeliharaan		1 Makam					
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga		100 persen	66.116			100 persen	247.600
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)		100 persen	66.116			100 persen	247.600
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	1 dokumen	54.480
		Jumlah dokumen informasi kependudukan dan keluarga yang disusun		14 dokumen	66.116				
		Jumlah dokumen pendataan keluarga sejahtera yang disusun		1 Dokumen					
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Pekalongan	-	-	-	Kota Pekalongan	27 laporan	145.120
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Pekalongan	-	-	-	Kota Pekalongan	8 dokumen	48.000
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Penurunan angka perkawinan di bawah 21 Tahun		12 persen	5.576.903			12 persen	1.859.294
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB SesuaiKearifan Budaya Lokal	Persentase Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (IKK Output)		8.24 perseribu	3.517.897			8.24 perseribu	969.070
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Kota Pekalongan	-	-	-	Kota Pekalongan	2 laporan	80.010
2.14.03.2.01.10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kota Pekalongan			DAK Non FIsik – BOKKB - BOKB	Kota Pekalongan	16 laporan	196.000
		Jumlah bulan penyediaan operasional Balai Penyuluhan KB		12 Bulan	3.419.857				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
2.14.03.2.01.11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kota Pekalongan	-	-	-	Kota Pekalongan	48 laporan	111.360
2.14.03.2.01.12	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum DAK Non FIsik – BOKKB -BOKB	Kota Pekalongan	1 dokumen	381.700
		Jumlah kelompok masyarakat yang diberikan informasi pembangunan keluarga kependudukan dan KB melalui penyuluhan langsung		51 Kelompok	98.040				
2.14.03.2.01.14	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Pekalongan	-	-	-	Kota Pekalongan	3 organisasi	200.000
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia		20.6 persen	2.059.006			20.6 persen	890.224
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Pekalongan	-	-	-	Kota Pekalongan	12 laporan	62.452
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Pekalongan	-	-	-	Kota Pekalongan	1026 orang	427.747
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Pekalongan			DAK FIsik – BOKB - KB	Kota Pekalongan	1 unit	199.995
		Jumlah sarana prasarana pelayanan KB pada kelompok kegiatan yang diadakan		20 unit	1.850.531				
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	1 laporan	200.030
		Jumlah PUS dari keluarga miskin yang mendapat pelayanan KB		480 Orang	208.475	DAK Non FIsik – BOKKB -BOKB			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Unmeet need KB		13 persen	178.324			13 persen	1.955.520
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		100 persen	178.324			100 persen	1.955.520
2.14.04.2.02.01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum DAK Non FIsik – BOKKB -BOKB	Kota Pekalongan	5 organisasi	468.720
		Jumlah kegiatan PPKBD, KKB, kelompok kegiatan, rumah data kependudukan dan PPKS yang difasilitasi		5 Kegiatan	178.324				
2.14.04.2.02.05	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kota Pekalongan	-	-	-	Kota Pekalongan	11 laporan	708.000
2.14.04.2.02.06	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat Pendampingan	Kota Pekalongan	-	-	-	Kota Pekalongan	11 laporan	778.800

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan DINSOSP2KB Kota Pekalongan dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renstra, pencapaian Renstra, dan visi dan misi Kota Pekalongan yang tertuang dalam RPJMD. Program kerja utama DINSOSP2KB Kota Pekalongan sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kota Pekalongan adalah :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA
6. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
7. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
8. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
9. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Indikator kinerja dari program tersebut menjadi tanggung jawab DINSOSP2KB Kota Pekalongan dalam evaluasi RKPD dan LKPJ.

Dalam Rencana Kerja DINSOSP2KB Kota Pekalongan Tahun 2025 terdapat 9 Program, 17 kegiatan dan 54 Subkegiatan, yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah. Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh kegiatan DINSOSP2KB Kota Pekalongan yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), DAK NonFisik – BOKB - KB, DAK Fisik serta DBHCHT.

Rencana Kerja dan Pendanaan DINSOSP2KB Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinsos P2KB Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
I	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**7.980.133.000**		
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.649.209.000**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100 persen**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**26.640.000**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 persen**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.500.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.720.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.420.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 laporan
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.610.150.000**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 persen**
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.567.467.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang/bulan
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.300.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.383.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**5.000.000**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 persen**
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**241.348.000**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100 persen**
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.300.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.140.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.110.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.318.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.480.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**365.321.000**	**Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.760.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	177.561.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	186.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**400.750.000**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	67 unit
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	182.500.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.250.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 unit

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja
B	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**386.432.000**	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan**	**75 persen**
7	**Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**	**182.140.000 .**	**Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan**	**10 persen**
21	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	182.140.000	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	340 keluarga
8	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**204.292.000**	**Presentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif**	**75 persen**
22	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	41.480.000	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang
23	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	130.872.000	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 orang
24	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	31.940.000	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 lembaga
C	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**1.720.232.000**	**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)**	**100 persen**
9	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**1.161.926.000**	**Persentase PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapat pelayanan sosial**	**100 persen**
25	Penyediaan Permakanan	456.696.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang
26	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	643.860.000	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang
27	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	61.370.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang
10	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial**	**558.306.000**	**Persentase PPKS lainnya yang mendapat pelayanan sosial di luar panti sosial**	**3.98 persen**
28	Penyediaan Permakanan	428.560.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	903 orang
29	Penyediaan Alat Bantu	23.540.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang
30	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	16.010.000	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang
31	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	37.446.000	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang
32	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	52.750.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	83 orang
D	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**1.328.740.000**	**Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial**	**53.73 persen**
11	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**1.328.740.000**	**Persentase graduasi KPM PKH**	**10 persen**
33	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	564.920.000	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	2000 orang

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja
34	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	763.820.000	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	950 keluarga
E	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**704.500.000**	**Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)**	**100 persen**
12	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**704.500.000**	**Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial**	**100 persen**
35	Penyediaan Makanan	300.000.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 orang
36	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	386.250.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 orang
37	Pelayanan Dukungan Psikososial	18.250.000	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 orang
F	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**191.020.000**	**Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan**	**100 persen**
13	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**191.020.000**	**Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**100 persen**
38	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional	128.110.000	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 dokumen
39	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	62.910.000	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 makam
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
II	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**4.062.414.000**		
G	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**247.600.000**	**Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga**	**100 persen**
14	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota**	**247.600.000**	**Persentase ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)**	**100 persen**
40	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	54.480.000	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 dokumen
41	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	145.120.000	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	6 laporan
42	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	48.000.000	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 dokumen
H	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**1.859.294.000**	**Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun**	**7.40 persen**
15	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**969.070.000**	**Persentase angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun**	**8.24 perseribu**
43	Pengendalian Program KKBPK	80.010.000	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 laporan
44	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	196.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 laporan
45	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	111.360.000	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	48 laporan
46	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	381.700.000	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 dokumen
47	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	200.000.000	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	3 organisasi

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja
16	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota**	**890.224.000**	**Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga indonesia**	**20.6 persen**
48	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	62.452.000	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 laporan
49	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	427.747.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1026 orang
50	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	199.995.000	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 unit
51	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	200.030.000	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 laporan
I	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**1.955.520.000**	**Unmeet need KB**	**13 persen**
17	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**1.955.520.000**	**Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**100 persen**
52	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	468.720.000	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 organisasi
53	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	708.000.000	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	11 laporan
54	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	778.800.000	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	11 laporan
Jumlah		12.042.547.000		

Sumber : Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2024

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan terkait perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (Renja) DINSOSP2KB Kota Pekalongan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan selama satu tahun kedepan. Renja disusun mengacu pada visi misi Walikota Pekalongan dan berpedoman kepada Perubahan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2126, Renstra DINSOSP2KB Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025.

5.1 Catatan Penting

Terbatasnya alokasi anggaran serta proses penganggaran dalam menerapkan SPM yang masih mengikuti prosedur normatif, sebagaimana penganggaran rutin harus mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan penerapan SPM. Untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja DINSOSP2KB Kota Pekalongan tahun 2025, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

a. Substansi Renja DINSOSP2KB Kota Pekalongan disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kota Pekalongan tahun 2025 dan Renstra Ketiga DINSOSP2KB Kota Pekalongan tahun 2021-2026.
b. DINSOSP2KB Kota Pekalongan berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) DINSOSP2KB Kota Pekalongan Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025.

c. DINSOSP2KB Kota Pekalongan berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 yang berpedoman kepada Renja DINSOSP2KB Kota Pekalongan Tahun 2025 dan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025 dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.
d. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja DINSOSP2KB Kota Pekalongan Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program, kegiatan, dan subkegiatan tahun 2025.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (RENJA) DINSOSP2KB Kota Pekalongan selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja DINSOSP2KB. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf DINSOSP2KB Kota Pekalongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja DINSOSP2KB Kota Pekalongan Tahun 2025 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Apabila terdapat kendala dalam pencapaian indikator kinerja yang telah direncanakan, baik diakibatkan oleh anggaran yang kurang memadai ataupun permasalahan teknis lainnya, dappat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan yang diemban oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai salah satu Perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Pekalongan.

Semoga Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kota Pekalongan sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Pekalongan.

Pekalongan, 8 Agustus 2024
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan

YOS ROSYIDI S.I.P., M.Si.
NIP. 19660516 198603 1 007

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

RENJA

RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2025

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 16
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 19
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 38
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 39
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 39
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 39
3.3. Program dan Kegiatan 40
3.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 53
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 55
BAB V PENUTUP 63
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pemerintah Kota Pekalongan Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 S/D 2026.....10
Tabel 2. 2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2023 16
Tabel 2. 3 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2023.....17
Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan DLH Kota Pekalongan.....19
Tabel 2. 5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 DLH Kota Pekalongan.....26
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 40
Tabel 3. 2 Rumusan Rencana Program Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 DLH Kota Pekalongan..... 42
Tabel 3. 3 Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 53

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023, serta mempertimbangkan visi, misi, dan dan program Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 dengan tetap memperhatikan hasil kinerja yang dicapai sebelumnya, permasalahan yang ada dan isu strategis yang dihadapi. Program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja (Ranwal Renja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan KepMendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Renja OPD ini nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kota Pekalongan Tahun 2024. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan secara menyuluruh, efektif dan efisien, maka perlu adanya rumusan tujuan yang jelas, factual dan realistis. Secara substansial kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 tidak boleh lepas dari beberapa hal sebagaimana berikut:

1. Apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya baik kelebihan maupun kekurangannya dalam pencapaian target - target yang telah ditetapkan. Semua pihak yang terkait dalam pencapaian target dimaksud harus mampu mensinergikan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki agar dalam pelaksanaan pembangunan dibidang lingkungan dapat lebih optimal;
2. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. Pembangunan dilaksanakan untuk saling memperbaiki dan melengkapi berbagai kekurangan serta kelemahan

pelaksanaan pembangunan daerah dibidang lingkungan. Pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya yang masih belum mampu diselesaikan atau bahkan yang belum terlaksana pada tahun 2024 harus menjadi prioritas penanganan pada tahun 2025;

3. Memprediksi kebutuhan-kebutuhan pembangunan pada kurun waktu satu tahun berikutnya sekaligus mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang diperkirakan muncul dan berkembang sehingga dapat dijamin konsistensi penerapan prinsip-prinsip pembangunan partisipatif dan berkelanjutan yang telah dikembangkan dengan baik;
4. Mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta mempertimbangkan azas koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari periode kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2021 – 2026, oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 merupakan penjabaran dari skema RPJM Daerah 2021 – 2026 dan sebagai tindak lanjut dari RKPD tahun 2025 serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 – 2026. Kedudukan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi:

1. Sebagai acuan bagi para pengambil kebijakan, karena memuat seluruh kebijakan publik;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan APBD, karena memuat arah kebijakan pemerintahan selama satu tahun;
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah bersama DPRD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 8);

1.3. Maksud dan Tujuan

Esensi dari Rencana Kerja ini bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan tahun 2025 adalah perwujudan dari implementasi sistem perencanaan daerah. Perencanaan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan.

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 adalah:

1. Menjabarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas pembangunan tahun 2025 dan mensinkronkan dengan program dan kegiatan dari provinsi dan pusat.
2. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.
3. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam rangka pembangunan daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup ini adalah dipakai sebagai pedoman atau acuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dalam melakukan dan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang lingkungan hidup, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas layanan publik;
2. Menurunkan tingkat pencemaran air;
3. Meningkatkan kualitas lahan; dan
4. Mengoptimalkan cakupan pelayanan persampahan perkotaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Lingkungan Hidup, proses penyusunan Renja Dinas Lingkungan

Hidup, keterkaitan antara Renja Dinas Lingkungan Hidup dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Lingkungan Hidup, dengan Renja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Renja Dinas Lingkungan Hidup serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Lingkungan Hidup serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup 2024 dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026.

Bab ini memuat tentangkajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan tahun 2025, mengacu pada APBD tahun berjalan pada waktu penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun-tahun sebelumnya.

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji diseuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, serta ketentuan peraturan perundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Walikota Pekalongan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDG's (Suistanable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan pentingterhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kota Pekalongan yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kota Pekalongan.

Bab III : Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Lingkungan Hidup.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan.
c. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup
Berisikan Program, kegiatan dan rencana pendanaan Dinas Lingkungan Hidup.

Bab V : Penutup
Berisikan uraian penutup, berupa :
5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan angaran tidak sesuai dengan kebutuhan
5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan
5.3 Rencana tindak lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian Renja tahun 2023 dan capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup. Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2023 secara umum Dinas Lingkungan Hidup telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi.

Tujuan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan Dinas Lingkungan Hidup disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauh mana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan Kota Pekalongan. Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam capaian kinerja strategis Dinas Lingkungan Hidup.

Pengukuran capaian kinerja disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara wajib dilihat sebagai suatu sistem lacak performa dinas atau dengan kata lain pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen penanganan program secara menyeluruh, karena kinerja yang diukur akan mendorong pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang. Sehingga dengan adanya suatu pengukuran kinerja maka kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tersebut dilaksanakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap kegiatan selesai dilaksanakan.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2023 memuat 10 (sepuluh) program dan 16 (enam belas) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 34.129.875.000,-. Setelah melalui beberapa tahapan proses perencanaan dan pembahasan oleh TAPD, dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kota

Pekalongan tahun 2023 anggaran berubah menjadi sebesar Rp. 33.785.817.000,- dengan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan sama dengan penetapan APBD. Sebagai dasar penilaian kinerja capaian keuangan, keluaran dan hasil kegiatan, status capaian kinerja dikelompokkan menjadi "Sangat Tinggi" yaitu capaian berkisar antara 91-100%, "Tinggi" yaitu capaian berkisar antara 75-90%, "Sedang" yaitu capaian berkisar antara 65-75%, "Rendah" yaitu capaian berkisar antara 50-65%, dan "Sangat Rendah" yaitu capaian di bawah 50%.

Berdasarkan capaian kinerja keuangan pelaksanaan APBDP DLH Kota Pekalongan tahun 2023, terdapat 39 sub kegiatan dengan status capaian "Sangat Tinggi" dan 2 sub kegiatan dengan status capaian "Tinggi", tidak ada sub kegiatan dengan status capaian "Sedang", 0 sub kegiatan dengan status capaian "Rendah" dan 0 sub kegiatan dengan status capaian "Sangat Rendah".

Capaian kinerja keluaran (*output*) sebagian besar kegiatan di DLH Kota Pekalongan status capiannya katagori "sangat baik" yaitu 38 sub kegiatan dan katagori "sedang" 7 (dua) kegiatan. Sedangkan capaian kinerja program (hasil/ outcome) yang merujuk pada Bab VIII - RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026, dari 10 indikator kinerja program terdapat 9 indikator yang telah memenuhi target kinerja dan 1 indikator yang belum memenuhi target kinerja. Indikator kinerja program yang belum memenuhi target dadalah Indikator Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati). Faktor penyebab belum tercapainya target adalah penambahan luasan ruang terbuka hijau belum sesuai yang ditargetkan.

Hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD-P Tahun 2022 dan Rencana Capaian Tahun 2023 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel. 2.1.

Tabel 2. 1
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 S/D 2026

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKALONGAN

No	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (2022)	Realisasi 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD sd tahun 2023	Persentase Capaian Terhadap Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Realisasi 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Lingkungan Hidup										
1	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persen	100	80	80	20	40	40	100	Jenis dokumen NA RPPLH (2022), RPPLH (2022), KLHS RDTR (2022), D3TLH (2021), KLHS RPJMD (2023) Total target 5 dokumen
2	Persentase Limbah Yang Diolah	Persen	49,01	39,29	25	40,95	17,65	49,01	49,01	
	- Jumlah monitoring terhadap kegiatan/usaha pemanfaat air tanah yang dilaksanakan	titik				50	51			
	- Jumlah pengambilan sampel air sungai yang dilakukan	kali				30	30			
	- Jumlah sampah yang diambil dari sungai	M3				3000	3000			
	- jumlah kampung iklim yang dibentuk	lokasi				1	1			
	- Jumlah parameter yang diakreditasi	parameter				10	20			

No	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (2022)	Realisasi 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD sd tahun 2023	Persentase Capaian Terhadap Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Realisasi 2023			
	- Jumlah sampel yang diuji	sampel				170	278			
	- Jumlah Uji Profesiensi/uji banding	Hasil uji				1	1			
	- jumlah DIKPLHD yang disusun	dokumen				1	1			
	- jumlah dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang disusun	dokumen				1	1			
	- Jumlah limbah cair yang dikelola	M3				240.000	240.000			
3	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Persen	2,949	2,909	2,900	2,919	2,900	2,900	98,34	
	- Jumlah Lokasi pemeliharaan pohon di sempadan jalan	lokasi				4	4			
	- Jumlah lokasi pemeliharaan rutin/berkala makam	lokasi				2	2			
	- Jumlah lokasi pemeliharaan rutin/berkala taman kota	lokasi				1	1			
	- Jumlah pengadaan konstruksi taman kota (SIDa)	lokasi				2	2			
	- jumlah TAHURA yang dipelihara	lokasi				6	6			
4	Persentase Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 Yang Diberikan	Persen	100	31,11	31,11	13,33	13,33	44,44	44,44	
	- Jumlah verifikasi lapangan ke usaha/kegiatan yang mengajukan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 maupun perpanjangan Izinnya	Usaha/kegiatan				14	14			
5	Persentase Usaha/Kegiatan yang mendapatkan rekomendasi Persetujuan Teknis Lingkungan dan Persetujuan Teknis PPLH	Persen	100	16,67	16,67	16,67	20,17	36,84	36,84	
	- Jumlah monitoring/pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan kepada perusahaan yang belum memiliki Dokumen Lingkungan	perusahaan				10	10			
	- Jumlah perusahaan yang memiliki Izin Lingkungan yang diawasi	Perusahaan				65	65			
	- Jumlah pengawasan terpadu dengan pihak terkait dalam rangka penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH	kali				5	3			

No	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (2022)	Realisasi 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD sd tahun 2023	Persentase Capaian Terhadap Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Realisasi 2023			
6	Persentase Masyarakat/Komunitas Peduli LH Yang Mendapatkan Edukasi Lingkungan Hidup	Persen	50	50	100	50	50	100	200	
	- Jumlah masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	komunitas				5	5			
	- Jumlah kelompok lembaga kemasyarakatan (PKK RT/ RW/Kelurahan/Kecamatan) yang mendapatkan bimbingan teknis pengelolaan lingkungan hidup	kelompok				2	2			
	- Jumlah pemberdayaan komunitas peduli lingkungan hidup di Kota	komunitas				5	5			
	- Jumlah Saka Kalpataru (Pramuka) yang dibina	orang				80	80			
	- Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar lingkungan hidup yang diselenggarakan	Event				1	2			
	- Jumlah lomba-lomba dalam rangka peringatan hari-hari besar lingkungan hidup yang diselenggarakan	lomba				4	4			
7	Persentase Perolehan Penghargaan Bidang LH	Persen	75	75	100	75	100	100	133,33	
	- Jumlah penilaian Adiwiyata Tingkat Kota yang diselenggarakan	Event				1	1			
	- Jumlah penilaian peringkat kinerja Perusahaan (proper) Daerah yang diselenggarakan	Event				1	1			
	- Jumlah penilaian sekolah adiwiyata yang diusulkan ke Tingkat Provinsi dan Nasional	Event				2	2			
8	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup Dari Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah koordinasi penyelesaian pengaduan yang dilaksanakan	kali				18	25			
9	Persentase pengelolaan sampah	persen	0,31	0,27	33,28	0,28	0,31	0,31	109,61	
	- Jumlah bulan operasional pengelolaan kebersihan dan pelayanan sampah	bulan				12	12			
	- Jumlah ruas jalan yang dibersihkan/disapu	ruas jalan				55	55			
	- Jumlah TPS3R yang difasilitasi (SIDa)	TPS3R				21	21			

No	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (2022)	Realisasi 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD sd tahun 2023	Persentase Capaian Terhadap Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Realisasi 2023			
	- Jumlah bulan fasilitasi opersional bank sampah induk	bulan				12	12			
	- Jumlah bulan operasional pengangkutan sampah	bulan				12	12			
	- Jumlah gerobak sampah yang dibeli	unit				7	7			
	- Jumlah kendaraan roda tiga yang dibeli	unit				2	2			
	- Jumlah rumah botol plastik yang dibeli	unit				6	6			
	- Jumlah tempat sampah yang dibeli	buah				70	82			
	- Jumlah bahan habis pakai yang dibeli	jenis				1	1			
	- Jumlah dumptruk yang dibeli	unit				1	1			
	- Jumlah gerobak sampah yang diadakan	unit				78	77			
	- Jumlah jembatan timbang yang ditera	unit				1	1			
	- Jumlah kendaraan roda 3 yang dipelihara	unit				18	18			
	- Jumlah mesin pemilah sampah yang diadakan	unit				2	2			
	- Jumlah perlengkapan pakaian kerja yang diadakan	jenis				4	4			
	- Jumlah TPS3R yang dipelihara	unit				3	6			
Urusan Rutin										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100	100	105,27	100	100	100	100	Tercapai
	- Jumlah dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun	dokumen			2	2	2			
	- Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	dokumen			2	2	2			
	- Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	bulan			12	12	12			
	- Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)	dokumen			2	2	2			
	- Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	dokumen			4	4	4			

No	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (2022)	Realisasi 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD sd tahun 2023	Persentase Capaian Terhadap Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Realisasi 2023			
	- Jumlah dokumen SPIP (1 dokumen Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	dokumen			5	5	5			
	- Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	bulan			14	14	14			
	- Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	bulan			12	12	12			
	- Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	dokumen			1	1	1			
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	108,21	100	103,06	103,06	103,06	Tercapai
	- Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi	kali			1	1	1			
	- Jumlah pakaian kerja lapanan/rompi yang diadakan	buah			441	441	441			
	- Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan			12	12	12			
	- Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	bulan			12	12	12			
	- Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	unit			23	72	107			
	- Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	bulan			12	12	12			
	- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	bulan			11	11	11			
	- Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan			12	12	12			
	- Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	bulan			12	12	12			
	- Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	Orang/kali			146	80	112			
	- Jumlah IPAL Laboratorium yang dibangun	unit			0	1	1			

No	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (2022)	Realisasi 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD sd tahun 2023	Persentase Capaian Terhadap Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Realisasi 2023			
	- Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan			12	12	12			
	- Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan			12	12	12			
	- Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	bulan			12	12	12			
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	- Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	bulan			12	12	12			
	- Jumlah bulan pemeliharaan alat besar	bulan			12	12	12			
	- Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	unit			12	1	1			
	- Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	bulan			12	12	12			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada DLH Kota Pekalongan sesuai tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja utama Rencana Stategis DLD Kota Pekalongan. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bahwa analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam Norma Standar Pelayanan Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Kinerja pelayanan DLH Kota Pekalongan dapat dilihat pada capaian pelaksanaan tugas pokoknya yaitu memimpin, merumuskan, mengatur, pembina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang bidang tata lingkungan dan penaatan hukum lingkungan, bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan pengelolaan RTH, serta bidang kebersihan dan pengelolaan sampah. Pada tahun 2023 sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya usaha yang terolah limbahnya dengan 1 (satu) indikator;
2. Meningkatnya ruang terbuka hijau dengan 1 (satu) indikator;
3. Optimalnya cakupan layanan persampahan dengan 1 (satu) indikator;
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan 1 (satu) indikator; dan
5. Meningkatnya tertib hukum lingkungan hidup dengan 1 (satu) indikator.

Tabel 2. 2
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
1	Meningkatnya usaha yang terolah limbahnya	Persentase tingkat pencemaran air	$= \frac{\sum \text{Parameter yang tidak sesuai baku mutu pada 5 sungai}}{\sum \text{Parameter air pada 5 sungai (7 x 5)}} \times 100\ \%$
2	Meningkatkatnya Ruang Terbuka Hijau	Persentase kenaikan luasan RTH	$= \frac{\text{Luas RTH tahun N - Luas RTH tahun N-1}}{\text{Luas RTH tahun N-1}} \times 100\ \%$
3	Optimalnya cakupan layanan persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	$= \frac{\sum \text{sampah terkelola tahun N} - \sum \text{sampah terkelola tahun N-1}}{\sum \text{sampah terkelola tahun N-1}} \times 100\ \%$
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD Tahun N

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
5	Meningkatnya penataan dan ketaatan hukum lingkungan	Tertib hukum lingkungan	$\frac{\sum \text{usaha dan/atau kegiatan yang melaporkan pelaksanaan AMDAL/UKL/UPL}}{\sum \text{usaha dan/atau kegiatan yang memiliki AMDAL/UKL/UPL}} \times 100\ \%$

Penilaian capaian kinerja utama DLH Kota Pekalongan tahun 2023 difokuskan pada 10 (sepuluh) program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlinduangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup; dan
10. Program Pengelolaan Persampahan.

Tabel 2. 3
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Sasaran Stretegis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya usaha yang terolah limbahnya	Persentase tingkat pencemaran air	62,86%	28,57%	220,01
2	Meningkatkatnya Ruang Terbuka Hijau	Persentase kenaikan luasan RTH	0,344%	1,31%	379,56
3	Optimalnya cakupan layanan persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	71,07%	95,20%	133,95
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	87	86,05	98,91
5	Meningkatnya tertib hukum lingkungan hidup	Tertib hukum lingkungan	34,42%	43,04%	125,04

Hasil analisis berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tabel diatas adalah sebagai berikut:

a. Capaian kinerja yang sesuai atau melebihi target ditunjukkan pada indikator meningkatnya usaha yang terolah limbahnya dengan capaian kinerja

220,01%, indikator meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan capaian kinerja 379,56%, optimalnya cakupan layanan persampahan dengan capaian kinerja 133,95% dan meningkatnya tertib hukum lingkungan hidup dengan capaian kinerja 125,04% atau dikategorikan **sangat tinggi**;

b. Capaian kinerja yang tidak mencapai target atau dibawah 100% ada pada indikator meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan capaian kinerja 98,91% atau masuk dalam katagori **tinggi**.

Selanjutnya hasil analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2. 4
Pencapaian Kinerja Pelayanan DLH Kota Pekalongan

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis	
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase tingkat pencemaran air			62,86	60,00	60,00	60,00	28,57		60,00	60,00	
2	Persentase kenaikan luasan RTH			0,344	0,343	0,341	0,340	1,31		0,341	0,340	
3	Persentase peningkatan pengelolaan sampah			71,07	70,68	70,29	69,91	95,20		70,29	69,91	
4	Nilai SAKIP OPD			87	88	89	90	86,05		89	90	
5	Tertib hukum lingkungan			34,42	43,00	51,90	60,1	43,04		51,90	60,1	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

A. Permasalahan

Setiap Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sering mengalami permasalahan dan hambatan yang harus dihadapi demi tetap menjaga keberadaan suatu organisasi. Permasalahan-permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh antara lain adalah:

1. Tidak semua industri melakukan uji laboratorium terhadap kualitas air limbah yang dihasilkan secara rutin.
2. Masih banyaknya industri kecil dan menengah yang tidak mempunyai IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah).
3. Sebagian besar industri kecil dan menengah membuang langsung air limbahnya ke saluran air atau sumber air.
4. Belum ditentukannya kelas air sungai.
5. Belum memiliki peralatan laboratorium yang memadai untuk uji kualitas udara.
6. Belum dilakukannya penetapan baku mutu kualitas udara emisi dan ambien.
7. Belum adanya pos pengaduan masyarakat yang mengakomodasi akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Selama ini pengaduan langsung ditujukan ke LH.
8. Masih minimnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
9. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
10. Belum optimalnya dukungan SDM.

B. Dampak terhadap Pencapaian Visi Misi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup telah menyusun program kerja dan kegiatan dalam Rencana Strategis sebagai upaya

pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pekalongan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Dalam RPJMD tersebut kinerja DLH Kota Pekalongan mendukung pencapaian Misi ke 4 yaitu "**Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan**" dengan tujuan "meningkatkan kualitas lingkungan hidup".

C. Tantangan dan Peluang

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya DLH kota Pekalongan menghadapi tantangan sebagai berikut:

1. Letak geografis dan topografi yang berada di daerah pesisir.
2. Ketersediaan sumber utama air menurun dengan sangat cepat, diakibatkan kurangnya pencarian sumber air tanah yang baru untuk Kota Pekalongan.
3. Meningkatnya polusi terhadap air permukaan dan air tanah.
4. Kualitas udara terus menurun.
5. Produksi limbah padat/sampah naik secara signifikan.
6. Kurangnya SDM yang berkompeten sesuai bidang dan tanggungjawab pekerjaan, serta personil teknis yang dapat menganalisa dan membuat perencanaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
7. Masih lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan.
8. Rendahnya kesadaran dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Peluang yang dapat disiasati dalam pengelolaan lingkungan di Kota Pekalongan antara lain:

1. Memperbaiki ketersediaan sistem pembuangan limbah.
2. Mengelola sumber daya air.
3. Mengurangi kepadatan lalu-lintas dan emisi kendaraan.
4. Libatkan sektor swasta dalam pengurangan efek gas rumah kaca.
5. Libatkan publik dan sektoir swasta dalam penngelolaan limbah padat/sampah.
6. Membersihkan polusi dari perusahaan-perusahaan yang ada.
7. Mengurangi kadar polusi perusahaan-perusahaan.
8. Mengoptimalkan peran pihak terkait atau stakeholder.
9. Mongoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan.
10. Meningkatkan kapasitas SDM.

D. Penentuan Isu-isu Stategis

Perumusan dan pengidetifikasian isu-isu yang tepat, cermat yang bersifat strategis sangat penting sekali karena merupakan kondisi atau hal yang harus

diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu berdasar permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan, serta hasil telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah, Renstra, RTRW dan KLHS maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Secara garis besar isu-isu strategis dimaksud adalah:

1. Pengendalian Pencemaran Air

   Kota Pekalongan merupakan dataran rendah dengan wilayah pantai, dan merupakan pula kota perdagangan dan industri yang didominasi oleh industri produk tekstil dan batik yang cukup dikenal baik dalam lingkup nasional maupun global, disamping ada pula industri dibidang perikanan dan industri lainnya yang berpotensi menimbulkan pencemaran baik air, tanah maupun udara. Berkaitan dengan permasalahan limbah industri berbagai upaya perbaikan telah dilakukan baik melalui sosialisasi masyarakat terutama kalangan industri dan UKM, fasilitasi pembangunan IPAL skala kecil ataupun IPAL bersama, namun belum dapat menyelesaiakan permasalahan yang ada, mengingat sumber pencemar tidak hanya berasal dari wilayah Kota Pekalongan saja, mengingat Kota Pekalongan merupakan wilayah hilir maka sumber pencemarannya pun berasal dari daerah di luar Kota Pekalongan, yang juga banyak menghasilkan limbah industri.
2. Pengendalian Pencemaran Udara

   Kota Pekalongan merupakan daerah yang berada disisi sebelah utara Pulau Jawa yang dilalui oleh jalur transportasi utama di Pulau Jawa. Jumlah kendaraan berat yang melintasi Kota Pekalongan sangat banyak yang berdampak pada tingginya jumlah emisi gas buang di Kota Pekalongan yang menyebabkan pencemaran udara. Selain berasal dari sumber emisi bergerak, pencemaran udara berasal dari emisi tidak bergerak, yaitu industri yang menggunakan bahan bakar batu bara, bensin maupun solar dan sejenisnya yang menghasilkan gas buang melalui cerobong yang menyebabkan pencemaran udara sehingga kualitas udara menurun. Permasalahan pencemaran udara juga muncul, sehingga kualitas udarapun semakin menurun akibat semakin banyak dihasilkannnya emisi gas buang baik dari transportasi ataupun asap industri.
3. Pengelolaan Sampah/Limbah Padat

   Isu persampahan merupakan hal yang perlu mendapat perhatian khusus, karena pada dasarnya setiap hari semua orang menghasilkan sampah, sehingga volume sampah semakin lama akan semakin

bertambah. Dalam jangka panjang apabila tidak dilakukan pengelolaan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang diharuskan akan menjadi permasalahan lingkungan yang sangat mengkhawatirkan, apabila untuk kawasan perkotaan dengan luas lahan yang relatif terbatas, sebagaimana telah terjadi di berbagai daerah. Untuk itu isu/permasalahan persampahan di masyarakat ini perlu mendapatkan perhatian dan penerapan kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan sehinga secara bertahap volume sampah dapat dikurangi dan tidak terus meningkat.

TPA Degayu yang saat ini menjadi satu satunya tempat pemrosesan akhir sampah di Kota Pekalongan masih menggunakan open dumping, disamping itu tumpukan sampah di TPA Degayu volumenya semakin banyak sehingga sudah mendekati kapasitas maksimal, sedangkan untuk penambahan lahan TPA sudah tidak memungkinkan karena daerah tersebut peruntukannya bukan untuk TPA.

4. Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Pemanasan Global (Global Warming)

   Isu pemanasan global yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan dan ekosistem bumi akibat efek gas rumah kaca, rusaknya lapisan ozon akibat banyaknya emisi gas buang yang dihasilkan kegiatan manusia dampaknya akan sangat mengerikan, secara makro yang dapat memacu terjadinya perubahan iklim, mencairnya es di kutub utara dan selatan, serta kerusakan bumi lainnya. Untuk itu isu pemanasan global ini harus menjadi perhatian semua kalangan serta perlu dilakukannya tindakan-tidakan pencegahan, pemulihan kondisi lingkungan guna meminimalisir terjadinya dampak pemanasan global tersebut.

5. Terbatasnya Ruang Terbuka Hijau dan Perubahan Penggunaan Lahan.

   Ruang terbuka hijau memiliki peranan yang cukup penting untuk mengurangi pencemaran udara di Kota Pekalongan, sekaligus meningkatkan kesejukan dan kerapian kota. Sebagaimana kita ketahui, keberadaan ruang terbuka hijau kota telah menjadi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu besar ruang terbuka hijau tersebut minimal 30% dari luas kota. Sementara ini luas ruang terbuka hijau di Kota Pekalongan adalah sebesar 108,53 ha. Perbandingan luas ruang terbuka hijau dibanding luas wilayah Kota Pekalongan adalah 108,53 ha : 3.742 ha (luas wilayah Kota Pekalongan dikurangi sawah, tambak dan badan air) atau sebesar 2,900%. Persentase tersebut masih jauh dari luas RTH yang dipersyaratkan dalam UU No. 26 Tahun 2007. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan harus berupaya untuk menambah luasan RTH yang ada. Terutamanya penambahan ruang-ruang hijau untuk publik yang dirasa masih kurang seperti taman kota, taman lingkungan baik di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW dan sebagainya.

Perubahan penggunaan lahan juga berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup. Hal ini disebabkan karena berubahnya fungsi lahan, misalnya dari semula lahan pertanian menjadi lahan perumahan atau lahan industri, sehingga mengakibatkan kurangnya daerah resapan air yang dampaknya ketika hujan terjadi banjir.

6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan.

   Kita ketahui bersama bahwa saat ini, tingkat kesadaran masyarakat tentang kepedulian terhadap lingkungan masih sangat rendah. Hal ini ditunjukkan dengan perilaku dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan, sebagai contoh membuang sampah/limbah sembarangan, melakukan penebangan tanaman/hutan tanpa berusaha melakukan penanaman kembali, kurang perhatian terhadap gerakan penghijauan, kurang menyadari bahwa bumi ini nantinya perlu dijaga dan dilestarikan untuk kepentingan geerasi selanjutnya. Kurangnya kesadaran masyarakat tersebut salah satu sebabnya antara lain belum tersosialisasikannya secara optimal peraturan-peraturantentang lingkungan hidup serta masih lemahnya penegakan peraturan tentang lingkungan hidup.

7. Adaptasi dan Mitigasi Rob.

   Rob merupakan permasalahan yang sangat sulit diatasi, disamping disebabkan oleh penurunan permukaan tanah juga disebabkan oleh meningkatnya permukaan air laut yang disebabkan oleh Global Warming *(Pemanasan Global).*

   Penurunan permukaan tanah salah satunya disebabkan oleh banyaknya pengambilan air bawah tanah untuk kebutuhan hidup dan untuk industri yang tidak terkendali. *Global Warming* (Pemanasan Global) merupakan fenomena alam yang terjadi secara global di bergabagi belahan dunia. Hal ini disebabkan karena tingginya Gas Rumah Kaca (GRK) yang berasal dari pembakaran fosil.

   Kawasan yang terkena dampak rob saat ini semakin meluas, hal ini menyebabkan kerentanan masyarakat terhadap penyakit semakin tinggi. Semua kelurahan yang berada didaerah pesisir Kota Pekalongan diantaranya Kelurahan Bandengan, Kandang Panjang, Panjang Baru, Degayu, Panjang Wetan, Pasirkratonkramat, Krapyak, Klego dan Pabean terkena dampak rob.

8. Kerusakan biomasa

   Tingginya jumlah pupuk kimia yang digunakan untuk pertanian saat ini menjadi kendala disemua daerah termasuk Kota Pekalongan. Pupuk kimia yang digunakan secara terus menerus akan menghasilkan panen yang maksimal akan tetapi lama kelamaan akan menyebabkan ketergantungan terhadap pupuk kimia yang menyebabkan tanah tersebut

akan mengalami kerusakan. Selain dari pupuk kimia, kerusakan biomasa juga diakibatkan oleh tingginya pencemaran air industri sehingga biomasa menjadi kurang berfungsi dengan maksimal.

9. Konservasi Sumber Daya Air (SDA)

   Kota Pekalongan merupakan kota jasa yang memiliki banyak sekali industri kecil yang berpotensi mencemari lingkungan. Dampaknya adalah berkurangnya ketersediaan air bersih dari sumur dangkal di wilayah tersebut. Didaerah pantai sumur dangkal sudah tercemar karena adanya intrusi air laut sehingga rasa air sumur menjadi asin. Salah satu upaya untuk mendapatkan air bersih tersebut adalah dengan membuat sumur dalam / sumur artesis atau dengan mengambil air dari Kabupaten Batang maupun Kabupaten Pekalongan. Perlu adanya konservasi sumber daya air agar jumlah air bersih di Kota Pekalongan terjaga.

10. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan.

    Kota Pekalongan memiliki daerah yang wilayahnya secara ekonomis sangat menguntungkan, tetapi dilihat dari dampak lingkungan yang ditimbulkan sangat merugikan. Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya sarana dan prasarana pendukung agar dampak lingkungan yang ditimbulkan dapat tertangani dengan baik. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan diantaranya adalah sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air, udara, persampahan, limbah B3, rob dan lain lain.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Renja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Disamping itu dokumen Renja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup.

Dengan disusunnya Rancangan Awal RKPD Kota Pekalongan tahun 2025, telah dirumuskan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dengan membandingkan rumusan rancangan awal RKPD dengan ketersediaan anggaran serta kebutuhan OPD, terdapat perbedaan yang menyebabkan perubahan perumusan kebutuhan tersebut. Perubahan rumusan kebutuhan

dilakukan agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih optimal. Perubahan tersebut antara lain anggaran pagu kegiatan. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2. 5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 DLH Kota Pekalongan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100%**	**15.939.353.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100%**	**15.570.419.500**	
a.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100%**	**17.120.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100%**	**17.120.000**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3.480.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3.480.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	1.640.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	1.640.000	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 laporan	12.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	12.000.000	
b.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**10.316.035.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**10.170.149.000**	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	116 orang/bulan	10.208.515.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	116 orang/bulan	10.064.449.000	
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	106,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	104.180.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.520.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.520.000	
c.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatu**	**100 persen**	**16.880.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 persen**	**12.330.000**	
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	16.880.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	12.330.000	
d.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100 Persen**	**284.190.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100 Persen**	**390.688.000**	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.275.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	9.026.000	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	53.380.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	60.964.000	
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 Paket	1.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 Paket	730.000	
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Paket	132.200.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Paket	141.700.000	
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekalongan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	13 Paket	24.500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekalongan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	13 Paket	35.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2 Dokumen	2.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2 Dokumen	2.580.000	
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95 Laporan	66.335.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87 Laporan	140.688.000	
e	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**609.121.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**564.433.000**	
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan	2.400.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan	1.760.000	
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	310.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	267.960.000	
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	296.121.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	294.713.000	
f	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**4.696.007.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**4.415.699.500**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 unit	340.364.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	173.149.500	
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kota Pekalongan	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	47 unit	4.205.643.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kota Pekalongan	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	47 Unit	4.120.360.000	
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	125.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	103.940.000	
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	43 Unit	25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	43 Unit	18.250.000	
II	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Kota Pekalongan**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup**	**20 persen**	**0**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Kota Pekalongan**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup**	**20 persen**	**0**	
a	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/Kota**	**Kota Pekalongan**	**Jumlah penyusunan dokumen KLHS untuk perencanaan**	**1 dokumen**	**0**	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/Kota**	**Kota Pekalongan**	**Jumlah penyusunan dokumen KLHS untuk perencanaan**	**1 dokumen**	**0**	
b	**Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD**	**Kota Pekalongan**	**Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kab/Kota yang disusun**	**2 dokumen**	**0**	**Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD**	**Kota Pekalongan**	**Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kab/Kota yang disusun**	**2 dokumen**	**0**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Kota Pekalongan**	**Persentase limbah yang diolah**	**45,97 persen**	**1.286.721.000**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Kota Pekalongan**	**Persentase limbah yang diolah**	**45,97 persen**	**1.214.866.000**	
a	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Kota Pekalongan**	**Persentase pelaku usaha yang mengolah limbahnya**	**54,38 persen**	**846.892.000**	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Kota Pekalongan**	**Persentase pelaku usaha yang mengolah limbahnya**	**54,38 persen**	**852.526.000**	
22	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	1 Dokumen	541.017.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	1 Dokumen	533.720.000	
23	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kota Pekalongan	jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	25.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kota Pekalongan	jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	18.250.000	
24	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	200 Dokumen	280.875.000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	200 Dokumen	253.586.000	
b	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Kota Pekalongan**	**Persentase upaya penanggulangan pencemaran air**	**76.47 persen**	**439.829.000**	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Kota Pekalongan**	**Persentase upaya penanggulangan pencemaran air**	**76.47 persen**	**362.340.000**	
25	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	2 Laporan	66.000.000	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	2 Laporan	48.180.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Pekalongan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dihentikan	5 Titik	373.829.000	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Pekalongan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dihentikan	5 Titik	314.160.000	
IV	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Kota Pekalongan**	**Persentase Ruang Terbuka Hijau**	**2,939 persen**	**7.903.244.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Kota Pekalongan**	**Persentase Ruang Terbuka Hijau**	**2,939 persen**	**3.635.404.500**	
a	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Kota Pekalongan**	**Luas RTH Publik**	**109,981 Ha**	**7.903.244.000**	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Kota Pekalongan**	**Luas RTH Publik**	**109,981 Ha**	**3.635.404.500**	
28	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kota Pekalongan	Luas RTH yang Dikelola Lingku Kewenangan Kabupaten/Kota	108,53 Ha	6.568.777.000	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kota Pekalongan	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	108,53 Ha	2.750.334.500	
29	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Kota Pekalongan	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	34,1 Unit	1.334.467.000	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Kota Pekalongan	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	34,1 Unit	1.334.467.000	
V	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Kota Pekalongan**	**Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan**	**13,33 persen**	**2.239.000**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Kota Pekalongan**	**Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan**	**13,33 persen**	**1.640.000**	
a	**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**Kota Pekalongan**	**Jumlah pelayanan rekomendasi persetujuan teknis dan perpanjangan persetujuan teknis penyimpanan sementara limbah B3**	**6 persen**	**2.239.000**	**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**Kota Pekalongan**	**Jumlah pelayanan rekomendasi persetujuan teknis dan perpanjangan persetujuan teknis penyimpanan sementara limbah B3**	**6 persen**	**1.640.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	2.239.000	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	1.640.000	
VI	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Kota Pekalongan**	**Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH**	**16,67 persen**	**83.150.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Kota Pekalongan**	**Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH**	**16,67 persen**	**29.590.000**	
a	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Pekalongan**	**Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi terhadap ketaatan hukum lingkungan**	**10 kegiatan**	**83.150.000**	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Pekalongan**	**Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi terhadap ketaatan hukum lingkungan**	**10 kegiatan**	**29.590.000**	
31	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kota Pekalongan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	45.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kota Pekalongan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	11.230.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Badan Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi	67 Badan Usaha	38.150.000	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Badan Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi	67 Badan Usaha	18.360.000	
VII	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Kota Pekalongan**	**Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup**	**50,00 persen**	**268.393.000**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Kota Pekalongan**	**Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup**	**50,00 persen**	**244.480.000**	
a	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Pekalongan**	**Jumlah masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup**	**5 komunitas**	**268.393.000**	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Pekalongan**	**Jumlah masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup**	**5 komunitas**	**244.480.000**	
34	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kota Pekalongan	Jumlah Lembaga Pendidikan formal/Lembaga Masyarakat/komunitas/kelompok Masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	9 Lembaga	72.000.000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kota Pekalongan	Jumlah Lembaga Pendidikan formal/Lembaga Masyarakat/komunitas/kelompok Masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	9 Lembaga	101.100.000	
35	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota Pekalongan	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	52.500.000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota Pekalongan	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	38.330.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kota Pekalongan	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	700 Orang	143.893.0000	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kota Pekalongan	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	700 orang	105.050.000	
VIII	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Kota Pekalongan**	**Persentase perolehan penghargaan bidang LH**	**75 persen**	**63.750.000**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Kota Pekalongan**	**Persentase perolehan penghargaan bidang LH**	**75 persen**	**44.350.000**	
a	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Pekalongan**	**Jumlah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat**	**3 penghargaan**	**63.750.000**	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Pekalongan**	**Jumlah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat**	**3 penghargaan**	**44.350.000**	
37	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Pekalongan	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	4 Entitas	63.750.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Pekalongan	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	4 Entitas	44.350.000	
IX	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Kota Pekalongan**	**Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti**	**100 persen**	**15.750.000**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Kota Pekalongan**	**Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti**	**100 persen**	**10.630.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Kota Pekalongan**	**Jumlah kasus lingkungan yang ditangani**	**6 kasus**	**15.750.000**	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Kota Pekalongan**	**Jumlah kasus lingkungan yang ditangani**	**6 kasus**	**10.630.000**	
38	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	18 Pengaduan	12.750.000	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	18 pengaduan	9.310.000	
39	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kota Pekalongan	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penganggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kab/kota	1 perkara	3.000.000	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kota Pekalongan	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penganggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kab/kota	1 perkara	1.320.000	
X	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Kota Pekalongan**	**Persentase pengelolaan sampah**	**0,3 persen**	**12.053.724.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Kota Pekalongan**	**Persentase pengelolaan sampah**	**0,29 persen**	**11.688.874.000**	
a	**Pengelolaan Sampah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase pengurangan sampah**	**17,94 persen**	**12.053.724.000**	**Pengelolaan Sampah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase pengurangan sampah**	**17,46 persen**	**11.688.874.000**	
40	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten.Kota atau TPA/TPST Regional	56324807 Ton	8.629.479.000	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten.Kota atau TPA/TPST Regional	56324807 Ton	8.584.479.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kota Pekalongan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	35 Kelompok	639.245.000	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kota Pekalongan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	35 Kelompok	497.950.000	
41	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	2.785.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	2.606.445.000	
JUMLAH					**37.616.324.000**	**JUMLAH**				**32.393.284.000**	

Pada Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota, kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub kegiatn Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN semula Rp 10.316.035.000 berkurang menjadi Rp 10.064.449.000 dikarenakan semula ASN sebanyak 100 orang, pada tahun 2025 pensiun 7 orang sehingga menjadi 93 orang. Pada sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor semula Rp 4.275.000 menjadi Rp 9.026.000 disesuaikan dengan kebutuhan komponen listrik selama 1 tahun. Pada Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor semula Rp 53.380.000 menjadi Rp 60.964.000 karena ada pengadaan TV digital untuk keperluan rapat di Ruang Kepala DLH. Pada Sub kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor semula Rp 132.200.000 menjadi Rp 141.700.000 dikarenakan ada penambahan pembelian minuman galon untuk tenaga lapangan. Pada sub kegiatan Penyelenggaran Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD semula Rp 66.335.000 menjadi Rp 140.688.000 dikarenakan keperluan untuk studi banding

dan kajian inovasi bidang persampahan ke kota lain. Untuk sub kegiatan lain mengalami penurunan karena ada rasionalisasi. Perubahan target pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD menyesuaikan dengan realisasi Tahun 2024.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. Musrenbang diatur dalam Undang-Undang no. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan diatur oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk tingkat nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Perkembangan perencanaan partisipatif bermula dari kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan prakarsa tersebut. Semua pihak yang terkait selanjutnya dikenal dengan istilah pemangku kepentingan (stakeholders). Komitmen semua pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan program, dan diyakini bahwa besarnya komitmen ini tergantung kepada sejauhmana mereka terlibat dalam proses perencanaan. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan partisipatif diwujudkan antara lain melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di mana sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan berasal dari semua aparat penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), masyarakat, kaum rohaniwan, pemilik usaha, kelompok profesional, organisasi non-pemerintah, dan lain-lain.

Demi mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah tahun 2021-2026, yakni Terwujudnya Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri, dan Religius. Pemerintah Kota Pekalongan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan (RPJMD) Tahun 2021-2026. Proses pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Pekalongan dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu Musrenbang Kelurahan, kemudian dilanjutkan dalam forum Musrenbang Kecamatan, tahapan dilaksanakan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD. Kemudian dilaksanakan Musrenbang RKPD yang menghasilkan rancangan akhir RKPD untuk dikaji bersama kelayakannya untuk proses penetapan. Didalam Musrenbang RKPD Tahun 2023 terdapat beberapa usulan dari kelompok masyarakat yang terkait dengan tupoksi DLH Kota Pekalongan, usulan tersebut diantaranya sebagai berikut

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 sebagai bagian dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026 mempunyai Tujuh Prioritas Nasional dalam RKP 2021 yaitu (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dan (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. "Tujuh Prioritas Nasional ini didukung oleh Kementerian/Lembaga melalui penetapan Program, Kegiatan dan Proyek Prioritas, serta didukung oleh Pemerintah Daerah melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah menurut pembagian Urusan Wajib dan Urusan Pilihan".

Pada tahun 2025 Kementerian LHK menekankan tindak lanjut dan arah pembangunan LHK sekaligus mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan: (a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, (b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim, serta (c) Pembangunan Rendah Karbon.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran dalam Renja adalah turunan penjabaran tujuan Renstra yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DLH Kota Pekalongan serta identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan- tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai sesuai tujuan organisasi. Adapun tujuan dan sasaran DLH Kota Pekalongan, telah dirumuskan sebagai berikut:

a. Tujuan : 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik;
   1. Menurunnya Tingkat Pencemaran Air;
   2. Meningkatkan Kualitas Lahan;
   3. Optimalnya Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan.

b. Sasaran :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya tertib hukum lingkungan hidup;
3. Meningkatnya usaha yang terolah limbahnya;
4. Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau;
5. Optimalnya cakupan layanan persampahan.

Untuk mengevaluasi pencapaian sasaran tersebut, maka dirumuskan indikator sasaran dan formulasi/rumus perhitungan indikator sasaran. Indikator sasaran yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran DLH Kota Pekalongan sampai dengan tahun 2024 merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing seksi selaku penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 3. 1
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	89
		Meningkatnya tertib hukum lingkungan hidup	Tertib Hukum Lingkungan	51,9 %
2	Menurunnya Tingkat Pencemaran Air	Meningkatnya usaha yang terolah limbahnya	Persentase tingkat pencemaran air	60,00 %
3	Meningkatkan Kualitas Lahan	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	Persentase kenaikan luasan RTH	0,341 %
4	Optimalnya Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan	Optimalnya cakupan layanan persampahan	Persentase pelayanan persampahan	70,29 %

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Perangkat Daerah

adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah.

Rencana kerja tahun 2025 merupakan lanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas untuk mewujudkan tujuan dan sasarannya. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebagian besar masih dilaksanakan pada tahun 2024. Pada prinsipnya program dan kegiatan disusun berdasarkan skala prioritas sesuai pagu indikatif yang ditetapkan.

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebanyak 10 Program, 16 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan dengan jumlah pagu Rp. 32.393.284.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kota Pekalongan. Adapun program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2025 tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3. 2

Rumusan Rencana Program Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 DLH Kota Pekalongan

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**32.393.284.000**				**39.061.580.000**
2.11	**LINGKUNGAN HIDUP**				**32.393.284.000**				**39.061.580.000**
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**Kota Pekalongan**	**100%**	**15.579.399.500**	APBD		**100%**	**13.280.593.000**
2.11.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Kota Pekalongan**	**100%**	**17.120.000**	APBD		**100%**	**23.051.000**
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	3 dokumen	3.480.000	APBD		3 dokumen	2.750.000
2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	2 dokumen	1.640.000	APBD		2 dokumen	1.650.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	15 laporan	12.000.000	APBD		15 laporan	18.651.000
2.11.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**Kota Pekalongan**	**100 persen**	**10.170.149.000**	APBD		**100 persen**	**10.280.620.000**
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kota Pekalongan	12 bulan	10.064.449.000	APBD		12 bulan	10.172.970.000
2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan / verifikasi keuangan SKPD	Kota Pekalongan	12 dokumen	104.180.000	APBD		12 dokumen	106.000.000
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Kota Pekalongan	1 dokumen	1.520.000	APBD		1 dokumen	1.650.000
2.11.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Kota Pekalongan**	**100 persen**	**12.330.000**	APBD		**100 persen**	**28.531.000**
2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kota Pekalongan	2 paket	12.330.000	APBD		2 paket	28.531.000
2.11.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**Kota Pekalongan**	**100 Persen**	**390.668.000**	APBD		**100 Persen**	**250.975.000**

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket penyediaan komponen instalasi Listrik	Kota Pekalongan	4 Paket	9.026.000	APBD		4 Paket	5.700.000
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Pekalongan	4 paket	60.964.000	APBD		4 Paket	57.900.000
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kota Pekalongan	4 paket	730.000	APBD		4 paket	8.000.000
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket penyediaan bahan logistic kantor yang disediakan	Kota Pekalongan	4 paket	141.700.000	APBD		4 paket	82.300.000
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Pekalongan	13 paket	35.000.000	APBD		13 paket	24.500.000
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kota Pekalongan	2 dokumen	2.580.000	APBD		2 dokumen	2.500.000
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	87 laporan	140.688.000	APBD		87 laporan	70.075.000
2.11.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Pekalongan**	**100 Persen**	**564.433.000**	APBD		**100 Persen**	**537.479.000**
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kota Pekalongan	4 laporan	1.760.000	APBD		4 laporan	2.400.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Pekalongan	12 laporan	267.960.000	APBD		12 laporan	263.000.000
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	Kota Pekalongan	12 laporan	294.713.000	APBD		12 laporan	272.079.000
2.11.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Pekalongan**	**100 Persen**	**4.415.699.500**	APBD		**100 Persen**	**2.159.937.000**
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kerndaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Pekalongan	19 Unit	173.149.500	APBD		19 Unit	162.982.000
2.11.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Kota Pekalongan	47 Unit	4.120.360.000	APBD		47 Unit	1.889.315.000
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Pekalongan	1 unit	103.940.000	APBD		1 unit	105.300.000
2.11.01.2.09.0010,	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Pekalongan	43 Unit	18.250.000	APBD		43 Unit	25.000.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase limbah yang diolah**	**Kota Pekalongan**	**45,97 persen**	**4.803.500.500**	APBD		**49,01 persen**	**7.727.614.000**
2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase pelaku usaha yang mengolah limbahnya**	**Kota Pekalongan**	**54,38 persen**	**805.556.000**	APBD		**53,57 persen**	**952.518.000**
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah dokumen Uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Kota Pekalongan	1 dokumen	533.720.000	APBD		1 dokumen	570.018.000
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	Kota Pekalongan	1 dokumen	18.250.000	APBD		1 dokumen	25.000.000
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Kota Pekalongan	200 dokumen	253.586.000	APBD		200 dokumen	357.500.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)
2.11.03.2.02	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase upaya penanggulangan pencemaran air**	**Kota Pekalongan**	**76.47 persen**	**362.540.000**	APBD		**76.47 persen**	**2.583.102.000**
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah laporan sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten / Kota yang dilaksanakan	Kota Pekalongan	2 laporan	48.180.000	APBD		2 laporan	66.000.000
2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan	Kota Pekalongan	5 titik	314.360.000	APBD		5 titik	2.576.502.000
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase Ruang Terbuka Hijau**	**Kota Pekalongan**	**2,939 persen**	**3.635.404.500**	APBD		**2,949 persen**	**4.191.994.000**
2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Luas RTH Publik**	**Kota Pekalongan**	**109,981 Ha**	**3.635.404.500**	APBD		**110,355 Ha**	**4.191.994.000**
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten / Kota	Kota Pekalongan	108,53 Ha	2.750.334.500	APBD		108,53 Ha	3.929.494.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)
2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	34,1 Unit	885.070.000	APBD		34,1 Unit	262.500.000
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan**	**Kota Pekalongan**	**13,33 persen**	**1.640.000**	APBD		**15,56 persen**	**2.273.000**
2.11.05.2.01	**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**Jumlah pelayanan rekomendasi persetujuan teknis dan perpanjangan persetujuan teknis penyimpanan sementara limbah B3**	**Kota Pekalongan**	**6 persen**	**1.640.000**	APBD		**7 persen**	**2.273.000**
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3	Kota Pekalongan	1 Laporan	1.640.000	APBD		1 Laporan	2.273.000
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH**	**Kota Pekalongan**	**16,67 persen**	**29.590.000**	APBD		**16,67 persen**	**61.518.000**

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)
2.11.06.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi terhadap ketaatan hukum lingkungan**	**Kota Pekalongan**	**10 kegiatan**	**29.590.000**	APBD		**10 kegiatan**	**61.518.000**
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	Kota Pekalongan	1 dokumen	11.230.000	APBD		1 dokumen	23.368.000
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kota Pekalongan	67 badan usaha	18.360.000	APBD		38 Perusahaan	38.150.000
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup**	**Kota Pekalongan**	**50,00 persen**	**244.480.000**	**APBD**		**50,00 persen**	**322.836.000**
2.11.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup**	**Kota Pekalongan**	**5 komunitas**	**244.480.000**	**APBD**		**5 komunitas**	**322.836.000**

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Kota Pekalongan	1 Dokumen	38.330.000	APBD		1 dokumen	90.000.000
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Kota Pekalongan	700 orang	105.050.000	APBD		700 orang	232.836.000
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan formal/Lembaga Masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah Lembaga Pendidikan formal/Lembaga Masyarakat/komunitas/kelompok Masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Kota Pekalongan	5 Lembaga	101.100.000	APBD		5 Lembaga	0
2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase perolehan penghargaan bidang LH**	**Kota Pekalongan**	**75 persen**	**44.350.000**	APBD		**75 persen**	**86.368.000**
2.11.09.2.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat**	**Kota Pekalongan**	**3 penghargaan**	**44.350.000**	APBD		**3 penghargaan**	**86.368.000**

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	Kota Pekalongan	4 Entitas	44.350.000	APBD		4 Entitas	86.368.000
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti**	**Kota Pekalongan**	**100 persen**	**10.630.000**	APBD		**100 persen**	**18.187.000**
2.11.10.2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Jumlah kasus lingkungan yang ditangani**	**Kota Pekalongan**	**6 kasus**	**10.630.000**	APBD		**6 kasus**	**18.187.000**
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Tingkat Kab/Kota	Jumlah Pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Tingkat Kab/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Kota Pekalongan	18 pengaduan	9.310.000	APBD		18 pengaduan	18.187.000
2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penganggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kab/kota	Kota Pekalongan	1 perkara	1.320.000	APBD		1 perkara	0

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase pengelolaan sampah**	**Kota Pekalongan**	**0,3 persen**	**11.688.874.000**	APBD		**0,31 persen**	**10.787.095.000**
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	**Persentase pengurangan sampah**	**Kota Pekalongan**	**17,94 persen**	**11.688.874.000**	APBD		**18,19 persen**	**10.787.095.000**
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat dan Kelompok Masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Kota Pekalongan	35 kelompok	497.950.000	APBD		35 kelompok	427.734.000
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Pihak Lain di luar Kabupaten/Kota untuk pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Persampahan sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Kota Pekalongan	1 dokumen	2.606.445.000	APBD		1 dokumen	3.585.000.000
2.11.11.2.01.0020	Penanganan Sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	Kota Pekalongan	56.324.807 ton	8.584.479.000	APBD		56.324.807 ton	6.774.361.000

3.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Lingkungan Hisup dalam penyusunan program dan kegiatan juga menampung aspirasi masyarakat dari pemangku kepentingan, baik dari OPD terkait, kelompok masyarakat langsung maupun dari para relawan peduli lingkungan Kota Pekalongan yang langsung ditujukan kepada Perangkat daerah dan juga hasil tinjauan kelapangan.

Berdasarkan hasil rumusan dari pemangku kepentingan tersebut dilakukan penyesuaian dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah sekaligus merupakan program dan kegiatan yang merupakan isu-isu strategis perangkat daerah.

Pada Musrenbang Kota tahun 2024, usulan dari pemangku kepentingan, baik dari SKPD terkait, kelompok masyarakat langsung maupun dari para relawan peduli lingkungan Kota Pekalongan yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup disajikan dalam tabel 3.3 dibawah.

Tabel 3. 3 Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Dinas Lingkungan Hidup

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				
1.1	(KEHATI) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				
1.1.1	Kabupaten/Kota Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Taman RW. 08 Jl. Permata Perum. Podosugih Indah, Kota Pekalongan	Pemugaran Taman - 20m x 20m = 40 meter persegi - Rp. 150000000	1 lokasi	
2	Program Pengelolaan Sampah				
2.1	Kegiatan Pengelolaan Sampah				
2.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana	- RW 16 sapuro kebulen Kec. Pekalon	Pegadaan Gerobak Sampah (VIAR) - 1	1 unit	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Pengelolaan Persampahan	gan Barat, Kota Pekalongan - 1. RW 06 Randujajar PKK; 2. Jl. Kurinci RT 5 RW 8 Bendan Kergon; 3. Makam Wisata Religi Sapuro (2 Unit); 4. Kraton Kidul Kel. Pasirkratonkramat, Kota Pekalongan - RT 01. RT 03 Kelurahan Kali Baros, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan	unit - Rp. 40000000 Pengadaan kendaraan bermotor roda 3 - 5 unit - Rp. 200000000 Hibah Pengadaan Armada Kendaraan Bermotor Roda Tiga - 1 lokasi - Rp. 30000000	5 unit 1 lokasi	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Rencana Kerja dan pendanaan daerah mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kota Pekalongan berdasarakan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025.

Perumusan rencana program dan kegiatan DLH Kota Pekalongan dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra, dan visi dan misi Kota Pekalongan yang tertuang dalam RPJMD. Program, kegiatan dan sub kegiatan DLH Kota Pekalongan sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kota Pekalongan adalah:

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan DLH Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Pagu Indikatif	Indikator kinerja	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	**32.393.284.000**		
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	**32.393.284.000**		
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**15.570.419.500**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100 persen**
1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**17.120.000**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 persen**
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.480.000	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.640.000	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan lapiran hasil	2 dokumen

			koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	15 laporan
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.170.149.000**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 persen**
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.064.449.000	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	105 orang/bulan
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	104.180.000	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.520.000	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12.330.000**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 persen**
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12.330.000	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	2 paket
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**390.688.000**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100 persen**
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.026.000	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.964.000	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	730.000	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket
4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	141.700.000	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket

4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.000.000	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	13 paket
4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.580.000	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.688.000	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	87 laporan
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**564.433.000**	**Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 persen**
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.760.000	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	267.960.000	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan
5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	294.713.000	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4.415.699.500**	**Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 persen**
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	173.149.500	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	19 unit
6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	4.120.360.000	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	47 unit
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	103.940.000	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit

6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.250.000	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	43 unit
II	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**0**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup**	**20 persen**
7	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/Kota**	**0**	**Jumlah penyusunan dokumen KLHS untuk perencanaan**	**1 dokumen**
7.1	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	0	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kab/Kota yang disusun	2 dokumen
III	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**1.167.896.000**	**Persentase limbah yang diolah**	**45,97 persen**
8	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**805.556.000**	**Persentase pelaku usaha yang mengolah limbahnya**	**54,38 persen**
8.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	533.720.000	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	1 dokumen
8.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	18.250.000	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	1 dokumen
8.3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	253.586.000	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	200 dokumen
9	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**362.340.000**	**Persentase upaya penanggulangan pencemaran air**	**76,47 persen**
9.1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan	48.180.000	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau	2 laporan

	Lingkungan Hidup pada Masyarakat		kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kab/kota yang dilaksanakan	
9.2	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	314.160.000	Jumlah sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan	5 titik
IV	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**	**3.635.404.500**	**Persentase ruang terbuka hijau**	**2,939 persen**
10	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**3.635.404.500**	**Luas RTH Publik**	**109,981 Ha**
10.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.750.334.500	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	108,53 Ha
10.2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	885.070.000	Unit Taman kehati lainnya yang dikelola lingkup kewenanganan kab/kota	34,1 unit
V	**Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**	**1.640.000**	**Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan**	**13,33 persen**
11	**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**1.640.000**	**Jumlah pelayanan rekomendasi persetujuan teknis dan perpanjangan persetujuan teknis penyimpanan sementara limbah B3**	**6 persen**
11.1	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	1.640.000	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuaan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	1 laporan
VI	**Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**29.590.000**	**Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujua teknis PPLH**	**16,67 persen**

12	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**29.590.000**	**Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi terhadap ketaatan hukum lingkungan**	**10 kegiatan**
12.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	11.230.000	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	1 dokumen
12.2	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	18.360.000	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	67 badan usaha
VII	**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	**244.480.000**	**Persentase masyarakat/komunitas peduli LH yang mendapat edukasi lingkungan hidup**	**50 persen**
13	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**244.480.000**	**Jumlah masyarakat/komuitas peduli LH yang mendapat edukasi lingkungan hidup**	**5 komunitas**
13.1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	38.330.000	Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan	1 dokumen
13.2	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	105.050.000	Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang terlibat	700 orang

13.3	Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	101.100.000	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	5 lembaga
VIII	**Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	**44.350.000**		
14	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**44.350.000**	**Jumlah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat**	**3 penghargaan**
14.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	44.350.000	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	4 entitas
IX	**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**10.630.000**	**Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti**	**100 persen**
15	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**10.630.000**	**Jumlah kasus lingkungan yang ditangani**	**6 kasus**
15.1	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	9.310.000	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kab/kota yang ditindaklanjuti/ditangani	18 pengaduan
15.2	Penerapan Sanksi Administrasi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	1.320.000	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kab/kota	1 perkara

X	**Program Pengelolaan Persampahan**	**11.688.874.000**	**Persentase pengelolaan sampah**	**0,3 persen**
16	**Pengelolaan Sampah**	**11.688.874.000**	**Persentase pengurangan sampah**	**17,94 persen**
16.1	Penanganan Sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	8.584.479.000	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kab/Kota atau TPA/TPST Regional	56.324.807 ton
16.2	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	497.950.000	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	35 kelompok
16.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	2.606.445.000	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana bersama pemeritah pusat, provinsi maupun pihak lain di luar kab/kota untuk pengelolaan persampahan sesuai dengan rencana induk pengelolaan sampah dan mengacu pada jakstrada	1 dokumen
		32.393.284.000		

Dalam Renja DLH Kota Pekalongan Tahun 2025 terdapat 10 Program, 16 Kegiatan dan 41 sub kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Total anggaran Renja 2025 sebesar Rp. 32.393.284.000,-. Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Seluruh kegiatan DLH Kota Pekalongan yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Indikator kinerja dari program-program tersebut menjadi tanggung jawab DLH Kota Pekalongan dalam evaluasi RKPD dan LKPJ.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan terkait perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (Renja) DLH Kota Pekalongan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan selama satu tahun kedepan. Renja disusun mengacu pada visi misi Walikota Pekalongan dan berpedoman kepada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) DLH Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025.

5.1 Catatan Penting

Terbatasnya alokasi anggaran serta proses penganggaran dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang masih mengikuti prosedur normatif, sebagaimana penganggaran rutin harus mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan peningkatakan kualitas lingkungan hidup. Untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja DLH Kota Pekalongan tahun 2025, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

a. Substansi Renja DLH Kota Pekalongan disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kota Pekalongan tahun 2024 dan Renstra DLH Kota Pekalongan tahun 2021-2026.

b. DLH Kota Pekalongan berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program kegiatan dan sub kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) DLH Kota Pekalongan Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025.

c. DLH Kota Pekalongan berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 yang berpedoman kepada Renja DLH Kota Pekalongan Tahun 2025 dan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025 dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.

d. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja DLH Kota Pekalongan Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (RENJA) DLH Kota Pekalongan selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja DLH. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf DLH Kota Pekalongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Untuk dapat merealisasikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja DLH Kota Pekalongan Tahun 2025 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Apabila terdapat kendala dalam pencapaian indikator kinerja yang telah direncanakan, baik diakibatkan oleh anggaran yang kurang memadai ataupun permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan yang diemban oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu Perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Pekalongan.

Semoga Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, serta memberikan manfaat bagi

proses perencanaan pembangunan Kota Pekalongan sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Pekalongan.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PEKALONGAN

Dr. SRI BUDI SANTOSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701214 199003 1 004

LAMPIRAN

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS LINGKUNGAN HIDUPKOTA PEKALONGAN

TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Dinas Lingkungan Hidup						32.393.284.000,00							32.385.800.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						32.393.284.000,00							32.385.800.000,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						32.393.284.000,00							32.385.800.000,00	
1	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen			100,00 persen	15.570.419.500,00						100,00 persen	13.320.509.000,00	
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			100 Persen	17.120.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup	-	23.051.000,00	
	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3.480.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup		2.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1.640.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup		1.650.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15 Laporan	12.000.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup		18.651.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 Persen	10.170.149.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup	-	10.280.620.000,00	
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				105 Orang/bulan	10.064.449.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup		10.172.970.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	104.180.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup		106.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.520.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup		1.650.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 Persen	12.330.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup	-	28.531.000,00	
	2	11	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	12.330.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup		28.531.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	-			100 Persen	390.688.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup	-	250.975.000,00	
	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	9.026.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup		5.700.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	60.964.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup		57.900.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	730.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup		8.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	141.700.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup		82.300.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	35.000.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup		24.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2.580.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup		2.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				87 Laporan	140.688.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup		70.075.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup	-	0,00	
	2	11	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	564.433.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup	-	554.735.000,00	
	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	1.760.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup		2.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	267.960.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup		263.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	294.713.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup		289.335.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	4.415.699.500,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup	-	2.182.597.000,00	
	2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				19 Unit	173.149.500,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup		162.982.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya														
							Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				47 Unit	4.120.360.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup		1.889.315.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	103.940.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup		105.300.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				43 Unit	18.250.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup		25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	20,00 persen			20,00 persen	0,00						20,00 persen	0,00	
	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah penyusunan dokumen KLHS untuk perencanaan	2dokumen			1 dokumen	0,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Kota Pekalongan	0dokumen	0,00	
	2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD														
							Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				2 Dokumen	0,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Kota Pekalongan		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase limbah yang diolah	45.97 persen			45.97 persen	1.167.896.000,00						45.97 persen	3.595.020.000,00	
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang mengolah limbahnya	53.57persen			54.38 persen	805.556.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan 07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan	53.57persen	952.518.000,00	
	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
							Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	533.720.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan 07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan		570.018.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	18.250.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan 07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan		25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota														
							Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				200 Dokumen	253.586.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan 07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan		357.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase upaya penanggulangan pencemaran air	76.47persen			76.47 persen	362.340.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan 07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan	76.47persen	2.642.502.000,00	
	2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat														
							Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				2 Laporan	48.180.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan 07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan		66.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup														
							Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				5 Titik	314.160.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan 07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan		2.576.502.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	2,939 persen			2,939 persen	3.635.404.500,00						2,939 persen	4.191.994.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH Publik	110.355Ha			109.981 Ha	3.635.404.500,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan 07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan	110.355Ha	4.191.994.000,00	
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														
							Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				108,53 Ha	2.750.334.500,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan 07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan		3.929.494.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	04	2.01	0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya														
							Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				34,1 Unit	885.070.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan 07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan		262.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	13,33 persen			13,33 persen	1.640.000,00						13,33 persen	2.273.000,00	
	2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah pelayanan rekomendasi persetujuan teknis dan perpanjangan persetujuan teknis penyimpanan sementara limbah B3	44persen			6 persen	1.640.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan 07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan	7persen	2.273.000,00	
	2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3														
							Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				1 Laporan	1.640.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan 07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan		2.273.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	16,67 persen			16,67 persen	29.590.000,00						16,67 persen	61.518.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi terhadap ketaatan hukum lingkungan	60kegiatan			10 kegiatan	29.590.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan	10kegiatan	61.518.000,00	
	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH														
							Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				1 Dokumen	11.230.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan		23.368.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup															
							Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				67 Badan Usaha	18.360.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan		38.150.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	50,00 persen			50,00 persen	244.480.000,00						50,00 persen	322.836.000,00	
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	5komunitas			5 komunitas	244.480.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan	5komunitas	322.836.000,00	
	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup														
							Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	38.330.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan		90.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup														
							Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				700 Orang	105.050.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan		232.836.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat														
							Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				5 Lembaga	101.100.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-			-	44.350.000,00						-	86.368.000,00	
	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat	18penghargaan			3 penghargaan	44.350.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan	3penghargaan	86.368.000,00	
	2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
							Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				4 Entitas	44.350.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan		86.368.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	100,00 persen			100,00 persen	10.630.000,00						100,00 persen	18.187.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus lingkungan yang ditangani	36kasus			6 kasus	10.630.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan	6kasus	18.187.000,00	
	2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota														
							Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				18 Pengaduan	9.310.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan		18.187.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	10	2.01	0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota														
							Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota				1 Perkara	1.320.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	0,3 persen			0,3 persen	11.688.874.000,00						0,3 persen	10.787.095.000,00	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah	18.19persen			17.94 persen	11.688.874.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Masyarakat Kota Pekalongan	18.19persen	10.787.095.000,00	
	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan														
							Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				35 Kelompok	497.950.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Masyarakat Kota Pekalongan		427.734.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				1 Dokumen	2.606.445.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Masyarakat Kota Pekalongan		3.585.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional					56324807 Ton	8.584.479.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Masyarakat Kota Pekalongan		6.774.361.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
							J U M L A H	**32.393.284.000,00**							**32.385.800.000,00**	

Pekalongan

World's City of Batik

RENCANA KERJA DISDUKCAPIL KOTA PEKALONGAN

Tahun 2025

Jl. Majapahit No.18
(0285) 422814
0856 4055 7650
https://disdukcapil.pekalongankota.go.id
dindukcapil.pekalongankota@gmail.com

disdukcapilkotapkl
@disdukcapilkotapkl
Disdukcapil Kota Pekalongan
dukcapilpintar.pekalongankota.go.id

EXECUTIVE SUMMARY

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kami telah menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2025. Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dalam mengimplementasikan perencanaan tahunan unit kerja sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah dalam rangka penyusunan RAPBD.

Capaian Indikator Kinerja Utama Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan berdasarkan target IKU tahun 2023 hingga 2024 semester II adalah sebagai berikut :

Indikator		**Realisasi**		**Keterangan**
		Tahun 2023	**Tahun 2024 s/d semester I**	
1.	Nilai AKIP OPD	82,60	n/a	-
2.	Tingkat Capaian Layanan Administrasi Kependudukan	83,56	87,90	Target Tahun 2024 sebesar 89,50%

Adapun pelaksanaan program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tahun 2023 sebagai berikut :

No	Program	Capaian
1	**Penunjang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	
	- Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%
	- Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,46%
	- Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	77,78%
2	**Pendaftaran Penduduk**	
	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	103,78%
3	**Pencatatan Sipil**	
	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	85,98%
4	**Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	9 OPD (100%)

Masalah utama yang harus segera diselesaikan pada pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tahun 2025 adalah :

1. Penentuan Definisi Operasional (DO) terkait indikator program “jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome), mengingat banyaknya OPD yang tidak dapat melanjutkan kerjasama disebabkan oleh persyaratan yang memberatkan OPD pemanfaat data;
2. Penerapan ISO 27001-2013 bagi unit pengguna terkait manajemen keamanan data informasi sesuai Permendagri Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
3. Target Perekaman Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk Kota Pekalongan;
4. Target capaian kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak usia 0-17 tahun kurang satu hari Kota Pekalongan.
5. Peningkatan Capaian kepemilikan akta perkawinan dan akta perceraian yang merupakan bagian dari target IKU Disdukcapil Kota Pekalongan melalui kegiatan perjanjian kerjasama dan pemutakhiran data pada setiap periode tertentu.

Demikian Renja ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Pekalongan, 08 Agustus 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil Kota Pekalongan

SLAMET HARIYADI, SH.,M.Hum.

NIP 19650204 198603 1 016

DAFTAR ISI

Executive Summary …..……. i

Daftar Isi ……. iv

Daftar Tabel ……. v

BAB I Pendahuluan …… 1

1.1 Latar Belakang …..…… 1

1.2 Landasan Hukum ...……. 2

1.3 Maksud dan Tujuan ..……... 5

1.4 Sistematika Penulisan …….. 6

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu ……... 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ……..…… 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah …… 13

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah …… 16

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD …...…….. 19

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..……... 26

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ……... 27

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional …...……... 27

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ……..…… 30

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ……. 31

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah …….. 35

BAB V Penutup ……... 47

5.1 Catatan Penting …… 47

5.2 Kaidah Pelaksanaan …… 48

5.3 Rencana Tindak Lanjut …… 49

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan ……	14
Tabel T-C.31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Pekalongan ……	21
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 …….	26
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Pekalongan ……	32
Tabel 3.1	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Nasional ……	29
Tabel 3.2	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah ……	30
Tabel 4.1	Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2025 dan Rencana Tahun 2026 .....……	36

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan Perangkat Daerah wajib menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD, dimana Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD dalam rangka penyusunan RAPBD.

Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 273, bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagaimana dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Renja Kementerian/Lembaga, Renja Provinsi Jawa Tengah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi Masyarakat.

Sehubungan dengan adanya hal tersebut diatas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun serangkaian dokumen kerja yaitu Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan unit kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan membuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya (tahun 2025) yang dicukupi dengan formulir kerangka anggaran serta indikasi pembiayaan 1 tahun kedepan.

Secara ringkas alur pikir dan tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar berikut :

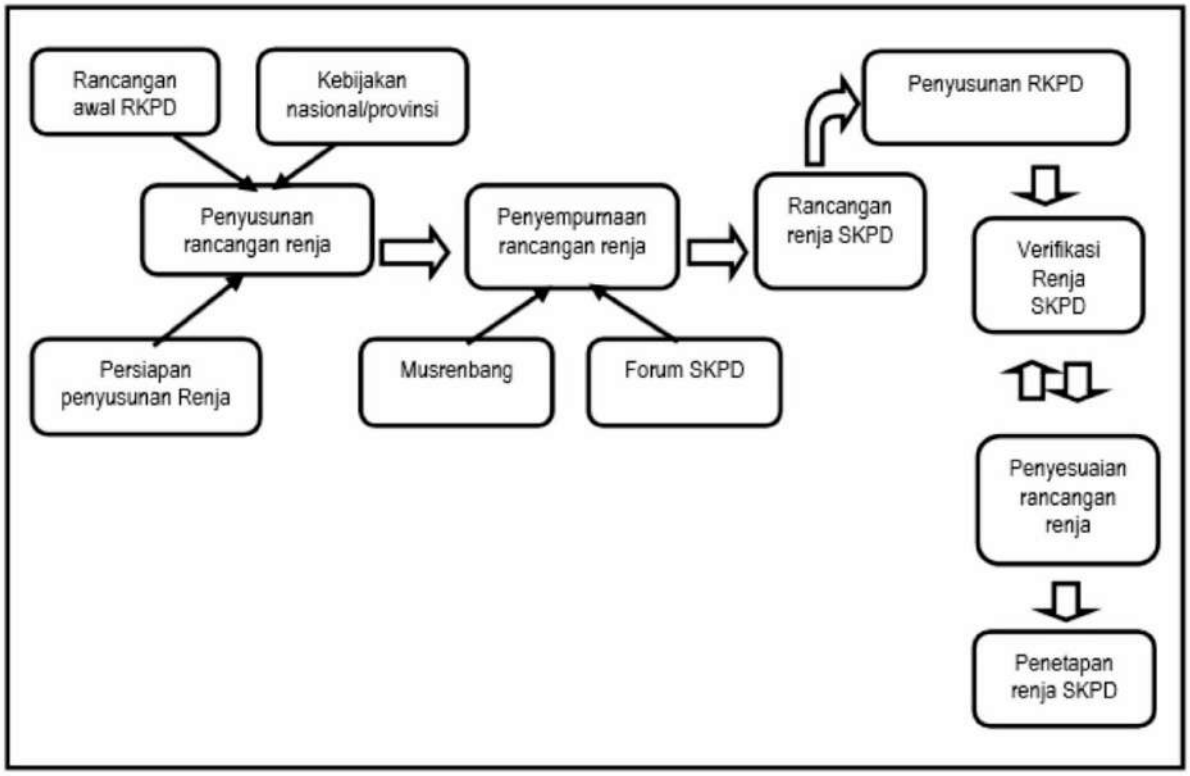

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2025 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan dengan Kabupaten Dati II Pekalongan, dan Kabupaten Dati II Batang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Pengamanan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
23. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
25. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
32. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
33. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan;
34. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Disdukcapil Kota Pekalongan Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menjadi acuan resmi sekaligus merupakan acuan pedoman bagi perencanaan kegiatan dan anggaran tahunan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Disdukcapil Kota Pekalongan Tahun 2025 yaitu :

a. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan khususnya pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
b. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tatalaksana pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna;
c. Mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) agar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
d. Sebagai sarana pengawasan yang efektif dan efisien melalui monitoring juga dapat sebagai kerangka landasan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dalam upaya peningkatan efektivitas sistem pelayanan publik pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
e. Untuk menyediakan satuan acuan resmi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai APBD Kota Pekalongan;
f. Untuk menyediakan satu tolok ukur APBD Kota Pekalongan dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Disdukcapil Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang penyusunan rencana renja, landasan hukum atau Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja, penjelasan mengenai maksud dan tujuan, serta sistematika bahasan tiap bab dalam Renja Perangkat Daerah.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada bagian ini berisikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini berisikan tentang Penelaahan Visi, Misi, Program Walikota dan Wakil Walikota serta Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Pada Pada bagian ini memuat rencana kerja kegiatan, capaian kinerja yang direncanakan dalam renstra perangkat daerah, pagu program dan kegiatan.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini berisikan uraian penutup, berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
c. Rencana tindak lanjut.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Sesuai dengan tugas pokoknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Kota Pekalongan di bidang kependudukan dan catatan sipil sejalan dengan pembangunan bidang kependudukan di daerah yang mendukung pelaksanaan program yang disusun oleh Pemerintah Pusat.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja untuk tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan telah melaksanakan berbagai sasaran-sasaran strategis yang dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program, didalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program.

Pada bab ini akan disajikan uraian hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 beserta perkiraan capaian atau hasil yang akan diperoleh tahun 2024, diuraikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut. Termasuk juga akan diuraikan analisis kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi serta review terhadap rancangan awal RKPD.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah penjabaran tahunan dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik.

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 yang

mengacu pada APBD tahun 2024 dan dikaitkan dengan pencapaian target renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Dalam tahun anggaran 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan mempunyai 4 Program 9 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan, dimana program tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan, namun ada beberapa kegiatan yang realisasinya belum memenuhi target yang direncanakan.

Adapun review hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan realisasi renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

No.	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (Perub. RPJMD 2016-2021	Realisasi 2021	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target Perubahan Renja 2023	Realisasi 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9/4)	
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
1	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	persen	88,75	-	-	83,53	86,69	86,69	97,68	Belum Tercapai
	- Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	dokumen	425.259	-	-	394.529	385.748	385.748	90,71	Belum Tercapai
2	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	persen	94	-	-	93,55	80,43	80,43	85,56	Belum Tercapai
	- Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil	dokumen	41.886	-	-	6981	9.240	9.240	22,06	Belum Tercapai
3	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	OPD	14	-	-	9	9	9	64,29	Belum Tercapai
	- Penyajian data kependudukan (IKK Output)	kali	2	-	-	2	2	2	100,00	Tercapai
Non Urusan										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	-	-	100	100	100	100,00	Tercapai
	- Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen	100	-	-	100	100	100	100,00	Tercapai
	- Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	persen	100	-	-	100	100	100	100,00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	-	-	100	100,46	100,46	100,46	Melebihi Target
	- Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	100	-	-	100	100	100	100,00	Tercapai
	- Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100	-	-	100	100	100	100,00	Tercapai
	- Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	-	-	100	100	100	100,00	Tercapai

No.	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (Perub. RPJMD 2016-2021	Realisasi 2021	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target Perubahan Renja 2023	Realisasi 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9/4)	
3	Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah	persen	100	-	-	100	77,78	77,78	77,78	Belum Tercapai
	- Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	-	-	100	77,78	77,78	77,78	Belum Tercapai

Dari tabel rekapitulasi di atas terdapat beberapa program/kegiatan yang belum tercapai, adapun faktor-faktor yang menyebabkan ketidaktercapaian program/kegiatan antara lain:

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah, ketidaktercapaian disebabkan oleh adanya pencatatan ganda pada realisasi capaian, kegiatan tersebut berupa rehab gedung kantor pada gedung utama selama 2 kali.
2. Pada Program lain yang belum tercapai selama tahun berjalan sedang dilakukan beberapa upaya antara lain, jemput bola, kerjasama dengan TP PKK dan melakukan koordinasi dengan OPD maupun dengan Dirjen Dukcapil.

Adapun kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab ketidaktercapaian, antara lain :

1. Adanya MoU antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelompok Kerja Kepala Sekolah Sekolah Dasar (K3SSD) untuk pelayanan akta kelahiran terlambat (TP), KK dan KIA Bagi Penduduk Kota Pekalongan;
2. Adanya MoU/Kerjasama dengan rumah sakit dan BLUD Puskesmas rawat inap untuk pelaporan akta kelahiran baru (jenis pelayanan jemput bola);
3. Adanya inovasi paket layanan adminduk terintegrasi "SIJALU" yang artinya mengurus satu dokumen kependudukan (akta kelahiran) otomatis mendapat dokumen kependudukan lain (KK dan KIA);
4. Adanya inovasi pengiriman dokumen adminduk Kerjasama dengan PT Pos Indonesia, Tbk;
5. Pelayanan pada hari libur (hari Sabtu);
6. Layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD);
7. Pelayanan secara online pada laman https://dukcapilpintar.pekalongankota.go.id dan media sosial.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja yang terukur sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, maka perlu ditetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tahun 2021-2026.

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan ini merupakan ukuran keberhasilan, kualitatif dan kuantitatif guna pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan organisasi pemerintah daerah serta memperjelas arah kemajuan pembangunan berkesinambungan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan

NO	INDIKATOR KINERJA	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023)	Tahun 2024*)	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Perekaman KTP Elektronik	Outcome	95,20%	95,40%	95,60%	95,60%	95,60%	99,19%	99,46%	95,60%	95,60%	
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yamg memiliki KIA	Outcome	55%	60%	65%	70%	75%	60,90%	67,36%	70%	75%	
3	Kepemilikan akta kelahiran	Outcome	93,10%	93,20%	93,30%	93,40%	93,50%	99,07	99,01%	93,40%	93,50%	
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatakan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Outcome	7	9	10	12	14	9	7	12	14	

NO	INDIKATOR KINERJA	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023)	Tahun 2024*)	Tahun 2025	Tahun 2026	
5	Penerbitan akta perkawinan	Output	50	50	50	50	50	55	21	50	50	
6	Penerbitan akta perceraian	Output	10	10	10	10	10	13	4	10	10	
7	Penerbitan akta kematian	Output	3225	3225	3225	3225	3225	4.053	1.547	3225	3225	
8	Penyajian data kependudukan	Output	2	2	2	2	2	2	1	2	2	

Keterangan : *)Realisasi capaian tahun 2024 menggunakan data RKPD Triwulan II 2024.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan di dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat menghadapi berbagai permasalahan, hambatan, kekuatan dan peluang.

Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Disdukcapil Kota Pekalongan dapat dilihat dari banyaknya inovasi dalam pelaksanaan pelayanan bidang Administrasi Kependudukan dengan Program-Program Unggulan : Program Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang mendukung GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk) melalui inovasi atau upaya, sebagai berikut :

1. Adanya MoU antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelompok Kerja Kepala Sekolah Sekolah Dasar (K3SSD) untuk pelayanan akta kelahiran terlambat (TP), KK dan KIA Bagi Penduduk Kota Pekalongan;
2. Adanya MoU/Kerjasama dengan rumah sakit dan BLUD Puskesmas rawat inap untuk pelaporan akta kelahiran baru (jenis pelayanan jemput bola);
3. Adanya inovasi paket layanan adminduk terintegrasi “SIJALU” yang artinya mengurus satu dokumen kependudukan (akta kelahiran) otomatis mendapat dokumen kependudukan lain (KK dan KIA);
4. Adanya inovasi pengiriman dokumen adminduk Kerjasama dengan PT Pos Indonesia, Tbk;
5. Pelayanan pada hari libur (hari Sabtu);
6. Layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD);
7. Pelayanan secara online pada laman https://dukcapilpintar.pekalongankota.go.id dan media sosial.

Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Secara teknis ada beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi antara lain :

1. Adanya persepsi masyarakat bahwa pembuatan/pengurusan administrasi kependudukan rumit;
2. Adanya potensi tindak kejahatan penyalahgunaan dan manipulasi dokumen serta hak akses Data Base Kependudukan dan Pencatatan sipil;

3. Capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih rendah.

Sedangkan beberapa hambatan yang dihadapi, antara lain :

1. Pengadaan blangko KTP-el seluruh Indonesia yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, sehingga memperlambat proses pencetakan KTP-el di daerah jika ketersediaan blangko KTP-el habis;
2. SOTK yang ada belum sesuai dengan ketentuan PP nomor 18 Tahun 2016, karena belum adanya UPT Dinas;
3. Tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap keamanan data pada dokumen digital dalam hal ini aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih rendah.

Kekuatan yang dimiliki untuk meraih peluang :

1. Pengelolaan Administrasi Kependudukan yang sudah berbasis Teknologi Informatika (TI) dengan pengoperasian SIAK sampai ditingkat Kecamatan, mempercepat permintaan/kebutuhan layanan Surat Keterangan dan Dokumen Kependudukan sehingga dapat membantu penyediaan data base kependudukan yang valid sebagai dasar penentuan kebijakan;
2. Penghapusan Retribusi/Biaya untuk Pelayanan Surat dan Dokumen Kependudukan, sehingga semua pengurusan Pelayanan Surat dan Dokumen Kependudukan gratis;
3. Ketersediaan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pendaftaran penduduk akan mempermudah pemberian pelayanan pendaftaran kependudukan yang cepat, murah, dan mudah serta akurat. Hal ini menjadikan modal adanya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan;
4. Tersedianya data base kependudukan dalam pengelolaan pelayanan pendaftaran penduduk akan lebih mudah diakses dengan adanya kemajuan dibidang tekhnologi informasi dan akan mendeteksi terkait adanya mobilisasi penduduk (perpindahan, kelahiran, dan kematian penduduk);
5. Adanya Komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf untuk pelaksanaan pembenahan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
6. Keberadaan Operator di tingkat Kecamatan yang memberi kontribusi dalam pelayanan kepada masyarakat melalui pembuatan KTP/KK;
7. Keinginan kuat dari berbagai pihak untuk mendukung Sistem administrasi kependudukan;

8. Meningkatkan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi antar sektor, dinas terkait dalam pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
9. Sertifikasi ISO 9001: 2015 sebagai bukti tersertifikasinya standar operasional pelaksanaan tugas dan fungsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik yang berhubungan langsung dengan masyarakat maupun tidak.

Kelemahan dan tantangan untuk dihadapi :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya Surat dan Dokumen Kependudukan dapat berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas permintaan dan kebutuhan akan layanan surat keterangan dan dokumen kependudukan. Hal ini berpengaruh terhadap Penyediaan Data Base Kependudukan yang valid sebagai dasar penentuan kebijakan pembangunan.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan perubahan/pembaharuan data pada dokumen kependudukan yang dimiliki. Hal ini berpengaruh pada ketersediaan data perkembangan kependudukan yang valid sebagai dasar penentuan kebijakan pembangunan.
3. Sarana dan Prasarana pendukung yang kurang memadai dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk mempengaruhi proses pelayanan penerbita dokumen kependudukan yang berbasis Teknologi Informasi (IT).
4. Keterbatasan anggaran, karena tidak adanya anggaran DAK dari pusat dan terbatasnya anggaran APBD sehingga menyebabkan permintaan sarana dan prasarana pendukung belum sepenuhnya terpenuhi.

Langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil, pelaporan perubahan/pembaharuan data pada dokumen kependudukan dan catatan sipil dengan lebih sering mengadakan sosialisasi (baik secara langsung maupun melalui media sosial), pemasangan baliho, spanduk dan penyebaran *leaflet;*
3. Bekerja sama dengan stakeholder, masyarakat, lembaga keagamaan, dan berbagai sektor agar program Pencatatan Sipil dan Kependudukan dapat terlaksana dengan lancar dan baik;

4. Pemanfaatan semaksimal mungkin keterbatasan dana dan SDM untuk mendapatkan hasil yang terbaik dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Isu-isu penting yang harus ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2025, antara lain:

1. Berkoordinasi dengan Bappeda untuk menentukan Definisi Operasional (DO) terkait indikator program "jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome), mengingat banyaknya OPD yang tidak dapat melanjutkan kerjasama disebabkan oleh persyaratan yang memberatkan OPD pemanfaat data;
2. Penerapan ISO 27001-2013 bagi unit pengguna terkait manajemen keamanan data informasi sesuai Permendagri Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
3. Kegiatan perekaman Identitas Kependudukan Digital (IKD) lebih dioptimalkan dari Tahun 2024 sehingga target capaian dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 25% dari 277 Juta penduduk Indonesia bisa tercapai;
4. Capaian kepemilikan akta perkawinan dan akta perceraian agar ditingkatkan dengan berbagai upaya antara lain bekerjasama dengan tempat ibadah dilangsungkan perkawinan dan bekerjasama dengan Pengadilan Agama serta mengirimkan surat pemberitahuan kepada penduduk yang belum mencantumkan nomor akta perkawinan dan akta perceraian pada dokumen kependudukannya.
5. Target capaian kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak usia 0-17 tahun kurang satu hari Kota Pekalongan.
6. Data Base Kependudukan sebagai dasar berbagai penyelenggaraan pemerintahan masih perlu ditingkatkan keakuratan dan validitasnya. Oleh karena itu diperlukan adanya pemutakhiran data ke lapangan pada setiap periode tertentu.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Menyusun Rencana Strategis Disdukcapil Kota Pekalongan berpedoman pada misi ketujuh yaitu "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*" untuk menuju visi :

"Mewujudkan Kota Pekalongan Yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius".

Untuk mencapai visi Kota Pekalongan tersebut diatas maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dalam pelaksanaan tugasnya harus sejalan dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Disdukcapil Kota Pekalongan telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2021-2026 dengan mempertimbangkan perubahan kebijakan yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, sosial dan budaya suatu daerah.

Rencana Strategis mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran. Untuk merealisasikan program kerja dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan ke dalam Renstra OPD, maka pada setiap awal tahun masing-masing OPD menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada rancangan awal Renstra dengan memperhatikan kebutuhan OPD dalam rangka percepatan, pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

Disdukcapil Kota Pekalongan melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang didukung oleh dana baik yang berasal dari APBD maupun APBN berupa Dana Alokasi Khusus (DAK). Kebutuhan dana tersebut harus selalu dianalisis terlebih dahulu sebelum ditetapkan menjadi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Analisis kebutuhan dana ini dilaksanakan untuk menyesuaikan dengan Rancangan RKPD. Dalam Tabel T-C.31 dibawah, dapat dilihat ada beberapa kegiatan yang harus disesuaikan kebutuhan dananya dengan pagu indikatif Rancangan RKPD.

Tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kota Pekalongan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.12.01.2	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota**	**KOTA PEKALONGAN**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100%**	**5.679.239.000**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota**	**KOTA PEKALONGAN**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100%**	**4.714.051.000**	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	18.050.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	18.050.000	
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.523.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.523.000	
2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.189.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.189.000	
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan Evaluasi Kinera Perangkat Daerah	15 Laporan	14.338.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan Evaluasi Kinera Perangkat Daerah	15 Laporan	14.338.000	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100%	3.626.003.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100%	3.604.660.000	
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	3.590.169.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	3.568.826.000	Pengurangan anggaran dikarenakan rasionalisasi
2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	34.200.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	34.200.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.634.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.634.000	
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	15.121.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	8.880.000	
2.12.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.000.000	
2.12.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	51 Orang	10.121.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	51 Orang	3.880.000	Pengurangan anggaran dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100%	1.476.486.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100%	666.291.000	
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listri/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.603.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listri/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.575.000	Pengurangan anggaran dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.273.433.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	534.210.000	Pengurangan anggaran dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran
2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	3.290.000	Pengurangan anggaran dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	39.370.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	26.200.000	Pengurangan anggaran dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	40.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	29.200.000	Pengurangan anggaran dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.580.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.240.000	Pengurangan anggaran dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	110.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	68.576.000	Pengurangan anggaran dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	301.024.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	264.903.000	
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.190.000	Pengurangan anggaran dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	141.480.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	136.505.000	Pengurangan anggaran dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	156.544.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	126.208.000	Pengurangan anggaran dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	242.555.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	151.267.000	
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemelihaaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	96.288.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemelihaaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	94.257.000	Pengurangan anggaran dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	75.272.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	19.350.000	Pengurangan anggaran dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	44 Unit	70.995.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	44 Unit	37.660.000	Pengurangan anggaran dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran
02.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih**	**Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk**	**87,07 Persen**	**369.903.000**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih**	**Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk**	**87,07 Persen**	**313.670.000**	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	415.016 dokumen	369.903.000	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	415.016 dokumen	313.670.000	
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	46000 Dokumen	284.584.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	46000 Dokumen	284.583.000	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan Hasi Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	59.364.000	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan Hasi Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	16.473.000	Pengurangan anggaran dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran
2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2 Laporan	25.955.000	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2 Laporan	12.614.000	Pengurangan anggaran dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran
02.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih**	**Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil**	**93,85 persen**	**365.358.000**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih**	**Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil**	**93,85 persen**	**341.730.000**	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil	6981 dokumen	365.358.000	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil	6981 dokumen	341.730.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	9285 Dokumen	339.723.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	9285 Dokumen	320.415.000	Pengurangan anggaran dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 Layanan	25.635.000	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 Layanan	21.315.000	Pengurangan anggaran dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran
02.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih**	**Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)**	**12 OPD**	**173.437.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih**	**Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)**	**12 OPD**	**71.790.000**	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Penyajian data kependudukan (IKK Output)	2 kali	**173.437.000**	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Penyajian data kependudukan (IKK Output)	2 kali	**71.790.000**	
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	34.272.000	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	22.220.000	Pengurangan anggaran dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informas Administrasi Kependudukan	2 Laporan	83.795.000	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informas Administrasi Kependudukan	2 Laporan	18.540.000	Pengurangan anggaran dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran
2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	1 Dokumen	55.370.000	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	1 Dokumen	31.030.000	Pengurangan anggaran dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran
TOTAL PAGU					**6.587.937.000**					**5.441.241.000**	

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan akan menampung bila ada usulan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok Masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari SKPD lain yang langsung ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Namun sampai dengan saat ini belum ada usulan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok Masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari SKPD lain yang langsung ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2025 Kota Pekalongan

Nama Perangkat Daerah : Disdukcapil

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

NIHIL

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Lampiran III matrik pembangunan jangka menengah Kementerian Dalam Negeri yang menjadi landasan penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan yaitu **program penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.** Program ini merupakan program teknis dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas data base kependudukan, melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang di dukung dengan Sistem Informasi Administrasi Kependududkan (SIAK) terpadu secara nasional.

Dalam RPJMN telah ditetapkan beberapa Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024. Dalam Agenda Pembangunan Nasional terdapat Visi dan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan antara lain :

1) Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2) Pengembangan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3) SDM berkualitas dan berdaya saing;
4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5) Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6) Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7) Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Diantara 7 (tujuh) agenda pembangunan di atas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan sebagai instansi pelaksana urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar terkait dengan tugas pokok dan fungsi berkontribusi pada agenda pembangunan ke tujuh yang berbunyi : Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dimana korelasi terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil yaitu mengendalikan pertumbuhan penduduk serta memperkuat tata kelola

kependudukan, dimana tata kelola kependudukan merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan dalam suatu daerah.

Untuk pelaksanaan program strategis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil diselenggarakan 7 (tujuh) kegiatan strategis yaitu :

1. Perubahan SIAK terdistribusi menjadi SIAK terpusat;
2. Pengembangan layanan adminduk digital dalam genggaman (IKD);
3. Penyiapan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan DAK 2 untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilu legislatif 2024;
4. Penyiapan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk pilkada serentak tahun 2024;
5. Pendataan adminduk penyandang disabilitas;
6. Pendataan kemiskinan ekstrim;
7. Penerapan buku pokok pemakaman.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan sebagai instansi pelaksana urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar telah melaksanakan 5 (lima) dari 7 (tujuh) kegiatan strategis Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Perubahan SIAK terdistribusi menjadi SIAK terpusat, Pengembangan layanan adminduk digital dalam genggaman, Penyiapan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan DAK 2 untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilu legislatif 2024, Penyiapan DP4 untuk pilkada serentak tahun 2024 dan pendataan adminduk penyandang disabilitas, hal tersebut selaras dengan visi Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri dan religius”.** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan misi ketujuh yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*”.

Selain berpedoman pada RPJMD 2021-2026, RKPD tahun 2025, Renja Disdukcapil Tahun 2025 juga berpedoman pada RKP Tahun 2025, dengan

penyelarasan prioritas pembangunan nasional dengan pembangunan Kota Pekalongan. Adapun Tema RKP Tahun 2025: “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Penyelarasan prioritas pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2025 dengan prioritas nasional disajikan dalam tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Nasional

PRIORITAS NASIONAL		**PRIORITAS KOTA PEKALONGAN**	
NO	**PRIORITAS**	**NO**	**PRIORITAS**
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan.	12	Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment.

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2024

Sesuai RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, maka tema pembangunan Kota Pekalongan tahun 2025 ditujukan untuk “Optimalisasi Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemandirian Dengan Dipayungi Nilai-nilai Religiusitas”. Adapun Prioritas pembangunan Kota Pekalongan tahun 2025 difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis Kota Pekalongan tahun 2025. Peenyelarasan prioritas pembangunan Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3.2
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	**PRIORITAS**	**NO**	**PRIORITAS**
4	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.	12	Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment.

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2024

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

A. Tujuan Renja

Tujuan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan tahun 2024. Sejalan dengan itu maka tujuan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 adalah : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik. Hal ini tercantum dalam Misi ketujuh Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan periode Tahun 2021-2026 yang berbunyi Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

B. Sasaran Renja

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan tahun 2021-2026, disebutkan perihal prioritas pembangunan Pemerintah Kota Pekalongan.

Prioritas pembangunan tersebut yang berkaitan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan adalah prioritas pembangunan Pemerintah Kota Pekalongan yang kedua yaitu : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik Berbasis pada,

Profesionalisme, Kepercayaan, Komitmen, Partisipatif dan Teknologi Informasi. Prioritas pembangunan ini menetapkan beberapa sasaran yang diantaranya merupakan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan.

Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
- Meningkatnya Layanan Administrasi Kependudukan.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Sasaran Strategis sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka disusunlah program-program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan akan merencanakan 4 Program 9 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain :

1. Pencapaian prioritas dan sasaran daerah;
2. Sinkronikasi dengan kebijakan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Adapun rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja (Renja) Disdukcapil Kota Pekalongan Tahun 2025 yang telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2025, tercantum dalam tabel 3.3 berikut :

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Pekalongan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.12.01.2	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**KOTA PEKALONGAN**	**100 Persen**	**4.714.051.000**			**100 Persen**	**5.152.947.000**
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	100 Persen	18.050.000	APBD Kota Pekalongan		100 Persen	39.219.000
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	3 Dokumen	2.523.000			3 Dokumen	10.750.000
2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	2 Dokumen	1.189.000			2 Dokumen	1.650.000
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinera Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	15 Laporan	14.338.000			15 Laporan	26.819.000
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	100 Persen	3.604.660.000	APBD Kota Pekalongan		100 Persen	3.439.120.000
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	28 Orang/bulan	3.568.826.000			28 Orang/bulan	3.374.470.000
2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	12 Dokumen	34.200.000			12 Dokumen	63.000.000
2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	1 Laporan	1.634.000			1 Laporan	1.650.000
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	100 Persen	8.880.000	APBD Kota Pekalongan		100 Persen	21.500.000
2.12.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	1 Paket	5.000.000			1 Paket	9.500.000
2.12.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	51 Orang	3.880.000			51 Orang	12.000.000
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	100 Persen	666.291.000	APBD Kota Pekalongan		100 Persen	1.254.736.000
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listri/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	4 Paket	2.575.000			4 Paket	1.500.000
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	4 Paket	534.210.000			4 Paket	1.069.736.000
2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	4 Paket	3.290.000			4 Paket	4.500.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	4 Paket	26.200.000			4 Paket	35.000.000
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	13 Paket	29.200.000			13 Paket	40.000.000
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	2 Dokumen	2.240.000			2 Dokumen	4.000.000
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	40 Laporan	68.576.000			40 Laporan	100.000.000
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	100 Persen	264.903.000	APBD Kota Pekalongan		100 Persen	297.801.000
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	4 Laporan	2.190.000			4 Laporan	3.000.000
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	12 Laporan	136.505.000			12 Laporan	110.100.000
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	12 Laporan	126.208.000			12 Laporan	184.701.000
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	100 Persen	151.267.000	APBD Kota Pekalongan		100 Persen	100.571.000
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemelihaaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	14 Unit	94.257.000			14 Unit	56.000.000
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	3 Unit	19.350.000			3 Unit	23.000.000
2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	44 Unit	37.660.000			44 Unit	21.571.000
02.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk**	**Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih**	**87,07 Persen**	**313.670.000**			**88,75 persen**	**351.135.000**
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	415.016 dokumen	313.670.000	APBD Kota Pekalongan		425.259 dokumen	351.135.000
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	46000 Dokumen	284.583.000			46000 Dokumen	283.635.000
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasi Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	1 Laporan	16.473.000			1 Laporan	31.500.000
2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	2 Laporan	12.614.000			2 Laporan	36.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
02.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil**	**Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih**	**93,85 persen**	**341.730.000**			**94,00 persen**	**291.975.000**
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	6981 dokumen	341.730.000	APBD Kota Pekalongan		6981 dokumen	291.975.000
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	9285 Dokumen	320.415.000			9285 Dokumen	279.975.000
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	1 Layanan	21.315.000			1 Layanan	12.000.000
02.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)**	**Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih**	**12 OPD**	**71.790.000**			**14 OPD**	**178.559.000**
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyajian data kependudukan (IKK Output)	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	2 kali	**71.790.000**	APBD Kota Pekalongan		**2 kali**	**178.559.000**
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	2 Laporan	22.220.000			2 Laporan	76.000.000
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informas Administrasi Kependudukan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	2 Laporan	18.540.000			2 Laporan	80.559.000
2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	1 Dokumen	31.030.000			1 Dokumen	22.000.000
TOTAL PAGU					**5.441.241.000**				**5.974.616.000**

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu kepada RKPD Tahun 2025 dan disusun guna menjadi acuan dalam pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan periodesasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan adanya pendanaan program dan kegiatan diharapkan target capaian kinerja masing-masing bidang tercapai sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Rencana kerja dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Rencana Program Dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2025 dan Rencana Tahun 2026

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	**Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar**								
2.12	**Urusan Pemerintahan Bidang Adminduk dan Capil**								
X.XX.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**KOTA PEKALONGAN**	**100%**	**4.714.051.000**	**APBD**		**100%**	**5.240.628.000**
X.XX.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**KOTA PEKALONGAN**	**100%**	**18.050.000**	**APBD**		**100%**	**39.219.000**

X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KOTA PEKALONGAN	3 dokumen	2.523.000	APBD		3 dokumen	10.750.000
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KOTA PEKALONGAN	2 dokumen	1.189.000	APBD		2 dokumen	1.650.000
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinera Perangkat Daerah	KOTA PEKALONGAN	15 Laporan	14.338.000	APBD		15 laporan	26.819.000

X.XX.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**KOTA PEKALONGAN**	**100%**	**8.880.000**	**APBD**		**100%**	**109.181.000**
X.XX.01.2.05.02	Pengadaaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	KOTA PEKALONGAN	1 paket	5.000.000	APBD		1 paket	9.500.000
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	KOTA PEKALONGAN	51 Orang	3.880.000	APBD		51 Orang	12.000.000

X.XX.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**KOTA PEKALONGAN**	**100%**	**931.194.000**	**APBD**		**100%**	**1.254.736.000**
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listri/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	KOTA PEKALONGAN	4 paket	2.575.000	APBD		4 paket	1.500.000
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KOTA PEKALONGAN	4 paket	534.210.000	APBD		4 paket	1.069.736.000
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	KOTA PEKALONGAN	4 paket	3.290.000	APBD		4 paket	4.500.000

X.XX.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	KOTA PEKALONGAN	4 paket	26.200.000	APBD		4 paket	35.000.000
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	KOTA PEKALONGAN	13 paket	29.200.000	APBD		13 paket	40.000.000
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	KOTA PEKALONGAN	2 dokumen	2.240.000	APBD		2 dokumen	4.000.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	KOTA PEKALONGAN	40 laporan	68.576.000	APBD		40 laporan	100.000.000
X.XX.01.2.01.07	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**KOTA PEKALONGAN**	**100%**	**3.604.660.000**	**APBD**		**100%**	**3.439.120.000**

X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KOTA PEKALONGAN	28 orang/bulan	3.568.826.000	APBD		28 orang/bulan	3.374.470.000
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KOTA PEKALONGAN	12 dokumen	34.200.000	APBD		12 dokumen	63.000.000
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KOTA PEKALONGAN	1 laporan	1.634.000	APBD		1 laporan	1.650.000
X.XX.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**KOTA PEKALONGAN**	**100%**	**264.903.000**	**APBD**		**100%**	**297.801.000**
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KOTA PEKALONGAN	4 laporan	2.190.000	APBD		4 laporan	3.000.000

X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KOTA PEKALONGAN	12 laporan	136.505.000	APBD		12 laporan	110.100.000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	KOTA PEKALONGAN	12 laporan	126.208.000	APBD		12 laporan	184.701.000
X.XX.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**KOTA PEKALONGAN**	**100 %**	**151.267.000**	**APBD**		**100%**	**100.571.000**
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	KOTA PEKALONGAN	14 unit	94.257.000	APBD		14 unit	56.000.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	KOTA PEKALONGAN	3 unit	19.350.000	APBD		3 unit	23.000.000

X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	KOTA PEKALONGAN	44 unit	37.660.000	APBD		44 unit	21.571.000
02.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk**	**KOTA PEKALONGAN**	**87,07%**	**313.670.000**	APBD		**88,75%**	**351.135.000**
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk**	KOTA PEKALONGAN	**415.016 dokumen**	313.670.000	APBD		**425.259 dokumen**	351.135.000
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	KOTA PEKALONGAN	46.000 dokumen	284.584.000	APBD		46.000 dokumen	283.635.000

2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasi Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	KOTA PEKALONGAN	1 laporan	16.473.000	APBD		1 laporan	31.500.000
2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	KOTA PEKALONGAN	2 laporan	12.614.000	APBD		2 laporan	36.000.000
02.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil**	**KOTA PEKALONGAN**	**93,85%**	**341.730.000**	**APBD**		**94,00%**	**291.975.000**
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil	KOTA PEKALONGAN	6.981 dokumen	341.730.000	APBD		6.981 dok	291.975.000

2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	KOTA PEKALONGAN	9.285 dokumen	320.415.000	APBD		9.285 dokumen	279.975.000
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	KOTA PEKALONGAN	1 layanan	21.315.000	APBD		1 layanan	12.000.000
02.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)**	KOTA PEKALONGAN	**12 OPD**	**71.790.000**	APBD		**14 OPD**	**178.559.000**

2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyajian data kependudukan (IKK Output)	KOTA PEKALONGAN	2 kali	71.790.000	APBD		2 kali	178.559.000
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	KOTA PEKALONGAN	2 laporan	22.220.000	APBD		2 laporan	76.000.000
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informas Administrasi Kependudukan	KOTA PEKALONGAN	2 laporan	18.540.000	APBD		2 laporan	80.559.000
2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggung jawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawa	KOTA PEKALONGAN	1 Dokumen	31.030.000	APBD		1 Dokumen	22.000.000

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2025 di susun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan. Rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki.

Perencanaan kinerja sebagai dasar untuk melihat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan sehingga dapat dilakukan upaya-upaya konkret untuk perbaikan manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang secara berkelanjutan, dan selanjutnya menjadi semakin terbuka dalam mewujudkan terciptanya kondisi ketenangan kerja. Keberhasilan operasional perencanaan sangat tergantung pada komitmen penuh dari seluruh komponen, melalui proses saling komunikasi timbal balik dalam menciptakan kebersamaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan adalah sebagai bahan penyusunan RAPBD dan rencana kegiatan prioritas pembangunan bidang kependudukan dan pencatatan sipil untuk meningkatkan kualitas, akuntanbilitas, transparasi pemerintahan serta partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan Pembangunan Daerah.

5.1 Catatan Penting

Masalah utama yang harus segera diselesaikan pada pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tahun 2025 adalah:

1. Penentuan Definisi Operasional (DO) terkait indikator program “jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome), mengingat banyaknya OPD yang tidak dapat melanjutkan kerjasama disebabkan oleh persyaratan yang memberatkan OPD pemanfaat data;
2. Penerapan ISO 27001-2013 bagi unit pengguna terkait manajemen keamanan data informasi sesuai Permendagri Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi;

3. Target Perekaman Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk Kota Pekalongan;
4. Target capaian kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak usia 0-17 tahun kurang satu hari Kota Pekalongan.
5. Peningkatan Capaian kepemilikan akta perkawinan dan akta perceraian yang merupakan bagian dari target IKU Disdukcapil Kota Pekalongan melalui kegiatan perjanjian kerjasama dan pemutakhiran data pada setiap periode tertentu.
6. Target capaian pada Sub.Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya semula 2 paket menjadi 1 paket dikarenakan pagu indikatif berkurang.
7. Adanya rasionalisasi anggaran yang mengakibatkan beberapa pagu berkurang dan beberapa pagu kegiatan tidak terakomodir.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku yang berkepentingan dalam pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya.

Dalam rangka meningkatkan keefektifan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2025, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Substansi Renja Disdukcapil disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025;
2. Tindak lanjut alokasi anggaran Disdukcapil Kota Pekalongan atas proses penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Renja Disdukcapil, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian target yang telah ditetapkan;
3. Bidang-bidang pada Disdukcapil agar menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing dengan mengacu pada Renja yang telah ditetapkan;
4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebik baik di masa yang akan datang dengan memanfaatkan, mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan oleh masing masing bidang atau bagian. Dengan demikian kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Kami berharap, bahwa Renja Disdukcapil ini dapat mengakomodir seluruh target indikor kinerja untuk urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan. Adapun jika terdapat kendala dalam capaian indikator kinerja tersebut, baik diakibatkan masih belum memadainya anggaran dan permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan

SLAMET HARIYADI, SH.M.Hum.
NIP 19650204 198603 1 016

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025

RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025

Pekalongan
World's City of Batik

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan pertolongan dan kemudahan dari-Nya, Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 ini selain mempertimbangkan aspek-aspek pendekatan teknokratik juga sudah mengkolaborasikan pendekatan politis berupa Visi Misi Walikota-Wakil Walikota Pekalongan Periode 2021-2026 dan pendekatan *bottom-up* dalam Musrenbang RKPD.

Hal yang paling mendasar adalah bahwa penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah ini telah berpedoman pada RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 yang sudah mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan 2021-2026 dan dengan memperhatikan perkembangan penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan pada lingkup yang lebih luas, baik di tingkat Provinsi Jawa Tengah ataupun di tingkat Nasional.

Secara umum, Rencana Kerja Perangkat Daerah ini disusun dalam 5 bab. Bab I membahas tentang Pendahuluan, Bab II membahas tentang Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, Bab III membahas tentang Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dan terakhir Bab V penutup.

Harapan kami, Dokumen ini dapat menjadi dasar dalam perencanaan penganggaran program dan kegiatan untuk selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Tak lupa kami mohon masukan kritik dan saran yang membangun demi hasil yang lebih baik di masa depan.

Pekalongan, 8 Agustus 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Pekalongan

PUJI WINARTI, SKM, M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP 19700502 199501 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN YANG LALU 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 28

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 35

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 38

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 66

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 70

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 70

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 72

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 73

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 96

BAB V PENUTUP 101

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan RAPBD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat rencana kegiatan pembangunan tahun 2024 yang dilampiri dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan 1 tahun berikutnya.

VISI Walikota dan Wakil Walikota periode 2021-2026 adalah **"Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius"**

Untuk mencapai VISI tersebut diatas, dilakukan MISI sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan;
3. Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman;
4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan;
5. Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal;
6. Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah;
7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government

Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021 Tanggal 24 November 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan melaksanakan tugas membantu Walikota

dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan perempuan dan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan dan penetapan sasaran, program bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan perempuan dan anak;
b. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan perempuan dan anak;
c. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan anak;
d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang sekretariat;
f. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
g. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4548);

6. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah;
12. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJM-P) Kota Pekalongan 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
15. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan 2021-2026;
16. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak;
18. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja DPMPPA Kota Pekalongan Tahun 2024 adalah :

1. Mewujudkan keterpaduan arah kebijakan dan strategi serta keselarasan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

2. Mewujudkan perencanaan, pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) DPMPPA Kota Pekalongan Tahun 2025, adalah :

1. Untuk menyediakan satu acuan resmi dalam menentukan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan yang akan dibiayai APBD Kota Pekalongan Tahun 2024;
2. Untuk menyediakan satu tolok ukur APBD Kota Pekalongan dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;
3. Untuk memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai tahun 2025 dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota 2021-2026;
4. Untuk memudahkan seluruh jajaran DPMPPA Kota Pekalongan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan operasional tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 DPMPPA Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan , sistematika penulisan.

II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat.

III. TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan.

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

V. PENUTUP

Bab ini berisi penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan RENJA DPMPPA Kota Pekalongan tahun 2025 secara konsisten.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPMPPA Kota Pekalongan, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPPA Kota Pekalongan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 dan hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

No	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Relalisasi 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender**	**persen**	**11,09**	**5,55**	**5,98**	**5,55**	**5,98**	**5,98**	**53,89**	**Belum Tercapai**
2	**Persentase Sub Kegiatan yang responsif gender**	**persen**	**100,00**	**47,58**	**16,67**	**16,67**	**16,67**	**64,25**	**64,25**	**Belum Tercapai**
3	Jumlah dokumen PPRG yang disusun	Dokumen	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	50,00	Belum Tercapai
4	Jumlah kegiatan Desk GAP GBS yang dilaksanakan	Kali	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	Tercapai
5	Jumlah koordinasi pokja PUG yang dilaksanakan	Kali	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	Tercapai
6	Jumlah koordinasi tim teknis PPRG yang dilaksanakan	Kali	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	Tercapai
7	**Persentase Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan sosialisasi/ advokasi Pemberdayaan Perempuan**	**Persen**	**40,00**	**13,33**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**33,33**	**83,33**	**Belum Tercapai**
8	Jumlah kegiatan advokasi PUG yang dilaksanakan	Kali	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	40,00	Belum Tercapai

No	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Relalisasi 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Jumlah kegiatan FGD PUG yang dilaksanakan	Kali	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	Tercapai
10	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi kelompok ekonomi perempuan yang dilaksanakan	Kali	-	-	27,00	27,00	27,00	27,00	100,00	Tercapai
11	Jumlah kegiatan pelatihan Forkom Puspa yang dilaksanakan	Kali	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	Tercapai
12	Jumlah kegiatan pelatihan pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan	Kali	-	-	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	Tercapai
13	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilaksanakan	Kali	-	-	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	Tercapai
14	Jumlah Koordinasi Forkom Puspa yang dilaksanakan	Kali	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	Tercapai
15	Jumlah Koordinasi Kelompok Ekonomi Perempuan yang dilaksanakan	Kali	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	Tercapai
16	**Persentase perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan dharma wanita**	**persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**Tercapai**

No	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Relalisasi 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Jumlah monev Dharma Wanita Persatuan Kota Pekalongan yang dilaksanakan	Kali	100,00	20,00	20,00	20,00	20,00	40,00	40,00	Belum Tercapai
18	**Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)**	**Persen**	**23,99**	**33,08**	**15,01**	**23,99**	**15,01**	**15,01**	**62,57**	**Belum Tercapai**
19	**Persentase ketercapaian pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**Tercapai**
20	Jumlah kegiatan Kelas Pendidikan Keluarga yang dilaksanakan	Kali	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	Tercapai
21	Jumlah Kegiatan Kelas Persiapan Pranikah yang dilaksanakan	Kali	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	Tercapai
22	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak yang dilaksanakan	Kali	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	Tercapai

No	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Relalisasi 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jumlah koordinasi Puspaga dengan Tim HIMPSI yang dilaksanakan	Kali	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	Tercapai
24	**Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani (IKK Output)**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**Tercapai**
25	Jumlah kegiatan Case Conference Kasus Perempuan yang dilaksanakan	Kali	240,00	78,00	39,00	25,00	39,00	117,00	48,75	Belum Tercapai
26	Jumlah pemberian konsultasi pengasuhan anak dan permasalahan keluarga yang dilaksanakan	Kali	150,00	33,00	10,00	20,00	10,00	43,00	28,67	Belum Tercapai
27	Jumlah pendampingan kasus kekerasan yang dilaksanakan	Kali	190,00	68,00	48,00	35,00	48,00	116,00	61,05	Belum Tercapai
28	**Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)**	**Persen**	**55,56**	**29,63**	**33,33**	**33,33**	**33,33**	**62,96**	**113,32**	**Tercapai**
29	**Persentase SRA (Sekolah Ramah Anak)**	**Persen**	**10,96**	**20,35**	**22,31**	**10,37**	**22,31**	**42,66**	**389,25**	**Tercapai**
30	Jumlah advokasi kelurahan layak anak yang dilaksanakan	Kelurahan	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	100,00	Tercapai
31	Jumlah Koordinasi Program Kerja dengan Lembaga APSAI yang dilaksanakan	Kali	12,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	8,33	Belum Tercapai

No	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Relalisasi 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Kota Layak Anak yang dilaksanakan	Kali	-	-	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00	Tercapai
33	Jumlah sekolah yang terpilih mendapat penghargaan SRA	Sekolah	60,00	16,00	20,00	15,00	20,00	36,00	60,00	Belum Tercapai
34	**Persentase forum anak yang aktif**	**Persen**	**40,63**	**12,50**	**15,63**	**15,63**	**15,63**	**28,13**	**69,22**	**Belum Tercapai**
35	Jumlah kegiatan pelatihan KHA yang dilaksanakan	Kali	5,00	3,00	2,00	2,00	2,00	5,00	100,00	Tercapai
36	Jumlah kelompok Posyandu yang terpilih mendapat penghargaan lomba Posyandu	Kelompok	20,00	4,00	3,00	3,00	3,00	7,00	35,00	Belum Tercapai
37	Jumlah Festival Anak yang dilaksanakan	Kali	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	40,00	Belum Tercapai
38	Jumlah kegiatan advokasi perlindungan dan pemenuhan hak anak yang dilaksanakan	Kali	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	Tercapai
39	Jumlah kegiatan Pelatihan Forum Anak yang dilaksanakan	Kali	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	40,00	Belum Tercapai
40	Jumlah kegiatan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak yang dilaksanakan	Kali	-	-	19,00	8,00	19,00	19,00	237,50	Tercapai

No	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Relalisasi 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Jumlah Koordinasi dengan Pendamping Forum Anak Kelurahan yang dilaksanakan	Kelurahan	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	Tercapai
42	Jumlah koordinasi peningkatan kualitas hidup anak yang dilaksanakan	Kali	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	Tercapai
43	Jumlah Koordinasi Peringatan Hari Anak Nasional yang dilaksanakan	Kali	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	Tercapai
44	Jumlah Koordinasi Program Kerja Forum Anak Tingkat Kota yg dilaksanakan	Kali	-	-	15,00	15,00	15,00	15,00	100,00	Tercapai
45	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembekalan agen perubahan di Sekolah Ramah Anak	Sekolah	-	-	9,00	9,00	9,00	9,00	100,00	Tercapai
46	Jumlah kelompok GSIB yang mendapat penghargaan lomba GSIB	Kelompok	8,00	-	5,00	5,00	5,00	5,00	62,50	Belum Tercapai
47	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Rumah Sakit Ramah Anak yang dilaksanakan	Kali	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	Tercapai

No	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Relalisasi 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	**persentase pengaduan kasus anak yang terlayani**	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
49	**Persentase ketercapaian pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**Tercapai**
50	Jumlah kegiatan Pelatihan Program Roots yang dilaksanakan	Kali	1,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	Tercapai
51	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan penghargaan Evaluasi PATBM yang dilaksanakan	Kelurahan	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	Tercapai
52	**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota (IKK Outcome)**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**Tercapai**
53	Jumlah kegiatan case conference kasus anak yang dilaksanakan	Kali	204,00	13,00	97,00	78,00	97,00	110,00	53,92	Belum Tercapai

No	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Relalisasi 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Jumlah pemberian konsultasi pengasuhan anak dan permasalahan keluarga yang dilaksanakan	Kali	146,00	18,00	74,00	65,00	74,00	92,00	63,01	Belum Tercapai
55	Jumlah pendampingan kasus kekerasan terhadap anak yang dilaksanakan	Kali	110,00	10,00	56,00	45,00	56,00	66,00	60,00	Belum Tercapai
56	**Persentase ketercapaian penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus**	**Persen**	**100,00**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**Tercapai**
57	Jumlah dokumen naskah akademik UPTD PPA yang disusun	Dokumen	1,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	Tercapai
58	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**Tercapai**
59	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**Tercapai**
60	Jumlah dokumen Renja yang disusun	Dokumen	10,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	40,00	Belum Tercapai

No	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Relalisasi 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	Dokumen	10,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	40,00	Belum Tercapai
62	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah	Bulan	60,00	12,00	12,00	12,00	12,00	24,00	40,00	Belum Tercapai
63	Jumlah dokumen evaluasi Renja yang disusun	Dokumen	20,00	4,00	4,00	4,00	4,00	8,00	40,00	Belum Tercapai
64	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (Penetapan dan Perubahan)	Dokumen	10,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	40,00	Belum Tercapai
65	Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	Dokumen	25,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	40,00	Belum Tercapai
66	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**Tercapai**
67	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	60,00	12,00	14,00	14,00	14,00	26,00	43,33	Belum Tercapai
68	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	Bulan	**60,00**	**12,00**	12,00	12,00	12,00	24,00	40,00	Belum Tercapai
69	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	Bulan	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	40,00	Belum Tercapai

No	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Relalisasi 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	**Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**persen**	**100,00**	**102,02**	**100,58**	**100,00**	**100,58**	**100,58**	**100,58**	**Tercapai**
71	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**Tercapai**
72	Jumlah keikutsertaan dalam Karnaval Batik	Kali	10,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	20,00	Belum Tercapai
73	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**Persen**	**100,00**	**106,05**	**101,75**	**100,00**	**101,75**	**101,75**	**101,75**	**Tercapai**
74	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	60,00	12,00	12,00	12,00	12,00	24,00	40,00	Belum Tercapai
75	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	Bulan	60,00	12,00	12,00	12,00	12,00	24,00	40,00	Belum Tercapai
76	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Unit	64,00	10,00	4,00	4,00	4,00	14,00	21,88	Belum Tercapai
77	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	60,00	12,00	12,00	12,00	12,00	24,00	40,00	Belum Tercapai

No	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Relalisasi 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Bulan	55,00	11,00	11,00	11,00	11,00	22,00	40,00	Belum Tercapai
79	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	60,00	12,00	12,00	12,00	12,00	24,00	40,00	Belum Tercapai
80	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	Bulan	60,00	12,00	12,00	12,00	12,00	24,00	40,00	Belum Tercapai
81	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	Orang/Kali	785,00	260,00	302,00	220,00	302,00	562,00	71,59	Belum Tercapai
82	**Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**Tercapai**
83	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	60,00	12,00	12,00	12,00	12,00	24,00	40,00	Belum Tercapai
84	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	60,00	12,00	12,00	12,00	12,00	24,00	40,00	Belum Tercapai
85	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor	Bulan	60,00	12,00	12,00	12,00	12,00	24,00	40,00	Belum Tercapai
86	**Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah**	**persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**Tercapai**

No	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Relalisasi 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**Tercapai**
88	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional	Bulan	18,00	18,00	12,00	12,00	12,00	30,00	166,67	Tercapai
89	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	Unit	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	100,00	Tercapai
90	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Bulan	60,00	12,00	12,00	12,00	12,00	24,00	40,00	Belum Tercapai
91	**Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan**	**Persen**	**100,00**	**33,33**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**83,33**	**83,33**	Belum Tercapai
92	**Persentase Fasilitasi Kerja sama TNI dan Kelurahan**	**Persen**	**66,67**	**22,22**	**11,11**	**11,11**	**11,11**	**33,33**	**50,00**	Belum Tercapai
93	Jumlah kelurahan yang difasilitasi kegiatan TMMD	Kelurahan	15,00	3,00	3,00	3,00	3,00	6,00	40,00	Belum Tercapai
94	**Persentase kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang"**	**Persen**	**70,37**	**74,07**	**81,48**	**59,26**	**81,48**	**81,48**	**115,79**	
95	**Persentase kinerja administrasi kelurahan**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	

No	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Relalisasi 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	Jumlah kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan lomba kelurahan	Kelurahan	15,00	1,00	3,00	3,00	3,00	4,00	26,67	Belum Tercapai
97	Jumlah dokumen evaluasi perkembangan kelurahan yang disusun	Dokumen	5,00	3,00	1,00	1,00	1,00	4,00	80,00	Belum Tercapai
98	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat**	**Persen**	**96,92**	**96,79**	**97,64**	**96,35**	**97,64**	**97,64**	**100,75**	**Tercapai**
99	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**80,68**	**100,00**	**80,68**	**80,68**	**80,68**	**Belum Tercapai**
100	Jumlah dokumen evaluasi pemberdayaan LKK yang disusun	Dokumen	10,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	40,00	Belum Tercapai
101	Jumlah kegiatan pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Kali	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	40,00	Belum Tercapai
102	Jumlah kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas LKK yang dilaksanakan	Kali	5,00	4,00	1,00	1,00	1,00	5,00	100,00	Tercapai
103	Jumlah inovator TTG yang terfasilitasi	Inovator	15,00	-	3,00	3,00	3,00	3,00	20,00	Belum Tercapai

No	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Relalisasi 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Jumlah kelurahan yang terpilih menjadi pelaksana terbaik gotong royong masyarakat	Kelurahan	15,00	-	3,00	3,00	3,00	3,00	20,00	Belum Tercapai
105	Jumlah TP PKK Kelurahan binaan yang dibina	Kelurahan	40,00	8,00	8,00	8,00	8,00	16,00	40,00	Belum Tercapai
106	Jumlah bulan terfasilitasinya kegiatan TP PKK Kota Pekalongan	Bulan	60,00	12,00	12,00	12,00	12,00	24,00	40,00	Belum Tercapai
107	Jumlah kegiatan Bintek pengelolaan UP2K-PKK yang dilaksanakan	Kali	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	40,00	Belum Tercapai
108	Jumlah kegiatan pelatihan digital marketing yang dilaksanakan	Kali	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	Tercapai
109	Jumlah kegiatan pelatihan pembuatan kerajinan dari limbah plastik yang dilaksanakan	Kali	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	40,00	Belum Tercapai
110	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kelurahan Gagah (Tanggap dan Tangguh) bencana tingkat kecamatan yang dilaksanakan	Kecamatan	-	-	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	Tercapai

No	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Relalisasi 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kelurahan Ramah Anak yang dilaksanakan	Kali	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	Tercapai
112	Jumlah Kegiatan Pelatihan TP3 PKK yang dilaksanakan	Kali	6,00	2,00	1,00	1,00	1,00	3,00	50,00	Belum Tercapai
113	Jumlah Kelompok Bank Sampah yang mendapat penghargaan lomba Bank Sampah	TP PKK Kelurahan	20,00	4,00	3,00	3,00	3,00	7,00	35,00	Belum Tercapai
114	Jumlah TP PKK Kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan Lomba Administrasi PKK	TP PKK Kelurahan	15,00	4,00	3,00	3,00	3,00	7,00	46,67	Belum Tercapai
115	Jumlah TP PKK Kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan Lomba Hatinya PKK	TP PKK Kelurahan	15,00	4,00	3,00	3,00	3,00	7,00	46,67	Belum Tercapai

No	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Relalisasi 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Jumlah TP PKK Kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan Lomba Beberan dan Simulasi Pola Asuh	TP PKK Kelurahan	15,00	4,00	3,00	3,00	3,00	7,00	46,67	Belum Tercapai
117	Jumlah Kelompok UP2K PKK yang terpilih mendapat penghargaan Lomba UP2K PKK	TP PKK Kelurahan	15,00	4,00	3,00	3,00	3,00	7,00	46,67	Belum Tercapai
118	Jumlah Kegiatan Capasity Building TP PKK yang dilaksanakan	Kali	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	Tercapai

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPPA

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU merupakan indikator yang paling menentukan (strategis) bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Tujuan penetapan indikator kinerja utama adalah :

1). Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik;

2). Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Hasil pengukuran kinerja DPMPPA Kota Pekalongan, adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	NILAI CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	3	4	5
1	Optimalisasi Pengarusutamaan Gender		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	140.43
		1 Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan	Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG	100.18
2	Optimalisasi Pengarusutamaan Hak Anak		Kategori Kota Layak Anak	150.00
		2 Meningkatnya Skor Kota Layak Anak	Skor Kota Layak Anak	122.19
3	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	113.67
		3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	99.87
		4 Meningkatnya Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	100.58

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja IKU DPMPPA Kota Pekalongan pada tahun 2023 adalah 105.77%, DPMPPA Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil karena semua target IKU sasaran strategis yang telah ditetapkan dicapai dengan sangat baik.

Tabel 2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n - 2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2023 (n - 2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			59,14	59,59	60,28	61,00	65,31		59,59	61,00	
2	Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG			28,51	28,52	28,52	28,53	28,56		28,52	28,53	
3	Kategori Kota Layak Anak			Madya	Madya	Madya	Madya	Nindya		Madya	Madya	
4	Skor Kota Layak Anak			630,00	632,00	634,00	636,00	769,80		632,00	636,00	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat			83,88	84,13	84,38	84,63	95,35		84,13	84,63	
6	Nilai SAKIP OPD			83,50	85,00	86,50	88,00	83,35		85,00	88,00	
7	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat			8,55	9,02	9,49	10,00	8,45		9,02	10,00	

Gambaran mengenai pencapaian kinerja DPMPPA Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut.

1. **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Selama periode tahun 2019 sampai dengan 2021, nilai IDG Kota Pekalongan mengalami fluktuasi yang cenderung mengalami penurunan, kemudian mulai tahun 2022 mengalami peningkatan, seperti terlihat pada grafik dibawah ini.

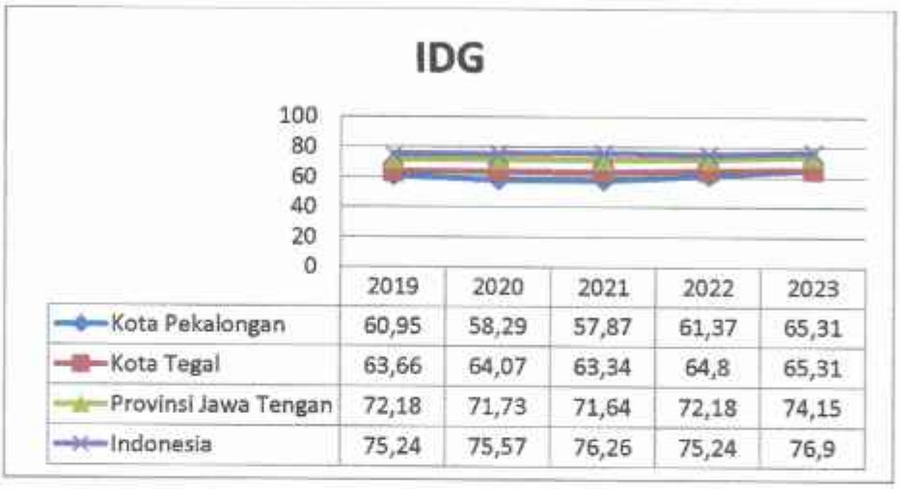

	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Pekalongan	60,95	58,29	57,87	61,37	65,31
Kota Tegal	63,66	64,07	63,34	64,8	65,31
Provinsi Jawa Tengan	72,18	71,73	71,64	72,18	74,15
Indonesia	75,24	75,57	76,26	75,24	76,9

Sumber : BPS, 2024

Tahun 2023 IDG Kota Pekalongan sama dengan Kota Tegal, namun jika disandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional, sepanjang tahun 2019-2023 nilai IDG Kota Pekalongan masih di bawah rata-rata.

2. **Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG**

Sumbangan pendapatan perempuan merupakan salah satu dari indikator yang dipakai untuk menghitung Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 angka Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG Kota Pekalongan cenderung menurun.

	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG Kota Pekalongan	28,53	28,5	28,21	28,04	28,56

Sumber : BPS rilis, 2024

Indeks Sumbangan PendapatanPerempuan dalam IDG Kota Pekalongan lebih rendah jika dibandingkan Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

	2019	2020	2021	2022	2022
Kota Pekalongan	28,53	28,5	28,21	28,04	28,56
Kota Tegal	30,47	30,62	30,19	29,86	30,73
Provinsi Jawa Tengan	34,31	34,29	34,6	34,59	35,21
Nasional	37,1	37,26	37,22	37,17	37,09

Sumber : BPS rilis, 2024

3. Kategori Kota Layak Anak

Kategori Kota Layak Anak merupakan penghargaan yang diberikan atas hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PPPA RI. Tahun 2023, penghargaan Kota Layak Anak meningkat dengan kategori Nindya, yang sebelumnya dari tahun 2019, mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak dengan Kategori Madya, dan tahun 2018 mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak dengan Kategori Pratama. Hal tersebut dikarenakan komitmen bersama Walikota Pekalongan dengan OPD terkait dan stakeholder, maupun peran LP-PAR (Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja) dan PPKBM PUSPAGA ElPePar berupa pelayanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak serta pusat pembelajaran keluarga.

4. Skor Kota Layak Anak

Skor Kota Layak Anak adalah skor yang diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PPPA RI tentang Kota Layak Anakm

	2020	2021	2022	2023
Skor Kota Layak Anak Kota Pekalongan	626	602	637,6	769,8

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2024

5. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indek Kepuasan Masyarakat merupakan persepsi penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik melalui survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan. Survei Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik di DPMPPA Kota Pekalongan sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari pelayanan publik yang dilaksanakan di LP-PAR. LP-PAR (Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja) yaitu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Pekalongan sebagai pusat pelayanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak.

Selain itu tahun 2021 di bentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dengan nama "PUSPAGA ELPePar" (Empati, Luwes, Peduli, dan Partisipasi) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 463/0013 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga.

Dengan dibentuknya Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR) dan PUSPAGA "ELPePar", penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan maupun layanan pembelajaran keluarga di Kota Pekalongan dapat terlayani dan tertangani 100 %

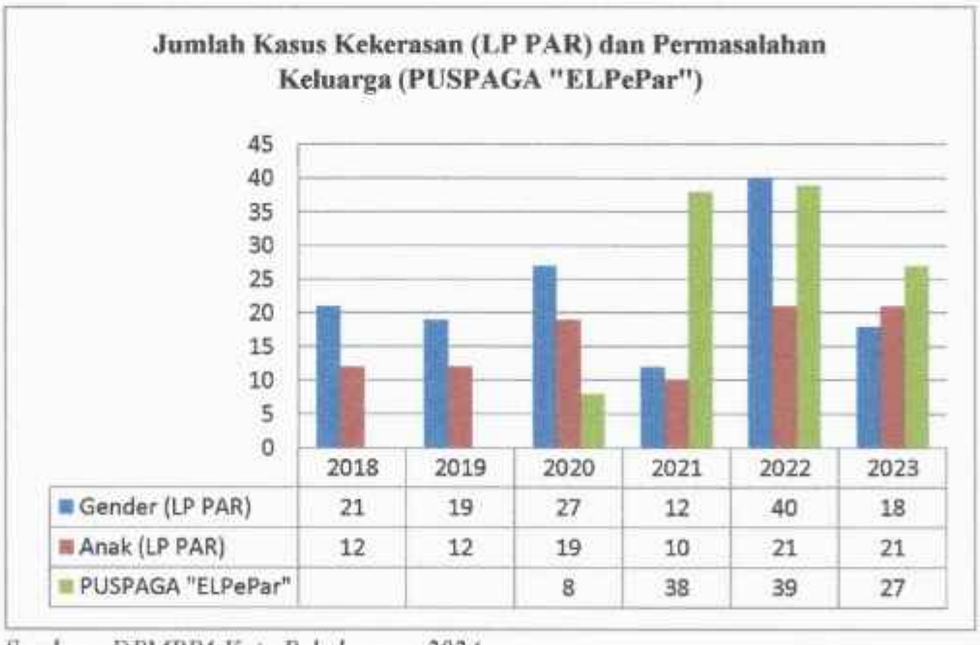

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gender (LP PAR)	21	19	27	12	40	18
Anak (LP PAR)	12	12	19	10	21	21
PUSPAGA "ELPePar"			8	38	39	27

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2024

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan, 2024

6. Nilai SAKIP OPD

Evaluasi AKIP bertujuan untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Komponen evaluasi meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja internal dan pencapaian kinerja. Nilai Evaluasi AKIP DPMPPA Kota Pekalongan menunjukkan peningkatan, dapat dilihat pada gambar berikut:

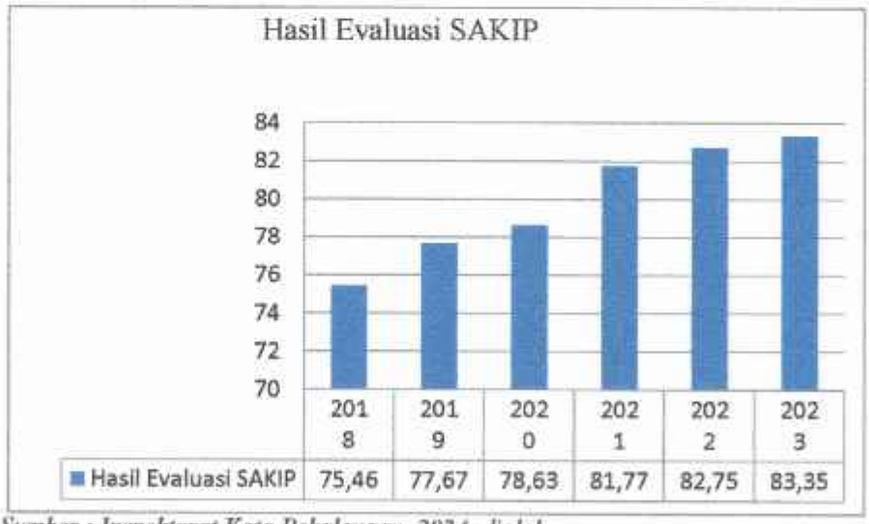

Sumber : Inspektorat Kota Pekalongan, 2024, diolah

7. Prosentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat

Pembangunan sumber daya manusia dengan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat dalam pembangunan ditunjukkan dengan tingkat keswadayaan masyarakat dalam pembangunan. Tingkat keswadayaan masyarakat dari tahun 2017 s.d 2021 menunjukkan angka peningkatan, namun di tahun 2021 menurun 2.62%, capaian swadaya masyarakat dalam

pembangunan berbasis masyarakat dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

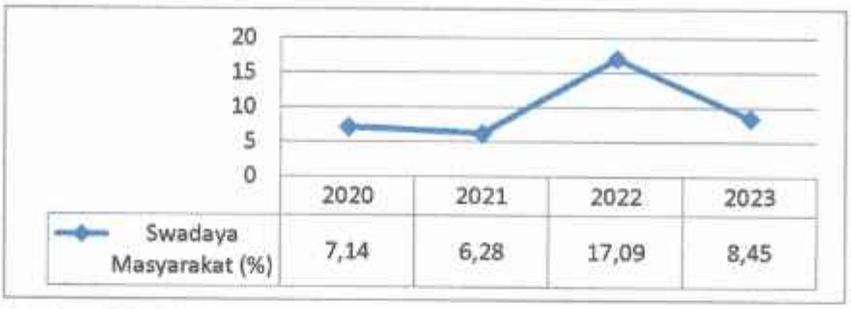

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2024, diolah

Tahun	Jumlah Kelurahan	Jumlah Anggaran (Rp)	Swadaya Masyarakat (Rp)	Prosentase (%)
2020	17	839.724.500	59.935.400	7.14
2021	27	4.332.379.400	272.125.750	6.28
2022	27	2.217.366.000	378.970.906	17.09
2023	27	4.005.082.000	338.567.000	8,45

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2024, diolah

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi ugas dan fungsi DPMPPA Kota Pekalongan adalah :

1. Permasalahan terkait kesekretariatan:
   a. Jumlah SDM di DPMPPA Kota Pekalongan belum memadai sesuai tugas dan fungsi;
   b. Sarana dan prasarana kantor belum memadai/layak;
   c. Tata kelola keuangan belum sesuai dengan yang diharapkan;
   d. Pelayanan informasi publik belum optimal.
2. Permasalahan terkait kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat :
   a. Rendahnya kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan;
   b. Menurunnya kesadaran dan kepedulian masyarakat perkotaan terhadap lingkungan;
   c. Pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam hal Teknologi Tepat Guna (TTG) masih kurang;
   d. Potensi nilai adat istiadat masyarakat belum diberdayakan secara optimal.
3. Permasalahan terkait pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan anak:
   b. Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam Indeks Pemberdayaan

Gender masih rendah;

c. Perangkat daerah dan stekholder terkait kurang memahami implementasi pengarusutamaan hak anak;
d. Masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
e. Peran kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum optimal;

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan pada 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan ke masyarakat. Keberhasilan pembangunan sangat di dukung oleh kompetensi dan kapabilitas SDM yang handal dan visioner.
b. Upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pemberdayaan di Kota Pekalongan.
c. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas. harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses pemberdayaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan khususnya di Kota Pekalongan
d. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan berkelanjutan.
e. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
f. Kelembagaan pengarusutamaan hak anak belum berjalan secara efektif dalam upaya pemenuhan, penghargaan, dan perlindungan hak anak;
g. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
h. Upaya kelembagaan perlindungan anak terhadap pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
i. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

j. Membangun jejaring dan kerjasama dengan komunitas, lembaga kemasyarakatan, media masa, dunia usaha dan perguruan tinggi.

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. Globalisasi dapat menjadi peluang yang baik untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas daerah dalam menghadapi tantangan global;
b. Kebijakan pengarusutamaan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender di daerah;
c. Kebijakan pengarusutamaan hak anak telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas pemenuhan dan perlindungan hak anak;
d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak;
e. Banyaknya potensi organisasi/lembaga kemasyarakatan, komunitas, media massa, dunia usaha dan perguruan tinggi yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat, perempuan, perlindungan perempuan dan anak.

Isu Strategis

Isu- isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan kurun waktu 2016-2021, adalah sebagai berikut

1. Belum optimalnya pengarusutaaan gender dan pemberdayaan perempuan;
2. Belum optimalnya pengarusutamaan hak anak;
3. Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
5. Belum optimalnya kinerja organisasi.

Strategi yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dalam menghadapi isu-isu tersebut, adalah :

1. Penyediaan dokumen perencanaan dan penganggaran responsif gender;
2. Fasilitasi pemberdayaan perempuan bidang ekonomi melalui organisas/lembaga kemasyarakatan;
3. Penyediaan layanan perlindungan perempuan;
4. Sinergitas antar perangkat daerah;

5. Jejaring dan kerjasama dengan komunitas, organisasi/lembaga kemasyarakatan, media masa, dunia usaha dan perguruan tinggi;
6. Penyediaan dokumen rencana aksi daerah kota layak anak;
7. Penyedian layanan perlindungan anak;
8. Peningkatan fasilitasi kerjasama TNI dan kelurahan;
9. Peningkatan kinerja administrasi kelurahan;
10. Peningkatan partisipasi dan peran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
11. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan, system pengendalian internal pemerintah dan evaluasi kinerja perangkat daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat dalam tabel 2.3, sebagai berikut :

Tabel : 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1			3	5	4	6	7	3	5	4	6	7
1.			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**		***Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender***	**9,24 persen**	**319.627.000**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**		***Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender***	**9,24 persen**	**150.940.000**
	1		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		*Persentase Sub Kegiatan yang responsif gender*	16.67 persen	20.025.000	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		*Persentase Sub Kegiatan yang responsif gender*	16.67 persen	14.960.000
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG					Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG				
				Kota Pekalongan	*Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota*	4 Dokumen	20.025.000		Kota Pekalongan	*Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota*	4 Dokumen	14.960.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	3	5	4	6	7	3	5	4	6	7
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		*Persentase Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan sosialisasi/ advokasi Pemberdayaan Perempuan*	33.33 persen	65.310.000	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		*Persentase Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan sosialisasi/ advokasi Pemberdayaan Perempuan*	33.33 persen	15.590.000
2	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi					Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				
		Kota Pekalongan	*Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota*	6 Dokumen	65.310.000		Kota Pekalongan	*Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota*	2 Dokumen	15.590.000
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		*Persentase perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan dharma wanita*	100.00 persen	234.292.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		*Persentase perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan dharma wanita*	100.00 persen	120.390.000

No			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1			3	5	4	6	7	3	5	4	6	7
		3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				
				Kota Pekalongan	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan*	1 Lembaga	234.292.000		Kota Pekalongan	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan*	1 Lembaga	120.390.000
2,			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**		***Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)***	**23,99 persen**	**80.142.000**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**		***Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)***	**15,01 persen**	**78.062.000**
	4		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		*Persentase ketercapaian pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota*	100 persen	13.050.000	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		*Persentase ketercapaian pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota*	100 persen	9.770.000
		4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	3	5	4	6	7	3	5	4	6	7
		Kota Pekalongan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*	3 Dokumen	13.050.000		Kota Pekalongan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*	3 Dokumen	9.770.000
5	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		*Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani (IKK Output)*	100.00 persen	67.092.000	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		*Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani (IKK Output)*	100.00 persen	68.292.000
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				
		Kota Pekalongan	*Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan*	24 Layanan	67.092.000		Kota Pekalongan	*Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan*	24 Layanan	68.292.000

No			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1			3	5	4	6	7	3	5	4	6	7
					Kabupaten/Kota					*Kabupaten/Kota*		
3,			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**		***Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)***	**48,15 persen**	**254.834.000**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**		***Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)***	**48,15 persen**	**215.615.000**
	6		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		*Persentase forum anak yang aktif*	34.38 persen	254.834.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		*Persentase forum anak yang aktif*	34.38 persen	215.615.000
		6	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				
				Kota Pekalongan	*Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	300 Orang	117.637.000		Kota Pekalongan	*Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	300 Orang	98.225.000

No			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1			3	5	4	6	7	3	5	4	6	7
		7	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Kota Pekalongan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	5 Dokumen	109.457.000		Kota Pekalongan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	5 Dokumen	96.770.000
		8	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Kota Pekalongan	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	2 Dokumen	27.740.000		Kota Pekalongan	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	2 Dokumen	20.620.000
4,			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**		***persentase pengaduan kasus anak yang terlayani***	**100,00 persen**	**98.579.000**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**		***persentase pengaduan kasus anak yang terlayani***	**100,00 persen**	**69.644.000**

No			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1			3	5	4	6	7	3	5	4	6	7
	7		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		*Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota (IKK Outcome)*	100.00 Persen	13.060.000	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		*Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota (IKK Outcome)*	100.00 Persen	9.780.000
		9	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA					Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA				
				Kota Pekalongan	*Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu*	1 Kegiatan	13.060.000		Kota Pekalongan	*Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu*	1 Kegiatan	9.780.000
	8		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten / kota (IKK Outcome)*	100 persen	63.327.000	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten / kota (IKK Outcome)*	100 persen	53.232.000
		10	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK					Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK				
				Kota Pekalongan	*Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan*	24 Layanan	63.327.000		Kota Pekalongan	*Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan*	24 Layanan	53.232.000

No			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1			3	5	4	6	7	3	5	4	6	7
	9		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Persentase ketercapaian penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus*	100 persen	22.192.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Persentase ketercapaian penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus*	100 persen	6.632.000
		11	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/					Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/				
				Kota Pekalongan	*Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK*	25 Orang	22.192.000		Kota Pekalongan	*Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK*	25 Orang	6.632.000
5,			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		***Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja***	**100,00 persen**	**4.086.014.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		***Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja***	**100,00 persen**	**3.666.753.000**
	10		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	100.00 Persen	20.762.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	100.00 Persen	20.762.000

No			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1			3	5	4	6	7	3	5	4	6	7
		12	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
				Kota Pekalongan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	3 Dokumen	7.204.000		Kota Pekalongan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	3 Dokumen	7.204.000
		13	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
				Kota Pekalongan	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	2 Dokumen	1.558.000		Kota Pekalongan	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	2 Dokumen	1.558.000
		14	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				Kota Pekalongan	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	15 Laporan	12.000.000		Kota Pekalongan	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	15 Laporan	12.000.000
	11		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		*Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah*	100.00 Persen	3.252.587.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		*Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah*	100.00 Persen	2.558.067.000
		15	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
				Kota Pekalongan	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	20 Orang/bulan	3.209.643.000		Kota Pekalongan	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	20 Orang/bulan	2.517.093.000

No			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1			3	5	4	6	7	3	5	4	6	7
		16	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
				Kota Pekalongan	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	12 Dokumen	41.500.000		Kota Pekalongan	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	12 Dokumen	39.530.000
		17	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
				Kota Pekalongan	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1.444.000		Kota Pekalongan	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1.444.000
	12		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		*Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah*	100.00 Persen	5.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		*Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah*	100.00 Persen	3.650.000
		18	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
				Kota Pekalongan	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	1 Paket	5.000.000		Kota Pekalongan	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	1 Paket	3.650.000

No			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1			3	5	4	6	7	3	5	4	6	7
	13		Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah*	100.00 Persen	253.856.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah*	100.00 Persen	192.256.000
		19	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
				Kota Pekalongan	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	2.330.000		Kota Pekalongan	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	1.710.000
		20	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
				Kota Pekalongan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	61.340.000		Kota Pekalongan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	44.952.000
		21	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
				Kota Pekalongan	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	4 Paket	4.242.000		Kota Pekalongan	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	4 Paket	2.050.000
		22	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor				

No			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1			3	5	4	6	7	3	5	4	6	7
				Kota Pekalongan	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	4 Paket	37.669.000		Kota Pekalongan	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	4 Paket	38.244.000
		23	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
				Kota Pekalongan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	2 Paket	10.000.000		Kota Pekalongan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	2 Paket	4.380.000
		24	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
				Kota Pekalongan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	2 Dokumen	3.455.000		Kota Pekalongan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	2 Dokumen	2.530.000
		25	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
				Kota Pekalongan	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	150 Laporan	134.820.000		Kota Pekalongan	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	150 Laporan	98.390.000
	14		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100.00 Persen	339.009.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100.00 Persen	270.268.000

No			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1			3	5	4	6	7	3	5	4	6	7
		26	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
				Kota Pekalongan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	4 Laporan	3.450.000		Kota Pekalongan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	4 Laporan	2.520.000
		27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
				Kota Pekalongan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	175.200.000		Kota Pekalongan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	107.400.000
		28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
				Kota Pekalongan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	160.359.000		Kota Pekalongan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	160.348.000
	15		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100.00 Persen	214.800.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100.00 Persen	621.750.000

No			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1			3	5	4	6	7	3	5	4	6	7
		29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
				Kota Pekalongan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	13 Unit	74.960.000		Kota Pekalongan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	16 Unit	71.960.000
		30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
				Kota Pekalongan	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	3 Unit	120.000.000		Kota Pekalongan	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	3 Unit	535.300.000
		31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
				Kota Pekalongan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	69 Unit	19.840.000		Kota Pekalongan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	69 Unit	14.490.000

No			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1			3	5	4	6	7	3	5	4	6	7
6,			**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**		***Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan***	**83,33 persen**	**760.000.000**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**		***Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan***	**83,33 persen**	**557.400.000**
	16		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa		*Persentase Fasilitasi Kerja sama TNI dan Kelurahan*	11.11 persen	760.000.000	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa		*Persentase Fasilitasi Kerja sama TNI dan Kelurahan*	11.11 persen	557.400.000
		32	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota					Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				
				Kota Pekalongan	*Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota*	5 Dokumen	760.000.000		Kota Pekalongan	*Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota*	4 Dokumen	557.400.000
7,			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**		***Persentase kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang"***	**66,67 persen**	**43.668.000**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**		***Persentase kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang"***	**88,89 persen**	**32.528.000**
	17		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		*Persentase kinerja administrasi kelurahan*	100.00 persen	43.668.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		*Persentase kinerja administrasi kelurahan*	100.00 persen	32.528.000
		33	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan					Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				

No			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1			3	5	4	6	7	3	5	4	6	7
				Kota Pekalongan	*Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan*	2 Dokumen	43.668.000		Kota Pekalongan	*Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan*	2 Dokumen	32.528.000
8.			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**		***Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat***	**96,73 persen**	**783.299.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**		***Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat***	**97,75 persen**	**696.116.000**
	18		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		*Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan*	100.00 persen	783.299.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		*Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan*	100.00 persen	696.116.000

No			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1			3	5	4	6	7	3	5	4	6	7
		34	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				
				Kota Pekalongan	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat*	2 Dokumen	168.940.000		Kota Pekalongan	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat*	1 Dokumen	130.182.000

No			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1			3	5	4	6	7	3	5	4	6	7
		35	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				
				Kota Pekalongan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	2 Lembaga	77.000.000		Kota Pekalongan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	1 Lembaga	54.894.000
		36	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna					Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				
				Kota Pekalongan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna*	1 Laporan	67.500.000		Kota Pekalongan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna*	1 Laporan	49.770.000
		37	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat					Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	3	5	4	6	7	3	5	4	6	7
		Kota Pekalongan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat*	1 Laporan	47.250.000		Kota Pekalongan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat*	1 Laporan	34.980.000
38	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga					Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				
		Kota Pekalongan	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga*	1 Dokumen	422.609.000		Kota Pekalongan	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga*	1 Dokumen	426.290.000
					6.426.163.000					**5.467.058.000**

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan pada tahun 2025 melaksanakan 2 Urusan Bidang, 8 Program, 18 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan yang terkait dengan program dan kegiatan DPMPPA.

Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut adalah sbb :

a. Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan :

1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
   - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
   - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

2) Program Perlindungan Perempuan :

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota :
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

3) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) :

1. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
   - Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
   - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

4) Program Perlindungan Khusus Anak :
   1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
      - Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA
   2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah :
      - Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
   3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus :
      - Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten / Kota

b. Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Program Peningkatan Kerjasama Desa :
   1. Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa, dengan sub kegiatan :
      - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota

2) Program Administrasi Pemerintahan Desa :
   1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, dengan sub kegiatan :
      - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

3) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat :
   1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang

Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1) Program Pelayanan Adinistrasi Perkantoran

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
   - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
   - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
   - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
   - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Dalam pelaksanaan MUSRENBANG baik di tingkat kelurahan, kecamatan maupun kota senantiasa ditekankan perlunya memprioritaskan kegitan atas dasar 'kebutuhan' dan bukan 'keinginan'. Disamping itu juga di prioritaskan kegiatan-kegiatan yang berdampak besar terhadap kenaikan IPM dan kegiatan yang mendukung terwujudnya Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekalongan.

Namun dalam kenyataannya masih banyak usulan kegiatan dari masyarakat yg lebih bersifat fisik dan mengesampingkan usulan yang bersifat non fisik, meskipun pada kenyataannya kegiatan non fisik tersebut sangat mendukung kenaikan IPM maupun terwujudnya Visi – Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekalongan.

Untuk kedepan, diharapkan usulan dari masyarakat (tingkat RT/ kelurahan) juga mengakomodir usulan non fisik disamping usulan fisik dan menggunakan data base TRI BINA yang ada sebagai dasar untuk memprioritaskan 'kebutuhan' masyarakat dibanding 'keinginan' masyarakat.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada tahun 2025, merupakan tahun keempat RPJMD Kota Pekalongan. Dalam kerangka Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025, Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan pentahapan pembangunan lima tahunan keempat. Oleh karena itu, dalam penyusunannya harus tetap mengacu dan mempedomani arah kebijakan dan sasaran sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025. Penelaahan RPJPD merupakan langkah utama dalam perumusan RPJMD mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan berkenaan dalam RPJPD. RPJMD Kota Pekalongan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan tahun 2021-2026.

Selain itu, RPJMD Tahun 2021-2026 sesuai dengan periode jabatan Walikota dan Wakil Walikota terpilih tersebut pada dasarnya juga merupakan kelanjutan atas tahapan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Dengan demikian, selain mencermati berbagai kondisi makro yang berasal dari data-data primer dan sekunder, juga menjadi hal pokok untuk melakukan evaluasi atas capaian RPJMD Tahun 2016-2021 khususnya terkait dengan rencana pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam RPJPD tahun 2005-2025. Hal ini penting agar lebih dapat menjamin keberlanjutan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025.

Selain upaya sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan dengan tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (Provinsi dan Pusat) serta pemerintahan di Kabupaten/Kota sekitar, perencanaan pembangunan juga harus merespon dinamika yang terjadi baik dalam skala lokal, regional, nasional juga global.Kecenderungan yang terjadi dalam skala lokal, regional, dan nasional secara normatif lebih dapat ditelusuri melalui dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang ada.Namun dalam skala global, selain isu-isu yang sekarang ini sedang disikapi oleh berbagai institusi, baik institusi pemerintah, akademisi, swasta, ataupun masyarakat, juga perlu diantisipasi berbagai dinamika lain yang sewaktu-waktu akan muncul di waktu yang akan datang.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan lanjutan dari pembangunan yang telah dicapai dalam kurun waktu 2016-2021. Untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, maka RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 disesuaikan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekalongan tahun 2005-2025, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, serta Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan Tahun 2009-2029. UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan.

Sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan periode Tahun 2016-2021 yang telah dilantik pada tanggal 26 Pebruari 2021, maka Visi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah

"Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius"

Visi tersebut dibangun dengan ruh perwujudan **Tahta Untuk Rakyat** sebagaimana falsafah pemerintahan yang dibangun oleh Sultan Hamengku Buwono IX. Dalam kerangka RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, falsafah Tahta Untuk Rakyat ini mengandung makna bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaran kekuasaan dalam pemerintahan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemanfaatan seluruh rakyat Kota Pekalongan.

Untuk mewujudkan visi, maka dirumuskan **misi** yang harus diemban oleh Pemerintah bersama dengan Masyarakat Kota Pekalongan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan;
3. Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman;
4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan;
5. Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal;
6. Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah;
7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government

Arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan perlindungan Anak Kota Pekalongan, adalah :

1. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran responsif gender dan Inisiasi pemilihan Gender Champion;
2. Peningkatan pemahaman perempuan melalui advokasi PUG;
3. Peningkatan layanan pengaduan perlindungan perempuan dan anak;
4. Melakukan advokasi, pendampingan dan konsultasi keluarga;
5. Melaksanakan pendampingan orang tua dan anak beresiko/rentan;
6. Mewujudkan sekolah yang ramah anak;
7. Peningkatan partisipasi anak dalam kelembagaan forum anak;
8. Melaksanakan advokasi kelurahan layak anak;
9. Pembentukan APSAI;
10. Penyusunan dokumen RAD KLA;
11. Fasilitasi TMMD dan Karya Bakti TNI;
12. Monitoring dan evaluasi perkembangan kelurahan kelurahan secara berkala
13. Pelatihan, pembinaan dan evaluasi kinerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
14. Pelatihan, pembinaan dan evaluasi kinerja fasilitator pemberdayaan masyarakat;
15. Penjaringan Kader Pemberdayaan Masyarakat;
16. Fasilitasi TTG, gotong royong masyarakat dan TP PKK Kota Pekalongan
17. Penyusunan dokumen perencanaan dan sistem pengendalian internal pemerintah yang berkualitas;
18. Monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara berkala.

3.2 **Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2021-2026, tertuang dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, adalah :

1. Optimalisasi Pengarusutamaan Gender;
2. Optimalisasi Pengarusutamaan Hak Anak;
3. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik.

Sasaran :

1. Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan;
2. Meningkatnya Skor Kota Layak anak;
3. Meningkatnya Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat;
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

3.3. **Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Pencapaian visi dan misi kepala daerah

Dalam pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan , yang dijabarkan dalam dokumen RPJMD adalah

"Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius"

Visi tersebut dibangun dengan ruh perwujudan **Tahta Untuk Rakyat** sebagaimana falsafah pemerintahan yang dibangun oleh Sultan Hamengku Buwono IX. Dalam kerangka RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, falsafah Tahta Untuk Rakyat ini mengandung makna bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaran kekuasaan dalam pemerintahan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemanfaatan seluruh rakyat Kota Pekalongan.

Untuk mewujudkan visi, maka dirumuskan **misi** yang harus diemban oleh Pemerintah bersama dengan Masyarakat Kota Pekalongan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan;
3. Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman;
4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan;
5. Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal;
6. Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah;
7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government.

Pencapaian SDGs

Salah satu tujuan dari SDGs yang termaksud didalam tujuan 16 untuk menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua termasuk untuk anak dan perempuan. Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan anak melalui kegiatan fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan melakukan salah satu kegiatan berupa pendampingan terhadap korban baik itu anak maupun terhadap perempuan. Pendampingan itu dimaksudkan agar kasus yang terjadi dapat selesai dengan tugas baik dari sisi

hukum maupun psikologis. Namun demikian upaya tersebut bukan tidak menemui kendala. Beberapa kasus yang secara nyata sudah dapat dibuktikan namun karena memperhatikan norma yang ada dimasyarakat sehingga kasus ditarik.

Sebagai bahan untuk mengedukasi masyarakat, advokasi terhadap keluarga, korban dan masyarakat harus terus dilaksanakan. Beberapa hal yang sudah dilakukan oleh DPMPPA untuk mengedukasi masyarakat antara lain :

1. Melalui fasilitasi kota layak anak dilakukan pembentukan kelurahan layak anak yang termasuk didalamnya dilibatkan forum anak di setiap kelurahan sehingga setiap anak mempunyai wadah yang positif dan dan terhindar dari pergaulan yang negatif. Selain itu diharapkan adanya peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan anak yang komprehensif;
2. Sosialisasi di tingkat kelurahan melalui dana kelurahan dimana DPMMPA diminta untuk menjadi narasumber. Diharapkan informasi tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak diketahui sampai dengan semua elemen masyarakat;
3. Bekerja sama dengan beberapa sekolah untuk dapat mengurangi terjadinya kekerasan dan bullying terhadap anak di sekolah;
4. Melakukan koordinasi dengan APSAI (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia) dalam rangka kolaborasi program kegiatan.

Melalui kegiatan dan upaya-upaya tersebut diharapkan terjadi penurunan kasus terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak dan tertangani kasus yang terjadi secara tuntas.

Pencapaian SPM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa pelayanan dasar pada urusan pemerintahan yang ditetapkan sebagai SPM adalah urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
6. Sosial.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan mengampu ***urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar***, yaitu :

1. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Perberdayaan masyarakat dan desa.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada tahun 2024 jumlah program dan kegiatan yang diusulkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan terdiri : 8 Program, 18 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan.

Lokasi kegiatan di seluruh Kota Pekalongan dengan sasaran antara lain masyarakat, lembaga/organisasi wanita, kelompok remaja, LKK, anak, perempuan.

Pagu anggaran Rp 5.467.058.000,00.

Rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026, dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun TAHUN 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				**5.467.058.000**				**5.703.080.000**
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**5.467.058.000**				**5.703.080.000**
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**514.261.000**				**350.791.000**
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	***Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender***		**9,24 persen**	**150.940.000**			**11,09 persen**	**98.798.000**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun TAHUN 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Sub Kegiatan yang responsif gender*		16.67 persen	14.960.000			16.67 persen	47.785.000
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG								
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	4 Dokumen	14.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	47.785.000
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan sosialisasi/ advokasi Pemberdayaan Perempuan*		33.33 persen	15.590.000			40,00 persen	36.373.000
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi								

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun TAHUN 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	2 Dokumen	15.590.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	36.373.000
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan dharma wanita*		100.00 persen	120.390.000			100.00 persen	14.640.000
2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								
		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Kota Pekalongan	1 Lembaga	120.390.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Lembaga	14.640.000
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	***Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)***		**15,01 persen**	**78.062.000**			**15,01 persen**	**64.476.000**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun TAHUN 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ketercapaian pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota*		100 persen	9.770.000			100 persen	28.639.000
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	3 Dokumen	9.770.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	28.639.000
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani (IKK Output)*		100.00 persen	68.292.000			100.00 persen	35.837.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun TAHUN 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota								
		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	24 Layanan	68.292.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Layanan	35.837.000
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	***Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)***		**48,15 persen**	**215.615.000**			**55,56 persen**	**137.872.000**
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase forum anak yang aktif*		34.38 persen	215.615.000			40,63 persen	137.872.000
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun TAHUN 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	300 Orang	98.225.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		300 Orang	40.000.000
2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	5 Dokumen	96.770.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	55.000.000
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun TAHUN 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	2 Dokumen	20.620.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	42.872.000
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	***persentase pengaduan kasus anak yang terlayani***		**100,00 persen**	**69.644.000**			**100,00 persen**	49.645.000
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota (IKK Outcome)*		100.00 Persen	9.780.000			100.00 Persen	15.000.000
2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA								
		Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	Kota Pekalongan	1 Kegiatan	9.780.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kegiatan	15.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun TAHUN 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten / kota (IKK Outcome)*		100 persen	53.232.000			100 persen	23.225.000
2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK								
		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Kota Pekalongan	24 Layanan	53.232.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Layanan	23.225.000
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ketercapaian penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus*		100 persen	6.632.000			100 persen	11.420.000
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/								

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun TAHUN 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Kota Pekalongan	25 Orang	6.632.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 Orang	11.420.000
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**4.952.797.000**				**5.352.289.000**
2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja***		**100,00 persen**	**3.666.753.000**			**100,00 persen**	**3.412.954.000**
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*		100.00 Persen	20.762.000			100.00 Persen	19.686.000
2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	3 Dokumen	7.204.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	4.186.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun TAHUN 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	2 Dokumen	1.558.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	1.500.000
2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	15 Laporan	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Laporan	14.000.000
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah*		100.00 Persen	2.558.067.000			100.00 Persen	2.823.407.000
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	20 Orang/bulan	2.517.093.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Orang/bulan	2.775.257.000
2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi								

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun TAHUN 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Keuangan SKPD								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan	12 Dokumen	39.530.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	46.500.000
2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan	1 Laporan	1.444.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	1.650.000
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah*		100.00 Persen	3.650.000			100.00 Persen	8.639.000
2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Pekalongan	1 Paket	3.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	8.639.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun TAHUN 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah*		100.00 Persen	192.256.000			100.00 Persen	198.220.000
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan	4 Paket	1.710.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	750.000
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan	4 Paket	44.952.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	26.720.000
2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Pekalongan	4 Paket	2.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	750.000
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun TAHUN 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan	4 Paket	38.244.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	22.500.000
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pekalongan	2 Paket	4.380.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	5.000.000
2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pekalongan	2 Dokumen	2.530.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	2.500.000
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	150 Laporan	98.390.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		150 Laporan	140.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun TAHUN 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100.00 Persen	270.268.000			100.00 Persen	184.956.000
2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	4 Laporan	2.520.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	2.400.000
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Pekalongan	12 Laporan	107.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	78.856.000
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan	12 Laporan	160.348.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	103.700.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun TAHUN 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100.00 Persen	621.750.000			100.00 Persen	178.046.000
2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Pekalongan	13 Unit	71.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		16 Unit	65.000.000
2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pekalongan	3 Unit	535.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	102.246.000
2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun TAHUN 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pekalongan	69 Unit	14.490.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		69 Unit	10.800.000
2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	***Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan***		**83,33 persen**	**557.400.000**			**83,33 persen**	**1.240.847.000**
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	*Persentase Fasilitasi Kerja sama TNI dan Kelurahan*		11.11 persen	557.400.000			11.11 persen	1.240.847.000
2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota								
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	4 Dokumen	557.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	1.240.847.000
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang"***		**88,89 persen**	**32.528.000**			**88,89 persen**	**50.164.000**
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Persentase kinerja administrasi kelurahan*		100.00 persen	32.528.000			100.00 persen	50.164.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun TAHUN 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan								
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kota Pekalongan	2 Dokumen	32.528.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	50.164.000
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	***Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat***		**97,75 persen**	**696.116.000**			**97,75 persen**	**648.324.000**
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan*		100.00 persen	696.116.000			100.00 persen	648.324.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun TAHUN 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat								
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Pekalongan	1 Dokumen	130.182.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	165.475.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun TAHUN 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Pekalongan	2 Lembaga	54.894.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Lembaga	158.375.000
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna								
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kota Pekalongan	1 Laporan	49.770.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	86.200.000
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat								

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun TAHUN 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Pekalongan	1 Laporan	34.980.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	68.000.000
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga								
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Pekalongan	1 Dokumen	426.290.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	170.274.000
JUMLAH					**5.467.058.000**				**5.703.080.000**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2025, sebagai berikut :

NO			Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1			2	3	4
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	**5.467.058.000**
			2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**5.467.058.000**
			2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**514.261.000**
1			**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**150.940.000**
	1		**2.08.02.2.01**	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**14.960.000**
		1	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	14.960.000
	2		**2.08.02.2.02**	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**15.590.000**
		2	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	15.590.000
	3		**2.08.02.2.03**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**120.390.000**
		3	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	120.390.000
2			**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**78.062.000**
	4		2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	9.770.000

NO			Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1			2	3	4
		4	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	9.770.000
	5		**2.08.03.2.02**	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**68.292.000**
		5	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	68.292.000
3			**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**215.615.000**
	6		**2.08.06.2.02**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**215.615.000**
		6	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	98.225.000
		7	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	96.770.000
		8	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.620.000
4			**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**69.644.000**
	7		**2.08.07.2.01**	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**9.780.000**
		9	2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	9.780.000
	8		**2.08.07.2.02**	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**53.232.000**
		10	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	53.232.000

NO			Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1			2	3	4
	9		**2.08.07.2.03**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**6.632.000**
		11	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	6.632.000
			2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**4.952.797.000**
5			**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.666.753.000**
	10		**2.13.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**20.762.000**
		12	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.204.000
		13	2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.558.000
		14	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000
	11		**2.13.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.558.067.000**
		15	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.517.093.000
		16	2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.530.000
		17	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.444.000
	12		**2.13.01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**3.650.000**
		18	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3.650.000
	13		**2.13.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**192.256.000**
		19	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.710.000
		20	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.952.000
		21	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.050.000
		22	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.244.000
		23	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.380.000
		24	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.530.000
		25	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.390.000

NO			Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1			2	3	4
	14		**2.13.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**270.268.000**
		26	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.520.000
		27	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	107.400.000
		28	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	160.348.000
	15		**2.13.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**621.750.000**
		29	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.960.000
		30	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	535.300.000
		31	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.490.000
6,			**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**557.400.000**
	16		**2.13.03.2.01**	**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**	**557.400.000**
		32	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	557.400.000
7,			**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**32.528.000**
	17		**2.13.04.2.01**	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**32.528.000**
		33	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	32.528.000
8,			**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**696.116.000**
	18		**2.13.05.2.01**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**696.116.000**
		34	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang	130.182.000

NO			Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1			2	3	4
				Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
		35	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	54.894.000
		36	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	49.770.000
		37	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	34.980.000
		38	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	426.290.000
				JUMLAH	**5.467.058.000**

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2025 disusun sebagai upaya pencapaian Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan.

Memedomani dokumen perencanaan diatas, maka prioritas pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan pada tahun 2025, adalah:

1. Optimalisasi pengarusutaaan gender dan pemberdayaan perempuan;
2. Optimalisasi pengarusutamaan hak anak;
3. Peningkatan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
4. Optimalisasi peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
5. Peningkatan kinerja organisasi.

Segenap jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan (stakeholder) secara konsisten dapat mengupayakan tercapainya sasaran dan tujuan sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkeadilan, penganggaran yang responsif gender serta mewujudkan pemerintahan yang amanah.

Akhirnya Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2025 dapat sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditegaskan dalam RKP Nasional 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen rencana pembangunan secara nasional. Dengan demikian maka pencapaian hasil-hasil pembangunan daerah berkontribusi dalam pencapaian keberhasilan pembangunan secara nasional.

Pekalongan, 8 Agustus 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Pekalongan

PUJI WINARTI, SKM, M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP 19700502 199501 2 001

LAMPIRAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi	: 2.13.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 7.204.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 4.186.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.204.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daersh	3 Dokumen
Hasil	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100.00 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencansan Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 7.204.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 7.204.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.204.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.604.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.604.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.504.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.204.000,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp. 2.204.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	ASB 014 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Spesifikasi : -	38 x 2	Kegiatan Dokumen	29.000,00	0 %	Rp. 2.204.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Renstra Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 300.000,00**
	[-] Penggandaan Dokumen Renstra					**Rp. 300.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	580	Lembar	300,00	0 %	Rp. 174.000,00
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 2 warna laminasi, tebal < 5c...	3	Buku	42.000,00	0 %	Rp. 126.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 4.100.000,00**
	[#] Penyusunan Dokumen Renstra Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.100.000,00**
	[-] Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Renstra					**Rp. 4.100.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	20 x 5	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	20 x 5	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 600.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 600.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 600.000,00**
	[#] Penyusunan Dokumen Renstra Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 600.000,00**
	[-] Transport Lokal Penyusunan Dokumen Renstra					**Rp. 600.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	2 x 10	Orang Hari	30.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
					Jumlah :	**Rp. 7.204.000,00**

Kota Pekalongan, 8 Agustus 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

PUJI WINARTI, S.K.M.M.Kes.
NIP. 197005021995012001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH,S.Sos,MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi	: 2.13.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.558.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 1.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.558.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
Hasil	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100.00 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.558.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.558.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.558.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.558.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.558.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.558.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1,558,000,00
	[-] Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Rp. 1.558.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	ASB 016 Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Spesifikasi : -	38	Kegiatan	41.000,00	0 %	Rp. 1.558.000,00
					Jumlah :	Rp. 1.558.000,00

Kota Pekalongan, 8 Agustus 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

PUJI WINARTI, S.K.M.Kes
NIP. 197005021995012001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH,S.Sos,MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi	: 2.13.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 12.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 14.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan
Hasil	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100,00 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 12.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 12.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.100.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.100.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.100.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.100.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.200.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp. 1.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 x 4	Orang Bulan	300.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen SAKIP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 600.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 x 2	Orang Bulan	300.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen SPIP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 300.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 x 1	Orang Bulan	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 9.800.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 6.900.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 6.800.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.700.000,00**
	[#] Penyusunan Dokumen SAKIP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.160.000,00**
	[-] Penggandaan Dokumen SAKIP					**Rp. 1.160.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	3868	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.159.800,00
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	200	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 200,00
	[#] Penyusunan Dokumen SPIP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 540.000,00**
	[-] Penggandaan Dokumen SPIP					**Rp. 540.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1800	Lembar	300,00	0 %	Rp. 540.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 5.200.000,00**
	[#] Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.080.000,00**
	[-] Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja dan Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja					**Rp. 2.080.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	20 x 4	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 880.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	20 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen SAKIP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.640.000,00**
	[-] Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen SAKIP					**Rp. 1.640.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	20 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 440.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	20 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen SPIP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.480.000,00**
	[-] FGD Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)					**Rp. 820.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	20 x 1	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 220.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	20 x 1	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	[-] Rapat Koordinasi Pemantauan SPIP					**Rp. 660.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	15 x 4	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 660.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 3.000.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 3.000.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 3.000.000,00**
	[#] Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.000.000,00**
	[-] Transport Lokal Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah					**Rp. 3.000.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	2 x 50	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 12.000.000,00**

Kota Pekalongan, 8 Agustus 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

PUJI WINARTI, S.H.,M.M.Kes.
NIP. 197005021996012001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH,S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi	: 2.13.2.88.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.517.093.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 2.775.257.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.517.093.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100.00 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.517.093.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.517.093.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.517.093.000,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 1.486.341.000,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 982.480.000,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 887.846.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Gaji Pokok PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 697.846.000,00**
	[-] Acress					**Rp. 246.000,00**
	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	246.000,00	0 %	Rp. 246.000,00
	[-] Gaji Pokok PNS Gol II					**Rp. 142.800.000,00**
	Belanja Gaji Pokok PNS	4 x 14	Orang Bulan	2.550.000,00	0 %	Rp. 142.800.000,00
	[-] Gaji Pokok PNS Gol III					**Rp. 462.000.000,00**
	Belanja Gaji Pokok PNS	11 x 14	Orang Bulan	3.000.000,00	0 %	Rp. 462.000.000,00
	[-] Gaji Pokok PNS Gol IV					**Rp. 282.800.000,00**
	Belanja Gaji Pokok PNS	4 x 14	Orang Bulan	5.050.000,00	0 %	Rp. 282.800.000,00
5.1.01.01.01.0002	**Belanja Gaji Pokok PPPK**					**Rp. 94.834.000,00**
	[#] Gaji Pokok PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 94.834.000,00**
	[-] Acress					**Rp. 834.000,00**
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1	Tahun	834.000,00	0 %	Rp. 834.000,00
	[-] Gaji Pokok PPPK					**Rp. 93.800.000,00**
	Belanja Gaji Pokok PPPK	2 x 14	Orang Bulan	3.350.000,00	0 %	Rp. 93.800.000,00
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp. 86.003.000,00**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp. 72.281.000,00**
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 72.281.000,00**
	[-] Acress					**Rp. 181.000,00**
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	181.000,00	0 %	Rp. 181.000,00
	[-] Tunjangan Keluarga PNS Gol II					**Rp. 11.200.000,00**
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	4 x 14	Orang Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 11.200.000,00
	[-] Tunjangan Keluarga PNS Gol III					**Rp. 38.500.000,00**
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	11 x 14	Orang Bulan	250.000,00	0 %	Rp. 38.500.000,00
	[-] Tunjangan Keluarga PNS Gol IV					**Rp. 22.400.000,00**
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	4 x 14	Orang Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 22.400.000,00
5.1.01.01.02.0002	**Belanja Tunjangan Keluarga PPPK**					**Rp. 13.722.000,00**
	[#] Tunjangan Keluarga PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 13.722.000,00**
	[-] Acress					**Rp. 2.000,00**
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1	Tahun	2.000,00	0 %	Rp. 2.000,00
	[-] Tunjangan Keluarga PPPK					**Rp. 13.720.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2 x 14	Orang Bulan	490.000,00	0 %	Rp. 13.720.000,00
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp. 85.444.000,00**
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp. 85.444.000,00**
	[#] Tunjangan Jabatan PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 85.444.000,00**
	[-] Acress					**Rp. 674.000,00**
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Tahun	674.000,00	0 %	Rp. 674.000,00
	[-] Tunjangan Jabatan Eselon II					**Rp. 28.350.000,00**
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 x 14	Orang Bulan	2.025.000,00	0 %	Rp. 28.350.000,00
	[-] Tunjangan Jabatan Eselon III a					**Rp. 13.860.000,00**
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 x 11	Orang Bulan	1.260.000,00	0 %	Rp. 13.860.000,00
	[-] Tunjangan Jabatan Eselon III b					**Rp. 27.440.000,00**
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	2 x 14	Orang Bulan	980.000,00	0 %	Rp. 27.440.000,00
	[-] Tunjangan Jabatan Eselon IV a					**Rp. 15.120.000,00**
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	2 x 14	Orang Bulan	540.000,00	0 %	Rp. 15.120.000,00
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					**Rp. 122.916.000,00**
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					**Rp. 107.083.000,00**
	[#] Tunjangan Fungsional PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 107.083.000,00**
	[-] Acress					**Rp. 683.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	683.000,00	0 %	Rp. 683.000,00
	[-] Analis Kebijakan Muda					**Rp. 50.400.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	2 x 14	Orang Bulan	1.800.000,00	0 %	Rp. 50.400.000,00
	[-] Penggerak swadaya masyarakat					**Rp. 42.000.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 x 14	Orang Bulan	3.000.000,00	0 %	Rp. 42.000.000,00
	[-] Tunjangan Fungsional PNS (Arsiparis Terampil)					**Rp. 14.000.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 x 14	Orang Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 14.000.000,00
5.1.01.01.04.0002	**Belanja Tunjangan Fungsional PPPK**					**Rp. 15.833.000,00**
	[#] Tunjangan Fungsional PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 15.833.000,00**
	[-] Acress					**Rp. 153.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1	Tahun	153.000,00	0 %	Rp. 153.000,00
	[-] Tunjangan Fungsional PPPK					**Rp. 15.680.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2 x 14	Orang Bulan	560.000,00	0 %	Rp. 15.680.000,00
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp. 30.123.000,00**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp. 24.371.000,00**
	[#] Tunjangan Fungsional Umum PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 24.371.000,00**
	[-] Acress					**Rp. 11.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Tahun	11.000,00	0 %	Rp. 11.000,00
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PNS Gol II					**Rp. 7.560.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3 x 14	Orang Bulan	180.000,00	0 %	Rp. 7.560.000,00
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PNS Gol III					**Rp. 16.800.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	6 x 14	Orang Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 16.800.000,00
5.1.01.01.05.0002	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK**					**Rp. 5.752.000,00**
	[#] Tunjangan Fungsional Umum PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 5.752.000,00**
	[-] Acress					**Rp. 40.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1	Tahun	40.000,00	0 %	Rp. 40.000,00
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PPPK					**Rp. 5.712.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2 x 14	Orang Bulan	204.000,00	0 %	Rp. 5.712.000,00
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp. 59.833.000,00**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp. 50.696.000,00**
	[#] Tunjangan Beras PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 50.696.000,00**
	[-] Acress					**Rp. 506.000,00**
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Tahun	506.000,00	0 %	Rp. 506.000,00
	[-] Tunjangan Beras PNS Gol II					**Rp. 9.240.000,00**
	Belanja Tunjangan Beras PNS	4 x 14	Orang Bulan	165.000,00	0 %	Rp. 9.240.000,00
	[-] Tunjangan Beras PNS Gol III					**Rp. 26.950.000,00**
	Belanja Tunjangan Beras PNS	11 x 14	Orang Bulan	175.000,00	0 %	Rp. 26.950.000,00
	[-] Tunjangan Beras PNS Gol IV					**Rp. 14.000.000,00**
	Belanja Tunjangan Beras PNS	4 x 14	Orang Bulan	250.000,00	0 %	Rp. 14.000.000,00
5.1.01.01.06.0002	**Belanja Tunjangan Beras PPPK**					**Rp. 9.137.000,00**
	[#] Tunjangan Beras PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 9.137.000,00**
	[-] Acress					**Rp. 37.000,00**
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1	Tahun	37.000,00	0 %	Rp. 37.000,00
	[-] Tunjangan Beras PPPK					**Rp. 9.100.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2 x 14	Orang Bulan	325.000,00	0 %	Rp. 9.100.000,00
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp. 19.675.000,00**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp. 19.675.000,00**
	[#] Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 19.675.000,00**
	[-] Acress					**Rp. 179.000,00**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Tahun	179.000,00	0 %	Rp. 179.000,00
	[-] Tunjangan PPh Gaji Ke 13					**Rp. 4.900.000,00**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Tahun	4.900.000,00	0 %	Rp. 4.900.000,00
	[-] Tunjangan PPh Gaji Ke 14					**Rp. 4.900.000,00**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Tahun	4.900.000,00	0 %	Rp. 4.900.000,00
	[-] Tunjangan PPh PNS Gol III					**Rp. 6.336.000,00**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	11 x 12	Orang Bulan	48.000,00	0 %	Rp. 6.336.000,00
	[-] Tunjangan PPh PNS Gol IV					**Rp. 3.360.000,00**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4 x 12	Orang Bulan	70.000,00	0 %	Rp. 3.360.000,00
5.1.01.01.05	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp. 15.000,00**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp. 13.000,00**
	[#] Pembulatan Gaji PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 13.000,00**
	[-] Pembulatan Gaji PNS					**Rp. 13.000,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	13.000,00	0 %	Rp. 13.000,00
5.1.01.01.05.0002	**Belanja Pembulatan Gaji PPPK**					**Rp. 2.000,00**
	[#] Pembulatan Gaji PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.000,00**
	[-] Pembulatan Gaji PPPK					**Rp. 2.000,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1	Tahun	2.000,00	0 %	Rp. 2.000,00
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**					**Rp. 83.963.000,00**
5.1.01.01.09.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**					**Rp. 78.544.000,00**
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 78.544.000,00**
	[-] Acress					**Rp. 184.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1	Tahun	184.000,00	0 %	Rp. 184.000,00
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan PNS Gol II					**Rp. 16.800.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	4 x 12	Orang Bulan	350.000,00	0 %	Rp. 16.800.000,00
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan PNS Gol III					**Rp. 40.926.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	11 x 12	Orang Bulan	310.000,00	0 %	Rp. 40.920.000,00
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan PNS Gol IV					**Rp. 20.640.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	4 x 12	Orang Bulan	430.000,00	0 %	Rp. 20.640.000,00
5.1.01.01.09.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK**					**Rp. 5.419.000,00**
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.419.000,00**
	[-] Acress					**Rp. 19.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1	Tahun	19.000,00	0 %	Rp. 19.000,00
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					**Rp. 5.400.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2 x 12	Orang Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**					**Rp. 2.465.000,00**
5.1.01.01.10.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**					**Rp. 2.183.000,00**
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.183.000,00**
	[-] Acress					**Rp. 35.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1	Tahun	35.000,00	0 %	Rp. 35.000,00
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Gol II					**Rp. 384.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4 x 12	Orang Bulan	8.000,00	0 %	Rp. 384.000,00
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Gol III					**Rp. 1.188.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	11 x 12	Orang Bulan	9.000,00	0 %	Rp. 1.188.000,00
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Gol IV					**Rp. 576.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4 x 12	Orang Bulan	12.000,00	0 %	Rp. 576.000,00
5.1.01.01.10.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK**					**Rp. 282.000,00**
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 282.000,00**
	[-] Acress					**Rp. 6.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1	Tahun	6.000,00	0 %	Rp. 6.000,00
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					**Rp. 276.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	2 x 12	Orang Bulan	11.500,00	0 %	Rp. 276.000,00
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**					**Rp. 6.941.000,00**
5.1.01.01.11.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**					**Rp. 6.285.000,00**
	[#] Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 6.285.000,00**
	[-] Acress					**Rp. 45.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1	Tahun	45.000,00	0 %	Rp. 45.000,00
	[-] Iuran Jaminan Kematian PNS Gol II					**Rp. 1.104.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	4 x 12	Orang Bulan	23.000,00	0 %	Rp. 1.104.000,00
	[-] Iuran Jaminan Kematian PNS Gol III					**Rp. 3.696.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	11 x 12	Orang Bulan	28.000,00	0 %	Rp. 3.696.000,00
	[-] Iuran Jaminan Kematian PNS Gol IV					**Rp. 1.440.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	4 x 12	Orang Bulan	30.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
5.1.01.01.11.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK**					**Rp. 656.000,00**
	[#] Iuran Jaminan Kematian PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 656.000,00**
	[-] Acress					**Rp. 8.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1	Tahun	8.000,00	0 %	Rp. 8.000,00
	[-] Iuran Jaminan Kematian PPPK					**Rp. 648.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	2 x 12	Orang Bulan	27.000,00	0 %	Rp. 648.000,00
5.1.01.01.12	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN**					**Rp. 5.483.000,00**
5.1.01.01.12.0001	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS**					**Rp. 5.848.000,00**
	[#] Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 5.848.000,00**
	[-] Acress					**Rp. 76.000,00**
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1	Tahun	76.000,00	0 %	Rp. 76.000,00
	[-] Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Gol II					**Rp. 816.000,00**
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	4 x 12	Orang Bulan	17.000,00	0 %	Rp. 816.000,00
	[-] Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Gol III					**Rp. 3.036.000,00**
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	11 x 12	Orang Bulan	23.000,00	0 %	Rp. 3.036.000,00
	[-] Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Gol IV					**Rp. 1.920.000,00**
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	4 x 12	Orang Bulan	40.000,00	0 %	Rp. 1.920.000,00
5.1.01.01.12.0002	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK**					**Rp. 635.000,00**
	[#] Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 635.000,00**
	[-] Acress					**Rp. 11.000,00**
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1	Tahun	11.000,00	0 %	Rp. 11.000,00
	[-] Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK					**Rp. 624.000,00**
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	2 x 12	Orang Bulan	26.000,00	0 %	Rp. 624.000,00
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp. 1.030.752.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp. 412.301.000,00**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp. 409.431.000,00**
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 409.431.000,00**
	[-] Acresa					**Rp. 491.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Tahun	491.000,00	0 %	Rp. 491.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Beban Kerja Esalon II					**Rp. 56.000.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 x 14	Orang Bulan	4.000.000,00	0 %	Rp. 56.000.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Beban Kerja Esalon III a					**Rp. 43.400.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 x 14	Orang Bulan	3.100.000,00	0 %	Rp. 43.400.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Beban Kerja Esalon III b					**Rp. 84.000.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2 x 14	Orang Bulan	3.000.000,00	0 %	Rp. 84.000.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Beban Kerja Esalon IV a					**Rp. 47.600.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2 x 14	Orang Bulan	1.700.000,00	0 %	Rp. 47.600.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Beban Kerja Jabatan Fungsional					**Rp. 54.180.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3 x 14	Orang Bulan	1.290.000,00	0 %	Rp. 54.180.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Beban Kerja Staf Golongan II					**Rp. 48.160.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4 x 14	Orang Bulan	860.000,00	0 %	Rp. 48.160.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Beban Kerja Staf Golongan III					**Rp. 75.600.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	6 x 14	Orang Bulan	900.000,00	0 %	Rp. 75.600.000,00
5.1.01.02.01.0002	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK**					**Rp. 2.870.000,00**
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.870.000,00**
	[-] Acress					**Rp. 70.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1	Tahun	70.000,00	0 %	Rp. 70.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Beban Kerja PPPK					**Rp. 2.800.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	2 x 14	Orang Bulan	100.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
5.1.01.02.05	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN**					**Rp. 618.451.000,00**
5.1.01.02.05.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS**					**Rp. 614.146.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 614.146.800,00
	[-] Acress					Rp. 246.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1	Tahun	246.000,00	0 %	Rp. 246.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja Eselon II					Rp. 90.300.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 x 14	Orang Bulan	6.450.000,00	0 %	Rp. 90.300.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja Eselon III a					Rp. 70.000.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 x 14	Orang Bulan	5.000.000,00	0 %	Rp. 70.000.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja Eselon III b					Rp. 117.600.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2 x 14	Orang Bulan	4.200.000,00	0 %	Rp. 117.600.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja Eselon IV a					Rp. 81.200.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2 x 14	Orang Bulan	2.900.000,00	0 %	Rp. 81.200.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja Golongan II					Rp. 61.600.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	4 x 14	Orang Bulan	1.100.000,00	0 %	Rp. 61.600.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja Golongan III					Rp. 109.200.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	6 x 14	Orang Bulan	1.300.000,00	0 %	Rp. 109.200.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja Jabatan Fungsional					Rp. 84.000.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3 x 14	Orang Bulan	2.000.000,00	0 %	Rp. 84.000.000,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK					Rp. 4.305.000,00
	[#] Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.305.000,00
	[-] Acress					Rp. 105.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1	Tahun	105.000,00	0 %	Rp. 105.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja PPPK					Rp. 4.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	2 x 14	Orang Bulan	150.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
					Jumlah :	Rp. 2.517.093.000,00

Kota Pekalongan, 6 Agustus 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

PUJI WINARTI, S.K.M.M.Kes.
NIP. 197005031990012001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	19671109196031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH,S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi	: 2.13.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 39.530.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 46.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 39.530.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100.00 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 39.530.000,00**
5,1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 39.530.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 34.200.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 34.200.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 25.200.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 25.200.000,00**
	[#] Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 25.200.000,00**
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran SKPD					**Rp. 6.900.000,00**
	Bendahara Pengeluaran SKPD Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 2,5 milia...	1 x 12	Orang Bulan	575.000,00	0 %	Rp. 6.900.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan/Barang SKPD					**Rp. 7.200.000,00**
	Pejabat Penatausahaan Keuangan/Barang SKPD Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 2,5 milia...	1 x 12	Orang Bulan	600.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pengurusan Gaji					**Rp. 3.300.000,00**
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pengurusan Gaji Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 2,5 milia...	1 x 12	Orang Bulan	275.000,00	0 %	Rp. 3.300.000,00
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran SKPD					**Rp. 7.800.000,00**
	Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d 5 miliar	1 x 12	Orang Bulan	650.000,00	0 %	Rp. 7.800.000,00
5.1.01.03.08	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD**					**Rp. 9.000.000,00**
5.1.01.03.08.0002	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan**					**Rp. 9.000.000,00**
	[#] Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 9.000.000,00**
	[-] Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna					**Rp. 4.200.000,00**
	Pembantu Pengurus Barang Pengguna /Pengurus Barang Pembantu di KPA Spesifikasi : Nilai Aset Tetap di bawah 50 M	1 x 12	Orang Bulan	350.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
	[-] Honorarium Pengurus Barang Pengguna					**Rp. 4.800.000,00**
	Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi : Nilai Aset Tetap di bawah 50 M	1 x 12	Orang Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 5.330.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 530.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 530.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 530.000,00**
	[#] Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 530.000,00**
	[-] Penggandaan					**Rp. 530.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1766	Lembar	300,00	0 %	Rp. 529.800,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	200	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 4.800.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 4.800.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 4.800.000,00**
	[#] Kegiatan Perekaman Pada Aplikasi SIPD **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 4.800.000,00**
	[-] Banpot Input Data Pada Aplikasi SIPD					**Rp. 4,800,000,00**
	Banpot Input Deta Aplikasi Keuangan Daerah di hari libur Spesifikasi : -	1 x 8 x 12	Orang Hari Bulan	50.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
					Jumlah :	**Rp. 39.530.000,00**

Kota Pekalongan, 8 Agustus 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemajuan dan Perlindungan Anak

RUSI WINARTI, S.KM,M.Kes
NIP. 197005021995012004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.SI	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH,S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi	: 2.13.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.444.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 1.650.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.444.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100,00 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.444.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.444.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.444.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.444.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.444.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.444.000,00
	[#] Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.444.000,00
	[-] Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Rp. 1.444.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	ASB 015 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Spesifikasi : -	38	Kegiatan	38.000,00	0 %	Rp. 1.444.000,00
					Jumlah :	Rp. 1.444.000,00

Kota Pekalongan, 8 Agustus 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemntalan, dan Perlindungan Anak

PUJI WINARTI, S.K.M.M.Kes
NIP. 197003021995012001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S,ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH,S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi	: 2.13.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Oktober s.d November
Kelompok Sasaran	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 3.650.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 8.639.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.650.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100,00 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
Waktu Pelaksanaan	: Oktober s.d November
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 3.650.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.650.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.650.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.650.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.650.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah					Rp. 3.650.000,00
	[#] Pakaian Karnaval Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.650.000,00
	[-] Belanja Kostum Karnaval					Rp. 3.650.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja kostum karnaval Spesifikasi : -	0.73	Stel	5.000.000,00	0 %	Rp. 3.650.000,00
					Jumlah :	Rp. 3.650.000,00

Kota Pekalongan, 8 Agustus 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

HUJI WINARTI, S.KM,M.Kes.
NIP. 197005021995012001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.SI	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH,S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi	: 2.13.2.06.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.710.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 750.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.710.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100.00 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 1.710.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 1.710.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 1.710.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 1.710.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 1.710.000,00**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp. 1.710.000,00**
	[#] Penyediaan Komponen Instalarisi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.710.000,00**
	[-] Belanja Alat Listrik dan Elektronik					**Rp. 1.710.000,00**
	Lampu Bulb LED 14 W Spesifikasi : Philips	15	Buah	48.000,00	0 %	Rp. 720.000,00
	Stop Kontak Spesifikasi : -	13	Buah	50.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
	Lampu LED Spesifikasi : -	20	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 80.000,00
	Kabel Spesifikasi : 1 X 4 mm2	13	Meter	20.000,00	0 %	Rp. 260.000,00
					Jumlah :	**Rp. 1.710.000,00**

Kota Pekalongan, 8 Agustus 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

PUJI WINARTI, S.K.M.M.Kes.
NIP. 197005021995012001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH,S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi	: 2.13.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 44.952.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 26.720.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 44.952.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100,00 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 44.952.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 25.113.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.000.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.000.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.000.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.000.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.000.000,00
	[-] Belanja Honorarium Kasir					Rp. 400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 x 2	Orang Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[-] Belanja Honorarium PPTK					**Rp. 600.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 x 2	Orang Bulan	300.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 24.113.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 24.113.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 24.113.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 6.097.000,00**
	[6] Penyediaan Peralatan dan Perangkapan Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 6.097.000,00**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					**Rp. 6.097.000,00**
	Ballpoint Spesifikasi : Biasa	47	Buah	3.000,00	0 %	Rp. 141.000,00
	Binder Clips Spesifikasi : No 107	18	Dos	35.000,00	0 %	Rp. 630.000,00
	Buku Agenda Spesifikasi : 2011	3	Buah	47.000,00	0 %	Rp. 141.000,00
	Buku Folio Spesifikasi : Isi 100 lembar	2	Buah	32.000,00	0 %	Rp. 64.000,00
	Buku Kwarto Spesifikasi : Isi 100 lembar	2	Buah	18.000,00	0 %	Rp. 36.000,00
	Buku Kwitansi Spesifikasi : Panjang	4	Buah	30.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 38 lembar	29	Buah	5.000,00	0 %	Rp. 145.000,00
	Cutter Spesifikasi : lebar pisau 0,9 cm	10	Buah	8.000,00	0 %	Rp. 80.000,00
	Gunting Spesifikasi : Gunting FL 8,5"	10	Buah	21.000,00	0 %	Rp. 210.000,00
	Isi Staples Spesifikasi : No. 10	20	Pak	14.000,00	0 %	Rp. 280.000,00
	Isolasi Spesifikasi : Kecil, Bening	20	Buah	5.000,00	0 %	Rp. 100.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Lakban Spesifikasi : 2", Hitam	4	Roll	35.000,00	0 %	Rp. 140.000,00
	Lem kertas Spesifikasi : Stick	20	Buah	5.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
	Map Ordner Spesifikasi : Kertas	80	Buah	19.000,00	0 %	Rp. 1.520.000,00
	Spidol Spesifikasi : Permanent	50	Buah	31.000,00	0 %	Rp. 1.550.000,00
	Map Gantung Spesifikasi : Kertas	140	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 840.000,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 16.504.000,00**
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perangkapan Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 16.504.000,00**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					**Rp. 16.504.000,00**
	Amplop Spesifikasi : 110-PLS	42	Pak	14.000,00	0 %	Rp. 588.000,00
	Amplop Spesifikasi : 104 PPS	10	Pak	12.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
	Kertas Facsimile Spesifikasi : 30 x 210 mm	2	Roll	62.000,00	0 %	Rp. 124.000,00
	Kertas Folio Spesifikasi : bergaris	2	Pak	41.000,00	0 %	Rp. 82.000,00
	Kertas Foto Spesifikasi : Kwarto, isi 50	2	Pak	64.000,00	0 %	Rp. 128.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 ; 70 gr; 210 X297 mm	155	Rim	54.000,00	0 %	Rp. 8.370.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 ; 80 gr; 216 X 330 mm	124	Rim	58.000,00	0 %	Rp. 7.192.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 677.000,00**
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perangkapan Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 677.000,00**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					**Rp. 677.000,00**
	Refil Tinta Spesifikasi : 100 ml	10	Botol	36.000,00	0 %	Rp. 360.000,00
	Refil Tinta Spesifikasi : Photo Warna, 120 ml	3	Botol	99.000,00	0 %	Rp. 297.000,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 735.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[6] Penyediaan Peralatan dan Perangkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 735.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp. 735.000,00
	Mouse Spesifikasi : Optical Mouse, USB	3	Unit	100.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Flashdisk Spesifikasi : USB Flasdisk 8 Gb	5	Unit	87.000,00	0 %	Rp. 435.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 19.839.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 19.839.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 7.511.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 7.511.000,00
5.2.02.05.02.0094	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 7.511.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.511.000,00
	[-] Belanja Modal AC					Rp. 7.511.000,00
	A.C. Split Spesifikasi : Split, 1 PK	1	Unit	7.511.000,00	0 %	Rp. 7.511.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp. 3.000.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi					Rp. 3.000.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone					Rp. 3.000.000,00
	[8] UPTD PPA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000,00
	[-] Belanja Modal Smartphone Pelayanan UPTD					Rp. 3.000.000,00
	Handphone Spesifikasi : 4 GB RAM 128 GB ROM	1	Unit	3.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 9.328.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 8.500.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 8.500.000,00
	[8] Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.500.000,00
	[-] Belanja Modal Laptop					Rp. 8.500.000,00
	Laptop Office Entry Level Spesifikasi : Setara Proccessor Core I3 Ram 4 GB SSD 256 gb VGA ...	1	Unit	8.500.000,00	0 %	Rp. 8.500.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 828.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 828.000,00
	[8] Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 828.000,00
	[-] Belanja Modal Webcam					Rp. 828.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Webcam Spesifikasi : 1280 x 720 pixels, photos up to 8 megapixels. Buil...	1	Unit	828.000,00	0 %	Rp. 828.000,00
					Jumlah :	Rp. 44.952.000,00

Kota Pekalongan, 8 Agustus 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak

RUJI WINARTI, S.KM,M.Kes.
NIP. 197006021995012001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH,S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi	: 2.13.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.050.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 750.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.050.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100,00 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 44,952.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 25.113.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 1.000.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 1.000.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 1.000.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 1.000.000,00**
	[8] Penyediaan Perlatan dan Perengkapan Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.000.000,00**
	[-] Belanja Honorarium Kasir					**Rp. 400.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 x 2	Orang Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[-] Belanja Honorarium PPTK					**Rp. 600.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 x 2	Orang Bulan	300.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 24.113.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 24.113.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 24.113.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 6.097.000,00**
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 6.097.000,00**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					**Rp. 6.097.000,00**
	Ballpoint Spesifikasi : Biasa	47	Buah	3.000,00	0 %	Rp. 141.000,00
	Binder Clips Spesifikasi : No 107	18	Dos	35.000,00	0 %	Rp. 630.000,00
	Buku Agenda Spesifikasi : 2011	3	Buah	47.000,00	0 %	Rp. 141.000,00
	Buku Folio Spesifikasi : Isi 100 lembar	2	Buah	32.000,00	0 %	Rp. 64.000,00
	Buku Kwarto Spesifikasi : Isi 100 lembar	2	Buah	18.000,00	0 %	Rp. 36.000,00
	Buku Kwitansi Spesifikasi : Panjang	4	Buah	30.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 38 lembar	29	Buah	5.000,00	0 %	Rp. 145.000,00
	Cutter Spesifikasi : lebar pisau 0,9 cm	10	Buah	8.000,00	0 %	Rp. 80.000,00
	Gunting Spesifikasi : Gunting FL 8,5"	10	Buah	21.000,00	0 %	Rp. 210.000,00
	Isi Staples Spesifikasi : No. 10	20	Pak	14.000,00	0 %	Rp. 280.000,00
	Isolasi Spesifikasi : Kecil, Bening	20	Buah	5.000,00	0 %	Rp. 100.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Lakban Spesifikasi : 2", Hitam	4	Roll	35.000,00	0 %	Rp. 140.000,00
	Lem kertas Spesifikasi : Stick	20	Buah	5.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
	Map Ordner Spesifikasi : Kertas	80	Buah	19.000,00	0 %	Rp. 1.520.000,00
	Spidol Spesifikasi : Permanent	50	Buah	31.000,00	0 %	Rp. 1.550.000,00
	Map Gantung Spesifikasi : Kertas	140	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 840.000,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 16.684.000,00**
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perangkapan Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 16.684.000,00**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					**Rp. 16.684.000,00**
	Amplop Spesifikasi : 110-PLS	42	Pak	14.000,00	0 %	Rp. 588.000,00
	Amplop Spesifikasi : 104 PPS	10	Pak	12.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
	Kertas Facsimile Spesifikasi : 30 x 210 mm	2	Roll	62.000,00	0 %	Rp. 124.000,00
	Kertas Folio Spesifikasi : bergaris	2	Pak	41.000,00	0 %	Rp. 82.000,00
	Kertas Foto Spesifikasi : Kwarto, isi 50	2	Pak	64.000,00	0 %	Rp. 128.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 ; 70 gr; 210 X297 mm	155	Rim	54.000,00	0 %	Rp. 8.370.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 ; 80 gr; 216 X 330 mm	124	Rim	58.000,00	0 %	Rp. 7.192.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 677.000,00**
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perangkapan Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 677.000,00**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					**Rp. 677.000,00**
	Refil Tinta Spesifikasi : 100 ml	10	Botol	38.000,00	0 %	Rp. 380.000,00
	Refil Tinta Spesifikasi : Photo Warna, 120 ml	3	Botol	99.000,00	0 %	Rp. 297.000,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 735.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perangkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 735.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp. 735.000,00
	Mouse Spesifikasi : Optical Mouse, USB	3	Unit	100.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Flashdisk Spesifikasi : USB Flasdisk 8 Gb	5	Unit	87.000,00	0 %	Rp. 435.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 19,839,000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 19,839,000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 7.511.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 7.511.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 7.511.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perangkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.511.000,00
	[-] Belanja Modal AC					Rp. 7.511.000,00
	A.C. Split Spesifikasi : Split, 1 PK	1	Unit	7.511.000,00	0 %	Rp. 7.511.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp. 3.000.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi					Rp. 3.000.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone					Rp. 3.000.000,00
	[#] UPTD PPA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000,00
	[-] Belanja Modal Smartphone Pelayanan UPTD					Rp. 3.000.000,00
	Handphone Spesifikasi : 4 GB RAM 126 GB ROM	1	Unit	3.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 9.328.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 8.500.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 8.500.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perangkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.500.000,00
	[-] Belanja Modal Laptop					Rp. 8.500.000,00
	Laptop Office Entry Level Spesifikasi : Setara Processor Core i3 Ram 4 GB SSD 256 gb VGA ...	1	Unit	8.500.000,00	0 %	Rp. 8.500.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 828.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 828.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perangkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 828.000,00
	[-] Belanja Modal Webcam					Rp. 828.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Webcam Spesifikasi : 1280 x 720 pixels, photos up to 8 megapixels, Buil...	1	Unit	828.000,00	0 %	Rp. 828.000,00
					Jumlah :	Rp. 2.059.000,00

Kota Pekalongan, 5 Agustus 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

PUJI WINARTI, S.Kom,M.Kes.
NIP. 197006021995012001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S,ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH,S,Sos,MM	19721013199603 2004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi	: 2.13.2.06.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 38.244.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 22.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 38.244.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100.00 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 38.244.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 38.244.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.100.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.100.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.100.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.100.000,00
	[8] Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.100.000,00
	[-] Belanja Honorarium Kasir					Rp. 880.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 x 4	Orang Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	[-] Belanja Honorarium PPTK					**Rp. 300.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1	Orang / Bulan	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 37.144.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 37.144.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 37.144.000,00**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp. 3.600.000,00**
	[#] Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.600.000,00**
	[-] Belanja Bahan Logistik Kantor					**Rp. 3.600.000,00**
	Gas LPG Spesifikasi : 12 kg	1.5 x 12	Buah Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp. 18.784.000,00**
	[#] Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 18.784.000,00**
	[-] Belanja Bahan Logistik Kantor					**Rp. 18.784.000,00**
	Isi Ulang Air Mineral Galon Spesifikasi : -	19 x 11	Galon Bulan	23.000,00	0 %	Rp. 4.807.000,00
	Gula Pasir Spesifikasi : -	15 x 11	Kg Bulan	15.000,00	0 %	Rp. 2.475.000,00
	Kopi bubuk Spesifikasi : 165gr	10 x 11	Buah Bulan	14.000,00	0 %	Rp. 1.540.000,00
	Mie Instant Spesifikasi : -	2 x 11	Dus Bulan	125.000,00	0 %	Rp. 2.750.000,00
	Teh Tubruk Spesifikasi : -	10 x 11	Pak Bulan	45.000,00	0 %	Rp. 4.950.000,00
	Teh Celup Spesifikasi : -	9.05 x 11	Pak Bulan	11.000,00	0 %	Rp. 1.095.050,00
	Kopi sachet Spesifikasi : Renteng	4 x 11	Buah Bulan	18.000,00	0 %	Rp. 792.000,00
	Air Mineral gelas Spesifikasi : -	11	Dus	34.000,00	0 %	Rp. 374.000,00
	Natura Spesifikasi : -	950	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 950,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 14.760.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 14.768.000,00**
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat					**Rp. 14.768.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	36 x 10	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 10.800.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	36 x 10	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 3.960.000,00
					Jumlah :	**Rp. 38.244.900,00**

Kota Pekalongan, 8 Agustus 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

PUJI WINARTI, S.K.M.,M.Kes.
NIP. 197006021995012001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	19650622194031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH,S.Sos,MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi	: 2.13.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 4.380.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 5.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.380.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100,00 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 4.380.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.380.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.380.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.380.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.380.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.380.000,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.380.000,00
	[-] Belanja Cetak					Rp. 3.115.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku agenda surat masuk Spesifikasi : -	2	Buku	20.000,00	0 %	Rp. 40.000,00
	Cetak stopmap dinas Spesifikasi : -	250	Buah	7.000,00	0 %	Rp. 1.750.000,00
	Cetak Kartu Kendali Masuk Spesifikasi : -	48	Buku	25.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Cetak Lembar Disposisi Spesifikasi : -	1	Rim	125.000,00	0 %	Rp. 125.000,00
	[-] Fotocopy					Rp. 1.265.000,00
	Fotocopy Spesifikasi : A4	4216	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.264.800,00
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	200	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 200,00
					Jumlah :	Rp. 4.380.000,00

Kota Pekalongan, 6 Agustus 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

PUJI WINARTI, S.KM,M.Kes.
NIP. 197005021995012001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.SI	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH,S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi	: 2.13.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.530.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 2.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.530.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100.00 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.530.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.530.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.530.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.000,00
	[8] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.000,00
	[-] Belanja Langganan Surat Kabar					Rp. 4.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	4000	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 4.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 2.526.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 2.526.000,00**
5.1.02.02.01.0052	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**					**Rp. 2.526.000,00**
	[#] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.526.000,00**
	[-] Belanja Langganan Surat Kabar					**Rp. 2.526.000,00**
	Langganan Koran Regional Spesifikasi : -	1 x 12	Buah Bulan	125.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Langganan Koran Lokal Spesifikasi : -	0.95 x 12	Buah Bulan	90.000,00	0 %	Rp. 1.026.000,00
					Jumlah :	**Rp. 2.530.000,00**

Kota Pekalongan, 8 Agustus 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

PUJI WINARTI, S.K.M.,M.Kes.
NIP. 197005021995012001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH,S.Sos,MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi	: 2.13.2.06.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 98.390.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 140.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 98.390.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100,00 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 98.390.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 98.390.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.750.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.750.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.750.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.750.000,00
	[8] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.750.000,00
	[-] Honorarium Kasir					Rp. 1.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 x 5	Orang Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] Honorarium PPTK					**Rp. 1.750.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta ...	1 x 5	Orang Bulan	350.000,00	0 %	Rp. 1.750.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 95.648.000,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 95.648.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 95.648.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 95.648.000,00**
	[#] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 95.648.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi					**Rp. 82.304.000,00**
	Transport Perjalanan Dinas Mobil dibawah 1700cc (BBM Pertamax/Dexlite) Spesifikasi : Semarang	53	Kali	286.000,00	0 %	Rp. 15.158.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Sekitar Kota Pekalongan Spesifikasi : Kabupaten (Batang,Pekalongan dan Pemalang)	20	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Jasa Jalan Tol Spesifikasi : -	250000 x 52	Rupiah Kali	1,00	0 %	Rp. 13.000.000,00
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : -	370000 x 100	Rupiah Orang / Hari	1,00	0 %	Rp. 37.000.000,00
	Biaya Transportasi darat (PP) Spesifikasi : Semarang	30	Orang / Kali	470.000,00	0 %	Rp. 14.100.000,00
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : -	46000	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 46.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah di Luar Pulau Jawa					**Rp. 13.336.000,00**
	Jasa Jalan Tol Spesifikasi : -	1000000 x 4	Rupiah Kali	1,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : Kepulauan Riau	4 x 2	Orang	1.167.000,00	0 %	Rp. 9.336.000,00
					Jumlah :	**Rp. 98.390.000,00**

Kota Pekalongan, 6 Agustus 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

PUJI WINARTI, S.KM,M.Kes.
NIP. 197005021995012001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst.		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.SI	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH,S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi	: 2.13.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.520.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 2.400.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.520.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan
Hasil	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.520.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.520.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.520.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 920.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 920.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 920.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 800.000,00
	[-] Belanja Material					Rp. 800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Material 10000 Spesifikasi : -	80	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	[#] UPTD PPA **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 120.000,00**
	Material 10000 Spesifikasi : -	12	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 1.600.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 1.600.000,00**
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp. 1.600.000,00**
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.600.000,00**
	[-] Banpot Caraka					**Rp. 1.600.000,00**
	Banpot caraka Spesifikasi : -	40	Orang / Kali	40.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
					Jumlah :	**Rp. 2,520.000,00**

Kota Pekalongan, 8 Agustus 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

PUJI WINARTI, S.K.M.,M.Kes.
NIP. 197005021996012001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH,S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi	: 2.13.2.06.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.13.01.2.06 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 160.348.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 103.700.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 160.348.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 160.348.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 160.348.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 160.348.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.826.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.826.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 7.826.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.826.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Peralatan/Bahan Kebersihan Kantor					**Rp. 7.828.000,00**
	Cairan Pembersih Kamar Mandi Spesifikasi : -	3 x 12	Botol Bulan	15.000,00	0 %	Rp. 540.000,00
	Pembersih Spesifikasi : Kaca, Besar	3 x 12	Botol Bulan	24.000,00	0 %	Rp. 864.000,00
	Pembersih Spesifikasi : Lantai, 900 ml / 800 ml (Refill)	5 x 12	Buah Bulan	28.000,00	0 %	Rp. 1.680.000,00
	Pewangi Spesifikasi : Ruangan	5 x 12	Buah Bulan	22.000,00	0 %	Rp. 1.320.000,00
	Refill Sabun cuci tangan Spesifikasi : -	3 x 12	Buah Bulan	20.000,00	0 %	Rp. 720.000,00
	sabun cuci piring Spesifikasi : 900ml	4 x 12	Buah Bulan	30.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
	Tissue Spesifikasi : Kotak, 120 play sheets/ 2 ply	84	Dos	15.000,00	0 %	Rp. 1.260.000,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : -	4000	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 4.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 152.520.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 144.600.000,00**
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp. 120.000.000,00**
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 120.000.000,00**
	[-] Belanja Jasa Penjaga Malam					**Rp. 48.000.000,00**
	Tenaga Kebersihan DPMPPA Spesifikasi : -	2 x 12	Orang Bulan	2.000.000,00	0 %	Rp. 48.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					**Rp. 72.000.000,00**
	Tenaga Kebersihan DPMPPA Spesifikasi : -	3 x 12	Orang Bulan	2.000.000,00	0 %	Rp. 72.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	**Belanja Jasa Tenaga Supir**					**Rp. 24.600.000,00**
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 24.600.000,00**
	[-] Belanja Jasa Pengemudi / Driver					**Rp. 24.600.000,00**
	Jasa Tenaga Sopir Operasional Spesifikasi : -	1 x 12	Orang Bulan	2.050.000,00	0 %	Rp. 24.600.000,00
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 7.920.000,00**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 6.912.000,00**
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 6.912.000,00**
	[-] Iuran BPJS Kesehatan Non ASN					**Rp. 6.912.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi : -	96000 x 6 x 12	Rupiah Orang Bulan	1,00	0 %	Rp. 6.912.000,00
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 432.000,00**
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 432.000,00**
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					**Rp. 432.000,00**
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi : -	6000 x 6 x 12	Rupiah Orang Bulan	1,00	0 %	Rp. 432.000,00
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp. 576.000,00**
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 576.000,00**
	[-] Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					**Rp. 576.000,00**
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi : -	8000 x 6 x 12	Rupiah Orang Bulan	1,00	0 %	Rp. 576.000,00
					Jumlah :	**Rp. 160.348.000,00**

Kota Pekalongan, 8 Agustus 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

PUJI WINARTI, S.KM,M.Kes.
NIP. 197005021995012001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091986031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH,S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi	: 2.13.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 71.960.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 65.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 71.960.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit
Hasil	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 71.960.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 71.960.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 71.960.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 36.960.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 36.960.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 36.960.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 36.960.000,00
	[-] BBM Mobil Kepala Dinas					Rp. 14.784.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BBM Mobil Jabatan Eselon II b & III (Ka.Dinas/Badan, Ka.Kantor, Kabag) Spesifikasi : BBM Pertamax (4 L/hr x Rp.14.000), max 22 hari/bln	1 x 22 x 12	Unit Hari Bulan	56.000,00	0 %	Rp. 14.784.000,00
	[-] BBM Mobil Operasional					**Rp. 22.175.000,00**
	BBM Mobil Operasional Sekretariat Dinas Spesifikasi : BBM Pertamax (3 L/hr x Rp.14.000), max 22 hari/bln	2 x 22 x 12	Unit Hari Bulan	42.000,00	0 %	Rp. 22.175.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 7.500.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 7.500.000,00**
5.1.02.02.01.0007	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp. 7.500.000,00**
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 7.500.000,00**
	[-] Belanja Perpanjangan STNK					**Rp. 7.500.000,00**
	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 (Station Wagon/Pick Up/sejenis)	3 x 1	Unit Tahun	1.500.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang Spesifikasi : Sepeda Motor/Kendaraan Bermotor Roda Dua :	10 x 1	Unit Tahun	300.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 27.500.000,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 27.500.000,00**
5.1.02.03.02.0038	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua**					**Rp. 4.975.000,00**
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.975.000,00**
	[-] Belanja Servis / Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua					**Rp. 4.975.000,00**
	Service dan suku cadang Spesifikasi : Sepeda Motor/Kendaraan Bermotor Roda Dua :	9.95 x 1	Unit Tahun	500.000,00	0 %	Rp. 4.975.000,00
5.1.02.03.02.0040	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus**					**Rp. 22.525.000,00**
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 22.525.000,00**
	[-] Belanja Servis / Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat (Mobil Dinas)					**Rp. 22.525.000,00**
	Service dan suku cadang Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 (Station Wagon/Pick Up/sejenis)	2.65	Unit	8.500.000,00	0 %	Rp. 22.525.000,00
					Jumlah :	**Rp. 71.960.000,00**

Kota Pekalongan, 8 Agustus 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

PUJI WINARTI, S.K.M.,M.Kes.
NIP. 197005021995012001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131998032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi	: 2.13.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 535.300.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 102.246.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 535.300.000,00
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit
Hasil	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 535.300.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 2.175.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 2.175.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 2.175.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 2.175.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 2.175.000,00**
	[0] Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.175.000,00**
	[-] Kasir					**Rp. 825.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincí Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 500 juta ...	1 x 3	Orang Bulan	275.000,00	0 %	Rp. 825.000,00
	[-] PPTK					**Rp. 1.350.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 500 juta ...	1 x 3	Orang Bulan	450.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 533.125.000,00**
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**Rp. 533.125.000,00**
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**					**Rp. 533.125.000,00**
5.2.03.01.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**					**Rp. 533.125.000,00**
5.2.03.01.01.0001	**Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor**					**Rp. 533.125.000,00**
	[#] Pemeliharaan Gedung Kantor DPMPPA **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 33.125.000,00**
	[-] Pemeliharaan Gedung Kantor DPMPPA Lama					**Rp. 33.125.000,00**
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Spesifikasi : Belanja modal yang bersifat kontraktual	33125000	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 33.125.000,00
	[#] Rehab Gedung Kantor DPMPPA **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 500.000.000,00**
	[-] Rehab Gedung Kantor DPMPPA Jalan Sriwijaya					**Rp. 500.000.000,00**
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Spesifikasi : Belanja modal yang bersifat kontraktual	500000000	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 500.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 535.300.000,00**

Kota Pekalongan, 6 Agustus 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

PUJI WINARTI, S.H.,M.M.Kes.
NIP. 197005021996012001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH,S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi	: 2.13.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pringrejo
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 14.490.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 10.800.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 14.490.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	69 Unit
Hasil	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Pringrejo
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 14.490.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 14.490.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 14.490.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 14.490.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 14.490.000,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp. 5.265.000,00
	[#] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.265.000,00
	[-] Pemeliharaan AC					Rp. 5.265.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	AC Split sd 1 PK Spesifikasi : Ringan	13	Buah	405.000,00	0 %	Rp. 5.265.000,00
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp. 4.125.000,00**
	[#] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.125.000,00**
	[-] Pemeliharaan Printer					**Rp. 4.125.000,00**
	Printer Spesifikasi : Ringan	13.75	Unit	300.000,00	0 %	Rp. 4.125.000,00
5.1.02.03.02.0409	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer**					**Rp. 5.100.000,00**
	[#] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.100.000,00**
	[-] Pemeliharaan PC dan Laptop					**Rp. 5.100.000,00**
	Pekerjaan Spesifikasi : -	300000 x 17	Rupiah Unit	1,00	0 %	Rp. 5.100.000,00
					Jumlah :	**Rp. 14.490.000,00**

Kota Pekalongan, 8 Agustus 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

PUJI WINARTI, S.H.,M.M.Kes.
NIP. 197005021995012001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	195506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.SI	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH,S.Sos,MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi	: 2.13.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 107.400.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 78.856.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 107.400.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 107.400.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 107.400.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 107.400.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.200.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.200.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 1.200.000,00
	[#] UPTD PPA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Kuota Internet (Pelayanan UPTD PPA)					Rp. 1.200.000,00
	Kuota Internet 1 G Spesifikasi : -	4 x 12	Pcs Bulan	25.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 106.200.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 106.200.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 4.800.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.800.000,00
	[-] Belanja Tagihan Telepon					Rp. 4.800.000,00
	Beban Jasa telepon Spesifikasi : -	400000 x 12	Rupiah Bulan	1,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 9.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.000.000,00
	[-] Belanja Tagihan Air					Rp. 9.000.000,00
	Beban Jasa air Spesifikasi : -	750000 x 12	Rupiah Bulan	1,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 62.400.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 62.400.000,00
	[-] Belanja Tagihan Listrik					Rp. 62.400.000,00
	Beban Jasa listrik Spesifikasi : -	5200000 x 12	Rupiah Bulan	1,00	0 %	Rp. 62.400.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 30.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 30.000.000,00
	[-] Belanja Tagihan Internet					Rp. 30.000.000,00
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi : -	2500000 x 12	Rupiah Bulan	1,00	0 %	Rp. 30.000.000,00
					Jumlah :	Rp. 107.400.000,00

Kota Pekalongan, 6 Agustus 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

PUJI WINARTI, S.KM,M.Kes.
NIP. 197005021995012001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	195508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.SI	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH,S.Sos,MM	197210131995032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Unit Organisasi	: 2.13.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan	: 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: OPD se Kota Pekalongan, Masyarakat/Pegiat Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 14.960.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 47.785.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	9,24 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 14.960.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen
Hasil	Persentase Sub Kegiatan yang responsif gender	16,67 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
6	BELANJA DAERAH					Rp. 14.960.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 14.960.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.250.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.250.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.250.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.250.000,00
	[8] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.250.000,00
	[-] Kasir					Rp. 800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 x 4	Orang Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	[-] PPTK					**Rp. 450.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 500 juta ...	1 x 1	Orang Bulan	450.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 13.710.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 2.070.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 2.070.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 90.000,00**
	[#] Desk GAP GBS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 90.000,00**
	[-] Fotocopy					**Rp. 90.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : A4	300	Lembar	300,00	0 %	Rp. 90.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 1.980.000,00**
	[#] Desk GAP GBS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.980.000,00**
	[-] Snack Desk					**Rp. 1.980.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	90 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 1.980.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 11.640.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 11.640.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 3.960.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.960.000,00**
	[-] Monev PPRG					**Rp. 3.960.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan vertifikasi/monitoring/eva,..	2 x 66	Orang Hari	30.000,00	0 %	Rp. 3.960.000,00
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 7.680.000,00**
	[#] ASB 003 - Sosialisasi Tatap Muka Peserta Pegawai - Dalam Kantor - Penuh Hari **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 7.680.000,00**
	[-] Advokasi Tim PPRG					**Rp. 3.840.000,00**
	ASB 003 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA PEGAWAI - DALAM KANTOR - PENUH HARI Spesifikasi : -	40 x 1	Orang Hari	96.000,00	0 %	Rp. 3.840.000,00
	[-] Sosialisasi Evaluasi PUG					**Rp. 3.840.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	ABB 003 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA PEGAWAI - DALAM KANTOR - PENUH HARI Spesifikasi : -	40 x 1	Orang Hari	96.000,00	0 %	Rp. 3.840.000,00
					Jumlah :	Rp. 14.980.000,00

Kota Pekalongan, 8 Agustus 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

PUJI WINARTI, S.KM,M.Kes.
NIP. 197005121995122001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196803101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH,S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Unit Organisasi	: 2.13.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan	: 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Forkom Puspa (Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 15.590.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 38.373.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	9,24 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.590.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen
Hasil	Persentase Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan sosialisasi/ advokasi Pemberdayaan Perempuan	33,33 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 15.590.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 15.590.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 3.650.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 3.650.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 3.650.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 3.650.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.650.000,00**
	[-] Kasir					**Rp. 1.400.000,00**
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 x 7	Orang Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	[-] PPTK					**Rp. 2.250.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 500 juta ...	1 x 5	Orang Bulan	450.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 11.940.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 1.830.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 1.830.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 190.000,00**
	[#] Cetak dan Penggandaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.000,00**
	[-] Cetak dan Penggandaan					**Rp. 1.000,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	1000	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 1.000,00
	[#] Rakor Forkom Puspa **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 189.000,00**
	[-] Fotocopy Rakor Forkam Puspa					**Rp. 189.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : A4	630	Lembar	300,00	0 %	Rp. 189.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 1.640.000,00**
	[#] Rakor Forkom Puspa **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.640.000,00**
	[-] Makan Rakor Forkom Puspa					**Rp. 1.200.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	40 x 1	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[-] Snack Rakor Forkom Puspa					**Rp. 440.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	40 x 1	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 440.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 60.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 60.000,00**
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp. 60.000,00**
	[#] Rakor Forkom Puspa **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 60.000,00**
	[-] Jasa Kebersihan Rakor fokom puspa					**Rp. 60.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tenaga Kebersihan Rapat/Pertemuan Spesifikasi : -	2 x 1	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 60.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 10.050.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 10.050.000,00**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 10.050.000,00**
	[#] ASB 001 - Sosialisasi Tatap Muka Peserta Masyarakat - Dalam Kantor - Penuh Hari **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 8.050.000,00**
	[-] Advokasi PUG					**Rp. 8.050.000,00**
	ASB 001 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - PENUH HARI Spesifikasi : -	50 x 1	Orang Hari	161.000,00	0 %	Rp. 8.050.000,00
	[#] Rakor Forkom Puspa **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.000.000,00**
	[-] Transport Rakor Forkom puspa					**Rp. 2.000.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	40 x 1	Orang Hari	50.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 15.590.000,00**

Kota Pekalongan, 6 Agustus 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

PUJI WINARTI, S.E, M.M.Kes.
NIP. 197009021995012001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH,S.Sos,MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Unit Organisasi	: 2.13.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan	: 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dharma Wanita Persatuan Kota Pekalongan Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 125.390.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 14.540.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	9,24 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 125.390.000,00
Keluaran	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga
Hasil	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan dharma wanita	100,00 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 120,390,000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 120,390,000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 1,800,000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 1,800,000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 1,800,000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 1,800,000,00**
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1,800,000,00**
	[-] Kasir					**Rp. 1,350,000,00**
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta ...	1 x 6	Orang Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
	[-] PPTK					**Rp. 450,000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 500 juta ...	1 x 1	Orang Bulan	450.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 118,590,000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 10,273,000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 10,273,000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1,253,000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 99,000,00**
	[-] Fotocopy (Pokir)					**Rp. 99,000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : A4	330	Lembar	300,00	0 %	Rp. 99.000,00
	[#] DWP (Tambahan) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 734,000,00**
	[-] Cetak dan Penggandaan					**Rp. 2,000,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	2000	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 2.000,00
	[-] Fotocopy (tambahan)					**Rp. 732,000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : A4	2440	Lembar	300,00	0 %	Rp. 732.000,00
	[#] HUT DWP **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 420,000,00**
	[-] Fotocopy					**Rp. 420,000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : A4	1400	Lembar	300,00	0 %	Rp. 420.000,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 297,000,00**
	[#] HUT DWP **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 297,000,00**
	[-] Spanduk HUT DWP (3 x 1,5 m)					**Rp. 297,000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	4.5 x 1	Meter Buah	66.000,00	0 %	Rp. 297.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 1.400.000,00**
	[#] HUT DWP **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.400.000,00**
	[-] Taman HUT DWP					**Rp. 1.400.000,00**
	Dekorasi Taman Acara Tingkat Kota Spesifikasi : -	1	Kegiatan	1.400.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 7.323.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.870.000,00**
	[-] Snack Rakor Pengurus DWP					**Rp. 1.870.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	34 x 5	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 1.870.000,00
	[#] Halal Bi Halal DWP **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.583.000,00**
	[-] Makan HBH DWP (50 orang x 1 kali)					**Rp. 1.890.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	63 x 1	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.890.000,00
	[-] Snack HBH DWP (50 org x 1 kali)					**Rp. 693.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	63 x 1	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 693.000,00
	[#] HUT DWP **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.870.000,00**
	[-] Makan HUT DWP					**Rp. 2.100.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	70 x 1	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	[-] Snack HUT DWP					**Rp. 770.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	70 x 1	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 770.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 650.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 650.000,00**
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp. 150.000,00**
	[#] HUT DWP **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 150.000,00**
	[-] Jasa kebersihan HUT DWP					**Rp. 150.000,00**
	Tenaga Kebersihan Rapat/Pertemuan Spesifikasi : -	5 x 1	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**Rp. 500.000,00**
	[#] HUT DWP **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 500.000,00**
	[-] MC HUT DWP					**Rp. 500.000,00**
	MC Spesifikasi : Lokal	1	Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 107.567.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 107.567.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 107,667,000,00**
	[#] ASB 001 - Sosialisasi Tatap Muka Peserta Masyarakat - Dalam Kantor - Penuh Hari **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 104,167,000,00**
	[-] Advokasi Penguatan bagi Anak Rentan Putus Sekolah (Pokir)					**Rp. 3.220.000,00**
	ASB 001 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - PENUH HARI Spesifikasi : -	20 x 1	Orang Hari	161.000,00	0 %	Rp. 3.220.000,00
	[-] Sosialisasi DWP (tambahan)					**Rp. 49,266,000,00**
	ASB 001 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - PENUH HARI Spesifikasi : -	51 x 6	Orang Hari	161.000,00	0 %	Rp. 49.266.000,00
	[-] Sosialisasi Kewirausahaan Mendukung Ekonomi Keluarga (Pokir)					**Rp. 8.050.000,00**
	ASB 001 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - PENUH HARI Spesifikasi : -	50 x 1	Orang	161.000,00	0 %	Rp. 8.050.000,00
	[-] Sosialisasi Ladies Program (Pokir)					**Rp. 12.880.000,00**
	ASB 001 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - PENUH HARI Spesifikasi : -	80 x 1	Orang Hari	161.000,00	0 %	Rp. 12.880.000,00
	[-] Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan (Pokir)					**Rp. 4,991,000,00**
	ASB 001 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - PENUH HARI Spesifikasi : -	31 x 1	Orang Hari	161.000,00	0 %	Rp. 4.991.000,00
	[-] Sosialisasi Peran Keluarga dalam Pencegahan Penyebaran HIV Aids (Pokir)					**Rp. 12.880.000,00**
	ASB 001 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - PENUH HARI Spesifikasi : -	80 x 1	Orang Hari	161.000,00	0 %	Rp. 12.880.000,00
	[-] Sosialisasi Public Speaking, MC dan Dirigen (Pokir)					**Rp. 12.880.000,00**
	ASB 001 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - PENUH HARI Spesifikasi : -	80 x 1	Orang Hari	161.000,00	0 %	Rp. 12.880.000,00
	[#] HUT DWP **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.500.000,00**
	[-] Transport HUT DWP					**Rp. 3.500.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	70 x 1	Orang Kali	50.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
					Jumlah :	Rp. 120.380.000,00

Kota Palangkaraya, 8 Agustus 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

FUJI WINARTI, S.K.M,M.Kes
NIP. 197005021995012001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst.		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.SI	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH,S.Sos,MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Unit Organisasi	: 2.13.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Kegiatan	: 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat, Tim LPPAR, Tim PPKBM PUSPAGA ELPePar, Tim HIMPSI Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 9.770.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 28.639.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	15.01 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.770.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen
Hasil	Persentase ketercapaian pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 9.770.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 9.770.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 900.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 900.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 900.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 900.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 900.000,00**
	[-] Kasir					**Rp. 450.000,00**
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta ...	1 x 2	Orang Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[-] PPTK					**Rp. 450.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 500 juta ...	1 x 1	Orang Bulan	450.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 8.870.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 3.235.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 3.235.000,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 488.000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 488.000,00**
	[-] Cetak dan Penggandaan					**Rp. 2.000,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	2000	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 2.000,00
	[-] Fotocopy					**Rp. 486.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : A4	1620	Lembar	300,00	0 %	Rp. 486.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 2.747.000,00**
	[#] Rapat Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.845.000,00**
	[-] Makan Rakor PPA (15 orang x 3 kali)					**Rp. 1.350.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	15 x 3	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
	[-] Snack Rakor PPA (15 orang x 3 kali)					**Rp. 495.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	15 x 3	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 495.000,00
	[#] Rapat Koordinasi PUSPAGA **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 902.000,00**
	[-] Makan Rakor PUSPAGA (11 orang x 2 kali)					**Rp. 660.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	11 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 660.000,00
	[-] Snack Rakor PUSPAGA (11 orang x 2 kali)					**Rp. 242.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	11 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 242.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 5.635.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 5.635.000,00**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 5.635.000,00**
	[#] ASB 001 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - PENUH HARI **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 5.635.000,00**
	[-] Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak					**Rp. 5.635.000,00**
	ASB 001 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - PENUH HARI Spesifikasi : -	35 x 1	Orang Kali	161.000,00	0 %	Rp. 5.635.000,00
					Jumlah :	**Rp. 9.779.000,00**

Kota Pekalongan, 6 Agustus 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

PUJI WINARTI, S.K.M.Kes
NIP. 197005021995012001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH,S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Unit Organisasi	: 2.13.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Kegiatan	: 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat/Korban Tindak Kekerasan Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 68.292.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 36.837.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	15.01 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 68.292.000,00
Keluaran	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Layanan
Hasil	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani (IKK Output)	100.00 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 68.292.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 68.292.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 1.200.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 1.200.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 1.200.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 1.200.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.200.000,00**
	[-] Kasir					**Rp. 750.000,00**
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 250 juta ...	1 x 3	Orang Bulan	250.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	[-] PPTK					**Rp. 450.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 500 juta ...	1 x 1	Orang Bulan	450.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 67.092.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 17.372.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 17.372.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 208.500,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 208.500,00**
	[-] Fotocopy					**Rp. 208.500,00**
	Fotocopy Spesifikasi : A4	695	Lembar	300,00	0 %	Rp. 208.500,00
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp. 380.000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 380.000,00**
	[-] Detergen					**Rp. 95.000,00**
	Sabun Spesifikasi : Deterjen Cream 900 gr	5	Per Bungkus	19.000,00	0 %	Rp. 95.000,00
	[-] Pasta Gigi					**Rp. 100.000,00**
	Pasta Gigi Spesifikasi : -	5	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
	[-] Pewangi Pakaian					**Rp. 65.000,00**
	Pewangi Spesifikasi : Pakaian	5	Botol	13.000,00	0 %	Rp. 65.000,00
	[-] Sabun Mandi					**Rp. 15.000,00**
	Sabun Spesifikasi : Mandi (Satuan)	5	Buah	3.000,00	0 %	Rp. 15.000,00
	[-] Sandal Jepit					**Rp. 55.000,00**
	Sandal Spesifikasi : karet, Jepit	5	Pc	11.000,00	0 %	Rp. 55.000,00
	[-] Sikat Gigi					**Rp. 50.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sikat Gigi Spesifikasi : -	5	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 50.000,00
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp. 711.500,00**
	[#] Belanja Natura dan Pakan-Natura **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 711.500,00**
	[-] Air Galon					**Rp. 136.000,00**
	Air Mineral Galon Spesifikasi : -	2	Galon	68.000,00	0 %	Rp. 136.000,00
	[-] Isi Ulang Galon					**Rp. 138.000,00**
	Isi Ulang Air Mineral Galon Spesifikasi : -	6	Galon	23.000,00	0 %	Rp. 138.000,00
	[-] Nasi Bungkus					**Rp. 437.500,00**
	Nasi Bungkus Spesifikasi : -	35	Per Bungkus	12.500,00	0 %	Rp. 437.500,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 16.072.000,00**
	[#] Case Conference **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.952.000,00**
	[-] Makan CC					**Rp. 2.160.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	6 x 12	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 2.160.000,00
	[-] Snack CC					**Rp. 792.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	6 x 12	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 792.000,00
	[#] Pendampingan dan Penjangkauan Klien **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 13.120.000,00**
	[-] Makan Pendampingan dan Penjangkauan					**Rp. 9.600.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	320	Orang / Kali	30.000,00	0 %	Rp. 9.600.000,00
	[-] Snack Pendampingan dan Penjangkauan					**Rp. 3.520.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	320	Orang / Kali	11.000,00	0 %	Rp. 3.520.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 41.529.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 40.200.000,00**
5.1.02.02.01.0020	**Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial**					**Rp. 40.200.000,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 40.200.000,00**
	[-] Fulltimer PPA					**Rp. 24.000.000,00**
	Tenaga Pelayanan Sosial (Fulltimer LPA-PAR) Spesifikasi : -	1 x 12	Orang Bulan	2.000.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
	[-] Tenaga Penanganan Sosial (PPA)					**Rp. 16.200.000,00**
	Tenaga Penanganan Sosial (Perlindungan Perempuan dan Anak) Spesifikasi : -	6 x 12	Orang Kali	225.000,00	0 %	Rp. 16.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 1,320,000,00**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 1,152,000,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1,152,000,00**
	[-] Jasa Premi Kesehatan 4%					**Rp. 1,152,000,00**
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi : -	1 x 12 x 96000	Orang Bulan Rupiah	1,00	0 %	Rp. 1,152,000,00
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 72,000,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 72,000,00**
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN					**Rp. 72,000,00**
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi : -	1 x 12 x 6000	Orang Bulan Rupiah	1,00	0 %	Rp. 72,000,00
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp. 96,000,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 96,000,00**
	[-] Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					**Rp. 96,000,00**
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi : -	1 x 12 x 8000	Orang Bulan Rupiah	1,00	0 %	Rp. 96,000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 8,200,000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 8,200,000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 4,200,000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 4,200,000,00**
	[-] Monev Kasus PPA					**Rp. 4,200,000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	2 x 70	Orang Hari	30.000,00	0 %	Rp. 4,200,000,00
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 4,000,000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 4,000,000,00**
	[-] Transport Pendampingan kasus PPA					**Rp. 4,000,000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	80	Hari	50.000,00	0 %	Rp. 4,000,000,00
					Jumlah :	**Rp. 68,282,000,00**

Kota Pekalongan, 6 Agustus 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

PUJI WINARTI, S.K.M.Kes
NIP. 197006021995012001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	195711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.SI	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH,S.Sos,MM	197210131998032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Unit Organisasi	: 2.13.2.06.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.06.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
Kegiatan	: 2.06.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.06.06.2.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Forum Anak Kota, Masyarakat (Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat), Sekolah, Guru dan Siswa Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Sederajat Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 98.225.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 40.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	48,15 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 98.225.000,00
Keluaran	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang
Hasil	Persentase forum anak yang aktif	34.36 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.06.06.2.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 98.225.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 98.225.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 1.350.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 1.350.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 1.350.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 1.350.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.350.000,00**
	[-] Kasir					**Rp. 900.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta ...	1 x 4	Orang Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	[-] PPTK					**Rp. 450.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 500 juta ...	1 x 1	Orang Bulan	450.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 98.875.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 25.550.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 25.550.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 972.000,00**
	[#] Festival Anak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 372.000,00**
	[-] Fotocopy					**Rp. 372.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : A4	1240	Lembar	300,00	0 %	Rp. 372.000,00
	[#] PUSPAGA **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 600.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : A4	2000	Lembar	300,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.584.000,00**
	[#] Festival Anak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.584.000,00**
	[-] Cetak Piagam Festival Anak					**Rp. 1.000.000,00**
	Cetak Kertas Manila/BC Spesifikasi : 2 muka; 2 warna; Double Folio	200	Lembar	5.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] Cetak Spanduk					**Rp. 584.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	3 x 3	Meter Buah	68.000,00	0 %	Rp. 584.000,00
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cenderamata**					**Rp. 1.600.000,00**
	[#] Festival Anak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.600.000,00**
	[-] Piala Festival Anak					**Rp. 1.600.000,00**
	Piala Bergilir Spesifikasi : -	2	Set	800.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 21.384.000,00**
	[#] Evaluasi Kelurahan Ramah Anak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.870.000,00**
	[-] Makan Rakor Kelurahan Ramah Anak					**Rp. 2.100.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	35 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	[-] Snack Evaluasi Kelurahan Ramah Anak (35 orang x 2 kali)					**Rp. 770.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	35 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 770.000,00
	[#] Festival Anak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.922.000,00**
	[-] Makan Juri dan Panitia Festival Anak					**Rp. 900.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	30 x 1	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	[-] Makan Rakor Juri dan Panitia Festival Anak					**Rp. 360,000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	12 x 1	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 360.000,00
	[-] Snack Juri Panitia Festival Anak					**Rp. 330,000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	30	Orang	11.000,00	0 %	Rp. 330.000,00
	[-] Snack Peserta Festival Anak					**Rp. 2.200,000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	200	Orang	11.000,00	0 %	Rp. 2.200.000,00
	[-] Snack Rakor Juri dan Panitia Festival Anak					**Rp. 132,000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	12 x 1	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 132.000,00
	[#] PUSPAGA **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.850.000,00**
	[-] Snack Case Conference PUSPAGA					**Rp. 550.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	50	Orang / Kali	11.000,00	0 %	Rp. 550.000,00
	[-] Snack Pendampingan PUSPAGA					**Rp. 3.300.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	300	Orang / Kali	11.000,00	0 %	Rp. 3.300.000,00
	[#] Rapat Koordinasi Forum Anak Kelurahan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.542.000,00**
	[-] Makan Rakor Forum Anak Kelurahan (31 orang x 2 kali)					**Rp. 1.860.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	31 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.860.000,00
	[-] Snack Rakor Forum Anak Kelurahan (31 orang x 2 kali)					**Rp. 682,000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	31 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 682.000,00
	[#] Rapat Koordinasi Forum Anak Kota Pekalongan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 8.200.000,00**
	[-] Makan Rakor Forum Anak Kota (20 orang x 10 kali)					**Rp. 6.000.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	20 x 10	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[-] Snack Rakor Forum Anak Kota Pekalongan (20 orang x 12 kali)					**Rp. 2.200.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	20 x 10	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 2.200.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 13.125.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 13.125.000,00**
5.1.02.02.01.0020	**Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial**					**Rp. 10.125.000,00**
	[#] PUSPAGA **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 10.125.000,00**
	[-] Honor Tim PUSPAGA					**Rp. 10.125.000,00**
	Tenaga Penangenan Sosial (Puspaga) Spesifikasi : -	3 x 15	Orang Kali	225.000,00	0 %	Rp. 10.125.000,00
5.1.02.02.01.0037	**Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan**					**Rp. 3.000.000,00**
	[#] Festival Anak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.000.000,00**
	[-] Juri Festival Anak					**Rp. 3.000.000,00**
	Juri / Pengamat Spesifikasi : Lokal	4	Orang	750.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 49.200.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 49.200.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 3.000.000,00**
	[#] PUSPAGA **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.000.000,00**
	[-] Monev PUSPAGA					**Rp. 3.000.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 6 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	100	Orang / Hari	30.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 46.200.000,00**
	[#] ASB 001 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - PENUH HARI **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 16.100.000,00**
	[-] Advokasi Penguatan Kapasitas Forum Anak Kota Pekalongan					**Rp. 16.100.000,00**
	ASB 001 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - PENUH HARI Spesifikasi : -	50 x 2	Orang Hari	161.000,00	0 %	Rp. 16.100.000,00
	[#] Festival Anak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 10.000.000,00**
	[-] Transport Peserta Festival Anak					**Rp. 10.000.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	200	Orang	50.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
	[#] PUSPAGA **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 5.000.000,00**
	[-] Transport Pendampingan PUSPAGA					**Rp. 5.000.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	100	Orang / Kali	50.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	[#] Rapat Koordinasi Forum Anak Kelurahan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.100.000,00**
	[-] Transport Rakor Forum Anak Kelurahan (31 orang x 2 kali)					**Rp. 3.100.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koeflslen	Satuan	Harga	PPN	
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	31 x 2	Orang Kali	50.000,00	0 %	Rp. 3.100.000,00
	[#] Rapat Koordinasi Forum Anak Kota Pekalongan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 12.000.000,00**
	[-] Transport Rakor Forum Anak Kota Pekalongan (20 orang x 12 kali)					**Rp. 12.000.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	20 x 12	Orang Kali	50.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 9.000.000,00**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 9.000.000,00**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp. 9.000.000,00**
	[#] Evaluasi Kelurahan Ramah Anak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.000.000,00**
	[-] Juara I Evaluasi Kelurahan Ramah Anak					**Rp. 1.250.000,00**
	Lomba Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Spesifikasi : Juara I	1	Kelurahan	1.250.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	[-] Juara II Evaluasi Kelurahan Ramah Anak					**Rp. 1.000.000,00**
	Lomba Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Spesifikasi : Juara II	1	Kelurahan	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] Juara III Evaluasi Kelurahan Ramah Anak					**Rp. 750.000,00**
	Lomba Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Spesifikasi : Juara III	1	Kelurahan	750.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	[#] Festival Anak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 6.000.000,00**
	[-] Juara I Festival Anak					**Rp. 2.500.000,00**
	Lomba Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Spesifikasi : Juara I	2	Kegiatan	1.250.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	[-] Juara II Festival Anak					**Rp. 2.000.000,00**
	Lomba Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Spesifikasi : Juara II	2	Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] Juara III Festival Anak					**Rp. 1.500.000,00**
	Lomba Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Spesifikasi : Juara III	2	Kegiatan	750.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
					Jumlah :	**Rp. 98.225.000,00**

Kota Pekalongan, 8 Agustus 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

PUJI WINARTI, S.STP, M.Kes
NIP. 197005021989012001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH,S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Unit Organisasi	: 2.13.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
Kegiatan	: 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Forum Anak Kota, Masyarakat (Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat), Sekolah, Guru dan Siswa Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Sederajat Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 96.770.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 55.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Dekala (desa/kelurahan layak anak)	48,15 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 96.770.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen
Hasil	Persentase forum anak yang aktif	34,38 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pencanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 96.770.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 96.770.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 1.350.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 1.350.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 1.350.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 1.350.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.350.000,00**
	[-] Kasir					**Rp. 900.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta ...	1 x 4	Orang Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	[-] PPTK					**Rp. 450.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 500 juta ...	1 x 1	Orang Bulan	450.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 95.429.900,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 22.380.900,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 22.380.900,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 700.000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 700.000,00**
	[-] Cetak dan Penggandaan					**Rp. 1.000,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	1000	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 1.000,00
	[-] Fotocopy					**Rp. 795.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : A4	2350	Lembar	300,00	0 %	Rp. 705.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.584.000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.584.000,00**
	[-] Spanduk					**Rp. 1.584.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	3 x 8	Meter Buah	66.000,00	0 %	Rp. 1.584.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 29.090.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 29.090.000,00**
	[-] Makan Rakor KLA (70 orang x 6 kali)					**Rp. 12.600.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	70 x 6	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 12.600.000,00
	[-] Rakor APSAI (35 orang x 2 kali)					**Rp. 2.100.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	35 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	[-] Snack Rakor APSAI (35 orang x 2 kali)					**Rp. 770.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	35 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 770.000,00
	[-] Snack Rakor KLA (70 orang x 6 kali)					**Rp. 4.620.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	70 x 6	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 4.620.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 16.500.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 16.500.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp. 16.500.000,00**
	[#] Tim Gugus Tugas KLA **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 16.500.000,00**
	[-] Honor KDH					**Rp. 9.000.000,00**
	Honorarium Panitia Kegiatan Spesifikasi : Pengarah/Pembina/Penasehat/Penanggung Jawab/Ketua ...	1 x 12	Orang Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	[-] Honor WKDH					**Rp. 7.500.000,00**
	Honorarium Panitia Kegiatan Spesifikasi : Pengarah/Pembina/Penasehat/Penanggung Jawab/Ketua ...	1 x 12	Orang Bulan	625.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 56.540.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 56.540.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 1.800.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.800.000,00**
	[-] Monev Pengembangan KLA (2 orang x 30 hari)					**Rp. 1.800.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	2 x 30	Orang Hari	30.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 54.740.000,00**
	[#] ASB 001 - Sosialisasi Tatap Muka Peserta Masyarakat-Dalam Kantor-Penuh Hari **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 54.740.000,00**
	[-] Advokasi KLA Tingkat Kecamatan					**Rp. 38.640.000,00**
	ASB 001 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - PENUH HARI Spesifikasi : -	60 x 4	Orang Hari	161.000,00	0 %	Rp. 38.640.000,00
	[-] Sosialisasi Internet Aman untuk Anak					**Rp. 8.050.000,00**
	ASB 001 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - PENUH HARI Spesifikasi : -	50 x 1	Orang Hari	161.000,00	0 %	Rp. 8.050.000,00
	[-] Sosialisasi Sekolah Ramah Anak					**Rp. 8.050.000,00**
	ASB 001 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - PENUH HARI Spesifikasi : -	50 x 1	Orang Hari	161.000,00	0 %	Rp. 8.050.000,00
					Jumlah :	**Rp. 96.778.000,00**

Kota Pekalongan, 8 Agustus 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

PUJI WINARTI, S.K.M.,M.Kes.
NIP. 197005021995012001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH,S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Unit Organisasi	: 2.13.2.06.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.06.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
Kegiatan	: 2.06.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.06.06.2.02.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Forum Anak Kota, Masyarakat (Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat), Sekolah, Guru dan Siswa Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Sederajat Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 20,620,000,00
Alokasi 2026	: Rp. 42,872,000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	48,15 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.620.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen
Hasil	Persentase forum anak yang aktif	34,38 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.06.06.2.02.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 20.620.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 20.620.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 1.350.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 1.350.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 1.350.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 1.350.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.350.000,00**
	[-] Kasir					**Rp. 960.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta ...	1 x 4	Orang Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	[-] PPTK					**Rp. 450.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 500 juta ...	1 x 1	Orang Bulan	450.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 19.270.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 30.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 30.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 30.000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan Utk Kegiatan Kantor - Kertas & Cover **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 30.000,00**
	[-] Fotocopy					**Rp. 30.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : A4	100	Lembar	300,00	0 %	Rp. 30.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 14.410.000,00**
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 14.410.000,00**
5.1.02.02.12.0001	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**					**Rp. 14.410.000,00**
	[#] ASB 005 - Pelatihan Tatap Muka Peserta Masyarakat di Dalam Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 14.410.000,00**
	[-] Pelatihan KHA					**Rp. 14.410.000,00**
	ASB 005 PELATIHAN TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT DI DALAM KANTOR Spesifikasi : -	55 x 2	Orang Hari	131.000,00	0 %	Rp. 14.410.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 4.830.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 4.830.000,00**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 4.830.000,00**
	[#] ASB 001 - Sosialisasi Tatap Muka Peserta Masyarakat - Dalam Kantor - Penuh Hari **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 4.830.000,00**
	[-] Sosialisasi Kader Pendamping Ketahanan Keluarga					**Rp. 4.830.000,00**
	ASB 001 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - PENUH HARI Spesifikasi : -	30 x 1	Orang Hari	161.000,00	0 %	Rp. 4.830.000,00
					Jumlah :	**Rp. 20.620.000,00**

Kota Pekalongan, 8 Agustus 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

PUJI WINARTI, S.K.M.,Kes.
NIP. 197005021995042001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S,H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH,S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Unit Organisasi	: 2.13.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
Kegiatan	: 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.01.0003 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Sekolah dan Siswa Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 9.780.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 15.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.780.000,00
Keluaran	Jumlah kegiatan pencegahan KIA terpadu	1 Kegiatan
Hasil	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota (IKK Outcome)	100,00 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.01.0003 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah kegiatan pencegahan KIA terpadu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 9.780.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 9.780.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 900.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 900.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 900.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 900.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 900.000,00**
	[-] Kasir					**Rp. 450.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta ...	1 x 2	Orang Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[-] PPTK					**Rp. 450.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 500 juta ...	1 x 1	Orang Bulan	450.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 8.880.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 830.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 830.000,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 830.000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 830.000,00**
	[-] Cetak Leaflet					**Rp. 830.000,00**
	Cetak Leaflet Spesifikasi : -	166	Lembar	5.000,00	0 %	Rp. 830.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 8.050.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 8.050.000,00**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 8.050.000,00**
	[#] ASB 001 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - PENUH HARI **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 8.050.000,00**
	[-] Sosialisasi Perlindungan Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (50 orang x 1 hari)					**Rp. 8.050.000,00**
	ASB 001 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - PENUH HARI Spesifikasi : -	50 x 1	Orang Kali	161.000,00	0 %	Rp. 8.050.000,00
					Jumlah :	**Rp. 9.780.000,00**

Kota Pekalongan, 6 Agustus 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemampuan dan Perlindungan Anak

PUJI WIJIARTI, S.KM, M.Kes.
NIP. 197005021995012001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH,S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Unit Organisasi	: 2.13.2.06.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.06.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
Kegiatan	: 2.06.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.06.07.2.02.0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Anak Korban Kekerasan, Keluarga dan Masyarakat Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 53.232.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 23.225.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 53.232.000,00
Keluaran	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	24 Layanan
Hasil	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten / kota (IKK Outcome)	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.06.07.2.02.0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 53.232.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 53.232.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.200.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.200.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.200.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.200.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.200.000,00
	[-] Kasir					Rp. 760.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 250 juta ...	1 x 3	Orang Bulan	250.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	[-] PPTK					**Rp. 450.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 500 juta ...	1 x 1	Orang Bulan	450.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 52.032.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 26.632.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 26.632.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 720.000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 720.000,00**
	[-] Fotocopy					**Rp. 720.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : A4	2400	Lembar	300,00	0 %	Rp. 720.000,00
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp. 380.000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 380.000,00**
	[-] Detergen					**Rp. 95.000,00**
	Sabun Spesifikasi : Deterjen Cream 800 gr	5	Per Bungkus	19.000,00	0 %	Rp. 95.000,00
	[-] Pasta Gigi					**Rp. 100.000,00**
	Pasta Gigi Spesifikasi : -	5	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
	[-] Pewangi Pakaian					**Rp. 65.000,00**
	Pewangi Spesifikasi : Pakaian	5	Botol	13.000,00	0 %	Rp. 65.000,00
	[-] Sabun Mandi					**Rp. 15.000,00**
	Sabun Spesifikasi : Mandi (Satuan)	5	Buah	3.000,00	0 %	Rp. 15.000,00
	[-] Sandal Jepit					**Rp. 55.000,00**
	Sandal Spesifikasi : karet, Jepit	5	Pc	11.000,00	0 %	Rp. 55.000,00
	[-] Sikat Gigi					**Rp. 50.000,00**
	Sikat Gigi Spesifikasi : -	5	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 50.000,00
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp. 2.162.000,00**
	[#] Belanja Natura dan Pakan-Natura **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.162.000,00**
	[-] Air Galon					**Rp. 135.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Air Mineral Galon Spesifikasi : -	2	Galon	68.000,00	0 %	Rp. 136.000,00
	[-] Isi Ulang Galon					**Rp. 276.000,00**
	Isi Ulang Air Mineral Galon Spesifikasi : -	12	Galon	23.000,00	0 %	Rp. 276.000,00
	[-] Nasi Bungkus					**Rp. 1.750.000,00**
	Nasi Bungkus Spesifikasi : -	140	Per Bungkus	12.500,00	0 %	Rp. 1.750.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 23.370.000,00**
	[#] Case Conference **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 9.840.000,00**
	[-] Makan CC					**Rp. 7.200.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	20 x 12	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	[-] Snack CC					**Rp. 2.640.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	20 x 12	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 2.640.000,00
	[#] Pendampingan dan Penjangkauan Klien **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 13.530.000,00**
	[-] Makan Pendampingan					**Rp. 9.900.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	330	Orang / Kali	30.000,00	0 %	Rp. 9.900.000,00
	[-] Snack pendampingan					**Rp. 3.630.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	330	Orang / Kali	11.000,00	0 %	Rp. 3.630.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 16.200.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 16.200.000,00**
5.1.02.02.01.0020	**Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial**					**Rp. 16.200.000,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 16.200.000,00**
	[•] Tenaga Penanganan Sosial (PPA)					**Rp. 16.200.000,00**
	Tenaga Penanganan Sosial (Perlindungan Perempuan dan Anak) Spesifikasi : -	6 x 12	Orang Kali	225.000,00	0 %	Rp. 16.200.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 5.200.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 5.200.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 4.200.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 4.200.000,00**
	[-] Monev Kasus PPA					**Rp. 4.200.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	2 x 70	Orang Hari	30.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 5.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Perjadanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Sumber Dana : Dana Tranafer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000,00
	[-] Transport Pendampingan kasus PPA					Rp. 5.000.000,00
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	100	Orang / Hari	50.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
					Jumlah :	Rp. 53.232.000,00

Kota Pekalongan, 6 Agustus 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

ENNY WINARTI, S.K.M.M.Kes.
NIP. 19700521 199512001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst.		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH,S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Unit Organisasi	: 2.13.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
Kegiatan	: 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: PATBM Kelurahan, Dinas/Instansi /Lembaga terkait Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 6.632.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 11.420.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.632.000,00
Keluaran	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	25 Orang
Hasil	Persentase ketercapaian penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 6.632.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 6.632.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 900.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 900.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 900.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 900.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 900.000,00**
	[-] Kasir					**Rp. 450.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta ...	1 x 2	Orang Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[-] PPTK					**Rp. 450.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 500 juta ...	1 x 1	Orang Bulan	450.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 5.732.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 1.107.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 1.107.000,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 1.107.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.107.000,00**
	[-] Makan Rakor Tim PATBM (27 orang x 1 kali)					**Rp. 810.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	27 x 1	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 810.000,00
	[-] Snack Rakor Tim PATBM (27 orang x 1 kali)					**Rp. 297.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	27 x 1	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 297.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 3.275.000,00**
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 3.275.000,00**
5.1.02.02.12.0001	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**					**Rp. 3.275.000,00**
	[#] ASB 005 - Pelatihan Tatap Muka Peserta Masyarakat Di Dalam Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.275.000,00**
	[-] Pelatihan Manajemen Kasus					**Rp. 3.275.000,00**
	ASB 005 PELATIHAN TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT DI DALAM KANTOR Spesifikasi : -	25 x 1	Orang Kali	131.000,00	0 %	Rp. 3.275.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 1.350.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 1.350.000,00**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 1.350.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.350.000,00**
	[-] Transport Rakor Tim PATBM (27 orang x 6 kali)					**Rp. 1.350.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	27 x 1	Orang Hari	50.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
					Jumlah :	**Rp. 6.832.000,00**

Kota Pekalongan, ...
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

PURI WINARNI, S.KOM,M.Kes
NIP. 197005021995012001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH,S.Sos,MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi	: 2.13.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
Kegiatan	: 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
Sub Kegiatan	: 2.13.03.2.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Kota Pekalongan Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 557.400.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 1.240.847.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan	83,33 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 557.400.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	4 Dokumen
Hasil	Persentase Fasilitasi Kerja sama TNI dan Kelurahan	11.11 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.03.2.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 557.400.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 548.800.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 9.600.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 9.600.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 9.600.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 9.600.000,00
	[#] Jumlah Kelurahan yang di Fasilitasi Kegiatan TMMD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.600.000,00
	[-] Honor Kasir Kegiatan					Rp. 3.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 1 miliar ...	1 x 12	Orang Bulan	300.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[-] Honor PPTK					**Rp. 6.000.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 1 miliar ...	1 x 12	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 539.000.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 375.760.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 375.760.000,00**
5.1.02.01.01.0001	**Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi**					**Rp. 344.000.000,00**
	[#] TMMD Sengkuyung I **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 61.000.000,00**
	[-] Pekerjaan Pengaspalan Jalan					**Rp. 61.000.000,00**
	Aspal Spesifikasi : -	6100	Kg	10.000,00	0 %	Rp. 61.000.000,00
	[#] TMMD Sengkuyung II **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 61.000.000,00**
	Aspal Spesifikasi : -	6100	Kg	10.000,00	0 %	Rp. 61.000.000,00
	[#] TMMD Sengkuyung III **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 61.000.000,00**
	Aspal Spesifikasi : -	6100	Kg	10.000,00	0 %	Rp. 61.000.000,00
	[#] TMMD Sengkuyung IV **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 61.000.000,00**
	Aspal Spesifikasi : -	6100	Kg	10.000,00	0 %	Rp. 61.000.000,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 2.643.000,00**
	[#] TMMD Sengkuyung I, II, III **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.643.000,00**
	[-] Fotocopy					**Rp. 2.643.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : A4	8810	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.643.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 4.752.000,00**
	[#] TMMD Sengkuyung I **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.188.000,00**
	[-] Spanduk TMMD Sengkuyung I					**Rp. 1.188.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	3 x 3 x 2	Meter Buah Kali	66.000,00	0 %	Rp. 1.188.000,00
	[#] TMMD Sengkuyung II **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.188.000,00**
	[-] Spanduk TMMD Sengkuyung II					**Rp. 1.188.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	3 x 3 x 2	Meter Buah Kali	66.000,00	0 %	Rp. 1.188.000,00
	[#] TMMD Sengkuyung III **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.188.000,00**
	[-] Spanduk TMMD Sengkuyung III					**Rp. 1.188.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	3 x 3 x 2	Meter Buah Kali	66.000,00	0 %	Rp. 1.188.000,00
	[#] TMMD Sengkuyung IV **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.188.000,00**
	[-] Spanduk TMMD Sengkuyung IV					**Rp. 1.188.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	3 x 3 x 2	Meter Buah Kali	66.000,00	0 %	Rp. 1.188.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 112.985.000,00**
	[#] ASB 002 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - SETENGAH HARI **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 16.400.000,00**
	[-] Penyuluhan TMMD Sengkuyung I					**Rp. 4.100.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	50 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	50 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] Penyuluhan TMMD Sengkuyung II					**Rp. 4.100.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	50 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	50 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] Penyuluhan TMMD Sengkuyung III					**Rp. 4.100.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	50 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	50 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] Penyuluhan TMMD Sengkuyung IV					**Rp. 4.100.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	50 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	50 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[#] Jumlah Kelurahan yang di Fasilitasi Kegiatan TMMD **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.845.000,00**
	[-] Snack dan Makan Rapat Koordinasi Penentuan Lokasi TMMD 2026					**Rp. 1.230.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	15 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 330.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	15 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	[-] Snack dan Makan Rapat Penetapan Lokasi TMMD					**Rp. 615.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	15 x 1	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 165.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	15 x 1	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[#] TMMD Sengkuyung I **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 20.580.000,00**
	[-] Rapat Panitia Upacara Buka/Tutup					**Rp. 1.640.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	20 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 440.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	20 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[-] Snack dan Makan Peserta Sarasehan					**Rp. 2.050.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	50 x 1	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 550.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	50 x 1	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] Snack dan Makan Rakor Checking Akhir dan Tinjau Lokasi TMMD					**Rp. 1.230.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	15 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 330.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	15 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	[-] Snack dan Makan Rapat Persiapan Upacara Buka/Tutup					**Rp. 2.460.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	30 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 660.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	30 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	[-] Snack Upacara Buka Tutup					**Rp. 13.200.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	600 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 13.200.000,00
	[#] TMMD Sengkuyung II **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 20.580.000,00**
	[-] Rapat Panitia Upacara Buka/Tutup					**Rp. 1.640.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	20 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 440.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	20 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[-] Snack dan Makan Peserta Sarasehan					**Rp. 2.050.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	50 x 1	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 550.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	50 x 1	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] Snack dan Makan Rakor Checking Akhir dan Tinjau Lokasi TMMD					**Rp. 1.230.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	15 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 330.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	15 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	[-] Snack dan Makan Rapat Persiapan Upacara Buka/Tutup					**Rp. 2.460.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	30 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 660.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	30 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	[-] Snack Upacara Buka Tutup					**Rp. 13.200.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	600 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 13.200.000,00
	[8] TMMD Sengkuyung III **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 20.580.000,00**
	[-] Rapat Panitia Upacara Buka/Tutup					**Rp. 1.640.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	20 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 440.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	20 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[-] Snack dan Makan Peserta Sarasehan					**Rp. 2.050.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	50 x 1	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 550.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	50 x 1	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] Snack dan Makan Rakor Checking Akhir dan Tinjau Lokasi TMMD					**Rp. 1.230.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	15 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 330.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	15 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	[-] Snack dan Makan Rapat Persiapan Upacara Buka/Tutup					**Rp. 2.400.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	30 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 660.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	30 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	[-] Snack Upacara Buka Tutup					**Rp. 13.200.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	600 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 13.200.000,00
	[#] TMMD Sengkuyung I, II, III **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 12.300.000,00**
	[-] Rakor Kegiatan TMMD					**Rp. 12.300.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	30 x 10	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 3.300.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	30 x 10	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	[#] TMMD Sengkuyung IV **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 29.580.000,00**
	[-] Rapat Panitia Upacara Buka/Tutup					**Rp. 1.640.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	20 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 440.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	20 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[-] Snack dan Makan Peserta Sarasehan					**Rp. 2.050.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	50 x 1	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 550.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	50 x 1	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] Snack dan Makan Rakor Checking Akhir dan Tinjau Lokasi TMMD					**Rp. 1.230.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	15 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 330.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	15 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	[-] Snack dan Makan Rapat Persiapan Upacara Buka/Tutup					**Rp. 2.460.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	30 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 660.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	30 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	[-] Snack Upacara Buka Tutup					**Rp. 13.200.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	600 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 13.200.000,00
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp. 11.500.000,00**
	[#] TMMD Sengkuyung I **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.875.000,00**
	[-] Buah Meja Upacara Buka Tutup TMMD					**Rp. 2.000.000,00**
	Buah Meja Spesifikasi : Jamuan tamu hanya untuk OPD Sekretariat DPRD dan B...	10 x 2	Paket Kali	100.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] Tumpeng Upacara Penutupan TMMD					**Rp. 875.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : Jamuan tamu hanya untuk OPD Sekretariat DPRD dan B...	25	Orang	35.000,00	0 %	Rp. 875.000,00
	[#] TMMD Sengkuyung II **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.875.000,00**
	[-] Buah Meja Upacara Buka Tutup TMMD					**Rp. 2.000.000,00**
	Buah Meja Spesifikasi : Jamuan tamu hanya untuk OPD Sekretariat DPRD dan B...	10 x 2	Paket Kali	100.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] Tumpeng Upacara Penutupan TMMD					**Rp. 875.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : Jamuan tamu hanya untuk OPD Sekretariat DPRD dan B...	25	Orang	35.000,00	0 %	Rp. 875.000,00
	[#] TMMD Sengkuyung III **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.875.000,00**
	[-] Buah Meja Upacara Buka Tutup TMMD					**Rp. 2.000.000,00**
	Buah Meja Spesifikasi : Jamuan tamu hanya untuk OPD Sekretariat DPRD dan B...	10 x 2	Paket Kali	100.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] Tumpeng Upacara Penutupan TMMD					**Rp. 875.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : Jamuan tamu hanya untuk OPD Sekretariat DPRD dan B...	25	Orang	35.000,00	0 %	Rp. 875.000,00
	[#] TMMD Sengkuyung IV **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.875.000,00**
	[-] Buah Meja Upacara Buka Tutup TMMD					**Rp. 2.000.000,00**
	Buah Meja Spesifikasi : Jamuan tamu hanya untuk OPD Sekretariat DPRD dan B...	10 x 2	Paket Kali	100.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] Tumpeng Upacara Penutupan TMMD					**Rp. 875.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : Jamuan tamu hanya untuk OPD Sekretariat DPRD dan B...	25	Orang	35.000,00	0 %	Rp. 875.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 85.040.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 17.840.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 17.200.000,00**
	[#] ASB 002 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - SETENGAH HARI **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 8.000.000,00**
	[-] Penyuluhan TMMD Sengkuyung I					**Rp. 2.000.000,00**
	Moderator, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	0.5 x 2	Orang Pekerjaan	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Staf (Honor Narasumber hanya diberikan untuk Wali ...	3 x 1	Orang Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] Penyuluhan TMMD Sengkuyung II					**Rp. 2.000.000,00**
	Moderator, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	0.5 x 2	Orang Pekerjaan	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Staf (Honor Narasumber hanya diberikan untuk Wali ...	3 x 1	Orang Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] Penyuluhan TMMD Sengkuyung III					**Rp. 2.000.000,00**
	Moderator, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	0.5 x 2	Orang Pekerjaan	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Staf (Honor Narasumber hanya diberikan untuk Wali ...	3 x 1	Orang Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] Penyuluhan TMMD Sengkuyung IV					**Rp. 2.000.000,00**
	Moderator, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	0.5 x 2	Orang Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Staf (Honor Narasumber hanya diberikan untuk Wali ...	3 x 1	Orang Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[#] TMMD Sengkuyung I **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.300.000,00**
	[-] Narsum Pembukaan TMMD - Walikota					**Rp. 1.300.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Walikota/ Wakil Bupati/Wakil Walikota	1 x 1	Orang Kegiatan	1.300.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Narsum Penutupan TMMD - Dandim 0710/Pekalongan					**Rp. 1.000.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon II /DPRD/ yang disetarakan (Honor Narasumbe...	1 x 1	Orang Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[#] TMMD Sengkuyung II **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.300.000,00**
	[-] Narsum Pembukaan TMMD - Walikota					**Rp. 1.300.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Walikota/ Wakil Bupati/Wakil Walikota	1 x 1	Orang Kegiatan	1.300.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
	[-] Narsum Penutupan TMMD - Dandim 0710/Pekalongan					**Rp. 1.000.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon II /DPRD/ yang disetarakan (Honor Narasumbe...	1 x 1	Orang Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[#] TMMD Sengkuyung III **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.300.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Walikota/ Wakil Bupati/Wakil Walikota	1 x 1	Orang Kegiatan	1.300.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon II /DPRD/ yang disetarakan (Honor Narasumbe...	1 x 1	Orang Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[#] TMMD Sengkuyung IV **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.300.000,00**
	[-] Narsum Pembukaan TMMD - Walikota					**Rp. 1.300.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Walikota/ Wakil Bupati/Wakil Walikota	1 x 1	Orang Kegiatan	1.300.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
	[-] Narsum Penutupan TMMD - Dandim 0710/Pekalongan					**Rp. 1.000.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon II /DPRD/ yang disetarakan (Honor Narasumbe...	1 x 1	Orang Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp. 640.000,00**
	[#] TMMD Sengkuyung I **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 160.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Banpot Caraka					Rp. 160.000,00
	Banpot caraka Spesifikasi : -	2 x 2	Orang Kali	40.000,00	0 %	Rp. 160.000,00
	[#] TMMD Sengkuyung II Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 160.000,00
	Banpot caraka Spesifikasi : -	2 x 2	Orang Kali	40.000,00	0 %	Rp. 160.000,00
	[#] TMMD Sengkuyung III Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 160.000,00
	Banpot caraka Spesifikasi : -	2 x 2	Orang Kali	40.000,00	0 %	Rp. 160.000,00
	[#] TMMD Sengkuyung IV Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 160.000,00
	Banpot caraka Spesifikasi : -	2 x 2	Orang Kali	40.000,00	0 %	Rp. 160.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 67.200.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 18.000.000,00
	[#] TMMD Sengkuyung I Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.500.000,00
	[-] Sewa Tenda/Layos					Rp. 4.500.000,00
	Sewa tenda semi SBY ful sisir Spesifikasi : -	3 x 2	Set Kali	750.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	[#] TMMD Sengkuyung II Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.500.000,00
	Sewa tenda semi SBY ful sisir Spesifikasi : -	3 x 2	Set Kali	750.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	[#] TMMD Sengkuyung III Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.500.000,00
	Sewa tenda semi SBY ful sisir Spesifikasi : -	3 x 2	Set Kali	750.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	[#] TMMD Sengkuyung IV Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.500.000,00
	Sewa tenda semi SBY ful sisir Spesifikasi : -	3 x 2	Set Kali	750.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp. 12.000.000,00
	[#] TMMD Sengkuyung I Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000,00
	[-] Sewa Kursi Lipat					Rp. 3.000.000,00
	Kursi lipat Spesifikasi : -	250 x 2	Buah Kali	6.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[#] TMMD Sengkuyung II Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000,00
	Kursi lipat Spesifikasi : -	250 x 2	Buah Kali	6.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] TMMD Sengkuyung III Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000,00
	Kursi lipat Spesifikasi : -	250 x 2	Buah Kali	6.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[#] TMMD Sengkuyung IV Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000,00
	Kursi lipat Spesifikasi : -	250 x 2	Buah Kali	6.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.02.04.0122	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 37.200.000,00
	[#] TMMD Sengkuyung I Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.300.000,00
	[-] Sewa Sound System					Rp. 9.300.000,00
	Sound system Spesifikasi : 1000 watt	3 x 2	Buah Kali	1.550.000,00	0 %	Rp. 9.300.000,00
	[#] TMMD Sengkuyung II Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.300.000,00
	Sound system Spesifikasi : 1000 watt	3 x 2	Buah Kali	1.550.000,00	0 %	Rp. 9.300.000,00
	[#] TMMD Sengkuyung III Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.300.000,00
	Sound system Spesifikasi : 1000 watt	3 x 2	Buah Kali	1.550.000,00	0 %	Rp. 9.300.000,00
	[#] TMMD Sengkuyung IV Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.300.000,00
	Sound system Spesifikasi : 1000 watt	3 x 2	Buah Kali	1.550.000,00	0 %	Rp. 9.300.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 78.200.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 78.200.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 4.200.000,00
	[#] Jumlah Kelurahan yang di Fasilitasi Kegiatan TMMD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 840.000,00
	[-] Survei Lokasi Calon TMMD 2026					Rp. 840.000,00
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	7 x 4	Orang Hari	30.000,00	0 %	Rp. 840.000,00
	[#] TMMD Sengkuyung I Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 840.000,00
	[-] Monitoring Checking Akhir dan Tinjau Lokasi TMMD					Rp. 600.000,00
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	10 x 2	Orang Hari	30.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	[-] Monitoring dan Evaluasi Kegiatan TMMD					Rp. 240.000,00
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	4 x 2	Orang Hari	30.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	[#] TMMD Sengkuyung II Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 840.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Monitoring Checking Akhir dan Tinjau Lokasi TMMD					**Rp. 600.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	10 x 2	Orang Hari	30.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	[-] Monitoring dan Evaluasi Kegiatan TMMD					**Rp. 240.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	4 x 2	Orang Hari	30.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	[#] TMMD Sengkuyung III **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 840.000,00**
	[-] Monitoring Checking Akhir dan Tinjau Lokasi TMMD					**Rp. 600.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	10 x 2	Orang Hari	30.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	[-] Monitoring dan Evaluasi Kegiatan TMMD					**Rp. 240.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	4 x 2	Orang Hari	30.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	[#] TMMD Sengkuyung IV **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 840.000,00**
	[-] Monitoring Checking Akhir dan Tinjau Lokasi TMMD					**Rp. 600.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	10 x 2	Orang Hari	30.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	[-] Monitoring dan Evaluasi Kegiatan TMMD					**Rp. 240.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	4 x 2	Orang Hari	30.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 74.000.000,00**
	[#] ASB 002 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - SETENGAH HARI **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 5.000.000,00**
	[-] Penyuluhan TMMD Sengkuyung I					**Rp. 5.000.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	50 x 2	Orang Hari	50.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	[#] TMMD Sengkuyung I **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 13.500.000,00**
	[-] Korsik TMMD					**Rp. 2.500.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	25 x 2	Orang Kali	50.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	[-] Peserta Sarasehan TMMD					**Rp. 2.500.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	50 x 1	Orang Hari	50.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	[-] Petugas Simtuduror					**Rp. 1.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	10 x 2	Orang Hari	50.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] Tenaga Pendukung					**Rp. 7.500.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	75 x 2	Orang Hari	50.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
	[#] TMMD Sengkuyung II **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 18.500.000,00**
	[-] Korsik TMMD					**Rp. 2.500.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	25 x 2	Orang Hari	50.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	[-] Penyuluhan TMMD Sengkuyung II					**Rp. 5.000.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	50 x 2	Orang Hari	50.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	[-] Peserta Sarasehan TMMD					**Rp. 2.500.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	50 x 1	Orang Hari	50.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	[-] Petugas Simtuduror					**Rp. 1.000.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	10 x 2	Orang Hari	50.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] Tenaga Pendukung					**Rp. 7.500.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	75 x 2	Orang Hari	50.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
	[#] TMMD Sengkuyung III **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 18.500.000,00**
	[-] Korsik TMMD					**Rp. 2.500.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	25 x 2	Orang Hari	50.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	[-] Penyuluhan TMMD Sengkuyung III					**Rp. 5.000.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	50 x 2	Orang Hari	50.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	[-] Peserta Sarasehan TMMD					**Rp. 2.500.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	50 x 1	Orang Hari	50.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	[-] Petugas Simtuduror					**Rp. 1.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	10 x 2	Orang Hari	50.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] Tenaga Pendukung					**Rp. 7.500.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	75 x 2	Orang Hari	50.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
	[#] TMMD Sengkuyung IV **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 18.500.000,00**
	[-] Koralik TMMD					**Rp. 2.500.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	25 x 2	Orang Hari	50.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	[-] Penyuluhan TMMD Sengkuyung IV					**Rp. 5.000.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	50 x 2	Orang Hari	50.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	[-] Peserta Sarasehan TMMD					**Rp. 2.500.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	50 x 1	Orang Hari	50.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	[-] Petugas Simtuduror					**Rp. 1.000.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	10 x 2	Orang Hari	50.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] Tenaga Pendukung					**Rp. 7.500.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	75 x 2	Orang Hari	50.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 8.800.000,00**
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp. 8.800.000,00**
5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**					**Rp. 8.800.000,00**
5.2.04.01.01	**Belanja Modal Jalan**					**Rp. 8.800.000,00**
5.2.04.01.01.0010	**Belanja Modal Jalan Lainnya**					**Rp. 8.800.000,00**
	[#] TMMD Sengkuyung I **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 8.800.000,00**
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan					**Rp. 1.000.000,00**
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 jut...	1 x 4	Orang / Paket / Pekerjaan Lokasi	250.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] Honorarium PPKOM TMMD					**Rp. 1.200.000,00**
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 jut...	1 x 4	Orang / Paket / Pekerjaan Lokasi	300.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[-] Honorarium Tim Teknis Pengawasan TMMD (Anggota)					**Rp. 1.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Tim Teknis Kegiatan, Anggota Spesifikasi : Nilai paket pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 jut...	1 x 4	Orang / Paket / Pekerjaan Lokasi	250.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] Honorarium Tim Teknis Pengawasan TMMD (Ketua)					**Rp. 1.200.000,00**
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Tim Teknis Kegiatan, Ketua Spesifikasi : Nilai paket pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 jut...	1 x 4	Orang / Paket / Pekerjaan Lokasi	300.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[-] Honorarium Tim Teknis Pengawasan TMMD (Sekretaris)					**Rp. 1.100.000,00**
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Tim Teknis Kegiatan, Sekretaris Spesifikasi : Nilai paket pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 jut...	1 x 4	Orang / Paket / Pekerjaan Lokasi	275.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
	[-] Honorarium Tim Teknis Persiapan TMMD (Anggota)					**Rp. 1.000.000,00**
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Tim Teknis Kegiatan, Anggota Spesifikasi : Nilai paket pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 jut...	1 x 4	Orang / Paket / Pekerjaan Lokasi	250.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] Honorarium Tim Teknis Persiapan TMMD (Ketua)					**Rp. 1.200.000,00**
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Tim Teknis Kegiatan, Ketua Spesifikasi : Nilai paket pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 jut...	1 x 4	Orang / Paket / Pekerjaan Lokasi	300.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[-] Honorarium Tim Teknis Persiapan TMMD (Sekretaris)					**Rp. 1.100.000,00**
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Tim Teknis Kegiatan, Sekretaris Spesifikasi : Nilai paket pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 jut...	1 x 4	Orang / Paket / Pekerjaan Lokasi	275.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
					Jumlah :	**Rp. 557.400.000,00**

Kota Pekalongan, 8 Agustus 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

PUJI WINARTI, S.K.M.Kes.
NIP. 197005021996012001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	19650814199203 1005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH,S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi	: 2.13.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
Kegiatan	: 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kelurahan Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 32.528.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 50.164.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang"	88.89 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 32.528.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen
Hasil	Persentase kinerja administrasi kelurahan	100.00 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 32.528.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 32.528.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.400.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.400.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.400.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.400.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.400.000,00
	[-] Honor Kasir Kegiatan					Rp. 2.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 x 12	Orang Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 30.128.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 9.848.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 9.848.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 678.000,00**
	[#] Penyusunan Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 678.000,00**
	[-] Fotocopy					**Rp. 678.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : A4	2260	Lembar	300,00	0 %	Rp. 678.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 990.000,00**
	[#] Penyusunan Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 990.000,00**
	[-] Spanduk Lomba					**Rp. 990.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	5 x 3	Buah Meter	66.000,00	0 %	Rp. 990.000,00
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp. 800.000,00**
	[#] Penyusunan Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 800.000,00**
	[-] Belanja Piala (Besar, Sedang, Kecil)					**Rp. 800.000,00**
	Piala Berego Spesifikasi : -	1	Set	800.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 7.380.000,00**
	[#] Penyusunan Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 7.380.000,00**
	[-] Rakor Lomba Perkembangan Kelurahan					**Rp. 5.535.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	45 x 3	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 1.485.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	45 x 3	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 4.050.000,00
	[-] Tim Lomba Perkembangan Kelurahan					**Rp. 1.845.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	15 x 3 x 1	Orang Kecamatan Kali	11.000,00	0 %	Rp. 495.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	15 x 3 x 1	Orang Kecamatan Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 6.750.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 6.750.000,00**
5.1.02.02.01.0037	**Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan**					**Rp. 6.750.000,00**
	[#] Penyusunan Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 6.750.000,00**
	[-] Tim Juri Lomba Perkembangan Kelurahan					**Rp. 6.750.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Juri / Pengamat Spesifikasi : Lokal	9 x 1	Orang Kali	750.000,00	0 %	Rp. 6.750.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 3.480.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 3.480.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 3.480.000,00**
	[#] Penyusunan Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.480.000,00**
	[-] Monev Petugas Input Prodeskel Epdeskel Kecamatan					**Rp. 240.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	2 x 1 x 4	Orang Hari Kecamatan	30.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	[-] Monev Petugas Input Prodeskel Epdeskel Kelurahan					**Rp. 3.240.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	2 x 2 x 27	Orang Hari Kelurahan	30.000,00	0 %	Rp. 3.240.000,00
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 10.050.000,00**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 10.050.000,00**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp. 10.050.000,00**
	[#] Penyusunan Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 10.050.000,00**
	[-] Uang Pembinaan Lomba Perkembangan Kelurahan					**Rp. 10.050.000,00**
	Lomba Pemberdayaan Masyarakat Spesifikasi : Juara I	0.4	Kali	12.000.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Lomba Pemberdayaan Masyarakat Spesifikasi : Juara II	0.75	Kali	4.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Lomba Pemberdayaan Masyarakat Spesifikasi : Juara III	0.75	Kali	3.000.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
					Jumlah :	**Rp. 32.528.300,00**

Kota Pekalongan, 8 Agustus 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

PUJI WINARTI, S.K.M.,M.Kes.
NIP. 197005021996012001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH,S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi	: 2.13.2.06.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Kegiatan	: 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, Masyarakat Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 130.182.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 165.475.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	97,75 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 130.182.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen
Hasil	Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	100,00 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 130.182.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 130.182.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 1.350.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 1.350.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 1.350.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 1.350.000,00**
	[#] Honorarium PPTK dan Kasir **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.350.000,00**
	[-] Kasir					**Rp. 1.350.000,00**
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta ...	1 x 6	Orang Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 128.832.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 17.164.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 17.164.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 824.000,00**
	[#] Penyusunan Dokumen Evaluasi Pemberdayaan LKK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 824.000,00**
	[-] Fotocopy					**Rp. 824.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : A4	2745	Lembar	300,00	0 %	Rp. 823.800,00
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	200	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 11.490.000,00**
	[#] Penyusunan Dokumen Evaluasi Pemberdayaan LKK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 11.490.000,00**
	[-] Rakor Kelembagaan Masyarakat					**Rp. 5.740.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	35 x 4	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 1.540.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	35 x 4	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
	[-] Rakor Pemberdayaan Masyarakat					**Rp. 5.740.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	35 x 4	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 1.540.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	35 x 4	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp. 4.860.000,00**
	[#] Penyusunan Dokumen Evaluasi Pemberdayaan LKK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 4.860.000,00**
	[-] Monitoring LKK dan Pemberdayaan Masyarakat					**Rp. 4.860.000,00**
	Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	2 x 27 x 3	Orang Kelurahan Lembaga	30.000,00	0 %	Rp. 4.860.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 90.168.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 85.809.000,00**
5.1.02.02.01.0020	**Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial**					**Rp. 37.809.000,00**
	[#] TA Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 37.809.000,00**
	[-] Gaji TA Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat					**Rp. 37.809.000,00**
	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Spesifikasi : Koordinator Faskel/Tehnikal Asisten	1 x 12	Orang Bulan	3.150.000,00	0 %	Rp. 37.800.000,00
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 48.000.000,00**
	[#] Tenaga Administrasi DPMPPA **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 48.000.000,00**
	[-] Gaji Tenaga Administrasi DPMPPA					**Rp. 48.000.000,00**
	Tenaga Administrasi DPMPPA Spesifikasi : -	2 x 12	Orang Bulan	2.000.000,00	0 %	Rp. 48.000.000,00
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 4.359.000,00**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 3.816.000,00**
	[#] TA Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.512.000,00**
	[-] BPJS TA Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat					**Rp. 1.512.000,00**
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi : -	1 x 12 x 126000	Orang Bulan Rupiah	1,00	0 %	Rp. 1.512.000,00
	[#] Tenaga Administrasi DPMPPA **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.304.000,00**
	[-] BPJS Tenaga Administrasi DPMPPA					**Rp. 2.304.000,00**
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi : -	2 x 12 x 96000	Orang Bulan Rupiah	1,00	0 %	Rp. 2.304.000,00
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 240.000,00**
	[#] TA Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 96.000,00**
	[-] JKK TA Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat					**Rp. 96.000,00**
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi : -	1 x 12 x 8000	Orang Bulan Rupiah	1,00	0 %	Rp. 96.000,00
	[#] Tenaga Administrasi DPMPPA **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 144.000,00**
	[-] JKK Tenaga Administrasi DPMPPA					**Rp. 144.000,00**
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi : -	2 x 12 x 6000	Orang Bulan Rupiah	1,00	0 %	Rp. 144.000,00
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp. 312.000,00**
	[#] TA Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 120.000,00**
	[-] JKM TA Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat					**Rp. 120.000,00**
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi : -	1 x 12 x 10000	Orang Bulan Rupiah	1,00	0 %	Rp. 120.000,00
	[#] Tenaga Administrasi DPMPPA **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 192.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] JKM Tenaga Administrasi DPMPPA					**Rp. 192.000,00**
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi : -	2 x 12 x 8000	Orang Bulan Rupiah	1,00	0 %	Rp. 192.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 21.500.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 21.500.000,00**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 21.500.000,00**
	[#] ASB 012 - PENYELENGGARAAN FORUM DAN RAPAT KOORDINASI INTERNAL DENGAN NARASUMBER INTERNAL DI DALAM KANTOR **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 5.840.000,00**
	[-] Rakor Pokjanal Posyandu					**Rp. 5,840,000,00**
	ASB 012 PENYELENGGARAAN FORUM DAN RAPAT KOORDINASI INTERNAL DENGAN NARASUMBER INTERNAL DI DALAM KANTOR Spesifikasi : -	20 x 2	Orang / Hari Kali	146.000,00	0 %	Rp. 5.840.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Evaluasi Pemberdayaan LKK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 15.860.000,00**
	[-] Monitoring LKK dan Pemberdayaan Masyarakat					**Rp. 4.860.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	2 x 27 x 3	Orang Kelurahan Lembaga	30.000,00	0 %	Rp. 4.860.000,00
	[-] Rakor Kelembagaan Masyarakat					**Rp. 5.400.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	27 x 4	Orang Kali	50.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	[-] Rakor Pemberdayaan Masyarakat					**Rp. 5.400.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	27 x 4	Orang Kali	50.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
					Jumlah :	**Rp. 138.182.000,00**

Kota Pekalongan, 6 Agustus 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

PUJI WINARTI, S.KM,M.Kes.
NIP.197005021998012001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah			
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL K...	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KET.	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S,H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi	: 2.13.2.09.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Kegiatan	: 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, Masyarakat Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 54.894.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 158.375.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	97.75 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 54.894.000,00
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga
Hasil	Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	100.00 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 54.894.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 54.894.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 1.350.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 1.350.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 1.350.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 1.350.000,00**
	[#] Honorarium PPTK dan Kasir **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.350.000,00**
	[-] Kasir					**Rp. 1.350.000,00**
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta ...	1 x 6	Orang Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 53.544.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 1.500.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 1.500.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 65.000,00**
	[#] Pelatihan Peningkatan Kapasitas LKK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 65.000,00**
	[-] Fotocopy					**Rp. 65,000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : A4	216	Lembar	300,00	0 %	Rp. 64.800,00
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	200	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 1.435.000,00**
	[#] Pelatihan Peningkatan Kapasitas LKK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.435.000,00**
	[-] Rapat Persiapan Pelatihan Peningkatan Kapasitas					**Rp. 1.435.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	35 x 1	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 385.000,00
	Jamuan makan (persecorangan) Spesifikasi : -	35 x 1	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 52.044.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 24.000.000,00**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 24.000.000,00**
	[#] Tenaga Administrasi DPMPPA **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 24.000.000,00**
	[-] Honorarium Tenaga Administrasi DPMPPA					**Rp. 24.000.000,00**
	Tenaga Administrasi DPMPPA Spesifikasi : -	1 x 12	Orang Bulan	2.000.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 1.320.000,00**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 1.152.000,00**
	[#] Tenaga Administrasi DPMPPA **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.152.000,00**
	[-] BPJS Tenaga Administrasi DPMPPA					**Rp. 1.152.000,00**
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi : -	1 x 12 x 96000	Orang Bulan Rupiah	1,00	0 %	Rp. 1.152.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 72.000,00
	[#] Tenaga Administrasi DPMPPA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 72.000,00
	[-] JKK Tenaga Administrasi DPMPPA					Rp. 72.000,00
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi : -	1 x 12 x 6000	Orang Bulan Rupiah	1,00	0 %	Rp. 72.000,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 96.000,00
	[#] Tenaga Administrasi DPMPPA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 96.000,00
	[-] JKM Tenaga Administrasi DPMPPA					Rp. 96.000,00
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi : -	1 x 12 x 8000	Orang Bulan Rupiah	1,00	0 %	Rp. 96.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 26.724.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 26.724.000,00
	[#] Pelatihan Peningkatan Kapasitas LKK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 26.724.000,00
	[-] Pelatihan Posyandu					Rp. 26.724.000,00
	ASB 005 PELATIHAN TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT DI DALAM KANTOR Spesifikasi : -	102 x 2	Orang Hari	131.000,00	0 %	Rp. 26.724.000,00
					Jumlah :	Rp. 54.894.000,00

Kota Pekalongan, 8 Agustus 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

PUJI WINARTI, S.K.M.M.Kes.
NIP. 197005021995012001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	19750729194121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH,S.Sos.MM	19721013199603204	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi	: 2.13.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Kegiatan	: 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, Masyarakat Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 49.770.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 86.200.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	97.75 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 49.770.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan
Hasil	Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan dikembangkan	100.00 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 49.770.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 49.770.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.300.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.300.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.300.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.300.000,00
	[#] Inovator TTG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.300.000,00
	[-] Honorarium Kasir					Rp. 3.300.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 500 juta ...	12	Bulan	275.000,00	0 %	Rp. 3.300.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 46.470.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 9.540.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 9.540.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 750.000,00**
	[#] Inovator TTG **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 750.000,00**
	[-] Fotocopy					**Rp. 750.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : A4	2500	Lembar	300,00	0 %	Rp. 750.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 2.040.000,00**
	[#] Inovator TTG **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.040.000,00**
	[-] Banner					**Rp. 250.000,00**
	X Banner Spesifikasi : Rangka Aluminium, cetak MMT 340 gsm, uk 160x60	1	Buah	250.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	[-] Cetak Leaflet					**Rp. 920.000,00**
	Cetak Leaflet Spesifikasi : -	184	Lembar	5.000,00	0 %	Rp. 920.000,00
	[-] Spanduk					**Rp. 870.000,00**
	Spanduk berbahan plastik Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 60 cm	6	Meter	145.000,00	0 %	Rp. 870.000,00
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp. 600.000,00**
	[#] Inovator TTG **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 600.000,00**
	[-] Piala Lomba Inovasi TTG					**Rp. 600.000,00**
	Piala Penrangan Spesifikasi : -	1	Set	600.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 6.150.000,00**
	[#] ASB 002 - Sosialisasi Inovasi Teknologi Tepat Guna **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.460.000,00**
	[-] Sosialisasi Inovasi Teknologi Tepat Guna					**Rp. 2.460.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	30 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	30 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 660.000,00
	[#] Inovator TTG **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.690.000,00**
	[-] Snack dan Makan Kegiatan TTG					**Rp. 0,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	-	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 0,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	-	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[-] Snack dan Makan Penilaian Lomba Inovasi TTG Tingkat Kota					**Rp. 1.230.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	30	Orang	30.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	30	Orang	11.000,00	0 %	Rp. 330.000,00
	[-] Snack dan Makan Rakor Inovasi TTG					**Rp. 0,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	-	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	-	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[-] Snack dan Makan Rakor Persiapan Lomba TTG					**Rp. 1.435.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	35 x 1	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	35 x 1	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 385.000,00
	[-] Snack dan Makan Rakor Posyantek Tingkat Kota					**Rp. 1.025.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	25 x 1	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	25 x 1	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 275.000,00
	[-] Snack dan Makan Tim Juri Lomba Inovasi TTG					**Rp. 0,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	-	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	-	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp. 0,00**
	[#] Keikutsertaan dalam Event TTG Tingkat Nasional **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 0,00**
	[-] Seragam Batik TTG Nasional					**Rp. 0,00**
	Seragam Batik TTG Nasional Spesifikasi : -	-	Buah	440.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 18.250.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 18.250.000,00**
5.1.02.02.01.0037	**Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan**					**Rp. 3.750.000,00**
	[#] Inovator TTG **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.750.000,00**
	[-] Honor Tim Juri Lomba Inovasi TTG Tingkat Kota Pekalongan					**Rp. 3.750.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Juri Perlombaan/Seni Spesifikasi : Lokal	5	Orang	750.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**Rp. 14.500.000,00**
	[#] Kaikutsertaan dalam Event TTG Tingkat Nasional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 14.500.000,00**
	[-] Dekorasi Stand Pameran					**Rp. 4.500.000,00**
	Sewa Stand Pameran Spesifikasi : -	2	Kegiatan	2.250.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	[-] Stand Pameran TTG Tingkat Nasional					**Rp. 10.000.000,00**
	Sewa Stand @10jt Spesifikasi : -	1	Kegiatan	10.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 6.680.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 6.680.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 2.430.000,00**
	[#] Inovator TTG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.430.000,00**
	[-] Monitoring dan Evaluasi Posyantek dan TTG					**Rp. 2.430.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 6 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	3 x 27	Orang Kelurahan	30.000,00	0 %	Rp. 2.430.000,00
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 4.250.000,00**
	[#] ASB 002 - Sosialisasi Inovasi Teknologi Tepat Guna Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.000.000,00**
	[-] Sosialisasi Inovasi Teknologi Tepat Guna					**Rp. 3.000.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	30 x 2	Orang Hari	50.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[#] Inovator TTG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.250.000,00**
	[-] Banpot Rakor Inovasi TTG					**Rp. 0,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	-	Orang Kali	50.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[-] Banpot Rakor Posyantek Tingkat Kota					**Rp. 1.250.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	25 x 1	Orang Hari	50.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 12.000.000,00**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 12.000.000,00**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp. 12.000.000,00**
	[#] Inovator TTG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 12.000.000,00**
	[-] Hadiah Lomba Inovasi TTG Tingkat Kota Pekalongan					**Rp. 12.000.000,00**
	Lomba Kreativitas Teknologi dan Inovasi Spesifikasi : Juara I	1	Kali	5.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Lomba Kreativitas Teknologi dan Inovasi Spesifikasi : Juara II	1	Kali	4.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Lomba Kreativitas Teknologi dan Inovasi Spesifikasi : Juara III	1	Kali	3.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
					Jumlah :	Rp. 49.770.000,00

Kota Pekalongan, 9 Agustus 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

PUJI WINARTI, S.K.M.,M.Kes.
NIP. 197006021993012001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH,S.Sos.MM	197210131986032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi	: 2.13.2.06.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.13.65 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Kegiatan	: 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, Masyarakat Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 34.980.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 68.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	97,75 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 34.980.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan
Hasil	Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	100,00 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 34.980.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 34.980.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.400.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.400.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.400.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.400.000,00
	[#] Fasilitasi Kegiatan BBGRM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.400.000,00
	[-] Honorarium Kasir					Rp. 2.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 x 12	Orang Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 32.580.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 11.410.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 11.410.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 252.000,00**
	[#] Fasilitasi Kegiatan BBGRM **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 252.000,00**
	[-] Fotocopy					**Rp. 252.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : A4	840	Lembar	300,00	0 %	Rp. 252.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.383.000,00**
	[#] Fasilitasi Kegiatan BBGRM **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 396.000,00**
	[-] Spanduk					**Rp. 396.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	6	Meter	66.000,00	0 %	Rp. 396.000,00
	[#] Puncak Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 907.000,00**
	[-] Backdrop					**Rp. 907.000,00**
	Backdrop Spesifikasi : rangka besi, MMT uk. 3x5 m	1	Meter	907.000,00	0 %	Rp. 907.000,00
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp. 1.200.000,00**
	[#] Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.200.000,00**
	[-] Piala Lomba BBGRM Tingkat Kota Pekalongan					**Rp. 1.200.000,00**
	Piala Perorangan Spesifikasi : -	2	Set	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 8.655.000,00**
	[#] Fasilitasi Kegiatan BBGRM **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.055.000,00**
	[-] Makan Kegiatan Lapangan					**Rp. 1.620.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	27 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.620.000,00
	[-] Rapat Koordinasi Kegiatan BBGRM					**Rp. 1.435.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	35 x 1	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 385.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	35 x 1	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
	[#] Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 4.100.000,00**
	[-] Rapat Persiapan Lomba BBGRM					**Rp. 2.870.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	35 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 770.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	35 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	[-] Rapat Tim Juri Lomba BBGRM					**Rp. 1.230.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	15 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 330.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	15 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	[#] Puncak Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.500.000,00**
	[-] Makan Kebersihan Lapangan Puncak BBGRM					**Rp. 1.500.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	50	Orang / Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 5.800.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 5.800.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 2.050.000,00**
	[#] Puncak Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.050.000,00**
	[-] Ketua TP PKK Kota Pekalongan/Wakil Ketua TP PKK Kota Pekalongan					**Rp. 750.000,00**
	Honor Narasumber Ketua PKK Tingkat Kota Spesifikasi : -	1	Orang / Kegiatan	750.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	[-] Walikota/Wakil Walikota Pekalongan					**Rp. 1.300.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Walikota/ Wakil Bupati/Wakil Walikota	1	Orang / Kegiatan	1.300.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
5.1.02.02.01.0037	**Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan**					**Rp. 3.750.000,00**
	[#] Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.750.000,00**
	[-] Juri Lomba BBGRM Tingkat Kota Pekalongan					**Rp. 3.750.000,00**
	Juri Perlombaan/Seni Spesifikasi : Lokal	5	Orang / Kegiatan	750.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 7.870.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 7.870.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 1.620.000,00**
	[#] Fasilitasi Kegiatan BBGRM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.620.000,00**
	[-] Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Gotong Royong Masyarakat					**Rp. 1.620.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	2 x 27	Orang Kelurahan	30.000,00	0 %	Rp. 1.620.000,00
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 6.250.000,00**
	[#] Puncak Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 6.250.000,00**
	[-] Kebersihan Lapangan Acara Puncak BBGRM					**Rp. 2.500.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	50	Orang	50.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	[-] Tenaga Pendukung Acara Puncak BBGRM					**Rp. 3.750.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	75	Orang	50.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
5.1.02.03	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 7.500.000,00**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 7.500.000,00**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp. 7.500.000,00**
	[#] Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 7.500.000,00**
	[-] Hadiah Lomba BBGRM					**Rp. 7.500.000,00**
	Lomba Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat Spesifikasi : Juara I	0.5	Kali	8.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Lomba Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat Spesifikasi : Juara II	0.5	Kali	4.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Lomba Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat Spesifikasi : Juara III	0.5	Kali	3.000.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
					Jumlah :	**Rp. 34.980.000,00**

Kota Pekalongan, 8 Agustus 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

PUJI WINARTI, S.K.M.,M.Kes.
NIP. 19790602199032001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
8	NUR SOBAH,S.Sos,MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi	: 2.13.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Kegiatan	: 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, Masyarakat Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 426.290.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 170.274.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	97.75 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 426.290.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen
Hasil	Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	100.00 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 426.290.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 426.290.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 426.290.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 166.640.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 166.640.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.000.000,00
	[#] Fasilitasi Kegiatan TP PKK Kota Pekalongan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.000.000,00
	[-] MAP PKK					Rp. 2.000.000,00
	Map Spesifikasi : berlogo	200	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 13.100.000,00
	[#] ASB 002 - SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - SETENGAH HARI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 594.000,00
	[-] SOSIALISASI GELARI PELANGI - POKJA II					Rp. 198.000,00
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	3	Meter	66.000,00	0 %	Rp. 198.000,00
	[-] SOSIALISASI KELURAHAN GAGAH (TANGGAP DAN TANGGUH) BENCANA - POKJA IV					Rp. 198.000,00
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	3	Meter	66.000,00	0 %	Rp. 198.000,00
	[-] SOSIALISASI KELURAHAN RAMAH PEDULI ANAK - POKJA I					Rp. 198.000,00
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	3	Meter	66.000,00	0 %	Rp. 198.000,00
	[#] ASB 005 - SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - PENUH HARI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 792.000,00
	[-] PELATIHAN CRAFT - POKJA II					Rp. 198.000,00
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	3	Meter	66.000,00	0 %	Rp. 198.000,00
	[-] PELATIHAN PEMBUATAN ABON DARI LIMBAH FILLET IKAN - POKJA III					Rp. 198.000,00
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	3	Meter	66.000,00	0 %	Rp. 198.000,00
	[-] PELATIHAN PEMBUATAN PUPUK ORGANIK CAIR - POKJA III					Rp. 198.000,00
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	3	Meter	66.000,00	0 %	Rp. 198.000,00
	[-] PELATIHAN TP3PKK - SEKRETARIAT					Rp. 198.000,00
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	3	Meter	66.000,00	0 %	Rp. 198.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Fasilitasi Kegiatan TP PKK Kota Pekalongan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 19.724.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)					Rp. 19.326.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 ; 70 gr ; 216 X 330 mm	5	Rim	60.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 ; 70 gr; 210 X297 mm	20	Rim	54.000,00	0 %	Rp. 1.080.000,00
	Fotocopy Spesifikasi : A4	19826	Lembar	300,00	0 %	Rp. 5.947.800,00
	Cetak Plakat Spesifikasi : -	10	Buah	300.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	200	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 200,00
	[-] SPANDUK					Rp. 396.000,00
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	6	Meter	66.000,00	0 %	Rp. 396.000,00
	[#] KEGIATAN LOMBA PKK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 990.000,00
	[-] LOMBA ADMINISTRASI PKK - SEKRETARIAT					Rp. 198.000,00
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	3	Meter	66.000,00	0 %	Rp. 198.000,00
	[-] LOMBA BEBERAN - POKJA I					Rp. 198.000,00
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	3	Meter	66.000,00	0 %	Rp. 198.000,00
	[-] LOMBA GELARI PELANGI - POKJA II					Rp. 198.000,00
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	3	Meter	66.000,00	0 %	Rp. 198.000,00
	[-] LOMBA HATINYA PKK - POKJA III					Rp. 198.000,00
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	3	Meter	66.000,00	0 %	Rp. 198.000,00
	[-] LOMBA PENGELOLAAN BANK SAMPAH - POKJA IV					Rp. 198.000,00
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	3	Meter	66.000,00	0 %	Rp. 198.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 17.500.000,00
	[#] Fasilitasi Kegiatan TP PKK Kota Pekalongan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 17.500.000,00
	[-] SERAGAM KAOS PKK					Rp. 17.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kaos Lapangan Lengan Panjang Spesifikasi : -	175	Buah	100.000,00	0 %	Rp. 17.500.000,00
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cenders Mata**					**Rp. 4.000.000,00**
	[#] KEGIATAN LOMBA PKK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 4.000.000,00**
	[-] LOMBA ADMINISTRASI PKK - SEKRETARIAT					**Rp. 800.000,00**
	Piala Beregu Spesifikasi : -	1	Set	800.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	[-] LOMBA BEBERAN - POKJA I					**Rp. 800.000,00**
	Piala Beregu Spesifikasi : -	1	Set	800.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	[-] LOMBA GELARI PELANGI - POKJA II					**Rp. 800.000,00**
	Piala Beregu Spesifikasi : -	1	Set	800.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	[-] LOMBA HATINYA PKK - POKJA III					**Rp. 800.000,00**
	Piala Beregu Spesifikasi : -	1	Set	800.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	[-] LOMBA PENGELOLAAN BANK SAMPAH - POKJA IV					**Rp. 800.000,00**
	Piala Beregu Spesifikasi : -	1	Set	800.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 7.816.000,00**
	[#] Fasilitasi Kegiatan TP PKK Kota Pekalongan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 7.816.000,00**
	[-] KARDUS BINGKISAN PKK					**Rp. 3.000.000,00**
	Kardus Spesifikasi : -	200	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] SERAGAM JAS PKK					**Rp. 4.000.000,00**
	Kain Seragam Jas PKK Spesifikasi : -	10	Stel	400.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	[-] TAPLAK MEJA					**Rp. 816.000,00**
	Taplak Spesifikasi : Meja Tamu	12	Buah	68.000,00	0 %	Rp. 816.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 86.349.000,00**
	[#] ASB 002 - SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - SETENGAH HARI **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 6.487.000,00**
	[-] SOSIALISASI GELARI PELANGI - POKJA II					**Rp. 3.690.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	45 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 990.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	45 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
	[-] SOSIALISASI KELURAHAN GAGAH (TANGGAP DAN TANGGUH) BENCANA - POKJA IV					**Rp. 1.945.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	45 x 1	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	45 x 1	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 495.000,00
	[-] SOSIALISASI KELURAHAN RAMAH PEDULI ANAK - POKJA I					Rp. 2.952.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	72	Orang / Kali	30.000,00	0 %	Rp. 2.160.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	72	Orang / Kali	11.000,00	0 %	Rp. 792.000,00
	[#] ASB 005 - SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - PENUH HARI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.380.000,00
	[-] PELATIHAN CRAFT - POKJA II					Rp. 1.640.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	40	Orang / Kali	11.000,00	0 %	Rp. 440.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	40	Orang / Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[-] PELATIHAN PEMBUATAN ABON DARI LIMBAH FILLET IKAN - POKJA III					Rp. 2.870.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	70	Orang / Kali	30.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	70	Orang / Kali	11.000,00	0 %	Rp. 770.000,00
	[-] PELATIHAN TP3PKK - SEKRETARIAT					Rp. 2.870.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	35 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 770.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	35 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	[#] Fasilitasi Kegiatan TP PKK Kota Pekalongan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 36.862.000,00
	[-] BERBAGI TAKJIL RAMADHAN - POKJA I					Rp. 1.650.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	150	Orang / Kali	11.000,00	0 %	Rp. 1.650.000,00
	[-] PADUAN SUARA PKK HARI IBU					Rp. 3.960.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	30 x 12	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 3.960.000,00
	[-] RAPAT INTI					Rp. 4.100.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	25 x 4	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	25 x 4	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] RAPAT PLENO TP PKK KOTA KEC KEL					**Rp. 24.600.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	75 x 6	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	75 x 8	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 6.600.000,00
	[-] RAPAT POKJA PKK KOTA					**Rp. 2.112.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	12 x 4 x 4	Orang Bidang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 2.112.000,00
	[-] RAPAT SEKRETARIS DAN BENDAHARA PKK KOTA					**Rp. 440.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	10 x 4	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 440.000,00
	[#] KEGIATAN LOMBA PKK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 33.620.000,00**
	[-] EVALUASI KELURAHAN GAGAH (TANGGAP DAN TANGGUH) BENCANA PADA KELURAHAN BINAAN - POKJA IV					**Rp. 2.050.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	50	Orang / Kali	11.000,00	0 %	Rp. 550.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	50	Orang / Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] LOMBA ADMINISTRASI PKK - SEKRETARIAT					**Rp. 1.640.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	40	Orang / Kali	11.000,00	0 %	Rp. 440.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	40	Orang / Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[-] LOMBA BEBERAN - POKJA I					**Rp. 4.100.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	100	Orang / Kali	11.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	100	Orang / Kali	30.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] LOMBA GELARI PELANGI - POKJA II					**Rp. 5.740.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	30	Orang / Kali	11.000,00	0 %	Rp. 330.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	30	Orang / Kali	30.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	15 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 330.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	15 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	80	Orang / Kali	11.000,00	0 %	Rp. 880.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	80	Orang / Kali	30.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[-] LOMBA HATINYA PKK - POKJA III					**Rp. 2.460.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	60	Orang / Kali	11.000,00	0 %	Rp. 660.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	60	Orang/Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	[-] LOMBA PADUAN SUARA TINGKAT PROVINSI					**Rp. 8.200.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	20 x 10	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 2.200.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	20 x 10	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[-] LOMBA PENGELOLAAN BANK SAMPAH - POKJA IV					**Rp. 2.050.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	50	Orang/Kali	11.000,00	0 %	Rp. 550.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	50	Orang / Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] LOMBA SENAM KREASI 6 LANGKAH CUCI TANGAN - POKJA IV					**Rp. 7.380.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	15 x 12	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	15 x 12	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 1.980.000,00
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp. 35.875.000,00**
	[#] Fasilitasi Kegiatan TP PKK Kota Pekalongan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 35.875.000,00**
	[-] SERAGAM BATIK PKK					**Rp. 30.625.000,00**
	Seragam Batik PKK Spesifikasi : -	175	Buah	175.000,00	0 %	Rp. 30.625.000,00
	[-] SERAGAM PADUAN SUARA PKK					**Rp. 5.250.000,00**
	Seragam Batik PKK Spesifikasi : -	30	Buah	175.000,00	0 %	Rp. 5.250.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 164.880.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 159.500.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 11.500.000,00**
	[#] ASB 002 - SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - SETENGAH HARI **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 6.000.000,00**
	[-] SOSIALISASI GELARI PELANGI - POKJA II					**Rp. 1.500.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Staf (Honor Narasumber hanya diberikan untuk Wali ...	3	Orang / Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] SOSIALISASI KELURAHAN GAGAH (TANGGAP DAN TANGGUH) BENCANA - POKJA IV					**Rp. 2.000.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Staf (Honor Narasumber hanya diberikan untuk Wali ...	4 x 1	Orang Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] SOSIALISASI KELURAHAN RAMAH PEDULI ANAK - POKJA I					**Rp. 2.500.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Staf (Honor Narasumber hanya diberikan untuk Wali ...	5	Orang / Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	[#] ASB 005 - SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - PENUH HARI **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 5.500.000,00**
	[-] PELATIHAN CRAFT - POKJA II					**Rp. 2.000.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Staf (Honor Narasumber hanya diberikan untuk Wali ...	4	Orang	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] PELATIHAN PEMBUATAN ABON DARI LIMBAH FILLET IKAN - POKJA III					**Rp. 1.500.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Staf (Honor Narasumber hanya diberikan untuk Wali ...	3	Orang / Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] PELATIHAN TP3PKK - SEKRETARIAT					**Rp. 2.000.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Staf (Honor Narasumber hanya diberikan untuk Wali ...	2 x 2	Orang Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp. 16.500.000,00**
	[#] Fasilitasi Kegiatan TP PKK Kota Pekalongan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 16.500.000,00**
	[-] HONOR KOH SELAKU PENASEHAT PKK					**Rp. 9.000.000,00**
	Honorarium Panitia Kegiatan Spesifikasi : Pengarah/Pembina/Penasehat/Penanggung Jawab/Ketua ...	1 x 12	Orang Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] HONOR WKDH SELAKU PENASEHAT PKK					Rp. 7.500.000,00
	Honorarium Panitia Kegiatan Spesifikasi : Pengarah/Pembina/Penasehat/Penanggung Jawab/Ketua ...	1 x 12	Orang Bulan	625.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan					Rp. 4.400.000,00
	[#] Fasilitasi Kegiatan TP PKK Kota Pekalongan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.400.000,00
	[-] PELATIH PADUAN SUARA PKK HARI IBU					Rp. 2.400.000,00
	Jasa Pelatih Ekstrakurikuler Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[#] KEGIATAN LOMBA PKK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.000.000,00
	[-] LOMBA PADUAN SUARA TINGKAT PROVINSI					Rp. 2.000.000,00
	Jasa Pelatih Ekstrakurikuler Spesifikasi : -	1 x 10	Orang Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 96.000.000,00
	[#] Fasilitasi Kegiatan TP PKK Kota Pekalongan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 96.000.000,00
	[-] HONOR TENAGA KEGIATAN DPMPPA					Rp. 96.000.000,00
	Tenaga Administrasi DPMPPA Spesifikasi : -	4 x 12	Orang Bulan	2.000.000,00	0 %	Rp. 96.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp. 19.500.000,00
	[#] KEGIATAN LOMBA PKK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 19.500.000,00
	[-] EVALUASI KELURAHAN GAGAH (TANGGAP DAN TANGGUH) BENCANA PADA KELURAHAN BINAAN - POKJA IV					Rp. 3.750.000,00
	Juri Perlombaan/Seni Spesifikasi : Lokal	5	Orang	750.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
	[-] LOMBA ADMINISTRASI PKK - SEKRETARIAT					Rp. 5.250.000,00
	Juri Perlombaan/Seni Spesifikasi : Lokal	7	Orang / Kegiatan	750.000,00	0 %	Rp. 5.250.000,00
	[-] LOMBA BEBERAN - POKJA I					Rp. 2.250.000,00
	Juri Perlombaan/Seni Spesifikasi : Lokal	3	Orang / Kegiatan	750.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
	[-] LOMBA GELARI PELANGI - POKJA II					Rp. 3.750.000,00
	Juri Perlombaan/Seni Spesifikasi : Lokal	5	Orang / Kegiatan	750.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
	[-] LOMBA HATINYA PKK - POKJA III					Rp. 2.250.000,00
	Juri Perlombaan/Seni Spesifikasi : Lokal	3	Orang / Kegiatan	750.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
	[-] LOMBA PENGELOLAAN BANK SAMPAH - POKJA IV					Rp. 2.250.000,00
	Juri Perlombaan/Seni Spesifikasi : Lokal	3	Orang / Kegiatan	750.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0048	**Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi**					**Rp. 6.000.000,00**
	[#] Fasilitasi Kegiatan TP PKK Kota Pekalongan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 6.000.000,00**
	[-] JASA KONTRIBUSI KEGIATAN TEMU KADER NASIONAL					**Rp. 6.000.000,00**
	Jasa Kontribusi Rapat TP PKK Spesifikasi : -	6000000	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
5.1.02.02.01.0062	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**					**Rp. 1.500.000,00**
	[#] Fasilitasi Kegiatan TP PKK Kota Pekalongan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.500.000,00**
	[-] SURAT KABAR					**Rp. 1.500.000,00**
	Langganan Koran Regional Spesifikasi : -	12	Bulan	125.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp. 4.200.000,00**
	[#] Fasilitasi Kegiatan TP PKK Kota Pekalongan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 4.200.000,00**
	[-] INTERNET/TV BERLANGGANAN					**Rp. 4.200.000,00**
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi : -	350000 x 12	Rupiah Bulan	1,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 5.280.000,00**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 4.608.000,00**
	[#] Fasilitasi Kegiatan TP PKK Kota Pekalongan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 4.608.000,00**
	[-] TENAGA KEGIATAN DPMPPA					**Rp. 4.608.000,00**
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi : -	4 x 12 x 96000	Orang Bulan Rupiah	1,00	0 %	Rp. 4.608.000,00
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 288.000,00**
	[#] Fasilitasi Kegiatan TP PKK Kota Pekalongan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 288.000,00**
	[-] TENAGA KEGIATAN DPMPPA					**Rp. 288.000,00**
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi : -	4 x 12 x 6000	Orang Bulan Rupiah	1,00	0 %	Rp. 288.000,00
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp. 384.000,00**
	[#] Fasilitasi Kegiatan TP PKK Kota Pekalongan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 384.000,00**
	[-] TENAGA KEGIATAN DPMPPA					**Rp. 384.000,00**
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi : -	4 x 12 x 8000	Orang Bulan Rupiah	1,00	0 %	Rp. 384.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 73.020.300,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 73.020.300,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 43.020.300,00**
	[#] SPPD KEGIATAN PKK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 43.020.300,00**
	[-] BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI					**Rp. 27.610.300,00**
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Jawa Tengah	52	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 19.240.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Eselon II / Anggota DPRD	27	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 4.050.000,00
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : Jawa Tengah	4	Orang / Hari	1.080.000,00	0 %	Rp. 4.320.000,00
	[-] BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI					**Rp. 15.410.000,00**
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	12	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 6.360.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Eselon II / Anggota DPRD	7	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
	Biaya Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	4	Orang / Hari	2.000.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 7,800,000,00**
	[#] Fasilitasi Kegiatan TP PKK Kota Pekalongan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 6,500,000,00**
	[-] MONEV PELAYANAN KB SEREMPAK - POKJA IV					**Rp. 500,000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	5 x 4	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	[-] MONEV PENGELOLAAN BANK SAMPAH - POKJA IV					**Rp. 1,200,000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	10 x 4	Orang Hari	30.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[-] MONEV PKK BINAAN					**Rp. 3,840,000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	8 x 8 x 2	Orang Lokasi Hari	30.000,00	0 %	Rp. 3.840.000,00
	[-] MONEV TP PKK KOTA KE TP PKK KECAMATAN					**Rp. 960,000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	8 x 4	Orang Hari	30.000,00	0 %	Rp. 960.000,00
	[#] KEGIATAN LOMBA PKK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1,200,000,00**
	[-] EVALUASI KELURAHAN GAGAH (TANGGAP DAN TANGGUH) BENCANA PADA KELURAHAN BINAAN - POKJA IV					**Rp. 1,200,000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	10 x 4	Orang Hari	30.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.04.01.0084	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 22,200,000,00**
	[#] ASB 002 - SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - SETENGAH HARI **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 10,100,000,00**
	[-] SOSIALISASI GELARI PELANGI - POKJA II					**Rp. 4,500,000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	45 x 2	Orang Hari	50.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	[-] SOSIALISASI KELURAHAN GAGAH (TANGGAP DAN TANGGUH) BENCANA - POKJA IV					**Rp. 2.000.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	40 x 1	Orang Hari	50.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] SOSIALISASI KELURAHAN RAMAH PEDULI ANAK - POKJA I					**Rp. 3.600.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	72	Orang / Hari	50.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[#] ASB 085 - SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - PENUH HARI **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 12.100.000,00**
	[-] PELATIHAN CRAFT - POKJA II					**Rp. 2.000.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	40	Orang / Hari	50.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] PELATIHAN PEMBUATAN ABON DARI LIMBAH FILLET IKAN - POKJA III					**Rp. 3.500.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	70	Orang / Hari	50.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	[-] PELATIHAN PEMBUATAN PUPUK ORGANIK CAIR - POKJA III					**Rp. 3.500.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	70	Orang / Hari	50.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	[-] PELATIHAN TP3PKK - SEKRETARIAT					**Rp. 3.100.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	31 x 2	Orang Hari	50.000,00	0 %	Rp. 3.100.000,00
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 21.750.000,00**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 21.750.000,00**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp. 18.000.000,00**
	[#] KEGIATAN LOMBA PKK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 18.000.000,00**
	[-] EVALUASI KELURAHAN GAGAH (TANGGAP DAN TANGGUH) BENCANA PADA KELURAHAN BINAAN - POKJA IV					**Rp. 3.000.000,00**
	Lomba-Lomba PKK (berkaitan/bekerja sama dengan PKK) Spesifikasi : Juara I	1	Rupiah	1.250.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	Lomba-Lomba PKK (berkaitan/bekerja sama dengan PKK) Spesifikasi : Juara II	1	Rupiah	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Lomba-Lomba PKK (berkaitan/bekerja sama dengan PKK) Spesifikasi : Juara III	1	Rupiah	750.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	[-] LOMBA ADMINISTRASI PKK - SEKRETARIAT					**Rp. 3.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Lomba-Lomba PKK (berkaitan/bekerja sama dengan PKK) Spesifikasi : Juara I	1	Rupiah	1.250.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	Lomba-Lomba PKK (berkaitan/bekerja sama dengan PKK) Spesifikasi : Juara II	1	Rupiah	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Lomba-Lomba PKK (berkaitan/bekerja sama dengan PKK) Spesifikasi : Juara III	1	Rupiah	750.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	[-] LOMBA BEBERAN - POKJA I					**Rp. 3.000.000,00**
	Lomba-Lomba PKK (berkaitan/bekerja sama dengan PKK) Spesifikasi : Juara I	1	Rupiah	1.250.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	Lomba-Lomba PKK (berkaitan/bekerja sama dengan PKK) Spesifikasi : Juara II	1	Rupiah	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Lomba-Lomba PKK (berkaitan/bekerja sama dengan PKK) Spesifikasi : Juara III	1	Rupiah	750.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	[-] LOMBA GELARI PELANGI - POKJA II					**Rp. 3.000.000,00**
	Lomba-Lomba PKK (berkaitan/bekerja sama dengan PKK) Spesifikasi : Juara I	1	Rupiah	1.250.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	Lomba-Lomba PKK (berkaitan/bekerja sama dengan PKK) Spesifikasi : Juara II	1	Rupiah	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Lomba-Lomba PKK (berkaitan/bekerja sama dengan PKK) Spesifikasi : Juara III	1	Rupiah	750.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	[-] LOMBA HATINYA PKK - POKJA III					**Rp. 3.000.000,00**
	Lomba-Lomba PKK (berkaitan/bekerja sama dengan PKK) Spesifikasi : Juara I	1	Rupiah	1.250.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	Lomba-Lomba PKK (berkaitan/bekerja sama dengan PKK) Spesifikasi : Juara II	1	Rupiah	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Lomba-Lomba PKK (berkaitan/bekerja sama dengan PKK) Spesifikasi : Juara III	1	Rupiah	750.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	[-] LOMBA PENGELOLAAN BANK SAMPAH - POKJA IV					**Rp. 3.000.000,00**
	Lomba-Lomba PKK (berkaitan/bekerja sama dengan PKK) Spesifikasi : Juara I	1	Rupiah	1.250.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Lomba-Lomba PKK (berkaitan/bekerja sama dengan PKK) Spesifikasi : Juara II	1	Rupiah	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Lomba-Lomba PKK (berkaitan/bekerja sama dengan PKK) Spesifikasi : Juara III	1	Rupiah	750.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
5,1,02,05,01,0002	**Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi**					**Rp. 3.750.000,00**
	[#] Fasilitasi Kegiatan TP PKK Kota Pekalongan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.750.000,00**
	[-] APRESIASI KADER LESTARI PKK					**Rp. 3.750.000,00**
	Apresiasi kader Lestari PKK Spesifikasi : diterimakan sekali per orang	5	Orang	750.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
					Jumlah :	**Rp. 426.290.000,00**

Kota Pekalongan, 6 Agustus 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

PUJI WINARTI, S.K.M.M.Kes
NIP. 197005021995012001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221984031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH,S.Sos,MM	197210131996032004	ANGGOTA	

DINAS PERHUBUNGAN

DOKUMEN RENJA AKHIR 2025

KOTA PEKALONGAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
DAFTAR ISI ii
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Maksud dan Tujuan 1
1.3. Sistematika Penulisan 1
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 4
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 6
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 6
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 14
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 15
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 16
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 17
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 26
BAB V. PENUTUP 28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mendasari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah wajib menyusun rencana pembangunan tahunan. Rencana pembangunan tahunan dimaksud diwujudkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Program Strategis Nasional, RKPD Provinsi, serta dinamika lingkungan strategis yang berkembang.

Secara hierarki penyusunan rencana kerja OPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Sejalan dengan dasar pikir di atas maka Dinas Perhubungan Kota Pekalongan sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2025 menyusun Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekalongan tahun 2025. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Tahun 2025, merupakan Rencana Pembangunan Tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi dan Misi Walikota Pekalongan dalam urusan Perhubungan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pekalongan tahun 2025 dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik di Dinas Perhubungan Kota Pekalongan pada tahun 2025.

1.2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud kegiatan penyusunan Renja adalah untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik pada tahun 2025. Tahun 2025 merupakan tahun keempat RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Sesuai dengan RPJMD tersebut, maka Visi yang harus diwujudkan yaitu, "**Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius**". Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat tujuh misi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan.
3. Mewujudkan lingkungan pemukiman yang nyaman.
4. Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan.
5. Membangun ekonomi kreatif berbasis potensi lokalSistematika Penulisan.
6. Melestarikan budaya, kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan yang berakhlaqul karimah.
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses Rencana Kerja, Dinas Perhubungan Kota Pekalongan mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja. Pada dokumen Rencana Kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Terdapat 2 (dua) program yang menjadi urusan wajib Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dalam mewujudkan visi Dinas Perhubungan yakni **"*Terwujudnya Profesionalisme dalam Pelayanan dan Pengembangan Sistem Transportasi yang Lancar, Aman dan Efektif*"**, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Tahun 2022 merupakan kedua pada periode Renstra Dinas Perhubungan Kota Pekalongan 2021-2026 dan mendasar hasil evaluasi RKPD tahun 2024 yang telah dilaksanakan, Dinas Perhubungan Kota Pekalongan sudah melaksanakan seluruh program dan kegiatan dengan capaian sebagai berikut:
Secara umum realisasi capaian program dan kegiatan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Tidak terdapat realisasi capaian Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
b. Terdapat Program/Kegiatan yang melebihi target yang telah ditetapkan;
c. Terdapat Program/Kegiatan yang sesuai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Realisasi capaian Program/Kegiatan tahun 2025 secara lebih rinci akan disajikan dalam tabel di bawah ini:

No	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (Perubahan RPJMD 2021)	Realisasi 2021	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Realisasi 2023			
1	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota (IKK Outcome)	ratio	0.44	0,44	0,49	0.44	0.44	0.44	100	Tercapai
2	Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	persen	94	90	124,7	92	164,69	164,69	179,01	Melampaui
3	Persentase Peningkatan Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang Melaksanakan Uji Berkala	persen	0,76	0,76	(4,90)	0,75	(9,9)	(9,9)	(1,3)	Belum Tercapai
4	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
5	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
6	Persentase Pengadaan/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai

Indikator persentase ketersediaan laporan capaian kinerja, persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum, dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, serta persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah telah mencapai target sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pencapaian ini didukung oleh sumber daya manusia Dinas Perhubungan yang kompeten dan bertekad untuk menyelesaikan program/kegiatan sesuai target yang telah ditentukan.

Diketahui dari tabel di atas, indikator kinerja lalu lintas kabupaten/kota telah melampaui target, dimana V/C Ratio semakin kecil atau mendekati angka 0 (nol) maka suatu jalan semakin baik kinerja arus lalu lintasnya atau dianggap tidak terjadi kemacetan. Hasil perhitungan V/C Ratio jalan perkotaan di Kota Pekalongan sebesar 0,44 dari target yang ditetapkan sebesar 0,44. Dari hasil diatas maka tingkat kemacetan jalan perkotaan di Kota Pekalongan mencapai batas nilai *Level Of Service* (*LOS*) **B**. Hal ini menunjukan bahwa kepadatan arus lalu lintas meningkat dari tahun sebelumnya. Sehingga perlu untuk meningkatkan penggunaan kapasitas jalan agar arus lalu lintas semakin lancar

Sementara itu, indikator persentase kendaraan bermotor wajib uji yang melaksanakan uji berkala dan persentase peningkatan fasilitas LLAJ belum mencapai target Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat pemilik kendaraan barang untuk melakukan kewajiban uji berkala. untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pemilik kendaraan barang, Dinas Perhubungan Kota Pekalongan telah melakukan upaya mengingatkan uji berkala dengan via SMS Gateway kepada pemilik kendaraan bermotor dan melaksanakan operasi laik jalan. Pada tahun 2024 ini pelaksanaan uji berkala juga sudah tidak berbayar, dengan adanya Uji Kir gratis diharapkan jumlah kendaraan yang melaksanakan uji meningkat dari tahun sebelumnya.

Target capaian kinerja yang sudah tercantum dalam dokumen Renstra menjadi tolak ukur dalam melakukan evaluasi dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perhubungan yaitu meski masih ada masalah dalam mencapai target tersebut ini dikarenakan beberapa faktor dan salah satunya adanya pengurangan atau rasionalisasi dari anggaran yang telah ditetapkan dalam RKPD sebelumnya. Dengan adanya rasionalisasi target yang semula tercantum tinggi tidak diturunkan seiring dengan adanya pengurangan anggaran. Dan ini menyebabkan capaian realisasi pada sebagian kegiatan tidak bisa mencapai target.

Dari hasil evaluasi tersebut, maka perlu memperhatikan faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut, di antaranya:

a. Penetapan indikator keluaran kegiatan pada tahap perencanaan agar lebih cermat lagi, sehingga bisa benar-benar mewakili output dari kegiatan dan bisa tercapai dengan baik;
b. Renja perubahan diperlukan untuk mengantisipasi perubahan beberapa kondisi atau kebijakan yang perlu ditindaklanjuti, sehingga kinerja kegiatan bisa mencapai 100%;
c. Penetapan kinerja kegiatan agar memperhatikan hasil capaian kinerja tahun lalu sehingga pencapaian yang terlalu tinggi (melebihi 100%) dan terlalu rendah (dibawah 90%) dapat dihindari.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Realisasi pencapaian IKK (Indikator Kinerja Kunci) Dinas Perhubungan selama periode Renstra Kota Pekalongan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel T-C.30 berikut ini.

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Pekalongan

No.	Indikator Program/Kegiatan	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	**Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota (IKK Outcome)**			0.52	0.44	0.44	0.44	0.39	0,44	0.44	0.44	
1	Persentase pelaksanaan kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ			100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Jumlah pembinaan dan pengawasan kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			180	180	180	180	180	90	180	180	
3	Persentase pelaksanaan kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan			89	89	90	92	127,3	164,69	92	92	
4	Persentase pelaksanaan kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)			83	83	83	83	100	133,3	83	83	
5	Jumlah kegiatan Audit Inspeksi Keselamatan LLAJ yang dilaksanakan			2	2	2	2	2	2	2	2	
6	Jumlah jenis angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota yang difasilitasi			1	3	3	3	3	3	3	3	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

a. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan kerangka ekonomi daerah dan pendanaan yang berdampak terhadap pagu anggaran yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan:
b. Kebijakan kebijakan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan yang tidak tetap sehingga adanya penyesuaian terhadap pelaksanaan dari pada kebijakan kebijakan yang ada berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
c. Kegiatan prioritas yang tidak masuk pada usulan untuk tahun berikutnya namun harus dilaksanakan pada tahun ini dimana kegiatan kegiatan tersebut untuk mempercepat pencapaian visi dan misi Kota Pekalongan.

Isu isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Pekalongan ke depan yaitu :

a. Tingginya hambatan samping di jalan yang mengurangi kapasitas jalan;
b. Belum optimalnya kualitas pelayanan angkutan umum;
c. Kurang optimalnya ketertiban lalu lintas dan pengelolaan parkir di kawasan strategis;
d. Belum optimalnya pemenuhan perlengkapan jalan (Marka, Rambu, Guardrail, RPPJ, Barrier, Lampu PJU) dikarenakan Keterbatasan APBD Kota Pekalongan;
e. Adanya tumpang tindih kewenangan dikarenakan di lokasi rencana pembangunan Terminal Tipe C tersebut juga dilewati trayek Angkutan AKDP;
f. Rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasar pada hasil rancangan awal RKPD 2025 terdapat beberapa kebutuhan yang perlu ditambahkan agar memenuhi kinerja pelayanan transportasi perkotaan secara maksimal. Berikut sub kegiatan yang berubah diantaranya :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik meningkat dari Rp. 12.052.836.000 menjadi Rp. 15.547.050.000, hal ini meningkat karena adanya penambahan unit kendaraan dinas.
b. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 519.179.000 menjadi Rp. 611.305.000 , meningkat guna penambahan jumlah prasarana jalan.
c. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1.302.000.000 menjadi Rp. 2.603.751.000 meningkat guna penambahan perlengkapan jalan.
d. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota sebesar Rp. 20.000.000 menjadi Rp. 25.000.000.

Review terhadap rancangan awal RKPD ini dapat dilihat pada Tabel T-C.31 berikut.

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kota Pekalongan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3.741.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3.741.000	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	1.763.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	1.763.000	
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	16.024.200	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	16.024.200	
4.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/bulan	4.536.661.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/bulan	4.536.661.000	
5.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	86.695.800	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	86.695.800	
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.634.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.634.000	
7.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan	1 Laporan	127.450.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan	1 Laporan	127.450.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Milik Daerah pada SKPD		Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			Barang Milik Daerah pada SKPD		Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			
8.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	`1 Paket	5.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	`1 Paket	10.000.000	
9.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.000.000	
10.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	92.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	92.000.000	
11.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	12.881.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	12.881.000	
12.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	315.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	315.000.000	
13.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	153.200.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	153.200.000	
14.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	2.680.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 bulan	2.680.000	
15.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	87.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	87.500.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pekalongan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	192.550.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pekalongan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	192.550.000	
17.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1.800.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1.800.000	
18.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.547.050.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.547,050.000	
19.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	350.228.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	350.228.000	
20.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 Unit	349.066.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 Unit	349.066.000	
21.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	240.400.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	240.400.000	
22.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	92 unit	64.295.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	92 unit	64.295.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
23.	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	40.000.000	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	40.000.000	
24.	Penetapan kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	38 Dokumen	2.973.280.000	Penetapan kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	38 Dokumen	2.973.280.000	
25.	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	150 unit	611.305.000	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	150 unit	611.305.000	
26.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	9 unit	2.603.751.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 unit	2.603.751.000	
27.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kota Pekalongan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	59 Unit	1.000.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kota Pekalongan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	59 Unit	1.000.000.000	
28.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Pekalongan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	12 Unit	300.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Pekalongan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	12 Unit	300.000.000	
29.	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Kota Pekalongan	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1 dokumen	60.000.000	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Kota Pekalongan	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1 dokumen	60.00.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kota Pekalongan	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2 unit	30.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kota Pekalongan	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2 unit	30.000.000	
31.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	4 laporan	400.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	4 laporan	400.000.000	
32.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	3014 unit	132.010.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	3014 unit	132.010.000	
33.	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4000 dokumen	103.420.000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4000 dokumen	103.420.000	
34.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 unit	102.184.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 unit	102.184.000	
35.	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala	1 Laporan	10.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala	1 Laporan	10.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kendaraan Bermotor					Kendaraan Bermotor			
36.	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	34.269.000	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	34.269.000	
37.	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Laporan	25.000.000	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Laporan	25.000.000	
38.	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	12 Laporan	600.000.000	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	12 Laporan	600.000.000	
39.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	4 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	4 Laporan	15.000.000	
40.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi	2 Laporan	25.000.000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi	2 Laporan	25.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota			Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota			
41.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kota Pekalongan	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2 Laporan	9.600.000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kota Pekalongan	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2 Laporan	9.600.000	
42.	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	31.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	31.000.000	
43	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	20 Unit	13.500.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	20 Unit	13.500.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berikut hasil dari musrenbang Kota Pekalongan tahun 2025 terdapat beberapa pokir yang diberikan kepada Dinas Perhubungan Kota Pekalongan diantaranya disajikan tabel T-C.32 sebagai berikut :

Tabel T-C.32.
Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Pekalongan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

No	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembangunan Prasarana jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Industri Gamer	- 1 lokasi – 18 titik - Rp. 121.287.000	Pokir 2025
2	Pembangunan Prasarana jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Kusuma Atmaja	-1 lokasi- 20 titik – Rp 134.905.000	Pokir 2025
3	Pembangunan Prasarana jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Seroja	-1 lokasi - 20 titik – Rp 94.500.000	Pokir 2025
4	Pembangunan Prasarana jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Madura	-1 lokasi – 17 titik - Rp 107.100.000	Pokir 2025
5	Pembangunan Prasarana jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Antasari Gamer	-1 lokasi – 6 titik – Rp 37.800.000	Pokir 2025

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan memuat keseluruhan kebijakan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor perhubungan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan alokasi kebutuhan pendanaan yang tertampung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, berdimensi kewilayahan (per pulau) dan telah menyesuaikan dengan Restrukturisasi dan Reformasi Program dan Kegiatan Pembangunan. Berdasarkan Renstra tersebut ditetapkanlah Visi yang merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Kementerian Perhubungan melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Adapun Visi Kementerian Perhubungan adalah :

> "Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Perhubungan Yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah"

Penjelasan dari Visi ini yaitu :

a. Pelayanan Perhubungan yang handal, yaitu penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
b. Pelayanan Perhubungan yang berdaya saing, yaitu penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif.
c. Pelayanan Perhubungan yang memberikan nilai tambah, yaitu penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peran serta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut :

a. Mempertahankan Tingkat Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Perhubungan. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa transportasi dititik beratkan kepada penambahan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, perbaikan pelayanan melalui pengembangan dan penerapan teknologi transportasi yang ramah lingkungan sesuai dengan isu perubahan iklim (global warming) sejalan dengan perkembangan permintaan dan preferensi masyarakat. Dalam peningkatan kapasitas dan pelayanan jasa transportasi senantiasa berpedoman kepada prinsip pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana induk, pedoman teknis dan skema pendanaan yang ditetapkan. Selain itu, dalam upaya mengurangi/menurunkan tingkat kecelakaan dari sektor transportasi di tengah kondisi keuangan negara yang masih diliputi krisis keuangan global, pemerintah terus berupaya secara bertahap membenahi sistem keselamatan dan keamanan transportasi menuju kondisi zero to accident. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak saja bertumpu kepada penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan namun peningkatan kualitas SDM transportasi, pembenahan regulasi di bidang keselamatan keamanan maupun sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.
b. Melaksanakan Konsolidasi melalui Restrukturisasi dan Reformasi di Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan. Melalui restrukturisasi dan reformasi dalam penyelenggaraan transportasi semakin memperjelas peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Restrukturisasi di bidang kelembagaan, menempatkan posisi Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perhubungan kepada daerah dalam bentuk dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Reformasi di bidang regulasi (regulatory reform) diarahkan kepada penghilangan restriksi yang memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa transportasi.

Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan 68 melibatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa transportasi. Restrukturisasi dan reformasi di bidang SDM diarahkan kepada pembentukan kompetensi dan profesionalisme insan perhubungan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki wawasan global dengan tetap mempertahankan jati dirinya sebagai manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa Perhubungan. Kebutuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi yang perlu mendapatkan perhatian adalah aksesibilitas di kawasan pedesaan, kawasan pedalaman, kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang masih menjadi tanggungjawab pemerintah.

c. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Jasa Perhubungan Yang Handal dan Memberikan Nilai Tambah. Pemerintah secara bertahap dengan dana yang terbatas melakukan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur, sedangkan belum seluruh masyarakat pengguna jasa memiliki daya beli yang memadai. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional, perlu diupayakan peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi menuju kepada kondisi yang dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat. Untuk itu dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan memberikan nilai tambah harus dapat mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peran serta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

Pernyataan Visi dan Misi Kementerian Perhubungan memberikan arahan bagi daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Perhubungan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Pekalongan di Bidang Perhubungan, yaitu :

a. Peran Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dalam upaya penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), membenahi sistem keselamatan dan keamanan, penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan, peningkatan kualitas SDM transportasi, serta pelayanan jasa transportasi senantiasa berpedoman kepada prinsip pembangunan berkelanjutan.
b. Pembenahan regulasi dan mengoptimalkan Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa transportasi. Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa transportasi di Kota Pekalongan.
c. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi dengan melakukan penataan moda transportasi Darat dan Sungai, serta jenis dan mekanisme transportasi di Kota Pekalongan.
d. Peningkatan kinerja pelayanan berupa Peningkatan dan penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan yang berkualitas dan representatif, yang dapat memberikan 70 pelayanan optimal bagi masyarakat sehingga tercipta kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang di Kota Pekalongan.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dalam program dan kegiatannya mendukung misi Kementerian Perhubungan dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi, meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah, meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi, dimana sesuai dengan indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yaitu persentase layanan jaringan distribusi transportasi orang dan atau barang, persentase ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi dan persentase kenyamanan dan kehandalan angkutan umum. dengan sasaran jangka menengah adalah:

a. Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal;
b. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah;

c. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana;
d. Rancangan Pergub Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2025 transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi;
e. Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi;
f. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

a. Faktor faktor kunci keberhasilan adalah unsur-unsur dari suatu organisasi yang menentukan keberhasilan atau kegagalan strategi organisasi. Faktor faktor kunci keberhasilan merupakan hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur-unsur perencanaan strategis. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi.

Arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

VISI : Mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius			
MISI IV : Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	Meningkatkan Layanan Transportasi Perkotaan	Meningkatkan Layanan Transportasi Perkotaan	Pemenuhan dan pengoptimalan Sarana dan Prasarana Perhubungan
			Peningkatan capaian Kinerja Lalu lintas
			Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala
MISI VII : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Governance			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	Meningkatan kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Mutu dan Kualitas Laporan Capaian Kinerja Dinas Perhubungan
			Peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur Dinas Perhubungan
			Peningkatan Mutu dan Kualitas pengadaan/ pemeliharaan Barang Milik Daerah

a. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain meliputi:
   1) Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan.
   2) Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
   3) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

b. Dasar dalam menetapkan program dan kegiatan Dinas Perhubungan tentunya berdasarkan telaahan dan analisa dari Visi, Misi Walikota serta telaahan dari Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra dari Dinas Perhubungan. Dengan adanya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terjadi penyesuaian untuk penyelarasan kinerja pada tahun 2025. Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai rancangan awal RKPD adalah sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan :
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Keuangan
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan :
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) :

1) Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
   - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
   - Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
   - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
   - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
   - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
   - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
3) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
   - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
   - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
4) Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
5) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
   - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

6) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
   - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
   - Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
   - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
7) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
8) Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
   - Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ
   - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
   - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
9) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
   - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota.

b. Tabel rencana program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Pekalongan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun	Kota Pekalongan	3 dokumen	3.741.000	APBD	-	2 dokumen	3.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	2 dokumen	1.763.000	APBD	-	2 dokumen	2.500.000
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	15 Laporan	16.024.200	APBD	-	15 Laporan	16.000.000
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	40 orang/bulan	4.536.661.000	APBD	-	40 orang/bulan	4.839.000.000
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan	12 dokumen	86.695.800	APBD	-	12 dokumen	86.000.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan	1 Laporan	1.634.000	APBD	-	1 Laporan	2.000.000
7	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pekalongan	1 Laporan	127.450.000	APBD	-	1 Laporan	40.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Pekalongan	`1 Paket	5.000.000	APBD	-	`1 Paket	160.000.000
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan	4 Paket	5.000.000	APBD	-	4 Paket	5.000.000
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan	4 Paket	92.000.000	APBD	-	4 Paket	75.000.000
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Pekalongan	4 Paket	12.881.000	APBD	-	4 Paket	7.500.000
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan	4 Paket	315.000.000	APBD	-	4 Paket	325.000.000
13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pekalongan	2 Paket	153.200.000	APBD	-	2 Paket	170.000.000
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pekalongan	2 dokumen	2.680.000	APBD	-	2 dokumen	2.500.000
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	100 Laporan	87.500.000	APBD	-	100 Laporan	100.000.000
16	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Pekalongan	4 Unit	192.550.000	APBD	-	4 Unit	165.887.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	4 Laporan	1.800.000	APBD	-	4 Laporan	2.000.000
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Pekalongan	12 Laporan	15.547.050.000	APBD	-	12 Laporan	12.318.531000
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan	12 Laporan	350.228.000	APBD	-	12 Laporan	321.000.000
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Pekalongan	33 Unit	349.066.000	APBD	-	33 Unit	300.000.000
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pekalongan	3 unit	240.400.000	APBD	-	3 unit	350.000.000
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pekalongan	92 unit	64.295.000	APBD	-	92 unit	40.000.000
23	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	1 Dokumen	40.000.000	APBD	-	1 Dokumen	65.000.000
24	Penetapan kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ	Kota Pekalongan	38 Dokumen	2.973.280.000	APBD	-	38 Dokumen	2.900.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kabupaten/Kota							
25	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Kota Pekalongan	150 unit	611.305.000	APBD	-	150 unit	500.000.000
26	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Pekalongan	9 unit	2.603.751.000	APBD	-	9 unit	790.000.000
27	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kota Pekalongan	59 Unit	1.000.000.000	APBD	-	59 Unit	1.214.000.000
28	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kota Pekalongan	12 Unit	300.000.000	APBD	-	12 Unit	300.000.000
29	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Kota Pekalongan	1 dokumen	60.000.000	APBD		1 dokumen	50.000.000
30	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Kota Pekalongan	2 unit	30.000.000	APBD	-	2 unit	100.000.000
31	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	4 laporan	400.000.000	APBD	-	4 laporan	400.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Kota Pekalongan	3014 unit	132.010.000	APBD	-	3014 unit	25.000.000
33	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Pekalongan	4000 dokumen	103.420.000	APBD	-	4000 dokumen	170.000.000
34	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Kota Pekalongan	9 unit	102.184.000	APBD	-	9 unit	104.000.000
35	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Pekalongan	1 Laporan	10.000.000	APBD	-	1 Laporan	15.000.000
36	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	3 Dokumen	34.269.000	APBD	-	3 Dokumen	32.000.000
37	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	3 Laporan	25.000.000	APBD	-	3 Laporan	30.000.000
38	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Kota Pekalongan	12 Laporan	600.000.000	APBD	-	12 Laporan	440.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kota Pekalongan	4 Laporan	15.000.000	APBD	-	4 Laporan	15.000.000
40	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	2 Laporan	25.000.000	APBD	-	2 Laporan	20.000.000
41	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kota Pekalongan	2 Laporan	9.600.000	APBD	-	2 Laporan	10.000.000
42	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	1 Laporan	31.000.000	APBD	-	1 Laporan	25.000.000
43	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Pekalongan	20 Unit	13.500.000	APBD		20 Unit	25.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing – masing SKPD pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih.
Program dan kegiatan dalam Renja Dinas Perhubungan masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Pada tahap ini dilakukan kegiatan persiapan penyusunan, kegiatan analisis dan pengkajian dokumen terkait, dan kegiatan penyusunan Renja Dinas Perhubungan.
Penyusunan Renja Dinas Perhubungan merupakan tahapan akhir yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Dinas Perhubungan yang definitif dan merupakan tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan yang proses penyusunannya mengacu pada rancangan akhir Dinas Perhubungan. Maka dari itu, Dinas Perhubungan perlu membentuk tim penyusun Renja Dinas Perhubungan yang bertugas melaksanakan seluruh proses penyusunan dokumen Renja Dinas Perhubungan sampai dengan penyusunan RKA – SKPD. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Pekalongan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan akhir Dinas Perhubungan.
Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan akhir Dinas Perhubungan, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, evaluasi pelaksanaan Renja Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Pekalongan tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.
Penyusunan Renja SKPD sebagaimana diatur dalam PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010 memiliki beberapa tahapan, antara lain :

a. Persiapan penyusunan Renja Dinas Perhubungan;
b. Penyusunan RENJA Dinas Perhubungan;
c. Pelaksanaan Forum Dinas Perhubungan; dan
d. Penetapan Renja Dinas Perhubungan.

Persiapan penyusunan Renja SKPD sebagaimana dimaksud diatas, meliputi :

a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusunan Renja SKPD;
b. Orientasi mengenai Renja Dinas Perhubungan;
c. Penyusunan agenda kerja tim penyusunan Renja Dinas Perhubungan; dan
d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan disusun :

a. Mengacu pada rancangan akhir Dinas Perhubungan;
b. Mengacu pada Renstra Dinas Perhubungan;
c. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
d. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
e. Berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Perhubungan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

a. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
b. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS

dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.

c. Renja Dinas Perhubungan merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak akhir tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 03 Tahun 2019 tanggal 23 Mei 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 antara lain :

a. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
b. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
c. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
d. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Jumlah Anggaran dalam Renja Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Tahun 2025, program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan tahun 2025 terdapat 2 Program Rutin dan Non-Rutin yaitu 14 Kegiatan 42 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 29.084.256.000,- (dua puluh sembilan milyar delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Akhir Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Tahun 2025 menjadi sangat penting artinya untuk menjadi acuan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai dokumen perencanaan, dokumen ini mengikat secara kelembagaan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2025 yang tidak terlepas dari dokumen Renstra, RKPD, RPJMD dan RPJPD.

Secara kontinyu dokumen ini juga menjadi acuan dalam dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Perhubungan Kota Pekalongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Pekalongan , Agustus 2025
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Pekalongan

M. Restu Hidayat, S. SiT., M.T
NIP. 19750305 199803 1 005

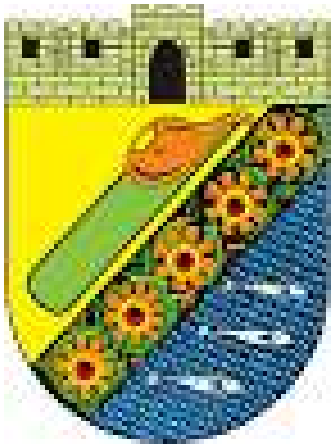

RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2025

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PEKALONGAN

JL. MAJAPAHIT NO. 5 PEKALONGAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Usulan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 ini merupakan penyusunan yang telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dan menyangkut keberhasilan dan pencapaian target yang telah dituangkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2021 RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 ini, kami sampaikan terima kasih.

Selanjutnya dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 ini, harapan kami apa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2025 dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2025.

Pekalongan 8 Agustus 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Pekalongan

ARIF KARYADI, S.Sos
NIP. 19711017 199903 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
BAB I. 4
PENDAHULUAN 4
1.1. Latar Belakang 4
1.2. Landasan Hukum 6
1.3. Maksud dan Tujuan 7
1.4. Sistematika Penulisan 7
BAB II. 9
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 12
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 28
BAB III 29
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 29
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 29
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 29
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 30
BAB IV. 43
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 43
BAB V 48
PENUTUP 48

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekalongan dilaksanakan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan tersebut, daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan program/kegiatan satu tahun sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen Rencana Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja-PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA, PPAS dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA APBD Tahun Anggaran 2025.

3. Renja-PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Renja-PD Tahun 2025 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Penyusunan Renja Tahun 2025 berpedoman pada RKPD 2025 yang sasaran pokok arah kebijakannya mengacu pada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Renja Tahun 2025 dalam penyusunannya diarahkan untuk mewujudkan Visi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan, yaitu ***"Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius"***

Renja Tahun 2025 dalam penyusunannya juga diarahkan untuk mewujudkan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan. Terdapat 7 (tujuh) Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan.
3. Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman.
4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan.
5. Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal.
6. Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah.

7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Goverment*.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5).
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 8).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2025.

Sedangkan tujuan disusunnya Renja adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2025, meliputi:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah

dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Kominfo Kota Pekalongan merupakan awal RPJMD Tahun 2021-2026, di Tahun 2022 Dinas Kominfo mengampu 2 indikator Utama Kota dan 5 Indikator Renstra. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun ini Dinas Kominfo mempunyai 7 target indikator program dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. Ada 4 Indikator Renstra yang belum tercapai di tahun 2025, diantaranya :
    - Indeks domain tata kelola SPBE tercapai 3.20 dari target akhir yang dipasang 3.25
    - Laju pemanfaatan data statistik sektoral tercapai 77.73% dari target akhir yang dipasang 80%
    - Nilai Keterbukaan informasi publik (KIP) tingkat Kota tercapai skor 96.62 dari target akhir yang dipasang 97.50
    - Nilai SAKIP tercapai 87.60 dari target akhir yang dipasang 90.
2. Ada 2 Indikator program yang mencapai target atau melebihi target , yakni :
    - Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai 95.95 dari target akhir yang dipasang 82.04
    - Indeks tata kelola KAMI tercapai tingkat II dari target akhir yang dipasang II

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, Ada beberapa faktor, diantaranya :

1. Pagu yang dipasang sudah dilakukan analisa perumusan target.
2. Efisiensi penggunaan anggaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan, sehingga dengan jumlah anggaran yang direncanakan dapat meningkatkan kinerja yang ditentukan.

3.

Untuk melihat capaian kinerja baik secara terperinci tersaji dalam tabel dibawah ini :

tabel T-C.29
rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dinas kominfo dan pencapaian renja s/d th 2023 (n-2) Kota Pekalongan

No	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2021	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase capaian target RPJMD	Status Capaian Target 2023
						Target 2023	Realisasi 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	Persen	100	100		100	100	100	100	belum tercapai
	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	indeks	3.30	2.80		3.00	3.00	3.00	90,90	belum tercapai
	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100		100	100	100	100	tercapai
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	100		100	100.52	100.52	100.52	tercapai
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100		100	100	100	100	belum tercapai
	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	persen	100	66		100	100	100	100	tercapai

	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	persen	3.74	0.93		2.80	2.80	2.80	74,86	belum tercapai

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023, dapat dilihat melalui rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolak ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintah dalam mencapai Visi dan Misi sesuai dengan IKK dan RPJMD yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dengan beberapa aspek/foku sebagai berikut :

1. optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (smart governance)
2. meningkatnya kualitas layanan publik (smart governance)

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut :

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tingkat kota			96.00	97.00	97.20	97.50	96.62		96.00	97.00	
2	Indeks domain tatakelola SPBE			2.95	3.05	3.15	3.25	3.20			3.05	
3	Indeks tata kelola KAMI			II	II	II	II	II			II	
4	Persentase Ketersediaan data statistik sektoral			70	73	76	80	77.73			73	
5	Nilai LKJIP			87.00	88.00	89.00	90	87.60			88.00	

6	Indeks Kepuasan Masyarakat			81.29	81.54	81.79	82.04	95.95			81.54	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Seperti proses kerja Perencanaan melalui beberapa tahap dari Musrenbang, Usulan dan proses sidang di Komisi dan Sidang di Badan Anggaran dengan berlakunya Perwal ASB Analisis Standar Belanja maka perlakuan penyusunan RAB juga disesuaikan seperti beberapa rekomendasi di Desk Renja Triwulan II Tahun 2023 sebagai berikut :

a. indikator mengacu pada renstra dan pagu anggaran menjabarkan penyesuaiannya
b. Layanan penangan keluhan masyarakat melalui kanal wadul aladin, SP4N Lapor, terus ditingkatkan kinerjanya dalam menjembatani masyarakat dengan Pemerintah Kota Pekalongan
c. LPPL Batik TV dan RKB yang saat ini bersaing dengan media sosial, citizen journalist, harus ditingkatkan kinerjanya agar dapat bersaing dalam menyebarkan informasi
d. Perbaikan kualitas penyiaran LPPL Batik TV dan RKB
e. Kerjasama media dalam menyebarluaskan informasi pembangunan di Kota Pekalongan terus dilaksanakan dalam pembentukan pola komunikasi yang baik dan efektif.
f. Beberapa anggaran pada sub kegiatan mengalami rasionalisasi pada tahun 2025, sehingga beberapa anggaran yang diajukan banyak berkurang dari pagu usulan dengan mempertimbangkan hasil yang dicapai saat ini.
g. Pengembangan jaringan FO Batiknet pada tahun 2025 tidak dianggarkan dikarenakan keterbatasan anggaran APBD 2025
h. Pelaksanaan penilaian indeks SPBE (sistem pemerintah berbasis elektronik) oleh Menpan RB
i. Pelaksanaan kegiatan Smart City yang tupoksinya dikembalikan ke Dinkominfo
j. Pembelian firewall untuk untuk mencegah akses yang tidak berhak ke suatu jaringan
k. Penyelesaian bangunan kantor lantai 2 yang belum teranggarkan pada tahun 2025
l. Anggaran pemeliharaan jaringan Batik-Net yang mengalami rasionalisasi
m. Pembangunan Gedung RKB sesuai DED yang sudah disusun di tahun 2019 diusulkan 1,5 Miliar mengingat gedung yang digunakan saat ini sudah mengalami roboh diantaranya ruang dapur dan ruang kamar mandi dan semuanya sudah resiko tinggi
n. Sarana dan Peralatan Studio Mini Batik TV untuk siaran LIVE Outdoor dimaksudkan seperti layaknya di TV Swasta bahwa pengambilan informasi secara live bisa

ditayangkan mengingat studio mini bisa berjalan di lingkungan wilayah Kota Pekalongan, hal itu dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 1.056.767.600,-

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sehubungan dengan berlakunya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 maka semua program dan kegiatan mengalami perubahan total sehingga Bappeda Kota Pekalongan telah mengadakan proses kerja secara bertahap melalui pemetaan kegiatan dari DPPA 2021 dikelompokkan sesuai indikator keluaran lalu dimapping masuk kegiatan yang sudah disediakan di Permendagri 90 Nomor 05-5889 Tahun 2021, Adapun Langkah yang harus disusun berikut :

1. Pemetaan Tusi (Tinjau kembali Tusi yang saat ini berjalan disesuaikan dengan kondisi daerah dan Permendagri 90 Tahun 2019
2. Pemataan anggaran disesuaikan dengan kinerja masing-masing bidang/sekretariat
3. Pemetaan indikator program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2021-2026 sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kota Pekalongan
Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dinas Komunikasi dan Informatika				12.742.294.000	Dinas Komunikasi dan Informatika				12.742.294.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				4.542.566.000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				4.542.566.000	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				4.542.566.000	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				4.542.566.000	
1	Relasi Media	Pekalongan	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	836.152.000	Relasi Media	Pekalongan	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	836.152.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Pekalongan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	5 Komunitas	43.660.000	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Pekalongan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	5 Komunitas	43.660.000	
3	Pelayanan Informasi Publik	Pekalongan	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	50 Permohonan	151.980.000	Pelayanan Informasi Publik	Pekalongan	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	50 Permohonan	151.980.000	
4	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Pekalongan	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100 Persentase	20.000.000	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Pekalongan	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100 Persentase	20.000.000	
5	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Pekalongan	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi	12 Rekomendasi	433.710.000	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Pekalongan	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi	12 Rekomendasi	433.710.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			prioritas Pemerintah Daerah					prioritas Pemerintah Daerah			
6	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Pekalongan	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2 Media	2.927.568.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Pekalongan	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2 Media	2.927.568.000	
7	Penyusunan Konten	Pekalongan	Jumlah Konten Informasi Publik	12500 Konten	129.496.000	Penyusunan Konten	Pekalongan	Jumlah Konten Informasi Publik	12500 Konten	129.496.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				20.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				20.000.000	
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000	
8	Pengelolaan Nama	Pekalongan	Jumlah Dokumen	12	20.000.000	Pengelolaan Nama	Pekalongan	Jumlah Dokumen	12 Dokumen	20.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa		Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Dokumen		Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa		Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa			
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2.298.428.000	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2.298.428.000	
9	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Pekalongan	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	2 Aplikasi	79.420.000	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Pekalongan	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	2 Aplikasi	79.420.000	
10	Koordinasi penyusunan proses bisnis	Pekalongan	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	4 Dokumen	16.430.000	Koordinasi penyusunan proses bisnis	Pekalongan	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	4 Dokumen	16.430.000	
11	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Pekalongan	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	3 Dokumen	107.850.000	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Pekalongan	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	3 Dokumen	107.850.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Pekalongan	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	2 Dokumen	77.850.000	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Pekalongan	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	2 Dokumen	77.850.000	
13	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Pekalongan	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	3 Aplikasi	375.448.000	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Pekalongan	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	3 Aplikasi	375.448.000	
14	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Pekalongan	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	181 Perangkat Daerah	1.404.350.000	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Pekalongan	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	181 Perangkat Daerah	1.404.350.000	
15	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah	Pekalongan	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan	5 Layanan	49.470.000	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah	Pekalongan	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan	5 Layanan	49.470.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	yang terintegrasi		Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional			yang terintegrasi		Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional			
16	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Pekalongan	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	20 Dokumen	167.900.000	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Pekalongan	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	20 Dokumen	167.900.000	
17	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE		Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	3 Aplikasi	19.710.000	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE		Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	3 Aplikasi	19.710.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				70.460.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				70.460.000	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah				70.460.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah				70.460.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota					
18	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Pekalongan	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	15 Dokumen	34.410.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Pekalongan	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	15 Dokumen	34.410.000	
19	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Pekalongan	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	10 Dokumen	36.050.000	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Pekalongan	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	10 Dokumen	36.050.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				105.050.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				105.050.000	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				78.420.000	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				78.420.000	
20	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan	Pekalongan	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan	2 Dokumen	7.400.000	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan	Pekalongan	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan	2 Dokumen	7.400.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan			Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan			
21	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pekalongan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 LAPORAN	51.800.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pekalongan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 LAPORAN	51.800.000	
21	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pekalongan	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	30 PERANGKAT DAERAH	19.220.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pekalongan	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	30 PERANGKAT DAERAH	19.220.000	
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	Pekalongan			26.630.000	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	Pekalongan			26.630.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota					
22	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pekalongan	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	30 PERANGKAT DAERAH	26.630.000	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pekalongan	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	30 PERANGKAT DAERAH	26.630.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.705.790.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.705.790.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21.257.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21.257.000	
23	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	7.494.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	7.494.000	
24	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pekalongan	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 DOKUMEN	1.763.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pekalongan	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 DOKUMEN	1.763.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dokumen RKA SKPD					Dokumen RKA SKPD			
25	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pekalongan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	12.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pekalongan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	12.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.345.643.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.345.643.000	
26	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pekalongan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 ORANG/BULAN	4.300.101.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pekalongan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 ORANG/BULAN	4.300.101.000	
27	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pekalongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	43.870.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pekalongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	43.870.000	
28	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 LAPORAN	1.672.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 LAPORAN	1.672.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				72.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				72.000.000	
29	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pekalongan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	67.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pekalongan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	67.000.000	
30	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				291.496.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				291.496.000	
31	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.990.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.990.000	
32	Penyediaan Peralatan dan	Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan dan	4 Paket	71.460.000	Penyediaan Peralatan dan	Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan dan	4 Paket	71.460.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perlengkapan Kantor		Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Perlengkapan Kantor		Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
33	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4.686.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4.686.000	
34	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pekalongan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	81.160.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pekalongan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	81.160.000	
35	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pekalongan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	29.200.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pekalongan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	29.200.000	
36	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pekalongan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	11.700.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pekalongan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	11.700.000	
37	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pekalongan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	90.300.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pekalongan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	90.300.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				632.380.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				632.380.000	
38	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.400.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.400.000	
39	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 LAPORAN	501.220.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 LAPORAN	501.220.000	
40	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 LAPORAN	128.760.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 LAPORAN	128.760.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				343.014.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				343.014.000	
41	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan	Pekalongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	24 UNIT	200.800.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan	Pekalongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	24 UNIT	200.800.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
42	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 UNIT	54.614.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 UNIT	54.614.000	
43	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	87.600.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	87.600.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan/sub kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel T-C.32 sebagai berikut :

Tabel T-C.32.
Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Pekalongan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Prioritas Nasional RKP Tahun 2024:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi dan Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dari ketujuh Prioritas Nasional di atas, terdapat beberapa sasaran yang terkait dengan tugas pokok dan sasaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan yaitu:

a) Sasaran ke 3 untuk PN 5 adalah Optimalnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)
b) Sasaran ke 2 untuk PN 7 adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong indeks pelayanan publik.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai, tujuan ditetapkan berdasarkan potensi, isu-isu strategis dan permasalahan yang ada pada pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan. Tujuan jangka menengah Dinkominfo Kota Pekalongan adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik
2. Meningkatkan keterbukaan informasi public
3. Mengoptimalkan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)
4. Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral
5. Mewujudkan keamanan informasi daerah

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas kominfo Kota Pekalongan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran merupakan hasil yang dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun jangka waktu Rencana Strategi Dinas kominfo Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatnya layanan informasi public
3. Meningkatnya tata kelola SPBE
4. Tersedianya data statistik sektoral
5. Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dikelola Dinas Kominfo antara lain :

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kota Pekalongan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dinas Komunikasi dan Informatika				12.735.454.000	APBD			
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**				4.542.566.000	APBD			
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				4.542.566.000	APBD			
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Pekalongan	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	836.152.000	APBD	Subkeg lama : layanan hubungan media		**935.000.000**
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Pekalongan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	43.660.000	APBD	Subkeg lama : **-** Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyar		**61.300.000**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							akat - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Pekalongan	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	151.980.000	APBD			**387.000.000**
2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Pekalongan	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	20.000.000	APBD	Subkeg lama : Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi		**50.000.000**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Publik		
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Pekalongan	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	433.710.000	APBD	Subkeg lama : - monitoring opini dan Aspirasi Publik - manajemen komunikasi krisis		**397.250.000**
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Pekalongan	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2.927.568.000	APBD			**2.808.892.000**
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Pekalongan	Jumlah Konten Informasi Publik	129.496.000	APBD			**131.000.000**
02.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**				20.000.000	APBD			
2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub**				20.000.000	APBD			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Pekalongan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	20.000.000	APBD			
2.16.03.2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				2.298.338.000	APBD			
2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Pekalongan	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	79.420.000	APBD			**99.000.000**
2.16.03.2.02.0014	Koordinasi penyusunan proses bisnis	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	Pekalongan	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	16.430.000	APBD			**461.725.000**
2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Pekalongan	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	107.850.000	APBD			**40.000.000**
2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang	Pekalongan	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur	77.850.000	APBD			**100.000.000**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan		dan peta rencana yang diusulkan					
2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Pekalongan	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	375.448.000	APBD			
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Pekalongan	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	1.404.350.000	APBD			**1.710.611.000**
2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau	Pekalongan	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	49.470.000	APBD			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Portal Data Nasional							
2.16.03.2.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Pekalongan	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	167.900.000	APBD	Sub keg lama : Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		**50.000.000**
2.16.03.2.02.0029	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	Pekalongan	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	19.710.000	APBD			
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**				70.460.000	APBD			**109.120.000**
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**				70.460.000	APBD			
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah	Pekalongan	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi	34.410.000	APBD			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	dilengkapi metadata		metadata					
2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Pekalongan	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	36.050.000	APBD			
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**				105.050.000	APBD			
2.21.02.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				78.420.000	APBD			
2.21.02.2.01.001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Pekalongan	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	7.400.000	APBD			**16.227.000**
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pekalongan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	51.800.000	APBD			**33.000.000**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Berbasis Elektronik dan Non Elektronik								
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Pekalongan	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	19.220.000	APBD			**100.546.000**
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Pekalongan		26.630.000	APBD			
2.21.02.2.02.001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Pekalongan	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	26.630.000	APBD			**30.000.000**
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				5.699.040.000	APBD			
2.16.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				21.257.000	APBD			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.494.000	APBD			**12.500.000**
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Pekalongan	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.763.000	APBD			**1.500.000**
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pekalongan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	APBD			**23.500.000**
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				4.338.893.000	APBD			
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pekalongan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.293.351.000	APBD			**3.393.521.000**
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pekalongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	43.870.000	APBD			**60.000.000**
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1.672.000	APBD			**1.500.000**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Keuangan Akhir Tahun SKPD					
2.16.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				72.000.000	APBD			
2.16.01.2.05.0002	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pekalongan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	67.000.000	APBD			**67.000.000**
2.16.01.2.05.0010	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.000.000	APBD			**11.000.000**
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				291.496.000	APBD			
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.990.000	APBD			**6.000.000**
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	71.460.000	APBD			**120.00.000**
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	4.686.000	APBD			**10.000.000**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tangga	Disediakan		Disediakan					
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pekalongan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	81.160.000	APBD			**121.000.000**
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pekalongan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	29.200.000	APBD			**50.000.000**
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Pekalongan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	11.700.000	APBD			**16.000.000**
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pekalongan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.300.000	APBD			**163.757.000**
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				632.380.000	APBD			
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000	APBD			**2.700.000**
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	501.220.000	APBD			**455.000.000**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		yang Disediakan							
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	128.760.000	APBD			**110.000.000**
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				343.014.000	APBD			
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pekalongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	200.800.000	APBD			**220.000.000**
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	54.614.000	APBD			**1.254.956.000**
2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	87.600.000	APBD			**110.000.000**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. Rencana Kerja

Di Dalam rumusan rencana program kegiatan bagi OPD tahun 2024 dan prakiraan maju 2025 Sebagai bahan evaluasi terdapat target (sesuai jenis sasaran dengan target indikator yang ingin dicapai), masing-masing kegiatan terdapat keluaran dan Hasil. Adapun kegiatan yang mengalami kenaikan dari tahun 2024 ke 2025 dikarenakan kenaikan tarif tahunan dan standarisasi, selain itu juga kenaikan atau penurunan yang menurut evaluasi indikator diantara sub kegiatan sama dipadukan dan dihitung ulang mengalami penurunan yang semula menyebar menjadi satu pelaksanaan di salah satu sub kegiatan juga dari memonitor viewer yang kurang untuk dihapus dan mengambil viewer memuat berita pemerintahan Kota Pekalongan.

B. Pendanaan Perangkat Daerah

Untuk tercapainya target dari setiap indikator kinerja dibutuhkan pendanaan untuk membiayai masing-masing kegiatan prioritas di Dinas Kominfo Kota Pekalongan tahun 2025. Kebutuhan pendanaan pada Dinas Kominfo Kota Pekalongan untuk tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu Anggaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana
1	2	3	4
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12.742.294.000	DAU
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	5.705.790.000	DAU
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.257.000	DAU
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.494.000	DAU

2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.763.000	DAU
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	DAU
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.345.643.000	DAU
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.300.101.000	DAU
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	43.870.000	DAU
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.672.000	DAU
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	72.000.000	DAU
2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000	DAU
2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	67.000.000	DAU
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	291.496.000	DAU
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor	2.990.000	DAU
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.460.000	DAU
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.686.000	DAU
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.160.000	DAU
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.200.000	DAU
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.700.000	DAU
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.300.000	DAU
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	632.380.000	DAU

2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000	DAU
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	501.220.000	DAU
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	128.760.000	DAU
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	343.014.000	DAU
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.800.000	DAU
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	54.614.000	DAU
2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	87.600.000	DAU
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.542.566.000	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.542.566.000	
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	836.152.000	
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	43.660.000	
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	151.980.000	
2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	20.000.000	
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	433.710.000	
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.927.568.000	
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	129.496.000	

02.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	2.318.428.000	
2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	20.000.000	
2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Subdomain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	20.000.000	
2.16.03.2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	2.298.28.000	
2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	79.420.000	
2.16.03.2.02.0014	Koordinasi penyusunan proses bisnis	16.430.000	
2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	107.850.000	
2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	77.850.000	
2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	375.448.000	
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	1.404.350.000	
2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	49.470.000	
2.16.03.2.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	167.900.000	
2.16.03.2.02.0029	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	19.710.000	
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	70.460.000	

2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	70.460.000	
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	34.410.000	
2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	36.050.000	
2.20.02.2.01.0011	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	105.050.000	DAU
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	105.050.000	DAU
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	78.420.000	DAU
2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.400.000	DAU
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	51.800.000	DAU
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	19.220.000	DAU
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	26.630.000	DAU
2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	26.630.000	DAU

BAB V

PENUTUP

Laporan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kominfo Kota Pekalongan Tahun 2025 ini disusun untuk dijadikan sebagai dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah Kota Pekalongan, serta sebagai panduan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kominfo Tahun 2025. Penyusunan Renja 2025 dilakukan setelah mempelajari visi, misi, dan program Pemerintah Kota Pekalongan sebagai muatan dan masukan dalam penyusunan visi, misi, strategi, kebijakan serta penyusunan program dan kegiatan dinas kominfo kota pekalongan satu tahun kedepan. Oleh karena itu, dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kominfo Kota Pekalongan ini dapat menjadi acuan dan pedoman yang digunakan sebagai masukan dalam rangka penguatan peran serta dan partisipasi aktif dari semua stakeholder yang terkait serta menjadi dasar dan bahan untuk melakukan evaluasi dan guna penyusunan laporan pelaksanaan kinerja PD tahunan maupun lima tahunan.

Dengan demikian, diharapkan renja dinas kominfo tahun 2025 ini dapat menjadi pegangan bagi seluruh aparatur di lingkungan dinas kominfo kota pekalongan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mendorong dan mewujudkan peningkatan pengelolaan komunikasi dan informatika kota pekalongan di tahun mendatang.

Demikian Laporan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, Terima kasih.

Pekalongan, 8 Agustus 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Pekalongan

ARIF KARYADI, S.Sos
NIP. 19711017 199903 1 007

Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan

RENJA (Rencana Kerja)

2025

DPMPTSP Kota Pekalongan

(0285) 432086
oss@pekalongankota.go.id
Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 1

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan Tahun 2025 dapat disusun tanpa ada halangan sesuatu apapun.

Renja DPMPTSP Kota Pekalongan Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024, dalam rangka menjalankan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen renja ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan DPMPTSP Kota Pekalongan yang disertai indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif. Selanjutnya, Renja akan menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPTSP Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025.

Kami menyadari Renja DPMPTSP Kota Pekalongan Tahun 2025 ini belum sempurna, sehingga masukan, saran dan koreksi semua pihak akan menjadi lebih baik untuk penyusunan renja pada tahun-tahun mendatang. Selanjutnya Renja DPMPTSP Tahun 2025 ini diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik agar dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sudah ditentukan.

Pekalongan, 08 Agustus 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PEKALONGAN

BENO HERITRIONO, SH.,M.Si
Pembina Utama Muda,
NIP. 19650118 198903 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar III

Daftar Isi II

Daftar Tabel III

BAB I 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.2 Sistematika Penulisan 4

BAB II 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 9

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 11

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 14

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 20

BAB III 21

3.3 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 21

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Kota Pekalongan 21

3.2.1 Visi dan Misi PD 21

3.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD 23

3.2.3 Struktur Organisasi PD 24

3.2.4 Kondisi Sumber Daya Manusia 26

3.2.5 Kondisi Sarana Prasarana 27

3.2.6 Program dan Kegiatan 32

BAB IV 40

BAB V 43

DAFTAR TABEL

Tabel T-C. 29. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah 8

Tabel T-C. 30. 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 10

Tabel T-C. 31. 1. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Pekalongan... 14

Tabel T-C.32. 1 Usulan Program/Kegiatan dari Pemangku Kepeningan Tahun 2023 Kota Pekalongan..... 20

Tabel 3.2.4 1 Jumlah Pegawai DPMPTSP Berdasarkan Pendidikan..... 26
Tabel 3.2.4 2 Jumlah Pegawai DPMPTSP 26

Tabel 4 1 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu Anggaran 40

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran nasional dan daerah. Dalam rangka pelaksanaan amanat ketiga Undang-Undang tersebut, Pemerintah Daerah salah satunya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan. RKPD tersebut merupakan kompilasi atau gabungan dari Rencana Kerja PD (RENJA PD) yang ada dalam Pemerintah Daerah setempat.

UU Nomor 25 tahun 2004 pasal 7 mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) PD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra dan mengacu kepada RKPD, Rencana Kerja (Renja) PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,dan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan pemerintah Kota Pekalongan, Kota Pekalongan mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal daerah.

Kegiatan penanaman modal telah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah serta meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan. Kegiatan penanaman modal di daerah selama ini sangat berperan penting antara lain dalam menciptakan lapangan kerja baru, PPmeningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi guna mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Pekalongan yang semakin sejahtera.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor-faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat di atasi, antara lain melalui reformasi birokrasi dan regulasi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. Mendorong birokrasi yang efesien dan efektif dengan kemudahan pelayanan, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif. Dengan perbaikan di berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan dapat menjadikan Kota Pekalongan menjadi daerah yang menarik bagi penanaman modal sehingga tingkat realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Dalam konteks otonomi daerah atau desentralisasi, penanaman modal atau investasi menjadi salah satu fokus penting dan sudah menjadi tugas struktural dari setiap organisasi pemerintah daerah. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah harus lebih fokus dalam pengembangan peluang potensi daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Oleh karena itu peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut harus dapat diukur dari kecepatan dan ketepatan dalam pemberian pelayanan di bidang penanaman modal terutama pelayanan di bidang perizinan.

Berkaitan dengan pelayanan di bidang penanaman modal, agar Kota Pekalongan menjadi daerah tujuan penanaman modal perlu ditingkatkan daya saing daerah dan iklim usaha yang lebih kondusif melalui penerapan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Sistem Aplikasi Perizinan Online Ringkas & Ekonomis (NEW SAKPORE). Selain itu pemberian kepastian hukum dan keadilan dalam pelayanan berusaha juga harus diterapkan kepada semua calon investor.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renja DPMPTSP Kota Pekalongan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timor, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pemangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
15. Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (RENJA) tahun 2025 dibuat dalam rangka menyusun rencana kegiatan tahun 2025 dengan maksud dan tujuan meningkatan kinerja pemerintah yang transparan dan sebagai koridor pelaksanaan kegiatan sehingga dalam implementasi pelaksanaan

kegiatan mampu melihat permasalahan yang ada, untuk kemudian ditindak lanjuti dengan pemecahan permasalahan pada tahun-tahun berikutnya.

Sedangkan tujuan penyusunan rencana kerja DPMPTSP adalah :

1. Sebagai pedoman dalam rangka pencapaian target kinerja program dan kegiatan
2. Sebagai tolak ukur kinerja untuk melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang penanaman modal
3. Sebagai acuan pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

1.2 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (RENJA) DPMPTSP Kota Pekalongan ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekalongan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

Berisi uraian mengenai :

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daeran tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu penting penyelengaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
2.5 penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi penelaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana kerja dan pendanaan indikatif perangkat daerah.

BAB V. PENUTUP

Menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPTSP) Kota Pekalongan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang diberi wewenang dan bertanggung jawab dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku. Pendelegasian kewenangan Kepada DPMPTSP meliputi :

1. Pelayanan perizinan berusaha, terdapat 8 jenis pelayanan meliputi konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung dan sertifikasi laik fungsi (SLF), nomor induk berusaha (NIB), sertifikasi stamdar dan izin
2. Pelayanan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha, jenis pelayanannya : pengolahan pangan industri rumah tangga (P-IRT), sertifikasi laik higiene sanitasi, sertifikasi sanitasi hotel, sertifikasi laik sehat, sertifikasi pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga (SPP-IRT), sertifikasi standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas pratama di RS Pemerintah, tanda daftar gudang, surat tanda pendaftaran waralaba, izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan, jenis layanan izin yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pelayanan perizinan non berusaha dan/atau persetujuan pemerintah; beberapa jenis pelayanannya yaitu sertifikat penyuluh keamanan pangan (SPKP), surat izin praktik dokter umum, surat izin praktik dokter gigi, surat izin praktik dokter spesialis, surat izin praktik keperawatan dll
4. Pelayanan non perizinan, pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada kepala DPMPTSP meliputi : kemudahan pelayanan antara lain penyederhanaan, fasilitas fiskal dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu dan informasi antara lain penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal

Jenis pelayanan perizinan semua gratis, namun ada 3 jenis izin yang dibebani izin retribusi daerah, yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Izin Trayek, dan Reklame yang dibayarkan kepada OPD Teknis. DPMPTSP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selain memiliki potensi dan peluang, juga menghadapi kendala dan tantangan yang menjadi permasalahan di bidang Penanaman modal yang harus diatasi dalam upaya menciptakan kepemerintahan yang baik (Good Governance). Hal ini diwujudkan dengan diperolehnya Standar ISO 9001 : 2015 untuk manajemen pelayanan secara menyeluruh. Masing- masing

bidang mempunyai Standar Oprasional Prosedur (SOP) guna pelaksanaan tugas sehari-hari. Tekad dan komitmen semua pegawai DPMPTSP untuk melaksanakan pelayanan prima juga diwujudkan dalam bentuk penandatanganan Ikrar Pelayanan Prima. Dengan kondisi lingkungan internal yang menjadi permasalahan utama yaitu :

1. Belum sepenuhnya dukungan produk hukum daerah guna mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan.
2. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM aparatur yang ada.
3. Seiring dengan berkembangnya dunia usaha terdapat jenis izin yang belum dilimpahkan kewenanganya ke DPMPTSP.

Menghadapi permasalahan / kendala dan tantangan yang menjadi isu strategis tersebut, dengan memanfaatkan potensi dan peluang yang ada serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026, maka telah ditetapkan Rencana Strategis DPMPTSP Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026, yang memuat rumusan visi dan misi Perangkat Daerah, indikator kinerja utama organisasi, tujuan dan sasaran strategis, serta kebijakan yang akan ditempuh, yang dijabarkan ke dalam perencanaan kinerja tahunan yang memuat sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu satu tahunan dan strategi yang digunakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran dan tujuan, dengan mengambil solusi sebagai berikut:

1. Perumusan pengkajian dan penyesuaian produk hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan.
2. Mengusulkan tambahan SDM PNS dan memaksimalkan PNS yang ada, serta teknis mengikutsertakan Diklat Teknis Perizinan Penanaman Modal.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Adapun data pengukuran kinerja diperoleh dari dua sumber yaitu:

a. Data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan bulanan, triwulanan, semesteran, dan laporan kegiatan lainnya.
b. Data eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja DPMPTSP Kota Pekalongan.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan antara lain :

a. Indikator masukan (input) merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka menghasilkan keluaran indikator kinerja. Input yang digunakan diantaranya dana dengan satuan rupiah, dan personel yang diukur dengan satuan orang.
b. Indikator keluaran (output) merupakan segala sesuatu yang diharapkan secara langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa produk fisik atau non fisik. Indikator output yang digunakan mulai dari output terselenggaranya kegiatan (jumlah kegiatan), jumlah laporan (LHA), jumlah personel (Diklat, pelatihan teknis), buku pedoman yang dibuat maupun jumlah barang / jasa yang dihasilkan.
c. Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan yang dilaksanakan. Indikator ini digunakan angka mutlak dan relatif (%), namun demikian indikator kinerja ini bervariasi tergantung pada sasaran yang ingin dicapai yang intinya kinerja tersebut harus menggambarkan sejauhmana kinerja tersebut dapat dimanfaatkan baik oleh Pimpinan maupun Stake holders lainnya.

Penilaian tingkat capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikelompokkan ke dalam 4 kategori sebagai berikut :

Rentang Capaian	**Kategori**
Lebih Dari 100	Sangat Baik
76 % Sampai 100 %	Baik
55 % Sampai 75 %	Cukup
Kurang Dari 55 %	Kurang

Pencapaian sasaran

Hasil pengukuran capaian sasaran merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kinerja DPMPTSP Kota Pekalongan tahun 2024, yang diilustrasikan dalam tabel Tingkat Pencapaian Sasaran :

Sesuai dengan penetapan kinerja DPMPTSP dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 telah dilaksanakan 6 program yang dijabarkan pada 31 sub kegiatan untuk mencapai 2 sasaran dengan hasil pengukuran kinerja Tahun **2023 adalah 100 %** .

Tabel T-C. 29. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah

Nama Perangkat Daerah : DPMPTSP Kota Pekalongan

No	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021 - 2025)	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Presentase Capaian RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Realisasi 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal										
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal										
	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	16,67	Tidak Tercapai
Program Promosi Penanaman Modal										
	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
Program Pelayanan Penanaman Modal										
	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Dokumen	2.500	2500,00	3847,00	2500	3847	3847	153,88	Tercapai
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal										
	Nilai Investasi Baru pertahun	Miliar Rupiah	40,514	6,42	152,43	6,55	637,82	229,1	565,49	Tercapai
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal										
	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

1. Capaian indikator Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota tidak memenuhi target dikarenakan Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan sebanyak 1 peraturan setiap tahun sejak 2021, sehingga akumulasi capaian sebanyak 3 peraturan sampai dengan triwulan 3 tahun 2023. Pada tahun 2021 : perwal 40/2021 ttg pelimpahan kewenangan, sk sop sakpore/simpadu Pada tahun 2022 : perda 9/2022 ttg penyusunan penanaman modal, perwal 55/2022 ttg pendelegasian kewenangan Pada tahun 2023 : perda 5/2023 ttg perubahan perda penyelenggaraan ptsp
2. Capaian indikator Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal jauh melebihi target dikarenakan Realisasi melebihi target karena adanya kebijakan OSS RBA (Online Single Submission Risk Base Approach) dari Pemerintah Pusat. NIB (Nomor Izin Berusaha) menjadi syarat pengajuan bantuan modal berusaha, sehingga animo pengusaha dalam mengurus perijinan meningkat.
3. Capaian indikator Nilai Invetasi Baru pertahun jauh melebihi target dikarenakan Rrealisasi Investasi Triwulan III Tahun 2023 Rp 195.183.348.923 sedangkan untuk Realisasi Investasi Triwulan IV Tahun 2023 Rp. 637.720.887.464

No	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (2022)	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Presentase Capaian RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Realisasi 2023			
Non Urusan										
Program Penunjang Urusan Kabupaten/Kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (DPMPTSP)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (DPMPTSP)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	103,58	103,58	103,58	Tercapai
3	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (DPMPTSP)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
1. Capaian Indikator Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (DPMPTSP) melebihi target karena jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah mencapai 114 kali dengan target 100 kali.										

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan dasar hukumnya yaitu Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008, Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam Norma Standar Pelayanan Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Sesuai dengan kedudukan yang tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2021 DPMPTSP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, untuk itu capaian kinerja pelayanan DPMPTSP dapat dilihat dari capaian nilai investasi.

Tabel T-C. 30. 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kota Pekalongan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Investasi sampai dengan tahun rencana			200,277	204,282	208,367	212,534	152,43	637,82	208,367	212,534	Capaian melebihi target karena target yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi (BKPM) sebesar 110 Milyar. Sedangkan penentuan target oleh BKPM dirilis pada awal tahun 2024.
1. Capaian melebihi target karena target yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi (BKPM) sebesar 110 Milyar. Sedangkan penentuan target oleh BKPM dirilis pada awal tahun 2024.												

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam hal ini DPMPTSP adalah :

a) Hasil Survey Daya Saing Daerah (SDSD) yang dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah terkait perkembangan ekonomi di daerah tertentu dalam dunia usaha dan investasi daerah.

Faktor-faktor penilaian daya saing daerah yang mempengaruhi dunia usaha dan pengambilan keputusan investasi adalah :

1. Kebijakan dan peraturan memulai usaha, perdagangan, pariwisata, dan sebagainya.
2. Stabilitas ekonomi makro.
3. Lingkungan investasi dan hukum (kepastian hukum, persaingan yang sehat).
4. Kualitas dan biaya tenaga kerja.
5. Ketersediaan dan kualitas layanan dasar infrastruktur, sarana prasarana, properti dan sebagainya.
6. Iklim bisnis secara umum seperti keamanan, perilaku terhadap dunia usaha dan sebagainya.
7. Fasilitas bisnis seperti insentif, biaya melaksanakan bisnis dan sebagainya.

Dengan menggunakan analisa SWOT Pemerintah Kota Pekalongan dinilai dan berada pada urutan ke-6 di wilayah Bakorwil III Jawa Tengah dengan beberapa kelemahannya sebagai berikut :

1. Kinerja Ekonomi
   a. Sangat rendahnya pertumbuhan PDRB
   b. Pertumbuhan kredit macet
   c. Rendahnya pertumbuhan PDRB per kapita
   d. Tingkat pengangguran
2. Persepsi Iklim Bisnis

   Kinerja pemerintah dalam hal penyediaan regulasi yang tidak menghambat masih dianggap perlu ditingkatkan.
3. Kinerja investasi

   Hampir semua indikator kinerja investasi berperforma rendah dibawah median Jawa Tengah, khususnya terkait dengan jumlah perusahaan yang berinvestasi, penyerapan volume investasi, tenaga kerja maupun rasio volume investasi dan alokasi anggaran promosi masih rendah.
4. Kinerja Pemerintah

   Dari sisi kualitas program dukungan pemerintah masih dinilai kurang memuaskan, rendahnya ketersediaan informasi potensi investasi dan prosentase alokasi anggaran promosi investasi.

5. Struktur

Rendahnya jumlah ketersediaan dan kualitas lembaga vokasi dan ketersediaan perbankan per 1000 penduduk penduduk.

6. Dinamika Bisnis

Rendahnya tingkat aplikasi kredit dan kebutuhan akan pendanaan eksternal.

b). Isu strategis yang kedua adalah terbitnya Perpres No.16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.

1. Pemerintah menetapkan RUPM dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal.
2. RUPM merupakan amanat Pasal Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
3. RUPM disusun dengan memperhatikan masukan dari seluruh pemangku kepentingan Kementrian / Lembaga, Pemerintah Daerah, KADIN Akademisi, dunia usaha, asosiasi dan lain-lain.
4. RUPM adalah dokumen perencanaan jangka panjang sampai dengan 2025 yang bersifat Komplementer terhadap perencanaan sektoral sehingga dapat berfungsi mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait di bidang penanaman modal.
5. Pada Perpres nomor 16 tentang RUPM pasal 4 ayat (2) Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun RUPM mengacu pada RUPM Provinsi dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/Kota.

c). Pada tahun 2016 DPMPTSP Kota Pekalongan telah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang diupayakan peningkatannya melalui kegiatan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan ISO 9001 : 2008, DPMPTSP menjadi satu-satunya PD di Kota Pekalongan yang telah berhasil memperoleh standar pelayanan mutu yang telah diakui oleh berbagai kalangan.

Namun penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal meskipun sudah berjalan dengan baik, masih sangat memerlukan upaya peningkatan dan mencari solusi permasalahan atau kendala pada saat pelaksanaan fungsi dan tugas DPMPTSP sehingga mempengaruhi penerbitan Izin yang melebihi SOP. Permasalahan yang ada dan menjadi isu strategis pada urusan bidang penanaman modal adalah :

1. Belum optimalnya promosi potensi dan peluang investasi serta produk unggulan daerah yang mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kota Pekalongan.
2. Belum optimalnya kerjasama antar daerah dan antar kelembagaan terkait dalam melakukan kegiatan promosi dan pengembangan penanaman modal dalam rangka meningkatkan realisasi investasi.

3. Pelayanan perizinan usaha yang belum sepenuhnya satu pintu, sehingga dapat memperlambat proses penanaman modal dan kemungkinan menjadikan ekonomi biaya tinggi.
4. Penerbitan Izin yang melebihi SOP, yang disebabkan belum optimalnya Aplikasi dan pengelolaan yang ada karena terbatasnya anggaran, kurangnya staf pemprosesan, Belum sepenuhnya SKPD teknis menyerahkan wewenangnya.
5. Masih rendahnya realisasi investasi di Kota Pekalongan, yang terlihat dari rendahnya perkembangan investasi.
6. Belum optimalnya fasilitasi, pembinaan dan pengendalian penanaman modal melalui pelaporan kegiatan penanaman modal.
7. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung investasi untuk pengembangan penanaman modal.

Guna mengatasi berbagai permasalahan atau isu strategis yang dihadapi, DPMPTSP senantiasa bekerjasama dan meningkatkan koordinasi baik dengan Kemendagri, BKPM RI, BPMD Provinsi Jawa Tengah maupun dengan PD teknis terkait di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Strategi yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan di atas sesuai dengan tugas pokok DPMPTSP adalah :

1. Meningkatkan upaya promosi investasi / penanaman modal dan produk unggulan Kota Pekalongan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
2. Meningkatkan kerjasama dalam rangka promosi investasi dan pengembangan penanaman modal, baik pemerintah dan kalangan dunia usaha maupun dengan kelembagaan lainnya.
3. Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan perizinan melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang cepat dan memberi kepastian serta penyederhanaan prosedur perizinan.
4. Agar penerbitan izin tidak melebihi SOP, maka mengoptimalkan staf dan sarpras yang ada, melakukan administrasi penanggalan secara manual dan lebih kooperatif dalam koordinasi dengan PD teknis.
5. Meningkatkan fasilitasi pelayanan perizinan berbasis tenologi informasi (Simpadu, SPIPISE, OSS dan Website).
6. Meningkatkan berbagai upaya fasilitasi, pembinaan dan pengendalian penanaman modal serta pengembangan dunia usaha melalui asosiasi pengusaha dan melasanakan Sosialisasi tentang LKPM.
7. Meningkatkan fasilitasi peningkatan prasarana dan sarana pendukung investasi untuk pengembangan penanaman modal di Kota Pekalongan.
8. Mempersiapkan berbagai upaya dalam rangka penyusunan RUPM Kota Pekalongan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD untuk mengidentifikasi program kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/ pagu indikatif.

Tabel T-C. 31. 1. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Pekalongan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan RKPD 2024)			Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				**6.448.253.000**			**6.597.089.000**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 Persen	**4.789.485.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	100 Persen	**4.853.453.000**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	**15.869.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	100 Persen	**15.069.000**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.598.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.798.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA dan Perubahan RKA yang disusun	2 Dokumen	1.271.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.271.000	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	12.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	12.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	**3.156.369.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100 Persen	**3.373.345.000**	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	3.112.291.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	3.318.767.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan RKPD 2024)			Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Dokumen	42.900.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	53.400.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	1 Dokumen	1.178.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1.178.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	**5.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	100 Persen	**5.000.000**	
7	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keikutsertaan dalam karnaval batik	1 kali	5.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 kali	5.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	**753.247.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100 Persen	**768.747.000**	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 paket	2.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 paket	2.500.000	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	527.147.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 paket	527.147.000	
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	2.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4 paket	2.500.000	
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	65.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 paket	65.000.000	
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	33.600.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 paket	59.100.000	
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	2.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 dokumen	2.500.000	
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	120.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	110.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan RKPD 2024)			Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				**6.448.253.000**			**6.597.089.000**	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	**685.504.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100 Persen	**512.796.000**	
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	7.127.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	7.127.000	
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	435.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	300.000.000	
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	243.377.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	205.669.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	**173.496.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100 Persen	**178.496.000**	
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	134.357.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15 Unit	143.357.000	
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit	17.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	15.000.000	
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit	22.139.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35 Unit	20.139.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	**77.882.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	1 Dokumen	**77.882.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan RKPD 2024)			Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				**6.448.253.000**			**6.597.089.000**	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Peraturan penanaman modal yang disusun Jumlah dokumen Audit ISO yang disusun	1 dokumen 1 kali	**37.057.000**	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	1 dokumen 1 kali	**37.057.000**	
21	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah peraturan penanaman modal disusun	1 kali	37.057.000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 kali	37.057.000	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen peta potensi penanaman modal yang disusun/disosialisasikan	1 Dokumen	**40.825.000**	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	1 Dokumen	**40.825.000**	
22	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	40.825.000	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	40.825.000	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	**39.630.000**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	100 Persen	**46.930.000**	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pelaksanaan promosi penanaman modal	1 Kegiatan	**39.630.000**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	1 Kegiatan	**46.930.000**	
23	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	**39.630.000**	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	46.930.000	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	2500 Dokumen	**781.256.000**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	2500 Dokumen	**856.124.000**	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang disusun	12 bulan	**781.256.000**	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	12 bulan	**856.124.000**	
24	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2750 Pelaku Usaha	446.292.000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2750 Pelaku Usaha	521.160.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan RKPD 2024)			Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				**6.448.253.000**			**6.597.089.000**	
25	Pemantauan,analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	60 Kegiatan Usaha	228.264.000	Pemantauan,analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	60 Kegiatan Usaha	228.264.000	
26	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarat Tehadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	120 Pelaku Usaha	91.700.000	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarat Tehadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan	120 Pelaku Usaha	91.700.000	
27	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	1 Dokumen	15.000.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Nilai Investasi Baru pertahun	6,96 Miliar Rupiah	**657.656.000**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	6,96 Miliar Rupiah	**657.656.000**	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah perusahaan yang dikunjungi dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanaman modal	150 Perusahaan	**657.656.000**	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	150 Perusahaan	**657.656.000**	
28	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	3 Kegiatan	116.789.000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	3 Kegiatan	116.789.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan RKPD 2024)			Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				**6.448.253.000**			**6.597.089.000**	
29	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	360 Pelaku Usaha	358.373.000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	360 Pelaku Usaha	358.373.000	
30	Pengawasan Penanaman Modal	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	120 Kegiatan Usaha	182.494.000	Pengawasan Penanaman Modal	120 Kegiatan Usaha	182.494.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	**102.344.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	100 Persen	**105.044.000**	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Data dan informasi perizinan dan non perizinan kab/kota yang disajikan	6 aplikasi	**102.344.000**	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	6 aplikasi	**105.044.000**	
31	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	102.344.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	105.044.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel T-C.32. 1 Usulan Program/Kegiatan dari Pemangku Kepeningan Tahun 2023 Kota Pekalongan

Nama Perangkat Daerah : DPMPTSP Kota Pekalongan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
NIHIL					

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.3 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dengan persaingan global daalam perekonomian dunia saat ini yang makin ketat, kebijakan penanaman modal harus diarahkan untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional yang mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju Ekonomi Global, dalam upaya memajukan daya saing perekonomian nasional secara berkelanjutan. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif guna peningkatan realisasi penanaman modal.

Sejalan dengan hal tersebut dan sesuai dengan tugas DPMPTSP yaitu melakukan kewenangan daerah dibidang Penanaman Modal daerah, penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan terpadu dan pelayanan sesuai kebijakan Walikota.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Kota Pekalongan

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai rencana strategi yang ditetapkan yaitu “Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” dan “Meningkatnya Investasi di kabupaten/kota, dimana keberhasilan pencapaian tujuan diukur dalam kurun waktu 5 tahunan.

Indikator tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu Indeks kepuasan masyarakat dan nilai SAKIP DPMPTSP dimana indeks kepuasan masyarakat diukur menggunakan metode survey kepuasan dari para pelaku usaha yang mendaftarkan izin usahanya di kantor DPMPTSP. Penilaian SAKIP diukur berdasarkan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran atau kinerja organisasi. Sedangkan pengukuran untuk meningkatkan investasi di kab/kota diukur berdasarkan nilai investasi sampai dengan tahun rencana. Keberhasilan pencapaian sasaran diukur setiap tahun dengan menggunakan indikator tujuan/sasaran.

3.2.1 Visi dan Misi PD

Rencana Kerja DPMPTSP Kota Pekalongan Tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi DPMPTSP Kota

Pekalongan seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis DPMPTSP Kota Pekalongan tahun 2021 – 2026 dan Visi DPMPTSP Kota Pekalongan adalah :

" Terwujudnya Peningkatan Realisasi Investasi Daerah Melalui Pelayanan Prima "

Sedangkan untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk Misi. Sesuai dengan peran DPMPTSP Kota Pekalongan, misi DPMPTSP Kota Pekalongan tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan promosi potensi dan peluang investasi Kota Pekalongan; Promosi adalah merupakan salah satu fungsi urusan penanaman modal yang mempunyai peranan penting, karena promosi petensi investasi merupakan langkah awal dalam kegiatan Penanaman Modal yang bertujuan untuk menarik sebayak mungkin calon investor agar mau menanamkan modalnya di Kota Pekalongan.

b. Meningkatkan kualitas pelayanan dan iklim yang kondusif untuk meningkatkan realisasi investasi dan pengembangan kerjasama; Dengan meningkatnya kualitas pelayanan dan iklim yang kondusif, maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat di di Dunia Usaha kepada pemerintah kota pekalongan. Kondisi ini akan berimplikasi pada terwujudnya kerjasama yang baik atar pemerintah, antara pemerintah dengan dunia usaha dan antar pelaku dunia usaha .

c. Mengembangkan sistem pengendalian penanaman modal/investasi; Sehubungan dengan adanya peningkatan realisasi investasi penanaman Modal, maka diperlukan upaya-upaya untuk mengendalikan kegitan penanaman modal agar berjalan dengan baik serta memenuhi aturan-aturan dan ketentuan yang berlaku. Untuk itu diperlukan adanya sistem pengendalian yang dapat dikembangkan dengan memanfaatkan inovasi / teknologi informasi yang ada, sehingga pengendalian dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

d. Mendorong peran serta masyarakat dalam mewujudkan pelayanan prima; Pelayanan prima dapat diartikan sebagai pelayanan terbaik, pelayanan yang memuaskan atau dapat pula diartikan dapat diberikan pelayanan yang melebihi dari harapan yang dilayani. Untuk mewujudkan pelayanan yang prima ini, selain upaya dari penyedia layanan, maka penerima layanan pun harus ikut mendukungnya. Kontribusi yang dapat diberikan oleh penerima layanan antara lain adalah dengan memahami layanan yang diberikan termasuk tata cara, prosedur dan sebagainya. Diharapkan apabila penerima layanan sudah memahami mereka akan minta dilayani secara wajar dan sesuai dengan aturan yang ada. Selain itu dengan memahami hal-hal yang terkait dengan layanan mereka juga dapat memberikan umpan balik kepada penyedia layanan sehingga penyedia layanan dapat terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayananannya.Terkait dengan layanan yang diberikan oleh

DPMPTSP maka sebagai penerima layanan juga harus didorong agar dalam meminta pelayanan senantiasa mengikuti aturan yang berlaku, serta dapat memberikan masukan dan umpan balik kepada DPMPTSP sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima.

e. Mewujudkan efektifitas pelayanan berbasis Teknologi Informasi; Pemanfaatan teknologi informasi semakin berkembang dan meluas. Kini hampir semua kegiatan manusia modern sudah menggunakan teknologi informasi sebagai alat bantu yang akan mempermudah dan mempercepat pencapaian tujuan. Demikian halnya dengan pelayanan kepada masyarakat, dengan didukung oleh teknologi informasi maka pelayanan dapat dilaksanakan dengan lebih baik, lebih cepat dan tepat. Sejak awal pendiriannya DPMPTSP sudah dirancang untuk menggunakan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan penerapan teknologi informasi ini diharapkan pelayanan yang diberikan menjadi lebih baik, efektif dan efisien.

f. Mengembangkan kualitas dan profesionalisme SDM. Kualitas dan Profesionalisme SDM adalah merupakan syarat mutlak agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta pelayanan prima secara profesional, untuk itu secara kualitas bahwa SDM yang ditempatkan sesuai standar kompetensi yang ditetapkan, yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan secara khusus agar bisa bertindak secara profesional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat, selain menerapkan misi-misi tersebut dalam mencapai tujuan visi yang ditetapkan, DPMPTSP juga mempunyai motto yang menjadi prinsip dalam pelayanan yaitu : ***Kepastian Prosedur, Kepastian Waktu dan Kepastian Biaya.***

3.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Tugas DPMPTSP Kota Pekalongan Berdasarkan Peraturan Walikota No. 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekalongan adalah :

" Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. "

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Walikota tersebut, DPMPTSP Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. perumusan dan penetapan sasaran program bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;

b. penetapan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
c. pengkoordinasian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
d. pengkoordinasian tugas dibidang perencanaan dan pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
e. pengkoordinasian fasilitasi bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
f. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan;
g. pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
h. pengkoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas;dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2.3 Struktur Organisasi PD

Berdasarkan Peraturan Walikota No. 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekalongan seperti gambar berikut: :

Tabel T-C. 33. 1 Bagan Organisasi DPMPTSP Kota Pekalongan

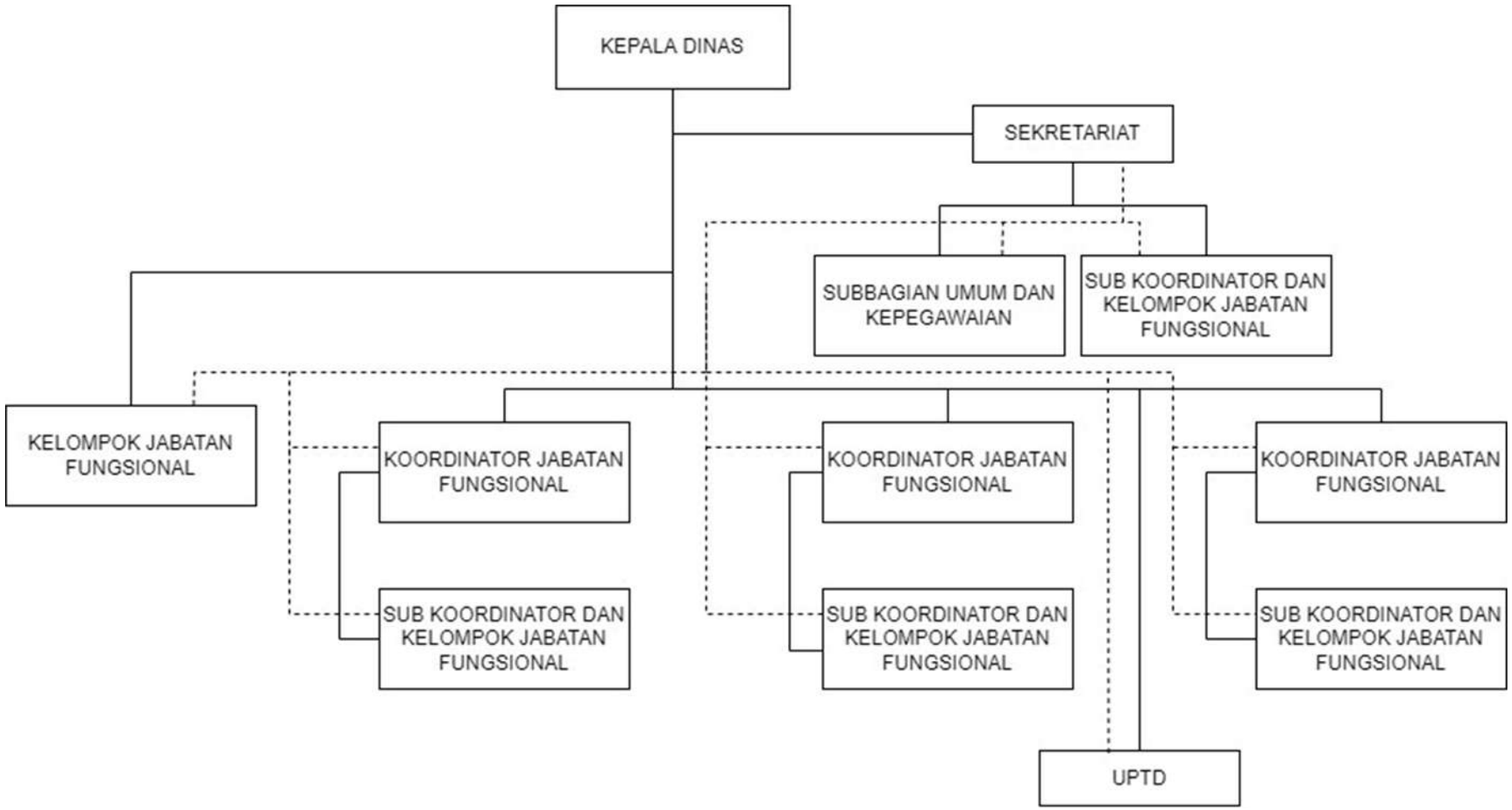

3.2.4 Kondisi Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan satu faktor sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP dalam melayani masyarakat. Sebagai Perangkat Daerah pelaksana urusan penanaman modal sekaligus pelayanan perizinan dan pengaduan, kualitas dan kuantitas SDM yang ada saat ini belum sesuai dengan kriteria minimal yang dipersyaratkan dalam Peraturan Kepala BKPM RI No.11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, DPMPTSP Kota Pekalongan per 31 Desember 2023 mempunyai pegawai 55 orang, terdiri dari 29 orang laki-laki dan 26 orang perempuan dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.2.4 1 Jumlah Pegawai DPMPTSP Berdasarkan Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Prosentasi	
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	SD	-		0%	0%
2.	SLTP	-		0%	0%
3.	SLTA	9	5	32%	22%
4.	DIPLOMA I	-		0%	0%
5.	DIPLOMA II	-		0%	0%
6.	DIPLOMA III	6	6	21%	26%
7.	DIMPLOMA IV	-		0%	0%
8.	S-1	10	9	36%	39%
9.	S-2	3	3	11%	13%
10.	S-3	-		0%	0%
	JUMLAH	**28**	**23**	**100%**	**100%**

Tabel 3.2.4 2 Jumlah Pegawai DPMPTSP Berdasarkan Golongan dan Kepangkatan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Prosentasi	
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	GOLONGAN I	-	-	0%	0%
2.	GOLONGAN II	8	6	29%	26%
3.	GOLONGAN III	17	14	61%	61%
4.	GOLONGAN IV	3	3	11%	13%
	JUMLAH	**28**	**23**	**100%**	**100%**

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Prosentasi	
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	II.a	-	-	0%	0%
2.	II.b	1	1	4%	4%
3.	III.a	1	1	4%	4%
4.	III.b	-	-	0%	0%
5.	IV.a	1	1	4%	4%
6.	IV.b	-	-	0%	0%
7.	JFT Penyetaraan Jabatan	7	5	25%	22%
8.	JFT	1	2	4%	9%
9.	JFU	17	13	61%	57%
	JUMLAH	**28**	**23**	**100%**	**100%**

3.2.5 Kondisi Sarana Prasarana

Kondisi sarana prasarana yang baik dan terpelihara akan sangat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan DPMPTSP sehari-hari kepada masyarakat. Pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung kantor DPMPTSP senantiasa dilaksanakan supaya terwujud gedung kantor yang representatif sehingga kenyamanan dan keamanan pelayanan akan tercipta serta masyarakat merasakan kepuasan atas jasa pelayanan DPMPTSP. Pemenuhan kelengkapan peralatan kantor setiap tahun dilaksanakan sehingga kondisi gedung beserta peralatan penunjang dan lingkungannya sesuai dengan standard PD pelayanan publik yang telah ditetapkan. Dengan demikian harapan mewujudkan pelayanan prima dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) kemungkinan dapat tercapai. Secara detail, sarana dan prasarana yang dimiliki DPMPTSP per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.5 1
Sarana dan Prasarana DPMPTSP

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi
1	Station Wagon	4	Unit	Baik
2	AC Split	47	Unit	Baik
3	Sepeda Motor Dinas	11	Unit	Baik
4	Lemari Besi /Metal	17	Unit	Baik
5	Rak Kayu	1	Unit	Baik
6	Filling Cabinet Besi	30	Unit	Baik
7	Brangkas	1	Unit	Baik
8	White Board	6	Unit	Baik
9	Papan Nama Instansi	2	Unit	Baik
10	Papan Pengumuman	1	Unit	Baik

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi
11	Meja Rapat	17	Unit	Baik
12	Kursi Tamu	3	Unit	Baik
13	Bangku Tunggu	15	Unit	Baik
14	Kursi Lipat	30	Unit	Baik
15	Meja Komputer	18	Unit	Baik
16	Kursi Tangan	14	Unit	Baik
17	Meja Tulis	7	Unit	Baik
18	Televisi	10	Unit	Baik
19	Unit Power Supply	43	Unit	Baik
20	Lambang Garuda	1	Unit	Baik
21	Gambar Presiden dan Wakil	2	Unit	Baik
22	Camera	1	Unit	Baik
23	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6	Unit	Baik
24	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	15	Unit	Baik
25	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	19	Unit	Baik
26	Pesawat Telepon	2	Unit	Baik
27	P.C Unit	52	Unit	Baik
28	Printer	55	Unit	Baik
29	Router	1	Unit	Baik
30	Server	7	Unit	Baik
31	Hub	3	Unit	Baik
32	Kursi Putar	11	Unit	Baik
33	Note Book	20	Unit	Baik
34	Lemari Kaca	1	Unit	Baik
35	Alat Pemadam/Portable	12	Unit	Baik
36	Buffet Kaca	1	Unit	Baik
37	Power Supply (Peralatan Studio Video	1	Unit	Baik
38	LCD Proyektor	3	Unit	Baik
39	Scanner	13	Unit	Baik
40	Lemari Kayu	13	Unit	Baik
41	Rak Besi	4	Unit	Baik
42	Papan Visual/Papan nama	1	Unit	Baik
43	Alat Penghancur Kertas	2	Unit	Rusak
44	Kursi Besi/ Metal	16	Unit	Baik
45	Meja Resepsionis	7	Unit	Baik

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi
46	Dispenser	1	Unit	Baik
47	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	Unit	Baik
48	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3	Unit	Baik
49	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	19	Unit	Baik
50	Kursi Rapat	54	Unit	Baik
51	Mesin penghisab debu/vacuum cleaner	1	Unit	Rusak
52	Mesin Pemotong	1	Unit	Baik
53	Jam Elektronik	1	Unit	Baik
54	Microphone	4	Unit	Baik
55	Mesin Absensi	2	Unit	Baik
56	Portable generating set	3	Unit	Baik
57	AC. Window	4	Unit	Baik
58	Sound System	3	Unit	Baik
59	Lemari buku arsip untuk dokumen arsip dinamis	9	Unit	Baik
60	Lemari es	1	Unit	Rusak
61	Meja tamu biasa	1	Unit	Baik
62	Kursi Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik
63	Meja Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik
64	Mesin Fotocopy Electronik	1	Unit	Baik
65	CCTV	4	Unit	Baik
66	Mesin Laminating	2	Unit	Baik
67	Meja 1/2 Biro	5	Unit	Baik
68	Sofa	1	Unit	Baik
69	Air curtain	4	Unit	Baik

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi DPMPTSP Kota Pekalongan, maka Renstra DPMPTSP Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026, arah kebijakan umum serta untuk mengatasi berbagai kondisi dan permasalahan di atas direncanakan usulan program dan kegiatan sebagai berikut :

Penjabaran dari perencanaan kinerja tahunan DPMPTSP Kota Pekalongan tahun 2024 yang memuat dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif disajikan dalam tabel pada lampiran I, II, sedangkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu satu tahunan dan stategi yang digunakan sebagai berikut :

Misi 1	:	Meningkatkan Promosi Potensi dan Peluang Investasi Kota Pekalongan
Tujuan	:	Meningkatkan upaya promosi potensi dan peluang investasi dan produk unggulan Kota Pekalongan baik dalam Negeri maupun luar Negeri.
Sasaran	:	Meningkatkanya frekwensi dan kwantitas promosi potensi instansi dan produk unggulan Kota Pekalongan.
Kebijakan	:	Meningkatkan berbagai kegiatan promosi potensi Investasi dan produk unggulan kepada investor daalam dan luar Negeri untuk memanfaatkan potensi Kota Pekalongan.
Misi 2	:	Meningkatkan kualitas pelayanan dan iklim yang kondusif untuk meningkatkan realisasi investasi dan pengembangan kerjasama.
Tujuan	:	Meningkatkan kerjasama dalam rangka promosi investasi dan pengembangan penanaman modal baik antar pemerintah, kalangan dunia usaha maupun dengan kelembagaan lainya.
Sasaran	:	Meningkatnya kerjasama bidang penanaman modal baik antar pemerintah, dunia usaha, maupun dengan kelembagaan lainya.
Kebijakan	:	Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam berbagai kegiatan promosi investasi dan upaya menarik minat investor, membangun sinegi dan kekhasan masing-masing daerah dalam berbagai bidang penanaman modal.
Misi 3	:	Mengembangkan Sistem Pengendalian Penanaman Modal / investasi .
Tujuan	:	Meningkatkan pemantauan, pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai peraturan perudang-undangan secara efektif dan efisien
Sasaran	:	Meningkatkan realisasi investasi penanaman modal dengan dukungan iklim investasi yang semakin kondusif dalam koridor kebijakan penanaman modal yang ramah lingkungan, taat aturan dan berkelanjutan.
Kebijakan	:	1. Meningkatkan pengendalian terhadap perizinan-perizinan yang telah dikeluarkan, meliputi kesesuaian usaha dan masa berlakunya. 2. Meningkatkan pemantauan terhadap para penanam modal, baik yang masih dalam taraf pembangunan maupun yang telah

beroperasi melalui pengumpulan dan verifikasi Data Laporan Kegiatan Penanaman modal.

Misi 4	:	Mendorong peran serta masyarakat dalam mewujudkan pelayanan prima.
Tujuan	:	Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektifitas pelayanan.
Sasaran	:	Meningkatnya pemahaman masyarakat tetang pelayanan perizinan dan penanaman modal Terfasilitasinya pengaduan masyarakat.
Kebijakan	:	Melaksanakan sosialisasi penanaman modal dan pelayanan perizinan. Melaksanakan fasilitasi pengaduan masyarakat .
Misi 5	:	Mewujudkan efektifitas pelayanan berbasis Teknologi informasi.
Tujuan	:	Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektifitas pelayanan.
Sasaran	:	Tersedianya sistem informasi pelayanan beserta sarana prasarana dan kelengkapan untuk operasionalitasnya dan terpeliharanya sistem Informasi pelayanan beserta sarana prasarana dan kelengkapan untuk operasionalitasnya.
Kebijakan	:	Mengembangkan sistem informasi pelayanan terpadu (Simpadu) Memelihara sistem informasi pelayanan terpadu (Simpadu)
. Misi 6	:	Mengembangkan Kualitas dan Profesionalisme SDM.
Tujuan	:	Meningkatkan kualitas sumbedaya manusia apratur pelayanan dalam rangka mewujudkan profesionalisme aparat Negara.
Sasaran	:	Meningkatkan jumlah aparat pelayanan yang berkualitas dan profesional sesuai kompetensi yang ditetapkan secara Nasional dan memiliki sikap sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi.
Kebijakan	:	Meningkatkan frekwensi pengiriman aparat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta prestasi aparat pelayanan yang berprestasi.

3.2.6 Program dan Kegiatan

Program 1 : Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1. Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah
2. Kegiatan Kajian Kebijakan Penanaman Modal
3. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi
4. Kegiatan Audit Standart ISO 9000.

Program 2 Pelaksanaan dan Pengendalian Penanaman Modal

1. Kegiatan Klinik LKPM
2. Kegiatan Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksana Penanaman Modal
3. Kegiatan Penyusunan Profil Investasi

Program 3 Pelayanan Perizinan

1. Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
2. Kegiatan Aplikasi SIMPADU
3. Kegiatan Pengelolaan Webside OSS
4. Kegiatan Pengelolaan SPIPISE
5. Kegiatan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
6. Kegiatan Fasilitasi Pengaduan Perijinan Dan Non Perijinan
7. Kegiatan Penyebarluasan Penanaman Modal dan Perizinan
8. Kegiatan Promosi Kegiatan Unggulan dan Inovatif.

Tabel T-C. 33. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Pekalongan

Nama OPD : DPMPTSP Kota Pekalongan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**5.319.645.000**				**13.037.457.100**
2.18	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL**				**3.763.374.000**				**8.953.172.000**
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**- Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah -Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja - Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**100 Persen 100 Persen 100 Persen**	**3.763.374.000**			**100 Persen 100 Persen 100 Persen**	**8.953.172.000**
2.18.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**100 Persen**	**19.639.000**			**100 Persen**	**34.000.000**
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	5.097.000	DAU			12.000.000
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	2.542.000	DAU			2.000.000
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Laporan	12.000.000	DAU			20.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif
2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**100 Persen**	**2.676.895.000**			**100 Persen**	**4.062.500.000**
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23 Orang/Bulan	2.639.417.000	DAU			4.000.000.000
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	36.300.000	DAU			58.000.000
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.178.000	DAU			4.500.000
2.18.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**100 Persen**	**3.650.000**			**100 Persen**	**53.390.000**
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 kali	3.650.000	DAU			53.390.000
2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**100 Persen**	**231.240.000**			**100 Persen**	**1.286.282.000**
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 paket	1.830.000	DAU			4.500.000
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediaka	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 paket	59.420.000	DAU			1.003.782.000
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 paket	2.560.000	DAU			5.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 paket	45.150.000	DAU			70.000.000
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 paket	40.150.000	DAU			80.000.000
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 dokumen	1.830.000	DAU			3.000.000
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 laporan	80.300.000	DAU			120.000.000
2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**100 Persen**	**696.390.000**			**100 Persen**	**907.000.000**
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 laporan	4.350.000	DAU			7.000.000
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 laporan	435.000.000	DAU			700.000.000
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 laporan	257.040.000	DAU			200.000.000
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**					**100 Persen**	
2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**100 Persen**	**135.560.000**			**100 Persen**	**2.610.000.000**
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	89.060.000	DAU			250.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	31.900.000	DAU			2.300.000.000
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Unit	14.600.000	DAU			60.000.000
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**1 Dokumen**	**51.180.000**			**1 Dokumen**	**250.000.000**
2.18.02.2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah audit ISO yang dilaksanakan Jumlah peraturan penanaman modal yang disusun**	**Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**1 Kali 1 Peraturan**	**24.350.000**			**1 Dokumen**	**85.000.000**
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	24.350.000	DAU			85.000.000
2.18.02.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen peta potensi penanaman modal yang disusun**	**Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**1 Dokumen**	**26.830.000**				**165.000.000**
2.18.02.2.02.0004	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	26.830.000	DAU			165.000.000
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**100 Persen**	**28.930.000**			**100 Persen**	**178.000.000**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif
2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal**	**Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**1 Kegiatan**	**28.930.000**			**2 Kegiatan**	**178.000.000**
2.18.03.2.01.002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	28.930.000	DAU			178.000.000
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal**	**Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**2500 Dokumen**	**739.790.000**			**2500 Dokumen**	**2.314.975.100**
2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah laporan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang disusun**	**Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**12 Bulan**	**739.790.000**			**12 Bulan**	**2.314.975.100**
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2750 Pelaku Usaha	9.860.000	DAU			102.600.100
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Kegiatan Usaha	441.280.000	DAU			900.000.000
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120 Pelaku Usaha	62.460.000	DAU			387.375.000
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang peizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	226.190.000	DAU			925.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Nilai Investasi Baru pertahun**	**Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**6,96 Miliar Rupiah**	**638.003.000**			**7,09 Miliar Rupiah**	**821.310.000**
2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah perusahaan yang dikunjungi dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanaman modal**	**Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**150 Perusahaan**	**638.003.000**			**177 Perusahaan**	**821.310.000**
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Kegiatan Usaha	107.446.000	DAU DAK			245.920.000
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sosialisasi Implementasi	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	360 Pelaku Usaha	348.703.000	DAU DAK			438.000.000
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku diakukan Inspeksi Lapangan serta dIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120 Kegiatan Usaha	181.854.000	DAU DAK			137.390.000
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**100 Persen**	**98.368.000**			**100 Persen**	**520.000.000**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif
2.18.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Data dan informasi perizinan dan non perizinan kab/kota yang disajikan**	**Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**6 Aplikasi**	**98.368.000**			**6 Aplikasi**	**520.000.000**
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	98.368.000	DAU			520.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan rencana program dan kegiatan DPMPTSP Kota Pekalongan dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra, dan visi dan misi Kota Pekalongan yang tertuang dalam RPJMD. Program kerja utama DPMPTSP Kota Pekalongan sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kota Pekalongan adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
3. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Dalam Renja DPMPTSP Kota Pekalongan Tahun 2024 terdapat 12 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan. Kegiatan DPMPTSP Kota Pekalongan yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kebutuhan pendanaan DPMPTSP Kota Pekalongan untuk tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4 1 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu Anggaran

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Sumber Dana	Penanggung Jawab
2.18	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL**	**5.319.645.000,00**	**13.037.457.100,00**		
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.763.374.000,00**	**8.953.172.000,00**		
2.18.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**19.639.000,00**	**34.000.000,00**		
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.097.000,00	12.000.000,00	DAU	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.542.000,00	2.000.000,00	DAU	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000,00	20.000.000,00	DAU	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.676.895.000,00**	**4.062.500.000,00**		
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.639.417.000,00	4.000.000.000,00	DAU	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.300.000,00	58.000.000,00	DAU	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.178.000,00	4.500.000,00	DAU	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**3.650.000,00**	**53.390.000,00**		
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3.650.000,00	53.390.000,00	DAU	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Sumber Dana	Penanggung Jawab
2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**231.240.000,00**	**1.286.282.000,00**		
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.830.000,00	4.500.000,00	DAU	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.420.000,00	1.003.782.000,00	DAU	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.560.000,00	5.000.000,00	DAU	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.150.000,00	70.000.000,00	DAU	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.150.000,00	80.000.000,00	DAU	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.830.000,00	3.000.000,00	DAU	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.300.000,00	120.000.000,00	DAU	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**696.390.000,00**	**907.000.000,00**		
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.350.000,00	7.000.000,00	DAU	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	435.000.000,00	700.000.000,00	DAU	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	257.040.000,00	200.000.000,00	DAU	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**135.560.000,00**	**2.610.000.000,00**		
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89.060.000,00	250.000.000,00	DAU	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31.900.000,00	2.300.000.000,00	DAU	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.600.000,00	60.000.000,00	DAU	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**51.180.000,00**	**250.000.000,00**		
2.18.02.2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**24.350.000,00**	**85.000.000,00**		**Koordinator PM**
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	24.350.000,00	85.000.000,00	DAU	Koordinator PM
2.18.02.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**26.830.000,00**	**165.000.000,00**		**Koordinator PM**
2.18.02.2.02.0004	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	26.830.000,00	165.000.000,00	DAU	Koordinator PM
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**28.930.000,00**	**178.000.000,00**		
2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**28.930.000,00**	**178.000.000,00**		Koordinator PM
2.18.03.2.01.002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	28.930.000,00	178.000.000,00	DAU	Koordinator PM
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**739.790.000,00**	**2.314.975.100,00**		
2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**739.790.000,00**	**2.314.975.100,00**		**Koordinator PTSP**
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	9.860.000,00	102.600.100,00	DAU	Koordinator PTSP

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Sumber Dana	Penanggung Jawab
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	441.280.000,00	900.000.000,00	DAU	Koordinator PTSP
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	62.460.000,00	387.375.000,00	DAU	Koordinator PTSP
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang peizinan berusaha berbasis risiko	226.190.000,00	925.000.000,00	DAU	Koordinator PTSP
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**638.003.000,00**	**821.310.000,00**		
2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**638.003.000,00**	**821.310.000,00**		**Koordinator PM**
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	107.446.000,00	245.920.000,00	DAU DAK	Koordinator PM
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	348.703.000,00	438.000.000,00	DAU DAK	Koordinator PM
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	181.854.000,00	137.390.000,00	DAU DAK	Koordinator PM
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**98.368.000,00**	**520.000.000,00**		
2.18.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**98.368.000,00**	**520.000.000,00**		**Koordinator PM**
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	98.368.000,00	520.000.000,00	DAU	Koordinator PM

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekalongan ini disusun guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan; mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance); dan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota Pekalongan. Penyusunan Renja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPTSP) Kota Pekalongan ini mengacu pada RPJM Pemerintah Daerah Kota Pekalongan tahun 2021 - 2026, sehingga perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun akan dapat berkelanjutan, konsisten dan berada pada kerangka acuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Renja DPMPTSP Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, sehingga Dapat tercapainya tujuan pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2025.

Pekalongan, 08 Agustus 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PEKALONGAN

BENO HERITRIONO, SH.,M.Si
Pembina Utama Muda,
NIP. 19650118 198903 1 002

RENCANA KERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KOTA PEKALONGAN

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Usulan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 ini merupakan penyusunan yang telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan dan menyangkut keberhasilan dan pencapaian target yang telah dituangkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2021 RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 ini, kami sampaikan terima kasih.

Selanjutnya dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 ini, harapan kami apa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun 2025 dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2025.

Pekalongan, 8 Agustus 2024
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kota Pekalongan

Drs. SOERJSO M.Pd.
NIP. 19640921 198803 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR....2
DAFTAR ISI....3
BAB I....4
PENDAHULUAN....4
1.1. Latar Belakang....4
1.2. Landasan Hukum....4
1.3. Maksud dan Tujuan....6
1.4. Sistematika Penulisan....6
BAB II....8
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU....8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah....8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah....11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah....14
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD....14
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat....31
BAB III....32
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH....32
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional....32
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah....32
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan....32
BAB IV....43
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH....43
BAB V....47
PENUTUP....47

BAB I
PENDAHULUAN

.

1.1 Latar Belakang

Perumusan rancangan awal Renja merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada OPD dalam menyusun Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 teknokratis dan partisipatif. Dokumentasi perumusan dan keseluruhan tahan perencanaan pembangunan daerah dijadikan sebagai kertas kerja *(working paper).* Suatu kertas kerja perumusan dan keseluruhan tahap penyusunan RKPD merupakan dokumen yang tak terpisah dan dijadikan sebagai dasar penyajian (dokumen).

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun 2025 merupakan Dokumen Rencana dengan wawasan satu tahun ke depan yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) harus memperhatikan seluruh perubahan sosial, politik, dan ekonomi serta menjadikan hasil evaluasi perencanaan tahun sebelumnya sebagai referensi.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam mendukung penyelenggaraan Program Pembangunan tahunan pemerintah daerah, sehingga dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan yang berisikan Progam dan Kegiatan yang disusun lebih menekankan kepada peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan dan peningkatan kualitas tata kelola arsip kearsipan di lingkungan OPD sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2024, tentunya progam dan kegiatan tersebut mendukung pelaksanaan prioritas kinerja pembangunan Kota Pekalongan yang mengusung visi Kota Pekalongan yaitu “Mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri dan religius”. Peran serta Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam misi dimaksud adalah mewujudkan sumber daya manusia yang religus, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan terwujud sebagai manifestasi daripada materi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah dijabarkan di dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 yaitu di dalam misi mewujudkan sumber daya manusia yang religus, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan maupun Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Disamping itu, RENJA yang disusun ini telah disinkronisasi dengan acuan Rencana Kerja Kementerian Lembaga (Renja K/L), Rencana Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga menjadi rujukan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Pekalongan Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
18. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Pekalongan Tahun 2004-2013;
19. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30);

20. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (LD Tahun 2013 Nomor 19);
21. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kota Pekalongan;
22. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 9);
23. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025

1.3 Maksud Dan Tujuan

A. Maksud

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai pedoman atau acuan bagi pihak-pihak kepentingan baik internal maupun eksternal lingkup kedinasan maupun tingkat Kota Pekalongan dan merupakan penjabaran dari implementasi pelaksanaan Indikator Kinerja Tahun yang akan datang di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan dalam menciptakan kesepakatan dan komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan misi Kota Pekalongan tahun 2021-2026. Serta sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran tahun 2025.

B. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menyusun program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2025;
2. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan dengan pembanding Renja Tahun sebelumnya maupun Tahun yang akan datang;
4. Pedoman dalam menyusun dokumen rencana agenda pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025 berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Tahun 2025;
5. Penetapan Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan yang direncanakan dalam pembebanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1 Latar Belakang

Memuat tentang pengertian Renja Dinarpus, Proses Penyusunan Renja, keterkaitan antara Rencana Kerja (Renja) dengan Dokumen RKPD dan Rencana Strategis (Renstra).

1.2 Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja

Dinarpus Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja).

1.4 Sistematika penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUSASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang Penelaahan Visi, Misi, Program Walikota Dan Wakil Walikota serta Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisikan Rencana Kerja Kegiatan, Capaian Kinerja yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah, Pagu Program dan Kegiatan.

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinarpus Kota Pekalongan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis pada tahun yang bersangkutan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinarpus Kota Pekalongan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinarpus Kota Pekalongan selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024.

Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan penetapan indikator kinerja, yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Anggaran Perubahan Belanja Tahun Anggaran 2023 Dinarpus Kota Pekalongan sebesar Rp. 16.218.787.000, melaksanakan 2 (dua) urusan wajib pemerintahan yaitu Kearsipan dan Perpustakaan, terdiri dari 4 program, 13 kegiatan dan 37 Sub Kegiatan . Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 16.015.200.135,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 98,74 %.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2024, dengan alokasi pagu anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 5.303.143.000,- melaksanakan 2 (dua) urusan wajib pemerintahan, 5 program, 14 kegiatan dan 37 sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%, baik realisasi keuangan maupun capaian fisiknya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinarpus sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia yang terbatas;
2. Pemahaman tentang output yang ingin dicapai dari setiap kegiatan belum terdefinisi secara utuh, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi output kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan.
3. Komitmen dan pemahaman bersama untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD perlu ditingkatkan dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinarpus dalam pelaksanaan urusan perpustakaan dan kearsipan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinarpus Kota Pekalongan, didasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun

sebelumnya. Capaian evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah dapat dilihat dalam tabel T-C.29. dibawah ini :

tabel T-C.29
rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Dinarpus dan pencapaian renja s/d th 2023 (n-2) Kota Pekalongan

No	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase capaian target RPJMD	Status Capaian Target 2023
						Target 2023	Realisasi 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	persen	3.30	2.80	80	46,67	96,67	96,67	96,67	belum tercapai
	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	100	100	100	100	100	tercapai
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	100	100	100	100,35	100.35	100.35	tercapai
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100	belum tercapai
	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	indeks	24,97	24,97	24,97	16,09	27,96	173,75	173,75	tercapai
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	persen	100	100	100	66,67	66,67	66,67	66,67	belum tercapai

	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK outcome)	indeks	45		80,23	45	75	166,67	166,67	tercapai

1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinarpus Kota Pekalongan didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan:

1. Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Dinarpus Kota Pekalongan adalah :

a. Tugas

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kota Pekalongan, Dinarpus Kota Pekalongan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yanG menjadi kewenangan daerah bidang kearsipan dan perpustakaan.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Dinarpus Kota Pekalongan mempunyai fungsi :

1) perumusan dan penetapan sasaran program bidang kearsipan dan perpustakaan;
2) perumusan kebijakan bidang kearsipan dan perpustakaan;
3) pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kearsipan;
4) pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang perpustakaan;
5) pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
6) pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
7) pengkoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinarpus Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, Dinarpus Kota Pekalongan, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, terdiri dari:
    1) Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan;
    2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Kepala Bidang Kearsipan,
d. Kepala Bidang Perpustakaan,
e. UPTD
f. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Kondisi Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Dinarpus Kota Pekalongan, sampai dengan 31 Juni 2024 berjumlah 16 orang

a. Jumlah pegawai Dinarpus berdasarkan jenjang pendidikan terakhir dari pegawai yang berstatus PNS adalah sebagai berikut :
   1) 2 (dua) orang berpendidikan S-2;
   2) 7 (tujuh) orang berpendidikan S-1;
   3) 5 (lima) orang berpendidikan D-III;
   4) 4 (enmpat) orang berpendidikan SMA;
   5) 1 (satu) orang berpendidikan SMP.

b. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut:
   1) Struktural
      a) Eselon II.b : 1 orang
      b) Eselon III.a : 1 orang
      c) Eselon III.b : 2 orang
      d) Eselon IV.a : 2 orang
      e) Eselon IV.b : 1 orang
   2) Staf : 4 orang
   3) Pejabat Fungsional : 6 orang

c. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/Golongan adalah sebagai berikut:
   1) Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang
   2) Pembina (IV/a) : 2 orang
   3) Penata Tingkat I (III/d) : 3 orang
   4) Penata (III/c) : 1 orang
   5) Penata Muda Tk. I (III/b) : - orang
   6) Penata Muda (III/a) : 4 orang
   7) Pengatur Tk. I (II/d) : 1 orang
   8) Pengatur (II/c) : 2 orang
   9) Golongan IX PPPK : 1 orang

Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2023, dapat dilihat melalui rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolak ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintah dalam mencapai Visi dan Misi sesuai dengan IKK dan RPJMD yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan beberapa aspek/foku sebagai berikut :

1. meningkatnya kualitas layanan publik
2. meningkatnya kegemaran membaca

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut :

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kota Pekalongan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	Nilai SAKIP OPD			76,50	77	78,5	80	75,30				
2	Indeks Pengawasan Kearsipan Tingkat Kota (ANRI)			2.95	3.05	3.15	3.25	3.20			3.05	
3	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (IKK Outcome)			20,12	20,32	20,52	20,73	19,25				
4	Persentase peningkatan kegemaran membaca			0,2	0,2	0,2	0,2	0	0		0,2	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat			78,20	79,45	79,70	79,95	95.59			81.54	

1.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting yang dapat diamati dalam pengembangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan tahun 2019, antara lain :

1. Meningkatkan gemar dan budaya baca masyarakat mealui pengembangkan budaya baca masyarakat untuk mewujudkan masyarakat gemar membaca kearah kebiasaan membaca, sehingga membaca menjadi suatu kebutuhan dan pada akhirnya tercipta budaya baca.
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat yang ditandai oleh meningkatnya standar mutu perpustakaan dan kompetensi SDM di semua jenis perpustakaan.
3. Peningkatan Penyelamatan Arsip dan Bahan Pustaka.

- Terjaganya dan terpeliharanya kelestarian koleksi bahan perpustakaan dan arsip
- Terjaminnya kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan sebagai khasanah informasi dan pengetahuan
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas koleksi bahan perpustakaan dan arsip
- Menyimpan, memelihara dan menyelamatkan arsip
- Tersedianya bahan perpustakaan dan arsip sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

4. Mengantisipasi perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi dengan segera akan menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Statis Dan Dinamis (SIKS dan SIKD) di pusat dan daerah serta pengembangan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional merupakan pelayanan publik yang dapat membantu dan melayani masyarakat akan kebutuhan arsip yang dilengkapi sarana dan prasarananya. Dan begitu juga halnya dengan Otomasi Perpustakaan dan pengembangan perpustakaan digital (e-library) yang merupakan harapan untuk dapat melaksanakan aktifitas perpustakaan melalui jaringan komputerisasi.
   Dalam mengamati isu-isu penting tersebut diatas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan telah melaksanakan peningkatan kinerja yang berkaitan dengan koordinasi dan sinergi program dengan lintas SKPD Propinsi dan SKPD/Lembaga tehnis yang mengelola perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten / Kota melalui rapat koordinasi, walaupun hasil yang diharapkan belum optimal, seperti sinergi program dengan Dinas Pendidikan yang berkaitan dengan perpustakaan sekolah, hal yang bisa dilakukan sharing kegiatan seperti Dinas pendidikan memberikan pembinaan terhadap Perpustakaan Sekolah, terkait sarana dan prasarana, sedangkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan melatih sumber daya manusia untuk mengelola perpustakaan sekolah seperti mengadakan pembinaan perpustakaan, bagaimana seharusnya mengelola buku dan menata koleksi buku-buku yang ada, sedangkan sinergi program belum berjalan sebagaimana mestinya.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi berkaitan dalam penyelenggaraan tugas SKPD adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya apresiasi terhadap bidang tugas perpustakaan dan kearsipan sehingga kedua bidang ini perlu terus menjadi skala prioritas Pemerintah Kota Pekalongan.
2. Masih ada sebagian orang yang menganggap perpustakaan dan kearsipan sesuatu lembaga yang termarjinalkan, sesuatu yang terpinggirkan padahal mereka lupa bahwa lembaga kami adalah sebagai sumber informasi yang perlu dimanfaatkan oleh mereka.
3. Respon SKPD lain untuk memanfaatkan jasa di bidang perpustakaan dan kearsipan belum maksimal hal ini bisa dilihat permintaan SKPD bagaimana mengelola pustaka dan arsip secara benar belum seluruhnya, padahal dalam kapasitas pembinaan terhadap SKPD sudah kami lakukan
4. Masih belum meratanya kualitas SDM bidang perpustakaan dan kearsipan yang ada pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan, sehingga masih perlu adanya tenaga Jabatan fungsional Pustakawan dan Arsiparis
5. Anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan yang masih perlu ditingkatkan,

sehingga hal ini sedikit mengalami kendala untuk memberikan pelayanan yang maksimal keadaan masyarakat khususnya perpustakaan masyarakat yang sangat membutuhkan pelayanan perpustakaan dan peningkatan kwalitas bidang kearsipan di masing-masing SKPD.

6. Terbatasnya sarana dan prasarana bidang perpustakaan dan kearsipan sehingga untuk memberikan pelayanan yang prima masih jauh dari harapan disebabkan karena masih menyatunya ruang pelayanan perpustakaan dengan ruang administrasi kepegawaian serta kondisi ruang untuk menyimpan koleksi buku dan khasanah arsip sangat memprihatinkan.

Walaupun ada kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan seperti yang disebutkan di atas, namun kendala dan hambatan tersebut tidak pula menjadikan patah semangat untuk memberikan pelayanan terbaik, dan ini juga tidak akan menggangu pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Isu-isu penting dan strategis yang dapat kami rekomendasikan untuk ditindaklanjuti dalam bentuk perumusan program dan kegiatan prioritas untuk tahun selanjutnya adalah:

1. Perlu ada penambahan mobil penjemputn keliling, sehingga target capaian Peningkatan kunjungan ke Perpustakaan bisa maksimal .
2. Perlu ada penambahan alokasi anggaran untuk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan.
3. Perlu penambahan SDM sesuai dengan kompetensinya antara lain : Pustakawan dan Arsiparis.
4. Pembangunan gedung perpustakaan umum daerah yang lebih representative.
5. Perlu ada pemisahan antara ruang kerja bidang kearsipan dengan Depo arsip.
6. Penambahan alokasi SDM arsiparis untuk setiap OPD.

1.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sehubungan dengan berlakunya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 maka semua program dan kegiatan mengalami perubahan total sehingga Bappeda Kota Pekalongan telah mengadakan proses kerja secara bertahap melalui pemetaan kegiatan dari DPPA 2021 dikelompokkan sesuai indikator keluaran lalu dimapping masuk kegiatan yang sudah disediakan di Permendagri 90 Nomor 05-5889 Tahun 2021, Adapun Langkah yang harus disusun berikut :

1. Pemetaan Tusi (Tinjau kembali Tusi yang saat ini berjalan disesuaikan dengan kondisi daerah dan Permendagri 90 Tahun 2019
2. Pemataan anggaran disesuaikan dengan kinerja masing-masing bidang/sekretariat
3. Pemetaan indikator program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2021-2026 sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019
4. Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.31

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kota Pekalongan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				4.926.753.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				4.926.753.000	
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pekalongan	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	16,41 indeks	741.097.000	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pekalongan	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	16,41 indeks	741.097.000	
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pekalongan	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan (IKK Output)	2,67 persen	468.012.000	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pekalongan	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan (IKK Output)	2,67 persen	468.012.000	
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Pekalongan	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan	1 perpustakaan	112.986.000	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Pekalongan	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan	1 perpustakaan	112.986.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dengan Manajemen Layanan TIK					dengan Manajemen Layanan TIK			
2	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Pekalongan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	3 perpustakaan	85.650.000	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Pekalongan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	3 perpustakaan	85.650.000	
3	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pekalongan	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 orang	43.785.000	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pekalongan	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 orang	43.785.000	
4	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Pekalongan	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang	1 layanan	151.181.000	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Pekalongan	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang	1 layanan	151.181.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dikembangkan melalui peningkatan koleksi					dikembangkan melalui peningkatan koleksi			
5	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Pekalongan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	100 eksemplar	74.410.000	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Pekalongan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	100 eksemplar	74.410.000	
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pekalongan	Kenaikan Nilai Budaya Baca	34.11 persen	273.085.000	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pekalongan	Kenaikan Nilai Budaya Baca	34.11 persen	273.085.000	
6	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Pekalongan	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	1 Lokus	25.850.000	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Pekalongan	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	1 Lokus	25.850.000	
7	Pembangunan dan	Pekalongan	Jumlah sarana	1		Pembangunan dan	Pekalongan	Jumlah sarana	1		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang menjadi kewenangan negara		Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan	35.500.000	Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang menjadi kewenangan negara		Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan	35.500.000	
8	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Pekalongan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	1 Orang	23.355.000	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Pekalongan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	1 Orang	23.355.000	
9	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Pekalongan	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	1 Perpustakaan	188.380.000	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Pekalongan	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	1 Perpustakaan	188.380.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN KEARSIPAN	Pekalongan			**4.185.656.000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN KEARSIPAN**	Pekalongan			**4.185.656.000**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pekalongan	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen	3.708.459.600	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pekalongan	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen	3.708.459.600	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pekalongan	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	31.260.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pekalongan	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	31.260.000	
10	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	10.000.000	
11	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pekalongan	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2 Dokumen	1.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pekalongan	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2 Dokumen	1.300.000	
12	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pekalongan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 laporan	19.960.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pekalongan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 laporan	19.960.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	2.534.909.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	2.534.909.000	
13	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pekalongan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.490.859.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pekalongan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.490.859.000	
14	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pekalongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	42.750.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pekalongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	42.750.000	
15	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.300.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian	100 persen	5.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian	100 persen	5.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			perangkat daerah					perangkat daerah			
16	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pekalongan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pekalongan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	199.986.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	199.986.600	
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.389.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.389.500	
18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	76.877.600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	76.877.600	
19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	1.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	1.500.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pekalongan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	42.828.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pekalongan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	42.828.000	
21	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pekalongan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.691.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pekalongan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.691.500	
21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pekalongan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pekalongan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.000.000	
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pekalongan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	65.700.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pekalongan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	65.700.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pekalongan	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	571.990.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pekalongan	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	571.990.000	
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	900.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	900.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	414.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	414.000.000	
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	157.090.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	157.090.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pekalongan	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	365.314.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pekalongan	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	365.314.000	
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pekalongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	100.480.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pekalongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	100.480.000	
27	Pemeliharaan/Reh	Pekalongan	Jumlah Gedung	2 Unit		Pemeliharaan/Reh	Pekalongan	Jumlah Gedung	2 Unit		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		236.734.000	abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		236.734.000	
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	61 Unit	28.100.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	61 Unit	28.100.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pekalongan	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	60,00 persen	328.042.600	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pekalongan	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	60,00 persen	328.042.600	
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Pekalongan	Persentase jumlah Perangkat Daerah yang di Tata Arsip Dinamisnya	32.26 persen	253.850.000	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Pekalongan	Persentase jumlah Perangkat Daerah yang di Tata Arsip Dinamisnya	32.26 persen	253.850.000	
29	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Pekalongan	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1 Berkas	169.070.000	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Pekalongan	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1 Berkas	169.070.000	
30	Pengawasan Arsip Dinamis	Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	1 Laporan	84.780.000	Pengawasan Arsip Dinamis	Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	1 Laporan	84.780.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kewenangan Kabupaten/Kota		Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			Kewenangan Kabupaten/Kota		Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Pekalongan	Persentase Jumlah Arsip Statis OPD yang diserahkan ke Depo Arsip	18 persen	55.242.600	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Pekalongan	Persentase Jumlah Arsip Statis OPD yang diserahkan ke Depo Arsip	18 persen	55.242.600	
31	Akuisisi, Pengolahan,Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Pekalongan	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	25 Arsip	55.242.600	Akuisisi, Pengolahan,Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Pekalongan	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	25 Arsip	55.242.600	
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Pekalongan	Persentase Peningkatan Pemahaman Pengelola Arsip tentang Kearsipan	80 persen	18.950.000	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Pekalongan	Persentase Peningkatan Pemahaman Pengelola Arsip tentang Kearsipan	80 persen	18.950.000	
32	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	18.950.000	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	18.950.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Pekalongan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	100 persen	149.153.800	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Pekalongan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	100 persen	149.153.800	
	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Pekalongan	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK (IKK Output)	100 persen	89.530.000	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Pekalongan	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK (IKK Output)	100 persen	89.530.000	
34	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan	Pekalongan	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian,	600 Arsip	79.490.000	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan	Pekalongan	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian,	600 Arsip	79.490.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			
35	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Pekalongan	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	10.040.000	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Pekalongan	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	10.040.000	
	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Pekalongan	Persentase Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip hasil alih media kabupaten/kota	100 persen	59.623.800	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Pekalongan	Persentase Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip hasil alih media kabupaten/kota	100 persen	59.623.800	
36	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan	Pekalongan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih	1 Arsip	59.623.800	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan	Pekalongan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih	1 Arsip	59.623.800	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penjaminan Keabsahan Arsip		Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip			Penjaminan Keabsahan Arsip		Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip			

1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan/sub kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel T-C.32 sebagai berikut :

Tabel T-C.32.

Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Pekalongan

Nama Perangkat Daerah : …….

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
N I H I L					

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal :
   1) Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
   2) Pencapaian SDGs,
   3) Pengentasan kemiskinan,
   4) Pencapaian NSPK dan SPM,
   5) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
   6) Pengembangan daerah terisolir,
   7) Dsb.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain meliputi:
   1) Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan.
   2) Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan
   3) sub kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
   4) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

d. Tabel rencana program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Pekalongan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dinas Kearsipan dan Perpustaakan				4.893.753.000	APBD			
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**				724.597.000	APBD			
2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				451.512.000	APBD			**279.713.800**
2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	Pekalongan	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	112.986.000	APBD			**103.531.200**
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Pekalongan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	85.650.000	APBD			**34.626.000**
2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi	Pekalongan	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan	43.785.000	APBD			**55.126.200**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	Pekalongan	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	134.681.000	APBD			**20.802.500**
2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Pekalongan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	74.410.000	APBD			**65.627.700**
2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				273.085.000	APBD			**279.962.200**
2.23.02.2.02.0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Pekalongan	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	25.850.000	APBD			**40.969.000**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.02.2.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang menjadi kewenangan negara	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pekalongan	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	35.500.000	APBD			**67.869.000**
2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Pekalongan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	23.355.000	APBD			**43.684.000**
2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Pekalongan	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	188.380.000	APBD			**90.369.000**
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**				311.542.000	APBD			**350.333.000**
2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**			Persentase jumlah Perangkat Daerah yang di Tata Arsip Dinamisnya	237.350.000	APBD			**261.221.000**
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan	Pekalongan	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	152.570.000	APBD			**178.998.000**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyusutan							
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	84.780.000	APBD			**82.223.000**
2.24.02.2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**		Pekalongan	Persentase Jumlah Arsip Statis OPD yang diserahkan ke Depo Arsip	55.242.600	APBD			**42.630.640**
2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan,Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Pekalongan	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	55.242.600	APBD			**42.630.640**
2.24.02.2.02	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**		Pekalongan	Persentase Peningkatan Pemahaman Pengelola Arsip tentang Kearsipan	18.950.000	APBD			**46.481.360**
2.24.02.2.02.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	18.950.000	APBD			**46.481.360**
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**				149.153.000	APBD			**163.840.000**
2.24.03.2.01	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan**			Pemusnahan arsip yang sesuai	89.530.000	APBD			**97.483.950**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun			NSPK (IKK Output)					
2.24.03.2.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Pekalongan	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	74.490.000	APBD			**78.357.050**
2.24.03.2.01.0002	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Pekalongan	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	10.040.000	APBD			**19.126.900**
2.24.03.2.04	**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**			Persentase Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip hasil alih media kabupaten/kota	59.623.800	APBD			**66.356.050**
2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan	Pekalongan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	59.623.800	APBD			**66.356.050**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Keabsahan Arsip	Arsip							
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				3.708.459.600	APBD			**3.221.618.000**
2.16.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				31.260.000	APBD			**13.350.000**
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	APBD			**5.000.000**
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Pekalongan	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.300.000	APBD			**1.350.000**
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pekalongan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.960.000	APBD			**7.000.000**
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				2.534.909.000	APBD			**2.410.283.000**
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pekalongan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.490.859.000	APBD			**2.361.483.000**
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pekalongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.750.000	APBD			**47.500.000**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.300.000	APBD			**1.300.000**
2.16.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				5.000.000	APBD			**9.500.000**
2.16.01.2.05.0010	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.000.000	APBD			**9.500.000**
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				199.986.600	APBD			
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3.389.500	APBD			**4.686.300**
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	76.877.000	APBD			**109.657.500**
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.500.000	APBD			**1.686.300**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tangga	Disediakan							
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pekalongan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	42.828.000	APBD			**60.500.100**
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pekalongan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6.691.500	APBD			**5.931.500**
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Pekalongan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3.000.000	APBD			**2.186.300**
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pekalongan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.700.000	APBD			**41.530.100**
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				571.990.000	APBD			**388.493.900**
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000	APBD			**1.800.000**
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	414.000.000	APBD			**302.636.705**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Disediakan							
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	157.090.000	APBD			**84.057.195**
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				365.314.000	APBD			**173.813.000**
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pekalongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100.480.000	APBD			**78.478.800**
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	236.734.000	APBD			**67.834.200**
2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28.100.000	APBD			**27.500.000**

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. Rencana Kerja

Di Dalam rumusan rencana program kegiatan bagi OPD tahun 2024 dan prakiraan maju 2025 Sebagai bahan evaluasi terdapat target (sesuai jenis sasaran dengan target indikator yang ingin dicapai), masing-masing kegiatan terdapat keluaran dan Hasil.

Adapun kegiatan yang mengalami kenaikan dari tahun 2024 ke 2025 dikarenakan kenaikan tarif tahunan dan standarisasi, selain itu juga kenaikan atau penurunan yang menurut evaluasi indikator diantara sub kegiatan sama dipadukan dan dihitung ulang mengalami penurunan yang semula menyebar menjadi satu pelaksanaan di salah satu sub kegiatan juga dari memonitor viewer yang kurang untuk dihapus dan mengambil viewer memuat berita pemerintahan Kota Pekalongan.

B. Pendanaan Perangkat Daerah

Untuk tercapainya target dari setiap indikator kinerja dibutuhkan pendanaan untuk membiayai masing-masing kegiatan prioritas di Dinarpus Kota Pekalongan tahun 2025. Kebutuhan pendanaan pada Dinarpus Kota Pekalongan untuk tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu Anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana
1	2	3	4
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	**4.185.656.000**	DAU
3.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	**3.708.459.600**	DAU
2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**31.260.000**	DAU
2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	DAU
2.24.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.300.000	DAU
2.24.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.960.000	DAU
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2.534.909.000**	DAU

2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.490.859.000	DAU
2.24.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.750.000	DAU
2.24.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.300.000	DAU
2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	DAU
3.24.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000	DAU
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**200.966.000**	DAU
2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor	3.389.500	DAU
2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.877.600	DAU
2.24.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.500.000	DAU
2.24.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.828.000	DAU
2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.691.500	DAU
2.24.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	DAU
2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.700.000	DAU
2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**523.990.000**	DAU
2.24.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000	DAU
2.24.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	414.000.000	DAU
2.24.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	157.090.000	DAU
2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**365.314.000**	DAU

2.24.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.480.000	DAU
2.24.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	236.734.000	DAU
2.24.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.100.000	DAU
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**725.576.000**	
2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**452.491.000**	
2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	112.986.000	
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	85.650.000	
2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	43.785.000	
2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	151.181.000	
2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	74.410.000	
2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**273.085.000**	
2.23.02.2.02.0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	25.850.000	
2.23.02.2.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang menjadi kewenangan negara	35.500.000	
2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	23.355.000	
2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	188.380.000	
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**295.816.000**	

2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**237.350.000**	
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	169.070.000	
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	84.780.000	
2.24.02.2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**55.242.600**	
2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan,Preservasi, dan Akses Arsip Statis	55.242.600	
2.24.02.2.02	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**18.950.000**	
2.24.02.2.02.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	18.950.000	
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**149.153.800**	
2.24.03.2.01	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**	**89.530.000**	
2.24.03.2.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	79.490.000	
2.24.03.2.01.0002	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	10.040.000	
2.24.03.2.04	**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**	**59.623.800**	
2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	59.623.800	

BAB V

PENUTUP

Laporan Rencana Kerja (RENJA) Dinarpus Kota Pekalongan Tahun 2025 ini disusun untuk dijadikan sebagai dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah Kota Pekalongan, serta sebagai panduan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinarpus Tahun 2025. Penyusunan Renja 2025 dilakukan setelah mempelajari visi, misi, dan program Pemerintah Kota Pekalongan sebagai muatan dan masukan dalam penyusunan visi, misi, strategi, kebijakan serta penyusunan program dan kegiatan dinas kominfo kota pekalongan satu tahun kedepan. Oleh karena itu, dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinarpus Kota Pekalongan ini dapat menjadi acuan dan pedoman yang digunakan sebagai masukan dalam rangka penguatan peran serta dan partisipasi aktif dari semua stakeholder yang terkait serta menjadi dasar dan bahan untuk melakukan evaluasi dan guna penyusunan laporan pelaksanaan kinerja PD tahunan maupun lima tahunan.

Dengan demikian, diharapkan renja dinarpus tahun 2025 ini dapat menjadi pegangan bagi seluruh aparatur di lingkungan Dinarpus kota pekalongan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mendorong dan mewujudkan peningkatan pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan kota pekalongan di tahun mendatang.

Demikian Laporan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, Terima kasih.

Pekalongan, 8 Agustus 2024
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kota Pekalongan

Drs. SOEROSO M.Pd.
NIP. 19640921 198803 1 007

Pekalongan
World's City of Batik

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

RANCANGAN AKHIR RENJA

TAHUN 2025

(0285) 423993
dkp.pekalongankota.go.id
dkpkotapekalongan@gmail.com
Jl. Yos Sudarso No. 46 Panjang Wetan, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan 51114

RANCANGAN AKHIR RENJA

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN 2025

Pekalongan
World's City of Batik

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Laksda Yos Sudarso Nomor 46 Kota Pekalongan Kode Pos 51114
Telepon: (0285) 423993 Faksimile 423993 *e-mail* dkpkotapekalongan@gmail.com
Website dkpkotapekalongan.go.id

DAFTAR ISI

COVER ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR TABEL v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud Dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB. II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7

2.1.1 Realisasi program / kegiatan / Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan; 9

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah sesuai target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan; 10

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 10

2.2. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah 14

2.2.1 Tugas 15

2.2.2 Fungsi 15

2.2.3 Faktor – factor penyebab terpenuhi target kinerja , antara lain : 19

2.2.4 Faktor – factor penghambat kinerja pada program / kegiatan 19

2.2.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah 20

2.2.6 Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor – factor penyebab tersebut. 20

2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 27

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 27

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat 38

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 39

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah. 39

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ... 40

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kota. 41

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). 43

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 43

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 50

3.5 Penentuan Isu Strategis 52

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 55

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 55

4.1.1 Tujuan 55

4.1.2 Sasaran 55

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 57

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 60

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 76

7.1 Urusan Pemerintahan Pilihan 76

7.1.1 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan 76

BAB VIII P E N U T U P 82

LAMPIRAN 1 83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 18

Gambar 5. 1 Skema Strategi Pencapaian Misi 5 58

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Realisasi Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022 dan 2023 7
Tabel 2. 2 Realisasi Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023 10
Tabel 2. 3 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 22
Tabel 2. 4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 29
Tabel 2. 5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 38

Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 40

Tabel 4. 1 Tujuan dan Indikator Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 55
Tabel 4. 2 Sasaran dan Indikator Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 56

Tabel 5. 1 Keterkaitan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 58

Tabel 6. 1 Target / Pagu Dinas Kelautan dan Perikanan yang tercantum dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 61

Tabel 7. 1 Kinerja penyelenggaraan bidang urusan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pekalongan. 77
Tabel 7. 2 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 79

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RenjaPerangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Fungsi Renja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah memuat antara lain program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju.

Rencana Kerja Perangkat Daerah atau Renja Perangkat Daerah adalah amanah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa :

1. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan ;
2. Renja berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
3. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup:
   a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
   b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
4. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD, dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

Dengan hal tersebut maka renja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan

Renja K/L dan Renja provinsi serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Seluruh tahapan proses merupakan implementasi perencanaan secara partisipatif dengan pendekatan teknokratik, buttom up, top down, dan politis.

Penyajian rancangan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan dilakukan dengan melihat Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Berdasarkan Peraturan Walikota 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rancangan akhir Rencana Kerja DKP Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
20. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);
21. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-

2026;

23. Peraturan Walikota 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan
24. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025

1.3 Maksud Dan Tujuan

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini ***dimaksudkan*** untuk pedoman dan acuan dalam perencanaan program maupun anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan selama 1 (Satu) Tahun dan merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan peraturan kepala daerah tentang RKPD .
2. Pedoman pada hasil evaluasi hasil renja perangkat daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal renja perangkat daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian dokumen renja perangkat daerah sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistimatika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah.
2.1.1 Realisasi program / kegiatan / Sub Kegiatan
2.2 Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah,
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan

3.4 Penentuan Isu Strategis

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah, Pagu Program dan Kegiatan.

BAB VIII P E N U T U P

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan isi dokumen.

BAB. II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan dengan realisasi belanja tahun 2023 adalah sebesar Rp.8.948.487.840 atau 95,68% dari target belanja tahun 2023. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2022 sebesar Rp.8.681.476.177 terdapat **penurunan realisasi** sebesar Rp.267.011.663 atau 3,08%.

Realisasi belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun anggaran 2023 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 1

Realisasi Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022 dan 2023

NO	JENIS BELANJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
5	**BELANJA DAERAH**	**9.352.584.000**	**8.948.487.840**	**95,68**	**8.681.476.177**
5.1	**BELANJA OPERASI**	8.463.554.000	8.062.419.840	**95,26**	8.179.926.577
5.1.01	Belanja Pegawai	3.275.771.000	2.991.713.222	**91,33**	3.353.885.090
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.891.023.000	3.779.362.538	**97,13**	4.097.584.487

NO	JENIS BELANJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
5.1.05	Belanja Hibah	1.246.760.000	1.241.844.080	**99,61**	558.357.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	50.000.000	49.500.000	**99,00**	170.100.000
5.2	**BELANJA MODAL**	889.030.000	886.068.000	**99,67**	501.549.600
5.2.01	Belanja Modal Tanah	220.000.000	218.730.000	**99,42**	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	173.645.000	173.048.000	**99,66**	159.625.300
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	489.885.000	488.790.000	**99,78**	257.224.300
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.500.000	5.500.000	**100,00**	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	**0,00**	84.700.000

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2025, dengan alokasi pagu anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 8,151,380,000.00 (Delapan Milyar Seratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) untuk melaksanakan 1 urusan pilihan kelautan dan perikanan, 4 program dan 13 kegiatan 33 Sub Kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%, baik realisasi keuangan maupun capaian fisiknya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program, kegiatan maupun sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan 1 urusan pilihan kelautan dan perikanan, 4 program dan 13 kegiatan 34 Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan refocusing anggaran dari sisa anggaran sewa TPI;
2. Adanya kendala ketersediaan BBM solar bersubsidi
3. Penerapan aturan pengadaan barang / jasa yang menerapkan *e-catalog* local, sementara adanya keterbatasan penyedia lokal yang memenuhi syarat KBLI yang sesuai;
4. Juknis sulit untuk dipenuhi sesuai persyaratan (karena kondisi di lapangan);
5. Penerapan aturan pengadaan barang / jasa yang menerapkan *e-catalog* local,

sementara adanya keterbatasan penyedia lokal yang memenuhi syarat KBLI yang sesuai;

6. Sarana dan prasarana yang kurang memadahi dan rusak, sementara keterbatasan anggaran untuk perbaikan;
7. Kondisi cuaca yang tidak menentu dan seringnya terjadi banjir rob menjadi kendala dalam pelaksanaan perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
8. Tuntutan sistem aplikasi;
9. Keterbatasan benih yang berkualitas;
10. Penetapan harga sewa TPI yang mengalami keterlambatan karena adanya update harga sewa dari PT Perindo.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan dalam pelaksanaan urusan pilihan perikanan dan kelautan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD.

Dari 4 (Empat) Program dengan 8 (Delapan) indikator kinerja outcome / hasil , terdapat 5 (lima) indikator outcome / hasil pada 4 (Empat) program tercapai melebihi target dan 1 (satu) indikator pada 1 (satu) program yang tidak memenuhi target, serta ada 1 (satu) target indikator program yang sesuai target yang direncanakan. Sedangkan untuk kegiatan, terdapat 13 (Tiga Belas) kegiatan dengan 13 (Tiga Belas) indikator, terdapat 6 indikator dari 6 kegiatan yang melebihi target, dan 7 indikator dari 7 kegiatan sesuai target yang sudah direncanakan. Adapun evaluasi kinerja hasil/keluaran program/kegiatan pada tahun 2023 tersebut adalah sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi program / kegiatan / Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;

Pada pelaksanaan renja tahun lalu (n-2) atau Tahun 2023, terdapat 1 (satu) indikator program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu 2 (dua) indikator dari capaian Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan 1 (satu) kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah sesuai target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;

Pada pelaksanaan renja tahun lalu (n-2) atau Tahun 2023, terdapat Indikator Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai yang direncanakan, ada 3 (tiga) indikator program, 6 (enam) indikator kegiatan dan 40 (Empat puluh) indikator sub kegiatan.

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Pada pelaksanaan renja tahun lalu (n-2) atau Tahun 2023, terdapat indikator program dan kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan, ada 3 (Tiga) indikator program, 6 (enam) indikator kegiatan serta 3 (Tiga) indikator sub kegiatan yang melebihi target.

Tabel 2. 2

Realisasi Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023

Nama OPD / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2023		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Presentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100	100	100,00
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100,89	100,89
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	100	100,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	100,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun	dokumen	2	2	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	dokumen	2	2	100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	bulan	12	12	100,00
	Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	dokumen	4	4	100,00

Nama OPD / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2023		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)	dokumen	2	2	100,00
	Jumlah Dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	dokumen	5	5	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	100,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	kali	14	14	100,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	bulan	12	12	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan SKPD yang disusun	dokumen	1	1	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100	100,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi	kali	1	1	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	persen	100	102,68	102,68
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	12	12	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	bulan	12	12	100,00
	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	unit	8	11	137,50
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	bulan	12	12	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makan dan minuman	bulan	11	11	100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang - undangan	bulan	12	12	100,00

Nama OPD / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2023		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	orang/kali	100	100	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	12	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor	bulan	12	12	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional	bulan	12	12	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang terpelihara secara rutin / berkala	unit	1	1	100,00
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	1	1	100,00
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala	bulan	12	12	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan produksi perikanan tangkap bersumber dari TPI	persen	1	-0,04	-0,04
	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	persen	1	-0,15	-0,15
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Sarpras Tangkap yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota	persen	5	8,57	171,40
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah dokumen statistik perikanan tangkap yang disusun	dokumen	1	1	100,00
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan yang diadakan	unit	3	3	100,00

Nama OPD / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2023		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Nelayan Kecil yang dibina	Persen	10	43,36	433,60
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah terbinanya KUB di Kota Pekalongan yang di bina	KUB	9	9	100,00
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan yang dibina	kelompok	4	8	200,00
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah pendampingan nelayan yang terfasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha yang dilaksanakan	nelayan	3	3	100,00
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Tangkap yang bersumber dari TPI	persen	1	-0,15	-15,00
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah bulan sewa gedung dan pelataran TPI	bulan	12	12	100,00
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah permohonan kapal yang didaftarkan	persen	43,33	52,59	121,37
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah pendampingan kepada nelayan pemilik kapal 0 - 5 GT	nelayan	45	59	131,11
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	persen	1	7,53	7,53
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Presentase Pembudidaya yang dibina	persen	61,92	67,8	109,50
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	kali	1	1	100,00
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Presentase ketercapaian aspek - aspek pengelolaan pembuddidayaan ikan kecil	persen	100	100	100
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data bidang budidaya yang disusun	dokumen	1	1	100,00
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Budidaya Ikan 2 Gabungan Kelompok (GAPOKDAKAN)	unit	2	2	100,00

Nama OPD / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2023		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Sarana dan Prasarana Budidaya Udang 2 Kelompok	unit	2	2	100,00
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pemeliharaan Balai Benih Ikan (BBI)	bulan	12	12	100,00
	Jumlah Kelompok yang difasilitasi Sarana dan Prasarana Budidaya	kelompok	27	27	100,00
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah benih ikan yang diadakan	ekor	4000	4000	100,00
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)	pelaku usaha	2	2	2,00
	Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	persen	12,12	26,73	26,73
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase penyediaan dan penyaluran Bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerahh kabupaten/kota	persen	70	92,88	132,69
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan fasilitasi pelaku usaha perikanan di kawasan technopark (SIDa)	bulan	12	12	100,00
	Jumlah gedung technopark yang terpelihara secara rutin	kawasan	1	1	100,00
	Jumlah pelaksanaan gemar makan ikan (SIDa)	kali	1	1	100,00
	Jumlah rehab gedung di kawasan technopark	unit	2	2	100,00

2.2. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kelautan dan perikanan dipimpin oleh Kepala dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Pekalongan melalui Sekretaris Daerah Kota Pekalongan memiliki 1 (satu) sekretariat, 2 (dua) bidang, yaitu Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Perikanan Budidaya serta 2 (Dua) Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) dan kelompok jabatan fungsional.

2.2.1 Tugas

Dalam melaksanakan tugas DKP menyelenggarakan fungsi :

1) DKP dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
2) DKP mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan.

2.2.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas DKP menyelenggarakan fungsi :

I. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
   a) perumusan dan penetapan sasaran program bidang kelautan dan perikanan;
   b) perumusan kebijakan bidang kelautan dan perikanan;
   c) pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang perikanan tangkap;
   d) pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang perikanan budidaya;
   e) pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
   f) pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD;
   g) pengarahan dan pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP);
   h) pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan program dan pelaksanaan kegiatan; dan
   i) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
   a) perumusan sasaran, program dan kegiatan dinas;
   b) pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis dinas;
   c) pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
   d) pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
   e) pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah,bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
   f) pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;

g) pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang kepegawaian;
h) pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
i) pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
j) pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
k) pengoordinasian pelaporan AnalisisJabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
l) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;dan
m) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:
a) perumusan program kerja bidang perikanan tangkap;
b) perumusan bahan kebijakan bidang bidang perikanan tangkap;
c) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang perikanan tangkap;
d) penyelenggaraan pengelolaan penangkapan ikan;
e) penyelenggaraan pemberdayaan nelayan kecil;
f) penyelenggaraan penerbitan tanda daftar kapal penangkapan ikan ≤ 10 GT;
g) penyelenggaraan penerbitan izin pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan ≤ 10 GT;
h) penyelenggaraan layanan pendaftaran kapal penangkapan ikan ≤ 10 GT;
i) penyelenggaraan pengawasan sumber daya perikanan;
j) pengoordinasian pengelolaan wilayah pesisir dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
k) perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang perikanan tangkap;
l) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
m) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

IV. Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:
a) perumusan program kerja bidang perikanan budidaya;

b) perumusan bahan kebijakan bidang perikanan budidaya;
c) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang perikanan budidaya;
d) penyelenggaraan rekomendasi penerbitan izin usaha budidaya perikanan;
e) penyelenggaraan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil;
f) penyelenggaraan penerbitan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK);
g) pengoordinasian pengelolaan budidaya perikanan;
h) penyelenggaraan penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan budidaya;
i) penyelenggaraan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan ikan budidaya;
j) pengoordinasian penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan;
k) perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang perikanan budidaya;
l) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Gambar 1. 1 Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

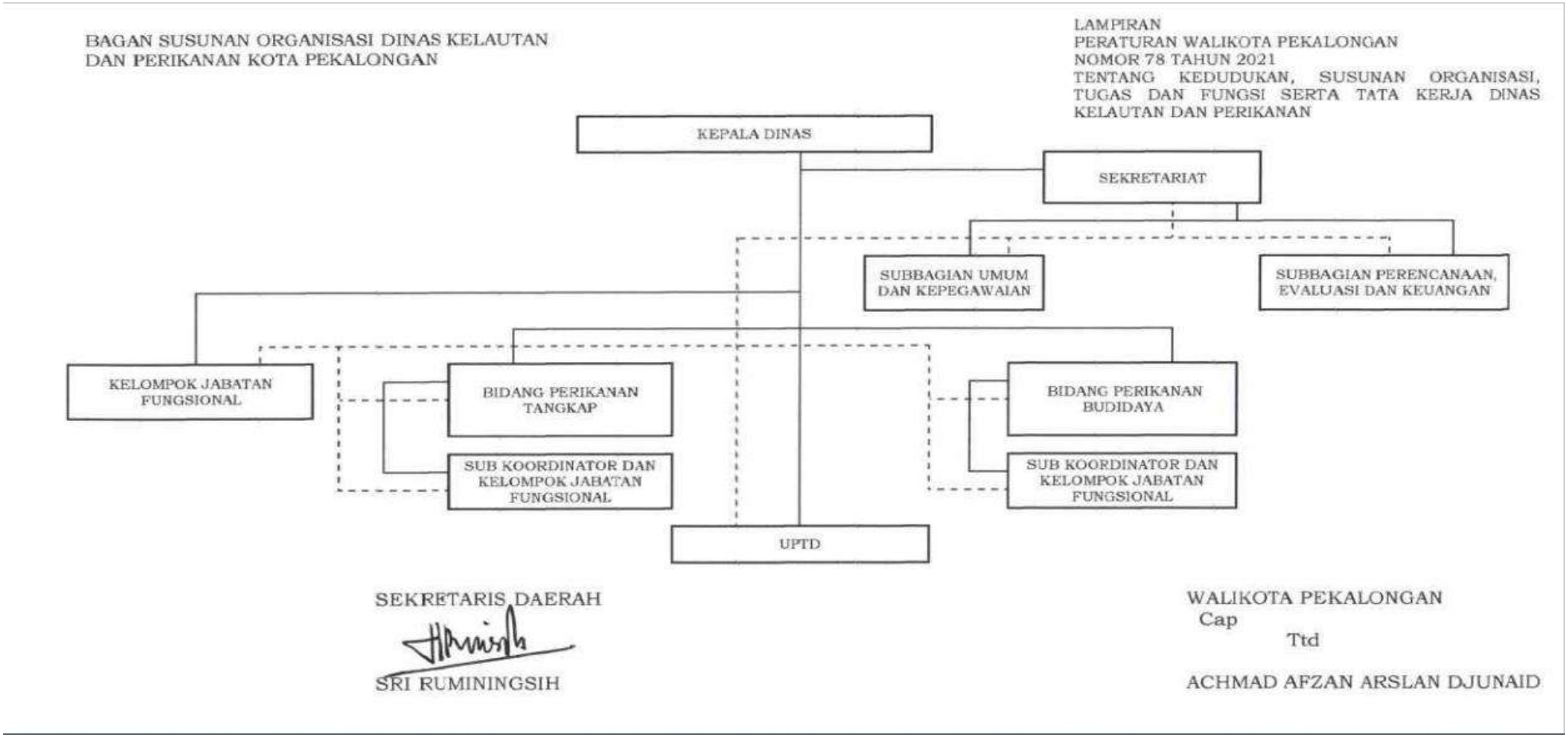

Analisis kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan. Diketahui faktor faktor pendukung dan penghambat kinerja :

2.2.3 Faktor – factor penyebab terpenuhi target kinerja , antara lain :

Faktor – factor penyebab terpenuhinya target kinerja antara lain :

- Memperbaiki pelayanan dan dukungan sarana dan prasarana pelelangan ikan,
- Ketertiban penyelenggaraan pelelangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pemenuhan dokumen evaluasi, peningkatan kinerja.
- Dukungan Tim Internal, dukungan stakeholder terkait, adanya dukungan program dan kegiatan serta anggaran yang memadai,
- Pengalaman pembudidaya sudah cukup baik,
- Pembayaran hasil lelang one day service, sistem lelang yg dapat disaksikan pemilik kapal dan bakul, dan kondisi fisik halaman TPI yg bersih dan rapi,
- Memperbaiki pelayanan dan dukungan sarana dan prasarana pelelangan ikan,
- Dukungan Tim Internal, dukungan stakeholder terkait, adanya dukungan program dan kegiatan serta anggaran yang memadai,
- Ketertiban penyelenggaraan pelelangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Adanya bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan berupa pemasangan pipa untuk membuka akses masuk nya air ke Kawasan tambak,
- Normalisasi saluran tambak;
- Pengadaan induk nila untuk meningkatkan produksi benih di BBI dan penyaluran benih kepada masyarakat dalam rangka peningkatan produksi ikan nila
- pembinaan /Monev untuk pembudidaya ikan.

2.2.4 Faktor – factor penghambat kinerja pada program / kegiatan

Capaian Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI pada tahun 2023 tidak tercapai. Realisasi tahun 2023 sebesar -0,15 persen atau terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 capaian Pendapatan Daerah bersumber dari TPI sebesar Rp. 4.433.748.930,- sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp. 3.750.103.920,-. Penurunan ini dikarenakan kondisi cuaca yang tidak mendukung, kondisi perairan terpengaruh El-Nino; Adanya Retribusi tambahan akibat penerapan kebijakan PNBP PIT; pembangunan infrastruktur parapet di dermaga; minimnya fasilitasi docking kapal.

Capaian Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI pada tahun 2023 tidak tercapai. Realisasi tahun 2023 sebesar -0,04 persen atau terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 capaian produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI sebesar 10.032.593 kg, sedangkan pada tahun 2023 sebesar 9.583.499 Kg. Berbanding searah dengan capaian peningkatan pendapatan daerah bersumber dari TPI, penyebab penurunan produksi perikanan bersumber dari TPI disebabkan oleh hal yang sama.

2.2.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra yaitu adanya ketidakstabilan realisasi (tercapai/tidak tercapainya) capaian target dalam hal produksi perikanan dikarenakan adanya factor pengaruh dari alam yang mempengaruhi besaran produksi perikanan. Serta adanya keterbatasan kewenangan urusan kelautan dan perikanan yang terbagi dengan Pemerintah Pusat ataupun wilayah lainnya.

2.2.6 Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor – factor penyebab tersebut.

Solusi atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi penyebab tersebut antara lain :

a) Selalu mengupdate informasi dengan berkoordinasi dengan bidang / Dinas terkait berkaitan dengan peraturan/ketentuan baru yang ada.
b) Melakukan evaluasi dan penyelarasan terhadap ASN yang menerima promosi / kenaikan jabatan merupakan ASN yang menerima reward.
c) Mendorong pemenuhan nilai pada aspek SAKIP yang lainnya.
d) Melakukan rapat internal terkait prioritas kebutuhan pada rencana kerja (Renja)
e) Mengoptimalkan normalisasi saluran tambak
f) Pemanfaatan lahan tergenang dengan budidaya yang tepat (teknologi dan komoditasnya)
g) Mengupayakan ketersediaan benih ikan di BBI secara kontinu.
h) Melakukan pendekatan kepada pemilik kapal agar bersarndar di TPI Kota Pekalongan terutama kapal ≤30 GT dengan fasilitasi rekomendasi BBM;
i) Mengoptimalkan papan seluncur diatas parapet ketika bongkar ikan;
j) Berkoordinasi dengan kementrian KKP untuk memberikan relaksasi regulasi penangkapan ikan terukur terhadap para pemilik kapal;
k) Pemberian rekomendasi BBM bersubsidi kepada nelayan kecil (pemilik kapal 1-10 GT) menggunakan aplikasi SIAPKAN;

l) Sosialisasi ke nelayan terkait penggunaan aplikasi SIAPKAN;
m) Melakukan koordinasi dengan Kominfo terkait kendala aplikasi SIAPKAN
n) Melakukan pembinaan kepada tim pengelola pengaduan agar berupaya menyelesaikan setiap pengaduan yang masuk sesuai dengan kewenangan dan tidak lebih dari 60 hari.
o) Memberikan pembinaan kepada admin atau petugas pengaduan yang menerima pengaduan agar responsif terhadap pengaduan yang masuk, serta mampu memberikan penjelasan yang baik kepada pelapor.
p) Melakukan evaluasi kinerja tim pengelola pengaduan untuk mengetahui kendala dan hambatan yang dihadapi serta menyusun strategi teknis peningkatan kualitas pengelolaan pengaduan.
q) Melakukan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan dengan tujuan untuk meningkatkan kenyamanan para pengguna layanan.
r) Melakukan perawatan sarana dan prasana terkait pelayanan Masyarakat
s) Melakukan koordinasi dengan petugas lalu lintas kapal PPN Pekalongan terkait parkir kapal yang akan bersandar di TPI Kota Pekalongan.

Berikut kami sajikan tabel evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun Lalu dan capaian Renstra perangkat daerah sebagai berikut :

Tabel 2. 3
Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sasaran / Tujuan / Program	Indikator	Formulasi/Definisi	Perhitungan Data/Sumber data	Target Akhir Renstra		Data Capaian Realisasi s.d TW. IV 2023	%
				Satuan	Target Kinerja Tahun 2023		
TUJUAN							
Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM tahun N	IKM tahun N (data dari bagian organisasi)	Indeks	79,44	92,08	115,91
Meningkatkan produksi perikanan	Pertumbuhan produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	Jumlah produksi perikanan tahun N - Jumlah produksi perikanan tahun N-1 / Jumlah produksi perikanan tahun N-1 * 100%		persen	5,10	-0,049	-0,96
SASARAN							
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP Tahun N	(Sumber Inspektorat)	Indeks	87,50	83,05	94,91
Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya dan Tangkap) Kab/Kota	Jumlah total produksi perikanan tangkap dan budidaya (Kab/kota)		Ton	15.600	10.123,79	64,89
PROGRAM							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persentase capaian kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah + Persentase	% capaian kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : TW. I : 5.83 TW. II : 5.83	persen	100	100	100

Sasaran / Tujuan / Program	Indikator	Formulasi/Definisi	Perhitungan Data/Sumber data	Target Akhir Renstra		Data Capaian Realisasi s.d TW. IV 2023	%
				Satuan	Target Kinerja Tahun 2023		
KABUPATEN / KOTA		capaian kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dibagi 2	TW. III : 65,83 TW. IV : 22.50 % capaian kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah : TW. I : 48,81 TW. II : 20,24 TW. III : 15,48 TW. IV : 15.48 Jadi Presentase ketersediaan laporan capaian kinerja = % ketersediaan laporan capaian kinerja : TW. I : (5.83+48,81)/2 = 27.32 TW. II : (5.83+20,24)/2= 13.04 TW. III : (65,83+ 15,48)/2= 40.66 TW. IV :(22,50+ 15.48)/2=18,99				
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase capaian kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah + Persentase capaian kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah + Persentase capaian kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibagi 3	% capaian kegiatan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah: TW. I : 0 TW. II : 0 TW. III : 0 TW. IV : 100 % capaian kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah : TW. I : 21,40 TW. II : 23.31 TW. III : 33,18	persen	100	100.89	100.89

Sasaran / Tujuan / Program	Indikator	Formulasi/Definisi	Perhitungan Data/Sumber data	Target Akhir Renstra		Data Capaian Realisasi s.d TW. IV 2023	%
				Satuan	Target Kinerja Tahun 2023		
			TW. IV : 24.79 % capaian kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah : TW. I : 25 TW. II : 25 TW. III : 25 TW. IV : 25 % ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum,dan jasa penunjang urusan pemerintahan : TW. I : (0+21,4+25)/3 TW. II : (0+23.31+25)/3 TW. III : (0+33,18+25)/3 TW. IV :(100+24,79+25)/3				
	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	Persentase capaian kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah + Persentase capaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibagi 2	Persentase capaian kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah = pada tahun 2023 tidak ada kegiatan pengadaan BMD Persentase capaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah TW. I = 12,50% TW. II = 37,50% TW. III = 12,50% TW. IV = 37.50%	persen	100	100	100

Sasaran / Tujuan / Program	Indikator	Formulasi/Definisi	Perhitungan Data/Sumber data	Target Akhir Renstra		Data Capaian Realisasi s.d TW. IV 2023	%
				Satuan	Target Kinerja Tahun 2023		
			Jadi Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah TW. I = 12,50% TW. II = 37,50% TW. III = 12,50% TW. IV = 37.50%				
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	Jml. Produksi Perikanan tangkap bersumber dari TPI tahun n - (n-1) dibagi produksi perikanan tangkap bersumber TPI (n-1)*100%	Jml. Produksi Perikanan tangkap bersumber dari TPI tahun 2023 : TW. I : ((1358362-10032593)/10032593)*100 TW. II :((3.248.589-10.032.593)/10032593)*100 TW. III : (5.156.955-10.032.593)/10.032.593 *100 TW. IV : (9.583.499 - 10.032.593)/10.032.593 *100 Jml. Produksi Perikanan tangkap bersumber dari TPI tahun 2022 : 10032593 kg	persen	6,07	1,05	17,42
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	Jml. Pendapatan daerah bersumber TPI tahun n - (n-1) dibagi Jml. Pendapatan daerah sumber TPI (n-1)*100%	Jml. Pendapatan daerah bersumber TPI tahun 2023 : TW. I : ((719.924.790-4.433.748.930)/4.433.748.930)*100; TW. II :((1.603.845.330- 4.433.748.930)/ 4.433.748.930)*100; TW. III :((2.383.521.450- 4.433.748.930)/4.433.748.930)*100; TW. IV : (3.750.103.920- 4.433.748.930)/4.433.748.930)*100;	persen	1	1,73	28,15

Sasaran / Tujuan / Program	Indikator	Formulasi/Definisi	Perhitungan Data/Sumber data	Target Akhir Renstra		Data Capaian Realisasi s.d TW. IV 2023	%
				Satuan	Target Kinerja Tahun 2023		
			Jml. Pendapatan daerah bersumber TPI tahun 2022 : 4.433.749 ;				
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya tahun n - (n-1) dibagi jumlah produksi perikanan budidaya n-1*100%	Jml. Produksi Perikanan budidaya tahun 2023 : s.d TW. I :((140480-502462)/502462)*100 s.d TW. II : ((285700-502462)/502462)*100 s/d TW. III : ((401719-502462)/502462)*100 s/d TW. IV : ((540289-502462)/502462*100 Jml. Produksi Perikanan budidaya tahun 2022 : 502462	persen	5,58	-10,45	-187,4
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)	Jumlah pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi pada tahun N	Jumlah pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi : TW I = 0 TW II = 0 TW III = 0 TW IV = 2	pelaku usaha	12	4	33,33
	Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	Jumlah pengusaha perikanan pengolahan dan pemasaran yang dibina dibagi Jumlah pengusaha perikanan pengolahan dan pemasaran*100%	TW I : (40/336)*100 TW II : (19/344)*100 TW III: (156/344)*100 TW IV : (151/344)*100	persen	12,20	26.73	219.14

2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program, kegiatan maupun sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa isu yang diperoleh dari permasalahan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Perubahan regulasi yang berpengaruh terhadap kebijakan daerah
   (1) Adanya kebijakan refocusing anggaran dari sisa anggaran sewa TPI;
   (2) Adanya kendala ketersediaan BBM solar bersubsidi
   (3) Penerapan aturan pengadaan barang / jasa yang menerapkan *e-catalog* local, sementara adanya keterbatasan penyedia lokal yang memenuhi syarat KBLI yang sesuai;
   (4) Penetapan harga sewa TPI yang mengalami keterlambatan karena adanya update harga sewa dari PT Perindo.
2. Kondisi Alam yang tidak menentu
   (1) Kondisi cuaca yang tidak menentu dan seringnya terjadi banjir rob menjadi kendala dalam pelaksanaan perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
   (2) Keterbatasan benih yang berkualitas;
3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana yang memadai
   (1) Sarana dan prasarana yang kurang memadahi dan rusak, sementara keterbatasan anggaran untuk perbaikan;
   (2) Tuntutan sistem aplikasi;
4. Juknis sulit untuk dipenuhi sesuai persyaratan (karena kondisi di lapangan);

Dari identifikasi isu terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan dalam pelaksanaan urusan pilihan perikanan dan kelautan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam

menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Tabel 2. 4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	REKAP RANCANGAN AWAL RKPD 2025		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		Keterangan
			Target	Pagu APBD	Target	Pagu APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				**10.566.822.000**		**8.151.380.000**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	**Presentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**Persen**	**100**	**6.250.270.000**	**100**	**5.320.066.000**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**35.500.000**	**100**	**24.500.000**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	15.750.000	3	10.000.000	Rasionalisasi anggaran tahun 2025
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	1.500.000	2	1.500.000	Rasionalisasi anggaran tahun 2025
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15	18.250.000	15	13.000.000	Rasionalisasi anggaran tahun 2025

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	REKAP RANCANGAN AWAL RKPD 2025		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		Keterangan
			Target	Pagu APBD	Target	Pagu APBD	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**4.016.274.000**	**100**	**3.645.820.000**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	25	3.960.764.000	25	3.588.710.000	Penyesuaian Jumlah ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	53.910.000	12	55.510.000	Tambahan Honorarium kasir penerimaan Technopark
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1.600.000	1	1.600.000	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Presentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**9.500.000**	**100**	**5.000.000**	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	9.500.000	1	5.000.000	Rasionalisasi anggaran tahun 2025
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Presentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**persen**	**100**	**427.141.000**	**100**	**244.280.000**	

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	REKAP RANCANGAN AWAL RKPD 2025		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		Keterangan
			Target	Pagu APBD	Target	Pagu APBD	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	10.500.000	4	7.670.000	Rasionalisasi anggaran tahun 2025
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	180.112.000	4	71.200.000	Rasionalisasi anggaran tahun 2025
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	6.500.000	4	4.750.000	Rasionalisasi anggaran tahun 2025
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	68.529.000	4	42.760.000	Rasionalisasi anggaran tahun 2025
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	9.000.000	2	6.570.000	Rasionalisasi anggaran tahun 2025
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2.500.000	2	1.830.000	Rasionalisasi anggaran tahun 2025
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	80	150.000.000	70	109.500.000	Rasionalisasi anggaran tahun 2025

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	REKAP RANCANGAN AWAL RKPD 2025		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		Keterangan
			Target	Pagu APBD	Target	Pagu APBD	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Presentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persen**	**100**	**554.655.000**	**100**	**546.168.000**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2.180.000	4	1.600.000	Rasionalisasi anggaran tahun 2025
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	179.475.000	12	181.375.000	Penambahan tagihan listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	373.000.000	12	363.193.000	Rasionalisasi anggaran tahun 2025
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Presentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**1.207.200.000**	**100**	**854.298.000**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	26	154.000.000	26	126.358.000	Rasionalisasi anggaran tahun 2025

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	REKAP RANCANGAN AWAL RKPD 2025		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		Keterangan
			Target	Pagu APBD	Target	Pagu APBD	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1.013.040.000	2	698.620.000	Rasionalisasi anggaran tahun 2025
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	40.160.000	5	29.320.000	Rasionalisasi anggaran tahun 2025
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**Peningkatan produksi perikanan tangkap bersumber dari TPI**	**persen**	**1**	**2.905.165.000**	**1**	**2.227.388.000**	
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Presentase Sarpras Tangkap yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota**	**persen**	**5**	**265.500.000**	**5**	**117.454.000**	
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	44.700.000	2	117.454.000	Penyesuaian satuan target indikator berupa dokumen sehingga berpindah pada sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	REKAP RANCANGAN AWAL RKPD 2025		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		Keterangan
			Target	Pagu APBD	Target	Pagu APBD	
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit	1	109.800.000	0	-	Penyesuaian satuan target indikator berupa dokumen sehingga berpindah pada sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	1	111.000.000	0	-	Karena pada tahun 2024 ditiadakan alat penyedot lumpur (anggaran digeser ke Dinas Perhubungan untuk Penerangan Jalan Umum) sehingga tidak dilanjutkan di tahun 2025
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Presentase Nelayan Kecil yang dibina**	**Persen**	**10**	**152.665.000**	**10**	**67.740.000**	
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	30	113.565.000	25	32.190.000	Rasionalisasi anggaran tahun 2025
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	19	39.100.000	19	35.550.000	Rasionalisasi anggaran tahun 2025
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	**Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Tangkap yang bersumber dari TPI**	**persen**	**1**	**2.487.000.000**	**1**	**2.042.194.000**	

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	REKAP RANCANGAN AWAL RKPD 2025		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		Keterangan
			Target	Pagu APBD	Target	Pagu APBD	
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	353	2.487.000.000	353	2.042.194.000	Rasionalisasi anggaran tahun 2025
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya**	**persen**	**1**	**312.400.000**	**1**	**181.988.000**	
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Presentase ketercapaian aspek - aspek pengelolaan pembuddidayaan ikan kecil**	**persen**	**100**	**312.400.000**	**100**	**181.988.000**	
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	15.000.000	1	8.470.000	Rasionalisasi anggaran tahun 2025
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2	17.000.000	2	12.410.000	Rasionalisasi anggaran tahun 2025
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1	225.000.000	1	126.588.000	Rasionalisasi anggaran tahun 2025
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui	Dokumen	4	20.400.000	1	8.970.000	Rasionalisasi anggaran tahun 2025

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	REKAP RANCANGAN AWAL RKPD 2025		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		Keterangan
			Target	Pagu APBD	Target	Pagu APBD	
	Pengelolaan Kesehatan Ikan						
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	30	35.000.000	25	25.550.000	Rasionalisasi anggaran tahun 2025
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan**	**Persen**	**12,12**	**1.098.987.000**	**12,12**	**421.938.000**	
	Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)	**pelaku usaha**	**2**		**2**		
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Presentase penyediaan dan penyaluran Bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerahh kabupaten/kota**	**persen**	**70**	**1.014.289.000**	**70**	**385.198.000**	

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	REKAP RANCANGAN AWAL RKPD 2025		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		Keterangan
			Target	Pagu APBD	Target	Pagu APBD	
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	30	1.014.289.000	2	385.198.000	Rasionalisasi anggaran tahun 2025 anggaran Rehab Technopark digeser ke sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	**Presentase Fasilitasi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**persen**	**16,67**	**84.698.000**	**16,67**	**36.740.000**	
Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	unit usaha	285	84.698.000	345	36.740.000	Rasionalisasi anggaran tahun 2025

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Sebelum melakukan penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, terlebih dahulu telah dilakukan penjaringan aspirasi masyarakat, baik terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berupa usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan perangkat daerah, asosiasi asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan pengamatan pelaksanaan musrenbang tingkat kota. Terhadap aspirasi tersebut kemudian dilakukan inventarisasi dan pengkajian apakah sesuai dengan isu isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah.

Usulan awal program, kegiatan dan sub kegiatan dari perangkat daerah kemudian diselaraskan dengan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui Musrenbang, baik musrenbang kelurahan maupun kecamatan dan kota, serta forum perangkat daerah. Dalam kegiatan ini kemudian diinventarisir pula usulan yang masuk melalui Pagu Indikatif. Sebagai sebuah konsekuensi atas telah ditandatanganinya kesepakatan antara Walikota sebagai pihak Eksekutif dengan DPRD sebagai lembaga legislative tentang penetapan pagu anggaran, maka semua usulan masyarakat yang masuk sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus dilaksanakan oleh perangkat daerah. Usulan yang dibuat oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitan dan Pengembangan Daerah telah disesuaikan dan telah mengakomodir semua usulan dari pemangku kepentingan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Pada proses Rancangan Awal Renja, belum ada usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Bappeda Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025.

Tabel 2. 5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Keterangan
	NIHIL				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dari perumusan permasalahan adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan / kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi permasalahan perangkat daerah terhadap bidang urusan perangkat daerah (urusan pilihan kelautan dan perikanan) secara terpisah atau sekaligus . Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab perangkat daerah.

Isu strategis perangkat daerah merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu perangkat daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah perangkat daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi perangkat daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Berikut kami sampaikan permasalahan dan isu – isu strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan yang diuraiakan pada bagian :

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Analisis isu strategis merupakan pemahaman permasalahan pembangunan dan isu isu penting dalam penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Perkembangan terkini, permasalahan dan tantangan pembangunan Kota Pekalongan, regional, nasional maupun internasional semakin bertambah sebagai implikasi terjadinya pandemi COVID-19 yang dimulai pada awal tahun 2020 hingga awal tahun 2023 telah mengalami penurunan, Meski demikian, dampak pandemi yang sudah

terjadi pada tahun 2020 dan masih akan berlanjut pada tahun tahun berikutnya. Oleh karena itu, permasalahan dan tantangan pembangunan sebagai dampak pandemi COVID-19 harus diintegrasikan ke dalam permasalahan dan isu strategis pembangunan Kota Pekalongan.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan disajikan pada Tabel T-B 35 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah.

Tabel 3. 1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
Kecenderungan produksi perikanan yang rendah atau menurun	Masih rendahnya produksi ikan yang didaratkan di TPI Pekalongan;	Pendangkalan muara sungai yang menyebabkan kapal kapal tidak bisa bersandar di TPI Kota Pekalongan
		Adanya musim Baratan dan Timuran akibat climate change yang menyebabkan nelayan tidak bisa berangkat melaut untuk mencari ikan.
	Masih rendahnya produksi dan produktivitas lahan perikanan budidaya;	Meluasnya dampak banjir dan rob
		Minimnya pasokan air laut untuk tambak yang berada di dalam tanggul yang dibutuhkan budidaya udang vaname
		Banyak pembudidaya yang beralih profesi.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sesuai dengan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan periode tahun 2021-2026, maka visi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah : *"**Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius"**.*

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, RPJMD ini merumuskan 7 (tujuh) misi

yang akan menjadi pemandu tugas bersama antara Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Ketujuh misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan ;
3. Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman.
4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota yang Berkelanjutan;
5. Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal;
6. Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah;
7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Clean Government;

Tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah terpilih tertuang dalam misi ke 5 yaitu " ***Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal*** ", untuk mendukung misi tersebut, maka yang menjadi Program Prioritas Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap ;
b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya ;
c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kota.

Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Visi dari Kementrian Kelautan Perikanan adalah "Mewujudkan sector kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional". Mandiri dimaksud kedepan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan

sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni :

1. Kedaulatan (Sovereignty), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Keberlanjutan (Sustainability), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. Kesejahteraan (Prosperity), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi. Keberlanjutan dimaksudkan untuk mengelola dan melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan prinsip ramah lingkungan sehingga tetap dapat menjaga kelestarian sumberdaya. Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kaitan ini, KKP senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh stakeholders kelautan dan perikanan, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil 30 perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya. Ketiga hal di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan

budaya bagi kepentingan bersama.

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah:

1. Kedaulatan (Sovereignty), yakni:
   a. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.
   b. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan
2. Keberlanjutan (Sustainability), yakni:
   a. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut
   b. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
   c. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan.
3. Kesejahteraan/ Kesejahteraan (Prosperity), yakni :
   a. Mengembangan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
   b. Mengembangkan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah harus mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Dalam penyusunan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 dijadikan pedoman dalam menetapkan lokasi pembangunan di Kota Pekalongan terkait pemanfaatan ruang, baik dari sisi rencana pola

ruang, rencana struktur ruang dan kawasan strategis kota, maupun sebagai dasar penyusunan prioritas program sesuai arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Berdasarkan kebijakan penetapan kawasan strategis Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029), Kota Pekalongan merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kawasan Perkotaan Pekalongan yang meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan. Pusat Kegiatan wilayah ini adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota, sehingga sarana prasarana dan fasilitas kota yang ada harus dapat melayani dalam skala regional. Kebijakan ini telah dipedomani dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029).

Selain Pusat Kegiatan Wilayah, sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah 2009-2029, Sistem Perwilayahan dilakukan dengan pembagian Wilayah Pengembangan dan penentuan arah pengembangan. Kota Pekalongan masuk dalam Wilayah Pengembangan Petanglong yang berpusat di Kawasan Perkotaan Pekalongan, dengan arah pengembangan meliputi : memadukan pembangunan Kota Pekalongan dan Wilayah sekitarnya, dan pengembangan wilayah yang didasarkan pada sektor unggulan (industri, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan).

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, telah ditetapkan 3 (tiga) pengembangan Kawasan Strategis Kota (KSK), yang meliputi : KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, KSK dari sudut kepentingan sosial budaya dan KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan diarahkan pada pengembangan kawasan minapolitan berada di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara.

Sedangkan untuk struktur ruang wilayah kota meliputi Pusat Kegiatan yang terdiri dari 1 (satu) Pusat Pelayanan Kota (PPK), 4 (empat) Sub Pusat Pelayanan Kota dan 6 (enam) Pusat Lingkungan; serta Sistem Jaringan Prasarana.

Pusat Pelayanan Kota / PPK yang merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional berada di kelurahan Kauman dan Bendan Kergon. Sedangkan Sub Pusat Pelayanan Kota / SPPK tersebar di 4 (empat) kecamatan yang berada di :

1) SPPK Kecamatan Pekalongan Barat berada di Kelurahan Tirto;
2) SPPK Kecamatan Pekalongan Utara berada di Kelurahan Panjang Wetan;
3) SPPK Kecamatan Pekalongan Timur berada di Kelurahan Gamer dan Kalibaros; dan
4) SPPK Kecamatan Pekalongan Selatan berada di Kelurahan Banyuurip.

1. Pelayanan Lingkungan / PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota berada di :
   1) PL di Kecamatan Pekalongan Barat berada di Kelurahan Pringrejo;
   2) PL di Kecamatan Pekalongan Utara berada di Kelurahan Kandang Panjang;
   3) PL di Kecamatan Pekalongan Utara berada di Kelurahan Degayu;
   4) PL di Kecamatan Pekalongan Timur berada di Kelurahan Gamer;
   5) PL di Kecamatan Pekalongan Selatan berada di Kelurahan Kuripan Kertoharjo; dan
   6) PL di Kecamatan Pekalongan Selatan berada di Kelurahan Sokoduwet.

Selanjutnya untuk pedoman penataan ruang yang mendukung pelaksanaan RTRW telah disusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) untuk Kawasan Strategis Kota (KSK) dari sudut kepentingan sosial budaya, yaitu Kawasan Jetayu, Kawasan Kali Loji, Kawasan Pasar Buah Pati Unus, Kawasan Pecinan, dan Kawasan Kampung Arab serta KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1) Kawasan Tirto, Koridor Batas Barat s.d. Jl Gajah Mada,
2) Kawasan Koridor Jl. Hayam Wuruk-Jl. Dr. Cipto dan Alun-alun,
3) Kawasan Koridor Jl. Urip Sumoharjo-Jl. Gatot Subroto dan Jl. Pelita II,
4) Kawasan Koridor Jl. W.R. Supratman-Jl. Pantai Sari-Jl. Samudra, Kawasan Teknopark Perikanan,
5) Kawasan Terpadu Kuripan dan Koridor Jl. H.O.S. Cokroaminoto, dan
6) Kawasan Batas Kota sebelah Timur dan Koridor Jl. Dr. Sutomo.

Salah satu kebijakan penataan ruang wilayah Kota Pekalongan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah adalah peningkatan hasil perikanan dan optimalisasi lahan pertanian.

Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan hasil perikanan meliputi :

- Meningkatkan sarana, prasarana dan peran kelembagaan perikanan dan pertanian;
- Mengembangkan produk unggulan perikanan dan pertanian;
- Meningkatkan nilai produk melalui pengolahan hasil perikanan dan pertanian; dan
- Mengembangkan pemasaran hasil perikanan dan pertanian.

Kawasan perikanan di Kota Pekalongan meliputi:

1 Kawasan Perikanan Tangkap :

Dengan luas kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) hektar berupa pengembangan fasilitas hasil perikanan tangkap meliputi:

i. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan;
ii. Pengolahan hasil perikanan berada di Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara;
iii. Kawasan pemasaran hasil perikanan berupa fasilitas pelelangan/ pasar ikan yang berada di Kelurahan Panjang Wetan dan/ atau Kelurahan Krapyak;
iv. Teknopark perikanan yang berada di Kelurahan Panjang Wetan; dan
v. Prasarana penunjang pelabuhan perikanan.

2 Kawasan perikanan budidaya

Dengan luas kurang lebih 173 (seratus tujuh puluh tiga) hektar berada di Kelurahan Degayu dan Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan

A. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan perikanan tangkap disusun dengan ketentuan:

I. diperbolehkan kegiatan berupa:

a) perikanan tangkap, pengolahan perikanan, dan pemasaran hasil perikanan;

b) pengembangan jaringan prasarana, sarana, dan utilitas untuk kepentingan umum; dan

c) pengembangan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob.

II. Diperbolehkan dengan syarat kegiatan dan/ atau mendirikan bangunan berupa:

a) pembangunan industri perikanan dan kelautan;

Yang dimaksud dengan industri yang mendukung perikanan tangkap meliputi galangan kapal, docking kapal, pabrik es untuk pendingin ikan, cold storage, dan stasiun pengisian bahan bakar/SPBB

b) kegiatan wisata dengan syarat tidak menggangu kegiatan perikanan tangkap;

c) kegiatan lain-lain yaitu:

- menara telekomunikasi / antena; dan
- prasarana, sarana dan utilitas.

III. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penelitian, pendidikan, dan penunjang perikanan tangkap;

IV. diperbolehkan terbatas kegiatan dan/ atau mendirikan bangunan berupa:

a) kegiatan pembangunan rumah tinggal, dengan batasan hanya untuk mencukupi kebutuhan pemilik lahan dan dengan syarat memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai alih fungsi peruntukan lahan;

b) kegiatan industri yaitu industri dan gudang yang mendukung kegiatan perikanan tangkap;

c) perkantoran

d) transportasi yaitu:

i. transportasi sungai dan penyeberangan serta fasilitas pendukungnya;

ii. transportasi laut dan fasilitas pendukungnya;

iii. transportasi darat (jalan raya) dan fasilitas pendukungnya; dan

iv. transportasi kereta api dan fasilitas pendukungnya.

e) kegiatan lain-lain yaitu militer.

V. tidak diperbolehkan kegiatan yang mencemari kualitas air yang menganggu budidaya perikanan;

VI. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana; dan

VII. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana.

VIII. tidak diperbolehkan kegiatan dan/ atau pembangunan yang mengganggu kegiatan perikanan tangkap.

IX. semua kegiatan yang tercantum diwajibkan mempertahankan keberadaan, keberlangsungan dan fungsi fasilitas dan atau utilitas umum yang terletak didalam lokasi pemanfaatan ruang.

B. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan perikanan budidaya disusun dengan ketentuan:

I. diperbolehkan kegiatan berupa:

a) perikanan budidaya;

b) pengembangan jaringan prasarana, sarana, dan utilitas untuk kepentingan umum; dan

c) pengembangan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob.

II. diperbolehkan dengan syarat kegiatan dan atau mendirikan bangunan berupa:

a) pembangunan industri yang mengolah hasil perikanan dan pemasaran hasil perikanan;.

b) kegiatan wisata dengan syarat tidak menggangu kegiatan perikanan budidaya;

c) kegiatan pertanian yaitu:

   i. usaha dan budidaya pertanian; dan

   ii. usaha dan budidaya peternakan;

d) kegiatan lain-lain yaitu:

   i. RTH;

   ii. menara telekomunikasi / antena; dan

   iii. sarana dan utilitas lainnya.

III. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penelitian, pendidikan, dan penunjang perikanan budidaya;

IV. diperbolehkan terbatas kegiatan dan / atau mendirikan bangunan berupa:

a) kegiatan pembangunan rumah tinggal, dengan batasan hanya untuk mencukupi kebutuhan pemilik lahan dan dengan syarat memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai alih fungsi peruntukan lahan;

b) kegiatan industri yaitu industri dan gudang;

c) perkantoran;

d) transportasi yaitu:

   i. transportasi sungai dan penyeberangan serta fasilitas pendukungnya;

   ii. transportasi darat (jalan raya) dan fasilitas pendukungnya; dan

   iii. transportasi kereta api dan fasilitas pendukungnya

   iv. tidak diperbolehkan kegiatan yang mencemari kualitas air yang menganggu budidaya perikanan;

V. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana; tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana;

VI. tidak diperbolehkan kegiatan dan/ atau pembangunan yang mengganggu kegiatan perikanan budidaya; dan

VII. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan huruf d diwajibkan mempertahankan keberadaan, keberlangsungan dan fungsi fasilitas dan atau utilitas umum yang terletak didalam lokasi pemanfaatan ruang.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), lebih mengutamakan pendekatan strategis, sehingga bukan KRP dalam RPJMD yang dinilai dampaknya, tetapi lebih memastikan strategi pembangunan berkelanjutan sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDG's), yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, telah diintegrasikan ke dalam Rancangan RPJMD.

Dari pelaksanaan KLHS RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, maka dapat diidentifikasi substansi terpenting KLHS meliputi:

a. Status lingkungan hidup. Status lingkungan hidup, secara umum menggambarkan daya dukung dan daya tampung. Daya dukung dan daya tampung menggambarkan kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan maupun seluruh kehidupan.

b. Skenario TPB tanpa upaya tambahan. Skenario TPB tanpa upaya tambahan adalah skenario terhadap pencapaian target TPB pada tahun 2024 (masa berakhirnya RPJMD) tanpa memerlukan upaya tambahan atau *Bussiness As Usual* (BAU). Dengan melaksanakan pembangunan yang sudah kita laksanakan selama ini maka target TPB akan tercapai pada tahun 2024.
c. Skenario TPB dengan upaya tambahan. Skenario TPB dengan upaya tambahan adalah skenario terhadap pencapaian target TPB yang tidak akan tercapai pada tahun 2024 (masa berakhirnya RPJMD) dengan *Bussiness As Usual* (BAU), sehingga memerlukan upaya tambahan untuk pencapaian target tersebut.
d. Penentuan isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis daerah. Isu strategis pembangunan KLHS RPJMD Kota Pekalongan mempertimbangkan indikator TPB yang membutuhkan upaya tambahan. Hasil perumusan skenario menunjukkan indikator TPB belum tercapai sampai dengan tahun 2024 merupakan indikator yang perlu upaya tambahan setelah dipadankan dengan aspek lain, terutama aspek lingkungan. Indikator yang belum tercapai perlu menjadi prioritas dalam dokumen KLHS agar dapat memenuhi target pada masa yang akan dating Rekomendasi program.
e. Rekomendasi program dari KLHS untuk masukan penyusunan RPJMD Kota Pekalongan 2021-2026 berupa usulan rekomendasi untuk dimasukkan dalam dokumen RPJMD.

Secara umum, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kota Pekalongan telah terlampaui, namun masih terdapat kapasitas daya dukung dan daya tampung aspek tertentu dan kecamatan tertentu yang dapat dioptimalkan. Para pemangku kepentingan harus “secara bijaksana” menjadikan status lingkungan hidup Kota Pekalongan sebagai faktor yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan maupun pencapaian target TPB. Pertimbangan terhadap status lingkungan hidup, merupakan upaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kota Pekalongan. Sesuai dengan UUPPLH, pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan,

kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Terhadap kelima aspek penting yang telah disebutkan di atas maka akan diuraikan dua hal aspek yang terpenting yaitu status lingkungan hidup serta penentuan isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis daerah, karena kedua aspek harus dicermati dan dijadikan masukan penting bagi RPJMD Kota Pekalongan, adalah sebagai berikut:

- Status Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
- Penentuan Isu Strategis, Permasalahan dan Sasaran Strategis Daerah.

3.5 Penentuan Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu identifikasi faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi /kabupaten /kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa ***isu strategis*** yang menjadi landasan bagi penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Tahun 2021 - 2026 yakni:

Perikanan Budidaya

1) Banjir hujan di awal tahun dan banjir rob pertengahan tahun;
2) Belum optimalnya pemanfaatan kawasan mangrove untuk budidaya perikanan;
3) Masih perlu peningkatan usaha budidaya ikan hias (cupang dan Guppy);

4) Masih banyaknya budidaya perikanan air payau (tambak) secara tradisional;
5) Perubahan ekosistem (dari air payau menjadi air tawar);
6) Masih Banyaknya kelompok pembudidaya yang belum memiliki Badan Hukum;
7) Masih banyaknya Pembudidaya yang belum memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Ijin Usaha Budidaya;
8) Masih banyaknya Unit Pengolahan Ikan yang belum menerapkan SKP; (sertfikat kelayakan pengolahan) dan GMP (Good Manufacturing Practice);
9) Berkurangnya Lahan Produksi Budidaya;
10) Keterbatasan sumber air untuk usaha budidaya;
11) Masih banyaknya pembudidaya yang belum menerapkan dan memiliki sertifikat CBIB / CPIB
12) Belum adanya Perda Perlindungan Budidaya

Perikanan Tangkap

1) Pembangunan bendung gerak yang berdampak pada :
   - Pentingnya docking kapal sehingga mengurangi minat kapal untuk lelang di TPI;
   - Pembuatan parapet tinggi hamper 2 m dapat menyebabkan penambahan biaya dan waktu bongkar.
2) Banjir rob di TPI semakin tinggi terutama di parkiran yang berdampak pada turunnya minat penjualan ikan dari truk freezer yang lelang di TPI;
3) Kemampuan bakul masih kecil sekitar 40 ton perhari sehingga apabila jumlah yang dilelang melebihi 40 ton harga ikan cenderung turun.
4) Belum disahkannya Dasar Hukum Pelaksanaan Lelang Terbatas dan Lelang sampel;
5) Tinggi sedimentasi alur muara pelabuhan Kota Pekalongan yang menyebabkan pendangkalan sehingga mempengaruhi kapal keluar masuk pelabuhan;
6) Masih Perlunya Penertiban Kapal – kapal pendatang (Penampung, Non Pangkalan, Penangkap);
7) Masih Rendahnya Produktivitas Nelayan Kecil karena keterbatasan Sarpras dan ketrampilan dalam menangkap ikan;
8) Kurangnya perlindungan Keselamatan Nelayan Kecil (5GT);
9) Perlunya Peningkatan Kelembagaan KUB (Kelompok Usaha Bersama) dan

Tumbuhnya KUB Baru;

10) Perlunya Kelengkapan Dokumen Kapal, Nelayan dan NIB (Nomor Ijin Berusaha);

11) Masih rendahnya cara penanganan ikan yang baik di atas kapal dan di TPI

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan dengan target indikator kinerja selama 5 (lima) tahun kebelakang (2021 - 2026) ,yaitu sebagai berikut :

4.1.1 Tujuan

1. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik;
   - Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatkan produksi perikanan;
   - Indikator kinerja Pertumbuhan produksi perikanan (tangkap dan budidaya).

Tabel 4. 1
Tujuan dan Indikator Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	78,19	78,44	78,69	78,94	79,19	79,44
Meningkatkan produksi perikanan	Pertumbuhan produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	persen	1	1	1	1	1	1

4.1.2 Sasaran

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
   - Indikator kinerja Nilai SAKIP OPD.
2. Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya).
   - Indikator kinerja Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya dan Tangkap) Kab/Kota.

Tabel 4. 2
Sasaran dan Indikator Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator Sasaran (IKU OPD)	Sat	Target Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	80,00	81,50	83,00	84,50	86,00	87,50
Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya dan Tangkap) Kab/Kota	Ton	14843	14991	15141	15293	15446	15600

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sesuai dengan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan periode tahun 2021-2026, maka visi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah :

"Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius"

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi sebagaimana diuraikan di atas, maka dirumuskan misi yang harus diemban oleh Pemerintah bersama dengan Masyarakat Kota Pekalongan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan sehingga program kegiatan di **Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan mendukung Misi ke-5 (Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal).**

Misi ini fokus kepada pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19. Indikator tujuan pada misi ini PDRB Per Kapita yang menunjukkan tingkat ekonomi Kota Pekalongan, yang akan dicapai melalui strategi sesuai kewenangan Kota Pekalongan, yaitu peningkatan daya tarik pariwisata dan daya saing ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Program unggulan yang mendukung misi ini adalah menambah jumlah pasar tradisional dengan konsep modern, membangun ekonomi kreatif dan digital preunership bagi kalangan muda, penyediaan jaringan internet gratis, penataan kawasan pedagang kaki lima sebagai pusat food street, mengembangkan kegiatan wisata religius dan kegiatan wisata lain,

serta mengembangkan Pekalongan sebagai pusat kuliner pesisir. Program tersebut merupakan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor riil di Kota Pekalongan. Skema strategi pencapaian Misi 5. Berikut gambar Skema Strategi Pencapaian Misi 5.:

Gambar 5. 1 Skema Strategi Pencapaian Misi 5

Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan dijelaskan dalam Tabel berikut.

Tabel 5. 1

Keterkaitan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

VISI	**“Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”**
MISI 5	**Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2022	2023	2024	2025	2026
Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Peningkatan daya tarik pariwisata dan daya saing ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Peningkatan promosi dan pemberdayaan pariwisata, industri, perdagangan dan jasa serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal					
			Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing					
			Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif					
			Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan					
			Penguatan pondasi keberlanjutan ekonomi kreatif, pariwisata, perdagangan, dan jasa					

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dapat didefinisikan sebagai penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi daerah, sedangkan kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dengan melibatkan sumber daya sebagai masukan (output) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Penentuan rumusan program yang dilakukan melalui perencanaan yang komprehensif dalam sebuah organisasi/lembaga merupakan hal penting yang harus dilakukan agar program-program tersebut dapat menunjang terlaksananya tujuan dari organisasi/lembaga. Guna mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan yang berkesinambungan yang tertuang dalam visi kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, dan sebagai arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan , maka berikut ini disusunlah Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan dalam tabel sebagaimana berikut.

Tabel 6. 1
Target / Pagu Dinas Kelautan dan Perikanan yang tercantum dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

Kode Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Nama Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Target / Pagu									
		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026	
		Batasan	Inputan	Batasan	Inputan	Batasan	Inputan	Batasan	Inputan	Batasan	Inputan
3.25.0.00.0.00.01.00	**Dinas Kelautan dan Perikanan**		**9.828.040.000**		**9.491.659.000**		**9.415.055.000**		**9.379.514.000**		**9.321.406.000**
03.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**		**4.434.757.000**		**4.363.206.000**		**4.280.191.000**		**4.195.523.000**		**4.295.299.000**
03.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**		**3.592.871.000**		**2.705.207.000**		**2.675.733.000**		**2.579.536.000**		**2.649.232.000**
Indikator Program :Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI		1.005.885.000	1.005.885.000	374.334.000	374.334.000	367.465.000	367.465.000	275.766.000	275.766.000	281.346.000	281.346.000
3.25.03.2.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**		**745.885.000**		**216.334.000**		**242.115.000**		**147.716.000**		**152.496.000**
Indikator Kegiatan : Persentase Sarpras Perikanan Tangkap yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			745.885.000		216.334.000		242.115.000		147.716.000		152.496.000
3.25.03.2.01.01	**Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan**		**80.000.000**		**76.334.000**		**100.000.000**		**29.800.000**		**30.550.000**
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang tersedia			80.000.000		76.334.000		100.000.000		29.800.000		30.550.000
3.25.03.2.01.02	**Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap**		**465.885.000**		**100.000.000**		**92.115.000**		**67.916.000**		**71.946.000**
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Prasarana Usaha Perikanan yang tersedia			465.885.000		100.000.000		92.115.000		67.916.000		71.946.000
3.25.03.2.01.03	**Penjaminan Ketersediaan**		**200.000.000**		**40.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**

Kode Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Nama Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Target / Pagu									
		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026	
		Batasan	Inputan	Batasan	Inputan	Batasan	Inputan	Batasan	Inputan	Batasan	Inputan
	Sarana Usaha Perikanan Tangkap										
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah penjaminan sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia			200.000.000		40.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
3.25.03.2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**180.000.000**		**125.000.000**		**92.350.000**		**95.050.000**		**95.850.000**
Indikator Kegiatan : Persentase Nelayan Kecil yang dibina			180.000.000		125.000.000		92.350.000		95.050.000		95.850.000
3.25.03.2.02.01	**Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil**		**50.000.000**		**45.000.000**		**34.350.000**		**35.050.000**		**35.850.000**
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah terbinanya KUB di Kota Pekalongan			50.000.000		45.000.000		34.350.000		35.050.000		35.850.000
3.25.03.2.02.02	**Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil**		**80.000.000**		**40.000.000**		**45.000.000**		**45.000.000**		**45.000.000**
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah kelompok nelayan yang dibina			80.000.000		40.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000
3.25.03.2.02.03	**Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha**		**50.000.000**		**40.000.000**		**13.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pendampingan nelayan yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha yang dilaksanakan			50.000.000		40.000.000		13.000.000		15.000.000		15.000.000
3.25.03.2.04	**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam**		**30.000.000**		**23.000.000**		**23.000.000**		**23.000.000**		**23.000.000**

Kode Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Nama Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Target / Pagu									
		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026	
		Batasan	Inputan	Batasan	Inputan	Batasan	Inputan	Batasan	Inputan	Batasan	Inputan
	1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
Indikator Kegiatan : Persentase jumlah permohonan kapal yang didaftarkan			30.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000
3.25.03.2.04.01	**Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT**		**15.000.000**		**12.000.000**		**12.000.000**		**12.000.000**		**12.000.000**
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen pencatatan kapal			15.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000
3.25.03.2.04.02	**Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT**		**15.000.000**		**11.000.000**		**11.000.000**		**11.000.000**		**11.000.000**
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pendataan kapal			15.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000
3.25.03.2.06	**Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**50.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**
Indikator Kegiatan : Persentase Pendaftaran Kapal yang Beroperasi			50.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
3.25.03.2.06.02	**Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT**		**50.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Pelayanan Pendaftaran yang dilayani			50.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
Indikator Program :Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI		2.586.986.000	2.586.986.000	2.330.873.000	2.330.873.000	2.308.268.000	2.308.268.000	2.303.770.000	2.303.770.000	2.367.886.000	2.367.886.000

Kode Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Nama Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Target / Pagu									
		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026	
		Batasan	Inputan	Batasan	Inputan	Batasan	Inputan	Batasan	Inputan	Batasan	Inputan
3.25.03.2.03	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**		**2.586.986.000**		**2.330.873.000**		**2.308.268.000**		**2.303.770.000**		**2.367.886.000**
Indikator Kegiatan : Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Bersumber dari TPI			2.586.986.000		2.330.873.000		2.308.268.000		2.303.770.000		2.367.886.000
3.25.03.2.03.02	**Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**		**2.586.986.000**		**2.330.873.000**		**2.308.268.000**		**2.303.770.000**		**2.367.886.000**
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Bulan sewa gedung dan pelataran TPI			2.586.986.000		2.330.873.000		2.308.268.000		2.303.770.000		2.367.886.000
03.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**		**294.762.000**		**587.013.000**		**536.502.000**		**538.993.000**		**557.508.000**
Indikator Program :Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya		294.762.000	294.762.000	587.013.000	587.013.000	536.502.000	536.502.000	538.993.000	538.993.000	557.508.000	557.508.000
3.25.04.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**0**		**43.000.000**		**50.000.000**		**24.000.000**		**24.000.000**
Indikator Kegiatan : Persentase Usulan Permohonan Izin Usaha Perikanan Bidang Budidaya yang Diterbitkan			0		43.000.000		50.000.000		24.000.000		24.000.000
3.25.04.2.01.01	**Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan**		**0**		**13.000.000**		**20.000.000**		**13.000.000**		**13.000.000**

Kode Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Nama Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Target / Pagu									
		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026	
		Batasan	Inputan	Batasan	Inputan	Batasan	Inputan	Batasan	Inputan	Batasan	Inputan
	Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing										
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Int yang diterbitkan			0		13.000.000		20.000.000		13.000.000		13.000.000
3.25.04.2.01.02	**Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing**		**0**		**30.000.000**		**30.000.000**		**11.000.000**		**11.000.000**
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, sert yang diterbitkan			0		30.000.000		30.000.000		11.000.000		11.000.000
3.25.04.2.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**		**118.762.000**		**200.147.000**		**167.000.000**		**185.000.000**		**175.000.000**
Indikator Kegiatan : Persentase Pembudidaya yang dibina			118.762.000		200.147.000		167.000.000		185.000.000		175.000.000

Kode Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Nama Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Target / Pagu									
		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026	
		Batasan	Inputan	Batasan	Inputan	Batasan	Inputan	Batasan	Inputan	Batasan	Inputan
3.25.04.2.02.01	**Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil**		**65.762.000**		**120.147.000**		**90.000.000**		**100.000.000**		**80.000.000**
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah benih ikan yang diadakan			65.762.000		120.147.000		90.000.000		100.000.000		80.000.000
3.25.04.2.02.02	**Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil**		**43.000.000**		**50.000.000**		**47.000.000**		**50.000.000**		**55.000.000**
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah kategori lomba kinerja Pokdakan dan Poklahsar yang dilaksanakan			43.000.000		50.000.000		47.000.000		50.000.000		55.000.000
3.25.04.2.02.03	**Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha**		**10.000.000**		**15.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Bantuan Pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha yang difasilitasi			10.000.000		15.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
3.25.04.2.02.04	**Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan**		**0**		**15.000.000**		**20.000.000**		**25.000.000**		**30.000.000**
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pembudidaya yang dilatih			0		15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000
3.25.04.2.03	**Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**0**		**25.000.000**		**25.000.000**		**20.000.000**		**20.000.000**
Indikator Kegiatan : Jumlah dokumen TDPIK yang diterbitkan			0		25.000.000		25.000.000		20.000.000		20.000.000
3.25.04.2.03.01	**Penetapan Persyaratan dan**		**0**		**15.000.000**		**15.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**

Kode Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Nama Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Target / Pagu									
		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026	
		Batasan	Inputan	Batasan	Inputan	Batasan	Inputan	Batasan	Inputan	Batasan	Inputan
	Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah syarat dan prosedur TDPIK yang ditetapkan			0		15.000.000		15.000.000		10.000.000		10.000.000
3.25.04.2.03.02	**Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**0**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dilayani			0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**		**176.000.000**		**318.866.000**		**294.502.000**		**309.993.000**		**338.508.000**
Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian aspek-aspek pengelolaan pembudidayaan ikan			176.000.000		318.866.000		294.502.000		309.993.000		338.508.000
3.25.04.2.04.01	**Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**15.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen data bidang budidaya			15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000
3.25.04.2.04.02	**Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**80.000.000**		**100.000.000**		**80.000.000**		**118.000.000**		**114.408.000**
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Prasrana Tambak Dinas/BBI yang dibangun			80.000.000		100.000.000		80.000.000		118.000.000		114.408.000
3.25.04.2.04.03	**Penjaminan Ketersediaan**		**50.000.000**		**68.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**

Kode Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Nama Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Target / Pagu									
		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026	
		Batasan	Inputan	Batasan	Inputan	Batasan	Inputan	Batasan	Inputan	Batasan	Inputan
	Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Sarana Usaha Pembudidayaan yang diadakan			50.000.000		68.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
3.25.04.2.04.04	**Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**23.000.000**		**30.000.000**		**23.000.000**		**25.000.000**		**25.000.000**
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Bintek Cara Budidaya Ikan Baik (CBIB)/ Cara Pembenihan Ikan Baik(CPIB) yang diselenggarakan			23.000.000		30.000.000		23.000.000		25.000.000		25.000.000
3.25.04.2.04.05	**Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat**		**8.000.000**		**105.866.000**		**126.502.000**		**101.993.000**		**134.100.000**
Indikator Sub Kegiatan : Terkelolanya Balai Benih Ikan (BBI)			8.000.000		105.866.000		126.502.000		101.993.000		134.100.000
3.25.04.2.04.07	**Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
03.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**		**547.124.000**		**1.070.986.000**		**1.067.956.000**		**1.076.994.000**		**1.088.559.000**
Indikator Program :Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan		0	0	64.996.000	64.996.000	63.599.000	63.599.000	62.705.000	62.705.000	63.653.000	63.653.000
3.25.06.2.01	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**		**0**		**20.000.000**		**20.000.000**		**20.000.000**		**20.000.000**
Indikator Kegiatan : Persentase Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Bagi Usaha Skala Mikro dan kecil			0		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000

Kode Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Nama Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Target / Pagu									
		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026	
		Batasan	Inputan	Batasan	Inputan	Batasan	Inputan	Batasan	Inputan	Batasan	Inputan
3.25.06.2.01.01	**Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**0**		**20.000.000**		**20.000.000**		**20.000.000**		**20.000.000**
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen Usaha Pemasar & Pengolah Perikanan			0		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000
3.25.06.2.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**		**0**		**44.996.000**		**43.599.000**		**42.705.000**		**43.653.000**
Indikator Kegiatan : Persentase Fasilitasi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			0		44.996.000		43.599.000		42.705.000		43.653.000
3.25.06.2.02.01	**Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**		**0**		**44.996.000**		**43.599.000**		**42.705.000**		**43.653.000**
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah terbinanya pengusaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil (SIDa)			0		44.996.000		43.599.000		42.705.000		43.653.000
Indikator Program : Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)		547.124.000	547.124.000	1.005.990.000	1.005.990.000	1.004.357.000	1.004.357.000	1.014.289.000	1.014.289.000	1.024.906.000	1.024.906.000
3.25.06.2.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**		**547.124.000**		**1.005.990.000**		**1.004.357.000**		**1.014.289.000**		**1.024.906.000**
Indikator Kegiatan : Persentase Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			547.124.000		1.005.990.000		1.004.357.000		1.014.289.000		1.024.906.000

Kode Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Nama Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Target / Pagu									
		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026	
		Batasan	Inputan	Batasan	Inputan	Batasan	Inputan	Batasan	Inputan	Batasan	Inputan
3.25.06.2.03.01	**Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
3.25.06.2.03.02	**Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**547.124.000**		**1.005.990.000**		**1.004.357.000**		**1.014.289.000**		**1.024.906.000**
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan fasilitasi pelaku usaha perikanan di kawasan technopark (SIDa)			340.000.000		705.990.000		804.357.000		904.289.000		914.906.000
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah event lomba kreasi olahan ikan (SIDA)			100.000.000		150.000.000		50.000.000		55.000.000		55.000.000
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pelaksanaan gemar makan ikan (SIDa)			107.124.000		150.000.000		150.000.000		55.000.000		55.000.000
X.XX	**Non Urusan**		**5.393.283.000**		**5.128.453.000**		**5.134.864.000**		**5.183.991.000**		**5.026.107.000**
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**5.393.283.000**		**5.128.453.000**		**5.134.864.000**		**5.183.991.000**		**5.026.107.000**
Indikator Program :Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja		4.477.539.000	4.477.539.000	4.062.242.000	4.062.242.000	4.085.454.000	4.085.454.000	4.129.849.000	4.129.849.000	4.270.649.000	4.270.649.000
X.XX.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**22.500.000**		**22.500.000**		**22.500.000**		**30.500.000**		**22.500.000**
Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah			22.500.000		22.500.000		22.500.000		30.500.000		22.500.000
X.XX.01.2.01.01	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		**2.750.000**		**2.750.000**		**2.750.000**		**10.750.000**		**2.750.000**
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun			2.750.000		2.750.000		2.750.000		2.750.000		2.750.000

Kode Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Nama Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Target / Pagu									
		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026	
		Batasan	Inputan	Batasan	Inputan	Batasan	Inputan	Batasan	Inputan	Batasan	Inputan
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang disusun			0		0		0		8.000.000		0
X.XX.01.2.01.02	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**		**1.500.000**		**1.500.000**		**1.500.000**		**1.500.000**		**1.500.000**
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun			1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000
X.XX.01.2.01.07	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**18.250.000**		**18.250.000**		**18.250.000**		**18.250.000**		**18.250.000**
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun			2.750.000		2.750.000		2.750.000		2.750.000		2.750.000
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)			2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah			10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun			3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000
X.XX.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**4.455.039.000**		**4.039.742.000**		**4.062.954.000**		**4.099.349.000**		**4.248.149.000**
Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah			4.455.039.000		4.039.742.000		4.062.954.000		4.099.349.000		4.248.149.000
X.XX.01.2.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**		**4.393.539.000**		**3.978.242.000**		**4.001.454.000**		**4.037.849.000**		**4.186.649.000**
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN			4.393.539.000		3.978.242.000		4.001.454.000		4.037.849.000		4.186.649.000
X.XX.01.2.02.03	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**		**60.000.000**		**60.000.000**		**60.000.000**		**60.000.000**		**60.000.000**
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan			60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000
X.XX.01.2.02.05	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**		**1.500.000**		**1.500.000**		**1.500.000**		**1.500.000**		**1.500.000**
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun			1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000

Kode Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Nama Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Target / Pagu									
		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026	
		Batasan	Inputan	Batasan	Inputan	Batasan	Inputan	Batasan	Inputan	Batasan	Inputan
Indikator Program :Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		613.114.000	613.114.000	507.704.000	507.704.000	502.916.000	502.916.000	506.372.000	506.372.000	520.397.000	520.397.000
X.XX.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**9.500.000**		**9.500.000**		**9.500.000**		**9.500.000**		**9.500.000**
Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000
X.XX.01.2.05.02	**Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**		**9.500.000**		**9.500.000**		**9.500.000**		**9.500.000**		**9.500.000**
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah keikutsertaan dalam Pameran, Hakteknas dan Karnaval batik			9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000
X.XX.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**231.250.000**		**235.250.000**		**239.250.000**		**243.250.000**		**247.250.000**
Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah			231.250.000		235.250.000		239.250.000		243.250.000		247.250.000
X.XX.01.2.06.01	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**		**7.500.000**		**7.500.000**		**7.500.000**		**7.500.000**		**7.500.000**
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000
X.XX.01.2.06.02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**		**41.500.000**		**41.500.000**		**41.500.000**		**41.500.000**		**41.500.000**
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos			4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan			37.500.000		37.500.000		37.500.000		37.500.000		37.500.000
X.XX.01.2.06.03	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**		**4.250.000**		**4.250.000**		**4.250.000**		**4.250.000**		**4.250.000**
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga			4.250.000		4.250.000		4.250.000		4.250.000		4.250.000

Kode Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Nama Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Target / Pagu									
		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026	
		Batasan	Inputan	Batasan	Inputan	Batasan	Inputan	Batasan	Inputan	Batasan	Inputan
X.XX.01.2.06.04	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**		**65.000.000**		**66.000.000**		**67.000.000**		**68.000.000**		**69.000.000**
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman			65.000.000		66.000.000		67.000.000		68.000.000		69.000.000
X.XX.01.2.06.05	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**		**7.500.000**		**7.500.000**		**7.500.000**		**7.500.000**		**7.500.000**
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan			7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000
X.XX.01.2.06.06	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**		**2.500.000**		**2.500.000**		**2.500.000**		**2.500.000**		**2.500.000**
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan			2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000
X.XX.01.2.06.09	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**		**103.000.000**		**106.000.000**		**109.000.000**		**112.000.000**		**115.000.000**
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah			103.000.000		106.000.000		109.000.000		112.000.000		115.000.000
X.XX.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**372.364.000**		**262.954.000**		**254.166.000**		**253.622.000**		**263.647.000**
Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			372.364.000		262.954.000		254.166.000		253.622.000		263.647.000
X.XX.01.2.08.01	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**		**1.800.000**		**1.800.000**		**1.800.000**		**1.800.000**		**1.800.000**
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat			1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000
X.XX.01.2.08.02	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**		**240.211.000**		**159.854.000**		**148.316.000**		**145.022.000**		**152.047.000**
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			240.211.000		159.854.000		148.316.000		145.022.000		152.047.000
X.XX.01.2.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**		**130.353.000**		**101.300.000**		**104.050.000**		**106.800.000**		**109.800.000**

Kode Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Nama Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Target / Pagu									
		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026	
		Batasan	Inputan	Batasan	Inputan	Batasan	Inputan	Batasan	Inputan	Batasan	Inputan
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor			130.353.000		101.300.000		104.050.000		106.800.000		109.800.000
Indikator Program :Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah		302.630.000	302.630.000	558.507.000	558.507.000	546.494.000	546.494.000	547.770.000	547.770.000	235.061.000	235.061.000
X.XX.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**302.630.000**		**558.507.000**		**546.494.000**		**547.770.000**		**235.061.000**
Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			302.630.000		558.507.000		546.494.000		547.770.000		235.061.000
X.XX.01.2.09.01	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**		**97.574.000**		**100.000.000**		**110.000.000**		**120.000.000**		**120.000.000**
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala			97.574.000		100.000.000		110.000.000		120.000.000		120.000.000
X.XX.01.2.09.03	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar**		**16.000.000**		**26.000.000**		**16.000.000**		**16.000.000**		**16.000.000**
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah alat besar yang terpelihara secara rutin/berkala			16.000.000		26.000.000		16.000.000		16.000.000		16.000.000
X.XX.01.2.09.09	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**		**166.556.000**		**410.007.000**		**397.994.000**		**389.270.000**		**76.561.000**
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala			166.556.000		410.007.000		397.994.000		389.270.000		76.561.000
X.XX.01.2.09.10	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung**		**22.500.000**		**22.500.000**		**22.500.000**		**22.500.000**		**22.500.000**

Kode Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Nama Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Target / Pagu									
		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026	
		Batasan	Inputan	Batasan	Inputan	Batasan	Inputan	Batasan	Inputan	Batasan	Inputan
	Kantor atau Bangunan Lainnya										
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor			22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja DKP Kota Pekalongan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DKP Kota Pekalongan dalam rentang lima tahun 2021-2026 Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

7.1 Urusan Pemerintahan Pilihan

7.1.1 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

7.1.1.1 Program Perikanan Tangkap

Fokus program adalah Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), serta Pemberdayaan Nelayan Kecil. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI sebesar 6,15 persen dan Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI sebesar 6,15 persen.

7.1.1.2 Program Perikanan Budidaya

Fokus program adalah pengembangan kapasitas pembudi daya ikan kecil, serta penyediaan sarana prasarana pembudidayaan ikan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 6,15 persen.

7.1.1.3 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Fokus program adalah pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan, serta pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu peningkatan jumlah pengusaha perikanan sebesar 12,2 persen dan pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant) sebanyak 2 pelaku usaha.

Tabel 7. 1
Kinerja penyelenggaraan bidang urusan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pekalongan.

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
TUJUAN										
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	78	78,19	78.44	78.69	78.94	79.19	79.44	79,44
2	Pertumbuhan produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	persen	N/A	N/A	1%	1%	1%	1%	1%	5,10%
SASARAN										
	Nilai SAKIP OPD	indeks	78,46	80,00	81,50	83,00	84,50	86,00	87,50	87,50
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya dan Tangkap) Kab/Kota	ton	14.696	14.843	14.991	15.141	15.293	15.446	15.600	15.600 Ton
PROGRAM PERIKANAN TANGKAP										
4	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	Persen	-0.073	1	1%	1%	1%	1%	1%	6,07%
	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	persen	-0.0041	1	1%	1%	1%	1%	1%	6,15

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
PERIKANAN BUDIDAYA										
5	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Persen	-0,54	1	1%	1%	1%	1%	1%	5,58
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN										
6	Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	Persen	12,20	12,2	12,2%	12,2%	12,2%	12,2%	12,2%	12,2%
	Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)	Pelaku usaha	5	2	2	2	2	2	2	12

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi sebagai berikut :

Tabel 7. 2
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Realisasi s/d Tahun					Target Kondisi Akhir Renstra Th 2026	Capaian (%) dibandingkan target akhir renstra 2026
					2022	2023	2024	2025	2026		
TUJUAN											
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	78	78,19	90,6	92,08				79,44	115,9
2	Pertumbuhan produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	persen	N/A	N/A	1,01	-0,049				5,10	-0,96
SASARAN											
1	Nilai Evaluasi SAKIP	Indeks	78,46	80	82,15	83,05				87,50	94,91
2	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya dan Tangkap) Kab/Kota	Ton	14.696	14.843	10.535	10.123,79				15.600	64,89
PROGRAM PERIKANAN TANGKAP											
1	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	persen	-0.073	1	1,10	1,05				6,07	17,42

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Realisasi s/d Tahun					Target Kondisi Akhir Renstra Th 2026	Capaian (%) dibandingkan target akhir renstra 2026
					2022	2023	2024	2025	2026		
2	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	persen	-0.0041	1	1,88	1,73				6,15	28,15
PROGRAM PERIKANAN BUDIDAYA											
1	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	persen	-0,54	1	-17,99	-10,45				5,58	-187,4
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN											
1	Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)	Pelaku Usaha	5	2	2	4				12	33,33
2	Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	persen	12,12	12,12		26.73				12,12	219,14

Berdasarkan ***Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi*** disimpulkan bahwa capaian kinerja utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan adalah sebagai berikut sebagai berikut :

a. Indikator nilai Evaluasi SAKIP target akhir yang ditetapkan 87,5 indeks

Capaian kinerja nilai Evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan sebesar 82,15 sehingga prosentase capaiannya 94,91% atau mendapat pengukuran kinerja **"Sangat Berhasil"** apabila dibandingkan *dengan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi*.

b. Indikator Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya dan Tangkap) Kota Pekalongan dengan target akhir yang ditetapkan 15.600 ton

Capaian kinerja indikator "Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya dan Tangkap) Kota Pekalongan" terealisasi sebesar 10.535 Ton sehingga prosentase capaiannya sebesar 64,89% atau mendapat pengukuran kinerja **"Cukup Berhasil"** apabila dibandingkan *dengan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi*

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan merupakan:

1. Rencana Strategis (renstra) dinas merupakan salah satu cara dalam mendukung visi dan misi Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 ;
2. Program-program yang disusun merupakan penjabaran atas kebijakan yang telah ditentukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan ;
3. Rencana Strategis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan diharapkan dapat dievaluasi dan diukur berdasarkan kinerja pencapaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada periode tertentu secara berkala tiap tahunnya melalui Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.

Revisi Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan tahun 2021 - 2026 digunakan sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap kinerja yang telah ditetapkan, dan akan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Revisi Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan tahun 2021 – 2026 maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 07 Agustus 2024.

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOTA PEKALONANGAN

Drs. SUGIYO
Pembina Tk. I
NIP. 196805091995121002

LAMPIRAN 1

PEMETAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENSTRA 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PEKALONGAN
TERHADAP PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMUTAKHIRAN KEPMENDAGRI 050-5899 TAHUN 2021

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Renja Akhir 2025	
			Target	Pagu APBD
1	2	3	4	5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				**8.151.380.000**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	**Presentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**Persen**	**100**	**5.320.066.000**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**24.500.000**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	10.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	1.500.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15	13.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**3.645.820.000**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	25	3.588.710.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	55.510.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Laporan	1	1.600.000

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Renja Akhir 2025	
			Target	Pagu APBD
1	2	3	4	5
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Presentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**5.000.000**
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	5.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Presentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**persen**	**100**	**244.280.000**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	7.670.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	71.200.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4.750.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	42.760.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	6.570.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	1.830.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	80	109.500.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Presentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persen**	**100**	**546.168.000**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.600.000

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Renja Akhir 2025	
			Target	Pagu APBD
1	2	3	4	5
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	181.375.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	363.193.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Presentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**854.298.000**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	26	126.358.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	698.620.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	29.320.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**Peningkatan produksi perikanan tangkap bersumber dari TPI**	**persen**	**1**	**2.227.388.000**
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Presentase Sarpras Tangkap yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota**	**persen**	**5**	**117.454.000**
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	117.454.000
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit	1	-
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	1	-

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Renja Akhir 2025	
			Target	Pagu APBD
1	2	3	4	5
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Presentase Nelayan Kecil yang dibina**	**Persen**	**10**	**67.740.000**
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	30	32.190.000
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	19	35.550.000
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	**Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Tangkap yang bersumber dari TPI**	**persen**	**1**	**2.042.194.000**
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	353	2.042.194.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya**	**persen**	**1**	**181.988.000**
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Presentase ketercapaian aspek - aspek pengelolaan pembuddidayaan ikan kecil**	**persen**	**100**	**181.988.000**
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	8.470.000
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2	12.410.000
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1	126.588.000
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen	4	8.970.000

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Renja Akhir 2025	
			Target	Pagu APBD
1	2	3	4	5
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	30	25.550.000
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan**	**Persen**	**12,12**	**421.938.000**
	Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)	**pelaku usaha**	**2**	
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Presentase penyediaan dan penyaluran Bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerahh kabupaten/kota**	**persen**	**70**	**385.198.000**
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	30	385.198.000
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	**Presentase Fasilitasi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**persen**	**16,67**	**36.740.000**
Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	unit usaha	285	36.740.000

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

DINPERPA
KOTA PEKALONGAN

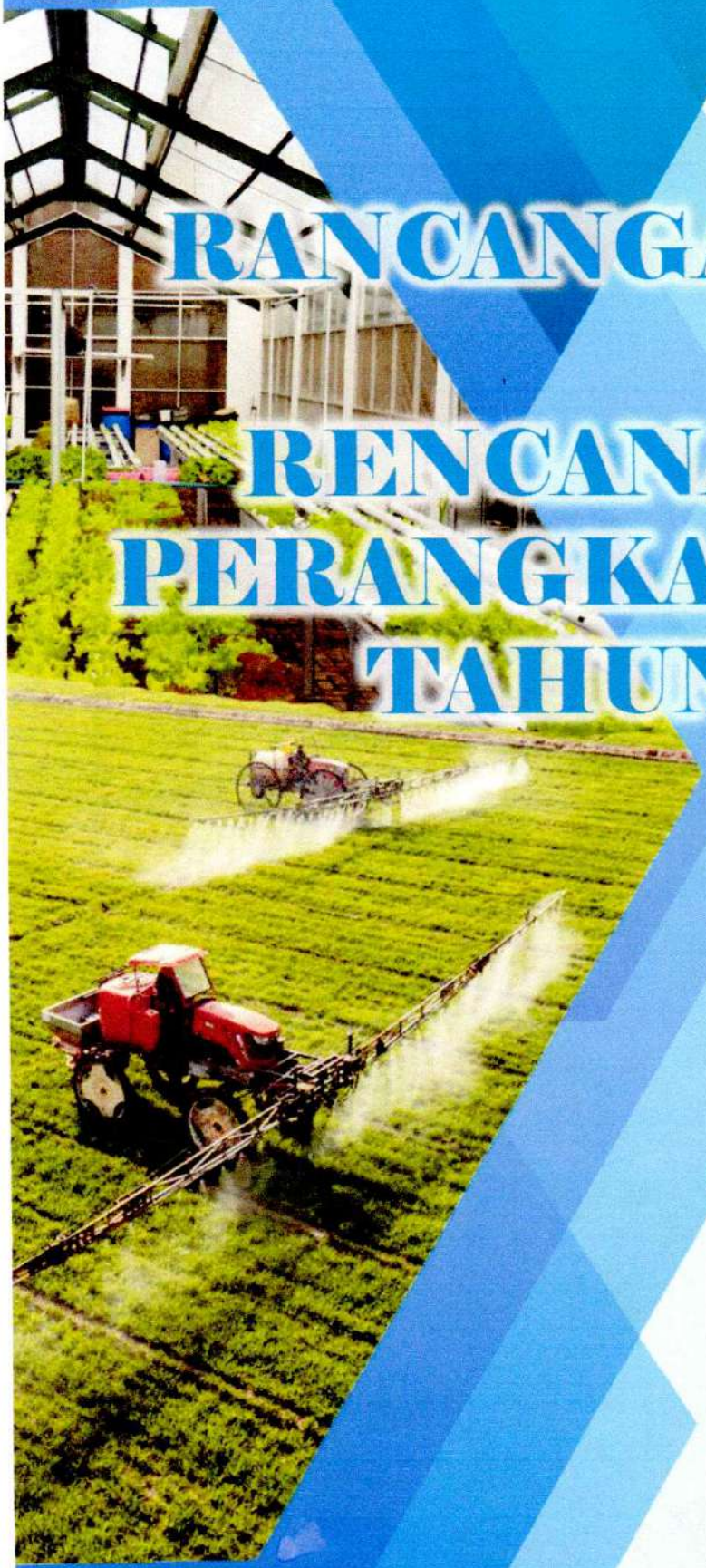

RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

www.dinperpa.pekalongankota.go.id

dinperpa.kotapekalongan@gmail.com

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Robbil Aalamiin kami panjatkan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan dapat menyusun Dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2025.

Dokumen Rencana Kerja ini disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, dan dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan serta visi Kota Pekalongan.

Atas kerjasama semua pihak akhirnya Dokumen Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2025, dapat disusun dan menjadi pedoman serta acuan bagi pelaksanaan pembangunan pertanian dan pangan di Kota Pekalongan Tahun 2025.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA PEKALONGAN

LILI SULISTYAWATI, S.Pi, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700711 199603 2 003

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar belakang 1

1.2. Landasan Hukum 4

1.3. Maksud dan Tujuan 11

1.4. Sistimatika Penulisan 11

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 13

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan capaian Renstra PD 13

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..16

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 17

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 22

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 23

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 23

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 25

3.3. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan 26

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 33

BAB V. PENUTUP 36

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. PENGERTIAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyusun Dokumen Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2025.

Rencana Kerja Tahunan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan ini mengacu pada kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan yaitu Mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri dan religius.

1.1.2. PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan.

   Persiapan penyusunan renja meliputi : (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rancangan Awal.

   Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah mencakup : Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

3. Penyusunan Rancangan.

   Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan Rancangan Awal RKPD.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah.

   Dilaksanakan oleh Kepala Daerah berkoordinasi dengan Bappeda Kota Pekalongan dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Awal.

   Perumusan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan perkada tentang RKPD. Perumusan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam perkada tentang RKPD.

6. Penetapan.

   Bappeda Kota Pekalongan menyampaikan seluruh Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan menjabarkan rencana kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tugas dan fungsi Dinas Daerah, Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan.

1.1.3. KETERKAITAN ANTARA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA.

Penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan dari rancangan awal Renja sampai akhir dipengaruhi oleh dokumen perencanaan lainnya yaitu Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan, rancangan awal RKPD, dan Rancangan akhir RKPD.

Pada penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan.

1. Berpedoman pada renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
2. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/ atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan.

Rancangan awal Renja kemudian disempurnakan menjadi Rancangan Renja. Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indicator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Rancangan Renja tersebut juga dibahas dan disempurnakan dalam forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappeda Kota Pekalongan untuk diverifikasi. Verifikasi tersebut harus dapat menjamin Rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Rancangan Renja hasil verifikasi tersebut akan dijadikan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

1.2. LANDASAN HUKUM

1.2.1. KETENTUAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) DAN KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH.

Berdasarkan Perda 5 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan, serta Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Daerah, Kedudukan, tugas, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan sebagai berikut :

Kedudukan

Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan merupakan unsur pelaksana kewenangan daerah di bidang Pertanian dan Pangan sesuai dengan arah kebijakan Walikota, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Pekalongan.

Tugas

Tugas melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang pertanian dan pangan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
3. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
5. penyusunan programa penyuluhan pertanian dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
6. penataan dan pengawasan prasarana pertanian;

7. pembinaan produksi di bidang pertanian dan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
8. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
9. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
10. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
11. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
12. pelaksanaan administrasi program dan kegiatan Dinperpa, dan ;
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya

Susunan Organisasi

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana diuraikan diatas, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan didukung oleh Pejabat-Pejabat dan staf yang tersebar pada jajaran/ komponen Sekretariat, Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Bidang Ketahanan Pangan. Jajaran komponen beserta unit satuan kerja masing-masing, diuraikan sebagai berikut :

a. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
c. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
d. Bidang Ketahanan Pangan.
e. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian & Pangan

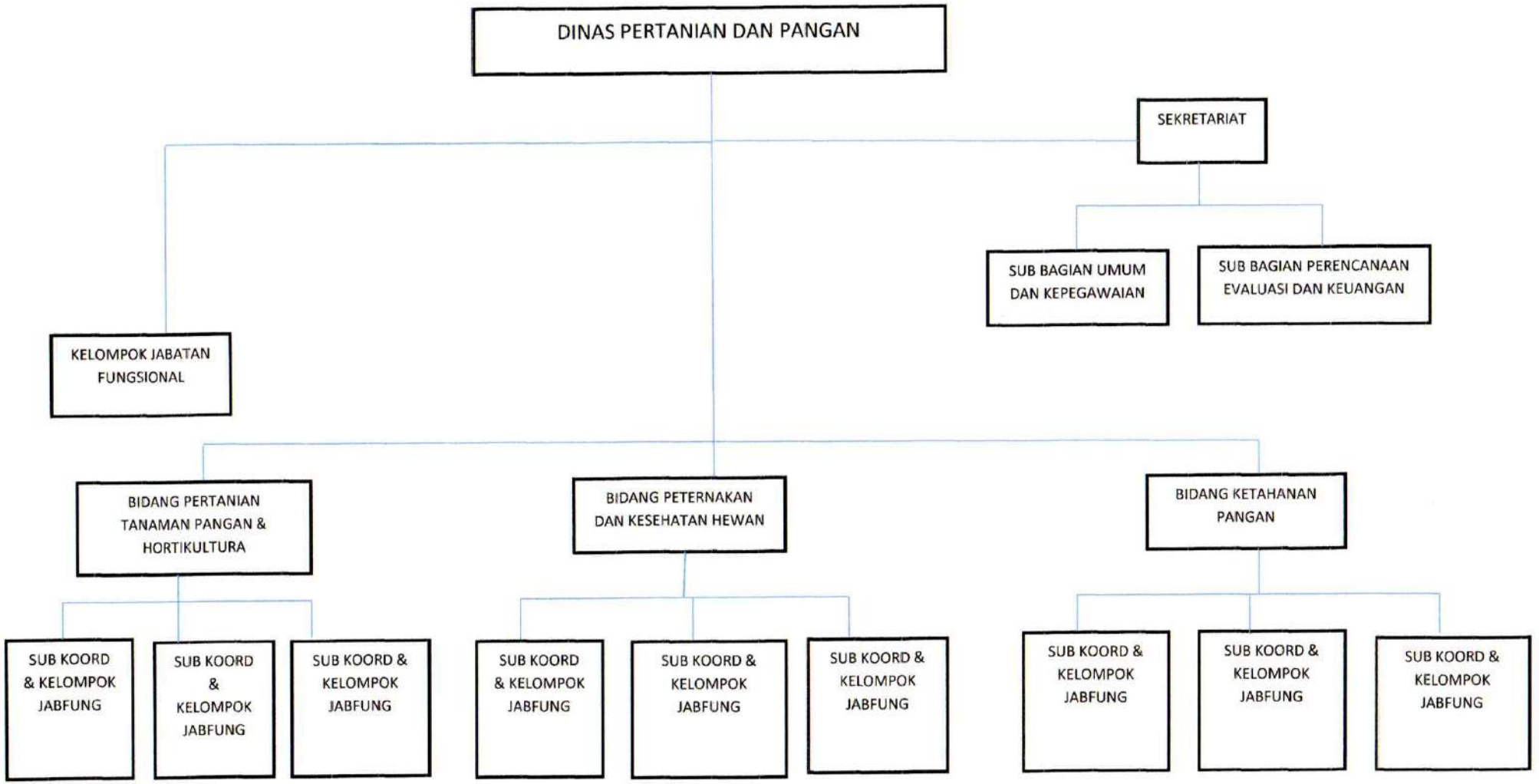

Sebagaimana Gambar 1.1, masing- masing unsur dari Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Sekretariat

a. Tugas :

Menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan.

b. Fungsi :

1. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, di urusan pertanian dan ketahanan pangan ;
2. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi ;
3. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan ;
4. Pengelolaan barang milik daerah/ kekayaan negara ; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

a. Tugas

Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

b. Fungsi

1. Perumusan program kerja bidang produksi tanaman pangan, hortikultura dan konservasi lahan dan air irigasi, pengembangan sarana prasarana dan alat mesin, bina usaha dan pemasaran hasil pertanian;
2. Penyusunan kebijakan teknis lingkup produksi tanaman pangan, hortikultura dan konservasi lahan dan air irigasi, pengembangan sarana prasarana dan alat mesin, bina usaha dan pemasaran hasil pertanian;
3. Penyelenggaraan program peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan konservasi lahan dan air irigasi, pengembangan sarana prasarana dan alat mesin, bina usaha dan pemasaran hasil pertanian;
4. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup produksi tanaman pangan, hortikultura dan konservasi lahan dan air irigasi,

pengembangan sarana prasarana dan alat mesin, bina usaha dan pemasaran hasil pertanian;

5. Penyelenggaraan pemberian rekomendasi di bidang produksi, tanaman pangan, hortikultura dan konservasi lahan dan air irigasi, pengembangan sarana prasarana dan alat mesin, bina usaha dan pemasaran hasil pertanian;
6. Perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
7. Pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

a. Tugas :

menyelenggarakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

b. Fungsi

1. perumusan program kerja bidang produksi dan usaha peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perternakan serta kesehatan hewan;
2. penyusunan kebijakan di bidang produksi dan usaha peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perternakan serta kesehatan hewan;
3. penyelenggaraan perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
4. penyelenggaraan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
5. penyelenggaraan pengawasan peredaran dan pengunaan serta sertifikasi bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
6. penyelenggaraan pemberian rekomendasi teknis perijinan/sertifikasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
7. penyelenggaraan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
8. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
9. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan

10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

4. Bidang ketahanan pangan

a. Tugas

Menyelenggarakan penyusunan pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Ketahanan Pangan.

b. Fungsi

1. perumusan program kerja bidang ketahanan pangan;
2. penyusunan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
3. pengkoordinasian penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah; Pengkoordinasian penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
4. Pengkoordinasian pengelolaan Keamanan Pangan kabupaten/ kota;
5. Pengkoordinasian penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi;
6. Penyelenggaraan evaluasi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
7. Penyelenggaraan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
8. Pengkoordinasian penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota;
9. Pengkoordinasian pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Keamanan Pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam daerah;
10. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar;
11. Pengkoordinasian upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di seksi ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, Keamanan Pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
12. Perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
13. Pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan

    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1.2.2. KETENTUAN TENTANG PERENCANAAN.

Adapun peraturan yang menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan adalah:

1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.2.3. KETENTUAN TENTANG PENGANGGARAN.

Peraturan yang menjadi pedoman dalam penganggaran adalah :

1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ;
2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah memberikan arah sekaligus pedoman bagi Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran OPD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra PD secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan :

1. Memberikan gambaran kemampuan OPD dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan akan dijadikan sebagai alat observasi untuk melakukan instropeksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pejabat/ Pimpinan Instansi.
2. Memberikan arah kebijakan tentang gambaran pelaksanaan tugas- tugas OPD serta indicator atau ukuran keberhasilan/ atau kegagalan pada tahun 2025.
3. Memberikan arah/ acuan dalam penyusunan program/ kegiatan pembangunan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2025.

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Sistimatika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistimatika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan pangan Kota Pekalongan selama Tahun 2023 dan tahun berjalan 2024 serta perkiraan target anggaran tahun 2025.

Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan renja Perangkat daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2023 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2023 telah dilaksanakan dan untuk mengetahui hasil- hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan pencapaian Renstra PD adalah untuk mengidentifikasikan sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasikan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Secara rinci rekapitulasi evaluasi Rencana Kerja PD dan Renstra sampai dengan Tahun 2023 dan Rencana Kerja Tahun 2024 akan dijabarkan dalam tabel lebih lanjut.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel T-C.29 dibawah ini.

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian renstra PD s/d Tahun 2023
pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan

No.	Indikator Program/Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2021-2026)	Target akhir Renstra	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d. Tahun 2023	Persentase Capaian target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Realisasi 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan										
1	Persentase cadangan pangan daerah	Persen	4,3	4,8	2,92	4,40	4,45	16,71	101,18	tercapai
2	Persentase kecamatan tahan pangan di kota Pekalongan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	tercapai
3	Persentase pangan segar yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	Persen	80	88	100	83,20	91,73	91,73	110,25	tercapai
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian.										
4	Nilai produksi pertanian pertahun	Miliar Rupiah	55,56	55,84	50,68	55,67	59,29	59,29	106,5	tercapai
5	Nilai produksi peternakan pertahun	Miliar Rupiah	180,84	203,65	644,18	191,91	259,62	259,62	151,50	tercapai
6	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	Persen	100	100	100	100	100	100	100	tercapai
7	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	5,00	5,00	-63,46	68,81	68,81	68,81	97,89	Tidak tercapai
8	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	Persen	0	100	100	100	100	100	100	tercapai
9	persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	Persen	0	5	36,36	27,16	49,38	63,63	98,77	Tidak tercapai
10	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	Persen	0	5,00	8,70	4,16	4,16	18,18	100	tercapai

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.										
11	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100	100	98,67	98,50	100	100	100	tercapai
12	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	64,47	64,47	102,61	102,61	102,61	tercapai
13	Persentase pengadaan/pemelihar aan barang milik daerah	Persen	100	100	96,08	96,08	91,68	91,68	91,68	Tidak tercapai

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Adapun hasil pengukuran kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dapat dilihat pada tabel T-C.30. dibawah ini :

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase ketersediaan pangan (ter sedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Tidak ada	-Jumlah cadangan pangan. -Jumlah kebutuhan pangan	92,01	102	85	86	92,01	102,01	85	86	
2.	Produktivitas pertanian perhektar pertahun	Tidak ada	-Jumlah produksi pertanian pangan	3	5	6	6	6	6	6	6	

			perhektar pertahun -Luas panen									
3.	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Tidak ada	-Jumlah (t)-(t-1) / (t-1)	2432	2432	2400	2400	2432	2432	2400	2400	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

Dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya Dinas Pertanian dan pangan Kota Pekalongan dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain :

1. Masih belum beragamnya konsumsi pangan masyarakat di Kota Pekalongan, tercermin dari skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Kota Pekalongan yang masih belum mencapai skor 100 (skor Tahun 2023 baru mencapai 93,7 skor). Hal ini perlu diatasi dengan berbagai upaya diantaranya yaitu melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap pentingnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) serta peningkatan ketrampilan dalam pengolahan pangan berbasis pangan lokal dan berbagai upaya diversifikasi pangan lainnya baik melalui sosialisasi, lomba maupun pelatihan.
2. Jumlah cadangan pangan daerah Pemerintah Kota Pekalongan yang belum sesuai dengan jumlah yang dianjurkan berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional RI No. 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.
3. Masih kurangnya dukungan pemerintah daerah dan lintas sektoral dalam pembangunan ketahanan pangan.
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk olahan pangan variasi. Hal ini perlu diatasi dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya konsumsi pangan B2SA dan upaya meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam upaya diversifikasi pangan melalui sosialisasi, lomba dan pelatihan. untuk olahan pangan variasi melalui sosialisasi dan pelatihan;
5. Faktor alam berupa banjir hujan/ air pasang (rob), mengakibatkan lahan pertanian yang terdampak rob dengan kadar salinitas yang lebih tinggi dari normal. Solusi

permasalahan tersebut dengan mengajukan bantuan bibit padi tahan salinitas tinggi ke Pemerintah Pusat sebagai upaya agar petani yang terdampak rob tetap bisa melakukan usaha tani ;

6. Lokasi Kota Pekalongan yang berada di pesisir Pantai, mengakibatkan pengairan air irigasi pertanian mengandalkan kiriman dari wilayah sekitar, sehingga saat musim kemarau, volume air yang sampai ke Pekalongan jumlahnya berkurang, sementara kondisi irigasi yang ada juga sudah banyak yang mengalami penyempitan/ pendangkalan.
7. Kesadaran para petani untuk menanam secara serentak dalam 1 (satu) area yang kurang, sehingga resiko serangan hama dimungkinkan silih berganti.
8. Pemanfaatan alsintan yang masih terbatas, dimana petani masih mengandalkan tenaga manusia, dari pembenihan hingga panen, yang membutuhkan biaya besar, sementara tenaga kerja sudah mulai berkurang.
9. Menyempitnya lahan budidaya ternak di wilayah Kota Pekalongan, oleh karena itu perlu dilakukan intensifikasi usaha ternak dengan memanfaatkan teknologi berwawasan lingkungan ;
10. Merebaknya isu penyakit hewan menular baru (New Emerging Disease), maka perlu dilakukan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular strategis dengan konsep One Health, terpadu bersama instansi terkait kesehatan dan lembaga pendidikan ;
11. Penjualan bahan pangan asal hewan yang kurang memenuhi syarat ASUH di pasar tradisional, terutama pasar darurat Banjarsari. Permasalahan ini diatasi dengan meningkatkan peran masyarakat dan aparatur pengawas dalam proses penyediaan bahan pangan asal hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal ;
12. Permintaan alih fungsi lahan pertanian yang relative tinggi. Sehingga perlu dilakukan pencermatan kondisi lapangan dan hanya memberikan rekomendasi AFL apabila lahan dimaksud peruntukan diluar non pertanian sesuai RTRW Kota Pekalongan ;
13. Penggunaan Kartu tani dalam penebusan pupuk bersubsidi masih sangat kurang. Oleh karena itu perlu ada upaya mendorong semua petani untuk menggunakan Kartu Tani dalam penebusan pupuk bersubsidi dan bersinergi dengan pihak- pihak terkait dalam pelaksanaan di lapangan ;

Adapun peluang yang dimiliki Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan adalah antara lain :

1. Kesempatan untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat untuk bersertifikat, khususnya untuk padi khusus dan tahan salinitas ;
2. Dukungan dari pihak- pihak terkait dalam pelaksanaan implementasi penggunaan kartu tani dalam penebusan pupuk bersubsidi ;
3. Animo masyarakat yang cukup tinggi untuk mengikuti edukasi pertanian sejak dini, dengan mengirimkan siswa PAUD/TK/SD ke Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan ;
4. Penambahan alokasi pupuk subsidi bagi petani.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD diperlukan dengan tujuan agar OPD dapat membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan OPD pada Tahun 2025.

Adapun hasil perbandingan review terhadap rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel T-C.31 dibawah ini :

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				254.973.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				254.973.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				254.973.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				254.973.000
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	*Persentase cadangan pangan daerah*		4,70 persen	194.955.000	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	*Persentase cadangan pangan daerah*		4,70 persen	194.955.000
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Persentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya yang dilaksanakan*		100 persen	69.400.000	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Persentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya yang dilaksanakan*		100 persen	69.400.000
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	*Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia*	Kota Pekalongan	1 laporan	32.600.000	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	*Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia*	Kota Pekalongan	1 laporan	32.600.000
Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	*Informasi Harga dan Pasokan Pangan*	Kota Pekalongan	12 dokumen	16.800.000	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	*Informasi Harga dan Pasokan Pangan*	Kota Pekalongan	12 dokumen	16.800.000
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	*Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)*	Kota Pekalongan	1 dokumen	20.000.000	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	*Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)*	Kota Pekalongan	1 dokumen	20.000.000
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Jumlah cadangan pangan daerah*		4500 kg	125.555.000	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Jumlah cadangan pangan daerah*		4500 kg	125.555.000
Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	*Rencana Kebutuhan Pangan Lokal*	Kota Pekalongan	1 dokumen	25.000.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	*Rencana Kebutuhan Pangan Lokal*	Kota Pekalongan	1 dokumen	25.000.000
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota*	Kota Pekalongan	4,5 ton	100.555.000	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota*	Kota Pekalongan	4,5 ton	100.555.000
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan	*Jumlah pelaksanaan pendampingan kelompok*		3 kegiatan	53.127.000	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan	*Jumlah pelaksanaan pendampingan kelompok*		3 kegiatan	53.127.000

Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*pemberdayaan pekarangan*				Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*pemberdayaan pekarangan*			
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	*Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*	Kota Pekalongan	1 laporan	53.127.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	*Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*	Kota Pekalongan	1 laporan	53.127.000
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	*Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan*		100 persen	17.916.000	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	*Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan*		100 persen	17.916.000
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Jumlah kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan*		4 kecamatan	17.916.000	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Jumlah kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan*		4 kecamatan	17.916.000
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	*Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan*	Kota Pekalongan	1 dokumen	17.916.000	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	*Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan*	Kota Pekalongan	1 dokumen	17.916.000
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	*Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan*		86,4 persen	42.102.000	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	*Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan*		86,4 persen	42.102.000
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan*		26 sampel	42.102.000	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan*		26 sampel	42.102.000
Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota*	Kota Pekalongan	1 dokumen	42.102.000	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota*	Kota Pekalongan	1 dokumen	42.102.000
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				7.244.300.000	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				7.244.300.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				7.244.300.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				7.244.300.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja*		100 persen	7.244.300.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja*		100 persen	7.244.300.000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*		100 persen	31.350.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*		100 persen	31.350.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Kota Pekalongan	3 dokumen	12.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Kota Pekalongan	3 dokumen	12.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	Kota Pekalongan	2 dokumen	1.650.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	Kota Pekalongan	2 dokumen	1.650.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Kota Pekalongan	15 laporan	17.700.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Kota Pekalongan	15 laporan	17.700.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah*		100 persen	6.067.694.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah*		100 persen	6.067.694.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Kota Pekalongan	40 orang/ bulan	5.984.873.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Kota Pekalongan	40 orang/ bulan	5.984.873.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	Kota Pekalongan	12 dokumen	81.171.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	Kota Pekalongan	12 dokumen	81.171.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	Kota Pekalongan	1 laporan	1.650.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	Kota Pekalongan	1 laporan	1.650.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah*		100 persen	9.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah*		100 persen	9.500.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	Kota Pekalongan	1 paket	9.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	Kota Pekalongan	1 paket	9.500.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian*		100 persen	142.955.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian*		100 persen	142.955.000

	administrasi umum perangkat daerah					*administrasi umum perangkat daerah*			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	Kota Pekalongan	4 paket	1.250.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	Kota Pekalongan	4 paket	1.250.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Kota Pekalongan	4 paket	36.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Kota Pekalongan	4 paket	36.500.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	Kota Pekalongan	4 paket	2.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	Kota Pekalongan	4 paket	2.500.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	Kota Pekalongan	4 paket	40.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	Kota Pekalongan	4 paket	40.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	Kota Pekalongan	13 paket	10.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	Kota Pekalongan	13 paket	10.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	Kota Pekalongan	1 dokumen	2.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	Kota Pekalongan	1 dokumen	2.500.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Kota Pekalongan	159 laporan	50.205.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Kota Pekalongan	159 laporan	50.205.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*		100 persen	270.174.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*		100 persen	270.174.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Kota Pekalongan	4 laporan	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Kota Pekalongan	4 laporan	2.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Kota Pekalongan	12 laporan	120.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Kota Pekalongan	12 laporan	120.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Kota Pekalongan	12 laporan	148.174.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Kota Pekalongan	12 laporan	148.174.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*		100 persen	56.700.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*		100 persen	56.700.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	Kota Pekalongan	28 unit	38.200.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	Kota Pekalongan	28 unit	38.200.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Kota Pekalongan	1 unit	8.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Kota Pekalongan	1 unit	8.500.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Kota Pekalongan	2 unit	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Kota Pekalongan	2 unit	10.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah	*Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dibangun*	Kota Pekalongan	100 persen	665.927.000	Pengadaan Barang Milik Daerah	*Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dibangun*	Kota Pekalongan	100 persen	665.927.000
Pembangunan Gedung Kantor	*Jumlah Gedung Kantor yang dibangun*	Kota Pekalongan	2 unit	665.927.000	Pembangunan Gedung Kantor	*Jumlah Gedung Kantor yang dibangun*	Kota Pekalongan	2 unit	665.927.000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	*Nilai produksi pertanian pertahun Nilai produksi peternakan pertahun*		199,66 miliar rupiah/ 55,78 miliar rupiah	236.237.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	*Nilai produksi pertanian pertahun Nilai produksi peternakan pertahun*		199,66 miliar rupiah/ 55,78 miliar rupiah	0
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian*		100 persen	105.515.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian*		100 persen	95.360.000
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana*	Kota Pekalongan	12 laporan	105.515.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana*	Kota Pekalongan	12 laporan	95.360.000

	Pendukung Pertanian					*Pendukung Pertanian*			
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase pelaksanaan kegiatan pengelolaan SDG hewan, tumbuhan dan mikroorganisme wewenang kabupaten/kota*		100 persen	77.260.000	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase pelaksanaan kegiatan pengelolaan SDG hewan, tumbuhan dan mikroorganisme wewenang kabupaten/kota*		100 persen	53.573.000
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	*Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman*	Kota Pekalongan	1 dokumen	25.000.000	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	*Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman*	Kota Pekalongan	1 dokumen	13.470.000
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	*Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian*	Kota Pekalongan	3 varietas unggul baru (VUB)	52.260.000	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	*Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian*	Kota Pekalongan	3 varietas unggul baru (VUB)	40.103.000
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota*		5 kali	36.462.000	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota*		5 kali	36.462.000
Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	*Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar*	Kota Pekalongan	6 laporan	20.500.000	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	*Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar*	Kota Pekalongan	6 laporan	20.500.000
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kenaikan pelayanan ULIB*		5 persen	17.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kenaikan pelayanan ULIB*		5 persen	17.000.000
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	*Jumlah benih/bibit ternak yang beredar*	Kota Pekalongan	200 laporan	17.000.000	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	*Jumlah benih/bibit ternak yang beredar*	Kota Pekalongan	200 laporan	17.000.000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	*Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian*		100 persen	579.407.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	*Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian*		100 persen	0
Pembangunan Prasarana Pertanian	*Persentase prasarana yang digunakan (IKK Output)*		100 persen	579.407.000	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Persentase prasarana yang digunakan (IKK Output)*		100 persen	0
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	*Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	Kota Pekalongan	2 unit	244.407.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	*Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	Kota Pekalongan	2 unit	0
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	*Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi*	Kota Pekalongan	1 unit	315.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	*Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi*	Kota Pekalongan	1 unit	0
Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	*Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi*	Kota Pekalongan	1 unit	16.466.000	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	*Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi*	Kota Pekalongan	1 unit	16.466.000
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	*Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular*		5 persen	227.080.000	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	*Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular*		5 persen	227.080.000
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Kejadian penyakit hewan menular (PHM) yang tertangani*		800 kasus	56.000.000	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Kejadian penyakit hewan menular (PHM) yang tertangani*		800 kasus	56.000.000
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota*	Kota Pekalongan	12 laporan	56.000.000	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota*	Kota Pekalongan	12 laporan	56.000.000
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pengawasan peredaran penjualan ternak*		100 persen	15.000.000	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pengawasan peredaran penjualan ternak*		100 persen	15.000.000
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan,	*Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan*	Kota Pekalongan	6 laporan	15.000.000	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan,	*Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan*	Kota Pekalongan	6 laporan	15.000.000

Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	*dan/atau pengeluaran HPM*				Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	*dan/atau pengeluaran HPM*			
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah hewan yang tertangani di PUSKESWAN*		500 ekor	35.000.000	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah hewan yang tertangani di PUSKESWAN*		500 ekor	35.000.000
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	*Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner*	Kota Pekalongan	12 laporan	35.000.000	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	*Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner*	Kota Pekalongan	12 laporan	35.000.000
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Persentase penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner pada pelaku usaha*		100 persen	121.080.000	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Persentase penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner pada pelaku usaha*		100 persen	121.080.000
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	*Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan*	Kota Pekalongan	1 laporan	37.500.000	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	*Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan*	Kota Pekalongan	1 laporan	37.500.000
Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	*Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik*	Kota Pekalongan	12 unit usaha	83.580.000	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	*Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik*	Kota Pekalongan	12 unit usaha	83.580.000
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	*Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota*		100 persen	53.746.000	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	*Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota*		100 persen	0
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian/peternakan*		4 kali	53.746.000	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian/peternakan*		4 kali	0
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	*Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan*	Kota Pekalongan	4 kali	25.000.000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	*Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan*	Kota Pekalongan	4 kali	13.300.000
Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	*Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan*	Kota Pekalongan	2 laporan	28.746.000	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	*Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan*	Kota Pekalongan	2 laporan	28.746.000
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	*persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin*		5 persen	31.352.000	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	*persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin*		5 persen	31.352.000
Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	*Persentase penurunan jumlah usaha pemotongan hewan yang tidak berijin*		5 persen	31.352.000	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	*Persentase penurunan jumlah usaha pemotongan hewan yang tidak berijin*		5 persen	31.352.000
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	*Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi*	Kota Pekalongan	1 laporan	31.352.000	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	*Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi*	Kota Pekalongan	1 laporan	31.352.000
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	*Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun*		5 persen	67.184.000	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	*Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun*		5 persen	35.707.000
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Persentase pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan kelembagaan petani*		100 persen	67.184.000	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Persentase pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan kelembagaan petani*		100 persen	35.707.000
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	Kota Pekalongan	1 unit	25.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	Kota Pekalongan	1 unit	12.850.000
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	Kota Pekalongan	1 unit	42.184.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	Kota Pekalongan	1 unit	22.857.000
			Jumlah :	8.694.279.000				Jumlah :	8.694.279.000

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.

Usulan program/ kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2025 merupakan perwujudan dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun dari pelaksanaan Musrenbang.

Adapun usulan program/ kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel T-C.32. sebagaimana dibawah ini :

Tabel T-C.32
Program/ Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/volume	Catatan
1	Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, Kegiatan Pembangunan prasarana pertanian Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Saluran air belakang KUA sampai Perumahan Tata Kahuripan Kel. Kuripan Kertoharjo, Kota Pekalongan	Terbangunnya talud untuk saluran irigasi	P= 200 m	Mendukung upaya peningkatan produksi padi di Kota Pekalongan
2	Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, Kegiatan Pembangunan prasarana pertanian Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Belakang RPSBM Kel. Kuripan Kertoharjo, Kota Pekalongan	Terbangunnya pavingisasi dengan peninggian.	75 m2.	Mendukung upaya peningkatan produksi padi di Kota Pekalongan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

4.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.

Sektor pertanian masih menjadi sector penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sector pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi sector pertanian dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industry, penyumbang PDB, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyedia bahan pakan dan bioenergy, serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Sejalan dengan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045, pembangunan sector pertanian ke depan akan mengacu pada paradigma pertanian untuk pembangunan (Agriculture for Development) yang memposisikan sector pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tata kelola pembangunan. Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sector pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang lebih luas dan multi fungsi. Selain sebagai sector utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sector pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan social (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyedia sarana wisata (agrowisata). Memposisikan sector pertanian dalam pembangunan nasional merupakan kunci utama keberhasilan dalam mewujudkan Indonesia yang bermartabat, mandiri, maju, adil dan makmur.

NAWA CITA atau agenda prioritas kabinet kerja mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat.

Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal :

1. Mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri ;
2. Mengatur kebijakan pangan secara mandiri ;
3. Melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan.

Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Sasaran strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2045 adalah :

1. Pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi gula dan daging ;
2. Peningkatan diversifikasi pangan ;
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor ;
4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergy ;
5. Peningkatan pendapatan keluarga petani ;
6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Dengan sasaran strategis tersebut, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan 7 strategi utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) meliputi :

1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan ;
2. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian ;
3. Pengembangan dan perluasan logistic benih/ bibit ;
4. Penguatan kelembagaan petani ;
5. Pengembangan dan penguatan pembiayaan ;
6. Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergy ;
7. Penguatan jaringan pasar produk pertanian.

Langkah operasional yang diterapkan selama program Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas padi, jagung, kedelai ;
2. Peningkatan produksi dan produktivitas tebu ;
3. Peningkatan produksi dan produktivitas daging ;
4. Peningkatan diversifikasi pangan ;
5. Peningkatan nilai tambah, daya saing, ekspor dan substitusi impor ;
6. Peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura yang berdaya saing ;
7. Peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan yang berdaya saing ;
8. Penyediaan bahan baku dan bioenergy ;
9. Peningkatan kesejahteraan petani.

Sedangkan untuk mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, maka ditetapkan visi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yaitu : " Menjadi Lembaga yang handal dan professional dalam memantapkan Ketahanan Pangan Masyarakat yang Berbasis Sumber Daya Lokal Menuju Kemandirian Jawa Tengah ".

Misi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yaitu :

1. Mewujudkan tata kelola lembaga yang baik berbasis teknologi informasi didukung oleh sumberdaya aparatur yang kompeten dan berintegritas tinggi ;
2. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan serta penanganan kerawanan pangan ;
3. Meningkatkan penganekaragaman dan mutu pangan.

Dengan demikian, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan dalam menentukan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan mempedomani Renstra Kementerian Pertanian. Terutama dalam hal meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan serta penanganan kerawanan pangan, meningkatkan penganekaragaman dan mutu pangan.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam menyusun pembangunan pertanian dan pangan selama 1 (satu) tahun ke depan. Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan yaitu tersusunnya sasaran strategis, program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.

Tujuan dikembangkan berdasarkan kriteria :

- Akseptabilitas, dapat diterima oleh seluruh stakeholders
- Fleksibilitas, mudah disesuaikan dengan tuntutan perubahan
- Dapat diukur
- Pendorong kinerja
- Kesesuaian dengan visi dan misi
- Mudah dipahami

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan menetapkan tujuan masing- masing misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dan persyaratan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun, yang bersifat idealistic mengandung nilai-nilai dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Tujuan akan mempertajam focus pelaksanaan fungsi lembaga dan menggerakkan prioritas semua kebijakan program maupun kegiatan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu gambaran dari suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan melalui tindakan- tindakan yang akan dilakukan. Sasaran untuk memberikan focus pada penyusunan program dan kegiatan yang bersifat spesifik, rinci dapat diukur dan dicapai.

Keberhasilan pencapaian berbagai sasaran sangat penting ditinjau untuk :

- Meletakkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan ;
- Menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh.

Selanjutnya untuk menjamin keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan menetapkan tujuan dan sasaran yang dijabarkan sebagai berikut :

Uraian Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Skor PPH Konsumsi	Optimalnya penanganan rawan pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	100 %
Meningkatkan Produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Persentase peningkatan Produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Meningkatnya nilai Produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Nilai Produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	100 %

Keterkaitan Tujuan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan dengan RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut :

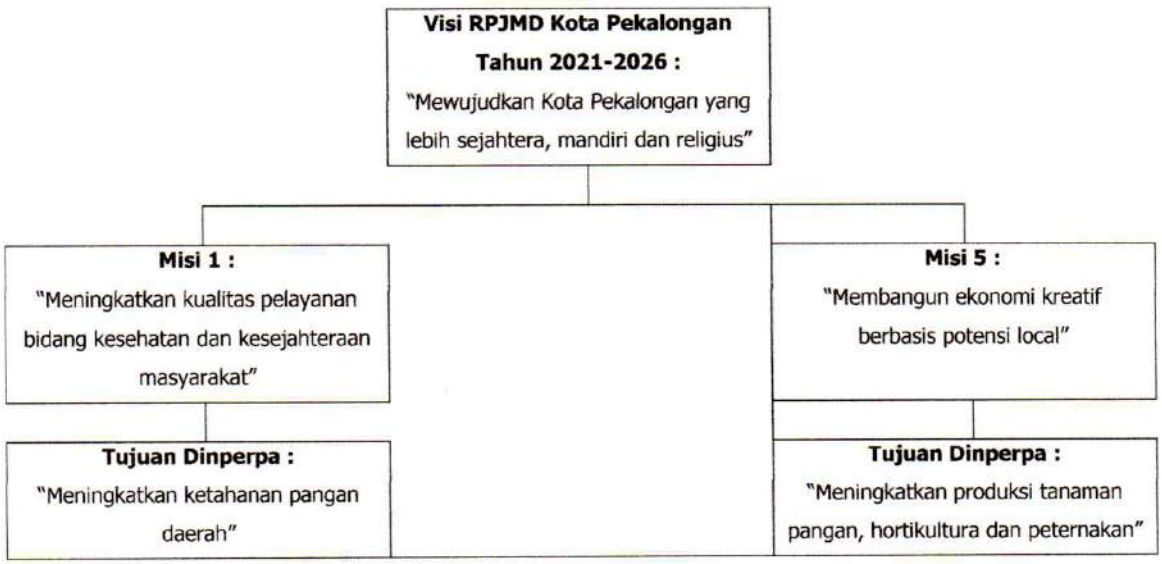

4.3. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN.

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan kegiatan dijabarkan dalam beberapa sub kegiatan. Program Perangkat Daerah merupakan program-program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perumusan kegiatan mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut :

1. Pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025.
2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025.
3. Prioritas pengembangan system pertanian dan pangan yang diwujudkan dalam kegiatan.

Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekalongan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang pertanian (Tanaman pangan, hortikultura, ketahanan pangan, peternakan). Maka dalam menetapkan program kegiatan harus mendukung visi, misi, tujuan, sasaran dan program Pemerintah Kota Pekalongan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan dan mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pekalongan, maka disusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2025 sebagaimana diuraikan diatas maka diperlukan rumusan program/ kegiatan/ Sub kegiatan. Dalam merumuskan program/ kegiatan / sub kegiatan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2025, ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunannya, antara lain :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Visi dan misi Walikota Pekalongan Tahun 2025 ditetapkan dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 ;
3. Program Nasional Kementerian/ Lembaga terkait dalam rangka percepatan mandiri pangan/ ketahanan pangan ;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan lintas sector pertanian dan ketahanan pangan dengan sector lain ;

5. Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan ;
6. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan masyarakat dan potensi sumber daya pertanian yang tersedia.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2025 beserta anggaran dapat dilihat pada tabel T-C.33. sebagaimana dibawah ini :

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				359.770.000,-				263.178.000,-
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				359.770.000,-				263.178.000,-
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	*Persentase cadangan pangan daerah*		4,70 persen	296.439.000,-			4,80 persen	202.252.000,-
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Persentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya yang dilaksanakan*		100 persen	129.157.000,-			100 persen	69.400.000,-
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	*Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia*	Kota Pekalongan	1 Laporan	106.747.000,-	DTU-DAU		1 Laporan	32.600.000,-
2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	*Informasi Harga dan Pasokan Pangan*	Kota Pekalongan	12 Dokumen	10.140.000,-	DTU-DAU		12 Dokumen	16.800.000,-
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	*Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)*	Kota Pekalongan	1 Dokumen	12.270.000,-	DTU-DAU		1 Dokumen	20.000.000,-
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Jumlah cadangan pangan daerah*		4500 Kg	114.155.000,-			5625 Kg	132.322.000,-
2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	*Rencana Kebutuhan Pangan Lokal*	Kota Pekalongan	1 Dokumen	8.155.000,-	DTU-DAU		1 Dokumen	25.000.000,-
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota*	Kota Pekalongan	4,5 Ton	106.000.000,-	DTU-DAU		10 Ton	107.322.000,-
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Jumlah pelaksanaan pendampingan kelompok pemberdayaan pekarangan*		3 kegiatan	53.127.000,-			3 kegiatan	530.000.000,-
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	*Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*	Kota Pekalongan	1 Laporan	53.127.000,-	DTU-DAU		1 Laporan	530.000.000,-
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	*Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan*		100,00 persen	35.881.000,-			100,00 persen	18.187.000,-
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Jumlah kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan*		4 kecamatan	35.881.000,-			4 kecamatan	18.187.000,-
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	*Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan*	Kota Pekalongan	1 Dokumen	35.881.000,-	DTU-DAU		1 Dokumen	18.187.000,-

2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	*Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan*		86,40 persen	27.450.000,-			88,00 persen	42.739.000,-
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan*		26 sample	27.450.000,-			26 sample	42.739.000,-
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota*	Kota Pekalongan	1 Dokumen	27.450.000,-	DTU-DAU		1 Dokumen	42.739.000,-
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				7.677.539.000,-				7.418.530.000,-
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				7.677.539.000,-				7.418.530.000,-
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja*		100 persen	5.860.462.000,-			100 persen	6.800.586.000,-
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*		100 persen	20.433.000,-			100 persen	23.850.000,-
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Kota Pekalongan	2 Dokumen	3.915.000,-	DTU-DAU		2 Dokumen	4.500.000,-
3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	Kota Pekalongan	2 Dokumen	3.690.000,-	DTU-DAU		2 Dokumen	1.650.000,-
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Kota Pekalongan	15 Laporan	12.828.000,-	DTU-DAU		15 Laporan	17.700.000,-
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah*		100 persen	5.059.045.000,-			100 persen	6.286.975.000,-
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Kota Pekalongan	40 Orang/bulan	5.006.285.000,-	DTU-DAU		40 Orang/bulan	6.204.154.000,-
3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	Kota Pekalongan	12 Dokumen	51.050.000,-	DTU-DAU		12 Dokumen	81.171.000,-
3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	Kota Pekalongan	1 Laporan	1.710.000,-	DTU-DAU		1 Laporan	1.650.000,-
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah*		100 persen	5.000.000,-			100 persen	9.500.000,-
3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	Kota Pekalongan	1 Paket	5.000.000,-	DTU-DAU		1 paket	9.500.000,-
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah*		100 persen	246.503.000,-			100 persen	148.942.000,-
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	Kota Pekalongan	4 Paket	1.250.000,-	DTU-DAU		4 Paket	1.250.000,-
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Kota Pekalongan	4 Paket	50.766.000,-	DTU-DAU		4 Paket	36.500.000,-
3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	Kota Pekalongan	4 Paket	2.760.000,-	DTU-DAU		4 Paket	2.500.000,-
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	Kota Pekalongan	4 Paket	34.028.000,-	DTU-DAU		4 Paket	40.000.000,-
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	Kota Pekalongan	13 Paket	12.926.000,-	DTU-DAU		13 Paket	10.000.000,-
3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	Kota Pekalongan	1 Dokumen	1.720.000,-	DTU-DAU		1 Dokumen	2.500.000,-
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat*	Kota Pekalongan	159 Laporan	143.053.000,-	DTU-DAU		159 Laporan	56.192.000,-

		Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*		100 persen	332.643.000,-			100 persen	274.619.000,-
3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Kota Pekalongan	12 Laporan	1.640.000,-	DTU-DAU		12 Laporan	2.000.000,-
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Kota Pekalongan	12 Laporan	125.000.000,-	DTU-DAU		12 Laporan	120.000.000,-
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Kota Pekalongan	12 Laporan	206.003.000,-	DTU-DAU		12 Laporan	152.619.000,-
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*		100 persen	196.838.000,-			100 persen	56.700.000,-
3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	Kota Pekalongan	28 Unit	59.290.000,-	DTU-DAU		28 Unit	38.200.000,-
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Kota Pekalongan	1 Unit	118.467.000,-	DTU-DAU		1 Unit	8.500.000,-
3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Kota Pekalongan	3 Unit	19.081.000,-	DTU-DAU		3 Unit	10.000.000,-
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	*Nilai produksi pertanian pertahun Nilai produksi peternakan pertahun*		55,78 Miliar Rupiah 199,66 Miliar Rupiah	1.421.483.000,-			203,65 Miliar Rupiah 55,84 Miliar Rupiah	242.404.000,-
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian*		100 persen	1.021.860.000,-			100 persen	109.880.000,-
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi								
		Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi		14 laporan	910.000.000,-	DTU-DAU/ DAKNF		14 laporan	0,-
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*	Kota Pekalongan	12 Laporan	111.860.000,-	DTU-DAU		12 Laporan	109.880.000,-
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase pelaksanaan kegiatan pengelolaan SDG hewan, tumbuhan dan mikroorganisme wewenang kabupaten/kota*		100 persen	53.573.000,-			100 persen	77.867.000,-
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	*Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman*	Kota Pekalongan	1 Dokumen	13.470.000,	DTU-DAU		1 Dokumen	25.000.000,-
3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	*Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian*	Kota Pekalongan	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	40.103.000,-	DTU-DAU		3 Varietas Unggul Baru (VUB)	52.867.000,-
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota*		5 kali	58.550.000,-			5 kali	37.657.000,-
3.27.02.2.03.0001	Pengawasan mutu benih/ bibit ternak, bahan pakan/ pakan/ tanaman skala kecil	*Jumlah pengawasan mutu benih / bibit ternak, bahan pakan/ pakan/ tanaman skala kecil*	Kota Pekalongan	6 Laporan	23.550.000,-	DTU-DAU			17.157.000,-
3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	*Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar*	Kota Pekalongan	6 Laporan	35.000.000,-	DTU-DAU			20.500.000,-
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah	*Persentase kenaikan pelayanan ULIB*		5 persen	287.500.000,-			5 persen	17.000.000,-

	Kabupaten/Kota								
3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	*Jumlah benih/bibit ternak yang beredar*	Kota Pekalongan	200 Laporan	287.500.000,-	DTU-DAU			17.000.000,-
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	*Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian*		100,00 persen	16.466.000,-			100,00 pers en	20.000.000,-
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Persentase prasarana yang digunakan (IKK Output)*		100 persen	16.466.000,-			100 persen	20.000.000,-
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	*Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi*	Kota Pekalongan	1 Unit	16.466.000,-	DTU-DAU		1 unit	20.000.000,-
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	*Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular*		5,00 persen	305.194.000,-			5,00 persen	230.515.000,-
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Kejadian penyakit hewan menular (PHM) yang tertangani*		800 kasus	63.105.000,-	DTU-DAU		800 kasus	56.000.000,-
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota*	Kota Pekalongan	12 Laporan	63.105.000,-	DTU-DAU		12 laporan	56.000.000,-
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pengawasan peredaran penjualan ternak*		100 persen	10.984.000,-	DTU-DAU		100 persen	15.000.000,-
3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	*Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM*	Kota Pekalongan	6 laporan	10.984.000,-	DTU-DAU		6 laporan	15.000.000,-
3.27.04.2.03	Pengeloiaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah hewan yang tertangani di PUSKESWAN*		500 ekor	20.620.000,-			500 ekor	35.000.000,-
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	*Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner*	Kota Pekalongan	12 Laporan	20.620.000,-	DTU-DAKNF		12 laporan	35.000.000,-
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Persentase penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner pada pelaku usaha*		100 persen	210.485.000,-			100 persen	124.515.000,-
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	*Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan*	Kota Pekalongan	1 Laporan	29.575.000,-	DTU-DAU		1 Laporan	37.500.000,-
3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	*Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik*	Kota Pekalongan	12 Unit Usaha	180.910.000,-	DTU-DAU		12 Unit Usaha	87.015.000,-
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	*Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota*		100,00 persen	13.300.000,-			100,00 persen	25.000.000,-
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian/peternakan*		4 kali	13.300.000,-	DTU-DAU		4 kali	25.000.000,-
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	*Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan*	Kota Pekalongan	1 Ha	13.300.000,-	DTU-DAU		4 kali	25.000.000,-
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	*persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin*		75,00 persen	24.927.000,-			100,00 pers en	31.826.000,-
3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan,	*Persentase penurunan jumlah usaha pemotongan hewan yang tidak berijin*		5 persen	24.927.000,-			5 persen	31.826.000,-

	Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan								
3.27.06.2.02.0005	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	*Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi*	Kota Pekalongan	1 Laporan	24.927.000,-	DTU-DAU		1 laporan	31.826.000,-
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	*Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun*		5,00 persen	35.707.000,-			5,00 persen	68.199.000,-
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Persentase pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan kelembagaan petani*		100 persen	35.707.000,-			100 persen	68.199.000,-
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	Kota Pekalongan	1 Unit	12.850.000,-	DTU-DAU		1 unit	25.000.000,-
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	Kota Pekalongan	1 Unit	22.857.000,-	DTU-DAU		1 unit	43.199.000,-
				Jumlah :	8.037.309.000,-			Jumlah:	7.681.708.000,-

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan beserta pendanaan Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat. Dijabarkan dalam kegiatan :
    a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/ kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 129.157.000,-
    b. Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/ kota, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 114.155.000,-
    c. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita / tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 53.127.000,-
2. Program Penanganan kerawanan pangan. Dijabarkan dalam kegiatan :
    a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 35.881.000,-
3. Program Pengawasan keamanan pangan. Dijabarkan dalam kegiatan :
    a. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/ kota, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 27.450.000,-
4. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah. Dijabarkan dalam kegiatan:
    a. Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 20.433.000,-
    b. Administrasi keuangan, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp.5.059.045,000,-
    c. Administrasi kepegawaian, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp.5.000,000,-
    d. Administrasi Umum, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 246.503.000,-
    e. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 332.643.000,-
    f. Pemeliharaan BMD Penunjang urusan Pemerintahan Daerah, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 196.838.000,-

5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian. Dijabarkan dalam kegiatan :
    a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 1.021.860.000,-
    b. Pengelolaan sumberdaya genetic (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 53.573.000,-
    c. Peningkatan mutu dan peredaran benih / bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah Kabupaten/ Kota, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 58.550.000,-
    d. Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/ bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten/ kota, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 287.500.000,-
6. Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian. Dijabarkan dalam kegiatan :
    a. Pembangunan Prasarana Pertanian, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 16.466.000,-
7. Program Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Dijabarkan dalam kegiatan :
    a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah Kabupaten/ kota, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 63.105.000,-
    b. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah Kabupaten/ Kota, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 10.984.000,-
    c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/ kota, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 20.620.000,-
    b. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp.210.485.000,-
8. Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. Dijabarkan dalam kegiatan :
    a. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 13.300.000,-
9. Program Perijinan Usaha pertanian. Dijabarkan dalam kegiatan :

a. Penerbitan ijin usaha produksi benih/ bibit ternak dan pakan , fasilitas pemeliharaan hewan, Rumah sakit hewan/ pasar hewan, Rumah potong hewan, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 24.927.000,-

10. Program Penyuluhan pertanian. Dijabarkan dalam kegiatan :

b. Pelaksanaan penyuluhan pertanian, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 35.707.000,-

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2025 disusun sebagai acuan dan dasar dalam penyelenggaraan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Kami berharap agar perencanaan pembangunan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2025 dapat terlaksana sesuai harapan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam pelaksanaan rencana kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2025 diperlukan komitmen dan tanggungjawab pemerintah, swasta dan masyarakat secara efektif, efisien, terintegrasi dan sinkronisasi dengan sektor lainnya sehingga dapat menggerakkan perekonomian di daerah.

Dalam pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2025 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir.

Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan yang akan terwujud dalam Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan tahun 2025.

Akhir kata semoga Dokumen Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2025 ini dapat berguna baik untuk mengukur kinerjanya sendiri maupun sebagai umpan balik bagi pihak- pihak yang berkepentingan.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA PEKALONGAN

LILI SULISTYAWATI, S.Pi, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700711 199603 2 003

Pekalongan
World's City of Batik

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Rencana Kerja (RENJA) Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan

Tahun 2025

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, Alhamdulillah dengan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (Dindagkop & UKM) Kota Pekalongan Tahun 2025 telah berhasil disusun dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa sholawat berangkai salam kita panjatkan kehadirat Nabi Besar Muhammad SAW semoga kita mendapatkan syafaatnya di Yaumil hisab kelak.

Penyusunan Renja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dindagkop & UKM tahun 2021-2026, dan telah disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Renja menjadi suatu keharusan karena akan digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan terkait penyelenggaran pemerintahan di bidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menegah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, sekaligus sebagai pedoman dan cuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsi. Dalam Renja ini, secara rinci telah ditetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dindagkop & UKM Kota Pekalongan pada tahun 2025. Setiap kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target yang ingin dicapai, serta pagu anggaran sebagai acuan dalam pelaksanaannya.

Diharapkan Renja ini dapat menjadi panduan yang efektif bagi seluruh jajaran Dindagkop & UKM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pekalongan dapat tercapai dengan optimal. Penyusunan Renja Tahun 2025 ini membutuhkan saran dan masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaan penyusunan Renja Dindagkop & UKM Kota Pekalongan pada tahun-tahun yang akan datang. Atas bantuan dan partisipasi semua pihak yang terlibat dalam penyusunan berlangsung diucapkan terima kasih.

Pekalongan, 8 Agustus 2024
Kepala Dindagkop & UKM
Kota Pekalongan

Drs. SUPRIONO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19661008 199203 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 5
1.2. Landasan Hukum 7
1.3. Maksud Dan Tujuan 10
1.4. Sistematika 11
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 15
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 15
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 30
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 32
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 49
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 51
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 51
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 56
3.3 Program dan Kegiatan 57
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 64
BAB V PENUTUP 71
5.1 Catatan Penting 71
5.2 Kaidah Pelaksanaan 72
Rencana Tindak lanjut 73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2023 19

Tabel T.C 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan 27

Tabel T.C 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 33

Tabel T.C 32 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 50

Tabel 3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Nasional 52

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Dindagkop & UKM Tahun 2025 Dan Perkiraan Maju Tahun 2026..... 59

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dindagkop & UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025..... 65

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara lugas telah mengamanatkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat ini juga dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dimana sebagai tindaklanjutnya, Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode jangka pendek satu tahun kedepan. Fungsi Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. Renja OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan, berpedoman pada Rencana Strategis OPD.

Sebagai upaya untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan

dengan peluang otonomi seluas-luasnya maka kewenangan diberikan kepada daerah. Hal ini merupakan peluang untuk memaksimalkan kemajuan pembangunan dengan ciri khas kearifan lokal dan potensi daerah dan sesuai dengan sumberdaya dan budaya masyarakat daerah tersebut. Salah satu hal yang mendukung dalam upaya mencapai tujuan pelayanan publik adalah dengan pelaksanaan rencana daerah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif melalui beberapa tahapan perencanaan.

Dengan demikian Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA OPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP). Pelaksanaan RENJA OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah atau selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah terbagi dalam tiga fase, yakni Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, Rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Walikota tentang Renja Perangkat Daerah sebagai berikut :

a. Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah merupakan draft awal sesuai dengan Rentra Perangkat Daerah pada tahun n.
b. Selanjutnya rencangan awal renja disempurnakan berdasarkan hasil konsultasi publik menjadi Rancangan Renja, yang disusun sebagai pembahasan dalam penyusunan Rancangan RKPD yang akan dibahas dalam musrenbang tingkat kota.
c. Hasil musrenbang menjadi dasar penetapan Peraturan Walikota tentang RKPD. Selanjutnya Peraturan Walikota tentang RKPD menjadi dasar dalam menyempurnakan Rancangan Renja menjadi Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.
d. Rancangan Akhir Renja seluruh Perangkat Daerah akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Renja Perangkat Daerah.

Seluruh tahapan proses merupakan implementasi perencanaan secara partisipatif dengan pendekatan teknokratik, *buttom up*, *top down*, dan politis.

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM sebagai salah satu OPD di Kota Pekalongan memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang perdagangan koperasi dan UKM kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021–2026 yaitu **"Terwujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius"**. Tahun Anggaran 2025 adalah tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2021 - 2026 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana atau pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

Renja Tahun 2025 dalam penyusunannya juga diarahkan untuk mewujudkan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan. Terdapat 7 (tujuh) Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan.
3. Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman.
4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan.
5. Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal.
6. Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah.
7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Goverment.*

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dindagkop & UKM Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa

Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2023 Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten

Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Panghapusan Kemiskinan Ekstrim;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 77);
19. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 8);
21. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 71);
22. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dindagkop & UKM) Kota Pekalongan Tahun 2025 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

   Dokumen Renja Dindagkop & UKM Kota Pekalongan disusun dengan maksud sebagai arah dan pedoman bagi Dindagkop & UKM Kota Pekalongan dalam melaksanakan rencana kegiatan tahunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Tujuan

Dokumen Renja Dindagkop & UKM Kota Pekalongan disusun bertujuan antara lain untuk:

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dindagkop & UKM Kota Pekalongan untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya;
b. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
c. Menjamin terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
d. Adanya kesinambungan antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.
e. Menjalankan tahapan perencanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
f. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.
g. Sebagai bahan evaluasi dan pengukuran kinerja atas program dan kegiatan yang dilaksanakan.

1.4 SISTEMATIKA

Rencana Kerja Dindagkop & UKM Kota Pekalongan Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dindagkop & UKM, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang.

Memuat tentang pengertian Renja Dindagkop & UKM, Proses Penyusunan Renja, Keterkaitan antara Rencana Kerja (Renja) dengan Dokumen RKPD dan Rencana Strategis (Renstra).

1.2 Landasan Hukum.

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja Dindagkop & UKM Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan.

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja).

1.4 Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Dindagkop & UKM Kota Pekalongan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dindagkop & UKM berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Memuat uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan Dindagkop & UKM dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah. Selain itu, juga untuk dapat diketahui dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program Nasional/Internasional, seperti *SDG's*. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses yang dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan penjelasannya. Kemudian menjelaskan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Renja, seperti terdapat rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan awal RKPD, atau program, kegiatan dan sub kegiatan cocok namun besarnya anggaran berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Memuat uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain : Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dindagkop & UKM.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Menjelaskan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dindagkop & UKM.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dindagkop & UKM.

3.2 Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan Rencana Kerja Kegiatan, Capaian Kinerja yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah, Pagu Program dan Kegiatan.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Rencana Kerja (Renja) Dindagkop & UKM Kota Pekalongan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis pada tahun yang bersangkutan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dindagkop & UKM Kota Pekalongan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan, program dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dindagkop & UKM Kota Pekalongan selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2025.

Pengukuran kinerja kegiatan/sub kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan penetapan indikator kinerja, yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2023 Dindagkop & UKM Kota Pekalongan sebesar Rp. 18.277.826.000,-, termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN dengan melaksanakan 2 penunjang urusan pemerintahan, 12 program, 18 kegiatan dan 35 sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 17.522.869.802,- dengan capaian kinerja sebesar

79.59% dan capaian kinerja keuangan/anggaran sebesar 95.86%. Dengan realisasi belanja tersebut dapat dianalisa capaian target kinerja berdasarkan indikator berdasarkan urusan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.5.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Target Pendapatan Tahun Anggaran 2023 Dindagkop & UKM Kota Pekalongan sebesar Rp. 3.500.000.000,- dan realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.894.202.723,- atau sebesar 82.69%.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2024, dengan alokasi pagu anggaran Belanja sebesar Rp. 18.519.495.825,- melaksanakan 2 unsur penunjang urusan pemerintahan, 12 program, 18 kegiatan dan 35 sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai diatas 90%, baik realisasi keuangan/anggaran maupun capaian fisiknya dan realisasi pendapatan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta perkiraan capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dindagkop & UKM sebagai berikut:

1. Realisasi belanja pada kegiatan hibah dari bantuan sosial dalam pelaksanaannya memerlukan penyesuaian dalam memehami Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan WaliKota Nomor 02A Tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sehingga hal tersebut berakibat pada ketidaksesuain degan perencanaan dan penjadwalan pelaksanaan kegiatan.
2. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan memiliki program dan kegiatan yang sangat dinamis, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap beberapa rekening belanja.
3. Koordinasi antar stake holder sektor perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah yang kurang optimal menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan;

4. Komitmen dan pemahaman bersama untuk mempedomani indikator kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD perlu ditingkatkan dalam merencanakan kegiatan.
5. Manajemen risiko yang disusun pada akhir tahun dimana proses perencanaan penganggaran sudah sampai pada tahap RAPBD sehingga belum sepenuhnya diimplementasikan secara menyeluruh dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sehingga potensi risiko belum dikelola secara proaktif dan reaktif.
6. Berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah bahwa hanya terdapat satu indikator dalam satu sub kegiatan sehingga perlu singkronisasi dengan target kinerja pada periode sebelumnya.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dindagkop & UKM dalam pelaksanaan urusan perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu 2023, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2023 pada Dindagkop & UKM Kota Pekalongan dari 2 urusan yaitu urusan Perdagangan dan urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan dengan 12 program.

Adapun evaluasi kinerja hasil/keluaran program/kegiatan/subkegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

   Terdapat 5 program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2023. Adapun untuk melihat capaian kinerja secara terperinci tersaji dalam tabel dibawah ini.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

   Pada Renja Dindagkop & UKM Kota Pekalongan tahun 2023 terdapat 7 indikator program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

   Pada Renja tahun 2023 tidak terdapat program/kegiatan yang melebihi target capaian kinerja.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

   Indikator program/kegiatan/sub kegiatan tidak tercapai targetnya

   Terdapat 5 indikator program yang tidak sesuai pencapaian dalam target kinerjanya antara lain program pengawasan dan pemeriksaan koperasi, progam peningkatan sarana distribusi perdagangan, program pengembangan ekspor, program standardisasi dan perlindungan konsumen, program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain:

   a. Adanya hambatan dalam komunikasi dan koordinasi dengan pengurus koperasi.
   b. Pembangunan pasar kecamatan masih dalam tahap perencanaan pada tahun 2023, sedangkan pembangunan fisik direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2024.
   c. Adanya penurunan harga komoditas unggulan potensial ekspor ditambah perlambatan ekonomi global yang memicu penurunan permintaan dari negara tujuan ekspor.
   d. Tingkat kesadaran wajib tera dan tera ulang yang masih rendah serta belum terdapat sanksi yang diberlakukan dengan tegas bagi wajib tera atau tera ulang yang tidak melaksanakan tera / terang alat UTTP.
   e. Masih kurangnya fasilitasi yang diberikan kepada UMKM terutama dalam pelaksanaan pameran luar daerah dan waktu pelaksanaan pameran/event sepenuhnya menjadi wewenang penyelenggara. Selain itu, fasilitasi pemasaran yang diberikan kepada UMKM dalam

Showroom Dekranasda tergantung pada minat UMKM untuk melakukan pemasaran di Showroom Dekranasda.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

   Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 yang membatasi jumlah indikator pada setiap subkegiatan, maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap indikator-indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap indikator dapat mengukur kinerja subkegiatan secara spesifik dan tidak terjadi duplikasi dengan indikator lainnya. Sehingga dalam penghitungan realisasi kinerja pada periode akhir renstra dapat secara akurat tersajikan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dindagkop & UKM Kota Pekalongan yang sudah dilakukan pemetaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, didasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun- tahun sebelumnya. Capaian evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah dapat dilihat dalam tabel 2.1. dibawah ini :

Tabel 2.1. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023
KOTA PEKALONGAN

OPD : DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Presentase capaian target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Realisasi 2023			
1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**									
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	Persen	33,23	29,70	30,94	29,70	29,70	89,38	Belum Tercapai
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	Persen	59,68	58,31	97,20	58,31	58,31	97,70	Belum Tercapai
4	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	Persen	12,37	11,38	12,06	11,38	11,38	92,00	Belum Tercapai
5	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**									
6	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	Persen	77,70	81,07	75,42	81,07	81,07	104,34	Melebihi Target
7	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Persen	100	68,75	93,75	68,75	68,75	68,75	Belum Tercapai

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Presentase capaian target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Realisasi 2023			
8	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	Persen	100,00	100	88	100	100	100,00	Tercapai
9	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan volume ekspor	Persen	8,19	-0,46	7,6	-0,46	7,6	-5,62	Belum Tercapai
10	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	Persen	83,99	59,02	77,99	59,02	59,02	70,27	Belum Tercapai
11	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	Persen	7,50	0,96	4,26	0,96	0,96	12,80	Belum Tercapai
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100	100	100	100	100	100,00	Tercapai
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	100	100	100,00	Tercapai

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dindagkop & UKM Kota Pekalongan didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan.

1. Tugas dan Fungsi Dindagkop & UKM

   Tugas dan fungsi Dindagkop & UKM Kota Pekalongan adalah:

   a. Tugas

      Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kepala Dindagkop & UKM Kota Pekalongan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah.

   b. Fungsi

      Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi:

      1) Perumusan dan penetapan sasaran, program bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
      2) Perumusan kebijakan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
      3) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang perdagangan;
      4) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
      5) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pasar dan pedagang kaki lima;
      6) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
      7) Pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan

evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;

8) Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaantugas;

9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dindagkop & UKM berdasarkan Peraturan Walikota Kota Pekalongan Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat
   1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
   2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Perdagangan;
d. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
e. Bidang Pasar dan Pedagang Kaki Lima;
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Kondisi Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Dindagkop & UKM Kota Pekalongan, sampai dengan Juli 2024 berjumlah 60 orang.

a. Jumlah pegawai Dindagkop & UKM berdasarkan jenjang pendidikan terakhir daripegawai yang berstatus PNS adalah sebagai berikut:
   1) 7 (tujuh) orang berpendidikan S 2;
   2) 15 (lima belas) orang berpendidikan S 1/D IV;
   3) 1 (satu) orang berpendidikan D III;
   4) 22 (dua puluh dua) orang berpendidikan setingkat SMA;

5) 8 (delapan) orang berpendidikan setingkat SMP;
6) 7 (tujuh) orang berpendidikan setingkat SD

b. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut:
1) Struktural
a) Eselon II.b : 1 orang
b) Eselon III.a : 1 orang
c) Eselon III.b : 3 orang
d) Eselon IV.a : 3 orang
e) Eselon IV.b : 1 orang
2) Pejabat Fungsional : 7 orang
3) Staf : 44 orang

c. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/Golongan adalah sebagai berikut:
1) Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang
2) Pembina Tk.I (IV/b) : 1 orang
3) Pembina (IV/a) : 7 orang
4) Penata Tingkat I (III/d) : 4 orang
5) Penata (III/c) : 2 orang
6) Penata Muda Tk. I (III/b) : 3 orang
7) Penata Muda (III/a) : 19 orang
8) Pengatur Tingkat I (II/d) : 1 orang
9) Pengatur (II/c) : 9 orang
10) Pengatur Muda Tingkat I (II/b) : 3 orang
11) Pengatur Muda (II/a) : 9 orang
12) Juru Tingkat I (I/d) : 1 orang
13) PPPK/ Gol IX : 1 orang

4. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, Dindagkop & UKM Kota Pekalongan memiliki sarana prasarana adalah:

a.	Mobil Dinas	:	4	unit
b.	Motor Dinas	:	25	unit
c.	Dump Truk	:	6	unit
d.	Kendaraan Roda Tiga lainnya	:	6	unit
e.	Container	:	2	unit
f.	Gerobak	:	59	unit
g.	Genset	:	2	unit
h.	Pompa Air	:	8	unit
i.	Mesin ketik	:	5	unit
j.	Lemari Kas	:	1	unit
k.	Lemari Besi	:	14	unit
l.	Lemari Kayu	:	14	unit
m.	Rak Besi	:	4	unit
n.	Filling Cabinet Besi	:	20	unit
o.	Brankas	:	1	unit
p.	Lemari Kaca	:	27	unit
q.	Lemari Makan	:	1	unit
r.	CCTV	:	2	unit
s.	Papan Visual	:	2	unit
t.	White Board	:	1	unit
u.	Mesin Presensi	:	16	unit
v.	Display	:	3	unit
w.	LCD	:	4	unit
x.	Papan Nama Instansi	:	5	unit
y.	Papan Pengumuman	:	3	unit
z.	Papan Tulis	:	1	unit
aa.	Alat Kantor Lainnya	:	17	unit
ab.	Meja Kerja Kayu	:	4	unit
ac.	Kursi Besi/Metal	:	13	unit
ad.	Bangku Panjang Besi/Metal	:	56	unit
ae.	Meja Rapat	:	19	unit
af.	Meja Ketik	:	1	unit
ag.	Meja Resepsionis	:	1	unit
ah.	Meja Makan Besi	:	68	unit
ai.	Kursi Rapat	:	180	unit
aj.	Kursi Tamu	:	2	unit
ak.	Meja Komputer	:	1	unit
al.	Sofa	:	2	unit
am.	Meja Tulis	:	4	unit
an.	Mesin Pemotong Rumput	:	2	unit
ao.	Lemari Es	:	2	unit
ap.	A.C Window	:	35	unit

aq.	A.C Split	:	4	unit
ar.	Kipas Angin	:	7	unit
as.	Kompor Gas	:	2	unit
at.	PC. Unit	:	41	unit
au.	Harddisk eksternal dan sejenisnya	:	10	unit
av.	Scanner	:	3	unit
aw.	Server	:	1	unit
ax.	Monitor	:	2	unit
ay.	Printer	:	51	unit
az.	Laptop/notebook	:	26	unit
ba.	TV	:	8	unit
bb.	Amplifier	:	1	unit
bc.	Wireless	:	6	unit
bd.	Sound System	:	4	unit
be.	Megaphone	:	4	unit
bf.	Microphone	:	5	unit
bg.	Camera	:	21	unit
bh.	Tangga Alumunium	:	1	unit
bi.	Dispenser	:	2	unit
bj.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	:	10	unit
bk.	Alat Pemadam	:	12	unit
bl.	Meja Kerja	:	42	unit
bm.	Meja Tamu	:	4	unit
bn.	Meja Rapat	:	6	unit
bo.	Kursi Kerja	:	29	unit
bp.	Lemari Buku Arsip	:	16	unit
bq.	Alat Komunikasi Radio/Telphone	:	5	unit
br.	Tenda	:	3	unit
bs.	Ruang Kerja	:	11	ruang
bt.	Ruang Rapat	:	2	ruang
bu.	Gudang	:	1	ruang
bv.	Peralatan Tera	:	365	buah

Pada tahun 2023 nilai indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Dindagkop & UKM Kota Pekalongan sebesar 88,69 (A) atau predikat sangat baik. Dan pada tahun 2024 naik cukup tinggi menjadi sebesar 99,62 (A) atau predikat sangat baik. Hal tersebut dikarenakan peningkatan pelayanan Masyarakat yang antara lain; pelayanan perpanjangan Kartu Ijin Pemakaian Tempat (KIPT) Pasar, pengajuan rekomendasai subsidi bahan bakar, pelayanan tera/ tera ulang, pembinaan UMKM dan koperasi dan pelayanan umum lainnya. Sedangkan nilai evaluasi AKIP Dindagkop & UKM Kota Pekalongan pada tahun 2022 sebesar 84,55 (A) dengan

predikat memuaskan dan pada tahun 2023 mengalami tren kenaikan menjadi sebesar 85.45 (A) dengan predikat memuaskan. Evaluasi AKIP menggambarkan efektivitas dan efisiensi atas penggunaan sumberdaya dan capaian target kinerja dalam organisasi. Nilai 85,45 menunjukan bahwa Dindagkop & UKM Kota Pekalongan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai target kinerjanya telah sesuai dengan arah, tujuan dan sasaran kinerja secara efektif dan efisien. Berbagi Upaya telah dilakukan dalam rangka peningktakan pelayanan publik dan akuntabilitas antara lain;

a. Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan dan Retribusi (Sitantri)
b. Optimalisasi E-kinerja dan E-presensi
c. Penggunaan Casecading dan pelaporan kinerja triwulan
d. Pengaduan pelayanan masyarakat melalui akun sosial media di *@dindagkopukm.kotapekalongan*,*https://dindagkop.pekalongankota.go.id/*,*www.facebook.com/dindagkopukmkotapekalongan.*

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dapat dilihat sebagaimana tabel Tabel.T.C.30.

Tabel T.C 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)*	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
1	Nilai modal usaha UMKM dari koperasi (Rp. Trilyun)			Rp.8,12 Trilyun	Rp.8,42 Trilyun	Rp.8,72 Trilyun	Rp.9,02 Trilyun	Rp.11,54 Trilyun	Rp. 10,23 Trilyun	Rp.8,72 Trilyun	Rp.9,02 Trilyun	
2	Nilai Ekspor Perdagangan			26,71 Juta US$	26,97 Juta US$	27,24 Juta US$	27,51 Juta US$	11,09 Juta US$	5,96 US$	27,24 Juta US$	27,51 Juta US$	
3	Nilai Evaluasi AKIP			85,50	86,5	87,5	88,50	85,45	n/a	87,5	88,50	
4	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			76,78	77,08	77,38	77,68	88,69	77,08	77,38	77,68	
5	Prosentase peningkatan nilai modal usaha dari koperasi			3,84 persen	3,69 persen	3,56 persen	3,44 persen	n/a	3,69 persen	3,56 persen	3,44 persen	
6	Persentase koperasi berkualitas			30,94 persen	31,49 persen	32,36 persen	33,23 persen	29,70 persen	20,66	32,36 persen	33,23 persen	
7	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota			58,31 persen	58,77 persen	59,22 persen	59,68 persen	97,20 persen	35,01 persen	59,22 persen	0**	
8	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha			12,06 persen	12,16 persen	12,27 persen	12,37 persen	23,09 persen	23,71 persen	12,27 persen	12,37 persen	

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)*	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
9	Prosentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP Toko)			75,42 persen	76,17 persen	76,92 persen	77,70 persen	81,07 persen	82,59 persen	76,92 persen	77,70 persen	
10	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan diwilayah kerjanya			81,25 persen	93,75 persen	100 pesen	100 persen	68,75 persen	75,00 persen	100 pesen	100 persen	
11	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya			54,55 persen	72,73 persen	90,91 persen	100 persen	100 persen	100 persen	90,91 persen	100 persen	
12	Persentase peningkatan volume ekspor			7,6 persen	7,79 persen	7,99 persen	8,19 persen	-0,04 persen	3,47 persen	7,99 persen	8,19 persen	
13	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku			77,99 persen	79,99 persen	81,99 persen	83,99 persen	59,02 persen	43,51 persen	81,99 persen	83,99 persen	
14	Persentase ketercapaian jumlah UMKM yang difasilitasi pemasaranya			4,26 persen	5,24 persen	6,42 persen	7,5 persen	0,96 persen	0.63 persen	6,42 persen	7,5 persen	
15	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja			100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	36,58 persen	100 persen	100 persen	

*Data capaian merupakan Data sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

** Rencana Tahun 2025, Dana DAK tidak akan dialokasikan untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Koperasi

2.3 ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dindagkop & UKM sebagai perangkat teknis daerah yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kewenangan daerah di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah menghadapi beberapa tantangan mengenai kebijakan dan pelaksanaan dalam penyelengaraan tugas dan fungsi. Permasalahan-permasalahan umum yang ada di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah secara singkat diuraikan sebagai berikut:

1. Koperasi dan UMKM
    a. Lemahnya kualitas tata kelola dan ekosistem kelembagaan perkoperasian dan UMKM di bidang manajemen termasuk sumber daya manusia (SDM), teknologi, permodalan dan pemasaran.
    b. Belum optimalnya penguatan usaha simpan-pinjam koperasi melalui penguatan pengawasan dan penguatan koperasi sektor riil.
    c. Lemahnya akses koperasi dan UMKM terhadap sumber permodalan dan pembiayaan usaha.
    d. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan dan perlindungan kepada anggota.
    e. Masih rendahnya tingkat keberlanjutan (eksistensi) dan ketahanan koperasi sebagai salah satu pilar penyangga ekonomi.
    f. Isu kesetaraan gender dalam distribusi pendapatan menjadi permasalahan yang perlu digali penyelesaiannya ketika jumlah UMKM sektor kuliner yang ternyata memiliki peran dalam peningkatan ekonomi. Selain itu nilai modal usaha UMKM dari koperasi dan kontribusi peran gender dalam perkoperasian di Kota Pekalongan perlu digali dan dikembangkan.

g. Masih lemahnya kemampuan UMKM untuk memenuhi standardisasi produk di pasar domestik maupun global.
h. Keterbatasan kemampuan pelaku UMKM untuk mengadopsi teknologi digital dan literasi digital.
i. Kurangnya akses pembiayaan terhadapa UMKM disebabkan banyak UMKM masih belum dapat menyusun laporan pembukuan dan administrasi keuangan secara digital.
j. Regulasi dan prosedur bisnis lintas batas yang kompleks, mahal dan memakan waktu.

2. Perdagangan
   a. Lemahnya koordinasi antara sektor produksi, transportasi dan jasa sehingga menghambat distribusi kebutuhan pokok masyarakat.
   b. Kenaikan beberapa komoditas kebutuhan pokok terutama minyak goreng, cabe, kedelai yang berdampak pada tingkat laju inflasi harus dikendalikan dan dibutuhkan koordinasi lintas lembaga dan sektor serta langkah-langkah taktis pengendalian harga.
   c. Kurang optimalnya pengembangan pasar dengan pola jejaring dan kemitraan antar pelaku usaha dalam pengembangan pasar dalam negeri.
   d. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha mikro terhadap peraturan perundangan perlindungan konsumen dan UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Peralatanya).
   e. Masih rendahnya pengetahuan pelaku usaha produk unggulan untuk melaksanakan kegiatan ekspor dan bisnis internasional.Kemitraan dalam proses perencanaan pembangunan.

3. Pasar dan Pedagangan Kaki Lima

   a. Pembangunan kembali Pasar Banjarsari sebagai ikon dan pusat perbelanjaan di Kota Pekalongan.
   b. Masih kurang optimalnya kondisi bangunan gedung dan sarana prasarana pada pasar Banyurip dalam menunjang aktivitas usaha perdagangan pasar tradisional.
   c. Masih kurang optimalnya pendapatan retrbusi yang bersumber dari Pasar dan PK-5 dalam memberikan kontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah).
   d. Adanya PK-5 yang masih melakukan aktivitas berjualan di badan jalan serta kurangnya kesadaran terhadap kebersihan, ketertiban, keamanan dan keindahan.
   e. Keberadaan pusat fashion dan kuliner Sugihwaras yang belum digunakan secara maksimal oleh PK-5.
   f. Kurangnya kesadaran para pedagang yang masih berjualan di Alun-alun Kota Pekalongan terhadap ketentuan Peraturan Daerah yang ada.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dariproses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Dari rancangan awal yang telah disusun oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 guna dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kerja tahun 2025 terdapat penyesuaian pagu, program dan kegiatan. Penyesuaian Rancangan awal RKPD terhadap Renja tahun 2025 tersebut melihat urgensi dan target indikator kinerja organisasi. Rancangan awal RKPD Dindagkop & UKM Kota Pekalongan sebesar Rp. 26.948.794.000,- menjadi Rp.20.301.719.000,- yang terdapat dalam beberapa kegiatan-kegiatan. Penyesuaian terjadi pada seluruh program yang ada pada Dindagkop & UKM, namun secara khusus program pendidikan dan latihan perkoperasian yang merupakan progam bersumber dari dana DAK non fisik pada tahun 2025 ini tidak dialokasi oleh Instansi Pembina Pemerintah Pusat kepada Kota/Kabupaten. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel T.C. 31.

Tabel T.C-31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kota Pekalongan	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	32,36 persen	141.138	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kota Pekalongan	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	32,36 persen	61.780
2	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kewenangan kabupaten / kota	64,46 persen	141.138	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kewenangan kabupaten / kota	64,46 persen	61.780
3	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	100 unit usaha	141.138	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	100 unit usaha	61.780

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	59,22 persen	645.601	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	0	000
5	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	1,18 persen	645.601	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	0	000
6	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	250 UMKM	645.601	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	0	000
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	12,27 persen	1.218.262	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	12,27 persen	323.520

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
8	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Meningkatnya UMKM yang mendapatkan pendampingan pengembangan usaha	6,06 persen	1.218.262	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Meningkatnya UMKM yang mendapatkan pendampingan pengembangan usaha	6,06 persen	323.520
9	Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	186 UMKM	1.218.262	Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	47 UMKM	323.520
10	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	76,93%	17.700	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	76,93%	6.330
11	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Persentase izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan	100 persen	9.300	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Persentase izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan	100 persen	4.530

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
12	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	8 Dokumen	9.300	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6 Dokumen	4.530
13	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Persentase Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan	100 Persen	8.400	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Persentase Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan	100 Persen	1.800
14	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	8.400	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	1.800
15	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100 persen	10.141.715	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100 persen	8.682.729

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
16	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Penyediaan Pelayanan Pasar Rakyat secara Profesional	18,75 persen	9.919.207	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Penyediaan Pelayanan Pasar Rakyat secara Profesional	18,75 persen	8.633.379
17	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	2.427.510	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	1.500.000
18	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	12 Unit	7.491.697	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	12 Unit	7.133.379
19	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Persentase ketercapaian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan khususnya PK5	57,47 persen	222.508	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Persentase ketercapaian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan khususnya PK5	57,47 persen	49.350
20	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen	222.508	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen	49.350

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
21	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	96 persen	121.853	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	96 persen	102.690
22	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Persentase objek sasaran pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok	90,91 persen	113.338	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Persentase objek sasaran pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok	90,91 persen	96.470
23	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	18 Laporan	113.338	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	18 Laporan	96.470
24	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK Outcome)	100 persen	8.515	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK Outcome)	100 persen	6.220

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
25	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	3 Dokumen	8.515	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	3 Dokumen	6.220
26	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Persentase peningkatan volume ekspor	7,99 persen	130.976	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Persentase peningkatan volume ekspor	7,99 persen	98.970
27	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan jumlah pelaku usaha yang menjadi ekportir (SIDa)	26 Pelaku Usaha	130.976	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan jumlah pelaku usaha yang menjadi ekportir (SIDa)	26 Pelaku Usaha	98.970
28	Peningkatan Citra Produk Ekspor		Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	30 UMKM	130.976	Peningkatan Citra Produk Ekspor		Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	30 UMKM	98.970

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
29	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	81,99 persen	351.184	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	81,99 persen	279.022
30	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan (IKK Output)	81,99 persen	351.184	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan (IKK Output)	81,99 persen	279.022
31	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5038 UTTP	306.184	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5164 UTTP	254.112
32	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	85 Orang	45.000	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100 Orang	24.910
33	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	6,42 persen	1.095.733	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	6,42 persen	969.080

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
34	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Peningkatan usaha mikro yang difasilitasi pemasaran produknya	128 UMKM	1.095.733	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Peningkatan usaha mikro yang difasilitasi pemasaran produknya	128 UMKM	969.080
35	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	128 UMKM	983.383	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	150 UMKM	872.330
36	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	30 UMKM	112.350	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	30 UMKM	96.750

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
37	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	7.697.044	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	7.014.252
38	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	24.102	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	18.084
39	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.176	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.132
40	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.476	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.952
41	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	18.450	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	12.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
42	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	7.672.942	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	6.996.168
43	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/ Bulan	7.603.424	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/Bulan	6.926.650
44	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	67.800	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	67.800
45	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1.718	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1.718

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
46	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	4.833.912	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	2.152.135
47	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	9.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	9.500
48	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	9.500	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	9.500
49	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	670.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	633.441
50	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
51	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	120.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	196.011
52	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	120.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	5.000
53	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	85.120	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	85.850
54	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	67.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	67.000
55	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.580	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.580
56	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	272.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	272.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
57	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	4.242.412	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	1.521.235
58	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.400	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	25.000
59	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.723.700	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	979.300
60	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	516.312	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	516.935
61	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	582.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	621.400

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
62	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	44 Unit	465.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	44 Unit	465.000
63	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	90.600	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	130.000
64	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	26.400	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	26.400

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sebelum melakukan penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terlebih dahulu telah dilakukan penjaringan aspirasi masyarakat, baik terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berupa usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan perangkat daerah, asosiasi asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan pengamatan pelaksanaan musrenbang tingkat kota. Terhadap aspirasi tersebut kemudian dilakukan inventarisasi dan pengkajian apakah sesuai dengan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah.

Usulan awal program, kegiatan dan sub kegiatan dari perangkat daerah kemudian diselaraskan dengan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui Musrenbang, baik musrenbang kelurahan maupun kecamatan dan kota, serta forum perangkat daerah. Dalam kegiatan ini kemudian diinventarisir pula usulan yang masuk melalui Pagu Indikatif. Sebagai sebuah konsekuensi atas telah ditandatanganinya kesepakatan antara Wali Kota sebagai pihak Eksekutif dengan DPRD sebagai pihak/lembaga legislatif tentang penetapan pagu anggaran, maka semua usulan masyarakat yang masuk sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus dilaksanakan oleh perangkat daerah. Usulan yang dibuat oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah disesuaikan dan telah mengakomodir semua usulan dari pemangku kepentingan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Pada proses Rancangan Awal Renja, belum ada usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Dindagkop & UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025.

Tabel T.C-32 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan

Tahun 2025

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME/ BESARAN	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**Program Pengembangan UMKM**				
1.1	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				
1.1.a	Pengadaan Gerobak UMKM	Kota Pekalongan	Jumlah UMKM terfasilitasi sarana pemasaran	21 UMKM	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana kerja (renja) perangkat daerah disusun sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Sedangkan RKPD disusun dengan menjabarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Renja Dindagkop & UKM tahun 2025 sesuai dengan RKPD 2025, yang merupakan penjabaran atas RPJMD 2021-2026.

Selain berpedoman pada RPJMD 2021-2026, RKPD tahun 2025, Renja Dindagkop & UKM Tahun 2025 juga berpedoman pada RKP Tahun 2025, dengan penyelarasan prioritas pembangunan nasional dengan pembangunan Kota Pekalongan. Adapun sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024, Tema RKP Tahun 2025: “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Penyelarasan prioritas pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2025 dengan prioritas nasional disajikan dalam Tabel 3.1 berikut:

Tabel. 3.1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Nasional

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	**PRIORITAS**	**NO**	**PRIORITAS**
1	**PN1** Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah
2	**PN2** Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru		
3	**PN3** Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6	Pelaksanaan peningkatan kualitas Perumahan kumuh dan permukiman kumuh
		7	Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup
		8	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan Dan transportasi perkotaan, Dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
4	**PN4** Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1	Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
		3	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan
		5	Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	**PRIORITAS**	**NO**	**PRIORITAS**
5	**PN5** Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah diDalam Negeri	9	Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan
6	**PN6** Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2	Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan
		4	Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing
7	**PN7** Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	12	Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment
8	**PN8** Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	10	Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal

Sesuai RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, maka tema pembangunan Kota Pekalongan tahun 2025 ditujukan untuk “Optimalisasi Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemandirian Dengan Dipayungi Nilai-nilai Religiusitas”. Adapun Prioritas pembangunan Kota Pekalongan tahun 2025 difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis Kota Pekalongan tahun 2025. Penyelarasan prioritas pembangunan Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 3.2. dibawah ini :

Tabel 3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan

Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	**PRIORITAS**	**NO**	**PRIORITAS**
1	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	6	Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
		8	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
		9	Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan
		10	Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal
2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	1	Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
		2	Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan
		3	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan
		4	Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing
		5	Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus

PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	**PRIORITAS**	**NO**	**PRIORITAS**
3	Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan	7	Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup
4	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah
		12	Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi *reward and punishment*

Dari Penyelerasan Prioritas Nasional di atas, terdapat beberapa sasaran dan prioritas nasional yang sesuai dengan tugas pokok dan sasaran kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah antara lain :

1. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pagan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru **(PN2)**;
2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi **(PN3);**
3. Membangun Desa dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan **(PN6)**.

Adapun kebijakan Pemerintah yang telah dilakukan dalam rangka pemberdayaan UMKM di Indonesia adalah:

1. Pembangunan infrastruktur

   Infrastruktur yang memadai akan membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar.

2. Program Pembiayaan

   Program pembiayaan dapat berupa fasilitasi pembiayaan modal dan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR)

3. Digitalisasi UMKM

   Digitalisasi dapat memberikan banyak manfaat bagi UMKM, termasuk efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan daya saing. Digitasliasai UMKM dapat dilakukan dengan fasilitasi dan pembinaan melalui *e-marketplace* dan penggunaan katalog lokal.

4. Sinergi dan Koordinasi

   Peningkatan sinergi dan koordinasi dengan sektor publik, akademi, dan juga sektor swasta, termasuk juga bagaimana mengembangkan skema keuangan syariah untuk UMKM sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang penghapusan kemiskinan Ekstrem mengamanatkan instansi yang membidangi urusan koperasi dan UKM untuk fasilitasi akses pembiayaan, akses pasar, serta pendampingan dan pelatihan bagi koperasi dan usaha mikro dalam pendapatan keluarga miskin ekstrem.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dindagkop & UKM Kota Pekalongan Tahun 2025 dengan memedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025, serta isu-isu strategis penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Pekalongan. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dari program dan kegiatan dalam Renja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan: Meningkatnya kualitas pelayanan publik
   - Sasaran :
     a) Meningkatnya akuntabilitas kinerja.
     b) Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
2. Tujuan: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis potensi keunggulan lokal daerah.
   - Sasaran :
     a) Meningkatnya peran koperasi dan lembaga keuangan.
     b) Meningkatnya nilai ekspor perdagangan.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh Dindagkop & UKM dengan dukungan perangkat daerah lain serta masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang lebih terukur.

Pada Rencana Kerja (Renja) Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan tahun 2025, faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, antara lain :

3.3.1. Pengentasan Kemiskinan Ekstrim Dengan Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Bidang Koperasi Dan UMKM.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menginstruksikan kepada instansi yang membidangi koperasi dan UMKM dalam untuk memberikan fasilitasi akses pembiayaan, akses pasar, serta pendampingan dan pelatihan bagi koperasi dan usaha mikro dalam peningkatan pendapatan keluarga miskin ekstrim.

Angka kemiskinan di Kota Pekalongan pada tahun 2022 sebesar 7% dan turun pada tahun 2023 menjadi 6,81%. Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2023 sebanyak 317.524 jiwa yang merupakan penduduk dalam kategori miskin ekstrim sebanyak 25.498 jiwa.

3.3.2. Peningkatan Kesetaraan Dan Kesejahteraan Melalui Kebijakan Ramah Gender.

Memperhatikan *cross cutting* Kementerian Koperasi dan UKM RI tentang isu gender bahwasanya melalui kebijakan kesetaraan dan ramah gender serta pencapaian *inclusi* ekonomi dengan mendukung UMKM yang dikelola perempuan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perlu diketahui bahwa jumlah UMKM Kota Pekalongan sebanyak 23.951 UMKM sebanyak 21.05% dan mampu secara signifikan berpengaruh positif terhadap PDRB. Dalam meningkatkan wirausaha Perempuan tersebut membutuhkan dukungan dan interfensi berupa pembiayaan, dukungan ekspor, pengembangan dan pelatihan bagi karyawan, peningkatan kualitas produk, hingga dukungan infrastruktur.

3.3.3. Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel dengan Memanfaatkan Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel ditunjukkan dengan keterbukaan informasi publik, transparansi perencanaan dan penganggaran, serta keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam Renja PD tahun 2025 Terdapat 12 program, 18 kegiatan dan 35 sub kegiatan dengan total pagu anggaran Rp.20.301.719.000, yang tersaji dalam tabel 3.2. sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dindagkop & UKM

Tahun 2025 Dan Perkiraan Maju Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17	**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KOTA PEKALONGAN**				20.301.719				18.521.127
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**				**385.300**				**2.209.866**
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)**	**Kota Pekalongan**	**32,36 persen**	**61.780**	**DAU**		**33,23 persen**	**123.668**
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kewenangan kabupaten / kota		64,46 persen	61.780	DAU		65.29 persen	123.668
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan		100 unit usaha	61.780	DAU		100 koperasi	123.668
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota**		**0**	**000**	**-**	Dana DAK Non Fisik PK2UMK tidak dialokasikan pada Tahun 2025	**59,68 persen**	**667.649**
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota		0	000	-		1.39 persen	667.649
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		0	000	-		116 koperasi	667.649
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)**		**12,27 persen**	**323.520**	**DAU**		**12,37 Persen**	**1.418.549**
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya UMKM yang mendapatkan pendampingan pengembangan usaha		6,06 persen	323.520	DAU		7.26 Persen	1.418.549
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi		47 UMKM	323.520	DAU		90 UMKM	1.418.549

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**19.916.419**				**16.311.261**
3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)**		**76,93%**	**6.330**	**DAU**		**77,70 persen**	**2.728**
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan		100 persen	4.530	DAU		100 persen	1.728
3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		6 Dokumen	4.530	DAU		3 Perizinan	1.728
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan		100 Persen	1.800	DAU		100 persen	1.000
3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang		1 Dokumen	1.800	DAU		1 perijinan	1.000
03.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya**		**100 persen**	**8.682.729**	**DAU**		**100 persen**	**6.050.840**
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Pelayanan Pasar Rakyat secara Profesional		18,75 persen	8.633.379	DAU		18.75 persen	5.928.840
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		1 Unit	1.500.000	DAU		0 Unit	000
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		12 Unit	7.133.379	DAU		16 Unit	5.928.840
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase ketercapaian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan khususnya PK5		57,47 persen	49.350	DAU		68.9 7 Persen	122.000
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		2 Dokumen	49.350	DAU		120 Orang	122.000
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya**		**96 persen**	**102.960**	**DAU**		**100 persen**	**135.000**
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase objek sasaran pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok		90,91 persen	96.740	DAU		100 persen	130.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		18 Laporan	96.740	DAU		18 Laporan	130.000
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK Outcome)		100 persen	6.220	DAU		100 persen	5.000
3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%		3 Dokumen	6.220	DAU		586 Dokumen	5.000
3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Persentase peningkatan volume ekspor**		**7,99 persen**	**98.970**	**DAU**		**8,19 persen**	**117.849**
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah pelaku usaha yang menjadi ekportir (SIDa)		26 Pelaku Usaha	98.970	DAU		28 pelaku usaha	117.849
3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi		30 UMKM	98.970	DAU		30 UMKM	117.849
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)**		**81,99 persen**	**279.022**	**DAU**		**83,99 persen**	**399.637**
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan (IKK Output)		81,99 persen	279.022	DAU		83.99 persen	399.637
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		5164 UTTP	254.112	DAU		5.290 UTTP	354.637
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina		100 Orang	24.910	DAU		5.164 UTTP	45.000
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)**		**6,42 persen**	**969.080**	**DAU**		**7,50 persen**	**421.031**
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Peningkatan usaha mikro yang difasilitasi pemasaran produknya		128 UMKM	969.080	DAU		100 persen	421.031
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		150 UMKM	872.330	DAU		12 UMKM	370.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi		30 UMKM	96.750	DAU		12 UMKM	51.031
3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**		**100 persen**	**7.014.252**	**DAU**		**100 persen**	**7.979.431**
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 persen	18.084	DAU		100 persen	22.850
3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	3.132	DAU		2 Dokumen	2.750
3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	2.952	DAU		2 Dokumen	1.650
3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15 Laporan	12.000	DAU		4 dokumen	18.450
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah		100 persen	6.996.168	DAU		100 persen	7.956.581
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		62 Orang/Bulan	6.926.650	DAU		14 bulan	7.881.731
3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	67.800	DAU		12 bulan	73.200
3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Dokumen	1.718	DAU		1 dokumen	1.650
3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**		**100 persen**	**2.763.076**	**DAU**		**100 persen**	**1.204.745**
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 persen	9.500	DAU		100 persen	14.500
3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 Paket	9.500	DAU		2 kali	14.500
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah		100 persen	633.441	DAU		100 persen	317.450

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)
3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	5.000	DAU		12 bulan	2.500
3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	196.011	DAU		12 bulan	47.500
3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	5.000	DAU		12 bulan	2.500
3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	85.850	DAU		12 bulan	64.950
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		13 Paket	67.000	DAU		12 bulan	60.000
3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	2.580	DAU		12 bulan	2.500
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		200 Laporan	272.000	DAU		55 org/kli	137.500
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	1.498.735	DAU		100 persen	518.053
3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	2.500	DAU		12 bulan	2.400
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	979.300	DAU		12 bulan	415.240
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	516.935	DAU		12 bulan	100.413
3.30.01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	621.400	DAU		100 Persen	354.742
3.30.01.2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		44 Unit	465.000	DAU		36 Unit	304.742
3.30.01.2.09.0001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	130.000	DAU		2 Unit	30.000
3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		50 Unit	26.400	DAU		12 Bulan	20.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dindagkop & UKM Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menetapkan tujuan, sasaran, stategi dan kebijakan yang diarahkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Pekalongan. Untuk dapat menjalankan proses tersebut, beberapa kegiatan direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2025 yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana kerja ini selain sebagai upaya menjalankan tugas dan fungsi, juga dalam upaya melaksanakan pencapaian target program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025. Rencana kerja DIndagkop & UKM Tahun 2025 mengacu kepada Renstra Dindagkop & UKM 2021-2026, mempunyai program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi. Program, kegiatan dan sub kegiatan Dindagkop & UKM Tahun 2025 mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang sudah ada dalam SIPD, sehingga ketercapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.

Berpedoman juga pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 70 tahun 2019 bahwa pemerintah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah yang dikelola dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan telah memanfaatkan SIPD dalam proses perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangannya.

Rencana Program, Kegaiatan dan pendanaan dalam Renja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2025 dilakukan malalui https://sipd-ri.kemendagri.go.id dan dapat dilihat sebagaimana dokumen terlampir.

Rencana kerja dan pendanaan Dindagkop & UKM Kota Pekalongan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dindagkop & UKM Kota PekalonganTahun Anggaran 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana
1	2	3	5	6	7
	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KOTA PEKALONGAN			20.301.719	
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**			**385.300**	
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)**	**32,36 persen**	**61.780**	**DAU**
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kewenangan kabupaten / kota	64,46 persen	61.780	DAU
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	100 unit usaha	61.780	DAU
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota**	**0**	**000**	**-**
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	0	000	-
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	0	000	-
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)**	**12,27 persen**	**323.520**	**DAU**
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya UMKM yang mendapatkan pendampingan pengembangan usaha	6,06 persen	323.520	DAU
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	47 UMKM	323.520	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana
1	2	3	5	6	7
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			**19.916.419**	
3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)**	**76,93%**	**6.330**	**DAU**
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan	100 persen	4.530	DAU
3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6 Dokumen	4.530	DAU
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan	100 Persen	1.800	DAU
3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	1.800	DAU
03.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya**	**100 persen**	**8.682.729**	**DAU**
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Pelayanan Pasar Rakyat secara Profesional	18,75 persen	8.633.379	DAU
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	1.500.000	DAU
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	12 Unit	7.133.379	DAU
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase ketercapaian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan khususnya PK5	57,47 persen	49.350	DAU
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen	49.350	DAU
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya**	**96 persen**	**102.960**	**DAU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana
1	2	3	5	6	7
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase objek sasaran pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok	90,91 persen	96.740	DAU
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	18 Laporan	96.740	DAU
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK Outcome)	100 persen	6.220	DAU
3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	3 Dokumen	6.220	DAU
3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Persentase peningkatan volume ekspor**	**7,99 persen**	**98.970**	**DAU**
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah pelaku usaha yang menjadi ekportir (SIDa)	26 Pelaku Usaha	98.970	DAU
3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	30 UMKM	98.970	DAU
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)**	**81,99 persen**	**279.022**	**DAU**
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan (IKK Output)	81,99 persen	279.022	DAU
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5164 UTTP	254.112	DAU
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100 Orang	24.910	DAU
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)**	**6,42 persen**	**969.080**	**DAU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana
1	2	3	5	6	7
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Peningkatan usaha mikro yang difasilitasi pemasaran produknya	128 UMKM	969.080	DAU
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	150 UMKM	872.330	DAU
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	30 UMKM	96.750	DAU
3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100 persen**	**7.014.252**	**DAU**
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	18.084	DAU
3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.132	DAU
3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.952	DAU
3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	12.000	DAU
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	6.996.168	DAU
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/Bulan	6.926.650	DAU
3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	67.800	DAU
3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1.718	DAU
3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 persen**	**2.763.076**	**DAU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana
1	2	3	5	6	7
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	9.500	DAU
3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	9.500	DAU
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	633.441	DAU
3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.000	DAU
3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	196.011	DAU
3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	5.000	DAU
3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	85.850	DAU
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	67.000	DAU
3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.580	DAU
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	272.000	DAU
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	1.498.735	DAU
3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.500	DAU
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	979.300	DAU
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	516.935	DAU
3.30.01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	621.400	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana
1	2	3	5	6	7
3.30.01.2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	44 Unit	465.000	DAU
3.30.01.2.09.0001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	130.000	DAU
3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	26.400	DAU

Sumber : Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, 2024

Dari tabel 4.1 tersebut diatas dapat dilihat bahwa rencana kerja pada tahun 2025 Dindagkop & UKM Kota Pekalongan melaksanakan 2 (dua) Penunjang Urusan Pemerintahan yaitu Urusan Perdagangan dan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, kedua urusan tersebut dituangkan ke dalam 12 (dua belas) Program, 18 (Delapan belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan.

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Rancangan Renja Dindagkop & Kota Pekalongan Tahun 2025 disusun berdasarkan pada dokumen perencanaan jangka menengah RPJMD Kota Pekalongan 2021-2026, dan RENSTRA Dindagkop & UKM 2021-2026 serta dokumen perencanaan tahunan RKPD Kota Pekalongan tahun 2025. Rencana Kerja Dindagkop & UKM Kota Pekalongan Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, analisis kebutuhan, dan usulan dari para pemangku kepentingan. Rencana Kerja Dindagkop & UKM Tahun 2025 memuat 2 unsur penunjang urusan pemerintahan, yaitu urusan perdagangan dan urusan koperasi dan usaha kecil menengah, yang terdiri dari 12 program 18 kegiatan dan 35 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 20.301.719.000,- (dua puluh milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah).

Substansi Renja Dindagkop & UKM disusun dengan berpedoman Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2025 disusun dalam kerangka menjamin keberlangsungan dan konsistensi program dan kegiatan yang belum sempat dituntaskan pada pelaksanaan tahun anggaran 2024.

5.1 CATATAN PENTING

Dalam rangka pelaksanaan dan anggaran maka dipandang perlu memperhatikan ketersediaan anggaran dengan kesesuaian kebutuhan. Selain itu dalam hal pelaksanaan semua program dan kegiatan harus mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

5.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Perencanaan yang baik adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku yang berkepentingan dalam pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (stakeholders) yang tetap harus dikedepankan.

Dalam rangka meningkatkan kefektifan pelaksanaan Rencana Kerja Dindagkop & UKM Kota Pekalongan Tahun 2025, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagi berikut:

1. Substansi Renja Dindagkop & UKM disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025.
2. Tindak lanjut alokasi anggaran Dindagkop & UKM Kota Pekalongan atas proses penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Renja Dindagkop & UKM, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian target yang telah ditetapkan.
3. Dindagkop & UKM Kota Pekalongan berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Dindagkop & UKMKota Pekalongan Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025.
4. Dindagkop & UKM Kota Pekalongan berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Renja Dindagkop & UKM Kota Pekalongan Tahun 2025 dan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025.

5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Dindagkop & UKM Kota Pekalongan Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025.

5.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebik baik di masa yang akan datang dengan memanfaatkan, mengelola potensidan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan oleh masing masing bidang atau bagian. Dengan demikian kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Renja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2025 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Kami berharap, bahwa Renja Dindagkop & UKM ini dapat mengakomodir seluruh target indikor kinerja untuk urusan perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah. Adapun jika terdapat kendala dalam capaian indikator kinerja tersebut, baik diakibatkan masih belum memadainya anggaran dan permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.

Demikianlah Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025disusun, dibuat sebagai bahan usulan untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025.

Pekalongan, 8 Agustus 2024
Kepala Dindagkop & UKM
Kota Pekalongan

Drs. SUPRIONO, M.M
NIP. 19661008 199203 1 010

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

City Of Crafts and Folk Art
Kota Pekalongan
Designated UNNESCO Creative City In 2014

RENCANA KERJA TAHUN 2025

DINPERINAKER

(0285) 421731
dinperinaker.pekalongankota.go.id
Jl. Majapahit 14 Kota Pekalongan

RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2025

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
(DINPERINAKER)

KOTA PEKALONGAN

2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada akhirnya Rencana Kinerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kota Pekalongan Tahun 2025 dapat disajikan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Rencana Kerja (Renja) ini merupakan proses Penyusunan Rencana sebagai penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinperinaker Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026

Rencana Kerja (Renja) Dinperinaker Kota Pekalongan Tahun 2025 ini pada hakikatnya merupakan perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Dengan telah disusunnya Rencana Kinerja (Renja) Dinperinaker Kota Pekalongan Tahun 2025 ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait, khususnya Dinperinaker Kota Pekalongan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun serta sarana evaluasi atas pencapaian kinerjanya dengan memperhatikan kriteria komponen-komponen perencanaan, memanfaatkan sistem pengukuran kinerja untuk monitoring kegiatan dan meningkatkan mutu informasi dalam laporan kinerja.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

KEPALA DINPERINAKER
KOTA PEKALONGAN

BETTY DAHFIANI DAHLAN, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19690203 199803 2 004

DAFTAR ISI

Daftar Isi 3
Daftar Tabel 4

BAB I. PENDAHULUAN 5

1.1. Latar Belakang 5
1.2. Landasan Hukum 6
1.3. Maksud dan Tujuan 8
1.4. Sistematika Penulisan 9

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINPERINAKER TAHUN LALU 11

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinperinaker Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinperinaker 11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinperinaker 21
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinperinaker 31
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 34
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 46

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINPERINAKER 47

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 47
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinperinaker 49
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 51

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINPERINAKER .. 65

4.1. Rencana Kerja 65
4.2. Pendanaan Perangkat Daerah 66

BAB V. PENUTUP 70

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2023 12

Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinperinaker dan Pencapaian Renstra Dinperinaker s.d. Tahun 2024 (Tahun Berjalan) 14

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinperinaker Kota Pekalongan Tahun 2023 23

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinperinaker Kota Pekalongan Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2024 dan 2025 24

Tabel 2.5. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Pekalongan 35

Tabel 2.6. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Pekalongan 46

Tabel 3.1. Sinkronisasi Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional. dengan Prioritas Kota Pekalongan Tahun 2025..... 47

Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinperinaker Kota Pekalongan..... 57

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan 65

Tabel 4.2 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu Anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2025 66

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Rencana Kerja Dinperinaker Kota Pekalongan merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinperinaker Kota Pekalongan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD berpedoman pada Renstra Dinperinaker Kota Pekalongan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efesien dan akuntanbilitas yang berorientasi pada hasil dan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan kinerja di tahun yang akan datang, maka perlu segera menetapkan Rencana Kerja Dinperinaker Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 yang memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang dilengkapi dengan dana indikatif serta sumber dananya dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025.

Penetapan Rencana Kerja (Renja) ini dimaksudkan sebagai tolok ukur dalam menghitung keberhasilan organisasi Instansi Pemerintah Dinperinaker Kota Pekalongan yang akan dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinperinaker Kota Pekalongan pada akhir tahun anggaran. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang melatar belakangi penyusunan Renja Dinperinaker Kota Pekalongan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Nasional;
12. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021- 2026;
18. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
19. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 88 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan;
20. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinperinaker Tahun 2025 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah serta sebagai wadah sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan isu-isu strategis tahun 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinperinaker Kota Pekalongan Tahun 2025, adalah :

1. Sebagai pedoman resmi bagi Dinperinaker Kota Pekalongan dalam menentukan prioritas program/ kegiatan dan kebijakan anggaran tahunan yang berdasarkan APBD;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinperinaker Kota Pekalongan untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya;
3. Pedoman Pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Dinperinaker Tahun 2025;
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi;
5. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah dan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menurut prinsip- prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENJA

Rencana Kerja Dinperinaker Kota Pekalongan tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINPERINAKER TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinperinaker Kota

Pekalongan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinperinaker Kota Pekalongan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinperinaker Kota Pekalongan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinperinaker Kota Pekalongan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINPERINAKER KOTA PEKALONGAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinperinaker Kota Pekalongan

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINPERINAKER KOTA PEKALONGAN

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINPERINAKER TAHUN LALU

Berdasarkan pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan yang disajikan dalam tabel pengukuran kinerja kegiatan, maka untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, dilakukan evaluasi dan analisis efisiensi dan efektivitas pengukuran kinerja setiap indikator kinerja kegiatan, agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, tingkat efisiensi yang dilakukan dan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak dalam rangka perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dan strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan di masa yang akan datang.

1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINPERINAKER KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA DINPERINAKER KOTA PEKALONGAN.

   Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinperinaker Kota Pekalongan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis pada tahun yang bersangkutan. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinperinaker Tahun 2023 dengan mendasarkan pada hasil pengukuran setiap indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinperinaker Kota Pekalongan tahun 2021-2026 yang disajikan pada tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinperinaker Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Dinperinaker sampai dengan Tahun 2023 terlampir.

   Pengukuran kinerja kegiatan/sub kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan penetapan indikator kinerja, yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan meliputi

indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinperinaker 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024, yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinperinaker Tahun 2021 – 2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinperinaker tahun-tahun sebelumnya, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan
Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Nilai SAKIP OPD	Indeks	73	74,70	102,33
2	Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	Persen	52,26	49,26	94,27
3	Pertumbuhan Industri	Persen	0,099	n/a	n/a

Dari table tersebut dapat diketahui capaian indikator kinerja utama pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Capaian kinerja pada indikator Nilai SAKIP OPD sebesar 102,33%, capaian ini melebihi/melampaui target yang ditetapkan.
- Capaian kinerja pada indikator Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan sebesar 94,27%, capaian ini kurang dari target yang ditetapkan.

- Capaian kinerja pada indikator Pertumbuhan Industri sebesar n/a atau belum tercapai, hal ini disebabkan capaian indikator tersebut berdasarkan angka yang direalese oleh BPS, sedangkan pada saat laporan ini dibuat angka tersebut belum realese.

Faktor pendukung yang mempengaruhi capaian indikator kinerja utama pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

- Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar OPD terkait, stakehorder dan masyarakat sebagai penerima manfaat.
- Dukungan anggaran yang memadai sehingga dapat mencapai target yang diharapkan.
- Meningkatnya partisipasi perusahaan dalam mengikuti kegiatan.
- Adanya Kerjasama yang baik dari Manajemen / HRD Perusahaan.
- Adanya komunikasi yang dapat dilakukan dengan mudah dengan media elektronik.
- Sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan.
- Kerjasama dan koordinasi intern antar bidang dalam ketepatan waktu / jadwal pelaksanaan.

Untuk melihat capaian kinerja baik secara terperinci tersaji dalam tabel T-C 29 dibawah ini :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinperinaker dan Pencapaian Renstra Dinperinaker s/d Tahun 2023
Kota Pekalongan

Nama OPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

No.	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (2021)	Realisasi 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Realisasi 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	Persen	0,55	0,33	0,372	0,42	1,09	1,792	325,82	Tercapai
A	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Kejuruan	Persen	100	100	100	100	101,18	101,18	101,18	Tercapai
1	Jumlah lulusan bersertifikat kompetensi	orang	-	-	-	32	50	50	156,25	Tercapai
2	Jumlah pengangguran yang difasilitasi pelatihan	Orang	1360	-	2.318	2.875	3.007	5.325	391,54	Tercapai
3	Jumlah perusahaan yang mengadakan kemitraan MoU dengan BLK melalui Kios 3in1 (SIDa)	perusahaan	92	12	16	16	16	50	54,35	Belum tercapai
4	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	orang	-	-	-	128	288	228	225	Tercapai
5	Jumlah bulan pemeliharaan bangunan BLK	bulan	-	-	-	12	12	12	100	Tercapai
6	Jumlah instruktur yang dinilai	instruktur	15	14	14	14	14	14	93,33	Ada instruktur yg pensiun
7	Jumlah kejuruan yang alat-alat pelatihannya dirawat	kejuruan	65	10	11	5	11	30	46,15	Belum tercapai
B	Persentase kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	persen	100	-	100	70	-	100	100	Tercapai,
8	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Ketrampilan Kerja di Kelurahan	Orang	-	-	1.218	80	2.139	3.357	275,62	Tercapai
C	Jumlah kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil dilaksanakan	tenant	6	6	6	6	6	6	100	Tercapai
9	Jumlah tenant yang memperoleh pembinaan (SIDa)	tenant	6	6	6	6	6	6	100	Tercapai
D	Persentase kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	persen	53,33	0	-	33,33	40,70	40,70	76,32	Belum tercapai

No.	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (2021)	Realisasi 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Realisasi 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Jumlah alumni siswa pelatihan yang termonitor	Alumni siswa	2100	300	600	160	160	1.060	50,48	Belum tercapai
II	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	persen	29,93	19,93	36,07	23,93	16,70	24,23	80,97	Belum Tercapai
E	Persentase kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	persen	14,08	8,52	22,30	10,75	64,22	31,68	225	Tercapai
F	Jumlah laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja yang disusun	buku	72	12	12	12	12	48	66,67	Belum tercapai
11	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kab/Kota (IKK Output)	bulan	-	-	-	12	12	12	100	Tercapai
12	Jumlah layanan informasi pasar kerja yang dilaksanakan	Layanan	-	-	-	700	701	701	100,14	Tercapai
13	Jumlah leaflet antar kerja yang dicetak	Rim	-	-	-	4	4	4	100	Tercapai
14	Jumlah orang yang difasilitasi pelayanan online sistem antar Kerja / AK I	orang	-	-	-	1.000	565	565	56,50	Tidak Tercapai
G	persentase CPMI yang terlayani secara legal	persen	100	29	467,65	100	100	283,82	283,82	Tercapai
15	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja (IKK Output)	orang	230	-	-	60	60	60	26,09	Belum Tercapai
16	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata (IKK Output)	orang	230	-	-	40	40	40	17,39	Belum Tercapai
17	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia yang terfasilitasi rekomendasi paspor	orang	-	-	-	75	75	75	100	Tercapai
18	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan PMI	orang	-	-	-	105	125	125	119,05	Tercapai
19	Jumlah pencari kerja yang mengikuti sosialisasi penempatan TKI	orang	250	50	80	120	120	250	100	Tercapai
H	Jumlah perusahaan terlayani perpanjangan IMTA di Kab/Kota	perusahaan	10	2	2	2	2	6	60	Belum Tercapai
III	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yg layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	persen	49,02	45,33	57	46,80	49,93	53,47	109,07	Tercapai

No.	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (2021)	Realisasi 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Realisasi 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Persentase kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	persen	42,28	37	10,11	39,11	73,58	41,85	98,97	Belum tercapai
20	Jumlah perusahaan yang mengikuti pembinaan Peraturan Perusahaan (PP) (SIDa)	perusahaan	175	35	30	35	35	100	57,14	Belum tercapai
21	Jumlah perusahaan yang didata mengikuti pembinaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) (SIDa)	perusahaan	75	35	30	30	30	95	126,67	Tercapai
22	Jumlah pekerja informal yang menerima bantuan premi	orang	-	-	-	1.000	1.000	1.000	100	Tercapai
23	Jumlah perusahaan yang didata ketenagakerjaannya	perusahaan	484	144	108	72	72	324	66,94	Belum tercapai
24	Jumlah perusahaan yang mengikuti pembinaan pengupahan	perusahaan	250	35	35	40	40	110	44	Belum tercapai
25	Jumlah perusahaan yang mengikuti sosialisasi UMK	perusahaan	-	-	-	45	45	45	100	Tercapai
26	Jumlah perusahaan yang mengikuti workshop struktur skala upah	perusahaan	-	-	-	40	40	40	100	Tercapai
27	Jumlah rekomendasi UMK yang disusun	Rekomendasi	5	1	1	1	1	3	60	Belum tercapai
28	Jumlah sidang/ rapat Dewan Pengupahan	kali	40	8	8	8	8	24	60	Belum tercapai
J	Persentase kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	persen	80,06	48,57	67,44	68,07	130,43	98,94	123,58	Tercapai
29	Jumlah perusahaan yang mengikuti dialog pencegahan perselisihan Hubungan Industrial/HI	perusahaan	250	0	50	35	35	85	34	Belum tercapai
30	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang difasilitasi mediasi	Kasus	140	28	22	28	28	78	55,71	Belum tercapai
31	Jumlah pengurus serikat pekerja/serikat buruh/ pengusaha/manajemen perusahaan, dan organisasi pengusaha yang didata untuk mengikuti pembinaan	Perusahaan / pengurus	525	105	80	80	80	265	50,48	Belum Tercapai
32	Jumlah peserta yang mengikuti Porseni Tripartit	orang	900	100	160	150	150	410	45,56	Belum tercapai
33	Jumlah sidang / rapat LKS Tripartit	kali	40	8	6	8	8	22	55	Belum tercapai

No.	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (2021)	Realisasi 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Realisasi 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Jumlah peserta pembinaan fasiitas kesejahteraan pekerja	perusahaan	250	-	-	55	150	150	60	Belum Tercapai
III a	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
K	Persentase ketercapaian perencanaan,penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
35	Jumlah dokumen renja yang disusun	dokumen	2	2	2	2	2	2	100	Tercapai
36	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	dokumen	2	2	2	2	2	2	100	Tercapai
37	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	bulan	12	12	12	12	12	12	100	Tercapai
38	Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	dokumen	4	4	4	4	4	4	100	Tercapai
39	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)	dokumen	2	2	2	2	2	2	100	Tercapai
40	Jumlah Dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan (RTP) yang disusun	dokumen	5	5	5	5	5	5	100	Tercapai
L	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
41	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	bulan	12	12	14	14	14	14	116,67	Tercapai
42	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	bulan	12	12	12	12	12	12	100	Tercapai
43	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	dokumen	5	1	1	1	1	3	60	Belum Tercapai
III b	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	100	105	100	100,30	100	100	Tercapai
M	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
44	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik	kali	1	1	1	1	1	1	100	Tercapai
N	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	persen	100	100	113	100	100,89	106,95	106,95	Tercapai
45	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	100	Tercapai
46	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	bulan	12	12	12	12	12	12	100	Tercapai

No.	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (2021)	Realisasi 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Realisasi 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	unit	120	27	5	8	9	41	34,17	Belum Tercapai
48	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	bulan	12	12	12	12	12	12	100	Tercapai
49	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	bulan	11	11	11	11	11	11	100	Tercapai
50	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	12	12	12	12	100	Tercapai
51	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	12	12	12	12	12	100	Tercapai
52	Jml fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	Orang/kali	450	91	99	85	85	275	61,11	Belum Tercapai
O	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
53	Jumlah bulan penyediaan jasa surat-menyurat	bulan	12	12	12	12	12	12	100	Tercapai
54	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	bulan	12	12	12	12	12	12	100	Tercapai
55	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	100	Tercapai
III c	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	105	100	100	101,67	101,67	Tercapai
P	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
56	Jumlah pekerjaan yang dilaksanakan	pekerjaan	-	-	1	1	1	1	100	Tercapai
Q	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	109,82	100	100	104,91	104,91	Tercapai
57	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional	bulan	37 unit	37 unit	39 unit	12 bln	12 bln	12 bln	100	Tercapai
58	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/ berkala	unit	2	1	1	2	2	2	100	Tercapai
59	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala.	bulan	12	12	12	12	12	12	100	Tercapai

No.	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (2021)	Realisasi 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Realisasi 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IV	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	persen	21,04	20,59	66,60	20,43	75,34	70,97	337,31	Tercapai
R	Persentase kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dilaksanakan	persen	4,5	2,0	101,68	3	100	100,84	2.240,89	Tercapai
60	Jumlah dokumen evaluasi RIPIK yang disusun (SIDa)	dokumen	1	-	1	1	1	1	100	Tercapai
61	Jumlah sentra yang difasilitasi kelembagaan	sentra	1			1	1	1	100	Tercapai
62	Jumlah IKM Batik/Kuliner/Kraft/Jamu/ Bordir/Canting /Kemasan yang mengikuti pelatihan pengembangan produk (SIDa)	IKM	150	-	40	30	30	70	46,67	Belum Tercapai
63	Jumlah IKM yang dilatih produksi bersih/industri hijau (SIDa)	IKM	-	-	-	30	30	30	100	Tercapai
64	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	dokumen	-	-	-	2	2	2	100	Tercapai
65	Jumlah SDM IKM yang dilatih Pelatihan Kemasan	IKM	-	-	-	25	30	30	120	Tercapai
66	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan Peningkatan Teknologi Digitalisasi IKM (SIDa)	IKM	-	-	-	30	30	30	100	Tercapai
67	Jumlah IKM/Perusahaan yang mengikuti sosialisasi SIINas	IKM/ Perusahaan	-	-	-	30	30	30	100	Tercapai
V	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	persen	26	23	100	24	9,04	54,52	209,69	Tercapai
S	Persentase pelaksanaan kegiatan rekomendasi Penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/Kota	persen	33	23	19,35	25	79,26	49,31	149,41	Tercapai
68	Jumlah ikm yang mengikuti pelatihan diversifikasi pangan	IKM	-	-	-	40	40	40	100	Tercapai
69	Jumlah pembatik yang mengikuti SKKNI	Pembatik	-	-	-	100	93	93	93	Belum Tercapai

No.	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (2021)	Realisasi 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Realisasi 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VI	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)	Persen	100	100	-	100	95	95	95	Belum Tercapai
T	Persentase kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan	persen	35	23	-	28	71,32	71,32	203,77	Tercapai
70	Jumlah IKM yang diupdate guna meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengembangan usaha (SIDa)	IKM	-	-	-	2.000	2.000	2.000	100	Tercapai

2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINPERINAKER

Analisis efisiensi dan efektivitas pengukuran kinerja setiap indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinperinaker Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026 yang menunjukkan peran utama dan kontribusi Dinperinaker Kota Pekalongan dalam mendukung tercapaiannya Misi ke 2 dalam RPJMD 2021 – 2026 yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan. Dan Misi ke 5 dalam RPJMD 2021 – 2026 yaitu Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal. Serta Misi 7 dalam RPJMD 2021-2026 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government.

Analisis capaian kinerja sasaran dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi yang dilakukan dan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi, serta penentuan penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Untuk memudahkan dalam melakukan analisis capaian kinerja setiap sasaran kinerja, berikut gambaran tentang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output dapat dilihat pada table T-C 30 berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan DINPERINAKER Kota Pekalongan

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Dinperinaker				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat			79,97	80,22	80,47	80,72	93,95	95,36	80,47	80,72	Indeks
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja			70,28	70,54	70,81	71,08	75,77	73,95	70,81	71,08	Persen
3	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan			2,28 - 2,84	2,48 - 2,83	2,53 – 3,32	4,55	n/a	n/a	2,53 – 3,32	4,55	Persen
4	Nilai SAKIP OPD			71,50	73	74,50	76	73,40	74,70	74,50	76	Nilai
5	Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan			52,22	52,26	52,29	52,33	61,50	49,26	52,29	52,33	Persen
6	Pertumbuhan Industri			0,099	0,09	0,085	0,085	4,26	2,30	0,085	0,085	Persen

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinperinaker Kota Pekalongan Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2024 dan 2025

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Satuan	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (Tahun n)	Tahun 2025 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	-	V	Persen	0,372	0,42	0,46	0,50	0,372	1,09	0,46	0,50	
A	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Kejuruan	-	-	Persen	100	100	100	100	100	101,18	100	100	
1	Jumlah lulusan bersertifikat kompetensi	-	-	orang	48	48	48	48	-	50	48	48	
2	Jumlah pengangguran yang difasilitasi pelatihan	-	-	Orang	240	256	272	288	2318	3007	1500	2000	
3	Jumlah perusahaan yang mengadakan MoU dg BLK melalui Kios 3in1 (SIDa)	-	-	perusahaan	16	16	16	16	16	16	16	16	
4	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	-	-	orang	-	-	-	-	-	288	300	300	
5	Jumlah bulan pemeliharaan bangunan BLK			bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	
6	Jumlah instruktur yang dinilai	-	-	instruktur	15	15	15	15	14	14	15	15	Ada instruktur yg pensiun
7	Jumlah kejuruan yang alat-alat pelatihannya dirawat	-	-	kejuruan	11	11	11	11	11	11	11	11	
B	Persentase kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	-	persen	60	70	80	90	100	-	80	90	
8	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Ketrampilan Kerja di Kelurahan	-	-	orang	-	-	-	-	1.218	2.139	80	80	
C	Jumlah kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil dilaksanakan	-	-	tenant	6	6	6	6	6	6	6	6	
9	Jumlah tenant yang memperoleh pembinaan (SIDa)	-	-	tenant	6	6	6	6	6	6	6	6	
D	Persentase kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	-	-	persen	26,67	33,33	40	46,67	-	40,70	40	46,67	
10	Jumlah alumni siswa pelatihan yang termonitor	-	-	Alumni siswa	600	600	300	300	600	160	300	300	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Satuan	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (Tahun n)	Tahun 2025 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II	Persentase tenaga kerja yang ditempat-kan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	-	V	persen	21,93	23,93	25,93	27,93	36,07	16,70	25,93	27,93	
E	Persentase kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	-	-	persen	9,63	10,75	11,86	12,97	22,30	64,22	11,86	12,97	
F	Jumlah laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja yang disusun	-	-	buku	12	12	12	12	12	12	12	12	
11	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kab/Kota (IKK Output)	-	-	bulan	-	-	-	-	-	12	12	12	
12	Jumlah layanan informasi pasar kerja yang dilaksanakan	-	-	Layanan	-	-	-	-	-	701	700	700	
13	Jumlah leaflet antar kerja yang dicetak	-	-	Rim	-	-	-	-	-	4	4	4	
14	Jumlah orang yang difasilitasi pelayanan online sistem antar Kerja / AK I	-	-	orang	-	-	-	-	-	565	500	500	
G	Persentase CPMI yang terlayani secara legal	-	-	persen	100	100	100	100	467,65	100	100	100	
15	jumlah calon pekerja migran Indonesia (CPMI)/calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Yg mendapatkan mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja (IKK Output)	-	-	orang	30	40	50	55	-	60	50	55	
16	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata (IKK Output)	-	-	orang	30	40	50	55	-	40	50	55	
17	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia yang terfasilitasi rekomendasi paspor	-	-	orang	-	-	-	-	-	75	75	75	
18	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan PMI	-	-	orang	-	-	-	-	-	125	120	120	
19	Jumlah pencari kerja yang mengikuti sosialisasi penempatan TKI	-	-	orang	50	50	50	50	80	120	50	50	
H	Jumlah perusahaan terlayani perpanjangan IMTA di Kab/Kota	-	-	perusahaan	2	2	2	2	2	2	2	2	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Satuan	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (Tahun n)	Tahun 2025 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
III	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	-	V	persen	46,05	46,80	47,51	48,27	57	49,93	47,51	48,27	
I	Persentase kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	-	-	persen	38,06	39,11	40,17	41,22	10,11	73,58	40,17	41,22	
20	Jumlah perusahaan yang mengikuti pembinaan peraturan perusahaan (PP) (SiDa)	-	-	perusahaan	35	35	35	35	30	35	35	35	
21	Jumlah perusahaan yang didata mengikuti pembinaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) (SIDa)	-	-	perusahaan	15	15	15	15	30	30	15	15	
22	Jumlah pekerja informal yang menerima bantuan premi	-	-	orang	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	
23	Jumlah perusahaan yang didata ketenagakerjaannya	-	-	perusahaan	484	484	484	484	108	72	75	75	
24	Jumlah perusahaan yang mengikuti pembinaan pengupahan	-	-	perusahaan	50	50	50	50	35	40	50	50	
25	Jumlah perusahaan yang mengikuti sosialisasi UMK	-	-	perusahaan	-	-	-	-	-	45	40	40	
26	Jumlah perusahaan yang mengikuti workshop struktur skala upah	-	-	perusahaan	-	-	-	-	-	40	40	40	
27	Jumlah rekomendasi UMK yang disusun	-	-	Rekomendasi	1	1	1	1	1	1	1	1	
28	Jumlah sidang/ rapat Dewan Pengupahan	-	-	kali	8	8	8	8	8	8	8	8	
J	Persentase kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	-	-	persen	52,19	68,07	72,45	77,11	67,44	130,43	72,45	77,11	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Satuan	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (Tahun n)	Tahun 2025 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	Jumlah perusahaan yang mengikuti dialog pencegahan perselisihan Hubungan Industrial	-	-	perusahaan	50	50	50	50	50	35	50	50	
30	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang difasilitasi mediasi	-	-	kasus	28	28	28	28	22	28	28	28	
31	Jumlah pengurus serikat pekerja/ serikat buruh/pengusaha/manajemen perusahaan, dan organisasi pengusaha yg didata untuk mengikuti pembinaan	-	-	Perusahaan/pengurus	105	105	105	105	80	80	105	105	
32	Jumlah peserta yang mengikuti Porseni Tripartit	-	-	orang	100	900	900	900	160	150	150	150	
33	Jumlah sidang / rapat LKS Tripartit	-	-	kali	8	8	8	8	6	8	8	8	
34	Jumlah peserta pembinaan fasilitas kesejahteraan pekerja	-	-	perusahaan	50	50	50	50	-	150	50	50	
III a	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	-	-	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
K	Persentase ketercapaian perencanaan,penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	-	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
35	Jumlah dokumen renja yang disusun	-	-	dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	
36	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	-	-	dokumen	4	4	4	4	2	2	4	4	
37	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	-	-	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	
38	Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	-	-	dokumen	4	4	4	4	4	4	4	4	
39	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)	-	-	dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	
40	Jumlah Dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	-	-	dokumen	5	5	5	5	5	5	5	5	
L	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	-	-	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
41	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	-	-	bulan	12	12	12	12	14	14	14	14	
42	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	-	-	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Satuan	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (Tahun n)	Tahun 2025 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	-	-	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	
III b	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	-	persen	100	100	100	100	105	100,30	100	100	
M	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	-	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
44	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik	-	-	kali	2	2	2	2	1	1	2	2	Perubahan indikator
N	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	-	-	persen	100	100	100	100	113	100,89	100	100	
45	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	-	-	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	
46	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	-	-	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	
47	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	-	-	unit	24	24	24	24	5	9	24	24	
48	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	-	-	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	
49	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	-	-	bulan	11	11	11	11	11	11	11	11	
50	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	-	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	
51	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	-	-	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	
52	Jml fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	-	-	Orang/kali	90	90	90	90	99	85	90	90	
O	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
53	Jumlah bulan penyediaan jasa surat-menyurat	-	-	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	
54	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	-	-	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Satuan	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (Tahun n)	Tahun 2025 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	-	-	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	
III c	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	-	-	persen	100	100	100	100	105	100	100	100	
P	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
56	Jumlah pekerjaan yang dilaksanakan	-	-	pekerjaan	1	0	0	0	1	1	0	0	Indikator baru
Q	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	persen	100	100	100	100	109,82	100	100	100	
57	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/ operasional	-	-	bulan	26 unit	37 unit	37 unit	37 unit	39 unit	12	12	12	
58	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	-	-	unit	1	2	2	2	1	2	2	2	Perubahan target
59	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala	-	-	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	
IV	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	-	V	persen	20,41	20,43	20,75	20,97	66,60	75,34	20,75	20,97	
R	Persentase kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dilaksanakan	-	-	persen	2,5	3,0	3,5	4,0	101,68	100	3,5	4,0	
60	Jumlah dokumen evaluasi RIPIK yang disusun (SIDa)	-	-	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	
61	Jumlah sentra yang difasilitasi kelembagaan	-	-	Sentra	-	-	-	-	-	1	1	1	
62	Jumlah IKM Batik/Kuliner/Kraft/ Jamu/ Bordir/Canting /Kemasan yang mengikuti pelatihan pengembangan produk (SIDa)	-	-	IKM	30	30	30	30	40	30	30	30	
63	Jumlah IKM yang dilatih produksi bersih/industri hijau (SIDa)	-	-	IKM	-	-	-	-	-	30	30	30	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Satuan	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (Tahun n)	Tahun 2025 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	-	-	Dokumen	-	-	-	-	-	2	2	2	
65	Jumlah SDM IKM yang dilatih Pelatihan Kemasan	-	-	IKM	-	-	-	-	-	30	25	25	
66	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan Peningkatan Teknologi Digitalisasi IKM (SIDa)	-	-	IKM	-	-	-	-	-	30	30	30	
67	Jumlah IKM/Perusahaan yang mengikuti sosialisasi SIINas	-	-	IKM/Perusahaan	-	-	-	-	-	30	30	30	
V	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	-	V	persen	24	24	25	25	100	9,04	25	25	
S	Persentase pelaksanaan kegiatan rekomendasi Penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/Kota	-	-	persen	23	25	28	30	19,35	79,26	28	30	
68	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan diversifikasi pangan	-	-	IKM	-	-	-	-	-	40	40	40	Indikator baru
69	Jumlah pembatik yang mengikuti SKKNI	-	-	pembatik	-	-	-	-	-	93	90	90	
VI	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)	-	-	Persen	100	100	100	100	-	95	95	95	
T	Persentase kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan	-	-	Persen	25	28	30	33	-	71,32	30	33	
70	Jumlah IKM yang diupdate guna meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengembangan usaha (SIDa)	-	-	IKM	7.500	7.500	7.500	7.500	-	2.000	2.000	2.000	

3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINPERINAKER KOTA PEKALONGAN

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinperinaker Kota Pekalongan tidak dapat lepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis dimaksud antara lain :

1. Masih tingginya tingkat pengangguran.
2. Masih kurangnya kualitas dan kompetensi calon tenaga kerja.
3. Masih banyaknya pencari kerja yang terdaftar yang belum ditempatkan.
4. Belum sebandingnya jumlah kesempatan kerja dengan pencari kerja.
5. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan tenaga kerja.
6. Masih banyaknya kasus yang perlu diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB).
7. Peningkatan jumlah wirausaha baru.
8. Klasifikasi industri kecil menjadi industri menengah/ besar.
9. Masih terbatasnya kemampuan pemanfaatan teknologi dalam pengembangan produk untuk meningkatkan daya saing.
10. Masih rendahnya kemampuan kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan produk.

Dengan adanya Isu-isu strategis diatas maka langkah-langkah yang sudah dilaksanakan oleh Dinperinaker sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat adalah antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas/ mutu pelatihan ketrampilan kepada para pencari kerja (pengangguran) terutama dengan menambah kejuruan yang banyak dibutuhkan dalam pasar kerja.
2. Melakukan Kebijakan dan program yang pro job disertai dengan penyiapan calon tenaga kerja oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang siap memasuki pasar kerja.
3. Melaksanakan kegiatan yang mendukung penempatan kerja

seperti Job Fair, Bursa Kerja Online, Bursa Kerja Khusus dan lain-lain.

4. Melakukan Kegiatan Job Canfasing yaitu dengan melakukan jemput bola atau mengunjungi perusahaan-perusahaan yang kemungkinan masih membutuhkan karyawan/pegawai.
5. Melakukan monitoring ke perusahaan-perusahaan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban dan hak perusahaan terhadap para pekerjanya seperti kewajiban pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
6. Melakukan fasilitasi mediasi kepada perusahaan/karyawan apabila terjadi perselisihan kerja.
7. Melakukan pembinaan kepada para tenant agar lebih produktif dan inovatif dalam pengembangan usahanya.
8. Melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada para IKM dalam pengembangan dan peningkatan usahanya, seperti pelatihan pembuatan kemasan produk, fasilitasi halal, PIRT, dan Merk.
9. Melaksanakan pelatihan-pelatihan yang bersifat pengembangan dan peningkatan mutu produk serta pelatihan yang bersifat pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan daya saing.

Adapun **permasalahan dan hambatan** yang dihadapi oleh Dinperinaker dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sekaligus melaksanakan pelayanan kepada masyarakat antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kekurangan Tenaga Instruktur yang kompeten pada beberapa Kejuruan.
2. Terbatasnya LPKS yang menyediakan kejuruan yang dibutuhkan pasar kerja.
3. Tidak semua masyarakat yang menganggur dapat tertampung karena terbatasnya kuota peserta pelatihan.
4. Kurangnya inovasi dalam usaha, sehingga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja.
5. Angkatan Kerja lulusan Sekolah mengalami peningkatan, kurang diimbangi dengan kesempatan kerja yang tersedia.

6. Sarana dan prasarana pelatihan yang masih kurang mencukupi sebagai alat pendukung kegiatan pelatihan.
7. Sebagian siswa lulusan pelatihan BLK enggan untuk bekerja diluar kota.
8. Masih relatif rendahnya kesadaran pengusaha untuk mentaati peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan (Pengupahan, Jaminan Sosial, pesangon, PHK dan lain-lain).
9. Implementasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan belum sesuai harapan (PHK, UMK, Outsourching).
10. Banjir rob berpengaruh pada kegiatan operasional IKM / perusahaan di Kota Pekalongan terutama di daerah yg dekat dengan pesisir pantai (IKM ikan, terasi dan pengolahan biota laut lainnya).

Dengan adanya permasalahan dan hambatan sebagaimana tersebut diatas akan membawa dampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah terutama terhadap pencapaian program dan kegiatan serta SDG's yang diampu oleh Dinperinaker Kota Pekalongan.

Sehubungan dengan adanya permasalahan dan hambatan sekaligus tantangan yang harus dihadapi oleh Dinperinaker, maka Dinperinaker menyiapkan formulasi isu-isu penting yang berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Adapun upaya/ solusi yang sudah dilaksanakan untuk mengatasi sebagian permasalahan sebagaimana tersebut diatas antara lain adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan bermacam-macam jenis pelatihan di BLK sehingga masyarakat bisa mengakses sesuai pilihan atau kebutuhannya.
2. Kerjasama dengan perusahaan untuk penempatan tenaga kerja.
3. Kerjasama dengan Provinsi menjalankan aplikasi e-Makaryo (InformasiPasar Kerja), dan Kementrian Ketenagakerjaan RI dengan aplikasi e-SIAPKERJA.
4. Menciptakan peluang-peluang usaha baru melalui pembentukan wirausaha baru, dengan menumbuhkan Start-up.

5. Memberdayakan kelembagaan Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit.
6. Membentuk dan memberdayakan kelembagaan LKS Bipartit di perusahaan.
7. Memfasilitasi dan mencegah perselisihan hubungan industrial.
8. Melakukan pembinaan perusahaan dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.
9. Membuka pelatihan pengembangan yang bisa untuk buka usaha mandiri/ berwirausaha.
10. Mengadakan pelatihan-pelatihan yang bersifat pengembangan usaha seperti pelatihan konveksi batik, desain hijab dan desain grafis kepada para IKM di wilayah Kota Pekalongan.

4. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Penyusunan Rancangan Awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan Awal RKPD dibahas dalam forum konsultasi publik dan disempurnakan berdasarkan berita acara hasil forum konsultasi publik. Rancangan Awal RKPD yang disempurnakan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.

Reviu terhadap rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dilakukan dalam rangka menselaraskan kebutuhan perangkat daerah dengan kemampuan daerah. Proses penyesuaian antara analisis kebutuhan dengan rancangan awal RKPD dapat dilihat pada rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.5
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KOTA PEKALONGAN

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Kota Pekl.	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	1,15 %	**3.355.717.000**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Kota Pekl.	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	1,15 %	**3.355.717.000**	
A	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	Kota Pekl.	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Kejuruan	100%	**3.213.567.000**	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	Kota Pekl.	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Kejuruan	100%	**3.213.567.000**	
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Pekl.	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1621 orang	2.832.939.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Pekl.	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1621 orang	2.832.939.000	
2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penye-diaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Pekl.	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi & Produktivitas pada Tahun n	1 lembaga	238.738.000	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Pekl.	Jumlah bulan pemeliharaan bangunan BLK	1 lembaga	238.738.000	
3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kota Pekl.	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	141 Unit	141.890.000	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kota Pekl.	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	141 Unit	141.890.000	
B	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	Kota Pekl.	Persentase kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	90%	**19.830.000**	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	Kota Pekl.	Persentase kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	90%	**19.830.000**	
1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Pekl.	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20 lembaga	19.830.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Pekl.	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20 lembaga	19.830.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	Kota Pekl.	Jumlah kegiatan Konsultansi Produk-tivitas pada Perusahaan Kecil dilaksanakan	6 tenant	**68.656.000**	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	Kota Pekl.	Jumlah kegiatan Konsultansi Produk-tivitas pada Perusahaan Kecil dilaksanakan	6 tenant	**68.656.000**	
1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kota Pekl.	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	30 perusahaan	68.656.000	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kota Pekl.	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	30 perusahaan	68.656.000	
D	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	Kota Pekl.	Persentase kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dilaksanakan	46,67%	**53.664.000**	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Kota Pekl.	Persentase kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dilaksanakan	46,67%	**53.664.000**	
1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Pekl.	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	2 dokumen	53.664.000	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Pekl.	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	2 dokumen	53.664.000	
II	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Kota Pekl.	Persentase tenaga kerja yg ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/ kota	**27,93%**	**350.444.000**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Kota Pekl.	Persentase tenaga kerja yg ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/ kota	**27,93%**	**350.444.000**	
A	**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota**	Kota Pekl.	Persentase kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten / Kota yang dilaksanakan	12,97%	**158.114.000**	**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota**	Kota Pekl.	Persentase kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten / Kota yang dilaksanakan	12,97%	**158.114.000**	
1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja**.**	Kota Pekl.	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yg Mendapat-kan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	40 orang	7.524.000	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja**.**	Kota Pekl.	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yg Mendapat-kan Pelatihan Melalui Bimtek & lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi.	40 orang	7.524.000	
2	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja.	Kota Pekl.	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	140 orang	25.760.000	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja.	Kota Pekl.	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan.	140 orang	25.760.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan.	Kota Pekl.	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	20 orang	14.600.000	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan.	Kota Pekl.	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	20 orang	14.600.000	
4	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Pekl.	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	61 orang	110.230.000	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Pekl.	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	61 orang	110.230.000	
B	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Kota Pekl.	Jumlah laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja yg disusun.	12 buku	**150.530.000**	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Kota Pekl.	Jumlah laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja yang disusun.	12 buku	**150.530.000**	
1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online**.**	Kota Pekl.	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 dokumen	62.970.000	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online**.**	Kota Pekl.	Jumlah Data dan Informasi yg Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online.	1 dokumen	62.970.000	
2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online.	Kota Pekl.	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	700 orang	17.200.000	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online.	Kota Pekl.	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	700 orang	17.200.000	
3	Job Fair/ Bursa Kerja	Kota Pekl.	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 orang	70.360.000	Job Fair/ Bursa Kerja	Kota Pekl.	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 orang	70.360.000	
C	**Pelindungan PMI (Pra & Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota.**	Kota Pekl.	Jumlah CPMI yang terlayani secara legal	49 orang	**41.800.000**	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota.**	Kota Pekl.	Jumlah CPMI yang terlayani secara legal	49 orang	**41.800.000**	
1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI).	Kota Pekl.	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	20 orang	20.540.000	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI).	Kota Pekl.	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	20 orang	20.540.000	
2	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran.	Kota Pekl.	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	102 Orang	21.260.000	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran.	Kota Pekl.	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	102 Orang	21.260.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Kota Pekl.	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome).	52%	**376.100.000**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Kota Pekl.	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome).	52%	**376.100.000**	
A	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota**	Kota Pekl.	Persentase kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota dilaksanakan.	41,22%	**82.550.000**	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Kota Pekl.	Persentase kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota dilaksanakan.	41,22%	**82.550.000**	
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan.	Kota Pekl.	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yg Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	12 perusahaan	17.090.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan.	Kota Pekl.	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	12 perusahaan	17.090.000	
2	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan.	Kota Pekl.	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	8 perusahaan	13.140.000	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan.	Kota Pekl.	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	8 perusahaan	13.140.000	
3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.	Kota Pekl.	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	11 Laporan	52.320.000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.	Kota Pekl.	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan.	11 Laporan	52.320.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten /Kota**	Kota Pekl.	Persentase kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan.	77,11%	**293.550.000**	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten /Kota**	Kota Pekl.	Persentase kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan.	77,11%	**293.550.000**	
1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.	Kota Pekl.	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	25 perkara	8.420.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.	Kota Pekl.	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	25 perkara	8.420.000	
2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Kota Pekl.	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	8 perkara	5.480.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Kota Pekl.	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan.	8 perkara	5.480.000	
3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi.	Kota Pekl.	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yg Diverifikasi	30 Asosiasi dan Serikat Pekerja	12.240.000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi.	Kota Pekl.	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi.	30 Asosiasi dan Serikat Pekerja	12.240.000	
4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten /Kota.	Kota Pekl.	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 lembaga	70.810.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten /Kota.	Kota Pekl.	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 lembaga	70.810.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.	Kota Pekl.	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	40 orang	196.600.000	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.	Kota Pekl.	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	40 orang	196.600.000	
IV	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA.**	Kota Pekl.	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja. Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	100 persen 100 persen 100 persen	**7.041.544.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA.**	Kota Pekl.	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja. Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	100 persen 100 persen 100 persen	**7.041.544.000**	
A	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**	Kota Pekl.	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.	100 persen	**25.287.000**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**	Kota Pekl.	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.	100 persen	**25.287.000**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Kota Pekl.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	3 dokumen	6.249.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Kota Pekl.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	3 dokumen	6.249.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekl.	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2.132.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekl.	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2.132.000	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Kota Pekl.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	16.906.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Kota Pekl.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	16.906.000	
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**	Kota Pekl.	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah.	100 persen	**6.028.036.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**	Kota Pekl.	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah.	100 persen	**6.028.036.000**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Kota Pekl.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 orang/ bulan	5.968.560.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Kota Pekl.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.	47 orang/ bulan	5.968.560.000	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD.	Kota Pekl.	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	57.500.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD.	Kota Pekl.	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	57.500.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	Kota Pekl.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.976.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	Kota Pekl.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	1 Laporan	1.976.000	
C	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.**	Kota Pekl.	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah.	100 persen	**3.650.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.**	Kota Pekl.	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah.	100 persen	**3.650.000**	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.	Kota Pekl.	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	3.650.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.	Kota Pekl.	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	3.650.000	
D	**Administrasi Umum Perangkat Daerah.**	Kota Pekl.	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah.	100 persen	**259.938.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah.**	Kota Pekl.	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah.	100 persen	**259.938.000**	
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kota Pekl.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.380.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kota Pekl.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.380.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Kota Pekl.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	90.027.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Kota Pekl.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	90.027.000	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekl.	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	3.750.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekl.	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	3.750.000	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	Kota Pekl.	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	74.716.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	Kota Pekl.	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	74.716.000	
5	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan.	Kota Pekl.	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7.825.000	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan.	Kota Pekl.	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7.825.000	
6	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pekl.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.650.000	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pekl.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.600.000	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Kota Pekl.	Jmlh Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordina-si & Konsultasi SKPD	20 Laporan	75.590.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Kota Pekl.	Jmlh Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordina-si & Konsultasi SKPD	20 Laporan	75.590.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**	Kota Pekl.	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	100 persen	**540.679.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**	Kota Pekl.	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	100 persen	**540.679.000**	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekl.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekl.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	3.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik.	Kota Pekl.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	260.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik.	Kota Pekl.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	260.500.000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Kota Pekl.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	277.179.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Kota Pekl.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	277.179.000	
G	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**	Kota Pekl.	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	100 persen	**183.954.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**	Kota Pekl.	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	100 persen	**183.954.000**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Kota Pekl.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 unit	108.774.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Kota Pekl.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 unit	108.774.000	
2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Kota Pekl.	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	49.400.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Kota Pekl.	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	49.400.000	
3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Kota Pekl.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yg Dipelihara/ Direhabilitasi	54 Unit	25.780.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Kota Pekl.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yg Dipelihara/ Direhabilitasi	54 Unit	25.780.000	
V	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Kota Pekl.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator	75,34%	**389.560.000**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Kota Pekl.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator	75,34%	**389.560.000**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)					pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)			
A	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota.**	Kota Pekl.	Persentase kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota dilaksanakan.	4,0%	**389.560.000**	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota.**	Kota Pekl.	Persentase kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota dilaksanakan.	4,0%	**389.560.000**	
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri.	Kota Pekl.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	31.730.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri.	Kota Pekl.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri.	1 Dokumen	31.730.000	
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.	Kota Pekl.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	42.830.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.	Kota Pekl.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.	1 Dokumen	42.830.000	
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.	Kota Pekl.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	114.300.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.	Kota Pekl.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	114.300.000	
4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.	Kota Pekl.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	88.850.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.	Kota Pekl.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	88.850.000	
5	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri.	Kota Pekl.	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industr	1 Dokumen	111.850.000	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri.	Kota Pekl.	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industr	1 Dokumen	111.850.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VI	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	Kota Pekl.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	25,00 persen	**7.470.000**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	Kota Pekl.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	25,00 persen	**7.470.000**	
A	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan.**	Kota Pekl.	Persentase pelaksanaan kegiatan rekomendasi Penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/ Kota.	30 persen	**7.470.000**	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan.**	Kota Pekl.	Persentase pelaksanaan kegiatan rekomendasi Penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/ Kota.	30 persen	**7.470.000**	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekl.	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	1 Dokumen	7.470.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekl.	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	1 Dokumen	7.470.000	
VII	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Kota Pekl.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome).	100 persen	**33.940.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Kota Pekl.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome).	100 persen	**33.940.000**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	Kota Pekl.	Persentase kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan.	33%	**33.940.000**	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	Kota Pekl.	Persentase kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten /Kota dilaksanakan.	33%	**33.940.000**	
1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten /Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).	Kota Pekl.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	30.800.000	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).	Kota Pekl.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	30.800.000	
2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Kota Pekl.	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	3.140.000	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Kota Pekl.	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	3.140.000	

5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sebelum melakukan penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker), terlebih dahulu telah dilakukan penjaringan aspirasi masyarakat, baik terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berupa usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan perangkat daerah, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan pengamatan pelaksanaan musrenbang tingkat kota. Terhadap aspirasi tersebut kemudian dilakukan inventarisasi dan pengkajian apakah sesuai dengan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah.

Usulan awal program,kegiatan dan sub kegiatan dari perangkat daerah kemudian diselaraskan dengan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui Musrenbang, baik dari musrenbang tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota, yang kemudian diinventarisir usulan-usulan tersebut melalui Pagu Indikatif. Setelah Anggaran ditetapkan maka semua usulan masyarakat harus dilaksanakan oleh perangkat daerah sepanjang usulan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Khusus untuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kota Pekalongan, usulan-usulan tersebut tidak ada.

Tabel 2.6
Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINPERINAKER KOTA PEKALONGAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah disusun sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan RKPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja Dinperinaker tahun 2025 sesuai dengan RKPD 2025, yang merupakan penjabaran atas RPJMD 2021-2026.

Selain berpedoman pada RPJMD 2021-2026, RKPD tahun 2025 termasuk juga Renja Tahun 2025 berpedoman pada RKP Tahun 2025, dengan penyelarasan prioritas pembangunan nasional dengan pembangunan Kota Pekalongan. Adapun penyelarasan prioritas pembangunan Kota Pekalongan dengan Nasional dapat dilihat pada tabel 3.1. dibawah ini :

Tabel 3.1.
Sinkronisasi Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Prioritas Nasional	No	Prioritas Kota Pekalongan
1	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.
		12	Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment.
2	Membangun dari Desadan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.	2	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata.
		04	Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing.

3	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.	1	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sector unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas.
		09	Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Sumber : RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dinarasikan bahwa prioritas yang dapat diambil dari Rencana Kerja Dinperinaker adalah pada prioritas RKPD :

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.
2. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment.
3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata.
4. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing.
5. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sector unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
6. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Hal tersebut diatas sinkron dengan prioritas nasional yaitu :

1. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan.
2. Membangun dari Desadan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.

3. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINPERINAKER KOTA PEKALONGAN

Hubungan yang selaras antara RENJA dan RENSTRA, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan tujuan dan sasaran RENSTRA DINPERINAKER tahun 2021-2026.

Setiap Perangkat Daerah bersama-sama melakukan optimalisasi untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Walikota Pekalongan Periode Tahun 2021-2026, oleh karena itu Renstra Dinperinaker Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 mengadopsi Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan yang tercantum dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan yang tercantum dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 yaitu "**Mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius**".

Sedangkan Misi yang mempunyai keterkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinperinaker Kota Pekalongan selaku Perangkat Daerah yang menangani urusan Ketenagakerjaan dan urusan Perindustrian, yang terkait dengan urusan Ketenagakerjaan adalah Misi Ke-2 yaitu **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan**. Sedangkan yang terkait dengan urusan bidang Perindustrian adalah Misi Ke-5 yaitu **Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal.**

Adapun yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efesien serta pemberian pelayanan kepada masyarakat secara prima adalah pada Misi Ke-7 yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-**

prinsip Good Governance dan Clean Government.

Penetapan tujuan dan sasaran yang akan dicapai secara nyata oleh Dinperinaker Kota Pekalongan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun ke depan, didasarkan pada kriteria khusus (*spesific*), terukur (*measuable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*) serta dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan dan isu utama bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian di Kota Pekalongan.

Adapun rumusan tujuan dan sasaran di dalam Perencanaan Strategis Dinperinaker Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026, yaitu :

1. **Misi 2** : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan
   Tujuan : Meningkatkan SDM yang Kompeten dan Produktif.
   Indikator : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.
   Sasaran : Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Siap Pakai yang ditempatkan.
   Indikator : Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan
   Strategi : Peningkatan ketrampilan angkatan kerja dan pencari kerja disertai perluasan kesempatan kerja.
   Arah Kebijakan : Penguatan kualitas tenaga kerja yang berkinerja tinggi serta penanaman nilai-nilai budaya masyarakat yang berkarakter.
2. **Misi 5** : Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal.
   Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan.
   Indikator : Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan.
   Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Industri.
   Indikator : Pertumubuhan Industri.

Strategi : Peningkatan kualitas dan kuantitas produk UMKM, penguatan kelembagaan sentra dan klaster serta pengembangan sarana dan prasarana sector industri.

Arah Kebiajakan : Penguatan sektor-sektor ekonomi kreatif dan unggulan daerah sebagai pondasi keberlanjutan peningkatan kesejahteraan di bidang ekonomi.

3. **Misi 7** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efesien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government.

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat.

Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator : Nilai SAKIP OPD

Strategi : Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan menitikberatkan pada penyelenggaraan pelayanan publik.

Arah Kebijakan : Penguatan sektor-sektor ekonomi kreatif dan unggulan daerah sebagai pondasi keberlanjutan peningkatan kesejahteraan di bidang ekonomi.

3.3. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan yang mendukungnya. Indikator kinerja program/ kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek-aspek yang relevan.

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara lain :

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

2. Pencapaian SDGs

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dikelola Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan dengan pertimbangan dua faktor tersebut diatas, sebagai berikut :

I	**Program**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**
A	**Kegiatan**	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**
1	Sub Kegiatan	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
2	Sub Kegiatan	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penye-diaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
3	Sub Kegiatan	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
B	**Kegiatan**	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**
1	Sub Kegiatan	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
C	**Kegiatan**	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**
1	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
D	**Kegiatan**	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**
1	Sub Kegiatan	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
II	**Program**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**
E	**Kegiatan**	**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota**
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja.
2	Sub Kegiatan	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja.
3	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan.
4	Sub Kegiatan	Perluasan Kesempatan Kerja
F	**Kegiatan**	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**
1	Sub Kegiatan	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online.

2	Sub Kegiatan	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online.
3	Sub Kegiatan	Job Fair/ Bursa Kerja
G	**Kegiatan**	**Pelindungan PMI (Pra & Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota.**
1	Sub Kegiatan	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI).
2	Sub Kegiatan	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran.
III	**Program**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**
H	**Kegiatan**	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota**
1	Sub Kegiatan	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
2	Sub Kegiatan	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan
3	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.
I	**Kegiatan**	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten /Kota**
1	Sub Kegiatan	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
2	Sub Kegiatan	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
3	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi.
4	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama

		Tripartit Daerah Kabupaten /Kota.
5	Sub Kegiatan	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.
IV	**Program**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA.**
J	**Kegiatan**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**
1	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3	Sub Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
K	**Kegiatan**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
2	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD.
3	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
L	**Kegiatan**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.**
1	Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.
M	**Kegiatan**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah.**
1	Sub Kegiatan	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
2	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
3	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
5	Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan.
6	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
7	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
N	**Kegiatan**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik.

3	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
O	**Kegiatan**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
2	Sub Kegiatan	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
3	Sub Kegiatan	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
V	**Program**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**
P	**Kegiatan**	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota.**
1	Sub Kegiatan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri.
2	Sub Kegiatan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.
3	Sub Kegiatan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.
4	Sub Kegiatan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.
5	Sub Kegiatan	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri.
VI	**Program**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**
Q	**Kegiatan**	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota.**
1	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
VII	**Program**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**

R	**Kegiatan**	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**
1	Sub Kegiatan	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten /Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
2	Sub Kegiatan	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas

Secara rekapitulasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan mengelola 7 (tujuh) Program, 18 (delapan belas) Kegiatan dan 51 (lima puluh satu) Sub Kegiatan.

Tabel 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 DINPERINAKER KOTA PEKALONGAN

SKPD : DINPERINAKER

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.732.546.000**								
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**11.123.805.000**				**11.306.585.000**
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	Kota Pekl.	1,15 %	**3.355.717.000**			1,15%	**2.076.136.000**
2	**07**	**03**	2.01		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Kejuruan	Kota Pekl.	100%	**3.213.567.000**			100%	**1.838.838.000**
2	**07**	**03**	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Kota Pekl.	1621 orang	2.832.939.000	DBHCHT			1.351.328.000
2	**07**	**03**	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi & Produktivitas pada Tahun n	Kota Pekl.	1 lembaga	238.738.000	APBD II			252.049.000
				03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Kota Pekl.	141 Unit	141.890.000	APBD II			235.461.000
2	**07**	**03**	2.02		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	Persentase kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Pekl.	90%	**19.830.000**	APBD II		100%	**75.259.000**
2	**07**	**03**	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Kota Pekl.	20 lembaga	19.830.000	APBD II			75.259.000
2	**07**	**03**	2.04		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	Jumlah kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil dilaksanakan	Kota Pekl.	6 tenant	**68.656.000**	APBD II		6 tenant	**87.039.000**
2	**07**	**03**	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas.	Kota Pekl.	30 perusahaan	68.656.000	APBD II			87.039.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**07**	**03**	2.05		**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan.	Kota Pekl.	46,67%	**53.664.000**	APBD II		53,33%	**75.000.000**
2	**07**	**03**	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah.	Kota Pekl.	2 dokumen	53.664.000	APBD II			75.000.000
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome).	Kota Pekl.	**27,93%**	**350.444.000**	APBD II		**27,93 %**	**926.684.000**
2	**07**	**04**	2.01		**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan.	Kota Pekl.	12,97%	**158.114.000**	APBD II		14,08%	**265.625.000**
2	**07**	**04**	2.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja**.**	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi.	Kota Pekl.	40 orang	7.524.000	APBD II			20.625.000
2	**07**	**04**	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja.	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan.	Kota Pekl.	140 orang	25.760.000	APBD II			50.000.000
2	**07**	**04**	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan.	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD.	Kota Pekl.	20 orang	14.600.000	APBD II			25.000.000
2	**07**	**04**	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja.	Kota Pekl.	61 orang	110.230.000	APBD II			170.000.000
2	**07**	**04**	2.03		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Jumlah laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja yang disusun.	Kota Pekl.	12 buku	150.530.000	APBD II		12 buku	**293.314.000**
2	**07**	**04**	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online**.**	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online.	Kota Pekl.	1 Dokumen	62.970.000	APBD II			65.746.000
2	**07**	**04**	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online.	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Kota Pekl.	700 orang	17.200.000	APBD II			121.550.000
2	**07**	**04**	2.03	03	Job Fair/ Bursa Kerja.	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja.	Kota Pekl.	100 Orang	70.360.000	APBD II			106.018.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**07**	**04**	2.04		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota.**	Jumlah CPMI yang terlayani secara legal	Kota Pekl.	49 orang	**41.800.000**	APBD II		54 orang	**367.745.000**
2	**07**	**04**	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI).	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Kota Pekl.	20 orang	20.540.000	APBD II			335.724.000
2	**07**	**04**	2.04	02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran.	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani.	Kota Pekl.	102 orang	21.260.000	APBD II			32.021.000
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome).	Kota Pekl.	52%	**376.100.000**	APBD II		52%	**484.442.000**
2	**07**	**05**	2.01		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan.	Kota Pekl.	41,22%	**82.550.000**	APBD II		42,28%	**116.394.000**
2	**07**	**05**	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan.	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online.	Kota Pekl.	12 perusahaan	17.090.000	APBD II			25.000.000
2	**07**	**05**	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan.	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama.	Kota Pekl.	8 perusahaan	13.140.000	APBD II			18.000.000
2	**07**	**05**	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan.	Kota Pekl.	11 Laporan	52.320.000	APBD II			73.394.000
2	**07**	**05**	2.02		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	Kota Pekl.	77,11%	**293.550.000**	APBD II		80,06%	**368.048.000**

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						di Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan.							
2	**07**	**05**	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Kota Pekl.	25 perkara	8.420.000	APBD II			15.000.000
2	**07**	**05**	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan.	Kota Pekl.	8 perkara	5.480.000	APBD II			12.000.000
2	**07**	**05**	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi.	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi.	Kota Pekl.	30 Asosiasi dan Serikat Pekerja	12.240.000	APBD II			22.048.000
2	**07**	**05**	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Kota Pekl.	1 Lembaga	70.810.000	APBD II			99.000.000
2	**07**	**05**	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.	Kota Pekl.	40 orang	196.600.000	APBD II			220.000.000
3	**31**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA.**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja. Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	Kota Pekl.	100 persen 100 persen 100 persen	**7.041.544.000**	APBD II		100 persen 100 persen 100 persen	**7.819.323.000**
3	**31**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Pekl.	100 persen	**25.287.000**	APBD II		100 persen	**26.450.000**
3	**31**	**01**	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Kota Pekl.	3 dokumen	6.249.000	APBD II			6.249.000
3	**31**	**01**	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekl.	2 dokumen	2.132.000	APBD II		2 dokumen	2.132.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	31	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekl.	15 Laporan	16.906.000	APBD II			18.069.000
3	31	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah.	Kota Pekl.	100 persen	**6.028.036.000**	APBD II		100 persen	**6.564.000.000**
3	31	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.	Kota Pekl.	47 orang/ bulan	5.968.560.000	APBD II			6.500.000.000
3	31	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD.	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekl.	12 Dokumen	57.500.000	APBD II		12 Dokumen	62.000.000
3	31	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	Kota Pekl.	1 Laporan	1.976.000	APBD II		1 Laporan	2.000.000
3	31	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah.	Kota Pekl.	100 persen	**3.650.000**	APBD II		100 persen	**9.500.000**
3	31	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Pekl.	1 paket	3.650.000	APBD II			9.500.000
3	31	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah.**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah.	Kota Pekl.	100 persen	**259.938.000**	APBD II		100 persen	**343.589.000**
3	31	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pekl.	4 Paket	4.380.000	APBD II			6.000.000
3	31	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Pekl.	4 Paket	90.027.000	APBD II			120.873.000
3	31	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Pekl.	4 Paket	3.750.000	APBD II			5.000.000
3	31	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Pekl.	4 Paket	74.716.000	APBD II			74.716.000
3	31	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan.	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pekl.	2 Paket	7.825.000	APBD II			7.000.000
3	31	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pekl.	2 Dokumen	3.650.000	APBD II			5.000.000
3	31	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Jmlh Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Kota Pekl.	20 Laporan	75.590.000	APBD II			125.000.000
3	31	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang	Kota Pekl.	100 persen	**540.679.000**	APBD II		100 persen	**559.000.000**

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Urusan Pemerintahan Daerah.							
3	31	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekl.	4 Laporan	3.000.000	APBD II			4.000.000
3	31	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Pekl.	12 Laporan	260.500.000	APBD II			255.000.000
3	31	01	**2.08**	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pekl.	12 Laporan	277.179.000	APBD II			300.000.000
3	31	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Kota Pekl.	100 persen	**183.954.000**	APBD II		100 persen	**316.784.000**
3	31	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Pekl.	23 unit	108.774.000	APBD II			106.784.000
3	31	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Pekl.	1 unit	49.400.000	APBD II			180.000.000
3	31	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yg Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Pekl.	54 Unit	25.780.000	APBD II			30.000.000
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**430.970.000**				**822.707.000**
3	3	1			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**430.970.000**				**822.707.000**
3	31	02			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	Kota Pekl.	75,34%	**389.560.000**	APBD II		75,34 persen	**683.127.000**
3	31	02	2.01		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota.**	Persentase kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota dilaksanakan.	Kota Pekl.	4,0%	**389.560.000**	APBD II		4,5 persen	**683.127.000**
3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri.	Jumlah Dokumen Hasil Koordina-si, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri.	Kota Pekl.	1 Dokumen	31.730.000	APBD II			41.600.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	**31**	**02**	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.	Kota Pekl.	1 Dokumen	42.830.000	APBD II			45.000.000
3	**31**	**02**	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kota Pekl.	1 Dokumen	114.300.000	APBD II			436.527.000
3	**31**	**02**	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.	Kota Pekl.	1 Dokumen	88.850.000	APBD II			110.000.000
3	**31**	**02**	2.01	06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri.	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri.	Kota Pekl.	1 Dokumen	111.850.000	APBD II			50.000.000
3	**31**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	Kota Pekl.	25,00 persen	**7.470.000**	APBD II		25 persen	**13.640.000**
3	**31**	**03**	2.01		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan.**	Persentase pelaksanaan kegiatan rekomendasi Penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/ Kota.	Kota Pekl.	30 persen	**7.470.000**	APBD II		33 persen	**13.640.000**
3	**31**	**03**	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	Kota Pekl.	1 Dokumen	7.470.000	APBD II			13.640.000
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome).	Kota Pekl.	100 persen	**33.940.000**	APBD II		100 persen	**125.000.000**

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	**31**	**04**	2.01		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan.	Kota Pekl.	33%	**33.940.000**	APBD II		35 persen	**125.940.000**
3	**31**	**04**	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kota Pekl.	1 Dokumen	30.800.000	APBD II			120.000.000
3	**31**	**04**	2.01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas.	Kota Pekl.	1 Dokumen	3.140.000	APBD II			5.940.000
								TOTAL	**11.554.775.000**				**12.129.292.000**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINPERINAKER

4.1. RENCANA KERJA

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan (Dinperinaker) menetapkan sasaran di Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 yang ingin dicapai atau diwujudkan sesuai dengan program kerja/rencana kerja Dinperinaker Kota Pekalongan, yaitu :

1. Meningkatnya jumlah tenaga kerja siap pakai yang ditempatkan.
2. Meningkatnya Pertumbuhan Industri.
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

Dengan sasaran tersebut dijabarkan menjadi 3 (tiga) indikator kinerja utama yang dilaksanakan oleh Dinperinaker Kota Pekalongan, yaitu :

1. Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan.
2. Pertumbuhan Industri.
3. Nilai SAKIP OPD.

Pencapaian sasaran ini tercermin dalam indikator-indikator kinerja dan target kinerja. Target capaian kinerja di tahun 2025 direncanakan dalam Renstra Dinperinaker tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel- 4.1
Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja 2025
1	2	3	4	5
MISI 2 RPJMD : Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan.				
1	Meningkatkan SDM yang Kompeten dan Produktif.		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71,08 persen
2		Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Siap Pakai yang ditempatkan.	Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	52,33 persen

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja 2025
1	2	3	4	5
MISI 5 RPJMD : Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal				
3	Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan.		Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	4,51 persen
4		Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Pertumbuhan Industri	0,085 persen
MISI 7 RPJMD : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government				
5	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	80,72 indeks
6		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	76 indeks

4.2. PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk tercapainya target dari setiap indikator kinerja dibutuhkan pendanaan untuk membiayai masing-masing kegiatan prioritas di Dinperinaker Kota Pekalongan Tahun 2025. Kebutuhan pendanaan pada Dinperinaker Kota Pekalongan untuk tahun 2025 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel – 4.2
Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu Anggaran
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan
Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana
1	2	3	4
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**11.123.805.000**	
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**11.123.805.000**	
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**3.355.717.000**	
2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**3.213.567.000**	
2.07.03.2.01. 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.832.939.000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
2.07.03.2.01. 02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	238.738.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.03.2.01. 03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	141.890.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.03.2.02	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**19.830.000**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana
1	2	3	4
2.07.03.2.02. 01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	19.830.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.03.2.04	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**68.656.000**	
2.07.03.2.04. 01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	68.656.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.03.2.05	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**53.664.000**	
2.07.03.2.05. 01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	53.664.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**350.444.000**	
2.07.04. 2.01	**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota**	**158.114.000**	
2.07.04. 2.01. 01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja**.**	7.524.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.04. 2.01. 03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja.	25.760.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.04. 2.01. 04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan.	14.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.04. 2.01. 05	Perluasan Kesempatan Kerja	110.230.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.04. 2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**150.530.000**	
2.07.04. 2.03. 01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online**.**	62.970.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.04. 2.03. 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online.	17.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.04. 2.03. 03	Job Fair/ Bursa Kerja.	70.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.04. 2.04	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota.**	**41.800.000**	
2.07.04. 2.04. 01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI).	20.540.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.04. 2.04. 02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran.	21.260.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**376.100.000**	
2.07.05. 2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah**	**82.550.000**	
2.07.05. 2.01. 01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan.	17.090.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.05. 2.01. 02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan.	13.140.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.05. 2.01. 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.	52.320.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.05. 2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**293.550.000**	
2.07.05. 2.02. 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.	8.420.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.05. 2.02. 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	5.480.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.05. 2.02. 03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi.	12.240.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.05. 2.02. 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota.	70.810.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.05. 2.02. 05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.	196.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana
1	2	3	4
3.31.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA.**	**7.041.544.000**	
3.31.01. 2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**	**25.287.000**	
3.31.01. 2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	6.249.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3.31.01. 2.01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.132.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3.31.01. 2.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	16.906.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3.31.01. 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**	**6. 028.036.000**	
3.31.01. 2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	5.968.560.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3.31.01. 2.02. 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD.	57.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3.31.01. 2.02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	1.976.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3.31.01. 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.**	**3.650.000**	
3.31.01. 2.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.	3.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3.31.01. 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah.**	**259.938.000**	
3.31.01. 2.06. 01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	4.380.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3.31.01. 2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.027.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3.31.01. 2.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3.31.01. 2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.716.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3.31.01. 2.06. 05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan.	7.825.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3.31.01. 2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	3.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3.31.01. 2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	75.590.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3.31.01. 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**540.679.000**	
3.31.01. 2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3.31.01. 2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	260.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3.31.01. 2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	277.179.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3.31.01. 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**183.954.000**	
3.31.01. 2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	108.774.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3.31.01. 2.09. 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3.31.01. 2.09. 10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.780.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	**430.970.000**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	**430.970.000**	
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**389.560.000**	
3.31.02. 2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota**	**389.560.000**	
3.31.02. 2.01. 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan	31.730.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3.31.02. 2.01. 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	42.830.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana
1	2	3	4
3.31.02. 2.01. 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.	114.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3.31.02. 2.01. 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	88.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3.31.02. 2.01. 06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri.	111.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN /KOTA**	**7.470.000**	
3.31.03.2.01	**Penerbitan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan.**	**7.470.000**	
3.31.03.2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten /Kota	7.470.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**33.940.000**	
3.31.04. 2.01	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan**	**33.940.000**	
3.31.04. 2.01. 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional	30.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3.31.04. 2.01. 02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas.	3.140.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	TOTAL	**11.554.775.000**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinperinaker Tahun Anggaran 2025 merupakan sebuah gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan guna merealisasikan tujuan dan sasaran Dinperinaker. Seluruh program dan kegiatan yang di rencanakan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekalongan dan RKPD Provinsi Jawa Tengah yang disesuaikan juga dengan pagu anggaran yang di terima Dinperinaker.

Dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan, alokasi anggaran indikatif seluruh kegiatan dan program kerja yang dikelompokan dalam Belanja Langsung Non Urusan pada rencana kerja tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 11.554.775.000,- diharapkan agar alokasi anggaran untuk Dinperinaker Kota Pekalongan mendapat prioritas dalam kebijakan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi implementasi program peningkatan pengawasan Akuntabilitas Aparatur Negara sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN

BETTY DAHFIANI DAHLAN, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19690203 199803 2 004

LAMPIRAN

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA						**11.554.775.000,00**							**12.129.292.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**11.123.805.000,00**							**11.306.585.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**11.123.805.000,00**							**11.306.585.000,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja***	**100 persen**			**100 persen**	**7.041.544.000,00**						**100 persen**	**7.819.323.000,00**	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	100 persen			100 persen	25.287.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperinaker	100 persen	26.450.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	6.249.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperinaker		6.249.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2.132.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperinaker		2.132.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15 Laporan	16.906.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperinaker		18.069.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah*	100 persen			100 persen	6.028.036.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperinaker	100 persen	6.564.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bulan	5.968.560.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperinaker		6.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	57.500.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperinaker		62.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.976.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperinaker		2.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah*	100 persen			100 persen	3.650.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperinaker	100 persen	9.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	3.650.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperinaker		9.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah*	100 persen			100 persen	259.938.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperinaker	100 persen	343.589.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4.380.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperinaker		6.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	90.027.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperinaker		120.873.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	3.750.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperinaker		5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	74.716.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperinaker		74.716.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	7.825.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperinaker		7.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	3.650.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperinaker		5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	75.590.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperinaker		125.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 persen			100 persen	540.679.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperinaker	100 persen	559.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	3.000.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperinaker		4.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	260.500.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperinaker		255.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	277.179.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperinaker		300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 persen			100 persen	183.954.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperinaker	100 persen	316.784.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				23 Unit	108.774.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperinaker		106.784.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	49.400.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperinaker		180.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				54 Unit	25.780.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperinaker		30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	***Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)***	**1,15 persen**			**1,15 persen**	**3.355.717.000,00**						**1,15 persen**	**2.076.136.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Persentase Pelaksanaan Pelatihan Kejuruan*	100 persen			100 persen	3.213.567.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	Pencari Kerja Kota Pekalongan	100 persen	1.838.838.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				1621 Orang	2.832.939.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	Pencari Kerja Kota Pekalongan		1.351.328.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				1 Lembaga	238.738.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	Pencari Kerja Kota Pekalongan		252.049.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				141 Unit	141.890.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	Pencari Kerja Kota Pekalongan		235.461.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Persentase kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta*	100 persen			90 persen	19.830.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	LPKS Kota Pekalongan	100 persen	75.259.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				20 Lembaga	19.830.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	LPKS Kota Pekalongan		75.259.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	*Jumlah kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil dilaksanakan*	6 tenant			6 tenant	68.656.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	Tenant Kota Pekalongan	6 tenant	87.039.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil														
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas				30 Perusahaan	68.656.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	Tenant Kota Pekalongan		87.039.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan*	53.33 persen			46.67 persen	53.664.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	Alumni siswa pelatihan dan Peminat magang Jepang Kota Pekalongan	53.33 persen	75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				2 Dokumen	53.664.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	Alumni siswa pelatihan dan Peminat magang Jepang Kota Pekalongan		75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	***Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)***	**27,93 persen**			**27,93 persen**	**350.444.000,00**						**27,93 persen**	**926.684.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan*	14.08 persen			12.97 persen	158.114.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	1.Perusahaan dan Pencaker, 2. Siswa SMK, 3. Disabilitas, 4. lokasi Padat Karya, Peserta Trasmigrasi, Perjanjian Kerja Transmigrasi, WUB Kota Pekalongan	14.08 persen	265.625.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja														
			Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi				40 Orang	7.524.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	1.Perusahaan dan Pencaker, 2. Siswa SMK, 3. Disabilitas, 4. lokasi Padat Karya, Peserta Trasmigrasi, Perjanjian Kerja Transmigrasi, WUB Kota Pekalongan		20.625.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				140 Orang	25.760.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	1.Perusahaan dan Pencaker, 2. Siswa SMK, 3. Disabilitas, 4. lokasi Padat Karya, Peserta Trasmigrasi, Perjanjian Kerja Transmigrasi, WUB Kota Pekalongan		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan														
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD				20 Orang	14.600.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	1.Perusahaan dan Pencaker, 2. Siswa SMK, 3. Disabilitas, 4. lokasi Padat Karya, Peserta Trasmigrasi, Perjanjian Kerja Transmigrasi, WUB Kota Pekalongan		25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				61 Orang	110.230.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	1.Perusahaan dan Pencaker, 2. Siswa SMK, 3. Disabilitas, 4. lokasi Padat Karya, Peserta Trasmigrasi, Perjanjian Kerja Transmigrasi, WUB Kota Pekalongan		170.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Jumlah laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja yang disusun*	72 buku			12 buku	150.530.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	1. Operator Informasi pasar kerja online dan Laporan Pencaker, 2. Layanan dan Leaflet, 3. Perusahaan Kota Pekalongan	12 buku	293.314.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				1 Dokumen	62.970.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	1. Operator Informasi pasar kerja online dan Laporan Pencaker, 2. Layanan dan Leaflet, 3. Perusahaan Kota Pekalongan		65.746.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				700 Orang	17.200.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	1. Operator Informasi pasar kerja online dan Laporan Pencaker, 2. Layanan dan Leaflet, 3. Perusahaan Kota Pekalongan		121.550.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				100 Orang	70.360.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	1. Operator Informasi pasar kerja online dan Laporan Pencaker, 2. Layanan dan Leaflet, 3. Perusahaan Kota Pekalongan		106.018.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah CPMI yang terlayani secara legal*	249 orang			49 orang	41.800.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	CPMI Kota Pekalongan	54 orang	367.745.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				20 Orang	20.540.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	CPMI Kota Pekalongan		335.724.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran														
			Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani				102 Orang	21.260.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	CPMI Kota Pekalongan		32.021.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	***Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)***	**52,00 persen**			**52,00 persen**	**376.100.000,00**						**52,00 persen**	**484.442.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan*	42.28 persen			41.22 persen	82.550.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	Perusahaan di Kota Pekalongan	42.28 persen	116.394.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				12 Perusahaan	17.090.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	Perusahaan di Kota Pekalongan		25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				8 Perusahaan	13.140.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	Perusahaan di Kota Pekalongan		18.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				11 Laporan	52.320.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	Perusahaan di Kota Pekalongan		73.394.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan*	80.06 persen			77.11 persen	293.550.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	Perusahaan di Kota Pekalongan, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Pekalongan	80.06 persen	368.048.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				25 Perkara	8.420.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	Perusahaan di Kota Pekalongan, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Pekalongan		15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				8 Perkara	5.480.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	Perusahaan di Kota Pekalongan, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Pekalongan		12.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi														
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				30 Asosiasi dan Serikat Pekerja	12.240.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	Perusahaan di Kota Pekalongan, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Pekalongan		22.048.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	70.810.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	Perusahaan di Kota Pekalongan, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Pekalongan		99.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				40 Orang	196.600.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	Perusahaan di Kota Pekalongan, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Pekalongan		220.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**430.970.000,00**							**822.707.000,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**430.970.000,00**							**822.707.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	***Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)***	**75,34 persen**			**75,34 persen**	**389.560.000,00**						**75,34 persen**	**683.127.000,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Persentase kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dilaksanakan*	4.5 persen			4.0 persen	389.560.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	IKM di Kota Pekalongan, DINPERINAKER, Pemerintah Kota Pekalongan	4.5 persen	683.127.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	31.730.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	IKM di Kota Pekalongan, DINPERINAKER, Pemerintah Kota Pekalongan		41.600.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	42.830.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	IKM di Kota Pekalongan, DINPERINAKER, Pemerintah Kota Pekalongan		45.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	114.300.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	IKM di Kota Pekalongan, DINPERINAKER, Pemerintah Kota Pekalongan		436.527.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	88.850.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	IKM di Kota Pekalongan, DINPERINAKER, Pemerintah Kota Pekalongan		110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	111.850.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	IKM di Kota Pekalongan, DINPERINAKER, Pemerintah Kota Pekalongan		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	***Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)***	**25,00 persen**			**25,00 persen**	**7.470.000,00**						**25,00 persen**	**13.640.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase pelaksanaan kegiatan rekomendasi Penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/Kota*	33 persen			30 persen	7.470.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	IKM Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan	33 persen	13.640.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	7.470.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	IKM Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan		13.640.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	***Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)***	**100,00 persen**			**100,00 persen**	**33.940.000,00**						**100,00 persen**	**125.940.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan*	35 persen			33 persen	33.940.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Industri, Sentra IKM, IKM Kota Pekalongan	35 persen	125.940.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	30.800.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Industri, Sentra IKM, IKM Kota Pekalongan		120.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				1 Dokumen	3.140.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Industri, Sentra IKM, IKM Kota Pekalongan		5.940.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	J U M L A H							**11.554.775.000,00**							**12.129.292.000,00**	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Kegiatan	: 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pencari Kerja Kota Pekalongan Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.832.939.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 1.351.328.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	1,15 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.832.939.000,00
Keluaran	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1621 Orang
Hasil	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Kejuruan	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 2.832.939.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 2.832.939.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 9.000.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 9.000.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 9.000.000,00**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 9.000.000,00**
	[#] Latker BLK; Latker LPKS/BLKK/Mitra Latker; Latker Kewirausahaan; Latker MPS **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 9.000.000,00**
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					**Rp. 9.000.000,00**
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	20	Orang / Kali	200.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta	20	Orang / Kali	250.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 2.823.939.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 2.420.014.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 2.420.014.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 22.720.000,00**
	[#] Latker BLK **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 1.920.000,00**
	[-] Toolkit Siswa Latker BLK					**Rp. 1.920.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : -	6 x 16 x 20000	Paket Buah Rupiah	1,00	0 %	Rp. 1.920.000,00
	[#] Latker BLK; Latker LPKS/BLKK/Mitra Latker; Latker Kewirausahaan; Latker MPS **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 5.000.000,00**
	[-] ATK Kegiatan					**Rp. 5.000.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : -	1 x 5000000	Paket Rupiah	1,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	[#] Latker Kewirausahaan **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 10.200.000,00**
	[-] ATK Latker Kewirausahaan					**Rp. 500.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : -	5 x 100000	Paket Rupiah	1,00	0 %	Rp. 500.000,00
	[-] Perlengkapan Tas Latker Kewirausahaan					**Rp. 7.700.000,00**
	Tas Spesifikasi : -	5 x 20	Paket Buah	77.000,00	0 %	Rp. 7.700.000,00
	[-] Toolkit Siswa Latker Kewirausahaan					**Rp. 2.000.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : -	5 x 20 x 20000	Paket Buah Rupiah	1,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[#] Latker LPKS/ BLKK/ Mitra Latker **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 1.600.000,00**
	[-] Toolkit Peserta Latker					**Rp. 1.600.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : -	4 x 20 x 20000	Paket Buah Rupiah	1,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	[#] Latker MPS Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 4.000.000,00**
	[-] Toolkit Latker MPS					**Rp. 4.000.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : -	10 x 20 x 20000	Paket Buah Rupiah	1,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 51.250.400,00**
	[#] Latker BLK Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 13.920.000,00**
	[-] Cetak dan Penulisan Sertifikat BLK					**Rp. 1.920.000,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	6 x 16 x 20000	Paket Lembar Rupiah	1,00	0 %	Rp. 1.920.000,00
	[-] Modul Pelatihan Latker di BLK (6 Pkt; 20 Buku)					**Rp. 12.000.000,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	6 x 20 x 100000	Paket Buku Rupiah	1,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	[#] Latker BLK; Latker LPKS/BLKK/Mitra Latker; Latker Kewirausahaan; Latker MPS Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 15.130.400,00**
	[-] Buku Laporan Tahunan DBHCHT (1 Kali; 3 buah)					**Rp. 225.000,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	1 x 3 x 75000	Kali Buku Rupiah	1,00	0 %	Rp. 225.000,00
	[-] Cetak stopmap dinas Spesifikasi					**Rp. 2.100.000,00**
	Cetak stopmap dinas Spesifikasi : -	300	Lembar	7.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	[-] Fotokopi Administrasi Umum 12 Bulan					**Rp. 3.725.400,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	12418	Lembar	300,00	0 %	Rp. 3.725.400,00
	[-] Kertas HVS A4					**Rp. 2.850.000,00**
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 ; 80 gr; 216 X 297 mm	25	Rim	54.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 ; 70 gr ; 216 X 330 mm	25	Rim	60.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] Laporan Per Program/ Jurusan - Rangkap 4					**Rp. 3.600.000,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	12 x 4 x 75000	Laporan Buku Rupiah	1,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[-] Laporan Triwulanan DBHCHT (4 Kali; 3 Buah)					**Rp. 180.000,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	4 x 3 x 15000	Kali Buku Rupiah	1,00	0 %	Rp. 180.000,00
	[-] Stopmap Untuk Peserta (Tempat Piagam/ Sertifikat)					**Rp. 2.450.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak stopmap dinas Spesifikasi : -	350	Buah	7.000,00	0 %	Rp. 2.450.000,00
	[#] Latker Kewirausahaan Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 600.000,00**
	[-] Belanja Penggandaan (Fotocopy Materi Latker)					**Rp. 600.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	5 x 20 x 20	Paket Orang Lembar	300,00	0 %	Rp. 600.000,00
	[#] Latker LPKS/ BLKK/ Mitra Latker Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 1.600.000,00**
	[-] Cetak dan Penulisan Sertifikat LPKS/BLK K					**Rp. 1.600.000,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	4 x 20 x 20000	Paket Lembar Rupiah	1,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	[#] Latker MPS Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 20.000.000,00**
	[-] Modul Latker MPS					**Rp. 20.000.000,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	10 x 20 x 100000	Paket Buku Rupiah	1,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 24.222.600,00**
	[#] Latker BLK Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 1.980.000,00**
	[-] Spanduk Latker BLK Per Jurusan					**Rp. 712.800,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	6 x 3 x 1 x 0.6	Paket Meter Meter %	66.000,00	0 %	Rp. 712.800,00
	[-] Spanduk Pembukaan dan Penutupan Pelatihan BLK (2 Kl)					**Rp. 1.267.200,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	4 x 4 x 2 x 0.6	Kali Meter Meter %	66.000,00	0 %	Rp. 1.267.200,00
	[#] Latker BLK; Latker LPKS/BLKK/Mitra Latker; Latker Kewirausahaan; Latker MPS Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 11.841.000,00**
	[-] Baliho					**Rp. 2.800.000,00**
	Baliho Spesifikasi : -	1 x 4 x 700000	Buah Kecamatan Rupiah	1,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	[-] Cetak Brosur-Brosur Latker					**Rp. 3.000.000,00**
	Cetak Brosur Spesifikasi : -	6000 x 500	Rupiah Lembar	1,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] Dokumentasi (Cetak Foto Peserta Pelatihan)					**Rp. 996.000,00**
	Cetak Film Foto Spesifikasi : Ukuran 4 R	249	Lembar	4.000,00	0 %	Rp. 996.000,00
	[-] Ink Jet Catridge					**Rp. 1.160.000,00**
	Ink Jet Cartridge Spesifikasi : Yellow/Magenta/Cyan Ink Cartridge	5	Buah	232.000,00	0 %	Rp. 1.160.000,00
	[-] Refill Tinta					**Rp. 1.905.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Refil Tinta Spesifikasi : 60 ml, Ber ID	15	Botol	127.000,00	0 %	Rp. 1.905.000,00
	[-] Spanduk Rapat-Rapat Koordiinasi					**Rp. 1.980.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	5 x 2 x 5 x 0.6	Kali Meter Meter %	66.000,00	0 %	Rp. 1.980.000,00
	[#] Latker Kewirausahaan Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 7.392.000,00**
	[-] Spanduk Pelaksanaan Latker Kewirausahaan					**Rp. 792.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	4 x 1 x 5 x 0.6	Meter Meter Paket %	66.000,00	0 %	Rp. 792.000,00
	[-] Spanduk Rapat-Rapat Koordiinasi					**Rp. 6.600.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	10 x 2 x 5	Kali Meter Meter	66.000,00	0 %	Rp. 6.600.000,00
	[#] Latker LPKS/ BLKK/ Mitra Latker Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 1.425.600,00**
	[-] Spanduk Pelatihan di LPKS/BLKK					**Rp. 633.600,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	4 x 1 x 4 x 0.6	Paket Meter Meter %	66.000,00	0 %	Rp. 633.600,00
	[-] Spanduk Pembukaan Latker LPKS/BLKK					**Rp. 792.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	2 x 5 x 2 x 0.6	Buah Meter Meter %	66.000,00	0 %	Rp. 792.000,00
	[#] Latker MPS Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 1.584.000,00**
	[-] Spanduk Latker MPS					**Rp. 1.584.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	10 x 1 x 4 x 0.6	Paket Meter Meter %	66.000,00	0 %	Rp. 1.584.000,00
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 1.000.000,00**
	[#] Latker BLK; Latker LPKS/BLKK/Mitra Latker; Latker Kewirausahaan; Latker MPS Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 1.000.000,00**
	[-] Materai @10.000,-					**Rp. 1.000.000,00**
	Materai 10000 Spesifikasi : -	100	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.01.01.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**Rp. 15.000.000,00**
	[#] Latker Kewirausahaan Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 15.000.000,00**
	[-] Kaos Lapangan Lengan Panjang Peserta Latker Kewirausahaan					**Rp. 15.000.000,00**
	Kaos Lapangan Lengan Panjang Spesifikasi : -	5 x 30	Paket Buah	100.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 1.838.927.000,00**
	[#] Latker BLK Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 110.750.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Las					**Rp. 20.000.000,00**
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi : -	1 x 20000000	Paket Rupiah	1,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
	[-] Pelatihan Menjahit Pakaian					**Rp. 13.200.000,00**
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi : -	1 x 13200000	Paket Rupiah	1,00	0 %	Rp. 13.200.000,00
	[-] Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue					**Rp. 15.600.000,00**
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi : -	1 x 15600000	Paket Rupiah	1,00	0 %	Rp. 15.600.000,00
	[-] Pelatihan Service AC					**Rp. 20.000.000,00**
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi : -	1 x 20000000	Paket Rupiah	1,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
	[-] Pelatihan Tata Boga					**Rp. 12.000.000,00**
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi : -	1 x 12000000	Paket Rupiah	1,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	[-] Perlengkapan Latker BLK/ Ransel siswa Latker					**Rp. 19.950.000,00**
	Ransel Spesifikasi : Standart	6 x 25 x 0.5	Paket Buah %	266.000,00	0 %	Rp. 19.950.000,00
	[-] Service Kendaraan Ringan					**Rp. 10.000.000,00**
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi : -	1 x 10000000	Paket Rupiah	1,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
	[#] Latker Kewirausahaan **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 20.000.000,00**
	[-] Bahan Praktek Latker Kewirausahaan					**Rp. 20.000.000,00**
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi : -	5 x 4000000	Paket Rupiah	1,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
	[#] Latker LPKS/ BLKK/ Mitra Latker **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 44.500.000,00**
	[-] Bahan Latker Hantaran					**Rp. 14.000.000,00**
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi : -	1 x 14000000	Orang / Paket Rupiah	1,00	0 %	Rp. 14.000.000,00
	[-] Bahan Latker Menjahit					**Rp. 20.000.000,00**
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi : -	2 x 10000000	Orang / Paket Rupiah	1,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
	[-] Bahan Latker Roti dan Kue					**Rp. 10.500.000,00**
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi : -	1 x 10500000	Orang / Paket Rupiah	1,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
	[#] Latker MPS **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 79.900.000,00**
	[-] Bahan Latker Kerajinan					**Rp. 20.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi : -	5 x 4000000	Paket Rupiah	1,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
	[-] Bahan Latker Roti dan Kue					**Rp. 20.000.000,00**
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi : -	5 x 4000000	Paket Rupiah	1,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
	[-] Perlengkapan Latker MPS/ Ransel					**Rp. 39.900.000,00**
	Ransel Spesifikasi : Standart	10 x 30 x 0.5	Paket Buah %	266.000,00	0 %	Rp. 39.900.000,00
	[#] pelatihan **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 1.583.777.000,00**
	[-] pelatihan					**Rp. 1.583.777.000,00**
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi : -	1583777000	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 1.583.777.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 385.894.000,00**
	[#] FKLPI / FKJPPID **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 3.680.000,00**
	[-] RAKOR KEMITRAAN FKJPPID					**Rp. 3.680.000,00**
	Jamuan makan (prasmanan) Spesifikasi : -	40 x 2	Orang Kali	35.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	40 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 880.000,00
	[#] Latker BLK **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 236.964.000,00**
	[-] Makan Materi umum Latker BLK					**Rp. 18.720.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	6 x 26 x 4	Paket Orang Hari	30.000,00	0 %	Rp. 18.720.000,00
	[-] Makan Pelaksanaan Latker Teknis BLK					**Rp. 140.400.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	6 x 30 x 26	Paket Hari Orang	30.000,00	0 %	Rp. 140.400.000,00
	[-] Makan Pembukaan dan Penutupan Latker BLK (2 Gelombang; 1 Hr)					**Rp. 10.800.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	30 x 6 x 2	Orang Paket Kali	30.000,00	0 %	Rp. 10.800.000,00
	[-] Makan Rakor Persiapan/ Evaluasi Latker BLK					**Rp. 5.400.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	30 x 6	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	[-] Snack Materi umum Latker BLK					**Rp. 6.864.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	6 x 26 x 4	Paket Orang Hari	11.000,00	0 %	Rp. 6.864.000,00
	[-] Snack Pelaksanaan Latker Teknis BLK					**Rp. 51.480.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	6 x 30 x 26	Paket Hari Orang	11.000,00	0 %	Rp. 51.480.000,00
	[-] Snack Rakor Persiapan/ Evaluasi Latker BLK					**Rp. 3.300.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	30 x 10	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 3.300.000,00
	[#] Latker Kewirausahaan Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 18.950.000,00**
	[-] Pelaksanaan Latker Kewirausahaan					**Rp. 14.350.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	5 x 2 x 35	Paket Hari Orang	30.000,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	5 x 2 x 35	Paket Hari Orang	11.000,00	0 %	Rp. 3.850.000,00
	[-] Rakor Umum Latker Kewirausahaan					**Rp. 4.600.000,00**
	Jamuan makan (prasmanan) Spesifikasi : -	50 x 2	Orang Kali	35.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	50 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
	[#] Latker LPKS/ BLKK/ Mitra Latker Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 95.460.000,00**
	[-] Makan dan Snack Latker LPKS/ BLK K/ Mitra -- Materi Umum					**Rp. 17.712.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	27 x 4 x 4	Orang Paket Hari	30.000,00	0 %	Rp. 12.960.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	27 x 4 x 4	Orang Paket Hari	11.000,00	0 %	Rp. 4.752.000,00
	[-] Makan dan Snack Latker (Materi Teknis) LPKS/ BLKK					**Rp. 61.992.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	4 x 14 x 27	Paket Hari Orang	30.000,00	0 %	Rp. 45.360.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	4 x 14 x 27	Paket Hari Orang	11.000,00	0 %	Rp. 16.632.000,00
	[-] Pembukaan dan Penutupan Pelatihan - LPKS/ BLKK					**Rp. 8.856.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	2 x 4 x 27	Kali Paket Orang	30.000,00	0 %	Rp. 6.480.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	2 x 4 x 27	Kali Paket Orang	11.000,00	0 %	Rp. 2.376.000,00
	[-] Rakor Latker LPKS/ BLKK/ Mitra Latker					**Rp. 6.900.000,00**
	Jamuan makan (prasmanan) Spesifikasi : -	50 x 3	Orang Kali	35.000,00	0 %	Rp. 5.250.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	50 x 3	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 1.650.000,00
	[#] Latker MPS **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 30.840.000,00**
	[-] Makan Snack Pelaksanaan Latker MPS					**Rp. 26.240.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	10 x 2 x 32	Paket Hari Orang	30.000,00	0 %	Rp. 19.200.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	10 x 2 x 32	Paket Hari Orang	11.000,00	0 %	Rp. 7.040.000,00
	[-] Rakor Latker MPS (Pekerja Pabrik Pokok)					**Rp. 4.600.000,00**
	Jamuan makan (prasmanan) Spesifikasi : -	50 x 2	Orang Kali	35.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	50 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
5.1.02.01.01.0072	**Belanja Pakaian Kerja Bengkel**					**Rp. 81.000.000,00**
	[#] Latker BLK **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 20.250.000,00**
	[-] Pakaian Latker BLK					**Rp. 20.250.000,00**
	Wearpack Baju Kerja Spesifikasi : -	6 x 25 x 0.45	Paket Buah %	300.000,00	0 %	Rp. 20.250.000,00
	[#] Latker LPKS/ BLKK/ Mitra Latker **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 13.500.000,00**
	[-] Pakaian Latker LPKS/ BLK K / Mitra					**Rp. 13.500.000,00**
	Wearpack Baju Kerja Spesifikasi : -	4 x 25 x 0.45	Paket Buah %	300.000,00	0 %	Rp. 13.500.000,00
	[#] Latker MPS **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 47.250.000,00**
	[-] Pakaian Latker MPS					**Rp. 47.250.000,00**
	Wearpack Baju Kerja Spesifikasi : -	10 x 35 x 0.45	Paket Buah %	300.000,00	0 %	Rp. 47.250.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 342.435.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 213.575.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 213.575.000,00**
	[#] FKLPI / FKJPPID **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 5.150.000,00**
	[-] RAKOR KEMITRAAN FKJPPID					**Rp. 5.150.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon II /DPRD/ yang disetarakan (Honor Narasumbe...	1 x 2 x 0.5	Orang Kali %	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon III / yang disetarakan (Honor Narasumber h...	1 x 2 x 0.5	Orang Kali %	900.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon IV / yang disetarakan (Honor Narasumber ha...	1 x 2 x 0.5	Orang Kali %	750.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Moderator, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	1 x 2 x 0.5	Orang Kali %	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	1 x 4 x 0.5	Orang Kali %	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[#] Latker BLK Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 24.100.000,00**
	[-] Honor Eselon III Pembukaan dan Penutupan Latker BLK (2 Gel)					**Rp. 1.800.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon III / yang disetarakan (Honor Narasumber h...	1 x 4 x 0.5	Orang Kali %	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	[-] Honor Eselon II Pembukaan dan Penutupan Latker BLK (2 Gel)					**Rp. 2.000.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon II /DPRD/ yang disetarakan (Honor Narasumbe...	1 x 4 x 0.5	Orang Kali %	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] Honor Eselon IV Pembukaan dan Penutupan Latker BLK (2 Gel)					**Rp. 1.500.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon IV / yang disetarakan (Honor Narasumber ha...	1 x 4 x 0.5	Orang Kali %	750.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] Honor Moderator Pembukaan dan Penutupan Latker BLK (2 Gel)					**Rp. 1.000.000,00**
	Moderator, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	1 x 4 x 0.5	Orang Kali %	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] Honor Walikota/Wakil Walikota Pembukaan dan Penutupan Latker BLK (2 Gel)					**Rp. 5.200.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Walikota/ Wakil Bupati/Wakil Walikota	1 x 4	Orang Kali	1.300.000,00	0 %	Rp. 5.200.000,00
	[-] Instruktur Non PNS Latker di BLK					**Rp. 9.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	6 x 1 x 30 x 0.05	Orang / Jam / Pelajaran Paket Hari %	1.000.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	[-] Narsum Provinsi/ Set DBH CHT Provinsi Pembukaan dan Penutupan Latker BLK (2 Gel)					**Rp. 3.600.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon II /DPRD/ yang disetarakan (Honor Narasumbe...	1 x 4 x 0.9	Orang Kali %	1.000.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[#] Latker BLK; Latker LPKS/BLKK/Mitra Latker; Latker Kewirausahaan; Latker MPS Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 43.300.000,00**
	[-] Moderator Rakor Persiapan dan Evaluasi					**Rp. 1.250.000,00**
	Moderator, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	1 x 5 x 0.5	Orang Kali %	500.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	[-] Narsum Eselon III					**Rp. 9.000.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon III / yang disetarakan (Honor Narasumber h...	1 x 5	Orang Kali	900.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon III / yang disetarakan (Honor Narasumber h...	1 x 5	Orang Kali	900.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	[-] Narsum Pengantar Kerja/ Analis Tenaga Kerja Rakor Persiapan dan Evaluasi					**Rp. 1.875.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon IV / yang disetarakan (Honor Narasumber ha...	1 x 5 x 0.5	Orang Kali %	750.000,00	0 %	Rp. 1.875.000,00
	[-] Narsum Provinsi					**Rp. 4.500.000,00**
	Narasumber Profesional dengan reputasi Regional Provinsi Spesifikasi : -	1 x 0.36 x 5	Orang % Kali	2.500.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	[-] Narsum rakor Mitra (LPKS/Pakar/MPS/Mitra Latker)					**Rp. 5.000.000,00**
	Narasumber Profesional dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	1 x 5	Orang Kali	1.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	[-] Narsum Rakor Persiapan dan Evaluasi Eselon II,					**Rp. 2.500.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon II /DPRD/ yang disetarakan (Honor Narasumbe...	1 x 5 x 0.5	Orang Orang %	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	[-] Narsum Rakor Persiapan dan Evaluasi (Eselon III)					**Rp. 2.250.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon III / yang disetarakan (Honor Narasumber h...	1 x 5 x 0.5	Orang Orang %	900.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
	[-] Rakor Persiapan; Evaluasi Latker (Latker Kewirausahaan; Latker MPS; Latker BLK; LatkerLPKS/ BLK K/ Mitra Latker)					**Rp. 16.925.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Walikota/ Wakil Bupati/Wakil Walikota	1 x 4	Orang Kali	1.300.000,00	0 %	Rp. 5.200.000,00
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon II /DPRD/ yang disetarakan (Honor Narasumbe...	1 x 5 x 0.5	Orang Kali %	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon III / yang disetarakan (Honor Narasumber h...	1 x 5 x 0.5	Orang Kali %	900.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon IV / yang disetarakan (Honor Narasumber ha...	1 x 5 x 0.5	Orang Kali %	750.000,00	0 %	Rp. 1.875.000,00
	Moderator, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	1 x 5	Orang Kali	500.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Walikota/ Wakil Bupati/Wakil Walikota	1 x 2	Orang Kali	1.300.000,00	0 %	Rp. 2.600.000,00
	[#] Latker Kewirausahaan **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 40.575.000,00**
	[-] Eselon II					**Rp. 2.500.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon II /DPRD/ yang disetarakan (Honor Narasumbe...	1 x 5 x 0.5	Orang Paket %	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	[-] Eselon III					**Rp. 7.650.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon III / yang disetarakan (Honor Narasumber h...	1 x 5 x 0.5	Orang Kali %	900.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon III / yang disetarakan (Honor Narasumber h...	1 x 6	Orang Kali	900.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	[-] Eselon IV					**Rp. 1.875.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon IV / yang disetarakan (Honor Narasumber ha...	1 x 5 x 0.5	Orang Paket %	750.000,00	0 %	Rp. 1.875.000,00
	[-] Moderator					**Rp. 1.250.000,00**
	Moderator, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	1 x 5 x 0.5	Orang Kali %	500.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	[-] Narsum/ Instruktur					**Rp. 10.000.000,00**
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	2 x 2 x 5 x 0.5	Orang Hari Paket %	1.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
	[-] Narsum Pakar Kewirausahaan/Manajemen					**Rp. 2.500.000,00**
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	1 x 5 x 0.5	Orang Paket %	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	[-] Narsum Provinsi					**Rp. 13.500.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon II /DPRD/ yang disetarakan (Honor Narasumbe...	1 x 15 x 0.9	Orang Kali %	1.000.000,00	0 %	Rp. 13.500.000,00
	[-] Walikota/ Wakil Walikota					**Rp. 1.300.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Walikota/ Wakil Bupati/Wakil Walikota	1 x 1	Orang Kali	1.300.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
	[#] Latker LPKS/ BLKK/ Mitra Latker **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 46.200.000,00**
	[-] Instruktur latker di LPKS/BLK K/ Mitra					**Rp. 33.600.000,00**
	Narasumber Profesional dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	4 x 12 x 14 x 0.05	Paket Orang / Jam Pelajaran Hari %	1.000.000,00	0 %	Rp. 33.600.000,00
	[-] Jasa Mengajar Kompetensi Dasar/Umum					**Rp. 2.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	2 x 2 x 0.5	Orang Kegiatan %	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] Materi umum/ Kewirausahaan					**Rp. 2.000.000,00**
	Narasumber Profesional dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	2 x 2 x 0.5	Orang Kegiatan %	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] Moderator					**Rp. 750.000,00**
	Moderator, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	1 x 3 x 0.5	Orang Kali %	500.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	[-] Narsum Eselon III					**Rp. 1.350.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon III / yang disetarakan (Honor Narasumber h...	1 x 3 x 0.5	Orang Kali %	900.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
	[-] Narsum Eseslon II,					**Rp. 1.500.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon II /DPRD/ yang disetarakan (Honor Narasumbe...	1 x 3 x 0.5	Orang Kali %	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] Pembukaan Latker LPKS/BLKK/ Mitra Latker Eselon II					**Rp. 1.000.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon II /DPRD/ yang disetarakan (Honor Narasumbe...	1 x 2 x 0.5	Orang Kali %	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] Pembukaan Latker LPKS/BLKK/ Mitra Latker Eselon III					**Rp. 900.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon III / yang disetarakan (Honor Narasumber h...	1 x 2 x 0.5	Orang Kali %	900.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	[-] Pembukaan Latker LPKS/BLKK/ Mitra Latker Moderator					**Rp. 500.000,00**
	Moderator, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	1 x 2 x 0.5	Orang Kali %	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	[-] Pembukaan Latker LPKS/BLKK/ Mitra Latker Walikota/ Wakil Walikota					**Rp. 2.600.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Walikota/ Wakil Bupati/Wakil Walikota	1 x 2	Orang Kali	1.300.000,00	0 %	Rp. 2.600.000,00
	[#] Latker MPS **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 54.250.000,00**
	[-] Eselon II					**Rp. 5.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon II /DPRD/ yang disetarakan (Honor Narasumbe...	1 x 10 x 0.5	Orang Kali %	1.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	[-] Eselon III					**Rp. 4.500.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon III / yang disetarakan (Honor Narasumber h...	1 x 10 x 0.5	Orang Kali %	900.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	[-] Eselon IV					**Rp. 3.750.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon IV / yang disetarakan (Honor Narasumber ha...	1 x 10 x 0.5	Orang Kali %	750.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
	[-] Instruktur latker MPS					**Rp. 20.000.000,00**
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	2 x 2 x 10 x 0.5	Orang Hari Paket %	1.000.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
	[-] Ketua Dekranasda					**Rp. 1.500.000,00**
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	1 x 3 x 0.5	Orang Kali %	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] Moderator					**Rp. 2.500.000,00**
	Moderator, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	1 x 10 x 0.5	Orang Kali %	500.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	[-] Narsum Manajemen MPS					**Rp. 5.000.000,00**
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	1 x 10 x 0.5	Orang Paket %	1.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	[-] Narsum Provinsi					**Rp. 3.600.000,00**
	Narasumber Profesional dengan reputasi Regional Provinsi Spesifikasi : -	1 x 4 x 0.36	Orang Kali %	2.500.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[-] 'Pakar/Mitra/Stakeholder Terkait					**Rp. 4.500.000,00**
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	1 x 10 x 0.45	Orang Kali %	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	[-] Walikota/ Wakil Walikota					**Rp. 3.900.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Walikota/ Wakil Bupati/Wakil Walikota	1 x 3	Orang Kali	1.300.000,00	0 %	Rp. 3.900.000,00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 15.500.000,00**
5.1.02.02.04.0123	**Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp. 15.500.000,00**
	[#] Latker BLK; Latker LPKS/BLKK/Mitra Latker; Latker Kewirausahaan; Latker MPS Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 15.500.000,00**
	[-] Sewa sound system					**Rp. 15.500.000,00**
	Sound system Spesifikasi : 1000 watt	5 x 2	Kali Hari	1.550.000,00	0 %	Rp. 15.500.000,00
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp. 12.000.000,00**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp. 12.000.000,00**
	[#] Latker BLK; Latker LPKS/BLKK/Mitra Latker; Latker Kewirausahaan; Latker MPS Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 12.000.000,00**
	[-] Sewa ruangan pelatihan					**Rp. 12.000.000,00**
	Sewa Gedung / Meeting Room Spesifikasi : -	2 x 5	Hari Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 101.360.000,00**
5.1.02.02.12.0001	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**					**Rp. 101.360.000,00**
	[#] Banpot OJT Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 6.000.000,00**
	[-] Bantuan transpot siswa selama 3 bln (kemitraan)					**Rp. 6.000.000,00**
	Bantuan Transport siswa OJT-BLK Spesifikasi : -	20 x 15	Orang Hari	20.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[#] Latker BLK Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 63.360.000,00**
	[-] Banport Peserta BLK					**Rp. 63.360.000,00**
	Transport siswa pelatihan BLK / LPKS Spesifikasi : -	16 x 6 x 33	Orang Paket Hari	20.000,00	0 %	Rp. 63.360.000,00
	[#] Latker LPKS/ BLKK/ Mitra Latker Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 32.000.000,00**
	[-] Banport Peserta LPKS					**Rp. 32.000.000,00**
	Transport siswa pelatihan BLK / LPKS Spesifikasi : -	20 x 4 x 20	Orang Paket Hari	20.000,00	0 %	Rp. 32.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 61.490.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 61.490.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 12.990.000,00**
	[#] Latker BLK Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 3.600.000,00**
	[-] Bantuan transport monitoring siswa OJT					**Rp. 3.600.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	4 x 30	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[#] Latker Kewirausahaan Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 3.150.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Koordinasi dan Monitoring Latker Kewirausahaan					**Rp. 1.350.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	3 x 3 x 5	Orang Kali Paket	30.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
	[-] SPPD Tim Kelurahan (Pendataan, Rekrutmen, Koordinasi ke RT/RW)					**Rp. 1.800.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	6 x 2 x 5	Orang Kali Paket	30.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	[#] Latker LPKS/ BLKK/ Mitra Latker **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 1.440.000,00**
	[-] SPPD Dalam Daerah (Koordinasi, Monitoring Pelatihan kerjasama dengan LPKS/ BLKKomunitas)					**Rp. 1.440.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	3 x 4 x 4	Orang Kali Lokasi	30.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
	[#] Latker MPS **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 4.800.000,00**
	[-] Koordinasi dan Monitoring Latker MPS					**Rp. 4.800.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	10 x 4 x 4	Paket Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 48.500.000,00**
	[#] FKLPI / FKJPPID **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 2.500.000,00**
	[-] Banpot Peserta Rakor Non PNS					**Rp. 2.500.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	25 x 2	Orang Kali	50.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	[#] Latker Kewirausahaan **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 14.000.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	20 x 4	Orang Kali	50.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	[-] Transport Peserta Latker Kewirausahaan (Latker Kewirausahaan)					**Rp. 10.000.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	20 x 2 x 5	Orang Hari Paket	50.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
	[#] Latker LPKS/ BLKK/ Mitra Latker **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 2.000.000,00**
	[-] Banpot Peserta Rakor Non PNS					**Rp. 2.000.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	20 x 2	Orang Kali	50.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[#] Latker MPS **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 30.000.000,00**
	[-] Banpot Panitian Pendukung Unsur manajement PT MPS Urip Sugiharto (Latker MPS (PekerjaPabrik Rokok))					**Rp. 4.000.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	4 x 10 x 2	Orang Paket Hari	50.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	[-] Banpot Peserta (Latker MPS (Pekerja Pabrik Rokok))					**Rp. 20.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	20 x 2 x 10	Orang Hari Paket	50.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
	[-] Banpot Peserta Rakor Non PNS					**Rp. 4.000.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	20 x 4	Orang Kali	50.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	[-] Banpot Petugas Mitra (Asisten Teknis Narsum) Angkut alat alat ke pabrik Rokok LokasiLatker MPS					**Rp. 2.000.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	2 x 10 x 2	Orang Paket Hari	50.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 2.832.939.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Kegiatan	: 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Oktober
Kelompok Sasaran	: Pencari Kerja Kota Pekalongan Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 238.738.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 252.049.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	1,15 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 238.738.000,00
Keluaran	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	1 Lembaga
Hasil	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Kejuruan	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Oktober
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 238.738.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 238.738.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 3.150.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 3.150.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 3.150.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 3.150.000,00**
	[#] Kejuruan yang alat-alatnya dirawat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.150.000,00**
	[-] Honorarium Kasir Kegiatan					**Rp. 1.350.000,00**
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta ...	6	Orang / Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
	[-] Honorarium PPTK					**Rp. 1.800.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	6	Orang / Bulan	300.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 235.588.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 10.972.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 10.972.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 722.000,00**
	[#] Kejuruan yang alat- alat pelatihannya dirawat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 722.000,00**
	[-] Fotocopy					**Rp. 722.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	2406	Lembar	300,00	0 %	Rp. 721.800,00
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	200	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 10.250.000,00**
	[#] Kejuruan yang alat- alat pelatihannya dirawat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 10.250.000,00**
	[-] Promosi BLK					**Rp. 5.125.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	125	Orang	11.000,00	0 %	Rp. 1.375.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	125	Orang	30.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
	[-] Rapat Koordinasi					**Rp. 5.125.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	125	Orang	11.000,00	0 %	Rp. 1.375.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	125	Orang	30.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 224.616.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 213.600.000,00**
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**Rp. 211.200.000,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 211.200.000,00**
	[-] Gaji Non ASN SK Dinas					**Rp. 211.200.000,00**
	Tenaga Administrasi DINPERINAKER Spesifikasi : -	2 x 12	Orang Bulan	2.050.000,00	0 %	Rp. 49.200.000,00
	Tenaga Administrasi DINPERINAKER Spesifikasi : -	5 x 12	Orang Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 132.000.000,00
	Tenaga Operator IT, Pengalaman Kerja di Pemkot lebih dari 8 tahun Spesifikasi : meliputi : Teknis jaringan, Entri data, Pengisi ko...	1 x 12	Orang Bulan	2.500.000,00	0 %	Rp. 30.000.000,00
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp. 2.400.000,00**
	[#] Kejuruan yang alat- alat pelatihannya dirawat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.400.000,00**
	[-] BANPOT CARAKA					**Rp. 2.400.000,00**
	Banpot caraka Spesifikasi : -	60	Kali	40.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 11.016.000,00**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 9.480.000,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 9.480.000,00**
	[-] BPJS KESEHATAN					**Rp. 9.480.000,00**
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi : -	1 x 12 x 104000	Orang Bulan Rupiah	1,00	0 %	Rp. 1.248.000,00
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi : -	7 x 12 x 98000	Orang Bulan Rupiah	1,00	0 %	Rp. 8.232.000,00
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 672.000,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 672.000,00**
	[-] Premi Asuransi Kecelakaan Kerja Non ASN					**Rp. 672.000,00**
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi : -	8 x 12 x 7000	Orang Bulan Rupiah	1,00	0 %	Rp. 672.000,00
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp. 864.000,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 864.000,00**
	[-] Premi Asuransi Kematian Non ASN					**Rp. 864.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi : -	8 x 12 x 9000	Orang Bulan Rupiah	1,00	0 %	Rp. 864.000,00
					Jumlah :	**Rp. 238.738.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	**Formulir RKA-BELANJA SKPD**
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Kegiatan	: 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pencari Kerja Kota Pekalongan Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 141.890.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 235.461.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	1,15 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 141.890.000,00
Keluaran	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	141 Unit
Hasil	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Kejuruan	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 141.890.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 36.778.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 3.850.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 3.850.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 3.850.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 3.450.000,00**
	[#] Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.450.000,00**
	[-] Honorarium Kasir Kegiatan					**Rp. 1.350.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta ...	1 x 6	Orang Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan					**Rp. 2.100.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta ...	1 x 6	Orang / Bulan Bulan	350.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 400.000,00**
	[#] Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 400.000,00**
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					**Rp. 250.000,00**
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta	1 x 1	Orang Kali	250.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	[-] Pejabat Teknis					**Rp. 150.000,00**
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Teknis Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta	1	Orang / Paket / Pekerjaan	150.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 32.928.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 13.004.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 13.004.000,00**
5.1.02.01.01.0001	**Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi**					**Rp. 1.000.000,00**
	[#] Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.000.000,00**
	[-] BLK					**Rp. 1.000.000,00**
	Bahan Bangunan Dan Konstruksi Spesifikasi : -	1 x 1000000	Tahun Rupiah	1,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp. 5.796.000,00**
	[#] Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.796.000,00**
	[-] BLK					**Rp. 5.796.000,00**
	Oli Mesin Spesifikasi : SAE 40	12	Buah	46.000,00	0 %	Rp. 552.000,00
	BBM Mesin Pemotong Rumput Spesifikasi : -	368	Liter	14.250,00	0 %	Rp. 5.244.000,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 608.000,00**
	[#] Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 608.000,00**
	[-] Fotocopy					**Rp. 608.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	2026	Lembar	300,00	0 %	Rp. 607.800,00
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	200	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp. 5.600.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.600.000,00**
	[-] Pengadaan Gerobak dorong sampah					**Rp. 5.600.000,00**
	Kontainer sampah Spesifikasi : -	1 x 5600000	Unit Rupiah	1,00	0 %	Rp. 5.600.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 1.200.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 1.200.000,00**
5.1.02.02.01.0016	**Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum**					**Rp. 1.200.000,00**
	[#] Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.200.000,00**
	[-] BLK					**Rp. 1.200.000,00**
	Tukang Harian Lepas Pekerjaan Swakelola Spesifikasi : -	10	Kali	120.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 18.724.000,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 18.724.000,00**
5.1.02.03.02.0038	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua**					**Rp. 2.000.000,00**
	[#] Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.000.000,00**
	[-] ALAT PRAKTIK BLK					**Rp. 2.000.000,00**
	Service dan suku cadang Spesifikasi : Sepeda Motor/Kendaraan Bermotor Roda Dua :	4	Unit	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.03.02.0040	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus**					**Rp. 2.550.000,00**
	[#] Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.550.000,00**
	[-] ALAT PRAKTIK BLK					**Rp. 2.550.000,00**
	Service dan suku cadang Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 (Station Wagon/Pick Up/sejenis)	1 x 0.3	Unit %	8.500.000,00	0 %	Rp. 2.550.000,00
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**Rp. 4.374.000,00**
	[#] Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.374.000,00**
	[-] BLK					**Rp. 4.374.000,00**
	AC Split sd 1 PK Spesifikasi : Ringan	45 x 0.24	Unit %	405.000,00	0 %	Rp. 4.374.000,00
5.1.02.03.02.0123	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp. 1.800.000,00**
	[#] Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.800.000,00**
	[-] Service Mesin Jahit					**Rp. 1.600.000,00**
	Pekerjaan Spesifikasi : -	16 x 100000	Unit Rupiah	1,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	[-] Service Mesin Pelubang Kancing					**Rp. 200.000,00**
	Pekerjaan Spesifikasi : -	1 x 200000	Unit Rupiah	1,00	0 %	Rp. 200.000,00
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp. 8.000.000,00**
	[#] Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 8.000.000,00**
	[-] PC DESAIN					**Rp. 1.600.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Personal Komputer (PC) / Laptop Spesifikasi : Ringan	16 x 0.2	Unit %	500.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	[-] PC TIK dan BISMAN					**Rp. 3.600.000,00**
	Personal Komputer (PC) / Laptop Spesifikasi : Ringan	36 x 0.2	Unit %	500.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[-] PC TU					**Rp. 500.000,00**
	Personal Komputer (PC) / Laptop Spesifikasi : Ringan	5 x 0.2	Unit %	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	[-] Pemeliharaan Jaringan LAN					**Rp. 2.000.000,00**
	Instalasi / perbaikan jaringan LAN Spesifikasi : -	10	Titik	200.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] Printer TU					**Rp. 300.000,00**
	Printer Spesifikasi : Ringan	2 x 0.5	Unit %	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 105.112.000,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 105.112.000,00**
5.2.02.02	**Belanja Modal Alat Angkutan**					**Rp. 22.350.000,00**
5.2.02.02.01	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**					**Rp. 22.350.000,00**
5.2.02.02.01.0004	**Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua**					**Rp. 22.350.000,00**
	[#] Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 22.350.000,00**
	[-] ALAT PRAKTIK BLK					**Rp. 22.000.000,00**
	Sepeda Motor Matic 125cc CBS ISS off the road Spesifikasi : -	1	Unit	22.000.000,00	0 %	Rp. 22.000.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					**Rp. 350.000,00**
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1	Orang / Paket / Pekerjaan	150.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 16.312.000,00**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp. 16.312.000,00**
5.2.02.05.02.0003	**Belanja Modal Alat Pembersih**					**Rp. 6.000.000,00**
	[#] Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 6.000.000,00**
	[-] BLK					**Rp. 6.000.000,00**
	Mesin Pemotong Rumput Spesifikasi : Gendong	1 x 0.8599684	Unit %	6.977.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
5.2.02.05.02.0004	**Belanja Modal Alat Pendingin**					**Rp. 8.312.000,00**
	[#] Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 8.312.000,00**
	[-] BLK					**Rp. 8.312.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Modal Alat Pendingin	1	Unit	8.312.000,00	0 %	Rp. 8.312.000,00
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp. 2.000.000,00**
	[#] Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.000.000,00**
	[-] BLK					**Rp. 2.000.000,00**
	Tempat sampah terpilah (organik dan anorganik) Spesifikasi : Rangka Besi	4	Set	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp. 12.000.000,00**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp. 5.000.000,00**
5.2.02.10.01.0003	**Belanja Modal Komputer Unit Lainnya**					**Rp. 5.000.000,00**
	[#] Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.000.000,00**
	[-] Belanja Modal Pengadaan Printer 3210					**Rp. 5.000.000,00**
	Pekerjaan Spesifikasi : -	1 x 5000000	Unit Rupiah	1,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp. 7.000.000,00**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp. 7.000.000,00**
	[#] Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 7.000.000,00**
	[-] Belanja Modal Pengadaan Scanner ADF (BM)					**Rp. 7.000.000,00**
	Scanner ADF (Automatic Document Feeder) Spesifikasi : -	1 x 7000000	Unit Rupiah	1,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
5.2.02.16	**Belanja Modal Alat Peraga**					**Rp. 54.450.000,00**
5.2.02.16.01	**Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan**					**Rp. 54.450.000,00**
5.2.02.16.01.0001	**Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan**					**Rp. 54.450.000,00**
	[#] Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 54.450.000,00**
	[-] Belanja Modal Pengadaan Trainer PLC Omron tanpa HMI (BM)					**Rp. 54.000.000,00**
	Pekerjaan Spesifikasi : -	4 x 13500000	Unit Rupiah	1,00	0 %	Rp. 54.000.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					**Rp. 450.000,00**
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta	1	Orang / Paket / Pekerjaan	250.000,00	0 %	Rp. 250.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta	1	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
					Jumlah :	**Rp. 141.890.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Kegiatan	: 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: April s.d Juni
Kelompok Sasaran	: LPKS Kota Pekalongan Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 19.830.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 75.259.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	1,15 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 19.830.000,00
Keluaran	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20 Lembaga
Hasil	Persentase kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	90 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina
Waktu Pelaksanaan	: April s.d Juni
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 19.830.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 19.830.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.700.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.700.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.700.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.700.000,00
	[#] Workshop Tata Kelola LPKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.700.000,00
	[-] Kasir kegiatan					Rp. 2.700.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta ...	1 x 12	Orang Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 17.130.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 6.650.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 6.650.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 2.974.000,00**
	[#] Volume Kunjungan Monitoring ke LPKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 687.000,00**
	[-] Buku Laporan					**Rp. 90.000,00**
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal < 5cm	3	Buku	30.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
	[-] Fotocopy					**Rp. 597.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1990	Lembar	300,00	0 %	Rp. 597.000,00
	[#] Workshop Tata Kelola LPKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.287.000,00**
	[-] Buku Laporan					**Rp. 90.000,00**
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal < 5cm	3	Buku	30.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
	[-] Buku Materi					**Rp. 1.200.000,00**
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal < 5cm	20 x 2	Orang Buku	30.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[-] Fotocopy					**Rp. 597.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1990	Lembar	300,00	0 %	Rp. 597.000,00
	[-] Sertifikat peserta workshop					**Rp. 400.000,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	20 x 20000	Lembar Rupiah	1,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 396.000,00**
	[#] Volume Kunjungan Monitoring ke LPKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 98.000,00**
	[-] Dokumentasi					**Rp. 98.000,00**
	Cetak Film Foto Spesifikasi : Ukuran 3 R	49	Lembar	2.000,00	0 %	Rp. 98.000,00
	[#] Workshop Tata Kelola LPKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 298.000,00**
	Cetak Film Foto Spesifikasi : Ukuran 3 R	50	Lembar	2.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
	[-] Spanduk					**Rp. 198.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	3 x 1 x 1	Meter Meter Buah	66.000,00	0 %	Rp. 198.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 3.280.000,00**
	[#] Workshop Tata Kelola LPKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.280.000,00**
	[-] Makan Snack Rapat Panitia					**Rp. 820.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	10 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	10 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 220.000,00
	[-] Makan Snack Workshop Tata Kelola LPKS					**Rp. 2.460.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	30 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	30 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 660.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 6.080.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 4.080.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 4.000.000,00**
	[#] Workshop Tata Kelola LPKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.000.000,00**
	[-] Honorarium Narasumber Profesional					**Rp. 4.000.000,00**
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	2 x 2	Orang Hari	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp. 80.000,00**
	[#] Workshop Tata Kelola LPKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 80.000,00**
	[-] Caraka					**Rp. 80.000,00**
	Banpot caraka Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Kali	40.000,00	0 %	Rp. 80.000,00
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 2.000.000,00**
5.1.02.02.12.0002	**Belanja Sosialisasi**					**Rp. 2.000.000,00**
	[#] Workshop Tata Kelola LPKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.000.000,00**
	[-] Transport Peserta					**Rp. 2.000.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	20 x 2	Orang Hari	50.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 4.400.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 4.400.000,00**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 4.400.000,00**
	[#] Volume Kunjungan Monitoring ke LPKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.600.000,00**
	[-] Transport Petugas Monitoring					**Rp. 3.600.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	4 x 30	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[#] Workshop Tata Kelola LPKS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 800.000,00**
	[-] Transport Narsum Jawa Tengah					**Rp. 800.000,00**
	Transportasi Narasumber Spesifikasi : -	4 x 200000	Kali Rupiah	1,00	0 %	Rp. 800.000,00
					Jumlah :	**Rp. 19.830.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	**Formulir RKA-BELANJA SKPD**
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Kegiatan	: 2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.04.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Tenant Kota Pekalongan Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 68.656.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 87.039.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	1,15 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 68.656.000,00
Keluaran	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	30 Perusahaan
Hasil	Jumlah kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil dilaksanakan	6 tenant

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.04.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 68.656.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 68.656.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 68.656.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 4.636.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 4.636.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 762.000,00**
	[#] Tenant yang memperoleh pembinaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 762.000,00**
	[-] Fotocopy					**Rp. 672.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	2240	Lembar	300,00	0 %	Rp. 672.000,00
	[-] Penggandaan buku laporan					**Rp. 90.000,00**
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal < 5cm	3	Buku	30.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 594.000,00**
	[#] Tenant yang memperoleh pembinaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 594.000,00**
	[-] Dokumentasi					**Rp. 198.000,00**
	Cetak Film Foto Spesifikasi : Ukuran 3 R	99	Lembar	2.000,00	0 %	Rp. 198.000,00
	[-] Penggandaan buku laporan					**Rp. 396.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	3 x 1 x 2	Meter Meter Buah	66.000,00	0 %	Rp. 396.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 3.280.000,00**
	[#] Tenant yang memperoleh pembinaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.280.000,00**
	[-] Makan snack pembinaan tenant					**Rp. 3.280.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	40 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	40 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 880.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 62.520.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 56.880.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 4.000.000,00**
	[#] Tenant yang memperoleh pembinaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 4.000.000,00**
	[-] Narasumber Technopreneur Orang luar					**Rp. 4.000.000,00**
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	2 x 2	Orang Kali	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**Rp. 52.800.000,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kegiatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 52.800.000,00**
	[-] Jasa Operator sistem					**Rp. 52.800.000,00**
	Tenaga Administrasi DINPERINAKER Spesifikasi : -	2 x 12	Orang Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 52.800.000,00
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp. 80.000,00**
	[#] Tenant yang memperoleh pembinaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 80.000,00**
	[-] Caraka					**Rp. 80.000,00**
	Banpot caraka Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Kali	40.000,00	0 %	Rp. 80.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 2.640.000,00**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 2.304.000,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kegiatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.304.000,00**
	[-] Jasa premi kesehatan					**Rp. 2.304.000,00**
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi : -	2 x 12 x 96000	Orang Bulan Rupiah	1,00	0 %	Rp. 2.304.000,00
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 144.000,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kegiatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 144.000,00**
	[-] Premi JKK					**Rp. 144.000,00**
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi : -	2 x 12 x 6000	Orang Bulan Rupiah	1,00	0 %	Rp. 144.000,00
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp. 192.000,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kegiatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 192.000,00**
	[-] JKM					**Rp. 192.000,00**
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi : -	2 x 12 x 8000	Orang Bulan Rupiah	1,00	0 %	Rp. 192.000,00
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 3.000.000,00**
5.1.02.02.12.0002	**Belanja Sosialisasi**					**Rp. 3.000.000,00**
	[#] Tenant yang memperoleh pembinaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.000.000,00**
	[-] Transport Pembinaan tenan					**Rp. 3.000.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	30 x 2	Orang Kali	50.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 1.500.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 1.500.000,00**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 1.500.000,00**
	[#] Tenant yang memperoleh pembinaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.500.000,00**
	[-] Monitoring Tenant					**Rp. 1.500.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	2 x 25	Orang Lokasi	30.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
					Jumlah :	**Rp. 68.656.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	**Formulir RKA-BELANJA SKPD**
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Kegiatan	: 2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Februari s.d April
Kelompok Sasaran	: Alumni siswa pelatihan dan Peminat magang Jepang Kota Pekalongan Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 53.664.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 75.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	1,15 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 53.664.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	2 Dokumen
Hasil	Persentase kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	46.67 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Februari s.d April
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 53.664.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 53.664.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 53.664.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 4.664.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 4.664.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.596.000,00**
	[#] Alumni Siswa Pelatihan yang Termonitor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.056.000,00**
	[-] Buku Laporan					**Rp. 90.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal < 5cm	3	Buku	30.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
	[-] Fotocopy					**Rp. 966.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	3220	Lembar	300,00	0 %	Rp. 966.000,00
	[#] Jumlah Dokumen RTKD yang disusun Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 540.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1800	Lembar	300,00	0 %	Rp. 540.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 198.000,00**
	[#] Alumni Siswa Pelatihan yang Termonitor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 198.000,00**
	[-] Dokumentasi					**Rp. 198.000,00**
	Cetak Film Foto Spesifikasi : Ukuran 3 R	99	Lembar	2.000,00	0 %	Rp. 198.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 2.870.000,00**
	[#] Alumni Siswa Pelatihan yang Termonitor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 410.000,00**
	[-] Makan Snack Rapat					**Rp. 410.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	10 x 1	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 110.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	10 x 1	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[#] Jumlah Dokumen RTKD yang disusun Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.460.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	20 x 3	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 660.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	20 x 3	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 37.000.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 7.000.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 7.000.000,00**
	[#] Jumlah Dokumen RTKD yang disusun Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 7.000.000,00**
	[-] Narasumber Provinsi					**Rp. 1.000.000,00**
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	1 x 1	Orang Kali	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] Narasumber pusat (kemnaker)					**Rp. 6.000.000,00**
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi Nasional Spesifikasi : -	2 x 2	Orang Kali	1.500.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
5.1.02.02.09	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**					**Rp. 30.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.09.0013	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen**					**Rp. 30.000.000,00**
	[#] Jumlah Dokumen RTKD yang disusun Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 30.000.000,00**
	[-] Jasa Konsultansi Dokumen RTKD yang disusun					**Rp. 30.000.000,00**
	Jasa Konsultasi Spesifikasi : -	30000000 x 1	Rupiah Pekerjaan	1,00	0 %	Rp. 30.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 12.000.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 12.000.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 12.000.000,00**
	[#] Alumni Siswa Pelatihan yang Termonitor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 12.000.000,00**
	[-] Transport Petugas Monitoring					**Rp. 12.000.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	10 x 8 x 5	Orang Kali Bulan	30.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 53.664.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	**Formulir RKA-BELANJA SKPD**
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
Kegiatan	: 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.01.0001 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Februari s.d Maret
Kelompok Sasaran	: 1.Perusahaan dan Pencaker, 2. Siswa SMK, 3. Disabilitas, 4. lokasi Padat Karya, Peserta Trasmigrasi, Perjanjian Kerja Transmigrasi, WUB Kota Pekalongan Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 7.524.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 20.625.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	27,93 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.524.000,00
Keluaran	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	40 Orang
Hasil	Persentase kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	12.97 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.01.0001 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi
Waktu Pelaksanaan	: Februari s.d Maret
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 7.524.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 7.524.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 7.524.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 1.084.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 1.084.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.084.000,00**
	[#] Sosialiasi Ketenagakerjaan yang dilaksanakan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.084.000,00**
	[-] Fotocopy					**Rp. 1.083.900,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	3613	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.083.900,00
	[-] pembulatan					**Rp. 100,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	100	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 6.440.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 6.440.000,00**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 6.440.000,00**
	[#] Sosialiasi Ketenagakerjaan yang dilaksanakan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 6.440.000,00**
	[-] sosialisasi ketenagakerjaan yang dilaksanakan (ASB 001)					**Rp. 6.440.000,00**
	ASB 001 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - PENUH HARI Spesifikasi : -	40 x 1 x 1	Orang Hari Kali	161.000,00	0 %	Rp. 6.440.000,00
					Jumlah :	**Rp. 7.524.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	**Formulir RKA-BELANJA SKPD**
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
Kegiatan	: 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Februari s.d Maret
Kelompok Sasaran	: 1.Perusahaan dan Pencaker, 2. Siswa SMK, 3. Disabilitas, 4. lokasi Padat Karya, Peserta Trasmigrasi, Perjanjian Kerja Transmigrasi, WUB Kota Pekalongan Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 25.760.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	27,93 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.760.000,00
Keluaran	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	140 Orang
Hasil	Persentase kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	12.97 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
Waktu Pelaksanaan	: Februari s.d Maret
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	**Uraian**	**Rinci Perhitungan**				**Jumlah**
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 25.760.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 25.760.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 2.700.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 2.700.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 2.700.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 2.700.000,00**
	[#] siswa kelas III SMK yang mengikuti kegiatan Bimbingan Jabatan persiapan masuk kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.700.000,00**
	[-] Honor Kasir					**Rp. 2.700.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 1 miliar ...	1 x 9	Orang Kali	300.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 23.060.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 9.300.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 9.300.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 544.800,00**
	[#] siswa kelas III SMK yang mengikuti kegiatan Bimbingan Jabatan persiapan masuk kerja **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 544.800,00**
	[-] Buku Laporan					**Rp. 90.000,00**
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal < 5cm	3	Buku	30.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
	[-] Fotocopy					**Rp. 454.800,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1516	Lembar	300,00	0 %	Rp. 454.800,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 555.200,00**
	[#] siswa kelas III SMK yang mengikuti kegiatan Bimbingan Jabatan persiapan masuk kerja **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 555.200,00**
	[-] Buku Laporan					**Rp. 555.200,00**
	Cetak Film Foto Spesifikasi : Ukuran 3 R	40	Lembar	2.000,00	0 %	Rp. 80.000,00
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	3 x 1 x 4 x 0.6	Meter Meter Buah %	66.000,00	0 %	Rp. 475.200,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 8.200.000,00**
	[#] siswa kelas III SMK yang mengikuti kegiatan Bimbingan Jabatan persiapan masuk kerja **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 8.200.000,00**
	[-] Makan Snack Bimbingan Jabatan					**Rp. 8.200.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	50 x 4	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	50 x 4	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 2.200.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 13.000.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 5.000.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 5.000.000,00**
	[#] siswa kelas III SMK yang mengikuti kegiatan Bimbingan Jabatan persiapan masuk kerja **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 5.000.000,00**
	[-] Kepala Sekolah					**Rp. 1.000.000,00**
	Moderator, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	1 x 4 x 0.5	Orang Kali %	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] Narasumber Perusahaan					**Rp. 4.000.000,00**
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	2 x 4 x 0.5	Orang Kali %	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 8.000.000,00**
5.1.02.02.12.0002	**Belanja Sosialisasi**					**Rp. 8.000.000,00**
	[#] siswa kelas III SMK yang mengikuti kegiatan Bimbingan Jabatan persiapan masuk kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 8.000.000,00**
	[-] Transport Peserta					**Rp. 8.000.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	40 x 4	Orang Kali	50.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 760.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 760.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 760.000,00**
	[#] siswa kelas III SMK yang mengikuti kegiatan Bimbingan Jabatan persiapan masuk kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 760.000,00**
	[-] Koordinasi dan Monitoring kegiatan					**Rp. 360.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	3 x 4	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 360.000,00
	[-] Tenaga Kebersihan					**Rp. 400.000,00**
	Uang harian perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Transport lokal Khusus untuk diluar Pegawai Pemkot...	2 x 4	Orang Kali	50.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
					Jumlah :	**Rp. 25.760.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	**Formulir RKA-BELANJA SKPD**
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
Kegiatan	: 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.01.0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Juli s.d Juli
Kelompok Sasaran	: 1.Perusahaan dan Pencaker, 2. Siswa SMK, 3. Disabilitas, 4. lokasi Padat Karya, Peserta Trasmigrasi, Perjanjian Kerja Transmigrasi, WUB Kota Pekalongan Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 14.600.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 25.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	27,93 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 14.600.000,00
Keluaran	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	20 Orang
Hasil	Persentase kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	12.97 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.01.0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD
Waktu Pelaksanaan	: Juli s.d Juli
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 14.600.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 14.600.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 14.600.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 9.580.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 9.580.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 109.000,00**
	[#] Jumlah Peserta disabilitas yang mengikuti layanan ketenagakerjaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 109.000,00**
	[-] Buku Laporan					**Rp. 30.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal < 5cm	1	Buku	30.000,00	0 %	Rp. 30.000,00
	[-] Fotocopy					**Rp. 78.900,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	263	Lembar	300,00	0 %	Rp. 78.900,00
	[-] Pembulatan					**Rp. 100,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	100	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 396.000,00**
	[#] Jumlah Peserta disabilitas yang mengikuti layanan ketenagakerjaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 396.000,00**
	[-] Spanduk					**Rp. 396.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	3 x 1 x 2	Meter Meter Buah	66.000,00	0 %	Rp. 396.000,00
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 6.000.000,00**
	[#] Jumlah Peserta disabilitas yang mengikuti layanan ketenagakerjaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 6.000.000,00**
	[-] Bahan Pelatihan					**Rp. 6.000.000,00**
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi : -	150000 x 20 x 2	Rupiah Orang Kali	1,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 3.075.000,00**
	[#] Jumlah Peserta disabilitas yang mengikuti layanan ketenagakerjaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.075.000,00**
	[-] Makan Snack Pelatihan					**Rp. 2.050.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	25 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	25 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 550.000,00
	[-] Makan Snack Rapat Koordinasi dengan Komunitas Disabilitas					**Rp. 1.025.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	25 x 1	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	25 x 1	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 275.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 5.020.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 3.020.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 2.900.000,00**
	[#] Jumlah Peserta disabilitas yang mengikuti layanan ketenagakerjaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.900.000,00**
	[-] Honor Penerjemah Disabilitas					**Rp. 500.000,00**
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	1 x 2 x 0.25	Orang Kali %	1.000.000,00	0 %	Rp. 500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Narasumber Pelatihan Disabilitas					**Rp. 2.400.000,00**
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	2 x 2 x 0.6	Orang Kali %	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp. 120.000,00**
	[#] Jumlah Peserta disabilitas yang mengikuti layanan ketenagakerjaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 120.000,00**
	[-] Caraka					**Rp. 120.000,00**
	Banpot caraka Spesifikasi : -	1 x 3	Orang Kali	40.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 2.000.000,00**
5.1.02.02.12.0002	**Belanja Sosialisasi**					**Rp. 2.000.000,00**
	[#] Jumlah Peserta disabilitas yang mengikuti layanan ketenagakerjaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.000.000,00**
	[-] Banpot Peserta Pelatihan Disabilitas					**Rp. 2.000.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	20 x 2	Orang Kali	50.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 14.600.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
Kegiatan	: 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Juli s.d Agustus
Kelompok Sasaran	: 1.Perusahaan dan Pencaker, 2. Siswa SMK, 3. Disabilitas, 4. lokasi Padat Karya, Peserta Trasmigrasi, Perjanjian Kerja Transmigrasi, WUB Kota Pekalongan Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 110.230.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 170.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	27,93 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 110.230.000,00
Keluaran	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	61 Orang
Hasil	Persentase kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	12.97 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja
Waktu Pelaksanaan	: Juli s.d Agustus
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 110.230.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 110.230.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 3.500.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 3.500.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 3.500.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 2.700.000,00**
	[#] Lokasi Pelaksanaan Padat karya **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.700.000,00**
	[-] Kasir kegiatan					**Rp. 2.700.000,00**
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta ...	1 x 12	Orang Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 800.000,00**
	[#] Lokasi Pelaksanaan Padat karya **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 800.000,00**
	[-] Pejabat pengadaan					**Rp. 400.000,00**
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta	2	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[-] PPKOM					**Rp. 400.000,00**
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	2	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 106.730.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 47.957.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 47.957.000,00**
5.1.02.01.01.0001	**Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi**					**Rp. 1.175.000,00**
	[#] Lokasi Pelaksanaan Padat karya **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.175.000,00**
	[-] Tali tambang					**Rp. 1.175.000,00**
	Tali tambang Spesifikasi : -	100 x 10	Meter Kali	1.175,00	0 %	Rp. 1.175.000,00
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp. 2.800.000,00**
	[#] Lokasi Pelaksanaan Padat karya **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.800.000,00**
	[-] BBM Truk					**Rp. 2.800.000,00**
	BBM Mobil Operasional Armada Sampah (ArmRoll,Dump Truck) Spesifikasi : BBM Solar (10 L/rit x Rp. 7.000), max 365 hr/th	2 x 10 x 2	Kendaraan Hari Lokasi	70.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
5.1.02.01.01.0005	**Belanja Bahan-Bahan Baku**					**Rp. 600.000,00**
	[#] Lokasi Pelaksanaan Padat karya **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 600.000,00**
	[-] Bambu					**Rp. 600.000,00**
	Bambu tali die 8-10 cm panj 10 m Spesifikasi : -	30 x 1	Orang Lokasi	20.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.01.01.0019	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian**					**Rp. 5.280.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Lokasi Pelaksanaan Padat karya **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 5.280.000,00**
	[-] Cangkul					**Rp. 2.480.000,00**
	Cangkul Spesifikasi : -	16	Buah	155.000,00	0 %	Rp. 2.480.000,00
	[-] Sekop					**Rp. 2.800.000,00**
	Sekop kecil Spesifikasi : -	28 x 1	Buah Lokasi	100.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 4.434.000,00**
	[#] Lokasi Pelaksanaan Padat karya **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.047.500,00**
	[-] Belanja Pengadaan Formulir					**Rp. 240.000,00**
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 ; 70 gr ; 216 X 330 mm	4	Rim	60.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	[-] Buku Laporan					**Rp. 90.000,00**
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal < 5cm	3	Buku	30.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
	[-] Fotocopy					**Rp. 1.717.500,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	5725	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.717.500,00
	[#] Perjanjian Kerja Yang Disahkan Oleh Dinas Bidang Ketenagakerjaan Kab/Kota Transmigrasi)(IKK Output) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.230.000,00**
	[-] Buku Laporan					**Rp. 90.000,00**
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal < 5cm	3	Buku	30.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
	[-] Fotocopy					**Rp. 1.140.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	3800	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.140.000,00
	[#] Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu Kab/Kota Transmigrasi (IKK Output) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.156.500,00**
	[-] Buku Laporan					**Rp. 90.000,00**
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal < 5cm	3	Buku	30.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
	[-] Fotocopy					**Rp. 1.066.500,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	3555	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.066.500,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 98.000,00**
	[#] Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu Kab/Kota Transmigrasi (IKK Output) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 98.000,00**
	[-] Dokumentasi					**Rp. 98.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak Film Foto Spesifikasi : Ukuran 3 R	49	Lembar	2.000,00	0 %	Rp. 98.000,00
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 60.000,00**
	[#] Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu Kab/Kota Transmigrasi (IKK Output) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 60.000,00**
	[-] Materai @10.000,-					**Rp. 60.000,00**
	Materai 10000 Spesifikasi : -	6	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 60.000,00
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp. 1.500.000,00**
	[#] Lokasi Pelaksanaan Padat karya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.500.000,00**
	[-] Sabit					**Rp. 1.500.000,00**
	Sabit/arit Spesifikasi : -	30 x 1	Buah Lokasi	50.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.01.01.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**Rp. 3.120.000,00**
	[#] Lokasi Pelaksanaan Padat karya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.120.000,00**
	[-] Sepatu Boots					**Rp. 3.120.000,00**
	Sepatu Boots Spesifikasi : Standart	30	Pasang	104.000,00	0 %	Rp. 3.120.000,00
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 16.960.000,00**
	[#] Lokasi Pelaksanaan Padat karya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 6.960.000,00**
	[-] Basket/ Keranjang					**Rp. 2.400.000,00**
	Basket/Keranjang Spesifikasi : -	24	Buah	100.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[-] Garpu Pacul					**Rp. 4.560.000,00**
	Garpu Pacul Spesifikasi : -	24	Buah	190.000,00	0 %	Rp. 4.560.000,00
	[#] Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu Kab/Kota Transmigrasi (IKK Output) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 10.000.000,00**
	[-] Uang Saku Transmigrasi					**Rp. 10.000.000,00**
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi : -	1 x 10000000	KK Rupiah	1,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 11.930.000,00**
	[#] Lokasi Pelaksanaan Padat karya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 9.880.000,00**
	[-] Makan Snack Penyuluhan Padat karya					**Rp. 2.870.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	35 x 2	Orang Lokasi	30.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	35 x 2	Orang Lokasi	11.000,00	0 %	Rp. 770.000,00
	[-] Makan Snack Rapat					**Rp. 410.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	10 x 1	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	10 x 1	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 110.000,00
	[-] Snack Pekerja					**Rp. 6.600.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	60 x 10 x 1	Orang Hari Lokasi	11.000,00	0 %	Rp. 6.600.000,00
	[#] Perjanjian Kerja Yang Disahkan Oleh Dinas Bidang Ketenagakerjaan Kab/Kota Transmigrasi)(IKK Output) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 410.000,00**
	[-] Makan Snack Rapat					**Rp. 410.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	10 x 1	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 110.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	10 x 1	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[#] Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu Kab/Kota Transmigrasi (IKK Output) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.640.000,00**
	[-] Makan Snack Pelepasan Transmigrasi					**Rp. 820.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	20 x 1	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 220.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	20 x 1	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	[-] Makan Snack Rapat					**Rp. 820.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	10 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 220.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	10 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 42.868.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 32.380.000,00**
5.1.02.02.01.0016	**Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum**					**Rp. 30.500.000,00**
	[#] Lokasi Pelaksanaan Padat karya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 30.500.000,00**
	[-] Transport Kepala Kelompok					**Rp. 5.500.000,00**
	Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja padat Karya Infrastruktur Spesifikasi : Kepala Kelompok	10 x 10 x 1	Orang Hari Lokasi	55.000,00	0 %	Rp. 5.500.000,00
	[-] Transport Pekerja					**Rp. 25.000.000,00**
	Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja padat Karya Infrastruktur Spesifikasi : Pekerja	50 x 10 x 1	Orang Hari Lokasi	50.000,00	0 %	Rp. 25.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp. 1.000.000,00**
	[#] Lokasi Pelaksanaan Padat karya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 500.000,00**
	[-] Tenaga Kebersihan					**Rp. 500.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa tenaga kebersihan yang mendapat penugasan tambahan Spesifikasi : -	5 x 2	Orang Lokasi	50.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	[#] Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu Kab/Kota Transmigrasi (IKK Output) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 500.000,00**
	Jasa tenaga kebersihan yang mendapat penugasan tambahan Spesifikasi : -	5 x 2	Orang Lokasi	50.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp. 880.000,00**
	[#] Lokasi Pelaksanaan Padat karya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 800.000,00**
	[-] Caraka					**Rp. 800.000,00**
	Banpot caraka Spesifikasi : -	2 x 10	Orang Kali	40.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	[#] Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu Kab/Kota Transmigrasi (IKK Output) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 80.000,00**
	Banpot caraka Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Kali	40.000,00	0 %	Rp. 80.000,00
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 2.788.000,00**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 1.377.600,00**
	[#] Lokasi Pelaksanaan Padat karya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.377.600,00**
	[-] JKK					**Rp. 1.377.600,00**
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi : -	16800 x 82	Rupiah Orang	1,00	0 %	Rp. 1.377.600,00
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp. 1.410.400,00**
	[#] Lokasi Pelaksanaan Padat karya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.410.400,00**
	[-] JKM					**Rp. 1.410.400,00**
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi : -	17200 x 82	Rupiah Orang	1,00	0 %	Rp. 1.410.400,00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 3.400.000,00**
5.1.02.02.04.0012	**Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya**					**Rp. 2.000.000,00**
	[#] Lokasi Pelaksanaan Padat karya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.000.000,00**
	[-] Sewa Alkon (Padat Karya)					**Rp. 2.000.000,00**
	Sewa Alat Berat Spesifikasi : -	4 x 1 x 500000	Unit Kali Rupiah	1,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.02.04.0043	**Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya**					**Rp. 1.400.000,00**
	[#] Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu Kab/Kota Transmigrasi (IKK Output) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.400.000,00**
	[-] Sewa angkutan transportasi orang dan barang dari TK II ke Transito Semarang					**Rp. 1.400.000,00**
	Sewa Sarana Mobilitas Spesifikasi : -	2 x 700000	Mobil Rupiah	1,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 4.300.000,00**
5.1.02.02.12.0002	**Belanja Sosialisasi**					**Rp. 4.300.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Lokasi Pelaksanaan Padat karya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.300.000,00**
	[-] Jasa Rekruitmen Peserta Padat Karya					**Rp. 300.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	3 x 2	Orang Lokasi	50.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[-] Transport Peserta Penyuluhan					**Rp. 4.000.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	40 x 2	Orang Lokasi	50.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 15.905.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 15.905.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 11.320.000,00**
	[#] Lokasi Pelaksanaan Padat karya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 11.320.000,00**
	[-] Jasa Koordinator Lapangan					**Rp. 1.920.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	8 x 1 x 8	Orang Lokasi Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.920.000,00
	[-] Jasa Monitoring dan Juru bayar					**Rp. 1.920.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	8 x 1 x 8	Orang Lokasi Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.920.000,00
	[-] Jasa Pengawas					**Rp. 960.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	4 x 1 x 8	Orang Lokasi Kali	30.000,00	0 %	Rp. 960.000,00
	[-] Jasa Petugas lapangan					**Rp. 2.400.000,00**
	Uang harian perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Transport lokal Khusus untuk diluar Pegawai Pemkot...	4 x 12 x 1	Orang Hari Lokasi	50.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[-] Jasa Petugas Teknis					**Rp. 960.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	4 x 1 x 8	Orang Lokasi Kali	30.000,00	0 %	Rp. 960.000,00
	[-] Jasa Transport Koordinasi Lapangan					**Rp. 1.000.000,00**
	Uang harian perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Transport lokal Khusus untuk diluar Pegawai Pemkot...	2 x 10 x 1	Orang Kali Lokasi	50.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] Transport Identifikasi Potensi					**Rp. 360.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	12 x 1 x 1	Kali Kali Lokasi	30.000,00	0 %	Rp. 360.000,00
	[-] Transport Panitia					**Rp. 1.800.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	10 x 6 x 1	Orang Kali Lokasi	30.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 4.585.000,00**
	[#] Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu Kab/Kota Transmigrasi (IKK Output) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 4.585.000,00**
	[-] Sosialisasi Transmigrasi (ASB 002)					**Rp. 4.585.000,00**
	ASB 002 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - SETENGAH HARI Spesifikasi : -	35 x 1	Orang Kali	131.000,00	0 %	Rp. 4.585.000,00
					Jumlah :	**Rp. 110.230.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	**Formulir RKA-BELANJA SKPD**
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
Kegiatan	: 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.03.0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: 1. Operator Informasi pasar kerja online dan Laporan Pencaker, 2. Layanan dan Leaflet, 3. Perusahaan Kota Pekalongan Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 62.970.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 65.746.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	27,93 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 62.970.000,00
Keluaran	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen
Hasil	Jumlah laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja yang disusun	12 buku

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.03.0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 62.970.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 62.970.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 6.900.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 6.900.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 6.900.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 6.900.000,00**
	[#] Data dan Informasi yang dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 6.000.000,00**
	[-] PPTK					**Rp. 6.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 1 miliar ...	1 x 12	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[#] Operator yang menangani aplikasi informasi pasar kerja online Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 900.000,00**
	[-] Kasir kegiatan					**Rp. 900.000,00**
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 x 3	Orang Bulan	300.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 56.070.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 630.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 630.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 630.000,00**
	[#] Data dan Informasi yang dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 630.000,00**
	[-] Buku Laporan					**Rp. 360.000,00**
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal < 5cm	12	Buku	30.000,00	0 %	Rp. 360.000,00
	[-] Fotocopy					**Rp. 270.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	900	Lembar	300,00	0 %	Rp. 270.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 55.440.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 52.800.000,00**
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**Rp. 52.800.000,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 52.800.000,00**
	[-] Jasa Administrasi Bursa Kerja Online					**Rp. 52.800.000,00**
	Tenaga Administrasi DINPERINAKER Spesifikasi : -	2 x 12	Orang Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 52.800.000,00
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 2.640.000,00**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 2.304.000,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.304.000,00**
	[-] BPJS Kesehatan					**Rp. 2.304.000,00**
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi : -	2 x 12 x 96000	Orang Bulan Rupiah	1,00	0 %	Rp. 2.304.000,00
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 144.000,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 144.000,00**
	[-] JKK					**Rp. 144.000,00**
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi : -	2 x 12 x 6000	Orang Bulan Rupiah	1,00	0 %	Rp. 144.000,00
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp. 192.000,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 192.000,00**
	[-] Asuransi Kematian					**Rp. 192.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi : -	2 x 12 x 8000	Orang Bulan Rupiah	1,00	0 %	Rp. 192.000,00
					Jumlah :	**Rp. 62.970.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	**Formulir RKA-BELANJA SKPD**
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
Kegiatan	: 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Maret s.d Maret
Kelompok Sasaran	: 1. Operator Informasi pasar kerja online dan Laporan Pencaker, 2. Layanan dan Leaflet, 3. Perusahaan Kota Pekalongan Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 17.200.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 121.550.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	27,93 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 17.200.000,00
Keluaran	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	700 Orang
Hasil	Jumlah laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja yang disusun	12 buku

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)
Waktu Pelaksanaan	: Maret s.d Maret
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 17.200.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 17.200.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 1.100.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 1.100.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 1.100.000,00**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 1.100.000,00**
	[#] Layanan Informasi Pasar Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.100.000,00**
	[-] Pejabat pengadaan					**Rp. 500.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta	1 x 2	Orang Pekerjaan	250.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	[-] PPKOM					**Rp. 600.000,00**
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 jut...	1 x 2	Orang Pekerjaan	300.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 16.100.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 6.030.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 6.030.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 3.816.000,00**
	[#] Layanan Informasi Pasar Kerja **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.816.000,00**
	[-] Fotocopy					**Rp. 3.816.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	12720	Lembar	300,00	0 %	Rp. 3.816.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 984.000,00**
	[#] Layanan Informasi Pasar Kerja **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 792.000,00**
	[-] Spanduk					**Rp. 792.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	1 x 4 x 3	Meter Meter Buah	66.000,00	0 %	Rp. 792.000,00
	[#] Pengelolaan Website dan Media Sosial **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 192.000,00**
	[-] Dokumentasi					**Rp. 192.000,00**
	Cetak Film Foto Spesifikasi : Ukuran 3 R	96	Lembar	2.000,00	0 %	Rp. 192.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 1.230.000,00**
	[#] Layanan Informasi Pasar Kerja **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.230.000,00**
	[-] Makan Snack Rapat Persiapan					**Rp. 1.230.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	10 x 3	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	10 x 3	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 330.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 10.070.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 10.070.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 900.000,00**
	[#] Layanan Informasi Pasar Kerja **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 900.000,00**
	[-] Job Canvasing Lowongan Kerja di Perusahaan					**Rp. 900.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	6 x 5	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 9.170.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Layanan Informasi Pasar Kerja **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 9.170.000,00**
	[-] Sosialisasi Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online (ASB 002)					**Rp. 9.170.000,00**
	ASB 002 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - SETENGAH HARI Spesifikasi : -	35 x 2	Orang Kali	131.000,00	0 %	Rp. 9.170.000,00
					Jumlah :	**Rp. 17.200.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	**Formulir RKA-BELANJA SKPD**
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
Kegiatan	: 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Juli s.d Agustus
Kelompok Sasaran	: 1. Operator Informasi pasar kerja online dan Laporan Pencaker, 2. Layanan dan Leaflet, 3. Perusahaan Kota Pekalongan Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 70.360.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 106.018.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	27,93 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.360.000,00
Keluaran	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Orang
Hasil	Jumlah laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja yang disusun	12 buku

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja
Waktu Pelaksanaan	: Juli s.d Agustus
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 70.360.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 70.360.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 70.360.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 24.740.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 24.740.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.263.000,00**
	[#] Perusahaan yang terfasilitasi dalam pelaksanaan jobfair Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.263.000,00**
	[-] Buku Laporan					**Rp. 90.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal < 5cm	3	Buku	30.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
	[-] Fotocopy					**Rp. 1.173.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	3910	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.173.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 5.802.000,00**
	[#] Perusahaan yang terfasilitasi dalam pelaksanaan jobfair Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.802.000,00**
	[-] Buku Laporan					**Rp. 1.600.000,00**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	400 x 4000	Lembar Lembar	1,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	[-] Dokumentasi					**Rp. 110.000,00**
	Cetak Film Foto Spesifikasi : Ukuran 3 R	55	Lembar	2.000,00	0 %	Rp. 110.000,00
	[-] Spanduk (Baliho) Job fair					**Rp. 1.980.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	6 x 5 x 1	Meter Meter Kali	66.000,00	0 %	Rp. 1.980.000,00
	[-] Spanduk publikasi					**Rp. 2.112.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	8 x 1 x 4	Meter Meter Kali	66.000,00	0 %	Rp. 2.112.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 17.675.000,00**
	[#] Perusahaan yang terfasilitasi dalam pelaksanaan jobfair Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 17.675.000,00**
	[-] Makan Job fair					**Rp. 7.200.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	80 x 3	Orang Hari	30.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	[-] Makan panitia dan petugas keamanan					**Rp. 3.600.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	40 x 3	Orang Hari	30.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[-] Makan rapat					**Rp. 900.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	15 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	[-] Makan Workshop BKK					**Rp. 750.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	25 x 1	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	[-] Snack Job fair					**Rp. 3.300.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	100 x 3	Orang Hari	11.000,00	0 %	Rp. 3.300.000,00
	[-] Snack panitia dan petugas keamanan					**Rp. 1.320.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	40 x 3	Orang Hari	11.000,00	0 %	Rp. 1.320.000,00
	[-] snack rapat					**Rp. 330.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	15 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 330.000,00
	[-] Snack Workshop					**Rp. 275.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	25 x 1	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 275.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 37.220.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 1.420.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 1.300.000,00**
	[#] Perusahaan yang terfasilitasi dalam pelaksanaan jobfair **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.300.000,00**
	[-] Honor Walikota					**Rp. 1.300.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Walikota/ Wakil Bupati/Wakil Walikota	1 x 1	Orang Kali	1.300.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp. 120.000,00**
	[#] Perusahaan yang terfasilitasi dalam pelaksanaan jobfair **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 120.000,00**
	[-] Caraka					**Rp. 120.000,00**
	Banpot caraka Spesifikasi : -	1 x 3	Orang Kali	40.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 33.000.000,00**
5.1.02.02.04.0410	**Belanja Sewa Peralatan Jaringan**					**Rp. 33.000.000,00**
	[#] Perusahaan yang terfasilitasi dalam pelaksanaan jobfair **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 33.000.000,00**
	[-] Sewa tempat Job fair					**Rp. 33.000.000,00**
	Sewa Gedung dan Bangunan Spesifikasi : -	11000000 x 3	Rupiah Hari	1,00	0 %	Rp. 33.000.000,00
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 2.800.000,00**
5.1.02.02.12.0002	**Belanja Sosialisasi**					**Rp. 2.800.000,00**
	[#] Perusahaan yang terfasilitasi dalam pelaksanaan jobfair **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.800.000,00**
	[-] Transport Perusahaan peserta jobfair					**Rp. 2.000.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	40 x 1	Orang Hari	50.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] Transport Workshop					**Rp. 800.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	16 x 1	Orang Kali	50.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 8.400.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 8.400.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 8.400.000,00**
	[#] Perusahaan yang terfasilitasi dalam pelaksanaan jobfair Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 8.400.000,00**
	[-] Banpot Job Canvasing					**Rp. 2.400.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	2 x 40	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[-] Banpot Panitia dan Petugas Keamanan					**Rp. 6.000.000,00**
	Uang harian perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Transport lokal Khusus untuk diluar Pegawai Pemkot...	40 x 3	Orang Hari	50.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 70.360.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
Kegiatan	: 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Februari s.d Maret
Kelompok Sasaran	: CPMI Kota Pekalongan Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 20.540.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 335.724.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	27,93 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.540.000,00
Keluaran	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	20 Orang
Hasil	Jumlah CPMI yang terlayani secara legal	49 orang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya
Waktu Pelaksanaan	: Februari s.d Maret
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 20.540.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 20.540.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 20.540.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 14.960.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 14.960.000,00**
5.1.02.01.01.0005	**Belanja Bahan-Bahan Baku**					**Rp. 10.000.000,00**
	[#] Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 10.000.000,00**
	[-] Bahan pelatihan cpmi					**Rp. 10.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi : -	20 x 500000	Orang Rupiah	1,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.332.000,00**
	[#] Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.332.000,00**
	[-] Buku Laporan					**Rp. 90.000,00**
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal < 5cm	3	Buku	30.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
	[-] Fotocopy					**Rp. 1.242.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	4140	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.242.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 348.000,00**
	[#] Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 348.000,00**
	[-] Dokumentasi					**Rp. 150.000,00**
	Cetak Film Foto Spesifikasi : Ukuran 3 R	75	Lembar	2.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
	[-] Spanduk					**Rp. 198.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	3 x 1 x 1	Meter Meter Meter	66.000,00	0 %	Rp. 198.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 3.280.000,00**
	[#] Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.280.000,00**
	[-] Makan Snack Pelatihan					**Rp. 2.460.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	30 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	30 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 660.000,00
	[-] Makan Snack Rapat Panitia					**Rp. 820.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	10 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	10 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 220.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 5.580.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 2.080.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 2.000.000,00**
	[#] Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.000.000,00**
	[-] Honor Narasumber					**Rp. 2.000.000,00**
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Hari	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp. 80.000,00**
	[#] Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 80.000,00**
	[-] Caraka					**Rp. 80.000,00**
	Banpot caraka Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Kali	40.000,00	0 %	Rp. 80.000,00
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 3.500.000,00**
5.1.02.02.12.0001	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**					**Rp. 1.500.000,00**
	[#] Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.500.000,00**
	[-] Biaya Pelatihan					**Rp. 1.500.000,00**
	Biaya Kontribusi Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Spesifikasi : -	750000 x 2	Rupiah Kali	1,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.02.12.0002	**Belanja Sosialisasi**					**Rp. 2.000.000,00**
	[#] Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.000.000,00**
	[-] Transport Peserta					**Rp. 2.000.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	20 x 2	Orang Hari	50.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 20.540.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	**Formulir RKA-BELANJA SKPD**
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
Kegiatan	: 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.04.0002 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Mei s.d Juni
Kelompok Sasaran	: CPMI Kota Pekalongan Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 21.260.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 32.021.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	27,93 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 21.260.000,00
Keluaran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	102 Orang
Hasil	Jumlah CPMI yang terlayani secara legal	49 orang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.04.0002 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani
Waktu Pelaksanaan	: Mei s.d Juni
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 21.260.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 21.260.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 2.700.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 2.700.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 2.700.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 2.700.000,00**
	[#] Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yangmendapatkan Sosialisasi (IKK Output) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.700.000,00**
	[-] Kasir kegiatan					**Rp. 2.700.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta ...	1 x 12	Orang Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 18.560.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 3.770.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 3.770.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.878.000,00**
	[#] Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yangmendapatkan Sosialisasi (IKK Output) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.116.000,00**
	[-] Buku Laporan					**Rp. 90.000,00**
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal < 5cm	3	Buku	30.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
	[-] Fotocopy					**Rp. 1.026.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	3420	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.026.000,00
	[#] Perusahaan Terlayani Perpanjangan IMTA di Kab/ Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 762.000,00**
	[-] Buku Laporan					**Rp. 90.000,00**
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal < 5cm	3	Buku	30.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
	[-] Fotocopy					**Rp. 672.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	2240	Lembar	300,00	0 %	Rp. 672.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 662.000,00**
	[#] Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yangmendapatkan Sosialisasi (IKK Output) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 364.000,00**
	[-] Dokumentasi					**Rp. 100.000,00**
	Cetak Film Foto Spesifikasi : Ukuran 3 R	50	Lembar	2.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
	[-] Spanduk Soisalisasi					**Rp. 264.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	4 x 1 x 1	Meter Meter Buah	66.000,00	0 %	Rp. 264.000,00
	[#] Perusahaan Terlayani Perpanjangan IMTA di Kab/ Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 298.000,00**
	[-] Dokumentasi					**Rp. 100.000,00**
	Cetak Film Foto Spesifikasi : Ukuran 3 R	50	Lembar	2.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
	[-] Spanduk					**Rp. 198.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	3 x 1 x 1	Meter Meter Buah	66.000,00	0 %	Rp. 198.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 1.230.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yangmendapatkan Sosialisasi (IKK Output) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 615.000,00**
	[-] Makan Snack Rapat					**Rp. 615.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	15 x 1	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 165.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	15	Orang	30.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[#] Perusahaan Terlayani Perpanjangan IMTA di Kab/ Kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 615.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	15	Orang	11.000,00	0 %	Rp. 165.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	15 x 1	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 300.000,00**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 300.000,00**
5.1.02.02.04.0118	**Belanja Sewa Mebel**					**Rp. 300.000,00**
	[#] Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yangmendapatkan Sosialisasi (IKK Output) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 300.000,00**
	[-] Sewa Kursi					**Rp. 300.000,00**
	Kursi lipat Spesifikasi : -	50 x 1	Orang Kali	6.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 14.490.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 14.490.000,00**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 14.490.000,00**
	[#] Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yangmendapatkan Sosialisasi (IKK Output) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 8.050.000,00**
	[-] Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yangmendapatkan Sosialisasi (IKK Output) (ASB 001)					**Rp. 8.050.000,00**
	ASB 001 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - PENUH HARI Spesifikasi : -	50 x 1	Orang Hari	161.000,00	0 %	Rp. 8.050.000,00
	[#] Perusahaan Terlayani Perpanjangan IMTA di Kab/ Kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 6.440.000,00**
	[-] Perusahaan Terlayani Perpanjangan IMTa di Kab/Kota (ASB 001)					**Rp. 6.440.000,00**
	ASB 001 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - PENUH HARI Spesifikasi : -	40 x 1	Orang Kali	161.000,00	0 %	Rp. 6.440.000,00
					Jumlah :	**Rp. 21.260.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	**Formulir RKA-BELANJA SKPD**
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
Kegiatan	: 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Juni
Kelompok Sasaran	: Perusahaan di Kota Pekalongan Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 17.090.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 25.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	52,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 17.090.000,00
Keluaran	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	12 Perusahaan
Hasil	Persentase kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	41.22 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Juni
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 17.090.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 17.090.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 17.090.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 920.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 920.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 20.000,00**
	[#] Jumlah perusahaan yang mengikuti pembinaan peraturan perusahaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 20.000,00**
	[-] Pembulatan					**Rp. 20.000,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	20000	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 20.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 900.000,00**
	[#] Jumlah perusahaan yang mengikuti pembinaan peraturan perusahaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 900.000,00**
	[-] Sertifikat peserta					**Rp. 900.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : -	60 x 15000	Lembar Rupiah	1,00	0 %	Rp. 900.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 5.040.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 5.040.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 4.800.000,00**
	[#] Jumlah perusahaan yang mengikuti pembinaan peraturan perusahaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 4.800.000,00**
	[-] Honor Narsum Wakil Walikota					**Rp. 1.300.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Walikota/ Wakil Bupati/Wakil Walikota	1	Orang / Kali	1.300.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
	[-] Narsum OPD Diluar Pemkot					**Rp. 1.500.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon IV / yang disetarakan (Honor Narasumber ha...	2 x 1	Orang Kali	750.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] Narsum pakar					**Rp. 2.000.000,00**
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	2 x 1	Orang Kali	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp. 240.000,00**
	[#] Jumlah perusahaan yang mengikuti pembinaan peraturan perusahaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 240.000,00**
	[-] Banpot Caraka					**Rp. 240.000,00**
	Banpot caraka Spesifikasi : -	1 x 6	Orang Kali	40.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 11.130.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 11.130.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 1.470.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Jumlah perusahaan yang mengikuti pembinaan peraturan perusahaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.470.000,00**
	[-] Monev Pembinaan Peraturan Perusahaan					**Rp. 1.470.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	49	Perusahaan	30.000,00	0 %	Rp. 1.470.000,00
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 9.660.000,00**
	[#] Jumlah perusahaan yang mengikuti pembinaan peraturan perusahaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 9.660.000,00**
	[-] ASB 001					**Rp. 9.660.000,00**
	ASB 001 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - PENUH HARI Spesifikasi : -	60 x 1	Orang Hari	161.000,00	0 %	Rp. 9.660.000,00
					Jumlah :	**Rp. 17.090.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
Kegiatan	: 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Perusahaan di Kota Pekalongan Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 13.140.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 18.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	52,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.140.000,00
Keluaran	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	8 Perusahaan
Hasil	Persentase kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	41.22 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 13.140.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 13.140.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 1.400.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 1.400.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 1.400.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 1.400.000,00**
	[#] Honor Kasir **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 800.000,00**
	[-] Honor Kasir					**Rp. 800.000,00**
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 x 4	Orang Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	[#] Sosialisasi Perndaftaran Perjanjian Kerja Bersama. **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 600.000,00**
	[-] Honor PPTK					**Rp. 600.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 x 2	Orang Bulan	300.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 11.740.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 2.010.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 2.010.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 516.000,00**
	[#] Sosialisasi Perndaftaran Perjanjian Kerja Bersama. **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 516.000,00**
	[-] Fotocopy					**Rp. 516.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1720	Lembar	300,00	0 %	Rp. 516.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 264.000,00**
	[#] Sosialisasi Perndaftaran Perjanjian Kerja Bersama. **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 264.000,00**
	[-] Cetak Spanduk Sosialisasi Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.					**Rp. 264.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	4 x 1	Meter Buah	66.000,00	0 %	Rp. 264.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 1.230.000,00**
	[#] Sosialisasi Perndaftaran Perjanjian Kerja Bersama. **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.230.000,00**
	[-] Konsumsi Panitia dan Narsum Pelaksanaan Kegiatan.					**Rp. 1.230.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	15 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 330.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	15 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 9.730.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 9.730.000,00**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 9.730.000,00**
	[#] Sosialisasi Perjanjian Kerja Bersama-Monev **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.680.000,00**
	[-] Transport Monev.					**Rp. 1.680.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	7 x 8	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.680.000,00
	[#] Sosialisasi Perndaftaran Perjanjian Kerja Bersama. Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 8.050.000,00**
	[-] Sosialisasi Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.					**Rp. 8.050.000,00**
	ASB 001 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - PENUH HARI Spesifikasi : -	50	Orang	161.000,00	0 %	Rp. 8.050.000,00
					Jumlah :	**Rp. 13.140.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
Kegiatan	: 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Perusahaan di Kota Pekalongan Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 52.320.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 73.394.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	52,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 52.320.000,00
Keluaran	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	11 Laporan
Hasil	Persentase kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	41.22 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 52.320.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 52.320.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 2.300.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 2.300.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 2.300.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 2.300.000,00**
	[#] Sidang Dewan Pengupahan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.300.000,00**
	[-] Honor Kasir					**Rp. 2.000.000,00**
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 x 10	Orang Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] Honor PPTK					**Rp. 300.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 x 1	Orang Bulan	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 50.020.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 19.080.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 19.080.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 2.922.000,00**
	[#] Monev UMK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 182.100,00**
	[-] Fotocopy					**Rp. 182.100,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	607	Lembar	300,00	0 %	Rp. 182.100,00
	[#] Pembinaan Sistem Pengupahan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 360.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1200	Lembar	300,00	0 %	Rp. 360.000,00
	[#] Pendataan Sarana HI & Jamsos **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 450.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1500	Lembar	300,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[#] Sidang Dewan Pengupahan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 900.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	3000	Lembar	300,00	0 %	Rp. 900.000,00
	[#] Sosialisai UMK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 600.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	2000	Lembar	300,00	0 %	Rp. 600.000,00
	[#] Workshop Struktur Skala Upah **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 429.900,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1433	Lembar	300,00	0 %	Rp. 429.900,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.767.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pembinaan Sistem Pengupahan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 714.000,00**
	[-] Sertifikat peserta					**Rp. 450.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : -	30 x 15000	Lembar Lembar	1,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[-] Spanduk					**Rp. 264.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	4 x 1	Meter Buah	66.000,00	0 %	Rp. 264.000,00
	[#] Sosialisai UMK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 264.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	4 x 1	Meter Buah	66.000,00	0 %	Rp. 264.000,00
	[#] Workshop Struktur Skala Upah **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 789.000,00**
	[-] Sertifikat peserta					**Rp. 525.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : -	35 x 15000	Lembar Rupiah	1,00	0 %	Rp. 525.000,00
	[-] Spanduk					**Rp. 264.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	4 x 1	Meter Buah	66.000,00	0 %	Rp. 264.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 14.391.000,00**
	[#] Monev UMK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 615.000,00**
	[-] Konsumsi Monev Tim Dewan Pengupahan					**Rp. 615.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	15 x 1	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	15 x 1	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 165.000,00
	[#] Pembinaan Sistem Pengupahan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.665.000,00**
	[-] Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan					**Rp. 1.845.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	45 x 1	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	45 x 1	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 495.000,00
	[-] Konsumsi Rapat Persiapan & Evaluasi					**Rp. 820.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	10 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	10 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 220.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pendataan Sarana HI & Jamsos **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 574.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	7 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 154.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	7 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 420.000,00
	[#] Sidang Dewan Pengupahan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.952.000,00**
	[-] Konsumsi rapat					**Rp. 2.952.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	24 x 3	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 2.160.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	24 x 3	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 792.000,00
	[#] Sosialisai UMK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.665.000,00**
	[-] Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan					**Rp. 1.845.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	45 x 1	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	45 x 1	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 495.000,00
	[-] Konsumsi Rapat Persiapan & Evaluasi					**Rp. 820.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	10 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	10 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 220.000,00
	[#] Workshop Struktur Skala Upah **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 4.920.000,00**
	[-] Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan					**Rp. 4.100.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	50 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	50 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
	[-] Konsumsi Rapat Persiapan & Evaluasi					**Rp. 820.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	10 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	10 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 220.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 17.780.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 17.780.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 14.550.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pembinaan Sistem Pengupahan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.500.000,00**
	[-] Honor Narasumber					**Rp. 2.500.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon IV / yang disetarakan (Honor Narasumber ha...	2 x 1	Orang Kali	750.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	1 x 1	Orang Kali	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[#] Sidang Dewan Pengupahan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 6.375.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon IV / yang disetarakan (Honor Narasumber ha...	1 x 1 x 0.5	Orang Kali Persen	750.000,00	0 %	Rp. 375.000,00
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Staf (Honor Narasumber hanya diberikan untuk Wali ...	6 x 1	Orang Kali	500.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	3 x 1	Orang Kali	1.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[#] Sosialisai UMK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.325.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon II /DPRD/ yang disetarakan (Honor Narasumbe...	1 x 1 x 0.5	Orang Kali Persen	1.000.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon III / yang disetarakan (Honor Narasumber h...	1 x 1 x 0.5	Orang Kali Persen	900.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon IV / yang disetarakan (Honor Narasumber ha...	1 x 1 x 0.5	Orang Kali Persen	750.000,00	0 %	Rp. 375.000,00
	[#] Workshop Struktur Skala Upah **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 4.350.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon III / yang disetarakan (Honor Narasumber h...	1 x 1	Orang Kali	900.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Narasumber Profesional dengan reputasi Regional Provinsi Spesifikasi : -	1 x 1	Orang Kali	2.500.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon II /DPRD/ yang disetarakan (Honor Narasumbe...	1 x 1 x 0.5	Orang Kali Persen	1.000.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon III / yang disetarakan (Honor Narasumber h...	1 x 1 x 0.5	Orang Kali Persen	900.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp. 2.750.000,00**
	[#] Sidang Dewan Pengupahan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.750.000,00**
	[-] Honor Wakil Walikota					**Rp. 1.250.000,00**
	Honorarium Panitia Kegiatan Spesifikasi : Pengarah/Pembina/Penasehat/Penanggung Jawab/Ketua ...	1 x 2	Orang Kali	625.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	[-] Honor Walikota					**Rp. 1.500.000,00**
	Honorarium Panitia Kegiatan Spesifikasi : Pengarah/Pembina/Penasehat/Penanggung Jawab/Ketua ...	1 x 2	Orang Kali	750.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp. 480.000,00**
	[#] Pembinaan Sistem Pengupahan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 80.000,00**
	[-] Banpot caraka					**Rp. 80.000,00**
	Banpot caraka Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Kali	40.000,00	0 %	Rp. 80.000,00
	[#] Sidang Dewan Pengupahan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 240.000,00**
	Banpot caraka Spesifikasi : -	1 x 6	Orang Kali	40.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	[#] Sosialisai UMK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 80.000,00**
	Banpot caraka Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Kali	40.000,00	0 %	Rp. 80.000,00
	[#] Workshop Struktur Skala Upah **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 80.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Banpot caraka Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Kali	40.000,00	0 %	Rp. 80.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 13.160.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 13.160.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 5.310.000,00**
	[#] Monev UMK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.160.000,00**
	[-] Monev Tim Dewan Pengupahan					**Rp. 720.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	12 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 720.000,00
	[-] Monev Tim Sekretariat					**Rp. 1.440.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	8 x 6	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
	[#] Pendataan Sarana HI & Jamsos **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.150.000,00**
	[-] Banpot monev					**Rp. 3.150.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	7 x 15	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 3.150.000,00
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 7.850.000,00**
	[#] Pembinaan Sistem Pengupahan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.500.000,00**
	[-] Banpot Peserta					**Rp. 1.500.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	30 x 1	Orang Kali	50.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[#] Sidang Dewan Pengupahan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.350.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	9 x 3	Orang Kali	50.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
	[#] Sosialisai UMK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.500.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	30 x 1	Orang Kali	50.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[#] Workshop Struktur Skala Upah **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.500.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	35 x 2	Orang Kali	50.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
					Jumlah :	**Rp. 52.320.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
Kegiatan	: 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Februari s.d Juli
Kelompok Sasaran	: Perusahaan di Kota Pekalongan, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Pekalongan Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 8.420.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 15.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	52,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.420.000,00
Keluaran	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	25 Perkara
Hasil	Persentase kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	77.11 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Perselisihan yang Dicegah
Waktu Pelaksanaan	: Februari s.d Juli
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 8.420.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 8.420.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 400.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 400.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 400.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 400.000,00**
	[#] Dialog Ketenagakerjaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 400.000,00**
	[-] Honor Kasir					**Rp. 400.000,00**
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 x 2	Orang Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 8.020.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 775.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 775.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 167.000,00**
	[#] Dialog Ketenagakerjaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 167.000,00**
	[-] Fotocopy					**Rp. 166.800,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	556	Lembar	300,00	0 %	Rp. 166.800,00
	[-] Pembulatan					**Rp. 200,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	200	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 198.000,00**
	[#] Dialog Ketenagakerjaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 198.000,00**
	[-] Spanduk					**Rp. 198.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	3 x 1	Meter Buah	66.000,00	0 %	Rp. 198.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 410.000,00**
	[#] Dialog Ketenagakerjaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 410.000,00**
	[-] Konsumsi rapat persiapan dan evaluasi					**Rp. 410.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	10 x 1	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	10 x 1	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 110.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 7.245.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 7.245.000,00**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 7.245.000,00**
	[#] Dialog Ketenagakerjaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 7.245.000,00**
	[-] ASB001-Dialog Ketenagakerjaan					**Rp. 7.245.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	ASB 001 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - PENUH HARI Spesifikasi : -	45 x 1	Orang Kali	161.000,00	0 %	Rp. 7.245.000,00
					Jumlah :	**Rp. 8.420.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
Kegiatan	: 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Perusahaan di Kota Pekalongan, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Pekalongan Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 5.480.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 12.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	52,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.480.000,00
Keluaran	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	8 Perkara
Hasil	Persentase kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	77.11 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 5.480.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 5.480.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 1.800.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 1.800.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 1.800.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 1.800.000,00**
	[#] Honorarium Kasir **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.800.000,00**
	[-] Honor Kasir					**Rp. 1.800.000,00**
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 x 9	Orang Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 3.680.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 3.280.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 3.280.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 163.000,00**
	[#] Perusahaan Yang Difasilitasi Mediasi. **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 163.000,00**
	[-] Fotocopy					**Rp. 162.900,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	543	Lembar	300,00	0 %	Rp. 162.900,00
	[-] Pembulatan					**Rp. 100,00**
	Kertas Dan Cover Spesifikasi : -	100	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 1.687.000,00**
	[#] Perusahaan yang Difasilitasi Mediasi. **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.687.000,00**
	[-] Pakaian Dinas Lapangan Mediator HI					**Rp. 1.687.000,00**
	Pakaian Dinas Lapangan lengkap Spesifikasi : Bahan	7 x 1	Orang Buah	241.000,00	0 %	Rp. 1.687.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 1.430.000,00**
	[#] Perusahaan yang Difasilitasi Mediasi. **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.430.000,00**
	[-] Konsumsi Rapat Persiapan/Klarifikasi/Mediasi.					**Rp. 1.430.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	10 x 13	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 1.430.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 400.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 400.000,00**
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp. 400.000,00**
	[#] Perusahaan yang Difasilitasi Mediasi. **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 400.000,00**
	[-] Banppot Caraka.					**Rp. 400.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Banpot caraka Spesifikasi : -	1 x 10	Orang Kali	40.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
					Jumlah :	**Rp. 5.480.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
Kegiatan	: 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d November
Kelompok Sasaran	: Perusahaan di Kota Pekalongan, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Pekalongan Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 12.240.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 22.048.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	52,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.240.000,00
Keluaran	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	30 Asosiasi dan Serikat Pekerja
Hasil	Persentase kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	77.11 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d November
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 12.240.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 12.240.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 700.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 700.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 700.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 700.000,00**
	[#] Verifikasi SP/SB & Organisasi Pengusaha **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 700.000,00**
	[-] Honor Kasir					**Rp. 400.000,00**
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 x 2	Orang Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[-] Honor PPTK					**Rp. 300.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 x 1	Orang Bulan	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 11.540.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 3.490.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 3.490.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 563.398,00**
	[#] Verifikasi SP/SB & Organisasi Pengusaha **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 563.398,00**
	[-] Fotocopy					**Rp. 563.100,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1877	Lembar	300,00	0 %	Rp. 563.100,00
	[-] Pembulatan					**Rp. 298,00**
	Kertas Dan Cover Spesifikasi : -	298	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 298,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 264.000,00**
	[#] Verifikasi SP/SB & Organisasi Pengusaha **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 264.000,00**
	[-] Spanduk					**Rp. 264.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	4 x 1	Meter Buah	66.000,00	0 %	Rp. 264.000,00
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 2.662.602,00**
	[#] Verifikasi SP/SB & Organisasi Pengusaha **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.662.602,00**
	[-] Seragam LKS Tripartit					**Rp. 2.662.602,00**
	Pakaian Batik Spesifikasi : Bahan	13 x 1 x 0.3977	Orang Buah Persen	515.000,00	0 %	Rp. 2.662.602,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 8.050.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 8.050.000,00**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 8.050.000,00**
	[#] Verifikasi SP/SB & Organisasi Pengusaha **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 8.050.000,00**
	[-] ASB001-Verifikasi SP/SB & Organisasi Pengusaha					**Rp. 8.050.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	ASB 001 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - PENUH HARI Spesifikasi : -	50 x 1	Orang Hari	161.000,00	0 %	Rp. 8.050.000,00
					Jumlah :	**Rp. 12.240.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	**Formulir RKA-BELANJA SKPD**
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
Kegiatan	: 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d November
Kelompok Sasaran	: Perusahaan di Kota Pekalongan, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Pekalongan Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 70.810.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 99.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	52,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.810.000,00
Keluaran	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga
Hasil	Persentase kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	77.11 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah LKS Tripartit yang Dibina
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d November
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 70.810.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 70.810.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 2.800.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 2.800.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 2.800.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 2.800.000,00**
	[#] Jumlah LKS Tripartit yang dibina Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.800.000,00**
	[-] Honor Kasir					**Rp. 1.600.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	8	Orang / Kali	200.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	[-] Honor PPTK					**Rp. 1.200.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 x 4	Orang Kali	300.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 68.010.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 28.616.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 28.616.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.002.000,00**
	[#] Jumlah LKS Tripartit yang dibina **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 912.000,00**
	[-] Fotocopy					**Rp. 912.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	3040	Lembar	300,00	0 %	Rp. 912.000,00
	[#] Jumlah peserta yang mengikuti Porseni Tripartit **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 90.000,00**
	[-] Cetak Kupon Jalan Sehat					**Rp. 90.000,00**
	Cetak Karcis Spesifikasi : -	15000 x 6	Rupiah Pak	1,00	0 %	Rp. 90.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.416.000,00**
	[#] Jumlah peserta yang mengikuti Porseni Tripartit **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.416.000,00**
	[-] Id Card Panitia					**Rp. 360.000,00**
	ID Card Spesifikasi : Standart	0.2 x 40	% Buah	45.000,00	0 %	Rp. 360.000,00
	[-] Spanduk Porseni					**Rp. 1.056.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	4 x 4	Meter Buah	66.000,00	0 %	Rp. 1.056.000,00
5.1.02.01.01.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**Rp. 4.000.000,00**
	[#] Jumlah peserta yang mengikuti Porseni Tripartit **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 4.000.000,00**
	[-] Kaos Panitia Porseni					**Rp. 4.000.000,00**
	Kaos Lapangan Lengan Panjang Spesifikasi : -	40	Orang	100.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp. 940.000,00**
	[#] Jumlah peserta yang mengikuti Porseni Tripartit **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 940.000,00**
	[-] Lomba Porseni Tripartit					**Rp. 940.000,00**
	Air Mineral gelas Spesifikasi : -	10	Dos	34.000,00	0 %	Rp. 340.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Air Mineral Botol Spesifikasi : 600 ml	10	Dos	60.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 21.258.000,00**
	[#] Jumlah LKS Tripartit yang dibina Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.788.000,00**
	[-] Konsumsi Rapat LKS Tripartit					**Rp. 2.788.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	17 x 4	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 748.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	17 x 4	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 2.040.000,00
	[#] Jumlah peserta yang mengikuti Porseni Tripartit Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 18.470.000,00**
	[-] Konsumsi Dialog Pemberdayaan Tripartit dalam Rangka Hari Buruh					**Rp. 4.100.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	100	Orang / Kali	11.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	100	Orang / Kali	30.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] Konsumsi Panitia Porseni Tripartit					**Rp. 6.560.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	40 x 4	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 1.760.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	40 x 4	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	[-] Konsumsi Peserta Senam Sehat					**Rp. 3.300.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	300	Orang / Kali	11.000,00	0 %	Rp. 3.300.000,00
	[-] Konsumsi Petugas Keamanan dan Kebersihan					**Rp. 2.460.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	30 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 660.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	30 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	[-] Konsumsi Tamu Undangan					**Rp. 2.050.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	50	Orang / Kali	11.000,00	0 %	Rp. 550.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	50	Orang / Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 21.054.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 14.460.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 11.200.000,00**
	[#] Jumlah LKS Tripartit yang dibina Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 11.200.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honor Rapat LKS Tripartit					**Rp. 6.000.000,00**
	Honor Narasumber Spesifikasi : (Honor Narasumber hanya diberikan untuk Wali Kota,...	6 x 4	Orang Kali	250.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[-] Honor Wakil Walikota					**Rp. 2.600.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Walikota/ Wakil Bupati/Wakil Walikota	1 x 2	Orang Kali	1.300.000,00	0 %	Rp. 2.600.000,00
	[-] Honor Walikota					**Rp. 2.600.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Walikota/ Wakil Bupati/Wakil Walikota	1 x 2	Orang Kali	1.300.000,00	0 %	Rp. 2.600.000,00
5.1.02.02.01.0025	**Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan**					**Rp. 2.900.000,00**
	[#] Jumlah peserta yang mengikuti Porseni Tripartit **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.900.000,00**
	[-] MC Porseni					**Rp. 500.000,00**
	MC Spesifikasi : Lokal	1	Orang	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	[-] Orkes Dangdut Porseni					**Rp. 2.000.000,00**
	Orkes Melayu / Dangdut Spesifikasi : Lokal	1	Paket	2.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] Penyanyi Dangdut Porseni					**Rp. 400.000,00**
	Penyanyi Dangdut Putri Spesifikasi : Lokal	2 x 0.666666666667	Orang	300.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp. 360.000,00**
	[#] Jumlah LKS Tripartit yang dibina **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 360.000,00**
	[-] Caraka LKS Tripartit					**Rp. 360.000,00**
	Banpot caraka Spesifikasi : -	9	Orang / Kali	40.000,00	0 %	Rp. 360.000,00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 6.594.000,00**
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**Rp. 1.950.000,00**
	[#] Jumlah peserta yang mengikuti Porseni Tripartit **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.950.000,00**
	[-] Sewa Layos Porseni Tripartit					**Rp. 1.950.000,00**
	Layos Besar biasa ful slisir Spesifikasi : -	3	Set	650.000,00	0 %	Rp. 1.950.000,00
5.1.02.02.04.0118	**Belanja Sewa Mebel**					**Rp. 1.250.000,00**
	[#] Jumlah peserta yang mengikuti Porseni Tripartit **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.250.000,00**
	[-] Sewa Kursi Porseni					**Rp. 800.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kursi susun Plastik Spesifikasi : -	100	Buah	8.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	[-] Sewa Meja Porseni					**Rp. 450.000,00**
	Meja bundar / kotak + cover Spesifikasi : -	10	Buah	45.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
5.1.02.02.04.0123	**Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp. 3.394.000,00**
	[#] Jumlah peserta yang mengikuti Porseni Tripartit Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.394.000,00**
	[-] Sewa Panggung Porseni					**Rp. 772.000,00**
	Panggung + karpet Spesifikasi : 4 X4 M	2	Set	386.000,00	0 %	Rp. 772.000,00
	[-] Sewa Sound System Porseni					**Rp. 2.622.000,00**
	Sound System 2000 watt Spesifikasi : 5 microphones~10x15 m	1	Set	2.622.000,00	0 %	Rp. 2.622.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 11.480.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 11.480.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 4.980.000,00**
	[#] Jumlah LKS Tripartit yang dibina Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.680.000,00**
	[-] Monev Sekretariat LKS Tripartit					**Rp. 1.680.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	7 x 8	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.680.000,00
	[#] Jumlah peserta yang mengikuti Porseni Tripartit Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.300.000,00**
	[-] Banpot Panitia Porseni					**Rp. 2.400.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	40 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[-] Banpot Petugas Keamanan dan Kebersihan					**Rp. 900.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	30	Orang / Kali	30.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 6.500.000,00**
	[#] Jumlah LKS Tripartit yang dibina Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.500.000,00**
	[-] Banpot Rapat LKS Tripartit					**Rp. 1.500.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	6 x 5	Orang Kali	50.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[#] Jumlah peserta yang mengikuti Porseni Tripartit Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.000.000,00**
	[-] Banpot Dialog Pemberdayaan LKS Tripartit					**Rp. 5.000.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	100	Orang	50.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 6.860.000,00**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 6.860.000,00**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp. 6.860.000,00**
	[#] Jumlah peserta yang mengikuti Porseni Tripartit **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 6.860.000,00**
	[-] Doorprize Porseni Tripartit					**Rp. 6.860.000,00**
	Uang untuk diberikan kepada masyarakat Spesifikasi : -	6860000	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 6.860.000,00
					Jumlah :	**Rp. 70.810.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
Kegiatan	: 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Februari s.d Juni
Kelompok Sasaran	: Perusahaan di Kota Pekalongan, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Pekalongan Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 196.600.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 220.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	52,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 196.600.000,00
Keluaran	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	40 Orang
Hasil	Persentase kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	77.11 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
Waktu Pelaksanaan	: Februari s.d Juni
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 196.600.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 196.600.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 2.600.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 2.600.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 2.600.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 2.600.000,00**
	[#] Honor Kasir. **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.250.000,00**
	[-] Honor Kasir					**Rp. 2.250.000,00**
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta ...	1 x 10	Orang Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
	[#] Honor PPTK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 350.000,00**
	[-] Honor PPTK					**Rp. 350.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta ...	1 x 1	Orang Bulan	350.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 194.000.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 674.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 674.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 410.000,00**
	[#] Sosialisasi Fasilitas Kesejahteraan Pekerja. **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 200,00**
	[-] Pembulatan					**Rp. 200,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	200	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 200,00
	[#] Sosialisasi/Pelatihan Pekerja Rentan tentang Keselamatan Kerja. **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 409.800,00**
	[-] Fotocopy Sosialisasi/Pelatihan Pekerja Rentan tentang Keselamatan Kerja.					**Rp. 409.800,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1366	Lembar	300,00	0 %	Rp. 409.800,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 264.000,00**
	[#] Sosialisasi/Pelatihan Pekerja Rentan tentang Keselamatan Kerja. **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 264.000,00**
	[-] Cetak spanduk Sosialisasi/Pelatihan Pekerja Rentan tentang Keselamatan Kerja.					**Rp. 264.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	4 x 1	Meter Buah	66.000,00	0 %	Rp. 264.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 188.496.000,00**
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 188.496.000,00**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 112.200.000,00**
	[#] Jamsos bagi pekerja rentan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 112.200.000,00**
	[-] Bantuan iuran JKK Pekerja Rentan					**Rp. 112.200.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi : -	935 x 10000 x 12	Orang Rupiah Bulan	1,00	0 %	Rp. 112.200.000,00
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp. 76.296.000,00**
	[#] Jamsos bagi pekerja rentan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 76.296.000,00**
	[-] Bantuan iuran JKM Pekerja Rentan					**Rp. 76.296.000,00**
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi : -	935 x 6800 x 12	Orang Rupiah Bulan	1,00	0 %	Rp. 76.296.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 4.830.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 4.830.000,00**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 4.830.000,00**
	[#] Sosialisasi/Pelatihan Pekerja Rentan tentang Keselamatan Kerja. Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.830.000,00**
	[-] ASB-001 Sosialisasi/Pelatihan Pekerja Rentan tentang Keselamatan Kerja.					**Rp. 4.830.000,00**
	ASB 001 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - PENUH HARI Spesifikasi : -	30 x 1	Orang Kali	161.000,00	0 %	Rp. 4.830.000,00
					Jumlah :	**Rp. 196.600.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinperinaker Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 6.249.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 6.249.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.249.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
Hasil	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 6.249.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 6.249.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 1.725.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 1.725.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 1.725.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 1.725.000,00**
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.725.000,00**
	[-] Honorarium Penatausahaan Keuangan					**Rp. 1.725.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta ...	1 x 3	Orang Bulan	350.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta ...	1 x 3	Orang Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 675.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 4.524.000,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 4.524.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 4.524.000,00**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 4.524.000,00**
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 4.524.000,00**
	[-] Rapat Penyusunan Renja dan Renstra					**Rp. 4.524.000,00**
	ASB 014 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Spesifikasi : -	52 x 3	Kegiatan Dokumen	29.000,00	0 %	Rp. 4.524.000,00
					Jumlah :	**Rp. 6.249.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	**Formulir RKA-BELANJA SKPD**
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinperinaker Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.132.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 2.132.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.132.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
Hasil	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 2.132.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 2.132.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 2.132.000,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 2.132.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 2.132.000,00**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 2.132.000,00**
	[#] Penyusunan Dokumen RKA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.132.000,00**
	[-] Penyusunan Dokumen RKA					**Rp. 2.132.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	ASB 016 Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Spesifikasi : -	52	Kegiatan	41.000,00	0 %	Rp. 2.132.000,00
					Jumlah :	**Rp. 2.132.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinperinaker Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 16.906.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 18.069.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 16.906.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan
Hasil	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 16.906.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 16.906.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.500.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.500.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.500.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.500.000,00
	[#] Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.500.000,00
	[-] Honorarium Penatausahaan Keuangan					Rp. 4.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 x 9	Orang Bulan	300.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 x 9	Orang Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 12.406.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 6.706.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 6.706.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.581.000,00**
	[#] Dokumen SAKIP, SPIP dan Evaluasi Renja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.581.000,00**
	[-] Fotocopy SAKIP, SPIP, Dok. Evaluasi Renja, Lap. Monev					**Rp. 1.581.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	5270	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.581.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 5.125.000,00**
	[#] Dokumen SAKIP, SPIP dan Evaluasi Renja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.125.000,00**
	[-] Dokumen SAKIP, SPIP dan Evaluasi Renja					**Rp. 5.125.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	25 x 5	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	25 x 5	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 1.375.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 1.200.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 1.200.000,00**
5.1.02.02.01.0046	**Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi**					**Rp. 1.200.000,00**
	[#] Dokumen SAKIP, SPIP dan Evaluasi Renja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.200.000,00**
	[-] Input ke Sistem Aplikasi					**Rp. 1.200.000,00**
	Entry Data Spesifikasi : -	4 x 150	Orang Kali	2.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 4.500.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 4.500.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 4.500.000,00**
	[#] Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.500.000,00**
	[-] Transport Koordinasi					**Rp. 4.500.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	6 x 25	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
					Jumlah :	**Rp. 16.906.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinperinaker Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 5.968.560.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 6.500.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.968.560.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 5.968.560.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 5.968.560.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 5.968.560.000,00**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp. 3.843.789.000,00**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp. 2.517.526.000,00**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp. 2.427.984.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.427.984.000,00**
	[-] Acress					**Rp. 38.184.000,00**
	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	38.184.000,00	0 %	Rp. 38.184.000,00
	[-] Gaji Pokok PNS Gol II					**Rp. 126.000.000,00**
	Belanja Gaji Pokok PNS	3 x 14	Orang Bulan	3.000.000,00	0 %	Rp. 126.000.000,00
	[-] Gaji Pokok PNS Gol III					**Rp. 1.612.800.000,00**
	Belanja Gaji Pokok PNS	32 x 14	Orang Bulan	3.600.000,00	0 %	Rp. 1.612.800.000,00
	[-] Gaji Pokok PNS Gol IV					**Rp. 651.000.000,00**
	Belanja Gaji Pokok PNS	10 x 14	Orang Bulan	4.650.000,00	0 %	Rp. 651.000.000,00
5.1.01.01.01.0002	**Belanja Gaji Pokok PPPK**					**Rp. 89.542.000,00**
	[#] Gaji Pokok PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 89.542.000,00**
	[-] Acress					**Rp. 1.342.000,00**
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1	Tahun	1.342.000,00	0 %	Rp. 1.342.000,00
	[-] Gaji Pokok PPPK					**Rp. 88.200.000,00**
	Belanja Gaji Pokok PPPK	2 x 14	Orang Bulan	3.150.000,00	0 %	Rp. 88.200.000,00
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp. 259.278.000,00**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp. 246.269.000,00**
	[#] Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 246.269.000,00**
	[-] Acress					**Rp. 2.669.000,00**
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	2.669.000,00	0 %	Rp. 2.669.000,00
	[-] Tunjangan Keluarga PNS Gol II					**Rp. 12.600.000,00**
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	3 x 14	Orang Bulan	300.000,00	0 %	Rp. 12.600.000,00
	[-] Tunjangan Keluarga PNS Gol III					**Rp. 168.000.000,00**
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	32 x 14	Orang Bulan	375.000,00	0 %	Rp. 168.000.000,00
	[-] Tunjangan Keluarga PNS Gol IV					**Rp. 63.000.000,00**
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	10 x 14	Orang Bulan	450.000,00	0 %	Rp. 63.000.000,00
5.1.01.01.02.0002	**Belanja Tunjangan Keluarga PPPK**					**Rp. 13.009.000,00**
	[#] Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 13.009.000,00**
	[-] Acress					**Rp. 269.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1	Tahun	269.000,00	0 %	Rp. 269.000,00
	[-] Tunjangan Keluarga PPPK					**Rp. 12.740.000,00**
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2 x 14	Orang Bulan	455.000,00	0 %	Rp. 12.740.000,00
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp. 123.108.000,00**
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp. 123.108.000,00**
	[#] Tunjangan Jabatan PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 123.108.000,00**
	[-] Acress					**Rp. 2.988.000,00**
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Tahun	2.988.000,00	0 %	Rp. 2.988.000,00
	[-] Tunjangan Jabatan PNS Eselon II b					**Rp. 29.400.000,00**
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 x 14	Orang Bulan	2.100.000,00	0 %	Rp. 29.400.000,00
	[-] Tunjangan Jabatan PNS Eselon III a					**Rp. 18.200.000,00**
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 x 14	Orang Bulan	1.300.000,00	0 %	Rp. 18.200.000,00
	[-] Tunjangan Jabatan PNS Eselon III b					**Rp. 42.000.000,00**
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	3 x 14	Orang Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 42.000.000,00
	[-] Tunjangan Jabatan PNS Eselon IV a					**Rp. 23.520.000,00**
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	3 x 14	Orang Bulan	560.000,00	0 %	Rp. 23.520.000,00
	[-] Tunjangan Jabatan PNS Eselon IV b					**Rp. 7.000.000,00**
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 x 14	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					**Rp. 452.257.000,00**
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					**Rp. 438.964.000,00**
	[#] Tunjangan Fungsional PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 438.964.000,00**
	[-] Acress					**Rp. 9.000.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	9.000.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	[-] Kenaikan Tunjangan Fungsional PNS					**Rp. 91.164.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	91.164.000,00	0 %	Rp. 91.164.000,00
	[-] Tunjangan Fungsional PNS Asesor Industri					**Rp. 8.400.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 x 14	Orang Bulan	600.000,00	0 %	Rp. 8.400.000,00
	[-] Tunjangan Fungsional PNS Instruktur Madya					**Rp. 98.000.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5 x 14	Orang Bulan	1.400.000,00	0 %	Rp. 98.000.000,00
	[-] Tunjangan Fungsional PNS Instruktur Muda					**Rp. 61.600.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4 x 14	Orang Bulan	1.100.000,00	0 %	Rp. 61.600.000,00
	[-] Tunjangan Fungsional PNS Instruktur Penyelia					**Rp. 14.000.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 x 14	Orang Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 14.000.000,00
	[-] Tunjangan Fungsional PNS Instruktur Pertama					**Rp. 42.000.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5 x 14	Orang Bulan	600.000,00	0 %	Rp. 42.000.000,00
	[-] Tunjangan Fungsional PNS Mediator HI Muda					**Rp. 28.000.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	2 x 14	Orang Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 28.000.000,00
	[-] Tunjangan Fungsional PNS Mediator HI Pertama					**Rp. 25.200.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	3 x 14	Orang Bulan	600.000,00	0 %	Rp. 25.200.000,00
	[-] Tunjangan Fungsional PNS Pengantar Kerja Muda					**Rp. 30.800.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	2 x 14	Orang Bulan	1.100.000,00	0 %	Rp. 30.800.000,00
	[-] Tunjangan Fungsional PNS Pengantar Kerja Pertama					**Rp. 8.400.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 x 14	Orang Bulan	600.000,00	0 %	Rp. 8.400.000,00
	[-] Tunjangan Fungsional PNS Penyuluh Perindag Muda					**Rp. 14.000.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 x 14	Orang Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 14.000.000,00
	[-] Tunjangan Fungsional PNS Penyuluh Perindag Pertama					**Rp. 8.400.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 x 14	Orang Bulan	600.000,00	0 %	Rp. 8.400.000,00
5.1.01.01.04.0002	**Belanja Tunjangan Fungsional PPPK**					**Rp. 13.293.000,00**
	[#] Tunjangan Fungsional PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 13.293.000,00**
	[-] Acress					**Rp. 300.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1	Tahun	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[-] Kenaikan Tunjangan Fungsional PPPK					**Rp. 393.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1	Tahun	393.000,00	0 %	Rp. 393.000,00
	[-] Tunjangan Fungsional PPPK					**Rp. 12.600.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2 x 14	Orang Bulan	450.000,00	0 %	Rp. 12.600.000,00
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp. 35.440.000,00**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp. 29.688.000,00**
	[#] Tunjangan Fungsional Umum PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 29.688.000,00**
	[-] Acress					**Rp. 638.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Tahun	638.000,00	0 %	Rp. 638.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Tunjangan Fungsional Umum Gol II					**Rp. 7.770.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3 x 14	Orang Bulan	185.000,00	0 %	Rp. 7.770.000,00
	[-] Tunjangan Fungsional Umum Gol III					**Rp. 21.280.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	8 x 14	Orang Bulan	190.000,00	0 %	Rp. 21.280.000,00
5.1.01.01.05.0002	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK**					**Rp. 5.752.000,00**
	[#] Tunjangan Fungsional Umum PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 5.752.000,00**
	[-] Acress					**Rp. 72.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1	Tahun	72.000,00	0 %	Rp. 72.000,00
	[-] Kenaikan Tunjangan Fungsional Umum PPPK					**Rp. 500.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1	Tahun	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PPPK					**Rp. 5.180.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2 x 14	Orang Bulan	185.000,00	0 %	Rp. 5.180.000,00
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp. 154.725.000,00**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp. 145.588.000,00**
	[#] Tunjangan Beras PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 145.588.000,00**
	[-] Acress					**Rp. 3.488.000,00**
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Tahun	3.488.000,00	0 %	Rp. 3.488.000,00
	[-] Tunjangan Beras Gol II					**Rp. 12.180.000,00**
	Belanja Tunjangan Beras PNS	3 x 14	Orang Bulan	290.000,00	0 %	Rp. 12.180.000,00
	[-] Tunjangan Beras Gol III					**Rp. 96.320.000,00**
	Belanja Tunjangan Beras PNS	32 x 14	Orang Bulan	215.000,00	0 %	Rp. 96.320.000,00
	[-] Tunjangan Beras Gol IV					**Rp. 33.600.000,00**
	Belanja Tunjangan Beras PNS	10 x 14	Orang Bulan	240.000,00	0 %	Rp. 33.600.000,00
5.1.01.01.06.0002	**Belanja Tunjangan Beras PPPK**					**Rp. 9.137.000,00**
	[#] Tunjangan Beras PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 9.137.000,00**
	[-] Acress					**Rp. 177.000,00**
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1	Tahun	177.000,00	0 %	Rp. 177.000,00
	[-] Tunjangan Beras PPPK					**Rp. 8.960.000,00**
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2 x 14	Orang Bulan	320.000,00	0 %	Rp. 8.960.000,00
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp. 37.629.000,00**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp. 37.629.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 37.629.000,00**
	[-] Acress					**Rp. 629.000,00**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Tahun	629.000,00	0 %	Rp. 629.000,00
	[-] Tunjangan PPh Gol III					**Rp. 19.200.000,00**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	32 x 12	Orang Bulan	50.000,00	0 %	Rp. 19.200.000,00
	[-] Tunjangan PPh Gol IV					**Rp. 9.600.000,00**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10 x 12	Orang Bulan	80.000,00	0 %	Rp. 9.600.000,00
	[-] Tunjangan PPh PNS Gaji ke-13					**Rp. 4.100.000,00**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Kali	4.100.000,00	0 %	Rp. 4.100.000,00
	[-] Tunjangan PPh PNS Gaji ke-14					**Rp. 4.100.000,00**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Kali	4.100.000,00	0 %	Rp. 4.100.000,00
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp. 37.000,00**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp. 34.000,00**
	[#] Pembulatan Gaji PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 34.000,00**
	[-] Pembulatan Gaji PNS					**Rp. 34.000,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	34.000,00	0 %	Rp. 34.000,00
5.1.01.01.08.0002	**Belanja Pembulatan Gaji PPPK**					**Rp. 3.000,00**
	[#] Pembulatan Gaji PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.000,00**
	[-] Pembulatan Gaji PPPK					**Rp. 3.000,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1	Tahun	3.000,00	0 %	Rp. 3.000,00
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**					**Rp. 210.536.000,00**
5.1.01.01.09.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**					**Rp. 205.451.000,00**
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 205.451.000,00**
	[-] Acress					**Rp. 3.851.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1	Tahun	3.851.000,00	0 %	Rp. 3.851.000,00
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan PNS Gol II					**Rp. 7.200.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	3 x 12	Orang Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan PNS Gol III					**Rp. 134.400.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	32 x 12	Orang Bulan	350.000,00	0 %	Rp. 134.400.000,00
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan PNS Gol IV					**Rp. 54.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	10 x 12	Orang Bulan	450.000,00	0 %	Rp. 54.000.000,00
	[-] Kenaikan Iuran Jaminan Kesehatan PNS					**Rp. 6.000.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1	Tahun	6.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
5.1.01.01.09.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK**					**Rp. 5.085.000,00**
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 5.085.000,00**
	[-] Acress					**Rp. 120.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1	Tahun	120.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					**Rp. 3.840.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2 x 12	Orang Bulan	160.000,00	0 %	Rp. 3.840.000,00
	[-] Kenaikan Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					**Rp. 1.125.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1	Tahun	1.125.000,00	0 %	Rp. 1.125.000,00
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**					**Rp. 6.171.000,00**
5.1.01.01.10.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**					**Rp. 5.902.000,00**
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 5.902.000,00**
	[-] Acress					**Rp. 94.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1	Tahun	94.000,00	0 %	Rp. 94.000,00
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Gol II					**Rp. 288.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3 x 12	Orang Bulan	8.000,00	0 %	Rp. 288.000,00
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Gol III					**Rp. 3.840.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	32 x 12	Orang Bulan	10.000,00	0 %	Rp. 3.840.000,00
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Gol IV					**Rp. 1.680.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	10 x 12	Orang Bulan	14.000,00	0 %	Rp. 1.680.000,00
5.1.01.01.10.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK**					**Rp. 269.000,00**
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 269.000,00**
	[-] Acress					**Rp. 5.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1	Tahun	5.000,00	0 %	Rp. 5.000,00
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					**Rp. 264.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	2 x 12	Orang Bulan	11.000,00	0 %	Rp. 264.000,00
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**					**Rp. 18.061.000,00**
5.1.01.01.11.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**					**Rp. 17.442.000,00**
	[#] Iuran Jaminan Kematian PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 17.442.000,00**
	[-] Acress					**Rp. 318.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1	Tahun	318.000,00	0 %	Rp. 318.000,00
	[-] Iuran Jaminan Kematian PNS Gol II					**Rp. 900.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	3 x 12	Orang Bulan	25.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	[-] Iuran Jaminan Kematian PNS Gol III					**Rp. 11.904.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	32 x 12	Orang Bulan	31.000,00	0 %	Rp. 11.904.000,00
	[-] Iuran Jaminan Kematian PNS Gol IV					**Rp. 4.320.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10 x 12	Orang Bulan	36.000,00	0 %	Rp. 4.320.000,00
5.1.01.01.11.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK**					**Rp. 619.000,00**
	[#] Iuran Jaminan Kematian PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 619.000,00**
	[-] Acress					**Rp. 10.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1	Tahun	10.000,00	0 %	Rp. 10.000,00
	[-] Iuran Jaminan Kematian PPPK					**Rp. 552.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	2 x 12	Orang Bulan	23.000,00	0 %	Rp. 552.000,00
	[-] Kenaikan Iuran Jaminan Kematian PPPK					**Rp. 57.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1	Tahun	57.000,00	0 %	Rp. 57.000,00
5.1.01.01.12	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN**					**Rp. 29.021.000,00**
5.1.01.01.12.0001	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS**					**Rp. 28.386.000,00**
	[#] Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 28.386.000,00**
	[-] Acress					**Rp. 306.000,00**
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1	Tahun	306.000,00	0 %	Rp. 306.000,00
	[-] Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					**Rp. 28.080.000,00**
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	45 x 12	Orang Bulan	52.000,00	0 %	Rp. 28.080.000,00
5.1.01.01.12.0002	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK**					**Rp. 635.000,00**
	[#] Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 635.000,00**
	[-] Acress					**Rp. 11.000,00**
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1	Tahun	11.000,00	0 %	Rp. 11.000,00
	[-] Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK					**Rp. 624.000,00**
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	2 x 12	Orang Bulan	26.000,00	0 %	Rp. 624.000,00
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp. 2.113.571.000,00**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp. 846.427.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp. 843.557.000,00**
	[#] Tambahan Penghasilan Beban Kerja PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 843.557.000,00**
	[-] Acress					**Rp. 2.157.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Tahun	2.157.000,00	0 %	Rp. 2.157.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Beban Kerja PNS Asesor Industri					**Rp. 13.720.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 x 14	Orang Bulan	980.000,00	0 %	Rp. 13.720.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Beban Kerja PNS Eselon II b					**Rp. 70.000.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 x 14	Orang Bulan	5.000.000,00	0 %	Rp. 70.000.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Beban Kerja PNS Eselon III a					**Rp. 44.100.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 x 14	Orang Bulan	3.150.000,00	0 %	Rp. 44.100.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Beban Kerja PNS Eselon III b					**Rp. 105.000.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3 x 14	Orang Bulan	2.500.000,00	0 %	Rp. 105.000.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Beban Kerja PNS Eselon IV a					**Rp. 67.200.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3 x 14	Orang Bulan	1.600.000,00	0 %	Rp. 67.200.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Beban Kerja PNS Eselon IV b					**Rp. 16.660.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 x 14	Orang Bulan	1.190.000,00	0 %	Rp. 16.660.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Beban Kerja PNS Instruktur Madya					**Rp. 92.400.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5 x 14	Orang Bulan	1.320.000,00	0 %	Rp. 92.400.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Beban Kerja PNS Instruktur Muda					**Rp. 60.480.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4 x 14	Orang Bulan	1.080.000,00	0 %	Rp. 60.480.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Beban Kerja PNS Instruktur Penyelia					**Rp. 13.720.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 x 14	Orang Bulan	980.000,00	0 %	Rp. 13.720.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Beban Kerja PNS Instruktur Pertama					**Rp. 68.600.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5 x 14	Orang Bulan	980.000,00	0 %	Rp. 68.600.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Beban Kerja PNS Mediator HI Muda					**Rp. 42.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2 x 14	Orang Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 42.000.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Beban Kerja PNS Mediator HI Pertama					**Rp. 41.160.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3 x 14	Orang Bulan	980.000,00	0 %	Rp. 41.160.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Beban Kerja PNS Pengantar Kerja Muda					**Rp. 42.000.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2 x 14	Orang Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 42.000.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Beban Kerja PNS Pengantar Kerja Pertama					**Rp. 13.720.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 x 14	Orang Bulan	980.000,00	0 %	Rp. 13.720.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Beban Kerja PNS Penyuluh Perindag Muda					**Rp. 21.000.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 x 14	Orang Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 21.000.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Beban Kerja PNS Penyuluh Perindag Pertama					**Rp. 13.720.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 x 14	Orang Bulan	980.000,00	0 %	Rp. 13.720.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Beban Kerja PNS Staf Gol II					**Rp. 30.660.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3 x 14	Orang Bulan	730.000,00	0 %	Rp. 30.660.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Beban Kerja PNS Staf Gol III					**Rp. 85.260.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	7 x 14	Orang Bulan	870.000,00	0 %	Rp. 85.260.000,00
5.1.01.02.01.0002	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK**					**Rp. 2.870.000,00**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.870.000,00**
	[-] Acress					**Rp. 70.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1	Tahun	70.000,00	0 %	Rp. 70.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					**Rp. 2.800.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	2 x 14	Orang Bulan	100.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
5.1.01.02.05	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN**					**Rp. 1.267.144.000,00**
5.1.01.02.05.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS**					**Rp. 1.262.839.000,00**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.262.839.000,00**
	[-] Acress					**Rp. 8.299.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1	Tahun	8.299.000,00	0 %	Rp. 8.299.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja PNS Asesor Industri					**Rp. 20.300.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 x 14	Orang Bulan	1.450.000,00	0 %	Rp. 20.300.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja PNS Eselon II b					**Rp. 105.000.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 x 14	Orang Bulan	7.500.000,00	0 %	Rp. 105.000.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja PNS Eselon III a					**Rp. 66.150.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 x 14	Orang Bulan	4.725.000,00	0 %	Rp. 66.150.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja PNS Eselon III b					**Rp. 156.450.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3 x 14	Orang Bulan	3.725.000,00	0 %	Rp. 156.450.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja PNS Eselon IV a					**Rp. 100.800.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3 x 14	Orang Bulan	2.400.000,00	0 %	Rp. 100.800.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja PNS Eselon IV b					**Rp. 24.850.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 x 14	Orang Bulan	1.775.000,00	0 %	Rp. 24.850.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja PNS Instruktur Madya					**Rp. 140.000.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	5 x 14	Orang Bulan	2.000.000,00	0 %	Rp. 140.000.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja PNS Instruktur Muda					**Rp. 89.600.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	4 x 14	Orang Bulan	1.600.000,00	0 %	Rp. 89.600.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja PNS Instruktur Penyelia					**Rp. 20.300.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 x 14	Orang Bulan	1.450.000,00	0 %	Rp. 20.300.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja PNS Instruktur Pertama					**Rp. 101.500.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	5 x 14	Orang Bulan	1.450.000,00	0 %	Rp. 101.500.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja PNS Mediator HI Muda					**Rp. 62.720.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2 x 14	Orang Bulan	2.240.000,00	0 %	Rp. 62.720.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja PNS Mediator HI Pertama					**Rp. 60.480.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3 x 14	Orang Bulan	1.440.000,00	0 %	Rp. 60.480.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja PNS Pengantar Kerja Muda					**Rp. 62.720.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2 x 14	Orang Bulan	2.240.000,00	0 %	Rp. 62.720.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja PNS Pengantar Kerja Pertama					**Rp. 20.300.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 x 14	Orang Bulan	1.450.000,00	0 %	Rp. 20.300.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja PNS Penyuluh Perindag Muda					**Rp. 31.500.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 x 14	Orang Bulan	2.250.000,00	0 %	Rp. 31.500.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja PNS Penyuluh Perindag Pertama					**Rp. 20.160.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 x 14	Orang Bulan	1.440.000,00	0 %	Rp. 20.160.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja PNS Staf Gol II					**Rp. 45.780.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3 x 14	Orang Bulan	1.090.000,00	0 %	Rp. 45.780.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja PNS Staf Gol III					**Rp. 125.930.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	7 x 14	Orang Bulan	1.285.000,00	0 %	Rp. 125.930.000,00
5.1.01.02.05.0002	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK**					**Rp. 4.305.000,00**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.305.000,00**
	[-] Acress					**Rp. 105.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1	Tahun	105.000,00	0 %	Rp. 105.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK					**Rp. 4.200.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	2 x 14	Orang Bulan	150.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 11.200.000,00**
5.1.01.03.02	**Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah**					**Rp. 11.200.000,00**
5.1.01.03.02.0014	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah**					**Rp. 8.600.000,00**
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 8.600.000,00**
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					**Rp. 8.600.000,00**
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1	Tahun	8.600.000,00	0 %	Rp. 8.600.000,00
5.1.01.03.02.0032	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)**					**Rp. 2.600.000,00**
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.600.000,00**
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)					**Rp. 2.600.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	1	Tahun	2.600.000,00	0 %	Rp. 2.600.000,00
					Jumlah :	**Rp. 5.968.560.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinperinaker Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 57.500.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 62.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 57.500.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 57.500.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 57.500.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 53.400.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 53.400.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 40.200.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 40.200.000,00**
	[#] Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 40.200.000,00**
	[-] Honorarium Penatausahaan Keuangan					**Rp. 40.200.000,00**
	Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d 25 miliar	1 x 12	Orang Bulan	850.000,00	0 %	Rp. 10.200.000,00
	Pejabat Penatausahaan Keuangan/Barang SKPD Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 10 miliar...	1 x 12	Orang Bulan	800.000,00	0 %	Rp. 9.600.000,00
	Bendahara Pengeluaran SKPD Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 10 miliar...	1 x 12	Orang Bulan	675.000,00	0 %	Rp. 8.100.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 10 miliar...	1 x 12	Orang Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pengurusan Gaji Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 5 miliar ...	1 x 12	Orang Bulan	300.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	Bendahara Penerimaan (SKPD) Spesifikasi : Nilai target pendapatan yang dikelola di atas 100 ...	1 x 12	Orang Bulan	325.000,00	0 %	Rp. 3.900.000,00
5.1.01.03.08	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD**					**Rp. 13.200.000,00**
5.1.01.03.08.0002	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan**					**Rp. 13.200.000,00**
	[#] Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 13.200.000,00**
	[-] Honorarium Penatausahaan Keuangan					**Rp. 13.200.000,00**
	Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi : Nilai Aset Tetap di bawah 50 M	1 x 12	Orang Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Pembantu Pengurus Barang Pengguna /Pengurus Barang Pembantu di KPA Spesifikasi : Nilai Aset Tetap di bawah 50 M	2 x 12	Orang Bulan	350.000,00	0 %	Rp. 8.400.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 4.100.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 500.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 500.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 500.000,00**
	[#] Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 500.000,00**
	[-] Fotocopy					**Rp. 500.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1666	Lembar	300,00	0 %	Rp. 499.800,00
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	200	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 3.600.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 3.600.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 3.600.000,00**
	[#] Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.600.000,00**
	[-] Honorarium Penatausahaan Keuangan					**Rp. 3.600.000,00**
	Banpot Input Data Aplikasi Keuangan Daerah di hari libur Spesifikasi : -	1 x 6 x 12	Orang Hari Bulan	50.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
					Jumlah :	**Rp. 57.500.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	**Formulir RKA-BELANJA SKPD**
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinperinaker Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.976.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 2.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.976.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 1.976.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 1.976.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 1.976.000,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 1.976.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 1.976.000,00**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 1.976.000,00**
	[#] Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.976.000,00**
	[-] Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun					**Rp. 1.976.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	ASB 015 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Spesifikasi : -	52	Kegiatan	38.000,00	0 %	Rp. 1.976.000,00
					Jumlah :	**Rp. 1.976.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinperinaker Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 3.650.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 9.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.650.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 3.650.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 3.650.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 3.650.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 3.650.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 3.650.000,00**
5.1.02.01.01.0074	**Belanja Pakaian Adat Daerah**					**Rp. 3.650.000,00**
	[#] Keikutsertaan dalam Karnaval Batik **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.650.000,00**
	[-] Kostum Karnaval					**Rp. 3.650.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja kostum karnaval Spesifikasi : -	1 x 0.73	Buah %	5.000.000,00	0 %	Rp. 3.650.000,00
					Jumlah :	**Rp. 3.650.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinperinaker Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 4.380.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 6.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.380.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 4.380.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 4.380.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 4.380.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 4.380.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 4.380.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 0,00**
	[#] Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 0,00**
	[-] Belanja fotocopy					**Rp. 0,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	-	Lembar	300,00	0 %	Rp. 0,00
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	-	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp. 4.380.000,00**
	[#] Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 4.380.000,00**
	[-] Batu batterai Dinas & BLK					**Rp. 1.110.000,00**
	Batu Baterai Spesifikasi : Kecil	9	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
	Batu Baterai Spesifikasi : Tanggung	50	Buah	18.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Batu Baterai Spesifikasi : Besar	5	Buah	24.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
	[-] Belanja lampu untuk kantor Dinas dan BLK					**Rp. 3.270.000,00**
	Lampu Spesifikasi : Esensial, 14 Watt	4	Buah	71.000,00	0 %	Rp. 284.000,00
	Lampu LED 12 Watt Spesifikasi : -	10	Buah	100.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Kabel Spesifikasi : 2 x 1,5 mm2	13	Meter	16.000,00	0 %	Rp. 208.000,00
	Steker Spesifikasi : Augen	7	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 105.000,00
	Steker Spesifikasi : Dengan arder	5	Buah	19.000,00	0 %	Rp. 95.000,00
	Lampu LED 19 Watt Spesifikasi : -	8	Buah	125.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Stop Kontak Spesifikasi : Broco	4	Buah	14.000,00	0 %	Rp. 56.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	StopKontak Rool Spesifikasi : -	2	Buah	68.000,00	0 %	Rp. 136.000,00
	Stop Kontak Spesifikasi : Multicord Polux 4 lub	4	Buah	60.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	Lampu Bulb LED 5 W Spesifikasi : Philips	5	Buah	29.200,00	0 %	Rp. 146.000,00
					Jumlah :	**Rp. 4.380.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	**Formulir RKA-BELANJA SKPD**
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinperinaker Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 90.027.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 120.873.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 90.027.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 90.027.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 27.279.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 450.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 450.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 450.000,00**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 450.000,00**
	[#] Peralatan dan perlengkapan gedung kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 450.000,00**
	[-] Honor PPJB					**Rp. 450.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 x 1	Orang Pekerjaan	250.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 x 1	Orang Pekerjaan	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 26.829.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 26.829.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 26.829.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 7.229.000,00**
	[#] Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 7.229.000,00**
	[-] Belanja ATK Kantor					**Rp. 7.229.000,00**
	Ballpoint Spesifikasi : Biasa	34	Buah	3.000,00	0 %	Rp. 102.000,00
	Binder Clips Spesifikasi : No 260	20	Buah	48.000,00	0 %	Rp. 960.000,00
	Binder Clips Spesifikasi : No 155	8	Buah	47.000,00	0 %	Rp. 376.000,00
	Binder Clips Spesifikasi : No 111	8	Buah	45.000,00	0 %	Rp. 360.000,00
	Mesin Hitung Elektronik/Calculator Spesifikasi : 12 Digits	1	Buah	242.000,00	0 %	Rp. 242.000,00
	Buku Folio Spesifikasi : Isi 100 lembar	10	Buah	32.000,00	0 %	Rp. 320.000,00
	Buku Nota Spesifikasi : 30 lbr besar (10)	10	Buah	31.000,00	0 %	Rp. 310.000,00
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 58 lembar	10	Buah	5.000,00	0 %	Rp. 50.000,00
	Cutter Spesifikasi : lebar pisau 2 cm	3	Buah	40.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
	Gunting Spesifikasi : Gunting FL 8,5"	2	Buah	21.000,00	0 %	Rp. 42.000,00
	Isi Pentel Spesifikasi : -	9	Buah	21.000,00	0 %	Rp. 189.000,00
	Isi Staples Spesifikasi : No. 10	10	Buah	14.000,00	0 %	Rp. 140.000,00
	Isi Staples Spesifikasi : No. 369	8	Buah	36.000,00	0 %	Rp. 288.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jepitan Kertas Spesifikasi : Logam	10	Buah	7.000,00	0 %	Rp. 70.000,00
	Lakban Spesifikasi : 2", Hitam	8	Buah	35.000,00	0 %	Rp. 280.000,00
	Odner Spesifikasi : Karton Logam	5	Buah	54.000,00	0 %	Rp. 270.000,00
	Paper Clips Spesifikasi : -	10	Buah	31.000,00	0 %	Rp. 310.000,00
	Penggaris Spesifikasi : Besi, 30 Cm	5	Buah	21.000,00	0 %	Rp. 105.000,00
	Pensil Spesifikasi : 2B	5	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 30.000,00
	Pita Spesifikasi : Untuk Mesin Ketik, Manual	1	Buah	35.000,00	0 %	Rp. 35.000,00
	Serutan pensil Spesifikasi : Atom	1	Buah	175.000,00	0 %	Rp. 175.000,00
	Spidol Spesifikasi : Permanent	5	Buah	31.000,00	0 %	Rp. 155.000,00
	Spidol Spesifikasi : White Board	10	Buah	12.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
	Stabillo Spesifikasi : -	10	Buah	21.000,00	0 %	Rp. 210.000,00
	Staples Spesifikasi : No. 10	1	Buah	75.000,00	0 %	Rp. 75.000,00
	Stick Notes Spesifikasi : Post-it 76x76 mm; 1 warna 70 gram	10	Buah	21.000,00	0 %	Rp. 210.000,00
	Stopmap Spesifikasi : bahan plastik	10	Buah	27.000,00	0 %	Rp. 270.000,00
	Stopmap Spesifikasi : kertas folio	15	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 60.000,00
	Stopmap / Snelechter Spesifikasi : bahan kertas	15	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 60.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Stopmap / Snelechter Spesifikasi : bahan plastik	10	Buah	27.000,00	0 %	Rp. 270.000,00
	Tinta Stempel Spesifikasi : Botolan	5	Buah	24.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
	Isolasi Spesifikasi : Kecil, Bening	10	Buah	5.000,00	0 %	Rp. 50.000,00
	Setip Spesifikasi : Biasa	5	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 30.000,00
	Note Spesifikasi : Page Marker pronto (15x50mmx5 pads); 5 warna; 70 g...	10	Pak	18.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
	Clip Spesifikasi : Ukuran Besar	10	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Lem kertas Spesifikasi : Stick	33	Buah	5.000,00	0 %	Rp. 165.000,00
	Lakban Spesifikasi : 2"	10	Buah	23.000,00	0 %	Rp. 230.000,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 13.670.000,00**
	[#] Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 13.670.000,00**
	[-] Belanja ATK Kantor					**Rp. 13.564.000,00**
	Amplop Spesifikasi : 80 gr ; kecil	56	Buah	7.000,00	0 %	Rp. 392.000,00
	Amplop Spesifikasi : Panjang (kabinet)	25	Buah	40.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Kertas Facsimile Spesifikasi : 30 x 210 mm	1	Buah	62.000,00	0 %	Rp. 62.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 ; 70 gr; 210 X297 mm	80	Rim	54.000,00	0 %	Rp. 4.320.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 ; 80 gr; 216 X 330 mm	125	Rim	58.000,00	0 %	Rp. 7.250.000,00
	Amplop Spesifikasi : 104 PPS	45	Pack	12.000,00	0 %	Rp. 540.000,00
	[-] Kertas stiker					**Rp. 106.000,00**
	Kertas Dan Cover Spesifikasi : -	2 x 53000	Rim Rupiah	1,00	0 %	Rp. 106.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 5.080.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.080.000,00**
	[-] Belanja ATK Kantor					**Rp. 5.080.000,00**
	Refil Tinta Spesifikasi : 60 ml, Ber ID	40	Buah	127.000,00	0 %	Rp. 5.080.000,00
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 850.000,00**
	[#] Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 850.000,00**
	[-] Materai					**Rp. 850.000,00**
	Materai 10000 Spesifikasi : -	85	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 850.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 62.748.000,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 62.748.000,00**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 32.840.000,00**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp. 32.840.000,00**
5.2.02.05.02.0001	**Belanja Modal Mebel**					**Rp. 20.820.000,00**
	[#] Peralatan dan perlengkapan gedung kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 20.820.000,00**
	[-] pengadaan kursi kerja					**Rp. 20.820.000,00**
	Pembelian Meubelair Spesifikasi : -	6 x 3470000	Unit Rupiah	1,00	0 %	Rp. 20.820.000,00
5.2.02.05.02.0004	**Belanja Modal Alat Pendingin**					**Rp. 12.020.000,00**
	[#] Peralatan dan perlengkapan gedung kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 12.020.000,00**
	[-] Pengadaan AC					**Rp. 12.020.000,00**
	A.C. Split Spesifikasi : Split, 1 PK	2 x 0.8	Unit Persen	7.511.000,00	0 %	Rp. 12.017.600,00
	Fotocopy Spesifikasi : A4	8	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.400,00
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp. 29.908.000,00**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp. 25.908.000,00**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp. 17.000.000,00**
	[#] Peralatan dan perlengkapan gedung kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 17.000.000,00**
	[-] Laptop					**Rp. 17.000.000,00**
	Belanja Modal Personal Computer	2	Buah	8.500.000,00	0 %	Rp. 17.000.000,00
5.2.02.10.01.0003	**Belanja Modal Komputer Unit Lainnya**					**Rp. 8.908.000,00**
	[#] Peralatan dan perlengkapan gedung kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 8.908.000,00**
	[-] Printer					**Rp. 8.908.000,00**
	Printer (Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi : Tabung Tinta Infus Resmi Seri L120 6 warna Tinta	2	Unit	4.454.000,00	0 %	Rp. 8.908.000,00
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp. 4.000.000,00**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp. 4.000.000,00**
	[#] Peralatan dan perlengkapan gedung kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pengadaan Scanner					**Rp. 4.000.000,00**
	Scanner Spesifikasi : Portable	1	Unit	4.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 90.027.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinperinaker Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 3.750.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 5.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.750.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 3.750.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 3.750.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 3.750.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 3.750.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 3.750.000,00**
5.1.02.01.01.0010	**Belanja Bahan-Isi Tabung Gas**					**Rp. 2.820.000,00**
	[#] Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.820.000,00**
	[-] Isi Ulang tabung gas					**Rp. 2.820.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Tabung Gas Spesifikasi : -	12 x 235000	Buah Rupiah	1,00	0 %	Rp. 2.820.000,00
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 930.000,00**
	[#] Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 930.000,00**
	[-] Belanja alat kebersihan kantor					**Rp. 392.000,00**
	Pisau Mesin Potong Rumput Spesifikasi : -	3	Buah	50.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
	Garpu Pacul Spesifikasi : -	1	Buah	190.000,00	0 %	Rp. 190.000,00
	Serok Spesifikasi : -	4	Buah	13.000,00	0 %	Rp. 52.000,00
	[-] Belanja alat rumah tangga					**Rp. 538.000,00**
	Sendok Spesifikasi : Makan	2	Lusin	131.000,00	0 %	Rp. 262.000,00
	Pisau Spesifikasi : logam	5	Buah	38.000,00	0 %	Rp. 190.000,00
	Plastik Klip Spesifikasi : uk 9 cm x 15,5 cm	2	Per Bungkus	42.000,00	0 %	Rp. 84.000,00
	Plastik Klip Spesifikasi : uk 10 cm x 7 cm	2	Lembar	1.000,00	0 %	Rp. 2.000,00
					Jumlah :	**Rp. 3.750.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinperinaker Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 74.716.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 74.716.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 74.716.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 74.716.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 74.716.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 74.716.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 74.716.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 74.716.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 304.000,00**
	[#] Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 304.000,00**
	[-] Belanja fotocopy					**Rp. 304.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Spesifikasi : A4	1013	Lembar	300,00	0 %	Rp. 303.900,00
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	100	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp. 50.222.000,00**
	[#] Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 50.222.000,00**
	[-] Belanja minuman harian karyawan Dinas (45 org x 22hr x 11 bln x Rp.2.500)					**Rp. 28.764.000,00**
	Gula Pasir Spesifikasi : -	3 x 22 x 11	Kg Hari Bulan	15.000,00	0 %	Rp. 10.890.000,00
	Teh Tubruk Spesifikasi : -	2 x 4 x 11	Pak Minggu Bulan	45.000,00	0 %	Rp. 3.960.000,00
	Isi Ulang Air Mineral Galon Spesifikasi : -	10 x 4 x 11	Galon Minggu Bulan	23.000,00	0 %	Rp. 10.120.000,00
	Kopi sachet Spesifikasi : Renteng	1 x 15 x 11	Buah Hari Bulan	18.000,00	0 %	Rp. 2.970.000,00
	Teh Celup Spesifikasi : -	1 x 4 x 11	Pak Minggu Bulan	11.000,00	0 %	Rp. 484.000,00
	Air Mineral Galon Spesifikasi : -	5	Galon	68.000,00	0 %	Rp. 340.000,00
	[-] jamuan tamu					**Rp. 5.244.000,00**
	Air Mineral gelas Spesifikasi : -	70	Dus	34.000,00	0 %	Rp. 2.380.000,00
	Natura Spesifikasi : -	10000 x 22 x 11	Rupiah Hari Bulan	1,00	0 %	Rp. 2.420.000,00
	Air Mineral Botol Spesifikasi : 330 ml	12	Dus	37.000,00	0 %	Rp. 444.000,00
	[-] Minuman harian karyawan BLK dan LIK (25 org x 22hr x 11 bln x Rp.2.500)					**Rp. 16.214.000,00**
	Gula Pasir Spesifikasi : -	2 x 22 x 11	Kg Hari Bulan	15.000,00	0 %	Rp. 7.260.000,00
	Teh Tubruk Spesifikasi : -	1 x 5 x 11	Pak Hari Bulan	45.000,00	0 %	Rp. 2.475.000,00
	Teh Celup Spesifikasi : -	1 x 5 x 11	Pak Hari Bulan	11.000,00	0 %	Rp. 605.000,00
	Isi Ulang Air Mineral Galon Spesifikasi : -	8 x 11	Galon Bulan	23.000,00	0 %	Rp. 2.024.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kopi bubuk Spesifikasi : 165gr	5 x 5 x 11	Buah Hari Bulan	14.000,00	0 %	Rp. 3.850.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 24.190.000,00**
	[#] Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 24.190.000,00**
	[-] Makmin rapat internal					**Rp. 11.480.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	70 x 4	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 3.080.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	70 x 4	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 8.400.000,00
	[-] Makmin rapat pelatihan di BLK					**Rp. 7.380.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	90 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 1.980.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	90 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	[-] Makmin rapat tamu					**Rp. 5.330.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	26 x 5	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 1.430.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	26 x 5	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 3.900.000,00
					Jumlah :	**Rp. 74.716.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	**Formulir RKA-BELANJA SKPD**
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinperinaker Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 7.825.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 7.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.825.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 7.825.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 7.825.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 7.825.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 7.825.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 7.825.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 5.525.000,00**
	[#] Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.525.000,00**
	[-] Belanja Cetak					**Rp. 2.930.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak stopmap dinas Spesifikasi : -	350	Buah	7.000,00	0 %	Rp. 2.450.000,00
	Cetak amplop dinas Spesifikasi : -	400	Buah	1.200,00	0 %	Rp. 480.000,00
	[-] Belanja fotocopy					**Rp. 2.440.800,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	8136	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.440.800,00
	[-] blanko kupon bbm					**Rp. 154.000,00**
	Cetak Kupon BBM (Solar/Pertalite/Pertamax/Dexlite, dll ukuran 20 ltr, 5 ltr,10ltr) Spesifikasi : -	14	Buku	11.000,00	0 %	Rp. 154.000,00
	[-] pembulatan					**Rp. 200,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	200	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 2.300.000,00**
	[#] Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.300.000,00**
	[-] Blanko A2 dan blanko disposisi (Kosong)					**Rp. 1.500.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : -	1500 x 1000	Buah Rupiah	1,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] cetak AK.1					**Rp. 800.000,00**
	Cetak Kertas HVS, 70 gram Spesifikasi : 2 Muka 1 warna; ukuran Kwitansi	800	Buah	1.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
					Jumlah :	**Rp. 7.825.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	**Formulir RKA-BELANJA SKPD**
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinperinaker Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 3.650.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 5.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.650.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 3.650.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 3.650.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 3.650.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 410.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 410.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 410.000,00**
	[#] Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 410.000,00**
	[-] Belanja fotocopy					**Rp. 410.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1366	Lembar	300,00	0 %	Rp. 409.800,00
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	200	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 3.240.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 3.240.000,00**
5.1.02.02.01.0062	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**					**Rp. 3.240.000,00**
	[#] Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.240.000,00**
	[-] Belanja langganan koran Dinas dan UPTD BLK					**Rp. 3.240.000,00**
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12 x 3	Bulan Buah	90.000,00	0 %	Rp. 3.240.000,00
					Jumlah :	**Rp. 3.650.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinperinaker Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 75.590.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 125.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.590.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 75.590.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 75.590.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 75.590.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 75.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 75.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 75.000,00**
	[#] Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 75.000,00**
	[-] fotocopy					**Rp. 75.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	250	Lembar	300,00	0 %	Rp. 75.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 75.515.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 75.515.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 74.075.000,00**
	[#] Fasilitasi Rapat Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 74.075.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Keluar Provinsi dalam Pulau Jawa (DIY Yogyakarta)					**Rp. 6.575.000,00**
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : D.I. Yogyakarta	3	Orang / Hari	420.000,00	0 %	Rp. 1.260.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Eselon II / Anggota DPRD	3	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Biaya Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.I. Yogyakarta	1	Orang / Hari	2.425.000,00	0 %	Rp. 2.425.000,00
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III, II dan I Spesifikasi : D.I. Yogyakarta	1	Orang / Hari	760.000,00	0 %	Rp. 760.000,00
	Transport Menggunakan Mobil Dinas Spesifikasi : Mobil dibawah 1.700 cc Per Km	40 x 1400 x 3	Liter Rupiah Kali	10,00	0 %	Rp. 1.680.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Keluar Provinsi dalam Pulau Jawa (DKI Jakarta)					**Rp. 5.802.000,00**
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	3	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 1.590.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Eselon II / Anggota DPRD	3	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Biaya Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1	Orang / Hari	2.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III, II dan I Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1	Orang / Hari	657.000,00	0 %	Rp. 657.000,00
	Transport Menggunakan Mobil Dinas Spesifikasi : Mobil dibawah 1.700 cc Per Km	85 x 1300	Liter Rupiah	10,00	0 %	Rp. 1.105.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Keluar Provinsi dalam Pulau Jawa (Jawa Barat)					**Rp. 10.956.000,00**
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Jawa Barat	5	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 2.150.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Eselon II / Anggota DPRD	5	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 750.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : Jawa Barat	1	Orang / Hari	2.479.000,00	0 %	Rp. 2.479.000,00
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : Jawa Barat	1	Orang / Hari	1.080.000,00	0 %	Rp. 1.080.000,00
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III, II dan I Spesifikasi : Jawa Barat	1	Orang / Hari	617.000,00	0 %	Rp. 617.000,00
	Transport Menggunakan Mobil Dinas Spesifikasi : Mobil dibawah 1.700 cc Per Km	388000	Liter	10,00	0 %	Rp. 3.880.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Keluar Provinsi dalam Pulau Jawa (Jawa Timur)					**Rp. 13.038.000,00**
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Jawa Timur	5	Orang / Hari	410.000,00	0 %	Rp. 2.050.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Eselon II / Anggota DPRD	5	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Biaya Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : Jawa Timur	1	Orang / Hari	1.806.000,00	0 %	Rp. 1.806.000,00
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III, II dan I Spesifikasi : Jawa Timur	1	Orang / Hari	732.000,00	0 %	Rp. 732.000,00
	Transport Menggunakan Mobil Dinas Spesifikasi : Mobil dibawah 1.700 cc Per Km	110 x 1400 x 5	Liter Liter Kali	10,00	0 %	Rp. 7.700.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi (Jawa Tengah)					**Rp. 34.885.000,00**
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Eselon II / Anggota DPRD	20	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Jawa Tengah	31	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 11.470.000,00
	Biaya Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : Jawa Tengah	5	Orang / Hari	1.665.000,00	0 %	Rp. 8.325.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30	Kali	286.000,00	0 %	Rp. 8.580.000,00
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : Jawa Tengah	2	Orang / Hari	1.080.000,00	0 %	Rp. 2.160.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III, II dan I Spesifikasi : Jawa Tengah	2	Orang / Hari	675.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi					**Rp. 2.819.000,00**
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Bali	1	Orang / Hari	480.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Eselon II / Anggota DPRD	1	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
	Biaya Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : Bali	1	Orang / Hari	2.189.000,00	0 %	Rp. 2.189.000,00
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 1.440.000,00**
	[#] Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.440.000,00**
	[-] Monitoring					**Rp. 1.440.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	2 x 2 x 12	Orang Kali Bulan	30.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
					Jumlah :	**Rp. 75.590.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinperinaker Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 3.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 4.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan
Hasil	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 3.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 3.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 3.000.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 120.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 120.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 120.000,00**
	[#] Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 120.000,00**
	[-] Belanja fotokopi					**Rp. 120.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	400	Lembar	300,00	0 %	Rp. 120.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 2.880.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 2.880.000,00**
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp. 2.880.000,00**
	[#] Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.880.000,00**
	[-] Banport Caraka					**Rp. 2.880.000,00**
	Banpot caraka Spesifikasi : -	1 x 12 x 6	Orang Bulan Kali	40.000,00	0 %	Rp. 2.880.000,00
					Jumlah :	**Rp. 3.000.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinperinaker Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 260.500.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 255.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 260.500.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 260.500.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 260.500.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 260.500.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 300.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 300.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 300.000,00**
	[#] Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 300.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja fotocopy					**Rp. 300.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1000	Lembar	300,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 260.200.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 260.200.000,00**
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp. 7.200.000,00**
	[#] Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 7.200.000,00**
	[-] Belanja tagihan telepon Dinas dan UPTD BLK					**Rp. 7.200.000,00**
	Beban Jasa telepon Spesifikasi : -	12 x 600000	Bulan Rupiah	1,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp. 12.000.000,00**
	[#] Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 12.000.000,00**
	[-] Belanja tagihan air Dinas dan UPTD BLK					**Rp. 12.000.000,00**
	Beban Jasa air Spesifikasi : -	12 x 1000000	Bulan Rupiah	1,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp. 209.000.000,00**
	[#] Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 209.000.000,00**
	[-] Belanja tagihan listrik Dinas dan UPTD BLK					**Rp. 209.000.000,00**
	Beban Jasa listrik Spesifikasi : -	11 x 19000000	Bulan Rupiah	1,00	0 %	Rp. 209.000.000,00
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp. 32.000.000,00**
	[#] Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 32.000.000,00**
	[-] Belanja tagihan internet Dinas dan UPTD BLK					**Rp. 32.000.000,00**
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi : -	10 x 3200000	Bulan Rupiah	1,00	0 %	Rp. 32.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 260.500.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	**Formulir RKA-BELANJA SKPD**
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinperinaker Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 277.179.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 300.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 277.179.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 277.179.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 277.179.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 277.179.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 36.940.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 36.940.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 671.500,00**
	[#] Penyediaan Jasa Kebersihan dan Peralatan/Bahan Kebersihan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 671.500,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Fotocopy					**Rp. 671.500,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	2238	Lembar	300,00	0 %	Rp. 671.400,00
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	100	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 528.000,00**
	[#] Penyediaan Jasa Kebersihan dan Peralatan/Bahan Kebersihan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 528.000,00**
	[-] Piket Posko Lebaran					**Rp. 528.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	4 x 2 x 1	Meter Meter Buah	66.000,00	0 %	Rp. 528.000,00
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp. 24.347.000,00**
	[#] Penyediaan Jasa Kebersihan dan Peralatan/Bahan Kebersihan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 24.347.000,00**
	[-] Peralatan dan Bahan Kebersihan					**Rp. 24.347.000,00**
	Kain Pel Spesifikasi : Extra Replace Mop	7	Buah	142.000,00	0 %	Rp. 994.000,00
	Gayung Spesifikasi : Tanggung; Plastik	26	Buah	13.000,00	0 %	Rp. 338.000,00
	sabun cuci piring Spesifikasi : 900ml	36	Buah	30.000,00	0 %	Rp. 1.080.000,00
	Sabun cuci tangan Spesifikasi : -	36	Buah	30.000,00	0 %	Rp. 1.080.000,00
	Sapu Spesifikasi : Cemara	20	Buah	18.000,00	0 %	Rp. 360.000,00
	Sapu Lidi Spesifikasi : -	20	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Sapu Spesifikasi : Lowo-lowo, Bambu / Ijuk	5	Buah	42.000,00	0 %	Rp. 210.000,00
	Tissue Spesifikasi : Kotak, 200 play sheets/ 2 ply	100	Buah	22.000,00	0 %	Rp. 2.200.000,00
	sulak Spesifikasi : Sulak Kecil	20	Buah	33.000,00	0 %	Rp. 660.000,00
	Toilet Colour Ball Spesifikasi : 12bungkus	36	Buah	47.000,00	0 %	Rp. 1.692.000,00
	Keset Spesifikasi : Keset Karet; 180 x 120cm	2	Buah	212.000,00	0 %	Rp. 424.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	keset Karet Spesifikasi : Karet; 40 x 60	5	Buah	71.000,00	0 %	Rp. 355.000,00
	Sabit/arit Spesifikasi : -	10	Buah	50.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Pembersih Spesifikasi : Lantai, 900 ml / 800 ml (Refill)	36	Buah	28.000,00	0 %	Rp. 1.008.000,00
	Pembersih Spesifikasi : Porselin/Keramik, 3.7 ml	36	Buah	63.000,00	0 %	Rp. 2.268.000,00
	Pembersih Spesifikasi : Kaca, kecil; 500 ml	24	Buah	23.000,00	0 %	Rp. 552.000,00
	Pewangi Spesifikasi : Ruangan, Refill	30	Buah	64.000,00	0 %	Rp. 1.920.000,00
	Serbet makan Spesifikasi : Kain	10	Buah	14.000,00	0 %	Rp. 140.000,00
	Sikat Spesifikasi : WC, Kayu / ijuk	20	Buah	21.000,00	0 %	Rp. 420.000,00
	Sampo Mobil Spesifikasi : -	10	Buah	16.000,00	0 %	Rp. 160.000,00
	Selang Air Spesifikasi : 5/8	1	Buah	678.000,00	0 %	Rp. 678.000,00
	Kain Pel Spesifikasi : Biasa	6	Buah	22.000,00	0 %	Rp. 132.000,00
	Tongkat Pel Spesifikasi : -	10	Buah	45.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Lap Kaca Spesifikasi : -	11	Buah	108.000,00	0 %	Rp. 1.188.000,00
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : otomatis	6	Buah	333.000,00	0 %	Rp. 1.998.000,00
	Tempat Sampah Spesifikasi : Pakai Tutup, Besar; Plastik	8	Buah	105.000,00	0 %	Rp. 840.000,00
	Ember Plastik Spesifikasi : Sedang	10	Buah	50.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Kit Black Magic Spesifikasi : -	12	Buah	38.000,00	0 %	Rp. 456.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kunci silinder (muller) Spesifikasi : -	8	Buah	75.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Keset Spesifikasi : Kain/Karet	12	Buah	62.000,00	0 %	Rp. 744.000,00
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 1.873.500,00**
	[#] Penyediaan Jasa Kebersihan dan Peralatan/Bahan Kebersihan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.873.500,00**
	[-] Alat Dapur					**Rp. 752.000,00**
	Tea set Spesifikasi : cangkir, lepek, tempat gula, teh, kopi	1	Buah	752.000,00	0 %	Rp. 752.000,00
	[-] Peralatan dan Bahan Kebersihan					**Rp. 1.121.500,00**
	Kanebo Spesifikasi : -	5	Buah	35.000,00	0 %	Rp. 175.000,00
	Sponge Spesifikasi : -	35	Buah	7.500,00	0 %	Rp. 262.500,00
	Box Tissue Spesifikasi : -	6	Buah	114.000,00	0 %	Rp. 684.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 9.520.000,00**
	[#] Penyediaan Jasa Kebersihan dan Peralatan/Bahan Kebersihan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 9.520.000,00**
	[-] Piket Posko Lebaran					**Rp. 6.650.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	19 x 10	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 2.090.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	19 x 10 x 0.8	Orang Kali Persen	30.000,00	0 %	Rp. 4.560.000,00
	[-] Rapat persiapan dan evaluasi posko lebaran					**Rp. 2.870.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	70 x 1	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 770.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	70 x 1	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 230.739.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 218.283.000,00**
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**Rp. 217.983.000,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 217.983.000,00**
	[-] Gaji jasa tenaga kebersihan					**Rp. 26.400.000,00**
	Tenaga Administrasi DINPERINAKER Spesifikasi : -	1 x 12	Orang Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 26.400.000,00
	[-] Gaji Tenaga Kontrak SK Walikota					**Rp. 34.983.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tenaga Kontrak SK Walikota (waktu kerja 7 jam) Spesifikasi : -	1 x 13	Orang Bulan	2.691.000,00	0 %	Rp. 34.983.000,00
	[-] Gaji Tenaga Non ASN SK Dinas					**Rp. 156.600.000,00**
	Tenaga Administrasi DINPERINAKER Spesifikasi : -	3 x 12	Orang Bulan	2.050.000,00	0 %	Rp. 73.800.000,00
	Tenaga Administrasi DINPERINAKER Spesifikasi : -	2 x 12	Orang Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 52.800.000,00
	Tenaga Operator IT, Pengalaman Kerja di Pemkot lebih dari 8 tahun Spesifikasi : meliputi : Teknis jaringan, Entri data, Pengisi ko...	1 x 12	Orang Bulan	2.500.000,00	0 %	Rp. 30.000.000,00
5.1.02.02.01.0051	**Belanja Jasa Pengolahan Sampah**					**Rp. 300.000,00**
	[#] Penyediaan Jasa Kebersihan dan Peralatan/Bahan Kebersihan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 300.000,00**
	[-] Retribusi Sampah					**Rp. 300.000,00**
	Retribusi Kebersihan Spesifikasi : -	12	Bulan	25.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 12.456.000,00**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 9.648.000,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 9.648.000,00**
	[-] Premi Asuransi Kesehatan Non ASN SK Dinas					**Rp. 8.304.000,00**
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi : -	1 x 12 x 104000	Orang Bulan Rupiah	1,00	0 %	Rp. 1.248.000,00
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi : -	6 x 12 x 98000	Orang Bulan Rupiah	1,00	0 %	Rp. 7.056.000,00
	[-] Premi Asuransi Kesehatan Non ASN SK Walikota					**Rp. 1.344.000,00**
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi : -	1 x 12 x 112000	Orang Bulan Rupiah	1,00	0 %	Rp. 1.344.000,00
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 1.932.000,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.932.000,00**
	[-] Premi Asuransi JHT Non ASN SK Walikota					**Rp. 1.248.000,00**
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, JHT (3,7 persen) Spesifikasi : -	1 x 12 x 104000	Orang Bulan Rupiah	1,00	0 %	Rp. 1.248.000,00
	[-] Premi Asuransi JKK Non ASN SK Dinas					**Rp. 588.000,00**
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi : -	7 x 12 x 7000	Orang Bulan Rupiah	1,00	0 %	Rp. 588.000,00
	[-] Premi Asuransi JKK Non ASN SK Walikota					**Rp. 96.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi : -	1 x 12 x 8000	Orang Bulan Rupiah	1,00	0 %	Rp. 96.000,00
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp. 876.000,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 876.000,00**
	[-] Premi Asuransi Jaminan Kematian Non ASN SK Dinas					**Rp. 756.000,00**
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi : -	7 x 12 x 9000	Orang Bulan Rupiah	1,00	0 %	Rp. 756.000,00
	[-] Premi Asuransi Jaminan Kematian Non ASN SK Walikota					**Rp. 120.000,00**
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi : -	1 x 12 x 10000	Orang Bulan Rupiah	1,00	0 %	Rp. 120.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 9.500.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 9.500.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 9.500.000,00**
	[#] Penyediaan Jasa Kebersihan dan Peralatan/Bahan Kebersihan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 9.500.000,00**
	[-] Piket Posko Lebaran					**Rp. 9.500.000,00**
	Bantuan Transport Pelayanan di luar jam kerja Spesifikasi : diberikan maks 4 kali sebulan	190	Orang / Kali	50.000,00	0 %	Rp. 9.500.000,00
					Jumlah :	**Rp. 277.179.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	**Formulir RKA-BELANJA SKPD**
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinperinaker Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 108.774.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 106.784.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 108.774.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit
Hasil	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 108.774.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 108.774.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 8.700.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 8.700.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 8.700.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 8.700.000,00**
	[#] Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 8.700.000,00**
	[-] Honorarium PPTK & Kasir					**Rp. 8.700.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 500 juta ...	1 x 12	Orang Bulan	450.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 500 juta ...	1 x 12	Orang Bulan	275.000,00	0 %	Rp. 3.300.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 100.074.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 44.874.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 44.874.000,00**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp. 44.715.000,00**
	[#] Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 44.715.000,00**
	[-] BBM Kendaraan Dinas					**Rp. 43.176.000,00**
	BBM Mobil Jabatan Eselon II b & III (Ka.Dinas/Badan, Ka.Kantor, Kabag) Spesifikasi : BBM Pertamax (4 L/hr x Rp.14.000), max 22 hari/bln	1 x 22 x 12	Kendaraan Hari Bulan	56.000,00	0 %	Rp. 14.784.000,00
	BBM Mobil Operasional Sekretariat Dinas Spesifikasi : BBM Pertamax (3 L/hr x Rp.14.000), max 22 hari/bln	3 x 17 x 12	Kendaraan Hari Bulan	42.000,00	0 %	Rp. 25.704.000,00
	BBM Sepeda Motor Operasional (Roda Tiga) Spesifikasi : BBM Pertamax (2 L/hr x Rp.14.000), max 22 hr/bln	1 x 8 x 12	Kendaraan Hari Bulan	28.000,00	0 %	Rp. 2.688.000,00
	[-] BBM mesin potong rumput					**Rp. 1.539.000,00**
	BBM Mesin Pemotong Rumput Spesifikasi : -	3 x 3 x 12	Liter Kali Bulan	14.250,00	0 %	Rp. 1.539.000,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 159.000,00**
	[#] Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 159.000,00**
	[-] Fotocopy					**Rp. 159.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	530	Lembar	300,00	0 %	Rp. 159.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 13.100.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 13.100.000,00**
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp. 13.100.000,00**
	[#] Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 13.100.000,00**
	[-] Biaya pajak kendaraan					**Rp. 13.100.000,00**
	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 (Station Wagon/Pick Up/sejenis)	6 x 0.8	Kendaraan Persen	1.500.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang Spesifikasi : Sepeda Motor/Kendaraan Bermotor Roda Dua :	17	Kendaraan	300.000,00	0 %	Rp. 5.100.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang Spesifikasi : Kendaraan Bermotor Roda Tiga (Viar/ sejenisnya)	2	Kendaraan	300.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Jasa KIR Spesifikasi : -	2	Unit	100.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 42.100.000,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 42.100.000,00**
5.1.02.03.02.0038	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua**					**Rp. 10.500.000,00**
	[#] Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 10.500.000,00**
	[-] Biaya pemeliharaan					**Rp. 10.500.000,00**
	Service dan suku cadang Spesifikasi : Sepeda Motor/Kendaraan Bermotor Roda Dua :	21	Unit	500.000,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
5.1.02.03.02.0039	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga**					**Rp. 1.000.000,00**
	[#] Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.000.000,00**
	[-] Biaya pemeliharaan					**Rp. 1.000.000,00**
	Service dan suku cadang Spesifikasi : Kendaraan Bermotor Roda (non sampah)	2	Unit	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.03.02.0040	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus**					**Rp. 30.600.000,00**
	[#] Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 30.600.000,00**
	[-] Biaya pemeliharaan					**Rp. 30.600.000,00**
	Service dan suku cadang Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 (Station Wagon/Pick Up/sejenis)	4 x 0.9	Unit Persen	8.500.000,00	0 %	Rp. 30.600.000,00
					Jumlah :	**Rp. 108.774.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	**Formulir RKA-BELANJA SKPD**
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinperinaker Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 49.400.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 180.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 49.400.000,00
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Hasil	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 49.400.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 49.400.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 49.400.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 30.680.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 30.680.000,00**
5.1.02.01.01.0001	**Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi**					**Rp. 25.000.000,00**
	[#] Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 25.000.000,00**
	[-] pemeliharaan gedung kantor Dinperinaker					**Rp. 25.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Bangunan Dan Konstruksi Spesifikasi : -	25000000	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 25.000.000,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 242.000,00**
	[#] Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 242.000,00**
	[-] Fotocopy					**Rp. 242.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	806	Lembar	300,00	0 %	Rp. 241.800,00
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	200	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.848.000,00**
	[#] Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.848.000,00**
	[-] Pembuatan spanduk					**Rp. 1.848.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	7 x 4	Buah Meter	66.000,00	0 %	Rp. 1.848.000,00
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 1.540.000,00**
	[#] Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.540.000,00**
	[-] Belanja umbul-umbul					**Rp. 1.540.000,00**
	Bambu bendera/Umbul-umbul Spesifikasi : -	28	Buah	55.000,00	0 %	Rp. 1.540.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 2.050.000,00**
	[#] Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.050.000,00**
	[-] Jamuan rapat					**Rp. 2.050.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	25 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 550.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	25 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 18.720.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 18.720.000,00**
5.1.02.02.01.0016	**Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum**					**Rp. 18.720.000,00**
	[#] Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 18.720.000,00**
	[-] pemeliharaan gedung kantor Dinperinaker					**Rp. 18.720.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tukang Harian Lepas Pekerjaan Swakelola Spesifikasi : -	3 x 52	Orang Hari	120.000,00	0 %	Rp. 18.720.000,00
					Jumlah :	**Rp. 49.400.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	**Formulir RKA-BELANJA SKPD**
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinperinaker Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 25.780.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 30.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.780.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	54 Unit
Hasil	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 25.780.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 25.780.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 25.780.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 400.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 400.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 400.000,00**
	[#] Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 400.000,00**
	[-] Belanja fotocopy					**Rp. 400.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1333	Lembar	300,00	0 %	Rp. 399.900,00
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	100	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 25.380.000,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 25.380.000,00**
5.1.02.03.02.0118	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel**					**Rp. 2.500.000,00**
	[#] Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.500.000,00**
	[-] pemeliharaan meubeleur					**Rp. 2.500.000,00**
	Perawatan Meubelair Spesifikasi : Ringan	25	Kali	100.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
5.1.02.03.02.0120	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih**					**Rp. 3.600.000,00**
	[#] Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.600.000,00**
	[-] Biaya pemeliharaan					**Rp. 3.600.000,00**
	Mesin potong rumput Spesifikasi : Sedang	2 x 0.9	Unit %	2.000.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**Rp. 10.530.000,00**
	[#] Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 10.530.000,00**
	[-] Biaya pemeliharaan					**Rp. 10.530.000,00**
	AC Split sd 1 PK Spesifikasi : Ringan	13 x 2	Unit Kali	405.000,00	0 %	Rp. 10.530.000,00
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp. 5.250.000,00**
	[#] Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.250.000,00**
	[-] Biaya pemeliharaan					**Rp. 5.250.000,00**
	Personal Komputer (PC) / Laptop Spesifikasi : Sedang	7	Unit	750.000,00	0 %	Rp. 5.250.000,00
5.1.02.03.02.0411	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya**					**Rp. 3.500.000,00**
	[#] Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.500.000,00**
	[-] Biaya pemeliharaan					**Rp. 3.500.000,00**
	Printer Spesifikasi : Sedang	7	Unit	500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
					Jumlah :	**Rp. 25.780.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Kegiatan	: 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: IKM di Kota Pekalongan, DINPERINAKER, Pemerintah Kota Pekalongan Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 31.730.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 41.600.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	75,34 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 31.730.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen
Hasil	Persentase kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dilaksanakan	4.0 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 31.730.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 31.730.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 1.200.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 1.200.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 1.200.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 1.200.000,00**
	[#] Fasilitasi Kelembagaan Sentra Industri **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.200.000,00**
	[-] Fasilitasi Kelembagaan Sentra Industri					**Rp. 1.200.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	6	Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 30.530.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 1.310.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 1.310.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 122.000,00**
	[#] Fasilitasi Kelembagaan Sentra Industri **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 122.000,00**
	[-] Fasilitasi Kelembagaan Sentra Industri					**Rp. 200,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	200	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 200,00
	[-] Penggandaan					**Rp. 121.800,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	406	Lembar	300,00	0 %	Rp. 121.800,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.188.000,00**
	[#] Fasilitasi Kelembagaan Sentra Industri **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.188.000,00**
	[-] Fasilitasi Kelembagaan Sentra Industri					**Rp. 1.188.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	3 x 1 x 6	Meter Meter Lembar	66.000,00	0 %	Rp. 1.188.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 240.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 240.000,00**
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp. 240.000,00**
	[#] Fasilitasi Kelembagaan Sentra Industri **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 240.000,00**
	[-] Fasilitasi Kelembagaan Sentra Industri					**Rp. 240.000,00**
	Banpot caraka Spesifikasi : -	1 x 6	Orang Kali	40.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 28.980.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 28.980.000,00**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 28.980.000,00**
	[#] Fasilitasi Kelembagaan Sentra Industri **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 28.980.000,00**
	[-] Fasilitasi Kelembagaan Sentra Industri					**Rp. 28.980.000,00**
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30 x 6	Orang Kali	161.000,00	0 %	Rp. 28.980.000,00
					Jumlah :	**Rp. 31.730.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	**Formulir RKA-BELANJA SKPD**
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Kegiatan	: 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: IKM di Kota Pekalongan, DINPERINAKER, Pemerintah Kota Pekalongan Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 42.830.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 45.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	75,34 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 42.830.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen
Hasil	Persentase kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dilaksanakan	4.0 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 42.830.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 42.830.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 1.200.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 1.200.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 1.200.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 1.200.000,00**
	[#] Pelatihan Produksi Bersih Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.200.000,00**
	[-] PPTK / Kasir Kegiatan					**Rp. 1.200.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	6 x 1	Orang Orang	200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 41.630.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 5.885.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 5.885.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 183.000,00**
	[#] Pelatihan Produksi Bersih **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 183.000,00**
	[-] Penggandaan					**Rp. 183.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	610	Lembar	300,00	0 %	Rp. 183.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 792.000,00**
	[#] Fasilitasi TKDN IK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 198.000,00**
	[-] spanduk					**Rp. 198.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	3 x 1 x 1	Meter Meter Buah	66.000,00	0 %	Rp. 198.000,00
	[#] Fasiltasi Pelaporan Produksi SIINas **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 198.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	3 x 1 x 1	Meter Meter Buah	66.000,00	0 %	Rp. 198.000,00
	[#] Pelatihan Kemasan / Desain Hijab / Konveksi / Pengembangan Produk / Manajemen Mutu / Digital Marketing **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 198.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	3 x 1 x 1	Meter Meter Buah	66.000,00	0 %	Rp. 198.000,00
	[#] Pelatihan Produksi Bersih **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 198.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	3 x 1 x 1	Meter Meter Buah	66.000,00	0 %	Rp. 198.000,00
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 4.500.000,00**
	[#] Pelatihan Kemasan / Desain Hijab / Konveksi / Pengembangan Produk / Manajemen Mutu / Digital Marketing **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.250.000,00**
	[-] Bahan Pelatihan					**Rp. 2.250.000,00**
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi : -	45 x 50000	Orang Rupiah	1,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
	[#] Pelatihan Produksi Bersih **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.250.000,00**
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi : -	45 x 50000	Orang Rupiah	1,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 410.000,00**
	[#] Rapat internal **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 410.000,00**
	[-] Makan rapat internal					**Rp. 300.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	10 x 1	Orang Hari	30.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[-] snack rapat internal					**Rp. 110.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	10 x 1	Orang Hari	11.000,00	0 %	Rp. 110.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 160.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 160.000,00**
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp. 160.000,00**
	[#] Fasilitasi TKDN IK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 40.000,00**
	[-] banpot caraka					**Rp. 40.000,00**
	Banpot caraka Spesifikasi : -	1 x 1	Orang Kali	40.000,00	0 %	Rp. 40.000,00
	[#] Fasiltasi Pelaporan Produksi SIINas **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 40.000,00**
	Banpot caraka Spesifikasi : -	1 x 1	Orang Kali	40.000,00	0 %	Rp. 40.000,00
	[#] Pelatihan Kemasan / Desain Hijab / Konveksi / Pengembangan Produk / Manajemen Mutu / Digital Marketing **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 40.000,00**
	Banpot caraka Spesifikasi : -	1 x 1	Orang Kali	40.000,00	0 %	Rp. 40.000,00
	[#] Pelatihan Produksi Bersih **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 40.000,00**
	Banpot caraka Spesifikasi : -	1 x 1	Orang Kali	40.000,00	0 %	Rp. 40.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 35.585.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 35.585.000,00**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 35.585.000,00**
	[#] Fasilitasi TKDN IK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 8.650.000,00**
	[-] ASB 001					**Rp. 8.050.000,00**
	ASB 001 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - PENUH HARI Spesifikasi : -	50 x 1	Orang	161.000,00	0 %	Rp. 8.050.000,00
	[-] Transport Narsum					**Rp. 600.000,00**
	Transportasi Narasumber Spesifikasi : -	1 x 600000	Orang Rupiah	1,00	0 %	Rp. 600.000,00
	[#] Fasiltasi Pelaporan Produksi SIINas **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 8.650.000,00**
	[-] ASB 001					**Rp. 8.050.000,00**
	ASB 001 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - PENUH HARI Spesifikasi : -	50 x 1	Orang Hari	161.000,00	0 %	Rp. 8.050.000,00
	[-] Transport Narsum					**Rp. 600.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Transportasi Narasumber Spesifikasi : -	1 x 600000	Orang Rupiah	1,00	0 %	Rp. 600.000,00
	[#] Pelatihan Kemasan / Desain Hijab / Konveksi / Pengembangan Produk / Manajemen Mutu / Digital Marketing **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 6.495.000,00**
	[-] ASB 005					**Rp. 5.895.000,00**
	ASB 002 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - SETENGAH HARI Spesifikasi : -	45 x 1	Orang Hari	131.000,00	0 %	Rp. 5.895.000,00
	[-] Transport Narsum					**Rp. 600.000,00**
	Transportasi Narasumber Spesifikasi : -	1 x 600000	Orang Rupiah	1,00	0 %	Rp. 600.000,00
	[#] Pelatihan Produksi Bersih **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 11.790.000,00**
	[-] ASB 005					**Rp. 11.790.000,00**
	ASB 002 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - SETENGAH HARI Spesifikasi : -	45 x 2	Orang Hari	131.000,00	0 %	Rp. 11.790.000,00
					Jumlah :	**Rp. 42.830.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	**Formulir RKA-BELANJA SKPD**
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Kegiatan	: 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: April s.d Juni
Kelompok Sasaran	: IKM di Kota Pekalongan, DINPERINAKER, Pemerintah Kota Pekalongan Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 114.300.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 436.527.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	75,34 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 114.300.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen
Hasil	Persentase kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dilaksanakan	4.0 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
Waktu Pelaksanaan	: April s.d Juni
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 114.300.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 114.300.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 7.850.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 7.850.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 7.850.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 7.500.000,00**
	[#] Gaji Tenaga Kegiatan LIK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 7.500.000,00**
	[-] PPTK / Kasir Kegiatan					**Rp. 7.500.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12	Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12	Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 350.000,00**
	[#] Bangunan Kawasan LIK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 350.000,00**
	[-] Pemeliharaan Kawasan LIK					**Rp. 350.000,00**
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1	Orang / Paket / Pekerjaan	150.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 106.450.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 1.490.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 1.490.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.080.000,00**
	[#] Gazebo LIK Tahap II **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.080.000,00**
	[-] Gazebo LIK Tahap II					**Rp. 1.080.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	3600	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.080.000,00
	[-] Penggandaan					**Rp. 0,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	-	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 410.000,00**
	[#] Gaji Tenaga Kegiatan LIK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 410.000,00**
	[-] Rapat Internal					**Rp. 410.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	10 x 1	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 110.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	10 x 1	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 81.360.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 77.400.000,00**
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**Rp. 77.400.000,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kegiatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 77.400.000,00**
	[-] Gaji Tenaga Kegiatan LIK					**Rp. 77.400.000,00**
	Tenaga Administrasi DINPERINAKER Spesifikasi : -	2 x 12	Orang Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 52.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tenaga Administrasi DINPERINAKER Spesifikasi : -	1 x 12	Orang Bulan	2.050.000,00	0 %	Rp. 24.600.000,00
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 3.960.000,00**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 3.456.000,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.456.000,00**
	[-] BPJS Kesehatan					**Rp. 3.456.000,00**
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi : -	3 x 12 x 96000	Orang Bulan Rupiah	1,00	0 %	Rp. 3.456.000,00
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 216.000,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 216.000,00**
	[-] JKK					**Rp. 216.000,00**
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi : -	3 x 12 x 6000	Orang Bulan Rupiah	1,00	0 %	Rp. 216.000,00
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp. 288.000,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 288.000,00**
	[-] JKM					**Rp. 288.000,00**
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi : -	3 x 12 x 8000	Orang Bulan Rupiah	1,00	0 %	Rp. 288.000,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 20.000.000,00**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp. 20.000.000,00**
5.1.02.03.03.0012	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar**					**Rp. 20.000.000,00**
	[#] Bangunan Kawasan LIK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 20.000.000,00**
	[-] Kawasan LIK					**Rp. 20.000.000,00**
	Pemeliharaan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Spesifikasi : -	20000000	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 3.600.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 3.600.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 3.600.000,00**
	[#] Bangunan Kawasan LIK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.600.000,00**
	[-] Monitoring dan evaluasi lapangan					**Rp. 3.600.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	3 x 4 x 10	Orang Kali Bulan	30.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 0,00**
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**Rp. 0,00**
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**					**Rp. 0,00**
5.2.03.01.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**					**Rp. 0,00**
5.2.03.01.01.0001	**Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor**					**Rp. 0,00**
	[#] Gazebo LIK Tahap II Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 0,00**
	[-] Gazebo LIK Tahap II					**Rp. 0,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	ASB GEDUNG 002 PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI SEDERHANA Spesifikasi : Bangunan gedung negara dan rumah negara Tipe C, D ...	-	Meter Meter %	4.710.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Spesifikasi : -	-	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 0,00
	[-] PPKOM / Pejabat Pengadaan					**Rp. 0,00**
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 jut...	-	Orang / Paket / Pekerjaan	250.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta	-	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[#] Revitalisasi Pengolahan Limbah **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 0,00**
	[-] Revitalisasi Pengolahan Limbah					**Rp. 0,00**
	ASB GEDUNG 002 PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI SEDERHANA Spesifikasi : Bangunan gedung negara dan rumah negara Tipe C, D ...	-	Meter Meter %	4.710.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Spesifikasi : -	-	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 0,00
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Spesifikasi : -	-	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 0,00
5.2.03.01.01.0012	**Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar**					**Rp. 0,00**
	[#] Gazebo LIK Tahap II **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 0,00**
	[-] PPKOM / Pejabat Pengadaan					**Rp. 0,00**
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai paket pekerjaan di atas 200 juta s.d 500 jut...	-	Orang / Paket / Pekerjaan	1.000.000,00	0 %	Rp. 0,00
					Jumlah :	**Rp. 114.300.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	**Formulir RKA-BELANJA SKPD**
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Kegiatan	: 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: April s.d Desember
Kelompok Sasaran	: IKM di Kota Pekalongan, DINPERINAKER, Pemerintah Kota Pekalongan Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 88.850.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 110.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	75,34 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 88.850.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen
Hasil	Persentase kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dilaksanakan	4.0 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
Waktu Pelaksanaan	: April s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 88.850.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 38.850.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 1.200.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 1.200.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 1.200.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 1.200.000,00**
	[#] Fasilitasi Sertifikasi Merk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.200.000,00**
	[-] Fasilitasi Sertifikasi Merk					**Rp. 1.200.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6	Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 37.650.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 1.250.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 1.250.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 458.000,00**
	[#] Fasilitasi Sertifikasi Merk **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 458.000,00**
	[-] Fasilitasi Sertifikasi Batik Mark					**Rp. 457.800,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1526	Lembar	300,00	0 %	Rp. 457.800,00
	[-] Fasilitasi Sertifikasi Merk					**Rp. 200,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	-	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 0,00
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	200	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 792.000,00**
	[#] Fasilitasi Sertifikasi Merk **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 396.000,00**
	[-] Fasilitasi Sertifikasi Merk					**Rp. 396.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	3 x 2	Meter Meter	66.000,00	0 %	Rp. 396.000,00
	[#] Sosialisasi Sertifikasi Halal **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 396.000,00**
	[-] Sosialisasi Sertifikasi Halal					**Rp. 396.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	3 x 2	Meter Meter	66.000,00	0 %	Rp. 396.000,00
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 0,00**
	[#] Fasilitasi SKKNI **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 0,00**
	[-] Fasilitasi SKKNI					**Rp. 0,00**
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi : -	-	Orang Rupiah	1,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 17.860.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 160.000,00**
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp. 160.000,00**
	[#] Fasilitasi Sertifikasi Merk **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 160.000,00**
	[-] Fasilitasi SKKNI					**Rp. 160.000,00**
	Banpot caraka Spesifikasi : -	2 x 2	Orang Kali	40.000,00	0 %	Rp. 160.000,00
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp. 2.700.000,00**
5.1.02.02.05.0043	**Belanja Sewa Hotel**					**Rp. 2.700.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Fasilitasi SNI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.700.000,00**
	[-] Fasilitasi Sertifikasi Batik Mark					**Rp. 2.700.000,00**
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III, II dan I Spesifikasi : Jawa Tengah	2 x 2	Orang / Kamar Hari %	675.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
5.1.02.02.09	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**					**Rp. 15.000.000,00**
5.1.02.02.09.0014	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus**					**Rp. 15.000.000,00**
	[#] Fasilitasi Sertifikasi Batik Mark Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 0,00**
	[-] Fasilitasi Sertifikasi Batik Mark					**Rp. 0,00**
	Jasa Sertifikasi Merk Spesifikasi : -	-	Produk Rupiah	1,00	0 %	Rp. 0,00
	[#] Fasilitasi Sertifikasi Merk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 15.000.000,00**
	[-] Fasilitasi Sertifikasi Merk					**Rp. 15.000.000,00**
	Jasa Sertifikasi Merk Spesifikasi : -	30 x 500000	Orang Rupiah	1,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	[#] Fasilitasi SNI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 0,00**
	[-] Fasilitasi SNI					**Rp. 0,00**
	Jasa Sertifikasi Merk Spesifikasi : -	-	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 18.540.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 18.540.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 720.000,00**
	[#] Fasilitasi Sertifikasi Merk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 720.000,00**
	[-] Sosialisasi Sertifikasi Halal					**Rp. 720.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	8 x 3	Kali Orang	30.000,00	0 %	Rp. 720.000,00
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 17.820.000,00**
	[#] Fasilitasi Sertifikasi Batik Mark Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 0,00**
	[-] Fasilitasi Sertifikasi Batik Mark					**Rp. 0,00**
	Transportasi Narasumber Spesifikasi : -	-	Orang Rupiah	1,00	0 %	Rp. 0,00
	ASB 001 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - PENUH HARI Spesifikasi : -	-	Orang Hari	161.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[#] Fasilitasi Sertifikasi Merk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 8.770.000,00**
	[-] Fasilitasi Sertifikasi Merk					**Rp. 8.770.000,00**
	ASB 001 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - PENUH HARI Spesifikasi : -	50 x 1	Orang Hari	161.000,00	0 %	Rp. 8.050.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	8 x 3	Kali Orang	30.000,00	0 %	Rp. 720.000,00
	[#] Fasilitasi SKKNI **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 0,00**
	[-] Fasilitasi SKKNI					**Rp. 0,00**
	ASB 001 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - PENUH HARI Spesifikasi : -	-	Orang Hari	161.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[#] Fasilitasi SNI **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.000.000,00**
	[-] Sosialisasi Sertifikasi Halal					**Rp. 1.000.000,00**
	Transportasi Narasumber Spesifikasi : -	2 x 500000	Orang Rupiah	1,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	ASB 001 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - PENUH HARI Spesifikasi : -	-	Orang Hari	161.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[#] Sosialisasi Sertifikasi Halal **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 8.050.000,00**
	ASB 001 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - PENUH HARI Spesifikasi : -	50 x 1	Orang Hari	161.000,00	0 %	Rp. 8.050.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 50.000.000,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 50.000.000,00**
5.2.02.01	**Belanja Modal Alat Besar**					**Rp. 50.000.000,00**
5.2.02.01.01	**Belanja Modal Alat Besar Darat**					**Rp. 50.000.000,00**
5.2.02.01.01.0011	**Belanja Modal Mesin Proses**					**Rp. 50.000.000,00**
	[#] Hibah mesin jahit **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 50.000.000,00**
	[-] Hibah mesin jahit					**Rp. 50.000.000,00**
	Pekerjaan Spesifikasi : -	1 x 50000000	Pekerjaan	1,00	0 %	Rp. 50.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 88.850.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	**Formulir RKA-BELANJA SKPD**
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Kegiatan	: 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Juli s.d September
Kelompok Sasaran	: IKM di Kota Pekalongan, DINPERINAKER, Pemerintah Kota Pekalongan Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 111.850.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	75,34 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 111.850.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen
Hasil	Persentase kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dilaksanakan	4.0 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
Waktu Pelaksanaan	: Juli s.d September
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 111.850.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 111.850.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 1.800.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 1.800.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 1.800.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 1.350.000,00**
	[#] Fasilitasi/Sosialisasi Produk Unggulan Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.350.000,00**
	[-] Honor Kasir Kegiatan					**Rp. 1.350.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6	Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 450.000,00**
	[#] Kajian dan Analisis Produk Unggulan Daerah Kota Pekalongan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 0,00**
	[-] PPKOM / Pejabat Pengadaan					**Rp. 0,00**
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	-	Pekerjaan	150.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[#] Kajian Sistem Informasi Manajemen Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 450.000,00**
	[-] Pejabat Pengadaan					**Rp. 200.000,00**
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta	1	Orang	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	[-] PPKOM / Pejabat Pengadaan					**Rp. 250.000,00**
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1	Orang	250.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 110.050.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 3.528.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 3.528.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 276.000,00**
	[#] Kajian dan Analisis Produk Unggulan Daerah Kota Pekalongan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 276.000,00**
	[-] Penggandaan					**Rp. 276.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	920	Lembar	300,00	0 %	Rp. 276.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 792.000,00**
	[#] Kajian dan Analisis Produk Unggulan Daerah Kota Pekalongan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 792.000,00**
	[-] Spanduk Kegiatan					**Rp. 792.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	3 x 4	Meter Meter	66.000,00	0 %	Rp. 792.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 2.460.000,00**
	[#] Kajian dan Analisis Produk Unggulan Daerah Kota Pekalongan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.460.000,00**
	[-] Rapat Internal					**Rp. 2.460.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	15 x 4	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 660.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	15 x 4	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 98.080.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 80.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 0,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Fasilitasi/Sosialisasi Produk Unggulan Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 0,00**
	[-] Honor Narasumber Fasilitasi/Sosialisasi Produk Unggulan Daerah					**Rp. 0,00**
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	-	Orang Kali	1.000.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp. 80.000,00**
	[#] Kegiatan Sosialisasi SNI/Katalog Elektronik/ dll Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 80.000,00**
	[-] Banpot caraka					**Rp. 80.000,00**
	Banpot caraka Spesifikasi : -	2 x 1	Orang Kali	40.000,00	0 %	Rp. 80.000,00
5.1.02.02.09	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**					**Rp. 98.000.000,00**
5.1.02.02.09.0004	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan**					**Rp. 98.000.000,00**
	[#] Kajian dan Analisis Produk Unggulan Daerah Kota Pekalongan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 0,00**
	[-] Kajian dan Analisis Produk Unggulan Daerah Kota Pekalongan					**Rp. 0,00**
	Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan Spesifikasi : -	-	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 0,00
	[#] Kajian Sistem Informasi Manajemen Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 98.000.000,00**
	[-] Kajian Sistem Informasi Manajemen					**Rp. 98.000.000,00**
	Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan Spesifikasi : -	98000000 x 1	Rupiah Pekerjaan	1,00	0 %	Rp. 98.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 8.442.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 8.442.000,00**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 8.442.000,00**
	[#] Fasilitasi/Sosialisasi Produk Unggulan Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.512.000,00**
	[-] Transport lokal Fasilitasi/Sosialisasi Produk Unggulan Daerah					**Rp. 4.512.000,00**
	ASB 003 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA PEGAWAI - DALAM KANTOR - PENUH HARI Spesifikasi : -	47	Orang	96.000,00	0 %	Rp. 4.512.000,00
	[#] Kegiatan Sosialisasi SNI/Katalog Elektronik/ dll Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.930.000,00**
	[-] Transport lokal Kegiatan Sosialisasi SNI/Katalog Elektronik/ dll					**Rp. 3.930.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	ASB 002 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - SETENGAH HARI Spesifikasi : -	30	Orang / Kali	131.000,00	0 %	Rp. 3.930.000,00
					Jumlah :	**Rp. 111.850.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
Kegiatan	: 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Juni
Kelompok Sasaran	: IKM Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 7.470.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 13.640.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	25,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.470.000,00
Keluaran	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen
Hasil	Persentase pelaksanaan kegiatan rekomendasi Penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/Kota	30 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Juni
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 7.470.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 7.470.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 1.200.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 1.200.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 1.200.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 1.200.000,00**
	[#] Verifikasi Teknis OSS / SIINas / Merk **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.200.000,00**
	[-] Verifikasi Teknis / Monitoring IKM					**Rp. 1.200.000,00**
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	6 x 1	Bulan Orang	200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 6.270.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 870.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 870.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 460.000,00**
	[#] Verifikasi Teknis OSS / SIINas / Merk **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 460.000,00**
	[-] Penggandaan					**Rp. 460.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1533	Lembar	300,00	0 %	Rp. 459.900,00
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	100	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 410.000,00**
	[#] Verifikasi Teknis OSS / SIINas / Merk **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 410.000,00**
	[-] Rapat Internal					**Rp. 410.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	10	Orang	11.000,00	0 %	Rp. 110.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	10	Orang	30.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 5.400.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 5.400.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 5.400.000,00**
	[#] Verifikasi Teknis OSS / SIINas / Merk **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 5.400.000,00**
	[-] Verifikasi Teknis / Monitoring IKM					**Rp. 5.400.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	3 x 5 x 12	Orang Kali Bulan	30.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
					Jumlah :	**Rp. 7.470.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
Kegiatan	: 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: April s.d Juni
Kelompok Sasaran	: Industri, Sentra IKM, IKM Kota Pekalongan Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 30.800.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 120.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)	100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.800.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen
Hasil	Persentase kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan	33 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Waktu Pelaksanaan	: April s.d Juni
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 30.800.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 30.800.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 1.200.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 1.200.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 1.200.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 1.200.000,00**
	[#] Updating Data IKM **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.200.000,00**
	[-] Honor kasir kegiatan					**Rp. 1.200.000,00**
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6	Bulan %	200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 29.600.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 7.230.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 7.230.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 270.000,00**
	[#] Updating Data IKM **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 270.000,00**
	[-] Perlengkapan Updating Data IKM					**Rp. 270.000,00**
	Ballpoint Spesifikasi : 1	27	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 162.000,00
	Stopmap Spesifikasi : kertas folio	27	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 108.000,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.202.400,00**
	[#] Updating Data IKM **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.202.400,00**
	[-] Penggandaan					**Rp. 1.202.400,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	4008	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.202.400,00
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	-	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 792.000,00**
	[#] Updating Data IKM **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 792.000,00**
	[-] Spanduk Kegiatan					**Rp. 792.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan m x 90 cm	3 x 4	Meter Meter	66.000,00	0 %	Rp. 792.000,00
5.1.02.01.01.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**Rp. 291.600,00**
	[#] Updating Data IKM **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 291.600,00**
	[-] Perlengkapan Updating Data IKM					**Rp. 291.600,00**
	Tanda Pengenal Pegawai Spesifikasi : Standart	27 x 0.24	Buah %	45.000,00	0 %	Rp. 291.600,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 4.674.000,00**
	[#] Updating Data IKM **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 4.674.000,00**
	[-] Rapat Internal					**Rp. 984.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	12 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 264.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	12 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 720.000,00
	[-] Sosialisasi kpd Kader Pendataan					**Rp. 3.690.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	45 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 990.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	45 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 13.580.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 13.580.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 1.500.000,00**
	[#] Updating Data IKM **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.500.000,00**
	[-] Sosialisasi kpd Kader Pendataan					**Rp. 1.500.000,00**
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2	Orang	750.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.02.01.0023	**Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan**					**Rp. 10.000.000,00**
	[#] Updating Data IKM **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 10.000.000,00**
	[-] Updating Data IKM					**Rp. 10.000.000,00**
	Jasa Pewawancara Responden Survey Spesifikasi : -	1000	Sampel	10.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp. 80.000,00**
	[#] Updating Data IKM **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 80.000,00**
	[-] Updating Data IKM					**Rp. 80.000,00**
	Banpot caraka Spesifikasi : -	2 x 1	Orang Kali	40.000,00	0 %	Rp. 80.000,00
5.1.02.02.01.0046	**Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi**					**Rp. 2.000.000,00**
	[#] Updating Data IKM **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.000.000,00**
	[-] Updating Data IKM					**Rp. 2.000.000,00**
	Entry Data Spesifikasi : -	1000	Sampel	2.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 8.790.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 8.790.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 7.290.000,00**
	[#] Updating Data IKM **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 7.290.000,00**
	[-] Monev Kegiatan Pendataan					**Rp. 3.240.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	9 x 12	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 3.240.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Monev Pengawas Kelurahan					**Rp. 4.050.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	27 x 5	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 4.050.000,00
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 1.500.000,00**
	[#] Updating Data IKM **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.500.000,00**
	[-] Sosialisasi kpd Kader Pendataan					**Rp. 1.500.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	30	Orang	50.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
					Jumlah :	**Rp. 30.800.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	**Formulir RKA-BELANJA SKPD**
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
Kegiatan	: 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 3.31.04.2.01.0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Juli s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Industri, Sentra IKM, IKM Kota Pekalongan Kota Pekalongan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 3.140.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 5.940.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)	100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.140.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen
Hasil	Persentase kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan	33 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.31.04.2.01.0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas
Waktu Pelaksanaan	: Juli s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 3.140.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 3.140.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 3.140.000,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 3.140.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 3.140.000,00**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 3.140.000,00**
	[#] Diseminasi Data Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.140.000,00**
	[-] Diseminasi Data					**Rp. 3.140.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	ASB 003 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA PEGAWAI - DALAM KANTOR - PENUH HARI Spesifikasi : -	40 x 1 x 0.8177084	Orang Hari	96.000,00	0 %	Rp. 3.140.000,00
					Jumlah :	**Rp. 3.140.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO S.T.	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI M.Sc.	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.MM	197210131996032004	ANGGOTA	

PEMERINTAH KOTA
PEKALONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Kota Pekalongan
Telepon : (0285) 421091 - 421093 Ps. 120
Fax : (0285) 424061 - 420914

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada akhirnya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 dapat disajikan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Rencana Kerja (Renja) ini merupakan proses Penyusunan Rencana sebagai penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 ini pada hakikatnya merupakan perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Dengan telah disusunnya Rencana Kinerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait, khususnya Sekretariat Daerah Kota Pekalongan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun serta sarana evaluasi atas pencapaian kinerjanya dengan memperhatikan kriteria komponen-komponen perencanaan, memanfaatkan sistem pengukuran kinerja untuk monitoring kegiatan dan meningkatkan mutu informasi dalam laporan kinerja.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH

NUR PRIYANTOMO, S.E, M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19690310 199603 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN LALU 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Pekalongan..... 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan..... 13
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Pekalongan 19
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 37

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN 38

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 38
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Kota Pekalongan..... 39
3.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 44

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN 51

BAB V PENUTUP 61

5.1. Catatan Penting..... 61
5.2. Kaidah Pelaksanaan 62
5.3. Rencana Tindak Lanjut 62

DAFTAR TABEL

Halaman

2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Pekalongan dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Pekalongan s.d. Tahun 2022 (Tabel T-C.29) 8

2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan (Tabel T-C.30) 15

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 (Tabel. T-C-31) 21

2.4. Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 37

3.1. Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Daerah..... 38

3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan (Tabel T-C.25) 41

3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 (Tabel T-C.33) 45

4.1. Rincian Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan..... 53

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pekalongan merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Pekalongan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Pekalongan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil dan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan kinerja di tahun yang akan datang, maka perlu segera menetapkan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 yang memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang dilengkapi dengan dana indikatif serta sumber dananya dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2024.

Penetapan Rencana Kerja (Renja) ini dimaksudkan sebagai tolok ukur dalam menghitung keberhasilan organisasi Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Daerah Kota Pekalongan yang akan dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Daerah Kota Pekalongan pada akhir tahun anggaran. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang melatarbelakangi penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Pekalongan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Dilingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 68 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan.
13. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah serta sebagai wadah sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan isu-isu strategis tahun 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025, adalah :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Sekretariat Daerah Kota Pekalongan dalam menentukan prioritas program/kegiatan dan kebijakan anggaran tahunan yang berdasarkan APBD;
2. Sebagai standar baku penjabaran tupoksi Sekretariat Daerah Kota Pekalongan, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan;
3. Pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025;
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi;
5. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah dan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menurut prinsip- prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pekalongan tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Pekalongan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Pekalongan.

2.4. *Review* terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Kota Pekalongan

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Berdasarkan Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan, realisasi capaian kinerja Tahun 2023 sebagian besar dalam skala diatas 90,01% dengan kategori sangat tinggi / sangat berhasil.

Ketercapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah tercapai sangat tinggi / sangat berhasil disebabkan karena beberapa faktor antara lain:

a. Wabah Covid 19 sudah terkendali sehingga aktivitas belanja menjadi lebih fleksibel.
b. Peningkatan penyusunan anggaran belanja sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Pekalongan tidak dapat lepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis dimaksud antara lain :

1. Peningkatan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN LALU

Berdasarkan pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan yang disajikan dalam tabel pengukuran kinerja kegiatan, maka untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, dilakukan evaluasi dan analisis efisiensi dan efektivitas pengukuran kinerja setiap indikator kinerja kegiatan, agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, tingkat efisiensi yang dilakukan dan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak dalam rangka perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dan strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan di masa yang akan datang.

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 dengan mendasarkan pada hasil pengukuran setiap indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Ketiga Sekretariat Daerah Kota Pekalongan pada tahun 2023 yang disajikan pada tabel Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2023 terlampir.

Kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Setda tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024, yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021 – 2026 berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun-tahun sebelumnya, sebagai berikut :

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Pekalongan dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Pekalongan s.d. Tahun 2023

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal 2022	Realisasi 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Realisasi 2023			
1	Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi.	Persen	100	100	103,55	100	100	100	100	Tercapai
2	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja.	Persen	100	100	100	100	99,71	99,71	97,31	Tidak Tercapai
3	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum, dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.	Persen	100	100	84,71	100	107,32	107,32	107,32	Tercapai
4	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah.	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
5	Persentase ketersediaan layanan administrasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai

	keuangan, operasional dan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah.									
6	Persentase pelayanan keprotokoleran.	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
7	Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu.	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
8	Persentase Raperda menjadi Perda yang berasal dari eksekutif.	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
9	Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat.	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
10	Persentase kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi-UKM, BUMD, pertanian, perikanan, kelautan, dan ketahanan pangan yang dikoordinasikan.	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
11	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome).	Persen	7	6	10,51	6	7,06	98,87	98,87	Tidak Tercapai

12	Persentase keberhasilan pengadaan barang/jasa.	Persen	100	100	87,5	100	97,5	97,5	97,5	Tidak Tercapai

Berdasarkan Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Pekalongan dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2023 Kota Pekalongan, bahwa tingkat pencapaian kinerja setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023, sebagai berikut :

I. Kesimpulan Capai Berdasarkan Aspek Indikator Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 3 (tiga) indikator program sebagai berikut:
   a. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja
   b. Persentase pelayanan keprotokoleran
   c. Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi

Tujuan strategis 3 (tiga) indikator tersebut adalah meningkatnya layanan masyarakat dan akuntabilitas kinerja.

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan sasaran strategis dan IKU dari ketiga indikator tersebut adalah Nilai SAKIP OPD.

2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

   Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan 3 (tiga) indikator program sebagai berikut:
   a. Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat
   b. Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu
   c. Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif

3. Program Perekonomian dan Pembangunan

   Program Perekonomian dan Pembangunan dengan 2 (dua) indikator program sebagai berikut:

   a. Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi- UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan
   b. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome)

   Tujuan strategis indikator Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Program Perekonomian dan Pembangunan adalah meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan.

   Meningkatnya Capaian Kinerja Pembangunan merupakan sasaran strategis dari kedua program tersebut dan IKU dari kelima indikator dalam kedua program tersebut adalah Persentase Capaian Kinerja Pembangunan.

II. Kesimpulan Capai Berdasarkan Status Ketercapaian

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 3 (tiga) indikator program yaitu persentase ketersediaan laporan capaian kinerja dengan status tercapai 100 persen, persentase pelayanan keprotokoleran dengan status tercapai 100 persen, dan Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi dengan status tercapai 100 persen.

2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan 3 (tiga) indikator program yaitu Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat dengan

status tercapai 100 persen, Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu dengan status tercapai 100 persen, dan Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif dengan status tercapai 100 persen.

3. Program Perekonomian dan Pembangunan dengan 2 (dua) indikator program yaitu Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi-UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan dengan status tercapai 100 dan Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome) dengan status tercapai 98,87 persen.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Analisis efisiensi dan efektivitas pengukuran kinerja setiap indikator kinerja program Kegiatan dan Sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021 yang menunjukkan peran utama dan kontribusi Sekretariat Daerah Kota Pekalongan dalam mendukung tercapaiannya Misi ke 7 dalam RPJMD 2016 – 2021 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien berdasarkan Prinsip – prinsip *Good Governance dan Clean Government*.

Analisis capaian kinerja sasaran dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi yang dilakukan dan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak dengan cara membandingkan antara output dengan *input* baik untuk rencana maupun realisasi, serta penentuan penyebab terjadinya *gap* maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa

pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan, sesuai dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, untuk penyusunan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk memudahkan dalam melakukan analisis capaian kinerja setiap sasaran kinerja, berikut gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output dapat dilihat pada Tabel. T-C.30 berikut :

Tabel. T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan

No.	Indikator Kegiatan	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Sekretariat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	SPM	-	100%	100%	100%	100%	99,39%	N/A	100%	100%	Belum Tercapai, Kegiatan Belum Terealisasikan
2	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	SPM	-	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	Belum Tercapai, Kegiatan Belum Terealisasikan
3	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	SPM	-	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	Belum Tercapai, Kegiatan Belum Terealisasikan
4	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	SPM	-	100%	100%	100%	100%	112,9%	N/A	100%	100%	Belum Tercapai, Kegiatan Belum Terealisasikan

5	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	SPM	-	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	Belum Tercapai, Kegiatan Belum Terealisasikan
6	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	SPM	-	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	Belum Tercapai, Kegiatan Belum Terealisasikan
7	Persentase ketercapaian administrasi keuangan dan operasional kepala daerah	SPM	-	100%	100%	100%	100%	50%	N/A	100%	100%	Belum Tercapai, Kegiatan Belum Terealisasikan
8	Persentase ketercapaian fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah	SPM	-	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	Belum Tercapai, Kegiatan Belum Terealisasikan
9	Persentase Capaian Kinerja Penyusunan Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	SPM	-	100%	100%	100%	100%	94,44%	N/A	100%	100%	Belum Tercapai, Kegiatan Belum Terealisasikan

10	Persentase capaian kinerja bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	SPM	-	100%	100%	100%	100%	99,77%	N/A	100%	100%	Belum Tercapai, Kegiatan Belum Terealisasikan
11	Persentase kegiatan penataan organisasi	SPM	-	100%	100%	100%	100%	102,03%	N/A	100%	100%	Belum Tercapai, Kegiatan Belum Terealisasikan
12	Persentase OPD tertib pelaporan pelaksanaan APBD	SPM	-	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	Belum Tercapai, Kegiatan Belum Terealisasikan
13	Persentase kegiatan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan	SPM	-	100%	100%	100%	100%	97,5%	N/A	100%	100%	Belum Tercapai, Kegiatan Belum Terealisasikan
14	Persentase capaian kinerja penataan administrasi pemerintahan, pengelolaan administrasi kewilayahan dan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	SPM	-	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	Belum Tercapai, Kegiatan Belum Terealisasikan

15	Persentase efektivitas kerja sama daerah	SPM	-	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	Belum Tercapai, Kegiatan Belum Terealisasikan
16	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan BUMD dan BLUD, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	SPM	-	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	Belum Tercapai, Kegiatan Belum Terealisasikan
17	Persentase ketercapaian kinerja fasilitasi keprotokolan, komunikasi tugas pimpinan dan pendokumentasian tugas pimpinan	SPM	-	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	Belum Tercapai, Kegiatan Belum Terealisasikan

2. Perlunya manajemen resiko dalam menghadapi kemungkinan penanganan masalah yang timbul akibat ketidakpahaman publik terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah;
3. Penguatan regulasi dan perbaikan celah-celah regulasi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah agar dapat memperkuat proses perencanaan dan pembinaan yang semakin mengedepankan asas *value for money*;
4. Maturitas organisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah belum diimbangi dengan bertambahnya tingkat layanan terstandar pada unit penunjang teknologi informasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat;
5. Perlunya optimalisasi pengembangan sektor ekonomi kreatif di Kota Pekalongan;
6. Mengoptimalkan koordinasi dan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pimpinan daerah;
7. Peningkatan pelayanan Sistem Informasi Peminjaman Ruang Rapat agar dapat diakses oleh semua OPD dengan baik;
8. Optimalisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
9. Perlu adanya ruang penyimpanan Arsip Inaktif di Sekretariat Daerah;
10. Perlu digitalisasi register surat dinas di Sekretariat Daerah.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 melalui rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target capaian / tolok ukur, dan besaran dana / pagu yang dibutuhkan, *review* rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel. C-31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kota Pekalongan

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kota Pekalongan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			34.844.489	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			34.068.900	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			56.851	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			61.851	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.842	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	7.842	Tambahan pagu untuk penyusunan dokumen Renstra
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.009	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.009	

3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	52.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	52.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			15.368.894	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			16.176.803	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang	15.169.182	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	119 Orang	15.977.091	Penyesuaian pagu karena adanya penambahan ASN di 2025 (Pengadaan CASN Tahun 2024)
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	197.850	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	197.850	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.862	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.862	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			82.337	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			338.667	

7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	82.337	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	338.667	Tambahan pagu untuk pengadaan PSL KDH dan WKDH serta Kepala OPD dalam rangka pelantikan KDH dan WKDH di 2025
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			9.470.599	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			8.387.129	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	80.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	70.000	Rasionalisasi dan efisiensi anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.550.256	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.016.108	Rasionalisasi dan efisiensi anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	144.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	144.500	
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.593.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.420.987	Rasionalisasi dan efisiensi anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah
12	Penyediaan	Kota	Jumlah	2 Paket		Penyediaan	Kota	Jumlah	2 Paket		

	Barang Cetakan dan Penggandaan	Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		66.831	Barang Cetakan dan Penggandaan	Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		66.831	
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	83.445	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	83.445	
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	1.440.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	1.085.258	Rasionalisasi dan efisiensi anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3000 Laporan	4.512.067	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3000 Laporan	4.500.000	Rasionalisasi dan efisiensi anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2.892.482	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2.753.905	
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	27.600	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	27.600	Rasionalisasi dan efisiensi anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah
17	Penyediaan	Kota	Jumlah	12		Penyediaan	Kota	Jumlah	12		Rasionalisasi dan efisiensi

	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1.245.000	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1.173.000	anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.619.882	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.553.305	Rasionalisasi dan efisiensi anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4.642.607	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4.018.296	
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	70 Unit	1.772.640	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	70 Unit	1.665.124	Rasionalisasi dan efisiensi anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah
20	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	2.469.267	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	1.952.472	Rasionalisasi dan efisiensi anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah
21	Pemeliharaan/	Kota	Jumlah	190 Unit		Pemeliharaan/	Kota	Jumlah	190 Unit		

	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		400.700	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		400.700	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			890.719	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			892.249	
22	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	850.719	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	852.249	Penyesuaian pagu BOP
23	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	40.000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	40.000	
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.440.000	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.440.000	
24	Penyediaan	Kota	Jumlah	12 Paket		Penyediaan	Kota	Jumlah	12 Paket		

	Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		840.000	Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		840.000	
25	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	600.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	600.000	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			995.670	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			475.356	
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			995.670	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			475.356	
26	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	9 Dokumen	108.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	9 Dokumen	95.630	Rasionalisasi dan efisiensi anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah
27	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	19 Kasus	805.170	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	19 Kasus	303.870	Rasionalisasi dan efisiensi anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah

28	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1200 Dokumen	82.500	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1200 Dokumen	75.856	Rasionalisasi dan efisiensi anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			14.326.219	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			14.293.199	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			14.326.219	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			14.293.199	
29	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	93 Dokumen	12.968.434	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	93 Dokumen	12.951.914	Rasionalisasi dan efisiensi anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah

30	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	22 Dokumen	454.176	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	22 Dokumen	454.176	

31	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	106 Dokumen	903.609	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	106 Dokumen	887.109	Rasionalisasi dan efisiensi anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			440.994	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			248.430	
	Penataan Organisasi	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			440.994	**Penataan Organisasi**	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			248.430	
32	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	108.994	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	64.323	Rasionalisasi dan efisiensi anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah

33	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	154.000	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	110.107	Rasionalisasi dan efisiensi anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah
34	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	36 Dokumen	178.000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	36 Dokumen	74.000	Rasionalisasi dan efisiensi anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			707.380	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			490.610	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			91.498	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			60.738	
35	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 Laporan	44.050	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 Laporan	28.450	Rasionalisasi dan efisiensi anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah
36	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	47.448	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	32.288	Rasionalisasi dan efisiensi anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah

	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			615.882	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			429.872	
37	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen	227.660	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen	173.500	Rasionalisasi dan efisiensi anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah
38	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4 Dokumen	388.222	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4 Dokumen	256.372	Rasionalisasi dan efisiensi anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			858.996	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.488.240	
	Administrasi Tata Pemerintahan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			788.996	**Administrasi Tata Pemerintahan**	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			403.780	
39	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	349.417	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	71.910	Rasionalisasi dan efisiensi anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah
40	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	247.509	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	197.230	Rasionalisasi dan efisiensi anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah

41	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	192.070	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	134.640	Rasionalisasi dan efisiensi anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			70.000	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.084.460	
42	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 Dokumen	70.000	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 Dokumen	1.084.460	Tambahan pagu untuk fasilitasi Musyawarah Korwill III APEKSI Tahun 2025 di Kota Pekalongan
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			329.860	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			261.780	
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			244.860	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			176.780	
43	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	58.600	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	41.500	Rasionalisasi dan efisiensi anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah

44	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	100.860	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	73.630	Rasionalisasi dan efisiensi anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah
45	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	85.400	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	61.650	Rasionalisasi dan efisiensi anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			85.000	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			85.000	
46	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	85.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	85.000	

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.577.909	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA**	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.133.799	
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.577.909	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.133.799	
47	Fasilitasi Keprotokolan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	345.279	Fasilitasi Keprotokolan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	244.400	Rasionalisasi dan efisiensi anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah
48	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	201 Laporan	815.500	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	201 Laporan	608.191	Rasionalisasi dan efisiensi anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah
49	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	417.130	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	281.208	Rasionalisasi dan efisiensi anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah

Secara keseluruhan, beberapa sub kegiatan mengalami rasionalisasi dan efisiensi anggaran dikarenakan adanya *refocussing* program prioritas dengan menyesuaikan realisasi s.d. triwulan III tahun 2024 dan kemampuan keuangan daerah. Beberapa poin atensi ada pada sub kegiatan Perencanaan, Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah besarannya berbeda dengan rancangan awal karena tambahan anggaran akan digunakan untuk penyusunan dokumen Renstra OPD, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN bertambah karena adanya kenaikan gaji berkala dan penambahan ASN atas pengadaan CASN tahun 2024 di lingkungan Sekretarariat Daerah Kota Pekalongan. Pagu anggaran Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya besarannya mengalami kenaikan yang signifikan dikarenakan untuk memfasilitasi pengadaan seragam PSL untuk pelantikan KDH dan WKDH di tahun 2025. Terakhir untuk sub kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri mengalami kenaikan pagu anggaran dikarenakan untuk memfasilitasi kegiatan Musyawarah Komisariat Wilayah III (Korwil III) APEKSI Tahun 2025 di Kota Pekalongan.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diutamakan yang merupakan usulan-usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat Kota Pekalongan.

Khusus untuk bidang pengawasan, usulan-usulan tersebut tidak dimunculkan/tidak ada.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pembangunan nasional merupakan upaya semua kompnen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan.

Dalam rangka mensinergikan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah Kota Pekalongan, maka berdasarkan Rancangan Awal RKP Tahun 2024 dan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025 dapat disusun hubungan antara Kebijakan Pembangunan Nasional dengan Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Daerah

No	Prioritas Nasional	Prioritas daerah
6	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan : a. Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. b. Meningkatnya penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Pekalongan maka Prioritas Nasional yang berkaitan langsung adalah pada Prioritas ke-6 yaitu Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi. Sejalan dengan hal tersebut dan sesuai dengan tugas Sekretariat Daerah yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, maka terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Pekalongan maka mempunyai kewajiban untuk :

1. Meningkatkan kualitas manajemen dan akuntabilitas organisasi melalui sistem koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal semua kebijakan dan regulasi daerah.
3. Meningkatkan kualitas pengawasan agar lebih terstruktur, dengan azas demokrasi, transparan, dan akuntabel.
4. Meningkatkan pelaksanaan sistem pengendalian intern secara berkelanjutan.
5. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hasil pengawasan yang memang harus disebarluaskan kepada masyarakat.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

Sekretariat Daerah Kota Pekalongan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sehingga program kegiatan di Sekretariat Daerah untuk mendukung prioritas ke-5 (Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan).

Hubungan yang selaras antara Renja dan Renstra, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah tahun 2021-2026.

Setiap Perangkat Daerah bersama-sama melakukan optimalisasi untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Wali Kota Pekalongan Periode Tahun 2021-2026, oleh karena itu Renstra Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 mengadopsi Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan yang tercantum dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan yang tercantum dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 yaitu “**Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius**”.

Sedangkan Misi yang mempunyai keterkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Pekalongan, adalah Misi Ke-7 Pemerintah Kota Pekalongan yaitu :"**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien berdasarkan Prinsip – prinsip *Good Governance dan Clean Government***".

Penetapan tujuan dan sasaran yang akan dicapai secara nyata oleh Sekretariat Daerah Kota Pekalongan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun ke depan, didasarkan pada kriteria khusus (*spesific*), terukur (*measuable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*) serta dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan dan isu utama di Kota Pekalongan.

Adapun rumusan tujuan dan sasaran di dalam Perencanaan Strategis Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026, yaitu :

1. Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik.

   Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

   Formulasi : Komulatif angka tertimbang komponen Penilaian Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah

   Sasaran :

   1.1. Meningkatnya Kapabilitas APIP Sekretariat Daerah Kota Pekalongan.

   Indikator Sasaran 1.1. :

   a. Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
      Formulasi : Nilai hasil akhir dari penjumlahan angka tertimbang dari unsur-unsur Nilai KIP

   b. Level Kapabiltas APIP
      Formulasi : *Hasil Quality Assurance* BPKP atas *Self Assesment* Kapabilatas APIP Sekretariat Daerah

   1.2. Meningkatnya Pengendalian *Intern* dan Akuntabilitas Kinerja

Indikator Sasaran:

a. Level Maturitas SPIP

   Formulasi : Nilai hasil akhir dari penjumlahan angka tertimbang dari unsur-unsur penilaian SPIP.

b. Persentase OPD yang memenuhi kriteria WBK

   Formulasi : Jumlah OPD yang hasil evaluasinya memenuhi kriteria WBK dibagi jumlah seluruh OPD dikalikan 100%.

c. Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Kota Pekalongan

   Formulasi : Nilai hasil akhir dari penjumlahan angka tertimbang dari unsur-unsur evaluasi SAKIP.

Pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 3.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan (Tabel T-C.25)

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0		Thn	Thn	Thn	Thn	Thn	
		2020	2021	1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Tujuan : Kepuasan Masyarakat								
1.1	Sasaran : Nilai SAKIP Setda	80,42	80,75	81	81,25	81,5	81,75	82	82
	Program :								
1.1.2	Presentase ketersediaan laporan capaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	kinerja								
1.1.3	Presentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian , administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.1.4	Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.1.5	Persentase Pelayanan Keprotokoleran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2	Sasaran : Presentase capaian kinerja pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Program :								
1.2.1	Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2.2	Persentase capaian fasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	pemberdayaan masyarakat								
1.2.3	Presentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari Eksekutif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Program :								
1.2.4	Presentase Kegiatan Strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi UKM, BUMD, Petanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2.5	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	7	7	6	6	6	6	6	6

3.3. PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan yang mendukungnya. Indikator kinerja program/kegiatan yang dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek-aspek yang relevan.

Sehingga ditentukan indikator kinerja program/kegiatan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
(Tabel T-C.33)

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

SKPD : SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**								
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**52.460.314.000**				**51.379.257.000**
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indikator Program: Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja**	Kota Pekl.	**100%**	**16.238.654.000**	**DAU**		**100%**	**15.001.622.000**
4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Indikator Kegiatan: Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Pekl.**	**100%**	**61.851.000**	**DAU**		**100%**	**75.250.000**
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekl.	3 Dokume	7.842.000	**DAU**		2 dokumen	3.500.000
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekl.	2 dokumen	2.009.000	**DAU**		2 dokumen	12.000.000
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekl.	15 laporan	52.000.000	**DAU**		25 laporan	59.750.000
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Indikator Kegiatan: Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Pekl.**	**100%**	**16.176.803.000**	**DAU**		**100%**	**14.929.372.000**
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekl.	119 orang	15.977.091.000	**DAU, PAD**		119 orang	14.698.272.000
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekl.	12 dokumen	197.850.000	**DAU**		96 dokumen	211.600.000
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Kota Pekl.	1 laporan	1.862.000	**DAU**		8 laporan	19.500.000

		Tahun SKPD							
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indikator Program: Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum,dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	Kota Pekl.	**100%**	**10.979.701.000**	**DAU**		**100%**	**8.848.806.000**
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Indikator Kegiatan: Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Pekl.**	**100%**	**338.667.000**	**DAU**		**100%**	**87.250.000**
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Pekl.	1 paket	338.667.000	**DAU**		24 paket	87.250.000
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Indikator Kegiatan: Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Pekl.**	**100%**	**7.887.129.000**	**DAU**		**100%**	**6.385.376.000**
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pekl.	4 paket	70.000.000	**DAU**		1 paket	80.000.000
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Pekl.	4 paket	1.016.108.000	**DAU**		12 paket	1.020.725.000
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Pekl.	4 paket	144.500.000	**DAU**		1 paket	170.000.000
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Pekl.	4 paket	1.420.987.000	**DAU**		1 paket	1.591.721.000
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pekl.	2 paket	66.831.000	**DAU**		1 paket	257.500.000
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pekl.	4 dokumen	83.445.000	**DAU**		6.216 dokumen	77.500.000
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pekl.	4 laporan	1.085.258.000	**DAU**		10 laporan	1.085.258.000
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekl.	3.000 laporan	4.500.000.000	**DAU**		1.800 laporan	2.102.672.000
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Indikator Kegiatan : Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Pekl.**	**100%**	**2.753.905.000**	**DAU**		**100%**	**2.376.180.000**
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekl.	4 laporan	27.600.000	**DAU**		12 laporan	26.600.000
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Pekl.	12 laporan	1.173.000.000	**DAU**		12 laporan	969.000.000
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pekl.	12 laporan	1.553.305.000	**DAU**		12 laporan	1.380.580.000
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indikator Program: Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	Kota Pekl.	**100%**	**4.018.296.000**	**DAU**		**100%**	**4.866.312.000**

4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Indikator Kegiatan: Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Pekl.**	**100%**	**4.018.296.000**	**DAU**		**100%**	**4.866.312.000**
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Pekl.	70 unit	1.665.124.000	**DAU**		70 unit	1.456.080.000
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pekl.	7 unit	1.952.472.000	**DAU**		7 unit	3.009.732.000
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pekl.	190 unit	400.700.000	**DAU**		190 unit	400.500.000
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indikator Program: Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan, Operasional dan Kerumahtanggan Sekretariat Daerah**	Kota Pekl.	**100%**	**2.332.249.000**	**DAU**		**100%**	**1.527.956.000**
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Indikator Kegiatan: Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah**	**Kota Pekl.**	**100%**	**892.249.000**	**DAU**		**100%**	**717.956.000**
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pekl.	2 orang/bulan	852.249.000	**PAD**		2 orang	687.956.000
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pekl.	4 orang	40.000.000	**DAU**		4 orang	30.000.000
4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Indikator Kegiatan : Persentase Ketercapaian Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Kota Pekl.**	**100%**	**1.440.000.000**	**DAU**		**100%**	**810.00.000**
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Pekl.	12 paket	840.000.000	**DAU**		12 paket	480.000.000
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Pekl.	12 paket	600.000.000	**DAU**		12 paket	330.000.000
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indikator Program: Persentase Ketercapaian Tata Laksana, Penataan Kelembagaan Serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi**	Kota Pekl.	**100%**	**248.340.000**	**DAU**		**100%**	**447.662.000**
4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**Indikator Kegiatan : Indeks Kelembagaan Kota**	**Kota Pekl.**	**79/100**	**248.340.000**	**DAU**		**79/100**	**447.662.000**
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Pekl.	2 dokumen	64.323.000	**DAU**		2 dokumen	110.662.000
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Pekl.	2 laporan	110.107.000	**DAU**		2 laporan	157.000.000
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Pekl.	36 dokumen	74.000.000	**DAU**		36 dokumen	180.000.000
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indikator Program: Persentase Pelayanan Keprotokoleran**	Kota Pekl.	**100%**	**1.133.799.000**	**DAU**		**100%**	**1.244.310.000**

4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Indikator Kegiatan: Persentase Ketercapaian Kinerja Fasilitasi Keprotokolan, Komunikasi Tugas Pimpinan dan Pendokumentasian Tugas Pimpinan**	**Kota Pekl.**	**100%**	**1.133.799.000**	**DAU**		**100%**	**1.244.310.000**
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kota Pekl.	12 laporan	244.400.000	**DAU**		12 laporan	283.728.000
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Pekl.	201 laporan	608.191.000	**DAU**		191 laporan	610.582.000
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Pekl.	12 laporan	281.208.000	**DAU**		12 laporan	350.000.000
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Indikator Program: Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif**	Kota Pekl.	**100%**	**475.356.000**	**DAU**		**100%**	**1.010.824.000**
4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Indikator Kegiatan: Persentase Capaian Kinerja Penyusunan Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum**	**Kota Pekl.**	**100%**	**475.356.000**	**DAU**		**100%**	**1.010.824.000**
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kota Pekl.	9 dokumen	95.630.000	**DAU**		9 dokumen	108.000.000
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Pekl.	19 kasus	303.870.000	**DAU**		21 kasus	818.824.000
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kota Pekl.	1.200 dokumen	75.856.000	**DAU**		1.000 dokumen	84.000.000
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Indikator Program: Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat**	Kota Pekl.	**100%**	**14.293.199.000**	**DAU**		**100%**	**16.039.090.000**
4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Indikator Kegiatan: Persentase Capaian Kinerja Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat**	**Kota Pekl.**	**100%**	**14.293.199.000**	**DAU**		**100%**	**16.039.090.000**
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Pekl.	93 dokumen	12.951.914.000	**DAU**		30 dokumen	14.436.520.000
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kota Pekl.	22 dokumen	454.176.000	**DAU**		2.181 dokumen	660.000.000
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata,	Kota Pekl.	106 dokumen	887.109.000	**DAU**		2 dokumen	942.570.000

		Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas							
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Indikator Program: Penyusunan Dokumen LPPD dan LKPJ Tepat Waktu**	Kota Pekl.	**100%**	**1.488.240.000**	**DAU**		**100%**	**871.986.000**
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Indikator Kegiatan: Persentase Capaian Kinerja Penataan Administrasi Pemerintahan, Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**Kota Pekl.**	**100%**	**403.780.000**	**DAU**		**100%**	**796.876.000**
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Pekl.	1 dokumen	71.910.000	**DAU**		1 dokumen	349.417.000
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Pekl.	3 dokumen	197.230.000	**DAU**		3 dokumen	248.389.000
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Pekl.	3 dokumen	134.640.000	**DAU**		2 dokumen	199.070.000
4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Indikator Kegiatan: Persentase Efektivitas Kerjasama Daerah**	**Kota Pekl.**	**100%**	**1.084.460.000**	**DAU**		**100%**	**75.110.000**
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kota Pekl.	20 dokumen	1.084.460.000	**DAU**		70 dokumen	75.110.000
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Indikator Program: Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD (IKK Outcome)**	Kota Pekl.	**6%**	**60.738.000**	**DAU**		**6%**	**110.029.000**
4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Indikator Kegiatan: Persentase OPD Tertib Pelaporan Pelaksanaan APBD**	**Kota Pekl.**	**100%**	**60.738.000**	**DAU**		**100%**	**110.029.000**
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Pekl.	2 laporan	28.450.000	**DAU**		2 laporan	42.681.000
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Pekl.	2 laporan	32.288.000	**DAU**		2 laporan	67.348.000
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Indikator Program :Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa**	Kota Pekl.	**100%**	**429.872.000**	**DAU**		**100%**	**512.838.000**
4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Indikator Kegiatan: Persentase Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Dilaksanakan**	**Kota Pekl.**	**100%**	**429.872.000**	**DAU**		**100%**	**512.838.000**
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pekl.	4 dokumen	173.500.000	**DAU**		4 dokumen	224.984.000
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Pekl.	4 dokumen	256.372.000	**DAU**		4 dokumen	287.854.000
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Indikator Program :Persentase Kegiatan Strategis Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi - UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan yang Dikoordinasikan**	Kota Pekl.	**100%**	**261.780.000**	**DAU**		**100%**	**894.822.000**

4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan BUMD dan BLUD, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil**	**Kota Pekl.**	**100%**	**176.780.000**	**DAU**		**100%**	**237.665.000**
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Pekl.	2 dokumen	41.500.000	**DAU**		2 dokumen	76.000.000
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Pekl.	1 laporan	73.630.00	**DAU**		1 laporan	63.000.000
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kota Pekl.	1 dokumen	61.650.000	**DAU**		1 dokumen	98.665.000
4.01.03.2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Indikator Kegiatan : Jumlah Bulan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bersumber dari DBHCHT**	**Kota Pekl.**	**12 bulan**	**85.000.000**	**DAU, DBHCHT**		**12 bulan**	**657.157.000**
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Kota Pekl.	1 dokumen	85.000.000	**DAU, DBHCHT**		1 dokumen	657.157.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran indikatif sebesar Rp 35.451.129.000 terdiri dari:
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp 61.851.000;
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah dengan anggaran Rp 16.176.803.000;
   c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran Rp 338.667.000;
   d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Anggaran Rp 7.887.129.000;
   e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp 2.753.905.000;
   f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp 4.018.296.000;
   g. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan anggaran Rp 892.249.000;
   h. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan anggaran Rp 1.440.000.000;
   i. Kegiatan Penataan Organisasi dengan anggaran Rp 248.430.000; dan
   j. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan anggaran Rp 1.133.799.000.

2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dengan pagu anggaran indikatif sebesar Rp 16.256.795.000 terdiri dari:
   a. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan anggaran Rp 475.356.000;
   b. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan anggaran Rp 14.293.199.000;
   c. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dengan anggaran Rp 403.780.000; dan
   d. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan anggaran Rp 1.084.460.000.
3. Program Perekonomian dan Pembangunan, dengan pagu anggaran indikatif sebesar Rp 752.390.000 terdiri dari:
   a. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan dengan anggaran Rp 60.738.000;
   b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran Rp 429.872.000;
   c. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dengan anggaran Rp 176.780.000; dan
   d. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam dengan anggaran Rp 85.000.000.

Secara rinci rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.1.

Rincian Rencana Kerja dan Pendanaan

Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp .000)**	**Catatan Penting**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	34.068.900	
2	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	61.851	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	7.842	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.009	
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	52.000	
6	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100%	16.176.803	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	119 Orang	15.977.091	
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	197.850	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.862	
10	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	338.667	

No	Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp .000)**	**Catatan Penting**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	338.667	
12	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100%	8.387.129	
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	70.000	
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.016.108	
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	144.500	
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.420.987	
17	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	66.831	
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	83.445	
19	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	1.085.258	
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3000 Laporan	4.500.000	
21	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	2.753.905	
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	27.600	
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	1.273.000	

No	Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp .000)**	**Catatan Penting**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
		yang Disediakan			
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.553.305	
25	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	4.018.296	
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	1.665.124	
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	1.952.472	
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	190 Unit	400.700	
29	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan dan operasional kepala daerah	100%	892.249	
30	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	852.249	
31	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	40.000	
32	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Persentase ketercapaian fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah	100%	1.440.000	
33	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	12 Paket	840.000	

No	Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp .000)**	**Catatan Penting**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
		yang Disediakan			
34	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	600.000	
35	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Presentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif	100%	475.356	
36	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	Persentase Capaian Kinerja Penyusunan Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	100%	475.356	
37	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	9 Dokumen	95.630	
38	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	19 Kasus	303.870	
39	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1200 Dokumen	75.856	
40	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%	14.293.199	
41	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	Persentase capaian kinerja bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	100%	14.293.199	
42	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	93 Dokumen	12.951.914	
43	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,	22 Dokumen	454.176	

No	Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp .000)**	**Catatan Penting**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
		Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			
44	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	106 Dokumen	887.109	
45	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi	100%	248.430	
46	**Penataan Organisasi**	Indeks Kelembagaan Kota	78/100	248.430	
47	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	64.323	
48	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	110.107	
49	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	36 Dokumen	74.000	
50	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome)	6%	60.738	
51	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	Persentase OPD tertib pelaporan pelaksanaan APBD	100%	60.738	
52	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 Laporan	28.450	

No	Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp .000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
53	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	32.288	
54	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	100%	429.872	
55	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	Persentase kegiatan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan	100%	429.872	
56	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen	173.500	
57	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4 Dokumen	256.372	
58	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	100%	1.488.240	
59	**Administrasi Tata Pemerintahan**	Persentase capaian kinerja penataan administrasi pemerintahan, pengelolaan administrasi kewilayahan dan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	100%	403.780	
60	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	71.910	
61	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	197.230	
62	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	134.640	
63	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	Persentase efektivitas kerja sama daerah	100%	1.084.460	
64	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 Dokumen	1.084.460	
65	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan,	100%	261.780	

No	Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp .000)**	**Catatan Penting**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
		Ketahanan pangan yang dikoordinasikan			
66	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan BUMD dan BLUD, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	100%	176.780	
67	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	41.500	
68	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	73.630	
69	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	61.650	
70	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	Jumlah Bulan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bersumber dari DBHCHT	12 bulan	85.000	
71	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 Dokumen	85.000	
72	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA**	Persentase pelayanan keprotokoleran	100%	1.133.799	
73	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Persentase ketercapaian kinerja fasilitasi keprotokolan, komunikasi tugas pimpinan dan pendokumentasian tugas pimpinan	100%	1.133.799	
74	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	244.400	

No	Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp .000)**	**Catatan Penting**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
75	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	201 Laporan	608.191	
76	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	281.208	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan sebuah gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan guna merealisasikan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah. Seluruh program dan kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Recana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekalongan dan RKPD Provinsi Jawa Tengah yang disesuaikan juga dengan pagu anggaran yang di terima Sekretariat Daerah.

Dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan, alokasi anggaran indikatif seluruh kegiatan dan program kerja 8 (delapan) bagian pada Sekretariat Daerah Kota Pekalongan sebesar Rp 52.460.314.000 yang dikelompokkan dalam Belanja Operasi sebesar Rp 52.091.506.800, Belanja Modal sebesar Rp 368.807.200, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 0,- dan Belanja Transfer sebesar Rp 0. Diharapkan agar alokasi anggaran untuk Sekretariat Daerah Kota Pekalongan mendapat prioritas dalam kebijakan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi implementasi program peningkatan pengawasan Akuntabilitas Aparatur Negara sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

5.1. CATATAN PENTING

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pekalongan selalu melibatkan peran serta *stakeholder* atau pemangku kepentingan.

5.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Dalam rangka meningkatkan keefektifan pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pekalongan, maka beberapa kaidah pelaksanaan yang diterapkan adalah:

1. Substansi Rencana Kerja Sekretariat Daerah disusun secara tepat dan terukur berdasarkan tata laksana arah kebijakan dalam RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025.
2. Alokasi anggaran Sekretariat Daerah Kota Pekalongan atas proses penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Renja Sekretariat Daerah, akan ditindaklanjuti agar tidak memengaruhi pada tingkat capaian target indikator yang telah ditetapkan.
3. Masing-masing sub unit pada Sekretariat Daerah Kota Pekalongan menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) berpedoman pada dokumen Rencana Kerja yang telah ditetapkan, dengan menganut prinsip rasionalitas, efektifitas dan efisiensi anggaran serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang dengan memanfaatkan, mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan, maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program dan kegiatan oleh masing-masing sub unit. Dengan demikian, kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan dapat terlihat serta tingkat capaian kinerjanya tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Harapan kami, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pekalongan dapat mengakomodir seluruh target indikator kinerja. Jika terdapat kendala dalam capaian indikator kinerja, baik karena masih belum memadainya sumber daya atau permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.

Dengan demikian, Rencana Kerja ini disusun untuk menjadi pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN

NUR PRIYANTOMO, S.E., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19690310 199603 1 002

DOKUMEN
RENCANA KERJA PENETAPAN (RENJA)
SEKRETARIAT DPRD
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025

SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKALONGAN

Jl. Mataram No. 3 Pekalongan 51111

Telepon (0285) 421984 email : setwan@pekalongankota.go.id

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 000.7.2.4/ 08 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun sekaligus merupakan komitmen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu diterbitkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan tentang Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota – kota Besar dan Kota – kota

Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 8);
10. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025

Pasal 1

(1) Dalam Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026 dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah;

(2) Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2021-2026.

Pasal 2

Sistematika RENJA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023, meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP

Pasal 3

RENJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 5

Apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal Juli 2024
Sekretaris DPRD Kota Pekalongan

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
SEKRETARIAT DPRD

WIDARJANTO, SH, M.HuM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660424 199603 1 002

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2025

SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKALONGAN
2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada akhirnya Rencana Kinerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 dapat disajikan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Rencana Kerja (Renja) ini merupakan proses Penyusunan Rencana sebagai penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 ini pada hakikatnya merupakan perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Dengan telah disusunnya Rencana Kinerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait, khususnya Sekretariat DPRD Kota Pekalongan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun serta sarana evaluasi atas pencapaian kinerjanya dengan memperhatikan kriteria komponen-komponen perencanaan, memanfaatkan sistem pengukuran kinerja untuk monitoring kegiatan dan meningkatkan mutu informasi dalam laporan kinerja.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

SEKRETARIS DPRD KOTA PEKALONGAN

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN SEKRETARIAT DPRD

WIDARJANTO, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19660424 199603 1 002

DAFTAR ISI

BAB I.	PENDAHULUAN		1
	1.1.	Latar Belakang	1
	1.2.	Landasan Hukum	2
	1.3.	Maksud dan Tujuan	2
	1.4.	Sistematika Penulisan	3
BAB II.	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		11
	2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (Tabel.C.29)	11
	2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel.T- C.30)	15
	2.3.	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	21
	2.4.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD (Tabel T-C.31) .	22
	2.5.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel.T-C.32) .	22
BAB III.	TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025		
	3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	24
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025	24
	3.3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 (Tabel.T-C.33)	24
BAB IV.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		30
BAB V.	PENUTUP		30

DAFTAR TABEL

1.	Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (tahun berjalan) Kota Pekalongan	12
2.	Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Daerah Kota Pekalongan	12
3.	Tabel T-C.31	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 20254 Kota Pekalongan.	
4.	Tabel T-C.32	Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Pekalongan.	
5.	Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Pekalongan	

/

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untukmenyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedomankerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi kinerja/pelaksanaan rencana. Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh dan dilaksanakan secara transparan dan berkesinambungan.

Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai sebuah dokumen perencanan Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka Menengah daerah (RPJMD) dan Resntra Daerah untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Renja Perangkat Daerah/RKT merupakan suatu dokumen perencanaan resmi daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program,dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasimasyarakat. Dokumen Renja disyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PerangkatDaerah. Kedudukan Renja Perangkat Daerah ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jang ka menengah daerah. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Pekalongan merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Pekalongan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD berpedoman pada renstra Sekretariat DPRD Kota Pekalongan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efesien dan akuntanbilitas yang berorientasi pada hasil dan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan kinerja di tahun yang akan datang, maka perlu segera menetapkan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2025 yang memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang dilengkapi dengan dana indikatif serta sumber dananya.

Penetapan Rencana Kerja (Renja) ini dimaksudkan sebagai tolok ukur dalam menghitung keberhasilan organisasi Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kota Pekalongan yang akan dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kota Pekalongan pada akhir tahun anggaran. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang melatarbelakangi penyusunan renja Sekretariat DPRD Kota Pekalongan tahun 2025 adalah sebagai

berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Dilingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah memberikan arah sekaligus pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Pekalongan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra secara berkesinambungan.

Sekretariat DPRD Kota Pekalongan merupakan lembaga Unsur Organisasi Pemerintah Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai Rencana Strategis yang dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kota Palembang sehingga tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Pekalongan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien

Maksud dari penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah serta sebagai wadah sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan isu-isu strategis tahun 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2025, adalah :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Sekretariat DPRD Kota Pekalongan dalam menentukan prioritas program/kegiatan dan kebijakan anggaran tahunan yang berdasarkan APBD;
2. Sebagai standar baku penjabaran tupoksi Sekretariat DPRD, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan;
3. Pedoman Pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD Tahun 2025;
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi;
5. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah dan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menurut prinsip- prinsip ***Good Governance*** **dan** ***Clean Government***

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENJA

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Pekalongan tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Pekalongan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Pekalongan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Pekalongan

3.3. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berdasarkan pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan yang disajikan dalam tabel pengukuran kinerja kegiatan, maka untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, dilakukan evaluasi dan analisis efisiensi dan efektivitas pengukuran kinerja setiap indikator kinerja kegiatan, agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, tingkat efisiensi yang dilakukan dan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak dalam rangka perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dan strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan di masa yang akan datang.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Pekalongan dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 terlampir pada tabel berikut :

Tabel C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Pekalongan dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Pekalongan s.d. Tahun 2023

No	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (2023)	Realisasi 2023	Target 2023		Realisasi Capaian RPJMD sd Tahun 2023	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Realisasi 2023			
	SEKRETARIAT DPRD									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	Persentase Ketersediaan laporan capaian kinerja	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**tercapai**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran,dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**tercapai**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran,dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**tercapai**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**tercapai**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	**100**	**100**	**100**	**106,07**	**106,07**	**106,07**	**tercapai**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**tercapai**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinatahan Daerah									

	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**tercapai**
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD									
	Persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD									
	Persentase ketercapaian layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Persen	100	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**tercapai**
	Layanan Adminstrasi DPRD									
	Persentase ketercapaian layanan administrasi DPRD	persen	100	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**tercapai**
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD									
	Persentase Perda yang ditetapkan									
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD									
	Persentase ketercapaian pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	persen	100	**100**	**100**	**100**	**75**	**75**	**75**	**tidak tercapai**
	Pembahasan Kebijakan Anggaran									
	Persentase Pembahasan kebijakan anggaran	Persen	100	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**tercapai**
	Peningkatan Kapasitas DPRD									
	Persentase ketercapaian peningkatan kapasitas DPRD	**persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**114,29**	**114,29**	**114,29**	**tercapai**
	Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat									
	Persentase ketercapaian penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	**persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**tercapai**
	Fasilitasi Tugas DPRD									
	Persentase ketercapaian pelaksanaan tugas DPRD	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**tercapai**

Berdasarkan Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Pekalongan dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2023 Kota Pekalongan, bahwa tingkat

pencapaian kinerja setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2023, sebagai berikut :

I. Kesimpulan Capaian Berdasarkan Aspek Indikator Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 4 (empat) indikator program sebagai berikut:

   a. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

   b. Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

   c. Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah

   d. Persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD

   Tujuan strategis 4 (empat) indikator tersebut adalah meningkatnya layanan masyarakat dan akuntabilitas kinerja. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan sasaran strategis dan IKU dari keempat indikator tersebut adalah Nilai SAKIP OPD.

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan 5 (lima) indikator program sebagai berikut:

   a. Persentase Peraturan Daerah yang ditetapkan

   b. Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran

   c. Persentase Ketercapaian Peningkatan Kapasitas DPRD

   d. Persentase Ketercapaian Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

   e. Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Tugas DPRD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan

Analisis efisiensi dan efektivitas pengukuran kinerja setiap indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026 yang menunjukkan peran utama dan kontribusi Sekretariat DPRD Kota Pekalongan dalam mendukung tercapaiannya Visi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan yang tercantum dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 yaitu "**Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri, dan Religius**".

Analisis capaian kinerja sasaran dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi yang dilakukan dan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi, serta penentuan penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Untuk memudahkan dalam melakukan analisis capaian kinerja setiap sasaran kinerja, berikut gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output dapat dilihat pada Tabel. T-C.30 berikut :

No	Indikator Kegiatan	SPM/ Standar	I K K	Target Renstra Sekretariat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	SPM		100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	Belum Tercapai, Kegiatan Belum Terealisasikan
	Persentase ketercapaian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urasan pemerintah daerah	SPM		100%	100%	100%	100%	102,02%	N/A	100%	100%	Belum Tercapai, Kegiatan Belum Terealisasikan
	Persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD	SPM		100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	Belum Tercapai, Kegiatan Belum Terealisasikan
	Persentase Perda yang ditetapkan	SPM		100%	100%	100%	100%	75%	N/A	100%	100%	Belum Tercapai, Kegiatan Belum Terealisasikan
	Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	SPM		100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	Belum Tercapai, Kegiatan Belum Terealisasikan
	Persentase ketercapaian peningkatan kapasitas DPRD	SPM		100%	100%	100%	100%	**114,29%**	N/A	100%	100%	Belum Tercapai, Kegiatan Belum Terealisasikan

	Persentase ketercapaian penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	SPM		100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	Belum Tercapai, Kegiatan Belum Terealisasikan
	Persentase ketercapaian pelaksanaan tugas DPRD	SPM		100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	Belum Tercapai, Kegiatan Belum Terealisasikan

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Berdasarkan Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan, realisasi capaian kinerja Tahun 2023 sebagian besar dalam skala diatas 95% dengan kategori sangat tinggi / sangat berhasil.

Ketercapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah tercapai sangat tinggi / sangat berhasil disebabkan karena beberapa faktor antara lain:

a. Perencanaan anggaran disusun dengan lebih baik sehingga terjadi peningkatan realisasi kinerja.
b. Pelaksanaan kegiatan yang dapat dilaksanakan tepat waktu

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKALONGAN

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Pekalongan tidak dapat lepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis dimaksud antara lain :

1. Peningkatan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;

2. Perlunya manajemen resiko dalam menghadapi kemungkinan penanganan masalah yang timbul akibat ketidakpahaman publik terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah;
3. Penguatan regulasi dan perbaikan celah-celah regulasi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah agar dapat memperkuat proses perencanaan dan pembinaan yang semakin mengedepankan asas value for money;
4. Maturitas organisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah belum diimbangi dengan bertambahnya tingkat layanan terstandar pada unit penunjang teknologi informasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat;
5. Perlunya optimalisasi pengembangan sektor ekonomi kreatif di Kota Pekalongan;
6. Mengoptimalkan koordinasi dan pelayanan dalam semua pelaksanaan kegiatan;
7. Peningkatan pelayanan Sistem Informasi Peminjaman Ruang Rapat Paripurna agar dapat diakses oleh semua OPD dan masyarakat dengan baik;
8. Optimalisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
9. Perlu digitalisasi register surat dinas di Sekretariat DPRD.

2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 melalui rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target capaian / tolok ukur, dan besaran dana / pagu yang dibutuhkan, review rancangan akhir RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2025 Kota Pekalongan

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kota Pekalongan

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp .000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp .000)	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Persentase ketersediaan layanan adm kepegawaian, adm umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 2. Persentase ketersediaan layanan adm keuangan dan	100% 100%	35.903.924	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Persentase ketersediaan layanan adm kepegawaian, adm umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 2. Persentase ketersediaan layanan keuangan dan	100% 100%	34.511.800	

			kesejahteraan DPRD 3. Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah 4. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100% 100%				kesejahteraan DPRD 3. Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah 4. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100% 100%		
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu 2. Persentase perda yang ditetapkan	100% 100%	28.892.418	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3. Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu Persentase perda yang ditetapkan	100% 100%	27.207.112	

Dari hasil reviu rancanngan akhir Renja Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2025 yang dilakukan oleh Inspektorat kota Pekalongan diperoleh kesimpulan : Rancangan Renja Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2025 telah disusun dengan asistensi dan koordinasi dengan Bappeda Kota Pekalongan dan secara garis besar telah selaras dengan renstra dan RKPD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025. Namun demikian masih terdapat kekurangan sebagai berikut :

1. Sampai dengan berakhirnya reviu, belum ada SK Tim Penyusun Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 dan bukti dokumentasi rapat-rapat internal terkait penyusunan Renja;
2. Belum ada dokumen Rancangan awal Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025;
3. Rancangan akhir Renja belum disajikan dengan sistematika sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
4. Sekretariat DPRD Kota Pekalongan belum menyampaikan dokumen rncangan akhir Renja secara lengkap kepada Bappeda untuk ditetapkan menjadi Perkada;
5. Masih terdapat ketidaksesuaian dengan renstra :
   a. Ketidaksesuaian indicator kinerja pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
   b. Ketidaksesuain indicator dan terget kinerja kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran
6. Masih terdapat ketidaksesuain dengan RKPD Tahun Anggaran 2025:
   a. ketidaksesuain Indikator Kinerja pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
   b. ketidaksesuaian rumusan Sub Kegiatan beserta indicator dan target kinerjanya, yaitu sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (ada dalam Renja, namun tidak ada dalam RKPD).

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diutamakan yang merupakan usulan-usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat Kota Pekalongan. Khusus untuk bidang pengawasan, usulan-usulan tersebut tidak dimunculkan/tidak ada.

Tabel T.C-32

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	N I H I L				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Dalam rangka mensinergikan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah Kota Pekalongan, maka berdasarkan Rancangan Awal RKP Tahun 2025 dan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025 dapat disusun hubungan antara Kebijakan Pembangunan Nasional dengan Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Daerah

No	Prioritas Nasional	Prioritas daerah
6	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	7.Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.2.1. Tujuan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD 2025 disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan untuk Tahun 2025 agar, dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dapat berjalan dengan lancar sesuai Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

Hubungan yang selaras antara RENJA dan RENSTRA, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan tujuan dan sasaran RENSTRA Sekretariat DPRD Kota Pekalongan tahun 2021-2026.

Setiap Perangkat Daerah bersama-sama melakukan optimalisasi untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Walikota Pekalongan Periode Tahun 2021-2026, oleh karena itu Renstra Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 mengadopsi Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan yang tercantum dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan yang tercantum dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 yaitu

“**Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri, dan Religius**”.

Sedangkan Misi yang mempunyai keterkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Pekalongan, adalah Misi Ke-7 Pemerintah Kota Pekalongan yaitu :"**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan prinsip prinsip *Good Governance* dan *Clean Goverment***".

3.2.2. Sasaran

Sesuai dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat DPRD dalam rangka fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kota Pekalongan harus dapat mewujudkan peningkatan kualitas dukungan administrasi, sarana prasarana, keuangan, persidangan, perundangan, penyerapan aspirasi, perumusan kebijakan dan kehumasan.

Dalam rangka peningkatan fungsi fasilitasi tersebut, Sekretariat DPRD Kota Pekalongan berupaya meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar Program-program dan Kegiatan-kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sesuai dengan fungsi dan tugas Sekretariat DPRD Kota Pekalongan.

Sasaran yang hendak dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah terwujudnya kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung penyelesaian agenda DPRD.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3.1. Faktor Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan, tugas dan wewenang DPRD Kota Pekalongan dalam meningkatkan kualitas dukungan administrasi, sarana prasarana, keuangan, persidangan, perundangan, penyerapan aspirasi, perumusan kebijakan dan kehumasan sesuai dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Sekretariat DPRD Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut perlu dukungan Program dan Kegiatan yang disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Pekalongan.

3.3.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Dalam penyusunan Renja 2025 ini terbagi dalam 2 (dua) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 38 (tiga pulih delapan) sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025 sebesar Rp. 61.718.912.000,00 (Enam puluh satu milyar tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah). Sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Pekalongan.

Pembagian Program dan Kegiatan sesuai dengan rancangan akhir RKPD 2025 yang disampaikan dalam Surat Walikota tentang Penyusunan RKPD dan Renja OPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
    a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
        2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
        3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    b. Administrasi Keuangan Daerah
        1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
        2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
        3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
        1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapnnya
    d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
        1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
        2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
        3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
        4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
        5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
        6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
        7) Fasilitasi Kunjungan Tamu
        8) Penyelenggaraan Rapat Konsultasi dan Koordinasi SKPD
    e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
        1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
        2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
        3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
    f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
        1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
        2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
        3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
    g. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
        1) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
        2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
        3) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

h. Layanan Administrasi DPRD
    1) Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
    2) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
    a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
        1) Pembahasan RAncangan Peraturan Daerah
        2) Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan
    b. Pembahasan Kebijakan Anggaran
        1) Pembahasan KUA dan PPAS
        2) Pembahasan APBD
        3) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
    c. Peningkatan Kapasitas DPRD
        1) Pendalaman Tugas DPRD
        2) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
        3) Penyusunan Program Kerja DPRD
        4) Publikasi dan Dokumentasi DPRD
    d. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
        1) Kunjungan Kerja Dalam Daerah
        2) Pelaksanaan Reses
    e. Fasilitasi Tugas DPRD
        1) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

3.3.3. Kesesuaian Program dan Kegiatan dengan RKPD

Program dan kegiatan yang direncanakan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan untuk Tahun 2025 mendasarkan pada Rencana Kerja DPRD yang diusulkan oleh seluruh Alat Kelengkapan DPRD dan ditetapkan dalam Rencana Kerja DPRD. Mendasarkan pada hal tersebut, pagu anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2025 menyesuaikan dengan hasil Rencana Kerja DPRD

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2025

4.1. Tabel Rencana Program dan Kegiatan

Sekretariat DPRD memiliki 2 (dua) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan. Kedua Program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Adapun Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 4.1. sebagai berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DPRD						**61.718.912.000,00**							**48.388.190.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**61.718.912.000,00**							**48.388.190.000,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**61.718.912.000,00**							**48.388.190.000,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase ketersediaanlaporan capaian kinerja***	100 persen	100 persen	100 persen	**100 persen**	**34.511.800.000,00**						**-**	**28.908.364.000,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	20.064.000,00			-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat	-	16.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	3 Dokumen	3.306.000,00	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		7.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 persen	100 persen	100 persen	2 Dokumen	1.558.000,00	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		1.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	15 Laporan	15.200.000,00	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		8.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah*	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	3.227.585.000,00			-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	sekretariat DPRD	-	3.328.071.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 persen	100 persen	100 persen	25 Orang/ bulan	3.163.841.000,00	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	sekretariat DPRD		3.256.171.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/VerifikasiKeuangan SKPD	100 persen	100 persen	100 persen	12 Dokumen	62.300.000,00	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	sekretariat DPRD		70.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 persen	100 persen	100 persen	1 Laporan	1.444.000,00	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	sekretariat DPRD		1.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD

	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah*	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	5.000.000,00			-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD	-	9.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 persen	100 persen	100 persen	1 Paket	5.000.000,00	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		9.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi Umum perangkat daerah*	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	3.689.605.000,00			-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD	-	2.710.411.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yang Disediakan	100 persen	100 persen	100 persen	4 Paket	19.131.000,00	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 persen	100 persen	100 persen	4 Paket	516.517.000,00	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Sekretariat DPRD		255.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yang Disediakan	100 persen	100 persen	100 persen	4 Paket	6.000.000,00	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 persen	100 persen	100 persen	4 Paket	714.772.000,00	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		627.911.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 persen	100 persen	100 persen	13 Paket	32.235.000,00	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		142.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 persen	100 persen	100 persen	2 Dokumen	25.800.000,00	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 persen	100 persen	100 persen	12 Laporan	379.250.000,00	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 persen	100 persen	100 persen	450 Laporan	1.995.900.000,00	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		1.300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	1.244.025.000,00			-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD	-	940.937.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

			Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat	100 persen	100 persen	100 persen	4 Laporan	1.800.000,00	- Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		1.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 persen	100 persen	100 persen	12 Laporan	276.252.000,00	- Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 persen	100 persen	100 persen	12 Laporan	965.973.000,00	- Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		739.137.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	893.823.000,00			-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD	-	1.431.640.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 persen	100 persen	100 persen	23 Unit	550.723.000,00	- Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		911.640.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 persen	100 persen	100 persen	2 Unit	250.000.000,00	- Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 persen	100 persen	100 persen	143 Unit	93.100.000,00	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*persentase ketersediaan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD*	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	24.595.218.000,00			-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat	-	19.471.305.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	100 persen	100 persen	100 persen	35 Orang/Bulan	23.704.121.000,00	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		18.541.305.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinasdan Atribut DPRD yang Disediakan	100 persen	100 persen	100 persen	140 Paket	335.725.000,00	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check UpDPRD	100 persen	100 persen	100 persen	35 Orang	555.372.000,00	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		530.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Persentase ketercapaian layanan administrasi DPRD*	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	836.480.000,00			-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat	-	1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														

			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	100 persen	100 persen	100 persen	12 Laporan	386.480.000,00	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	100 persen	100 persen	100 persen	12 Paket	450.000.000,00	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	***Persentase Perda yangditetapkan***	100 persen	100 persen	100 persen	**100,00 persen**	**27.207.112.000,00**						**-**	**19.479.826.000,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Persentase ketercapaian pembentukan Perda dan peraturan DPRD*	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	4.692.620.000,00			-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan	-	8.300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	12 Dokumen	2.772.250.000,00	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen KajianPerundang-Undangan	100 persen	100 persen	100 persen	6 Dokumen	1.920.370.000,00	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		5.300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Persentase PembahasanKebijakan Anggaran*	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	302.850.000,00			-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD	-	409.197.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS														

			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	100 persen	100 persen	100 persen	2 Dokumen	149.200.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	100 persen	100 persen	100 persen	2 Dokumen	149.200.000,00	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	100 persen	100 persen	100 persen	1 Dokumen	4.450.000,00	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		109.197.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Persentase Ketercapaian peningkatan kapasitas DPRD*	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	2.324.597.000,00			-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		3.150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	100 persen	100 persen	100 persen	4 Dokumen	1.442.100.000,00	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	100 persen	100 persen	100 persen	20 Dokumen	217.340.000,00	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														
			Jumlah Dokumen RencanaKerja DPRD	100 persen	100 persen	100 persen	1 Dokumen	64.600.000,00	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Publikasidan Dokumentasi DPRD	100 persen	100 persen	100 persen	48 Dokumen	600.557.000,00	- Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Persentase ketercapaian penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat*	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	1.165.715.000,00			-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan	-	1.700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	100 persen	100 persen	100 persen	12 Laporan	259.665.000,00	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			Jumah Dokumen HasilPelaksanaan Reses	100 persen	100 persen	100 persen	3 Dokumen	906.050.000,00	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		1.400.000.000,00	
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Persentase Ketercapaian Fasilitasi tugas DPRD*	100 persen	100 persen	100 persen	100,00 persen	18.721.330.000,00			-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD	-	5.920.629.00,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
			Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100 persen	100 persen	100 persen	1 dokumen	18.721.330.000,00	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		5.920.629.00,00	SEKRETARIAT DPRD

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2025 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di sekretariat DPRD Kota Pekalongan.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Kerja DPRD yang dijabarkan dalam Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, indikator, target kinerja dan pagu anggaran, disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yangdirencanakan. Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2025 diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD sehingga dapat mendukung agenda kegiatan DPRD dengan baik dan lancar serta secara keseluruhan dapat mendukung keberhasilan pembangunan.

Program dan Kegiatan yang telah disusun dalam Renja Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2025 nantinya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD tahun 2025.

Pekalongan, 8 Agustus 2024
SEKRETARIS DPRD KOTA PEKALONGAN

WIDARJANTO, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BAPPEDA
Membangun
Bersama
Masyarakat

RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025

Pekalongan
World's City of Batik

BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PEKALONGAN
2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, Alhamdulillah dengan rahmatNya Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Pekalongan Tahun 2025 telah berhasil disusun. Renja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Bappeda 2021-2026, dan telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam Renja ini, secara rinci telah ditetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kota Pekalongan pada tahun 2025. Setiap kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target yang ingin dicapai, serta pagu anggaran sebagai acuan dalam pelaksanaannya.

Diharapkan Renja ini dapat menjadi panduan yang efektif bagi seluruh jajaran Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pekalongan dapat tercapai dengan optimal.

Pekalongan, 1 Agustus 2024

Kepala Bappeda Kota Pekalongan

CAYEKTI WIDIGDO, AP.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19750729 199412 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL ivv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud Dan Tujuan 4
1.4 Sistematika 4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. 23
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 29
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 31
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 43
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 44
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional. 44
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 48
3.3 Program dan Kegiatan 49
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 60
BAB V PENUTUP 65
5.1 Catatan Penting 65
5.2 Kaidah Pelaksanaan 65
5.3 Rencana Tindak lanjut 65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2023 10

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2023 Target Dan Proyeksi Tahun 2024 dan Tahun 2025..... 28

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Pekalongan 32

Tabel 2.4 Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Bappeda Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024..... 44

Tabel 3.1 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Nasional 465

Tabel 3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi 47

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Bappeda Tahun 2025 Dan Perkiraan Maju Tahun 2026 50

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025..... 60

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan proses strategis dalam mengoptimalkan potensi sumber daya lokal guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan ini ditandai dengan peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja, serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan publik dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Daya saing daerah dan indeks pembangunan manusia menjadi tolok ukur utama keberhasilan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah, sebagai landasan dari seluruh aktivitas pembangunan, memiliki peran sentral dalam memastikan pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Secara konseptual, perencanaan pembangunan daerah dapat didefinisikan sebagai proses sistematis dalam merancang tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perencanaan pembangunan yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengamanatkan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dimana sebagai tindaklanjutnya, Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.

Sebagai upaya untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan dengan peluang otonomi seluas-luasnya maka kewenangan diberikan kepada daerah. Hal ini merupakan peluang untuk memberikan kemajuan pembangunan dengan ciri khas dan potensi daerah dan sesuai dengan sumberdaya dan budaya masyarakat daerah tersebut. Salah satu hal yang mendukung dalam upaya mencapai tujuan pelayanan publik adalah dengan pelaksanaan rencana daerah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif melalui beberapa tahapan perencanaan.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah atau selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah terbagi dalam tiga fase, yakni Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, Rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Walikota tentang Renja Perangkat Daerah sebagai berikut:

a. Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah merupakan draft awal sesuai dengan Rentra Perangkat Daerah pada tahun n.
b. Selanjutnya rencangan awal renja disempurnakan berdasarkan hasil konsultasi publik menjadi Rancangan Renja, yang disusun sebagai pembahasan dalam penyusunan Rancangan RKPD yang akan dibahas dalam musrenbang tingkat kota.
c. Hasil musrenbang menjadi dasar penetapan Peraturan Walikota tentang RKPD. Selanjutnya Peraturan Walikota tentang RKPD menjadi dasar dalam menyempurnakan Rancangan Renja menjadi Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.
d. Rancangan Akhir Renja seluruh Perangkat Daerah akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Renja Perangkat Daerah.

Seluruh tahapan proses merupakan implementasi perencanaan secara partisipatif dengan pendekatan teknokratik, *buttom up, top down, dan politis*.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Kepmendagri nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keunagan daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
20. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);
21. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13);

22. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bappeda Kota Pekalongan;
24. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitan dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

   Dokumen Renja BAPPEDA Kota Pekalongan disusun dengan maksud sebagai arah dan pedoman bagi BAPPEDA Kota Pekalongan dalam melaksanakan rencana kegiatan tahunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Tujuan

   Dokumen Renja BAPPEDA Kota Pekalongan disusun bertujuan antara lain untuk:

   a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan BAPPEDA Kota Pekalongan untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya;
   b. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
   c. Menjamin terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
   d. Adanya kesinambungan antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.
   e. Menjalankan tahapan perencanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

1.4 SISTEMATIKA

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja BAPPEDA, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang.

Memuat tentang pengertian Renja Bappeda, Proses Penyusunan Renja, Keterkaitan antara Rencana Kerja (Renja) dengan Dokumen RKPD dan Rencana Strategis (Renstra).

1.2 Landasan Hukum.

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan.

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja).

1.4 Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Bappeda Kota Pekalongan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bappeda berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Memuat uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan Bappeda dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Selaian itu, juga untuk dapat diketahui dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SDGs. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses yang dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan penjelasannya. Kemudian menjelaskan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Renja, seperti terdapat rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan awal RKPD, atau program, kegiatan dan sub kegiatan cocok namun besarnya anggaran berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
Memuat uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain : Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; Penjelasan kesesuaian usulan

tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Menjelaskan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda.

3.2 Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Pekalongan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis pada tahun yang bersangkutan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kota Pekalongan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan, program dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bappeda Kota Pekalongan selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2025.

Pengukuran kinerja kegiatan/sub kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan penetapan indikator kinerja, yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2023 Bappeda Kota Pekalongan sebesar Rp. 7.641.959.000,-, termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN dengan melaksanakan 2 penunjang urusan pemerintahan, 4 program, 15 kegiatan dan 34 sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 7.261.284.832,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 95,02%.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2024, dengan alokasi pagu anggaran Belanja sebesar Rp. 7.591.490.000,- (belanja gaji dan tunjangan 4.890.512,-) melaksanakan 2 unsur penunjang urusan pemerintahan, 4 program, 16 kegiatan dan 35 sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%, baik realisasi keuangan maupun capaian fisiknya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta perkiraan capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda sebagai berikut:

1. Keterbatasan akses terhadap data dan informasi yang relevan dalam proses perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
2. Mengingat perubahan struktur kelembagaan yang signifikan pasca penghapusan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), indikator yang digunakan untuk menghitung nilai RIDA tidak dapat dihitung;
3. Koordinasi antar *stake holder* perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang tidak maksimal menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan;
4. Komitmen dan pemahaman bersama untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam

Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD perlu ditingkatkan dalam merencanakan kegiatan.

5. Manajemen risiko yang disusun pada akhir tahun dimana proses perencanaa penganggaran sudah sampai pada tahap RAPBD sehingga belum sepenuhnya diimplementasikan secara menyeluruh dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sehingga potensi risiko belum dikelola secara proaktif dan reaktif.
6. Berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah bahwa hanya terdapat satu indikator dalam satu sub kegiatan sehingga perlu singkronisasi dengan target kinerja pada periode sebelumnya.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah dan urusan penelitian dan pengembangan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu 2023, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2023 pada Bappeda Kota Pekalongan dari 2 urusan yaitu urusan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan yang dilaksanakan dengan 4 program,

Adapun evaluasi kinerja hasil/ keluaran program/kegiatan/ subkegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

   Pada pelaksanaan Renja Bappeda Kota Pekalongan tahu 2023 seluruh program memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang diharapkan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

   Pada Renja Bappeda Kota Pekalongan tahun 2023 terdapat 12 indikator dengan kategori memenuhi target ketercapaian pada indikator program sebanyak 11 indikator program.

   Namun demikian terdapat 1 indikator yang dalam penilaian ketercapaiannya tidak sesuai dengan devinisi awal penyusunan target yaitu skor capaian nilai Rida pada program penelitian dan pengembangan daerah. Hal yang mendasarinya adalah perubahan signifikan dalam tata kelola riset dan inovasi pasca pembubaran BRIN, indikator yang digunakan untuk menghitung nilai RIDA perlu dievaluasi ulang dan disesuaikan. Pada indikator kegiatan terdapat 15 indikator kegiatan dengan kategori memenuhi target dalam ketercapaian indikator kegiatan sebanyak 15 indikator.

   Sedangkan pada indikator sub kegiatan terdapat 57 indikator yang kesemua indikator sub kegiatan tersebut memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

   Pada Renja tahun 2023 terdapat 1 sub kegiatan yang melebihi target capaian kinerja yaitu sub kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan taget jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah sebanyak 400 orang/ kali terealisasi sebanyak 407 orang/ kali atau sebesar 101%.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Indikator program/kegiatan/sub kegiatan tidak tercapai targetnya

Terdapat satu indikator program yang tidak sesuai pencapaian dalam target kinerjanya yaitu program pengembangan penelitian daerah dengan indikator skor capaian nilai Rida sebesar 73. Hal ini disebabkan karena pasca reorganisasi Badan Riset dan Inovasi Nasional telah menyebabkan ketidaksesuaian indikator yang digunakan untuk mengukur nilai Riset dan Inovasi Daerah (RIDA). Indikator seperti jumlah publikasi ilmiah internasional dan jumlah paten yang diperoleh, yang sebelumnya dianggap penting, mungkin tidak lagi sepenuhnya mencerminkan kinerja riset dan inovasi daerah dalam konteks saat ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendefinisian ulang indikator yang mencakup aspek-aspek seperti inovasi sosial, komersialisasi hasil riset, dan kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah

Adapun faktor-faktor melebihi target kinerja pada kegiatan, disebabkan efisiensi penggunaan anggaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan, sehingga dengan jumlah anggaran yang direncanakan dapat meningkatkan kinerja yang ditentukan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

   Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang membatasi jumlah indikator pada setiap subkegiatan, maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap indikator-indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap indikator dapat mengukur kinerja subkegiatan secara spesifik dan tidak terjadi duplikasi dengan indikator lainnya. Sehingga dalam penghitungan realisasi kinerja pada periode akhir renstra dapat secara akurat tersajikan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BAPPEDA Kota Pekalongan yang sudah dilakukan maping berdasarkan permendagri 90 tahun 2019, didasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Capaian evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah dapat dilihat dalam tabel 2.1. dibawah ini :

Tabel 2.1. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 KOTA PEKALONGAN

OPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9	10 = (5 + 7 + 9)	11
5	**URUSAN PENUNJANG**									
5.01	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN**									
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan ketercapaian kinerja**	**100%**	**100%**	100%	100%	100%	100%	100%	100
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	**100%**	**100%**	100%	100%	100%	100%	100%	100
		persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	**100%**	**100%**	100%	100%	100%	100%	100%	100
5.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evalusi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja Yang Disusun	10 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	8 dokumen	80

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9	10 = (5 + 7 + 9)	11
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA	Jumlah dokumen RKA dan RKA Perubahan Yang Disusun	10 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	8 dokumen	80
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah	60 bl	24 bl	12 bl	12 bl	100%	12 bl	48 bl	80
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	20 dokumen	8 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	8 dokumen	16 dokumen	80
		Jumlah dokumen SAKIP yang Disusun (penetapan dan perubahan)	10 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	8 dokumen	80
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	25 dokumen	10 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	20 dokumen	80
5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gajidan TunjanganASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	60 bl	-	12 bl	12 bl	100%	12 kali	48 bl	80

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9	10 = (5 + 7 + 9)	11
		Jumlah bulan penyediaan gajidan tunjangan ASN	60 bl	24 bl	12 bl	12 bl	100%	12 bl	48 bl	80
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	60 bl	24 bl	12 bl	12 bl	100%	12 bl	48 bl	80
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	4 dokumen	80
5.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik	15	1 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	3 kali	20
5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 bl	24 bl	12 bl	12 bl	100%	12 bl	48 bl	80
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda-benda pos	60 bl	24 bl	12 bl	12 bl	100%	12 bl	48 bl	80
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	15 unit	10 unit	6 unit	6 unit	100%	6	22 unit	146

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9	10 = (5 + 7 + 9)	11
		Jumlah sarpras pendukung yang diadakan dalam menunjang penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas (bankeu)	-	-	20 unit	20 unit	100%	-	20 unit	80
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	60 bl	24 bl	12 bl	12 bl	100%	12 bl	48 bl	80
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	55 bl	22 bl	11 bl	11 bl	100%	11 bl	44 bl	80
5.01.01.2.06.05	Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60 bl	24 bl	12 bl	12 bl	100%	12 bl	48 bl	80
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	60 bl	24 bl	12 bl	12 bl	100%	12 bl	48 bl	80
5.01.01.2.06.09	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	547 org/kali	445 org/kali	400 org/kali	407 org/kali	101%	275 org/kali	1.127 org/kali	206
5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase ketercapaian penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
	Penyediaan JasaSurat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	60 bl	24 bl	12 bl	12 bl	100%	12 bl	48 bl	80
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bl	24 bl	12 bl	12 bl	100%	12 bl	48 bl	80

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9	10 = (5 + 7 + 9)	11
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	60 bl	24 bl	12 bl	12 bl	100%	12 bl	48 bl	80
5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	100%	100%	100%	100%	100%	100
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	75 unit	29 unit	14 unit	14 unit	100%	14 unit	57 unit	76
		Jumlah bulan kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	-	-	12 bl	12 bl	100%	12 bl	48 bl	80
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	60 bl	24 bl	12 bl	12 bl	100%	12 bl	48 bl	80
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu**	**100%**	**100%**	100%	100%	100%	100%	100%	100
		Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	**100%**	**100%**	100%	100%	100%	100%	100%	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9	10 = (5 + 7 + 9)	11
		Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	**100%**	**100%**	100%	100%	100%	100%	100%	100
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
5.01.02.2.01.07	KoordinasiPenyusunan danPenetapanDokumenPerencanaan PembangunanDaerahKabupaten/Kota	Jumlah dokumen background study RPJMD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100
		Jumlah dokumen RKPD yang disusun	15 dokumen	6 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	12 dokumen	80
		Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas sumberdaya manusia yang dilaksanakan (bankeu)	-	-	1 kali	1 kali	100%	-	1 kegiatan	-
		Jumlah pertemuan Asosiasi Kepala Bappeda se-Jawa Tengah yang dilaksanakan (bankeu)	-	-	1 kali	1 kali	100%	-	1 kali	-
5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase pelaksanaanan alisis data melalui forum satu data**	**100%**	**100%**	100%	100%	100%	100%	100%	100
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan data prioritas satu data terpadu daerah yang disusun (SIDa)	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	4 dokumen	80

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9	10 = (5 + 7 + 9)	11
5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah**	**100%**	**100%**	100%	100%	100%	100%	100%	100
5.01.02.2.03.03	Monitoring,Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan evaluasi RKPD yang disusun	20 dokumen	8 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	16 dokumen	80
		Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN (DAK) yang disusun	20 dokumen	8 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	16 dokumen	80
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase ketersediaan Dokumen perencanaan Bidang Pemsosbud**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
		Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9	10 = (5 + 7 + 9)	11
5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persentase kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-	-	1 laporan	1 laporan	100%	1 dokumen	2 laporan	-
		Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan yang dilaksanakan	10 kali	2 kali	1 kali	1 kali	100%	-	3 kali	30
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan pembangunan Bidang pemerintahan yang disusun	5 dokumrn	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	4 dokumen	80
		Jumlah dokumen LP2KD yang disusun	5 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	20
		Jumlah dokume RAT Penanggulangan Kemiskinan yang disusun	5 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	20
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen capaian SDGs Kota Pekalongan yang disusun	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	1 dokumen	20

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9	10 = (5 + 7 + 9)	11
		Jumlah dokumen pelaksanaan Penanggulangan masalah gizi yang disusun	5 dokumen	2 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	40
		Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pembangunan Manusia	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	3 kali	60
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Anggaran Responsif Anak (ARA) Kota Pekalongan	5 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	20
		Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia yang disusun	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	4 dokumen	80
		Jumlah dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) yang disusun	2 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	50
		Jumlah dokumen Fasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Pekalongan yang disusun	5 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	50
5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Persentase kegiatan Fasilitasidan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dilaksanakan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9	10 = (5 + 7 + 9)	11
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen pendukung pengembangan Teknopark	3 dokumen	-	-	-	-	-	1 dokumen	30
		Jumlah dokumen Kajian Pengembangan Kota Pekalongan dengan Penekanan pada Pengembangan Sektor Perikanan	-	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	-
		Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi yang disusun	5 dokumen	2 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	40
		Jumlah dokumen koordinasi perencanaan sektor SDA yang disusun	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	-
5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persentase pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**100%**	**100%**	**100%**	100%	100%	**100%**	100%	100
5.01.03.2.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Revisi Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang disusun	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	-
		Jumlah Laporan Koordinasi Bidang Infrastruktur yang disusun	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	3 dokumen	60
		Jumlah dokumen kajian Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Onshore yang disusun	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9	10 = (5 + 7 + 9)	11
		Jumlah dokumen model peremajaan/revitalisasi kawasan kumuh yang disusun	-	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	-
5.01.03.2.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen evaluasi implementasi Perda RTRW 2009-2029 yang disusun	**-**	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	-
		Jumlah dokumen koordinasi pengembangan wilayah yang disusun	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	5 dokumen	100
		Jumlah dokumen revisi masterplan smart city yang disusun	-	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	-
		Jumlah laporan evaluasi smart city yang disusun	5 dokumen	2 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	40
		Jumlah dokumen/laporan koordinasi penataan ruang yang disusun	5 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**									
5.05.02	**Program penelitian dan pengembangan daerah**	**Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD**	**100%**	**100%**	100%	100%	100%	100%	100%	100
		Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	**72**	**76,6**	73	NA	NA	73	-	-
		Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	**100%**	**100%**	100%	100%	100%	100%	100%	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9	10 = (5 + 7 + 9)	11
5.05.02.2.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Capaian pelaksanaan Riset Unggulan Daerah serta pengelolaan Jurnal dan website kelitbangan**	**100%**	**100%**	**100%**	100%	100%	**100%**	**100%**	100
5.05.02.2.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi PenelitianDan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah penelitian dan Pengembangan oleh peneliti dan/atau lembaga penelitian yang difasilitasi	30 riset	10 riset	5 riset	5 riset	100%	4 riset	19 riset	63
		Jumlah penelitian dan pengembangan bidang otonomi daerah yang dilaksanakan	5 riset	5 riset	5 riset	5 riset	100%		10 riset	200
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah jurnal litbang yang diterbitkan	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	4 dokumen	80
		Jumlah website kelitbangan yang dikelola	2 website	1 website	1 website	1 website	100%	1 laporan	1 wibesite	50
5.05.02.2.02	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah FGD/workshop/Rakor kelitbangan yang dilaksanakan (SIDa)	15 kali	6 kali	3 kali	3 kali	100%	-	9 kali	60
		Jumlah kajian riset bersama yang dilaksanakan (SIDa)	5 kali	2 kali	2 kali	2 kali	100%	1 laporan	5 kali	100
		Jumlah workshop/FGD pengabdian masyarakat yang dilaksanakan (SIDa)	20 kali	8 kali	3 kali	3 kali	100%	-	11 kali	55

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9	10 = (5 + 7 + 9)	11
5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Persentase pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi (SiDA)**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
	Penelitian,Pengembangan,dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Koordinasi dan evaluasi Sida	4 kali	8 kali	4 kali	4 kali	100%	-	12 kali	300
		Jumlah keikutsertaan dalam pameran inovasi tingkat regional	5 event	1 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	3 kali	60
		Jumlah pelaksanaan Pameran Inovasi	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	3 kali	60
		Jumlah Pemenang Krenova	20 pemenang	10 pemenang	5 pemenang	5 pemenang	100%	2 pemenag	17 pemenang	85
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Sosialisasi HKI yang dilaksanakan (SIDa)	1 kali	-	1 kali	1 kali	100%	1 kali	2 kali	200

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

Analisis kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BAPPEDA Kota Pekalongan didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan.

1. Tugas dan Fungsi BAPPEDA

   Tugas dan fungsi BAPPEDA Kota Pekalongan adalah:

   a. Tugas

      Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Oerganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

   b. Fungsi

      Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

      1) perumusan dan penetapan sasaran, program bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
      2) perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
      3) perumusan kebijakan bidang penelitian dan pengembangan;
      4) pengoordinasian perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral dari unit unit kerja Perangkat Daerah dengan perencanaan pembangunan dari Perangkat Daerah Provinsi dan/atau instansi Pemerintah Pusat;
      5) pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan;
      6) pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang penelitian dan pengembangan;
      7) pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
      8) pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
      9) pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas;
      10) pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

2. Struktur Organisasi

   Susunan organisasi BAPPEDA berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dapat diuraikan sebagai berikut:

   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat

1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
d. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan
e. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
f. Bidang penelitian dan pengembangan
g. UPTB; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Kondisi Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di BAPPEDA Kota Pekalongan, sampai dengan Juli 2024 berjumlah 33 orang.

a. Jumlah pegawai BAPPEDA berdasarkan jenjang pendidikan terakhir dari pegawai yang berstatus PNS adalah sebagai berikut:
   1) 9 (sembilan) orang berpendidikan S 2;
   2) 19 (sembilan belas) orang berpendidikan S 1/D IV;
   3) 3 (tiga) orang berpendidikan D III;
   4) 2 (dua) orang berpendidikan setingkat SMA.
b. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut:
   1) Struktural
      a) Eselon II.b : 1 orang
      b) Eselon III.a : 1 orang
      c) Eselon III.b : 4 orang
      d) Eselon IV.a : 2 orang
   2) Pejabat Fungsional : 14 orang
   3) Staf : 11 orang
c. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/Golongan adalah sebagai berikut:
   1) Pembina Utama Muda (IV/c) : 2 orang
   2) Pembina Tk.I (IV/b) : 2 orang
   3) Pembina (IV/a) : 5 orang
   4) Penata Tingkat I (III/d) : 3 orang
   5) Penata (III/c) : 2 orang
   6) Penata Muda Tk. I (III/b) : 5 orang
   7) Penata Muda (III/a) : 9 orang
   8) Pengatur (II/c) : 3 orang
   9) Pengatur Muda (II/a) : 1 orang
   10) PPPK/ Gol IX : 1 orang

4. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, BAPPEDA Kota Pekalongan memiliki sarana prasarana adalah:

a. Mobil Dinas : 3 unit
b. Motor Dinas : 13 unit
c. PC. Unit : 11 unit
d. Laptop/laptop : 41 unit
e. LCD : 5 unit

f.	Drone	:	1 unit
g.	Voice recorder	:	2 unit
h.	GPS Garmin	:	1 buah
i.	Camera	:	5 buah
j.	AC	:	17 unit
k.	Ruang Kerja	:	13 ruang
l.	Ruang Rapat	:	2 ruang
m.	Gudang	:	1 ruang

Sarana prasana untuk Sekretariat pada BAPPEDA Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

a.	Meja kerja	:	6 buah
b.	Meja rapat	:	2 buah
c.	Kursi rapat	:	24 buah
d.	Lemari	:	3 buah
e.	Kursi kerja	:	8 buah
f.	Filling cabinet	:	4 unit
g.	Kipas angin	:	1 unit
h.	Televisi	:	2 unit
i.	Printer/scener	:	7 unit
j.	Mesin ketik	:	1 unit

Sarana prasana untuk Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya pada BAPPEDA Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

a.	Meja kerja	:	9 buah
b.	Meja rapat	:	1 buah
c.	Kursi kerja	:	10 buah
d.	Kursi rapat	:	6 buah
e.	Televisi	:	1 unit
f.	Lemari	:	5 buah
g.	Filling cabinet	:	5 buah
h.	Printer scener	:	5 buah

Sarana prasarana di Ruang Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

a.	Meja kerja	:	5 buah
b.	Meja rapat	:	1 buah
c.	Kursi kerja	:	5 buah
d.	Kursi rapat	:	4 buah
e.	Televisi	:	1 unit
f.	Lemari	:	4 buah
g.	Filling cabinet	:	2 buah
h.	Printer	:	5 buah

Sarana prasarana di Bidang Perekonomian, sumberdaya alam, infrastruktur dan kewilayahan BAPPEDA Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

a.	Meja rapat	:	1 buah
b.	Kursi rapat	:	7 buah
c.	Televisi	:	1 unit
d.	Meja kerja	:	9 buah
e.	Lemari	:	7 buah
f.	Kursi kerja	:	7 buah
g.	Filling cabinet	:	14 buah
h.	Printer/scener	:	4 buah

Sarana prasarana di Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah pada BAPPEDA Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

a.	Meja rapat	:	1 buah
b.	Meja kerja	:	10 buah
c.	Kursi kerja	:	10 buah
d.	Kursi rapat	:	6 buah
e.	Televisi	:	1 unit
f.	Lemari	:	6 buah
g.	Filling cabinet	:	2 buah
h.	Printer/scemer	:	3 buah

5. Permasalahan

Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat, tetapi hanya sebagian saja usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini. Proses perencanaan yang diawali dari Musrenbangkel pada umumnya bersifat agenda tahunan dengan stakeholder yang bersifat sama. Diperlukan wadah atau sistem yang mengakomodir permasalahan pembangunan yang menyeluruh yang menampung permasalahan secara akumulasi selama 1 tahun sehingga perencanan pembangunan dapat menampung permasalahan dan solusi secara luas.

Menurut Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2021, Bappeda merupakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Berdasarkan perwal tersebut, Bappeda mengampu 2 (dua) urusan yaitu urusan perencanaan pembangunan dan urusan penelitian dan pengembangan.

Pada Tahun 2025, Bappeda melaksanakan 2 urusan penunjang pemerintahan yaitu urusan perencanaan pembanguann dan urusan penelitian dan pengembangan, 4 program, 15 kegiatan dan 34 subkegiatan dengan capaian indikator sasaran sebagai berikut :

a) Nilai SAKIP OPD

Penilian didasarkan atas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang meliputi laporan kinerja instansi pemerintah, rencana aksi, perjanjian kinerja dan capaian kinerja OPD pada tingkat kota, provinsi maupun nasional. Nilai SAKIP Bappeda Kota Pekalongan pada periode evaluasi tahun 2023 adalah 88.50 dengan predikat A (Memuaskan) dari darget yang ditetapkan sebesar 89.00.

b) Persentase program RKPD selaras dengan program RPJMD

Uraian sasaran meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dengan indikator persentase program RKPD selaras dengan RPJMD dengan ketercapaian indikator sebesar 100% hal ini didukung oleh ketercapaian jumlah Program RKPD Tahun 2024 sesuai RPJMD sebanyak 125 dan jumlah Program RPJMD yg direncanakan untuk tahun 2023 sebanyak 125.

c) Persentase laporan hasil litbang

Pada uraian sasaran meningkatnya rekomendasi hasil Litbang dengan indikator Persentase laporan hasil litbang pada tahun 2023 realisasi capaian indikator tesebut sebesar 100%. Pencapaian tersebut didukung oleh terlaksananya laporan Riset Unggulan Daaerah sebanyak 5 dokumen, laporan Riset Bersama sebanyak 2 dokumen dan jumlah laporan hasil penelitian sebanyak 7 dokumen.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 2.2. dibawah ini :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2023
Target Dan Proyeksi Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
	Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan Pembangunan dan penelitian pengembangan									
1	Nilai SAKIP OPD			88	89	90	88,50	90	91	indeks
2	Persentase program RKPD selaras dengan program RPJMD			100	100	100	100	100	100	persen
3	Persentase laporan hasil litbang			100	100	100	100	100	100	persen

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2024

2.3 ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

BAPPEDA sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kewajiban daerah di bidang perencanaan dan evaluasi pembangunan penelitian dan pengembangan daerah menghadapi beberapa tantangan mengenai kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan dinamika persoalan yang lain yang ditemui dalam penyelenggaraan pemerintahan. Permasalahan permasalahan umum yang ada dalam penyusunan perencanaan di bidang perencanaan pembangunan secara singkat diuraikan sebagai berikut:

1. Desentralisasi pemerintahan dan pembangunan

   Desentralisasi yang memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat secara aktif merupakan langkah strategis dalam pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan inovasi dalam pengelolaan pembangunan. Akan tetapi, keberhasilan desentralisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dapat berimplikasi pada ketimpangan distribusi pembangunan dan memicu ego sektoral yang berpotensi menghambat pemanfaatan sumber daya secara optimal.

2. Hasil riset belum sepenuhnya menjadi rujukan dalam perencanaan pembangunan

   Hasil-hasil riset yang telah dihasilkan oleh lembaga riset belum secara optimal dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan di Kota Pekalongan. Orientasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lebih mengedepankan target kinerja jangka pendek dan pendanaan seringkali menghambat implementasi program-program jangka panjang yang berkelanjutan. Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan komitmen bersama dalam menjadikan hasil riset sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan kota

3. Kemitraan dalam proses perencanaan pembangunan

   Kemitraan dengan berbagai pihak yang kompeten dan peduli terhadap pembangunan daerah sangatlah penting untuk menciptakan sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kemitraan ini tidak hanya mendorong terciptanya pembangunan yang lebih efektif dan efisien, tetapi juga membangun kepercayaan sosial dan rasa memiliki bersama terhadap hasil pembangunan.

4. Perluasan tuntutan partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan daerah

   Dinamika demokratisasi yang terus berlangsung menuntut peningkatan partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan. Namun, tantangan utama terletak pada pengembangan metode dan mekanisme partisipasi yang efektif dan terarah, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. Adanya budaya patriarki yang masih kuat menjadi salah satu kendala yang perlu diatasi untuk mewujudkan partisipasi yang inklusif.

5. Pluralitas aspirasi dan kebutuhan masyarakat

   Penyelarasan kebijakan dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki masih diperlukan. Dalam masyarakat yang heterogen dengan berbagai kebutuhan dan aspirasi, keputusan memilih suatu keputusan akan menjadi hal yang tidak mudah,

tetapi secara tak terhindarkan harus dilakukan. Karena itu, kebutuhan untuk mengembangkan pola dan sistem yang pengambilan keputusan jelas dan terukur untuk menetukan pemihakan dan pilihan aspirasi segmen masyarakat akan menjadi salah satu isu strategik yang dihadapi institusi perencana.

6. Perubahan regulasi yang berpengaruh terhadap kebijakan daerah

   Dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); sedikit banyak mempengaruhi proses perencanaan dan penganggaran di daerah.

7. Belum optimalnya basis data sebagai bahan penyusunan perencanaan

   Perencanaan pembangunan yang efektif sangat bergantung pada ketersediaan basis data terpadu yang komprehensif dan akurat. Kota Pekalongan telah memiliki basis data terpadu yang mengintegrasikan data dari berbagai sektor, seperti ekonomi, sumber daya, sosial, budaya, dan kewilayahan. Namun demikian efektivitas basis data terpadu masih perlu dioptimalkan lagi.

Permasalahan spesifik yang dihadapi adalah belum optimalnya penyediaan data dan informasi perencanaan pembangunan untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan dinamika perkembangan kebijakan perencanaan pembangunan nasional.

Dalam setiap pengambilan kebijakan sangat diperlukan adanya data dan informasi yang valid, akurat dan *up to date*, sehingga dalam suatu proses akan mudah untuk mengidentifikasi suatu masalah. Dengan keakuratan data dan informasi yang terus menerus diharapkan akan menghasilkan suatu *output* yang tepat. Kurang validnya data dan informasi sering mengakibatkan pengambilan kebijakan yang kurang tepat sasaran. Adapun permasalahan lain yang ada di Bappeda dalam rangka pencapaian tugas dan fungsi, antara lain :

1. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, pemerintahan, sosial dan budaya, sarana dan prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang sinergis dan terintegrasi

   Kebutuhan dokumen perencanaan pendukung masih sangat dibutuhkan dalam upaya penyusunan dokumen perencanaan pemerintahan yang tepat dan terukur. Dokumen tersebut baik yang yang bersifat jangka pendek, menengah maupun panjang. Selain itu karena faktor keterbatasan jumlah personil perencana yang memiliki kompetensi dasar perencanaan pembangunan daerah.

2. Belum efektifnya sistem monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang dikarenakan kurang spesifiknya indikator kinerja, sehingga evaluasi kinerja dan pelaporan yang belum konsisten. Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) diharapkan Monitoring dan Evaluasi dapat lebih efektif.

Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA Kota Pekalongan, diantaranya adalah:

1. Inovasi dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan dengan melibatkan masyarakat untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tuntutan masyarakat yang semakin kritis serta tugas tugas lain yang diberikan pimpinan.
2. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi dalam RPJMD 2021-2026.
4. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan dengan melibatkan masyarakat dengan fasilitasi pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Pekalongan

OPD : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan

REKAP RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	**PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU 2025**	**PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU 2025**	**CATATAN PENTING**
	BAPPEDA				**9.282.312.000**	**BAPPEDA**				**6.843.290.000**	
	PERENCANAAN				8.049.867.000	PERENCANAAN				6.324.854.000	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	6.517.344.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	5.418.748.000	
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		
			Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	100 persen				Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	100 persen		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketersediaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	326.142.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketersediaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	19.916.000	

REKAP RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	**PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU 2025**	**PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU 2025**	**CATATAN PENTING**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	10.576.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	6.972.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	1.623.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	1.394.000	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	313.943.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	11.550.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	5.624.180.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	4.811.585.000	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	5.580.844.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	4.774.293.000	
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	41.860.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	36.000.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.476.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	1.292.000	

REKAP RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	**PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU 2025**	**PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU 2025**	**CATATAN PENTING**
								Keuangan Akhir Tahun SKPD			
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	8.510.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	5.000.000	
7	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	8.510.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	5.000.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	327.303.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	287.256.000	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.338.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.120.000	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	58.370.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	36.500.000	
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	2.677.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	2.400.000	
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	48.191.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	48.536.000	

REKAP RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	**PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU 2025**	**PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU 2025**	**CATATAN PENTING**
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	13.387.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10.990.000	
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	2.544.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	2.340.000	
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	200.796.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	184.370.000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	153.334.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	168.421.000	
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1.343.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	990.000	
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	66.002.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	75.000.000	
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	85.989.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	92.431.000	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	77.875.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	126.570.000	

REKAP RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	**PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU 2025**	**PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU 2025**	**CATATAN PENTING**
	Pemerintahan Daerah										
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	57.720.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	107.000.000	
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	41 Unit	20.155.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	41 Unit	19.570.000	
II	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100 persen	769.719.000	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100 persen	421.464.000	
			Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	100 persen				Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	100 persen		
			Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	8 Laporan				Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	8 Laporan		
7	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan	100 persen	651.184.000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase penyusunan	100 persen	361.259.000	

REKAP RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	**PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU 2025**	**PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU 2025**	**CATATAN PENTING**
								perencanaan dan pendanaan			
20	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	5 Dokumen	651.184.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	5 Dokumen	361.259.000	
8	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase pelaksanaan analisis data melalui forum satu data	100 persen	106.532.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase pelaksanaan analisis data melalui forum satu data	100 persen	15.050.000	
21	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	106.532.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	15.050.000	
9	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100 persen	12.003.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100 persen	45.155.000	
22	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8 Laporan	12.003.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8 Laporan	45.155.000	

REKAP RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	**PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU 2025**	**PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU 2025**	**CATATAN PENTING**
	Pembangunan Daerah										
III	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	100 persen	762.804.000	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	100 persen	484.642.000	
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	100 persen				Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	100 persen		
			Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	100 persen				Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	100 persen		
10	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintagan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan	100 persen	196.592.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintagan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan	100 persen	135.160.000	
23	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	8.567.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	14.965.000	

REKAP RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	**PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU 2025**	**PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU 2025**	**CATATAN PENTING**
24	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	68.541.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	33.500.000	
25	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	25.701.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	14.965.000	
26	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	93.783.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	71.730.000	
11	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dilaksanakan	100 persen	163.110.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dilaksanakan	100 persen	135.030.000	

REKAP RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	**PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU 2025**	**PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU 2025**	**CATATAN PENTING**
27	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	163.110.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	135.030.000	
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 persen	403.102.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 persen	214.452.000	
28	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	197.072.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	154.210.000	
29	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	206.030.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	60.242.000	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.232.445.000	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				518.436.000	
IV	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	100 persen	1.232.445.000	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	100 persen	518.436.000	

REKAP RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	**PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU 2025**	**PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU 2025**	**CATATAN PENTING**
			Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	100 persen				Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	100 persen		
			Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	74 Indeks				Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	74 Indeks		
13	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Capaian pelaksanaan Riset Unggulan Daerah serta pengelolaan Jurnal dan website kelitbangan	100 persen	252.582.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Capaian pelaksanaan Riset Unggulan Daerah serta pengelolaan Jurnal dan website kelitbangan	100 persen	234.598.000	
30	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	5 Laporan	175.573.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	5 Laporan	171.760.000	
31	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	77.009.000	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	62.838.000	
14	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	100 persen	295.859.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	100 persen	111.321.000	
32	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 dokumen	295.859.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 dokumen	111.321.000	
15	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi (SiDA)	100 persen	684.004.000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase pelaksanaan	100 persen	172.517.000	

REKAP RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	**PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU 2025**	**PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU 2025**	**CATATAN PENTING**
								pengembangan inovasi dan teknologi (SiDA)			
33	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 dokumen	659.004.000	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 dokumen	164.117.000	
34	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	25.000.000	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	8.400.000	

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2024

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sebelum melakukan penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, terlebih dahulu telah dilakukan penjaringan aspirasi masyarakat, baik terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berupa usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan perangkat daerah, asosiasi asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan pengamatan pelaksanaan musrenbang tingkat kota. Terhadap aspirasi tersebut kemudian dilakukan inventarisasi dan pengkajian apakah sesuai dengan isu isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah.

Usulan awal program, kegiatan dan sub kegiatan dari perangkat daerah kemudian diselaraskan dengan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui Musrenbang, baik musrenbang kelurahan maupun kecamatan dan kota, serta forum perangkat daerah. Dalam kegiatan ini kemudian diinventarisir pula usulan yang masuk melalui Pagu Indikatif. Sebagai sebuah konsekuensi atas telah ditandatanganinya kesepakatan antara Walikota sebagai pihak Eksekutif dengan DPRD sebagai lembaga legislatif tentang penetapan pagu anggaran, maka semua usulan masyarakat yang masuk sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus dilaksanakan oleh perangkat daerah. Usulan yang dibuat oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitan dan Pengembangan Daerah telah disesuaikan dan telah mengakomodir semua usulan dari pemangku kepentingan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Pada proses Rancangan Awal Renja, belum ada usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Bappeda Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025.

Tabel 2.4 Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Bappeda Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Rencana kerja (renja) perangkat daerah disusun sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Sedangkan RKPD disusun dengan menjabarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Renja Bappeda tahun 2025 sesuai dengan RKPD 2025, yang merupakan penjabaran atas RPJMD 2021-2026.

Selain berpedoman pada RPJMD 2021-2026, RKPD tahun 2025, Renja Bappeda Tahun 2025 juga berpedoman pada RKP Tahun 2025, dengan penyelarasan prioritas pembangunan nasional dengan pembangunan Kota Pekalongan. Adapun Tema RKP Tahun 2025: “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Penyelarasan prioritas pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2024 dengan prioritas nasional disajikan dalam Tabel 3.1 berikut:

Tabel. 3.1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Nasional

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	**PRIORITAS**	**NO**	**PRIORITAS**
1	PN1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah
2	PN2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan		
3	PN3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6	Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
		7	Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup
		8	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	**PRIORITAS**	**NO**	**PRIORITAS**
			kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
4	PN4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1	Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
		3	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan
		5	Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus
5	PN5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	9	Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan
6	PN6 Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2	Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan
		4	Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing
7	PN7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	12	Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	**PRIORITAS**	**NO**	**PRIORITAS**
8	PN8 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	10	Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

Sesuai RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, maka tema pembangunan Kota Pekalongan tahun 2025 ditujukan untuk “Optimalisasi Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemandirian Dengan Dipayungi Nilai-nilai Religiusitas”. Adapun Prioritas pembangunan Kota Pekalongan tahun 2025 difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis Kota Pekalongan tahun 2025. Peenyelarasan prioritas pembangunan Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 3.2. dibawah ini :

Tabel 3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan

Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	**PRIORITAS**	**NO**	**PRIORITAS**
1	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	6	Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
		8	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
		9	Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan
		10	Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal
2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat,	1	Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh,

PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	**PRIORITAS**	**NO**	**PRIORITAS**
	bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata		guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
		2	Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan
		3	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan
		4	Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing
		5	Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus
3	Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan	7	Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup
4	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah
		12	Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi *reward and punishment*

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2025 berpedoman dan mengacu pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Rencana Kerja ini menjabarkan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Tahun 2025 merupakan tahun keempat kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota periode 2021-2026 yang arah kebijakannya sesuai dengan RPJMD 2021-2026. Selain itu Rencana Strategis Bappeda yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja juga sudah disusun untuk jangka waktu 2021-2026. Sehubungan hal tersebut, maka penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mengacu pada RPJMD 2021-2026, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2025 dan didasarkan pada Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Lima Tahun ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025.

Arah kebijakan makro selanjutnya dirumuskan menjadi sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai, selanjutnya dijabarkan lagi dalam sasaran-sasaran perangkat daerah, sehingga terwujud keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan antar waktu dan antar lembaga. Dalam kaitannya dengan penetapan prioritas daerah yang telah disusun berdasarkan tema pembangunan Tahun 2025, maka kedudukan Badan Perencanan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah mendukung secara langsung dalam prioritas daerah yang pertama, yaitu Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel serta terjaganya kondusivitas wilayah.

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman atau acuan bagi semua bidang dan sekretariat di Bappeda dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu juga, renja ini dimaksudkan sebagai bahan untuk mengevaluasi diri dalam meningkatkan kinerja BAPPEDA.

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2025 dengan memedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025, serta isu-isu strategis penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Pekalongan. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan yang ditetapkan adalah ***meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan pengukuran kinerja daerah, serta meningkatkan kualitas kelitbangan untuk mendukung kualitas perencanaan pembangunan*** dengan sasaran ***meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan meningkatnya rekomendasi hasil litbang***, sehingga BAPPEDA sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, serta membantu Kepala Daerah dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah dituntut untuk menghasilkan produk produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan teknologi yang inovatif yang efektif dan efisien.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh BAPPEDA dengan dukungan perangkat daerah lain serta masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang lebih terukur.

Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan di BAPPEDA antara lain terhadap:

1. Pencapaian prioritas dan sasaran daerah;
2. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah; dan
3. Sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam kaitannya dengan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan, pada tahun 2025, BAPPEDA Kota Pekalongan merencanakan akan mencapainya dengan melaksanakan 4 Program yang terdiri 15 kegiatan dengan 34 sub kegiatan dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Pekalongan.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2025 yang telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2025, tercantum dalam tabel 3.2. sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Tahun 2025

Dan Perkiraan Maju Tahun 2026

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2025				PERKIRAAN MAJU PERKIRAAN TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET	PAGU 2025	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
		BAPPEDA Kota Pekalongan				6.843.290.000			**9.392.179.000**
	5.01	PERENCANAAN				6.324.854.000			**8.139.035.000**
I	5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja		100 persen	5.418.748.000	APBD Kota Pekalongan	100 persen	6.725.961.000
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 persen			100 persen	
			Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah		100 persen			100 persen	
1	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 persen	19.916.000		100 persen	320.211.000
1	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 dokumen	6.972.000	APBD Kota Pekalongan	3 dokumen	2.716.000

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2025				PERKIRAAN MAJU PERKIRAAN TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET	PAGU 2025	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 dokumen	1.394.000	APBD Kota Pekalongan	2 dokumen	1.630.000
3	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15 Laporan	11.550.000	APBD Kota Pekalongan	15 Laporan	315.865.000
2	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah		100 persen	4.811.585.000		100 persen	5.827.228.000
4	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	32 Orang/bulan	4.774.293.000	APBD Kota Pekalongan	32 Orang/bulan	5.784.450.000
5	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan	12 dokumen	36.000.000	APBD Kota Pekalongan	12 dokumen	41.321.000
6	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan	1 Laporan	1.292.000	APBD Kota Pekalongan	1 Laporan	1.457.000
3	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 persen	5.000.000		100 persen	8.639.000
7	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan	1 Paket	5.000.000	APBD Kota Pekalongan	1 Paket	8.639.000

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2025				PERKIRAAN MAJU PERKIRAAN TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET	PAGU 2025	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 persen	287.256.000		100 persen	332.253.000
8	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan	4 Paket	2.120.000	APBD Kota Pekalongan	4 Paket	1.359.000
9	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan	4 Paket	36.500.000	APBD Kota Pekalongan	4 Paket	59.254.000
10	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Pekalongan	4 Paket	2.400.000	APBD Kota Pekalongan	4 Paket	2.717.000
11	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan	4 Paket	48.536.000	APBD Kota Pekalongan	4 Paket	48.920.000
12	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pekalongan	2 Paket	10.990.000	APBD Kota Pekalongan	2 Paket	13.589.000
13	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pekalongan	2 dokumen	2.340.000	APBD Kota Pekalongan	2 dokumen	2.582.000
14	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	200 Laporan	184.370.000	APBD Kota Pekalongan	200 Laporan	203.832.000

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2025				PERKIRAAN MAJU PERKIRAAN TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET	PAGU 2025	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
5	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	168.421.000		100 persen	157.932.000
15	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	4 Laporan	990.000	APBD Kota Pekalongan	4 Laporan	1.363.000
16	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Pekalongan	12 Laporan	75.000.000	APBD Kota Pekalongan	12 Laporan	67.000.000
17	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan	12 Laporan	92.431.000	APBD Kota Pekalongan	12 Laporan	89.569.000
6	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 persen	126.570.000		100 persen	79.698.000
18	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Pekalongan	14 Unit	107.000.000	APBD Kota Pekalongan	14 Unit	59.238.000
19	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pekalongan	41 Unit	19.570.000	APBD Kota Pekalongan	41 Unit	20.460.000

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2025				PERKIRAAN MAJU PERKIRAAN TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET	PAGU 2025	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
II	5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu		100 persen	421.464.000		100 persen	620.952.000
			Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu		100 persen			100 persen	
			Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu		8 Laporan			8 Laporan	
7	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan		100 persen	361.259.000		100 persen	498.531.000
20	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Kota Pekalongan	5 Dokumen	361.259.000	APBD Kota Pekalongan	5 Dokumen	498.531.000
8	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan analisis data melalui forum satu data		100 persen	15.050.000		100 persen	109.690.000
21	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Kota Pekalongan	1 Dokumen	15.050.000	APBD Kota Pekalongan	1 Dokumen	109.690.000

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2025				PERKIRAAN MAJU PERKIRAAN TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET	PAGU 2025	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
9	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah		100 persen	45.155.000		100 persen	12.731.000
22	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kota Pekalongan	8 Laporan	45.155.000	APBD Kota Pekalongan	8 Laporan	12.731.000
III	5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud		100 persen	484.642.000		100 persen	792.122.000
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian		100 persen			100 persen	
			Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah		100 persen			100 persen	
10	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintagan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan		100 persen	135.160.000		100 persen	216.705.000

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2025				PERKIRAAN MAJU PERKIRAAN TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET	PAGU 2025	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
23	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Pekalongan	1 Laporan	14.965.000	APBD Kota Pekalongan	1 Laporan	8.727.000
24	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Kota Pekalongan	1 Laporan	33.500.000	APBD Kota Pekalongan	1 Laporan	76.798.000
25	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Pekalongan	1 Laporan	14.965.000	APBD Kota Pekalongan	1 Laporan	26.181.000
26	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Kota Pekalongan	1 Laporan	71.730.000	APBD Kota Pekalongan	1 Laporan	104.999.000

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2025				PERKIRAAN MAJU PERKIRAAN TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET	PAGU 2025	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
11	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dilaksanakan		100 persen	135.030.000		100 persen	166.220.000
27	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Kota Pekalongan	1 Laporan	135.030.000	APBD Kota Pekalongan	1 Laporan	166.220.000
12	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100 persen	214.452.000		100 persen	409.197.000
28	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Kota Pekalongan	2 Laporan	154.210.000	APBD Kota Pekalongan	2 Laporan	200.052.000
29	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Kota Pekalongan	2 Laporan	60.242.000	APBD Kota Pekalongan	2 Laporan	209.145.000
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				518.436.000			1.253.144.000

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2025				PERKIRAAN MAJU PERKIRAAN TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET	PAGU 2025	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
IV	5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD		100 persen	518.436.000		100 persen	1.253.144.000
			Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan		100 persen			100 persen	
			Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)		74 persen			74 persen	
13	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Capaian pelaksanaan Riset Unggulan Daerah serta pengelolaan Jurnal dan website kelitbangan		100 persen	234.598.000		100 persen	257.175.000
30	5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kota Pekalongan	5 Laporan	171.760.000	APBD Kota Pekalongan	5 Laporan	178.228.000
31	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Kota Pekalongan	1 Laporan	62.838.000	APBD Kota Pekalongan	1 Laporan	78.947.000
14	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial		100 persen	111.321.000		100 persen	301.622.000
32	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kota Pekalongan	2 dokumen	111.321.000	APBD Kota Pekalongan	2 dokumen	301.622.000

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2025				PERKIRAAN MAJU PERKIRAAN TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET	PAGU 2025	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
15	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi (SiDA)		100 persen	172.517.000		100 persen	694.347.000
33	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Pekalongan	2 dokumen	164.117.000	APBD Kota Pekalongan	2 dokumen	694.347.000
34	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kota Pekalongan	1 Laporan	8.400.000	APBD Kota Pekalongan	1 Laporan	-

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bappeda Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menetapkan tujuan, sasaran, stategi dan kebijakan yang diarahkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Pekalongan. Untuk dapat menjalankan proses tersebut, beberapa kegiatan direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2025 yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana kerja ini selain sebagai upaya menjalankan tugas dan fungsi, juga dalam upaya melaksanakan pencapaian target program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025. Rencana kerja Bappeda Tahun 2025 mengacu kepada Renstra Bappeda 2021-2026, mempunyai program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi. Program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda Tahun 2025 mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang sudah ada dalam SIPD, sehingga ketercapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.

Rencana kerja dan pendanaan Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025

No.	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome / Output	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	BAPPEDA	**6.843.290.000**		
A	**Urusan Perencanaan Pembangunan**	6.324.854.000		
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	5.418.748.000	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen
			Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	100 persen
1	***Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	19.916.000	Persentase ketersediaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.972.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.394.000	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.550.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan
2	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	4.811.585.000	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.774.293.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan

No.	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome / Output	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	PelaksanaanPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD	36.000.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD	1.292.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
3	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	5.000.000	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket
4	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	287.256.000	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2.120.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket
9	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor	36.500.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.400.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket
11	Penyediaan BahanLogistik Kantor	48.536.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.990.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	2.340.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen
14	Rapat Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	184.370.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan
5	***Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah***	168.421.000	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	990.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	92.431.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
6	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah***	126.570.000	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan PajakKendaraan Perorangan	107.000.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit

No.	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome / Output	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
19	PemeliharaanRehabilitasiSarana dan PrasaranaGedung Kantor atauBangunan Lainnya	19.570.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	41 Unit
II	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	421.464.000	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100 persen
			Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	100 persen
			Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	8 Laporan
7	***Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan***	361.259.000	Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan	100 persen
20	Koordinasi Penyusunandan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	361.259.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	5 Dokumen
8	***Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah***	15.050.000	Persentase pelaksanaan analisis data melalui forum satu data	100 persen
21	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	15.050.000	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen
9	***Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah***	45.155.000	Persentase pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100 persen
22	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	45.155.000	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8 Laporan
III	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	484.642.000	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	100 persen
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	100 persen
			Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	100 persen
10	***Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia***	135.160.000	Persentase kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintagan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan	100 persen
23	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	14.965.000	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	1 Laporan

No.	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome / Output	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
24	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	33.500.000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan
25	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14.965.000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan
26	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	71.730.000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan
11	***Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomiandan SDA (Sumber Daya Alam)***	135.030.000	Persentase kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dilaksanakan	100 persen
27	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	135.030.000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan
12	***Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan***	214.452.000	Persentase pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 persen
28	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang nfrastruktur	154.210.000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan
29	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	60.242.000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan
B	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	518.436.000		
IV	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	518.436.000	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	100 persen
			Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	100 persen
			Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	74 persen
13	***Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan***	234.598.000	Capaian pelaksanaan Riset Unggulan Daerah serta pengelolaan Jurnal dan website kelitbangan	100 persen
30	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	171.760.000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	5 Laporan
31	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	62.838.000	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan

No.	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome / Output	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	***Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan***	111.321.000	Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	100 persen
32	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial	111.321.000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 dokumen
15	***Pengembangan Inovasi dan Teknologi***	172.517.000	Persentase pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi (SiDA)	100 persen
33	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	164.117.000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 dokumen
34	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	8.400.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2024

Dari tabel 4.1 tersebut diatas dapat dilihat bahwa rencana kerja pada tahun 2025 Bappeda Kota Pekalongan melaksanakan 2 (dua) Penunjang Urusan Pemerintahan yaitu Urusan Perencanaan Pembangunan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan, kedua urusan tersebut dituangkan ke dalam 4 (empat) Program, 15 (lima belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan.

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Rancangan Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2025 disusun berdasarkan pada dokumen perencanaan jangka menengah RPJMD Kota Pekalongan 2021-2026, dan RENSTRA Bappeda 2021-2026 serta dokumen perencanaan tahunan RKPD Kota Pekalongan tahun 2025. Rencana Kerja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, analisis kebutuhan, dan usulan dari para pemangku kepentingan. Rencana Kerja Bappeda Tahun 2025 memuat 2 unsur penunjang urusan pemerintahan, yaitu urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan, yang terdiri dari 4 program 15 kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 6.843.290.000,- (enam milyar delapan ratus empat puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Substansi Renja Bappeda disusun dengan berpedoman Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

5.1 CATATAN PENTING

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja BAPPEDA telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Keterlibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang dan forum perangkat daerah.

5.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Perencanaan yang baik adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku yang berkepentingan dalam pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*) yang tetap harus dikedepankan.

Dalam rangka meningkatkan kefektifan pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2025, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagi berikut:

1. Substansi Renja Bappeda disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025.
2. Tindak lanjut alokasi anggaran Bappeda Kota Pekalongan atas proses penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Renja Bappeda, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian target yang telah ditetapkan.
3. Bidang-bidang pada Bappeda, agar segera menyusun rencana kerja anggaran (RKA) masing masing dengan mengacu pada Renja yang telah ditetapkan.
4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.

5.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebik baik di masa yang akan datang dengan memanfaatkan, mengelola potensi

dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan oleh masing masing bidang atau bagian. Dengan demikian kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Kami berharap, bahwa Renja Bappeda ini dapat mengakomodir seluruh target indikor kinerja untuk urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan. Adapun jika terdapat kendala dalam capaian indikator kinerja tersebut, baik diakibatkan masih belum memadainya anggaran dan permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025.

Pekalongan, 1 Agustus 2024

Kepala Bappeda Kota Pekalongan

CAYEKTI WIDIGDO, AP.,MSI
Pembina Utama Muda
NIP 19750729 199412 1 001

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Pekalongan
World's City of Batik

RENCANA KERJA

TAHUN 2025

BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKALONGAN

Jl. Sriwijaya No. 44 Pekalongan Telp. 0285 – 429451

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2025

BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PEKALONGAN
Jl. Sriwijaya No. 44 Pekalongan Telp. 0285 – 429451

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Petunjuk dan HidayahNya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan semua Kebijakan, Program dan Sasaran serta Kegiatan yang dilaksanakan sesuai Rencana Kerja Tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja ini kami ucapkan terima kasih.

Pekalongan, Juli 2024

KEPALA BPKAD KOTA PEKALONGAN

Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc

Pembina Utama Muda

NIP. 196507171992032014

DAFTAR ISI

COVER i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.... 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra BPKAD Kota Pekalongan 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD 46
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 61

BAB III TUJUAN DAN SASARAN 63
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 63
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD 65
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 66

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 82
4.1 Rencana Kerja 82
4.2 Pendanaan Perangkat Daerah 83

BAB V PENUTUP 88

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perumusan rancangan awal Renja merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada OPD dalam menyusun Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 teknokratis dan partisipatif. Dokumentasi perumusan dan keseluruhan tahan perencanaan pembangunan daerah dijadikan sebagai kertas kerja *(working paper).* Suatu kertas kerja perumusan dan keseluruhan tahap penyusunan RKPD merupakan dokumen yang tak terpisah dan dijadikan sebagai dasar penyajian (dokumen).

Rencana Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025 merupakan Dokumen Rencana dengan wawasan satu tahun ke depan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) harus memperhatikan seluruh perubahan sosial, politik, dan ekonomi serta menjadikan hasil evaluasi perencanaan tahun sebelumnya sebagai referensi.

Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dalam mendukung penyelenggaraan Program Pembangunan tahunnan pemerintah daerah, sehingga dalam Rencana Kerja (Renja) tahunnan yang berisikan Progam dan Kegiatan yang disusun lebih menekankan kepada Pengelolaan Keuangan sebagai wujud dari dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2025, tentunya progam dan kegiatan tersebut mendukung pelaksanaan prioritas kinerja pembangunan Kota Pekalongan yang mengusung visi Kota Pekalongan yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat”. Peran serta Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dalam misi dimaksud adalah meningkatkan penyelenggaraan

pemerintahan yang efektif berkualitas transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah terwujud sebagai manifestasi daripada materi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah dijabarkan di dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 yaitu di dalam Prioritas Kinerja Pembangunan Kota Pekalongan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan maupun Renstra Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Disamping itu, Renja yang disusun ini telah disinkronisasi dengan acuan Rencana Kerja Kementerian Lembaga (Renja K/L), Rencana Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga menjadi rujukan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Pekalongan Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
8. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

17. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang “Pekalongan Kota Batik” sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Pekalongan didalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya;
25. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kota Pekalongan tahun 2021-2026;

26. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah;
27. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025.

1.3 Maksud Dan Tujuan

A. Maksud

Rencana Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai pedoman atau acuan bagi pihak-pihak kepentingan baik internal maupun eksternal lingkup kedinasan maupun tingkat Kota Pekalongan dan merupakan penjabaran dari implementasi pelaksanaan Indikator Kinerja Tahun yang akan datang di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan dalam menciptakan kesepakatan dan komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan misi Kota Pekalongan 2021-2026. Serta sebagaian acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran tahun 2025.

B. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menyusun program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2025;
2. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan dengan pembanding Renja Tahun sebelumnya maupun Tahun yang

akan datang;

4. Pedoman dalam menyusun dokumen rencana agenda pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025 berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Tahun 2025;
5. Penetapan Pelaksanaan Program Kegiatan Badan Keuangan Dearah Kota Pekalongan yang direncanakan dalam pembebanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja PD yang berisi latar belakang penyusunan rencana kerja, landasan hukum atau peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan rencana kerja, penjelasan mengenai maksud dan tujuan, serta sistematika bahasaan tiap bab dalam Renja PD.

BAB 2 HASIL EVALUSASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, berisikan tentang evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah,, Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, berisikan tentang Telaahan Visi, Misi, Dan Program Walikota Dan Wakil Walikota dan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, Tujuan dan sasaran renja perangkat daerah dan Program dan Kegiatan.

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN, berisikan rencana kerja kegiatan, capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra PD dan pagu program dan kegiatan.

BAB 5 PENUTUP, berisikan uraian penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra BPKAD Kota Pekalongan

Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan dalam menjalankan tugasnya sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2021-2026 sebanyak 2 (dua) sasaran.

Tahun 2023 adalah tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan adalah sebagaimana pada Tabel dibawah di ini

Tabel 2.1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indek Pengelolaan Keuangan Baik (Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu)	persen	100	100	100%
2	Rasio PAD	persen	1.98	2.26	114%
3	Nilai SAKIP OPD	persen	84.5	84.35	100%

Dari tabel tersebut dapat diketahui capaian indikator kinerja utama pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Capaian kinerja pada indikator Indek Pengelolaan Keuangan Baik

(Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu) sebesar 100%. Capaian ini sesuai dengan target yang ditetapkan.

- Capaian kinerja pada indikator Rasio PAD sebesar 114%. Capaian ini melebihi/melampaui target yang ditetapkan.
- Capaian kinerja pada indikator nilai SAKIP OPD sebesar 100%. Capaian ini melebihi/melampaui target yang ditetapkan.

Faktor pendukung yang mempengaruhi capaian indikator kinerja utama pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

- Semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga cukup membantu dalam pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah
- Peningkatan SDM melalui Bintek/Pelatihan/Diklat tentang pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah dan aset daerah
- Pendampingan/Desk dalam penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan termasuk penyusunan laporan aset dan persediaan
- Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP), dengan pembayaran non tunai untuk Pajak dan Retribusi sesuai dengan Roadmap (ETP) 2021-2025
- Pelaksanaan E-monitoring pajak daerah (tapping box dan sejenisnya)
- Pemberian Stimulus PBB
- Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD
- Penggunaan ZNT BPN sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2;
- Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah;
- Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verfikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak
- Pengembangan Aplikasi Pendapatan (Simpatda, Sismiop, e-BPHTB, e-SPTD) menyesuaikan regulasi terbaru
- Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek antara data

simpatda di BPKAD dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya

- Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah
- Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idle cash dalam bentuk deposito
- Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan brand image
- Adanya komitmen Pimpinan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan good governance dan clean government
- Melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi SAKIP oleh APIP
- Evaluasi kinerja yang dilakukan setiap triwulan untuk menggali permasalahan dan mencarikan solusinya terhadap kinerja yang belum tercapai

Untuk melihat capaian kinerja baik secara terperinci tersaji dalam tabel 2.1.2 dibawah ini :

Tabel 2.1.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan / Indikator	Satuan	Target Akhir Renstra 2021-2026	Kondisi Kinerja Awal	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026
							Target Perubahan Renja	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	Persen	7.26	11.91	11.08	6.13	8.08	5.79	60.45%	79.75%	Tercapai
A	Persentase ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100%	100%	Tercapai
1	Jumlah dokumen KUA PPAS APBD yang disusun	Dokumen	1	2	2	2	2	2	100%	200%	Tercapai
2	Jumlah dokumen KUPA PPAS Perubahan APBD yang disusun	Dokumen	-	2	2	2	2	2	100%	-	Indikator baru (Sub Kegiatan baru)
3	Jumlah kegiatan asistensi RKA PD/unit kerja yang dilaksanakan	Kali	2	2	2	2	2	2	100%	100%	Tercapai
4	Jumlah dokumen pedoman penyusunan RKA yang disusun	Dokumen	2	2	2	2	2	2	100%	100%	Tercapai
5	Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan	Kali	1	1	1	1	1	1	100%	100%	Tercapai
6	Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD Kota Pekalongan yang disusun	Dokumen	4	4	4	4	4	4	100%	100%	Tercapai
7	Dokumen perda dan perwal APBD Kota Pekalongan	Dokumen	2	2	2	2	2	2	100%	100%	Tercapai
8	Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan	Kali	1	1	1	1	1	1	100%	100%	Tercapai
9	Jumlah Bahan sidang Raperda dan Raperwal perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun	Dokumen	4	4	4	4	4	4	100%	100%	Tercapai

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan / Indikator	Satuan	Target Akhir Renstra 2021-2026	Kondisi Kinerja Awal	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026
							Target Perubahan Renja	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Dokumen perda dan perwal perubahan APBD Kota Pekalongan	Dokumen	2	2	2	2	2	2	100%	100%	Tercapai
11	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal / perwal di Kota Pekalongan	Bulan	12	12	12	12	12	12	100%	100%	Tercapai
12	Jumlah koordinasi perencanaan anggaran yang dilaksanakan	Kali	16	16	19	16	16	16	100%	100%	Tercapai
B	Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD dan Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D	Persen	100	100	0	100	100	100	100%	100%	Tercapai
13	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah	Kali	12	12	12	12	12	12	100%	100%	Tercapai
14	Jumlah dokumen SPD yang diterbitkan	Dokumen	3	3	3	3	4	4	100%	133%	Tercapai
15	Jumlah OPD yang diterbitkan dan dicairkan dokumen SP2Dnya	OPD	-	80	80	-	-	-	-	-	Perubahan indikator (indikator lama)
16	Jumlah OPD yang SP2D nya di terbitkan dan dicairkan	OPD	-	-	-	67	67	67	100%	-	Perubahan indikator (indikator baru)
17	Jumlah laporan Dana Transfer per bidang yang disusun	Laporan	30	2	2	30	26	26	100%	87%	Tercapai
18	Jumlah pelaksanaan pelatihan/monitoring pelaksanaan transaksi non tunai	Kali	2	4	4	2	2	2	100%	100%	Tercapai
19	Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan	Data SPT Tahunan	3120	3120	3130	3165	3455	3455	100%	111%	Tercapai
20	Jumlah pelaksanaan penerbitan daftar gaji PNS Kota Pekalongan	Kali	14	14	13	14	14	14	100%	100%	Tercapai

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan / Indikator	Satuan	Target Akhir Renstra 2021-2026	Kondisi Kinerja Awal	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026
							Target Perubahan Renja	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Jumlah dokumen/pedoman penatausahaan keuangan daerah yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	100%	100%	Tercapai
22	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah	Kali	3	5	5	3	3	3	100%	100%	Tercapai
C	Persentase Ketersediaan Perda dan Perwal Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu	Persen	100	100	0	100.00	100	100	100%	100%	Tercapai
23	Jumlah laporan rekonsiliasi pendapatan dan belanja SKPD/SKPKD	Laporan	68	65	65	68	68	68	100%	100%	Tercapai
24	Jumlah laporan rekap SKRD/SKPD pengelola pendapatan	Laporan	7	-	-	7	7	7	100%	100%	Tercapai
25	Jumlah laporan realisasi anggaran dan prognosis yang disusun	Laporan	13	13	13	13	13	13	100%	100%	Tercapai
26	Jumlah rekonsiliasi Laporan Keuangan BLUD dan SKPD yang dilaksanakan	Kali	5	5	7	5	5	5	100%	100%	Tercapai
27	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan Keuangan Konsolidasi) yang disusun	Laporan	7	7	7	7	7	7	100%	100%	Tercapai
28	Jumlah dokumen Perda dan Perwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	Dokumen	2	2	2	2	2	2	100%	100%	Tercapai
29	Jumlah publikasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kali	1	1	1	1	1	1	100%	100%	Tercapai
30	Jumlah laporan MP TP-TGR yang disusun	Laporan	12	12	12	12	12	12	100%	100%	Tercapai
31	Jumlah dokumen kebijakan teknis pengelolaan keuangan yang disusun	Dokumen	1	2	2	1	1	1	100%	100%	Tercapai
32	Jumlah pembinaan/ desk/ rekonsiliasi Laporan Keuangan BLUD yang dilaksanakan	Kali	4	10	10	4	4	4	100%	100%	Tercapai

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan / Indikator	Satuan	Target Akhir Renstra 2021-2026	Kondisi Kinerja Awal	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026
							Target Perubahan Renja	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Jumlah pelaporan dana bergulir yang disusun	Laporan	4	4	4	-	-	-	-	-	Perubahan indikator (indikator lama)
34	Jumlah pendampingan pengelolaan keuangan OPD yang dilaksanakan	Kali	12	4	4	4	4	4	100%	33%	Perubahan indikator (indikator baru)
35	Jumlah unit kerja yang didampingi dalam pelaporan dana bergulir	Unit Kerja	-	-	4	4	4	4	100%	-	Perubahan indikator (indikator baru)
36	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran yg disusun	Laporan	-	16	16	-	-	-	-	-	Perubahan indikator (indikator lama)
37	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Dana Blud yg disusun	Laporan	-	16	16	-	-	-	-	-	Perubahan indikator (indikator lama)
D	Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos	Persen	100	100	100	100	100	100	100%	100%	Tercapai
38	Jumlah bulan penyediaan dana BTT	Bulan	12	12	12	12	12	12	100%	100%	Tercapai
II	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100%	Tercapai
E	Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap dan Persediaan	Persen	100	100	0	100	100	100	100%	100%	Tercapai
39	Jumlah buku standar harga yang disusun	Buku	2	2	2	2	2	2	100%	100%	Tercapai
40	Jumlah buku Analis Standar Biaya yang disusun	Buku	-	-	-	10	-	-	-	-	Perubahan indikator (indikator baru)

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan / Indikator	Satuan	Target Akhir Renstra 2021-2026	Kondisi Kinerja Awal	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026
							Target Perubahan Renja	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Jumlah buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah	Buku	2	2	2	2	-	-	-	-	Tercapai
42	Jumlah papan nama aset	Buah	55	55	55	50	-	-	-	-	Tidak Tercapai
43	Jumlah patok batas tanah	Patok	600	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Tercapai
44	Jumlah pengajuan sertifikat	Bidang	20	750	750	350	250	250	100%	1250%	Tercapai
45	Jumlah jenis BMD yang akan dinilai untuk pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD	Jenis	3	3	4	3	3	2	67%	67%	Tercapai
46	Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang terehabilitasi sedang/berat	Unit	1	1	1	1	1	1	100%	100%	Tercapai
47	Jumlah gedung /aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin/berkala	Unit	2	2	2	2	2	2	100%	100%	Tercapai
48	Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi sedang/berat	Unit	3	3	1	-	4	2	50%	67%	Tercapai
49	Jumlah pelaksanaan lelang garapan tanah eks bengkok	Kali	5	5	5	5	4	4	100%	80%	Tercapai
50	Jumlah laporan/data BMD dan Barang Persediaan	Laporan	79	79	79	79	81	81	100%	103%	Tercapai
III	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	Persen	0.05	0.05	0.06	0.02	5	4.8	95.83%	9600%	Tercapai
F	Persentase realisasi pendapatan pajak dan retribusi yang dikelola BKD	Persen	100	106.7	106.7	107.15	100	114.48	114%	114%	Tercapai
51	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	-	-	-	1	1	1	100%	-	Indikator baru (Sub Kegiatan baru)
52	Jumlah kegiatan Walikota Pekalongan Regional Tax Award yang dilaksanakan	Kali	1	1	1	1	-	-	-	-	Tercapai
53	Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah yang disusun	Dokumen	2	-	-	2	-	-	-	-	Tercapai

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan / Indikator	Satuan	Target Akhir Renstra 2021-2026	Kondisi Kinerja Awal	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026
							Target Perubahan Renja	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun	Laporan	12	-	-	12	12	12	100%	100%	Tercapai
55	Jumlah pelaksanaan rakor bidang pendapatan	Kali	6	-	-	8	4	4	100%	67%	Tercapai
56	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan yang dilaksanakan	Kali	-	-	-	12	1	1	100%	-	Perubahan indikator (indikator baru)
57	Jumlah surat tagihan yang diterbitkan	Surat	3060	4000	5486	4202	3060	3904	128%	128%	Tercapai
58	Terperiksanya wajib pajak dan retribusi daerah	Wajib Pajak	8	75	180	100	140	242	173%	3025%	Tercapai
59	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	Kali	50	50	388	198	180	224	124%	448%	Tercapai
G	Persentase peningkatan potensi pendapatan pajak	Persen	5.0	4.5	26.09	15	4.7	13.94	297%	279%	Tercapai
60	Jumlah objek pajak dan retribusi yang didata	Objek	1500	1500	1536	1768	1500	1554	104%	104%	Tercapai
61	Jumlah Objek Pajak yang dimonitoring	Objek	1140	1140	1140	1200	1140	1162	102%	102%	Tercapai
62	Jumlah Kajian Proyeksi Potensi Pajak Darah	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	Indikator baru (Sub Kegiatan baru)
63	Jumkah sistem informasi baru yang diadakan	Aplikasi	-	2	2	1	1	1	100%	-	Tercapai
64	Jumlah sistem informasi yang dilakukan pemeliharaan	Aplikasi	8	8	32	8	8	8	100%	100%	Tercapai
65	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan	Aplikasi	-	-	-	1	4	4	100%	-	Penambahan indikator
67	Jumlah Berkas Permohonan Pelayanan PBB yg diproses dan diselesaikan	Berkas	2000	2000	2859	3791	2000	2054	103%	103%	Tercapai

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan / Indikator	Satuan	Target Akhir Renstra 2021-2026	Kondisi Kinerja Awal	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026
							Target Perubahan Renja	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Jumlah Buku DHKP PBB 2021 yang disusun	Buku	94	94	94	94	94	94	100%	100%	Tercapai
69	Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB 2021	Buku	4	4	4	4	4	4	100%	100%	Tercapai
70	Jumlah Objek Pajak PBB yang terupdate	Objek	8000	-	-	6313	628	628	100%	8%	Tidak Tercapai
71	Jumlah dan Ketetapan SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan	Lembar	93000	93000	95019	95130	94000	94543	101%	102%	Tercapai
72	Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang dibuat	Lembar	19000	19000	19596	20110	19000	19608	103%	103%	Tercapai
73	Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota	Orang/ bulan	1	1	4	1	-	-	-	-	Tercapai
74	Jumlah wajib pajak dan wajib reklame yang terlayani	WP/ WR	14400	6000	6142	18360	14400	15241	106%	106%	Tercapai
75	Jumlah berkas BPHTB yang diverifikasi	Berkas	1500	1500	2588	2126	2000	2113	106%	141%	Tercapai
IV	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100	100	100	100	100	100	100%	100%	Tercapai
H	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100%	100%	Tercapai
76	Jumlah dokumen renja yang disusun	Dokumen	2	2	2	2	2	2	100%	100%	Tercapai
77	Jumlah dokumen renstra yang disusun	Dokumen	-	1	1	-	-	-	-	-	Tercapai
78	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	Dokumen	2	-	-	2	2	2	100%	100%	Perubahan indikator (indikator baru)
79	Jumlah dokumen RKA, Perubahan RKA, DPA dan Perubahan DPA yang disusun	Dokumen	-	4	4	-	-	-	-	-	Perubahan indikator (indikator lama)
80	Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	Dokumen	4	4	4	4	4	4	100%	100%	Tercapai

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan / Indikator	Satuan	Target Akhir Renstra 2021-2026	Kondisi Kinerja Awal	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026
							Target Perubahan Renja	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun	Dokumen	2	2	2	-	-	-	-	-	Perubahan indikator (indikator lama)
82	Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	-	-	-	-	-	Perubahan indikator (indikator lama)
83	Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	Dokumen	5	5	5	5	5	5	100%	100%	Tercapai
84	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	Bulan	-	-	-	12	12	12	100%	-	Perubahan indikator (indikator baru)
85	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (Penetapan dan Perubahan)	Dokumen	-	-	-	2	2	2	100%	-	Perubahan indikator (indikator baru)
I	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	0	100	100	100	100%	100%	Tercapai
86	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	12	12	12	12	12	100%	100%	Tercapai
87	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	Bulan	12	12	12	12	12	12	100%	100%	Tercapai
88	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	100%	100%	Tercapai
V	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	100	100	100.46	100%	100%	Tercapai

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan / Indikator	Satuan	Target Akhir Renstra 2021-2026	Kondisi Kinerja Awal	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026
							Target Perubahan Renja	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
J	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	100	0	100	100	101.38	101%	101%	Tercapai
89	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	100%	100%	Tercapai
90	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	Bulan	12	12	12	12	12	12	100%	100%	Tercapai
91	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Unit	15	39	47	86	45	45	100%	300%	Tercapai
92	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12	12	12	12	12	12	100%	100%	Tercapai
93	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Bulan	11	11	11	11	11	11	100%	100%	Tercapai
94	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	12	12	12	12	100%	100%	Tercapai
95	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	12	12	12	12	12	100%	100%	Tercapai
96	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	Orang/kali	200	300	384	319	300	329	110%	165%	Tercapai
K	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	0	100	100	100	100%	100%	Tercapai
97	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	12	12	12	12	12	100%	100%	Tercapai
98	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12	100%	100%	Tercapai
99	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	100%	100%	Tercapai
VI	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100%	100%	Tercapai

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan / Indikator	Satuan	Target Akhir Renstra 2021-2026	Kondisi Kinerja Awal	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026
							Target Perubahan Renja	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100%	100%	Tercapai
100	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Perorangan Roda 4 yang diadakan	Unit	-	-	-	2	7	7	100%	-	Tercapai
101	Jumlah Kendaraan Operasional Roda 2 yang diadakan	Unit	-	-	-	2	8	8	100%	-	Tercapai
102	Jumlah Kendaraan Operasional Roda 4 yang diadakan	Unit	-	-	-	6	6	6	100%	-	Tercapai
103	Jumlah Sepeda Listrik yang diadakan	Unit	-	-	-	2	-	-	-	-	Tercapai
M	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100%	100%	Tercapai
104	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	Unit	47	47	38	-	-	-	-	-	Perubahan indikator (indikator lama)
105	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Bulan	-	-	-	12	12	12	100%	-	Perubahan indikator (indikator baru)
106	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	Unit	1	1	1	1	1	1	100%	100%	Tercapai
107	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	100%	100%	Tercapai
N	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100%	100%	Tercapai
108	Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota	Kali	2	-	-	-	-	-	-	-	Perubahan indikator (indikator lama)

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan / Indikator	Satuan	Target Akhir Renstra 2021-2026	Kondisi Kinerja Awal	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026
							Target Perubahan Renja	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi	Kali	-	-	-	1	1	1	100%	-	Perubahan indikator (indikator baru)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja pelayanan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023, dapat dilihat melalui rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaran pemerintah dalam mencapai Visi dan Misi sesuai dengan IKK dan RPJMD yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dengan beberapa aspek/ fokus sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan internal dan keuangan dengan diperolehnya opini WTP, Penetapan Peraturan APBD yang tepat waktu dan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib administrasi.
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Tabel 2.2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Cat. Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2023	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	10	11	12	13
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	-	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	n/a	n/a	WTP	WTP	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	79,07	79,32	79,57	79,82	80,07	88,67	n/a	n/a	79,82	80,07	
3	Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu	-	-	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a	100	100	
4	Ratio PAD	-	-	1,95%	1,98%	2,01%	2,05%	2,06	2,30	n/a	n/a	2,05%	2,06	
5	Nilai SAKIP OPD	-	-	83,50	84,50	85,50	86,50	86,50	84,95	n/a	n/a	86,50	86,50	

Tabel 2.1.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kota Pekalongan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra					Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				(n-3)	(n-2)	(n-1)	n	(n+1)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(Tahun n)	(Tahun n+1)	
1	2	3	4	6	7	8	8	8	10	10	10	11	12	13
I	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)			8.33	8.08	7.66	7.5	7.5	6.13	8.08				
A	Persentase ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
1	Jumlah dokumen KUA PPAS APBD yang disusun			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021
2	Jumlah dokumen KUPA PPAS Perubahan APBD yang disusun			2	2	2	2	2	2	2				Indikator Lama
	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun										2	2	2	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021
3	Jumlah kegiatan asistensi RKA PD/unit kerja yang dilaksanakan			2	2	2	2	2	2	2				Indikator Lama
4	Jumlah dokumen pedoman penyusunan RKA yang disusun			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021
5	Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan			1	1	1	1	1	1	1				Indikator Lama

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra					Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				(n-3)	(n-2)	(n-1)	n	(n+1)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(Tahun n)	(Tahun n+1)	
1	2	3	4	6	7	8	8	8	10	10	10	11	12	13
6	Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD Kota Pekalongan yang disusun			4	4	4	4	4	4	4				Indikator Lama
7	Dokumen perda dan perwal APBD Kota Pekalongan			2	2	2	2	2	2	2				Indikator Lama
8	Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan			1	1	1	1	1	1	1				Indikator Lama
	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD										2	2	2	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021
9	Jumlah Bahan sidang Raperda dan Raperwal perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun			4					4					Indikator Lama
10	Dokumen perda dan perwal perubahan APBD Kota Pekalongan			2	2	2	2	2	2	2				Indikator Lama
11	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal / perwal di Kota Pekalongan			12	12	12	12	12	12	12				Indikator Lama
	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD										2	2	2	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra					Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				(n-3)	(n-2)	(n-1)	n	(n+1)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(Tahun n)	(Tahun n+1)	
1	2	3	4	6	7	8	8	8	10	10	10	11	12	13
12	Jumlah koordinasi perencanaan anggaran yang dilaksanakan			16	16	16	16	16	16	16				Indikator Lama
	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran										2	2	2	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021
B	Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD dan Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
13	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah			12	12	12	12	12	12	12				Indikator Lama
14	Jumlah dokumen SPD yang diterbitkan			3	3	3	3	3	3	3				Indikator Lama
15	Jumlah OPD yang diterbitkan dan dicairkan dokumen SP2Dnya			-	-	-	-	-	-	-				Indikator Lama
16	Jumlah OPD yang SP2D nya di terbitkan dan dicairkan			67					67					Indikator Lama
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah										7000			Indikator Lama
17	Jumlah laporan Dana Transfer per bidang yang disusun			30	30	30	30	30	30	30				Indikator Lama

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra					Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				(n-3)	(n-2)	(n-1)	n	(n+1)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(Tahun n)	(Tahun n+1)	
1	2	3	4	6	7	8	8	8	10	10	10	11	12	13
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya										24	24	24	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021
18	Jumlah pelaksanaan pelatihan/monitoring pelaksanaan transaksi non tunai			2	2	2	2	2	2	2				Indikator Lama
	umlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank										12	12	12	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021
19	Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan			3300	3120	3120	3120	3120	3165	3120				Indikator Lama
20	Jumlah pelaksanaan penerbitan daftar gaji PNS Kota Pekalongan			14	14	14	14	14	14	14				Indikator Lama

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra					Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				(n-3)	(n-2)	(n-1)	n	(n+1)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(Tahun n)	(Tahun n+1)	
1	2	3	4	6	7	8	8	8	10	10	10	11	12	13
	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)										2	2	2	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021
21	Jumlah dokumen/pedoman penatausahaan keuangan daerah yang disusun			1	1	1	1	1	1	1				Indikator Lama
	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan										1	1	1	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021
22	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah			3	3	3	3	3	3	3				Indikator Lama

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra					Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				(n-3)	(n-2)	(n-1)	n	(n+1)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(Tahun n)	(Tahun n+1)	
1	2	3	4	6	7	8	8	8	10	10	10	11	12	13
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota										200	150	150	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021
C	Persentase Ketersediaan Perda dan Perwal Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu			100	100	100	100	100	100.00	100	100	100	100	
23	Jumlah laporan rekonsiliasi pendapatan dan belanja SKPD/SKPKD			68	68	68	68	68	68	68				Indikator Lama
24	Jumlah laporan rekap SKRD/SKPD pengelola pendapatan			7	7	7	7	7	7	7				Indikator Lama
25	Jumlah laporan realisasi anggaran dan prognosis yang disusun			13	13	13	13	13	13	13				Indikator Lama
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban										4	4	4	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021
26	Jumlah rekonsiliasi Laporan Keuangan BLUD dan SKPD yang dilaksanakan			5	5	5	5	5	5	5				Indikator Lama
	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran										13	1	1	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra					Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				(n-3)	(n-2)	(n-1)	n	(n+1)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(Tahun n)	(Tahun n+1)	
1	2	3	4	6	7	8	8	8	10	10	10	11	12	13
27	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan Keuangan Konsolidasi) yang disusun			7	7	7	7	7	7	7				Indikator Lama
	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi										7	7	7	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021
28	Jumlah dokumen Perda dan Perwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun			2	2	2	2	2	2	2				Indikator Lama
	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota										2	2	2	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021
29	Jumlah publikasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			1	1	1	1	1	1	1				Indikator Lama
30	Jumlah laporan MP TP-TGR yang disusun			12	12	12	12	12	12	12				Indikator Lama

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra					Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				(n-3)	(n-2)	(n-1)	n	(n+1)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(Tahun n)	(Tahun n+1)	
1	2	3	4	6	7	8	8	8	10	10	10	11	12	13
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah										2	2	2	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021
31	Jumlah dokumen kebijakan teknis pengelolaan keuangan yang disusun			1	1	1	1	1	1	1				Indikator Lama
	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah										2	2	2	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021
32	Jumlah pembinaan/ desk/ rekonsiliasi Laporan Keuangan BLUD yang dilaksanakan			4	4	4	4	4	4	4				Indikator Lama
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota										120	120	120	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021
33	Jumlah pelaporan dana bergulir yang disusun			-	4	4	4	4	-	4				Indikator Lama
34	Jumlah pendampingan pengelolaan keuangan OPD yang dilaksanakan			4	12	12	12	12	4	12				Indikator Lama
35	Jumlah unit kerja yang didampingi dalam pelaporan dana bergulir			4					4					Indikator Lama

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra					Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				(n-3)	(n-2)	(n-1)	n	(n+1)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(Tahun n)	(Tahun n+1)	
1	2	3	4	6	7	8	8	8	10	10	10	11	12	13
36	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran yg disusun			-					-					Indikator Lama
37	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Dana Blud yg disusun			-					-					Indikator Lama
D	Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
38	Jumlah bulan penyediaan dana BTT			12	12	12	12	12	12	12				Indikator Lama
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak										12	12	12	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021
II	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
E	Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap dan Persediaan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
39	Jumlah buku standar harga yang disusun			2	2	2	2	2	2	2				Indikator Lama
40	Jumlah buku Analis Standar Biaya yang disusun			10					10					Indikator Lama
41	Jumlah buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah			2	2	2	2	2	2	2				Indikator Lama

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra					Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				(n-3)	(n-2)	(n-1)	n	(n+1)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(Tahun n)	(Tahun n+1)	
1	2	3	4	6	7	8	8	8	10	10	10	11	12	13
	Jumlah Standar Harga yang Disusun										2	2	2	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah										4	4	4	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021
42	Jumlah papan nama aset			50	55	55	55	55	50	55				Indikator Lama
43	Jumlah patok batas tanah			-	600	600	600	600	-	600				Indikator Lama
44	Jumlah pengajuan sertifikat			350	78	20	20	20	350	78				Indikator Lama
45	Jumlah jenis BMD yang akan dinilai untuk pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD			3	3	3	3	3	3	3				Indikator Lama
46	Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang terehabilitasi sedang/berat			1	1	1	1	1	1	1				Indikator Lama
47	Jumlah gedung /aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin/berkala			2	2	2	2	2	2	2				Indikator Lama
48	Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi sedang/berat			3	3	3	3	3	0	3				Indikator Lama
49	Jumlah pelaksanaan lelang garapan tanah eks bengkok			5	5	5			5	5				Indikator Lama
	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah										12	12	12	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra					Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				(n-3)	(n-2)	(n-1)	n	(n+1)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(Tahun n)	(Tahun n+1)	
1	2	3	4	6	7	8	8	8	10	10	10	11	12	13
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah										2	2	2	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021
50	Jumlah laporan/data BMD dan Barang Persediaan			79	80	80	80	80	79	80				Indikator Lama
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah													Indikator Lama
	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah										2	2	2	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021
	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah										81	81	81	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021
III	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)			0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.02	0.05	0.05	0.05	0.05	
F	Persentase realisasi pendapatan pajak dan retribusi yang dikelola BKD			100	100	100	100	100	107.15	100				
51	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah			1					1	1	1	1	1	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra					Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				(n-3)	(n-2)	(n-1)	n	(n+1)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(Tahun n)	(Tahun n+1)	
1	2	3	4	6	7	8	8	8	10	10	10	11	12	13
52	Jumlah kegiatan Walikota Pekalongan Regional Tax Award yang dilaksanakan			1	1	1	1	1	1	1				Indikator Lama
53	Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah yang disusun			2	2	2	2	2	2	2				Indikator Lama
54	Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun			12	12	12	12	12	12	12				Indikator Lama
55	Jumlah pelaksanaan rakor bidang pendapatan			8	6	6	6	6	8	6				Indikator Lama
56	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan yang dilaksanakan			12					12					Indikator Lama
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah									12	12	12	12	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021
57	Jumlah surat tagihan yang diterbitkan			3400	3060	3060	3060	3060	4202	3060				Indikator Lama
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah										3500	3500	3500	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021
58	Terperiksanya wajib pajak dan retribusi daerah			80	8	8	8	8	100	8				Indikator Lama
59	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah			160	50	50	50	50	198	50				Indikator Lama

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra					Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				(n-3)	(n-2)	(n-1)	n	(n+1)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(Tahun n)	(Tahun n+1)	
1	2	3	4	6	7	8	8	8	10	10	10	11	12	13
	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah										200	200	200	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021
	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah										2	2	2	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021
G	Persentase peningkatan potensi pendapatan pajak			5	4.7	4.8	4.9	4.9	15	4.7	4.8	4.9	4.9	
60	Jumlah objek pajak dan retribusi yang didata			1500	1500	1500	1500	1500	1768	1500				Indikator Lama
61	Jumlah Objek Pajak yang dimonitoring			1140	1140	1140	1140	1140	1200	1140				Indikator Lama
62	Jumlah Kajian Proyeksi Potensi Pajak Darah			1					1					Indikator Lama
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah										12	12	12	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021
63	Jumkah sistem informasi baru yang diadakan			1	0	0	0	0	1	0				Indikator Lama
64	Jumlah sistem informasi yang dilakukan pemeliharaan			8	8	8	8	8	8	8				Indikator Lama
65	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan			1					1					Indikator Lama

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra					Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				(n-3)	(n-2)	(n-1)	n	(n+1)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(Tahun n)	(Tahun n+1)	
1	2	3	4	6	7	8	8	8	10	10	10	11	12	13
	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah										12	12	12	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021
67	Jumlah Berkas Permohonan Pelayanan PBB yg diproses dan diselesaikan			3000	2000	2000	2000	2000	3791	2000				Indikator Lama
68	Jumlah Buku DHKP PBB 2021 yang disusun			94	94	94	94	94	94	94				Indikator Lama
69	Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB 2021			4	4	4	4	4	4	4				Indikator Lama
70	Jumlah Objek Pajak PBB yang terupdate			6000	8000	8000	8000	8000	6313	8000				Indikator Lama
	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya										6000	6000	6000	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021
71	Jumlah dan Ketetapan SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan			94000	93000	93000	93000	93000	95130	93000				Indikator Lama
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah										115000	115000	115000	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021
72	Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang dibuat			19000	19000	19000	19000	19000	20110	19000				Indikator Lama
73	Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota			1	1	1	1	1	1	1				Indikator Lama
74	Jumlah wajib pajak dan wajib reklame yang terlayani			18000	14400	14400	14400	14400	18360	14400				Indikator Lama

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra					Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				(n-3)	(n-2)	(n-1)	n	(n+1)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(Tahun n)	(Tahun n+1)	
1	2	3	4	6	7	8	8	8	10	10	10	11	12	13
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah										14400	14400	14400	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021
75	Jumlah berkas BPHTB yang diverifikasi			1500	1500	1500	1500	1500	2126	1500				Indikator Lama
	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi										2500	2500	2500	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021
IV	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
H	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
76	Jumlah dokumen renja yang disusun			2	2	2	2	2	2	2				Indikator Lama
77	Jumlah dokumen renstra yang disusun			-	0	0	1	1	-	0				Indikator Lama
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										2	2	2	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021
78	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun			2	2	2	2	2	2	2				Indikator Lama
79	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			-					-		2	2	2	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra					Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				(n-3)	(n-2)	(n-1)	n	(n+1)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(Tahun n)	(Tahun n+1)	
1	2	3	4	6	7	8	8	8	10	10	10	11	12	13
80	Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun			4	4	4	4	4	4	4				Indikator Lama
81	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun			0	2	2	2	2	0	2				Indikator Lama
82	Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah			0	12	12	12	12	0	12				Indikator Lama
83	Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun			5	5	5	5	5	5	5				Indikator Lama
84	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah			12					12					Indikator Lama
85	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (Penetapan dan Perubahan)			2					2					Indikator Lama
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										15	15	15	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021
I	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
86	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN			12	12	12	12	12	12	12				Indikator Lama
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN										56	56	56	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra					Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				(n-3)	(n-2)	(n-1)	n	(n+1)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(Tahun n)	(Tahun n+1)	
1	2	3	4	6	7	8	8	8	10	10	10	11	12	13
87	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan			12	12	12	12	12	12	12				Indikator Lama
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										12	12	12	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021
88	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun			1	1	1	1	1	1	1				Indikator Lama
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										1	1	1	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021
V	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
J	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
89	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			12	12	12	12	12	12	12				Indikator Lama
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan										4	4	4	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra					Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				(n-3)	(n-2)	(n-1)	n	(n+1)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(Tahun n)	(Tahun n+1)	
1	2	3	4	6	7	8	8	8	10	10	10	11	12	13
90	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos			12	12	12	12	12	12	12				Indikator Lama
91	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan			86	15	15	15	15	86	15				Indikator Lama
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan										4	4	4	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021
92	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga			12	12	12	12	12	12	12				Indikator Lama
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan										4	4	4	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021
93	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman			11	11	11	11	11	11	11				Indikator Lama
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan										4	4	4	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021
94	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan			12	12	12	12	12	12	12				Indikator Lama
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan										2	2	2	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021
95	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan			12	12	12	12	12	12	12				Indikator Lama

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra					Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				(n-3)	(n-2)	(n-1)	n	(n+1)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(Tahun n)	(Tahun n+1)	
1	2	3	4	6	7	8	8	8	10	10	10	11	12	13
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan										2	2	2	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021
96	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah			300	200	200	200	200	319	200				Indikator Lama
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										250	250	250	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021
K	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	100	100	100	100	100	100				
97	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat			12	12	12	12	12	12	12				Indikator Lama
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat										4	4	4	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021
98	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			12	12	12	12	12	12	12				Indikator Lama
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan										12	12	12	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021
99	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor			12	12	12	12	12	12	12				Indikator Lama

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra					Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				(n-3)	(n-2)	(n-1)	n	(n+1)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(Tahun n)	(Tahun n+1)	
1	2	3	4	6	7	8	8	8	10	10	10	11	12	13
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan										12	12	12	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021
VI	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
L	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
100	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Perorangan Roda 4 yang diadakan			2					2					Indikator Lama
101	Jumlah Kendaraan Operasional Roda 2 yang diadakan			2					2					Indikator Lama
102	Jumlah Kendaraan Operasional Roda 4 yang diadakan			6					6					Indikator Lama
103	Jumlah Sepeda Listrik yang diadakan			2					2					Indikator Lama
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan										2	0	0	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan										4	1	0	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra					Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				(n-3)	(n-2)	(n-1)	n	(n+1)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(Tahun n)	(Tahun n+1)	
1	2	3	4	6	7	8	8	8	10	10	10	11	12	13
M	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	100	100	100	100	100	100				
104	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala			0	47	47	47	47	0	47				Indikator Lama
105	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional			12					12					Indikator Lama
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya										42	42	42	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021
106	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala			1	1	1	1	1	1	1				Indikator Lama
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi										1	1	1	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021
107	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor			12	12	12	12	12	12	12				Indikator Lama
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi										70	70	70	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra					Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				(n-3)	(n-2)	(n-1)	n	(n+1)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(Tahun n)	(Tahun n+1)	
1	2	3	4	6	7	8	8	8	10	10	10	11	12	13
N	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
108	Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota			0	2	2	2	2	0	2				Indikator Lama
109	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi			1					1					Indikator Lama
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan										1	1	1	Indikator sesuai Kepmendagri no.050/5889 tahun 2021

-

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi BPKAD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan dalam rangka peningkatan kinerja maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Kota Pekalongan jangka menengah maka dapat ditetapkan isu strategis BPKAD Kota Pekalongan yaitu:

1. Penyusunan dokumen perencanaan BPKAD yang selaras dengan dokumen perencanaan tingkat kota, kesesuaian indikator kinerja, serta pelaporan yang sesuai dengan kaidah AKIP;
2. Penyusunan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu;
3. Mempertahankan Opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Daerah;
4. Peningkatan mutu pelayanan administrasi pengelolaan pajak daerah yang tertib dan akurat, baik itu SDM maupun sarana dan prasarana;
5. Peningkatan Pendapatan dari tahun sebelumnya melalui koordinasi yang solid dengan instansi pengelola pendapatan;
6. Penatausahaan aset daerah secara tertib.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu terhadap rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dilakukan dalam rangka menselaraskan kebutuhan perangkat daerah dengan kemampuan daerah.

Proses penyesuaian antara analisis kebutuhan dengan rancangan awal RKPD menyebabkan adanya perubahan rumusan program dan kegiatan sebagai berikut

Tabel 2.4.1

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KEUANGAN					KEUANGAN					
	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih			26,811,880,000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih			24,012,710,000	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih			**17,957,674,000**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih			**17,219,881,000**	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	**17,742,000**	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	**20,637,000**	
X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen renja yang disusun	3 dokumen	3,364,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen renja yang disusun	3 dokumen	8,300,000	
X.XX.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	2 dokumen	2,378,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	2 dokumen	2,337,000	
X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	15 dokumen	12,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	15 dokumen	10,000,000	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi	100 persen	**13,354,587,000**	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi	100 persen	**13,146,766,000**	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Barat, Podosugih	keuangan perangkat daerah				Barat, Podosugih	keuangan perangkat daerah			
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 orang / bulan	13,231,783,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 orang / bulan	13,028,800,000	
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	120,600,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	115,800,000	
X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	2,204,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	2,166,000	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	**5,000,000**	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	**5,000,000**	
X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	2 paket	5,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	2 paket	5,000,000	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	**1,262,479,000**	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	**531,480,000**	
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	7,500,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	5,480,000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	579,479,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	160,590,000	
X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	18,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	10,950,000	
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	120,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	80,300,000	
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	50,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	36,500,000	
X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 Dokumen	2,500,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 Dokumen	1,775,000	
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	200 Laporan	485,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	200 Laporan	235,885,000	
X.XX.01.2.07					**1,818,000,000**	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih			**675,000,000**	
X.XX.01.2.07.0001					1,237,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih				
X.XX.01.					581,000,000	Pengadaan	Kota		1 unit	675,000,000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.0002						Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih				
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	**823,683,000**	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	**763,064,000**	
X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan	3,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan	2,190,000	
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	514,816,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	514,816,000	
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	305,867,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	246,058,000	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	**676,183,000**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	**2,077,934,000**	
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	50 Unit	143,660,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	50 Unit	151,214,000	
X.XX.01.	Pemeliharaan/Rehab	Kota	Jumlah gedung	1 unit	483,544,000	Pemeliharaan/Rehab	Kota	Jumlah gedung	1 unit	1,891,680,000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.09.0009	ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	kantor yang terpelihara secara rutin/berkala			ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	kantor yang terpelihara secara rutin/berkala			
X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	70 Unit	48,979,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	70 Unit	35,040,000	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih			**5,823,272,000**	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih			**4,000,978,000**	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Persentase ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu	100 persen	**945,908,000**	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Persentase ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu	100 persen	**766,836,000**	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun	2 dokumen	15,615,000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun	2 dokumen	15,451,000	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2 dokumen	8,815,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2 dokumen	15,451,000	
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen pedoman penyusunan RKA yang disusun	2 dokumen	23,000,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen pedoman penyusunan RKA yang disusun	2 dokumen	21,424,000	
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	2 Dokumen	752,202,000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	2 Dokumen	574,328,000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Daerah tentang Penjabaran APBD		Penjabaran APBD			Daerah tentang Penjabaran APBD		Penjabaran APBD			
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Dokumen Bahan sidang sidang Raperda dan Raperwal perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun	2 dokumen	78,224,000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Dokumen Bahan sidang sidang Raperda dan Raperwal perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun	2 dokumen	75,548,000	
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	68,052,000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	64,634,000	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD dan Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D	100 persen	**397,925,000**	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD dan Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D	100 persen	**337,692,000**	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	8500 Dokumen	249,717,000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	8500 Dokumen	228,500,000	
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	24 Dokumen	15,900,000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	24 Dokumen	12,600,000	
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan	Kota Pekalongan, Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja	2 Dokumen	22,510,000	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan	Kota Pekalongan, Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja	2 Dokumen	13,690,000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Barat, Podosugih	Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Barat, Podosugih	Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 Laporan	51,265,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 Laporan	45,852,000	
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen/pedoman penatausahaan keuangan daerah yang disusun	1 dokumen	20,100,000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen/pedoman penatausahaan keuangan daerah yang disusun	1 dokumen	13,690,000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan					serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan					
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	300 Orang	38,433,000	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	23,360,000	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Persentase Ketersediaan Perda dan Perwal Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu	100 persen	**356,039,000**	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Persentase Ketersediaan Perda dan Perwal Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu	100 persen	**396,450,000**	
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Dokumen	36,750,000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Dokumen	43,070,000	
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah laporan realisasi anggaran dan prognosis yang disusun	13 laporan	5,625,000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah laporan realisasi anggaran dan prognosis yang disusun	1 laporan	5,840,000	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan Keuangan Konsolidasi) yang disusun	7 laporan	99,750,000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan Keuangan Konsolidasi) yang disusun	7 laporan	101,500,000	
5.02.02.2.03.000	Koordinasi dan Penyusunan	Kota Pekalongan,	Jumlah dokumen Raperda dan	2 dokumen	69,250,000	Koordinasi dan Penyusunan	Kota Pekalongan,	Jumlah dokumen Raperda dan	2 dokumen	80,000,000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Pekalongan Barat, Podosugih	Raperwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun			Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Pekalongan Barat, Podosugih	Raperwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun			
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen	6,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen	7,300,000	
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen kebijakan teknis pengelolaan keuangan yang disusun	1 dokumen	11,250,000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen kebijakan teknis pengelolaan keuangan yang disusun	1 dokumen	14,600,000	
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	120 Orang	127,414,000	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	120 Orang	144,140,000	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos	100 persen	**4,123,400,000**	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos	100 persen	**2,500,000,000**	
5.02.02.	Pengelolaan Dana	Kota	Jumlah Laporan	12	4,123,400,000	Pengelolaan Dana	Kota	Jumlah Laporan	12 Laporan	2,500,000,000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.04.0009	Darurat dan Mendesak	Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan		Darurat dan Mendesak	Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih			**1,413,542,000**	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih			**934,850,000**	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap dan Persediaan	100 persen	**1,413,542,000**	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap dan Persediaan	100 persen	**934,850,000**	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	59,650,000	Penyusunan Standar Harga	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	56,650,000	
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	18,750,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	13,690,000	
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan	266,950,000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan	113,150,000	
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	61,000,000	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	63,950,000	
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan	2 Dokumen	487,471,000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan	2 Dokumen	258,450,000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Milik Daerah		Penghapusan Barang Milik Daerah			Milik Daerah		Penghapusan Barang Milik Daerah			
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah laporan/data BMD dan Barang Persediaan	81 laporan	519,721,000	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah laporan/data BMD dan Barang Persediaan	81 laporan	428,960,000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih			**1,617,392,000**	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih			**1,857,001,000**	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Persentase realisasi pendapatan pajak dan retribusi yang dikelola BPKAD	100 persen	**1,617,392,000**	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Persentase realisasi pendapatan pajak dan retribusi yang dikelola BPKAD	100 persen	**1,857,001,000**	
		Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Persentase peningkatan potensi pendapatan pajak	4.7 persen			Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Persentase peningkatan potensi pendapatan pajak	4.7 persen		
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih			3,750,000		Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih				
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah yang disusun	12 laporan	140,275,000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah yang disusun	12 laporan	127,390,000	
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	37,500,000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	277,380,000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	91,622,000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	33,510,000	
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	3000 Obyek Pajak	172,950,000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	8500 Obyek Pajak	125,560,000	
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	115000 Dokumen	283,500,000	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	115000 Dokumen	206,960,000	
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	14400 Layanan	380,226,000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	14400 Layanan	334,595,000	
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	2500 Dokumen	35,000,000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	2500 Dokumen	25,550,000	
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	3500 Dokumen	344,215,000	Penagihan Pajak Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	3500 Dokumen	615,928,000	
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	160 Dokumen	100,604,000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	160 Dokumen	82,678,000	
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat,	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi	2 Laporan	27,750,000	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat,	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi	2 Laporan	27,450,000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Podosugih	Pemerintah Daerah				Podosugih	Pemerintah Daerah			

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebelum melakukan penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan, terlebih dahulu telah dilakukan penjaringan aspirasi masyarakat, baik terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berupa usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan perangkat daerah, asosiasi- asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan pengamatan pelaksanaan musrenbang tingkat kota. Terhadap aspirasi tersebut kemudian dilakukan inventarisasi dan pengkajian apakah sesuai dengan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah.

Usulan awal program dan kegiatan dari perangkat daerah kemudian diselaraskan dengan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui Musrenbang, baik musrenbang kelurahan maupun kecamatan dan kota, serta forum perangkat daerah. Dalam kegiatan ini kemudian diinventarisir pula usulan yang masuk melalui Pagu Indikatif. Sebagai sebuah konsekuensi atas telah ditandatanganinya kesepakatan antara Walikota sebagai pihak Eksekutif dengan DPRD sebagai lembaga legislatif tentang penetapan pagu anggaran, maka semua usulan masyarakat yang masuk sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus dilaksanakan oleh perangkat daerah. Usulan yang dibuat telah disesuaikan dan telah mengakomodir semua usulan dari pemangku kepentingan yang berkatian dengan tugas dan fungsinya. Pada Tahun Anggaran 2025 para pemangku kepentingan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan tidak terdapat usulan program dan kegiatan.

Tabel 2.5.1

Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kota Pekalongan

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan

N I H I L

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BPKAD KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Arah kebijakan RKP Tahun 2025 meliputi:

1) Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa.
2) Insfrastruktur berkualitas yag diarahkan pada peningkatan infrastruktur konekttivitas, pengembangan transisi energy, percepatan infrastruktur IKN hingga reformasi pengelolaan sampah.
3) Ekonomi inklusif yang berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan menciptakan produk-produk ramah lingkungan.

Prioritas Nasional RKP Tahun 2025 meliputi:

1) Memperkokoh ideologi Pancasila dan hak asasi manusia.
2) Program peningkatan pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa lewat swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah dan ekonomi digital.
3) Pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas dan mendorong kewirausahaan, serta mengembangkan industri kreatif.
4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi dan kesetaraan gender. Ini akan masuk dalam anggaran bidang pendidikan, kesehatan, perlinsos, dan bidang pengarusutamaan gender.
5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah
6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan pemberantasan kemiskinan.

7) Memperkuat reformasi politik dan hukum, pemberantasan korupsi, narkoba dan judi.
8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi yang akan didanai anggaran bidang pendidikan.

Dari delapan Prioritas Nasional di atas, yang terkait dengan tugas pokok dan sasaran kinerja BPKAD Kota Pekalongan yaitu Sasaran ke 3 yaitu Ekonomi inklusif yang berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan menciptakan produk-produk ramah lingkungan untuk prioritas nasional yaitu ke-2 Program peningkatan pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa lewat swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah dan ekonomi digital; dan ke-6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan pemberantasan kemiskinan.

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah (PD) yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimaksud.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan terpilih periode 2016-2021 adalah **"Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas"**, dengan Misi :

1. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
3. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan;

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan;
5. Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas;
6. Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlaqul karimah.

Telaahan terhadap visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung BPKAD Kota Pekalongan, ini ditunjukan melalui pernyataan misi ke-2 yaitu: “Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat”. Peran serta BPKAD dalam misi dimaksud adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif berkualitas transparan dan akuntabe transparan pemerintahan yang akuntabel berbasis teknologi informasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD

Tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai, tujuan ditetapkan berdasarkan potensi, isu-isu strategis dan permasalahan yang ada pada pelayanan BPKAD Kota Pekalongan. Tujuan jangka menengah BPKAD Kota Pekalongan adalah :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh BPKAD Kota Pekalongan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran merupakan hasil yang dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun jangka waktu Rencana Strategi BPKAD Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan
2. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara lain :

1. Pencapaian Visi dam Misi Kepala Daerah,
2. Pencapaian SDGs

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dikelola Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dengan pertimbangan dua faktor tersebut diatas antara lain :

A	**Program**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
I	**Kegiatan**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
1	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3	Sub Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
II	**Kegiatan**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
3	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
III	**Kegiatan**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
1	Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
IV	**Kegiatan**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
2	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5	Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
V	**Kegiatan**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
1	Sub Kegiatan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
VI	**Kegiatan**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
VII	**Kegiatan**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3	Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
B	**Program**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**
VIII	**Kegiatan**	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**
1	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
2	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3	Sub Kegiatan	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
4	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
5	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
6	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
IX	**Kegiatan**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**

1	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
2	Sub Kegiatan	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
3	Sub Kegiatan	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
4	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
5	Sub Kegiatan	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
6	Sub Kegiatan	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
X	**Kegiatan**	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**
1	Sub Kegiatan	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
2	Sub Kegiatan	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
3	Sub Kegiatan	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
5	Sub Kegiatan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
6	Sub Kegiatan	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah

7	Sub Kegiatan	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
XI	**Kegiatan**	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**
1	Sub Kegiatan	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
C	**Program**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**
XII	**Kegiatan**	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**
1	Sub Kegiatan	Penyusunan Standar Harga
2	Sub Kegiatan	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
3	Sub Kegiatan	Pengamanan Barang Milik Daerah
4	Sub Kegiatan	Penilaian Barang Milik Daerah
5	Sub Kegiatan	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
6	Sub Kegiatan	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
D	**Program**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**
XIII	**Kegiatan**	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**
1	Sub Kegiatan	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
2	Sub Kegiatan	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
3	Sub Kegiatan	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
4	Sub Kegiatan	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
5	Sub Kegiatan	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
6	Sub Kegiatan	Penetapan Wajib Pajak Daerah
7	Sub Kegiatan	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
8	Sub Kegiatan	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
9	Sub Kegiatan	Penagihan Pajak Daerah
10	Sub Kegiatan	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
11	Sub Kegiatan	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Secara rekapitulasi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah mengelola 4 (empat) Program, 13 (dua belas) Kegiatan dan 57 (lima puluh delapan) Sub Kegiatan.

Tabel 3.4.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Tahun 2026 Pagu Indikatif (Rp.)
			Lokasi	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
5.02	KEUANGAN				24,012,710,000		27,084,137,160
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**17,219,881,000**		**17,310,381,926**
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**20,637,000**		**18,150,000**
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	2 Dokumen	8,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4,700,000
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	2 Dokumen	2,337,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2,250,000
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	11 Laporan	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11,200,000
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**13,146,766,000**		**15,376,892,926**
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan, Pekalongan	53 Orang/bulan	13,028,800,000	Dana Transfer Umum-Dana	15,239,642,926

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Tahun 2026 Pagu Indikatif (Rp.)
			Lokasi	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Barat, Podosugih			Alokasi Umum	
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	12 Dokumen	115,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	135,000,000
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	1 Laporan	2,166,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2,250,000
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**5,000,000**		**5,000,000**
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	2 Paket	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5,000,000
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**531,480,000**		**908,000,000**
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	1 Paket	5,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7,500,000
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	20 Paket	160,590,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	395,000,000
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	12 Paket	10,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	18,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Tahun 2026 Pagu Indikatif (Rp.)
			Lokasi	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	11 Paket	80,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	110,000,000
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	12 Paket	36,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50,000,000
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	24 Dokumen	1,775,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2,500,000
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	60 Laporan	235,885,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	325,000,000
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**675,000,000**		**0**
5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	1 Unit		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	675,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**763,064,000**		**725,464,000**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Tahun 2026 Pagu Indikatif (Rp.)
			Lokasi	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	12 Laporan	2,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3,000,000
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	12 Laporan	514,816,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	506,400,000
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	12 Laporan	246,058,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	216,064,000
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**2,077,934,000**		**276,875,000**
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	41 Unit	151,214,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	136,875,000
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	1,891,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100,000,000
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	70 Unit	35,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40,000,000
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				**4,000,978,000**		**6,703,141,000**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Tahun 2026 Pagu Indikatif (Rp.)
			Lokasi	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				**766,836,000**		**1,032,474,000**
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	15,451,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	35,000,000
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	15,451,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	35,000,000
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	21,424,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	62,000,000
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	574,328,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	729,537,000
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	75,548,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	144,937,000
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Pekalongan, Semua	12 Dokumen	64,634,000	Dana Transfer Umum-Dana	26,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Tahun 2026 Pagu Indikatif (Rp.)
			Lokasi	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kecamatan, Semua Kel/Desa			Alokasi Umum	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				**337,692,000**		**272,344,000**
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8500 Dokumen	228,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	91,391,500
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Dokumen	12,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	23,000,000
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	13,690,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25,000,000
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	45,852,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	75,952,500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Tahun 2026 Pagu Indikatif (Rp.)
			Lokasi	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)					
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	13,690,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25,000,000
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Orang	23,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	32,000,000
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				**396,450,000**		**398,323,000**
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	43,070,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	59,000,000
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8,000,000
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	7 Laporan	101,500,000	Dana Transfer Umum-Dana	95,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Tahun 2026 Pagu Indikatif (Rp.)
			Lokasi	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Semua Kel/Desa			Alokasi Umum	
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	90,000,000
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	7,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10,000,000
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	14,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20,000,000
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120 Orang	144,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	116,323,000
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				**2,500,000,000**		**5,000,000,000**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Tahun 2026 Pagu Indikatif (Rp.)
			Lokasi	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	2,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5,000,000,000
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				**934,850,000**		**1,333,475,500**
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah				**934,850,000**		**1,333,475,500**
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	56,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	55,000,000
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	13,690,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30,000,000
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	113,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	217,100,000
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	63,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	65,000,000
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,	Kota Pekalongan, Semua	2 Dokumen	258,450,000	Dana Transfer Umum-Dana	333,624,500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Tahun 2026 Pagu Indikatif (Rp.)
			Lokasi	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kecamatan, Semua Kel/Desa			Alokasi Umum	
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81 Laporan	428,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	632,751,000
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				**1,857,001,000**		**1,737,138,734**
5.02.04.2.0001	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				**1,857,001,000**		**1,737,138,734**
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	12 Laporan	127,390,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	306,400,000
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	12 Laporan	277,380,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30,000,000
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	12 Laporan	33,510,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	59,837,000
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	4 Obyek Pajak	125,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	176,550,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Tahun 2026 Pagu Indikatif (Rp.)
			Lokasi	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	19000 Dokumen	206,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300,000,000
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	14400 Layanan	334,595,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	396,081,734
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	2500 Dokumen	25,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	67,632,000
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	3060 Dokumen	615,928,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	241,138,000
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	50 Dokumen	82,678,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	159,500,000
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	2 Laporan	27,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Rencana Kerja

Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan menetapkan sasaran di Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan tahun 2021-2026 yang ingin dicapai/ diwujudkan sesuai dengan program kerja/rencana kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan, yaitu

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah;

Dengan sasaran tersebut dijabarkan menjadi 3 (tiga) indikator kinerja utama yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan, yaitu:

1. Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu
2. Ratio PAD
3. Nilai SAKIP OPD

Pencapaian sasaran ini tercemin dalam indikator-indikator kinerja dan target kinerja. Target capaian kinerja di tahun 2025 direncanakan dalam Renstra BPKAD 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.1
Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja
Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja 2025
1	2	3	4	6
Misi 7 RPJMD : Mewujudkan tat kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan G*ood Governance* dan C*lean Government*				
1	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan		Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	WTP
2	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	79,82
3		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran	Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja 2025
1	2	3	4	6
		dan Pelaporan Keuangan	Ratio PAD	2,05%
4		Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	84,50

4.2. Pendanaan Perangkat Daerah

Untuk tercapainya target dari setiap indikator kinerja dibutuhkan pendanaan untuk membiayai masing-masing kegiatan prioritas di Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2025. Kebutuhan pendanaan pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan untuk tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2.1
Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu Anggaran
Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana
1	2	3	4
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	22,750,901,000.00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16,661,201,000	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,637,000	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,337,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12,288,086,000	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12,170,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	115,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,166,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5,000,000	
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	531,480,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana
1	2	3	4
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160,590,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,775,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	235,885,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	675,000,000	
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	675,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	763,064,000	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	514,816,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	246,058,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,377,934,000	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	151,214,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2,191,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3,863,849,000	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	766,836,000	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	15,451,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	15,451,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	21,424,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana
1	2	3	4
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	574,328,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	75,548,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	64,634,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	301,009,000	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	191,817,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	13,690,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	45,852,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	13,690,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	23,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	325,004,000	
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	43,070,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	5,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	69,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	65,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	7,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	14,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	119,144,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana
1	2	3	4
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2,471,000,000	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2,471,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	901,850,000	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	901,850,000	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	40,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	13,690,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	113,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	47,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	258,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	428,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1,324,001,000	
5.02.04.2.0001	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,324,001,000	
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	127,390,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	27,380,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	33,510,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	125,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	206,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	318,095,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	25,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	365,928,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	82,678,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	10,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk dijadikan sebagai dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Kota Pekalongan, serta dan sebagai panduan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025. Penyusunan Renja 2025 dilakukan setelah mempelajari visi, misi, dan program Pemerintah Kota Pekalongan sebagai muatan dan masukan dalam penyusunan visi, misi, strategi, kebijakan serta penyusunan program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan untuk satu tahun kedepan. Oleh karena itu, dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan ini dapat menjadi sebagai acuan dan pedoman yang digunakan sebagai masukan dalam rangka penguatan peran serta dan partisipasi aktif dari semua stakeholders yang terkait didalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah serta menjadi dasar dan bahan untuk melakukan evaluasi dan guna penyusunan laporan pelaksanaan kinerja PD tahunan maupun lima tahunan.

Dengan demikian, diharapkan Renja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 ini dapat menjadi pegangan bagi seluruh aparatur di lingkungan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan dalam melaksanaan program dan kegiatan untuk mendorong dan mewujudkan peningkatan pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah Kota Pekalongan di tahun mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 ini masih memerlukan penyempurnaan dan saran dari semua pihak untuk perbaikannya.

Pekalongan, Juli 2024

KEPALA BPKAD KOTA PEKALONGAN

Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc

Pembina Utama Muda

NIP. 196507171992032014

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2025

Pekalongan
World's City of Batik

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekalongan Tahun 2025 dapat disusun tanpa ada halangan sesuatu apapun.

Renja BKPSDM Kota Pekalongan Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025, dalam rangka menjalankan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Renja ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan BKPSDM Kota Pekalongan yang disertai indikator dan target kinerja serta pagu indikatif. Selanjutnya Renja akan menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKPSDM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025.

Kami menyadari Renja BKPSDM Kota Pekalongan Tahun 2025 ini belum sempurna, sehingga masukan, saran dan koreksi semua pihak akan menjadi lebih baik untuk penyusunan renja pada tahun-tahun mendatang. Selanjutnya Renja BKPSDM Kota Pekalongan Tahun 2025 ini diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik agar dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sudah ditentukan.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

KEPALA BKPSDM
KOTA PEKALONGAN

RUSMANI BUDIHARJO, A.KS, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19720913 199803 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 14

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 19

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 22

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegaiatan Masyarakat..... 34

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 35

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 35

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 36

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 37

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 51

BAB V PENUTUP 57

5.1 Catatan Penting 57

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 57

5.3 Rencana Tindak Lanjut 58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d(tahun berjalan) BKPSDM Kota Pekalongan 11

Tabel 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang..... 16

Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kota Pekalongan..... 18

Tabel T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 BKPSDM Kota Pekalongan 23

Tabel T-C.32 Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku kepentingan Tahun 2025 Kota Pekalongan..... 34

Tabel 5 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional Rumusan..... 36

Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 BKPSDM Kota Pekalongan..... 39

Tabel 6 Rencana Kerja dan Pendanaan BKPSDM Kota Pekalongan Tahun 2025 52

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang diimplikasikan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Pasal 27), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah merupakan Dokumen perencanaan PD untuk periode 1 tahun, memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Renja Perangkat Daerah juga memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah, pada tahun-tahun yang sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi, serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan

berbagai kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan serta mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan aturan tersebut, maka dalam rangka mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan tahunan daerah perlu dibuat Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang sistematis, bermutu, akuntabel dan tepat waktu. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan tahun 2025 disusun dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Pekalongan, rencana strategis BKPSDM Kota Pekalongan dan RKPD Kota Pekalongan. Penyusunan ini dilakukan melalui proses koordinasi antar Bidang di lingkungan BKPSDM Kota Pekalongan, konsultasi dan koordinasi dengan BAPPEDA dan OPD terkait di Kota Pekalongan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pekalongan tahun 2025 didasarkan kepada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan;
12. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan Tahun 2025 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

   Dokumen Renja BKPSDM Kota Pekalongan disusun dengan maksud sebagai arah dan pedoman bagi BKPSDM Kota Pekalongan dalam melaksanakan rencana kegiatan tahunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Tujuan

   Dokumen Renja BKPSDM Kota Pekalongan disusun bertujuan antara lain untuk:

   a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan BKPSDM Kota Pekalongan untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya;
   b. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
   c. Menjamin terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;

d. Adanya kesinambungan antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Menjalankan tahapan perencanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada bab ini dibagi menjadi lima bagian pembahasan, yaitu :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-

masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan;

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, tantangan dan peluang, dampak terhadap visi/misi kepala daerah dan terhadap capaian program nasional/ internasional serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Diuraikan kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota.

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini pembahasan dibagi menjadi beberapa pembagian pembahasan, yaitu :

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pada bagian ini, perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah;

3.3 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, penjelasan jika rumusan program/ kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, tabel rencana program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana kerja dan pendanaan indikatif perangkat daerah.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian (dalam pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Kota Pekalongan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis pada tahun yang bersangkutan.Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) BKPSDM Kota Pekalongan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan, program dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BKPSDM Kota Pekalongan selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024.

Pengukuran kinerja kegiatan/sub kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan penetapan indikator kinerja, yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2023 BKPSDM Kota Pekalongan sebesar Rp.7.318.883.000,- termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN dengan melaksanakan 3 penunjang urusan pemerintahan, 3 program, 12 kegiatan dan 34 sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 7.070.979.841,- atau sebesar 96,61 %.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2024, dengan alokasi pagu anggaran Belanja sebesar Rp. 8.123.318.000,- (belanja gaji dan tunjangan 4.043.920.000,-) melaksanakan 3 unsur penunjang urusan pemerintahan, 3 program, 12 kegiatan dan 34 sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%, baik realisasi keuangan maupun capaian fisiknya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta perkiraan capaian program,kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan BKPSDM Kota Pekalongan sebagai berikut:

1. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan dalam perencanaan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
2. Kemampuan sumber daya manusia pada BKPSDM masih kurang optimal;
3. Koordinasi antar stake holder dalam bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang belum maksimal;
4. Pemahaman tentang output yang ingin dicapai dari setiap kegiatan dan sub kegiatan belum terdefinisi secara utuh, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi output kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan/sub kegiatan.
5. Komitmen dan pemahaman bersama untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD perlu ditingkatkan dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh BKPSDM dalam pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2), dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BKPSDM Kota Pekalongan yang sudah dilakukan maping berdasarkan Permendagri 90 tahun 2019, didasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahuntahun sebelumnya. Capaian evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah dapat dilihat dalam tabel 2.1. dibawah ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d (2023)
Badan Kepagawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan

N0	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s/d Tahun 2023	Prosentase Capaian target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Realisasi 2023			
I.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**									
	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	100	100	100	100	100%	tercapai
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100%	tercapai
	persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100%	tercapai
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100%	tercapai
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	Persentase Ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100%	tercapai
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100%	tercapai
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100	100	102.36	100	102.36	102.36	102.36%	tercapai
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100%	tercapai

N0	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s/d Tahun 2023	Prosentase Capaian target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Realisasi 2023			
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100%	tercapai
II	**Program Kepegawaian Daerah**									
	Persentase Keterisian Jabatan	persen	90	90	97,41	90	97,41	97,41	108,23%	tercapai
	Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	persen	80	80	64,35	80	64,35	64,35	80,44%	Tidak tercapai
	Persentase PNS berkembang karier	persen	50	50	66,67	50	66,67	66,67	133,33%	tercapai
	Tingkat Pelaporan Kinerja ASN	persen	100	100	98,90	100	98,90	98,90	98,90%	Tidak tercapai
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN									
	Persentase ketersediaan data PNS	persen	100	100	100	100	100	100	100%	tercapai
2	Mutasi dan Promosi ASN									
	Persentase Ketersediaan Data Mutasi dan Promosi ASN	persen	110	110	118,71	110	118,71	118,71	118,71%	tercapai
3	Pengembangan Kompetensi ASN									
	Persentase PNS berkembang kompetensinya (Diklat teknis dan Latpim)	persen	42	42	45,35	42	45,35	45,35	107,97%	tercapai
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									
	Tingkat Disiplin ASN	persen	100	100	99,97	100	99,97	99,97	99,97%	Tidak tercapai
III	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**									
	Persentase PNS berkembang kompetensinya	persen	100	100	177,02	100	177,02	177,02	177,02%	tercapai
1	Pengembangan Kompetensi Teknis									
	Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	persen	100	100	128,42	100	128,42	128,42	128,42%	tercapai

N0	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s/d Tahun 2023	Prosentase Capaian target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Realisasi 2023			
2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional									
	Cakupan penyelenggaraan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	orang	207	250	20	40	20	220	88%	Tidak tercapai

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam Norma Standar Pelayanan Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK). Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan di bidang kepegawaian dan pengembangan SDM, maka cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada BKPSDM Kota Pekalongan sesuai tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja utama Rencana Stategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan.

1. Tugas dan Fungsi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan.

BKPSDM mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan unsur penunjang yang melaksanakan fungsi kepegawaian dan pengembangan SDM yang menjadi kewenangan daerah di bidang manajemen Aparatur Sipil Negara. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BKPSDM menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan dan penetapan sasaran, program bidang kepegawaian dan pengembangan SDM;
b. perumusan kebijakan bidang kepegawaian dan pengembangan SDM;
c. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengadaan, informasi dan pembinaan pegawai;
d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang mutasi dan promosi ASN;
e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengembangan SDM dan kompetensi ASN;
f. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;

g. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP);
h. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Untuk mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, telah ditindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Adapun Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari:

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat
    1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pengadaan, Informasi dan Pembinaan Pegawai;
d. Bidang Mutasi dan Promosi ASN;
e. Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi ASN;
f. UPTB; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Kondisi Sumber Daya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan didukung sumber daya manusia sejumlah 36 orang terdiri dari 26 orang Pegawai Negeri Sipil dan 10 orang non ASN. Berdasarkan

data Simpeg BKPSDM Kota Pekalongan, untuk jumlah PNS dapat diperinci sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			L	P
1	I	-	-	-
2	II	4	-	4
3	III	15	7	8
4	IV	5	3	2
5	IX	2	-	2
	Jumlah	26	10	16

Dari jumlah total pegawai tersebut, untuk jumlah pegawai BKPSDM berdasarkan kualifikasi pendidikan dan berdasarkan jumlah yang menduduki jabatan dapat dilihat dari diagram dan tabel sebagai berikut :

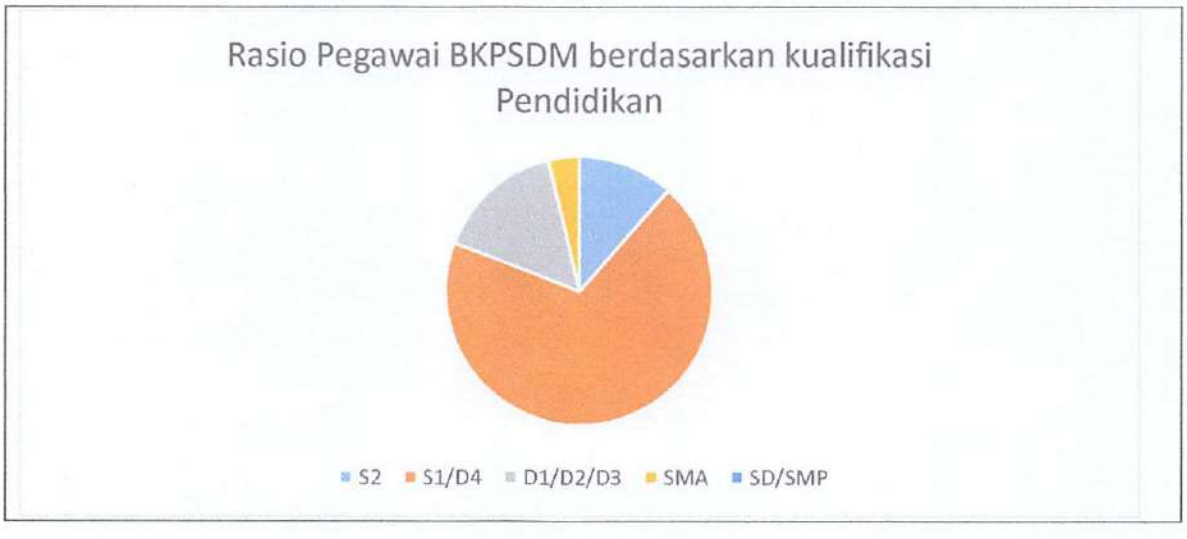

4. Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, BKPSDM Kota Pekalongan telah memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai.

5. Permasalahan

Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down.

Pada awal perencanaan anggaran, cukup banyak usulan yang disampaikan baik oleh internal bidang maupun stakeholder terkait terutama ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, tetapi hanya sebagian saja yang dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran sehingga berdasarkan penentuan skala prioritas dan kebijakan yang ada.

Pada tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekalongan *telah melaksanakan 2 (dua) program strategis dan 1 (satu) program penunjang yang dijabarkan dalam 12 kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan pencapaian sasaran sebagai berikut :*

a. Nilai Sakip OPD

   Penilaian didasarkan atas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang meliputi laporan kinerja instansi pemerintah, rencana aksi, perjanjian kinerja dan capaian kinerja OPD pada tingkat kota, provinsi maupun nasional. Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh inspektorat, BKPSDM mendapat nilai 82,75 dari target 83 atau ketercapaiannya 99,70%.

b. Persentase Laporan SKP ASN tepat waktu

   Persentase pelaporan Kinerja ASN dengan target 87% realisasi 98,90% dengan ketercapaian 113,68%.

c. Persentase jumlah ASN yang meningkat kompetensinya

   Persentase jumlah ASN yang meningkat kompetensinya dengan target 40 % yang dihitung dengan formulasi Jumlah pegawai yang mengikuti diklat / Jumlah pegawai yang potensial x 100%, untuk capaian pada tahun 2023 sebesar 85,92 %.
   Adapun hasil analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel 3 sebagai berikut :

Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kota Pekalongan

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Sakip OPD			83	84,50	86	87,5	82,75		84.50	87,50	Indeks
2	Persentase Laporan SKP ASN tepat waktu			87	88	89	90	98,90		99	99	Persen
3	Persentase jumlah ASN yang meningkat kompetensinya			40	40	40	40	68,74		65	65	Persen

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Analisis Tingkat Kinerja

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pada Pemerintah Kota Pekalongan, BKPSDM Kota Pekalongan telah menyusun program kerja dan kegiatan dalam Rencana Strategis yang memuat tugas pokok dan fungsi dan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pekalongan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, BKPSDM Kota Pekalongan mendukung pencapaian misi ke-7 yaitu **"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government"** dengan Tujuan "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien".

Guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, BKPSDM Kota Pekalongan menetapkan 3 indikator kinerja guna mengukur tingkat keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan. Indikator Kinerja dan capaian yang dihasilkan pada tahun 2023 sebagai berikut:

1) Nilai Sakip OPD 82,75 dengan capaian 99,70%
2) Persentase Laporan SKP ASN Tepat Waktu 98,90% dengan capaian 113,68%
3) Persentase Jumlah ASN Yang Meningkat Kompetensinya 34,37% dengan capaian 85,92%

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam hal menjalankan peran sebagai organisasi perangkat daerah selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak.

Selama menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

Dukungan anggaran di BKPSDM Kota Pekalongan jika dibandingkan dengan jumlah ASN di Kota Pekalongan yang belum semua mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan kompetensi. antara lain adalah:

1. Analisis kebutuhan pengembangan kompetensi belum sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Kebijakan pengalokasian anggaran untuk pengembangan SDM sebesar 0,16% dari total belanja daerah bagi pemerintah kabupaten/kota, diatur dalam Permendagri No. 27 Tahun 2021
3. Pemerintah Kota Pekalongan sangat bergantung pada BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai penyelenggara pelatihan yang belum sepenuhnya dapat memfasilitasi kurikulum pelatihan sesuai dengan gap kompetensi yang diusulkan.
4. Belum adanya platform digital yang dirancang khusus untuk mendukung proses pembelajaran dan penyediaan konten pembelajaran sehingga pelatihan akan lebih efektif dan efisien.

2.3.3 Dampak terhadap Pencapaian Visi Misi

Pengembangan Kompetensi bagi ASN yang telah dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan dalam hal ini BKPSDM Kota Pekalongan memegang peranan dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja pencapaian tujuan pemerintah. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja terbaik BKPSDM Kota Pekalongan akan berdampak langsung pada kinerja yang telah ditetapkan.

Terkait dengan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 kinerja BKPSDM Kota Pekalongan berdampak pada pencapaian misi "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip *good governance dan clean government*",

2.3.4 Tantangan dan Peluang

Adapun yang menjadi tantangan organisasi dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi yaitu adanya kelemahan-kelemahan yang meliputi :

a. Dukungan anggaran belum seluruhnya dapat memfasilitasi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan untuk mengikuti diklat;
b. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penyelenggara diklat;
c. Terbatasnya alokasi anggaran serta penganggaran dalam pengembangan kompetensi yang masih mengikuti prosedur normatif, sebagaimana penganggaran rutin, padahal untuk pengembangan kompetensi diperlukan terobosan dan lebih persuasif.

Selain itu tantangan yang mendasar dan kerangka penentuan arah pembangunan Kota Pekalongan adalah terkait urusan kepegawaian. Dalam menghadapi tantangan tersebut diperlukan kajian dan analisis kinerja pelayanan kepada ASN dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan kepada ASN yang dibutuhkan.

Peluang yang dapat disiasati untuk mendukung program Kepegawaian Pengembangan Kompetensi di Kota Pekalongan antara lain :

a. Terbukanya pengembangan kapasitas BKPSDM melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, dan lembaga penyelenggara diklat.
b. Makin terbukanya komunikasi dan koordinasi penyelenggara pengembangan kompetensi.
c. Adanya kesempatan pengembangan ketrampilan melalui diklat maupun bintek bagi personil BKPSDM.

2.3.5 Penentuan Isu-isu Stategis

Penentuan dan pengidetifikasian isu-isu yang tepat, cermat yang bersifat strategis sangat penting sekali karena merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Oleh karena itu isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia perlu mendapatkan perhatian lebih karena merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan .

Berdasarkan telaahan identifikasi permasalahan yang ada, perumusan isu stategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja ASN di dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
2. Peningkatan kompetensi ASN dengan mengikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan guna meningkatkan nilai IP ASN dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dengan disusunnya Rancangan Awal RKPD Kota Pekalongan tahun 2025, telah dirumuskan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan BKPSDM Kota Pekalongan tahun 2025 Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dengan membandingkan rumusan rancangan awal RKPD dengan kebutuhan OPD, terdapat perbedaan yang menyebabkan perubahan perumusan kebutuhan tersebut.

Perubahan rumusan kebutuhan dilakukan agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih efisien, efektif dan optimal. Perubahan tersebut antara lain anggaran pagu kegiatan dan penyesuaian target dan indikator kegiatan. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut :

Tabel T-C31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 BKPSDM Kota Pekalongan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
URU SAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					**8.774.363.000**	**URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**7.065.317.000**	
I.1 URUSAN KEPEGAWAIAN					**6.950.835.000**					**5.530.451.000**	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100 persen**	**4.863.066.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100 persen**	**4.343.251.000**	
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah	**100 persen**				**Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah**	**100 persen**		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	**100 persen**				**Persentase pengadaan/pemelihar aan barang milik daerah**	**100 persen**		
A	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**BKPSDM Kota Pekalongan**	***Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah***	***100 persen***	***23.594.000***	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**BKPSDM Kota Pekalongan**	***Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah***	***100 persen***	***23.594.000***	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**BKPSDM Kota Pekalongan**	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 dokumen	3.132.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**BKPSDM Kota Pekalongan**	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	3 dokumen	3.132.000	Dokumen yang disusun adalah Renja Penetapan, Renja Perubahan dan Renstra
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	2 dokumen	2.952.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	2 dokumen	2.952.000	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**BKPSDM Kota Pekalongan**	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	15 laporan	17.510.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**BKPSDM Kota Pekalongan**	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	15 laporan	17.510.000	
B	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**BKPSDM Kota Pekalongan**	***Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah***	***100 persen***	***4.082.714.000***	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**BKPSDM Kota Pekalongan**	***Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah***	***100 persen***	***3.556.643.000***	***Perubahan pagu anggaran***
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	32 orang/bulan	*4.044.746.100*	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	26 orang/bulan	*3.518.675.000*	Perubahan target kinerja menyesuaikan perubahan pagu anggaran
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	12 dokumen	*36.600.000*	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	*36.600.000*	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**BKPSDM Kota Pekalongan**	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*1 Laporan*	*1.368.000*	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*1 Laporan*	*1.368.000*	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
C	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	**BKPSDM Kota Pekalongan**	***Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***100 persen***	***5.000.000***	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***BPBD Kota Pekalongan***	***Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah***	***100 persen***	***5.000.000***	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	**BKPSDM Kota Pekalongan**	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	*2 Paket*	5.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	*2 Paket*	5.000.000	
D	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**BKPSDM Kota Pekalongan**	***Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah***	***100 persen***	*277.003.000*	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**BKPSDM Kota Pekalongan**	***Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah***	***100 persen***	*202.840.000*	***Perubahan pagu anggaran***
1	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*4 Paket*	3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*4 Paket*	2.190.000	Perubahan pagu anggaran
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*4 Paket*	*39.937.000*	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*4 Paket*	*29.160.000*	Perubahan pagu anggaran
3	Penyediaan peralatan rumah tangga	**BKPSDM Kota Pekalongan**	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*4 Paket*	2.500.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*4 Paket*	2.430.000	Perubahan pagu anggaran

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**BKPSDM Kota Pekalongan**	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*4 Paket*	*53.400.000*	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*4 Paket*	*38.990.000*	Perubahan pagu anggaran
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**BKPSDM Kota Pekalongan**	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*2 Paket*	*10.000.000*	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*13 Paket*	*7.300.000*	Perubahan pagu anggaran
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan	**BKPSDM Kota Pekalongan**	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*2 Dokumen*	2.600.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*2 Dokumen*	1.900.000	Perubahan pagu anggaran
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*125 Laporan*	165.566.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*125 Laporan*	120.870.000	Perubahan pagu anggaran
E	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**BKPSDM Kota Pekalongan**	***Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***100 persen***	***373.200.000***	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**BKPSDM Kota Pekalongan**	***Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***100 persen***	***404.914.000***	***Perubahan pagu anggaran***
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*12 Laporan*	2.400.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*4 Laporan*	1.760.000	Perubahan pagu anggaran
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka*	*12 Laporan*	*211.800.000*	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka*	*12 Laporan*	*200.004.000*	Perubahan pagu anggaran

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*12 Laporan*	*159.000.000*	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*12 Laporan*	*203.150.000*	Perubahan pagu anggaran, dikarenakan adanya penambahan pegawai Tenaga Kontrak Walikota
F	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**BKPSDM Kota Pekalongan**	***Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***100 persen***	***101.555.000***	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**BKPSDM Kota Pekalongan**	***Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***100 persen***	***150.260.000***	***Perubahan pagu anggaran***
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	13 unit	*54.675.000*	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	13 unit	*47.280.000*	Perubahan pagu anggaran
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 unit	*34.380.000*	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 unit	*93.850.000*	Perubahan pagu anggaran, untuk rehabilitasi gedung BKPSDM dan gedung diklat
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	25 unit	*12.500.000*	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	10 unit	*9.130.000*	Perubahan target kinerja menyesuaikan perubahan pagu anggaran

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
II	***PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH***	***BKPSDM Kota Pekalongan***	***Persentase Keterisian Jabatan***	***90 persen***	***2.087.768.900.***	***PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH***	***BKPSDM Kota Pekalongan***	***Persentase Keterisian Jabatan***	***90 persen***	***1.187.200.000***	***Perubahan Pagu Anggaran***
			Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	***80 persen***				***Persentase Keterpenuhan Formasi ASN***	***80 persen***		
			Persentase PNS berkembang karier	***80 persen***				***Persentase PNS berkembang karier***	***80 persen***		
			Tingkat Pelaporan Kinerja ASN	***100 persen***				***Tingkat Pelaporan Kinerja ASN***	***100 persen***		
G	*Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN*	**BKPSDM Kota Pekalongan**	***Persentase ketersediaan data PNS***	***100 persen***	*1.283.863.900*	*Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN*	**BKPSDM Kota Pekalongan**	***Persentase ketersediaan data PNS***	***100 persen***	*435.000.000*	Perubahan Pagu Anggaran
1	*Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK*	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK*	*1 Dokumen*	*1.134.828.000*	*Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK*	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK*	*1 Dokumen*	*300.000.000*	Perubahan Pagu Anggaran
2	*Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian*	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian*	*16 Dokumen*	*149.035.900*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian*	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian*	*12 Dokumen*	*135.000.000*	Perubahan target dikarenakan beberapa aplikasi di https://pamomong.pekalongankota.go.id tidak dignakan lagi
H	*Mutasi dan Promosi ASN*	BKPSDM Kota Pekalongan	*Persentase Ketersediaan Data Mutasi dan Promosi ASN*	*90 persen*	***351.253.000***	*Mutasi dan Promosi ASN*	BKPSDM Kota Pekalongan	*Persentase Ketersediaan Data Mutasi dan Promosi ASN*	*90 persen*	***391.310.000***	Perubahan Pagu Anggaran

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	*Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN*	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN*	*6 Dokumen*	*22.068.000*	*Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN*	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN*	*6 Dokumen*	*32.610.000*	Perubahan pagu anggaran
2	*Pengelolaan Promosi ASN*	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN*	*2 Dokumen*	*329.185.000*	*Pengelolaan Promosi ASN*	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN*	*2 Dokumen*	*358.600.000*	Perubahan pagu anggaran
I	*Pengembangan Kompetensi ASN*	BKPSDM Kota Pekalongan	*Persentase PNS berkembang kompetensinya (Diklat teknis dan Latpim*	*42 persen*	***260.225.000***	*Pengembangan Kompetensi ASN*	BKPSDM Kota Pekalongan	*Persentase PNS berkembang kompetensinya (Diklat teknis dan Latpim*	*42 persen*	***189.990.000***	Perubahan pagu anggaran
1	*Pengelolaan Assessment Center*	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center*	*1 Dokumen*	*135.575.000*	*Pengelolaan Assessment Center*	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center*	*1 Dokumen*	*98.970.000*	Perubahan pagu anggaran
2	*Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN*	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan*	*14 Orang*	*80.680.000*	*Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN*	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan*	*6 Orang*	*58.900.000*	Perubaha target kinerja menyesuaikan perubahan apgu anggaran
3	*Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional*	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional*	*9 Dokumen*	*25.000.000*	*Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional*	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional*	*1 Dokumen*	*18.250.000*	Perubahan pagu anggaran

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	*Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN*	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN*	*1 Dokumen*	*19.000.000*	*Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN*	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN*	*1 Dokumen*	*13.870.000*	Perubahan pagu anggaran
J	***Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur***	BKPSDM Kota Pekalongan	*Tingkat Disiplin ASN*	100 persen	***192.397.000***	***Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur***	BKPSDM Kota Pekalongan	*Tingkat Disiplin ASN*	100 persen	***171.500.000***	Perubahan pagu anggaran
1	*Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai*	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan*	*130 Orang*	*43.000.000*	*Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai*	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan*	*130 Orang*	*43.000.000*	
2	*Pembinaan Disiplin ASN*	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan*	*1 Orang*	*99.397.000*	*Pembinaan Disiplin ASN*	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan*	*1 Orang*	*91.500.000*	Perubahan pagu anggaran
3	*Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN*	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN*	*5 Laporan*	*50.000.000*	*Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN*	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN*	*5 Laporan*	*36.500.000*	Perubahan pagu anggaran
II.2	*PENDIDIKAN DAN PELATIHAN*				***1.832.528.000***					***1.534.866.000***	***Perubahan pagu anggaran***
III	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	BKPSDM Kota Pekalongan	**Persentase PNS berkembang kompetensinya**	**100%**	***1.832.528.000***	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Kota Pekalongan**	*Persentase PNS berkembang kompetensinya*	**100%**	***1.534.866.000***	***Perubahan pagu anggaran***

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	***Pengembangan Kompetensi Teknis***	BKPSDM Kota Pekalongan	Persentase Penyelenggaran, Pembinaan, pengoordinasian., fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	***100 persen***	*1.423.298.000*	***Pengembangan Kompetensi Teknis***	***Kota Pekalongan***	Persentase Penyelenggaran, Pembinaan, pengoordinasian., fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	***100 persen***	*1.138.366.000*	*Perubahan pagu anngaran*
1	*Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum*	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi*	*230 Orang*	*1.044.932.000*	*Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum*	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi*	*125 Orang*	*760.000.000*	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	*Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum*	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum*	*3 Dokumen*	*378.366.000*	*Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum*	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum*	*3 Dokumen*	*378.366.000*	
B	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	BKPSDM Kota Pekalongan	Cakupan penyelenggaraan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	250 orang	*396.500.000*	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	BKPSDM Kota Pekalongan	Cakupan penyelenggaraan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	250 orang	*396.500.000*	
1	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota*	*10 Orang*	*50.000.000*	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota*	*10 Orang*	*36.500.000*	Perubahan pagu anggaran
2	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,*	*1 Laporan*	*350.230.000*	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan	BKPSDM Kota Pekalongan	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,*	*1 Laporan*	*360.000.000*	Perubahan pagu anggaran untuk kegiatan Latsar CPNS

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		*Kepemimpinan, dan Prajabatan*			Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		*Kepemimpinan, dan Prajabatan*			

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan disusunnya Rancangan Awal RKPD Kota Pekalongan tahun 2025, telah dirumuskan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan BKPSDM Kota Pekalongan tahun 2025 Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dengan membandingkan rumusan rancangan awal RKPD dengan kebutuhan OPD, terdapat perbedaan yang menyebabkan perubahan perumusan kebutuhan tersebut.

Perubahan rumusan kebutuhan dilakukan agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih efisien, efektif dan optimal juga terdapat usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel T-C32 Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kota Pekalongan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Rencana kerja (renja) perangkat daerah disusun sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Sedangkan RKPD disusun dengan menjabarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Renja BKPSDM tahun 2025 sesuai dengan RKPD 2025, yang merupakan penjabaran atas RPJMD 2021-2026.

Selain berpedoman pada RPJMD 2021-2026, RKPD tahun 2025, Renja BKPSDM Tahun 2025 juga berpedoman pada RKP Tahun 2025, dengan penyelarasan prioritas pembangunan nasional dengan pembangunan Kota Pekalongan. Adapun Tema RKP Tahun 2025: " Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi: 1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; 2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan; 3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan; 4. Penguatan daya saing usaha; 5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi; 6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas; 7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan 8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Sesuai RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, maka tema pembangunan Kota Pekalongan tahun 2025 ditujukan untuk "Optimalisasi Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemandirian Dengan Dipayungi Nilai-nilai Religiusitas". Adapun Prioritas pembangunan Kota Pekalongan tahun 2025 difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis Kota Pekalongan tahun 2025. Penyelarasan prioritas pembangunan Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional sejalan dengan tugas pokok dan fungsi yang ada pada BKPSDM Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini :

Tabel 5 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan

Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	**PRIORITAS**	**NO**	**PRIORITAS**	**NO**	**PRIORITAS**
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	5	Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4	Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12	Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN

Sumber : RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan tahun 2025 berpedoman dan mengacu pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Rencana Kerja ini menjabarkan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah

ditetapkan. Selain itu Rencana Strategis BKPSDM yang menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja juga sudah disusun untuk jangka waktu 2021-2026.

Sehubungan hal tersebut, maka penyusunan Rencana Kerja BKPSDM mengacu pada RPJMD 2021-2026, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2025 dan didasarkan pada Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Lima Tahun ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025. Rencana Kerja BKPSDM Kota Pekalongan Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman atau acuan bagi semua bidang dan sekretariat di BKPSDM dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu juga, renja ini dimaksudkan sebagai bahan untuk mengevaluasi diri dalam meningkatkan kinerja BKPSDM.

Tujuan dan Sasaran dalam Renja adalah turunan penjabaran tujuan Renstra yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM Kota Pekalongan serta identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan- tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai sesuai tujuan organisasi.

Adapun tujuan dan sasaran BKPSDM Kota Pekalongan, telah dirumuskan sebagai berikut:

1. a. Tujuan : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik
   b. Sasaran : 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. a. Tujuan : Meningkatkan kualitas manajemen ASN
   b. Sasaran : 1) Meningkatnya kualitas manajemen kinerja
3. a. Tujuan : Meningkatkan kualitas profesionalisme ASN
   b. Sasaran : 1) Meningkatnya kompetensi ASN

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh

instansi pemerintah. Program/kegiatan/sub kegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah, dimana perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah.

Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat daerah menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, kebijakan provinsi dan kebijakan pemerintah daerah.

Rencana kerja tahun 2025 merupakan lanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas untuk mewujudkan tujuan dan sasarannya. Hal ini terlihat dari beberapa sub kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebagian besar masih dilaksanakan pada tahun 2025. Pada prinsipnya program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan skala prioritas sesuai pagu indikatif yang ditetapkan.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebanyak 3 program, 12 kegiatan dan 35 sub kegiatan dengan jumlah pagu Rp. 7.065.317.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan. Adapun program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2025 tersebut dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut :

Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 BKPSDM Kota Pekalongan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					**7.065.317.000**				**10.211.157.000**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**100 persen**	**4.343.251.000**	DAU		**100 persen**	**5.082.896.000**
		2.Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah		**100 persen**				**100 persen**	
		3. Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah		**100 persen**				**100 persen**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**100 persen**	23.594.000	DAU		**100 persen**	12.850.000
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM Kota Pekalongan	3 dokumen	3.132.000	DAU		3 dokumen	2.750.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BKPSDM Kota Pekalongan	2 dokumen	2.952.000	DAU		2 dokumen	1.650.000
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kota Pekalongan	15 laporan	17.510.000	DAU		15 laporan	8.450.000
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	BKPSDM Kota Pekalongan	**100 persen**	**3.556.643.000**	DAU		**100 persen**	**4.430.374.000**
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM Kota Pekalongan	26 Orang/bulan	3.518.675.000	DAU		26 Orang/bulan	4.373.724.000
5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BKPSDM Kota Pekalongan	12 dokumen	36.600.000	DAU		12 dokumen	55.000.000
5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM Kota Pekalongan	1 Laporan	1.368.000,	DAU		1 Laporan	1.650.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**100 persen**	**5.000.000**	DAU		**100 persen**	**9.500.000**
5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	BKPSDM Kota Pekalongan	2 Paket	5.000.000	DAU		2 Paket	9.500.000
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**100 persen**	**202.840.000**	DAU		**100 persen**	**189.500.000**
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BKPSDM Kota Pekalongan	4 Paket	2.190.000	DAU		4 Paket	2.000.000
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BKPSDM Kota Pekalongan	4 Paket	29.160.000	DAU		4 Paket	22.000.000
5.03.01.2.06.0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	BKPSDM Kota Pekalongan	4 Paket	2.430.000	DAU		4 Paket	1.000.000
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BKPSDM Kota Pekalongan	4 Paket	38.990.000	DAU		4 Paket	52.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	BKPSDM Kota Pekalongan	13 Paket	7.300.000	DAU		13 paket	10.000.000
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BKPSDM Kota Pekalongan	2 Dokumen	1.900.000	DAU		2 Dokumen	2.500.000
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM Kota Pekalongan	125 Laporan	120.870.000	DAU		76 laporan	100.000.000
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**100 persen**	**404.914.000**	DAU		**100 persen**	**264.784.000**
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM Kota Pekalongan	4 Laporan	1.760.000	DAU		4 Laporan	2.000.000
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BKPSDM Kota Pekalongan	12 Laporan	200.004.000	DAU		12 Laporan	140.784.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BKPSDM Kota Pekalongan	12 Laporan	203.150.000	DAU		12 Laporan	122.000.000
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**100 persen**	**150.260.000**	DAU		**100 persen**	**175.888.000**
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	BKPSDM Kota Pekalongan	13 Unit	47.280.000	DAU		13 Unit	35.877.000
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BKPSDM Kota Pekalongan	2 Unit	93.850.000	DAU		2 Unit	128.011.000
5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BKPSDM Kota Pekalongan	10 Unit	9.130.000	DAU		10 Unit	12.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	***Persentase Keterisian Jabatan***	**BKPSDM Kota Pekalongan**	***90 persen***	**1.187.200.000**	DAU		***90 persen***	**1.495.219.000**
		Persentase Keterpenuhan Formasi ASN		***80 persen***				***80 persen***	
		Persentase PNS berkembang karier		***80 persen***				***80 persen***	
		Tingkat Pelaporan Kinerja ASN		***100 persen***				***100 persen***	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase ketersediaan data PNS	BKPSDM Kota Pekalongan	100 persen	435.000.000	DAU		**100%**	771.558.000
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM Kota Pekalongan	1 Dokumen	300.00.000	DAU		1 Dokumen	656.068.000
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM Kota Pekalongan	12 Dokumen	135.000.000	DAU		16 Dokumen	115.450.000
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	Persentase Ketersediaan Data Mutasi dan Promosi ASN	**BKPSDM Kota Pekalongan**	90 persen	391.210.000	DAU		90 persen	102.754.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM Kota Pekalongan	6 Dokumen	32.610.000	DAU		6 Dokumen	19.600.000
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM Kota Pekalongan	2 Dokumen	358.600.000	DAU		2 Dokumen	83.154.000
5.03.02.2.03	**Pengembangan kompetensi**	**Persentase PNS berkembang kompetensinya (diklat teknis dan Latpim)**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**42 persen**	**189.990.000**	DAU		**42 persen**	479.728.000
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan asessesmen center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	BKPSDM Kota Pekalongan	1 Dokumen	98.970.000	DAU		1 Dokumen	338.048.000
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	BKPSDM Kota Pekalongan	6 Orang	58.900.000	DAU		7 Orang	86.680.000
5.03.02.2.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	BKPSDM Kota Pekalongan	1 Dokumen	18.250.000	DAU		1 Dokumen	36.000.000
5.03.02.2.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	BKPSDM Kota Pekalongan	1 Dokumen	13.870.000	DAU		1 Dokumen	19.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tingkat Disiplin ASN	BKPSDM Kota Pekalongan	**100 persen**	171.000.000	DAU		**100 persen**	141.219.000
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	BKPSDM Kota Pekalongan	130 orang	43.000.000	DAU		100 orang -	33.000.000
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	BKPSDM Kota Pekalongan	1 orang	91.500.000	DAU		1 orang	102.219.000
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPSDM Kota Pekalongan	5 laporan	36.500.000	DAU		2 laporan	6.000.000
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**		**BKPSDM Kota Pekalongan**		**1.534.866.000**	DAU			**3.633.042.000**
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase PNS berkembang kompetensinya**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	100 persen	**1.534.866.000**	DAU		100 persen	**3.633.042.000**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Penyelenggaran, Pembinaan, pengoordinasian., fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM Kota Pekalongan	100 persen	1.138.366.000	DAU		100 persen	1.018.924.000
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	BKPSDM Kota Pekalongan	125 Orang	760.000.000	DAU		125 Orang	930.424.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM Kota Pekalongan	3 Dokumen	378.366.000	DAU		3 Dokumen	88.500.000
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Cakupan penyelenggaraan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsiona	BKPSDM Kota Pekalongan	250 orang	396.500.000	DAU		250 orang	2.604.818.000
5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	BKPSDM Kota Pekalongan	10 Orang	36.500.000	DAU		30 Orang	50.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM Kota Pekalongan	1 Laporan	360.000.000	DAU		1 Laporan	2.554.818.000
5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja	BKPSDM Kota Pekalongan	0 Dokumen	0			2 Dokumen	9.300.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					7.065.317.000				10.211.157.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan BKPSDM Kota Pekalongan dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renstra, pencapaian Renstra, dan visi dan misi Kota Pekalongan yang tertuang dalam RPJMD. Program kerja utama BKPSDM Kota Pekalongan sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kota Pekalongan adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Kepegawaian Daerah
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Indikator kinerja dari program tersebut menjadi tanggung jawab BKPSDM Kota Pekalongan dalam evaluasi RKPD dan LKPJ.

Dalam Rencana Kerja BKPSDM Kota Pekalongan Tahun 2025 terdapat 3 Program, 12 kegiatan dan 36 sub kegiatan, yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah. Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan/ sub kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan/ sub kegiatan. Perumusan kegiatan/ sub kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh kegiatan BKPSDM Kota Pekalongan yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Rencana Kerja dan Pendanaan BKPSDM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 6 Rencana Kerja dan Pendanaan BKPSDM Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BKPSDM		**7.065.317.000**		
URUSAN KEPEGAWAIAN		**5.530.451.000**		
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.343.251.000**	**1. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100 persen**
			2.Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah	**100 persen**
			3.Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	**100 persen**
A	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**23.594.000**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 persen**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.132.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.952.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.510.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 laporan
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.556.643.000**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 persen**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.518.675.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 orang/ bulan
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.600.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.368.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan
C	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**5.000.000**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 persen**
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket
D	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**202.840.000**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100 persen**
1	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan	2.190.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	4 paket

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kantor		Bangunan Kantor yang Disediakan	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.160.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket
3	Penyediaan peralatan rumah tangga	2.430.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.990.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.296.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 paket
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.900.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.870.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 laporan
E	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**404.914.000**	**Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.760.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.004.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	203 .150.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
F	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***150.260.000***	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.280.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 unit
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	93.850.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	9.130.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	10 unit

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Bangunan Lainnya			
II	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**1.187.200.000**	***Persentase Keterisian Jabatan***	***90 persen***
			Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	***80 persen***
			Persentase PNS berkembang karier	***80 persen***
			Tingkat Pelaporan Kinerja ASN	***100 persen***
A	**Pengadaan,pemberhentian, dan informasi kepegawaian ASN**	**435.000.000**	Persentase ketersediaan data PNS	100 persen
1	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	300.000.000	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen
2	Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	135.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen
B	**Mutasi dan Promosi ASN**	**391.210.000**	Persentase Ketersediaan Data Mutasi dan Promosi ASN	**90 persen**
1	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	32.610.000	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Dokumen
2	Pengelolaan Promosi ASN	358.600.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen
C	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**189.990.000**	**Persentase PNS berkembang kompetensinya (Diklat teknis dan Latpim)**	**42 persen**
1	Pengelolaan Asesssmen center	98.970.000	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen
2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	58.900.000	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan lanjutan	6 orang
3	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan diklat jabatan fungsional	18.250.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	1 Dokumen
4	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	13.870.000	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Dokumen
D	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**171.000.000**	**Tingkat Disiplin ASN**	**100 persen**
1	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	43.000.000	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	130 orang
2	Pembinaan disiplin ASN	91.500000	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1 orang

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	36.500.000	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 laporan
III	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**1.534.866.000**	**Persentase PNS berkembang kompetensinya**	**100 persen**
E	***PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS***	***1.138.366.000***	**Persentase Penyelenggaran, Pembinaan, pengoordinasian., fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum**	**100 persen**
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	760.000.000	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	*125 orang*
2	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	378.366.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	*3 dokumen*
F	***Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional***	***396.500.000***	Cakupan penyelenggaraan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	***250 orang***
1	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	36.500.000	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	10 orang
2	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	360.000.000	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 laporan

Dari tabel 4.1 tersebut diatas dapat dilihat bahwa rencana kerja pada tahun 2025 BKPSDM Kota Pekalongan melaksanakan 2 (dua) Urusan Pilihan Penunjang yaitu urusan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan ke dalam 3 (tiga) Program, 12 (dua) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan terkait perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja BKPSDM Kota Pekalongan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan selama satu tahun kedepan. Renja disusun mengacu pada visi misi Walikota Pekalongan dan berpedoman kepada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025.

5.1 Catatan Penting

Terbatasnya alokasi anggaran serta proses penganggaran dalam kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang masih mengikuti prosedur normatif, sebagaimana penganggaran rutin harus mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan penyelenggaraan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. Untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja BKPSDM Kota Pekalongan tahun 2025, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

a. Substansi Renja BKPSDM Kota Pekalongan disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kota Pekalongan tahun 2025 dan Renstra BKPSDM Kota Pekalongan tahun 2021-2026.

b. BKPSDM Kota Pekalongan berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program kegiatan dan sub kegiatan yang telah dirumuskan dalam

Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Kota Pekalongan Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025.

c. BKPSDM Kota Pekalongan berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 yang berpedoman kepada Renja BKPSDM Kota Pekalongan Tahun 2025 dan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025 dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.

d. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja BKPSDM Kota Pekalongan Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Renja BKPSDM Kota Pekalongan selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BKPSDM. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf BKPSDM Kota Pekalongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Untuk dapat merealisasikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja BKPSDM Kota Pekalongan Tahun 2025 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Apabila terdapat kendala dalam pencapaian indikator kinerja yang telah direncanakan, baik diakibatkan oleh anggaran yang kurang memadai ataupun permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.

Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan yang diemban oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Pekalongan.

Semoga Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kota Pekalongan sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Pekalongan.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PEKALONGAN

RUSMANI BUDIHARJO, A.KS, M.M
Pembina Tk. I
NIP.: 19720913 199803 1 001

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

City Of Crafts
and Folk Art
Kota Pekalongan
Designed UNNESCO
Creative City In 2014

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

INSPEKTORAT

BERANI JUJUR! HEBAT!

RENCANA KERJA

INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2025

#bangga melayani bangsa

Pekalongan
World's City of Batik

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
INSPEKTORAT DAERAH

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 700/xxx TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025

INSPEKTUR DAERAH KOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun sekaligus merupakan komitmen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun) Inspektorat Daerah Kota Pekalongan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu diterbitkan Keputusan Inspektur Kota Pekalongan tentang Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang –

Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota – kota Besar dan Kota – kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerntah;
11. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun Tahun 2010 tentang Pelaksanaaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA PEKALONGAN TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025

Pasal 1

(1) Dalam Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026 dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 (RKPD 2025) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah;

(2) Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2021-2026.

Pasal 2

Sistematika RENJA Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025, meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

BAB V : PENUTUP.

Pasal 3

RENJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 5

Apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 31 Juli 2024.

Plh. INSPEKTUR DAERAH
KOTA PEKALONGAN

SRI MULYANI, S.Sos.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19671003 199703 2 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada akhirnya Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 dapat disajikan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Rencana Kerja (Renja) ini merupakan proses Penyusunan Rencana sebagai penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 ini pada hakikatnya merupakan perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Dengan telah disusunnya Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait, khususnya Inspektorat Daerah Kota Pekalongan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun serta sarana evaluasi atas pencapaian kinerjanya dengan memperhatikan kriteria komponen-komponen perencanaan, memanfaatkan sistem pengukuran kinerja untuk monitoring kegiatan dan meningkatkan mutu informasi dalam laporan kinerja.

Pekalongan, 31 Juli 2024

Plh. INSPEKTUR DAERAH
KOTA PEKALONGAN

SRI MULYANI, S.Sos.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19671003 199703 2 001

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN . 1

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 2
1.4. Sistematika Penulisan 3

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 11

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (Tabel.T-C.29) 11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel.T-C.30) .. 15
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 21
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD (Tabel T-C.31) . 22
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel.T-C.32) 22

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 24

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 (Tabel.T-C.33) 24

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 30

BAB V. PENUTUP..... 30

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan) Kota Pekalongan.	12
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kota Pekalongan ..	12
Tabel T-C.31	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kota Pekalongan.	12
Tabel T-C.32	Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Pekalongan..	12
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Pekalongan	12

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Pekalongan merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kota Pekalongan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD 2025, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD berpedoman pada renstra Inspektorat Daerah Kota Pekalongan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 (RKPD 2025).

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efesien dan akuntanbilitas yang berorientasi pada hasil dan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan kinerja di tahun yang akan datang, maka perlu segera menetapkan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 yang memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang dilengkapi dengan dana indikatif serta sumber dananya.

Penetapan Rencana Kerja (Renja) ini dimaksudkan sebagai tolok ukur dalam menghitung keberhasilan organisasi Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kota Pekalongan yang akan dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kota Pekalongan pada akhir tahun anggaran. Dengan rencana kerja yang terukur dan

didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang melatarbelakangi penyusunan renja Inspektorat Daerah Kota Pekalongan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerntah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Dilingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah serta sebagai wadah sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan isu-isu strategis tahun 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025, adalah :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Daerah Kota Pekalongan dalam menentukan prioritas program/kegiatan dan kebijakan anggaran tahunan yang berdasarkan APBD;
2. Sebagai standar baku penjabaran tupoksi Inspektorat Daerah, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan;
3. Pedoman Pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Inspektorat Daerah Tahun 2025;
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi;
5. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah dan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menurut prinsip- prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENJA

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Pekalongan tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Kota Pekalongan.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Pekalongan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Pekalongan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2025

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kota Pekalongan

3.3. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB 2

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berdasarkan pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan yang disajikan dalam tabel pengukuran kinerja kegiatan, maka untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, dilakukan evaluasi dan analisis efisiensi dan efektivitas pengukuran kinerja setiap indikator kinerja kegiatan, agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, tingkat efisiensi yang dilakukan dan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak dalam rangka perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dan strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan di masa yang akan datang.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Pekalongan dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 terlampir pada tabel berikut :

(Tabel T- C. 29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kota Pekalongan

No	Indikator Program/ Kegiatan	SATUAN	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (Perub RPJMD 2016-2021)	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD SD Tahun 2023	Persentase Capaian target RPJMD	Status Capaian
					Target 2023	Realisasi 2023			
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								
	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100		100	100	100	100	Tercapai
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian,administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100		100	100	100	100	Tercapai
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100		100	100	100	100	Tercapai
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran,dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen	100		100	100	100	100	Tercapai
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	persen	100		100	100	100	100	Tercapai
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	persen	100		100	100	100	100	Tercapai
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	persen	100		100	100	100	100	Tercapai
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100		100	100	100	100	Tercapai

1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100		100	100	100	100	Tercapai
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**								
	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	persen	85		85	52,94	52,96	52,96	Tidak Tercapai
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal								
	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Internal yang Terbit Tepat Waktu	persen	100		100	104,94	104,94	104,94	Tercapai
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu								
	Persentase ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	persen	100		100	100	100	100	Tercapai
3	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**								
	Level Kapabilitas APIP	Nilai	3	1	3,06	3,06	3,06	3,06	Tercapai
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan								
	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	persen	100		100	100	100	100	Tercapai
3.2	Pendampingan dan Asistensi								
	Persentase pendampingan dan asistensi yang dilakukan	persen	100		100	82,07	82,07	82,07	Tercapai

Semua kegiatan mencapai target renstra, kecuali kegiatan Pendampingan dan Asistensi yang disebabkan hanya 6 OPD yang lolos pada tahap reviu LKE ZI oleh Inspektorat dari 11 OPD yang direviu dan dari target 10 OPD yang diharapkan dapat memperoleh predikat WBK atau WBBM. Enam OPD yang lolos reviu LKE oleh Inspektorat selanjutnya diberikan pendampingan. Untuk kategori WBBM terdapat dua OPD yaitu DINARPUS dan DPMPTSP. Untuk kategori WBK terdapat empat OPD yaitu Puskesmas Pekalongan Selatan, Puskesmas Noyontaansari, RSUD Bendan dan DPUPR. Dari enam OPD yang diberikan pendampingan hanya RSUD Bendan yang lolos mendapatkan predikat WBK dari KEMENPANRB (surat nomor B/311/RB.99/2023 tanggal 28 November 2023.

Terdapat satu kegiatan yang capaiannya melebihi target yaitu kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal yang dikarenakan adanya mandatory pemeriksaan dari MCP KPK. Target jumlah total laporan penyelenggaraan pengawasan internal adalah 226 laporan, dengan capaian di triwulan satu sebanyak 59 laporan, triwulan dua sebanyak 36 laporan, triwulan tiga sebanyak 51 laporan dan triwulan empat sebanyak 92 laporan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Analisis efisiensi dan efektivitas pengukuran kinerja setiap indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun **2021 – 2026** yang menunjukkan peran utama dan kontribusi Inspektorat Daerah Kota Pekalongan dalam mendukung tercapaiannya Visi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan yang tercantum dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 yaitu "**Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri, dan Religius**".

Analisis capaian kinerja sasaran dilakukan untuk mengetahui tingkat

efisiensi yang dilakukan dan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi, serta penentuan penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Hasil Analisis Efisiensi dan Efektifitas, serta *Performance Gap* dan Strategi Pemecahan Masalah Pencapaian Kinerja setiap Sasaran Inspektorat Daerah Kota Pekalongan :

1. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran "Meningkatnya OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi"

   Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi BPKP Perwakilan provinsi Jawa Tengah Nomor : PE.09.03/LHP-885/PW11/3.2/2023 tanggal 21 Desember 2023 tentang Hasil Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Pekalongan, bahwa penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dinyatakan tingkat maturitasnya sudah pada **level terdefinisi** atau **level 3** dengan **nilai 3,002.**

2. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran "Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM"
   Enam OPD yang lolos reviu LKE oleh Inspektorat dari sebelas OPD yang direviu. Untuk kategori WBBM terdapat dua OPD yaitu DINARPUS dan DPMPTSP. Untuk kategori WBK terdapat empat OPD yaitu Puskesmas Pekalongan Selatan, Puskesmas Noyontaansari, RSUD Bendan dan DPUPR. Dari enam OPD yang diberikan pendampingan hanya RSUD Bendan yang lolos mendapatkan predikat WBK dari KEMENPANRB (surat nomor B/311/RB.99/2023 tanggal 28 November 2023

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Pekalongan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian Proyeksi			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Maturitas SPIP		Level maturitas	3.20	3.40	3.60	3.80	3.02	3.002	0.00	3.35	Adanya penambahan regulasi yang mengintruksikan bahwa SPIP tidak hanya fokus pada struktur SPIP saja, tapi juga memperhatikan peran perencanaan dan pencapaian tujuan (out put dan out come)
2	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM		Predikat WBK/ WBBM	2	2	2	2	2	1	0	2	Ketatnya persyaratan yang harus dipenuhi, baik oleh Pemkot / Pemkab maupun OPD / Satker yang diusulkan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kota Pekalongan tidak dapat lepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis dimaksud antara lain :

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum dapat dilaksanakan dengan optimal dan terkoordinasi dengan mengedepankan peran sebagai quality assurance (menjamin kualitas dari suatu instansi) bukan mencari kesalahan.
2. Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah menargetkan kapabilitas APIP di tahun 2020 berada pada Level 3 dari skor Level 1-5 sesuai kriteria penilaian internasional.
3. Akuntabilitas pengelolaan keuangan wajib menjadi perhatian utama dalam penyelenggaran pemerintahan daerah.
4. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI maupun APIP masih berjalan lamban dan belum menunjukkan progres yang menggembirakan.
5. Pembinaan aparatur perangkat daerah yang berintegritas dan anti korupsi untuk melaksanakan reformasi di segala bidang.
6. Pengembangan teknik dan sistem pengawasan dalam menunjang proses kegiatan Inspektorat Daerah Daerah.
7. Pengawasan terhadap PPRG secara keseluruhan merupakan upaya penguatan pelaksanaan dan pelembagaan PPRG dalam sistem perencanaan dan penganggaran di daerah, dengan mengoptimalkan peran Inspektorat Daerah sebagai institusi yang memiliki peran melakukan pengawasan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2025

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kota Pekalongan

Inspektorat Daerah

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Sesuai SE Penguatan APIP dr KPK Nomor B/4435/KSP.00/70-73/2024				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Pekalongan**	**Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah**	**100 persen**	**6,286,119**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Pekalongan**	**Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah**	**100 persen**	**14.959.561**
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 Persen**	**20,465**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 Persen**	**20,465**
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	7,030	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	7,030
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1,435	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1,435
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	12,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	12,000

1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100**	**persen**	**5,890,351**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100**	**persen**	**5,821,036**
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37	Orang/bulan	5,846,851	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38	Orang/bulan	5,777,536
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	42,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	42,000
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1,500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1,500
1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**persen**	**195,700**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**persen**	**511.000**
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	Paket	10,400	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	5,000
1.3.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9	Dokumen	6,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	26	Dokumen	6,000

1.3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	37	Orang	179,300	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	38	Orang	500,000
1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**persen**	**426,882**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**persen**	**805,883**
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	5,749	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	5,749
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	158,124	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	504,987
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	5,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	5,000
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	45,327	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	49,967
1.4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	12,500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	12,500
1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	Dokumen	2,680	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	Dokumen	2,680

1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	Laporan	197,502	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	Laporan	225,000
1.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**persen**	**95,582**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**persen**	**123,182**
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	3,500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	3,500
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	47,400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	75,000
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	44,682	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	44,682
1.6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**persen**	**170,420**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**persen**	**179,338**
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	Unit	125,420	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	Unit	130,838

1.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	15,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	15,000
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	58	Unit	30,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70	Unit	33,500
1.7							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	2	Unit	7,498,657
1.7.1							Pengadaan Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan	Jumlah Unit Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1	Unit	479,567
1.7.1							Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1	Unit	7,019,090x`
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Kota Pekalongan**	**Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan**	**85**	**persen**	**195,215**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Kota Pekalongan**	**Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan**	**85**	**persen**	**437,038**
2.1	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Kota Pekalongan**	**Persentase Laporan Hasil Pengawasan Internal yang Terbit Tepat Waktu**	**100**	**persen**	**176,967**	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Kota Pekalongan**	**Persentase Laporan Hasil Pengawasan Internal yang Terbit Tepat Waktu**	**100**	**persen**	**377,038**

2.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	75	Laporan	38,728	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	37	Laporan	43,780
2.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	128	Laporan	14,730	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	150	Laporan	43,876
2.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	185	Laporan	28,125	Reviu Laporan Kinerja	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	107	Laporan	50,000
2.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	126	Laporan	14,100	Reviu Laporan Keuangan	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	46	Laporan	19,750
2.1.5	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kota Pekalongan	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1	Kesepakatan	23,368	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kota Pekalongan	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4	Kesepakatan	22,870
2.1.6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	7	Dokumen	57,916	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	7	Dokumen	196,762
2.2	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu yang Terbit Tepat Waktu**	**100**	**persen**	**18,248**	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu yang Terbit Tepat Waktu**	**100**	**persen**	**60,000**
2.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2	Laporan	6,000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	3	Laporan	10,000
2.2.2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	3	Laporan	12,248	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	18	Laporan	50,000

3	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Kota Pekalongan**	**Level Kapabilitas APIP**	**3**	**nilai**	**299,808**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Kota Pekalongan**	**Level Kapabilitas APIP**	**3**	**nilai**	**380,937**
3.1	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Kota Pekalongan**	**Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Disusun**	**100**	**persen**	**30,937**	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Kota Pekalongan**	**Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Disusun**	**100**	**persen**	**30,937**
3.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kota Pekalongan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	5	Rekomendasi	27,937	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kota Pekalongan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	5	Rekomendasi	27,937
3.1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kota Pekalongan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2	Rekomendasi	3,000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kota Pekalongan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2	Rekomendasi	3,000
3.2	**Pendampingan dan Asistensi**	**Kota Pekalongan**	**Persentase pendampingan dan asistensi yang dilakukan**	**97**	**persen**	**268,871**	**Pendampingan dan Asistensi**	**Kota Pekalongan**	**Persentase pendampingan dan asistensi yang dilakukan**	**97**	**persen**	**350,000**
3.2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	30	perangkat daerah	28,332	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	30	perangkat daerah	50,000
3.2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Pekalongan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10	perangkat daerah	23,420	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Pekalongan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	21	perangkat daerah	50,000

3.2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Pekalongan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	15	Kegiatan	84,463	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Pekalongan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	19	Kegiatan	100,000
3.2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kota Pekalongan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	3	perangkat daerah	132,656	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kota Pekalongan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	3	perangkat daerah	150,000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diutamakan yang merupakan usulan-usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat Kota Pekalongan.

Khusus untuk bidang pengawasan, usulan-usulan tersebut tidak dimunculkan/tidak ada.

Tabel T.C-32
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan.

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Pekalongan maka Prioritas Nasional yang berkaitan langsung adalah pada Prioritas ke-6 yaitu Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi. Sejalan dengan hal tersebut dan sesuai dengan tugas Inspektorat Daerah yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, maka terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Pekalongan maka mempunyai kewajiban untuk :

1. Meningkatkan kualitas manajemen dan akuntabilitas organisasi melalui sistem koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal semua kebijakan dan regulasi daerah.
3. Meningkatkan kualitas pengawasan agar lebih terstruktur, dengan azas demokrasi, transparan, dan akuntabel.
4. Meningkatkan pelaksanaan sistem pengendalian intern secara berkelanjutan.
5. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hasil pengawasan yang memang harus disebarluaskan kepada masyarakat.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kota Pekalongan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sehingga program kegiatan di Inspektorat untuk mendukung prioritas ke-5 (Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan).

Hubungan yang selaras antara RENJA dan RENSTRA, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan tujuan dan sasaran RENSTRA Inspektorat Daerah Kota Pekalongan tahun 2021-2026.

Setiap Perangkat Daerah bersama-sama melakukan optimalisasi untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Walikota Pekalongan Periode Tahun 2021-2026, oleh karena itu Renstra Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 mengadopsi Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan yang tercantum dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan yang tercantum dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 yaitu "**Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri, dan Religius**".

Sedangkan Misi yang mempunyai keterkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Pekalongan selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang mengawasi jalannya pelaksanaan Pemerintahan Daerah, adalah Misi Ke-7 Pemerintah Kota Pekalongan yaitu :"**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan prinsip prinsip *Good Governance* dan *Clean Goverment***".

Penetapan tujuan dan sasaran yang akan dicapai secara nyata oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun ke depan, didasarkan pada kriteria khusus (*spesific*), terukur (*measuable*), dapat dicapai

(*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*) serta dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan dan isu utama bidang Pengawasan di Kota Pekalongan.

Adapun rumusan tujuan dan sasaran di dalam Perencanaan Strategis Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026, yaitu :

1. Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.
   Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
   Formulasi : Komulatif angka tertimbang komponen Penilaian Kualitas Pelayanan Inspektorat

   Sasaran :

   1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
   Indikator Sasaran 1.1. : Nilai SAKIP OPD

   Formulasi : Meningkatnya Nilai hasil akhir SAKIP OPD

2. Tujuan 2 : Meningkatan kualitas pengendalian internal.
   Indikator Tujuan : Maturitas SPIP
   Formulasi : Nilai hasil akhir dari penjumlahan angka tertimbang dari unsur-unsur penilaian SPIP

   Sasaran :

   1.1. Meningkatnya OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi.
   Indikator Sasaran 1.1. : Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi

   Formulasi : Meningkatnya Jumlah OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi

3. Tujuan 3 : Meningkatkan Implementasi Zona Integritas pada OPD
   Indikator Tujuan : Jumlah OPD yang Menyandang Predikat WBK/WBBM

Formulasi : Jumlah OPD yang hasil evaluasinya memenuhi kriteria WBK dibagi jumlah seluruh OPD dikalikan 100%.

Sasaran :

1.1 Meningkatnya Kepatuhan OPD dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Daerah

Indikator Sasaran 1.1. : Jumlah OPD yang memenuhi standar pengusulan predikat WBK/WBBM

Formulasi : Jumlah OPD yang hasil evaluasinya memenuhi kriteria WBK dibagi jumlah seluruh OPD dikalikan 100%.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan yang mendukungnya. Indikator kinerja program/kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek-aspek yang relevan.

Sehingga ditentukan indikator kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Kota Pekalongan berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel rencana program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Pekalongan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
Inspektorat Daerah				16.176.644.000,00			11.564.199.000,00
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				16.176.644.000,00			11.564.199.000,00
INSPEKTORAT DAERAH				16.176.644.000,00			11.564.199.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	100 persen	15.358.669.000,00		100 persen	11.095.448.000,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100Persen	100 Persen	20.465.000,00		100Persen	12.730.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	7.030.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.930.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							

	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	1.435.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.300.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15 Laporan	12.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		9.500.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100Persen	100 Persen	6.220.144.000,00		100Persen	5.074.828.000,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		38 Orang/bulan	6.176.644.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5.040.328.000,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	42.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		33.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.500.000,00

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100Persen	100 Persen	511.000.000,00		100Persen	8.639.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.000.000,00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		26 Dokumen	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.000.000,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		38 Orang	500.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6.639.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100Persen	100 Persen	805.883.000,00		100Persen	204.416.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang		4 Paket	5.749.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.500.000,00

	Disediakan						
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	504.987.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		40.000.000,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	49.967.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		40.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	12.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	2.680.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.700.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan		90 Laporan	225.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		106.216.000,00

	Konsultasi SKPD						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	7.498.657.000,00		-	5.600.000.000,00
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit	479.567.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		600.000.000,00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	7.019.090.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5.000.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100Persen	100 Persen	123.182.000,00		100Persen	61.835.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	3.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Laporan	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		34.835.000,00

	yang Disediakan						
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	44.682.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		22.000.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100Persen	100 Persen	179.338.000,00		100Persen	133.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		15 Unit	130.838.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		70.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		33.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		70 Unit	33.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30.000.000,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	85,00 persen	85,00 persen	437.038.000,00		85,00 persen	124.123.000,00
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Internal yang Terbit Tepat Waktu	100persen	100 persen	377.038.000,00		100persen	107.755.000,00
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah							
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		37 Laporan	43.780.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12.000.000,00
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah							
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		150 Laporan	43.876.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12.000.000,00
Reviu Laporan Kinerja							
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		107 Laporan	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12.000.000,00
Reviu Laporan Keuangan							
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		46 Laporan	19.750.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11.755.000,00
Kerja Sama Pengawasan Internal							
	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk		4 Kesepakatan	22.870.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		9.000.000,00
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP							

	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		7 Dokumen	196.762.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		51.000.000,00
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase ketercapaian Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu yang Terbit Tepat Waktu	100persen	100 persen	60.000.000,00		100persen	16.368.000,00
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah							
	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani		3 Laporan	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		8.000.000,00
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu							
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		18 Laporan	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		8.368.000,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP	3,00 nilai	3,00 nilai	380.937.000,00		3,00 nilai	344.628.000,00
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100persen	100 persen	30.937.000,00		100persen	35.010.000,00

	yang Disusun						
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan							
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		5 Rekomendasi	27.937.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		32.010.000,00
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan							
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun		2 Rekomendasi	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3.000.000,00
Pendampingan dan Asistensi	Persentase pendampingan dan asistensi yang dilakukan	98persen	97 persen	350.000.000,00		98persen	309.618.000,00
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah							
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		30 perangkat daerah	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30.000.000,00
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi							
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		21 perangkat daerah	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		15.000.000,00
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi							

	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		19 Kegiatan	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		139.618.000,00
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas							
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		3 perangkat daerah	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		125.000.000,00
				16.176.644.000,00			**11.564.199.000,00**

BAB 4

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah kota Pekalongan

Rencana Kerja ini mencerminkan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan seperti halnya pencapaian visi dan misi kepala daerah, prioritas pembangunan dan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Kota Pekalongan. Plafon anggaran yang direncanakan untuk melaksanakan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Pekalongan untuk tahun 2025 sejumlah Rp. 16.176.644.000,- (enam belas miliar serratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025.

Dari rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka disajikan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Inspektorat Daerah Kota Pekalongan sebagaimana table berikut :

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
Inspektorat Daerah				16.176.644.000,00	
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				16.176.644.000,00	
INSPEKTORAT DAERAH				16.176.644.000,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	100 persen	15.358.669.000,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100Persen	100 Persen	20.465.000,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	7.030.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA

					ALOKASI UMUM
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	1.435.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15 Laporan	12.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100Persen	100 Persen	6.220.144.000,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		38 Orang/bulan	6.176.644.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	42.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100Persen	100 Persen	511.000.000,00	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI

					UMUM
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		26 Dokumen	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		38 Orang	500.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100Persen	100 Persen	805.883.000,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	5.749.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	504.987.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	49.967.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	12.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI

					UMUM
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	2.680.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		90 Laporan	225.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	7.498.657.000,00	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit	479.567.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	7.019.090.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100Persen	100 Persen	123.182.000,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	3.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	44.682.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100Persen	100 Persen	179.338.000,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		15 Unit	130.838.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		70 Unit	33.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	85,00 persen	85,00 persen	437.038.000,00	
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Internal yang Terbit Tepat Waktu	100persen	100 persen	377.038.000,00	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah					
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		37 Laporan	43.780.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah					
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		150 Laporan	43.876.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

Reviu Laporan Kinerja					
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		107 Laporan	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
Reviu Laporan Keuangan					
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		46 Laporan	19.750.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
Kerja Sama Pengawasan Internal					
	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk		4 Kesepakatan	22.870.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP					
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		7 Dokumen	196.762.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase ketercapaian Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu yang Terbit Tepat Waktu	100persen	100 persen	60.000.000,00	
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah					
	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani		3 Laporan	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		18 Laporan	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP	3,00 nilai	3,00 nilai	380.937.000,00	

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	100persen	100 persen	30.937.000,00	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan					
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		5 Rekomendasi	27.937.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan					
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun		2 Rekomendasi	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
Pendampingan dan Asistensi	Persentase pendampingan dan asistensi yang dilakukan	98persen	97 persen	350.000.000,00	
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah					
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		30 perangkat daerah	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi					
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		21 perangkat daerah	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi					
	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		19 Kegiatan	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas					
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		3 perangkat daerah	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
				16.176.644.000,00	

BAB 5
PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Pekalongan merupakan arah pelaksanaan program dan kegiatan dan sub kegiatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan sasaran dan kebijakan daerah dengan memperhatikan prioritas pembangunan. Output Rencana Kerja Inspektorat Daerah adalah Program Kerja Pangawasan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungi serta sasaran program Inspektorat Daerah.

Selanjutnya Inspektorat Daerah Kota Pekalongan sebagai pemilik fungi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintah daerah, senantiasa meningkatkan kualitas pengawasannya sehingga dapat mengurangi resiko pada perangkat daerah dengan pola penyelenggaraan pengawasan berdasarkan manajemen resiko. Manajemen resiko berasal dari pemilihan program dan kegiatan masing-masing perangkat daerah yang memiliki resiko tertinggi dan digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan pengawasan berbasis resiko yang diusulkan dalam suplemen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan sasaran audit kinerja dalam rangka menjaga sinkronisasi dan konsistensi secara efektif, efisien dan ekonomis dalam mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan.

Untuk itu diperlukan rencana tindak lanjut terhadap beberapa hal tersebut yang telah direncanakan yaitu :

1. Meningkatkan volume monitoring dan evaluasi melalui kegiatan – kegiatan rapat koordinasi teknis, pemanggilan obyek pemeriksaan dalam rangka percepatan penyelesaian temuan dan rekomendasi.
2. Melaksanakan asistensi/pendampingan percepatan penyelesaian tindak lanjut atas saran dan perbaikan terhadap pemeriksaan" BPK-RI/APIP dan pendampingan terhadap laporan keuangan, pemeriksaan/ audit kinerja dan pemeriksaan operasional serta

manajemen risiko terhadap seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

3. Melaksanakan asistensi/pendampingan percepatan pemenuhan dokumen MCP.
4. Membuka layanan klinik konsultasi dan pemberian advisory terhadap OPD di Pemerintah Kota Pekalongan.
5. Bekerjasama dengan KPK-RI dan Badan Statistik dalam Rangka Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI).
6. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pengawasan, Sarana dan Prasarana dalam

Demikian penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 yang memuat pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menjadi skala prioritas dan penunjang untuk dilaksanakan pada tahun 2025 yang disesuaikan dengan RKPD 2025 Tahun 2024. Diharapkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang telah disusun dapat dimplementasikan dalam kegiatan pengawasan dan dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pencapaian program dan kegiatan yang sesuai dengan rencana kerja dan pendanaan yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2025 rangka mendukung tugas-tugas di bidang pengawasan.

Pekalongan, 31 Juli 2024

Plh. INSPEKTUR DAERAH
KOTA PEKALONGAN

SRI MULYANI, S.Sos., M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19671003 199703 2 001

RENCANA KERJA

RENJA 2025

KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

KOTA PEKALONGAN

Jalan Kusuma Bangsa No.96 Kota Pekalongan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, alhamdulillah dengan rahmatNya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2025 telah berhasil disusun. Renja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pekalongan Utara 2021-2026, dan telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan. Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam Renja ini, secara rinci telah ditetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan pada tahun 2025. Setiap kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target yang ingin dicapai, serta pagu anggaran sebagai acuan dalam pelaksanaannya.

Diharapkan Renja ini dapat menjadi panduan yang efektif bagi seluruh jajaran Kecamatan Pekalongan Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga tujuan dan sasarana pembangunan Kota Pekalongan dapat tercapai dengan optimal terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pekalongan, 08 Agustus 2024
CAMAT PEKALONGAN UTARA
KOTA PEKALONGAN

WISMO ADITYO,S.Pt,MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19710926 199903 1 006

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU 10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pekalongan Utara Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Pekalongan Utara 10
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Kecamatan Pekalongan Utara 17
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pekalongan Utara 23
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN 38
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 38
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pekalongan Utara .. 40
3.3 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan 41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 55
4.1 Rencana Kerja 55
4.2 Pendanaan 57
BAB V PENUTUP 58

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29..... 12
Tabel T-C.30..... 19
Tabel T-C.31..... 25
Tabel T-C. 32..... 35
Tabel T-C.33..... 47

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hubungan Renja dengan Dokumen perencanaan dan Penganggaran..... 3
Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pekalongan Utara..... 24

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk Tahun 2025. Renja Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2025 ini disusun berdasarkan pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil pada Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, dengan mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan, dan sinergitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pekalongan Utara tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan. Hal ini dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, saling mendukung samapai dengan seluruh tujuan dan sasaran yang terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Penyusunan Renja PD yang dilakukan melalui tiga tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup sebagi berikut :

1. Tahap perumusan rancangan Renja OPD.

2. Tahap penyajian rancangan Renja OPD.
3. Tahap penetapan Renja OPD.

Renja Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan penentuan pagu dalam Renja Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 mengacu kepada rencana program prioritas pada Rancangan Akhir RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025. Untuk penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas Rancangan Akhir RKPD yang disusun ke dalam Rancangan Akhir Renja Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, selaras dengan Renstra Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2021-2026. Selanjutnya Rancangan Akhir Renja Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2025 dijadikan sebagai dasar penyusunan Penetapan Renja Perangkat Daerah dan selanjutnya menjadi Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2025 yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Akhir Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Gambar 1

Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

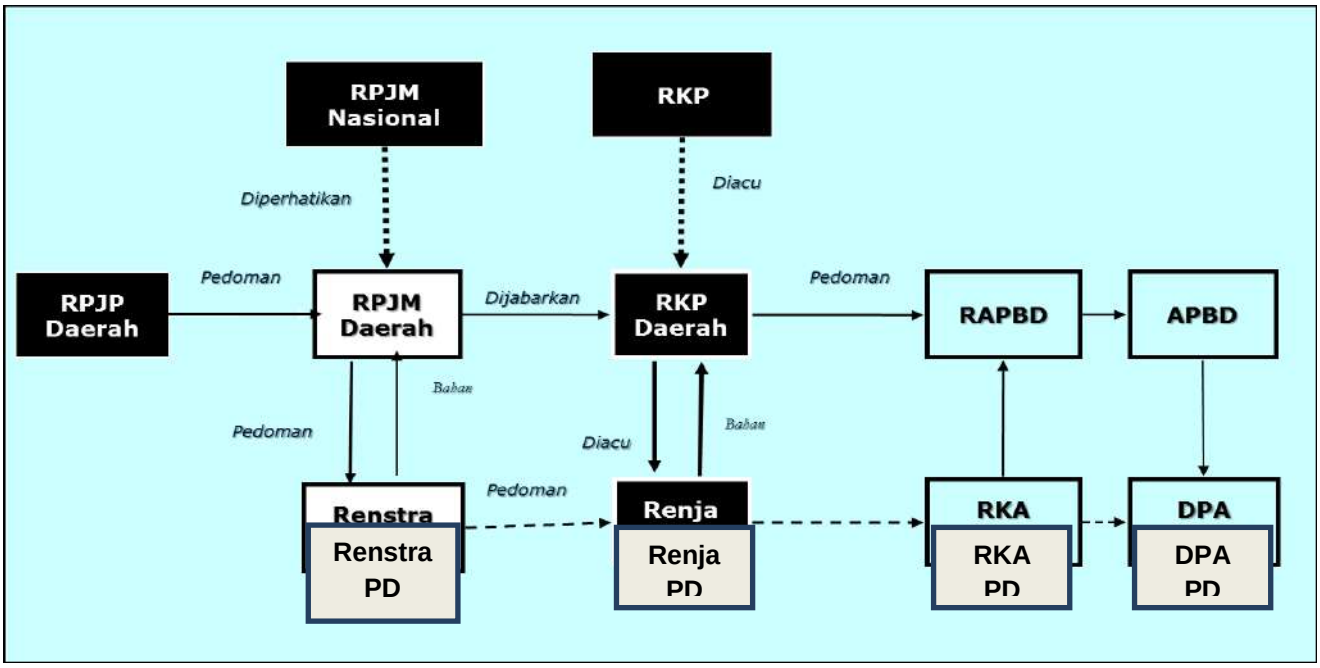

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 (diolah)

1.2. Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4700) ;
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan Dengan Kabupaten Dati II Pekalongan, dan Kabupaten Dati II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peratauran Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2205-2025 (Lembaran Daearah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peratuaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 19) ;
15. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
17. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2021-2026.

18. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas wilayah yaitu perencanaan strategis di Wilayah Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan guna mewujudkan keadaan dalam waktu satu tahun kedepan yang medukung visi misi Kepala Daerah, yang diutamakan guna kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan.

Kemudian tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan/arah bagi Kecamatan Pekalongan Utara dalam menyusun program/kegiatan prioritas tahun 2025 berdasarkan ketersediaan sumberdaya yang ada;
2. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Kasi/Kasubag di lingkungan Kecamatan Pekalongan Utara dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025.
3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I **PENDAHULUAN**, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

I.I Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

I.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

I.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

I.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada bab ini dibagi menjadi lima bagian pembahasan, yaitu :

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya;

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan;

II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, tantangan dan peluang, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan;

II.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD berisikan tentang proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alas an proses tersebut dilakukan,Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, diuraikan kajian atas program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, yang merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN, pada bab ini pembahasan dibagi menjadi **beberapa** pembagian pembahasan, yaitu :

III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah , pada bagian ini, perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah;

III.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan

BAB IV **PENUTUP**, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian (dalam pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pekalongan Utara Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Pekalongan Utara

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2025 diperlukan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2023 dan Capaian Kecamatan Pekalongan Utara pada Tahun Anggaran berjalan 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Pekalongan Utara berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Pekalongan Utara Tahun sebelumnya.

Hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun 2023) dan tahun berjalan 2024 Kecamatan Pekalongan Utara dapat disajikan dalam table T-C.29 sebagai berikut:

TABEL T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
TAHUN : 2024

	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (Perub RPJMD 2016-2021)	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Status Capaian
						Target 2023	Realisasi 2023		
1	2	3			4	10	11	12	11= (10/4)
7.01.0.00.0.00.01.00	**Kecamatan Pekalongan Utara**								
7.01	**Urusan Kewilayahan**								
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	- Presentase ketersediaan laporan capaian kinerja - Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persentase	100 %	100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 96,67%	100 % 100 % 96,67 %	Tercapai Tercapai Tidak tercapai Jadwal pekerjaan di alihkan
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai

		evaluasi kinerja perangkat daerah							
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	Tingkat kinerja penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di wilayah Utara	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai

7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahaan**	**Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahaan**	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara**	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Perentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasaan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasaan Kepala Daerah	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai

7.01.0.00.0.00.01.0001	Kelurahan Kandang Panjang								
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahaan**	**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Ketercapaian pemberdayaan kelurahan	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
7.01.0.00.0.00.01.0002	Kelurahan Panjang Wetan								
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahaan**	**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Ketercapaian pemberdayaan kelurahan	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
7.01.0.00.0.00.01.0003	Kelurahan Degayu								
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahaan**	**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Ketercapaian pemberdayaan kelurahan	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
7.01.0.00.0.00.01.0004	Kelurahan Bandengan								
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahaan**	**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan**	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai

		Kelurahan							
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Ketercapaian pemberdayaan kelurahan	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
7.01.0.00.0.00.01.0005	Kelurahan Krapyak								
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahaan**	**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Ketercapaian pemberdayaan kelurahan	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
7.01.0.00.0.00.01.0006	Kelurahan Padukuhan Kraton								
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahaan**	**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Ketercapaian pemberdayaan kelurahan	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
7.01.0.00.0.00.01.0007	Kelurahan Panjang Baru								
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahaan**	**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	Persentase	100 %	100 %	100 %	93,3 %	100 %	Tercapai
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Ketercapaian pemberdayaan	Persentase	100 %	100 %	100 %	93,3 %	93,3 %	Tidak Tercapai karena ada pengalihan jadwal

		kelurahan							pekerjaan pada tahun berikutnya

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pekalongan Utara

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berisikan tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pekalongan Utara berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Kemudian untuk jenis indicator kajian disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing – masing Kecamatan Pekalongan Utara serta ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Berikut data tabel kinerja pelayanan Kecamatan Pekalongan Utara :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
(YANG DIAMPU OLEH CAMAT)

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1. Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja 2. Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian 3. Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %

2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah,Pelayanan Publik di Wilayah Utara	100 %	100 %
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan di Kelurahan Wilayah Utara	100 %	100 %
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	100 %	100 %
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di wilayah Utara	100 %	100 %

Hasil analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pekalongan Utara, sebagaimana terlampir.

TABEL T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

NO.	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				Tahun 2022 (Thn. n-2)	Tahun 2023 (Thn. n-1)	Tahun 2024 (Thn. n)	Tahun 2025 (Thn. N+1)	Tahun 2022 (Thn. n-2)	Tahun 2023 (Thn. n-1)	Tahun 2024 (Thn. n)	Tahun 2025 (Thn. N+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Nilai SAKIP OPD			75,5	77	78,5	80	73,65	74,73	78.5	80	
2.	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja			100%	100%	100%	100%	100%	100%	41.12	100%	Capain pada tahun 2024 adalah capaian sampai dengan TW II
3.	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	30.16	100%	Capain pada tahun 2024 adalah capaian

	Pemerintahan Daerah											sampai dengan TW II
4.	Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah			100%	100%	100%	100%	100 %	96,67 %	23.58	100%	Capain pada tahun 2024 adalah capaian sampai dengan TW II
5	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara			100%	100%	100%	100%	100%	100%	58.34	100%	Capain pada tahun 2024 adalah capaian sampai dengan TW II
6.	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara			100%	100%	100%	100%	100%	100%	50 %	100%	Capain pada tahun 2024 adalah capaian sampai dengan TW II
7.	Tingkat kinerja Trantibum Wilayah Utara			100%	100%	100%	100%	100%	100%	50 %	100%	Capain pada tahun 2024 adalah capaian sampai

												dengan TW II
8.	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	Capain pada tahun 2024 adalah capaian sampai dengan TW II

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamtan Pekalongan Utara

Kecamatan Pekalongan Utara sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dalam mengidentifikasikan permasalahan pembangunan daerah, dimana permasalahan urusan merupakan penjabarkan dari akar masalah di tingkat kota. Indentifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Kecamatan Pekalongan Utara sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakat tersaji dalam 2 urusan yang diampu yaitu sebagai berikut :

a. Urusan Kewilayahan

Permasalahan yang ada yaitu :

1. Belum optimalnya Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Belum optimalnya Tingkat Kinerja Trantibum
3. Belum optimalnya Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan
4. Belum optimalnya Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum
5. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
6. Belum optimalnya kualitas pengawasan Perangkat Daerah

b. Non Urusan

Permasalahan yang ada yaitu :

1. Belum optimalnya ketersediaan laporan capaian kinerja
2. Belum optimalnya ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
3. Belum optimalnya pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah
4. Belum optimalnya proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
5. Belum optimalnya ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah
6. Belum optimalnya ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Belum optimalnya ketercapaian administrasi umum perangkat daerah

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RT/RW di Kota Pekalongan yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pekalongan Utara, sebagai berikut :

a. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, cepat, tepat, efisien, dan transparan.
b. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mewujudkan akuntabilitas.
c. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
d. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
e. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Pekalongan dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Pekalongan Utara adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Pekalongan Utara dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan dan perbaikan terhadap kondisi geografis yang sampai dengan ini terjadi untuk kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

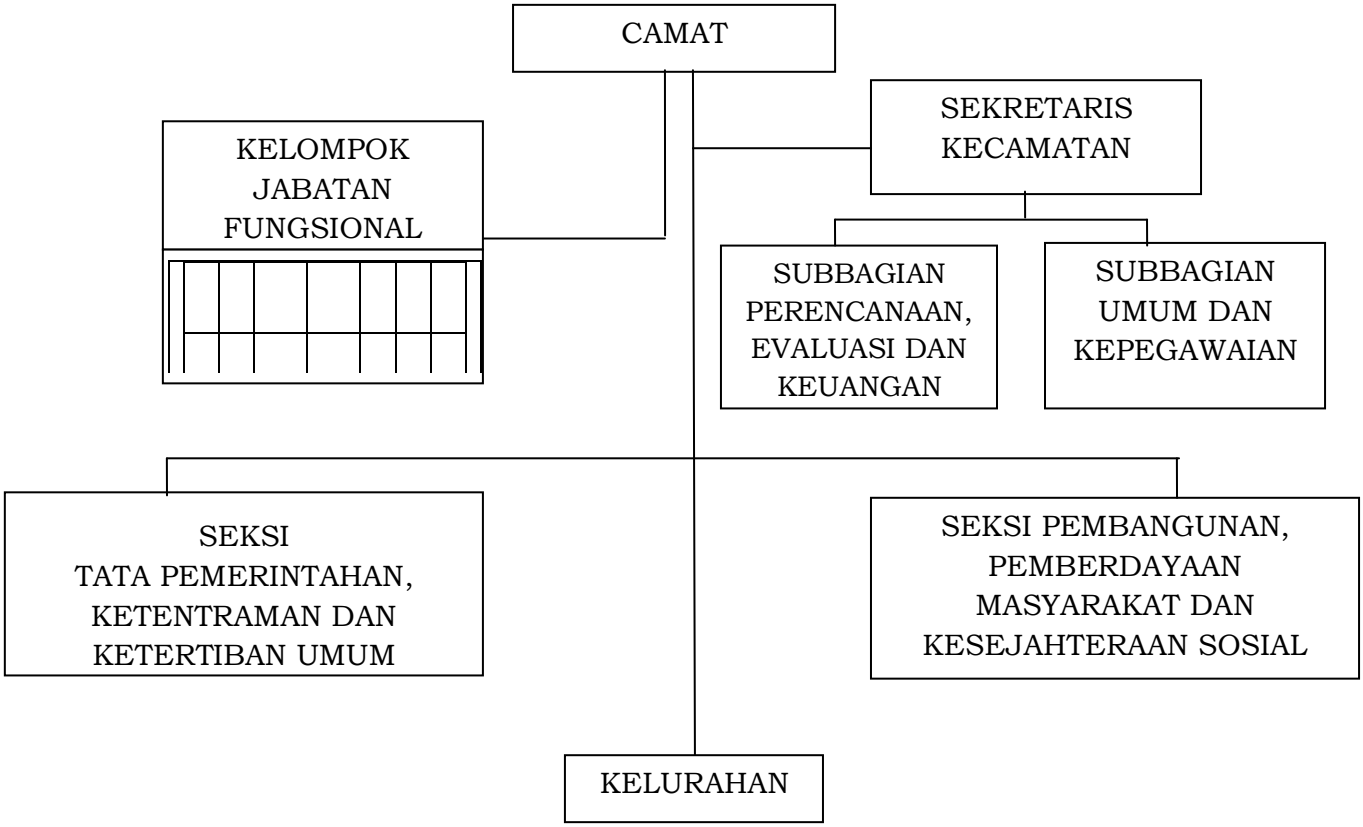

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan atas program dan kegiatan Kecamatan Pekalongan Utara tahun 2025, maka hasil review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel T-C.31

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan

OPD. KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kecamatan Pekalongan Utara				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kecamatan Pekalongan Utara				
	-Penyusunan		-Jumlah dokumen	3 dokumen	7.668.000	-Penyusunan		-Jumlah			

	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		perencanaan perangkat daerah			Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	4.089.000	
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		- Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	2 dokumen	1.886.000	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		- Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	2 dokumen	1.927.000	
	-Evalausi Kinerja Perangkat Daerah		- Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	15 laporan	195.900.000	- Evalausi Kinerja Perangkat Daerah		- Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	15 laporan	108.570.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		- Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	62 orang	7.590.684.000	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		- Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	71 orang	7.576.059.000	
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD		- Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	195.900.000	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD		- Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	195.900.000	
	- Koordinasi		- Jumlah	1 laporan	1.748.000	-		- Jumlah			

	dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir SKPD			- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir SKPD	1 laporan	1.786.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	2 paket	16.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **Administrasi Umum Perangkat Daerah**		-Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	2 paket	7.300.000	
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		- Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 paket	6.450.000	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		- Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 paket	6.280.000	
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 paket	129.080.000	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 paket	99.000.000	
	- Penyediaan		- Jumlah paket Peralatan			- Penyediaan		- Jumlah paket			

	Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Rumah Tangga yang disediakan -Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan -Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan - Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan - Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 paket 4 paket 13 paket 1 dokumen 12 laporan	8.131.000 201.062.000 40.000.000 12.000.000 20.695.000	Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Peralatan Rumah Tangga yang disediakan -Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan -Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan - Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan - Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD -jumlah	4 paket 4 paket 13 paket 1 dokumen 12 laporan	3.140.000 139.362.000 30.300.000 12.000.000 13.870.000	

	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat		-jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	10.500.000	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat		laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	7.670.000	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		-jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	125.884.000	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		-jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	140.184.000	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		-jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	742.383.000	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		-jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	744.163.000	
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak		-jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan	37 unit	192.401.000	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak		-jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	37 unit	165.570.000	

	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		pajaknya			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
	- Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		-jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13 unit	105.320.000	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		-jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	11 unit	78.000.000	
	- Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	120 unit	45.000.000	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	90 unit	32.850.000	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN**					**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					

	PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Keggiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat** Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Kewenangan		-Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait -Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 laporan 4 laporan	10.000.000 7.125.000	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Keggiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat** Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan		-Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait -Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 laporan 4 laporan	9.130.000 4.460..000	

	Lain Yang Dilimpahkan										
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** **Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan **Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan** Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan pendidikan dan Ketrampilan		-Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan -Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan	4 lembaga 2400 keluarga	48.261.000 67.050.000	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** **Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan **Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan** Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan pendidikan dan Ketrampilan untuk mewujudkan		-Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan -Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang	4 lembaga 1823 keluarga	24.720.000 57.350.000	

	untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing		Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing			sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing		berkualitas dan berdaya saing			
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		-Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11 laporan	297.540.000	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		-Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11 laporan	285.040.000	

5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		-Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 laporan	5.625.000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		-Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 laporan	4,970.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan Pekalongan Utara dalam penyusunan program dan kegiatan terlebih dahulu menampung aspirasi masyarakat dari pemangku kepentingan, baik dari OPD terkait, kelompok masyarakat maupun warga masyarakat.

Berdasarkan hasil rumusan dari pemangku kepentingan tersebut dilakukan penyesuaian dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah sekaligus merupakan program dan kegiatan yang merupakan isu-isu strategis Perangkat Daerah, tentu saja usulan program dan kegiatan ini adalah berdasarkan pada skala prioritas.

TABEL T-C.32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1.	Peninggian dan Pengecoran Jalan Selat Karimata dan Drainase Udit 40 Jalan Selat Karimata (kanan kiri) lanjutan	RW 1 – 6 Kelurahan Bandengan	Presentase ketercapaian pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	1300 x 5 x0,4 m dan 2600 m x 0,3 m	PK 1 dalam musrenbang tingkat kecamatan
2.	Perbaikan dan normalisasi saluran Jalan progo Timur, Jl. Veteran dan Manunggal	Lintas RW 03, 04, 06	Presentase ketercapaian pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	2500 m	PK 2 dalam musrenbang tingkat kecamatan
3.	Drainase Udit depan Mushola Suhada Jalan Kusuma Bangsa Sebelah Makam Pahlawan	RT.1,2 RW 01	Presentase ketercapaian pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	600 m	PK 3 dalam musrenbang tingkat kecamatan
5.	Usulan Kegiatan pemberdayaan perempuan melalui perkuatan perempuan dalam kegiatan ekonomi	7 kelurahan di Kecamatan Pekalongan Utara	Presentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan melalui perkuatan perempuan dalam kegiatan ekonomi	50 oranng x 7 kelurahan	PK 5 dalam musrenbang tingkat kecamatan

6.	Pembangunan pagar keliling kantor kelurahan Panjang Wetan beserta pintu gerbang	Kantor Kelurahan Panjang Wetan	Persentase ketercapaian gedung/ bangunan yang terbangun	1 unit	Usulan melalui surat kepada Ketua TAPD
7.	Pembangunan talud/penyangga pinggiran saluran air Kelurahan Panjang Wetan	depan makam Kristen RT.01 RW.06 Kelurahan Panjang Wetan	Persentase ketercapaian pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	1 unit	Usulan melalui surat kepada Ketua TAPD
8.	Pembangunan Posyandu	Rt 04 RW 06 Kelurahan Panjang di area bantaran sungai lodji	Persentase ketercapaian pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	1 unit	Usulan melalui surat kepada Ketua TAPD
9.	Pembangunan gedung kantor Panjang Baru	Kelurahan Panjang Baru	Persentase ketercapaian gedung/ bangunan yang terbangun	1 unit dengan nilai 1.012.000.000	Usulan melalui surat kepada Ketua TAPD
10.	Pembangunan Perluasan Kantor Kelurahan Krapyak	Kelurahan Krapyak	Persentase ketercapaian gedung/ bangunan yang terbangun	1 unit dengan nilai 400.000.000	Usulan melalui surat kepada Ketua TAPD
11.	Pembanguan gedung logistic Kelurahan Padukuhan Kraton	Kelurahan Padukuhan Kraton	Persentase ketercapaian gedung/ bangunan yang	1 unit dengan nilai	Usulan melalui surat kepada Ketua

			terbangun	125.000.000	TAPD
12.	Rehan lanjutan PAUD Manunggal	Padukuhan Kraton	Persentase ketercapaian gedung/ bangunan yang terbangun	1 unit dengan nilai 100.000.000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Pada hakekatnya perencanaan pembangunan nasional perupakan acuan utama bagi setiap daerah propinsi dan kabupaten / kota dalam merumuskan kebijaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Arah kebijaksanaan pembangunan daerah kota harus didasari oleh visi dan misi daerah dan output akhirnya berupa pola dasar pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Permasalahan tersebut antara lain :

1. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
2. Belum optimalnya mobil patroli untuk kegiatan rutin trantibum dalam melayani pemenuhan kebutuhan akan rasa aman dan ketertiban bagi warga di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara.
3. Belum optimalmya mobil sampah untuk kegiatan rutin pengambilan sampah dikarenakan armada yang ada rusak berat karena sering kena banjir dan rob.
4. Belum optimalnya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan. Permasalahan ini muncul sebagai akibat faktor eksternal berupa cepatnya perubahan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan penataan organisasi dan kelembagaan serta ketatalaksanaan pemerintahan. Dampak dari perubahan-perubahan Peraturan Pemerintah membutuhkan proses penyatuan dengan situasi dan kondisi yang akhirnya menghambat laju kinerja aparatur.
5. Belum optimalnya profesionalisme aparat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dimana mengharuskan adanya aparat yang profesional dalam proses penerapan tata pemerintahan yang baik (Good Governance).
6. Kurangnya komunikasi dan kerjasama LPM dan BKM dalam kegiatan koordinasi, perencanaan dan evaluasi pembangunan serta kurang

tersedianya dana yang dibutuhkan untuk percepatan dan pemerataan pembangunan sarana prasarana dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat, menyebabkan program dan hasil pembangunan belum optimal.

7. Belum adanya keseragaman penyelenggaraan administrasi kependudukan oleh aparatur Kelurahan maupun di tingkat RW / RT sebagai akibat kurang memahami sistem administrasi kependudukan serta belum adanya buku-buku manual bagi RT dan RW yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Sehingga data kependudukan ditingkat RT / RW masih kurang tertib, hal tersebut mempengaruhi data pendukung guna terwujudnya pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Kinerja aparatur kelurahan perlu ditingkatkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum, hal tersebut terjadi sebagai akibat :
    a. Kurang representatifnya lokasi kantor Kelurahan dikarenakan tuntutan perubahan zaman (kondisi rusak, kurang luas dll)
    b. Adanya Lurah yang berdomisili di luar wilayah kerjanya karena belum tersedia rumah dinas bagi Lurah. Hal ini mempengaruhi kinerja Lurah dalam pelayanan masyarakat, karena sering timbul permasalahan sewaktu-waktu, sehingga berakibat penyelesaian masalah kurang cepat.
    c. Perlu peningkatan SDM aparatur di bidang perencanaan, penyusunan program, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, sehingga dalam pelaksanaan dan evaluasi kegiatan sesuai sasaran pada bidang tugas / fungsinya masing-masing.
9. Belum adanya anggaran untuk fasilitasi kegiatan kepemudaan dan olah raga maupun fasilitasi kegiatan ormas, sehingga event-event di tingkat Kecamatan Pekalongan Utara yang dapat mendorong terciptanya iklim yang kondusif tidak dapat terselenggara, serta menyebabkan pemuda dan potensi keolahragaan kesulitan dalam menyalurkan / mengembangkan bakat dan minat untuk berprestasi maupun berapresiasi.
10. Kurangnya kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman, pengamalan ajaran agama serta kualitas iman dan taqwa kepada

Tuhan YME bagi aparatur Pemerintah Kecamatan maupun Kelurahan secara rutin, maka dapat diindikasikan bahwa masih rendahnya kualitas pengamalan ajaran agama dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut dapat mendorong lahirnya etika dan moral yang tidak mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Keberhasilan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan dalam mewujudkan tugasnya dalam dipengaruhi oleh :

1. Dukungan sarana prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai.
2. Makin terbukanya komunikasi antar Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan dengan masyarakat.
3. Makin berperannya lembaga legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat.
4. Makin meningkatnya kepedulian Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan dalam pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
5. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya kerjasama dengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pekalongan Utara

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan- tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Untuk optimalisasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pekalongan Timur melaksanakan Visi dan Misi yang telah disusun oleh Kepala Daerah terpilih, Adapun Visi dan Misi Pemerintah Kota Pekalongan adalah :

"Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berdasarkan nilai-nilai religiusitas"

yang dijabarkan ke dalam Misi – Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan ;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat ;
3. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan ;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan ;
5. Mengambangkan IT berbasis komunitas ;
6. Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlakul karimah.

Tujuan yang telah dirumuskan Kecamatan Pekalongan Utara dalam mendukung visi dan misi Walikota Pekalongan dalam hal ini misi kedua adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

Akan dicapai melalui 2 Sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan guna terwujudnya Visi dan Misi Kepala Daerah serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta dengan melihat prioritas pembangunan yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Perangkat daerah menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Rencana Kerja tahun 2025 merupakan lanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 sebagian besar masih dilaksanakan pada tahun 2025. Pada prinsipnya program dan kegiatan disusun berdasarkan skala prioritas sesuai pagu indikatif yang ditetapkan.

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pekalongan Utara pada tahun 2025 adalah sebanyak 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 26 (Dua Puluh Enam) Sub Kegiatan dengan jumlah pagu indikatif awal sebesar Rp 9.753.690.000,-

Sehubungan dengan hal tersebut untuk Rencana Kerja Tahun 2025 dengan melihat renstra 2021-2026 sesuai analisis dari Bappeda, Kecamatan Pekalongan Utara melaksanakan 5 (lima) program, 12 (dua belas)) kegiatan dan 26 (Dua Puluh Enam) Sub Kegiatan dengan jumlah pagu indikatif awal sebesar Rp 9.753.690.000,-dengan rincian sebagai berikut :

1.1. Program

- 1.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 1.1.2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 1.1.3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 1.1.4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 1.1.5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1.2. Kegiatan

- 1.2.1. Program Penunjang Urasan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.2.1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2.1.2. Administrasi Keuangan Daerah

1.2.1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.2.1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.2.1.5. Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintahan Daerah

1.2.1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.2.2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1.2.2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

1.2.2.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

1.2.3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1.2.3.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan

1.2.3.3 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan

1.2.4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1.2.4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1.2.5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1.2.5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

1.3. Sub Kegiatan

1.3.1. Program Penunjang Urasan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.3.1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.3.1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.3.1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD

1.3.1.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.3.1.2. Administrasi Keuangan Daerah

1.3.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.3.1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD

1.3.1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.3.1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.3.1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

1.3.1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.3.1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

1.3.1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.3.1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.3.1.4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.3.1.4.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.3.1.4.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.3.1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.3.1.5. Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintahan Daerah

1.3.1.5.1 Penyediaan Jasa surat menyurat

1.3.1.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.3.1.5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.3.1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.3.1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.3.1.6.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya

1.3.1.6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.3.2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1.3.2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

1.3.2.1.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

1.3.2.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

1.3.2.2.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

1.3.3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1.3.3.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan

1.3.3.2.1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

1.3.3.2 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan

1.3.3.2.1 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

1.3.4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1.3.4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1.3.4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

1.3.5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1.3.5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

1.3.5.1.1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kota Pekalongan

Kode OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Baru	Nama OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Baru	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/sub kegiatan	INDIKATOR KINERJA BESARAN/ VOLUME CATATAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	**Kecamatan Pekalongan Utara**								
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	Kecamatan Pekalongan Utara	**100 %**				**100 %**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Ketercapaian Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Kecamatan Pekalongan Utara	**100 %**				**100 %**	

7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		4 laporan	9.130.000	APBD			9.130.000
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Ketercapaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Kecamatan Pekalongan Utara	**100 %**					
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		4 laporan	4.460.000	APBD			4.460.000
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	Kecamatan Pekalongan Utara	**100 %**				**100 %**	
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Kecamatan Pekalongan Utara	**100 %**				**100 %**	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		4 lkk	24.720.000	APBD			24.720.000

7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Kecamatan Pekalongan Utara	**100 %**					
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		1823 keluarga	57.350.000	APBD			57.350.000
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	Kecamatan Pekalongan Utara	**100 %**				**100 %**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase ketercapaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Kecamatan Pekalongan Utara	**100 %**				**100 %**	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		11 laporan	285.040.000	APBD			285.040.000

7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara**	Kecamatan Pekalongan Utara	**100 %**				**100 %**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kecamatan Pekalongan Utara	**100 %**				**100 %**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1 dokumen	4.970.000	APBD			4.970.000
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	- Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja - Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kecamatan Pekalongan Utara	**100 %** **100 %** **100 %**				**100 %** **100 %** **100 %**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kecamatan Pekalongan Utara	**100 %**				**100 %**	

7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 dokumen	4.089.000	APBD			4.089.000
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 dokumen	1.927.000	APBD			1.927.000
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15 laporan	108.570.000	APBD			108.570.000
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kecamatan Pekalongan Utara	**100 %**				**100 %**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		71 orang	7.590.684.000	APBD			7.590.684.000
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 laporan	195.900.000	APBD			195.900.000
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 laporan	1.786.000	APBD			1.786.000
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kecamatan Pekalongan Utara	**100 %**				**100 %**	

7.01..01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 paket	7.300.000	APBD			7.300.000
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kecamatan Pekalongan Utara	**100 %**				**100 %**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 paket	6.280.000	APBD			6.280.000
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		4 paket	99.000.000	APBD			99.000.000
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		4 paket	3.140.000	APBD			3.140.000
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 paket	139.362.000	APBD			139.362.000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		13 paket	30.300.000	APBD			30.300.000
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 dokumen	12,000.000	APBD			12,000.000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan	13.870.000	APBD			13.870.000

7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kecamatan Pekalongan Utara	**100 %**				**100 %**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 laporan	7.670.000	APBD			7.670.000
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	140.184.000	APBD			140.184.000
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	744.163.000	APBD			744.163.000
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kecamatan Pekalongan Utara	**100 %**				**100 %**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		37 unit	165.570.000	APBD			165.570.000
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		11 unit	78.000.000	APBD			78.000.000

7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		90 unit	32.850.000	APBD			32.850.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Rencana Kerja

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka disusunlah rencana kerja yang dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengikuti peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2024 menetapkan 5 (lima) program, 12 (Dua Belas) kegiatan dan 26 (Dua Puluh Enam) Sub Kegiatan.

Program Yang Dilaksanakan

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Yang Dilaksanakan

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keungan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
8. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
9. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
10. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

11. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
12. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan Yang Dilaksanakan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun Keuangan SKPD
7. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan
13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
14. Penyeenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
15. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
17. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
20. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
21. Pelaksanaan Urusan Permerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
22. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
23. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

24. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing
25. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
26. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4.2 Pendanaan

Dalam menjalankan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang telah direncakan sesuai dengan yang telah dijelaskan diatas, Kecamatan Pekalongan Utara memperoleh pendanaan kegiatan yang bersumber dari APBD dan DAU APBN terkait gaji dan tunjangan PNS.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan berbasis Good Governace dan Clean Goverment dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) mengikuti paradigma baru yang akan mampu menciptakan kebijakan (trickle down effect) sehingga kepentingan masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan selain menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2025 juga berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan. Renja diharapkan juga mampu memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan suatu keputusan kebijakan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pemangku jabatan dan staf Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih optimal.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal yang perlu diperhatikan selama tahun berjalan guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pekalongan Utara sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Pekalongan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2025 ini kami sajikan sebagai bentuk acuan pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang, sehingga tercapai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan yang lebih baik dengan prinsip bersama-sama melaksanakan pembangunan dengan asas transparansi, akuntabel, berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan bersama di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara serta sebagai bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Pekalongan.

Semoga Renja Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga

diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2025.

Demikian kami ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Pekalongan,08 Agustus 2024
CAMAT PEKALONGAN UTARA
KOTA PEKALONGAN

WISNU ARIYADI,S.Pt,MT
Pembina Tingkat I
NIP. 197109261999031 006

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
TAHUN 2025

Pekalongan
World's City of Batik

KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
KOTA PEKALONGAN
2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Tahun 2025 telah berhasil disusun. Renja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pekalongan Selatan 2021-2026, dan telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam Renja ini, secara rinci telah ditetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan pada tahun 2025. Setiap kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target yang ingin dicapai, serta pagu anggaran sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya Renja akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanan Anggaran (DPA) Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun Anggaran 2025.

Renja Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Tahun 2025 telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun demikian laporan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kami mengharapkan masukan dan saran guna perbaikan serta penyempurnaan penyusunan Renja pada tahun yang akan datang.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

Camat Pekalongan Selatan
Kota Pekalongan

ZAENAL MUHIBBIN, S.Pd.
Pembina
NIP. 19670609 199103 1 008

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ... 20

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 22

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 32

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 34

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 34

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 35

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 35

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 45

BAB V PENUTUP 50

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2023	12
Tabel 2.2	Jumlah ASN Kecamatan Pekalongan Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	17
Tabel 2.3	Jumlah ASN Kecamatan Pekalongan Selatan Berdasarkan Golongan/Ruang	17
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2023, Target dan Proyeksi Tahun 2024 dan Tahun 2025	19
Tabel 2.5	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Pekalongan	23
Tabel 2.6	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun Anggaran 2025	33
Tabel 3.1	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional	34
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026	37
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	45

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diimplikasikan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dalam Penyusunan Renja, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah, pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi, serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan kebijakan Pemerintah

Daerah Kota Pekalongan serta mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan tahunan daerah perlu dibuat Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang sistematis, bermutu, akuntabel dan tepat waktu. Renja Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Penyusunan ini dilakukan melalui proses koordinasi internal Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, konsultasi dan koordinasi dengan BAPPEDA dan Perangkat Daerah terkait di Kota Pekalongan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Tahun 2025 didasarkan pada:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Selatan, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran

Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 8).
10. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 98);
11. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Derah Kota Pekalongan Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Tahun 2025 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

   Dokumen Renja Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan disusun dengan maksud sebagai arah dan pedoman bagi Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dalam melaksanakan rencana kegiatan tahunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Tujuan

   Dokumen Renja Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan disusun bertujuan antara lain untuk:
   a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya;
   b. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
   c. Menjamin terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;

d. Adanya kesinambungan antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya;
e. Menjalankan tahapan perencanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Pekalongan Selatan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Memuat tentang pengertian Renja Kecamatan Pekalongan Selatan, Proses Penyusunan Renja, Keterkaitan antara Rencana Kerja (Renja) dengan Dokumen RKPD dan Rencana Strategis (Renstra).

1.2 Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja).

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU:

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pekalongan Selatan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Memuat uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Pekalongan Selatan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Selaian itu, juga untuk dapat diketahui dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SDGs. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses yang dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan penjelasannya. Kemudian menjelaskan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap

perbedaan dengan Renja, seperti terdapat rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan awal RKPD, atau program, kegiatan dan sub kegiatan cocok namun besarnya anggaran berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Memuat uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain : Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pekalongan Selatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pekalongan Selatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pekalongan Selatan.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis pada tahun yang bersangkutan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan, program dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2025.

Pengukuran kinerja kegiatan/sub kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan penetapan indikator kinerja, yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan sebesar Rp. 8.168.812.000,-, termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN dengan melaksanakan 5 program, 12 kegiatan dan 26 sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 7.887.252.800,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 96,55%. Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2024, dengan alokasi pagu anggaran Belanja sebesar Rp.9.214.315.000,- (belanja gaji dan tunjangan Rp. 6.685.790.000,-) dengan melaksanakan 5 program, 12 kegiatan dan 26 sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%, baik realisasi keuangan maupun capaian fisiknya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta perkiraan capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pekalongan Selatan sebagai berikut:

1. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan dalam perencanaan unsur kewilayahan khususnya wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan;
2. Belum terpenuhinya sumber daya manusia yang sesuai dengan kualitas dan kuantitas Analisis Jabatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan;
3. Koordinasi antar *stakeholder* dalam unsur kewilayahan yang tidak maksimal;
4. Komitmen dan pemahaman bersama untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD perlu ditingkatkan dalam merencanakan kegiatan;

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pekalongan Selatan dalam pelaksanaan urusan unsur kewilayahan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu 2023, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2023 pada Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan yang melaksanakan urusan unsur kewilayahan dengan 5 program.

Adapun evaluasi kinerja hasil/keluaran program/kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

   Pada pelaksanaan Renja Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan tahun 2023 seluruh program memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang diharapkan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

   Pada Renja Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan tahun 2023 terdapat 7 indikator dengan kategori seluruh program memenuhi target.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

   Pada Renja tahun 2023 tidak ada indikator yang melebihi target capaian kinerja diatas 100%.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan yang sudah dilakukan mapping berdasarkan permendagri 90 tahun 2019, didasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Capaian evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat dalam tabel 2.1. dibawah ini:

TABEL 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2023
KOTA PEKALONGAN

OPD : KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

No.	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (Perubahan RPJMD 2016-2021)	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
					Target 2023	Realisasi 2023			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								
	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100		100	100	100	100	Tercapai
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian,administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100		100	100	100	100	Tercapai
	Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	100		100	100	100	100	Tercapai
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100		100	100	100	100	Tercapai
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100		100	100	100	100	Tercapai
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian	Persen	100		100	100	100	100	Tercapai
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	Persen	100		100	100	100	100	Tercapai

No.	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (Perubahan RPJMD 2016-2021)	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
					Target 2023	Realisasi 2023			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100		100	100	100	100	Tercapai
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100		100	100	100	100	Tercapai
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								
	Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik di Wilayah Selatan	Persen	100		100	100	100	100	Tercapai
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
	Persentase pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persen	100		100	100	100	100	Tercapai
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								
	Tingkat kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/ kelurahan di Wilayah Selatan	Persen	100		100	100	100	100	Tercapai
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								
	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	Persen	100		100	100	100	100	Tercapai

No.	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (Perubahan RPJMD 2016-2021)	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
					Target 2023	Realisasi 2023			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								
	Persentase kegiatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dilaksanakan	Persen	100		100	100	100	100	Tercapai
3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan								
	Persentase kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan	Persen	100		100	100	100	100	Tercapai
IV	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								
	Tingkat kinerja Trantibum Wilayah Selatan	Persen	100		100	100	100	100	Tercapai
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
	Tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan Wilayah Selatan	Persen	100		100	100	100	100	Tercapai
V	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								
	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan	Persen	100		100	100	100	100	Tercapai
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								
	Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Persen	100		100	100	100	100	Tercapai

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan.

1. Tugas dan Fungsi Kecamatan

   Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Camat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

   a. perumusan dan penetapan sasaran dan program bidang pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan;
   b. perumusan kebijakan bidang pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan;
   c. pengoordinasian pengelolaan kesekretariatan di Kecamatan;
   d. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan;
   e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   f. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
   g. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota;
   h. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
   i. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
   j. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
   k. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Wali Kota kepada Camat;
   l. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;

m. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Camat;
b. Sekretariat Kecamatan, terdiri atas:
    1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan; dan
    2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
d. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum;
e. Kelurahan, terdiri atas:
    1) Lurah;
    2) Sekretariat Kelurahan;
    3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum; dan
    4) Seksi Pemerintahan dan Pembangunan.
f. Jabatan Fungsional.

3. Kondisi Sumber Daya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan didukung sumber daya manusia sejumlah 27 orang terdiri dari 14 orang ASN dan 13 orang non ASN. Adapun jumlah pegawai ASN Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan sampai dengan bulan Juli 2024 berdasarkan jenjang pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2 Jumlah ASN Kecamatan Pekalongan Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	PNS	PPPK	JUMLAH
1	SLTA	6	-	6
2	DIPLOMA III	2	1	3
3	S-1	5	-	5
4	S-2	-	-	-
	Jumlah	**13**	**1**	**14**

Tabel 2.3 Jumlah ASN Kecamatan Pekalongan Selatan Berdasarkan Golongan/Ruang

No.	GOLONGAN	PNS	PPPK	JUMLAH
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	6	-	6
3	Golongan III	6	-	6
4	Golongan IV	1	-	1
5	Golongan VII	-	1	1
	Jumlah	**13**	**1**	**14**

4. Kondisi Sarana dan Prasarana

   Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan telah memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai.

5. Permasalahan

   Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down.

Pada awal perencanaan anggaran, cukup banyak usulan yang disampaikan baik oleh internal seksi di kecamatan maupun oleh *stakeholder* terkait kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan, namun tidak semua usulan dapat direalisasi

Pada Tahun 2023, Kecamatan Pekalongan Selatan telah melaksanakan 4 program strategis dan 1 program penunjang yang dijabarkan dalam 5 program, 12 kegiatan dan 26 sub kegiatan dengan capaian indikator sasaran sebagai berikut:

a) Nilai SAKIP OPD

   Penilian didasarkan atas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang meliputi laporan kinerja instansi pemerintah, rencana aksi, perjanjian kinerja dan capaian kinerja OPD pada tingkat kota, provinsi maupun nasional. Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat, Kecamatan Pekalongan Selatan mendapat nilai 75,80 dengan predikat BB (Sangat Baik) dari target yang ditetapkan sebesar 75.50 dengan ketercapaian 100,40%. Pencapaian tersebut menunjukkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kecamatan Pekalongan Selatan sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

b) Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan Trantibum

   Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan Trantibum dengan target 100%, realisasi 99,87% dengan ketercapaian 99,87%.

Adapun hasil analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam Tabel 2.4 sebagai berikut:

TABEL 2.4 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN TAHUN 2023
TARGET DAN PROYEKSI TAHUN 2024 DAN TAHUN 2025

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13
1	Nilai SAKIP OPD			74,00	75,50	77,00	75,80	77,00	78,50	Indeks
2	Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan Trantibum			100%	100%	100%	99,87%	100%	100%	Persen

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Permasalahan dan hambatan tersebut, antara lain:

1. Belum mencukupinya peralatan kantor sebagai sarana penunjang kelancaran dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
2. Sumber Daya Manusia yang kurang memadai, karena Kecamatan Pekalongan Selatan hanya didukung dengan 14 ASN dan dibantu oleh tenaga kontrak dan tenaga kegiatan, sehingga berdampak pada kurangnya kelancaran dalam pelaksanaan pelayanan dan administrasi pemerintahan secara umum.
3. Belum optimalnya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan. Permasalahan ini muncul sebagai akibat faktor eksternal berupa cepatnya perubahan regulasi yang berkaitan dengan penataan organisasi dan kelembagaan serta ketatalaksanaan pemerintahan. Dampak dari perubahan-perubahan Peraturan Pemerintah membutuhkan proses penyatuan dengan situasi dan kondisi yang akhirnya menghambat laju kinerja aparatur.
4. Belum optimalnya profesionalisme aparat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik di mana mengharuskan adanya aparat yang profesional dalam proses penerapan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
5. Belum adanya keseragaman penyelenggaraan administrasi kependudukan oleh aparatur kelurahan maupun di tingkat RW/RT sebagai akibat kurang memahami sistem administrasi kependudukan serta belum adanya buku-buku manual bagi RT dan RW yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Sehingga data kependudukan di tingkat RT/RW masih kurang tertib, hal tersebut mempengaruhi ketersediaan data pendukung guna terwujudnya pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
6. Kurangnya komunikasi dan kerjasama antar LKK dalam kegiatan koordinasi, perencanaan dan evaluasi pembangunan serta kurang tersedianya dana yang dibutuhkan untuk percepatan dan pemerataan pembangunan sarana

prasarana dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat di kelurahan, yang menyebabkan program dan hasil pembangunan belum optimal.

7. Perlu peningkatan kinerja kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum, hal tersebut terjadi sebagai akibat:
   a. Kurang representatifnya lokasi kantor kelurahan dikarenakan tuntutan perubahan (kondisi bangunan yang rusak, luasan ruangan kurang representatif, letak yang berada jauh dari permukiman, dll).
   b. Perlunya peningkatan SDM aparatur di bidang perencanaan, penyusunan program, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, sehingga dalam pelaksanaan dan evaluasi kegiatan sesuai sasaran pada bidang tugas/fungsinya masing-masing.

Keberhasilan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dalam mewujudkan tugasnya dipengaruhi oleh:

1. Tersedianya dukungan sarana prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai.
2. Makin terbukanya komunikasi antara Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan kelurahan dengan masyarakat.
3. Makin meningkatnya kepedulian masyarakat dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatnya kualitas pelayanan publik.
4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu penting terkait tugas pokok dan fungsi kecamatan diperoleh baik melalui analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi kecamatan di masa yang akan datang.

Adapun isu-isu penting terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pekalongan Selatan sebagai berikut:

1. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
    a. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya menerbangkan balon udara dan petasan pada saat tradisi Syawalan.
    b. Masih adanya peredaran Miras oplosan yang meresahkan masyarakat.
    c. Masalah kenakalan remaja.
    d. Penyalahgunaan jalur interchange tol Sokoduwet-Setono untuk kegiatan balap sepeda motor liar.
    e. Penyalahgunaan jalur lambat di sepanjang jalur interchange tol Sokoduwet-Setono untuk berjualan pedagang kaki lima.
    f. Penyalahgunaan area pemakaman Bong Cina Kelurahan Kuripan Yosorejo untuk tempat prostitusi liar.
    g. Terjadinya pelanggaran pemanfaatan tata ruang.
2. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
    a. Terjadinya banjir di sebagian wilayah pada saat musim hujan dikarenakan kondisi drainase yang tidak berfungsi dengan baik.
    b. Belum adanya pengolahan limbah yang memadai sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan.
    c. Masih adanya masyarakat yang buang air besar ke aliran air karena tidak mempunyai tangki septik atau jamban yang layak.
    d. Menurunnya semangat gotong royong di masyarakat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.5 sebagai berikut:

TABEL 2.5 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KOTA PEKALONGAN

OPD : KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kecamatan Pekalongan Selatan				**8.488.274.000**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**				**10.088.404.000**	
	Unsur Kewilayahan				**8.488.274.000**	**Unsur Kewilayahan**				**10.088.404.000**	
	Kecamatan				**8.488.274.000**	**Kecamatan**				**10.088.404.000**	
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja**	**100 Persen**	**8.133.652.000**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja**	**100 Persen**	**9.693.612.000**	
			Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**100 Persen**				**Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**		
			Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah	**100 Persen**				**Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100 Persen**		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**108.391.000**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**103.442.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	13.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.828.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.804.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	92.391.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	97.810.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Admininstrasi Keuangan Perangkat daerah		**Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**6.786.319.000**	**Admininstrasi Keuangan Perangkat daerah**		**Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**7.197.272.000**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/ Bulan	6.608.719.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/ Bulan	7.023.100.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	174.600.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	172.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.672.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**18.229.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**5.000.000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	18.229.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	5.000.000	
	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah		**Presentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**340.965.000**	**Adminitrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**288.488.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	7.800.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.700.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	136.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	114.370.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	9.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	3.400.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	122.665.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	114.288.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	35.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	26.650.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	17.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	11.580.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	12.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	12.500.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Presentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**694.644.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Presentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**863.914.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	9.300.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	6.400.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	86.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	98.720.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	599.344.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	758.794.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Presentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**185.104.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Presentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**1.235.496.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	38 Unit	83.104.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	38 Unit	144.496.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	62.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	1.062.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	111 Unit	40.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas	89 Unit	29.000.000	
2	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan**	**100 Persen**	**9.674.000**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan**	**100 Persen**	**12.580.000**	
						Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**Persentase pelaksanaan kegiatan oordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	**100 Persen**		
						Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	8.600.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100 Persen**	**9.674.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100 Persen**	**3.980.000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	9.674.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	3.980.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		**Tingkat Kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/ kelurahan di Wilayah Selatan**	**100 Persen**	**109.375.000**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		**Tingkat Kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/ kelurahan di Wilayah Selatan**	**100 Persen**	**98.040.000**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 Persen**	**25.000.000**						
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000						
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		**Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dilaksanakan**	**100 Persen**	**25.000.000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		**Persentase kegiatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dilaksanakan**	**100 Persen**	**40.690.000**	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	40.690.000	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		**Persentase kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan**	**100 Persen**	**59.375.000**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**		**Persentase kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan**	**100 Persen**	**57.350.000**	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	120 Keluarga	59.375.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	117 Keluarga	57.350.000	
4	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Selatan**	**100 Persen**	**224.465.000**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Selatan**	**100 Persen**	**279.102.000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		**Persentase ketercapaian kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**100 Persen**	**224.465.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase ketercapaian kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**100 Persen**	**279.102.000**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	224.465.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	9 Laporan	279.102.000	
5	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan**	**100 Persen**	**11.108.000**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan**	**100 Persen**	**5.070.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah		**Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**100 Persen**	**11.108.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah**		**Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**100 Persen**	**5.070.000**	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	11.108.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	5.070.000	
	Kelurahan Jenggot				**387.142.000**	**Kelurahan Jenggot**				**418.057.000**	
	Unsur Kewilayahan				**387.142.000**	**Unsur Kewilayahan**				**418.057.000**	
	Kecamatan				**387.142.000**	**Kecamatan**				**418.057.000**	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**100 Persen**	**387.142.000**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**100 Persen**	**418.057.000**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 Persen**	**387.142.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 Persen**	**418.057.000**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	88.697.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	124.244.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas/ Ormas	285.945.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas/ Ormas	281.313.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kelurahan Buaran Kradenan				**385.601.000**	**Kelurahan Buaran Kradenan**				**565.157.000**	
	Unsur Kewilayahan				**385.601.000**	**Unsur Kewilayahan**				**565.157.000**	
	Kecamatan				**385.601.000**	**Kecamatan**				**565.157.000**	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**100 Persen**	**385.601.000**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**100 Persen**	**565.157.000**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 Persen**	**385.601.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 Persen**	**565.157.000**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	88.697.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	275.144.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas/ Ormas	284.404.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas/ Ormas	277.513.000	
	Kelurahan Kuripan Kertoharjo				**320.867.000**	**Kelurahan Kuripan Kertoharjo**				**347.693.000**	
	Unsur Kewilayahan				**320.867.000**	**Unsur Kewilayahan**				**347.693.000**	
	Kecamatan				**320.867.000**	**Kecamatan**				**347.693.000**	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**100 Persen**	**320.867.000**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**100 Persen**	**347.693.000**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 Persen**	**320.867.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 Persen**	**347.693.000**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	88.697.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	124.244.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas/ Ormas	219.670.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas/ Ormas	210.949.000	
	Kelurahan Kuripan Yosorejo				**384.646.000**	**Kelurahan Kuripan Yosorejo**				**407.772.000**	
	Unsur Kewilayahan				**384.646.000**	**Unsur Kewilayahan**				**407.772.000**	
	Kecamatan				**384.646.000**	**Kecamatan**				**407.772.000**	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**100 Persen**	**384.646.000**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**100 Persen**	**407.772.000**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 Persen**	**384.646.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 Persen**	**407.772.000**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	96.335.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	135.004.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas/ Ormas	275.811.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas/ Ormas	260.268.000	
	Kelurahan Sokoduwet				**350.384.000**	**Kelurahan Sokoduwet**				**381.336.000**	
	Unsur Kewilayahan				**350.384.000**	**Unsur Kewilayahan**				**381.336.000**	
	Kecamatan				**350.384.000**	**Kecamatan**				**381.336.000**	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**100 Persen**	**350.384.000**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**100 Persen**	**381.336.000**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 Persen**	**350.384.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 Persen**	**381.336.000**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	96.335.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	131.882.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas/ Ormas	241.549.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan,	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas/ Ormas	236.954.000	
	Kelurahan Banyurip				**393.808.000**	**Kelurahan Banyurip**				**426.111.000**	
	Unsur Kewilayahan				**393.808.000**	**Unsur Kewilayahan**				**426.111.000**	
	Kecamatan				**393.808.000**	**Kecamatan**				**426.111.000**	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**100 Persen**	**393.808.000**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**100 Persen**	**426.111.000**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 Persen**	**393.808.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 Persen**	**426.111.000**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	100.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	131.882.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas/ Ormas	281.308.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas/ Ormas	281.729.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan Pekalongan Selatan dalam penyusunan program dan kegiatan terlebih dahulu menampung aspirasi masyarakat dari pemangku kepentingan, baik dari Perangkat Daerah terkait, kelompok masyarakat maupun warga masyarakat melalui forum perencanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil rumusan dari pemangku kepentingan tersebut, dilakukan penyesuaian dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah sekaligus merupakan program dan kegiatan yang merupakan isu-isu strategis Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan tersebut disusun berdasarkan skala prioritas, seperti disajikan dalam Tabel 2.6 sebagai berikut:

TABEL 2.6 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pembebasan Lahan dan Pelebaran Jalan	Kuripan Lor Gg. 12 Kelurahan Kuripan Yosorejo	-	65 m2	OPD pelaksana Dinperkim
2	Peningkatan Jalan dan Drainase Saluran	Jl. Pelita I Kelurahan Buaran Kradenan	-	Jalan : 900 m x 3 m = 2700 m Saluran sisi selatan : 900 m, sisi utara : 700 m	OPD pelaksana DPUPR
3	Peningkatan Kapasitas Kader Institusi Layanan Primer (Posyandu Terintegrasi)	6 Kelurahan	-	5 orang/kelurahan	OPD pelaksana Dinkes
4	Pembuatan Joging Track	Lapangan Jenggot Lapangan Kuripan Lor	-	2 paket	OPD pelaksana Dinparbudpora
5	Pembangunan Gedung PAUD	Kelurahan Banyurip	-	1 unit	OPD pelaksana Dindik

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada hakekatnya perencanaan pembangunan nasional merupakan acuan utama bagi setiap daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah harus didasari oleh visi dan misi daerah dan output akhirnya berupa pola dasar pembangunan daerah. Renja Kecamatan Pekalongan Selatan tahun 2025 pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus selaras dengan arah kebijakan, tema, dan prioritas pembangunan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

Tabel 3.1 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional

PRIORITAS NASIONAL		**PRIORITAS PROVINSI**		**PRIORITAS KOTA PEKALONGAN**	
NO.	**PRIORITAS**	NO.	**PRIORITAS**	NO.	**PRIORITAS**
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12	Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan Selatan tahun 2025 berpedoman dan mengacu pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Rencana Kerja ini menjabarkan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai sesuai tujuan organisasi.

Adapun tujuan dan sasaran Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan telah dirumuskan dalam Renstra Kecamatan Pekalongan Selatan tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sasaran :
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan dan Trantibum.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pekalongan Selatan dengan dukungan perangkat daerah lain serta masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang lebih terukur.

Dalam kaitannya dengan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan pada tahun 2025, Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan merencanakan akan mencapainya dengan melaksanakan 5 Program yang terdiri 12 kegiatan dengan 26 sub kegiatan dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Pekalongan. Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Tahun 2025 yang

telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2025, tercantum dalam tabel 3.2 sebagai berikut:

TABEL 3.2 RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kecamatan Pekalongan Selatan				**10.088.404.000**				**8.722.301.000**
7	**Unsur Kewilayahan**				**10.088.404.000**				**8.722.301.000**
7.01	**Kecamatan**				**10.088.404.000**				**8.722.301.000**
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja**		**100 Persen**	**9.693.612.000**	**APBD**		**100 Persen**	**8.396.613.000**
		Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**100 Persen**		**APBD**		**100 Persen**	
		Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah		**100 Persen**		**APBD**		**100 Persen**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100 Persen**	**103.442.000**	**APBD**		**100 Persen**	**102.757.000**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	3.828.000	APBD			5.000.000
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1.804.000	APBD			3.000.000
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	15 Laporan	97.810.000	APBD			94.757.000
7.01.01.2.02	**Admininstrasi Keuangan Perangkat daerah**	**Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100 Persen**	**7.197.272.000**	**APBD**		**100 Persen**	**7.029.493.000**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	64 Orang/ Bulan	7.023.100.000	APBD			6.851.893.000
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	172.500.000	APBD			174.600.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.672.000	APBD			3.000.000
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100 Persen**	**5.000.000**	**APBD**		**100 Persen**	**18.505.000**
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	5.000.000	APBD			18.505.000
7.01.01.2.06	**Adminitrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100 Persen**	**288.488.000**	**APBD**		**100 Persen**	**346.116.000**
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	5.700.000	APBD			7.800.000
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	114.370.000	APBD			136.000.000
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	3.400.000	APBD			9.500.000
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	114.288.000	APBD			127.816.000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	26.650.000	APBD			35.000.000
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	11.580.000	APBD			17.500.000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	12.500.000	APBD			12.500.000
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100 Persen**	**863.914.000**	**APBD**		**100 Persen**	**711.837.000**
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	6.400.000	APBD			9.300.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	98.720.000	APBD			86.000.000
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	758.794.000	APBD			616.537.000
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 Persen**	**1.235.496.000**	**APBD**		**100 Persen**	**187.905.000**
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	38 Unit	144.496.000	APBD			85.905.000
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	9 Unit	1.062.000.000	APBD			62.000.000
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	89 Unit	29.000.000	APBD			40.000.000
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan**		**100 Persen**	**12.580.000**	**APBD**		**100 Persen**	**22.321.000**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase pelaksanaan kegiatan oordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**		**100 Persen**	**8.600.000**	**APBD**		**100 Persen**	**12.500.000**
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	8.600.000	APBD			12.500.000
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**100 Persen**	**3.980.000**	**APBD**		**100 Persen**	**9.821.000**
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	3.980.000	APBD			9.821.000
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Tingkat Kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/ kelurahan di Wilayah Selatan**		**100 Persen**	**98.040.000**	**APBD**		**100 Persen**	**60.112.000**
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dilaksanakan**		**100 Persen**	**40.690.000**	**APBD**		**100 Persen**	**25.000.000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	40.690.000	APBD			25.000.000
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan**		**100 Persen**	**57.350.000**	**APBD**		**100 Persen**	**35.112.000**
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	117 Keluarga	57.350.000	APBD			35.112.000
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Selatan**		**100 Persen**	**279.102.000**	**APBD**		**100 Persen**	**231.979.000**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase ketercapaian kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**		**100 Persen**	**279.102.000**	**APBD**		**100 Persen**	**231.979.000**
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	9 Laporan	279.102.000	APBD			231.979.000
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan**		**100 Persen**	**5.070.000**	**APBD**		**100 Persen**	**11.276.000**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**		**100 Persen**	**5.070.000**	**APBD**		**100 Persen**	**11.276.000**
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.070.000	APBD			11.276.000
	Kelurahan Jenggot				**418.057.000**				**387.312.000**
7	**Unsur Kewilayahan**				**418.057.000**				**387.312.000**
7.01	**Kecamatan**				**418.057.000**				**387.312.000**
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**		**100 Persen**	**418.057.000**	**APBD**		**100 Persen**	**387.312.000**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**		**100 Persen**	**418.057.000**	**APBD**		**100 Persen**	**387.312.000**
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	APBD			12.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	6 Unit	124.244.000	APBD			88.867.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	9 Pokmas/ Ormas	281.313.000	APBD			285.945.000
	Kelurahan Buaran Kradenan				**565.157.000**				**385.771.000**
7	**Unsur Kewilayahan**				**565.157.000**				**385.771.000**
7.01	**Kecamatan**				**565.157.000**				**385.771.000**
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**		**100 Persen**	**565.157.000**	**APBD**		**100 Persen**	**385.771.000**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**		**100 Persen**	**565.157.000**	**APBD**		**100 Persen**	**385.771.000**
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	APBD			12.500.000
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	5 Unit	275.144.000	APBD			88.867.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	10 Pokmas/ Ormas	277.513.000	APBD			284.404.000
	Kelurahan Kuripan Kertoharjo				**347.693.000**				**321.037.000**
7	**Unsur Kewilayahan**				**347.693.000**				**321.037.000**
7.01	**Kecamatan**				**347.693.000**				**321.037.000**
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**		**100 Persen**	**347.693.000**	**APBD**		**100 Persen**	**321.037.000**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**		**100 Persen**	**347.693.000**	**APBD**		**100 Persen**	**321.037.000**
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	APBD			12.500.000
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	7 Unit	124.244.000	APBD			88.867.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	6 Unit	124.244.000	APBD			88.867.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	9 Pokmas/ Ormas	281.313.000	APBD			285.945.000
	Kelurahan Buaran Kradenan				**565.157.000**				**385.771.000**
7	**Unsur Kewilayahan**				**565.157.000**				**385.771.000**
7.01	**Kecamatan**				**565.157.000**				**385.771.000**
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**		**100 Persen**	**565.157.000**	**APBD**		**100 Persen**	**385.771.000**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**		**100 Persen**	**565.157.000**	**APBD**		**100 Persen**	**385.771.000**
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	APBD			12.500.000
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	5 Unit	275.144.000	APBD			88.867.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	10 Pokmas/ Ormas	277.513.000	APBD			284.404.000
	Kelurahan Kuripan Kertoharjo				**347.693.000**				**321.037.000**
7	**Unsur Kewilayahan**				**347.693.000**				**321.037.000**
7.01	**Kecamatan**				**347.693.000**				**321.037.000**
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**		**100 Persen**	**347.693.000**	**APBD**		**100 Persen**	**321.037.000**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**		**100 Persen**	**347.693.000**	**APBD**		**100 Persen**	**321.037.000**
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	APBD			12.500.000
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	7 Unit	124.244.000	APBD			88.867.000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas/ Ormas	219.670.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas/ Ormas	210.949.000	
	Kelurahan Kuripan Yosorejo				**384.646.000**	**Kelurahan Kuripan Yosorejo**				**407.772.000**	
	Unsur Kewilayahan				**384.646.000**	**Unsur Kewilayahan**				**407.772.000**	
	Kecamatan				**384.646.000**	**Kecamatan**				**407.772.000**	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**100 Persen**	**384.646.000**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**100 Persen**	**407.772.000**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 Persen**	**384.646.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 Persen**	**407.772.000**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	96.335.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	135.004.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas/ Ormas	275.811.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas/ Ormas	260.268.000	
	Kelurahan Sokoduwet				**350.384.000**	**Kelurahan Sokoduwet**				**381.336.000**	
	Unsur Kewilayahan				**350.384.000**	**Unsur Kewilayahan**				**381.336.000**	
	Kecamatan				**350.384.000**	**Kecamatan**				**381.336.000**	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**100 Persen**	**350.384.000**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**100 Persen**	**381.336.000**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 Persen**	**350.384.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 Persen**	**381.336.000**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	96.335.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	131.882.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas/ Ormas	241.549.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan,	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas/ Ormas	236.954.000	
	Kelurahan Banyurip				**393.808.000**	**Kelurahan Banyurip**				**426.111.000**	
	Unsur Kewilayahan				**393.808.000**	**Unsur Kewilayahan**				**426.111.000**	
	Kecamatan				**393.808.000**	**Kecamatan**				**426.111.000**	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**100 Persen**	**393.808.000**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**100 Persen**	**426.111.000**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 Persen**	**393.808.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 Persen**	**426.111.000**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	100.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	131.882.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas/ Ormas	281.308.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas/ Ormas	281.729.000	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menetapkan tujuan, sasaran, stategi dan kebijakan yang diarahkan untuk mencapai visi dan misi Kota Pekalongan. Untuk dapat menjalankan proses tersebut, beberapa kegiatan direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2025. Perumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pekalongan Selatan dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengarah pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra, pencapaian Renstra serta visi dan misi Kota Pekalongan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

Rencana kerja ini selain sebagai upaya menjalankan tugas dan fungsi, juga dalam upaya melaksanakan pencapaian target program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025. Rencana kerja Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2025 mengacu kepada Renstra Kecamatan Pekalongan Selatan 2021-2026, mempunyai program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi.

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini:

TABEL 4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Urusan / Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome / Output	Target Kinerja
1	2	3	4	5
	Kecamatan Pekalongan Selatan	10.088.404.000		
	Unsur Kewilayahan	10.088.404.000		
	Kecamatan	10.088.404.000		
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.693.612.000	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100 Persen
			Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen
			Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	103.442.000	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen

No.	Urusan / Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome / Output	Target Kinerja
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.828.000	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.804.000	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	97.810.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan
II	**Admininstrasi Keuangan Perangkat daerah**	**7.197.272.000**	**Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.023.100.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/ Bulan
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	172.500.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.672.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
III	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**5.000.000**	**Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket
IV	**Adminitrasi Umum Perangkat Daerah**	**288.488.000**	**Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5.700.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	114.370.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.400.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.288.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.650.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	11.580.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.500.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan
V	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**863.914.000**	**Presentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah**	**100 Persen**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.400.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	98.720.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	758.794.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
VI	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.235.496.000**	**Presentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	144.496.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	38 Unit
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.062.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas	89 Unit

No.	Urusan / Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome / Output	Target Kinerja
1	2	3	4	5
B	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**12.580.000**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan**	**100 Persen**
I	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**8.600.000**	**Persentase pelaksanaan kegiatan oordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	**100 Persen**
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8.600.000	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan
II	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**3.980.000**	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100 Persen**
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3.980.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan
C	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**98.040.000**	**Tingkat Kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/ kelurahan di**	**100 Persen**
I	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**40.690.000**	**Persentase kegiatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dilaksanakan**	**100 Persen**
1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.690.000	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan
II	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**57.350.000**	**Persentase kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan**	**100 Persen**
1	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	57.350.000	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	117 Keluarga
D	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**279.102.000**	**Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Selatan**	**100 Persen**
I	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**279.102.000**	**Persentase ketercapaian kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**100 Persen**
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	279.102.000	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9 Laporan
E	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**5.070.000**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan**	**100 Persen**
I	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah**	**5.070.000**	**Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**100 Persen**
1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.070.000	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen
	Kelurahan Jenggot	**418.057.000**		
	Unsur Kewilayahan	**418.057.000**		
	Kecamatan	**418.057.000**		
A	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**418.057.000**	**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**100 Persen**
I	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**418.057.000**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 Persen**

No.	Urusan / Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome / Output	Target Kinerja
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.500.000	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	124.244.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	281.313.000	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas/ Ormas
	Kelurahan Buaran Kradenan	**565.157.000**		
	Unsur Kewilayahan	**565.157.000**		
	Kecamatan	**565.157.000**		
A	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**565.157.000**	**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**100 Persen**
I	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**565.157.000**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 Persen**
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.500.000	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	275.144.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	277.513.000	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas/ Ormas
	Kelurahan Kuripan Kertoharjo	**347.693.000**		
	Unsur Kewilayahan	**347.693.000**		
	Kecamatan	**347.693.000**		
A	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**347.693.000**	**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**100 Persen**
I	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**347.693.000**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 Persen**
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.500.000	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	124.244.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	210.949.000	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas/ Ormas
	Kelurahan Kuripan Yosorejo	**407.772.000**		
	Unsur Kewilayahan	**407.772.000**		
	Kecamatan	**407.772.000**		
A	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**407.772.000**	**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**100 Persen**
I	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**407.772.000**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 Persen**
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.500.000	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	135.004.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	260.268.000	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas/ Ormas

No.	Urusan / Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome / Output	Target Kinerja
1	2	3	4	5
	Kelurahan Sokoduwet	**381.336.000**		
	Unsur Kewilayahan	**381.336.000**		
	Kecamatan	**381.336.000**		
A	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**381.336.000**	**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**100 Persen**
I	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**381.336.000**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 Persen**
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.500.000	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	131.882.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	236.954.000	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas/ Ormas
	Kelurahan Banyurip	**426.111.000**		
	Unsur Kewilayahan	**426.111.000**		
	Kecamatan	**426.111.000**		
A	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**426.111.000**	**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**100 Persen**
I	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**426.111.000**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 Persen**
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.500.000	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	131.882.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	281.729.000	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas/ Ormas

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Pekalongan Selatan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan yang diemban oleh Kecamatan Pekalongan Selatan sebagai salah satu Perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Pekalongan.

Demikian Renja Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2025 ini kami sajikan sebagai bentuk acuan pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang sehingga tercapai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan yang lebih baik dengan prinsip bersama-sama membangun dan membangun bersama-

sama yang berlangsung secara transparan, akuntabel, berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan bersama di Kecamatan Pekalongan Selatan.

Renja tahun 2025 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaan. Selanjutnya Camat beserta penyelenggara pemerintahan Kecamatan Pekalongan Selatan akan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana yang dituangkan dalam Renja Tahun 2025. Sehingga diharapkan Kecamatan Pekalongan Selatan bersama seluruh *stakeholder* yang ada perlu memberikan dukungan sepenuhnya agar program-program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan karena keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2025 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

CAMAT PEKALONGAN SELATAN
KOTA PEKALONGAN

ZAENAL MUHIBBIN, S.Pd.
Pembina
NIP. 19670609 199103 1 008

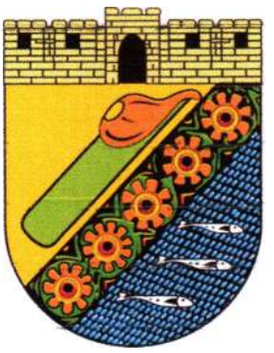

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

(RENJA – PD)

KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
Jl. H. Sabrawi No. 1 Telp. (0285) 436373
Pekalongan 51151

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan ridho-Nya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pekalongan Barat tahun 2025 dapat disusun dengan baik dan lancar. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pekalongan Barat tahun 2025 merupakan rencana kerja yang akan dilakukan oleh Kecamatan Pekalongan Barat selama 1 (satu) Tahun ke depan. Penyususunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Pekalongan Barat merupakan keharusan dalam rangka menetapkan Program dan Kegiatan 1(satu) tahunan sesuai dengan Visi Misi Kepala Daerah yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra).

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah untuk mensinkronisasikan antara pelayanan publik, kewilayahan dan non urusan dengan Program Kegiatan sesuai dengan Kebijakan Umum APBD & Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Kota Pekalongan Tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja ini juga bertujuan sebagai upaya memberikan arah / pedoman untuk rencana kegiatan Kecamatan Pekalongan Barat selama tahun 2025. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak baik terhadap peningkatan pelayanan masyarakat dan menjaga ketentraman masyarakat.

Besar harapan kami, Rencana Kerja (RENJA) ini dapat digunakan sebagai Bahan Pertimbangan untuk memberikan Kebijakan guna mengurangi Kesenjangan Pelayanan Masyarakat dan juga berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Kecamatan Pekalongan Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat . Kami sadar bahwa dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini masih banyak terdapat kekurangan sehingga kami sangat memerlukan saran, kritik maupun masukan dari semua pihak sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pekalongan Barat pada Tahun-tahun berikutnya.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

Camat Pekalongan Barat

Kota Pekalongan

Drs. MUCHAMAD NATSIR, M.Si

NIP. 19691127 198903 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

I.1. Latar Belakang 1

I.2. Landasan Hukum 3

I.3. Maksud dan Tujuan 5

I.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 9

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 9

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 14

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 17

II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 19

II.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan 29

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 31

III.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 31

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 33

III.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 46

BAB V PENUTUP 48

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diimplikasikan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Pasal 27), menyebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Renja Perangkat Daerah juga memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk Tahun 2025. Renja Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Tahun 2025 ini disusun berdasarkan pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil pada Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, dengan mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan, dan sinergitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pekalongan Barat tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Hal ini dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, saling mendukung sampai dengan seluruh tujuan dan sasaran yang terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Penyusunan Renja PD yang dilakukan melalui tiga tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup sebagi berikut :

1. Tahap perumusan rancangan Renja OPD.
2. Tahap penyajian rancangan Renja OPD.
3. Tahap penetapan Renja OPD.

Renja Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan penentuan pagu dalam Renja Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 mengacu kepada rencana program prioritas pada Rancangan Akhir RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025. Untuk penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas Rancangan Akhir RKPD yang disusun ke dalam Rancangan Akhir Renja Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, selaras dengan Renstra Kecamatan Pekalongan Barat Tahun 2021-2026. Selanjutnya Rancangan Akhir Renja Kecamatan Pekalongan Barat Tahun 2025 dijadikan sebagai dasar penyusunan Penetapan Renja Perangkat Daerah dan selanjutnya menjadi Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pekalongan Barat Tahun 2025 yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Akhir Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah, pada tahun-tahun yang

sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi, serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan serta mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat.

Gambar 1
Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

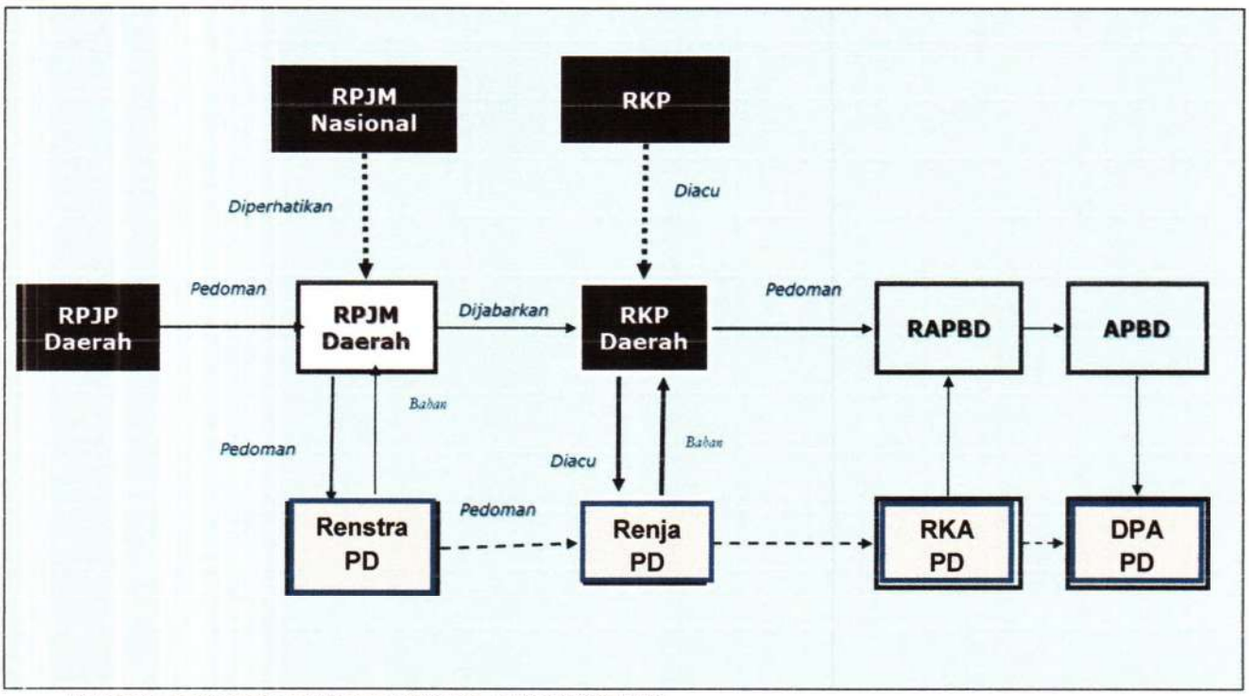

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 (diolah)

I.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan tahun 2025 didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peratauran Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
8. Surat Edaran Gubernur JAwa Tengah Nomor 050/0000549 tanggal 15 Januari 2020 tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi JAwa Tengah Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029;
10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Taun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;
11. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pekalongan Barat Tahun 2021-2026;
12. Peratauran Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas wilayah yaitu perencanaan strategis di Wilayah Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan guna mewujudkan keadaan dalam waktu satu tahun kedepan yang mendukung visi misi Kepala Daerah, yang diutamakan guna kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan. Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan tahun 2025 dimaksudkan untuk dan menyelaraskan prioritas program dan kegiatan Kecamatan Pekalongan Barat dengan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu, penyusunan Rencana Kerja ini juga dimaksudkan untuk melakukan upaya sinkronisasi terhadap program-program dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pembangunan daerah pada tahun 2025. Hal ini untuk lebih meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan media untuk menyamakan persepsi, menyatukan komitmen dan langkah-langkah kebijakan pemerintah daerah Kota Pekalongan pada Tahun 2025.

Kemudian tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Tahun 2025 sebagai pedoman bagi Kecamatan Pekalongan Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 serta keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan dalam mewujudkan visi, misi dan program pembangunan dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota masa bakti 2021-2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan Barat adalah :

1. Sebagai acuan/arah bagi Kecamatan Pekalongan Barat dalam menyusun program/kegiatan prioritas tahun 2025 berdasarkan ketersediaan sumberdaya yang ada;
2. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Kasi/Kasubag di lingkungan Kecamatan Pekalongan Barat dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025.
3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah.

I.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

I.I Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

I.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

I.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

I.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada bab ini dibagi menjadi lima bagian pembahasan, yaitu :

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah,

Bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD

tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya;

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan;

II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,

berisikan uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Tantangan dan peluang, serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan;

II.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD

berisikan tentang proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan,Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,

diuraikan kajian atas program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, yang merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta

kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN,

pada bab ini pembahasan dibagi menjadi **beberapa** pembagian pembahasan, yaitu :

III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional,

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaah yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah,

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah;

III.3 Program dan Kegiatan, dan Sub Kegiatan

faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian (dalam pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2025 diperlukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD sampai dengan Tahun 2023. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan PD dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan PD.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

Hasil evaluasi pelaksanaan renja Tahun lalu (tahun 2023) dan Tahun Berjalan 2024, Kecamatan Pekalongan Barat dapat disajikan dalam tabel T-II.1 sebagai berikut :

TABEL T-II.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D. TAHUN BERJALAN

KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

TAHUN : 2024

No	Indikator Program / Kegiatan		Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (Perub RPJMD 2016-2021)	Realisasi 2023	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
							Target 2023	Realisasi 2023			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.0.00.0.00.01.0000	**Kecamatan Pekalongan Barat**										
7	**Urusan Kewilayahan**										
7.01	**Kecamatan**										
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	- Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja -Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah -Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persentase	100%	100%	100%	100 % 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	Tercapai Tercapai Tercapai
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%	Tercapai
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%	Tercapai
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%	Tercapai
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%	Tercapai
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%	Tercapai

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%	Tercapai
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat	Persentase	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat	Persentase	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	**Tercapai**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	Persentase	100%	100%	**100%**	100%	100%	100%	100%	**Tercapai**
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	Persentase	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%	Tercapai
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Persentase	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	Tercapai
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Barat	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**Tercapai**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai

7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat	Persentase	100%	100%	**100%**	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase	100%	100%	**100%**	100%	100%	100%	100%	Tercapai
7.01.0.00.0.00.01.0001	**Kelurahan Medono**										
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
7.01.0.00.0.00.01.0002	**Kelurahan Podosugih**										
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
7.01.0.00.0.00.01.0003	**Kelurahan Tirto**										
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase	100%	100%	98,15%	100%	98,15%	98,15%	98,15%	Tercapai
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	Persentase	100%	100%	98,15%	100%	98,15%	98,15%	98,15%	Tercapai
7.01.0.00.0.00.01.0004	**Kelurahan Bendankergon**										
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Kegiatan Pemberdayaan	Persentase ketercapaian	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai

	Kelurahan	pemberdayaan kelurahan									
7.01.0.00.0.00.01.0005	**Kelurahan Sapurokebulen**										
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase	100%	100%	95,83%	100%	95,83%	95,83%	95,83%	Tercapai
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	Persentase	100%	100%	95,83%	100%	95,83%	95,83%	95,83%	Tercapai
7.01.0.00.0.00.01.0006	**Kelurahan Pasirkratonkramat**										
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
7.01.0.00.0.00.01.0007	**Kelurahan Pringrejo**										
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase	100%	100%	96,67%	100%	96,67%	96,67%	96,67%	Tercapai
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	Persentase	100%	100%	96,67%	100%	96,67%	96,67%	96,67%	Tercapai

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, berisikan Capaian Kinerja pelayanan sesuai dengan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun IKK. Indikator Kinerja yang akan dimuat berdasarkan tugas dan fungsi instansi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kajian pelayanan.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
(YANG DIAMPU OLEH CAMAT)

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja 2. Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3. Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100% 100% 100%	100% 100% 100%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat	100%	100%
3	Prograam Pemberdayaan Masyarakat Desa da Kelurahan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan di Wilayah Barat	100%	100%
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Barat	100%	100%

5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat	100%	100%

Hasil analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pekalongan Barat, sebagaimana terlampir.

TABEL T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

NO.	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				Tahun 2022 (Thn. n-2)	Tahun 2023 (Thn. n-1)	Tahun 2024 (Thn. n)	Tahun 2025 (Thn. N+1)	Tahun 2022 (Thn. n-2)	Tahun 2023 (Thn. n-1)	Tahun 2024 (Thn. n)	Tahun 2025 (Thn. N+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Nilai SAKIP OPD			74	75,5	77	78,5	73,50	75,20	77	78,5	
2.	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja			100%	100%	100%	100%	100%	100%	41,12%	100%	Capaian pada tahun 2024 adalah capaian s/d TW II

3.	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	34,13%	100%	Capaian pada tahun 2024 adalah capaian s/d TW II
4.	Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	40,09%	100%	Capaian pada tahun 2024 adalah capaian s/d TW II
5.	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	Capaian pada tahun 2024 adalah capaian s/d TW II
6.	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Capaian pada tahun 2024 adalah capaian s/d TW II
7.	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik di Wilayah Barat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%	Capaian pada tahun 2024 adalah capaian s/d TW II
8.	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Barat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	Capaian pada tahun 2024 adalah capaian s/d TW II

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan Pekalongan Barat sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dalam mengidentifikasikan permasalahan pembangunan daerah, dimana permasalahan urusan merupakan penjabarkan dari akar masalah di tingkat kota. Indentifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Kecamatan Pekalongan Barat sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakat tersaji dalam 2 urusan yang diampu yaitu sebagai berikut :

a. Urusan Kewilayahan

Permasalahan yang ada yaitu :

1. Belum optimalnya Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Belum optimalnya Tingkat Kinerja Trantibum
3. Belum optimalnya Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan
4. Belum optimalnya Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum
5. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
6. Belum optimalnya kualitas pengawasan Perangkat Daerah

b. Non Urusan

Permasalahan yang ada yaitu :

1. Belum optimalnya ketersediaan laporan capaian kinerja
2. Belum optimalnya ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
3. Belum optimalnya pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah
4. Belum optimalnya proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
5. Belum optimalnya ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah
6. Belum optimalnya ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Belum optimalnya ketercapaian administrasi umum perangkat daerah
8. Belum optimalnya SDM di Kecamatan Pekalongan Barat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RT/RW di Kota Pekalongan yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pekalongan Barat, sebagai berikut :

a. Membangun sistem pelayanan prima yang ramah, cepat, tepat, efisien, dan transparan.
b. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mewujudkan akuntabilitas.
c. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
d. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
e. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Pekalongan dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Pekalongan Barat adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Pekalongan Barat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan dan perbaikan terhadap kondisi geografis yang sampai dengan ini terjadi untuk kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

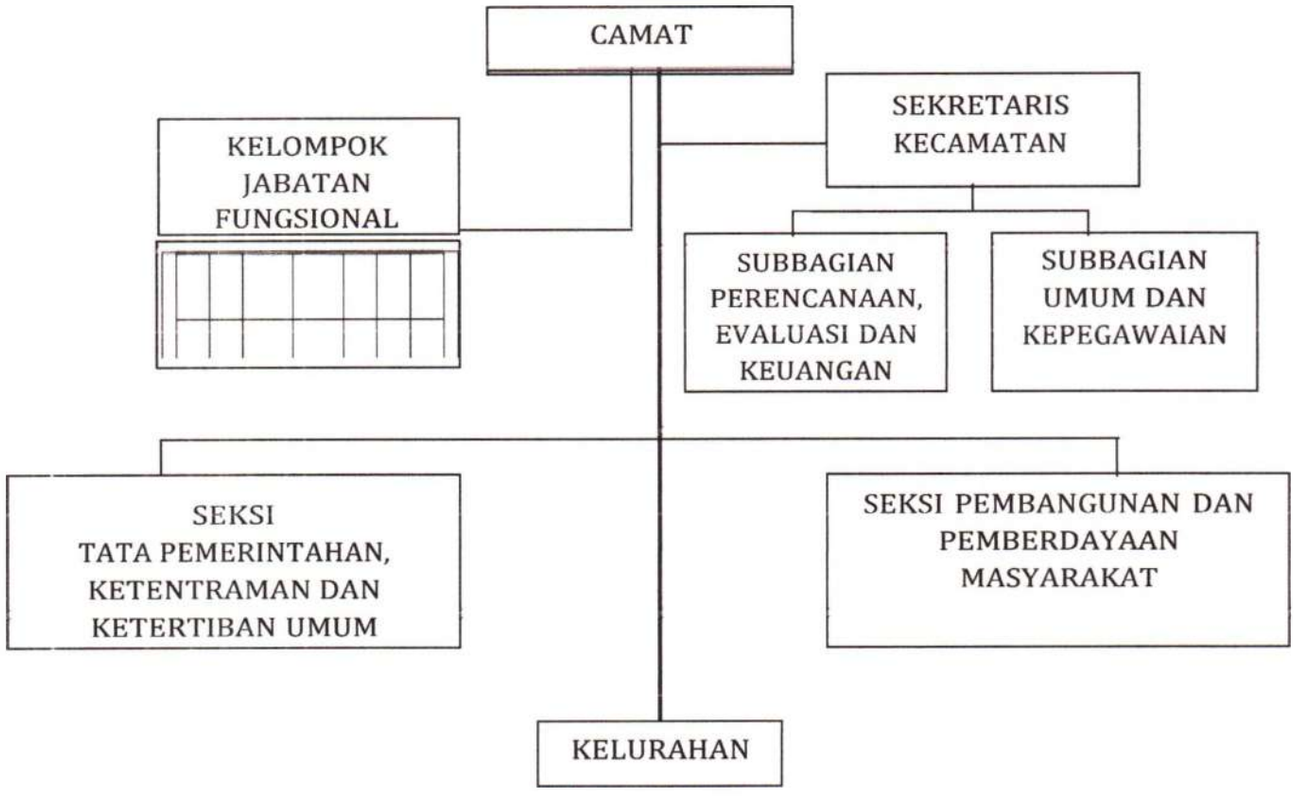

II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awaal RKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan kerja OPD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Dokumen rencana kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capian merupakan representatif tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Pekalongan Barat. Disamping itu dokumen Rancangan awal RKPD juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta sub kegiatan.

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tengah Tahun 2025 bahwa Kecamatan Pekalongan Barat bertanggungjawab atas penyelenggaraan salah sasaran strategis daerah terkait Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Meningkatnya Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, di Kota Pekalongan. Dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 sudah semua Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang pada Kecamatan Pekalongan Barat sudah diakomodir. Untuk kondisi Anggaran Tahun 2025 belum sesuai dengan kebutuhan yang ada dan ke depannya semoga tidak terjadi refocusing. Review Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada tabel T-C.31 dibawah ini

TABEL T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KOTA PEKALONGAN

OPD KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi kinerja PerangkatDaerah	Kecamatan Pekalongan Barat				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kecamatan Pekalongan Barat				
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Rp 7.726.000	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Rp 4.089.000	
	- Koordinasi dan Penyusunan Doku men RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Rp 1.927.000	- Koordinasi dan Penyusunan Doku men RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Rp 1.927.000	

- Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	Rp 117.000.000	- Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	Rp 108.570.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				
– Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pekalongan Barat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/Bulan	Rp7.556.287.000	– Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	Kecamatan Pekalongan Barat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/Bulan	**Rp** 7.846.811.000
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Rp. 195.900.000	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	12 Dokumen	Rp 195.900.000
'- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Rp1.786.000	– Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 1.786.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Pekalongan Barat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	Rp 18.229.000	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Pekalongan Barat	Jumlah paket pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	Rp 7.300.000

Administrasi Umum Perangkat Daerah					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				
- Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Pekalongan Barat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor yg disediakan	4 Paket	Rp 8.600.000	- Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Pekalongan Barat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor yg disediakan	4 Paket	Rp 6.280.000
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp 179.151.000	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor yg disediakan	4 Paket	Rp 74.530.000
- Penyediaan Peralatan RumahTangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	Rp 10.500.000	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	Rp 7.670.000
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket bahan logistik kantor yang Disediakan	4 paket	Rp 254.466.000	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket bahan logistik kantor yang Disediakan	4 paket	Rp 141.759.000
- Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan		Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yangDisediakan	2 paket	Rp 40.000.000	- Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan		Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yangDisediakan	13 paket	Rp 30.300.000
- PenyediaanBahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen	Rp. 20.640.000	- PenyediaanBahan Bacaandan peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang	2 dokumen	Rp 12.000.000

-Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 laporan	Rp 12.500.000	-Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD		Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 laporan	Rp 13.870.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Pekalongan Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	Rp 10.500.000	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Pekalongan Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	Rp7.670.000
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	Rp 121.300.000	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	Rp 117.900.000
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	Rp 902.719.000	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yan	12 laporan	Rp 907.239.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah**				
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya	Kecamatan Pekalongan Barat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	34 unit	Rp 141.443.000	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, dane	Kecamatan Pekalongan Barat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	33 unit	Rp 143.163.000

Pemeliharaan, dane Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	15 unit	Rp 122.072.000	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Pekalongan Barat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	15 unit	Rp 87.600.000
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	125 unit	Rp 45.000.000	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	126 unit	Rp 32.850.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK ***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*** - Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan Instansi vertikal terkait	Kecamatan Pekalongan Barat	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan Instansi vertikal terkait	1 Laporan	Rp 15.000.000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** - Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan Instansi vertikal terkait	Kecamatan Pekalongan Barat	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	4 Laporan	Rp 9.130.000

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kecamatan Pekalongan Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	Rp 6.985.000	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat** - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	Rp 4.460.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kecamatan Pekalongan Barat			
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Pekalongan Barat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga kemasyarakatan	Rp 40.135.000	- **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga kemasyarakatan	Rp 41.220.000
Pemberdayaan dan Kesejahteraa n Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia	Kecamatan Pekalongan Barat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1875 Keluarga	Rp 71.239.000	**Pemberdayaan dan Kesejahteraa n Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan** - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan	Kecamatan Pekalongan Barat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1166 Keluarga	Rp 55.480.000

yang Berkualitas dan Berdaya Saing					Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM ***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*** - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pekalongan Barat	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11 Laporan	Rp 212.170.000	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pekalongan Barat	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11 Laporan	Rp 194.622.000
PROGRAM PENYELENG GARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM ***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*** Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan	Kecamatan Pekalongan Barat	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordnasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	Rp. 5.625.000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Pekalongan Barat	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordnasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	Rp 4.970.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				
KELURAHAN MEDONO Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan Medono	Presentase Ketercapaian pemberdayaan masyarakat	100%	Rp.527.465.000	***KELURAHAN MEDONO Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat***	Kelurahan Medono	Presentase Ketercapaian pemberdayaan masyarakat	100%	Rp.527.465.000
KELURAHAN PODOSUGIH Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan Podosugih	Presentase Ketercapaian pemberdayaan masyarakat	100%	Rp.530.247.000	***KELURAHAN PODOSUGIH Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat***	Kelurahan Podosugih	Presentase Ketercapaian pemberdayaan masyarakat	100%	Rp.530.247.000
KELURAHAN TIRTO Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan Tirto	Presentase Ketercapaian pemberdayaan masyarakat	100%	Rp.473.876.000	***KELURAHAN TIRTO Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat***	Kelurahan Tirto	Presentase Ketercapaian pemberdayaan masyarakat	100%	Rp.473.876.000
KELURAHAN SAPUROKEBULEN Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan Sapurokebulen	Presentase Ketercapaian pemberdayaan masyarakat	100%	Rp.513.869.000	***KELURAHAN SAPUROKEBULEN Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat***	Kelurahan Sapurokebulen	Presentase Ketercapaian pemberdayaan masyarakat	100%	Rp.513.869.000
KELURAHAN BENDANKERGON Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan Bendankergon	Presentase Ketercapaian pemberdayaan masyarakat	100%	Rp.550.844.000	***KELURAHAN BENDANKERGON Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat***	Kelurahan Bendankergon	Presentase Ketercapaian pemberdayaan masyarakat	100%	Rp.550.844.000

KELURAHAN PASIRKRATON KRAMAT Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan Pasirkraton kramat	Presentase Ketercapaian pemberdayaan masyarakat	100%	Rp.644.161.000	***KELURAHAN PASIRKRATON KRAMAT Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat***	Kelurahan Pasirkraton kramat	Presentase Ketercapaian pemberdayaan masyarakat	100%	Rp.644.161.000
KELURAHAN PRINGREJO Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan Pringrejo	Presentase Ketercapaian pemberdayaan masyarakat	100%	Rp.564.450.000	***KELURAHAN PRINGREJO Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat***	Kelurahan Pringrejo	Presentase Ketercapaian pemberdayaan masyarakat	100%	Rp.564.450.000

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan Pekalongan Barat dalam penyusunan program dan kegiatan terlebih dahulu menampung aspirasi masyarakat dari pemangku kepentingan, baik dari OPD terkait, kelompok masyarakat maupun warga masyarakat.

Berdasarkan hasil rumusan dari pemangku kepentingan tersebut dilakukan penyesuaian dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah sekaligus merupakan program dan kegiatan yang merupakan isu-isu strategis Perangkat Daerah, tentu saja usulan program dan kegiatan ini adalah berdasarkan pada skala prioritas.

TABEL T-C.32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1	Peninggian Tanggul Sungai Permanen	Sebelah Barat Gg. 12 Sungai Meduri RT. 6 RW. 3 dan RT.05 dan RW.04 Kelurahan Tirto	Terlaksananya peninggian Tanggul Sungai Permanen	400x0,40x0,40 t	DPUPR
2.	Saluran U 30 + Tutup (Kanan Kiri)	Jl. Supriyadi RT 01 RW 05 depan rumah bu Ida (Ibu Hendrik) sampai Jembatan Tirto	Terlaksananya Pembuatan Saluran U 30 + Tutup (kanan kiri)	1600 m	DPUPR
3.	Perbaikan Jembatan Tengku Umar	RW. VIII Kelurahan Pasirkratonkramat	Terlaksananya Perbaikan Jembatan Tengku Umar	14 x 6 m	DPUPR
4.	Peninggian Tanggul Sungai Beningsari	RT. 3 RW. 11 Kelurahan Bendankergon	Terlaksananya peninggian Tanggul Sungai Beningsari	100 m	DPUPR
5.	Pembangunan Senderan Saluran Tersier	RW. XI - XIII (Gg 7 Pringlangu Depan SPBU Kintong) Kel. Pringrejo	Terlaksananya pembangunan Senderan Saluran Tersier	550m	DPUPR

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada hakekatnya perencanaan pembangunan nasional merupakan acuan utama bagi setiap daerah propinsi dan Kabupaten/Kota dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah Kota harus didasari oleh visi dan misi daerah dan output akhirnya berupa pola dasar pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
2. Masih tingginya angka stunting dan anak tidak sekolah dapat berpengaruh pada tingkat IPM Masyarakat Kecamatan Pekalongan Barat, sehingga dibutuhkan adanya kerjasama lintas sektor agar lebih optimal serta dukungan anggaran yang memadai.
3. Belum optimalnya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan. Permasalahan ini muncul sebagai akibat faktor eksternal berupa cepatnya pergantian regulasi.
4. Perubahan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan penataan organisasi dan kelembagaan serta ketatalaksanaan pemerintahan. Dampak dari perubahan-perubahan Peraturan Pemerintah membutuhkan proses penyatuan dengan situasi dan kondisi yang akhirnya menghambat laju kinerja aparatur.
5. Kurangnya Sumber Daya Manusia dengan kompetensi yang layak dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat Kecamatan Pekalongan Barat.
6. Belum optimalnya hubungan koordinasi dengan LPM dan BKM dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.
7. Pagu anggaran yang dirasa kurang maksimal dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan sarana prasarana dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga menyebabkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang menurun.

8. Kinerja aparatur Kelurahan perlu ditingkatkan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, hal tersebut terjadi sebagai akibat :
    a. Kurang representatifnya lokasi kantor Kelurahan dikarenakan tuntutan perubahan zaman (kondisi rusak, kurang luas dll)
    b. Belum tersedianya rumah dinas Kelurahan yang bisa difungsikan bagi apparat Kelurahan yang berdomisili diluar wilayah kerja Kelurahan setempat.
    c. Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan yang masing belum maksimal.
9. Pagu anggaran untuk fasilitasi kegiatan kepemudaan dan olah raga maupun fasilitasi kegiatan ormas yang belum teralokasikan, sehingga terkendala dalam penyelenggaraan kegiatan yang bersifat dukungan terhadapa kreatifitas pemuda di wilayah Kecamtan Pekalongan Barat.

Keberhasilan Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas dan fungsi didasari oleh beberapa faktor yakni sebagai berikut :

a. Adanya pimpinan sebagai role model di sebuah SKPD
b. Adanya dukungan pimpinan
c. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
d. Adanya program dan kegiatan yang jelas
e. Tersedianya tupoksi yang jelas dan tanggungjawab dalam pekerjaan
f. Tersedianya aparatur pemerintahan yang memadai baik ASN maupun non ASN

Rumusan Visi misi Kota Pekalongan yang diangkat dalam Renstra Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategis sesuai kondisi obyektif lingkungan strategis lingkup Kota Pekalongan dalam lima tahun ke depan, yaitu : yaitu **"Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius".**

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Pekalongan ini, Uraian tujuan dan sasaran Kecamatan Pekalongan Barat adalah sebagai berikut :

1. Tujuan
    a. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik
2. Sasaran
    a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
    b. Meningkatnya Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik, Pemberdayaan dan Trantibum

Tujuan dan sasaran seperti yang diuraikan diatas disusun juga dengan kaitan untuk mendukung pencapaian prioritas RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pekalongan Barat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Pekalongan Barat. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan- tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Untuk optimalisasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pekalongan Barat melaksanakan Visi dan Misi yang telah disusun oleh Kepala Daerah terpilih. Kemudian sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menjalankan pemerintahan di tingkat wilayah Kecamatan maka ditetapkan bahwa Kecamatan menjalan Misi dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan

"Meningkatkan Kualitas Layanan Publik"

Sasaran

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
2. Meningkatnya Tngkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan dan Trantibum.

III.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan guna terwujudnya Visi dan Misi Kepala Daerah serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta dengan melihat prioritas pembangunan yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Perangkat daerah menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Rencana Kerja tahun 2025 merupakan lanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 sebagian besar masih dilaksanakan pada tahun 2025. Pada prinsipnya program dan kegiatan disusun berdasarkan skala prioritas sesuai pagu indikatif yang ditetapkan.

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pekalongan Barat pada tahun 2025 adalah sebanyak 5 (lima) program, 13 (Tiga belas) kegiatan dan 29 (Dua Puluh Sembilan) Sub Kegiatan, dengan jumlah pagu indikatif awal pada kecamatan Pekalongan Barat sebesar Rp. 10..057.096.00,- dan pagu indikatif yang dikelola oleh 7 (tujuh) Kelurahan sebesar Rp 3. 804.912.000,- jadi total semua pagu anggaran Kecamatan Pekalongan Barat Tahun 2025 sebesar Rp. 13.862.008.000,-.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk Rencana Kerja Tahun 2025 dengan melihat renstra 2021-2026 sesuai analisis dari Bappeda, Kecamatan Pekalongan Barat melaksanakan 5 (lima) program, 13 (Tiga belas) kegiatan dan 29 (Dua Puluh Sembilan) Sub Kegiatan dengan jumlah pagu indikatif awal sebesar Rp 13.862.008.000,-. dengan rincian sebagai berikut :

1.1. PROGRAM

- 1.1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- 1.1.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
- 1.1.3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
- 1.1.4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- 1.1.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1.2. KEGIATAN

- 1.2.1. Program Penunjang Urasan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - 1.2.1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.2.1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.2.1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.2.1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.2.1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.2.2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1.2.2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

1.2.2.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

1.2.3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1.2.3.1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

1.2.3.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

1.2.3.3 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

1.2.4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1.2.4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1.2.5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1.2.5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

1.3. SUB KEGIATAN

1.3.1. Program Penunjang Urasan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.3.1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.3.1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.3.1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD

1.3.1.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.3.1.2. Administrasi Keuangan Daerah

1.3.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.3.1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD

1.3.1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.3.1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.3.1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

1.3.1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.3.1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

1.3.1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.3.1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.3.1.4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.3.1.4.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.3.1.4.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.3.1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.3.1.5. Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintahan Daerah

1.3.1.5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.3.1.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.3.1.5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.3.1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.3.1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.3.1.6.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1.3.1.6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.3.2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1.3.2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

1.3.2.1.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

1.3.2.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

1.3.2.1.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

1.3.3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1.3.3.1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

1.3.3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

1.3.3.1.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

1.3.3.1.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

1.3.3.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan

1.3.3.2.1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

1.3.3.3 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

1.3.3.3.1 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

1.3.4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1.3.4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1.3.4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

1.3.5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1.3.5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

1.3.5.1.1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

TABEL T-C.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan	INDIKATOR KINERJA BESARAN / VOLUME CATATAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.0.00.0.00.01.0000	**Kecamatan Pekalongan Barat**				**Rp. 10.057.096.000**				**Rp.9.960.10136.000**
7	**Urusan Kewilayahan**								
7.01	**Kecamatan**								
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	- Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja -Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah -Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Kecamatan Pekalongan Barat	100%				100%	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Kecamatan Pekalongan Barat		Rp 4.089.000	APBD			Rp 13.000.000

	Perencanaan Perangkat Daerah	Daerah							
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Rp. 1.927.000	APBD			Rp 3.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp 108.570.000	APBD			Rp 114.500.000
	Administrasi Keuangan PerangkatDaerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Pekalongan Barat						
	– Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Rp 7.846.811.000	APBD			**Rp 7.579.528.000**
	– Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Rp 195.900.000	APBD			Rp 195.000.000
	– Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Rp 1.786.000	APBD			Rp 3.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Pekalongan Barat						

	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			Rp 7.300.000	APBD			Rp 18.533.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Pekalongan Barat						
	– Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Rp 6.280.000	APBD			Rp 8.600.000
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Rp 74.530.000	APBD			Rp 149.500.000
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			Rp 7.670.000	APBD			Rp 10.500.000
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Rp 141.759.000	APBD			Rp **141.326.000**
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			Rp 30.300.000	APBD			Rp 40.000.000
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			Rp 12.000.000	APBD			Rp 20.000.000

	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Rp 13.870.000	APBD			Rp 12.500.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pekalongan Barat						
	– Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Rp 7.670.000	APBD			Rp 10.500.000
	– Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Rp 117.900.000	APBD			Rp 105.250.000
	– Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Rp 907.239.000	APBD			Rp 689.526.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pekalongan Barat						
	– Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Rp 143.163.000	APBD			Rp 101.374.000

	atau Kendaraan Dinas Jabatan – Pemeli Haraan/Rehab Gedung kantor dan bangunan lainnya – Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab			Rp 87.600.000 Rp 32.850.000	APBD APBD			Rp 66.500.000 Rp 45.000.000
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat	Kecamatan Pekalongan Barat	100%				100%	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Pekalongan Barat		Rp 9.130.000	APBD			Rp 15.000.000

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Pekalongan Barat		Rp 4.460.000	APBD			Rp 26.029.000
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat	Kecamatan Pekalongan Barat	100%				100%	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Pekalongan Barat		Rp 41.220.000	APBD			Rp47.600.000

	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan Pekalongan Barat		Rp 55.480.000	APBD			Rp 19.327.000
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Barat	Kecamatan Pekalongan Barat	100%				100%	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Kecamatan Pekalongan Barat		Rp192.622.000	APBD			Rp 191.787.000

	Wilayah Kecamatan	Vertikal di Wilayah Kecamatan							
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat		100%				100%	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			Rp 4.970.000	APBD			Rp10.003.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan berbasis Good Governace dan Clean Goverment dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) mengikuti paradigma baru yang akan mampu menciptakan kebijakan (trickle down effect) sehingga kepentingan masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan selain menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2025 juga berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Renja diharapkan juga mampu memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan suatu keputusan kebijakan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pemangku jabatan dan staf Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih optimal.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal yang perlu diperhatikan selama tahun berjalan guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pekalongan Barat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Pekalongan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pekalongan Barat Tahun 2025 ini kami sajikan sebagai bentuk acuan pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang, sehingga tercapai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan yang lebih baik dengan prinsip bersama-sama melaksanakan pembangunan dengan asas transparansi, akuntabel, berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan bersama di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat serta sebagai bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Pekalongan.

Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 dengan tetap memperhatikan Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pekalongan Barat pada Tahun 2025 tetap merujuk pada target RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025,

Pagu Indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan Guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan Barat Tahun 2025 ini, maka disusun beberapa Program dan Kegiatan terkait tata kelola pemerintahan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Ada 5 Program, 13 kegiatan dan 29 Sub Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Barat Tahun 2025 dengan Rencana Anggaran sebesar Rp 13.862.008.000,- yang digunakan untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kewilayahan dan Non-Urusan yang bersumber dari APBD Kota Pekalongan.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Tahun 2025 merupakan sebuah produk rencana kerjasama dari seluruh komponen organisasi melalui pembahasan-pembahasan yang melibatkan lintas sektoral dan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Rencana Kerja yang telah tersusun ini tidak dapat semata-mata dijadikan sebuah komitmen, tetapi sangat penting sebagai pedoman dan acuan kerja bagi seluruh unsur Kecamatan Pekalongan Barat dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kecamatan. Kondisi objektif organisasi mengisyaratkan betapa pentingnya implementasi sebuah komitmen, oleh karenanya Rencana Kerja yang tersusun ini harus dapat dijadikan fungsi sebagai berikut :

1. Secara konsisten dijadikan pedoman dan acuan dasar serta diimplementasikan ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal;
2. Sebagai pengikat yang sinergis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Pekalongan Barat;
3. Merupakan landasan bagi Rencana Kerja tahap berikutnya.

Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dalam mengaktualisasikan Renja ini sangat diharapkan, yang pada gilirannya akan mampu mendorong perwujudan Visi, Misi, dan Tupoksi Kecamatan Pekalongan Barat. Semoga Renja Kecamatan Pekalongan Barat Tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan Daerah Kota Pekalongan tahun 2025.

Demikian kami ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

CAMAT PEKALONGAN BARAT

KOTA PEKALONGAN

Drs. MUCHAMAD NATSIR, M.SI

Pembina Tingkat I

NIP. 19691127 198903 1 006

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diimplikasikan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Pasal 27), menyebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Renja Perangkat Daerah juga memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah, pada tahun-tahun yang sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi, serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan serta mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat.

Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pwraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah Daerah, bahwa :

(1) Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf b, paling lambat minggu pertama bulan Desember.

(2) Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah. Hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan.

Berdasarkan aturan tersebut, maka dalam rangka mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan tahunan daerah perlu dibuat Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang sistematis, bermutu, akuntabel dan tepat waktu. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Kecamatan Pekalongan TimurKota Pekalongan tahun 2025 disusun dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Pekalongan dan rencana strategis Kecamatan Pekalongan TimurKota Pekalongan. Penyusunan ini dilakukan melalui proses koordinasi antar seksi di lingkungan Kecamatan Pekalongan TimurKota Pekalongan, konsultasi dan koordinasi dengan BAPPEDA dan OPD terkait di Kota Pekalongan. Hasil rencana kerja Kecamatan Pekalongan TimurKota Pekalongan tersebut nantinya dapat di kompilasikan dengan rencana kerja Rencana kerja Perangkat daerah lainnya di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RAPBD.

Gambar 1
Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

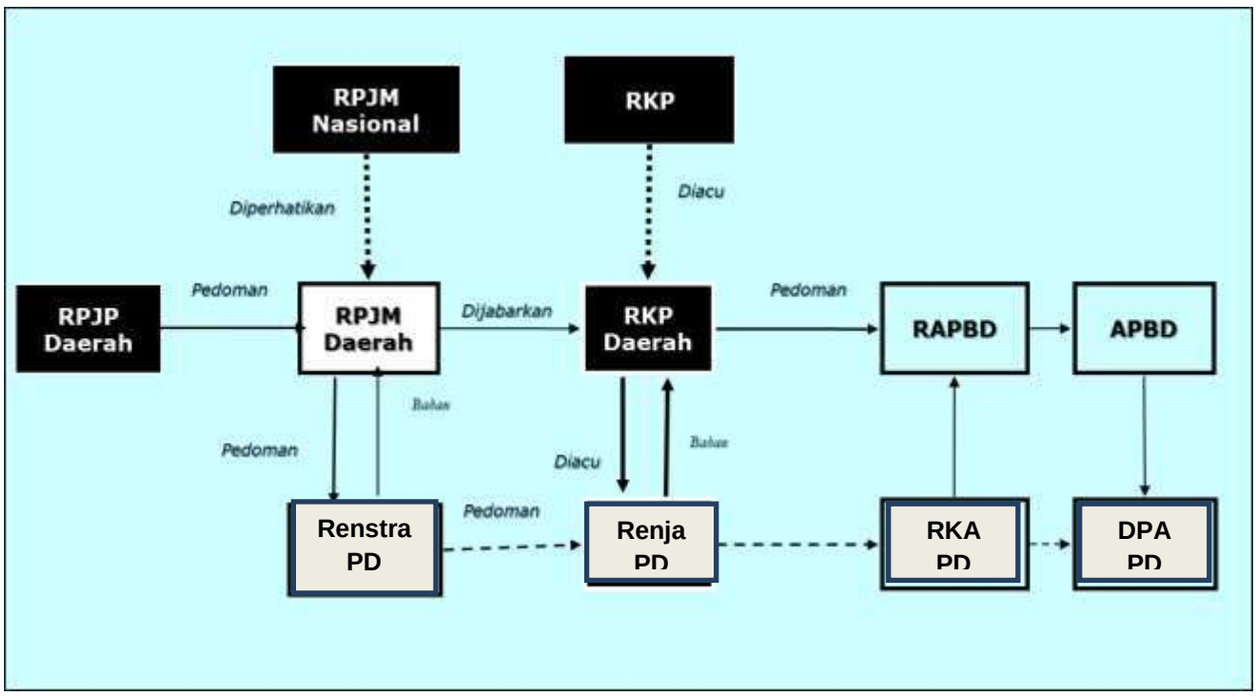

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 (diolah)

I.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan TimurKota Pekalongan tahun 2025 didasarkan kepada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang PerubahanUndang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besardan Kota-kota Ketjil di Djawa (LembaranNegara Republik Indonesia tahun 1954Nomor 40, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor104, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun1998 tentang Perubahan Batas WilayahKotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan,Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongandan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1988 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian Dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 21, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4698);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan ;
12. Peraturan Walikota Pekalongan nomer 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025.

I.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan TimurKota Pekalongan tahun 2025 dimaksudkan untuk dan menyelaraskan prioritas program dan kegiatan Kecamatan Pekalongan Timurdengan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 sesuai Peraturan Walikota Pekalongan nomer 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu, penyusunan Rencana Kerja ini juga dimaksudkan untuk melakukan upaya sinkronisasi terhadap program-program dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pembangunan daerah pada tahun 2025. Hal ini untuk lebih meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan media untuk menyamakan persepsi, menyatukan komitmen dan langkah-langkah kebijakan pemerintah daerah Kota Pekalongan pada Tahun 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan Timuradalah :

1. Sebagai acuan/arah bagi Kecamatan Pekalongan Timurdalam menyusun program/kegiatan prioritas tahun 2025 berdasarkan ketersediaan sumberdaya yang ada;
2. Merumuskan program dan kegiatan Kecamatan Pekalongan TimurKota Pekalongan pada tahun 2025.
3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan Timurtahun 2025sesuai Permendagri 86 Tahun 2017dan Surat Sekretaris Daerah Kota Pekalongan Nomor B/700/000.7.4/2024/i tanggal 15 Sepetember

2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, agar substansi padabab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

I.1. Latar Belakang
I.2. Landasan Hukum
I.3. Maksud dan Tujuan
I.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAHTAHUN LALU:

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
b. Kaidah – kaidah pelaksanaan
c. Rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2025 diperlukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD sampai dengan Tahun 2024 Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan PD dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan PD.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daereah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

Hasil evaluasi pelaksanaan renja Tahun lalu (tahun 2023) dan Tahun Berjalan 2024, Kecamatan Pekalongan Timurdapat disajikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 (C.29)

No	IndikatorProgram Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal 2022	Realisasi 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d 2023	Prosentase capaian target RPJMD	Status Capaian
						Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	-	100	100	100	100	100	100	tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	-	100	100	100	100	100	100	tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	-	100	100	100	100	100	100	tercapai
4	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur	persen	-	100	100	100	100	100	100	tercapai
5	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Timur	persen	-	100	100	100	100	100	100	tercapai
6	Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Timur	persen	-	100	100	100	100	100	100	tercapai
	- Jumlah patroli trantib yang dilaksanakan	kali	-	48	36	36	36	100	100	tercapai
	- Jumlah kegiatan catur pilar	kegiatan	-	2	2	1	1	100	100	tercapai
	- Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah fasilitasi TP. PKK	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai

	- Jumlah dokumen Musrenbang Kecamatan yang disusun	dokumen	-	1	1	1	1	100	100	tercapai
	- Jumlah Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi Tertib Administrasi	kelurahan	-	7	7	7	7	100	100	tercapai
	- Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumen musrenbangkel) yang disusun/KAUMAN	dokumen	-	1	1	1	1	100	100	tercapai
	- Jml. Lokasi saluran lingkungan yang dibangun/dipelihara	Lokasi	-	1	1	1	1	100	100	tercapai
	- Jml. Sarpras lingkungan yang diadakan	Unit	-	1	1	1	1	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM Kelurahan Kauman	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan Kauman	Bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM Kelurahan Kauman	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jml. LKK yang difasilitasi	LKK	-	1	1	1	1	100	100	tercapai
	- Jumlah personil RT yang dibina	orang	-	108	108	108	108	100	100	tercapai
	- Jumlah personil RW yang dibina	orang	-	18	18	18	18	100	100	tercapai
	- Jumlah kegiatan koordinasi hasil pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan	kegiatan		4	4	4	4	100	100	tercapai
	- Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun	laporan		1	1	1	1	100	100	tervcapai
	- Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan	kali		6	6	6	6	100	100	tercapai
	- **Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumen musrenbangkel) yang**	dokumen	-	1	1	1	1	100	100	tercapai

	disusun/PONCOL									
	- Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahanJumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah Lembaga yang difasilitasi hibah sarpras	lokasi	-	4	4	4	4	100	100	tercapai
	- Jumlah Lokasi yang difasilitasi pembangunan gapura dan pengadaan gerobak sampah	lokasi	-	1	1	1	1	100	100	tercapai
	- Jumlah Rakor PLPBK yang diadakan	Kali	-	1	1	1	1	100	100	tercapai
	- Jumlah lokasi jalan pemukiman yang dipaving di Kelurahan Poncol	Lokasi	-	1	1	1	1	100	100	tercapai
	- Jumlah Sarpras lingkungan yang diadakan	Unit	-	0	1	1	1	100	100	tercapai
	- Jumlah strip gula darah yang diadakan di Kelurahan Poncol	box	-	45	45	45	45	100	100	tercapai
	- Jumlah kegiatan rembug stunting tingkat kelurahan yang dilaksanakan	kali	-	0	1	1	1	100	100	tercapai
	- Jumlah kegiatan koordinasi hasil pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan	kali	-	1	4	4	4	100	100	tercapai
	- Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun	kali	-	1	1	1	1	100	100	tercapai
	- Jml. LKK yang difasilitasi	LKK	-	3	2	2	2	100	100	tercapai
	- Jumlah RT/RW yang difasilitasi di Kelurahan Poncol	Orang	-	81	82	82	82	100	100	tercapai
	- Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan	kali		1	3	3	3	100	100	tercapai

	- **Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumen musrenbangkel) yang disusun/Kel. KLEGO**	Dokumen	-	1	1	1	1	100	100	tercapai
	- Jumlah lokasi jalan pemukiman yang ditingkatkan	Lokasi	-	0	1	1	1	100	100	tercapai
	- Jumlah RT/RW yang difasilitasi hibah sarpras Kelurahan Klego	Lokasi	-	2	1	1	1	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan	kali	-	8	8	8	8	100	100	tercapai
	- Jumlah taman baca yang difasilitasi	kali	-	1	1	1	1	100	100	tecapai
	- Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan	kali	-	24	24	24	24	100	100	tercapai
	- Jumlah RT/RW yang difasilitasi kelurahan klego	RT/RW	-	63	63	63	63	100	100	tercapai
	- Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan	kali	-	24	24	24	24	100	100	tercapai
	- Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun	kali	-	0	1	1	1	100	100	tercapai
	- Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan	kali	-	1	6	6	6	100	100	tercapai
	- Jumlah kegiatan koordinasi hasil pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan	kegiatan	-	4	4	4	4	100	100	tercapai
	- Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan Kelurahan Klego	kali	-	4	4	4	4	100	100	tercapai
	- **Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumen musrenbangkel) yang disusun kel**	dokumen	-	1	1	1	1	100	100	tercapai

	GAMER									
	- Jumlah Lokasi yang difasilitasi hibah sarpras alat tensi	lokasi	-	1	1	1	1	100	100	tercapai
	- Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan Kelurahan Gamer	kali	-	4	4	4	4	100	100	tercapai
	- Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan di Kelurahan Gamer	kali	-	4	4	4	4	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan	kali	-	8	8	8	8	100	100	tercapai
	- Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan di Kelurahan Gamer	kali	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah Kegiatan update data ATS yang di laksanakan	kali	-	1	1	1	3	100	100	tercapai
	- Jumlah RT/RW yang difasilitasi di Kelurahan Gamer	RT/RW	-	42	42	42	42	100	100	tercapai
	- Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan	kali	-	8	27	27	27	100	100	tercapai
	- Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun	laporan	-	1	1	1	1	100	100	tercapai
	- **Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumen musrenbangkel) yang disusun Kel.NOYONTAANSARI**	dokumen	-	1	1	1	1	100	100	tercapai
	- Jumlah lokasi Sarpras yang dibangun / dipelihara Kelurahan Noyontaansari	Lokasi	-	2	5	5	5	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai

	- Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan Kelurahan Noyontaansari	Lokasi	-	5	42	42	42	100	100	tercapai
	- Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan Kelurahan Noyontaansari	Kali	-	1	3	3	3	100	100	tercapai
	- Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan Kelurahan Noyontaansari	kali	-	6	4	4	4	100	100	tercapai
	- Jumlah taman baca yang difasilitasi Kelurahan Noyontaansari	lokasi	-	1	1	1	1	100	100	tercapai
	- Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan Kelurahan Noyontaansari	kali	-	4	4	4	4	100	100	tercapai
	- Jumlah fasilitasi peningkatan keterampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan	kali	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah personil RT/RW yang dibina di Kelurahan Noyontaansari	RT/RW	-	74	74	74	74	100	100	tercapai
	- Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun	kali	-	1	1	1	1	100	100	tercapai
	- Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan Kelurahan Noyontaansari	Kali	-	6	4	4	4	100	100	tercapai
	- Jumlah kegiatan koordinasi hasil pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan	kegiatan	-	4	4	4	4	100	100	tercapai
	- Jumlah kegiatan sosialisasi NAPZA yang dilaksanakan	kali	-	1	1	1	1	100	100	tercapai
	- **Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumen musrenbangkel) yang disusunKel. SETONO**	dokumen	-	1	1	1	1	100	100	tercapai
	- Jumlah Fasilitasi Kegiatan pemeliharaan PLPBK Kelurahan Setono	lokasi	-	0	1	1	1	100	100	tercapai

	- Jumlah lokasi perbaikan dan Pembuatan jalan permukiman yang di paving di Kelurahan Setono	Lokasi	-	3	2	2	2	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan	kali	-	4	4	4	4	100	100	tercapai
	- Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan	kali	-	1	3	3	3	100	100	tercapai
	- Jumlah kegiatan koordinasi hasil pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan	kali	-	4	4	4	4	100	100	tercapai
	- Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan di Kelurahan Setono	kali	-	2	2	2	2	100	100	tercapai
	- Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan	kali	-	2	2	2	2	100	100	tercapai
	- Jumlah RT/RW yang difasilitasi di Kelurahan Setono	RT/RW	-	93	93	93	93	100	100	tercapai
	- Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan	kali	-	6	6	6	6	100	100	tercapai
	- **Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumen musrenbangkel) yang disusun Kelurahan KALIBAROS**	dokumen	-	1	1	1	1	100	100	tercapai
	- Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan di Kelurahan Kalibaros	kali	-	4	4	4	4	100	100	tercapai
	- Jumlah RT / RW yang difasilitasi hibah sarpras	RT/RW	-	4	4	4	4	100	100	tercapai

	- Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan di Kelurahan Kalibaros	kali	-	8	8	8	8	100	100	tercapai
	- Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan	kali	-	4	4	4	4	100	100	tercapai
	- Jumlah RT/RW yang difasilitasi di Kelurahan Kalibaros	RT/RW	-	46	47	47	47	100	100	tercapai
	- Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun	laporan	-	1	1	1	1	100	100	tercapai
	- Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan	kali	-	4	4	4	4	100	100	tercapai
	- Jumlah fasilitasi peningkatan keterampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan	kali	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- **jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat KECAMATAN**	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	kali		7	7	7	7	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- JUmlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai

	- JUmlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	bulan	-	11	11	11	11	100	100	tercapai
	- **Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kel. KAUMAN**	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	bulan	-	11	11	11	11	100	100	tercapai
	- **Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat kel. PONCOL**	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai

	- Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/pnerangan bangunan kantor	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan surat kabar / majalah dan peraturan perundang – undangan	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	bulan	-	11	11	12	12	100	100	tercapai
	- **Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat kel. KLEGO**	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa kebesihan dan peralatan kebesihan kantor	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai

	/penerangan bangunan kantor									
	- Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan surat kabar / majalah dan peraturan perundang – undangan	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	bulan	-	11	11	11	11	100	100	tercapai
	- **Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kel.GAMER**	Bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	Bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah buah penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	Bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan surat kabar / majalah dan peraturan perundang – undangan	Bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Bulan	-	11	11	11	11	100	100	tercapai
	- **Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kel. NOYONTAANSARI**	Bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai

	- Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	Bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan Alat Tulis Kntor dan Benda Pos	Bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	Bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Bulan	-	11	11	11	11	100	100	tercapai
	- **Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kel. SETONO**	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya, air dan listrik	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai

	- Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan surat kabar / majalah dan peraturan perundang – undangan	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	bulan	-	11	11	11	11	100	100	tercapai
	- **jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kel. KALIBAROS**	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- jumlah bulan Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan surat kabar / majalah dan peraturan perundang – undangan	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman	bulan	-	11	11	11	11	100	100	tercapai

2	Persentase pelaksanaan pemiliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga	persen	0	100	100	100	100	100	100	tercapai
	KECAMATAN									
	- Jumlah gedung/unit/lokasi yang dibangun	unit	-	1	2	2	2	33,33	100	tercapai
	- Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	-	1	1	1	1	100	100	tercapai
	- Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	-	1	1	1	1	100	100	tercapai
	- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	-	14	14	14	14	100	100	tercapai
	- Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	unit	-	0	10	7	7	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	KEL.KAUMAN									
	- Jumlah gedung kantor yang terpelihara secararutin/berkala	unit	-	1	5	1	1	100	100	tercapai
	- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	-	3	3	3	3	100	100	tercapai
	- Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	unit	-	3	3	5	5	100	100	tercapai
	KEL PONCOL									

	- jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	-	1	1	1	1	100	100	tercapai
	- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin berkala	unit	-	3	3	3	3	100	100	tercapai
	- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	unit	-	4	4	4	4	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	KEL. KLEGO									
	- Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin / berkala	unit	-	1	1	1	1	100	100	tercapai
	- Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin / berkala	unit	-	2	2	3	3	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor	unit	-	2	2	2	2	100	100	tercapai
	KEL.GAMER									
	- Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	-	2	2	3	3	100	100	tercapai
	- jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	unit	-	2	2	2	2	100	100	tercapai
	KEL. NOYONTAANSARI									

	- Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	-	1	1	1	1	100	100	tercapai
	- Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	-	1	1	1	1	100	100	tercapai
	- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	-	2	2	4	4	100	100	tercapai
	- Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	unit	-	4	2	2	2	100	100	tercapai
	KEL.SETONO									
	- Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	-	1	1	1	1	100	100	tercapai
	- jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	-	1	1	1	1	100	100	tercapai
	- Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	-	4	4	5	5	100	100	tercapai
	- Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	unit	-	4	4	4	4	100	100	tercapai
	KEL.KALIBAROS									
	- Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	-	1	1	1	1	100	100	tercapai

	- Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	-	3	3	4	4	100	100	tercapai
	- jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	bulan	-	0	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	unit	-	1	1	1	1	100	100	tercapai
3	Persentase kehadiran aparatur	%	0.00	90.00	90.00	90.00	100.00	100.00	100.00	tercapai
	- Jumlah sarung batik yang diadakan	setel	-	0	14	14	100	100	100	tercapai
4	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	0.00	100.00	5.00	100.00	100.00	100.00	100.00	tercapai
	- Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun	dokumen	-	2	2	2	2	100	100	tercapai
	- Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja Penetapan dan Perubahan; Rencana Aksi; LKJIP) dan Laporan - Laporan Keuangan SKPD yang disusun	dokumen	-	6	6	6	6	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 Laporan Pemantauan RTP) yang disusun	dokumen	-	5	5	5	5	100	100	Tidak tercapai
	- Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai

	Perangkat Daerah									
	- Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
	- Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah	bulan	-	12	12	12	12	100	100	tercapai
6	Pengaduan yang diterima	kasus	-	-	0	-	0.00	0.00	0.00	tercapai
	- Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota	orang/bulan	-	4	4	4	4	100	100	tercapai

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK. Indikator Kinerja yang akan dimuat oleh Kecamatan Pekalongan Timur berdasarkan tugas dan fungsinya serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kajian pelayanan. Hasil analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pekalongan Timur, sebagaimana terlampir.

TABEL T- C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

NO.	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				Tahun 2022 (Thn. n-2)	Tahun 2023 (Thn. n-1)	Tahun 2024 (Thn. n)	Tahun 2025 (Thn. N+1)	Tahun 2022 (Thn. n-2)	Tahun 203 (Thn. n-1)	Tahun 2024 (Thn. n)	Tahun 2025 (Thn. N+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.	Persentase kehadiran aparatur			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.	Persentase pengaduan			0%	0%	0%	0%	0%	5%	2%	3%	
5.	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian,			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

	administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah											
7.	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8.	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9.	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10.	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Timur			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11.	Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Timur			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Secara garis besar tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pekalongan Timur adalah sebagai Perangkat Daerah Otonom yang membantu Pemerintah Kota Pekalongan dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Tugas pokok di atas didistribusikan dalam jabatan-jabatan yang terdapat dalam struktur organisasi Kecamatan Pekalongan Timur sesuai Peraturan Walikota Pekalongan Nomor : 97Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan yang membawahi :
   - Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
   - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
4. Kepala Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. C a m a t

Kecamatan mempunyai tugas mendukung Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan umum di wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan dan penetapan sasaran dan program bidang pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan ;
b. perumusan kebijakan bidang pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan ;
c. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan di Kecamatan ;
d. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan ;
e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
f. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman,, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat ;
g. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Walikota
h. pengkoordinasiaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;

i. pengkoordinasian peyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat Kecamatan dan Kelurahan ;
j. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan ;
k. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat ;
l. Pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan /atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
m. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas, dan
n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. <u>Sekretariat Kecamatan</u>

a. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
b. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan barang milik daerah, serta pengoordinasian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris menjalankan fungsi :

a. perumusan sasaran, program dan kegiatan Kecamatan;
b. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Kecamatan;
c. pengkoordinasian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Kecamatan ;
d. pembinaan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan ;
e. pembinaan pengelolaan administrasi umum Kecamatan ;
f. pembinaan pengeloaan administrasi kepegawaian Kecamatan ;
g. pembinaan pengelolaan administrasi barang milik daerah Kecamatan ;
h. pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah Kecamatan ;
i. pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan Kecamatan ;
j. pengoordinasian pengeloaan data dan informasi ;

k. pengkoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP);
l. pengkoordinasian pelaporan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan dan evaluasi Kelembagaan ;
m. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Kecamatan dibantu oleh Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dan Subbagian umum.

2.a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.
2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kerja, administrasi keuangan dan evaluasi kegiatan tahunan.

   Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas :

   a. menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan;
   b. menyusun bahan dan melaksanaan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran ;
   c. mengoordinasikan penyusunan dokumen RKA dan RKA Perubahan, DPA dan DPA Perubahan, serta lapaoran capaian kinerja, ihtisar realisasi kinerja, dan evaluasi kinerja Kecamatan ;
   d. melaksanakan penyediaan gaji dan tunjangan ASN ;
   e. melaksanakan penatausahaan keuangan ;
   f. mengoordinasikan dan melaksanakan fungsi akuntansi ;
   g. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran, dan/atau akhir tahun ;
   h. menyusun pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran ;
   i. mengelola dan menyiapkan bahan tanggapan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan ;
   j. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP); dan
   k. mengevaluuasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

2.b. Subbagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian dan administrasi pelayanan umum..

   Untuk melaksanakan tugas subbagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

   a. menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
   b. mengoordinasikan dn melaksanakan penyediaan kompone instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, serta bahan candaan dan peraturan perundang-undangan ;
   c. melaksanakan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi ;
   d. mengoordinasikan dan melaksanakan penatausahaan arsip dinamis ;
   e. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kepegawaian ;
   f. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan administrasi barang milik daerah, meliputi penyusunan prencanaan kebutuhan, pemanfaatan, penatausahaan, serta rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah ;
   g. menggordinasikan dan melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan ;
   h. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan jasa menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik, peralatan dan perlengkapan kantor, serta pelayanan umum kantor lainnya ;
   i. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya :
   j. mengelola penyusunan Laporan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan dan Evaluasi Kelembagaan dan
   k. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan

3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

a. menyusun bahan perencanaan program kerja bidang Pemerintahan, Ketentram dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat ;
b. menyusuan bahan kebijakan bidang pemerintahan, ketentramanb dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat ;
c. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kecamatan :
d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di Kecamatan :
e. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan ;
f. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan di wilayah Kecamatan;
g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dengan POLRI, TNI dan/atau inatansi terkait di wilayah Kecamatan ;
h. menggordinasikan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan ;
i. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait di bidang penegakan peraturan perundang-undangan ;
j. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat :

Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

a. menyusun bahan perencanaanprogram kerja bidang pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat ;

b. menyusun bahan kebijakan bidang pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat ;
c. melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan ;
d. mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan ;
e. mengoordinasikan penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan ;
f. mengoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
g. memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan teknologi tepat guna ;
h. melaksanakan upaya peningkatan pendidikan dan ketrampilan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga ;
i. melaksanakan fasilitasi bantuan dan upaya peningkatan kesejahteraan sosial ;
j. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan

Struktur organisasi merupakan gambaran secara sistematis mengenai hubungan dan kerjasama sekelompok orang dalam usaha mencapai tujuan bersama. Dengan adanya struktur organisasi akan diketahui tingkat kekuasaan, garis wewenang dan tanggung jawab seorang dalam suatu organisasi.Pemerintah Kecamatan Pekalongan Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya menggunakan struktur organisasi berbentuk garis dan staf, yaitu bentuk organisasi dimana pimpinan dibantu oleh staf dan ada suatu kesatuan komando dari tingkat yang lebih atas ke tingkat bawah. Fungsi staf adalah untuk memberi bantuan baik pikiran, tenaga maupun dalam bentuk yang lain yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi.struktur organisasi Kecamatan Pekalongan Timur sesuai Peraturan Walikota Pekalongan Nomor : 97Tahun 2022 sebagai berikut

a. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan terdiri dari :

- Camat;
- Sekretariat terdiri dari :
  - Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
  - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Kepala Seksi PemerintahanKetentraman dan Ketertiban Umum
- Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Bagan Susunan Organisasi

Bagan organisasi diperlukan untuk menggambarkan hubungan dan fungsi yang jelas antara masing-masing bagian yang ada dalam suatu organisasi. Semakin banyak kegiatan yang dilaksanakan dalam organisasi pemerintahan, maka semakin kompleks pula hubungan yang ada.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

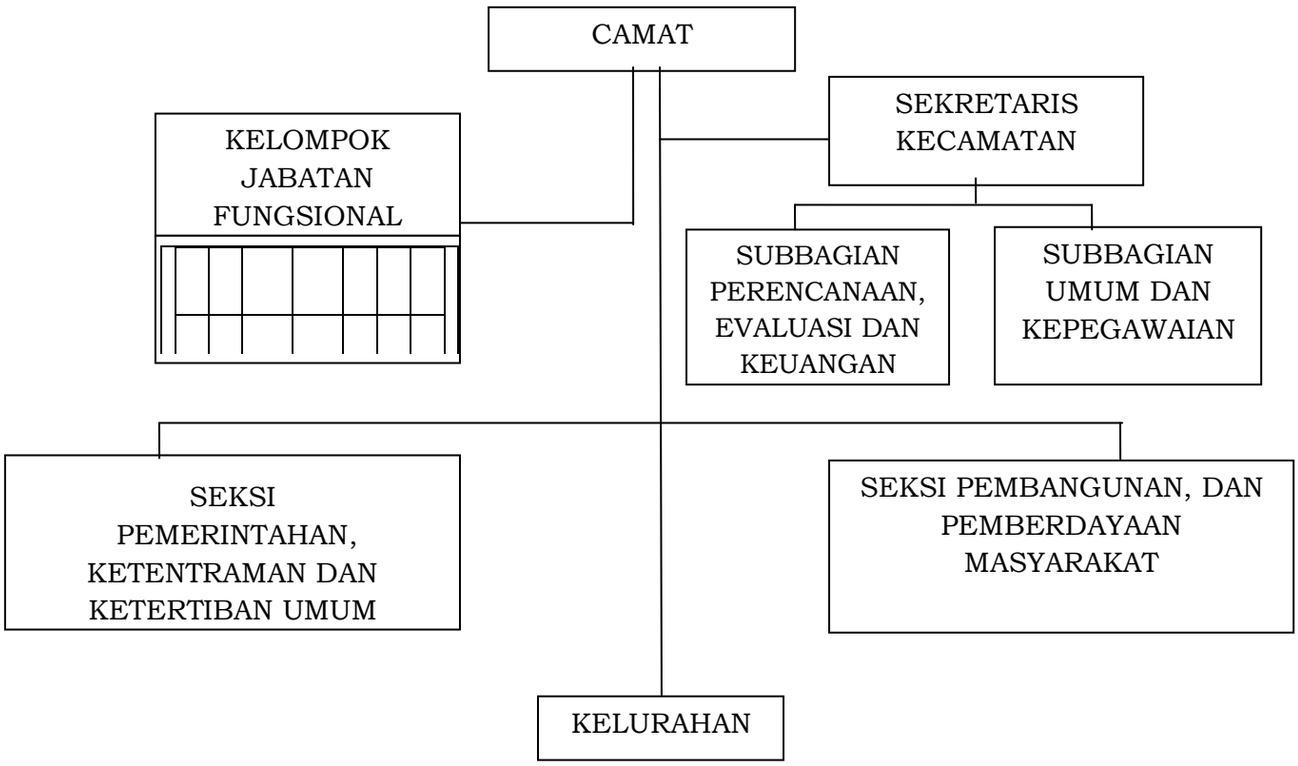

Dalam setiap pelaksanaaan penyelenggaraan pemerintah selalu terdapat Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, adapun permasalahan dan hambatan tersebut :

1. Kurangnya sumber daya manusia
2. Kebijakan peraturan pemerintah yang berubah-ubah sehingga terjadi ketidak konsistennya aturan
3. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dan gedung yang masih proses penyempurnaan.
4. Sebagian wilayah Pekalongan Timur sudah ada yang terdampak rob seperti Kelurahan Klego, Gamer, Kauman.
5. Wilayah Timur yang rawan Kriminalitas sehingga perlu perhatian yang serius dan membutuhkan sinergitas dengan instansi lain

Disamping permasalahan dan hambatan, terdapat peluang dan tantangan dalam meningkatkan pelayanan, diantaranya :

1. Pada hari hari tertentu ada kegiatan wisata religi yang menyebabkan rawan kemacetan, penumpukan sampah, rawan kriminalitas sehingga perlu perhatian dan penanganan dari phak terkait.
2. Peningkatan sektor UMKM yang perlu lebih mendapat perhatian serius

Adanya isu-isu penting dan dapat di rekomendasikan dan menjadi catatan yang strategis yang dapat direkomendasikan untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun selanjutnya:

1. Penanganan sampah yang intensif
2. Pencegahan dan penanganan tindak kriminal yang efektif
3. Penanganan banjir dan rob
4. Penanganan dan pencegahan stunting

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Timur tahun 2025 yang telah disusun pada akhir tahun 2024 memuat beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang masih relevan dan berkesinambungan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 ini, akan tetapi setelah melalui beberapa proses pentahapan yang dilalui bersama Pemerintah Kota Pekalongan dan dengan penyesuaian cascading yang telah disusun, maka terdapat beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan dan penyesuaian, diantaranya dapat dilihat pada tabel T-C.31 tersebut dibawah ini :

TABEL T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
	Unsur Kewilayahan					Unsur Kewilayahan					
	Kecamatan					Kecamatan					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	- **Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja**	**Kec. Pekalongan Timur**	**100 Persen**	10.340.084.000	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	- **Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja**	**Kec. Pekalongan Timur**	**100 Persen**	**10.340.084.000**	
		- Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Pekalongan Timur	100 Persen			- Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Pekalongan Timur	100 Persen		
		- Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kec. Pekalongan Timur	100 Persen			- Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kec. Pekalongan Timur	100 Persen		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- **Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec. Pekalongan Timur**	**100 Persen**	128.000.000	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	- **Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec. Pekalongan Timur**	**100 Persen**	**128.000.000**	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan yang Disusun	Kec. Pekalongan Timur	2 Dokumen	8.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan yang Disusun	Kec. Pekalongan Timur	2 Dokumen	8.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Jumlah dokumen RKA dan Perubahan RKA yang disusun	Kec. Pekalongan Timur	2 Dokumen	3,000,000		- Jumlah Dokumen RKA dan Perubahan RKA yang disusun	Kec. Pekalongan Timur	2 Dokumen	3,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	- Jumlah Dokumen Evaluasi Renja yang Disusun	Kec. Pekalongan Timur	4 Dokumen	117.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	- Jumlah Dokumen Evaluasi Renja yang Disusun	Kec. Pekalongan Timur	4 Dokumen	117,000,000	
		- Jumlah Dokumen SAKIP yang disusun (Penetapan dan Perubahan)	Kec. Pekalongan Timur	2 Dokumen			- Jumlah Dokumen Yang SAKIP yang disusun (Penetapan dan Perubahan)	Kec. Pekalongan Timur	2 Dokumen		
		- Jumlah Bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kec. Pekalongan Timur dan Semua Kelurahan	12 Bulan			- Jumlah Bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kec. Pekalongan Timur dan Semua Kelurahan	12 Bulan		
		- Jumlah Dokumen SPIP (1 Dokumen RTP, 4 Dokumen Pemantauan RTP) yang disusun	Kec. Pekalongan Timur	5 Dokumen			- Jumlah Dokumen SPIP (1 Dokumen RTP, 4 Dokumen Pemantauan RTP) yang disusun	Kec. Pekalongan Timur	5 Dokumen		
	Admininstrasi Keuangan Perangkat daerah	**- Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec. Pekalongan Timur**	**100 Persen**	**8.038.205.000**	**Admininstrasi Keuangan Perangkat daerah**	**- Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec. Pekalongan Timur**	**100 Persen**	**8.038.205.000**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	- Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pekalongan Timur	12 Bulan	**7.800.905.000**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	- Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pekalongan Timur	12 Bulan	7,800.905.000	

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Jumlah bulan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Pekalongan Timur dan Semua Kelurahan	12 Bulan	234.300.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Jumlah bulan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Pekalongan Timur dan semua Kelurahan	12 Bulan	234.300.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	Kec. Pekalongan Timur	1 Dokumen	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Laporan keuangan SKPD yang disusun	Kec. Pekalongan Timur	1 Dokumen	3,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**- Presentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kec. Pekalongan Timur**	**100 Persen**	**10.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**- Presentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kec. Pekalongan Timur**	**100 Persen**	**10.000.000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Pekalongan Timur	1 buah	10.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	- Jumlah Keikutsertaan dalam Event tingkat kota	Kec. Pekalongan Timur	2 kali	10.000.000	
	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	**- Presentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec. Pekalongan Timur**	**100 Persen**	**457.744.000**	**Adminitrasi Umum Perangkat Daerah**	**- Presentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec. Pekalongan Timur**	**100 Persen**	**457.744.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Pekalongan Timur dan Semua Kelurahan	12 Bulan	10.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Pekalongan Timur dan Semua Kelurahan	12 Bulan	10.500.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	Kec. Pekalongan Timur	12 Bulan	156.591.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	Kec. Pekalongan Timur dan Semua Kelurahan	12 Bulan	156.591.000	

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Pekalongan Timur dan Semua Kelurahan	12 Bulan	10.500,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Pekalongan Timur dan Semua Kelurahan	12 Bulan	10,500,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	Kec. Pekalongan Timur dan Semua Kelurahan	11 Bulan	200.013.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	Kec. Pekalongan Timur dan Semua Kelurahan	11 Bulan	200.013.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Pekalongan Timur dan Semua Kelurahan	12 Bulan	40.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Pekalongan Timur dan Semua Kelurahan	12 Bulan	40,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	- Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	Kec. Pekalongan Timur dan Semua Kelurahan	12 Bulan	20.640.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	- Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	Kec.Pekalongan Timur dan Semua Kelurahan	12 Bulan	20,640,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	Kec. Pekalongan Timur	7 kali	19.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	Kec. Pekalongan Timur	7 kali	19.500.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**- Presentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Pekalongan Timur**	**100 Persen**	**0**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**- Presentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Pekalongan Timur**	**100 Persen**	**0**	
	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	- Jumlah bangunan gedung yang diadakan/dibangun	Kec. Pekalongan Timur	0 Unit	0	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	- Jumlah bangunan gedung yang diadakan/dibangun	Kec. Pekalongan Timur	2 Unit	0	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**- Presentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kec. Pekalongan Timur**	**100 Persen**	**1.369.074.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**- Presentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kec. Pekalongan Timur**	**100 Persen**	**1.043,308,000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Pekalongan Timur dan Semua Kelurahan	12 Bulan	10,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Pekalongan Timur dan Semua Kelurahan	12 Bulan	10,500,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	- Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Pekalongan Timur dan Semua Kelurahan	12 Bulan	193.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	- Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Pekalongan Timur dan Semua Kelurahan	12 Bulan	19.200.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Peralatan Kebersihan Kantor	Kec. Pekalongan Timur dan Semua Kelurahan	12 Bulan	1.165.374.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Pekalongan Timur dan Semua Kelurahan	12 Bulan	1.65.374.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**- Presentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Pekalongan Timur**	**100 Persen**	**337.061.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**- Presentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Pekalongan Timur**	**100 Persen**	**337.061.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	Kec. Pekalongan Timur dan Semua Kelurahan	14 Unit	175.662.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	Kec. Pekalongan Timur dan semua Kelurahan	14 unit	175.662.000	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	Kec. Pekalongan Timur dan Semua Kelurahan	2 Unit	119.724.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	Kec. Pekalongan Timur dan Semua Kelurahan	2 Unit	119.724.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Kec. Pekalongan Timur dan Semua Kelurahan	12 Bulan	41.675.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Kec. Pekalongan Timur dan Semua Kelurahan	12 Bulan	41.675.000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**- Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Timur**	**Kec. Pekalongan Timur dan Semua Kelurahan**	**100 Persen**	**24.390.000**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Timur**	**Kec. Pekalongan Timur dan Semua Kelurahan**	**100 Persen**	**24.390.000**	
	pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	**- Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Timur**	**Kec. Pekalongan Timur**	**100 Persen**	11.890.000	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**- Tingkat ketercapaian koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kec. Pekalongan Timur**	**100 Persen**	**11.890.000**	
	koordinasi,sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemeintahan dengan perangkat daerah dan perangkat daerah terkait	- Jumlah kelurahan yang dibina tertib administrasinya	Kec. Pekalongan Timur	7 Kelurahan	12.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	- Jumlah kelurahan yang dibina tertib administrasinya	Kec. Pekalongan Timur	7 Kelurahan	12,000,000	

	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**- Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Wilayah Timur**	**Kec. Pekalongan Timur**	**100 Persen**	**139.016.000**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**- Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Wilayah Timur**	**Kec. Pekalongan Timur**	**100 Persen**	**139.016.000**	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**- Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kec. Pekalongan Timur**	**100 Persen**	**36.442.000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**- Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kec. Pekalongan Timur**	**100 Persen**	**36.442.000**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kec. Pekalongan Timur	100 Persen	**57.111.000**	**Kegiatan pemberdayaan kelurahan**	- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	**Kec. Pekalongan Timur**	**100 persen**	57.111.000	
		- Jumlah fasilitasi kegiatan TP PKK	Kec. Pekalongan Timur	12 bulan		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	- Jumlah dokumen Musrenbang dan FDKP kecamatan yang disusun	Kec. Pekalongan Timur	2dokumen		
		- Jumlah kegiatan catur pilar yang dilaksanakan	Kec. Pekalongan Timur	1 kali		**Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan**	**- Prosentase kecapaian Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan**	**Kec. Pekalongan Timur**	**1 00 persen**		

		- Jumlah dokumen Musrenbang kecamatan yang disusun	Kec. Pekalongan Timur	1 dokumen		Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	Jumlah failitasi TPP PKK Jumlah catur pilar yg dilaksanakan Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	Kec. Pekalongan Timur	1unit 2 kegiatan 0 lkk		
	Pemberdayaan dan kesejaheraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	peningkatan kesadaran keluarga dalm peningkatan pendidikan dan ketrampilan untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Kec. Pekalongan Timur	100 persen	81.905.000	**Pemberdayaan dan kesejaheraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan**	- **Prosentase Pemberdayaan dan kesejaheraan keluarga tingkat kecamatan** **Prosentase tercapainya kegiatan Pemberdayaan dan kesejaheraana rakyat tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Kec. Pekalongan Timur**	**100 persen**	**81.905.000**	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan	peningkatan kesadaran keluarga dalm peningkatan pendidikan dan ketrampilan untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Kec. Pekalongan Timur	100 persen	82.500,000	Peningkatan kesadarankeluarga dalam peningkatan pendidikan dan ketrampilanuntuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Jumlah distribusi bansos kematian yang dilaksanakan Jumlah fasilitas kegiatan masy yag dilaksanakan Jml fasiitas bunda PAUD tingkat kecamatan yang dilaksanakan	Kec. Pekalongan Timur	12 bulan 24 kali 1 kali	82.500,000	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	- **Tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan Wilayah Timur**	**Kec. Pekalongan Timur**	**100 Persen**	200.566.000	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	- **Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Timur**	**Kec. Pekalongan Timur**	**100 Persen**	**200.566.000**	

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**- Prosentase ketercapaian koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**Kec. Pekalongan Timur**	**100 Persen**	200.566.000	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**- Tingkat ketercapaian koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**Kec. Pekalongan Timur**	**100 Persen**	**200.566.000**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- Jumlah patroli trantib	Kec. Pekalongan Timur	24 Kali	200.566.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- Jumlah hasil laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah patroli trantib	Kec. Pekalongan Timur	48 Kali	200.566.000	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur**	**Kec. Pekalongan Timur**	**100 Persen**	**10.000.000**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur**	**Kec. Pekalongan Timur**	**100 Persen**	**10.000.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**- Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Timur**	**Kec. Pekalongan Timur**	**100 Persen**	6.270.000	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah**	**- Prosentase ketercapaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah**	**Kec. Pekalongan Timur**	**100 Persen**	**6.270.000**	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	- Jumlah Rapat Koordinasi Forkopimca yang dilaksanakan	Kec. Pekalongan Timur	1 Kali	6.270.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	- Jumlah dokumen tugas forum koordinassi pimpinan di kecamatan Jumlah Rapat Koordinasi Forkopimca yang dilaksanakan	Kec. Pekalongan Timur	0 dokumen 2 Kali	6.270.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan Pekalongan Timurdalam penyusunan program dan kegiatan terlebih dahulu menampung aspirasi masyarakat dari pemangku kepentingan, baik dari OPD terkait, kelompok masyarakat maupun warga masyarakat.

Berdasarkan hasil rumusan dari pemangku kepentingan tersebut dilakukan penyesuaian dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah sekaligus merupakan program dan kegiatan yang merupakan isu-isu strategis Perangkat Daerah, tentu saja usulan program dan kegiatan ini adalah berdasarkan pada skala prioritas, seperti disajikan dalam Tabel : T-C.32 sebagai berikut :

TABEL T-C.32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1.	Pekerjaan sambungan saluran air tapak siring	Jalan Tapak siring Kelurahan poncol alan Tondano sisi barat	Terlaksananya pekerjaan sambungan saluran air tapak siring di kelurahan poncol	1000 m	DPU – PR
2.	Perbaikan peninggian dan pembuatan Talud sungai kali Rowo	Setono, sungai kali Rowo	Terpenuhinya perbaikan , peninggian dan pembuatan sungai kali Rowo	1.200.m	DPU – PR
3.	Perbaikan saluran air Jl. Otto Iskandar Dinata	Kalibaros, Sepanjang jl. Otto Iskandar Dinata	Telaksananya pekerjaan perbaikan saluran air di Jl. Otto Iskandar dinata	900 m	DPU – PR
4.	Peninggian dan perbaikan jalan dengan cor	Klego, jl, seroja RW 6 dan 8 (dari SD 04 Klego sampai jalan seruni)	Terlaksanannya pekerjaan peninggian dan perbaikan jl, seroja RW 6 dan 8 (dari SD 04 Klego sampai jalan seruni)	P = 500 m, L = 500 m	DPU - PR
5.	Pembuatan saluran U -60	Kauman, RT.01 RW.15 jl. Patiunus	Terlaksanannya pembuatan saluran RT.01 RW.15 jl. Patiunus	200 m	DPU - PR

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada hakekatnya perencanaan pembangunan nasional perupakan acuan utama bagi setiap daerah propinsi dan kabupaten / kota dalam merumuskan kebijaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Arah kebijaksanaan pembangunan daerah kota harus didasari oleh visi dan misi daerah dan output akhirnya berupa pola dasar pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Pekalongan TimurKota Pekalongan tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Permasalahan tersebut antara lain :

1. Belum reprensentatifnya gedung kantor Kecamatan Pekalongan Timur, karena masih dalam tahap pekerjaan penyempurnaan gedung dan pekerjaan halaman depan yang masih mengalami banjir pada saat hujan sehingga menghambat kelancaran dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
2. Sumber Daya Manusia yang kurang memadai, karena Kecamatan Pekalongan Timur hanya didukung dengan 15 PNS dan dibantu oleh tenaga kontrak dan tenaga kegiatan, sehingga berdampak pada kurangnya kelancaran dalam pelaksanaan pelayanan dan administrasi pemerintahan secara umum.
3. Belum optimalnya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan. Permasalahan ini muncul sebagai akibat faktor eksternal berupa cepatnya perubahan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan penataan organisasi dan kelembagaan serta ketatalaksanaan pemerintahan. Dampak dari perubahan-perubahan Peraturan Pemerintah membutuhkan proses penyatuan dengan situasi dan kondisi yang akhirnya menghambat laju kinerja aparatur.
4. Belum optimalnya profesionalisme aparat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dimana mengharuskan adanya aparat yang profesional dalam proses penerapan tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

5. Kurangnya komunikasi dan kerjasama LPM dan BKM dalam kegiatan koordinasi, perencanaan dan evaluasi pembangunan serta kurang tersedianya dana yang dibutuhkan untuk percepatan dan pemerataan pembangunan sarana prasarana dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat, menyebabkan program dan hasil pembangunan belum optimal.
6. Masih perlunya pembinaan penyelenggaraan administrasi kependudukan oleh aparatur Kelurahan maupun di tingkat RW / RT sebagai akibat kurang memahami sistem administrasi kependudukan serta belum adanya buku-buku manual bagi RT dan RW yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Sehingga data kependudukan ditingkat RT / RW masih kurang tertib, hal tersebut mempengaruhi data pendukung guna terwujudnya pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
7. Kinerja aparatur kelurahan perlu ditingkatkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum, hal tersebut terjadi sebagai akibat :
    a. Kurang representatifnya lokasi kantor Kelurahan dikarenakan tuntutan perubahan zaman (kondisi rusak, kurang luas dll)dan pemeliharaan yang kurang maksimal
    b. Kurang nya SDM di kelurahan karena banyak yang sudah menjelang/masuk usia pensiun dan perlu untuk melakukan re generasi , serta SDM yang ada kurang maksimal dalam melaksanakan pekerjaannya
    c. Perlu peningkatan SDM aparatur di bidang perencanaan, penyusunan program, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, sehingga dalam pelaksanaan dan evaluasi kegiatan sesuai sasaran pada bidang tugas / fungsinya masing-masing.
8. Kurangnya kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman, pengamalan ajaran agama serta kualitas iman dan taqwa kepada Tuhan YME bagi aparatur Pemerintah Kecamatan maupun Kelurahan secara rutin, maka dapat diindikasikan bahwa masih rendahnya kualitas pengamalan ajaran agama dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut dapat mendorong lahirnya etika dan moral yang tidak mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
9. Adanya kegiatan keagamaan yang rutin terselenggara dan menimbulkan dampak positif dan negatif , dampak positif menjadi icon kegiatan skala daerah karena di kunjungi orang orang dari luar daerah, meningkatkan

ekonomi kerakyatan, namun demikian untuk sisi negative nya timbul kemacetan, rawan kriminal, menghasilkan sampah yang cukup banyak

Keberhasilan Kecamatan Pekalongan TimurKota Pekalongan dalam mewujudkan tugasnya dalam dipengaruhi oleh :

1. Dukungan sarana prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai.
2. Adanya hubungan /komunikasi yang baik antara Kecamatan Timur Kota Pekalongan dengan Kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Pekalongan Timur
3. Makin terbukanya komunikasi antar Kecamatan Pekalongan TimurKota Pekalongan dengan masyarakat.
4. Makin berperannya lembaga legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat.
5. Makin meningkatnya kepedulian Kecamatan Pekalongan TimurKota Pekalongan dalam pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
6. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya kerjasama dengan Kecamatan Pekalongan TimurKota Pekalongan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan- tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Untuk optimalisasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pekalongan Timur melaksanakan Visi dan Misi yang telah disusun oleh Kepala Daerah terpilih, Adapun Visi dan Misi Pemerintah Kota Pekalongan adalah :

“Mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih Sejahtera, mandiri dan Religius”

Yang dijabarkan ke dalam Misi – Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat ;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan era global ;
3. Mewujudkan lingkungan pemukiman yang nyaman ;
4. Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan ;
5. Membangun ekonomi kreatif berbasis potensi lokal ;
6. Melestarikan budaya, kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan yang berakhlakul karimah ;
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government.

Tujuan yang telah dirumuskan Kecamatan Pekalongan Timur dalam mendukung visi dan misi Walikota Pekalongan dalam hal ini misi ke-7 adalah :

1. Meningkatkan pelayanan publik

Dengan sasaran :

1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
1.2. Meningkatnya tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan dan trantibum.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Perangkat daerah

menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Rencana kerja tahun 2025 merupakan lanjutan dari beberapa program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan dan sub – sub kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas untuk mewujudkan tujuan dan sasarannya. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebagian besar masih dilaksanakan pada tahun 2024. Pada prinsipnya program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan skala prioritas sesuai pagu indikatif yang ditetapkan.

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pekalongan Timur beserta 7 Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Pekalongan Timurpada tahun 2025 adalah sebanyak 5 program,11 kegiatan dan dijabarkan dalam 27 sub kegiatan.

Adapun rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Pekalongan Timur dan Kelurahan di wilayahnya adalah sebagai berikut :

1.1. Program

1.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1.2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1.1.3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1.1.4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1.1.5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1.2. Kegiatan

1.2.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.2.1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2.1.2. Administrasi Keuangan Daerah

1.2.1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.2.1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.2.1.5. Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintahan Daerah

1.2.1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.2.2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1.2.2.1 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang di limpahkan kepada camat

1.2.3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1.2.3.1 Kegiatan Pemberdayaan kelurahan

1.2.3.2 Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan Kelurahan.

1.2.3.3 Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan

1.2.4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1.2.4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan KetertibanUmum

1.2.5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1.2.5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1.3. Sub Kegiatan

1.3.1. Program Penunjang Urasan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.3.1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.3.1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.3.1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD

1.3.1.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.3.1.2. Administrasi Keuangan Daerah

1.3.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.3.1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD

1.3.1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.3.1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.3.1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

1.3.1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.3.1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

1.3.1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.3.1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.3.1.4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.3.1.4.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.3.1.4.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan

1.3.1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.3.1.5. Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintahan Daerah

1.3.1.5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.3.1.5.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.3.1.5.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.3.1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.3.1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan

1.3.1.7.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1.3.1.7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

1.3.2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1.3.2.1 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

1.3.3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1.3.3.1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan

1.3.4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1.3.4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1.3.5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1.3.5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Kelurahan sebagai Sub unit kerja dibawah Kecamatan Pekalongan Timur, rencana program dan kegiatannya menginduk pada Renja Kecamatan Pekalongan Timur Tahun 2023 Adapun rencana anggaran program dan kegiatan masing-masing kelurahan dijabarkan sebagai berikut :

1.1 Program

1.1.1 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1.1.2 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1.1.3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1.4 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayana Publik

1.1.5 Program penyelenggaraan Pemerintahan Umum

1.2 Kegiatan

1.2.1 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1.2.1.1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

1.2.1.1.1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan

1.2.1.2 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan

1.2.1.2.1 peningkatan kesadaran keluarga dalm peningkatan pendidikan dan ketrampilan untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing

1.2.1.3 Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan

1.2.1.3.1 penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan kecamatan

1.2.2 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1.2.2.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1.2.3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.2.3.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2.3.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.3.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.2.3.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.2.3.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.3 Sub kegiatan

1.3.1 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1.3.1.1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

1.3.1.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

1.3.1.1.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

1.3.1.1.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

1.3.2 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1.3.2.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1.3.2.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

1.3.3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.3.3.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.3.3.1.1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.3.3.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.3.3.2.1 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1.3.3.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.3.3.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.3.3.3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.3.3.3.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.3.3.3.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.3.3.3.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.3.3.3.6 Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1.3.3.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.3.3.4.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.3.3.4.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.3.3.4.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.3.3.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.3.3.5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.3.3.5.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1.3.3.5.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan Timur yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) program dan 11 (sebelas) kegiatan dan dilaksanakan dalam 27(dua puluh enam) sub kegiatan lagi yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2025 tersebutbeserta indikator kinerja dan pendanaan pagu indikatifnya dapat dilihat pada tabel T-C.33. dibawah ini :

TABEL T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Unsur Kewilayahan								
7 1	Kecamatan								
7 1 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	Kecamatan Pekalongan Timur	100 Persen	12.292.737.000	APBD		100 Persen	10.340.084.000
		- Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Pekalongan Timur	100 Persen		APBD		100 Persen	
7 1 1 2 1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pekalongan Timur	100 Persen	121.752.000	APBD		100 Persen	128.000.000
7 1 1 2 1 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan yang Disusun	Kecamatan Pekalongan Timur	2 Dokumen	2.784.000	APBD		2 Dokumen	8.000.000
7 1 1 2 1 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Jumlah Dokumen RKA dan Perubahan RKA yang disusun	Kecamatan Pekalongan Timur	2 Dokumen	1.968.000	APBD		2 Dokumen	3.000.000

7 1 1 2 1 7	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	- Jumlah Dokumen Evaluasi Renja yang Disusun	Kecamatan Pekalongan Timur	4 Dokumen	117.000.000	APBD		4 Dokumen	117.000.000
		- Jumlah Dokumen Yang SAKIP yang disusun (Penetapan dan Perubahan)	Kecamatan Pekalongan Timur	2 Dokumen		APBD		2 Dokumen	
		- Jumlah Dokumen SPIP (1 Dokumen RTP, 4 Dokumen Pemantauan RTP) yang disusun	Kecamatan Pekalongan Timur	5 Dokumen		APBD		5 Dokumen	
		- Jumlah Bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah semua kelurahan	Kecamatan Pekalongan Timur dan Semua Kelurahan	12 Bulan		APBD		12 Bulan	
7 1 1 2 2	Admininstrasi Keuangan Perangkat daerah	- Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Pekalongan Timur	100 Persen	**8.680.729.000**	APBD		100 Persen	**8.038.205.000**
7 1 1 2 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	- Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pekalongan Timur	12 Bulan	8.444.605.000	APBD		12 Bulan	7.800.905.000
7 1 1 2 2 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Jumlah bulan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan semua kelurahan/7 kelurahan	Kecamatan Pekalongan Timur dan Semua Kelurahan	12 Bulan	234.300.000	APBD		12 Bulan	234.300.000
7 1 1 2 2 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Laporan keuangan SKPD yang disusun	Kecamatan Pekalongan Timur	1 Dokumen	1.824.000	APBD		1 Dokumen	3,000,000
7 1 1 2 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Presentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Pekalongan Timur	100 Persen	**10.000.000**	APBD		100 Persen	**10.000.000**

| | | |

7	1	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	Kecamatan Pekalongan Timur	7 kali	19.000.000	APBD		7 kali	19.500.000
7	1	1	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Pekalongan Timur	100%	0	APBD		100 Persen	2.500.000.000
7	1	1	2	7	1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah gedung/unit lokasi yang dibangun	Kecamatan Pekalongan Timur	2 unit	0	APBD		100 Persen	2.500.000.000
7	1	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Presentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Pekalongan Timur	100 Persen	**1.185.334.000**	APBD		100 Persen	**1.369.074.000**
7	1	1	2	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Pekalongan Timur dan Semua Kelurahan	12 Bulan	10.500.000	APBD		12 Bulan	10,500,000
7	1	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	-	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pekalongan Timur dan Semua Kelurahan	12 Bulan	163.200.000	APBD		12 Bulan	193.200.000
7	1	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Peralatan Kebersihan Kantor	Kecamatan Pekalongan Timur dan Semua Kelurahan	12 Bulan	1.011.634.000	APBD		12 Bulan	1.165.374.000
7	1	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Presentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pekalongan Timur dan Semua Kelurahan	100 Persen	**1.883.743.000**	APBD		100 Persen	**337.061.000**

7 1 1 2 9 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	Kecamatan Pekalongan Timur dan semua Kelurahan	14 unit	169.743.000	APBD		14 unit	175.662.000
7 1 1 2 9 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	Kecamatan Pekalongan Timur dan Semua Kelurahan	2 Unit	1.669.000.000	APBD		2 Unit	119.724.000
7 1 1 2 9 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Pekalongan Timurdan Semua Kelurahan	12 Bulan	45.000.000	APBD		12 Bulan	41.675.000
7 1 2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Timur	Kecamatan Pekalongan Timur	100 Persen	30.636.000	APBD		100 Persen	**24.390.000**
7 1 2 2 1	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang di limpahkan kepada camat	- Persentase ketercapaian koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Kecamatan Pekalongan Timur	100 Persen	7.125.000	APBD		100 Persen	11.890.000
	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	koordinasi,sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemeintahan dengan perangkat daerah dan perangkat daerah terkait	Kecamatan Pekalongan Timur	100 persen	12.500.000	APBD		100 Persen	12.500.000

7 1 3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan di Wilayah Timur	Kecamatan Pekalongan Timur	100 Persen	**109.811.000**	APBD		100 Persen	**139.016.000**
7 1 3 2 2	Kegiatan Pemberdayaan Kecamatan	-	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemberdayaan Kecamatan	Kecamatan Pekalongan Timur	100 Persen	109.811.000	APBD		100 Persen	139.016.000
7 1 3 2 3 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	-	Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan	Kecamatan Pekalongan Timur	40 Kegiatan	42.761.000	APBD		40 Kegiatan	
7 1 3 2 6	**Pemberdayaan dankesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan**					42.761.000	APBD		100 persen	**81.905.000**
7 1 3 2 6 6	Peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan ketrampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaua saing		Jumlah fasilitasi distribusi bansos kematian yang dilaksanakan Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan Jumlah fasilitasi bunda PAUD tingkat kecamatan yang di laksanakan	Kecamatan Pekalongan Timur	710 keluarga	42.761.000	APBD		710 keluarga	**81.905.000**
7 1 4	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**-**	**Tingkat Kinerja trantibum di wilayah Timur**	**Kecamatan Pekalongan Timur**	**100 Persen**	200.429.000	**APBD**		**100 Persen**	**200.566.000**
7 1 4 2 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	Prosentase ketercapaian koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pekalongan Timur	100 Persen	200.429.000	APBD		100 Persen	200.566.000

7 1 4 2 1 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- Jumlah patroli trantib	Kecamatan Pekalongan Timur	36 Kali	200.429.000	APBD		48 Kali	200.566.000
7 1 5	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur	Kecamatan Pekalongan Timur	100 Persen	5.625.000	APBD		100 Persen	6.270.000
7 1 5 2 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah	- Persentase ketercapaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Pekalongan Timur	100 Persen	5.625.000	APBD		100 Persen	6.270.000
7 1 5 2 1 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	- Jumlah dokumen tugas forum forum koordinsi pimpinan di kecamatan Jumlah rapat forkopimca yang dilaksanakan	Kecamatan Pekalongan Timur	1 Kali	5.625.000	APBD		1 Kali	6.270.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagaiwujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhanmasyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis padadengan keterlibatan lebih banyak parapelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengantuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaanyang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan padamasyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pekalongan TimurKota Pekalongan selain menjadi pelaksanaankegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Pekalongan Timur.Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025. RENJA juga dapat digunakansebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagiseluruh jajaran Kecamatan Pekalongan TimurKota Pekalongan. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangadiperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatangoleh para pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Pekalongan TimurKota Pekalongan sehingga akandiperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan yang diemban oleh Kecamatan Pekalongan Timursebagai salah satu Perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Pekalongan.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Timur dan KotaPekalongan beserta pendanaan Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        1) Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah 8.000.000

2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.000.000
3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 117.000.000,00

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.800.905.000
2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD 234.300.000
3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD 3.000.000

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1) Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapannya 10.000.000

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangnan Kantor 10.500.000,00
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 156.195.000
3) Penyedian Peralatan Rumah Tangga 10.500.000,00
4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 200.013.000
5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000,00
6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 20.640.000
7) Penyelenggaran Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD 19.500.000

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.500.000
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 193.200.000
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.165.374.000

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 175.662.000
2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 119.724.000
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 41.675.000

2. Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik

a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang di limpahkan kepada camat
1) pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang Dilimpahkan 11.890.000

b. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

1) koordinasi,sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemeintahan dengan perangkat daerah dan perangkat daerah terkait 12.500.000

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
      1) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 200.566.000
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
      1) Pelaksanaan tugas Forum koordinasi Pimpinan Kecamatan 6.270.000
5. Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

a. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan

1) Peningkatan kesadaran keluarga dalm peningkatan pendidikan dan ketrampilan untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 81.905.000

b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan

1) Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan kecamatan 51.711.000

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pekalongan Timur Tahun 2025 ini kami sajikan sebagai bentuk acuan pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang sehingga tercapai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan yang lebih baik dengan prinsip bersama-sama membangun dan membangun bersama-sama yang berlangsung secara transparan, akuntabel, berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan bersama di Kecamatan Pekalongan Timur dan sebagai bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Pekalongan.

Semoga Renja Kecamatan Pekalongan Timur Tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2025. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Pekalongan,05 Agustus 2024

CAMAT PEKALONGAN TIMUR

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN KEC. PEKALONGAN TIMUR

DARMINTO, S,I.P., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 19680126 199303 1 003